SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang :

a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah merupakan kegiatan untuk menjamin kegiatan agar pembangunan berjalan secara efektif, efisien, dan bersasaran sehingga tercapai tujuan pembangunan Daerah yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10/2024);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6/2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2027 dan berakhir pada 31 Desember 2027.

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 menjadi pedoman dalam:
a. penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2027;
b. penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2027; dan
c. pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : gambaran umum kondisi Daerah;
c. bab III : kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
d. bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
e. bab V : rencana kerja dan pendanaan Daerah;
f. bab VI : kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
g. bab VII : penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2026

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juli 2026

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

TOLKHA AMARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2026 NOMOR 10 SERI E NOMOR 9

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUPIKNO, SH., M.Acc
Pembina, IV/a
NIP. 197908142010011014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN xviii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-5
1.4. Maksud dan Tujuan I-6
1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah II-1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2025 dan Realisasi RPJMD II-208
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah II-281
2.4. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah II-306
2.5. Evaluasi Inovasi dan Program Unggulan II-323
2.6. Telaah Pokok Pikiran DPRD II-343
2.7. Penghargaan yang Diterima Kabupaten Purworejo II-419
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-6
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-4
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027 ..... IV-8
4.3. Dukungan Sasaran dan Prioritas Daerah IV-21
4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-25
4.5. Arah Pengembangan Wilayah IV-28
4.6. Inovasi Pembangunan Daerah IV-42
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2027 ..... V-1
5.2. Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2027 ..... V-109
5.3. Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027 Kabupaten Purworejo terhadap Prioritas Nasional (PN) V-122

5.4. Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027 Kabupaten Purworejo terhadap Program Delegasi Provinsi..... V-152
5.5. Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)..... V-158
5.6. Dukungan Program RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 terhadap Satu Data Indonesia V-165
5.7. Rencana Pelaksanaan Standar Minimal (SPM) V-165
5.8. Rencana Kegiatan, Aktivitas, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, dan Hibah pada Tahun 20277 ..... V-211
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah VI-1
6.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) VI-2
6.3. Indikator Utama Pembangunan (IUP)..... VI-40
BAB VII PENUTUP..... VII-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo II-2
Tabel 2.2. Data DAS di Kabupaten Purworejo II-5
Tabel 2.3. Data Kawasan Mata Air di Kabupaten Purworejo II-6
Tabel 2.4. Luasan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 ..... II-9
Tabel 2.5. Luasan Kawasan Peruntukan Lindung Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 ..... II-10
Tabel 2.6. Luasan Kawasan Peuntukan Budi Daya Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 ..... II-10
Tabel 2.7. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Purworejo II-11
Tabel 2.8. Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-16
Tabel 2.9. Dampak Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2025 ..... II-16
Tabel 2.10. Desa/Kelurahan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo II-18
Tabel 2.11. Tabel Potensi Komoditas EBT Kabupaten Purworejo II-23
Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 Berdasarkan Sex Ratio II-26
Tabel 2.13. Presentase Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Purworejo II-27
Tabel 2.14. Distribusi Penduduk Kabupaten Purworejo II-30
Tabel 2.15. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo (miliar rupiah) II-32
Tabel 2.16. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo (miliar rupiah) II-33
Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo (%) II-34
Tabel 2.18. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo (%) II-35
Tabel 2.19. PDRB ADHB menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo (miliar rupiah) II-35
Tabel 2.20. PDRB ADHK 2010 menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo (miliar rupiah) II-36
Tabel 2.21. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purworejo menurut Pengeluaran Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 (%) II-37
Tabel 2.22. Laju Pertumbuhan PDRB Purworejo ADHK 2010 menurut Komponen Pengeluaran (%) II-37
Tabel 2.23. Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia II-38
Tabel 2.24. Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2025 ..... II-39

Tabel 2.25. Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2025 ..... II-40
Tabel 2.26. IPG dan IDG Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 ..... II-52
Tabel 2.27. Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-54
Tabel 2.28. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-55
Tabel 2.29. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2025 ..... II-55
Tabel 2.30. Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2025 ..... II-56
Tabel 2.31. Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B II-57
Tabel 2.32. Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-58
Tabel 2.33. Prevelensi Gizi Buruk dan Balita Pendek (Stunting) Berdasarkan E-PPGBM Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-58
Tabel 2.34. Prevelensi Gizi Buruk dan Balita Pendek (Stunting) Berdasarkan Survei Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2025 ..... II-59
Tabel 2.35. Cakupan Kepersertaan dan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-60
Tabel 2.36. Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-61
Tabel 2.37. Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-62
Tabel 2.38. Kasus Malaria di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-63
Tabel 2.39. Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-64
Tabel 2.40. Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Succes Rate*) di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-64
Tabel 2.41. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-65
Tabel 2.42. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-66
Tabel 2.43. Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2025 ..... II-67
Tabel 2.44. Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2021-2025 ..... II-68
Tabel 2.45. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2021-2025 ..... II-69
Tabel 2.46. Capaian Akses Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-70
Tabel 2.47. Capaian Akses Sanitasi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-71

Tabel 2.48. Persentase Drainase Jalan di Perkotaan dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-72
Tabel 2.49. Persentase Bangunan Milik Daerah dengan Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-73
Tabel 2.50. Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-73
Tabel 2.51. Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-74
Tabel 2.52. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten di Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-74
Tabel 2.53. Daerah Irigasi Permukaan (DIP) Berdasarkan Kewenangan di Kabupaten Purworejo II-75
Tabel 2.54. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-75
Tabel 2.55. Capaian Kinerja Penataan Ruang Di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-77
Tabel 2.56. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-78
Tabel 2.57. Persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-78
Tabel 2.58. Persentase Jumlah Rumah Susun, Rumah Khusus yang Terbina di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-79
Tabel 2.59. Persentase Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-79
Tabel 2.60. Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-80
Tabel 2.61. Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Purworejo II-80
Tabel 2.62. Persebaran Kawasan Kumuh Perkotaan Purworejo dan Kutoarjo II-81
Tabel 2.63. Pengurangan kawasan kumuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025 ..... II-82
Tabel 2.64. Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 ha yang Ditangani di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-83
Tabel 2.65. Persentase Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Purwoejo Tahun 2021-2025 ..... II-84
Tabel 2.66. Tabel Kinerja Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo II-85
Tabel 2.67. Tabel Penyelesaian Pelanggaran Perda Kabupaten Purworejo II-88
Tabel 2.68. Tabel Kinerja Penyelenggaraan Trantibum Linmas II-87
Tabel 2.69. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani Tahun 2021-2025 ..... II-87
Tabel 2.70. Tabel Data PPKS di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-88

Tabel 2.71. Tabel Data PSKS di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024 ..... II-90
Tabel 2.72. Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo..... II-92
Tabel 2.73. *Coverage* Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo..... II-94
Tabel 2.74. Indeks Ketimpangan Gender dan Komponen Penyusunnya II-95
Tabel 2.75. Indeks Perlindungan Anak dan Komponen Penyusunnya II-97
Tabel 2.76. Kerentanan Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-99
Tabel 2.77. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi di Kabupaten Purworejo berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2021-2025 ..... II-102
Tabel 2.78. Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanahan Tahun 2024 ..... II-103
Tabel 2.79. Tabel Luas Lahan Berdasarkan Tingkat Kekritisan di Kabupaten Purworejo Tahun 2022 dan 2024 (Ha)..... II-105
Tabel 2.80. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Purworejo II-106
Tabel 2.81. Tabel Penurunan Emisi Kumulatif di Kabupaten Purworejo ($tonCO_2eq$) II-110
Tabel 2.82. Tabel Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)..... II-111
Tabel 2.83. Tabel Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik II-111
Tabel 2.84. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) II-111
Tabel 2.85. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2020-2025 .... II-112
Tabel 2.86. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Tahun 2021 – 2025 ..... II-113
Tabel 2.87. Tabel Persentase Akta Perkawinan Non-Muslim yang Diterbitkan II-114
Tabel 2.88. Tabel Persentase Instansi/Lembaga yang Memanfaatkan Informasi Administrasi Kependudukan II-114
Tabel 2.89. Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku..... II-115
Tabel 2.90. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Purworejo II-116
Tabel 2.91. Tabel Kerja Sama Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2025 ..... II-116
Tabel 2.92. Tabel Kerjasama Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-117
Tabel 2.93. Angka iBangga Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2025..... II-118
Tabel 2.94. Total Fertility Rate Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-119
Tabel 2.95. *Demand Satisfied* Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 .... II-119
Tabel 2.96. Prevalensi Kehamilan Tidak Direncanakan di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-120
Tabel 2.97. Rasio Konektivitas Kabupaten Purworejo II-123
Tabel 2.98. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal di Kabupaten Purworejo..... II-125
Tabel 2.99. Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purworejo II-126
Tabel 2.100. Data Halte yang Layak Fungsi Pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo..... II-126
Tabel 2.101. Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat di Kabupaten Purworejo II-127
Tabel 2.102. Jaringan Trayek AKAP, AKDP, Angkutan Perdesaaan, dan Angkutan Perbatasan Kabupaten Purworejo..... II-127

Tabel 2.103. Titik Parkir yang Terlayani di Kabupaten Purworejo II-131
Tabel 2.104. Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan di Kabupaten Purworejo II-131
Tabel 2.105. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purworejo II-133
Tabel 2.106. Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet II-135
Tabel 2.107. Data Wilayah *Blank Spot* di Kabupaten Purworejo II-136
Tabel 2.108. Koperasi aktif dan Koperasi Sehat di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-138
Tabel 2.109. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 ..... II-138
Tabel 2.110. Perkembangan Kemitraan UMKM dengan Koperasi di Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2025 ..... II-139
Tabel 2.111. Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo (Juta Rupiah) II-142
Tabel 2.112. Indeks Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2024-2025 ..... II-148
Tabel 2.113. Data Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-151
Tabel 2.114. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dikembangkan di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-151
Tabel 2.115. Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-153
Tabel 2.116. Jumlah Kelompok Kesenian yang Ber-SKT dan Kesenian Aktif di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-154
Tabel 2.117. Jumlah Pengunjung Museum Tosan Aji Tahun 2021-2025 ..... II-154
Tabel 2.118. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2025 ..... II-155
Tabel 2.119. Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-155
Tabel 2.120. Tingkat Gemar Membaca Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2025 ..... II-156
Tabel 2.121. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-157
Tabel 2.122. Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-158
Tabel 2.123. Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Purworejo II-158
Tabel 2.124. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Purworejo II-160
Tabel 2.125. PAD yang terkait dengan Sektor Pariwisata Kabupaten Purworejo II-163
Tabel 2.126. Disparitas Harga Kabupaten Purworejo II-170
Tabel 2.127. Kinerja Sektor Perindustrian Kabupaten Purworejo II-172
Tabel 2.128. Animo dan Realisasi Penempatan Transmigran II-173
Tabel 2.129. Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Purworejo II-179
Tabel 2.130. Opini Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo II-181
Tabel 2.131. Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021-2025 ..... II-183
Tabel 2.132. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2021-2025 ..... II-185

Tabel 2.133. Nilai Kapabilitas APIP tahun 2021-2025 ..... II-186
Tabel 2.134. Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi tahun 2021-2025 ..... II-188
Tabel 2.135. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan II-190
Tabel 2.136. Skala dan kategori Indek Ketahanan Nasional..... II-191
Tabel 2.137. Indek Ketahanan Nasional Ipoleksosbud Kabupaten Purworejo..... II-191
Tabel 2.138. Jumlah Kejadian Konflik SARA Kabupaten Purworejo..... II-191
Tabel 2.139. Rasio Beban Ketergantungan di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025..... II-200
Tabel 2.140. Kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Purworejo..... II-201
Tabel 2.141. Status Capaian Realisasi Kinerja..... II-209
Tabel 2.142. Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2025 ..... II-209
Tabel 2.143. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 ..... II-216
Tabel 2.144. Capaian Indikator Utama Daerah (IUP) Tahun 2025 ..... II-234
Tabel 2.145. Capaian Kinerja Tujuan/ Sasaran dan IKU PD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pada Tahun 2025..... II-236
Tabel 2.146. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Pada Tahun 2025..... II-238
Tabel 2.147. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Tahun 2025..... II-240
Tabel 2.148. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2025 ..... II-241
Tabel 2.149. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2025 ..... II-242
Tabel 2.150. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Pada Tahun 2025 ..... II-243
Tabel 2.151. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Pada Tahun 2025 ..... II-245
Tabel 2.152. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2025..... II-246
Tabel 2.153. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pada Tahun 2025 ..... II-247
Tabel 2.154. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Pada Tahun 2025 ..... II-248
Tabel 2.155. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pada Tahun 2025..... II-248
Tabel 2.156. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Tahun 2025..... II-249
Tabel 2.157. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2025 ..... II-251
Tabel 2.158. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Tahun 2025 ..... II-251

Tabel 2.159. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Pada Tahun 2025 ..... II-253
Tabel 2.160. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Pada Tahun 2025 ..... II-253
Tabel 2.161. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pada Tahun 2025 ..... II-254
Tabel 2.162. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pada Tahun 2025 ..... II-255
Tabel 2.163. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusa Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pada Tahun 2025 ..... II-257
Tabel 2.164. Capaian Kinerja Utama (Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Pada Tahun 2025 ..... II-257
Tabel 2.165. Capaian Kinerja Utama (Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Pada Tahun 2025 ..... II-257
Tabel 2.166. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pada Tahun 2025 ..... II-258
Tabel 2.167. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pada Tahun 2025 ..... II-258
Tabel 2.168. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Pada Tahun 2025 ..... II-259
Tabel 2.169. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2025 ..... II-260
Tabel 2.170. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pada Tahun 2025 ..... II-260
Tabel 2.171. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Pada Tahun 2025 ..... II-262
Tabel 2.172. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pada Tahun 2025 ..... II-263
Tabel 2.173. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Pada Tahun 2025 ..... II-264
Tabel 2.174. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Sekretariat Daerah Pada Tahun 2025 ..... II-264
Tabel 2.175. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Sekretariat DPRD Pada Tahun 2025 ..... II-266
Tabel 2.176. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Unsur Penunjang Perencanaan Pada Tahun 2025..... II-266
Tabel 2.177. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Unsur Penunjang Keuangan Pada Tahun 2025..... II-267
Tabel 2.178. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Unsur Penunjang Kepegawaian Pada Tahun 2025 ..... II-269
Tabel 2.179. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Penelitian dan Pengembangan Pada Tahun 2025 ..... II-270
Tabel 2.180. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Inspektorat Daerah Pada Tahun 2025 ..... II-271
Tabel 2.181. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Kecamatan Pada Tahun 2025 ..... II-273
Tabel 2.182. Capaian Kinerja Tujuan/ Sasaran dan IKU PD Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Tahun 2025..... II-275

Tabel 2.183. Indeks Pencapaian SPM pada masing-masing Bidang di Kabupaten Purworejo Tahun 2025 ..... II-276
Tabel 2.184. Capian Indikator SPM Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 - 2025 ..... II-277
Tabel 2.185. Target dan Realisasi Indikator SDGs Kabupaten Purworejo Tahun 2025 ..... II-278

Tabel 2.186. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional Sampai Dengan Tahun 2025 ..... II-307
Tabel 2.187. Intervensi Daerah Dalam Mendukung Penurunan Kemiskinan II-308
Tabel 2.188. Intervensi Daerah Dalam Mendukung Peningkatan SDM Berkualitas II-310
Tabel 2.189. Intervensi Daerah Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Berkelanjutan II-311
Tabel 2.190. Dukungan Program Strategis Nasional Pada RPJMD 2025-2029 ..... II-312
Tabel 2.191. Hasil Evaluasi Kinerja Program Strategis Nasional Kabupaten Purworejo Semester II Tahun 2025 ..... II-314
Tabel 2.192. Dukungan 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah II-319
Tabel 2.193. Skor IDSD Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2025 ..... II-324
Tabel 2.194. Perkembangan Skor Pilar IDSD Kabupaten Purworejo II-324
Tabel 2.195. Jumlah Peserta dan Pemenang Krenova Kabupaten Purworejo II-326
Tabel 2.196. Inovasi yang Sudah Dibangun sampai dengan Tahun 2025 ..... II-327
Tabel 2.197. Realisasi Program Unggulan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025 ..... II-338
Tabel 2.198. Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... II-343
Tabel 3.1. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ..... III-3
Tabel 3.2. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... III-5
Tabel 3.3. Persentase Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2025 dan APBD 2026 dan Proyeksi / target 2027 ..... III-7
Tabel 3.4. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ... III-11
Tabel 3.5. Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Purworejo Tahun 2023 s.d tahun 2027 ..... III-12
Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2027 ..... III-25
Tabel 3.7. Rencana Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) III-29
Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2027 ..... III-31
Tabel 3.9. Kerangka Pendanaan Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... III-32
Tabel 3.10. Realisasi Sumber Pendanaan Lainnya Tahun 2025 ..... III-34
Tabel 3.11. Realisasi Pelaksanaan TJSLP Kabupaten Purworejo Tahun 2025 ... III-38
Tabel 4.1. Penjelasan Makna Visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 ..... IV-1
Tabel 4.2. Sinkronisasi Visi Kabupaten Purworejo dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah IV-2

Tabel 4.3. Sinkronisasi Misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ..... IV-2
Tabel 4.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Sasaran Kabupaten Purworejo IV-5
Tabel 4.5. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... IV-6
Tabel 4.6. Sinergitas Sasaran Kabupaten, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah IV-8
Tabel 4.7. Prioritas Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... IV-11
Tabel 4.8. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Strategi Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... IV-12
Tabel 4.9. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Purworejo Tahun 2027 .... IV-14
Tabel 4.10. Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) IV-22
Tabel 4.11. Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Tahun 2027, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-26
Tabel 4.12. Rencana Sub Kegiatan yang Akan Dibangun Inovasi atau Dikembangkan Inovasinya pada Tahun 2027 ..... IV-43
Tabel 5.1. Rekapitulasi Target dan Pagu Indikatif Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... V-45
Tabel 5.2. Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Pinter Bocahe dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027 ..... V-109
Tabel 5.3. Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Religius Masyarakate dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027 ..... V-110
Tabel 5.4. Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Sehat Penduduke dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027 ..... V-112
Tabel 5.5. Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Sejahtera Wargane dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027 ..... V-113
Tabel 5.6. Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Alus Dalane dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027 ..... V-118
Tabel 5.7. Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Rame Pasare dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027 ..... V-119
Tabel 5.8. Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Ayem Petanine dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027 ..... V-122
Tabel 5.9. Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Nasional V-123
Tabel 5.10. Dukungan Program Strategis Nasional V-129
Tabel 5.11. Rencana Pelaksanaan Dukungan Program Strategis Nasional (ProSN) pada Tahun 2027 ..... V-135
Tabel 5.12. Dukungan 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah V-152
Tabel 5.13. Dukungan Kabupaten Purworejo terhadap Tema Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 ..... V-158
Tabel 5.14. Prioritas Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... V-159
Tabel 5.15. Permasalahan, Isu Strategis, dan Prioritas Pembangunan Tahun 2027 ..... V-160
Tabel 5.16. Kegiatan yang Akan Dilaksanakan di Masing-Masing WP Tahun 2027 ..... V-163
Tabel 5.17. Dukungan Program RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 terhadap Satu Data Indonesia V-165
Tabel 5.18. Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... V-166
Tabel 5.19. Rencana Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... V-168
Tabel 6.1. Target Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... VI-2

Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... VI-2
Tabel 6.3. Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... VI-17
Tabel 6.4. Target Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... VI-40
Tabel 6.5. Keselarasan Indikator Utama Pemangunan Kabupaten Purworejo, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah VI-44

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1.1. Hubungan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya I-6
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Purworejo II-2
Gambar 2.2. Peta Kelerengan Kabupaten Purworejo II-3
Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Purworejo II-4
Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Purworejo II-5
Gambar 2.5. Peta Curah Hujan Kabupaten Purworejo II-8
Gambar 2.6. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Purworejo II-9
Gambar 2.7. Peta Tanah Longsor Kabupaten Purworejo II-19
Gambar 2.8. Peta Bencana Banjir Kabupaten Purworejo II-20
Gambar 2.9. Peta Gelombang Pasang dan Tsunami Kabupaten Purworejo II-21
Gambar 2.10. Peta Rawan Bencana Kabupaten Purworejo II-22
Gambar 2.11. Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 .... II-24
Gambar 2.12. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 ..... II-25
Gambar 2.13. Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2025 ..... II-28
Gambar 2.14. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024 (%) II-32
Gambar 2.15. Perkembangan PDRB ADHK 2010 dan ADHB menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Purworejo (triliun rupiah) II-36
Gambar 2.16. Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2021 – 2025 ..... II-38
Gambar 2.17. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purworejo II-39
Gambar 2.18. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purworejo Tahun 2010 – 2025 ..... II-41
Gambar 2.19. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2021-2025 ..... II-41
Gambar 2.20. Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional II-43
Gambar 2.21. Inflasi Kabupaten Purworejo II-44
Gambar 2.22. Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar II-45
Gambar 2.23. Perkembangan AHH Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025 ..... II-47
Gambar 2.24. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025 ..... II-48
Gambar 2.25. Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025 ..... II-49
Gambar 2.26. Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024 ..... II-50
Gambar 2.27. Pengeluaran Per Kapita Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya (ribu rupiah per orang per tahun) Tahun 2020-2025 ..... II-51
Gambar 2.28. Proporsi Kondisi Jalan Di Kabupaten Purworejo II-68
Gambar 2.29. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Purworejo II-91
Gambar 2.30. Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Purworejo II-92

Gambar 2.31. Perbandingan Pekerja Formal dan Informal di Kabupaten Purworejo II-93
Gambar 2.32. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 ..... II-95
Gambar 2.33. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024 ..... II-97
Gambar 2.34. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo II-98
Gambar 2.35. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Purworejo II-100
Gambar 2.36. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Kabupaten Purworejo.....II-101
Gambar 2.37. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Purworejo II-102
Gambar 2.38. IKLH Kabupaten Purworejo.....II-104
Gambar 2.39. Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo.....II-124
Gambar 2.40. Terminal Tipe A Purworejo.....II-129
Gambar 2.41. Terminal Tipe B Kutoarjo.....II-130
Gambar 2.42. Kondisi Eksisting Terminal Tipe C Purwodadi (kiri) dan Terminal Tipe C Kutoarjo (kanan) II-130
Gambar 2.43. Indeks Pemerintah Digital / Indeks SPBE Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 .....II-132
Gambar 2.44. Jumlah Informasi Publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025.....II-134
Gambar 2.45. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Purworejo II-141
Gambar 2.46. Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menurut KBLI.....II-142
Gambar 2.47. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Purworejo II-143
Gambar 2.48. Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Purworejo II-144
Gambar 2.49. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri II-145
Gambar 2.50. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan II-146
Gambar 2.51. Peningkatan Prestasi Olahraga II-147
Gambar 2.52. Capaian Indeks KAMI Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2025 .....II-149
Gambar 2.53. Tingkat Hunian Akomodasi di Kabupaten Purworejo Tahun 2025 .....II-161
Gambar 2.54. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Purworejo II-164
Gambar 2.55. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura.....II-165
Gambar 2.56. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan.....II-166
Gambar 2.57. Persentase Peningkatan Produksi Daging II-167
Gambar 2.58. Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular II-168
Gambar 2.59. Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2025 .....II-168
Gambar 2.60. Kinerja Realisasi Pupuk di Kabupaten Purworejo.....II-171
Gambar 2.61. Persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah dan masih berlaku di Kabupaten Purworejo II-171
Gambar 2.62. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purworejo.....II-175
Gambar 2.63. Nilai SAKIP Kabupaten Purworejo.....II-175

Gambar 2.64. Nilai Sakip Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Purworejo tahun 2021-2025 .....II-176
Gambar 2.65. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 .....II-177
Gambar 2.66. Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 .....II-178
Gambar 2.67. Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2021-2025 .....II-179
Gambar 2.68. Indeks Penglolaan Keuangan Daerah tahun 2021-2025 .....II-180
Gambar 2.69. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2021-2025 .....II-181
Gambar 2.70. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Purworejo tahun 2021- 2025 .....II-182
Gambar 2.71. Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 .....II-184
Gambar 2.72. Indeks Inovasi Daerah tahun 2021-2025 .....II-185
Gambar 2.73. Nilai Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 .....II-187
Gambar 2.74. Survei Penilaian Integritas tahun 2021-2025 .....II-189
Gambar 2.75. Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2020-2024 .....II-192
Gambar 2.76. Distribusi Pengeluaran pada Kelompok Penduduk 40% Terbawah Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2021-2024 (%).....II-193
Gambar 2.77. PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB) Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2021-2025 (miliar rupiah) II-194
Gambar 2.78. Distribusi PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB) Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitarnya, serta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 (%).....II-195
Gambar 2.79. Distribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitarnya, serta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 (%).....II-196
Gambar 2.80. PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHB) Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2021-2025 (miliar rupiah) II-197
Gambar 2.81. PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2021-2025 (miliar rupiah) II-198
Gambar 2.82. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitarnya, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 (%).....II-199
Gambar 2.83. Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Purworejo.....II-201
Gambar 2.84. Upah Minumum Kabupaten Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2021-2026 (ribu rupiah) II-203
Gambar 2.85. Portal DataJo Kabupaten Purworejo II-204
Gambar 2.86. Dashboard Fisik dan Keuangan Aplikasi Sawiji.....II-206

Gambar 2.87. Dashboard Sebaran Peta Paket Pekerjaan Pada Aplikasi Sawiji II-206
Gambar 2.88. Dashboard Data Aplikasi Sawiji II-206
Gambar 2.89. Modul Yang Tersedia Pada Aplikasi Sawiji II-207
Gambar 2.90. Penerima Penghargaan Perangkat Daerah Dengan Kinerja Evaluasi Terbaik Tahun 2025 ..... II-208
Gambar 2.91. Proporsi Ketercapaian Serta Status Kinerja IKU Daerah Tahun 2025 ..... II-210
Gambar 2.92. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo 2022 s.d 2025 ..... II-326
Gambar 2.93. Penghargaan IGA Kabupaten Purworejo Tahun 2025 ..... II-420
Gambar 2.94. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2025 ..... II-421
Gambar 2.95. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Peringkat PRATAMA Tahun 2025 ..... II-422
Gambar 2.96. Penghargaan Anggaraksa Dharma Tahun 2025 ..... II-423
Gambar 2.97. Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2025 ..... II-424
Gambar 2.98. Penghargaan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-20 ..... II-424
Gambar 2.99. Penghargaan TTG Posyantek Desa Berprestasi II-425
Gambar 2.100. Penghargaan KIP Awards dengan Predikat Menuju Informatif II-426
Gambar 2.101. Penghargaan FKRTL Berkomitmen Terbaik dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Kantor Cabang Tahun 2025 ..... II-427
Gambar 2.102. Penyaji Unggulan Pentas Duta Seni Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah II-428
Gambar 4.1. Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ..... IV-11
Gambar 4.2. Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah IV-28
Gambar 4.3. Arah Pengembangan Wilayah WP Keburejo IV-31
Gambar 4.4. Peta Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Purworejo IV-35
Gambar 5.1. Peta Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Purworejo V-108

DAFTAR RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN

halaman

Matrik 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan V-212
Matrik 2. Dinas Kesehatan Daerah V-230
Matrik 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang V-335
Matrik 4. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, dan Pertanahan V-347
Matrik 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran V-356
Matrik 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah V-366
Matrik 7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana V-375
Matrik 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa V-392
Matrik 9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian V-406
Matrik 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan V-417
Matrik 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil V-432
Matrik 12. Dinas Perhubungan V-437
Matrik 13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian V-445
Matrik 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan V-454
Matrik 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu V-464
Matrik 16. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata V-470
Matrik 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan V-479
Matrik 18. Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja V-488
Matrik 19. Sekretariat Daerah V-504
Matrik 20. Sekretariat DPRD V-511
Matrik 21. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah V-519
Matrik 22. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah V-527
Matrik 23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia V-542
Matrik 24. Inspektorat Daerah V-549
Matrik 25. Kecamatan Grabag V-557
Matrik 26. Kecamatan Ngombol V-564
Matrik 27. Kecamatan Purwodadi V-572
Matrik 28. Kecamatan Bagelen V-579
Matrik 29. Kecamatan Kaligesing V-587
Matrik 30. Kecamatan Purworejo V-594
Matrik 31. Kecamatan Banyuurip V-609
Matrik 32. Kecamatan Bayan V-618
Matrik 33. Kecamatan Kutoarjo V-625
Matrik 34. Kecamatan Butuh V-635
Matrik 35. Kecamatan Pituruh V-644
Matrik 36. Kecamatan Kemiri V-652
Matrik 37. Kecamatan Bruno V-659
Matrik 38. Kecamatan Gebang V-667
Matrik 39. Kecamatan Loano V-676
Matrik 40. Kecamatan Bener V-684
Matrik 41. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik V-691

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. RKPD disusun sebagai bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang menegaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah, amanat pembangunan global/ nasional/ regional, regulasi yang berlaku, dan agenda dinamika pembangunan nasional lainnya pada tahun 2027, serta memperhatikan keberlanjutan kebijakan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2026.

RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025–2029 yang menetapkan visi pembangunan daerah yaitu **“Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius dan Inovatif (Purworejo Berseri)”**. Visi tersebut menjadi arah utama pembangunan daerah dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki daya saing ekonomi dan kualitas sumber daya manusia yang unggul, kesejahteraan yang meningkat dan merata, kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius, serta tata kelola pembangunan yang adaptif dan inovatif. RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 berpedoman pada Rancangan RKP Tahun 2027 dan Program Strategis Nasional (Pro SN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (yaitu Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Sekolah Rakyat, Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri dan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah, Jaminan Kesehatan Nasional, Makan Bergizi Gratis, Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah, Pengendalian Inflasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kemudahan Perizinan di Daerah, serta berpedoman pada Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Di samping itu, Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 menjadi acuan dalam: 1) penyelarasan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan

prioritas pembangunan provinsi dan prioritas pembangunan nasional; dan 2) sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Tahun 2027 merupakan bagian dari tahapan pembangunan jangka menengah yang diarahkan pada penguatan fondasi pembangunan daerah guna mempercepat pencapaian sasaran RPJMD. Berdasarkan tahapan pembangunan tahunan, tema pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ditetapkan sebagai **"Penguatan Infrastruktur Berbasis Lingkungan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah."** Tema ini menegaskan pembangunan infrastruktur difokuskan untuk mendukung konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penguatan infrastruktur berbasis lingkungan dimaknai sebagai pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan fungsional, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mitigasi risiko bencana, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, membuka peluang investasi, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, serta menciptakan lapangan kerja tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 disusun untuk menjamin keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, serta keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. RKPD ini diharapkan menjadi pedoman pembangunan daerah Tahun 2027 dalam mendukung terwujudnya visi **Purworejo Berseri** secara berkelanjutan.

Dokumen RKPD Tahun 2027 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

1) Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam satu tahun;
2) Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3) Secara Operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan
4) Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 adalah:

1) Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
16) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1159);
18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
20) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
21) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);

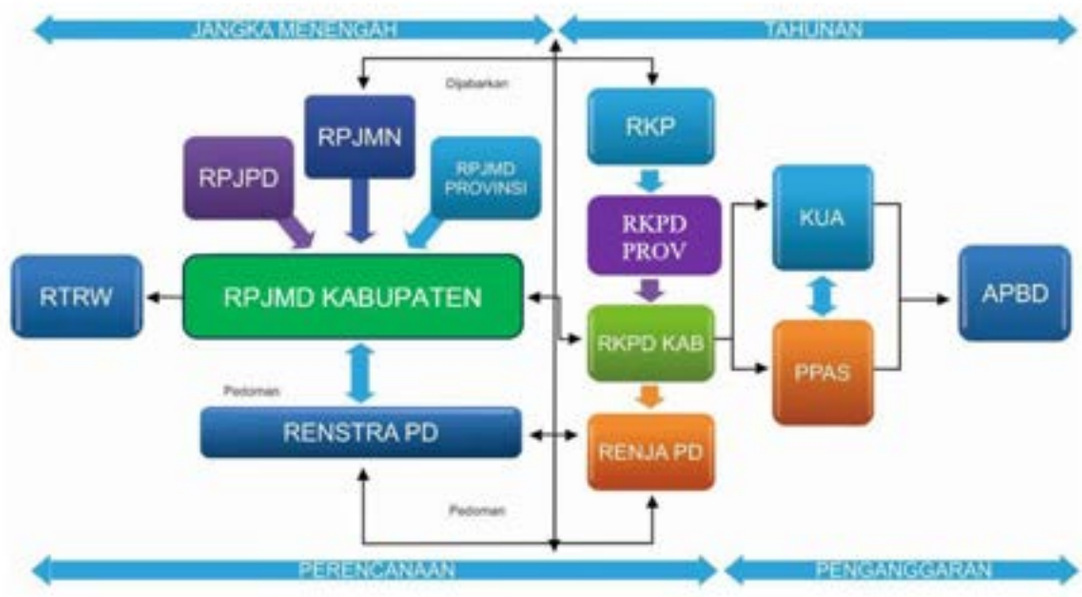
22) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);
23) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024);
24) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 6 Seri E Nomor 4).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan/berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Selanjutnya dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka RKPD Kabupaten Purworejo akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purworejo Tahun 2027.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1. Hubungan antara Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Tahun 2027 adalah untuk merumuskan program prioritas pembangunan daerah pada tahun 2027 berdasarkan penjabaran dari Visi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan mengacu pada program-program prioritas tahun yang akan dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dengan mendorong dukungan dunia usaha dan partisipasi masyarakat. Selain itu maksud penyusunan RKPD ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dengan memperhatikan potensi dan permasalahan pembangunan daerah secara komprehensif.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2027 adalah untuk:

1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 antara DPRD Kabupaten Purworejo dengan Bupati Purworejo yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027;
2) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
4) Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
5) Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

6) Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi tentang harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini membahas tentang gambaran daerah Kabupaten Purworejo yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum, aspek daya saing dan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Data di dala bab ini menjadi dasar bagi analisis permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan. Berikut ini adalah deskripsi yang lebih detail tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Purworejo.

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

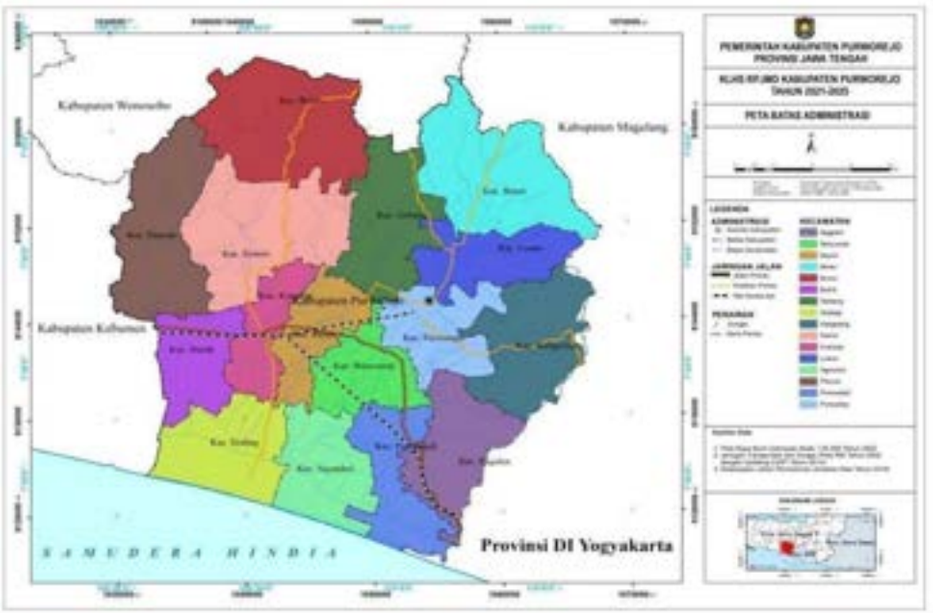
Sub bab ini menjelaskan tentang kondisi atau keadaan suatu wilayah yang meliputi fisik wilayah dan interaksi wilayah dengan lingkungannya serta kondisi kependudukan wilayah Kabupaten Purworejo yang merupakan faktor penting dalam mengidentifikasi potensi keruangan dalam perencanaan pembangunan. Pemahaman karakteristik kewilayahan Kabupaten Purworejo mendeskripsikan mengenai letak geografis, kondisi fisik wilayah, dan penggunaan lahan. Kondisi kependudukan digambarkan dengan informasi dinamika kependudukan suatu wilayah dilihat dari jumlah, strukturdan komposisi penduduk.

2.1.1.1. ASPEK GEOGRAFI

Identifikasi wilayah ditinjau dari kondisi geografi digunakan sebagai dasar untuk memahami keruangan suatu wilayah sebagai hasil interaksi sosial dan fisik wilayah. Aspek Geografi Kabupaten Purworejo pada sub-bab ini diperinci pada tiga konsep utama yaitu konsep lokasi, geofisik dan biofisik lahan. Ketiga karakteristik tersebut dijadikan dasar untuk identifikasi potensi pengembangan wilayah dan kerawanan bencana di Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak pada posisi antara 1090 47’ 28” sampai 1100 8’ 20” Bujur Timur dan 70 32’ – 70 54” Lintang Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Purworejo:

Sebelah utara : Kabupaten Wonosobo & Kabupaten Magelang
Sebelah selatan : Samudera Indonesia
Sebelah barat : Kabupaten Kebumen
Sebelah timur : Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Purworejo
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2025

Luas administrasi Kabupaten Purworejo adalah sebesar 1.081,45 km². Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo memiliki persentase luas 3,18% dari total luasan provinsi. Kabupaten Purworejo terbagi dalam 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa.

Jumlah desa/kelurahan dan luas menurut kecamatan di Kabupaten Purworejo tersaji pada Tabel 2.1. Dapat diamati bahwa Kecamatan Bruno (105,68 km2) merupakan kecamatan yang paling luas di tingkat kabupaten. Di samping itu, meski Kecamatan Ngombol luas daerahnya tidak begitu luas (59,33 km²), kecamatan ini memiliki jumlah desa paling banyak, yakni 57 desa.

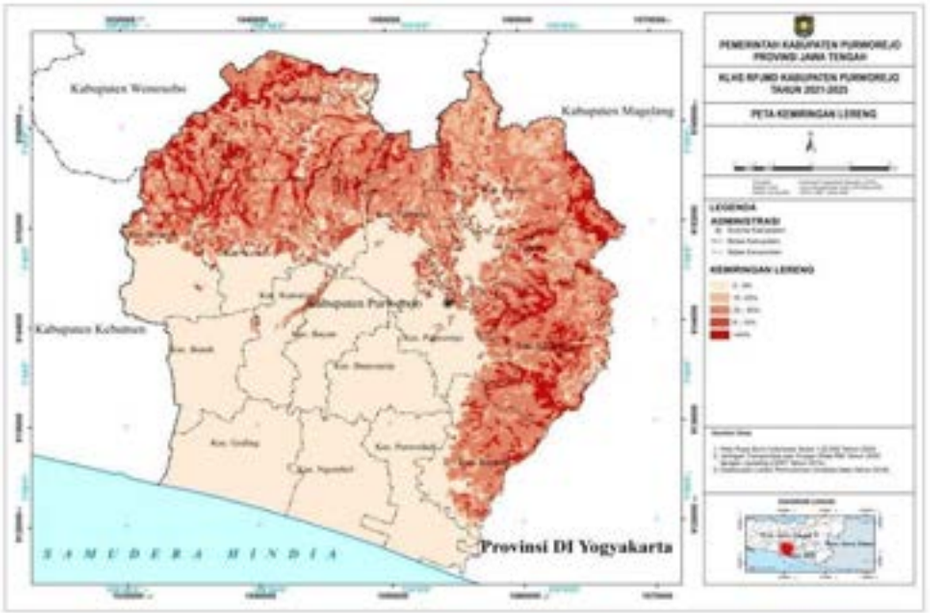
Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Kecamatan di Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas (km²)
1	*2*	*3*	*4*
1.	Grabag	32	67,80
2.	Ngombol	57	59,33
3.	Purwodadi	40	56,15
4.	Bagelen	17	63,44
5.	Kaligesing	21	78,33
6.	Purworejo	25	53,25
7.	Banyuurip	27	47,78
8.	Bayan	26	44,66
9.	Kutoarjo	27	39,20
10.	Butuh	41	47,21
11.	Pituruh	49	89,01
12.	Kemiri	40	103,15
13.	Bruno	18	105,68
14.	Gebang	25	70,51
15.	Loano	21	53,51
16.	Bener	28	102,44
	Jumlah	494	1.081,45

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041

a. Topografi

Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo secara umum terbagi menjadi dua yaitu bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25–1.050 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 mdpl.



Gambar 2.2. Peta Kelerengan Kabupaten Purworejo
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2025

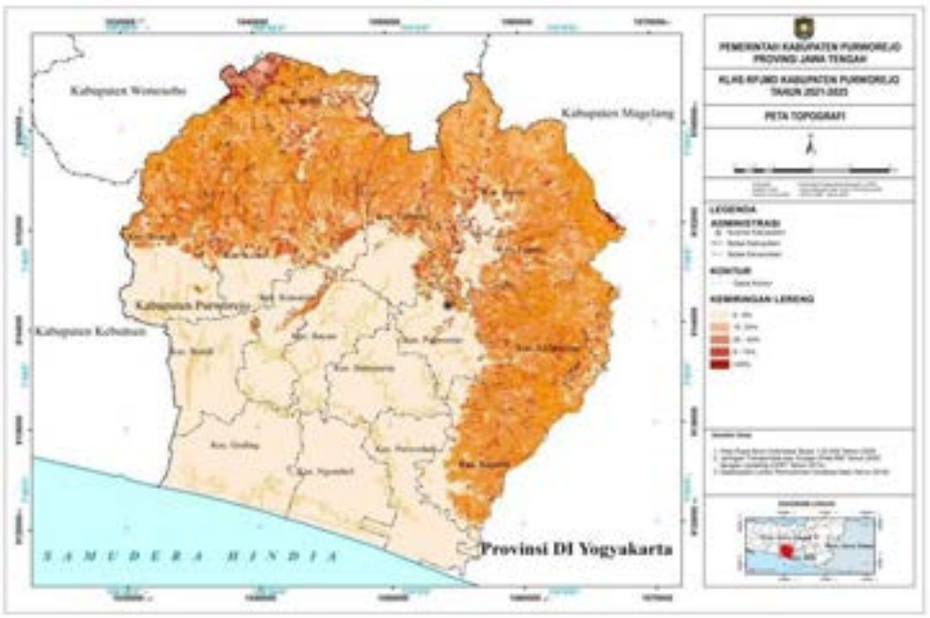
Kondisi kemiringan lereng atau kelerengan Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

1) Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo; Wilayah dengan kelas kelerengan datar ini juga didominasi oleh aktivitas budidaya yang meliputi permukiman, kegiatan produksi, pertanian lahan kering.
2) Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen;
3) Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo;
4) Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh;

Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 - 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut:

1) Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.
2) Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1.064 meter di atas permukaan air laut.

Kenampakan kondisi topografi Kabupaten Purworejo dapat diamati pada gambar di bawah ini.



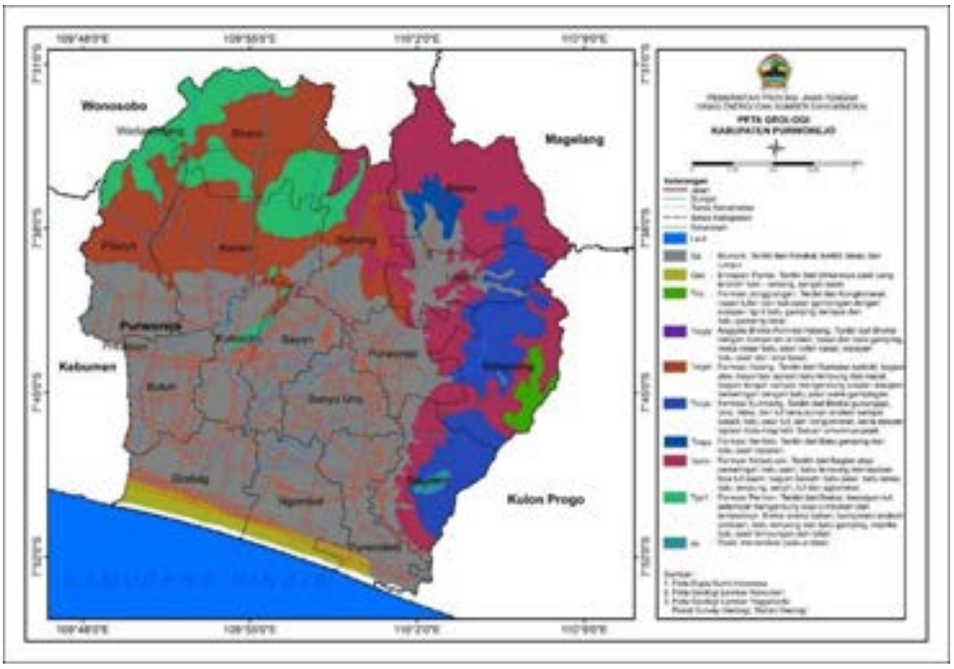
Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Purworejo
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2025

b. Geologi

Secara eksploratif Kabupaten Purworejo dari beberapa jenis tanah, yaitu:

1) Tanah alluvial mempunyai agihan sebesar 31,9% di wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk keperluan pertanian, jenis tanah ini mempunyai produktivitas rendah sampai dengan tinggi. Disamping untuk budidaya pertanian tanah jenis ini juga dimanfaatkan untuk pengembangan permukiman.
2) Tanah Regosol mempunyai produktivitas rendah sampai dengan tinggi dengan agihan sebesar 5,03%. Tanah jenis ini banyak dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Purworejo untuk keperluan pertanian dan perkebunan
3) Tanah Latosol mendominasi wilayah Kabupaten Purworejo dengan agihan sebesar 63,07%, dengan produktivitas sedang hingga tinggi. Jenis tanah ini merupakan tanah pertanian yang relatif baik

Kenampakan kondisi geologi Kabupaten Purworejo dapat diamati pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Purworejo
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2025

c. Hidrologi

Secara hidrogeologis, sumber air di Kabupaten Purworejo terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Purworejo yakni sungai, mata air, dan air waduk/bendungan yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Di Kabupaten ini terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di Samudera Indonesia. Sungai-sungai tersebut termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.2. Data DAS di Kabupaten Purworejo

No.	Nama DAS	Debit Min (M^3/Det)	Debit Max (M^3/Det)	Luas (Ha)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	DAS Cokroyasan	251	541	35.100
2	DAS Mawar	245	1.347	78.000
3	DAS Bogowonto	600	1.187	59.000

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2025

Selain sungai, bendung/waduk juga menjadi sumber air permukaan di Kabupaten Purworejo. Pembangunan Bendung Bener di Kabupaten Purworejo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat juga menjadi salah satu sumber air yang dapat digunakan oleh kebutuhan masyarakat sehari hari dan pengairan bagi pertanian. Di sisi lain, terdapat 59 titik mata air di Kabupaten Purworejo dengan total debit 169,2 m3/ detik. Berikut kawasan mata air di Kabupaten Purworejo

Tabel 2.3. Data Kawasan Mata Air di Kabupaten Purworejo

No	Nama Mata Air	Desa	Kecamatan	Debit
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Tuk Umbul	Medono	Bener	10,10
2	Siloko	Ngasinan	Bener	3,00
3	Pening	Ngasinan	Bener	2,00
4	Sirebut	Benowo	Bener	10,00
5	Tuksiwaru	Limbangan	Bener	10,00
6	Tuk Siwuang	Limbangan	Bener	7,00
7	Tuk Mudal	Kalinongko	Loano	42,50
8	Simbar Joyo	Mudalrejo	Loano	27,78
9	Sedayu / Ngrau	Sedayu	Loano	3,40
10	Tuk Songo	Purworejo	Purworejo	7,00
11	Kedungkebo	Pangenrejo	Purworejo	4,64
12	Simbarjoyo	Mudalrejo	Purworejo	27,78
13	Sekalapan	Pakem	Gebang	1,50
14	Tirip	Rendeng	Gebang	1,70
15	Siranda	Girijoyo	Pituruh	5,00
16	Gondosuli I	Pamriyan	Pituruh	2,00
17	Gondosuli II	Pamriyan	Pituruh	3,00
18	Sipetung	Wonosido	Pituruh	3,00
19	Kedondong	Kaligondang	Pituruh	2,00
20	Andong	Brunosari	Bruno	3,00
21	Siglodak	Cempedak	Bruno	2,00
22	Pakisarum	Pakisarum	Bruno	1,00
23	Plipiran	Plipiran	Bruno	2,00
24	Tirip	Clapar	Bagelen	10,00
25	Beji	Clapar	Bagelen	5,00
26	Kaliputat	Clapar	Bagelen	3,00
27	Kali Clapar	Clapar	Bagelen	3,00
28	Nglegok	Soko	Bagelen	5,00
29	Lemah Putih	Soko	Bagelen	20,00
30	Sipoh	Semagung	Bagelen	5,00
31	Ngaglik	Semagung	Bagelen	4,00
32	Sekopek	Semono	Bagelen	4,00
33	Karangginem	Semono	Bagelen	4,00
34	Gandik	Semono	Bagelen	4,00
35	Depok	Semono	Bagelen	6,00
36	Klegen	Semono	Bagelen	3,00
37	Belik	Piji	Bagelen	5,00
38	Pernolo	Kemanukan	Bagelen	5,00
39	Jembangan	Kemanukan	Bagelen	3,00
40	Bawi	Kemanukan	Bagelen	3,00
41	Sipucung	Kemanukan	Bagelen	3,00
42	Sitolang	Sokoagung	Bagelen	2,00
43	Pucungsawit	Sokoagung	Bagelen	2,00
44	Sidandang	Hargorojo	Bagelen	10,00
45	Curug	Sokoagung	Bagelen	6,00
46	Pancuran	Tlogokotes	Bagelen	2,00
47	Singobarong	Somorejo	Bagelen	2,00
48	Pletuk Kidul	Dadirejo	Bagelen	2,00
49	Sudorogo 1	Sudorogo	Kaligesing	2,00
50	Sudorogo 2	Sudorogo	Kaligesing	2,00
51	Tawangsari 1	Tawangsari	Kaligesing	3,00
52	Tawangsari 2	Tawangsari	Kaligesing	1,00
53	Tawangsari 3	Tawangsari	Kaligesing	1,00
54	Tlogobulu 1	Tlogobulu	Kaligesing	3,00
55	Tlogobulu 2	Tlogobulu	Kaligesing	1,00
56	Purbowono 1	Purbowono	Kaligesing	2,00
57	Purbowono 2	Purbowono	Kaligesing	3,00
58	Purbowono 3	Purbowono	Kaligesing	2,00
59	Kaliglagah	Kaliglagah	Kemiri	2,00

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

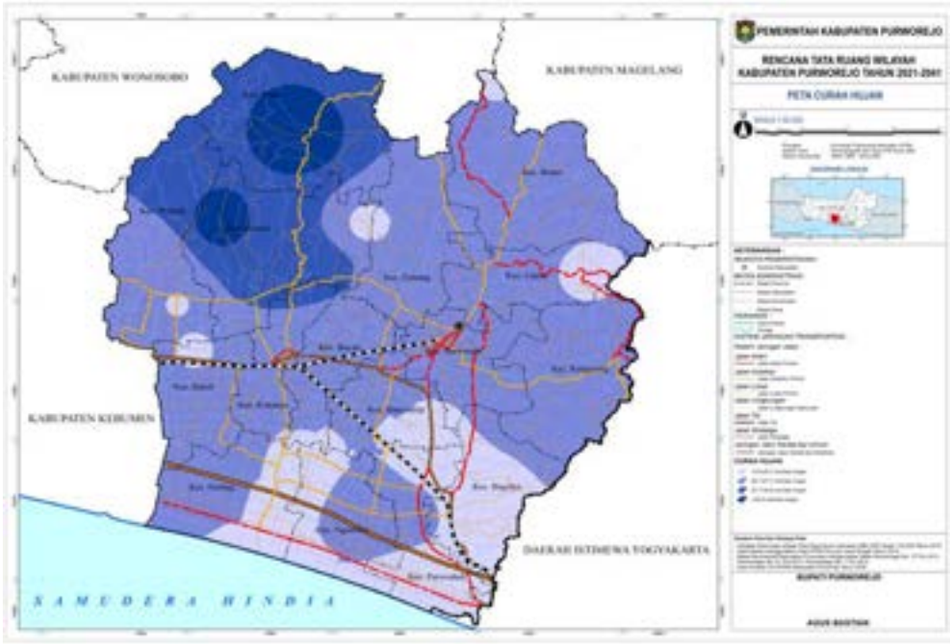
Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Potensi air bawah tanah Kabupaten Purworejo berada pada cekungan air bawah tanah (CAT) Kebumen-Purworejo meliputi daerah Gombong bagian barat sampai Kabupaten Purworejo bagian Timur. Luas CAT Kebumen-Purworejo ini adalah 109.800 hektar dengan potensi air bawah tanah bebas/ dangkal sebesar 269,6 juta m3 per tahun. Sedangkan luas cekungan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Purworejo adalah 48.480 hektar dengan potensi air bawah tanah bebas/dangkal 119,04 juta m3/tahun.

d. Klimatologi

Deskripsi mengenai iklim untuk Kabupaten Purworejo lebih dibatasi pada deskripsi mengenai curah hujan dan suhu, dengan pertimbangan bahwa kedua unsur iklim tersebut sangat dominan dengan kerawanan wilayah terhadap ancaman bencana khususnya banjir, kekeringan, dan longsor. Di samping itu, aktivitas sektor pertanian yang menjadi sektor basis bagi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kedua unsur iklim tersebut, khususnya curah hujan.

Kabupaten Purworejo memiliki iklim tropis basah dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang datang setiap enam bulan silih berganti. Rata-rata suhu udara tahun 2025 adalah 23,35^{o}C dengan suhu maksimum 35,50^{o}C dan suhu minimum 7,90^{o}C dengan curah hujan tahun 2025 adalah 2.419 mm dengan hari hujan 166 hari. Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam.

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengakibatkan penjenuhan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (*trigger factor*) terjadinya bencana yaitu banjir dan longsor lahan di Kabupaten Purworejo.



Gambar 2.5. Peta Curah Hujan Kabupaten Purworejo
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2025

e. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Purworejo terbagi menjadi 2 (dua) kawasan yaitu:

a. Kawasan peruntukan lindung yang meliputi :
   1) Kawasan konservasi yang terdapat di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Purwodadi;
   2) Kawasan Cagar Alam terdapat di Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Butuh, Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano dan Kecamatan Bener); dan
   3) Kawasan Ekosistem Mangrove terdapat di Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Purwodadi.

b. Kawasan peruntukan budi daya meliputi :
   1) Kawasan Hutan Produksi yang terdapat di Kecamatan Kaligesing, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, Bener, Grabag, Ngombol dan Purwodadi;
   2) Kawasan Perkebunan Rakyat terdapat di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Kaligesing, Purworejo, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano dan Bener;
   3) Kawasan Pertanian terdapat di seluruh kecamatan (4) Kawasan Perikanan tangkap terdapat di Kecamatan Grabag, Ngombol dan Purwodadi untuk perikanan Budidaya di Kecamatan Gebang, Loano dan Bener;
   4) Kawasan Pertambangan dan Energi terdapat di Kecamatan Bagelen;
   5) Kawasan Peruntukan Industri terdapat di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bayan, Kemiri, Gebang, Loano dan Bener ;
   6) Kawasan Pariwisata terdapat di seluruh kecamatan
   7) Kawasan Permukiman terdapat di seluruh kecamatan dan
   8) Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdapat di seluruh kecamatan.

Luasan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purworejo tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4. Luasan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

Rencana Pola Ruang Wilayah		Luas (Ha)	Luas Total (Ha)
1		*2*	*3*
Kawasan Peruntukan Lindung	Kawasan Konservasi	827	919
	Kawasan Cagar Budaya	0,0	
	Kawasan Ekosistem Mangrove	92	
Kawasan Peruntukan Budi Daya	Kawasan Hutan Produksi	8.322	105.894
	Kawasan Perkebunan Rakyat	28.214	
	Kawasan Pertanian	39.082	
	Kawasan Perikanan	18	
	Kawasan Pertambangan dan Energi	96	
	Kawasan Peruntukan Industri	1.250	
	Kawasan Pariwisata	343	
	Kawasan Permukiman	28.517	
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	52	
Badan Air	Badan Air	1.332	1.332
Luas Total (ha)		**108.145**	**108.145**

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Kabupaten Purworejo memiliki 919 Ha kawasan peruntukan lindung atau 0,85% dari seluruh luasan di kabupaten. Sementara itu, 105.894 Ha (97,92%) ialah kawasan peruntukan budi daya. Selebihnya, 1.332 Ha (1,23%) merupakan badan air. Lebih lanjut, ha l ini dapat diamati pada peta rencana pola ruang Kabupaten Purworejo berikut.



Gambar 2.6. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Purworejo

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2041

Berdasarkan rencana pola ruang, Kabupaten Purworejo memiliki kawasan konservasi seluas 827 ha yang merupakan suaka pesisir (lokasi di 3 kecamatan). Adapun kawasan ekosistem mangrove seluas 92 Ha di Kecamatan Ngombol dan Purwodadi.

Tabel 2.5. Luasan Kawasan Peruntukan Lindung Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

No	Kecamatan	Kawasan Konservasi	Kawasan Cagar Budaya	Kawasan Ekosistem Mangrove
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kec. Grabag	490,2	0,0	0,0
2	Kec. Ngombol	207,9	0,0	76,8
3	Kec. Purwodadi	129,0	0,0	15,1
4	Kec. Bagelen	0,0	0,0	0,0
5	Kec. Kaligesing	0,0	0,0	0,0
6	Kec. Purworejo	0,0	0,0	0,0
7	Kec. Banyuurip	0,0	0,0	0,0
8	Kec. Bayan	0,0	0,0	0,0
9	Kec. Kutoarjo	0,0	0,0	0,0
10	Kec. Butuh	0,0	0,0	0,0
11	Kec. Pituruh	0,0	0,0	0,0
12	Kec. Kemiri	0,0	0,0	0,0
13	Kec. Bruno	0,0	0,0	0,0
14	Kec. Gebang	0,0	0,0	0,0
15	Kec. Loano	0,0	0,0	0,0
16	Kec. Bener	0,0	0,0	0,0
Luas Total (Ha)		**827,1**	**0,0**	**91,9**

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Kabupaten Purworejo memiliki arahan penggunaan lahan dominan pertanian, seluas 39.082 ha atau 36,14% dari luasan total daerah, diikuti permukiman dengan luas 28.517,5 ha (26,37%) dan perkebunan rakyat dengan luas 28.214 ha (26,09%). Kawasan pertanian terbagi menjadi kawasan tanaman pangan dan kawasan holtikultura, sementara kawasan hutan produksi terbagi ke dalam kawasan hutan produksi terbatas/ kawasan pariwisata dan kawasan hutan produksi tetap. Adapun kawasan permukiman dibedakan menjadi perdesaan-perkotaan.

Kawasan hutan produksi dan perkebunan rakyat menjulang di sisi timur dan utara kabupaten, dengan wilayah berupa perbukitan. Kawasan pertanian dan permukiman cukup merata di seluruh kecamatan, kecuali luasan pertanian di Kecamatan Kaligesing. Sementara kawasan peruntukan industri lebih terpusat di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, dan Bayan.

Tabel 2.6. Luasan Kawasan Peruntukan Budi Daya Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041

No	Kecamatan	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Pertanian	Kawasan Perikanan	Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata	Kawasan Permukiman	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Kec. Grabag	90,2	57,0	3.176,6	0,0	0,0	497,9	168,7	2.157,5	2,0
2	Kec. Ngombol	40,9	16,8	3.789,0	0,0	0,0	294,0	25,1	1.403,4	0,0
3	Kec. Purwodadi	2,8	1,8	2.928,8	0,0	0,0	130,3	70,1	2.240,1	0,0

No	Kecamatan	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Perkebunan Rakyat	Kawasan Pertanian	Kawasan Perikanan	Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Pariwisata	Kawasan Permukiman	Kawasan Pertahanan dan Keamanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Kec. Bagelen	0,0	1.796,2	1.982,0	0,0	96,4	0,0	0,0	2.394,1	0,0
5	Kec. Kaligesing	466,9	5.959,6	108,2	0,0	0,0	0,0	3,6	1.274,6	0,0
6	Kec. Purworejo	0,0	1.340,8	1.681,6	0,0	0,0	0,0	23,1	2.153,4	33,6
7	Kec. Banyuurip	0,0	0,0	2.856,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.878,1	0,9
8	Kec. Bayan	0,0	0,0	2.456,1	0,0	0,0	150,1	0,0	1.767,1	12,2
9	Kec. Kutoarjo	0,0	0,0	2.298,3	0,0	0,0	0,0	3,6	1.586,4	3,2
10	Kec. Butuh	0,0	0,0	2.953,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1.635,1	0,0
11	Kec. Pituruh	1.493,3	2.414,7	2.988,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.941,7	0,0
12	Kec. Kemiri	1.264,0	2.489,4	4.356,8	0,0	0,0	42,2	0,0	2.063,2	0,0
13	Kec. Bruno	3.434,3	4.881,8	1.101,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1.095,3	0,0
14	Kec. Gebang	688,5	1.486,8	3.102,8	6,0	0,0	66,0	0,0	1.618,8	0,0
15	Kec. Loano	65,6	2.287,0	1.557,0	4,7	0,0	7,4	49,2	1.289,2	0,0
16	Kec. Bener	775,3	5.482,1	1.745,1	7,4	0,0	62,4	0,0	2.019,7	0,0
Luas Total (Ha)		**8.321,7**	**28.214,0**	**39.082,1**	**18,1**	**96,4**	**1.250,4**	**343,3**	**28.517,5**	**51,9**

Sumber: RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

f. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi wilayah adalah kemampuan suatu daerah yang berupa sumber daya yang bisa digunakan, dieksploitasi, dan diambil manfaatnya untuk dikembangkan secara lebih lanjut sehingga bisa meningkatkan dan menciptakan kemampuan wilayah yang memadai.

Kabupaten Purworejo dikenal sebagai daerah agraris yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di bidang pertanian. Kabupaten Purworejo memiliki potensi pengembangan wilayah di bidang perkebunan dan pertanian. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo yang didominasi oleh lahan perkebunan dan pertanian. Lahan perkebunan di Kabupaten Purworejo seluas 32.685,74 Ha, sedangkan lahan pertanian seluas 30.311,89 Ha yang terdiri dari sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Berikut rincian penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.7. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Purworejo

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	*2*	*3*
1	Belukar	286,10
2	Hutan	18.936,40
3	Kebun	32.685,74
4	Permukiman	21.910,27

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	*2*	*3*
5	Rawa	8,35
6	Sawah Irigasi	25.134,81
7	Sawah Tadah Hujan	5.177,08
8	Sungai	779,54
9	Tambak	369,28
10	Tanah Ladang	3.137,99
Total		108.425,57

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, dimana Kabupaten Purworejo termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Keburejo; pengembangan wilayahnya diarahkan sebagai upaya penguatan struktur ruang dan peningkatan fungsi kawasan strategis berbasis konektivitas wilayah, pengembangan ekonomi regional, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. WP Keburejo diposisikan sebagai kawasan penghubung strategis antara wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga memiliki peran penting dalam mendukung integrasi sistem perkotaan lintas wilayah. Dalam kerangka tersebut, pengembangan WP Keburejo diarahkan pada integrasi kawasan perkotaan Purworejo–Kutoarjo dengan Kawasan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) sebagai pusat pertumbuhan baru berbasis konektivitas global. Integrasi ini dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya kawasan perkotaan yang adaptif terhadap perkembangan transportasi udara, logistik, serta aktivitas ekonomi berbasis jasa dan perdagangan. Dengan demikian, WP Keburejo berfungsi sebagai kawasan hinterland yang mendukung operasional dan pengembangan YIA, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di wilayah selatan Jawa Tengah.

Dalam kerangka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044, penguatan peran strategis Kabupaten Purworejo sebagai simpul konektivitas dalam Wilayah Pengembangan (WP) Keburejo merupakan bagian integral dari upaya pembentukan struktur ruang wilayah yang efisien, terintegrasi, dan berdaya saing. Posisi geografis Kabupaten Purworejo yang berada pada koridor selatan Pulau Jawa serta berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta menempatkan wilayah ini sebagai titik temu (nodal point) yang menghubungkan sistem jaringan prasarana transportasi regional, khususnya antara kawasan selatan Jawa Tengah dengan Kawasan Strategis Nasional Yogyakarta–Borobudur. Penguatan fungsi konektivitas tersebut diarahkan melalui pengembangan sistem jaringan transportasi multimoda yang mengintegrasikan transportasi darat, perkeretaapian, dan aksesibilitas menuju transportasi udara melalui Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Dalam konteks ini, Kabupaten Purworejo memiliki peran sebagai hinterland utama yang mendukung operasional YIA, sekaligus sebagai koridor distribusi logistik dan mobilitas penumpang yang menghubungkan kawasan produksi di Jawa Tengah bagian selatan dengan pusat-pusat pertumbuhan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Optimalisasi peran ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan nasional dan provinsi, pengembangan simpul transportasi terpadu di kawasan perkotaan

Purworejo–Kutoarjo, serta penguatan fungsi Stasiun Kutoarjo sebagai simpul perkeretaapian strategis dalam jaringan lintas selatan Jawa. Selain itu, penguatan peran Kabupaten Purworejo sebagai simpul konektivitas juga diarahkan untuk mendukung pengembangan koridor ekonomi berbasis pariwisata dan perdagangan regional. Dalam hal ini, Purworejo berfungsi sebagai wilayah transit dan distribusi yang menghubungkan destinasi wisata unggulan di Kebumen dan Purworejo dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Pengembangan konektivitas ini tidak hanya difokuskan pada aspek fisik infrastruktur, tetapi juga mencakup integrasi sistem pelayanan transportasi, peningkatan aksesibilitas antar destinasi, serta pengembangan kawasan penunjang (supporting areas) seperti rest area, pusat logistik, dan kawasan ekonomi lokal berbasis UMKM dan ekonomi kreatif. Lebih lanjut, dalam perspektif pengembangan wilayah berbasis jaringan (network-based development), Kabupaten Purworejo diarahkan untuk berfungsi sebagai simpul interkoneksi yang mengintegrasikan sistem perkotaan regional melalui pendekatan keterpaduan antar pusat kegiatan. Kawasan perkotaan Purworejo–Kutoarjo dikembangkan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) yang memiliki fungsi sebagai pusat distribusi barang dan jasa, pusat pelayanan sosial ekonomi, serta simpul pertumbuhan yang mampu menarik dan mendistribusikan arus pergerakan manusia, barang, dan informasi secara efisien. Dalam konteks ini, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola transportasi serta pengembangan sistem informasi infrastruktur yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data (data-driven planning).

Secara spasial, keberadaan YIA sebagai infrastruktur transportasi udara berskala internasional telah menggeser pusat gravitasi pertumbuhan ke arah koridor selatan Jawa, sehingga menciptakan peluang terbentuknya kawasan pertumbuhan baru (new growth pole) di wilayah perbatasan. Kabupaten Purworejo, yang secara geografis berada pada hinterland langsung YIA, memiliki keunggulan komparatif dalam hal ketersediaan lahan, kedekatan spasial, serta konektivitas jaringan transportasi darat dan perkeretaapian. Oleh karena itu, penguatan kawasan perbatasan YIA diarahkan untuk mengintegrasikan fungsi-fungsi ekonomi antara wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pendekatan pembangunan berbasis koridor (corridor-based development) dan aglomerasi ekonomi (economic clustering). Dalam perspektif pengembangan ekonomi wilayah, kawasan perbatasan YIA berpotensi dikembangkan sebagai kawasan aerotropolis, yaitu kawasan perkotaan yang tumbuh dan berkembang dengan bandara sebagai pusat aktivitas ekonomi. Pengembangan konsep ini mencakup integrasi antara fungsi transportasi udara dengan kegiatan logistik, pergudangan, industri ringan, perdagangan, pariwisata, serta jasa penunjang lainnya. Kabupaten Purworejo dalam hal ini diarahkan untuk mengambil peran sebagai lokasi pengembangan kawasan penunjang (supporting area), seperti pusat distribusi logistik regional, kawasan industri berbasis agro dan manufaktur ringan, serta kawasan komersial yang mendukung rantai pasok (supply chain) kawasan YIA. Lebih lanjut, penguatan koridor ekonomi YIA–Purworejo juga diarahkan pada peningkatan konektivitas fisik dan fungsional antar wilayah. Hal ini mencakup

pengembangan jaringan jalan kolektor primer dan sekunder yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan pusat-pusat kegiatan di Purworejo (Purworejo–Kutoarjo), peningkatan aksesibilitas menuju simpul perkeretaapian strategis seperti Stasiun Kutoarjo, serta integrasi sistem transportasi antarmoda yang efisien dan berkelanjutan. Selain konektivitas fisik, diperlukan pula penguatan konektivitas non-fisik melalui integrasi sistem informasi logistik, penyederhanaan regulasi lintas wilayah, serta harmonisasi kebijakan tata ruang antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam konteks pengembangan pariwisata, kawasan perbatasan YIA memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang utama bagi wisatawan menuju destinasi unggulan di Jawa Tengah bagian selatan, termasuk kawasan pesisir Purworejo dan Geopark Karangsambung Kebumen serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur. Pengembangan pariwisata Kabupaten Purworejo diarahkan melalui integrasi destinasi wisata pantai selatan dengan kawasan Geopark Kebumen dan Kawasan Borobudur dalam satu ekosistem destinasi Wilayah Pengembangan (WP) Keburejo yang terhubung secara spasial, fungsional, dan ekonomi. Strategi ini dilaksanakan melalui penguatan konektivitas antardestinasi, pengembangan produk wisata tematik berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas amenitas dan atraksi wisata, penguatan kelembagaan dan kerja sama antardaerah, serta pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan. Beberapa upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemkab Purworejo diantaranya : a) penguatan konektivitas dan aksesibilitas kawasan wisata, melalui peningkatan jaringan jalan penghubung destinasi, pengembangan sistem transportasi wisata, serta penyediaan infrastruktur pendukung pada koridor wisata Pantai Selatan Purworejo–Geopark Kebumen–Borobudur; b) pengembangan klaster destinasi wisata terpadu, melalui integrasi kawasan wisata pantai selatan Kabupaten Purworejo, kawasan geowisata, wisata budaya, dan wisata pedesaan dalam satu paket perjalanan (integrated tourism circuit) berbasis karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah; c) penguatan daya tarik dan diversifikasi produk wisata, melalui pengembangan wisata bahari, geowisata, wisata budaya, wisata sejarah, ekowisata, dan ekonomi kreatif yang saling terhubung dan mendukung pembentukan rantai nilai pariwisata regional; d) peningkatan kualitas amenitas dan pelayanan pariwisata, melalui penyediaan fasilitas pendukung destinasi, pengembangan akomodasi, pusat informasi wisata, ruang publik, serta e) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata; penguatan kerja sama lintas daerah dan tata kelola destinasi, melalui sinergi perencanaan, promosi bersama, pengembangan event regional, serta f) penguatan kelembagaan pengelolaan destinasi antarwilayah dalam WP Keburejo dan pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata, melalui penguatan UMKM, ekonomi kreatif, produk unggulan daerah, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan wisata untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan pemerataan manfaat pembangunan. Beberapa kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan diantaranya : 1) Pengembangan koridor wisata Pantai Jatimalang–Pantai Ketawang–Pantai Jetis sebagai gerbang wisata pesisir Kabupaten Purworejo; 2) Pengembangan

konektivitas wisata Purworejo–Kebumen–Borobudur melalui peningkatan akses jalan, penataan simpul transportasi, dan pengembangan jalur wisata tematik; 3) Pengembangan paket wisata terpadu "Pesisir–Geopark–Warisan Dunia" yang mengintegrasikan destinasi wisata pantai, geowisata, budaya, dan desa wisata; 4) Pengembangan sentra ekonomi kreatif, kuliner, kerajinan, dan produk unggulan lokal pada kawasan wisata strategis dan desa wisata; 5) Pengembangan event bersama dan branding destinasi regional dalam kerangka ekosistem pariwisata WP Keburejo; dan 6) Penguatan desa wisata penyangga dan kawasan strategis pariwisata di wilayah selatan Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari rantai destinasi regional. Melalui strategi tersebut, Kabupaten Purworejo diharapkan berperan sebagai penghubung dan penguat ekosistem pariwisata regional yang mampu meningkatkan daya saing destinasi, memperluas pergerakan wisatawan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara sektor pariwisata, transportasi, dan ekonomi kreatif menjadi kunci dalam menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan. Dari sisi tata ruang dan lingkungan, pengembangan kawasan perbatasan YIA harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pengendalian pemanfaatan ruang menjadi krusial untuk mencegah terjadinya urban sprawl yang tidak terkendali, konflik pemanfaatan lahan, serta degradasi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan zonasi yang jelas, penguatan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, serta penerapan konsep pembangunan rendah karbon dan ramah lingkungan (green infrastructure).

Secara keseluruhan, penguatan potensi strategis kawasan perbatasan YIA sebagai koridor pertumbuhan ekonomi baru diharapkan mampu menciptakan keterpaduan pembangunan wilayah antara Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkatkan daya saing regional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis perencanaan spasial yang adaptif, kawasan ini berpotensi menjadi motor penggerak utama pembangunan wilayah selatan Jawa Tengah dalam jangka panjang.

Di sisi lain, penguatan konektivitas wilayah juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan ketahanan wilayah. Kabupaten Purworejo yang memiliki kawasan pesisir selatan dengan tingkat kerawanan bencana yang relatif tinggi memerlukan integrasi antara pengembangan infrastruktur konektivitas dengan sistem mitigasi dan manajemen risiko bencana. Oleh karena itu, pembangunan jaringan transportasi dan simpul konektivitas harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta penerapan standar teknis yang adaptif terhadap potensi bencana. Secara keseluruhan, penguatan peran strategis Kabupaten Purworejo sebagai simpul konektivitas WP Keburejo diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana wilayah yang mampu meningkatkan efisiensi pergerakan, memperkuat integrasi ekonomi regional, serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Dengan

demikian, Kabupaten Purworejo tidak hanya berfungsi sebagai wilayah penghubung (transit area), tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perkembangan wilayah sekitarnya dalam kerangka pembangunan wilayah selatan Jawa Tengah yang inklusif dan berkelanjutan.

g. Wilayah Rawan Bencana

Di Kabupaten Purworejo terdapat lima potensi rawan bencana, yaitu potensi rawan bencana tanah longsor, potensi rawan bencana banjir, potensi rawan bencana gelombang pasang dan tsunami, potensi rawan bencana gempa bumi, dan potensi rawan bencana kekeringan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Data Informasi Bencana Indonesia yang diluncurkan dari BNPB, diketahui dari tahun 2021-2025 Kabupaten Purworejo telah mengalami berbagai jenis kejadian bencana alam, yang meliputi banjir, tanah longsor, puting beliung, dan kekeringan. Bencana alam yang paling sering terjadi adalah kejadian tanah longsor dan puting beliung.

Tabel 2.8. Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

Tahun	Banjir	Tanah Longsor	Gelombang Pasang	Puting Beliung	Kekeringan	Jumlah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2025	7	47	N/A	46	1	101
2024	3	32	0	107	1	143
2023	0	8	0	34	685	727
2022	45	47	0	48	52	198
2021	0	2	0	2	0	4
Jumlah	55	136	0	237	739	1.173

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (Dibi), 2025

Selama lima tahun terakhir terdapat 1.173 kejadian bencana alam di Kabupaten Purworejo. Di mana bencana alam yang paling sering terjadi adalah kejadian bencana bencana kekeringan dan angin puting beliung. Sedangkan jika dirinci menurut jenis kejadian bencananya, berikut dampak yang diakibatkan oleh bencana tersebut di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.9. Dampak Bencana Alam di Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2025

Kejadian Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa (penduduk)			Kerusakan								
		Meninggal	Terluka	Mendenita	Rumah	Fas. Pendidikan	Fas. Kesehatan	Fas. Peribadatan	Fas. Umum	Perkantoran	Jembatan	Pabrik	Kios
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
2021													
Tanah Longsor	2	0	0	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Puting Beliung	2	0	0	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0

2022													
Banjir	45	0	0	18.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanah Longsor	47	2	0	120	36	0	0	1	0	0	0	0	0
Puting Beliung	48	0	0	55	36	0	0	0	0	0	0	0	1
Kekeringan	52	0	0	2.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023													
Banjir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tanah longsor	8	0	0	35	10	0	0	0	2	0	0	0	0
gelombang pasang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
puting beliung	34	0	1	58	17	0	0	0	12	0	0	1	0
kebakaran hutan/lahan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kekeringan	685	0	0	25.740	6.435	0	0	0	0	0	0	0	0
Gempa bumi	1	0	0	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2024													
Banjir	3	-	-	969	-	-	-	-	-	-	-	-	-
tanah longsor	32	4	-	69	16	-	-	2	13	-	1	-	-
gelombang pasang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
puting beliung	107	-	-	593	157	-	-	-	-	-	-	-	-
kebakaran hutan/lahan	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kekeringan	1	-	-	16.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Gempa bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025													
Banjir	7	0	0	2825	0	0	0	0	3	0	0	0	0
tanah longsor	47	1	5	106	32	1	0	1	27	0	1	0	0
gelombang pasang	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
puting beliung	46	0	0	69	21	1	0	0	18	0	0	0	2
kebakaran hutan/lahan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kekeringan	1	0	0	345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gempa bumi	N/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (Dibi), 2025

Bencana yang terjadi di Kabupaten Purworejo lima tahun terakhir antara lain banjir sebanyak 55 kali, tanah longsor sebanyak 136 kali, puting beliung sebanyak 237 kali, serta kekeringan 739 kali. Pada tahun 2025, bencana di Kabupaten Purworejo telah mengakibatkan beberapa korban baik korban jiwa maupun rumah hingga rusaknya infrastruktur yang ada. Korban jiwa yang paling banyak disebabkan oleh bencana banjir yang menyebabkan 2.825 orang menderita.

a) Potensi Rawan Bencana Tanah Longsor

Potensi rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Purworejo terdapat di Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Purworejo, Loano, Bener, Gebang, Bruno, Kemiri, Pituruh dan Kutoarjo. Hal ini tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.10. Desa/Kelurahan Rawan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Purworejo

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Longsor		
	Tinggi	Sedang	Rendah
1	*2*	*3*	*4*
Grabag	0	0	0
Ngombol	0	0	0
Bagelen	6	1	9
Kaligesing	20	0	1
Purworejo	7	0	6
Banyuurip	0	0	0
Bayan	0	0	2
Kutoarjo	0	0	9
Butuh	0	0	0
Pituruh	8	0	10
Kemiri	8	0	20

Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Longsor		
	Tinggi	Sedang	Rendah
1	*2*	*3*	*4*
Bruno	13	0	5
Gebang	8	0	12
Loano	13	0	8
Bener	10	0	18
Jumlah	96	1	97

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan analisis data diketahui bahwa pada wilayah dataran tinggi memiliki bahaya tanah longsor yang tinggi, hal ini dikarenakan kawasan ini merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang mudah bergerak.

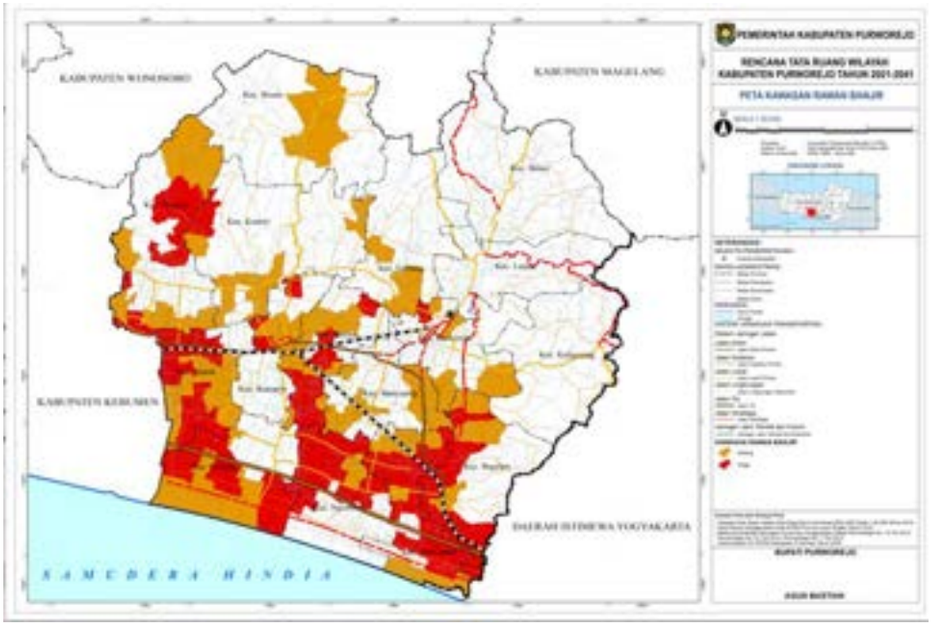


Gambar 2.7. Peta Tanah Longsor Kabupaten Purworejo
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2025

b) Potensi Rawan Bencana Banjir

Potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Banyuurip, Purworejo, Bayan, Kutoarjo, Butuh, Kutoarjo, Kemiri, Pituruh, Gebang, Loano, dan Bener. Kawasan ini memiliki topografi yang rendah dan rutin setiap musim penghujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

Diantara kecamatan yang rawan banjir, Kecamatan Grabag, Ngombol, Purwodadi dan Bagelen adalah kecamatan yang sering terdampak banjir karena posisinya yang paling rendah. Genangan banjir di kawasan ini dapat bertahan lebih dari 1 minggu dan selain merendam kawasan permukiman, banjir juga merendam kawasan pertanian sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gagal panen di kawasan tersebut.



Gambar 2.8. Peta Bencana Banjir Kabupaten Purworejo
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2025

c) Potensi Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Tsunami

Potensi rawan gelombang pasang dan tsunami di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di pesisir Pantai Selatan yang kawasannya berada di Kecamatan Grabag, Ngombol, dan Purwodadi. Kawasan rawan bencana gelombang pasang adalah tempat-tempat yang terkena pasang-surut air laut akibat gaya gravitasi/gaya tarik bulan sehingga tergenang pada musim-musim tertentu. Sedangkan kawasan rawan tsunami adalah tempat-tempat yang terkena gelombang pasang laut dengan periode yang panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari bawah laut yang berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran tanah.

Tsunami mempunyai kecepatan yang berbanding lurus dengan kedalaman laut, sehingga semakin dalam laut maka kecepatan tsunami semakin besar. Selama penjalaran dari tengah laut menuju pantai kecepatan semakin berkurang karena gesekan dengan dasar laut yang semakin dangkal, akibatnya tinggi gelombang pantai menjadi semakin besar karena adanya penumpukan masa air akibat dari penurunan kecepatan. Gelombang yang berkecepatan tinggi ini dapat menghancurkan kehidupan di daerah pantai dan kembalinya air ke laut setelah puncak gelombang bisa menyeret segala sesuatu ke laut. Sampai saat ini, di Kabupaten Purworejo belum memiliki alat deteksi dini tsunami dan baru mengandalkan gejala alam saja.

Pada jarak 0-500 m dari pantai terdapat 11 desa yang berpotensi rawan terhadap bencana gelombang pasang. Ketika gelombang pasang terjadi, air laut yang masuk tidak dapat kembali ke laut sehingga membanjiri kawasan di sekitarnya. Hal ini dikarenakan di kawasan pesisir Kabupaten Purworejo terdapat gumuk-gumuk pasir dan di muara sungai sudah tertutup sedimentasi. Air laut yang bercampur dengan air sungai menjadikan air bersifat payau. Bencana gelombang pasang ini selain merusak kawasan pertanian dan pertambakan, juga mengganggu aktivitas kawasan permukiman di sekitarnya yang ikut terendam luapan

air. Banjir baru dapat surut setelah sedimentasi di muara sungai dibuka dan air dapat mengalir kembali ke laut. Usaha pembangunan jetty di muara sungai Wawar dan Cokroyasan untuk mengatasi sedimentasi pasir hanya efektif selama 1 tahun. Setelah itu, arah gelombang berubah dan sedimentasi di muara tetap terjadi.

Berbeda halnya dengan bencana gelombang pasang, bencana tsunami berpotensi melanda kawasan yang lebih luas. Dari pengalaman bencana tsunami yang pernah terjadi di pesisir pantai selatan Pulau Jawa, ketinggiannya mencapai 15 m dan mencapai radius ± 1,5 km dari tepi pantai. Dari asumsi ini, maka desa yang potensi rawan bencana tsunami mencapai ±33 desa. Tetapi bila prediksi dibuat lebih besar dengan radius mencapai ±5 km dari tepi pantai, maka desa yang berpotensi rawan bencana tsunami berkembang menjadi 56 desa.



Gambar 2.9. Peta Gelombang Pasang dan Tsunami Kabupaten Purworejo
Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2025

d) Potensi Rawan Bencana Gempa Bumi

Kawasan rawan bencana gempa bumi adalah tempat-tempat yang rentan mengalami peristiwa pelepasan energi sehingga menyebabkan dislokasi/pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Gempa bumi dapat terjadi karena proses tektonik akibat pergerakan lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, runtuhan tanah, aktivitas gunung berapi, dan ledakan nuklir. Energi getaran gempa dirambatkan ke seluruh bagian bumi, getaran tersebut dapat menyebabkan kerusakan dan runtuhnya struktur bangunan sehingga dapat menyebabkan korban jiwa. Potensi rawan bencana gempa bumi meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Purworejo.

e) Potensi Rawan Bencana Kekeringan

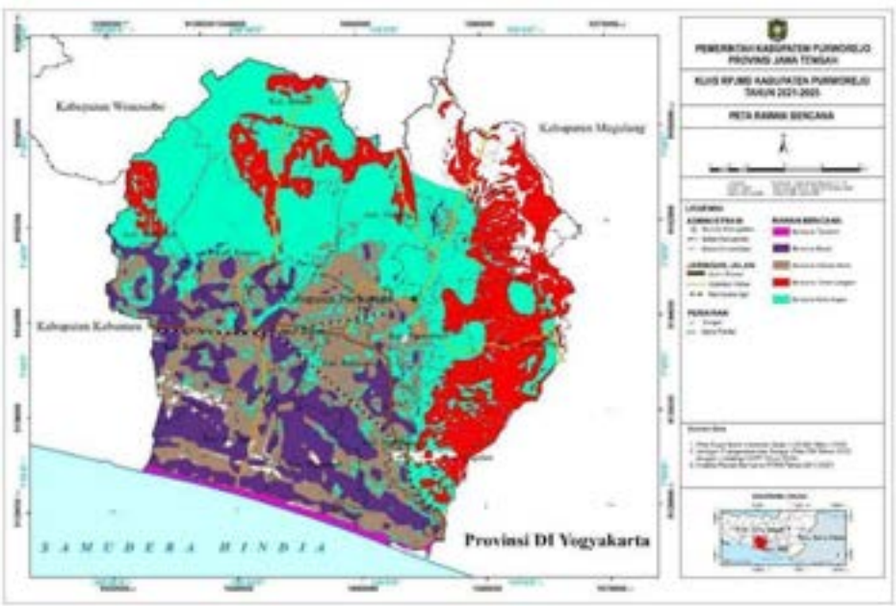
Potensi rawan bencana kekeringan ada dua macam, yaitu kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk. Kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung *control point*. Sedangkan kekeringan dari aspek air

bersih berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, dan mahalnya biaya memperoleh air bersih.

Kekeringan pada daerah irigasi disebabkan karena berkurangnya debit air, tingginya kebocoran pada saluran, tidak adanya saluran tersier, tidak taatnya jadwal pola tanam, kelembagaan P3A tidak berjalan dengan baik, pengambilan air secara liar, kurangnya kesadaran untuk bertanam palawija, dan sistem konvensional yang masih digunakan petani dalam bertanam padi.

Debit sungai terbesar terdapat pada Sungai Bogowonto karena sungai ini merupakan aliran primer dari DAS Bogowonto. Debit sungai dari tahun ke tahun semakin menurun dikarenakan kurangnya sistem penyimpanan air akibat berkurangnya daerah konservasi di sekitar aliran sungai. Hal ini berdampak pada musim kemarau, terdapat sungai/kali yang tidak memiliki debit air bahkan sampai kering hingga musim hujan berikutnya.

Sementara itu, potensi rawan bencana kekeringan air bersih hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo. Untuk daerah pegunungan, pada beberapa kasus sumber air bersih berada jauh di bawah permukiman penduduk sehingga perlu upaya untuk menaikkan air ke atas dengan pompa. Sementara itu pada beberapa desa di tepi pantai airnya payau/asin dan keruh. Kendala yang sering dijumpai bahwa sumber mata air cukup jauh dari permukiman warga sehingga membutuhkan jaringan perpipaan yang panjang untuk sampai ke permukiman masyarakat tersebut.



Gambar 2.10. Peta Rawan Bencana Kabupaten Purworejo
Sumber: DPUPR Kab. Purworejo, 2025

h. Komoditas Energi Baru Terbarukan (EBT)

Komoditas Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah berbagai jenis sumber energi yang berasal dari alam dan dapat diperbaharui secara alami, seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomassa. EBT dianggap sebagai solusi untuk mengatasi ketergantungan

pada energi fosil yang terbatas dan berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Kabupaten Purworejo merupakan salah satu upaya strategis dalam mendukung penerapan ekonomi hijau melalui pemanfaatan energi yang rendah emisi, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pengembangan EBT diharapkan mampu meningkatkan ketahanan energi daerah, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Berdasarkan data potensi komoditas EBT tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025, Kabupaten Purworejo memiliki potensi sumber energi terbarukan yang beragam, meliputi energi surya, angin, hidro, dan bioenergi, yang dapat dioptimalkan sebagai penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tabel 2.11.Tabel Potensi Komoditas EBT Kabupaten Purworejo

No	Komoditas EBT	Satuan	Nilai	
			2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**Potensi Angin**			
a.	Onshore	MW	232,6	232,6
b.	Offshore	MW	3347	3347
2.	**Potensi Surya**			
a.	PLTS	GWp	7,1	7,1
b.	PLTS Terapung	MW	-	-
3.	**Potensi Hidro**			
a.	PLTA RoR	MW	2,5	2,5
b.	PLTA Bendungan	MW	6	6
4.	**Potensi Bioenergi**			
a.	Potensi Biomassa Existing Limbah Industri:			
	Gula	MW	-	-
	Kayu	MW	1,1	1,1
	Kelapa Sawit	MW	-	-
	Padi	MW	-	-
	Pulp dan Kertas	MW	-	-
	Tapioka	MW	-	-
b.	Potensi Biomassa Existing Produk Utama:			
	Sampah Kota Teknis	MW	1,7	1,7
	Sampah Kota Teoritis	MW	5,6	5,6
c.	Potensi Biomassa Pengembangan:			
	Hutan Produksi Kritis	Ha	80,6	80,6
5.	**Potensi Panas Bumi**			
a.	Cadangan:			
	Spekulatif	MW	-	-
	Hipotetik	MW	-	-
	Mungkin	MW	-	-
	Terduga	MW	-	-
	Terbukti	MW	-	-
b.	Total Potensi Panas Bumi	MW	-	-

Sumber: Data Kementerian ESDM, 2025

Potensi energi angin terdiri atas potensi angin darat (onshore) sebesar 232,6 MW dan potensi angin lepas pantai (offshore) sebesar 3.347

MW, yang menunjukkan peluang pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu terutama di wilayah pesisir. Selain itu, potensi energi surya juga cukup signifikan dengan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 7,1 GWp, yang dapat dikembangkan melalui pemanfaatan lahan potensial maupun pemanfaatan atap bangunan (rooftop solar).

Pada sektor energi air, potensi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdiri dari PLTA tipe Run of River sebesar 2,5 MW dan PLTA bendungan sebesar 6 MW, yang mencerminkan peluang pemanfaatan sumber daya air untuk penyediaan energi listrik yang lebih bersih dan berkelanjutan. Sementara itu, potensi bioenergi berasal dari biomassa limbah industri dan sampah perkotaan, antara lain biomassa kayu sebesar 1,1 MW, potensi energi dari sampah kota sebesar 1,7 MW secara teknis dan 5,6 MW secara teoritis, serta potensi pengembangan biomassa dari hutan produksi kritis seluas 80,6 hektare.

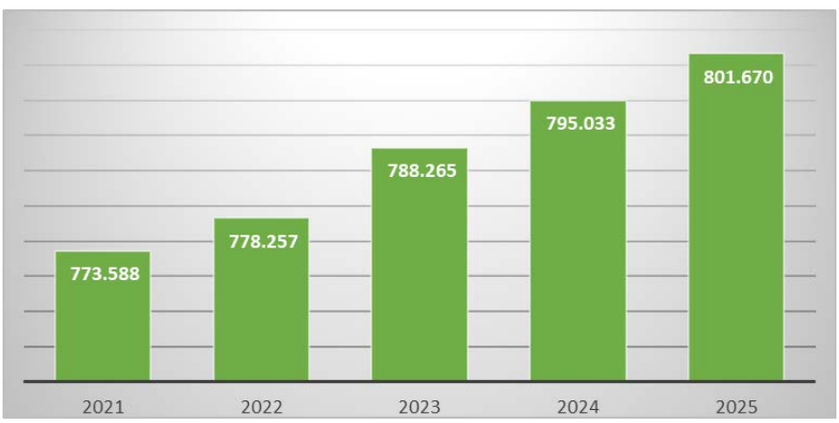
Keberadaan potensi EBT tersebut menjadi modal penting dalam mendukung kebijakan transisi energi di daerah, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca serta penguatan ketahanan energi daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, perencanaan, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat dalam rangka mendorong optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan secara bertahap dan berkelanjutan.

2.1.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

Jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah memiliki sifat yang dinamis karena adanya perubahan yang terjadi di wilayah tersebut. Perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk yang memasuki atau keluar dari wilayah tersebut. Data demografi di Kabupaten Purworejo terbagi menjadi jumlah penduduk secara umum, distribusi penduduk dan struktur penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 2021 hingga 2025, terjadi peningkatan yang signifikan. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 tersaji dalam gambar berikut ini.



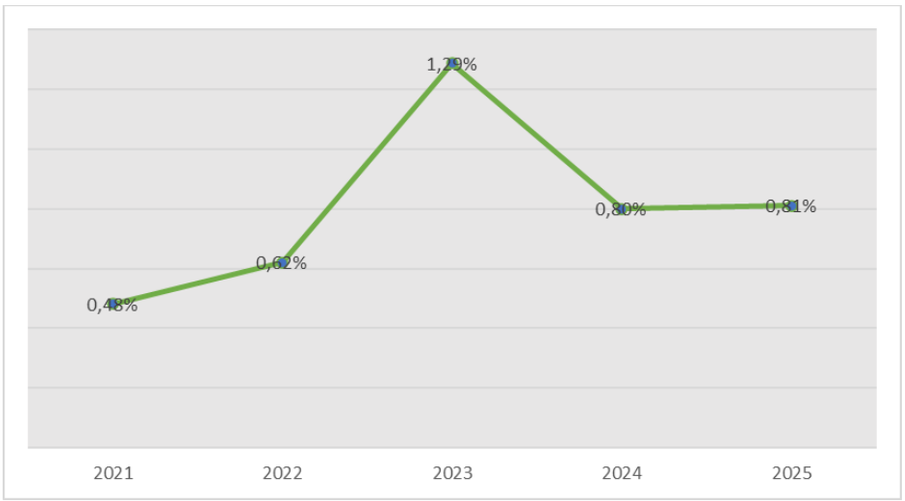
Gambar 2.11. Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Kab. Purworejo, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kabupaten Purworejo menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang stabil dan positif. Berdasarkan data proyeksi penduduk tahun 2021 hingga 2025, jumlah penduduk meningkat dari 773.588 jiwa pada tahun 2021 kemudian meningkat menjadi 778.257 jiwa pada tahun 2022. Peningkatan jumlah penduduk berlanjut pada tahun 2023 dengan total 788.265 jiwa, dan kembali bertambah menjadi 795.033 jiwa pada tahun 2024. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Purworejo mencapai 801.670 jiwa. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan penduduk yang relatif stabil selama periode lima tahun tersebut.

Peningkatan jumlah penduduk ini memiliki implikasi penting terhadap kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana wilayah. Pertumbuhan penduduk berpotensi meningkatkan permintaan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, serta infrastruktur dasar lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan dinamika pertumbuhan penduduk dalam proses perencanaan tata ruang, penyediaan fasilitas pelayanan publik, serta pengembangan infrastruktur wilayah agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Laju pertumbuhan penduduk secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor alami mencakup kelahiran (fertilitas) dan kematian (mortalitas), sedangkan faktor nonalami mencakup migrasi (imigrasi dan emigrasi). Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Purworejo dari tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.12. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025
Sumber: BPS 2025, diolah

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan variasi tiap tahun, tidak stabil tapi cenderung menunjukkan pola naik-turun. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,48 persen, yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 0,62 persen. Peningkatan tersebut berlanjut secara signifikan pada tahun 2023 dengan capaian 1,29 persen, yang merupakan nilai tertinggi selama periode 5 tahun. Memasuki tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 0,80 persen. Kondisi ini relatif stabil pada tahun 2025 dengan sedikit peningkatan menjadi 0,81 persen. Penurunan setelah tahun 2023

mengindikasikan adanya perlambatan laju pertumbuhan penduduk dibandingkan dengan periode sebelumnya Pola ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk bisa mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.

Secara umum, tren selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk sempat mengalami akselerasi hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023, kemudian mengalami penurunan dan cenderung stabil pada kisaran 0,8 persen pada dua tahun terakhir. Dinamika tersebut dapat menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, penyediaan layanan dasar, serta perencanaan kebutuhan infrastruktur dan sosial di masa mendatang.

b. Struktur Penduduk

Struktur penduduk di Kabupaten Purworejo berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada data *sex ratio* di wilayah tersebut. Data *sex ratio* menampilkan perbandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan yang dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data terkait jumlah penduduk Kabupaten Purworejo berdasarkan *sex ratio* dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 Berdasarkan *Sex Ratio*

Jumlah Penduduk Kabupaten Purworejo				
Tahun	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah**	**Sex Rasio**
2021	387.047	386.541	773.588	100,13%
2022	389.302	388.955	778.257	100,09%
2023	394.698	393.567	788.265	100,29%
2024	398.135	396.898	795.033	100,31%
2025	401.499	400.171	801.670	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo (2025)

Pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil. Peningkatan ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, dengan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan setiap tahunnya.

Nilai sex ratio selama periode tersebut berada pada kisaran 100,09–100,31, yang menunjukkan bahwa terdapat sekitar 100 hingga 101 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Kondisi ini mencerminkan struktur penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan serta tidak menunjukkan adanya ketimpangan komposisi jenis kelamin yang signifikan**.**

Struktur penduduk di suatu wilayah juga dapat dilihat melalui kelompok usia. Analisis terhadap kelompok usia memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika demografis. Jumlah penduduk menurut usia di Kabupaten Purworejo dari tahun 2021 hingga 2025 tersaji dalam tabel berikut, yang memperlihatkan distribusi penduduk berdasarkan kategori usia selama periode tersebut. Data ini sangat penting untuk memahami komposisi usia penduduk, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.13. Persentase Penduduk Menurut Usia di Kabupaten Purworejo

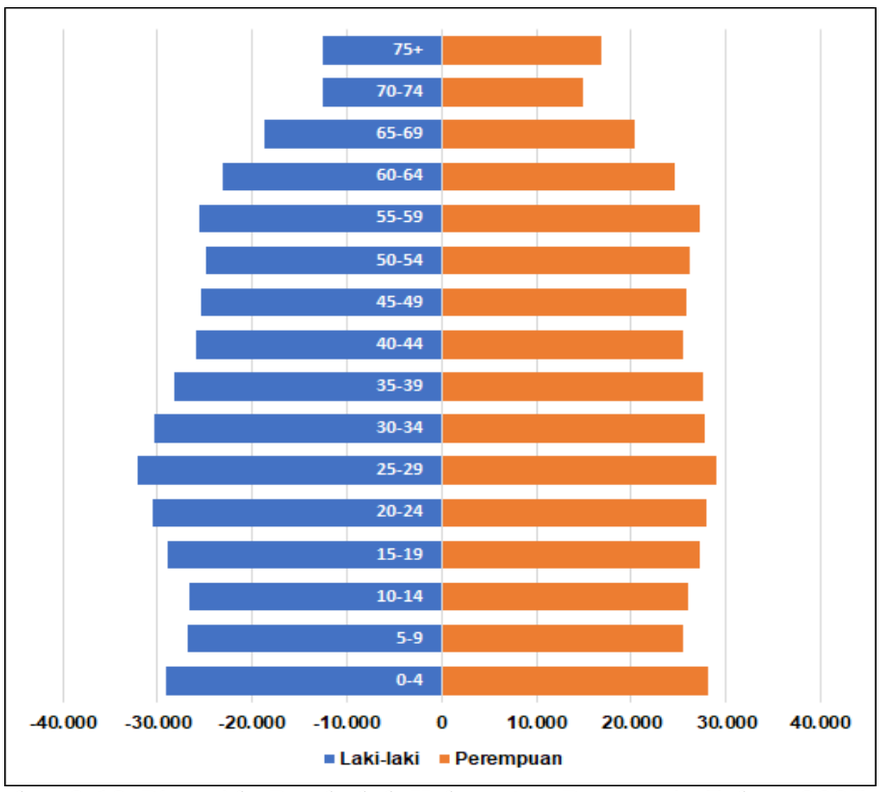
Kelompok Umur	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Usia 0-4	6,67	6,59	7,03	7,13	7,08
Usia 5-9	6,71	6,63	6,55	4,55	6,62
Usia 10-14	7,18	7,07	6,83	5,37	6,47
Usia 15-19	7,46	7,35	7,25	3,89	6,86
Usia 20-24	7,61	7,44	7,53	4,10	7,18
Usia 25-29	7,30	7,20	7,58	10,77	7,57
Usia 30-34	7,14	7,07	7,21	5,56	7,30
Usia 35-39	6,60	6,57	6,83	6,69	6,98
Usia 40-44	6,64	6,61	6,45	7,95	6,44
Usia 45-49	6,73	6,76	6,49	5,41	6,34
Usia 50-54	7,09	7,12	6,64	6,68	6,28
Usia 55-59	6,60	6,71	6,64	7,67	6,51
Usia 60-64	5,66	5,78	5,81	6,98	6,01
Usia 65-69	4,28	4,42	4,62	5,60	4,98
Usia 70-74	2,67	2,83	3,04	4,93	3,58
Usia 75+	3,67	3,85	3,50	7,41	3,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo, 2025

Struktur penduduk Kabupaten Purworejo selama periode 2021-2025 menunjukkan komposisi usia yang relatif merata, dengan dominasi penduduk pada usia produktif (15-64 tahun). Hal ini mengindikasikan bahwa Purworejo berada pada fase bonus demografi, meskipun mulai diikuti peningkatan penduduk usia lanjut. Kelompok usia 0-14 tahun (usia belum produktif) menunjukkan persentase relatif stabil di kisaran 19-21% setiap tahun, kelompok usia 0-4 tahun cenderung meningkat hingga 2024-2025. Usia 5-14 tahun mengalami fluktuasi, terutama penurunan tajam pada tahun 2024. kondisi ini menunjukkan bahwa angka kelahiran relatif stabil. Namun terdapat kemungkinan adanya dinamika migrasi pada tahun tertentu (khususnya 2024). Kelompok usia produktif merupakan kelompok terbesar dalam struktur penduduk Kabupaten Purworejo, mendominasi lebih dari 65% total penduduk, kelompok usia 20-34 tahun memiliki proporsi tinggi, terutama usia 25-29 tahun mencapai 10,77% pada tahun 2024 (tertinggi sepanjang periode), hal ini menunjukkan potensi besar tenaga kerja dan ekonomi daerah. Kondisi menjadi peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Penyediaan lapangan kerja, pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan merupakan tantangan yang harus tersedia. Persentase penduduk usia lanjut (65+) menunjukkan tren meningkat, terutama pada tahun 2024. Tahun 2025 sedikit menurun namun tetap lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. hal ini mengindikasikan proses penuaan penduduk (*aging population*) mulai terlihat dengan kata lain adanya peningkatan harapan hidup.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, struktur penduduk Kabupaten Purworejo juga dapat dianalisis melalui piramida penduduk. Piramida penduduk menggambarkan distribusi jumlah penduduk menurut kelompok umur serta perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam setiap kelompok usia.

Gambaran piramida penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2025 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.13. Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo, 2025

Komposisi penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif (15–64 tahun), terutama pada kelompok umur 20–24 tahun, 25–29 tahun, dan 30–34 tahun, yang memiliki proporsi cukup besar dibandingkan kelompok umur lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Purworejo berada pada fase yang potensial untuk memperoleh bonus demografi, yaitu ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif.

Keberadaan penduduk usia produktif yang besar merupakan peluang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan pembangunan sumber daya manusia. Namun demikian, kondisi ini juga menuntut peningkatan kapasitas daerah dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

Pada kelompok umur 0–14 tahun, jumlah penduduk masih relatif besar yang menunjukkan keberlanjutan regenerasi penduduk. Hal ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan anak, serta pemenuhan gizi dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang. Sementara itu, pada kelompok umur 65 tahun ke atas terlihat adanya proporsi penduduk lanjut usia meskipun masih relatif lebih kecil dibandingkan kelompok usia produktif. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan penuaan penduduk (*ageing population*) yang secara bertahap perlu

diantisipasi melalui penguatan layanan kesehatan, jaminan sosial, serta kebijakan perlindungan bagi penduduk lanjut usia.

Dengan demikian, struktur piramida penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2025 memberikan gambaran bahwa daerah memiliki peluang memanfaatkan bonus demografi, namun pada saat yang sama perlu mempersiapkan kebijakan pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja, serta mengantisipasi dinamika kependudukan di masa mendatang.

c. Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Distribusi Penduduk Kabupaten Purworejo

No	Kecamatan	Luas	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025
			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)	Jumlah Jiwa	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1.	Grabag	67,8	727	49.727	765	50.573	778	51.175	755	51.772	764
2.	Ngombol	59,33	590	35.277	638	35.826	648	36.202	610	36.572	616
3.	Purwodadi	56,15	737	41.652	771	42.291	783	42.725	761	43.153	769
4.	Bagelen	63,44	481	30.541	478	30.829	483	30.965	488	31.093	490
5.	Kaligesing	78,33	406	31.955	427	32.339	432	32.564	416	32.782	419
6.	Purworejo	53,25	1.598	85.541	1.622	85.483	1.621	85.595	1.607	85.688	1609
7.	Banyuurip	47,78	907	43.464	964	43.951	975	44.221	926	44.482	931
8.	Bayan	44,66	1.155	51.923	1.202	52.699	1.220	53.220	1192	53.732	1203
9.	Kutoarjo	39,2	1.585	62.249	1.669	62.866	1.686	63.172	1.612	63.463	1619
10.	Butuh	47,21	892	42.248	916	42.728	937	42.998	911	43.259	916
11.	Pituruh	89,01	579	51.823	669	52.587	679	53.095	597	53.594	602
12.	Kemiri	103,15	569	59.247	643	60.272	654	61.008	591	61.737	599
13.	Bruno	105,68	499	53.395	492	54.551	503	55.454	525	56.357	533
14.	Gebang	70,51	617	43.697	608	44.220	615	44.525	631	44.821	636
15.	Loano	53,51	714	38.391	715	38.891	724	39.201	733	39.503	738
16.	Bener	102,44	552	57.127	607	58.159	618	58.913	575	59.662	582

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab Purworejo, 2021-2025

Selama periode 2021–2025, kepadatan penduduk Kabupaten Purworejo menunjukkan pola yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, seiring bertambahnya jumlah penduduk dihampir seluruh kecamatan. Namun demikian, tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan menunjukkan disparitas yang cukup tinggi, dipengaruhi oleh perbedaan luas wilayah, fungsi kawasan, dan tingkat aktivitas ekonomi.

Kecamatan Kutoarjo merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, mengeser Kecamatan Purworejo sejak tahun 2022. Pada tahun 2025 tingkat kepadatan Kecamatan Kutoarjo yakni 1.619 jiwa/km², hal ini karena Kecamatan Kutoarjo sebagai pusat perdagangan, transportasi dan permukiman perkotaan. Kecamatan Purworejo memiliki tingkat kepadatan 1.609 jiwa/km², berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan layanan.

Kecamatan Bayan dan Banyuurip kepadatannya di atas 900 jiwa/ km², mencerminkan kawasan penyangga perkotaan dan mengalami peningkatan kepadatan seiring dengan perkembangan permukiman dan aktivitas ekonomi. Kecamatan dengan kepadatan sedang terdapat di Kecamatan Grabag, Purwodadi, Loano, Butuh, Gebang, Ngombol dan Pituruh, memiliki kepadatan penduduk pada kisaran 600-800 jiwa/ km², dengan ciri utama pertumbuhan kepadatan relatif bertahan, berfungsi sebagai wilayah transisi antara perkotaan dan perdesaan, potensial untuk pengembangan permukiman baru dan UMKM berbasis lokal. Kecamatan dengan kepadatan rendah antara lain Kaligesing, Bagelen, Bruno, Kemiri dan Bener dengan kepadatan dibawah 600 jiwa/ km² dengan ciri luas wilayah relatif besar, kondisi geografis berbukit/pegunungan, pola permukiman tersebar. wilayah ini berpotensi untuk pengembangan pertanian, kehutanan dan ekowisata.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

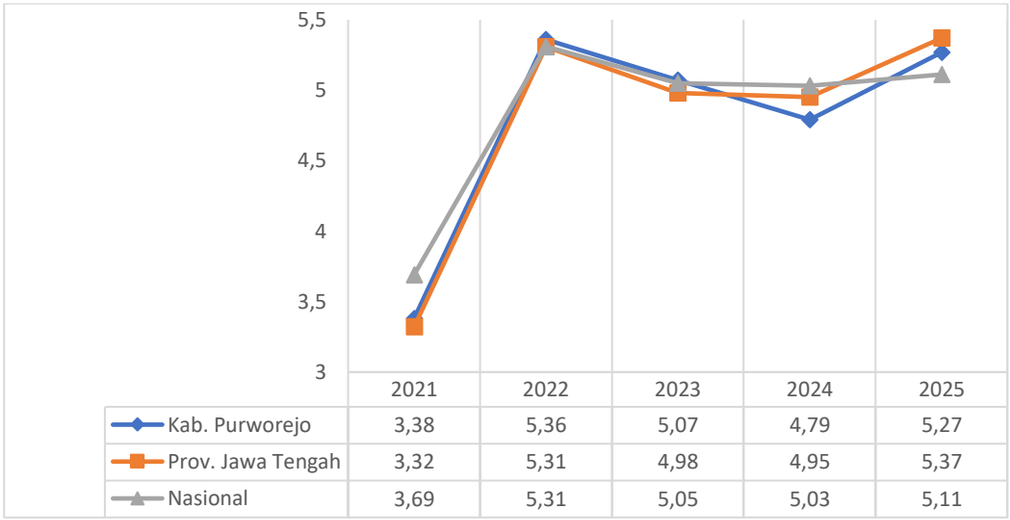
Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan mewujudkan pembangunan daerah yang mandiri secara perekonomian, merata, dan berkelanjutan. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya, dan olahraga.

2.1.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi secara umum dideskripsikan melalui pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kemiskinan. Ketiga variabel ini termasuk indikator makro yang tertuang dalam dokumen perencanaan Kabupaten Purworejo.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2021-2025), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo selalu berada di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Namun di tahun 2024, Kabupaten Purworejo mengalami kontraksi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79% berada di bawah Provinsi Jawa Tengah (4,95%) dan Indonesia (5,03%). Angka ini menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2023 dengan selisih sebesar 0,28% namun kembali meningkat pada tahun 2025. Rincian perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 dapat diamati pada grafik berikut.



Gambar 2.14. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2020 – 2024 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Analisis PDRB dapat menjadi pertimbangan dalam kebijakan perencanaan daerah serta evaluasi hasil pembangunan. PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Purworejo pada tahun 2021–2025 tertinggi terdapat di lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 2.978,76 miliar rupiah pada tahun 2025 disusul Lapangan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2.927,08 miliar rupiah. Sedangkan capaian terendah pada tahun 2024 terdapat pada Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 10,88 miliar rupiah. Lebih lanjut, kondisi ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.15. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.764,46	2.835,78	2.909,19	2.906,43	2.927,08
B	Pertambangan dan Penggalian	99,73	102,10	101,55	105,13	106,54
C	Industri Pengolahan	2.476,35	2.562,41	2.693,35	2.825,18	2.978,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,14	14,41	15,15	16,15	16,58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,76	10,25	10,34	10,48	10,88
F	Konstruksi	1.245,16	1.293,72	1.360,92	1.481,36	1.599,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.870,04	1.917,79	2.000,73	2.069,70	2.176,91
H	Transportasi dan Pergudangan	619,78	971,94	1.051,91	1.137,35	1.183,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	311,02	350,80	385,05	410,53	456,33
J	Informasi dan Komunikasi	1.200,28	1.212,34	1.313,42	1.415,57	1.554,68
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	462,38	470,57	481,87	503,15	518,22
L	Real Estate	310,86	325,16	343,45	362,17	383,39
M,N	Jasa Perusahaan	40,66	42,48	44,37	47,25	51,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	494,85	498,89	521,22	532,59	545,85

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
P	Jasa Pendidikan	1.080,61	1.090,61	1.150,97	1.249,41	1.349,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	248,83	251,62	264,42	284,08	298,61
R,S, T,U	Jasa lainnya	325,56	349,70	377,75	396,48	425,94
Produk Domestik Regional Bruto		**13.573,47**	**14.300,56**	**15.025,64**	**15.753,02**	**16.583,69**

*Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2026

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahunnya. Berbeda dengan perhitungan Atas Dasar Harga Konstan, lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi lapangan usaha tertinggi tahun 2025 atas dasar harga berlaku, sebesar 5.357,40 miliar rupiah disusul lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 5.309,01 miliar rupiah. Di Kabupaten Purworejo selama tahun 2021-2025, lapangan usaha yang menyumbang PDRB atas dasar harga berlaku terendah ialah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang yaitu sebesar 14,87 miliar rupiah. Hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.16. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo (miliar rupiah)

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.359,33	4.650,88	5.008,17	5.197,94	5.357,40
B	Pertambangan dan Penggalian	163,15	172,99	176,86	183,09	189,08
C	Industri Pengolahan	3.881,47	4.190,37	4.593,66	4.977,69	5.309,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,37	16,94	18,19	19,59	20,19
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,95	12,70	12,93	13,80	14,87
F	Konstruksi	1.843,62	2.011,68	2.177,71	2.399,34	2.617,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.461,86	2.623,30	2.832,15	2.983,20	3.199,35
H	Transportasi dan Pergudangan	788,02	1.307,36	1.531,17	1.676,21	1.764,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	412,51	472,21	523,85	569,59	643,37
J	Informasi dan Komunikasi	1.236,34	1.248,88	1.353,97	1.461,04	1.608,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	723,07	785,59	822,59	870,50	912,69
L	Real Estate	389,31	412,03	437,25	462,36	493,07
M,N	Jasa Perusahaan	60,35	65,11	70,25	76,29	84,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	710,02	738,18	786,97	816,45	844,29
P	Jasa Pendidikan	1.761,87	1.804,99	1.927,81	2.131,14	2.349,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	357,97	365,62	391,47	426,98	457,02
R,S, T,U	Jasa lainnya	426,53	473,71	522,67	558,63	618,38
Produk Domestik Regional Bruto		**19.602,72**	**21.352,54**	**23.187,67**	**24.823,84**	**26.483,56**

*Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2026

Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum memiliki laju pertumbuhan tertinggi (Atas Dasar Harga Konstan 2010), yaitu sebesar

11,16% pada tahun 2025. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai sektor basis di Kabupaten Purworejo justru laju pertumbuhannya paling lambat dibanding sektor lain, yaitu sebesar 0,71% di tahun 2025, meskipun sudah mengalami perbaikan dibanding tahun 2024 yang minus 0,1%. Lebih lanjut, hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo (%)

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**0,28**	**2,58**	**2,59**	**-0,10**	**0,71**
B	Pertambangan dan Penggalian	5,64	2,38	-0,54	3,53	1,34
C	Industri Pengolahan	3,68	3,48	5,11	4,89	5,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,59	9,65	5,14	6,60	2,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,30	4,99	0,88	1,35	3,82
F	Konstruksi	8,74	3,90	5,19	8,85	7,97
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,56	2,55	4,32	3,45	5,18
H	Transportasi dan Pergudangan	3,13	56,82	8,23	8,12	4,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,02	12,79	9,76	6,62	11,16
J	Informasi dan Komunikasi	5,97	1,01	8,34	7,78	9,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,65	1,77	2,40	4,42	3,00
L	Real Estate	2,36	4,60	5,62	5,45	5,86
M,N	Jasa Perusahaan	2,52	4,47	4,45	6,49	8,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,47	0,82	4,48	2,18	2,49
P	Jasa Pendidikan	0,10	0,92	5,53	8,55	8,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,21	1,12	5,09	7,44	5,11
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,74	7,41	8,02	4,96	7,43
Produk Domestik Regional Bruto		**3,31**	**5,36**	**5,07**	**4,84**	**5,27**

*Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2026

Terdapat tiga lapangan usaha yang pertumbuhannya ditargetkan, yaitu PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan sektor Industri Pengolahan. Dalam kurun lima tahun terakhir, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sempat mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan 2023 dengan laju pertumbuhan sebesar 2,58% dan 2,59%, namun mengalami penurunan menjadi -0,1% pada tahun 2024, dan kemudian membaik pada tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 0,71%. Sejalan dengan hal tersebut, dua sektor lain yang diunggulkan, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan sektor Industri Pengolahan juga turut mengalami penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2024, dan kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2025, yaitu sebesar 5,44 untuk sektor Industri Pengolahan, serta 5,18 untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Dilihat dari distribusinya, lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang menyumbang PDRB (atas dasar harga berlaku) paling rendah (0,06%) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha ini tidak dapat

menjadi sektor unggulan untuk dikembangkan di Kabupaten Purworejo. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.18. Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purworejo (%)

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	**22,24**	**21,78**	**21,60**	**20,94**	**20,23**
B	Pertambangan dan Penggalian	0,83	0,81	0,76	0,74	0,71
C	Industri Pengolahan	19,80	19,63	19,81	20,05	20,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	9,40	9,42	9,39	9,67	9,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,56	12,29	12,21	12,02	12,08
H	Transportasi dan Pergudangan	4,02	6,12	6,60	6,75	6,66
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,10	2,26	2,26	2,29	2,43
J	Informasi dan Komunikasi	6,31	5,85	5,84	5,89	6,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,69	3,68	3,55	3,51	3,45
L	Real Estate	1,99	1,93	1,89	1,86	1,86
M,N	Jasa Perusahaan	0,31	0,30	0,30	0,31	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,62	3,46	3,39	3,29	3,19
P	Jasa Pendidikan	8,99	8,45	8,31	8,59	8,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,83	1,71	1,69	1,72	1,73
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,18	2,22	2,25	2,25	2,33
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2026

Perkembangan perekonomian Kabupaten Purworejo terus mengalami perubahan seiring perkembangan aktifitas perekonomian wilayah dan regional yang mempengaruhinya. Hal ini terlihat dari kinerja perekonomian Kabupaten Purworejo selama periode tahun 2020- 2024. Perkembangan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADH Berlaku) dan atas dasar harga konstan (ADH Konstan), serta tingkat pertumbuhan pada total PDRB.

Tabel 2.19. PDRB ADHB menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	15.133,40	16.593,37	18.282,49	19.594,08	20.794,26
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	395,55	435,73	474,44	549,72	575,41
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.951,49	1.971,01	2.082,67	2.139,49	2.257,66
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.275,30	5.633,87	5.915,01	6.405,52	6.898,14
E	Perubahan Inventori	223,35	284,56	331,7	250,67	261,83
F	Ekspor Barang dan Jasa	-3.376,37	-3.569,99	-3.898,64	-4.115,54	-4.303,74
Produk Domestik Regional Bruto		**19.602,72**	**21.349,54**	**23.187,67**	**24.823,84**	**26.483,56**

*Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

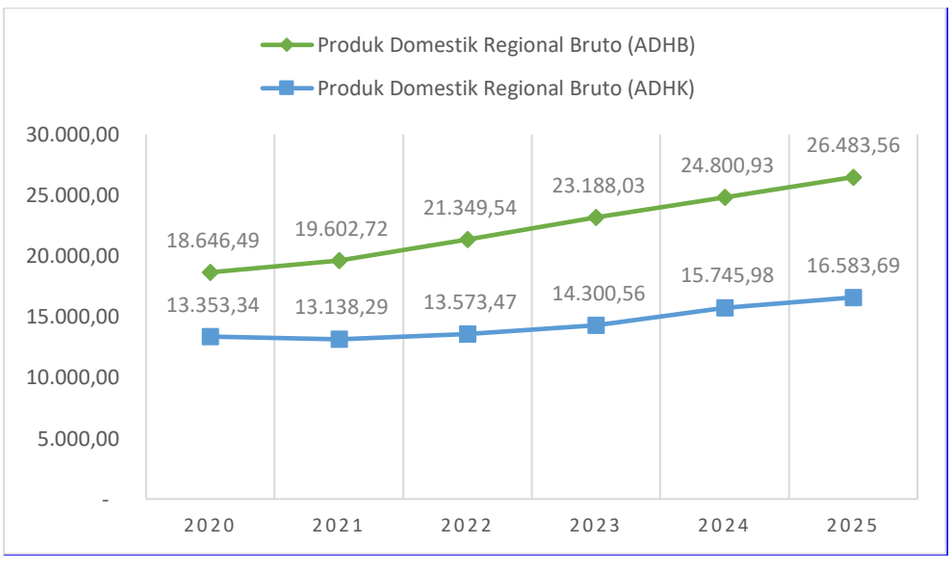
Sejak 2021 agregasi ekonomi Purworejo telah menembus level di atas 15 triliun rupiah. Pada tahun 2025, nilai ekonomi Purworejo mencapai 26,48 triliun rupiah yang sebagian besar digerakkan oleh Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebagaimana dapat diamati pada tabel di atas.

Tabel 2.20. PDRB ADHK 2010 menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purworejo (miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10.280,91	10.837,59	11.484,18	12.045,36	12.594,59
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	246,87	258,61	273,25	309,01	317,38
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.247,10	1.257,70	1.288,86	1.302,92	1.356,08
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.498,22	3.625,65	3.771,10	3.982,20	4.238,99
E	Perubahan Inventori	96,74	120,73	128,53	94,28	95,78
F	Ekspor Barang dan Jasa	-1.796,37	-1.799,72	-1.920,28	-1.980,75	-2.019,13
PDRB		**13.138,29**	**13.573,47**	**15.025,64**	**15.753,02**	**16.583,69**

*Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2026

Kondisi perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut jenis pengeluaran di Kabupaten Purworejo sama dengan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Meskipun demikian, PDRB ADHK Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 masih berada pada 16,58 triliun rupiah. Hal ini dapat diamati pada tabel di atas. Kemudian, perbandingan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku menurut jenis pengeluaran dapat diamati pada gambar berikut.



Gambar 2.15. Perkembangan PDRB ADHK 2010 dan ADHB menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Purworejo (triliun rupiah)
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2020-2026

Masih mengenai PDRB Pengeluaran, secara struktur ekonomi peranan Konsumsi Rumah Tangga menjadi yang terbesar dengan persentase sebesar 78,52% pada tahun 2025. Kontribusi terbesar kedua ditempati oleh

Pembentukan Modal Tetap Bruto yang cenderung stabil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dengan capaian terakhir pada tahun 2025 adalah sebesar 26,05% dari total seluruh PDRB. Secara lebih detail, hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.21. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Purworejo menurut Pengeluaran Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 (%)

Jenis Pengeluaran		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	77,20	77,72	78,85	78,93	78,52
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,02	2,04	2,05	2,21	2,17
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,96	9,23	8,98	8,62	8,52
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,91	26,39	25,51	25,80	26,05
E	Perubahan Inventori	1,14	1,33	1,43	1,01	0,99
F	Ekspor Barang dan Jasa	-17,22	-16,72	-16,81	-16,58	-16,25
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

*Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Selaras dengan kondisi perekonoiman Kabupaten Purworejo secara umum, laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 mengalami penurunan pada empat komponen. Dalam kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi komponen yang paling mengalami dampak, yaitu melambat pada angka -6,71. Kondisi pasca Covid kembali membaik pada tahun 2022 namun kembali sedikit terkontraksi pada tahun 2023 dan 2024. Secara umum kondisi pada tahun 2025 kembali membaik, meskipun pada beberapa jenis mengalami penurunan laju. Lebih lanjut hal ini dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.22. Laju Pertumbuhan PDRB Purworejo ADHK 2010 menurut Komponen Pengeluaran (%)

Jenis Pengeluaran		2021	2022	2023	2024*	2025**
1	*2*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,49	5,41	5,97	4,89	4,56
B	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,23	4,75	5,66	13,09	2,71
C	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,72	0,85	2,48	1,09	4,08
D	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,28	3,64	4,01	5,60	6,45
E	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
F	Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Produk Domestik Regional Bruto		**3,31**	**5,36**	**5,07**	**4,84**	**5,27**

*Keterangan: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2020-2026

b. Tingkat Kemiskinan

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk

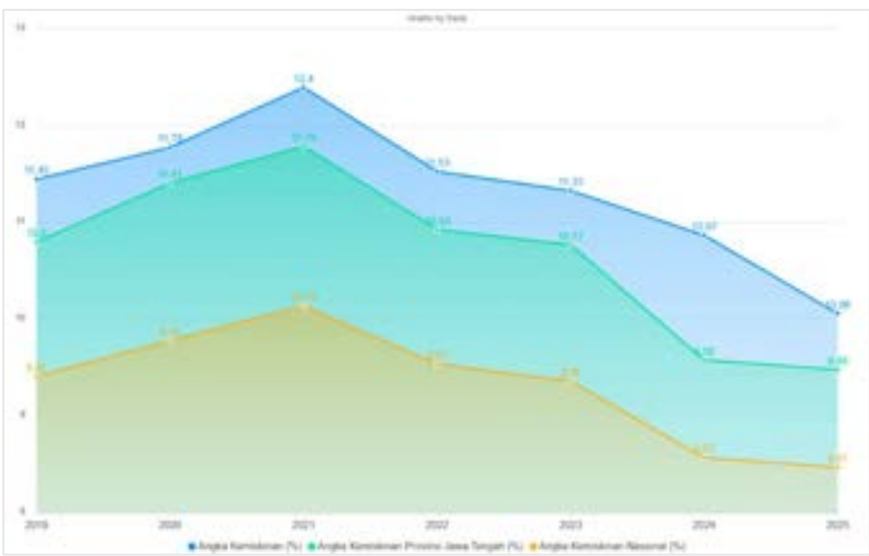
perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis kemiskinan Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan kabupaten di sekitarnya dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.23. Garis Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia

Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Kab. Purworejo	376.127	393.731	427.622	459.253	496.812
Kab. Kebumen	390.599	416.004	451.678	471.824	502.841
Kab. Wonosobo	373.474	399.180	425.105	456.351	486.105
Kab. Magelang	353.608	377.497	411.129	431.289	454.591
Kab. Kulon Progo	360.202	381.666	416.870	438.007	452.717
Prov. Jawa Tengah	409.193	438.833	477.580	507.001	537.812
Indonesia	486.168	535.547	550.458	595.242	609.160

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, Kabupaten Purworejo memiliki garis kemiskinan relatif lebih tinggi, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia. Tingkat kemiskinan menggambarkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Baik di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, maupun Indonesia. Hingga 2021, kemiskinan cenderung mengalami peningkatan sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19. Namun kondisi ini telah berhasil diturunkan pada tahun 2022 dan terus menurun hingga mencapai kondisi terendah pada tahun 2025 yaitu sebesar 10,06. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia selama kurun waktu 2021-2025 ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

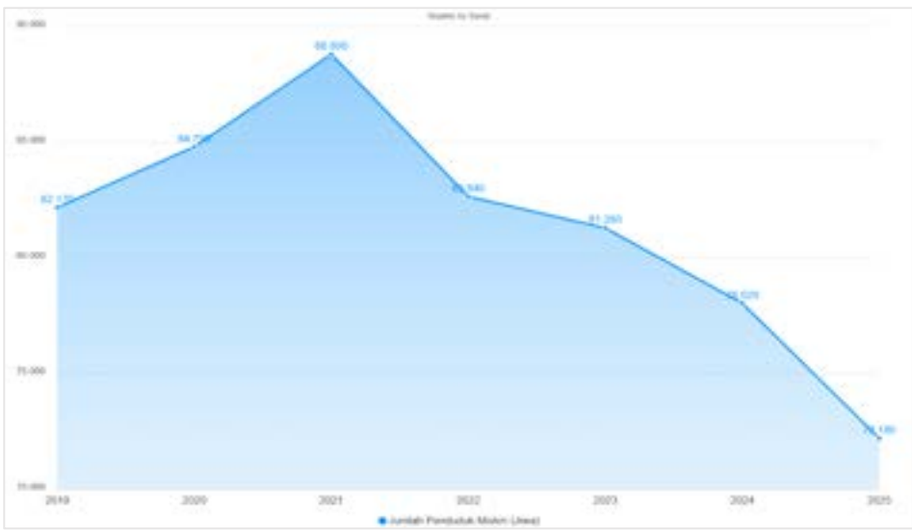


Gambar 2.16. Angka Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2021 – 2025

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021-2025

Secara umum, angka kemiskinan Purworejo dalam lima tahun terakhir selalu lebih tinggi dari kondisi di tingkat provinsi dan nasional. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 1.2.1* dan 10.1.1 (a), tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo masih berada di atas target nasional, yaitu menurun menjadi 7-8%. Masih besarnya gap antara tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo dan nasional tentunya membuat kemiskinan menjadi sebuah isu besar yang perlu diselesaikan bersama serta membutuhkan peran berbagai pihak untuk saling bersinergi dalam pengentasannya.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo, mulai tahun 2021 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk miskin pada tahun 2021 yang mengalami terus mengalami penurunan hingga tahun 2025. Tingkat kemiskinan Kabupaten Purworejo menurun sebesar 0,46 poin, dari 11,33 persen pada tahun 2023 menjadi 10,87 persen pada tahun 2024. Tingkat kemiskinan Kabupaten Purworejo menurun sebesar 0,81 persen poin, dari 10,87 persen pada tahun 2024 menjadi 10,06 persen pada tahun 2025.



Gambar 2.17. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Purworejo
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan pemerintah harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Purworejo dan daerah di sekitarnya, serta Jawa Tengah, dan Indonesia dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.24. Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2025

Kedalaman Kemiskinan (%)	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kab. Purworejo	1,36	1,31	1,78	1,08	1,54
Kab. Kebumen	3,24	3,41	2,89	2,35	1,95
Kab. Wonosobo	2,75	3,18	2,60	2,41	2,25

Kedalaman Kemiskinan (%)	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kab. Magelang	1,63	1,66	1,73	1,23	1,04
Kab. Kulon Progo	3,01	2,32	2,54	2,48	1,81
Prov. Jawa Tengah	1,91	1,77	1,75	1,64	1,56
Indonesia	1,71	1,56	1,53	1,36	1,37

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

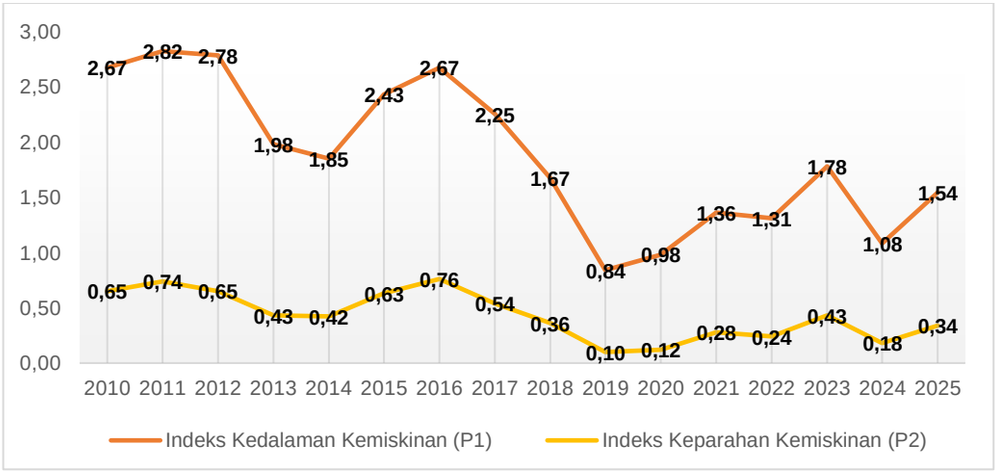
Indeks Kedalaman Kemiskinan (*P*1) pada Tahun 2025 adalah sebesar 1,54, naik 0,46 poin dibandingkan Tahun 2024 yang bernilai sebesar 1,08. Peningkatan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Purworejo semakin mendekati Garis Kemiskinan.

Tabel 2.25. Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2020-2025

Keparahan Kemiskinan (%)	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kab. Purworejo	0,28	0,24	0,43	0,18	0,34
Kab. Kebumen	0,88	1,02	0,75	0,48	0,40
Kab. Wonosobo	0,65	0,86	0,63	0,60	0,54
Kab. Magelang	0,35	0,41	0,41	0,23	0,17
Kab. Kulon Progo	0,75	0,56	0,61	0,62	0,34
Prov. Jawa Tengah	0,45	0,42	0,42	0,37	0,35
Indonesia	0,42	0,38	0,38	0,32	0,32

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Hasil serupa juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (*P*2) di Kabupaten Purworejo yang mengalami peningkatan sebesar 0,16 poin dari pada tahun 2025. Artinya, ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi di tahun terakhir ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Purworejo, kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan serta ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin cenderung lebih rendah daripada daerah di sekitarnya, namun masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah serta di tingkat nasional. Tren kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan Kabupaten Purworejo tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 disajikan pada gambar berikut.

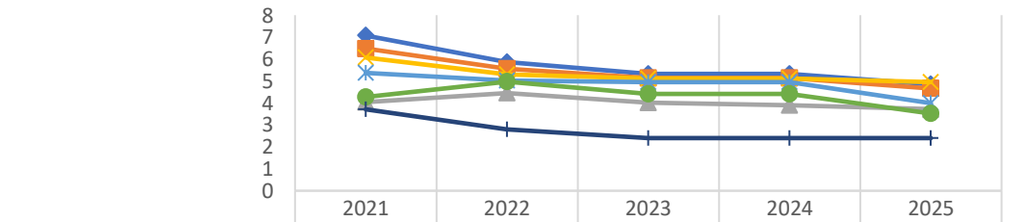


Gambar 2.18. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Purworejo Tahun 2010 – 2025

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencerminkan persentase angkatan kerja yang tidak terserap dalam pasar kerja. TPT di Kabupaten Purworejo relatif lebih baik jika dibandingkan TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2021-2025. Begitu pula jika dibandingkan kabupaten sekitarnya, TPT Kabupaten Purworejo berada pada posisi yang relatif lebih baik. Dari tahun 2021-2025, TPT Kabupaten Purworejo relatif menurun sebesar 0,17 persen.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	7,07	5,86	5,32	5,32	4,85
Provinsi Jawa Tengah	6,48	5,57	5,13	5,13	4,66
Kabupaten Purworejo	4,04	4,45	4,02	3,89	3,72
Kabupaten Kebumen	6,07	5,29	5,11	5,11	4,95
Kabupaten Wonosobo	5,37	5,01	4,95	4,95	3,99
Kabupaten Magelang	4,27	4,97	4,42	4,42	3,52
Kabupaten Kulon Progo	3,71	2,8	2,4	2,4	2,4

Gambar 2.19. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2021-2025

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Peningkatan TPT di Kabupaten Purworejo disebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja (meningkat sebesar 1,26 persen per Agustus 2025) (BPS Kabupaten Purworejo, 2025), yang tidak diimbangi dengan perluasan lapangan kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat pendidikannya, TPT pada tingkat pendidikan menengah ke atas dan pendidikan tinggi lebih tinggi dibandingkan TPT pada tingkat pendidikan SMP ke bawah. Disamping itu, berdasarkan kategorinya pengangguran di Kabupaten Purworejo didominasi oleh pengangguran yang Merasa Tidak Mungkin Mendapat Pekerjaan/ *Hopeless of Job*. Banyaknya pengangguran dengan tingkat pendidikan

menengah dan tinggi serta *hopeless of job* yang disebabkan *mismatch* atau ketidaksesuaian antara kualifikasi pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang ada. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mengatasi permasalahan pengangguran.

Di sisi lain penduduk bekerja didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah (sebesar 58,34 persen pada tahun 2023) yang merupakan *low skilled workers* dimana rentan terhadap otomatisasi di era reformasi teknologi. Selain itu, berdasarkan status pekerjaannya, penduduk bekerja di Kabupaten Purworejo didominasi oleh pekerja informal sebesar 70,07 persen. Sektor informal dapat menjadi salah satu solusi bagi pengurangan pengangguran di Kabupaten Purworejo karena mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi. Meskipun demikian pekerja pada sektor informal rentan terdampak goncangan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Purworejo diperlukan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun non formal serta peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

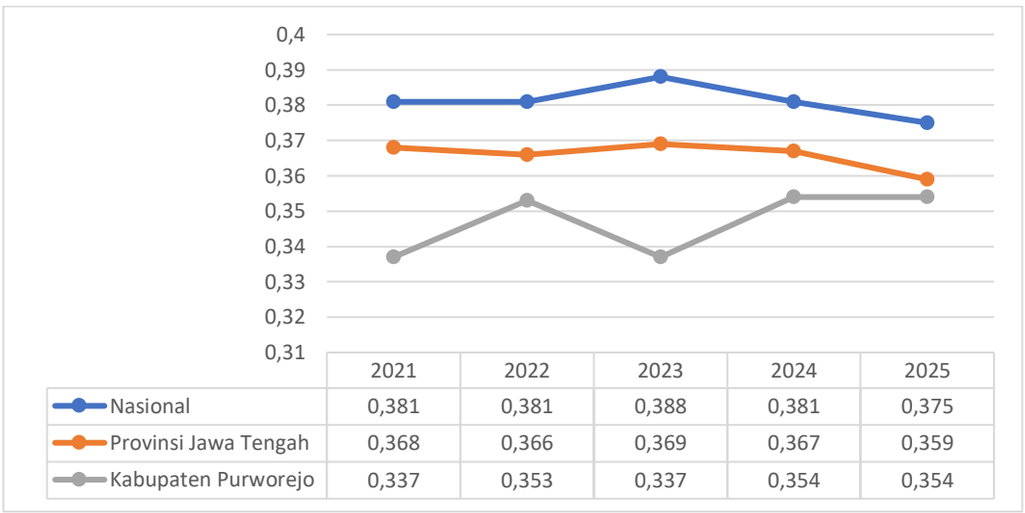
Sebagian besar penganggur terbuka di Purworejo berada dalam kelompok usia muda dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi (SMA/SMK, Diploma 3, dan Sarjana) tetapi belum mempunyai keterampilan khusus dan belum memiliki pengalaman kerja. Kondisi ini perlu dijembatani untuk menghubungkan dunia industri/usaha dengan dunia pendidikan, serta melakukan *link & match* berbasis *market driven* dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pengangguran dan upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam menurun namun penurunan tidak cukup signifikan. Berdasarkan data terakhir, upah minimum di Kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

d. Rasio Gini

Untuk melihat ketimpangan pendapatan penduduk, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Rasio Gini atau Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin tinggi, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah, atau mendekati pemerataan sempurna. BPS mengkategorikan Indeks Gini menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang (0,3 < Indeks Gini < 0,4) dan tinggi (Indeks Gini > 0,4).

Indeks Gini Kabupaten Purworejo pada tahun 2021-2025 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Selama periode tersebut, tercatat indeks gini tertinggi pada tahun 2024 sebesar 0,354 dan indeks gini terendah pada tahun 2021 dan 2023 sebesar 0,337. Nilai indeks gini Kabupaten Purworejo berada pada kisaran 0,337 hingga 0,354 dimana setiap tahunnya nilai indeks gini tersebut bergantian mengalami kenaikan dan penurunan.

Secara keseluruhan nilai indeks gini Kabupaten Purworejo terus berada pada kategori sedang. Selain itu, selama 5 tahun indeks gini Kabupaten Purworejo selalu berada di bawah indeks gini Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan di Kabupaten Purworejo lebih merata dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, namun tetap memperlukan perhatian dari pemerintah.



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	0,381	0,381	0,388	0,381	0,375
Provinsi Jawa Tengah	0,368	0,366	0,369	0,367	0,359
Kabupaten Purworejo	0,337	0,353	0,337	0,354	0,354

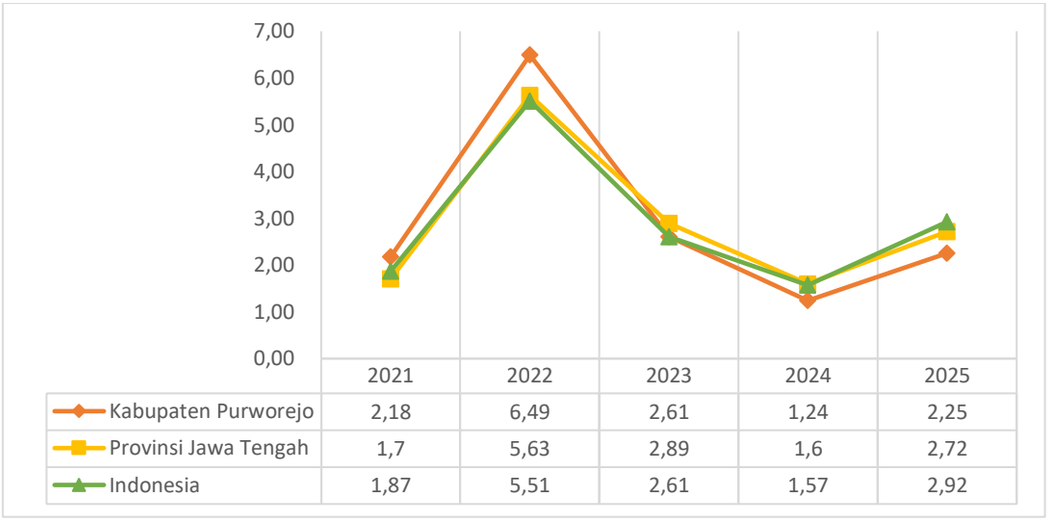
Gambar 2.20. Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

e. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi. Indikator ini menunjukkan tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu daerah, disebabkan oleh konsumsi masyarakat yang meningkat, likuiditas pasar berlebih yang memicu aksi konsumsi atau spekulasi, atau adanya hambatan dalam distribusi dan suplai barang. Dalam roda perekonomian salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah laju inflasi karena inflasi akan berimplikasi pada hampir semua elemen di dalam sistem ekonomi.

Pada tahun 2020, BPS tidak lagi menghitung tingkat inflasi di Kabupaten Purworejo. Perkembangan inflasi selanjutnya hanya dapat ditunjukkan di tingkat nasional, provinsi, dan kota-kota besar di Jawa Tengah. Purwokerto merupakan daerah rujukan yang paling dekat untuk menggambarkan kondisi inflasi di Kabupaten Purworejo. Pada gambar di bawah ini dapat diamati fluktuasi inflasi di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia dalam kurun waktu 2021 – 2025.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Purworejo	2,18	6,49	2,61	1,24	2,25
Provinsi Jawa Tengah	1,7	5,63	2,89	1,6	2,72
Indonesia	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92

Gambar 2.21. Inflasi Kabupaten Purworejo

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025 & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

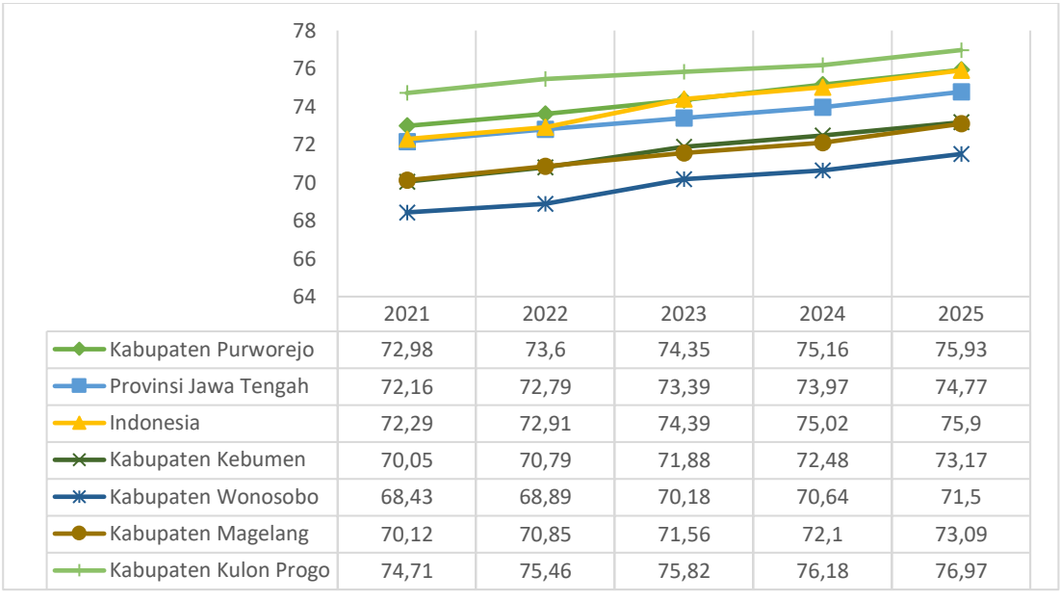
Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dengan capaian terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,24 dan meningkat tajam pada tahun 2022 sebesar 6,49 senada dengan capaian inflasi di level Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Tingkat inflasi pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu sebesar 1,01%. Kondisi peningkatan inflasi pada tahun 2022 secara umum disebabkan oleh tekanan harga global, gangguan *supply* pangan, dan kebijakan penyesuaian harga BBM. Kondisi ini juga disebabkan karena meningkatnya permintaan masyarakat dengan membaiknya perekonomian pasca pandemi Covid-19.

2.1.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan suatu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai. IPM mengukur 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk yaitu: umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Angka Harapan Hidup, tingkat pengetahuan yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup layak yang diukur melalui Pengeluaran Per Kapita.

IPM Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu tahun 2021-2025 cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun serta selalu berada di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam grafik berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Purworejo	72,98	73,6	74,35	75,16	75,93
Provinsi Jawa Tengah	72,16	72,79	73,39	73,97	74,77
Indonesia	72,29	72,91	74,39	75,02	75,9
Kabupaten Kebumen	70,05	70,79	71,88	72,48	73,17
Kabupaten Wonosobo	68,43	68,89	70,18	70,64	71,5
Kabupaten Magelang	70,12	70,85	71,56	72,1	73,09
Kabupaten Kulon Progo	74,71	75,46	75,82	76,18	76,97

Gambar 2.22. Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia serta Kabupaten Sekitar

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025, BPS Kabupaten Kulon Progo, 2025, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purworejo di tahun 2025 kembali meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat pada tahun 2025, IPM Kabupaten Purworejo sebesar 75,93. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Besaran ini menempatkan Kabupaten Purworejo sebagai penyandang status wilayah dengan pembangunan manusia dalam kelompok “tinggi”.

Dari tahun ke tahun, IPM Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan. Bahkan semenjak tahun 2014, IPM Kabupaten Purworejo telah masuk dalam kategori tinggi yaitu pada angka diatas 70. Pada periode 2024-2025, IPM Kabupaten Purworejo meningkat 0,82 persen. Peningkatan ini menunjukkan terjadi perkembangan di tahun 2024 dalam hal pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan pada periode ini lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2023-2024, yang hanya naik sebesar 0,49 persen.

Semakin naiknya angka IPM ini menunjukkan pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo semakin mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Seiring dengan kenaikan IPM, dimensi yang membentuknya semakin mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana dijabarkan sebagai berikut.

a) Angka Harapan Hidup

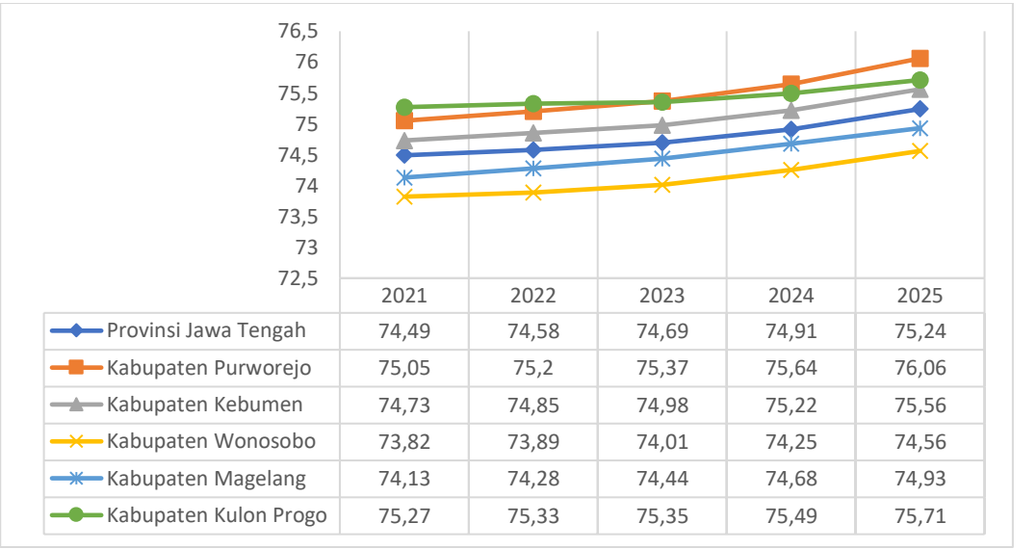
Kesehatan adalah hak dan investasi, dan semua warga masyarakat berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin, dengan demikian diperlukan sistem yang mengatur pelaksanaan upaya pemenuhan hak warga untuk tetap hidup sehat, dengan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini, pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Purworejo menunjukkan laju yang lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten sekitarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan AHH ini antara

lain masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta masalah gizi yang dialami oleh anak-anak. Selain itu, angka kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Penyakit Menular Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) juga masih tinggi, yang turut berkontribusi terhadap lambatnya peningkatan AHH.

Angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi mencerminkan perlunya peningkatan dalam layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk akses ke perawatan prenatal dan postnatal yang lebih baik. Masalah gizi pada anak-anak juga menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya yang lebih kuat untuk mengatasi kekurangan gizi dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tingginya angka kesakitan akibat PTM, seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi, serta Penyakit Menular Potensial KLB seperti tuberkulosis dan demam berdarah, menunjukkan perlunya peningkatan dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit. Ini termasuk kampanye kesehatan yang lebih efektif, peningkatan akses ke layanan kesehatan, dan program vaksinasi yang luas untuk mengurangi beban penyakit menular.

Derajat Kesehatan masyarakat ditandai dengan Angka Harapan Hidup, semakin tinggi Angka Harapan Hidup mencerminkan makin membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Tingginya kasus kematian Ibu, Bayi, Balita dan Masalah Gizi Balita (*Weightfaltering, Underweight, Wasting,* dan *Stunting*) serta Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) merupakan masalah yang sangat berpengaruh terhadap Angka Harapan Hidup. Selain hal tersebut kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan juga masih rendah di tandai dengan belum optimalnya pelaksanaan 5 (lima) Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Saat ini Kabupaten Purworedjo dihadapkan pada *Triple Burden*, yaitu penyakit menular yang jumlah kasus masih tinggi, penyakit tidak menular yang semakin meningkat prevalensinya serta penyakit yang dulunya sudah teratasi muncul kembali (*re-emerging infectious diseases*) atau munculnya penyakit baru (*new-emerging infectious diseases*). Tiga penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah TB, HIV/AIDS dan Malaria sedangkan penyakit tidak menular yang prevalensinya semakin meningkat adalah penyakit Deabetes Militus, Hipertensi, dan Gangguan Jiwa.



	2021	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	74,49	74,58	74,69	74,91	75,24
Kabupaten Purworejo	75,05	75,2	75,37	75,64	76,06
Kabupaten Kebumen	74,73	74,85	74,98	75,22	75,56
Kabupaten Wonosobo	73,82	73,89	74,01	74,25	74,56
Kabupaten Magelang	74,13	74,28	74,44	74,68	74,93
Kabupaten Kulon Progo	75,27	75,33	75,35	75,49	75,71

Gambar 2.23. Perkembangan AHH Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, Bapperida DIY, & BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

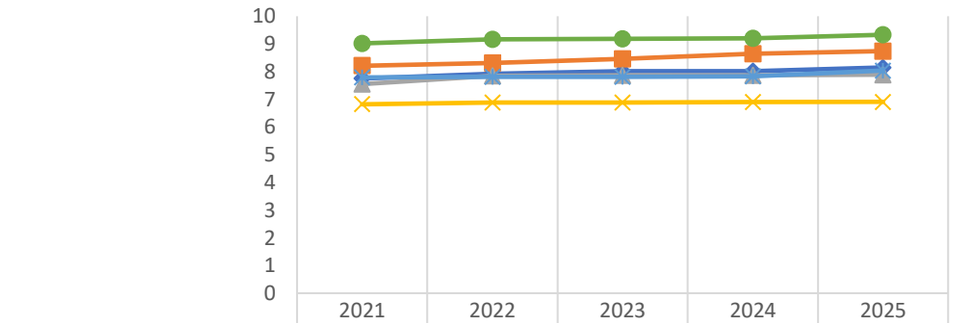
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, terlihat bahwa AHH di Kabupaten Purworejo mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten sekitarnya selama periode 2021 hingga 2025. Grafik tersebut menunjukkan bahwa AHH di Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 adalah 75,05 dan meningkat menjadi 76,06 pada tahun 2025. Meskipun ada peningkatan, laju pertumbuhan ini masih terbilang lambat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya pertumbuhan AHH di Kabupaten Purworejo termasuk tingginya angka kematian ibu dan bayi, masalah gizi pada anak-anak, serta tingginya angka kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Penyakit Menular Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB). Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, program gizi yang lebih efektif, dan upaya pencegahan serta pengendalian penyakit yang lebih baik.

Dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, diharapkan AHH di Kabupaten Purworejo dapat tumbuh lebih cepat dan sejalan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Kabupaten Purworejo dapat menikmati hidup yang lebih sehat dan sejahtera.

b) Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kondisi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 – 2025 dapat diamati pada gambar berikut.



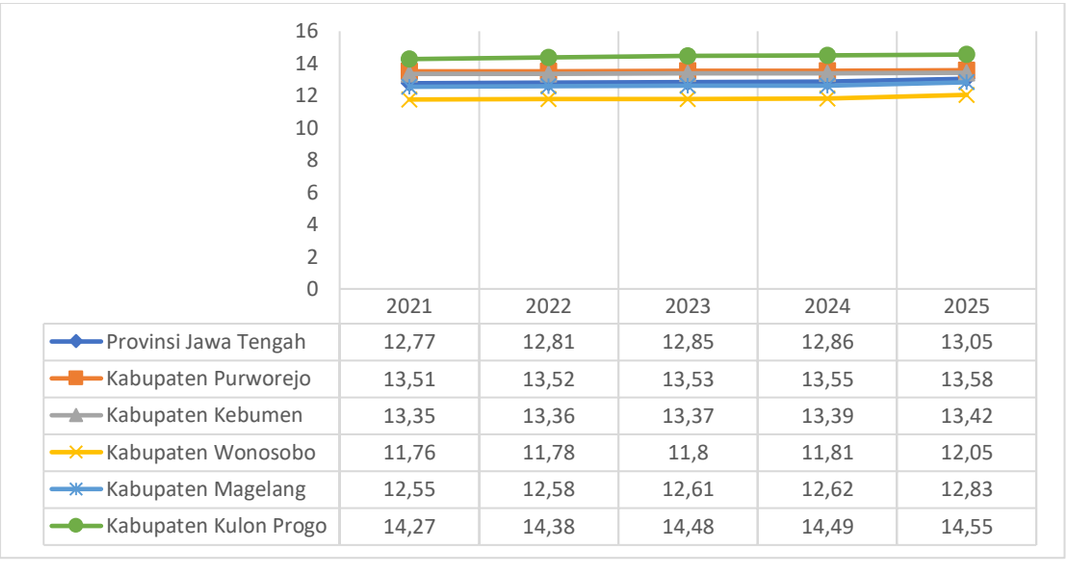
	2021	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	7,75	7,93	8,01	8,02	8,15
Kabupaten Purworejo	8,21	8,32	8,46	8,65	8,74
Kabupaten Kebumen	7,55	7,85	7,86	7,87	7,89
Kabupaten Wonosobo	6,82	6,88	6,89	6,9	6,91
Kabupaten Magelang	7,79	7,81	7,82	7,83	8,04
Kabupaten Kulon Progo	9,02	9,17	9,18	9,2	9,33

Gambar 2.24. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025

Sumber: BPS, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa RLS di Kabupaten Purworejo meningkat dari 8,21 tahun pada 2021 menjadi 8,74 tahun pada 2025. Meskipun ada peningkatan yang positif, RLS di Purworejo masih berada di bawah Kabupaten Kulon Progo dengan peningkatan yang lebih tinggi. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam meningkatkan lama sekolah di Purworejo, masih ada kebutuhan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk mencapai tingkat yang setara atau lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya. Selain itu, meskipun RLS telah mengalami peningkatan, angka ini masih di bawah target nasional yang ditetapkan oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 4.1.1.(g), yaitu rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun yang diharapkan meningkat menjadi 8,8 tahun.

Upaya peningkatan pendidikan ini dapat mencakup berbagai strategi seperti peningkatan fasilitas sekolah, pelatihan guru, serta program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu. Dengan demikian, diharapkan RLS di Kabupaten Purworejo dapat terus meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan daya saing masyarakat di wilayah tersebut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Provinsi Jawa Tengah	12,77	12,81	12,85	12,86	13,05
Kabupaten Purworejo	13,51	13,52	13,53	13,55	13,58
Kabupaten Kebumen	13,35	13,36	13,37	13,39	13,42
Kabupaten Wonosobo	11,76	11,78	11,8	11,81	12,05
Kabupaten Magelang	12,55	12,58	12,61	12,62	12,83
Kabupaten Kulon Progo	14,27	14,38	14,48	14,49	14,55

Gambar 2.25. Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021-2025

Sumber: BPS, 2026

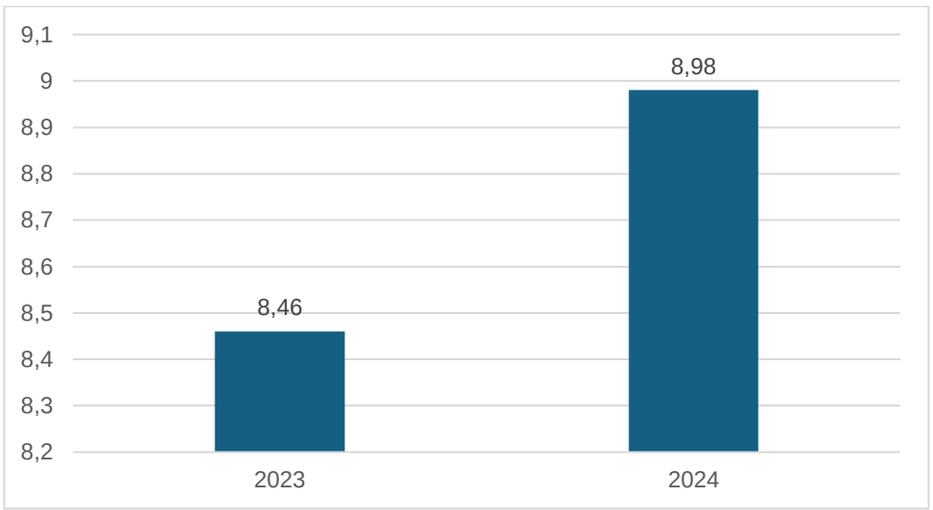
Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2025, RLS mencapai angka 13,58 tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan peningkatan yang relatif lambat. HLS di Kabupaten Purworejo diharapkan dapat menempuh pendidikan setidaknya hingga jenjang Diploma I atau Diploma III. Angka HLS yang tinggi mencerminkan optimisme dan potensi besar bagi generasi mendatang untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan daya saing ekonomi masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat yang akan membawa manfaat bagi individu yang terdidik serta mendorong pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.

Tren angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2021 hingga 2025. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, angka harapan lama sekolah di tahun 2025 tumbuh sebesar 0,07 persen dan pertumbuhan paling cepat dalam kurun waktu lima tahun terakhir adalah di tahun 2025 yang tumbuh sebesar 0.03 persen dibandingkan tahun 2024. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk Kabupaten Purworejo yang bersekolah dengan capaian kelas yang semakin tinggi. Di tahun 2025, Harapan Lama Sekolah telah mencapai 13,58 tahun, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau masuk ke perguruan tinggi minimal Diploma 2.

Sementara itu untuk angka rata-rata lama sekolah dalam periode tahun 2025 tumbuh sebesar 0,53 persen bila dibandingkan dengan tahun 2021 lalu dan pertumbuhan paling cepat terjadi di tahun 2024 yang tumbuh sebesar 0,19 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Purworejo yang lebih baik. Hingga tahun 2025, secara rata-rata,

penduduk Kabupaten Purworejo usia 25 tahun ke atas telah selesai mengenyam pendidikan kelas VIII (SMP kelas 2).

Selain pada penduduk berusia 25 tahun ke atas, perhitungan rata-rata lama sekolah juga dilakukan pada penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Purworejo. Berikut merupakan grafik rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Purworejo tahun 2023-2024.



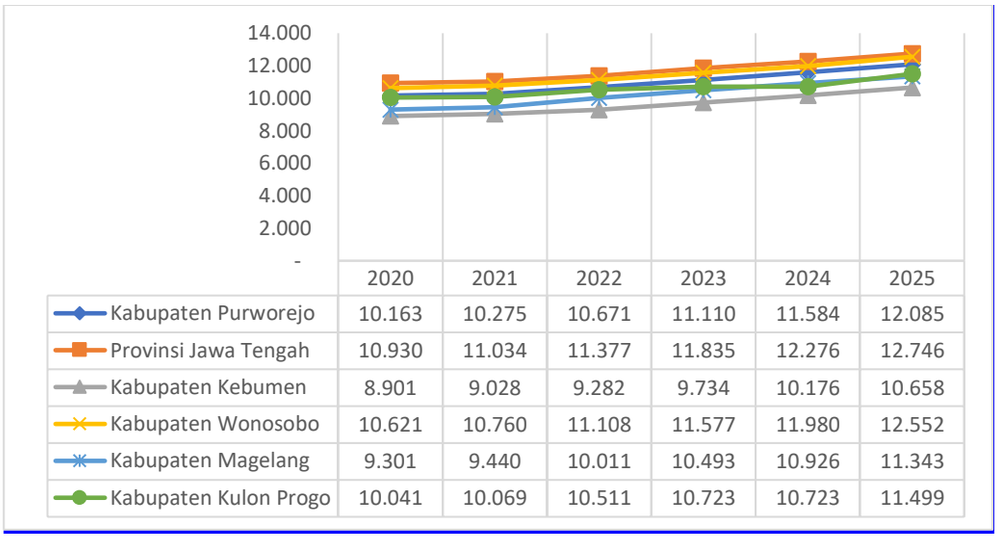
Gambar 2.26. Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2024

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa nilai Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan pada tahun 2023 ke tahun 2024, yakni dari 8,46 menjadi 8,98. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan semakin mudahnya akses pendidikan yang dijangkau masyarakat. Selain itu, apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata lama sekolah regular, nilai rata-rata lama sekolah pada penduduk usia 15 tahun ke atas hanya mengalami selisih yang tidak signifikan dengan nilai rata-rata lama sekolah reguler. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada kesenjangan akses pendidikan antara generasi muda yang sedang mengenyam pendidikan maupun dengan kelompok penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Purworejo.

c) Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran per kapita di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, serta kabupaten sekitar dapat diamati pada grafik berikut.



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Purworejo	10.163	10.275	10.671	11.110	11.584	12.085
Provinsi Jawa Tengah	10.930	11.034	11.377	11.835	12.276	12.746
Kabupaten Kebumen	8.901	9.028	9.282	9.734	10.176	10.658
Kabupaten Wonosobo	10.621	10.760	11.108	11.577	11.980	12.552
Kabupaten Magelang	9.301	9.440	10.011	10.493	10.926	11.343
Kabupaten Kulon Progo	10.041	10.069	10.511	10.723	10.723	11.499

Gambar 2.27. Pengeluaran Per Kapita Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya (ribu rupiah per orang per tahun) Tahun 2020-2025

Pengeluaran perkapita pertahun mewakili dimensi standar hidup layak pada pembangun IPM. Di tahun 2025, pengeluaran per kapita per tahun Kabupaten Purworejo sebesar 12,085 juta rupiah. Angka tersebut naik sebesar 0,501 juta rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk Kabupaten Purworejo sejak tahun 2020 sampai dengan 2025 semakin meningkat tiap tahunnya. Selama periode 2020-2025, pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sekitar Rp 1,92 juta atau 17,66 persen. Secara rata-rata selama periode tersebut terjadi peningkatan 4,08 persen per tahun. Pertumbuhan yang paling pesat terjadi di tahun 2024 dimana pada saat itu tercatat pertumbuhan pengeluaran per kapita sebesar 3,53 persen. Angka pengeluaran per kapita per tahun sebesar 12,085 juta rupiah jika diambil rata-rata per bulannya pada tahun 2025, seorang penduduk mengeluarkan biaya sekitar 1.145,158 ribu rupiah untuk makan minum dan keperluan lainnya.

Naiknya pengeluaran dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan semakin bertambahnya konsumsi yang dilakukan masyarakat. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan setiap penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat diartikan bahwa penduduk tersebut dapat menikmati lebih banyak barang dan jasa untuk menunjang kelangsungan hidupnya dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula sebaliknya, bila pengeluaran untuk konsumsi menurun, terdapat indikasi terjadi penurunan daya beli di masyarakat sehingga kesejahteraan mereka semakin berkurang. Melalui pendekatan pengeluaran inilah standar hidup atau kesejahteraan penduduk mampu diukur. Sebagai catatan pengeluaran perkapita di sini adalah pengeluaran per kapita dengan tahun dasar 2012 yang sudah disesuaikan antar daerah (pengeluaran per kapita disesuaikan) atau biasa dikenal sebagai *Purchasing Power Parity* (PPP).

b. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Selain melalui pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesejahteraan sosial juga dapat diketahui melalui analisis Indeks

Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG yang difokuskan pada faktor ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di berbagai level. Sedangkan IDG adalah ukuran yang menilai sejauh mana perempuan memiliki akses dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, termasuk dalam pengambilan keputusan. IDG mengukur kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian pembangunan di bidang-bidang tersebut. Semakin tinggi nilai IDG, semakin tinggi pula tingkat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tabel 2.26. IPG dan IDG Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,33	95,59	95,59	95,34	95,34*
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,09	71,13	71,13	70,77	70,77*

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2024

Pada tahun 2024, nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purworejo yaitu 95,34 atau mengalami sedikit penurunan dari nilai tahun 2023 yang mencapai 95,38. Begitu pula dengan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Purworejo yang menurun pada tahun 2024 yaitu 70,77 dibandingkan indeks pada tahun 2023 sebesar 71,13. Hal ini menunjukkan kesenjangan gender dalam pembangunan di Kabupaten Purworejo sudah semakin menurun dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Namun meskipun nilai IPG Kabupaten Purworejo semakin meningkat, nilai IPG masih di bawah 100, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian pembangunan laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan capaian pembangunan perempuan. Pencapaian hasil baik IPG menyisakan pekerjaan dan tugas yang tidak ringan, terutama yang terkait dengan isu disparitas pencapaian pembangunan manusia antargender.

Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaanya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain: 1) Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan responsif gender; 2) Rendahnya kesadaran desa untuk menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa; 3) Kurangnya edukasi dalam rangka pencegahan kekerasan pada perempuan; dan 4) Kurangnya perhatian terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan dalam perumusan kebijakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumusan permasalahan atau isu strategis terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Purworejo adalah masih rendahnya penerapan kebijakan responsif gender.

2.1.2.3. FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA

Seni budaya dan religiusitas memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Seni budaya sering kali berfungsi sebagai jembatan untuk mengekspresikan nilai-nilai spiritual, sementara religiusitas memberikan jiwa dan kedalaman moral pada sebuah karya seni maupun olahraga. Indeks Religiusitas Daerah disusun sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana kehidupan keagamaan masyarakat berjalan secara harmonis, mendalam, serta berdampak pada perilaku sosial sehari-hari. Indeks ini menggnakan lima dimensi utama, yaitu ideologis, ritualistik, intelektual, pengalaman, dan konsekuensial, yang dirumuskan dengan mengacu pada teori religiusitas serta disesuaikan dengan kondisi lokal Kabupaten Purworejo.

Dimensi Ideologis mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ajaran agama yang dianut. Dalam pengukuran, dimensi ini direpresentasikan melalui indikator persentase dukungan pemerintah terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap ajaran agama dan Jumlah penduduk yang percaya terhadap ajaran beragama. Dimensi Ritualistikmenggambarkan frekuensi pelaksanaan ibadah dan ritual keagamaan masyarakat. Hal ini diukur melalui persentase terselenggaranya berbagai kegiatan keagamaan di Kabupaten Purworejo yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dimensi Intelektual menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama. Indikator yang digunakan adalah persentase siswa yang mengikuti pendidikan agama, baik melalui jalur formal di sekolah maupun jalur nonformal seperti taman pendidikan Al-Quran atau kegiatan keagamaan lainnya. Dimensi Pengalaman berkaitan dengan pengalaman spiritual masyarakat, termasuk kondisi kejiwaan dan keterpaparan terhadap ajaran menyimpang. Indikator yang dipakai adalah persentase masyarakat yang terpapar aliran sesat atau radikalisme. Dimensi Konsekunsialmengukur dampak nyata agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga keharmonisan sosial. Indikator yang digunakan antara lain persentase konflik sosial berlatar agama yang terjadi dalam satu tahun dan mampu diselesaikan, persentase penduduk yang lahir dari pernikahan yang sah serta indeks zakat nasional.

Berdasarkan perhitungan, Indeks Religiusitas Kabupaten Purworejo Tahun 2024 menunjukkan nilai 71,25. Angka ini mencerminkan bahwa nilai-nilai keagamaan telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat dan memberikan pengaruh nyata terhadap pola pikir, sikap, serta perilaku sosial. Indeks ini sekaligus menjadiu modal sosial penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penguatan aspek sosial budaya dan peningkatan kerukunan masyarakat di Kabupaten Purworejo.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 4 (empat) fokus layanan, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja pada layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan berikut ini.

a. Bidang Urusan Pendidikan

Indeks Literasi/Numerisasi digunakan untuk mengukur atau menilai tingkat pemahaman, pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, memahami informasi yang kompleks, serta memahami, menggunakan, dan bekerja dengan angka. Indeks Literasi/Numerisasi Kabupaten Purworejo dihitung pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 2.27. Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Indikator Asesmen Tingkat Nasional	Nilai				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Literasi Membaca SD/Sederajat	1,92	59,46	65,62	69.49	65,37
2	Literasi Membaca SMP/Sederajat	1,96	68,39	79,18	81.51	81.60
3	Numerisasi SD/Sederajat	1,78	47,84	49,14	57.57	53,21
4	Numerisasi SMP/Sederajat	1,70	57,67	68,76	69.91	70,65

Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikbud, 2026

Persentase siswa yang mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat pada seluruh indikator. Pada jenjang SD/sederajat, capaian literasi membaca meningkat hingga mencapai 69,49% pada tahun 2024, namun menurun menjadi 65,37% pada tahun 2025. Hal serupa terjadi pada numerasi SD yang turun dari 57,57% pada tahun 2024 menjadi 53,21% pada tahun 2025. Sementara itu, pada jenjang SMP/sederajat, capaian literasi membaca dan numerasi terus mengalami peningkatan hingga mencapai masing-masing 81,60% dan 70,65% pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, capaian literasi membaca masih lebih tinggi dibandingkan numerasi pada kedua jenjang pendidikan. Selisih antara literasi dan numerasi mencapai 12,16 poin persentase pada jenjang SD/sederajat dan 10,95 poin persentase pada jenjang SMP/sederajat. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguasaan kompetensi numerasi masih menjadi tantangan yang lebih besar dibandingkan literasi membaca, sehingga diperlukan penguatan kualitas pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika, melalui peningkatan kompetensi guru, penerapan pembelajaran yang lebih kontekstual, serta penguatan budaya belajar yang mendukung peningkatan kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah peserta didik.

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui ketercapaian pendidikan berkualitas yang merata yaitu proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi.

Tabel 2.28. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi	39.664	36.398	45.697	58.240	62.778
2	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	449.265	569.383	628.615	634.845	640.778
3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	8,83%	6,39%	7,27%	9,17%	9,80%

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode 2021–2025, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Proporsi tersebut turun dari 8,83% pada tahun 2021 menjadi 6,39% pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 7,27% pada tahun 2023, 9,17% pada tahun 2024, dan mencapai 9,80% pada tahun 2025. Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, dari 39.664 orang pada tahun 2021 menjadi 62.778 orang pada tahun 2025.

Meningkatnya proporsi penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi mencerminkan semakin baiknya akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tinggi di Kabupaten Purworejo. Capaian ini menjadi modal penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing serta mendukung pembangunan daerah. Meskipun demikian, dengan proporsi yang baru mencapai 9,80% pada tahun 2025, masih diperlukan berbagai upaya untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi, melalui peningkatan aksesibilitas, dukungan pembiayaan pendidikan, serta penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi guna menghasilkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dan produktif.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tertentu. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu.

Tabel 2.29. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	80,89	82,23	82,41	85,50	85,50*
2.	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	90,51	90,98	91,38	92,08	92,08*
3.	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	82,25	83,05	96,64	97,70	97,70*
4.	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)	-	3,72	10,86	16,65	20,15

**: data sementara*

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan Rapor Pendidikan Kemendikdasmen, 2025

Berdasarkan data di atas, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat pada seluruh kelompok umur. APS usia 5–6 tahun meningkat dari 80,89% pada tahun 2021 menjadi 85,50% pada tahun 2025. APS usia 7–12 tahun juga mengalami kenaikan dari 90,51% menjadi 92,08%, sedangkan APS usia 13–15 tahun meningkat paling signifikan, yaitu dari 82,25% menjadi 97,70%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan di Kabupaten Purworejo semakin membaik, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

Sementara itu, APS kelompok usia 7–18 tahun pada kelompok pendidikan kesetaraan juga mengalami peningkatan, dari 3,72% pada tahun 2022 menjadi 20,15% pada tahun 2025. Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, capaian tersebut masih relatif rendah dibandingkan kelompok usia lainnya, sehingga upaya peningkatan akses pendidikan kesetaraan masih perlu diperkuat. Secara umum, peningkatan APS pada seluruh kelompok umur mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, namun peningkatan partisipasi pada pendidikan anak usia dini serta pendidikan kesetaraan masih menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Purworejo.

Penguatan nilai-nilai budaya lokal di dunia pendidikan menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan jati diri bangsa. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah penyelenggaraan mata pelajaran muatan lokal (mulok) seperti bahasa daerah dan seni budaya di satuan pendidikan. Keberadaan guru yang mengajar mulok tidak hanya mendukung pelestarian warisan budaya, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter peserta didik agar lebih mencintai dan menghargai kebudayaan daerahnya. Indikator persentase satuan pendidikan yang memiliki guru pengampu mulok bahasa daerah dan seni budaya mencerminkan sejauh mana sekolah telah mengintegrasikan aspek kebudayaan dalam kurikulumnya. Indikator ini juga menjadi ukuran terhadap komitmen daerah dalam mengarusutamakan kebudayaan melalui jalur pendidikan formal.

Tabel 2.30. Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	23,57%	24,22%	24,05%	24,13%	41,82%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan data di atas, persentase satuan pendidikan di Kabupaten Purworejo yang mempunyai guru mengajar muatan lokal Bahasa Daerah/Seni Budaya dan mengarusutamakan kebudayaan menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2021–2025. Persentase tersebut

naik dari 23,57% pada tahun 2021 menjadi 24,22% pada tahun 2022, kemudian relatif stabil pada kisaran 24% hingga tahun 2024, sebelum meningkat cukup signifikan menjadi 41,82% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan implementasi pendidikan berbasis kebudayaan di satuan pendidikan. Meskipun demikian, capaian tersebut juga mengindikasikan bahwa masih terdapat lebih dari separuh satuan pendidikan yang belum memiliki guru pengampu muatan lokal Bahasa Daerah/Seni Budaya atau belum mengarusutamakan kebudayaan, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi guru, pemenuhan tenaga pendidik, serta penguatan kebijakan untuk memperluas implementasi pendidikan berbasis budaya di seluruh satuan pendidikan.

Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B. Berikut Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025.

Tabel 2.31. Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	53.32	50.59	51.98	80.33	85,68

Sumber: Dindikbud Kabupaten Purworejo, 2026

Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B di Kabupaten Purworejo menunjukkan perkembangan yang positif selama periode 2021–2025. Setelah mengalami penurunan dari 53,32% pada tahun 2021 menjadi 50,59% pada tahun 2022, capaian kembali meningkat menjadi 51,98% pada tahun 2023. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, yaitu mencapai 80,33%, dan terus meningkat menjadi 85,68% pada tahun 2025.

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang telah memenuhi standar mutu sesuai dengan persyaratan akreditasi minimal B. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas penyelenggaraan pendidikan, baik dari aspek tata kelola, proses pembelajaran, maupun pemenuhan standar sarana dan prasarana. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar seluruh satuan pendidikan dapat mempertahankan maupun meningkatkan status akreditasinya sehingga mutu layanan pendidikan di Kabupaten Purworejo semakin merata.

b. Bidang Urusan Kesehatan

Kasus Kematian Ibu dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Jumlah kematian ibu dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Berikut adalah tabel Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025.

Tabel 2.32. Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah kasus kematian ibu	22	6	5	7	11

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Purworejo mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 22 kasus, kemudian terjadi penurunan tajam pada 2022 menjadi 6 kasus dan kembali menurun pada 2023 menjadi 5 kasus. Namun, tren tersebut berbalik meningkat pada 2024 menjadi 7 kasus dan kembali naik cukup signifikan pada 2025 menjadi 11 kasus.

Secara keseluruhan, meskipun sempat terjadi perbaikan yang ditunjukkan oleh penurunan kasus hingga tahun 2023, peningkatan kembali pada dua tahun terakhir mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap sistem rujukan maternal dan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Purworejo agar angka kematian dapat ditekan secara berkelanjutan.

***Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita** adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Prevalensi *stunting* mengacu pada persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami *stunting* dalam pertumbuhan fisiknya. Prevalensi balita *stunting* digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi nilainya, semakin serius dan mendesak perluasan upaya untuk mengatasi masalah ini.

Tabel 2.33. Prevelensi Gizi Buruk dan Balita Pendek (Stunting) Berdasarkan E-PPGBM Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita	11,81	11,29	13,30	15,93	16,25

Sumber : Dinas Keseharan Kabupaten Purworejo, 2026

Prevalensi Balita Pendek (stunting) berdasarkan ePPGBM menunjukkan angka yang meningkat cukup signifikan dari tahun 2021 sebesar 11,81% dan pada tahun 2025 menjadi sebesar 16,25%. Diperlukan upaya keras dalam mengatasi permasalahan terkait penurunan angka stunting di Kabupaten Purworejo. Perbedaan utama antara stunting dan gizi buruk terletak pada fokusnya. Stunting lebih menitikberatkan pada aspek pertumbuhan fisik, khususnya tinggi badan, sementara gizi buruk mencakup berbagai defisiensi nutrisi yang mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan.

Tabel 2.34. Prevelensi Gizi Buruk dan Balita Pendek (Stunting) Berdasarkan Survei Kementerian Kesehatan Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita	15,7	21,3	20,6	14,90	14,90*

**: tidak dilakukan survey*

Sumber : Kementerian Kesehatan RI, 2025

Berdasarkan Survei Kementerian Kesehatan pada tahun 2024, angka prevalensi stunting di Kabupaten Purworejo tercatat sebesar 14,90%. Angka tersebut menurun dari tahun 2023 sebesar 20,6%. Berdasarkan pelaporan hasil penimbangan pada e-ppgbm prevalensi stunting mengalami peningkatan sedangkan berdasarkan hasil survei kementerian ksehatan mengalami penurunan. Namun pada tahun 2024 selisih antara pelaporan dan survei tidak jauh. Hal ini disebabkan hasil penimbangan yang dilaporkan sudah hampir 100% dan prosedur penimbangan sudah semakin baik dengan didukung alat antropometri yang sudah sesuai standar.

Penyebab terjadinya *stunting* yaitu kualitas dan kuantitas makanan balita kurang memenuhi standar, pola asuh balita masih kurang optimal, ketersediaan pangan tingkat rumah tangga kurang mencukupi karena 50 persen gizi buruk dari keluarga miskin, pemanfaatan pekarangan di tingkat rumah tangga belum optimal, pemberdayaan keluarga masih kurang serta masih adanya ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK) yang beresiko melahirkan bayi *stunting*. Meningkatnya prevalensi ibu hamil dengan anemia juga turut berpengaruh dalam meningkatkan risiko *stunting*.

Kesehatan ibu juga berperan penting terhadap kualitas kesehatan secara keseluruhan. Banyak perempuan yang mengalami hamil pada saat usia masih remaja dan kurangnya edukasi tentang kesehatan ibu dan anak sehingga tidak mengkonsumsi makanan secara benar selama kehamilan kemudian melahirkan bayi yang kecil atau berat badan rendah. Selain itu, keterbatasan dalam pemanfaatan pangan dikarenakan pemahaman/ pengetahuan yang terbatas terhadap pangan dan gizi, serta pola asuh. Selain itu, sanitasi yang layak juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan berbagai penyakit.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk memastikan seluruh penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas tanpa menghadapi hambatan finansial. Salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan program ini adalah persentase cakupan kepesertaan, yaitu indikator yang menggambarkan sejauh mana penduduk telah terdaftar dalam sistem jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Hal ini menjadi cerminan dari kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya perlindungan kesehatan serta efektivitas mekanisme pembiayaan jaminan sosial.

Tabel 2.35. Cakupan Kepersertaan dan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	83,18	87,27	95,85	98,31	99,63
2	Cakupan Keaktifan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional	*NA*	*NA*	73,54	73,65	80,59

Sumber: Dinas Keseharan Kabupaten Purworejo, 2026

Selama periode 2021–2025, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, cakupan kepesertaan tercatat sebesar 83,18%, dan meningkat menjadi 99,63% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses jaminan kesehatan, terutama melalui integrasi penduduk miskin dan tidak mampu ke dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik yang didanai oleh APBN maupun APBD.

Meskipun telah mendekati target *Universal Health Coverage*, tantangan masih dihadapi dalam menjangkau kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal dan belum terdaftar sebagai peserta JKN. Selain itu, upaya untuk menjaga validitas data kepesertaan dan memastikan keaktifan peserta dalam membayar iuran juga menjadi perhatian utama dalam menjaga keberlanjutan program. Data menunjukkan meski pada tahun 2023 sampai dengan 2025 cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Purworejo mencapai lebih dari 95%, akan tetapi keaktifan peserta jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Purworejo hanya pada kisaran 80,59% di tahun 2025. Hal ini berarti 20% peserta jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Purworejo memiliki status peserta yang tidak aktif. Perlu adanya sinergi lintas sektor dan upaya sosialisasi yang masif untuk memastikan seluruh penduduk tidak hanya terdaftar, tetapi juga terlindungi secara aktif dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Penyakit Tidak Menular (PTM) di Kabupaten Purworejo masih dihadapkan dengan tantangan besar karena masih menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia. Di tengah upaya untuk mengendalikan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan penting, peningkatan morbiditas dan mortalitas akibat PTM menambah beban ganda dalam pelayanan kesehatan. Kondisi ini menuntut strategi pembangunan kesehatan yang komprehensif dan terpadu untuk menghadapi kedua jenis penyakit ini secara bersamaan, memastikan bahwa upaya pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Tantangan ini memerlukan perhatian dan dukungan dari seluruh sektor terkait untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem kesehatan guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang holistik di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.36. Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	ODGJ	2.397	3.052	3.880	4.138	3.819
2	Diabetes Melitus	6.919	6.853	9.327	11.876	12.037
3	Hipertensi	25.669	30.708	61.663	81.252	99.199

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2026

Jumlah kasus penyakit tidak menular di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat pada sebagian besar jenis penyakit. Hipertensi merupakan penyakit tidak menular dengan jumlah kasus tertinggi, meningkat dari 25.669 kasus pada tahun 2021 menjadi 99.199 kasus pada tahun 2025. Kasus diabetes melitus juga mengalami peningkatan dari 6.919 kasus pada tahun 2021 menjadi 12.037 kasus pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022. Sementara itu, jumlah kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) meningkat dari 2.397 kasus pada tahun 2021 hingga mencapai 4.138 kasus pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 3.819 kasus pada tahun 2025.

Peningkatan jumlah kasus penyakit tidak menular menunjukkan bahwa penyakit degeneratif masih menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Purworejo. Tingginya kasus hipertensi dan diabetes melitus mengindikasikan perlunya penguatan upaya promotif dan preventif melalui penerapan perilaku hidup sehat, deteksi dini faktor risiko, serta pengelolaan penyakit secara berkelanjutan di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, penanganan kesehatan jiwa juga perlu terus diperkuat melalui peningkatan akses layanan kesehatan jiwa, edukasi kepada masyarakat, serta dukungan lintas sektor guna meningkatkan kualitas hidup penyandang gangguan jiwa.

Meskipun jumlah kasus penyakit tidak menular masih menunjukkan kecenderungan meningkat, upaya pengendalian PTM di tingkat pelayanan kesehatan terus mengalami penguatan. Hal ini tercermin dari capaian indikator **Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)** yang mencapai 100% pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh puskesmas di Kabupaten Purworejo telah memenuhi indikator yang ditetapkan, yaitu capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan hipertensi dan diabetes melitus masing-masing di atas 80%, serta memenuhi persyaratan teknis dan administratif dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas pelayanan kesehatan primer dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM telah semakin baik, meskipun pengendalian jumlah kasus di masyarakat masih memerlukan upaya yang berkelanjutan.

Penyakit menular (PM) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting karena menyebabkan tingginya angka kesakitan, kematian, dan kecacatan. Selain itu, beberapa penyakit menular memiliki potensi untuk berkembang menjadi kejadian luar biasa (KLB) atau wabah yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit secara efektif

dan efisien guna menurunkan angka kejadian serta mencegah penyebaran penyakit. Gambaran jumlah penderita penyakit menular di Kabupaten Purworejo tahun 2021–2025 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.37. Jumlah Penderita Penyakit Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Jenis Penyakit	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	TBC (+)	546	935	914	1.141	1.322
2	Pneumonia	54	171	248	334	1.634
3	HIV (kasus baru)	51	83	64	120	63
4	Diare	1.162	3.402	4.516	7.427	7.267
5	Kusta	8	14	9	8	10
6	Frambusia	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan data jumlah penderita penyakit menular di Kabupaten Purworejo tahun 2021–2025, terlihat bahwa jumlah kasus setiap jenis penyakit mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Penyakit dengan jumlah penderita tertinggi selama periode tersebut adalah diare, diikuti oleh tuberkulosis (TBC). Pada tahun 2025, kasus diare mencapai 7.267 kasus, sedangkan TBC mencapai 1.322 kasus.

Kasus TBC menunjukkan peningkatan dari 546 kasus pada tahun 2021 menjadi 935 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 914 kasus, kemudian kembali meningkat menjadi 1.141 kasus pada tahun 2024 dan 1.322 kasus pada tahun 2025. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun sempat menurun, beban penyakit TBC masih menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapat perhatian.

Kasus pneumonia juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama periode pengamatan. Jumlah penderita meningkat dari 54 kasus pada tahun 2021 menjadi 171 kasus pada tahun 2022, kemudian bertambah menjadi 248 kasus pada tahun 2023, 334 kasus pada tahun 2024, dan melonjak hingga 1.634 kasus pada tahun 2025. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh meningkatnya cakupan deteksi kasus maupun bertambahnya kejadian infeksi saluran pernapasan di masyarakat.

Berbeda dengan TBC dan pneumonia, kasus HIV (kasus baru) menunjukkan pola yang lebih fluktuatif. Jumlah kasus meningkat dari 51 kasus pada tahun 2021 menjadi 83 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 64 kasus pada tahun 2023, meningkat kembali menjadi 120 kasus pada tahun 2024, dan turun menjadi 63 kasus pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa penemuan kasus baru HIV masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti cakupan skrining, perilaku berisiko, serta akses terhadap layanan kesehatan.

Kasus diare mengalami peningkatan yang sangat tajam selama lima tahun terakhir. Jumlah kasus meningkat dari 1.162 kasus pada tahun 2021 menjadi 3.402 kasus pada tahun 2022, kemudian bertambah menjadi 4.516 kasus pada tahun 2023, 7.427 kasus pada tahun 2024, dan sedikit menurun menjadi 7.267 kasus pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan pada

tahun terakhir, jumlah kasus diare tetap menjadi yang tertinggi dibandingkan penyakit menular lainnya.

Sementara itu, kasus kusta relatif rendah dan cenderung stabil. Jumlah penderita tercatat sebanyak 8 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 14 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 9 kasus pada tahun 2023, 8 kasus pada tahun 2024, dan sedikit meningkat menjadi 10 kasus pada tahun 2025.

Berbeda dengan penyakit lainnya, frambusia tidak ditemukan selama periode 2021–2025, dengan jumlah kasus tetap nol setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo berhasil mempertahankan status bebas kasus frambusia selama lima tahun berturut-turut.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa penyakit diare dan TBC masih menjadi penyumbang kasus penyakit menular terbesar di Kabupaten Purworejo. Selain itu, peningkatan kasus pneumonia pada tahun 2025 perlu menjadi perhatian khusus. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan upaya promotif, preventif, deteksi dini, serta peningkatan cakupan pelayanan kesehatan untuk menekan angka kejadian penyakit menular di Kabupaten Purworejo.

Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina yang terinfeksi parasit *Plasmodium*. Kabupaten Purworejo sebelumnya merupakan salah satu daerah endemis malaria di Provinsi Jawa Tengah karena memiliki wilayah perbukitan Menoreh yang menjadi habitat alami vektor malaria. Namun, melalui berbagai upaya pengendalian yang dilakukan secara berkelanjutan, Kabupaten Purworejo saat ini telah berhasil mencapai status eliminasi malaria.

Tabel 2.38. Kasus Malaria di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Kasus Malaria	535	561	41	0	15
2	API	0,69	0,7	0,05	0,012	0,02

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, 2026

Perkembangan kasus malaria di Kabupaten Purworejo selama tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang terus menurun. Berdasarkan data di atas, jumlah kasus malaria pada tahun 2021 tercatat sebanyak 535 kasus dengan nilai *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,69 per 1.000 penduduk berisiko. Pada tahun 2022 jumlah kasus sedikit meningkat menjadi 561 kasus dengan API sebesar 0,70. Peningkatan tersebut berkaitan dengan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) malaria pada akhir tahun 2021 yang masih berdampak terhadap penemuan kasus pada tahun 2022.

Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 41 kasus dengan API sebesar 0,05. Pada tahun 2024 tidak ditemukan kasus malaria (0 kasus), sedangkan nilai API tercatat sebesar 0,012. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan upaya pengendalian malaria yang telah dilaksanakan secara konsisten. Pada tahun 2025 hanya ditemukan 15 kasus malaria dengan API sebesar 0,02. Kasus yang ditemukan merupakan kasus yang dapat ditangani dengan cepat melalui sistem

surveilans dan respons yang telah berjalan dengan baik sehingga tidak terjadi penularan setempat secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo telah berhasil menurunkan beban penyakit malaria secara signifikan hingga mencapai status eliminasi malaria. Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan, antara lain penguatan surveilans, penemuan dan pengobatan kasus secara dini, pengendalian vektor, serta keterlibatan masyarakat dan lintas sektor dalam menjaga agar tidak terjadi penularan kembali. Meskipun telah mencapai eliminasi, kewaspadaan tetap perlu dipertahankan melalui pemantauan kasus secara berkesinambungan untuk mencegah munculnya kembali penularan malaria di Kabupaten Purworejo.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) merupakan indikator penting dalam upaya pengendalian penyakit ini di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan yang sesuai dalam periode tertentu. Data mengenai penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Purworejo memberikan gambaran tentang efektivitas program kesehatan yang sedang dijalankan untuk mengatasi penyakit menular ini. Berikut merupakan data penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.39. Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Treatment coverage	31,4	54,3	52,3	61,5	80,0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2026

Data ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (TB), namun masih terdapat tantangan dalam mencapai cakupan yang optimal. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pencapaian ini termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang TB, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta upaya pemerintah dalam memperluas cakupan skrining TB. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam meningkatkan kapasitas skrining dan memastikan bahwa semua pasien yang ditemukan mendapatkan pengobatan yang tepat dan mematuhi regimen pengobatan sampai selesai. Berikut merupakan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment succes rate*) sebagai persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap.

Tabel 2.40. Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Succes Rate*) di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Treatment Succes Rate	83	84	82	79	84

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2026

Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan capaian yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi. Pada tahun 2021 tingkat keberhasilan pengobatan tercatat sebesar 83%, meningkat menjadi 84% pada tahun 2022. Selanjutnya, capaian menurun menjadi 82% pada tahun 2023 dan 79% pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 84% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengobatan tuberkulosis secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi keberhasilan pengobatan.

Penurunan capaian pada tahun 2023–2024 dapat mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan program, seperti kepatuhan pasien menjalani pengobatan hingga tuntas maupun faktor akses dan kualitas layanan kesehatan. Meningkatnya kembali *Treatment Success Rate* pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program pengendalian tuberkulosis. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan melalui penguatan deteksi dini, pendampingan pasien, pemantauan kepatuhan berobat, serta peningkatan kualitas layanan agar capaian dapat terus meningkat dan mendekati target nasional

Capaian pengendalian penyakit menular tersebut turut tercermin pada indikator **Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)**. Berdasarkan data pada tabel di bawah, indikator ini mulai diukur pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 40,7%, kemudian relatif stabil pada tahun 2024 sebesar 40,0%, dan menurun menjadi 33,3% pada tahun 2025. Indikator ini dihitung berdasarkan persentase puskesmas yang memenuhi kriteria, yaitu memiliki *Treatment Coverage* (TC) lebih dari 90%, *Treatment Success Rate* (TSR) lebih dari 90%, serta memenuhi sedikitnya dua indikator lainnya, seperti tidak ditemukannya kasus ODIV virulen tersuspensi, eradikasi frambusia, dan eliminasi malaria.

Tabel 2.41. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	0	0	40.7	40.0	33.3

Sumber : Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, 2026

Meskipun Kabupaten Purworejo telah berhasil mencapai eliminasi malaria dan mempertahankan kondisi bebas frambusia, penurunan capaian Angka Populasi Bebas Penyakit Menular pada tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat puskesmas yang belum memenuhi seluruh indikator yang dipersyaratkan. Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh masih tingginya beban penyakit menular lainnya, seperti TBC, diare, dan pneumonia, yang memengaruhi capaian indikator pelayanan dan pengendalian penyakit di tingkat puskesmas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pengendalian penyakit menular melalui peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan surveilans, deteksi dini, serta upaya

promotif dan preventif agar semakin banyak puskesmas yang mampu memenuhi seluruh indikator yang telah ditetapkan.

Akreditasi Paripurna merupakan predikat akreditasi tertinggi yang diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akreditasi ini menjadi indikator bahwa fasilitas pelayanan kesehatan telah menerapkan tata kelola organisasi, pelayanan klinis, manajemen risiko, serta peningkatan mutu secara berkesinambungan untuk menjamin pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Tabel 2.42. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
1	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	NA	NA	69.00	79.00	80,26

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2026

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan selama periode 2021–2025. Capaian tersebut mulai meningkat pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 69,00%, kemudian meningkat menjadi 79,00% pada tahun 2024 dan 80,26% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan semakin banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang telah memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien sesuai dengan ketentuan akreditasi yang berlaku. Meningkatnya persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna mencerminkan semakin baiknya kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memenuhi standar pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, serta memperkuat budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Ke depan, pembinaan dan pendampingan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan perlu terus dilakukan agar seluruh fasilitas mampu mempertahankan maupun meningkatkan status akreditasinya sehingga kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat semakin optimal.

Tingkat kepuasan pasien merupakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada unit pelayanan publik. Penilaian dilakukan berdasarkan sembilan unsur pelayanan, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 2.43. Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2025

No	Layanan Kesehatan	Tahun		
		2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di Puskesmas	86.00	91.06	92.06
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	83.00	85	86.20
3	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjokronegoro	84.60	86.01	86.82

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, 2026

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kesehatan di Kabupaten Purworejo selama periode 2023–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan di puskesmas meningkat dari 86,00 pada tahun 2023 menjadi 91,06 pada tahun 2024 dan kembali meningkat menjadi 92,06 pada tahun 2025. Demikian pula pada RSUD Tjitrowardojo, tingkat kepuasan meningkat dari 83,00 menjadi 85,00 dan 86,20, sedangkan pada RSUD Tjokronegoro meningkat dari 84,60 menjadi 86,01 dan 86,82 selama periode yang sama.

Peningkatan kepuasan pasien tersebut menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo semakin baik berdasarkan penilaian masyarakat terhadap sembilan unsur pelayanan publik. Puskesmas mencatat tingkat kepuasan tertinggi pada tahun 2025, yaitu sebesar 92,06, yang mengindikasikan tingginya apresiasi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Ke depan, peningkatan mutu pelayanan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, terutama melalui penyempurnaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi dan perilaku petugas, optimalisasi penanganan pengaduan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

c. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum

Dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pekerjaan umum termasuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, kinerja infrastruktur menjadi parameter penting dalam menilai efektivitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan dasar yang berkualitas bagi masyarakat. Secara konseptual, persentase kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam merencanakan, membangun, mengoperasikan, serta memelihara infrastruktur publik, seperti jaringan jalan, air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung, dan jasa konstruksi. Persentase kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.44. Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2021-2025

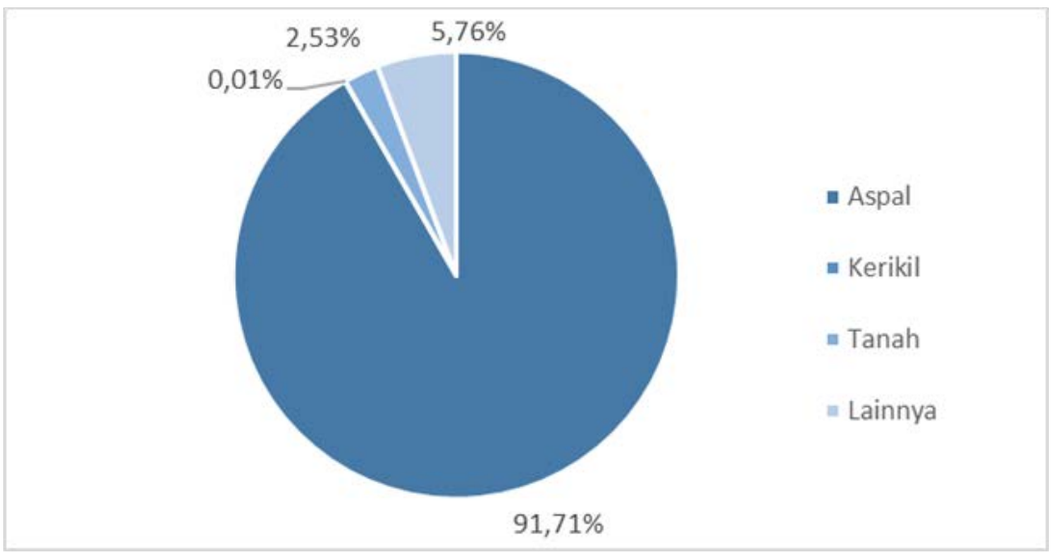
No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum	53,75%	55,54%	56,27%	58,79%	59,99%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2026

Pada tabel terlihat bahwa terdapat tren peningkatan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum di Kabupaten Purworejo pada tahun 2021-2025. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan semakin meningkatnya indikator kinerjanya, menunjukkan bahwa pelayanan infrastruktur telah berjalan secara optimal dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif tata kelola pembangunan, peningkatan persentase kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum juga mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur yang selaras dengan arah kebijakan nasional serta agenda pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur yang berkinerja baik akan mendukung konektivitas wilayah, meningkatkan produktivitas ekonomi, memperbaiki kualitas lingkungan, serta memperkuat ketahanan wilayah terhadap risiko bencana.

1) Jaringan Jalan

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 622/12/2023, bahwa panjang ruas jalan provinsi di Kabupaten Purworejo sebesar 2.015,26 km. Sedangkan berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor: 160.18/497/2023 terdapat 227 ruas jalan kewenangan kabupaten dengan panjang total 757,79 km. Dari total panjang jalan tersebut, terdiri dari konstruksi aspal, kerikil, tanah, dan lainnya. Proporsi konstruksi jalan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.28. Proporsi Kondisi Jalan Di Kabupaten Purworejo

Sumber: DPUPR Tahun 2026, diolah

Kondisi kemantapan jalan kabupaten sangat berdampak terhadap pencapaian indikator persentase kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum. Persentase jalan kewenagan Kabupaten dalam keadaan mantap pada tahun 2021-2025 dapat terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.45. Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Panjang jalan kondisi baik (km)	227,96	214,09	146,22	119,94	131,90
2	Panjang jalan kondisi sedang (km)	387,51	414,78	331,570	359,58	348,60
3	Panjang jalan kondisi rusak ringan (km)	94,35	97,74	163,840	164,28	137,68
4	Panjang jalan kondisi rusak berat (km)	59,44	42,65	116,160	113,99	139,61
5	Total Panjang jaringan jalan kabupaten (km)	769,25	769,25	757,79	757,79	757,79
6	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Sedang	80,01%	81,75%	63,05%	63,28%	63,41%
7	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	80,01%	81,75%	63,05%	63,28%	63,41%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2026

2) Akses air minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Tingkat kemudahan rumah tangga untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya menjadi salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dari sisi kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan bahwa air minum harus memenuhi baku mutu standar air minum, yaitu memenuhi parameter fisik, mikrobiologi, kimia, dan radioaktif. Selain itu, air minum merupakan komponen utama SDG's dalam target 6.1, yaitu memastikan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030. Target ini menekankan bahwa air minum tidak hanya harus tersedia, tetapi juga memenuhi standar kualitas kesehatan, berkelanjutan, serta dapat diakses secara adil oleh seluruh kelompok masyarakat. Penyediaan layanan air minum merupakan sektor kunci yang bersifat lintas tujuan (cross-cutting sector) dalam kerangka SDGs. Air minum tidak hanya mendukung pencapaian SDG 6.1, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesehatan, pengurangan kemiskinan, pembangunan kota berkelanjutan, serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan tata kelola air minum menjadi salah satu prioritas strategis dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Capaian akses air minum Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46. Capaian Akses Air Minum Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum Yang Layak	96,86%	97,97%	99,34%	99,34%	98,80%
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	17,17%	19,56%	22,43%	29,21%	31,74%
3	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapat Akses Air Minum Yang Aman	26,50%	27,82%	29,19%	31,58%	31,74%
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	96,86%	97,97%	99,34%	99,34%	98,80%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa capaian akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dan akses air minum aman nilainya cenderung naik dari tahun 2021-2025. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat di wilayah perkotaan lebih memilih menggunakan jaringan perpipaan melalui jaringan PDAM yang dinilai lebih aman. Masyarakat di wilayah perkotaan tidak punya pilihan lain selain menggunakan jaringan perpipaan PDAM karena keterbatasan lahan untuk pembuatan sumur dan adanya degradasi kualitas air tanah akibat pencemaran air limbah domestic.

3) Akses Sanitasi

Air minum dan sanitasi merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Dalam siklus hidrologi, air dan limbah saling terhubung. Limbah cair domestik (greywater dan blackwater) yang tidak diolah akan masuk ke badan air (sungai, danau, atau air tanah), yang pada akhirnya menjadi sumber air minum. Dengan demikian, sanitasi berfungsi sebagai “barrier” untuk mencegah pencemaran sumber air. Sanitasi yang buruk akan menurunkan kualitas air minum, sementara penyediaan air minum yang aman membutuhkan sistem sanitasi yang memadai. Secara sistem, pembangunan infrastruktur air minum (SPAM) dan sanitasi (SPALD) harus direncanakan secara terpadu. Ketidakseimbangan pembangunan, misalnya cakupan air minum tinggi tetapi sanitasi rendah, akan memicu degradasi kualitas air dan meningkatkan biaya pengolahan air minum. Dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), air minum dan sanitasi merupakan indikator kunci untuk: pengentasan kemiskinan; peningkatan kualitas kesehatan; produktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ketercapaian akses air minum aman tanpa sanitasi layak akan menciptakan “trade-off” yang menghambat keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan dan pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi, lintas sektor, dan

berkelanjutan guna menjamin kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Untuk menilai capaian akses sanitasi di Kabupaten Purworejo terdapat beberapa KPI, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 2.47. Capaian Akses Sanitasi Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	84,94%	89,45%	95,32%	95,21%	95,95%
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	17,17%	3,19%	4,36%	4,58%	4,93%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2026

Adanya perubahan paradigma dari sanitasi layak ke aman mencerminkan pergeseran fundamental yaitu dari infrastruktur ke sistem layanan. Pembangunan sanitasi tidak hanya berfokus pada pembangunan jamban, tetapi memastikan seluruh rantai pengelolaan limbah berfungsi dan pencegahan pencemaran tanah, air tanah, dan badan air. Selain itu memastikan bahwa pembangunan sanitasi tidak hanya berfokus pada output, tetapi sudah beralih ke outcome. Paradigma baru juga mengubah pembangunan sanitasi dari parsial menjadi terintegrasi antar sektor.

4) Drainase

Drainase merupakan komponen yang sangat urgen dalam pembangunan infrastruktur karena berfungsi sebagai sistem pengelolaan air yang menentukan keberlanjutan, ketahanan, dan kualitas lingkungan permukiman maupun kawasan perkotaan. Drainase berperan dalam mengalirkan air hujan dan limpasan permukaan secara terkendali. Tanpa sistem drainase yang memadai, kapasitas infiltrasi tanah akan terlampaui sehingga terjadi genangan hingga banjir. Hal ini berdampak langsung pada kerusakan infrastruktur jalan, permukiman, serta terganggunya aktivitas ekonomi. Air yang tidak terkelola dapat mempercepat degradasi struktur, seperti perkerasan jalan, fondasi bangunan, dan jaringan utilitas. Secara teknis, kelebihan air meningkatkan tekanan hidrostatik dan mempercepat proses pelapukan material, sehingga umur layanan infrastruktur menjadi lebih pendek. Dalam pendekatan modern (drainase berwawasan lingkungan), sistem drainase tidak hanya membuang air, tetapi juga mengelola air melalui konsep resapan (infiltrasi). Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan siklus hidrologi serta mendukung ketersediaan air tanah. Infrastruktur drainase merupakan salah satu faktor pendukung capaian kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum. Jika capaian drainase dalam kondisi baik meningkat maka indeks infrastruktur juga akan semakin meningkat. Capaian persentase saluran drainase dalam kondisi baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 2.48. Persentase Drainase Jalan di Perkotaan dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	28,27%	28,70%	29,06%	29,95%	31,71%
2	Panjang saluran drainase kondisi baik/ tidak tersumbat pembuangan aliran air	70.086	71.165	72,053	74.252	78.624
3	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten	247.955	247.955	247.955	247.955	247.955

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan tabel tersebut, capaian drainase dalam kondisi baik cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir. Dalam melaksanakan penanganan drainase perkotaan, Pemkab Purworejo sudah mengintegrasikan drainase dengan infrastruktur jalan dan kawasan. Drainase yang terintegrasi dengan sistem air limbah, persampahan, dan tata ruang, pengelolaannya akan lebih optimal. Berkurangnya sampah yang masuk ke saluran dan pengendalian limpasan permukaan meningkatkan kondisi fisik drainase. Drainase dirancang dalam 1 kesatuan sistem dari hulu ke hilir, dimana kawasan hulu sebagai pengendalian limpasan; kawasan tengah sebagai jaringan saluran dan bagian hilir menuju kolam retensi atau badan air. Selain itu, pemeliharaan rutin (pembersihan sedimen, sampah, dan vegetasi liar) mencegah degradasi fungsi drainase. Secara teknis, operasi dan pemeliharaan yang konsisten mampu mempertahankan kapasitas hidrolis saluran sehingga indikator “kondisi baik” meningkat. Selain itu, pendekatan seperti eco-drainage atau sustainable urban drainage system (SUDS) meningkatkan efektivitas pengelolaan air hujan melalui infiltrasi dan retensi. Hal ini mengurangi beban saluran utama, sehingga kerusakan fisik dan penurunan kinerja dapat diminimalisasi.

5) Bangunan Gedung

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara, bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah. Terdapat 240 bangunan gedung negara kewenangan kabupaten yang telah terinventarisasi. Dalam perkembangannya, saat ini terdapat 218 bangunan gedung negara milik daerah dalam kondisi baik. Capaian persentase bangunan milik daerah dengan kondisi baik masih dibawah target dikarenakan penanganan terhadap gedung negara milik daerah dengan kondisi rusak tidak terlalu signifikan, sebagian besar penanganan masih bersifat pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi baik. Cakupan penanganan bangunan

gedung milik daerah dalam rentang waktu 2021-2025 dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.49. Persentase Bangunan Milik Daerah dengan Kondisi Baik di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase Bangunan Milik Daerah dengan Kondisi Baik	74,58%	75,83%	75,83%	79,58%	90,83%
2	Jumlah bangunan gedung negara milik daerah dengan kondisi baik	179	182	182	191	218
3	Jumlah seluruh bangunan gedung negara milik daerah	240	240	240	240	240

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2026

6) Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) adalah setiap orang yang memilki ketrampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan SKK Konstruksi. Dalam permen tersebut dijelaskan bahwa setiap TKK wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi) sebagai tanda bukti pengauan kompetensi TKK. Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.50. Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	70,13%	79,19%	91,82%	100%	100%
2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat	155	175	202	220	220
3	Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/ analis di wilayah kabupaten	221	221	220	220	220

Sumber : DPUPR Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya kecelakaan kerja dalam pekerjaan konstruksi. Faktor yang pertama yaitu kesalahan manusia atau *human error*. Kedua, faktor terganggunya material bangunan. Faktor ketiga, banyaknya peralatan konstruksi yang tidak tersertifikasi. Faktor keempat, metode pelaksanaan konstruksi di lapangan terutama terkait Program K3 yang tidak dijalankan secara optimal dan faktor kelima adanya efisiensi anggaran. Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan

Konstruksi di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51. Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	*Uraian*	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	80	80	94	66	50
3	Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	80	80	94	66	50

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2026

Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten

Indeks Kinerja Sistem Irigasi merupakan alat ukur komprehensif yang tidak hanya menilai kondisi teknis jaringan, tetapi juga efektivitas tata kelola irigasi secara keseluruhan. Optimalisasi IKSI menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan layanan irigasi dan peningkatan produktivitas sektor pertanian. Dalam perspektif teknokratik, IKSI merepresentasikan pendekatan integrated water resources management (IWRM), di mana keberhasilan sistem irigasi tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi juga oleh tata kelola kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan pembiayaan. Capaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten di Purworejo Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.52. Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten di Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten (IKSI)	66,04	67,95	67,1	67,95	69,48
2	Prasarana Fisik (45%)	29,46	29,70	29,74	30,21	31,01
3	Produktivitas tanaman (15%)	13,68	13,68	13,68	12,24	12,36
4	Sarana Penunjang (10%)	7,11	7,11	7,11	6,69	6,81
5	Organisasi Personalia (15%)	10,55	10,56	10,56	9,60	9,90
6	Dokumentasi (5%)	3,42	3,43	3,43	4,17	4,20
7	Kondisi Kelembagaan (10%)	5,56	5,57	5,57	5,04	5,19

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa terdapat 3 (tiga) kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi yaitu: DI yang luasnya lebih dari 3000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat; DI yang luasnya 1000 ha-3000 ha; menjadi

tanggung jawab Pemerintah Provinsi; dan DI yang luasnya kurang dari 1000 ha; menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Purworejo berdasarkan jenisnya dibagi menjadi Daerah Irigasi Permukaan (DIP) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR). Daerah Irigasi permukaan di Kabupaten Purworejo berdasarkan kewenangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53. Daerah Irigasi Permukaan (DIP) Berdasarkan Kewenangan Di Kabupaten Purworejo

No	Kewenangan	Jumlah DI	Luasan (ha)
1	*2*	*3*	*4*
1	**Pusat**	**3**	**19.908**
	DI Boro		5.136
	DI Kedungputri		4.341
	DI Waduk Wadaslintang		10.431
2	**Provinsi**	**3**	**2.840**
	DI Watujagir		210
	DI Kalibutek		98
	DI Loning Kragilan		2.532
3	**Kabupaten**	**250**	**9.470**

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2026

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi di wilayah selatan Kabupaten Purworejo yang sebagian besar berada di kawasan pesisir pantai, petani memanfaatkan Daerah Irigasi Rawa (DIR). Terdapat 14 (empat belas) DIR di Kabupaten Purworejo dengan luas total sebesar 453 ha. Dalam melakukan evaluasi perhitungan terhadap kinerja sistem irigasi, terdapat 4 (empat) komponen yang digunakan yaitu kondisi bangunan pengambilan, kondisi bangunan pengatur, kondisi bangunan pelengkap dan kondisi saluran pembawa. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Purworejo diformulasikan melalui perhitungan 35% kondisi bangunan pengambilan, 25% kondisi bangunan pengatur, 10% kondisi bangunan pelengkap dan 30% kondisi saluran pembawa. Di tahun 2025, persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Purworejo sebesar 68,43%, meningkat sebesar 1,06% dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 67,37%. Kinerja layanan irigasi di Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.54. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*	*8*
1	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	64,62%	67,02%	65,34%	67,37%	68,43%
2	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik	274.590	278.020	281.450	284.880	288.310
3	Panjang total saluran irigasi	342.988	342.988	342.988	342.988	342.988
4	Persentase kondisi bangunan pengambilan	74,62%	74,68%	75,11%	78,54%	80,25%

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*	*8*
5	Jumlah bangunan pengambilan dalam kondisi baik (buah)	173	174	175	183	187
6	Jumlah total bangunan pengambilan (buah)	233	233	233	233	233
7	Persentase kondisi bangunan pengatur	27,12**%**	33,05%	32,49%	33,47%	33,61%
8	Jumlah bangunan pengatur dalam kondisi baik (buah)	200	234	234	237	238
9	Jumlah total bangunan pengatur (buah)	708	708	708	708	708
10	Persentase kondisi bangunan pelengkap	70,07**%**	70,55%	70,65%	71,03%	71,20%
11	Jumlah bangunan pelengkap dalam kondisi baik (buah)	2.040	2.041	2.044	2.055	2.060
12	Jumlah total bangunan pelengkap (buah)	2.893	2.893	2.893	2.893	2.893
13	Persentase kondisi saluran pembawa	81,06**%**	85,21%	85,50%	81,37%	84,36%
14	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	278.020	292.273	293.271	279.096	289.356
15	Panjang total saluran irigasi (m)	242.988	242.988	342.988	342.988	342.988
16	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	26,18%	22,68%	65,66%	67,73%	67,73%

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2026

Pada tahun 2024, dari total 9.470 ha luas Dearah Irigasi kewenangan kabupaten terdapat 6.413,61 ha yang dilakukan penanganan, dimana DI yang direhabilitasi seluas 351,14 ha dan DI yang dipelihara seluas 6.062,47 ha. Dengan demikian Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 67,73%. Pada tahun 2025, tidak terdapat peningkatan capaian rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi karena total jaringan yang dibangun ditingkatkan direhab dan di OP jumlahnya sama dengan luasan fungsional.

Kinerja Penataan Ruang

Kinerja penataan ruang merupakan ukuran tingkat keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang dalam mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam perspektif kebijakan nasional, penataan ruang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, tetapi juga sebagai alat integrasi pembangunan lintas sektor dan wilayah. Secara konseptual, kinerja penataan ruang dapat dianalisis melalui tiga pilar utama, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pertama, pada aspek perencanaan, kinerja diukur dari kualitas dan cakupan dokumen rencana tata ruang seperti RTRW dan RDTR. Indikator utamanya meliputi

tingkat ketersediaan dokumen yang telah ditetapkan secara legal, kesesuaian dengan kebijakan nasional/daerah, serta tingkat integrasi dengan rencana pembangunan sektoral. Perencanaan yang baik ditandai dengan berbasis data spasial yang akurat dan responsif terhadap dinamika pembangunan. Kedua, pada aspek pemanfaatan ruang, kinerja mencerminkan sejauh mana pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang (spatial compliance), optimalisasi fungsi kawasan, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah. Tingginya deviasi pemanfaatan ruang menunjukkan lemahnya implementasi rencana. Ketiga, pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, kinerja diukur melalui efektivitas instrumen pengendalian seperti perizinan (KKPR), pengawasan, penertiban, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Indikator pentingnya antara lain rasio kepatuhan terhadap rencana tata ruang dan jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti. Capaian kinerja penataan ruang Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.55. Capaian Kinerja Penataan Ruang Di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Persentase Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)	NA	NA	NA	8,33%	22,22%
2	Jumlah kelengkapan dokumen RTR yang telah disusun	NA	NA	NA	3	8
3	Jumlah kelengkapan dokumen RTR yang direncanakan	NA	NA	NA	36	36
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	NA	89,35%	89,42%	90,95%	91,48%
5	Jumlah KKPR yang sesuai	NA	277	575	794	891
6	Jumlah KKPR yang diterbitkan	NA	310	643	873	974
7	Persentase Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tata Ruang	NA	NA	NA	NA	NA
8	Jumlah kasus yang tertangani hingga penerbitan dokumen penetapan sanksi (surat himbauan atas pelanggaran penataan ruang)	NA	NA	NA	NA	NA
9	Jumlah kasus	NA	NA	NA	NA	NA
10	Persentase Kinerja Penataan Ruang	NA	NA	NA	NA	44,70

Sumber: DPUPR Kabupaten Purworejo, 2026

d. Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan kepada pemerintah untuk menjamin masyarakat untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Pemerintah juga bertanggung jawab melindungi segenap masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu

pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga diamanatkan bahwa urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sub urusan perumahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota diantaranya: a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota; b) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota; c) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; dan d) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

1) Perumahan

Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Korban Bencana Kabupaten dan Relokasi Program Pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani	78	11	6	5	5
3	Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani	78	11	6	5	5

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2026

Sedangkan persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57. Persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase Masyarakat yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	0%	100%	0%	100%	100%
2	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang tertangani	0	9	0	0	0

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	0	9	0	0	0

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2026

Sedangkan persentase jumlah rumah susun, rumah khusus yang terbina di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.58. Persentase Jumlah Rumah Susun, Rumah Khusus yang Terbina di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase jumlah rumah susun, rumah khusus yang terbina	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah rumah susun yang dibina	1	1	1	1	1
3	Jumlah rumah susun yang ada	1	1	1	1	1

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2026

Persentase Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.59. Persentase Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase Ijin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terbit yang Diajukan Pemohon	89,80%	90,32%	100%	100%	100%
2	Jumlah izin perumahan yang diterbitkan	44	56	14	14	14
3	Jumlah izin pembangunan perumahan yang diajukan	49	62	14	14	14

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2026

Selain permasalahan terkait penyediaan perumahan khususnya bagi masyarakat yang terkena bencana dan relokasi program pemerintah, penyediaan rumah tidak layak huni juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Purworejo. Masih banyaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum mempunyai Rumah Layak Huni menjadi pekerjaan yang harus segera diselesaikan oleh Pemkab Purworejo, yang tentu saja hal tersebut membutuhkan upaya yang besar.

Untuk rumah tidak layak huni yang berada di Kawasan kumuh akan ditangani melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan. Akan tetapi untuk RTLH, yang berada di luar kawasan kumuh harus ada program pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah salah satunya yaitu penyediaan Rumah Layak Huni melalui pendanaan APBD. Persentase pengurangan

rumah tidak layak huni di luar Kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.60. Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni di luar Kawasan kumuh	10,80%	10,28%	9,40%	5,66%	5,66%
2	Jumlah RTLH di luar kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati	20.564	19.571	17.891	15.431	15.431
3	Jumlah rumah di luar kawasan kumuh	190.429	190.429	190.429	272.500	272.500
4	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	67,04%	67,27%	67,68%	68,16%	68,16%

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2026

Persentase pengurangan rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh mengalami penurunan karena tidak seimbangnya intervensi penanganan RTLH dengan penambahan jumlah rumah.

2) Kawasan Permukiman

Salah satu permasalahan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purworejo adalah masih tingginya luasan kawasan kumuh. Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan kompleks di perkotaan yang mencakup persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Purworejo. Berdasarkan SK Bupati Nomor 160.18/526/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo), terdapat 126,811 Ha luasan kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo yang tersebar di 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Kutoarjo, Kelurahan Purworejo, Kelurahan Mranti, Kelurahan Pangen Juru Tengah, Kelurahan Baledono, Kelurahan Pangerejo dan Kelurahan Keseneng. Luasan Kawasan kumuh per kelurahan di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61. Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Purworejo

No	Kelurahan	Luasan SK Kumuh 2020 (Ha)
1	*2*	*3*
1	Pangenrejo	7,899
2	Mranti	4,390
3	Baledono	13,504
4	Purworejo	10,00
5	Keseneng	2,800
6	Pangenjurutengah	39,300
7	Kutoarjo	48,918
	Luas Total	126,811

Sumber: Dinperkimtan, 2026

Kawasan kumuh perkotaan Purworejo tersebar di 2 (dua) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo. Data basis RT dan RW persebaran kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.62. Persebaran Kawasan Kumuh Perkotaan Purworejo dan Kutoarjo

No	Nama Desa	Wilayah Mikro Perencanan	Luas (Ha)
1	*2*	*3*	*4*
Kecamatan Purworejo			
1	Kel Pangenrejo	RT 01 /RW II	7,899
		RT 02 /RW V	
		RT 01, 02/ RW VI	
2	Kel Mranti	RT 03, 04 / RW III	4,390
3	Kel Baledono	RT 02, 03 ,05, 06, 07 / RW IV	13,504
		RT 01, 02, 03, 04 / RW V	
		RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 / RW VII	
		RT 03, 04, 05 / RW VIII	
4	Kel Purworejo	RT 02 / RW I	10,000
		RT 01 / RW IX	
		RT 01,02,03,06 / RW XII	
		RT 02 /RW XIII	
5	Kel Keseneng	RT 01,04/RW I	2,800
6	Kel Pangenjurutengah	RT 01, 02, 03 / RW IV	39,300
		RT 01, 02, 03 / RW V	
Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Purworejo			**88,13**
Kecamatan Kutoarjo			
1	Kel Kutoarjo	RT 01, 02, 03, 04 / RW I	48,918
		RT 01, 02, 03 / RW II	
		RT 01, 02, 03, 04 / RW III	
		RT 01, 02, 03, 04, 05 / RW XI	
		RT 01, 02, 03, 04 / RW XII	
Luas Kawasan Kumuh Kecamatan Kutoarjo			**48,918**
Total Luas Kawasan Kumuh Perkotaan Purworejo			**126,811**

Sumber: SK Bupati Nomor 160.18/526/2020

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo mulai tahun 2020-2025 dilaksanakan melalui kolaborasi beberapa program dan sumber pendanaan. Untuk menangani Kawasan kumuh di wilayah Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo mendapatkan *National Slum Upgrading Program* (NSUP) melalui World Bank, yang dapat mengeliminir 48,918 Ha kawasan kumuh di wilayah tersebut. Sementara untuk penanganan kumuh untuk luasan dibawah 10 ha, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinperkimtan meluncurkan Program Penanganan Kawasan Kumuh Berbasis Masyarakat (PAKU EMAS); yang sudah berkontribusi banyak terhadap pengurangan luasan kumuh di wilayah Kabupaten Purworejo. Intervensi pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.63. Pengurangan kawasan kumuh Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Nama Lokasi/ Kawasan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Nomor 160.18/526/2020			Penanganan Kumuh Tahun 2025			
		RT-RW	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh	Sisa Kumuh		
						Nilai	Tingkat	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
1	Baledono 13,50 Ha	RT001-RW005	Baledono	Purworejo	0,53	17	KUMUH RINGAN			6	TIDAK KUMUH
2		RT001-RW007	Baledono	Purworejo	0,61	27	KUMUH RINGAN			10	TIDAK KUMUH
3		RT002-RW004	Baledono	Purworejo	0,79	24	KUMUH RINGAN			2	TIDAK KUMUH
4		RT002-RW005	Baledono	Purworejo	0,33	21	KUMUH RINGAN			11	TIDAK KUMUH
5		RT002-RW007	Baledono	Purworejo	0,30	29	KUMUH RINGAN			6	TIDAK KUMUH
6		RT003-RW004	Baledono	Purworejo	0,69	27	KUMUH RINGAN			7	TIDAK KUMUH
7		RT003-RW005	Baledono	Purworejo	0,50	18	KUMUH RINGAN			5	TIDAK KUMUH
8		RT003-RW007	Baledono	Purworejo	0,26	17	KUMUH RINGAN			16	KUMUH RINGAN
9		RT003-RW008	Baledono	Purworejo	0,69	24	KUMUH RINGAN			8	TIDAK KUMUH
10		RT004-RW005	Baledono	Purworejo	0,54	20	KUMUH RINGAN			6	TIDAK KUMUH
11		RT004-RW007	Baledono	Purworejo	0,81	25	KUMUH RINGAN			16	KUMUH RINGAN
12		RT004-RW008	Baledono	Purworejo	2,35	25	KUMUH RINGAN			13	TIDAK KUMUH
13		RT005-RW004	Baledono	Purworejo	0,36	21	KUMUH RINGAN			6	TIDAK KUMUH
14		RT005-RW007	Baledono	Purworejo	0,25	29	KUMUH RINGAN			7	TIDAK KUMUH
15		RT005-RW008	Baledono	Purworejo	1,59	24	KUMUH RINGAN			11	TIDAK KUMUH
16		RT006-RW004	Baledono	Purworejo	0,79	26	KUMUH RINGAN			7	TIDAK KUMUH
17		RT006-RW007	Baledono	Purworejo	0,47	29	KUMUH RINGAN			9	TIDAK KUMUH
18		RT007-RW004	Baledono	Purworejo	0,39	22	KUMUH RINGAN			1	TIDAK KUMUH
19		RT007-RW007	Baledono	Purworejo	0,79	18	KUMUH RINGAN			17	KUMUH RINGAN
20		RT008-RW007	Baledono	Purworejo	0,47	16	KUMUH RINGAN			20	KUMUH RINGAN
21	Keseneng 2,80 Ha	RT001-RW001	Keseneng	Purworejo	1,25	26	KUMUH RINGAN			21	KUMUH RINGAN
22		RT004-RW001	Keseneng	Purworejo	1,55	31	KUMUH RINGAN			27	KUMUH RINGAN
23	Mranti 4,39 Ha	RT003-RW003	Mranti	Purworejo	1,47	35	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
24		RT004-RW003	Mranti	Purworejo	2,92	29	KUMUH RINGAN	2,92	-	12	KUMUH RINGAN
25	Purworejo 10,00 Ha	RT001-RW009	Purworejo	Purworejo	1,80	21	KUMUH RINGAN	-	-	0	TIDAK KUMUH
26		RT001-RW012	Purworejo	Purworejo	1,30	19	KUMUH RINGAN	-	-	0	TIDAK KUMUH
27		RT002-RW001	Purworejo	Purworejo	2,10	28	KUMUH RINGAN	-	-	13	TIDAK KUMUH
28		RT002-RW012	Purworejo	Purworejo	0,54	28	KUMUH RINGAN	-	-	0	TIDAK KUMUH
29		RT002-RW013	Purworejo	Purworejo	3,42	22	KUMUH RINGAN	-	-	1	TIDAK KUMUH
30		RT003-RW012	Purworejo	Purworejo	0,44	29	KUMUH RINGAN	-	0,44	17	KUMUH RINGAN
31		RT006-RW012	Purworejo	Purworejo	0,41	41	KUMUH SEDANG	-	0,41	16	KUMUH RINGAN
32	Pangenjuru tengah 39,30 Ha	RT001-RW004	Pangenjuru tengah	Purworejo	6,38	34	KUMUH RINGAN	-	-	11	TIDAK KUMUH
33		RT001-RW005	Pangenjuru tengah	Purworejo	6,32	21	KUMUH RINGAN	-	-	3	TIDAK KUMUH
34		RT002-RW004	Pangenjuru tengah	Purworejo	8,31	33	KUMUH RINGAN	-	-	12	TIDAK KUMUH
35		RT002-RW005	Pangenjuru tengah	Purworejo	7,72	27	KUMUH RINGAN	-	-	12	TIDAK KUMUH
36		RT003-RW004	Pangenjuru tengah	Purworejo	4,83	33	KUMUH RINGAN	4,83	-	14	KUMUH RINGAN
37		RT003-RW005	Pangenjuru tengah	Purworejo	5,75	23	KUMUH RINGAN	-	-	12	TIDAK KUMUH
38	Pangenrejo 7,90 Ha	RT001-RW002	Pangenrejo	Purworejo	1,98	21	KUMUH RINGAN	-	-	13	TIDAK KUMUH
39		RT001-RW006	Pangenrejo	Purworejo	1,65	16	KUMUH RINGAN	-	-	6	TIDAK KUMUH

No	Nama Lokasi/ Kawasan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Nomor 160.18/526/2020			Penanganan Kumuh Tahun 2025			
		RT-RW	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Pengurangan Kumuh	Sisa Kumuh		
						Nilai	Tingkat	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Nilai	Tingkat
40	Kutoarjo 48,92 Ha	RT002-RW005	Pangenrejo	Purworejo	1,27	25	KUMUH RINGAN	-	-	5	TIDAK KUMUH
41		RT002-RW006	Pangenrejo	Purworejo	3,00	23	KUMUH RINGAN	-	3,00	16	KUMUH RINGAN
42		RT001-RW001	Kutoarjo	Kutoarjo	3,62	27	KUMUH RINGAN	-	-	5	TIDAK KUMUH
43		RT001-RW002	Kutoarjo	Kutoarjo	2,81	18	KUMUH RINGAN	-	-	7	TIDAK KUMUH
44		RT001-RW003	Kutoarjo	Kutoarjo	2,22	17	KUMUH RINGAN	-	-	6	TIDAK KUMUH
45		RT001-RW011	Kutoarjo	Kutoarjo	2,96	18	KUMUH RINGAN	-	-	1	TIDAK KUMUH
46		RT001-RW012	Kutoarjo	Kutoarjo	1,09	19	KUMUH RINGAN	-	-	9	TIDAK KUMUH
47		RT002-RW001	Kutoarjo	Kutoarjo	2,70	16	KUMUH RINGAN	-	-	6	TIDAK KUMUH
48		RT002-RW002	Kutoarjo	Kutoarjo	2,80	16	KUMUH RINGAN	-	-	1	TIDAK KUMUH
49		RT002-RW003	Kutoarjo	Kutoarjo	1,57	18	KUMUH RINGAN	-	-	8	TIDAK KUMUH
50		RT002-RW011	Kutoarjo	Kutoarjo	2,44	21	KUMUH RINGAN	-	-	10	TIDAK KUMUH
51		RT002-RW012	Kutoarjo	Kutoarjo	2,01	20	KUMUH RINGAN	-	-	7	TIDAK KUMUH
52		RT003-RW001	Kutoarjo	Kutoarjo	4,02	29	KUMUH RINGAN	-	-	9	TIDAK KUMUH
53		RT003-RW002	Kutoarjo	Kutoarjo	1,78	19	KUMUH RINGAN	-	-	8	TIDAK KUMUH
54		RT003-RW003	Kutoarjo	Kutoarjo	1,97	16	KUMUH RINGAN	-	-	3	TIDAK KUMUH
55		RT003-RW011	Kutoarjo	Kutoarjo	1,97	16	KUMUH RINGAN	-	-	0	TIDAK KUMUH
56		RT003-RW012	Kutoarjo	Kutoarjo	0,95	34	KUMUH RINGAN	-	-	12	TIDAK KUMUH
57		RT004-RW001	Kutoarjo	Kutoarjo	3,64	23	KUMUH RINGAN	-	-	8	TIDAK KUMUH
58		RT004-RW003	Kutoarjo	Kutoarjo	2,41	16	KUMUH RINGAN	-	-	1	TIDAK KUMUH
59		RT004-RW011	Kutoarjo	Kutoarjo	1,19	16	KUMUH RINGAN	-	-	1	TIDAK KUMUH
60		RT004-RW012	Kutoarjo	Kutoarjo	0,98	31	KUMUH RINGAN	-	-	13	TIDAK KUMUH
61		RT005-RW011	Kutoarjo	Kutoarjo	5,79	24	KUMUH RINGAN	-	-	10	TIDAK KUMUH
Total Luas Kumuh					**126,81**			**7,75**	**8,98**		

Sumber : Dinperkimtan, 2026

Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo periode Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64. Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 ha yang Ditangani di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	45,98%	90,70%	90,70%	86,85%	92,97%
2	Luas Kawasan kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha)	58,313	115,022	115,022	110,14	117,90
3	Luas Kawasan kumuh di bawah 10 ha (ha)	126,811	126,811	126,811	126,811	126,811

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2026

3) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas

umum merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Purwoejo Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65. Persentase Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kabupaten Purwoejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	92,93%	92,93%	94,67%	69,76%	69,76%
2	Jumlah rumah yang telah dilengkapi dengan PSU	187.823	187.823	191.333	2.895	2.895
3	Jumlah rumah	202.106	202.106	202.106	4.150	4.150

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2026

Terdapat penurunan capaian di tahun 2024, karena terdapat definisi perumahan yang dilengkapi dengan PSU. Jika dulu semua perumahan dianggap perumahan yang harus dipenuhi PSU-nya, akan tetapi sekarang hanya perumahan yang dibangun oleh pengembang yang bisa ditangani PSU-nya.

e. Bidang Urusan Ketenteramaan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Sementara Pelindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta membantu kegiatan sosial kemasyarakatan.

1. Kebencanaan

Terkait kebencanaan, Kabupaten Purworejo mulai menghitung Indeks Risiko Bencana sejak tahun 2020. Menurut perhitungan BNPB, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Purworejo berada pada nilai 190.01 masuk kategori risiko tinggi. Angka IRBI ini semakin membaik hingga tahun 2025 menurun menjadi 86,45 seiring meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo menjadi daerah yang geografisnya multi ancaman terjadinya bencana alam dan memiliki karakteristik bencana yang unik, dimana setiap terjadi banjir pasti juga terjadi tanah longsor. Sehingga untuk mengatasi masalah ini maka perlu adanya respon yang cepat antara keterpaduan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan bencana, sehingga penanggulangan bencana dapat berjalan cepat, tepat, efisien dan efektif.

Kinerja Badan Penanggulangan bencana Untuk penanggulangan bencana dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 tercapai 100%. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan Pelatihan Tim SAR Penanganan Bencana, Tanggap Darurat Bencana, Gladi Lapang Penanganan Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana. Kinerja yang cukup baik ini juga didukung dengan menurunnya jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana, meningkatnya jumlah sistem peringatfan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan, menurunnya jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.

Meskipun capaian kinerja penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo adalah 100%, namun masih diperlukan upaya serta kerjasama antar stakeholder untuk menurunkan indeks risiko bencana yang ada.

Tabel 2.66. Tabel Kinerja Penanggulangan Bencana Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
4	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. (1.5.3*), (11.b.2*), dan (13.1.1*)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). (11.5.1.(a))	163,63	144,57	127,62	114,09	86,45
6	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,77	0,69	0,69	0.84	0.85
7	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. (1.5.1*), (11.5.1*) dan (13.1.2*)	381,5	624,5	3278,3	960,4	415,4
8	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. (11.5.1 (c))	19	21	28	37	45
9	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. (11.5.2. (a)) dan (1.5.2 (a))	NA	NA	NA	NA	NA
10	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah (1.5.1.(a))	61	65	72	82	91

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2025

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Dengan diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu

dilaksanakan di daerah dengan mengimplementasikan fase perencanaan, pelaksanan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dilaksanakan secara lintas sektor.

Sementara itu Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, semula 0,77 pada Tahun 2021 menjadi 0,85 pada Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah semakin menguat.

2. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada;
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada; dan
d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau perkada.

Penegakan Perda bertujuan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda dilakukan dengan melakukan penyiapan, menganalisis, pengkajian dan perumusan kebijakan penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pengawasan dan teknis penyidikan dan penyelidikan di tingkat Daerah. Penegakan Perda yang dilaksanakan di Kabupaten Purworejo digambarkan dengan adanya kejadian pelanggaran Perda sebagai berikut:

Tabel 2.67. Tabel Penyelesaian Pelanggaran Perda Kabupaten Purworejo

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	2021	6.755	6.755	100
2	2022	3.749	3.749	100
3	2023	2.538	2.538	100
4	2024	3.858	3.858	100
5	2025	1.601	1.601	100

Sumber: Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo, 2025

Adapun Kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo bisa dilihat dari indikator kinerja di bawah ini:

Tabel 2.68. Tabel Kinerja Penyelenggaraan Trantibum Linmas

No	Indikator	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibum linmas	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	58,33%	81,08%,	80,82%	100%	100%
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15,58 menit	10,59 menit	5,15 menit	6,12 menit	7,73 menit

Sumber: Satpol PP Damkar Kabupaten Purworejo 2025

f. Bidang Urusan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Tabel 2.69. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase PPKS yang tertangani	24.26	24.95	25.60	26.90	27,45

Sumber: Dinsosdaldukkb Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan Tabel 2.64, persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat, dari 24,26 persen pada tahun 2021 menjadi 27,45 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya cakupan pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada PPKS melalui berbagai program perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan, dan jaminan sosial yang didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah.

Meskipun demikian, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian besar PPKS yang belum memperoleh pelayanan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan jangkauan layanan melalui penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pemutakhiran data PPKS, serta penguatan sinergi lintas sektor agar pelayanan kesejahteraan sosial semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat yang berada dalam kondisi rentan.

Tabel 2.70. Tabel Data PPKS di Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025

No	Indikator		Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	279	113	71		15	3
2	Anak Terlantar (AT)	107	83	53		5	2
3	Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	89	38	25		7	1
4	Anak Jalanan	20	19	15		6	3
5	Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)	840	667	639		458	286
6	Anak dengan Disabilitas Fisik	606	235	200		144	89
	a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	352	235	200		144	89
	a.2. Mata (Tuna Netra)	155	37	37		16	9
	a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	99	15	48		43	3
7	Disabilitas Sensorik		109	106		75	45
8	Disabilitas Mental	162	223	229		158	92
	b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	141	178	183		138	83
	b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	21	10	8		2	2
9	Disabilitas Mental dan Fisik	72	100	36		22	20
10	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	8	7	4		3	2
11	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	8	18	8		4	5
12	Lanjut Usia Terlantar	9	2.079	1.466		152	109
13	Penyandang Disabilitas	7.435	6.547	6.434		6.305	4.276
14	a. Penyandang Disabilitas Fisik	5.365	2.437	2.385		2.112	1.481
	a.1. Tubuh (Tuna Daksa)	2.674	2.437	2385		2112	1.481
	a.2. Mata (Tuna Netra)	1.688	463	445		440	328
	a.3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	1.003	637	501		500	291
15	b. Penyandang Disabilitas Sensorik		1.232	1.129		1.133	752
16	Disabilitas Mental	1.738	2.410	2.485		2.592	1.729
	b.1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	903	1384	1376		1342	669
	b.2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	835	180	238		222	170
17	Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	332	249	199		458	314
18	Tuna Susila (TS)	79	80	63		50	24

No	Indikator		Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
19	Gelandangan	35	35	35		21	13
20	Pengemis	58	57	49		36	18
21	Pemulung	101	102	105		87	42
22	Kelompok Minoritas/Waria	2	1	-			0
	Waria	-	1	-			0
	Gay	-	-	-			0
23	Bekas Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	255	230	195		81	63
24	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	8	8	7		6	2
25	Korban Penyalahgunaan NAPZA	10	10	6		1	1
26	Korban Trafficking	2	2	1		1	1
27	Korban Tindak Kekerasan	18	15	3		1	1
28	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	2	2	-		0	0
29	Korban Bencana Alam	20	20	18		0	0
30	Korban Bencana Sosial	2	2	2		2	1
31	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	965	906	664		308	269
32	Fakir Miskin	129.779	112.545	121.993		117.594	122.725
33	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	36	40	28		8	10
34	Komunitas adat Terpencil	-	-	-		0	-
	JUMLAH	140.167	123.626	131.884		121.151	117.857

Sumber : Dinsos Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Purworejo tahun 2021–2025, jumlah PPKS secara umum menunjukkan tren menurun, dari 140.167 jiwa pada tahun 2021 menjadi 117.857 jiwa pada tahun 2025 atau turun sekitar 15,9 persen. Penurunan terjadi pada sebagian besar kelompok PPKS, terutama Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Penyandang Disabilitas, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, serta Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa berbagai program perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan pemerintah telah memberikan dampak positif terhadap pengurangan jumlah masyarakat yang berada dalam kondisi rentan sosial.

Meskipun demikian, kelompok fakir miskin masih mendominasi jumlah PPKS dengan angka yang relatif tinggi dan cenderung fluktuatif selama periode 2021–2025. Selain itu, jumlah penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental, juga masih memerlukan perhatian melalui penguatan layanan rehabilitasi, pemberdayaan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, upaya penanganan PPKS perlu terus ditingkatkan melalui

sinergi lintas sektor, pemutakhiran data, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi agar mampu mengurangi kerentanan sosial dan meningkatkan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2.71. Tabel Data PSKS di Kabupaten Purworejo tahun 2021-2024

No	Jenis	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pekerja Sosial Profesional	9	11	8	8
2	Pekerja Sosial Masyarakat	129	1167	4	4
3	Taruna Siaga Bencana	29	60	42	42
4	Pendamping PKH	113	104	110	110
5	Karang Taruna	224	339	54	54
6	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0	286	286	286
7	Penyuluh Sosial	1	3	2	2
8	TKSK	16	16	17	17
9	LKS	12	0	9	9
10	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1
11	Keluarga Pioner	0	86	84	84
12	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	1	10	5	5
13	Dunia Usaha	0	28	0	0
14	Family Care Unit	0	0	0	0
15	SLRT	-	-	494	494

Sumber: Dinsos Provinsi Jawa Tengah, 2025

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena berperan sebagai mitra pemerintah dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berdasarkan data tahun 2021–2024, terdapat beberapa jenis PSKS yang menunjukkan kondisi relatif stabil, seperti Pendamping PKH yang berjumlah 110 orang pada tahun 2023–2024, Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 42 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebanyak 17 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebanyak 9 lembaga, serta Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebanyak 1 lembaga. Selain itu, pada tahun 2023–2024 telah terbentuk 494 unit Sentra Layanan Terpadu (SLRT) yang diharapkan semakin memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial.

Di sisi lain, beberapa jenis PSKS mengalami penurunan jumlah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas, pembinaan, dan optimalisasi peran PSKS agar mampu mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara lebih efektif. Sinergi antara pemerintah daerah, PSKS, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan sosial, terutama dalam penanganan PPKS di Kabupaten Purworejo.

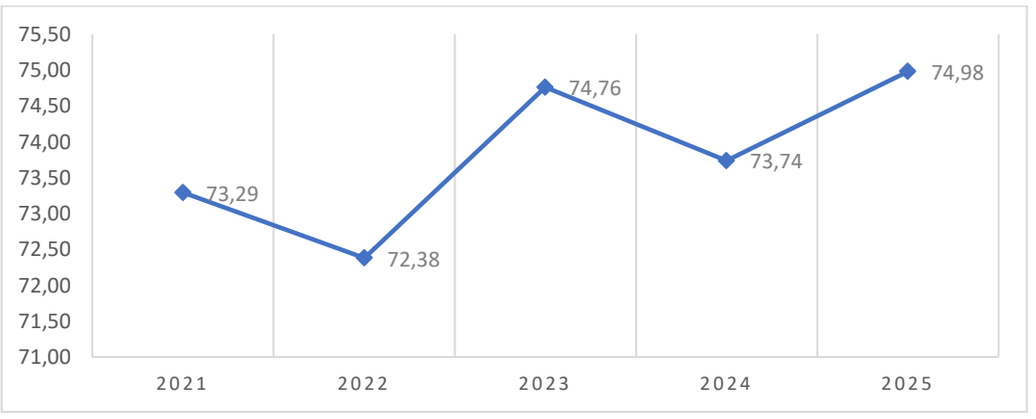
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan:

a. Bidang Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan upaya penting dalam perekonomian daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor produksi yang memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas perekonomian. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk menipendudukngkatkan kuantitas dan kualitas lapangan kerja dalam suatu daerah. Meskipun demikian, pertumbuhan penciptaan lapangan kerja baru cenderung berjalan lebih lambat dibandingkan pertumbuhan penduduk usia kerja. Hal ini mengakibatkan tidak semua angkatan kerja terserap oleh pasar kerja, sehingga terjadi ketidakseimbangan ini akan menciptakan persoalan ketenagakerjaan yaitu pengangguran. Besarnya persentase penduduk yang telah bekerja merupakan suatu ukuran dalam mengidentifikasi permasalahan pada bidang ketenagakerjaan.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan besarnya supply tenaga kerja untuk dapat memproduksi barang dan jasa dalam suatu wilayah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK di Kabupaten Purworejo relatif meningkat dari tahun 2021 (73,29) hingga 2025 (74,38). Hal ini menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian semakin meningkat.



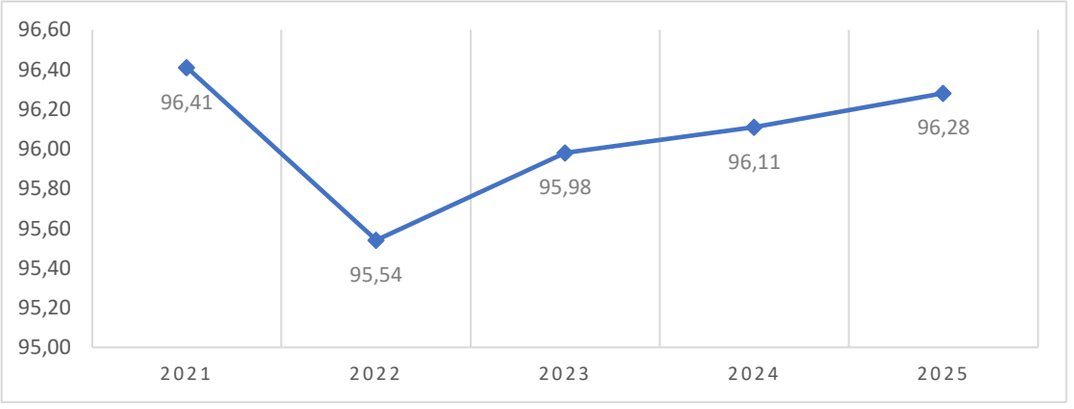
Gambar 2.29. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Purworejo
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2026

Meskipun TPAK di Kabupaten Purworejo relatif meningkat dari tahun 2021-2025 namun jika tidak diimbangi dengan peluang serapannya dalam pasar kerja dapat menyebabkan sebagian jumlah angkatan kerja tidak bisa mendapatkan pekerjaan/menganggur.

Mekanisme pasar kerja sangat bergantung pada adanya permintaan dan penawaran (supply and demand) tenaga kerja. Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja disebabkan karena masih adanya “gap” antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi pencari kerja sehingga menyebabkan terjadinya penganggur terbuka. Penganggur terbuka juga disebabkan masa tunggu bagi angkatan kerja baru untuk mendapatkan

pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Kesempatan kerja di Kabupaten Purworejo dapat dilihat melalui indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) yang menggambarkan persentase penduduk bekerja terhadap total angkatan kerja. Semakin tinggi nilai indikator ini, maka semakin besar proporsi angkatan kerja yang berhasil terserap di pasar kerja.



Gambar 2.30. Tingkat Kesempatan Kerja Kabupaten Purworejo
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2026

Perkembangan kesempatan kerja di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif baik dan stabil, dengan tingkat kesempatan kerja berada pada kisaran 95–96 persen. Setelah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022, kesempatan kerja kembali meningkat pada tahun 2023 hingga 2025 seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian daerah. Namun demikian, kondisi kesempatan kerja yang relatif tinggi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pekerjaan yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari aspek produktivitas tenaga kerja, yang menggambarkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output atau nilai tambah ekonomi. Produktivitas tenaga kerja umumnya diukur dari rasio antara nilai PDRB dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja, sehingga menunjukkan besarnya kontribusi rata-rata setiap pekerja dalam kegiatan ekonomi daerah.

Tabel 2.72. Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo

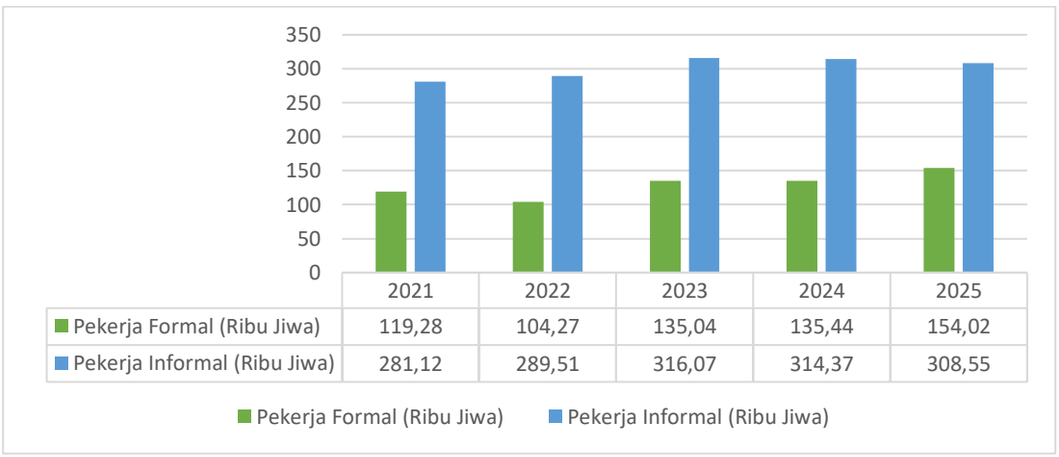
No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	19.602.720	21.352.540	23.187.670	24.823.840	26.483.560
2	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	400.400	393.780	451.110	449.810	462.570
3	Produktivitas Tenaga Kerja Purworejo (Juta Rupiah/ Tenaga Kerja)	48,96	54,22	51,40	55,19	57,25
4	Produktivitas Tenaga Kerja Jateng (Juta Rupiah/ Tenaga Kerja)	79,60	84,78	80,47	87,13	91,25

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo dan BPS Prov. Jateng, 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja Kabupaten Purworejo menunjukkan kecenderungan meningkat dalam jangka menengah. Pada tahun 2021 produktivitas tenaga kerja tercatat sebesar

48,96 juta rupiah per tenaga kerja, kemudian meningkat menjadi 57,25 juta rupiah pada tahun 2025. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah, tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Purworejo masih relatif lebih rendah. Produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah pada periode yang sama tercatat meningkat dari 79,60 juta rupiah per tenaga kerja pada tahun 2021 menjadi 91,25 juta rupiah per tenaga kerja pada tahun 2025. Perbedaan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan produktivitas antara Kabupaten Purworejo dengan tingkat provinsi. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya upaya peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, sehingga produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Purworejo dapat terus meningkat dan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, masih besarnya proporsi tenaga kerja yang terserap pada sektor informal yang umumnya memiliki tingkat produktivitas relatif lebih rendah dibandingkan sektor formal. Pekerjaan pada sektor informal umumnya berskala usaha kecil, menggunakan teknologi sederhana, serta memiliki keterbatasan akses terhadap modal, pelatihan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah yang dihasilkan per tenaga kerja menjadi relatif terbatas. Selanjutnya, terkait pekerja formal dan informal yang secara sederhana dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan pekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai, selebihnya termasuk pekerja informal. Berdasarkan status pekerjaan utamanya, sebagian besar penduduk di Kabupaten Purworejo bekerja secara informal.



	2021	2022	2023	2024	2025
Pekerja Formal (Ribu Jiwa)	119,28	104,27	135,04	135,44	154,02
Pekerja Informal (Ribu Jiwa)	281,12	289,51	316,07	314,37	308,55

Gambar 2.31. Perbandingan Pekerja Formal dan Informal di Kabupaten Purworejo
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2026

Gambar di atas menunjukkan kondisi ketenagakerjaan dari tahun 2021 hingga tahun 2025, pekerja di Kabupaten Purworejo masih didominasi oleh pekerja informal. Meskipun terdapat kenaikan pekerja formal namun lajunya tidak sebesar kenaikan pekerja informal. Sektor informal dapat menjadi salah satu solusi bagi pengurangan pengangguran di Kabupaten Purworejo karena mampu menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan tinggi. Meskipun demikian pekerja pada sektor informal rentan terdampak jika terjadi gejolak secara ekonomi. Selain itu,

tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja informal juga masih sangat rendah di Kabupaten Purworejo. Jamsostek bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat dari risiko sosial, yaitu kecelakaan kerja dan kematian, serta melindungi dari pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah daerah didorong terus memperluas cakupan Jamsostek di sektor formal maupun informal, sebagai upaya perlindungan pada tenaga kerja di Kabupaten Purworejo.

Indikator ketenagakerjaan lain adalah cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Berikut data coverage perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didapatkan dari BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 2.73. *Coverage* Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	101.278	110.331	120.794	113.620
2	Jumlah semesta Penduduk Bekerja / Potensi Peserta (BPJS)	251.559	256.382	262.887	262.887
3	Jumlah Penduduk Bekerja (BPS)	393.780	451.110	449.810	462.570
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	40,26%	43,03%	45,95%	43,22%

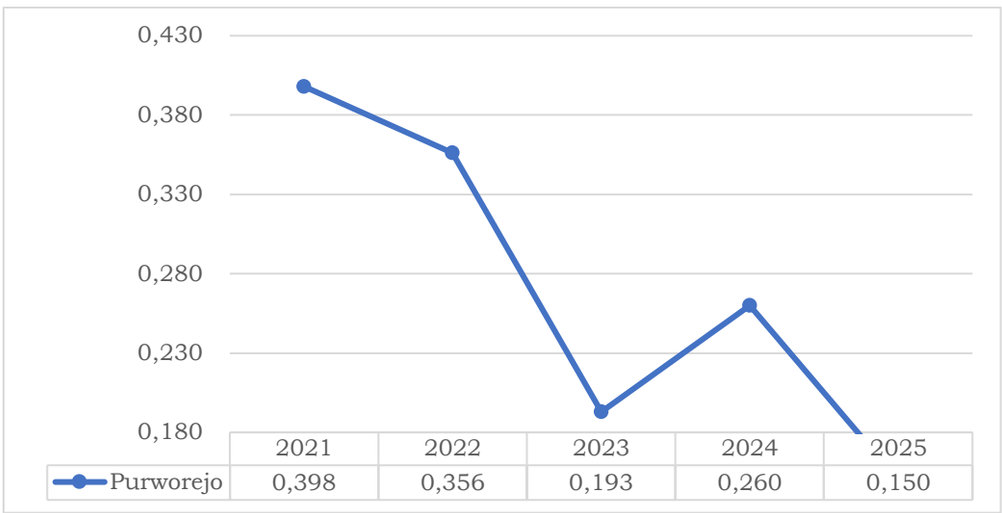
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2026

Berdasarkan perkembangan kepesertaan Jamsostek di Kabupaten Purworejo periode 2022–2025, terlihat tren peningkatan yang konsisten pada tahun 2022–2024, dari 101.278 peserta (40,26%) menjadi 120.794 peserta (45,95%). Namun, pada tahun 2025 jumlah peserta mengalami penurunan menjadi 113.620 peserta dengan tingkat cakupan 43,22%, atau berkurang 7.174 peserta dan 2,73 persen dibandingkan tahun 2024. Meskipun demikian, capaian tahun 2025 masih lebih baik dibandingkan tahun 2022, baik dari sisi jumlah peserta maupun tingkat cakupan.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa upaya perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan masih perlu diperkuat agar tren peningkatan dapat kembali berlanjut. Di sisi lain, jika dibandingkan dengan total angkatan kerja di Kabupaten Purworejo, masih terdapat proporsi pekerja yang belum terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama pekerja pada sektor informal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi, perluasan akses kepesertaan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, baik formal maupun informal.

b. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. IKG menujukkan ketidakoptimalan pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetraan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Semakin rendah nilai IKG maka semakin baik kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.



Gambar 2.32. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan data di atas, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode 2021–2025. Nilai IKG menurun dari 0,398 pada tahun 2021 menjadi 0,356 pada tahun 2022, kemudian kembali turun cukup signifikan menjadi 0,193 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 IKG meningkat menjadi 0,264, namun pada tahun 2025 kembali menurun menjadi 0,150, yang merupakan nilai terendah selama periode pengamatan. Semakin rendah nilai IKG menunjukkan semakin kecil ketimpangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.74. Indeks Ketimpangan Gender dan Komponen Penyusunnya

Tahun	Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan	Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berumur <20th	Persentase Keterwakilan di Legislatif		Persentase Penduduk Usia 25 tahun ke atas dengan Pendidikan SMA ke atas		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		IKG
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2021	0,080	0,193	82,22	17,78	37,25	31,46	84,49	62,57	0,398
2022	0,042	0,204	82,22	17,78	39,31	32,44	83,96	61,29	0,356
2023	0,000	0,199	80,00	20,00	40,59	32,97	85,74	63,86	0,193
2024	0,014	0,215	77,78	22,22	45,68	34,86	84,64	62,87	0,264
2025	0,124	0,000	42,84	34,49	77,27	22,73	85,83	64,20	0,150

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2026

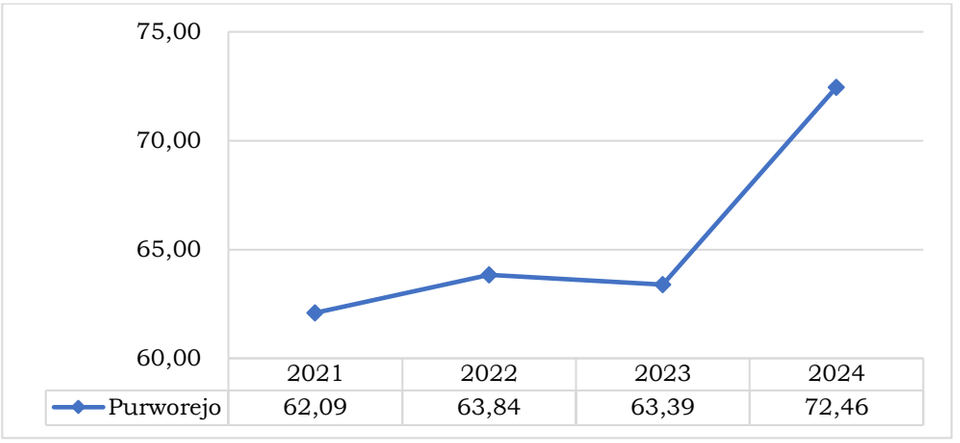
Penurunan IKG pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 didukung oleh membaiknya beberapa indikator penyusun. Pada dimensi kesehatan reproduksi, tidak terdapat lagi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup di luar fasilitas kesehatan, yaitu turun dari 0,042%menjadi 0,000%. Selain itu, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif meningkat dari 17,78% menjadi 20,00%, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga meningkat dari 61,29% menjadi 63,86%. Meskipun proporsi perempuan yang melahirkan pertama pada usia kurang dari 20 tahun sedikit menurun dari 0,204 menjadi 0,199, perbaikan pada indikator kesehatan, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi tersebut mampu menurunkan tingkat ketimpangan gender secara signifikan.

Pada tahun 2024, IKG kembali meningkat menjadi 0,264. Peningkatan ini dipengaruhi oleh memburuknya indikator kesehatan reproduksi, yaitu meningkatnya proporsi perempuan yang melahirkan hidup di luar fasilitas kesehatan dari 0,000% menjadi 0,014%, serta meningkatnya proporsi perempuan yang melahirkan pertama pada usia kurang dari 20 tahun dari 0,199 menjadi 0,215. Selain itu, TPAK laki-laki dan perempuan juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, masing-masing dari 85,74% menjadi 84,64% dan dari 63,86% menjadi 62,87%. Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan gender kembali meningkat, meskipun keterwakilan perempuan di legislatif naik menjadi 22,22% dan capaian pendidikan perempuan juga mengalami peningkatan.

Pada tahun 2025, IKG kembali mengalami penurunan menjadi 0,150. Penurunan ini didorong oleh membaiknya dimensi pemberdayaan dan partisipasi ekonomi perempuan. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif meningkat cukup signifikan menjadi 34,49%, sedangkan TPAK perempuan meningkat menjadi 64,20%. Selain itu, tidak terdapat lagi perempuan yang melahirkan pertama pada usia kurang dari 20 tahun. Walaupun proporsi perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan meningkat menjadi 0,124%, secara keseluruhan peningkatan peran perempuan dalam bidang politik dan ekonomi lebih dominan dalam menurunkan tingkat ketimpangan gender.

Secara umum, perkembangan IKG Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan dalam kesetaraan gender. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi, memperluas kesempatan, memperoleh pendidikan menengah dan tinggi, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan pengambilan keputusan agar ketimpangan gender dapat terus ditekan.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) menggambarkan capaian pembangunan di bidang perlindungan anak melalui pengukuran berbagai aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. IPA digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan telah menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Nilai IPA yang semakin tinggi menunjukkan semakin baik kualitas perlindungan anak di suatu daerah, sedangkan nilai yang rendah mengindikasikan masih perlunya peningkatan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.



Gambar 2.33. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2024

Sumber: KemenPPPA, 2026

Berdasarkan data di atas, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Nilai IPA meningkat dari 62,09 pada tahun 2021 menjadi 63,84 pada tahun 2022 atau naik sebesar 1,75 poin. Selanjutnya, pada tahun 2023 nilai IPA sedikit menurun menjadi 63,39, namun penurunan tersebut relatif kecil sehingga secara umum kondisi perlindungan anak masih berada pada tingkat yang relatif stabil.

Tabel 2.75. Indeks Perlindungan Anak dan Komponen Penyusunnya

Tahun	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus	IPA
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2022	56,61	81,91	79,91	30,35	66,59	63,84
2023	55,07	84,05	80,01	22,62	70,05	63,39
2024	86,22	75,63	62,27	64,73	76,00	72,46

Sumber: KemenPPPA, 2026

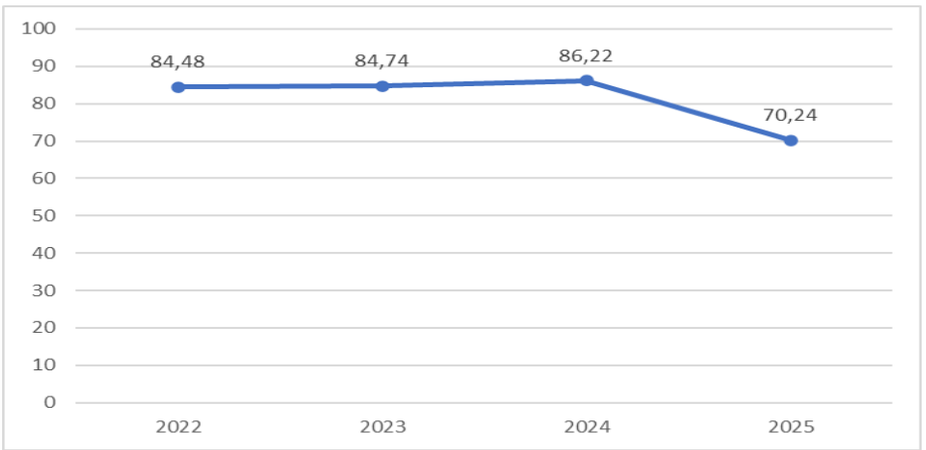
Apabila ditinjau berdasarkan komponen penyusunnya, peningkatan IPA pada tahun 2024 terutama didorong oleh kenaikan yang sangat signifikan pada Indeks Dimensi 1 (Hak Sipil dan Kebebasan) yang meningkat dari 55,07 menjadi 86,22, serta Indeks Dimensi 4 (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya) yang meningkat dari 22,62 menjadi 64,73. Selain itu, Indeks Dimensi 5 (Perlindungan Khusus) juga mengalami peningkatan dari 70,05 menjadi 76,00, yang mengindikasikan semakin baiknya upaya perlindungan terhadap anak yang berada dalam situasi khusus maupun rentan.

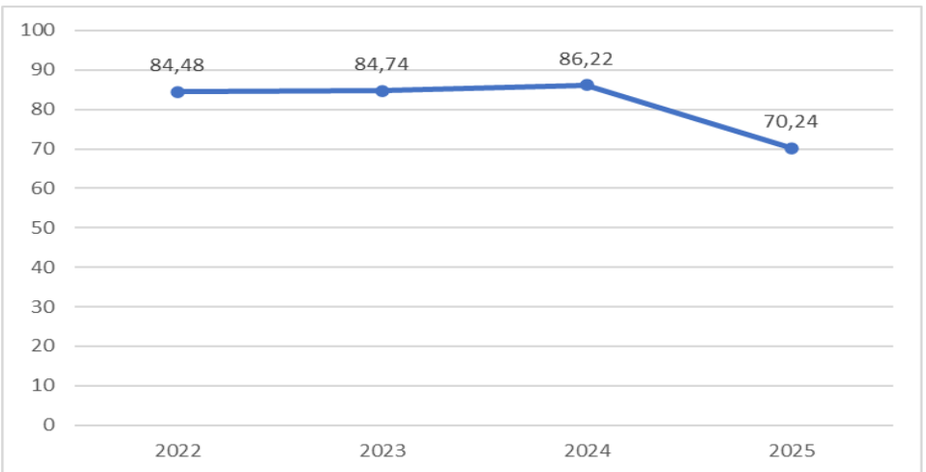
Di sisi lain, beberapa dimensi mengalami penurunan pada tahun 2024. Indeks Dimensi 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif) menurun dari 84,05 menjadi 75,63, sedangkan Indeks Dimensi 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan) mengalami penurunan yang cukup besar dari 80,01 menjadi 62,27. Penurunan pada kedua dimensi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak serta dalam pemenuhan aspek kesehatan dasar dan kesejahteraan anak.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai IPA pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Kabupaten Purworejo semakin efektif, terutama dalam menjamin hak sipil anak, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kegiatan budaya, serta memperkuat perlindungan khusus bagi anak. Namun demikian, pemerintah daerah masih perlu memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kualitas pengasuhan keluarga, penguatan layanan kesehatan dasar, dan pemenuhan kesejahteraan anak agar seluruh dimensi penyusun IPA dapat berkembang secara lebih seimbang dan berkelanjutan.

c. Bidang Urusan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dikembangkan oleh Badan Pangan Nasional yang mengadopsi dari (*Global Food Security Index - GFSI*) dan disesuaikan dengan ketersediaan data di Indonesia. IKP disusun mempertimbangkan tiga pilar yaitu pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Berdasarkan hasil analisis dari Badan Pangan Nasional, IKP Kabupaten Purworejo dari tahun 2022-2025.





Gambar 2.34. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo
Sumber: Ringkasan FSVA Tahun 2025, Badan Pangan Nasional 2025

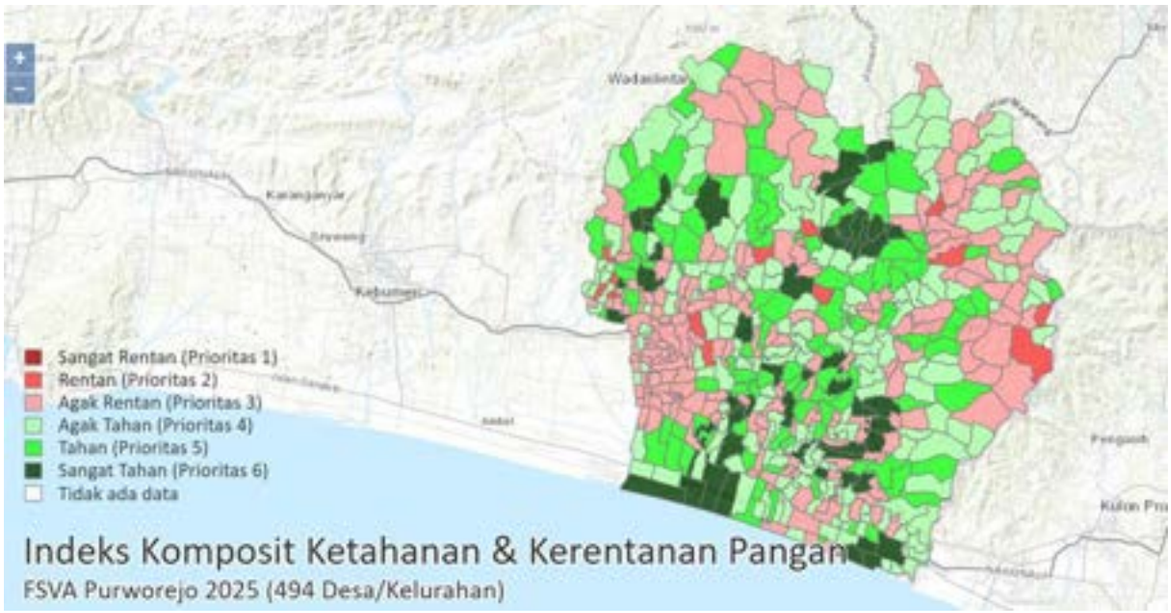
Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Purworejo dari tahun 2022 hingga 2025, ketahanan pangan terus mengalami peningkatan dan selalu berada dalam kelompok dengan ketahanan pangan yang sangat tahan di tingkat nasional. Pada tahun 2025, IKP menunjukkan nilai yang menurun dan menjadi pada kelompok tahan. Menurunnya nilai IKP di Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 salah satunya disebabkan oleh perubahan metodologi melalui penambahan variabel baru seperti (stabilitas harga, PoU, keamanan pangan, skor PPH, protein hewani, CPPD). Adanya penambahan variabel baru terhadap perhitungan IKP ini perlu disikapi dengan fokus pada perbaikan pada aspek ketersediaan pangan yang mendongkrak pada peningkatan konsumsi energi dan protein hewani perkapita dan pengelolaan CPPD, pada aspek keterjangkauan melalui pengendalian harga pangan dan menurunkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, aspek konsumsi melalui peningkatan keamanan pangan dan pola konsumsi pangan yang beragam seimbang.

Meskipun IKP Kabupaten Purworejo menunjukkan kondisi tahan secara keseluruhan, penting untuk dicatat bahwa tidak semua kecamatan, desa, atau penduduk di dalamnya memiliki tingkat ketahanan pangan yang sama. Untuk mengidentifikasi daerah yang benar-benar rentan terhadap masalah pangan, diperlukan pembuatan peta provinsi dan kabupaten hingga ke unit wilayah terkecil. Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) tahun 2025, terdapat 179 desa dari total desa di Kabupaten Purworejo yang termasuk dalam kategori rentan pangan (prioritas 1-3). Jumlah tersebut secara akumulasi meningkat jika dibandingkan tahun 2021, dimana terdapat 109 desa yang termasuk dalam kategori rentan pangan. Hasil analisis FSVA ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk fokus pada perbaikan ketahanan pangan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi sebagai rentan untuk memastikan bahwa semua penduduk dapat menikmati tingkat ketahanan pangan yang memadai.

Tabel 2.76. Kerentanan Pangan di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Prioritas	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Prioritas 1 (Sangat Rentan)	9	9	0	0	0
2	Prioritas 2 (Rentan)	45	45	15	10	13
3	Prioritas 3 (Agak Rentan)	55	55	77	121	166
4	Prioritas 4 (Agak Tahan)	74	74	192	177	170
5	Prioritas 5 (Tahan)	188	188	167	98	96
6	Prioritas 6 (sangat tahan)	123	123	43	8	49

Sumber: https://fsva.badanpangan.go.id/ 2026



Gambar 2.35. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Purworejo
Sumber: https://fsva.badanpangan.go.id/ 2026

Peta di atas menunjukkan bahwa desa rentan/rawan pangan yang berada di prioritas 1, 2, dan 3 didominasi pada wilayah-wilayah perbatasan dataran tinggi. Prioritas 1 paling banyak berada di Kecamatan Bruno. Desa-desa yang dalam posisi prioritas 2-3 merupakan desa-desa dengan rasio lahan baku sawah yang rendah, daya beli masyarakat yang rendah, memiliki lokasi yang cukup jauh dari pusat kota, dan mengalami kendala untuk mendapatkan akses air bersih. Pemerintah Kabupaten Purworejo terus berupaya menangani desa rentan/rawan pangan melalui beberapa cara yaitu menyalurkan cadangan pangan pada desa rawan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Selain penyaluran cadangan pangan, pada desa-desa tersebut juga dilakukan pendampingan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan lokal.

Meskipun telah dilakukan penanganan namun jumlah desa rentan rawan pangan belum menunjukkan pengurangan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh penanganan desa rentan/rawan pangan di Kabupaten Purworejo yang dilakukan belum komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor penyebab desa rentan/rawan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan yang meliputi akses ekonomi, akses fisik/ infrastruktur, dan akses sosial, serta pemanfaatan pangan dengan indikator akses terhadap air bersih dan rasio tenaga kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar sektor yang terkait dalam penanganan desa rentan/rawan pangan di Kabupaten Purworejo.

Untuk mengukur seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan, dapat digunakan indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU). Indikator ini mencerminkan proporsi penduduk yang mengalami kekurangan gizi, yaitu mereka yang tidak memenuhi kebutuhan energi yang diperlukan untuk kesehatan dan kesejahteraan. Semakin tinggi nilai PoU, semakin besar proporsi penduduk yang tidak memperoleh konsumsi pangan dengan kandungan nutrisi yang memadai. Dengan demikian, nilai PoU yang tinggi mengindikasikan adanya masalah serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan di wilayah tersebut. Berikut adalah capaian PoU di Kabupaten

Purworejo untuk tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukkan perubahan dalam prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan selama periode tersebut.

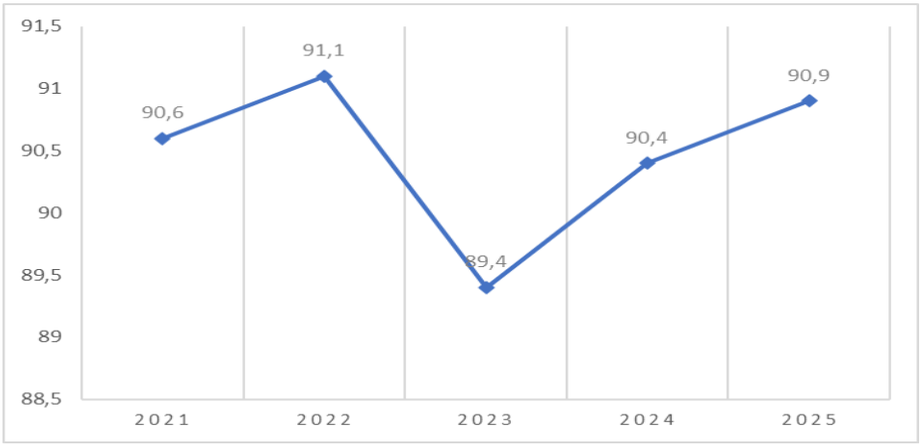


Gambar 2.36. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment)* Kabupaten Purworejo
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) di Kabupaten Purworejo menempati posisi tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yang mengindikasikan perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Purworejo. Meskipun tren penurunan ini menggambarkan upaya positif dalam mengatasi masalah ketidakcukupan pangan, angka tersebut tetap menunjukkan tantangan signifikan yang harus diatasi untuk memastikan semua penduduk mendapatkan akses pangan yang cukup dan bergizi.

Di sisi lain, kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan PPH

ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal sebesar 100.



Gambar 2.37. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Purworejo
Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2026

Skor PPH (Pola Pangan Harapan) di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren perbaikan yang konsisten dari tahun 2021 hingga 2025, dengan skor yang semakin mendekati angka 100, menandakan peningkatan kualitas konsumsi pangan. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, hal ini disebabkan oleh perubahan metodologi perhitungan yang kini didasarkan pada data pengeluaran masyarakat untuk kelompok pangan tertentu. Penurunan ini tidak mencerminkan penurunan kualitas konsumsi pangan secara keseluruhan, melainkan lebih pada penyesuaian data yang lebih akurat.

Peningkatan skor PPH ini menggambarkan bahwa kualitas dan keragaman konsumsi pangan di Kabupaten Purworejo semakin membaik, yang berkontribusi pada pola makan yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA). Meskipun pencapaian skor PPH di Kabupaten Purworejo merupakan kemajuan signifikan, nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan, Kabupaten Purworejo masih menghadapi tantangan dalam mencapai standar nasional. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan pola konsumsi pangan agar dapat bersaing dengan capaian di tingkat provinsi dan nasional.

Tabel 2.77. Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi di Kabupaten Purworejo berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2021-2025

No	Kelompok Pangan	Standar	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Padi-padian	25	25	25	24,1	23,9	24,7
2	Umbi-umbian	2,5	1,1	1,3	0,9	1	0,8
3	Pangan Hewani	24	17,9	18,6	19,2	19,9	19,5
4	Minyak dan Lemak	5	5	5	4,5	5	5
5	Buah/Biji Berminyak	1	1	1	0,9	0,9	0,9
6	Kacang-kacangan	10	8,2	7,7	7,8	7,8	7,9
7	Gula	2,5	2,4	2,5	2	1,9	1,9
8	Sayur dan Buah	30	30	30	30	30	30
9	Lain-lain	0	0	0	0	0	0
10	**Skor PPH**	**100**	**90,6**	**91,1**	**89,4**	**90,4**	**90,9**

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo, 2025

Pada tahun 2025, skor PPH (Pola Pangan Harapan) Kabupaten Purworejo menunjukkan penurunan pada beberapa kelompok pangan yaitu umbi-umbian dan pangan hewani. Sedangkan jika dibandingkan dengan kondisi ideal, terdapat kelompok pangan yang dibawah standar yaitu pada kelompok padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula. Konsumsi pangan hewani pada tahun 2025 menunjukkan perbaikan dari tahun 2024 meskipun masih jauh dari target ideal. Kenaikan ini menunjukkan adanya upaya menuju peningkatan konsumsi protein hewani, namun masih terhambat oleh faktor harga dan preferensi konsumsi yang lebih berorientasi pada karbohidrat. Disamping itu, masih adanya keterbatasan akses pasokan pada wilayah tertentu yang jauh dari rantai dingin sehingga pilihan pangan hewani terbatas dan harganya relatif lebih mahal. Oleh karena itu, penting untuk mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan, khususnya pada kelompok pangan hewani dan kacang-kacangan, guna mencapai skor PPH yang lebih baik dan mendekati standar yang diharapkan.

Ketersediaan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan konsumsi masyarakat. Tingkat ketersediaan pangan yang memadai menunjukkan bahwa suatu daerah mampu menyediakan bahan pangan yang cukup bagi penduduknya, baik melalui produksi lokal maupun melalui distribusi dari wilayah lain. Oleh karena itu, pemantauan terhadap persentase ketersediaan pangan perlu dilakukan secara berkala guna mengetahui kondisi serta perkembangan ketahanan pangan di suatu daerah. Berikut disajikan data mengenai persentase ketersediaan pangan selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

d. Bidang Urusan Pertanahan

Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan diimplementasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan melalui 3 Program dengan 3 indikator kinerja sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

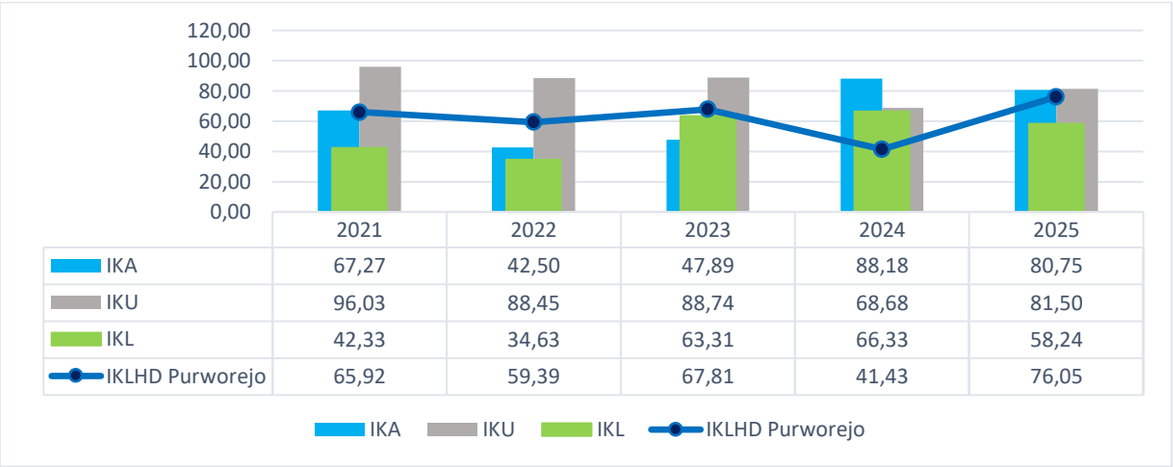
Tabel 2.78. Capaian Kinerja Urusan Bidang Pertanahan Tahun 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penerbitan Izin Lokasi	%	0	0	0,00%	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	%	100	100	100,00%	Sangat Tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Permohonanan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui	%	100	100	100,00%	Sangat Tinggi

Sumber: Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, 2025

e. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan, mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, upaya tersebut menjadi salah satu fondasi penerapan ekonomi hijau, yaitu pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas lingkungan hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun dari komponen Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Perkembangan capaian IKLH Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 memberikan gambaran mengenai kondisi kualitas lingkungan sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas pengelolaan lingkungan dalam mendukung penerapan ekonomi hijau di daerah. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara lengkap disajikan pada diagram berikut:



	2021	2022	2023	2024	2025
IKA	67,27	42,50	47,89	88,18	80,75
IKU	96,03	88,45	88,74	68,68	81,50
IKL	42,33	34,63	63,31	66,33	58,24
IKLHD Purworejo	65,92	59,39	67,81	41,43	76,05

Gambar 2.38. IKLH Kabupaten Purworejo

Sumber : DLHP Kabupaten Purworejo, 2026

Dari tahun 2021-2025 terjadi peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo. IKLH Kabupaten Purworejo tahun 2025 mendapatkan predikat sedang, dimana komponen IKA mendapatkan predikat sedang, IKU berada pada predikat sedang, sedangkan IKL mendapatkan predikat buruk. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo diperlukan intervensi khusus pada kualitas kualitas lahan dan mempertahankan kualitas air dan udara.

Penurunan kualitas lahan di Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu alih fungsi lahan, erosi tanah, serta tekanan pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Perkembangan pembangunan mendorong perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian, tegalan, maupun lahan terbuka menjadi kawasan permukiman dan bangunan usaha. Kondisi tersebut mengurangi tutupan vegetasi serta menurunkan kemampuan tanah dalam menjaga kesuburan dan fungsi hidrologisnya. Selain itu, faktor biofisik wilayah seperti kemiringan lereng, karakteristik tanah yang mudah tererosi, serta praktik pengelolaan lahan yang belum

sepenuhnya menerapkan kaidah konservasi turut meningkatkan risiko degradasi lahan.

Salah satu indikator degradasi lingkungan Penurunan kualitas lahan di Kabupaten Purworejo dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu alih fungsi lahan, erosi tanah, serta tekanan pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Perkembangan pembangunan mendorong perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian, tegalan, maupun lahan terbuka menjadi kawasan permukiman dan bangunan usaha. Kondisi tersebut mengurangi tutupan vegetasi serta menurunkan kemampuan tanah dalam menjaga kesuburan dan fungsi hidrologisnya. Selain itu, faktor biofisik wilayah seperti kemiringan lereng, karakteristik tanah yang mudah tererosi, serta praktik pengelolaan lahan yang belum sepenuhnya menerapkan kaidah konservasi turut meningkatkan risiko degradasi lahan.

Salah satu indikator degradasi lingkungan tersebut adalah luas lahan kritis. Lahan kritis merupakan lahan yang mengalami penurunan fungsi sehingga tidak mampu lagi mendukung produktivitas maupun fungsi ekologis secara optimal. Perkembangan luas lahan kritis di Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

Tabel 2.79. Tabel Luas Lahan Berdasarkan Tingkat Kekritisan di Kabupaten Purworejo Tahun 2022 dan 2024 (Ha)

No	Kekritisan	Tahun 2022 (Ha)	Tahun 2024 (Ha)	Selisih (+/-)
1	Tidak Kritis	52.153,97	61.293,94	9.139,96
2	Potensial Kritis	48,87	21,78	-27,09
3	Agak Kritis	51.683,18	46.127,30	-5.555,88
4	Kritis	4.114,15	624,47	-3.489,69
5	Sangat Kritis	153,01	85,70	-67,31

Sumber : BPDAS Serayu Opak Progo, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, kondisi kekritisan lahan di Kabupaten Purworejo menunjukkan perbaikan pada periode 2022–2024. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya luas lahan tidak kritis dari 52.153,97 hektare menjadi 61.293,94 hektar, serta menurunnya luas lahan pada kategori potensial kritis, agak kritis, kritis, dan sangat kritis. Perbaikan tersebut mengindikasikan bahwa berbagai upaya konservasi dan rehabilitasi lahan mulai memberikan hasil dalam mengurangi tingkat degradasi lahan. Meskipun demikian, kondisi tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan perkembangan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang selama periode 2021–2025 masih menunjukkan pola fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lahan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kekritisan lahan, tetapi juga oleh perubahan tutupan lahan, alih fungsi lahan, pengelolaan kawasan, dan faktor lingkungan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan.

Salah satu upaya tersebut adalah melalui penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian dari penerapan ekonomi hijau. RTH berperan dalam meningkatkan tutupan vegetasi, memperbesar daya resap air, mengurangi risiko erosi, menyerap emisi karbon, serta menjaga keanekaragaman hayati. Berdasarkan data tahun 2023 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo,

luas RTH kawasan perkotaan di Kabupaten Purworejo mencapai 468,70 hektar atau sekitar 7,23% dari luas kawasan perkotaan. Meskipun penyediaan RTH telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan fungsi ekologis kawasan, luas RTH tersebut masih perlu terus ditingkatkan untuk mendukung perbaikan kualitas lahan, meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL), serta memperkuat pembangunan rendah karbon dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Sedangkan untuk Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan pola fluktuatif. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022, nilai IKA meningkat hingga mencapai 88,18 pada tahun 2024, kemudian sedikit menurun menjadi 80,75 pada tahun 2025. Perbaikan kualitas air tersebut menunjukkan adanya upaya pengelolaan sumber daya air dan pengendalian pencemaran yang mulai memberikan hasil, meskipun upaya perlindungan badan air dari pencemaran limbah domestik, pertanian, dan kegiatan usaha perlu terus diperkuat untuk menjaga kualitas air secara berkelanjutan.

Sementara itu, Indeks Kualitas Udara (IKU) juga berfluktuasi, dengan nilai tertinggi sebesar 96,03 pada tahun 2021 dan terendah 68,68 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, IKU meningkat menjadi 81,50, yang menunjukkan kualitas udara relatif terjaga namun tetap menghadapi tekanan dari aktivitas transportasi, pembangunan, dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian emisi, peningkatan ruang terbuka hijau, penggunaan energi yang lebih bersih, serta penerapan pembangunan rendah karbon perlu terus diperkuat sebagai bagian dari implementasi ekonomi hijau.

Selain kualitas lingkungan hidup, kinerja pada urusan lingkungan hidup juga dapat dicerminkan dari pengelolaan sampahnya. Pengelolaan persampahan merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk untuk mengurangi dan mengelola sampah untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.80. Pengelolaan Sampah di Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah timbulan sampah (ton)	105.420,18	105.694,22	117.432,91	117.937,34	118.209,05
2	Jumlah pengurangan sampah (ton)	26.870,36	27.552,64	27.000,84	0	0
	a. Jumlah pembatasan timbulan sampah	*2.409,68*	*1.882,24*	*1.018,33*	*0*	*0*
	b. Jumlah pemanfaatan kembali sampah	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c. Jumlah pendaurulangan sampah	*24.460,68*	*25.671,40*	*25.982,51*	*0*	*0*
3	Jumlah penanganan sampah (ton)	19.116,55	24.356,82	30.716,28	55.019,95	81.412,74
	a. Pemilahan/ Pengumpulan	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	b. Pengangkutan	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	c. Pengolahan	*2.169,60*	*1.372,77*	*3.100,38*	*28.385,90*	*56.267,89*
	d. Pemrosesan akhir	*16.946,95*	*22.984,05*	*27.615,90*	*26.634,05*	*25.144,85*
4	Jumlah sampah terkelola (ton)	44.939,14	51.910,46	57.717,12	55.019,95	81.412,74

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
5	Jumlah sampah tidak terkelola (ton)	60.481,04	53.783,76	59.715,79	62.917,39	36.796,31
6	Persentase penanganan sampah (%)	18,13	23,04	26,16	46,65	68,87
7	Persentase pengurangan sampah (%)	25,49	26,07	22,99	0	0
8	Persentase sampah terkelola (%)	42,63	49,15	49,15	46,65	68,87
9	Persentase sampah tidak terkelola (%)	57,37	50,89	50,85	53,35	31,13
10	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	25,26	25,59	24,77	24,07	47,60

Sumber: DLHP Kabupaten Purworejo, 2025
**Data tahun 2025 belum diverifikasi oleh Kementerian LH*

Data capaian kinerja pengelolaan sampah di atas merupakan data yang dilaporkan dalam SIPSN. Persentase sampah tidak terkelola di Kabupaten Purworejo dari tahun 2021 hingga tahun 2025 meningkat cukup signifikan. Kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Purworejo perlu didorong baik secara penanganan maupun pengurangan sampah. Kinerja pada pengurangan sampah di Kabupaten Purworejo tercatat 0 persen karena terdapat perubahan metode perhitungan, dimana sebelumnya pendaurulangan tercatat dalam pengurangan sampah, namun sejak tahun 2024, kegiatan daur ulang sampah tercatat dalam upaya penanganan sampah. Perubahan metode ini menyebabkan capaian pengurangan sampah secara statistik terlihat menurun atau bahkan nol, meskipun secara faktual kegiatan daur ulang masih tetap berlangsung.

Di samping pengurangan dan penanganan sampah, kegiatan pengolahan sampah menjadi salah satu upaya untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan:

1. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dan sebagainya;
2. Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2025, yang menandakan adanya perbaikan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Purworejo. Peningkatan jumlah sampah yang terolah ini menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan pengelolaan sampah melalui berbagai fasilitas seperti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), TPS 3R, bank sampah, serta fasilitas pengolahan lainnya mulai mengalami peningkatan. Meskipun demikian, kondisi tersebut masih perlu diimbangi dengan peningkatan upaya pengurangan sampah dari sumbernya.Meskipun demikian, kondisi tersebut masih perlu diimbangi dengan peningkatan upaya

pengurangan sampah dari sumbernya.Meskipun demikian, data tahun 2025 masih bersifat sementara (belum tervalidasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup) sehingga masih dimungkinkan terjadi perubahan setelah proses verifikasi dan validasi data oleh pemerintah pusat. Proses validasi ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah dengan kondisi riil di lapangan. Tanpa adanya upaya pengurangan yang optimal, peningkatan timbulan sampah berpotensi kembali meningkatkan beban fasilitas pengolahan dan TPA. Saat ini Pemerintah Kabupaten Purworejo memiliki 1 unt TPA yaitu TPA Gunung Tumpeng di Desa Jetis Kecamatan Loano seluas 4,69 hektar menggunakan sistem pengolahan *controlled landfill*. Setiap harinya TPA tersebut menerima 45-55 ton sampah dimana sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, fasilitas publik, kawasan perkantoran, dan lain sebagainya. Namun demikian, kapasitas TPA Gunung Tumpeng saat ini telah mendekati bahkan melampaui kapasitas rencana operasionalnya. Peningkatan volume sampah yang masuk tidak sebanding dengan ketersediaan lahan penimbunan, sehingga menyebabkan kondisi TPA mengalami kejenuhan atau *over capacity*.

Peningkatan jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan adanya perbaikan kapasitas penanganan sampah, namun kondisi tersebut masih perlu diimbangi dengan peningkatan upaya pengurangan sampah dari sumbernya.

Pemerintah Kabupaten Purworejo saat ini tengah berupaya melakukan transformasi TPA menjadi TPST dan terus memperbaiki sistem pengelolaan persampahan secara terpadu. Perbaikan sistem pengelolaan sampah tersebut dapat ditempuh melalui peningkatan upaya pengurangan sampah dari sumbernya seperti pengembangan bank sampah, penerapan pemilahan sampah rumah tangga, penguatan program *reduce, reuse, recycle* (3R), serta penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi bagian dari transformasi menuju ekonomi hijau dengan mengurangi ketergantungan pada penimbunan sampah di TPA serta meningkatkan nilai tambah dari residu sampah.

Selain pengelolaan sampah dan limbah domestik, pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) juga menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Pengelolaan Limbah B3 yang sesuai dengan ketentuan berperan dalam mencegah pencemaran air, udara, dan lahan yang merupakan komponen penyusun IKLH. Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Purworejo masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum optimalnya kepatuhan sebagian penghasil limbah B3 dalam melakukan penyimpanan dan penyerahan limbah kepada pengelola berizin, terbatasnya pengawasan terhadap penghasil limbah B3 skala kecil, serta belum tersedianya fasilitas pengolahan limbah B3 di Kabupaten Purworejo sehingga pengelolaan masih bergantung pada fasilitas pengolah di luar daerah. Oleh karena itu, penguatan pengawasan, pembinaan, dan pengelolaan Limbah B3 perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo.

Selain kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah, isu perubahan iklim juga menjadi bagian dari pembangunan di Indonesia,

terutama sejak pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Upaya penurunan emisi nasional ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran serta pemerintah daerah untuk bersama-sama memerangi ancaman perubahan iklim global. Dalam upaya mengurangi emisi GRK nasional, sesuai dengan ketentuan pada Perpres No. 61 tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca nasional maka provinsi dan kabupaten/kota juga diwajibkan untuk melakukan inventarisasi gas rumah kaca.

Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo Tahun 2023 sebesar 921,00 Gg CO2eq, dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, emisi tertinggi dihasilkan pada tahun 2019. Sejak tahun 2019-2021 emisi GRK mengalami penurunan, sementara pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2022-2023 emisi GRK kembali mengalami penurunan. Penurunan emisi GRK pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sebesar 18% atau setara dengan 197,14 Gg CO2eq. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh sektor AFOLU. Penurunan yang cukup signifikan diakibatkan penyerapan emisi pada sektor lahan sebesar (31,41) Gg CO2eq dan penurunan produksi kayu bulat dari tahun 2019-2023 sebanyak 37.058 m3.

Penurunan tersebut terjadi di sektor AFOLU, penurunan yang cukup signifikan diakibatkan penyerapan emisi pada sektor lahan dan penurunan produksi kayu bulat. Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Purworejo Tahun 2023 mencapai 921,00 Gg CO2eq dengan proporsi sumber emisi terbesar dari sektor energi yang berkontribusi menghasilkan emisi GRK mencapai 442,92 Gg CO2eq atau sebesar 48,09% dari total emisi GRK Kabupaten Purworejo 2023, sektor AFOLU (Pertanian dan Kehutanan) mencapai 381,19 Gg CO2eq atau sebesar 41,39%, sektor limbah mencapai 71,90 Gg CO2eq atau sebesar 7,81%, sektor IPPU merupakan kontributor emisi GRK terkecil yakni 24,99 Gg CO2eq atau sebesar 2,71% dari total emisi GRK Kabupaten Purworejo 2023.

Pembangunan Rendah Karbon merupakan salah satu strategi dalam mendukung penerapan ekonomi hijau. Implementasi strategi tersebut dilakukan melalui pengintegrasian aksi-aksi mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan daerah pada berbagai sektor, meliputi energi, lahan, kawasan pesisir dan kelautan, serta pengelolaan limbah. Berdasarkan rekapitulasi capaian pada Platform AKSARA Bappenas, hingga tahun 2025 Kabupaten Purworejo telah melaksanakan 784 aksi pembangunan rendah karbon yang diakumulasi sejak tahun 2010. Seluruh aksi tersebut menghasilkan potensi penurunan emisi kumulatif sebesar 1.721.721,30 ton CO_2eq, dengan kontribusi sekitar 4,44 persen terhadap total capaian penurunan emisi di Provinsi Jawa Tengah. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Berikut secara rinci penurunan emisi kumulatif di Kabupaten Purworejo dari tahun 2021-2025.

Tabel 2.81. Tabel Penurunan Emisi Kumulatif di Kabupaten Purworejo (tonCO_2eq)

No	Sektor Mitigasi	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Energi	2.823,53	5.906,60	9.524,53	13.681,91	13.707,90
2	Kawasan Pesisir dan Kelautan	0,00	0,00	759,02	1.578,76	1.578,76
3	Lahan	114.884,76	230.734,55	494.533,85	570.135,44	1.641.971,52
4	Pengelolaan Limbah	1.330,50	4.506,11	35.363,15	64.448,40	64.463,12
Total		119.038,78	241.147,26	540.180,55	649.844,52	1.721.721,30

Sumber : Aksara Bappenas, 2026

Berdasarkan sektor mitigasi, kontribusi penurunan emisi terbesar berasal dari sektor lahan, yang mencapai 1.641.971,52 ton CO_2eq pada tahun 2025, diikuti oleh sektor pengelolaan limbah sebesar 64.463,12 ton CO_2eq, sektor energi sebesar 13.707,90 ton CO_2eq, serta sektor kawasan pesisir dan kelautan sebesar 1.578,76 ton CO_2eq. Secara umum, capaian penurunan emisi kumulatif menunjukkan tren meningkat selama periode 2021–2025, yang mencerminkan semakin luasnya implementasi aksi pembangunan rendah karbon di Kabupaten Purworejo.

Secara umum, kinerja pada urusan lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo menunjukkan kinerja yang membaik dari tahun ke tahun. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk perencanaan di masa yang akan datang, yaitu pencemaran air yang semakin mendorong penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara selama lima tahun terakhir, penurunan kualitas lahan, upaya pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan pada aspek pengurangan sampah dan penanganan sampah, serta adaptasi terhadap perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Meskipun terdapat kemajuan dalam kinerja lingkungan hidup, tantangan yang ada masih sangat besar. Perlu adanya komitmen dan upaya yang lebih kuat dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup secara komprehensif dan berkelanjutan.

f. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil meliputi kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, kepemilikan dokumen pencatatan sipil, instansi/lembaga yang memanfaatkan informasi administrasi kependudukan, dan kesesuaian profil kependudukan dengan regulasi yang berlaku.

1. Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk.

Dokumen pendaftaran penduduk terdiri dari Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Identitas Anak (KIA). Indikator untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Kabupaten Purworejo tersebut dilihat dari persentase kepemilikan KK, persentase kepemilikan KTP-el, dan persentase kepemilikan KIA.

Tabel 2.82. Tabel Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Kepala Keluarga yang Mempunyai KK	269.779	272.121	275.534	278.295	280.688
2	Jumlah Kepala Keluarga	276.870	272.121	275.534	278.295	280.688
3	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	97,44	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan data di atas, persentase kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Purworejo sejak tahun 2022 sudah tercapai 100% hingga tahun 2024. KTP merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). Indikator ini berutujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki KTP. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Berikut merupakan data kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025.

Tabel 2.83. Tabel Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Penduduk yang Mempunyai KTP-el	611.268	615.837	618.040	621.392	622.881
2	Jumlah Wajib KTP	615.563	616.548	619.259	623.239	626.403
3	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	99,30%	99,88%	99,80%	99,70%	99,44%

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purworejo, 2025

Kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 99,30% dan pada tahun 2025 sebesar 99,44%. Peningkatan kepemilikan KTP Elektronik didukung dengan adanya pendampingan SIAK RELASI dan Aplikasi SINDOLALAK serta adanya jemput bola bagi penduduk rentan, wajib KTP yang ada di pondok pesantren dan wajib KTP di desa dan kelurahan secara umum.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri.

Tabel 2.84. Tabel Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Wajib KIA yang Mempunyai KIA	173.912	157.886	168.231	178.524	180.918
2	Jumlah Wajib KIA	194.447	189.171	178.855	185.311	181.760
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	89,44%	83,46%	94,06%	96,33%	99,54%

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purworejo, 2025

Kepemilikan KIA juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 sebesar 89,44% menjadi 99,54% pada 2025. Peningkatan ini didukung dengan adanya kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo melalui pengajuan KIA secara kolektif melalui PAUD, SD/MI, SMP/MTS, adanya pelayanan terpadu pencatatan sipil (3 in 1), pengurusan akta kelahiran, penerbitan KIA dan KK sekaligus, serta bekerjasama dengan Tim Pengerak PKK untuk ikut mensosialisasikan pada saat pertemuan rutin.

Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk masing-masing selalu mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh Pemerintah Pusat melalui DAK dan adanya strategi jemput bola dari dinas bekerjasama dengan pemerintah desa dan kader kesehatan desa.

Permasalahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk diantaranya keterbatasan alat perekaman KTP elektronik, pelayanan belum dapat mencakup seluruh penduduk rentan seperti penduduk dengan keterbatasan fisik, mental, dan penyandang disabilitas, masih banyak penduduk yang secara *de facto* berdomisili di Kabupaten Purworejo namun secara *de jure* beralamat di luar Purworejo, belum adanya kerjasama antar daerah dalam proses pendaftaran penduduk, pelayanan kependudukan secara online belum banyak dipahami oleh masyarakat.

2. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami sesorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan dan perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Dokumen pencatatan sipil terdiri dari Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan.

Kepemilikan akta kelahiran menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Akta kelahiran dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau pembuatan surat-surat penting lainnya, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal. Berikut merupakan data kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025.

Tabel 2.85. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2020 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun yang Mempunyai Akta Kelahiran	200.412	197.144	197.653	196.351	193.938
2	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun	210.092	199.234	198.897	196.357	193.939
3	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95,39%	98,95%	99,37%	99,99%	99,99%

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purworejo, 2025

Kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk usia 0 – 18 tahun dari tahun 2021 sebesar 95,39% meningkat menjadi 99,99% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan

akta kelahiran semakin meningkat. Peningkatan kepemilikan Akta kelahiran didukung dengan adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), adanya aplikasi online turut serta memepermudah pencatatan sehingga setiap kelahiran dapat langsung terdata. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan dokumen pencatatan sipil ditunjukkan dengan meningkatnya kepemilikan akta di tahun 2024 yang hampir mencapai 100% dikarenakan masih adanya data penduduk yang terdapat dalam database yang setelah dikonfirmasi ke desa ternyata sudah pindah ke luar Kabupaten purworejo dan belum melakukan perpindahan secara administrasi kependudukan.

Selanjutnya untuk data terkait dengan akta kematian yang diterbitkan tahun 2021 - 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.86. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Akta Kematian yang Diterbitkan	5.924	9.724	9.223	8.061	8.418
2	Jumlah Kematian yang Dilaporkan	5.924	9.724	9.223	8.061	8.418
3	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purworejo, 2025

Akta kematian dan akta kelahiran merupakan dokumen peristiwa penting yang harus diterbitkan atas setiap peristiwa kematian dan kelahiran penduduk. Digunakan sebagai acuan dalam menyuguhkan database kependudukan yang valid, dan dasar utk perumusan kebijakan pembangunan bagi pmth dan pemanfaatan data bagi stakeholder. Dalam pencapaian target akta kematian dan akta kelahiran sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan, beberapa inovasi telah dilaksanakan. Komitmen dan dukungan fasilitasi pemerintah dlm pelayanan kependudukan merupakan faktor pendorong utama. Adapun faktor hambatannya yaitu kurangnya sarana alat dan sumberdaya terlatih kependudukan utk percepatan layanan kependudukan dan capil.

Akta perkawinan merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akta perkawinan memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Persentase akta perkawinan non muslim dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta perkawinan dengan jumlah seluruh pasangan perkawinan yang dilaporkan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, diketahui bahwa semua pasangan nikah yang ada di Kabupaten Purworejo sudah memiliki akta perkawinan. Berikut adalah data rasio pasangan yang memiliki akta perkawinan di Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025.

Tabel 2.87. Tabel Persentase Akta Perkawinan Non-Muslim yang Diterbitkan

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Akta Perkawinan Non-Muslim yang Diterbitkan	98	130	78	64	69
2	Jumlah Perkawinan non-Muslim yang Dilaporkan	98	130	78	64	69
3	Persentase Akta Perkawinan Non-Muslim yang Diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purworejo, 2025

Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil masing-maisng selalu mengalami peningkatan. Meskipun begitu, kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Purworejo belum mencapai 100%. Dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan KIA belum dirasa penting oleh masyarakat. Selain itu, mobilitas penduduk yang tidak diikuti dengan pencatatan administrasi kependudukan.

Komitmen dan dukungan fasilitasi pemerintah dalam pelayanan kependudukan merupakan faktor pendorong utama. Adapun faktor hambatannya yaitu kurangnya sarana alat dan sumberdaya terlatih kependudukan untuk percepatan layanan kependudukan dan capil. Selain itu, data kependudukan belum menggambarkan kondisi kependudukan secara valid dikarenakan masih terdapat penduduk yang secara *de facto* tinggal di Kabupaten Purworejo namun secara *de jure* masih diakui sebagai warga di luar Kabupaten Purworejo, sehingga masih terdapat penduduk yang terbatas dalam memperoleh akses pelayanan publik. Selain itu, data kependudukan saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pelayanan publik, pengambilan kebijakan, atau keputusan dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Persentase Instansi/Lembaga yang Memanfaatkan Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan mengamanahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkomitmen untuk mendorong pemanfaatan data kependudukan khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sampai dengan tahun 2024 sebanyak 34 Perangkat Daerah dari 41 Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, yang di mana capaian persentasinya sebanyak 82,93% ini dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana pada perangkat daerah.

Tabel 2.88. Tabel Persentase Instansi/Lembaga yang Memanfaatkan Informasi Administrasi Kependudukan

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan	8	24	29	34	38
2	Jumlah instansi	41	41	41	41	41

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	Persentase Instansi/ Lembaga yang Memanfaatkan Informasi Administrasi Kependudukan	19,51%	58,54%	70,73%	82,93%	92,68%

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purworejo, 2025

Pada tahun 2021 instansi/Lembaga yang memanfaatkan informasi administrasi kependudukan mengalami penurunan dari 41 perangkat daerah menjadi 8 perangkat daerah. Hal ini dikarenakan adanya peralihan sistem dari *web service* ke *web portal* sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2020 sehingga Instansi harus mengadakan pembaharuan perjanjian kerja sama. Sampai dengan tahun 2021 baru mencapai 8 perangkat daerah yang telah menyusun perjanjian kerja sama kemudian meningkat menjadi 34 perangkat daerah pada tahun 2024.

4. Persentase Kesesuaian Profil Kependudukan dengan Regulasi yang Berlaku

Profil kependudukan merupakan buku yang memuat informasi kependudukan yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, berisi data dan informasi kependudukan yang dianalisis secara sederhana agar pengguna data dapat memahami kondisi perkembangan kependudukan dan pencatatan sipil.

Data utama dalam penyusunan Buku Profil ini bersumber dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Database kependudukan yang terhubung oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) selanjutnya dikonsolidasikan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB) yang dikeluarkan per-semester setiap tahunnya.

Profil kependudukan Kabupaten Purworejo disusun setiap tahunnya dan telah disusun sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga capaian persentase kesesuaian profil kependudukan adalah 100% dari tahun 2020 - 2024.

Tabel 2.89. Tabel Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah aturan penyusunan profil kependudukan yang sesuai	1	1	1	1	1
2	Jumlah aturan penyusunan profil kependudukan yang seharusnya sesuai	1	1	1	1	1
3	Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Purworejo, 2025

g. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks. Penentuan status desa berdasarkan pada hasil pengukuran Indeks Desa yang merupakan pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDT. Desa Mandiri merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik.

Tabel 2.90. Persentase Desa Mandiri Kabupaten Purworejo

Status Desa	Jumlah Desa	
	2024	2025
1	*2*	*3*
Mandiri	121	47
Maju	188	267
Berkembang	151	151
Tertinggal	8	4
Sangat Tertinggal	1	
Jumlah Desa	469	469
Persentase Desa Mandiri	**25,80%**	**10,02%**

Sumber: KemenPPN/Bappenas RI, 2025

Sebelum lahirnya Indeks Desa ini, pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa dilihat dari penialaian Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Status Desa pada tahun 2024 diperoleh berdasarkan hasil konversi dari Indeks Desa Mandiri, sementara tahun 2025 merupakan tahun pertama pengisian instrumen Indeks Desa sehingga terjadi re-klasifikasi status desa. Berdasarkan data di atas, Kabupaten Purworejo mengalami penurunan signifikan pada jumlah desa mandiri yang menurun menjadi status Desa Maju. Sementara untuk Desa Tertinggal menurun dari 8 desa menjadi 4 desa. Status mandiri mensyaratkan desa memiliki ekonomi yang kuat, infrastruktur lengkap, SDM unggul, dan tata kelola baik.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup.

Tabel 2.91. Tabel Kerja Sama Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Status Desa	Jumlah
1	*2*	*3*
1	Jumlah desa yang melaksanakan kerja sama desa	456 desa

No	Status Desa	Jumlah
1	*2*	*3*
2	Bentuk kerja sama antar desa	456 desa
3	Kerja sama dengan pihak ketiga	Belum tersedia/Belum tercatat
4	Status kerja sama telah ditetapkan	0 desa
5	Status kerja sama belum ditetapkan	456 desa

Sumber: DPPPAMD, 2026

Kerja sama desa menjadi salah satu indikator meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam membangun jejaring dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan. Hingga tahun 2025, sebanyak 456 desa (97,2%) di Kabupaten Purworejo telah melaksanakan kerja sama desa. Tingginya cakupan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa semakin mampu mengembangkan kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, maupun pengembangan potensi ekonomi lokal. Ke depan, tantangan yang dihadapi tidak hanya meningkatkan jumlah desa yang melaksanakan kerja sama, tetapi juga memperkuat kualitas, keberlanjutan, dan legalitas kerja sama sehingga manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih optimal oleh masyarakat.

Tabel 2.92. Tabel Kerjasama Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Status Desa	Jumlah
1	*2*	*3*
1	Jumlah desa yang melaksanakan kerja sama desa	456 desa
2	Bentuk kerja sama antar desa	456 desa
3	Kerja sama dengan pihak ketiga	Belum tersedia/Belum tercatat
4	Status kerja sama telah ditetapkan	0 desa
5	Status kerja sama belum ditetapkan	456 desa

Sumber: DPPPAMD, 2026

Tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Purworejo menunjukkan kondisi yang baik. Hingga tahun 2024, seluruh desa sebanyak 469 desa telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), memiliki Sistem Informasi Desa (SID), memiliki website desa, serta tepat waktu dalam menyusun APBDes dan laporan keuangan desa. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh pemerintah desa telah memenuhi aspek administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ke depan, upaya yang perlu dilakukan adalah mempertahankan capaian tersebut sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penguatan kapasitas aparatur, penataan administrasi pemerintahan, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa.

Salah satu indikator yang mencerminkan perkembangan perekonomian desa adalah keberadaan dan tingkat perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hingga tahun 2024, berdasarkan hasil pemeringkatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kabupaten Purworejo memiliki 15 BUMDes dengan kategori Maju, 143 BUMDes Berkembang, 71 BUMDes Pemula, dan 239 BUMDes Perintis.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes di Kabupaten Purworejo masih berada pada kategori Perintis, yang

mengindikasikan bahwa BUMDes telah terbentuk namun masih memerlukan penguatan dari aspek kelembagaan, tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, maupun pengembangan unit usaha. Di sisi lain, jumlah BUMDes yang telah mencapai kategori Berkembang dan Maju menunjukkan adanya desa-desa yang mampu mengelola potensi ekonomi lokal secara lebih optimal sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan data tersebut, diperlukan upaya pembinaan yang berkesinambungan melalui peningkatan kapasitas pengelola, penguatan tata kelola kelembagaan, akses terhadap permodalan, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak agar BUMDes pada kategori Perintis dan Pemula dapat naik kelas menjadi Berkembang dan Maju. Dengan demikian, peran BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa di Kabupaten Purworejo diharapkan semakin optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

h. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indeks pembangunan keluarga atau iBangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia. iBangga menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, serta untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang, atau rentan. Peningkatan kualitas keluarga dapat menumbuhkan rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Tabel 2.93. Angka iBangga Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2025

No	Dimensi	Tahun			
		2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	iBangga	57,21	62,74	61,90	64,23

Sumber : BKKBN, (2026)

Data menunjukkan bahwa nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Purworejo selama periode 2022–2025 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Nilai iBangga meningkat dari 57,21 pada tahun 2022 menjadi 62,74 pada tahun 2023, sedikit menurun menjadi 61,90 pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 64,23 pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas pembangunan keluarga yang ditinjau dari aspek ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Meskipun demikian, upaya penguatan pembangunan keluarga perlu terus dilakukan melalui peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi, serta perluasan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial agar kualitas keluarga di Kabupaten Purworejo terus meningkat secara berkelanjutan.

Total Fertility Rate (TFR) merupakan rata-rata jumlah anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun), dengan asumsi perempuan tersebut mengalami pola fertilitas sesuai kelompok umur pada tahun tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat fertilitas suatu wilayah dan menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan kependudukan.

Tabel 2.94. Total *Fertility Rate* Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Total *Fertility Rate*	2,10	2,10	2,05	2,11	2,09

Sumber: BKKBN, 2026

Tren *Total Fertility Rate (TFR)* Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada kisaran 2,05–2,11 anak per perempuan. Nilai TFR tercatat sebesar 2,10 pada tahun 2021 dan 2022, kemudian menurun menjadi 2,05 pada tahun 2023, meningkat kembali menjadi 2,11 pada tahun 2024, dan sedikit menurun menjadi 2,09 pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat fertilitas di Kabupaten Purworejo berada pada kisaran *replacement level fertility* (sekitar 2,1 anak per perempuan), yang mencerminkan kondisi fertilitas yang relatif terkendali. Ke depan, upaya peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta edukasi mengenai perencanaan keluarga perlu terus diperkuat untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dan mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Demand Satisfied adalah indikator yang menggambarkan persentase perempuan usia subur (15–49 tahun) yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan, dan telah menggunakan metode kontrasepsi modern. Indikator ini mencerminkan sejauh mana kebutuhan akan pengaturan kehamilan telah terpenuhi melalui akses terhadap layanan kontrasepsi yang efektif, aman, dan sesuai preferensi pengguna. Tingginya angka *demand satisfied* menunjukkan keberhasilan program keluarga berencana dalam menjangkau kelompok sasaran dengan pelayanan yang memadai. Sebaliknya, rendahnya angka ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses, keterbatasan informasi, atau hambatan sosial budaya yang menghambat penggunaan kontrasepsi modern.

Tabel 2.95. Demand Satisfied Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	*Demand Satisfied*	80,42	81,42	82,95	83,9	87,11

Sumber: Dinsosdukpppa Kabupaten Purworejo, 2025

Capaian *demand satisfied* Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2021–2025. Persentase perempuan usia subur yang kebutuhan ber-KB menggunakan metode kontrasepsi modernnya

telah terpenuhi meningkat dari 80,42% pada tahun 2021 menjadi 81,42% pada tahun 2022, 82,95% pada tahun 2023, 83,90% pada tahun 2024, dan mencapai 87,11% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mengindikasikan semakin baiknya akses dan pemanfaatan pelayanan keluarga berencana serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap metode kontrasepsi modern. Capaian ini menjadi indikator positif dalam mendukung kesehatan reproduksi, pemenuhan hak reproduksi, serta penguatan ketahanan keluarga sebagai salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kehamilan tidak direncanakan merupakan kondisi di mana seorang perempuan mengalami kehamilan tanpa adanya keinginan untuk hamil saat itu atau sama sekali tidak menginginkan anak lagi. Indikator ini penting dalam menggambarkan tingkat keberhasilan pelayanan keluarga berencana, pendidikan kesehatan reproduksi, serta akses terhadap kontrasepsi yang efektif. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak, kelanjutan pendidikan, serta stabilitas ekonomi dan sosial keluarga. Angka kehamilan tidak direncanakan yang tinggi biasanya terjadi akibat penggunaan kontrasepsi yang tidak konsisten atau tidak efektif, kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi, serta keterbatasan akses terhadap layanan KB, terutama di kalangan remaja, kelompok miskin, dan wilayah pedesaan. Selain itu, faktor budaya dan tekanan sosial juga dapat menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi.

Tabel 2.96. Prevalensi Kehamilan Tidak Direncanakan di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Prevalensi Kehamilan Tidak Direncanakan	16,2	15,67	15,21	14,8	31,2

Sumber: Dinsosdukpppa Kabupaten Purworejo, 2025

Prevalensi kehamilan tidak direncanakan di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan menurun, seiring dengan meningkatnya cakupan penggunaan kontrasepsi modern dan penguatan edukasi kesehatan reproduksi di tingkat komunitas. Pada tahun 2021, proporsi kehamilan tidak direncanakan berada pada kisaran 16,2%, dan turun menjadi sekitar 14,8% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam meningkatkan akses terhadap informasi dan layanan KB yang berkualitas. Namun pada tahun 2025 kembali meningkat dengan signifikan menjadi 31,2%. Tantangan masih dihadapi dalam menurunkan angka kehamilan tidak direncanakan di kalangan remaja dan pasangan usia muda. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk penguatan pendidikan kesehatan reproduksi berbasis sekolah dan komunitas, layanan ramah remaja, serta pelibatan aktif tokoh masyarakat dalam mendorong perubahan perilaku. Penurunan kehamilan yang tidak direncanakan akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesehatan ibu dan anak, penurunan angka kematian maternal, serta

perencanaan keluarga yang lebih baik dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

i. Bidang Urusan Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Pengembangan sektor transportasi diharapkan tidak hanya sekedar mendukung pembangunan di Kabupaten Purworejo tetapi harus mampu menjadi bagian dari arah pembangunan di Kabupaten Purworejo. Keberhasilan pembangunan sektor transportasi bukan hanya diukur dari ketersediaan layanan ataupun terbangunnya infrastruktur transportasi seperti jalan, jalan rel, terminal penumpang atau barang, stasiun, dan infrastruktur lainnya (*output*) tetapi bagaimana memastikan layanan dan infrastruktur yang terselenggara atau terbangun dapat digunakan dan memberikan nilai tambah bagi penggunanya (*outcome*), serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Purworejo (*impact*).

Keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA) yang berdekatan dengan Kabupaten Purworejo diharapkan dapat menjadi pemicu tumbuhnya kawasan aerotropolis di Jawa Tengah bagian selatan. Rencana jaringan transportasi yang akan dikembangkan di kawasan sekitar YIA (*Border City*) antara lain jaringan jalan, jalur pejalan kaki, dan jaringan jalur kereta api. Rencana jaringan jalan meliputi peningkatan jalan kolektor primer yang berstatus jalan provinsi yang menghubungkan dengan batas Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DIY; Peningkatan jalan strategis nasional (Jalan Daendels) yang menghubungkan dengan batas Kabupaten Kebumen-Purworejo-Kulonprogo; serta Peningkatan dan pengembangan sistem jalan lingkungan di seluruh kawasan. Rencana jalur pejalan kaki di Kawasan *Border City* berada pada kawasan yang dapat menimbulkan bangkitan pejalan kaki seperti pusat perbelanjaan/hiburan, pusat perkantoran, sarana pelayanan umum, perumahan, dan pariwisata. Jalur kereta api yang melewati Kawasan *Border City* yaitu jaringan jalur kereta api antar Kota Surakarta-Kutoarjo dengan salah satu pemberhentian di Stasiun Wojo, Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen. Rencana jaringan rel kereta api di Kawasan *Border City* yaitu peningkatan kualitas jaringan jalur kereta api dengan mengembangkan simpul-simpul transportasi melalui pendekatan *Transit Oriented Development* (TOD). Penerapannya dengan merencanakan halte pada area strategis dengan simpul-simpul permukiman, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan kantong parkir sebagai sarana untuk mencapai halte pemberhentian transportasi umum. Kantong parkir disediakan utamanya untuk sepeda demi mendorong penggunaan kendaraan non bermotor dan tercipta kawasan yang *walkable* dan *transit supportive*. *Transit Oriented Development* (TOD) didukung dengan berbagai potensi ekonomi pada masing-masing kawasan strategis. Beberapa titik kawasan yang akan dikembangkan melalui pendekatan TOD, antara lain perkotaan Kutoarjo di titik simpul Stasiun Besar Kutoarjo, Terminal Tipe B, dan Pasar Beras. Keberadaan Stasiun Wojo sebagai pemadu antarmoda transportasi kereta api, bus, dan pesawat udara di kawasan perkotaan *Border City* di wilayah Kecamatan Bagelen dan Purwodadi terkait keberadaan Yogyakarta International Airport

(YIA) serta untuk menangkap peluang pelaku perjalanan, maka masing-masing perkotaan transit akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan amenitas perkotaan untuk memenuhi kebutuhan transit. Selain itu pembangunan rel ganda Kutoarjo-Kroya diharapkan meningkatkan akses ke Stasiun Besar Kutoarjo.

Penguatan konektivitas Transit Oriented Development (TOD) di Kawasan Stasiun Kutoarjo–Terminal Kutoarjo diarahkan untuk mewujudkan simpul transportasi terpadu yang mengintegrasikan moda transportasi kereta api, angkutan jalan, dan transportasi umum massal. Pengembangan ini bertujuan meningkatkan kemudahan perpindahan antarmoda (intermodal), memperpendek waktu perjalanan, meningkatkan aksesibilitas masyarakat, serta mendorong penggunaan transportasi publik yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Kawasan Stasiun Kutoarjo sebagai pintu gerbang transportasi berbasis rel dan Terminal Kutoarjo sebagai simpul angkutan jalan memiliki peran strategis dalam melayani mobilitas masyarakat Kabupaten Purworejo maupun wilayah aglomerasi Purwomanggung ataupun Keburejo. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konektivitas melalui penyediaan jalur penghubung yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki maupun pesepeda, penataan halte dan titik naik-turun penumpang, sistem informasi perjalanan yang terintegrasi, manajemen lalu lintas kawasan, serta pengembangan kawasan pendukung yang berorientasi pada aktivitas transit.

Pengembangan TOD tersebut diperkuat dengan keberadaan layanan Trans Jateng Koridor Kutoarjo–Borobudur, yang menghubungkan Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Magelang sekaligus mendukung konektivitas menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Layanan ini menjadi penghubung utama bagi masyarakat, pekerja, pelajar, dan wisatawan melalui angkutan massal yang terjangkau, sehingga mampu meningkatkan akses menuju pusat kegiatan ekonomi, pelayanan publik, dan destinasi wisata.

Sinergi antara pengembangan kawasan TOD dan layanan Trans Jateng diharapkan dapat meningkatkan keterpaduan sistem transportasi regional, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, menekan kemacetan dan emisi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di sekitar kawasan transit. Pengembangan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah Purworejo dengan kawasan aglomerasi Purwomanggung ataupun Keburejo dan mendukung pemerataan pembangunan wilayah melalui sistem transportasi yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo memiliki tujuan Meningkatkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator tujuan Rasio Konektivitas dan Penurunan Angka Kecelakaan. Sedangkan sasarannya Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau dengan indikator sasaran Rasio Konektivitas dan Penurunan Angka Kecelakaan.

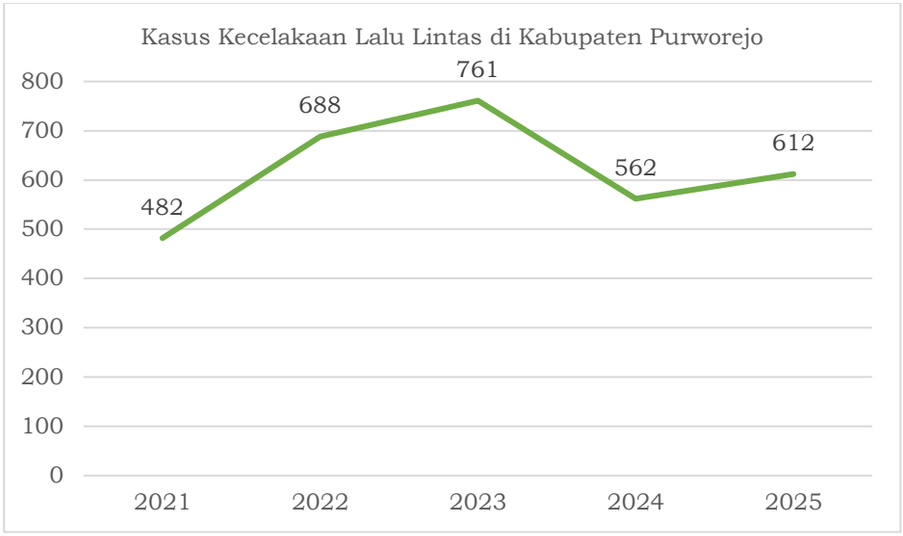
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, rasio konektivitas yaitu perbandingan antara jumlah jaringan angkutan umum (trayek) yang dilayani dengan jumlah kebutuhan trayek di kabupaten. Rasio konektivitas di Kabupaten Purworejo dari tahun 2021 hingga 2024 mengalami stagnasi yaitu 92 dengan jumlah trayek yang dilayani sebanyak 61 trayek. Tahun 2025 rasio konektivitas wilayah naik menjadi 93 dengan jumlah trayek yang dilayani sebanyak 62 trayek. Hal tersebut mengindikasi adanya stagnasi jumlah trayek aktif serta frekuensi layanan angkutan jalan. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan pola mobilitas masyarakat, efisiensi rute trayek, serta dampak pandemi yang sempat memengaruhi layanan transportasi. Adanya peningkatan di tahun 2025 menunjukkan adanya upaya perbaikan konektivitas transportasi meskipun belum sepenuhnya ke tingkat optimal.

Tabel 2.97. Rasio Konektivitas Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah trayek yang dilayani	61	61	61	61	62
2.	Jumlah kebutuhan trayek	66	66	66	66	66
3.	Jumlah lintas rata-rata dalam satu minggu	2.528	2.528	2.528	2.528	2.528
4.	Bobot angkutan jalan	1	1	1	1	1
5.	Rasio Konektivitas WIlayah	92	92	92	92	93

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2026

Penurunan angka kecelakaan dihitung berdasarkan data dari Satlantas Polres Purworejo, pada tahun 2021 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi yaitu sebanyak 482. Tahun 2022 mengalami lonjakan menjadi 688 kasus dan di tahun 2023 menjadi 761 kasus. Pada tahun 2024 menurun menjadi 562 kasus. Di tahun 2025 angka kecelakaan meningkat menjadi 612 kasus. Data terakhir menunjukkan tidak ada penurunan angka kecelakaan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2025. Bahkan angka kecelakaan meningkat sebanyak 50 kasus. Beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kecelakaan lalu lintas yaitu tingkat kesadaran pengemudi akan keselamatan berlalu lintas yang masih rendah, kondisi kendaraan yang kurang memadai, kondisi medan jalan yang kurang memadai, serta masih belum idealnya jumlah APJ seperti rambu, APILL, PJU, *Guard Rail*, Cermin Tikungan, *Deliniator*, dan Pita Penggaduh di seluruh Kabupaten Purworejo.



Gambar 2.39. Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Purworejo

Sumber: Satlantas Polres Purworejo, 2026

Program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2027 yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator program Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten; Persentase Angkutan Umum, Terminal, dan Titik Parkir yang Tersedia; serta Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana.

Indikator pertama yaitu Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten juga merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang mengukur jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan dibandingkan dengan jumlah total ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota.

Pemenuhan minimal perlengkapan jalan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan minimal perlengkapan jalan adalah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, guardrill, penerangan jalan umum (PJU) dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) pada jalan kabupaten/kota minimal sebesar 60% dari total kebutuhan ideal untuk masing-masing perlengkapan jalan dimaksud untuk 1 (satu) ruas jalan. Jenis dan ruang lingkup rambu, marka, guardrill dan APILL sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal di Kabupaten Purworejo pada tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.98. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal di Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*3*	*4*
1	Jumlah ruas jalan kabupaten/kota dengan pemenuhan minimal perlengkapan jalan dari total kebutuhan ideal perlengkapan jalan	77	78	79	83	87
2	Jumlah total ruas jalan kewenangan kabupaten/kota	227	227	227	227	227
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	33,90 %	34,40 %	34,80 %	36,56 %	38,32 %

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2026

Terdapat 87 ruas jalan kabupaten yang telah dilengkapi kelengkapan jalan seperti rambu jalan, cermin tikungan, PJU, APILL, *Warning Light*, marka, *guardrail*, deliniator, dan pita penggaduh. Hal ini berarti masih ada 140 ruas jalan kabupaten lagi yang perlu dilengkapi perlengkapan jalan demi meningkatkan tingkat keselamatan pengguna jalan di ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlengkapan jalan terdiri atas marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Selain perlengkapan jalan yang disebutkan di atas ada pula Alat Penerangan Jalan/ Penerangan Jalan Umum (PJU) yaitu lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas. Untuk menunjang keamanan dan keselamatan pengguna jalan, ketersediaan Alat Pengaman Jalan (APJ) mutlak diperlukan. Selain marka, rambu lalu lintas, APILL, dan PJU, terdapat pula alat pengaman jalan yang meliputi pagar pengaman jalan (guard rail), cermin tikungan, tanda patok tikungan (delineator), serta pita penggaduh.

Berikut data ketersediaan perlengkapan jalan di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.99. Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Marka jalan	74.018	74.018	77.593	83.749	89.209
2.	Rambu lalu lintas	2.728	2.877	2.919	3.028	3.109
3.	APILL	109	111	111	111	114
4.	PJU	1.344	1.842	1.954	2.281	2.540
5.	Pagar pengaman jalan (*guard rail*)	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
6.	Cermin tikungan	59	79	91	119	124
7.	Tanda patok tikungan (*delineator*)	256	256	256	256	256
8.	Pita penggaduh	44	44	44	44	44

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2026

Indikator kedua yaitu Persentase Angkutan Umum, Terminal, dan Titik Parkir yang Tersedia merupakan hasil rata-rata dari Persentase Terminal Tipe C, Persentase Titik Parkir yang Terlayani, dan Persentase Layanan Angkutan Darat. Indikator ini mendukung ketercapaian indikator tujuan dan sasaran Rasio Konektivitas dan Penurunan Angka Kecelakaan.

Untuk menunjang Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo mengajukan usulan penyediaan halte di sekolah-sekolah melalui dana APBN. Sehingga di tahun 2020 terdapat tambahan halte sebanyak 6 unit. Data sebaran letak halte di Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100. Data Halte yang Layak Fungsi Pada Setiap Prasarana Kabupaten yang Telah Dilayani Angkutan Umum di Kabupaten Purworejo

No	Nama Jalan	Jumlah		Keterangan
1	*2*	*3*		*4*
1	Depan PDAM	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
2	Depan RS Permata	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
3	Depan Dinas Pertanian	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
4	Depan Kejaksaan Lama	1	Lokasi	APBD PURWOREJO
5	Alun-alun KTA	1	Lokasi	APBD 2016
6	Depan SMP N 1 Purworejo	1	Lokasi	APBD 2017
7	Simpang 3 Boro	1	Lokasi	APBD 2017
8	SMPN 26 / DPU	1	Lokasi	APBD 2019
9	SMP 2	1	Lokasi	APBNP 2020
10	SMP 31	1	Lokasi	APBNP 2020
11	SMA 3	1	Lokasi	APBNP 2020
12	RSUD Cokronegoro/AKPER	1	Lokasi	APBNP 2020
13	SMA 2	1	Lokasi	APBNP 2020
14	Kec Bayan / SMP Bayan	1	Lokasi	APBNP 2020
	JUMLAH	**14**	**Lokasi**	

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2026

Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2025, jumlah angkutan darat di Kabupaten Purworejo tetap. Namun tidak seluruh angkutan darat beroperasi secara rutin. Hanya ada 319 unit angkutan darat yang masih rutin beroperasi. Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah penumpang angkutan darat. Jumlah penumpang angkutan darat dari tahun 2021 hingga 2025 cenderung menurun. Di tahun 2025 jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 57.130 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 jumlah penumpang di tahun terakhir jauh lebih rendah dikarenakan beberapa faktor

yaitu angkutan umum dinilai kurang nyaman digunakan serta angkutan umum di Kabupaten Purworejo belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Purworejo sehingga masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi. Penurunan drastis jumlah penumpang di tahun 2025 dikarenakan angkutan di terminal non bus Kutoarjo pindah ke terminal tipe B Kutoarjo serta adanya kebakaran Pasar Kutoarjo yang menyebabkan lahan terminal non bus Kutoarjo digunakan untuk PKL Pasar Kutoarjo.

Tabel 2.101. Jumlah Angkutan Darat dan Penumpang Angkutan Darat di Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah angkutan darat	589	589	589	589	589
2	Jumlah penumpang angkutan darat	646.751	633.135	655.720	138.585	57.130

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2026

Dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan penumpang umum massal, pada tahun 2020 telah dioperasikan BRT koridor Kutoarjo-Borobudur. Jumlah penumpang cenderung mengalami peningkatan. Jumlah shelter pada tahun 2020 sejumlah 13 unit. Di tahun 2021 ada penambahan shelter baik permanen maupun portable untuk meningkatkan pelayanan calon penumpang sebanyak 4 unit, sehingga total shelter berjumlah 17 unit. Penambahan shelter berada di jalan lingkar utara, Sucen, Seren, dan Mranti. Berikut data jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Perdesaaan, dan Angkutan Perbatasan di Kabupaten Purworejo:

Tabel 2.102. Jaringan Trayek AKAP, AKDP, Angkutan Perdesaaan, dan Angkutan Perbatasan Kabupaten Purworejo

No	Trayek	Jalur
1	*2*	*3*
1.	AKAP	Solo – Yogya – Purworejo - Cilacap PP
		Yogya – Purworejo - Cilacap PP
		Solo – Yogya – Purworejo - Purwokerto PP
		Yogya – Purworejo - Purwokerto PP
		Yogya – Purworejo – Purwokerto - Jakarta PP
		Yogya – Purworejo – Purwokerto – Jakarta -Bogor PP
		Solo – Yogya – Purworejo – Purwokerto - Tasikmalaya PP
		Solo – Yogya – Purworejo – Jakarta – Lampung -Pekanbaru
		Solo – Yogya – Purworejo – Tasikmalaya – Bandung – Semarang – Purworejo – Tasikmalaya - Bandung
		Surabaya – Yogya – Purworejo – Tasikmalaya -Bandung - Jakarta
		Surabaya – Yogya – Purworejo – Bandung – Jakarta -Lampung – Jambi - Pekanbaru
		GunungKidul – Yogya – Purworejo – Purwokerto -Jakarta - PP
		Surabaya – Yogya – Purworejo - Jakarta
		Surabaya - Yogya- Purworejo – Jakarta – Lampung -Jambi - Pekanbaru
		Purworejo – Jakarta – Lampung – Jambi – Pekanbaru -Aceh
		Purworejo – Bandung - Lampung
		Surabaya – Yogya – Purworejo – Bandung - Jakarta-Lampung
		Purworejo – Jakarta - Bogor
		Surabaya – Yogya – Purworejo - Bandung
		Solo – Yogya – Purworejo - Bandung
2	AKDP	Semarang-Purworejo-Purwokerto PP
		Semarang-Purworejo-Cilacap PP

No	Trayek	Jalur
1	*2*	*3*
		Purworejo-Magelang PP
		Purworejo-Wonosobo PP
		Purworejo-Kebumen PP
3	Angkutan Perdesaan	Purworejo - Kutoarjo
		Purworejo-Krendetan - Dadirejo
		Purworejo – Kaliboto
		Purworejo - Banyuurip - Sendangsari
		Purworejo - Tegalmiring - Bencorejo
		Kutoarjo - Klepu - Pituruh
		Kaligintung - Sawangan - Kedungbatur - Kalikotes - Pituruh - Kutoarjo
		Kutoarjo - Kemiri - Pituruh
		Kutoarjo - Butuh - Kedungagung - Kedungsari - Wonorejo
		Kutoarjo - Gng Tugel - Winong
		Purworejo - Gintungan – Mlaran - Winong
		Purworejo - Banyuasin
		Purworejo - Kaligesing
		Purworejo - Caok - Tlogorejo
		Purworejo - Somongari - Jatirejo
		Purworejo – Semawung - Semagung - Durensari
		Kutoarjo - Kemiri – Bruno - Tegalsari
		Cepedak - Bruno – Kemiri - Kutoarjo
		Purworejo - Cengkawakrejo - Ketangi
		Pundensari - Keduren - Purworejo
		Surorejo - Tegalrejo - Purworejo
		Kutoarjo - Bayan – Jono - Piyono - Wingko
		Kutoarjo – Bayan - Pekutan – Pucangagung - Sambeng - Seren
		Kutoarjo - Gebang - Brengkol
		Purworejo - Ngasinan
		Purworejo – Purwodadi - Ngombol
		Purworejo – Purwodadi – Ngombol- Wunut
		Purworejo – Purwodadi – Ngombol-Wonoroto
		Purworejo – Purwodadi – Gesing – Nampurejo
		Purworejo – Karangduwur - Kemiri – Kutoarjo – Andong - Tamansari – Sembaon - Grabag – Purwodadi - Bagelen – Piji – Cangkrep-Purworejo
		Kutoarjo – Ketawang
		Kutoarjo - Suren – Wareng - Sidomulyo
		Kutoarjo - Grabag – Wunut - Wonoroto
		Purworejo - Jalingkut – Terminal Bus Purworejo
		Purworejo – Bulus
		Purworejo - Maron – Redin - Kemiri
		Kutoarjo - Kemiri – Kedungpomahan Kulon
		Purworejo – Kaligesing – Goa Seplawan - Pandanrejo
		Purworejo - Krendetan – Tlogokotes
		Purworejo - Krendetan - Bugel
		Purworejo - Bagelen - Hargorojo
		Purworejo - Dewi – Tanjung Anom
		Purworejo - Perum Boro – Pakisrejo – Bajangrejo
		Purworejo - Winong - Sawangan
		Purworejo - Gebang – Tlogosono – Redin
		Purworejo - Bayan – Bringin - Seren
		Purworejo - Jenar – Angkrukketip - Ngombol -Wunut
		Purworejo – Sikemplong – Boro Wetan
		Kutoarjo - Kemiri – Pituruh – Kali Glagah
		Kutoarjo – Kaliwatu- Kranggan - Paitan
		Kutoarjo - Loning - Girijoyo
		Purworejo – Ngaran
		Purworejo - Cacaban - Kalitapas
		Purworejo - Ketosari - Sidomukti
		Purworejo - Kaliboto – Kaliwader – Kalitapas
		Purworejo - Purwodadi - Jogoboyo

No	Trayek	Jalur
1	*2*	*3*
		Kedunggubah - Purworejo
		Sokoagung - Clapar – Cangkrep Lor – Perum Tambak – Purworejo
		Rimun – Kalikalong – Caok – Purworejo
		Sidorejo - Cangkrep - Purworejo
		Kalinongko - Purworejo
		Kedungpomahan Wetan – Kemiri - Kutoarjo. PP
		Wonoroto – Ngombol – Sendangsari – Lengkong – Purworejo. PP
		Pogungrejo – Pogungkalangan – Krandegan - Tangkisan – Jatingarang - Bandungkidul – Kutoarjo. PP
4	Angkutan Perbatasan	Pendowo (Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo) - Kulonprogo PP

Sumber : RTRW Kabupaten Purworejo 2021-2041 dan Keputusan Bupati Purworejo Nomor : 169.18/598/2018 Tentang Jaringan Trayek, Kode Jalur Dan Rute Angkutan Perdesaan Di Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo mempunyai 3 tipe terminal, yaitu Terminal Tipe A, Terminal Tipe B dan Terminal Tipe C. Terminal Bis Purworejo yang merupakan terminal Tipe A terletak di tepi jalan Raya Purworejo-Kutoarjo, Kelurahan Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip, tepatnya persis di depan Polres Purworejo. Terminal ini melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES). Pembangunan Terminal Purworejo selesai dibangun pada tahun 2023 oleh Kementerian Perhubungan. Pembangunan terminal ini merupakan bagian dari program Revitalisasi Terminal Tipe A secara nasional yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat. Revitalisasi dilakukan agar fasilitas dan layanan terminal semakin baik, sehingga dapat menumbuhkan budaya masyarakat untuk menggunakan angkutan massal bus.



Gambar 2.40. Terminal Tipe A Purworejo
Sumber: Survey Primer, 2025

Terminal Tipe B di Kabupaten Purworejo yaitu Terminal Kutoarjo yang berada di Jalan Nasional III Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo. Terminal Kutoarjo selesai dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 dan diresmikan di akhir tahun 2024. Selain berfungsi sebagai terminal pemberhentian bus, Terminal Kutoarjo juga memiliki UMKM

center yang bernama *Keburejo Hangout Point*. Dengan adanya *Keburejo Hangout Point* diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya.



Gambar 2.41. Terminal Tipe B Kutoarjo
Sumber: Survey Primer, 2025

Terminal Tipe C yang ada di Kabupaten Purworejo berjumlah 4 buah, yaitu Terminal Non Bis Kongsi, Terminal Bis Kutoarjo, Terminal Non Bis Kutoarjo, dan Terminal Bis Purwodadi. Keempat terminal tersebut masih berfungsi dengan baik sampai dengan saat ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, bahwa penyelenggara terminal wajib menyediakan dan melaksanakan pelayanan kepada penumpang angkutan dalam hal pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan dan kesetaraan. Keempat terminal Tipe C di Kabupaten Purworejo sudah berusaha memenuhi pelayanan tersebut, misalnya dalam hal penyediaan fasilitas keamanan jalan, kantor penjaga terminal, petugas operasional terminal, ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, Ruang Terbuka Hijau (RTH), fasilitas dan petugas kebersihan, drainase, ketersediaan letak jalur pemberangkatan dan kedatangan, tempat naik/turun penumpang dan tempat parkir kendaraan umum dan kendaraan pribadi.



Gambar 2.42. Kondisi Eksisting Terminal Tipe C Purwodadi (kiri) dan Terminal Tipe C Kutoarjo (kanan)
Sumber: Survey Sekunder, 2023

Kondisi persentase titik parkir yang terlayani selalu membaik dari tahun ke tahun. Di tahun 2025, jumlah titik parkir yang terlayani mencapai 224 titik dari 224 potensi titik parkir yang ada. Hal ini berarti seluruh titik parkir di Kabupaten Purworejo telah terlayani.

Tabel 2.103. Titik Parkir yang Terlayani di Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	4	5	6	7
1	Jumlah Titik Parkir yang terlayani	165	172	221	224	224
2	Jumlah Potensi Titik Parkir	224	224	224	224	224

Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan kajian Survei Potensi Parkir Kabupaten Purworejo yang telah disusun oleh Dinhub pada tahun 2022, diperoleh data titik parkir yang ada di Kabupaten Purworejo dibagi menjadi dua yaitu Tempat Khusus Parkir (TKP) dan parkir Tepi Jalan Umum (TJU) atau *on street*. Terdapat tujuh lokasi yang masuk dalam Tempat Khusus Parkir (TKP) yaitu Pasar Baledono, Daya Tarik Wisata Goa Seplawan, Gor Jend. Sarwo Edy Wibowo, Pasar Purworejo, Pasar Kutoarjo, RSUD Tjitrowardoyo, dan Kolam Renang Arta Tirta. Sedangkan untuk parkir Tepi Jalan Umum (TJU) atau on street ada 224 titik parkir yang tersebar di wilayah perkotaan Purworejo-Kutoarjo.

Indikator ketiga yaitu Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana merupakan hasil perhitungan persentase kepemilikan KIR angkutan umum. Indikator ini mendukung ketercapaian indikator tujuan dan sasaran Penurunan Angka Kecelakaan.

Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) di Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 sebanyak 3.100 buah. Sedangkan jumlah KBWU yang memiliki KIR sebanyak 2.274 buah. Uji KIR merupakan pengujian berkala yang dilakukan untuk memastikan kendaraan layak digunakan di jalan raya. Jumlah KBWU yang memiliki KIR selama tahun 2021 hingga 2024 cenderung menurun, padahal di tahun 2024 terdapat kebijakan dari pusat yang memberlakukan uji KIR gratis. Faktor penyebab jumlah KBWU yang memiliki KIR tidak mencapai target yaitu tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan uji KIR masih rendah dikarenakan tidak ada operasi penertiban di jalan, tidak ada sanksi administratif berupa denda, serta banyak angkutan darat yang tidak beroperasi karena jumlah penumpang yang semakin menurun.

Tabel 2.104. Persentase Kendaraan Umum Laik Jalan di Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	3	*4*	*5*	6	7
1	Jumlah KBWU yang memiliki KIR	3.184	2.698	2.462	2.227	2.274
2	Jumlah KBWU	4.500	4.120	3.100	3.100	3.100

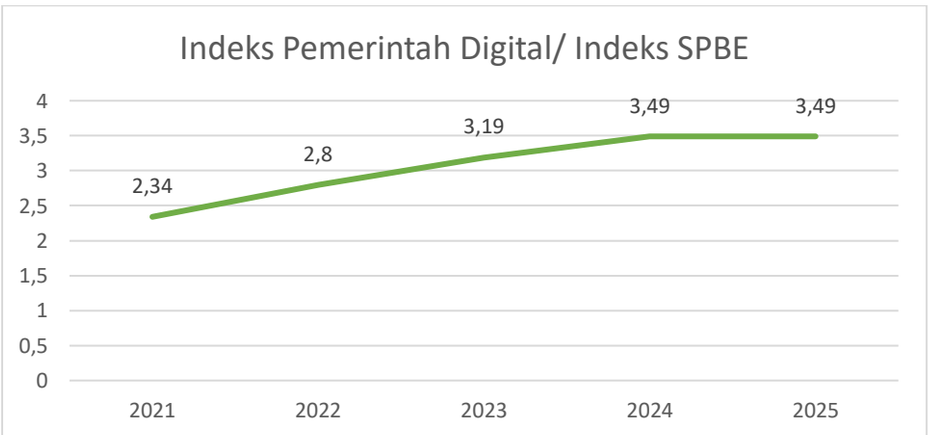
Sumber: Dinhub Kabupaten Purworejo, 2026

j. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika merupakan urusan yang memiliki kewenangan untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi. Di dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi Informatika Statistika dan Persandian Kabupaten Purworejo memiliki tujuan Mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator tujuan Indeks Pemerintah Digital (Pemdi). Sedangkan sasarannya Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kematangan digital pemerintahan dengan indikator sasaran Indeks Keterbukaan Informasi Publik dan Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital.

Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) merupakan salah satu indikator penting yang dinilai oleh Kementerian PANRB untuk mengukur kemajuan digitalisasi pemerintahan daerah. Penilaian ini menggunakan 35 indikator yang dikelompokkan dalam 9 aspek. Indeks Pemdi merupakan pembaruan/ kelanjutan dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam indeks SPBE domain yang dinilai yaitu kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Sedangkan dalam Indeks Pemdi aspek yang dinilai meliputi Strategi dan Rencana, Tata Kelola dan Manajemen, Teknologi Digital, Audit Teknologi Digital, Keamanan Siber, Kapabilitas dan Budaya Digital, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi, Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, serta Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah.

Indeks SPBE / Indeks Pemdi di Kabupaten Purworejo tahun 2021-2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2021, skornya yaitu 2,34 dan meningkat bertahap di setiap tahun hingga mencapai 3,49 di tahun 2024. Tahun 2025 merupakan tahun peralihan Indeks SPBE ke Indeks Pemdi. Oleh karena itu di tahun 2025 Indeks SPBE/ Indeks Pemdi tidak dihitung. Peningkatan nilai Indeks SPBE/Indeks Pemdi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.



Gambar 2.43. Indeks Pemerintah Digital / Indeks SPBE Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

Sumber: KemenPANRB, 2026

Nilai Aspek Teknologi Digital dalam Indeks Pemdi terdiri dari empat indikator, yakni tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi, tingkat kematangan pemanfaatan ekosistem Pusat Data Nasional, tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah, dan tingkat kematangan pemanfaatan teknologi baru. Nilai Aspek Teknologi Digital dalam Indeks Pemdi pada tahun 2025 sebesar 3,25. Untuk data tahun sebelumnya tidak ada karena nilai aspek teknologi digital merupakan salah satu komponen baru dalam perhitungan Indeks Pemdi.

Komunikasi dan informatika merupakan urusan yang memiliki kewenangan untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong badan publik, baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo selaku OPD yang mengelola keterbukaan informasi di daerah juga menyediakan berbagai informasi publik. Untuk mengukur keberhasilan dalam hal ini, dilakukan pengukuran atas Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi tolok ukur tingkat transparansi pemerintah dalam melaksanakan kinerjanya.

Keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan interaksi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut adalah implementasi demokrasi yang menyeluruh, mengharuskan pengetahuan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan informasi faktual, harus terpenuhi. Oleh karena itu, Pemerintah dengan dukungan masyarakat, wajib membangun sistem komunikasi yang sehat, sebagai upaya meningkatkan kualitas ruang dan komunikasi publik demi terciptanya sistem penyelenggaraan negara yang baik (*good governance*). Gambaran mengenai perwujudan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut.

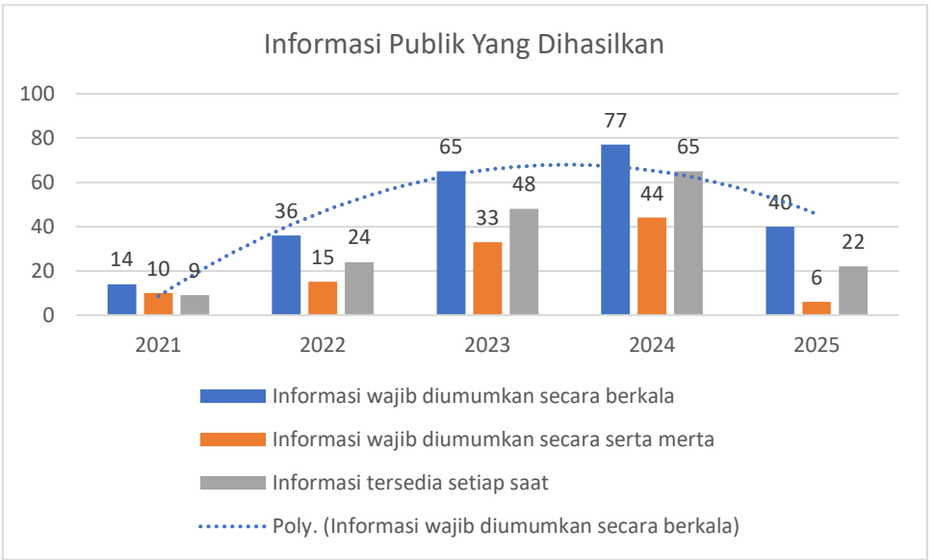
Tabel 2.105. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Purworejo

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Skor Keterbukaan Informasi Publik	57,43	65,98	82,22	84,66	85,13
Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Kurang Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Sumber: Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Purworejo saat ini masuk dalam kategori "Menuju Informatif" dengan nilai 85,13. Naik dari tahun 2021 yang bernilai 57,43. Peningkatan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Purworejo disebabkan oleh meningkatnya informasi yang diumumkan kepada masyarakat. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan

kepentingan publik. Adapun capaian dari Kabupaten Purworejo dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2.44. Jumlah Informasi Publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

Sumber: Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan data di atas, Kabupaten Purworejo mengalami penurunan jumlah informasi publik yang dihasilkan. Pada tahun 2025, sebanyak 40 informasi wajib diumumkan secara berkala, mencakup berbagai aspek seperti informasi terkait Badan Publik, Ringkasan Program dan Kegiatan yang Sedang Dijalankan, Informasi Laporan Akuntabilitas Kerja, Ringkasan Laporan Keuangan, Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik, Tata Cara Permohonan Informasi Publik, Informasi tentang Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan dan Pelanggaran Badan Publik, Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa, Informasi tentang Regulasi Badan Publik, Informasi tentang Ketenagakerjaan, serta Informasi tentang Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di setiap Kantor Badan Publik. Selain itu, Badan Publik juga wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, dengan total 6 informasi yang telah dikeluarkan pada tahun 2025. Informasi wajib diumumkan secara serta merta meliputi informasi tentang bencana alam, informasi keadaan bencana non alam, informasi bencana sosial, informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular, informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, serta informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Informasi yang tersedia setiap saat meliputi DaftarInformasi Publik, Informasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Badan Publik, Informasi Lengkap yang Wajib Disediakan dan Diumumkan, Informasi tentang Organisasi, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan, Dokumen tentang Rencana Strategis, Informasi tentang Pedoman Pelayanan Publik, serta Informasi mengenai Laporan Pelayanan Informasi Publik Badan Publik. Pada tahun 2025, sebanyak 22 informasi tersedia setiap saat telah dikeluarkan.

Penurunan jumlah informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo disebabkan oleh keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur pengelola informasi (PPID), Informasi tidak diperbarui, serta informasi yang disediakan seringkali terlalu formal, sulit dipahami, dan susah diakses oleh masyarakat awam.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. Transformasi digital mengacu pada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif dan berdaulat, yaitu terkait regulasi dan institusi, pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur digital dan teknologi, keterpaduan data, modal investasi teknologi, serta riset dan inovasi.

Tolok ukur transformasi digital di tingkat daerah dapat diukur dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet. Indikator ini juga merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dalam urusan komunikasi dan informasi. Definisi operasional rumah tangga dengan akses internet yaitu rumah tangga dengan minimal terdapat satu anggota rumah tangga yang mengakses internet, baik melalui jaringan tetap atau seluler. Rumah tangga dengan akses internet berarti bahwa internet tersedia untuk digunakan oleh semua anggota rumah tangga kapan saja. Sedangkan formulasi perhitungannya adalah jumlah rumah tangga dengan minimal satu anggota rumah tangga yang mengakses internet dibagi total rumah tangga dikali 100%. Semakin tinggi nilainya maka dapat digambarkan semakin baik kondisi akses internet di masyarakat. Berikut data Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.106. Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	57,45	71,25	71,35	73,66	77,13

Sumber: Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2026

Berdasarkan data BPS Kabupaten Purworejo yang dipublikasikan melalui Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten purworejo dari tahun 2021 hingga tahun 2025, dapat dilihat bahwa belum seluruh rumah tangga di Kabupaten Purworejo memiliki akses terhadap internet. Hal ini terlihat jelas dari persentase yang meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum mencapai 100%. Hingga tahun 2025, persentase rumah tangga dengan akses internet berada pada angka 77,13%. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam penyediaan akses internet bagi rumah tangga, masih ada sekitar 22,87% rumah tangga yang belum terjangkau. Ketidakmerataan akses ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infrastruktur yang belum memadai di daerah terpencil, kemampuan ekonomi yang terbatas, serta kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat.

Adapun hal yang menyebabkan belum seluruh area di Kabupaten Purworejo memiliki akses terhadap internet adalah kendala yang disebabkan oleh *Blank Spot*. *Blank Spot* adalah kondisi dimana suatu tempat tidak tersentuh atau terjangkau sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Berikut data sebagian wilayah desa yang termasuk dalam *Blank Spot* di Kabupaten Purworejo khususnya pada layanan pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2.107. Data Wilayah Blank Spot di Kabupaten Purworejo

No.	Wilayah	Titik Koordinat	Kantor Desa	Layanan Pendidikan (SD/SMP/SMA/ SMK)	Layanan Kesehatan (Puskesmas/ Rumah Sakit)*
1		*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Kecamatan Bruno				
1.1.	Desa Watuduwur				
		-7.5431, 109.916	Baldes Watuduwur		
		-7.54425, 109.916		SMP N 42 Purworejo	
		-7.54558, 109.919		SD N Watuduwur	
1.2.	Desa Kambangan				
		-7.52581, 109.897	Baldes Kambangan		
		-7.52141, 109.901		SD N Kambangan	
1.3.	Desa Giyombong				
		-7.53874, 109.883	Baldes Giyombong		
		-7.53857, 109.884		SD N Giyombong	
2.	Kecamatan Loano				
2.1.	Desa Ngargosari	-7.64772, 110.107	Baldes Ngargosari		
		-7.64774, 110.107		SD N Ngargosari	
2.2.	Desa Kemejing	-7.65732, 110.08	Baldes Kemejing		
		-7.65737, 110.08		SD N Kemejing	
3.	Kecamatan Kaligesing				
3.1.	Desa Tlogobulu				
		-7.70093, 110.12	Baldes Tlogobulu		
		-7.70125, 110.12		SD N Tlogobulu	
3.2.	Desa Tlogoguwo				
		-7.73066, 110.115	Baldes Tlogoguwo		
4.	Kecamatan Bagelen				
4.1.	Desa Sokoagung				
		-7.79979, 110.042	Baldes Sokoagung		
		-7.80086, 110.055		SD N Sokoagung	
4.2.	Desa Semono				
		-7.78566, 110.06	Baldes Semono		
		-7.78563, 110.061			Pustu Semono
4.3.	Desa Tlogokotes	-7.83503, 110.03	Baldes Tlogokotes		
		-7.83431, 110.032		SD Tlogokotes	
5.	Kecamatan Gebang				
5.1.	Desa Kalitengkek				

No.	Wilayah	Titik Koordinat	Kantor Desa	Layanan Pendidikan (SD/SMP/SMA/ SMK)	Layanan Kesehatan (Puskesmas/ Rumah Sakit)*
1		*3*	*4*	*5*	*6*
		-7.58529, 109.994	Baldes Kalitengkek		
		-7.58545, 109.988		SD N Kalitengkek	
5.2.	Desa Ngaglik	-7.61282, 109.977	Baldes Ngaglik		
		-7.58527, 109.994		SD N Ngaglik	
6.	Kecamatan Pituruh				
6.1.	Desa Kaligondang				
		-7.60859, 109.834		SD Kaligondang	
6.2.	Desa Somogede				
		-7.60935, 109.823	Baldes Somogede		
		-7.6123, 109.821		SD N Somogede	
7.	Kecamatan Kemiri				
7.1.	Desa Pamriyan				
		-7.58441, 109.852	Baldes Pamriyan		
		-7.58453, 109.852		SD N Pamriyan	
7.2.	Desa Wonosido	-7.590620697376174, 109.86021218692335	Baldes Wonosido		
		-7.5903895778784385, 109.8601815428009		SD N Wonosido	

2.1.

Sumber: Laporan Hasil Pemetaan Blank spot Dan Layanan Internet Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa dari 469 desa dan 25 kelurahan yang ada di Kabupaten Purworejo, masih terdapat 16 desa di 7 kecamatan yang belum seluruh wilayahnya terjangkau oleh sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Berdasarkan hasil pemetaan daerah blank spot dan layanan intemet dalam mendukung transformasi digital masih terdapat 15 fasilitas pendidikan dan 1 fasilitas kesehatan yang belum terlayani oleh sinyal internet.

k. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian rakyat, dengan memberikan kesempatan kerja dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal. Salah satu kontribusi utama koperasi adalah melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga rendah kepada pelaku UMKM, yang memungkinkan untuk mengembangkan usaha dan memperluas jangkauan bisnis. Dengan adanya koperasi, khususnya jenis simpan pinjam, pelaku UMKM mendapatkan akses ke sumber daya finansial yang diperlukan untuk pertumbuhan dan stabilitas usaha. Sinergi keduanya memperkuat ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Salah satu indikator perkembangan koperasi adalah jumlah koperasi yang aktif dan koperasi sehat. Berikut data jumlah koperasi aktif dan sehat di Kabupaten Purworejo dari tahun 2021-2025.

Tabel 2.108. Koperasi aktif dan Koperasi Sehat di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	5	6	7
1	Jumlah koperasi aktif	235	239	239	277	699
2	Jumlah koperasi sehat	123	121	119	114	116
3	Jumlah koperasi secara keseluruhan	280	284	284	284	744

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan data pada tabel, jumlah koperasi di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025. Total koperasi meningkat dari 284 unit pada periode 2022–2024 menjadi 744 unit pada tahun 2025, atau bertambah 460 koperasi (sekitar 162%). Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh pembentukan 454 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun demikian, keberadaan koperasi tersebut masih memerlukan tindak lanjut berupa penguatan kapasitas sumber daya manusia, permodalan, serta pengembangan unit usaha agar koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, jumlah koperasi aktif juga meningkat dari 277 unit pada tahun 2024 menjadi 699 unit pada tahun 2025, sedangkan jumlah koperasi sehat naik tidak cukup signifikan dari 114 unit menjadi 116 unit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah koperasi bertambah sangat pesat, peningkatan kualitas koperasi yang ditunjukkan melalui status koperasi sehat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar koperasi yang telah terbentuk dapat berkembang menjadi koperasi yang aktif, sehat, dan berkelanjutan.

Selain aspek kelembagaan, kemajuan koperasi di suatu daerah juga diukur melalui volume usaha koperasi. Volume usaha berperan dalam perhitungan *Asset Turn Over* dan berdampak signifikan pada aspek finansial koperasi. Dengan demikian, pengembangan volume usaha yang baik merupakan faktor determinan utama dalam memastikan keberhasilan atau kegagalan koperasi, terutama di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.109. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Purworejo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	5	6	7
1	Volume Usaha Koperasi (Juta Rupiah)	547.923	344.187	460.701	562.758	652.316
2	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	19.602.720	21.352.540	23.187.670	24.823.840	26.483.560

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	5	6	7
3	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,80	1,61	1,99	2,27	2,46

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2026

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang berfluktuasi selama periode 2021–2025. Rasio tersebut tercatat sebesar 2,80% pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 1,61% pada tahun 2022. Selanjutnya, rasio kembali meningkat menjadi 1,99% pada tahun 2023, 2,27% pada tahun 2024, dan mencapai 2,46% pada tahun 2025. Peningkatan rasio pada tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan volume usaha koperasi lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDRB, sehingga kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah semakin membaik, meskipun belum kembali mencapai tingkat tahun 2021.

Meskipun demikian, nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap pembentukan PDRB daerah masih relatif terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa peran koperasi dalam aktivitas ekonomi daerah masih perlu diperkuat agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kondisi tersebut antara lain keterbatasan skala usaha koperasi, kapasitas manajerial pengurus, akses terhadap permodalan, serta terbatasnya diversifikasi usaha koperasi.

Dengan demikian, peningkatan peran koperasi dalam perekonomian daerah perlu didukung melalui penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas manajemen usaha, pengembangan unit usaha produktif, serta perluasan kemitraan dengan UMKM dan sektor usaha lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan volume usaha koperasi sehingga kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Purworejo semakin meningkat pada masa mendatang.

Sementara itu, peran koperasi di Kabupaten Purworejo dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan masih belum optimal, khususnya dalam membangun kemitraan dengan pelaku UMKM. Hal tersebut tampak pada data jumlah UMKM yang bermitra dengan koperasi dibawah ini.

Tabel 2.110. Perkembangan Kemitraan UMKM dengan Koperasi di Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2025

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	5	6	7	8
1	Jumlah UMKM	UMKM	18.927	21.982	28.378	30.674	33.532
2	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap	Orang	19.982	22.357	29.082	32.024	34.032
3	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Koperasi	UMKM	N/A	N/A	N/A	2.813	3.169
4	Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi	%	N/A	N/A	N/A	9,17	9,45

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	5	6	7	8
5	Jumlah UMKM yang Telah Memiliki Sertifikat Halal	UMKM	83	602	12.183	20.044	25.496

Sumber : DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2026

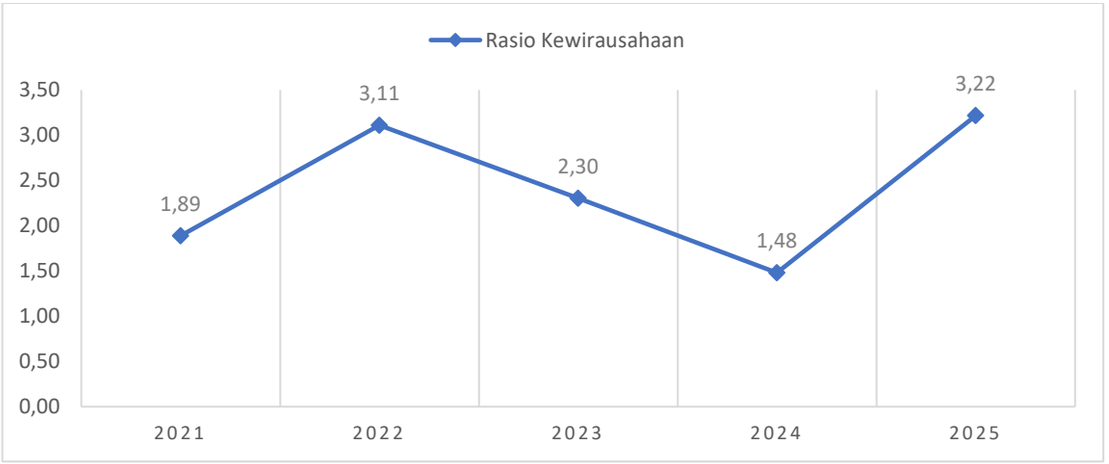
Perkembangan kemitraan UMKM dengan koperasi di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang positif. Jumlah UMKM meningkat dari 18.927 unit pada tahun 2021 menjadi 33.532 unit pada tahun 2025, seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap dari 19.982 orang menjadi 34.032 orang. Data kemitraan mulai tersedia pada tahun 2024, dengan 2.813 UMKM atau 9,17 persen bermitra dengan koperasi, kemudian meningkat menjadi 3.169 UMKM atau 9,45 persen pada tahun 2025. Selain itu, jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikat halal juga mengalami peningkatan yang signifikan, dari 83 UMKM pada tahun 2021 menjadi 25.496 UMKM pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan semakin kuatnya sinergi antara UMKM dan koperasi serta meningkatnya daya saing UMKM melalui pemenuhan aspek legalitas dan jaminan mutu produk.

Perkembangan UMKM tersebut turut memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Karakteristik UMKM yang relatif mudah diakses, padat karya, serta tidak memerlukan modal yang besar menjadikannya salah satu sektor yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan salah satu strategi penting dalam pembangunan ekonomi daerah, sekaligus menjadi fondasi dalam menumbuhkan kewirausahaan.

Meskipun demikian, peningkatan jumlah UMKM belum sepenuhnya mencerminkan kuatnya ekosistem kewirausahaan di Kabupaten Purworejo. Hal ini terlihat dari rasio kewirausahaan yang masih relatif rendah dibandingkan dengan target nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mendorong lahirnya wirausaha baru, meningkatkan skala usaha, serta memperkuat kapasitas pelaku usaha masih perlu terus ditingkatkan.

Kewirausahaan merupakan salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi karena mampu mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Dalam konteks nasional, rasio kewirausahaan menjadi salah satu prasyarat menuju Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2029, dengan target minimal sebesar 3,69 persen, sementara rasio kewirausahaan nasional pada tahun 2025 telah mencapai 3,57 persen. Peningkatan rasio kewirausahaan menjadi penting karena semakin banyak pelaku usaha yang mampu berkembang dan mempekerjakan tenaga kerja tetap, semakin besar pula kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan penguatan struktur perekonomian.

Rasio Kewirausahaan untuk Kabupaten Purworejo pada periode tahun 2020-2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.45. Rasio Kewirausahaan Kabupaten Purworejo
Sumber: BPS Kabupaten Purworejo Tahun 2026

Meskipun rasio kewirausahaan Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 meningkat menjadi 3,22 persen, capaian tersebut masih berada di bawah rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,57 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan kewirausahaan masih perlu terus diperkuat melalui penciptaan wirausaha baru, peningkatan kapasitas dan daya saing pelaku usaha, perluasan akses pembiayaan, penguatan inkubasi bisnis, serta pemanfaatan teknologi digital. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan rasio kewirausahaan di Kabupaten Purworejo dapat terus meningkat sehingga mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, memperkuat struktur perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

l. Bidang Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu kunci pengungkit pembangunan ekonomi. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Untuk mendorong tercapainya pemenuhan kebutuhan investasi dan berkembangnya sektor riil, diperlukan berbagai kebijakan pemerintah, meliputi penciptaan iklim kondusif bagi dunia usaha, stabilitas politik di daerah, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur yang memadai. Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya mendukung penciptaan kebijakan pemerintah yang pro investasi dan dapat mendorong berkembangnya dunia usaha. Kebijakan tersebut adalah penciptaan iklim kondusif bagi investor dalam dan luar negeri dalam segala hal, seperti meningkatnya jaminan kepastian hukum, promosi terpadu, intermediasi perbankan, pelatihan keterampilan tenaga kerja, penyediaan prasarana dan sarana dan kebijakan tata ruang daerah yang konsisten.

Salah satu indikator yang menggambarkan kinerja penanaman modal di daerah dapat dilihat melalui realisasi penanaman modal yang dicatat oleh DPMPTSP Kabupaten Purworejo. Berikut data realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo pada tahun 2021-2025.

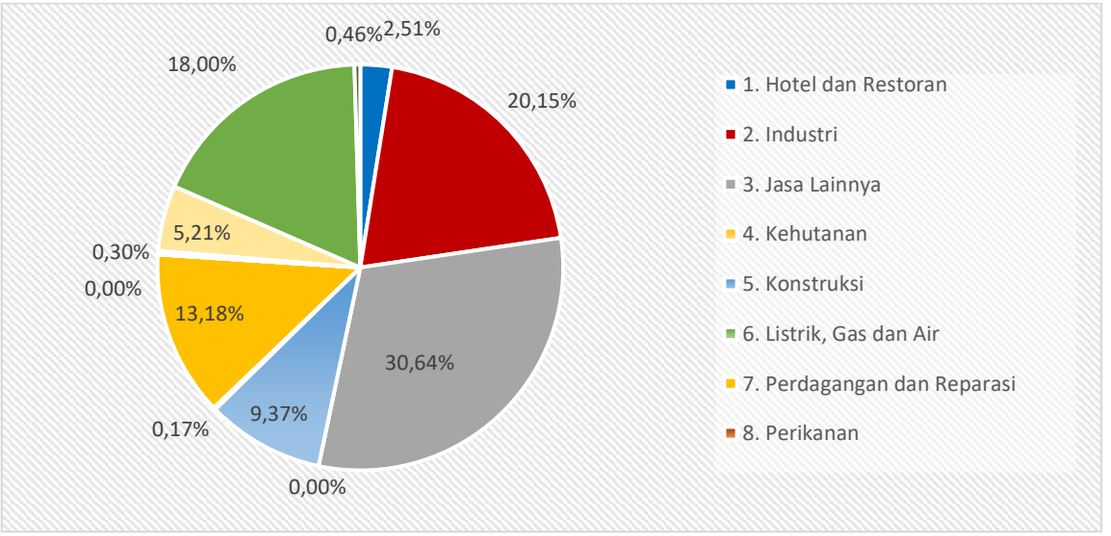
Tabel 2.111. Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo (Juta Rupiah)

No	Tahun	Realisasi Penanaman Modal			
		PMA	PMDN	UMKM	Total
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	2021	971.500.000	44.815.300.000	53.171.377.800	98.958.177.800
2	2022	3.667.700.000	67.572.000.000	2.276.711.703.361	2.347.951.403.361
3	2023	229.399.765	138.975.300.000	1.396.127.160.214	1.535.331.859.979
4	2024	326.920.420	125.609.508.705	1.322.558.126.237	1.448.494.555.362
5	2025	3.665.864.804	213.373.243.889	495.835.538.977	712.874.647.670

Sumber: OSS, 2025

Realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan sumber investasi, realisasi penanaman modal didominasi oleh investasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memberikan kontribusi terbesar setiap tahunnya. Sementara itu, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir, dari Rp125,61 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp213,37 miliar pada tahun 2025. Adapun Penanaman Modal Asing (PMA) masih memberikan kontribusi yang relatif kecil dibandingkan PMDN maupun investasi UMKM.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur investasi di Kabupaten Purworejo masih didominasi oleh kegiatan usaha skala domestik, khususnya UMKM. Meskipun realisasi investasi mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan PMDN pada tahun 2025 mengindikasikan adanya potensi penguatan investasi dalam negeri yang perlu terus didorong melalui perbaikan iklim investasi, kemudahan perizinan, penyediaan infrastruktur pendukung, serta penguatan daya saing sektor-sektor unggulan daerah. Capaian investasi tahun 2025 menandai pemulihan yang kuat dibanding tahun sebelumnya, namun secara komparatif posisi realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo masih perlu diperkuat agar lebih kompetitif di tingkat Jawa Tengah. Berikut gambaran penanaman modal di tahun 2025 berdasarkan KBLI.



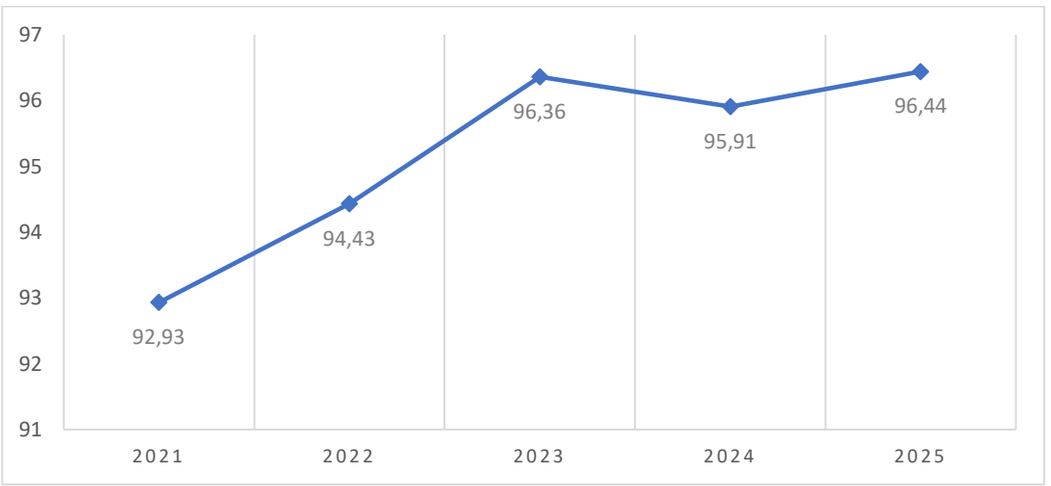
Gambar 2.46. Realisasi Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo Tahun 2025 menurut KBLI

Sumber: OSS, 2025

Data di atas menunjukkan adanya konsentrasi investasi pada sektor-sektor tertentu seperti Jasa lainnya dan Industri, sehingga dibutuhkan strategi penguatan sektor unggulan yang diikuti diversifikasi sektor pendukung untuk menjaga stabilitas pertumbuhan jangka menengah.

Selain itu, peningkatan realisasi investasi juga tidak terlepas dari kualitas pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan berusaha. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kualitas layanan tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan. IKM merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat atau pelaku usaha terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, termasuk kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, kejelasan persyaratan, serta profesionalitas petugas. Semakin tinggi nilai IKM, maka semakin baik kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat maupun investor.

Berikut ini ialah grafik yang menunjukkan perkembangan IKM terhadap perizinan dalam kurun lima tahun terakhir di DPMPTSP.



Gambar 2.47. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Purworejo

Sumber: DPMPTSP Kab. Purworejo, 2026

Saat ini Kabupaten Purworejo telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) di komplek Alun-Alun Kabupaten Purworejo. MPP yang telah diresmikan pada 7 Oktober 2022 ini menjadi salah satu penyebab tingginya IKM pada tahun 2023 sebesar 96,36, meskipun sedikit menurun di tahun terakhir (95,91). Tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dapat menjadi sinyal positif bagi calon investor karena menunjukkan bahwa proses perizinan relatif mudah dan efisien. Kondisi tersebut seharusnya dapat menjadi modal penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah.

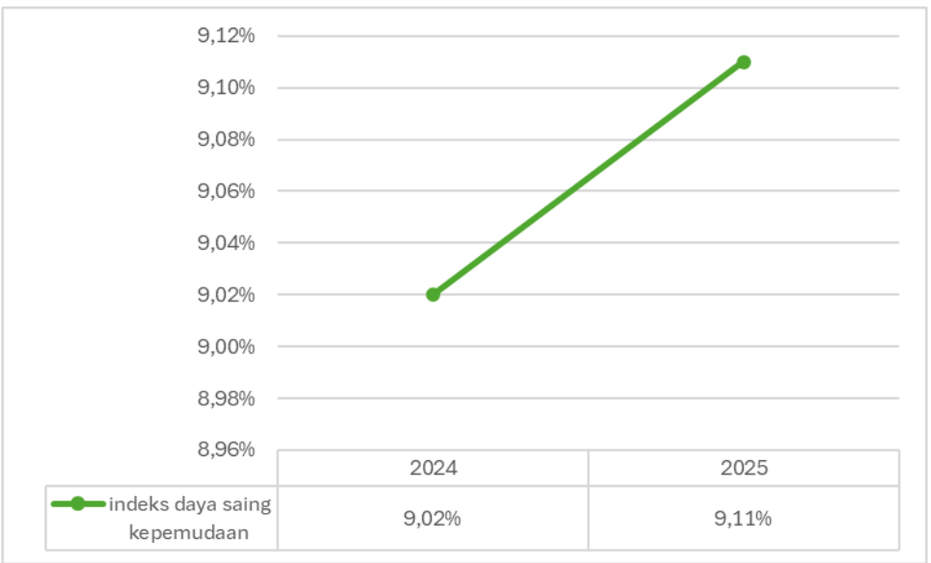
Namun demikian, tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan realisasi penanaman modal yang signifikan di Kabupaten Purworejo. Secara komparatif, nilai investasi di Purworejo masih relatif rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor pelayanan perizinan saja tidak cukup untuk menarik investasi, karena keputusan investor juga dipengaruhi oleh berbagai

faktor lain, seperti ketersediaan infrastruktur, aksesibilitas wilayah, kesiapan kawasan industri, kedekatan dengan pasar, serta ketersediaan tenaga kerja dan rantai pasok industri.

Dengan demikian, meskipun kualitas layanan perizinan di Kabupaten Purworejo telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, upaya peningkatan investasi tetap perlu didukung oleh penguatan faktor fundamental investasi, seperti pengembangan kawasan industri atau sentra ekonomi baru, peningkatan konektivitas infrastruktur, penyusunan proyek siap investasi (*investment ready project*), serta promosi investasi yang lebih terarah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi daerah sehingga realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo dapat meningkat dan lebih kompetitif di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

m. Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kualitas pembangunan di bidang kepemudaan serta olahraga di suatu daerah. Indeks ini memberikan gambaran mengenai potensi, partisipasi, serta dukungan terhadap kegiatan kepemudaan dan olahraga. Berikut disajikan data Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan.



Gambar 2.48. Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Purworejo

Sumber : Dinporapar Kabupaten Purworejo Tahun 2025

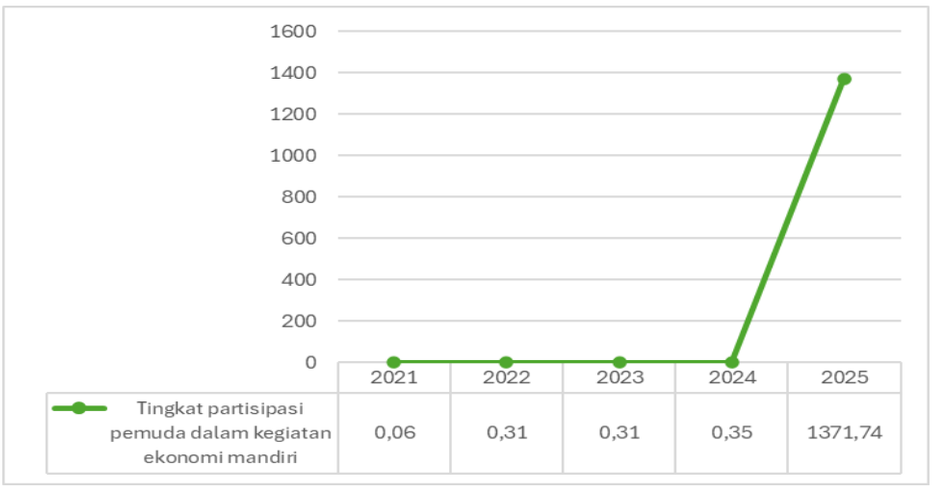
Indeks Daya Saing Kepemudaan menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,09 persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam capaian indikator daya saing pemuda, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan, pendidikan, kewirausahaan, maupun program pemberdayaan kepemudaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Meskipun peningkatannya relatif kecil, tren positif ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas dan peran pemuda mulai memberikan dampak, sehingga perlu terus didorong melalui program dan kebijakan yang

berkelanjutan guna meningkatkan daya saing pemuda secara lebih optimal di tahun-tahun berikutnya.

Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian dan kontribusi generasi muda terhadap pembangunan ekonomi daerah. Keterlibatan pemuda dalam aktivitas ekonomi mandiri, seperti wirausaha, usaha kreatif, maupun kegiatan produktif lainnya, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemantauan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan efektivitas program pemberdayaan pemuda yang telah dilaksanakan.

Data berikut menunjukkan perkembangan tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri selama periode tahun 2021 hingga 2025.



	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,06	0,31	0,31	0,35	1371,74

Gambar 2.49. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Sumber : Dinporapar Kabupaten Purworejo Tahun 2025

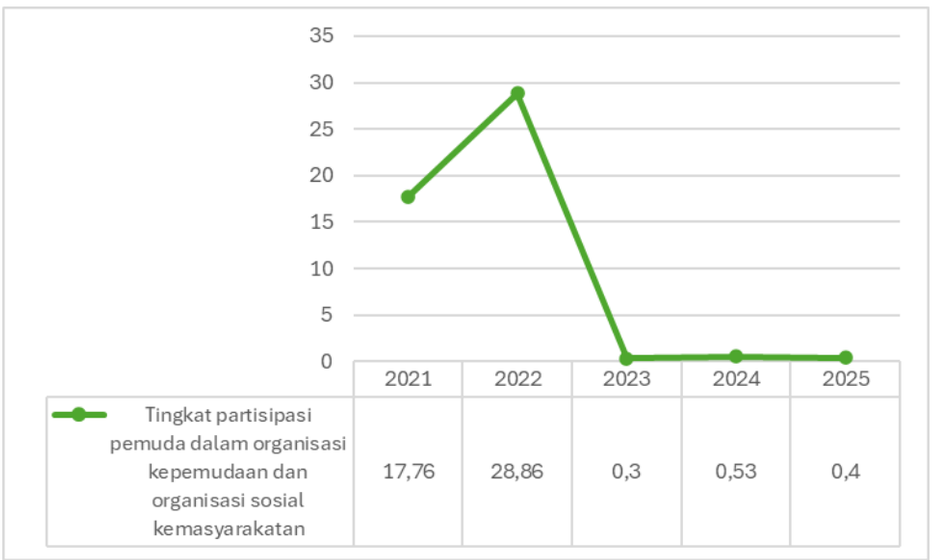
Berdasarkan data yang tersedia, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, tingkat partisipasi pemuda tercatat sebesar 0,06. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 0,31 dan nilai tersebut tetap sama pada tahun 2023.

Pada tahun 2024, partisipasi pemuda kembali mengalami peningkatan menjadi 0,35 yang menunjukkan adanya perkembangan positif dalam keterlibatan pemuda pada kegiatan ekonomi mandiri. Namun pada tahun 2025 terlihat lonjakan nilai yang sangat tinggi hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode pengukuran. Pada tahun 2021-2024 perhitungannya adalah jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten dibandingkan dengan jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/Kota. Sedangkan pada tahun 2025 perhitungannya adalah Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten dibandingkan dengan Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di Kabupaten/Kota.

Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai tingkat keterlibatan generasi muda dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui organisasi kepemudaan, pemuda dapat

mengembangkan kemampuan kepemimpinan, memperluas jaringan sosial, serta berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan di lingkungan masyarakat. Selain itu, keterlibatan dalam organisasi sosial kemasyarakatan juga menjadi sarana bagi pemuda untuk menyalurkan aspirasi, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat solidaritas dan kerja sama antaranggota masyarakat.

Untuk mengetahui perkembangan keterlibatan pemuda tersebut, berikut disajikan data tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan selama periode tahun 2021 - 2025.



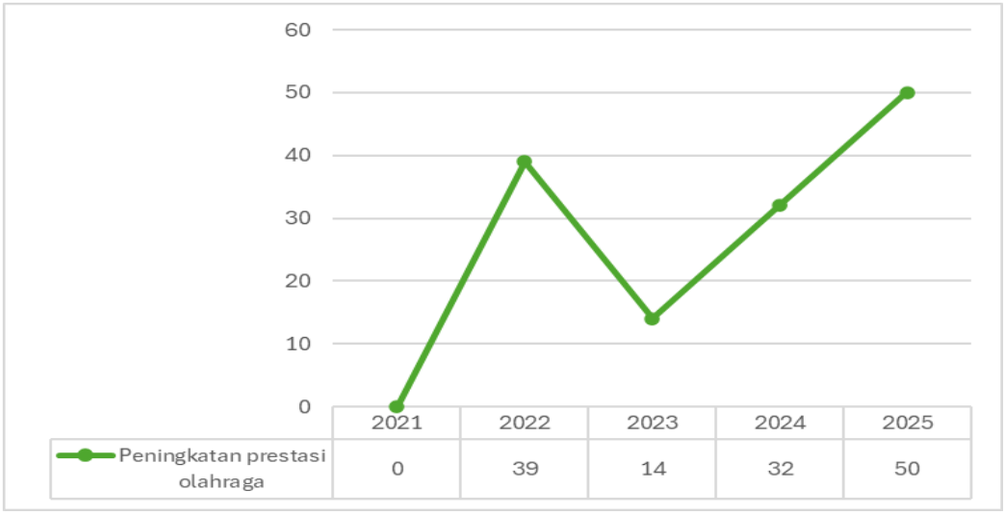
Gambar 2.50. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Sumber : Dinporapar Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersedia, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, tingkat partisipasi pemuda tercatat sebesar 17,76. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 28,86, yang menunjukkan meningkatnya keterlibatan pemuda dalam kegiatan organisasi pada periode tersebut. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi 0,3. Penurunan ini berlanjut dengan sedikit peningkatan pada tahun 2024 menjadi 0,53. Selanjutnya pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan menjadi 0,4. Apabila dilihat secara umum, data ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemuda masih belum stabil sehingga diperlukan upaya yang lebih konsisten dalam mendorong keterlibatan pemuda dalam kegiatan organisasi sosial dan kepemudaan.

Prestasi olahraga merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembinaan dan pengembangan olahraga di suatu daerah. Peningkatan prestasi olahraga tidak hanya mencerminkan kemampuan atlet dalam berkompetisi, tetapi juga menunjukkan efektivitas program pembinaan, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, serta dukungan berbagai pihak terhadap pengembangan potensi atlet. Upaya peningkatan prestasi olahraga perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, serta peningkatan kualitas

pelatih dan fasilitas olahraga. Untuk mengetahui perkembangan capaian tersebut, berikut disajikan data peningkatan prestasi olahraga selama periode tahun 2021 -2025.



Gambar 2.51. Peningkatan Prestasi Olahraga

Sumber : Dinporapar Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersedia, peningkatan prestasi olahraga menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 belum tercatat adanya peningkatan prestasi olahraga dengan nilai sebesar 0. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dengan nilai mencapai 39. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pembinaan dan pencapaian prestasi olahraga pada periode tersebut. Namun pada tahun 2023 nilai peningkatan prestasi olahraga mengalami penurunan menjadi 14. Selanjutnya pada tahun 2024 kembali terjadi peningkatan dengan nilai mencapai 32, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga. Tren peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian tertinggi selama periode pengamatan yaitu sebesar 50. Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023, tren peningkatan prestasi olahraga menunjukkan perkembangan yang positif hingga tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pembinaan dan pengembangan olahraga mulai memberikan hasil yang lebih optimal dalam meningkatkan prestasi atlet.

n. Bidang Urusan Statistik

Urusan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Secara teknis, penyelenggaraan urusan statistik di daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta berbagai regulasi turunannya. Di Kabupaten Purworejo, urusan statistik menjadi kewenangan perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informatika sebagai Walidata, sedangkan Badan Pusat Statistik berperan sebagai pembina statistik sektoral. Urusan statistik di Kabupaten Purworejo memiliki sasaran di level Perangkat Daerah yakni

Meningkatnya kualitas statistik sektoral dengan indikator sasaran Indeks Satu Data Indonesi (Indeks SDI).

Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) Data Leadership. Setiap domain terdiri dari beberapa aspek di mana masing-masing aspek terdiri dari beberapa indikator yang kemudian nilainya akan dihitung agregasinya untuk mendapatkan nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI). Berdasarkan hasil penilaian Bappenas, Indeks SDI Kabupaten Purworejo pada tahun 2024 dan 2025 adalah sebesar berikut:

Tabel 2.112. Indeks Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Purworejo Tahun 2024-2025

No	Aspek	2024		2025		
	Bobot	Nilai		Bobot	Nilai	
A.	**Domain Kebijakan dan Kelembagaan**	**34%**		**65,30**	**20%**	**74,91**
1.	Aspek Kebijakan	17%		87,99	8%	84,78
2.	Aspek Kelembagaan	17%		42,61	12%	68,33
B.	**Domain Penyelenggaraan SDI**	**43%**		**38,60**	**56%**	**38,69**
1.	Aspek Perencanaan	11%		71,64	14%	46,30
2.	Aspek Pengumpulan	6%		0,00	12%	0,00
3.	Aspek Pemeriksaan	18%		25,11	14%	28,48
4.	Aspek Penyebarluasan	8%		52,50	16%	70,00
C.	**Domain Data Leadership**	**23%**		**91,30**	**24%**	**82,44**
1.	Aspek Pemanfaatan Data	14%		85,71	12%	79,17
2.	Aspek Pembiayaan	9%		100,00	6%	100,00
3.	Aspek Manajemen Data	N/A	N/A	6%		71,43
Indeks Satu Data Indonesia		**59,80**		**56,44**		

Sumber: Bappenas, 2026

Berdasarkan tabel di atas, nilai Indeks SDI mengalami penurunan dari 59,80 pada tahun 2024 menjadi 56,44 pada tahun 2025 (turun sebesar 3,36 poin). Penurunan ini bukan semata-mata disebabkan oleh penurunan nilai pada setiap aspek, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan bobot penilaian SDI tahun 2025 serta menurunnya nilai pada beberapa aspek yang memiliki bobot besar. Aspek yang mengalami penurunan nilai antara lain aspek kebijakan, aspek perencanaan, dan aspek pemanfaatan data.

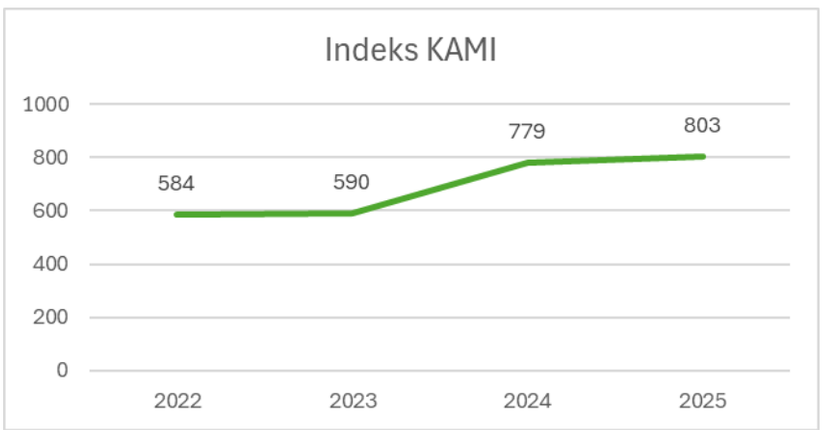
Aspek kebijakan turun sebesar 3,21 poin disebabkan oleh SK Satu Data belum diperbarui mengikuti Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Aspek perencanaan turun sebesar 25,34 poin disebabkan oleh belum seluruh Perangkat Daerah menyusun daftar data prioritas, perencanaan statistik sektoral belum terintegrasi, serta daftar data belum mengacu pada Satu Data Indonesia dan belum ditetapkan dalam SK Bupati. Aspek pemanfaatan data turun sebesar 6,54 poin disebabkan oleh data belum sepenuhnya digunakan dalam penyusunan kebijakan, *dashboard* data belum dimanfaatkan secara optimal, serta *evidence-based policy* belum diterapkan di seluruh OPD.

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian terkait Urusan Statistik pada tahun 2027 adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Program ini memiliki indikator yaitu Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Melalui program ini, diharapkan capaian indikator pada urusan statistik dapat terwujud secara optimal, memastikan bahwa data statistik yang tersedia mencakup berbagai sektor penting yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya data yang komprehensif dan *up-to-date*, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo dapat dilakukan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Berikut capaian indikator pada urusan statistik.

Dokumen statistik sektoral dan daerah yang telah disusun oleh Dinkominfostasandi dipublikasikan melalui laman https://datajo.purworejokab.go.id/ agar memudahkan akses bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Meski capaian ini sangat positif, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan data yang disediakan tetap relevan, *up-to-date*, dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, upaya terus-menerus dalam pembaruan data, peningkatan kualitas, dan penyebarluasan informasi harus menjadi prioritas agar dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di Kabupaten Purworejo.

o. Bidang Urusan Persandian

Dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang andal dan aman secara digital, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melaksanakan penguatan layanan persandian dan keamanan informasi melalui pengukuran Indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang disusun oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Indeks ini menggambarkan seberapa matang dan komprehensif pengelolaan keamanan informasi diterapkan dalam infrastruktur pemerintahan daerah. Berikut merupakan capaian Indeks KAMI Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025.



Gambar 2.52. Capaian Indeks KAMI Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2025
Sumber: Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas, Indeks KAMI mulai dihitung tahun 2022. Indeks KAMI Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan yang signifikan selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2022, skor indeks

tercatat sebesar 584 kemudian mengalami peningkatan menjadi 590 di tahun 2023. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan signifikan menjadi 779, dan di tahun 2025 menjadi 803. Hal tersebut menandakan penguatan kebijakan dan teknis keamanan informasi berupa langkah-langkah strategis dalam pengelolaan risiko siber, pengamanan data aset pemerintah, serta penerapan sistem elektronik yang lebih aman.

Urusan persandian merupakan upaya penting untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan informasi yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi pemerintah. Sehingga, keberhasilan urusan ini dicirikan oleh kemampuan untuk melindungi data dan informasi dari akses yang tidak sah, serta memastikan integritas dan keaslian informasi yang dikelola oleh pemerintah. Program yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian terkait Urusan Persandian pada tahun 2027 adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator program berupa Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.

Sebelum tahun 2021, layanan persandian meliputi pelayanan penerimaan dan penyampaian berita sandi dari pusat dan provinsi serta layanan telekomunikasi berita telepon/fax antar perangkat daerah. Mulai tahun 2022, Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo telah meningkatkan kapabilitasnya dengan membentuk *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dan menyediakan layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

CSIRT merupakan tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan serta aktivitas insiden keamanan siber. Pembentukan CSIRT bertujuan untuk melakukan penyelidikan komprehensif serta melindungi sistem dan data dari insiden keamanan siber. Selain itu, CSIRT juga aktif dalam penilaian dan deteksi ancaman, perencanaan mitigasi, serta tinjauan arsitektur keamanan informasi organisasi. Tim ini berperan penting dalam memastikan bahwa layanan persandian tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dalam mengelola ancaman keamanan siber.

Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE), yang mengacu pada UU ITE Pasal 1 angka 12, adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. TTE berfungsi untuk memastikan integritas dan keaslian dokumen elektronik yang digunakan dalam transaksi dan komunikasi pemerintahan. Dengan adanya TTE, efisiensi administrasi dan kepercayaan terhadap dokumen elektronik di lingkungan pemerintahan dapat meningkat secara signifikan.

Di samping itu, Dinkominfostasandi juga masih memiliki tantangan dalam memastikan bahwa seluruh sistem dan data di Kabupaten Purworejo benar-benar terlindungi dari ancaman siber. Keberlanjutan dan peningkatan kapabilitas CSIRT serta penyebaran penggunaan TTE perlu terus didorong untuk menjaga keamanan dan integritas informasi. Implementasi program ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, CSIRT, dan seluruh perangkat daerah untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan terpercaya dalam pengelolaan informasi dan komunikasi.

p. Bidang Urusan Kebudayaan

Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan merupakan cakupan Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya

Tak Benda (WBTB) yang mendapatkan intervensi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan/atau pembinaan.

Tabel 2.113. Data Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Cagar Budaya Dan Warisan Budaya Tak Benda	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Objek Diduga CB	284	284	284	284	284
2	CB	43	55	65	81	91
3	Objek Diduga WBTB	3	3	3	5	5
4	WBTB	3	3	3	4	4
5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	16,03%	20,21%	23,69%	29,41%	31,97%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 tetap sebanyak 284 objek, yang menunjukkan belum adanya penambahan objek yang teridentifikasi dan diregistrasi. Sementara itu, jumlah Cagar Budaya (CB) yang telah ditetapkan terus meningkat dari 43 objek pada tahun 2021 menjadi 91 objek pada tahun 2025. Pada aspek Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), jumlah Objek Diduga WBTB bertambah dari 3 menjadi 6 objek, sedangkan WBTB yang telah ditetapkan meningkat dari 3 menjadi 5 objek. Sejalan dengan perkembangan tersebut, persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan juga meningkat secara konsisten dari 16,03% pada tahun 2021 menjadi 31,97% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pelestarian dan penetapan warisan budaya di Kabupaten Purworejo, meskipun masih diperlukan penguatan inventarisasi, kajian akademik, serta percepatan proses penetapan agar lebih banyak objek dan warisan budaya memperoleh status perlindungan dan pelestarian secara resmi.

Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa masyarakat yang menjadi bagian penting dari identitas daerah.

Tabel 2.114. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dikembangkan di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah kebudayaan yang dikembangakan	7	7	8	7	7
2	Jumlah kebudayaan yang terdata	10	10	10	10	10
3	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	70,00	70,00	80,00	70,00	70,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan data di atas, selama periode 2021–2025 terdapat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdata. Dari jumlah tersebut, objek kebudayaan yang berhasil dikembangkan mencapai 7 objek pada tahun

2021, 2022, 2024, dan 2025, serta meningkat menjadi 8 objek pada tahun 2023. Persentase pengembangan kebudayaan sebesar 70% pada sebagian besar tahun, dan meningkat menjadi 80% pada tahun 2023.

Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Purworejo meliputi sepuluh unsur, yaitu:

1. Manuskrip, berupa naskah yang memiliki nilai sejarah dan budaya, seperti *Babad Kedung Kebo, Babad Loano, Babad Diponegoro*, dan *Babad Banyuurip.*
2. Tradisi lisan yaitu tuturan yang diwariskan secara turun-temurun, seperti sejarah lisan, dongeng, pantun, rapalan, dan cerita rakyat yang berkembang di Kabupaten Purworejo
3. Adat istiadat, berupa kebiasaan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti tradisi Merti Desa, Jolenan, dan Grebeg Ingkung.
4. Ritus, yaitu tata cara pelaksanaan upacara adat atau keagamaan, seperti upacara kelahiran, perkawinan, kematian, peringatan tertentu, dan berbagai ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
5. Pengetahuan Tradisional, yaitu pengetahuan lokal yang berkembang dari pengalaman masyarakat, meliputi kerajinan, busana, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan tentang alam. Salah satu contohnya adalah Batik Purworejo.
6. Teknologi Tradisional, yaitu keterampilan dan teknologi yang diwariskan secara turun-temurun untuk mendukung kehidupan masyarakat. Contohnya adalah Tosan Aji sebagai warisan teknologi tradisional.
7. Seni, yang mencakup seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media. Bentuknya antara lain seni tari, musik, teater, lukisan, patung, dan keramik.
8. Bahasa, sebagai sarana komunikasi masyarakat. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Purworejo adalah Bahasa Jawa, yang masih dilestarikan melalui berbagai kegiatan, seperti Panata Cara menggunakan Bahasa Jawa.
9. Permainan Rakyat, yaitu permainan tradisional yang berfungsi sebagai hiburan sekaligus media pewarisan nilai budaya, seperti kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor. Permainan tersebut juga diperkenalkan dalam kegiatan Pameran Temporer Museum Tosan Aji Purworejo.
10. Olahraga Tradisional, yaitu aktivitas fisik yang mengandung nilai budaya dan diwariskan secara turun-temurun, seperti pencak silat.

Keberadaan sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo memiliki kekayaan budaya yang beragam dan perlu terus dilestarikan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, serta pembinaan agar tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Kabupaten Purworejo memiliki berbagai situs dan bangunan bersejarah yang menjadi bagian penting dari warisan budaya daerah. Beberapa di antaranya adalah Lingga Bulat Telur, Situs Goa Silawang, Situs Goa Silumbu, Situs Pijig, Gereja Kyai Sadrach, Memorial House W.R. Soepratman, Situs Goa Gong, Gereja GPIB Purworejo, Masjid Al Iman Loano,

Masjid Jatisalam, dan Museum Tosan Aji. Keberadaan tempat-tempat bersejarah tersebut memiliki nilai penting sebagai sarana pelestarian sejarah, pendidikan, serta pengembangan pariwisata budaya.

Tabel 2.115. Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

NO	Tempat Bersejarah	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	7.659	13.581	57.838	28.556	78.790

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan data jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Purworejo tahun 2021–2025, kunjungan menunjukkan tren yang terus meningkat. Jumlah pengunjung tercatat sebanyak 7.659 orang pada tahun 2021, meningkat menjadi 13.581 orang pada tahun 2022, kemudian melonjak signifikan menjadi 57.838 orang pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah pengunjung mengalami penurunan menjadi 28.556 orang, namun kembali meningkat secara tajam pada tahun 2025 hingga mencapai 78.790 orang.

Peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dipengaruhi oleh adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan sekolah dan lembaga pendidikan dalam pemanfaatan tempat-tempat bersejarah, khususnya Museum Tosan Aji, sebagai media pembelajaran sejarah lokal. Program edukasi tersebut mendorong meningkatnya kunjungan peserta didik sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di luar kelas. Meskipun terjadi penurunan jumlah kunjungan pada tahun 2024, tren kenaikan kembali terlihat pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata sejarah dan efektivitas upaya promosi serta pemanfaatan situs budaya sebagai destinasi edukatif.

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah kunjungan ke tempat bersejarah di Kabupaten Purworejo mencerminkan semakin optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset cagar budaya sebagai sarana pendidikan, pelestarian sejarah, dan pengembangan pariwisata budaya. Kondisi ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, komunitas budaya, dan masyarakat dalam mendukung pelestarian serta pemanfaatan warisan budaya daerah.

Pemajuan kebudayaan diharapkan dapat mendorong pembangunan terutama dimensi ekonomi dalam hal ini melalui keaktifan kelompok kesenian dalam pertunjukan kesenian. Persentase kelompok kesenian yang aktif menggambarkan cakupan kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Pertunjukan atau festival kesenian dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama para pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor. Berikut merupakan data jumlah kelompok kesenian yang ber-SKT dan Kesenian Aktif di Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025.

Tabel 2.116. Jumlah Kelompok Kesenian yang Ber-SKT dan Kesenian Aktif di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

NO	Kelompok Kesenian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Kelompok Kesenian ber-SKT	457	597	604	689	1.438
2	Jumlah Kelompok Kesenian yang Aktif	1.310	1.310	1.310	1.310	1.637
3	**Persentase kelompok kesenian yang aktif**	**34,89%**	**45,57%**	**46,11%**	**52,60%**	**87,84%**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan data di atas, jumlah kelompok kesenian yang ber-SKT atau memilik Surat Keterangan Terintegrasi dari tahun 2021 sampai dengan 2025 terus meningkat. Begitu juga untuk kelompok kesenian yang aktif juga selalu meningkat. Kelompok kesenian yang aktif adalah kelompok kesenian yang terdaftar dan berperan serta aktif setiap tahunnya dalam kegiatan/acara yang menampilkan pertunjukan atau festival kesenian. Pertunjukan atau festival dapat berskala internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan selama pelaku seni tersebut memperoleh penghasilan/pendapatan/honor.

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kebudayaan di Kabupaten Purworejo dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, dan praktik budaya pada kehidupan sosial cukup baik. Kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan masih perlu ditingkatkan. Upaya pelindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terkait Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk Seni, merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Diperlukan adanya peran dan sinergi seluruh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang kebudayaan.

Perlindungan aset budaya juga dapat terwujud dengan menyediakan museum yang dikelola secara representatif. Pada Kabupaten Purworejo terdapat Museum Tosan Aji yang berfungsi yang telah dikelola dengan baik dan menjadi salah satu tujuan wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.117. Jumlah Pengunjung Museum Tosan Aji Tahun 2021-2025

NO	Kelompok Kesenian	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah pengunjung museum	952	11.920	48.921	18.061	18.200
2	Jumlah pengunjung museum tahun n-1	2.221	952	11.920	48.921	18.061

Sumber: Dindikbud Kabupaten Purworejo, 2026

q. Bidang Urusan Perpustakaan

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan kajian yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur IPLM, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi perpustakaan, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari,

jumlah perpustakaan memiliki Standar Nasional Perpustakaan (SNP), keterlibatan masyarakat kegiatan sosialisasi/promosi, dan anggota perpustakaan (Perpusnas, 2023). IPLM Kabupaten Purworejo tahun 2022 adalah 56,98 kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 78,43. Berikut merupakan indikator indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 2022-2025.

Tabel 2.118. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2025

No	Uraian	Nilai			
		2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		56,98	78,43	78,32	9,36

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, 2026

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ke 2023, yaitu dari 56,98 menjadi 78,43. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan yang cukup besar dalam akses, kualitas, maupun pemanfaatan layanan literasi oleh masyarakat. Pada tahun 2024, nilai IPLM relatif stabil di angka 78,32, yang menunjukkan bahwa capaian literasi berhasil dipertahankan meskipun tidak mengalami peningkatan berarti.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi 9,36. Penurunan tajam ini dikarenakan adanya perubahan metode pengukuran. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi faktor penyebab serta merumuskan strategi pemulihan guna mengembalikan dan meningkatkan kembali tingkat literasi masyarakat di Kabupaten Purworejo.

Tingkat pemanfaatan perpustakaan dihitung dengan banyaknya pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan per hari di tahun tersebut dibagi jumlah penduduk pada tahun yang sama. Jumlah pemustaka yang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan berasal dari kunjungan harian perpustakaan (onsite dan online) dan kunjungan pemustaka yang terlibat dalam kegiatan perpustakaan. Perpustakaan yang dimaksud dengan perpustakaan adalah perpustakaan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, Perguruan Tinggi dan Khusus. Tingkat pemanfaatan perpustakaan di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025 sebagai berikut.

Tabel 2.119. Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	4.751	18.606	33.428	56.401	56.401*

Sumber: Dinpusip Kabupaten Purworejo, 2026

Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2021 sangat rendah dan meningkat sampai tahun 2025. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 adanya pandemi covid-19 layanan keliling ke Sekolah terhambat dan baru dimulai

lagi bulan November 2021 dan adanya penerapan kebijakan PPKM. Namun jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2022 kembali meningkat sebesar 6,67% sampai pada tahun 2023 menjadi 11,23%.

Pada tahun 2024, jumlah pengunjung perpustakaan semakin meningkat, Hal ini didorong oleh bangunan perpustakaan daerah Kabupaten Purworejo yang baru dan representatif dengan sarana prasarana yang memadai sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung. Selain itu, adanya inovasi safari perpustakaan ke desa prioritas penanganan kemiskinan. Aktivitas ini menambah wawasan dan pengetahuan terkait keberadaan perpustakaan dan kemanfaatan perpustakaan terkait layanan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat menuju kesejahteraan.

Dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan minat baca masyarakat diperlukan upaya untuk menambah jumlah bahan pustaka baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan yaitu kurangnya promosi dan sosialisasi akan program-program perpustakaan, beberapa kecamatan mempunyai jarak yang cukup jauh dari perpustakaan, minimnya SDM untuk layanan perpustakaan keliling, dan koleksi *e-book* belum *update* sejak tahun 2019.

Tingkat gemar membaca merupakan indikator penting dalam menilai minat literasi masyarakat dan menjadi fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Indikator ini mencerminkan seberapa besar ketertarikan masyarakat terhadap kegiatan membaca, baik melalui media cetak maupun digital, serta mencerminkan keberhasilan program literasi yang dijalankan di suatu wilayah. Budaya membaca yang tinggi erat kaitannya dengan peningkatan kualitas pendidikan, produktivitas, dan kemampuan berpikir kritis masyarakat.

Tabel 2.120. Tingkat Gemar Membaca Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2025

No	Uraian	Nilai			
		2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Tingkat Kegemaran Membaca		59.80	57.07	70.24	56,83

Sumber: BPS Kabupaten Purworejo, 2025

Tingkat Kegemaran Membaca di Kabupaten Purworejo selama periode 2022–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup dinamis. Pada tahun 2022, nilai tercatat sebesar 59,80, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 57,07. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan minat atau kebiasaan membaca masyarakat pada periode tersebut.

Selanjutnya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 70,24, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam budaya membaca, kemungkinan didorong oleh program literasi, peningkatan akses bahan bacaan, atau kampanye gemar membaca. Namun, pada tahun 2025 nilai kembali menurun menjadi 56,83 dikarenakan adanya perubahan metode perhitungan.

Secara keseluruhan, tren ini memperlihatkan bahwa tingkat kegemaran membaca masyarakat belum stabil dan masih rentan terhadap penurunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan minat baca masyarakat, seperti

penguatan program literasi, penyediaan fasilitas membaca yang lebih merata, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya budaya membaca.

r. Bidang Urusan Kearsipan

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Audit Kearsipan Internal adalah Audit yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Sedangkan Audit Kearsipan Eksternal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Pengawasan kearsipan internal merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap perangkat daerah di lingkungannya. Pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan melalui audit kearsipan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan di masing-masing pencipta arsip.

Tabel 2.121. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	68,02	73,16	81,92	75,78	84,83
2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	-	62,22	82,36	76,38	77,70
3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	68,02	80,46	81,26	75,38	89,58

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, 2026

Nilai hasil pengawasan kearsipan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021-2023, yaitu 68,02 pada tahun 2021 menjadi 73,16 pada tahun 2022, dan mencapai 81,92 pada tahun 2023. Capaian ini mencerminkan perbaikan tata kelola kearsipan, peningkatn kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pembinaan internal oleh lembaga kearsipan daerah. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan niai menjadi 75,78 yang mengindikasikan adanya tantangan dalam konsistensi pelaksanaan kebijakan kearsipan di seluruh perangkat daerah. Penurunan ini menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan kearsipan ke depan. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2024, nilai hasil pengawasan kearsipan kembali meningkat di tahun 2025.

Secara umum, hasil pengawasan menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Purworejo telah mengalami perbaikan, meskipun masih diperlukan penguatan aspek kelembagaan,

sumber daya manusia, serta pengawasan berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kearsipan daerah secara menyeluruh.

Salah satu faktor yang turut memengaruhi hasil pengawasan kearsipan adalah tingkat partisipasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Berdasarkan data capaian, Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN di Kabupaten Purworejo masih sangat rendah. Selama periode 2020 higga 2023, persentase unggahan tercatat 0 persen, dan baru menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 sebesar 21,74 persen.

Tabel 2.122. Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	0	0	21,74	35,76

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo, 2026

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Purworejo terletak di pesisir selatan dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, memiliki potensi besar dalam sektor Kelautan dan Perikanan. Namun, produksi perikanan di daerah ini dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Fluktuasi ini mungkin dipengaruhi oleh perubahan kondisi cuaca, keberagaman spesies ikan, serta dinamika pasar dan teknologi perikanan. Tantangan seperti pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan, pencemaran laut, dan perubahan iklim juga dapat memengaruhi hasil produksi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan ekonomi biru melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, serta ekonomi hijau melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien, ramah lingkungan, dan berketahanan terhadap perubahan iklim. Upaya ini perlu didukung dengan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas nelayan, serta pengembangan usaha perikanan yang bernilai tambah dan berwawasan lingkungan.

Tabel 2.123. Produksi Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Produksi perikanan budidaya (Ton)	3.846,00	3.957,36	4.036,51	4.120,77	4.207,50
2	Nilai produksi perikanan budidaya (Juta Rupiah)	174.302,73	182.886,33	181.386,91	183.427,10	186.887,89
3	Produksi perikanan tangkap (Ton)	159,36	149,45	155,51	163,08	171,05
4	Nilai produksi perikanan tangkap (Juta Rupiah)	5.871,41	5.462,88	5.799,38	8.059,89	9.901,76
5	Produksi Pengolahan dan	-	-	236,99	242,97	248,6

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (Ton)					
6	Nilai Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan (Juta Rupiah)	-	1.253,78	2.356,61	2.416,05	2.491,47
7	Produksi Garam (ton)	18,9	36,67	235,53	123,13	136,92

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo, 2026

Produksi perikanan di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, baik pada subsektor perikanan budidaya, perikanan tangkap, maupun kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Peningkatan produksi tersebut mencerminkan berkembangnya aktivitas ekonomi sektor perikanan yang berperan dalam penyediaan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat pesisir dan pembudidaya, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada subsektor perikanan budidaya, produksi meningkat dari 3.846 ton pada tahun 2021 menjadi 4.207,50 ton pada tahun 2025. Sejalan dengan peningkatan produksi tersebut, nilai produksi juga meningkat dari Rp174.302,73 juta menjadi Rp186.887,89 juta, yang menunjukkan semakin berkembangnya usaha budidaya ikan dan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, produksi perikanan tangkap menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi namun cenderung meningkat pada akhir periode. Produksi sempat menurun dari 159,36 ton pada tahun 2021 menjadi 149,45 ton pada tahun 2022, kemudian kembali meningkat hingga mencapai 171,05 ton pada tahun 2025. Nilai produksinya juga meningkat cukup signifikan, dari Rp5.871,41 juta pada tahun 2021 menjadi Rp9.901,76 juta pada tahun 2025, yang mencerminkan meningkatnya nilai ekonomi hasil tangkapan.

Selain itu, kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan juga menunjukkan perkembangan yang positif sejak mulai tercatat pada tahun 2023. Produksi meningkat dari 236,99 ton pada tahun 2023 menjadi 248,60 ton pada tahun 2025, sedangkan nilai produksinya meningkat dari Rp2.356,61 juta menjadi Rp2.491,47 juta. Kondisi ini mengindikasikan mulai berkembangnya hilirisasi produk perikanan yang mampu meningkatkan nilai tambah dan memperkuat rantai nilai sektor perikanan di daerah.

Secara keseluruhan, sektor perikanan memiliki potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Namun demikian, optimalisasi sektor ini masih menghadapi tantangan, baik dari aspek produktivitas, daya saing, maupun pengelolaan sumber daya. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, daya saing sektor perikanan Kabupaten Purworejo masih relatif terbatas karena struktur usaha yang didominasi skala kecil serta tingkat

produktivitas yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi sektor perikanan Kabupaten Purworejo terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah belum sebesar daerah-daerah yang menjadi sentra perikanan utama.

Selain peningkatan produktivitas dan daya saing, keberlanjutan pengembangan sektor perikanan juga sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pengawasan yang memadai menjadi prasyarat untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kelestarian sumber daya, sejalan dengan prinsip ekonomi biru yang menekankan pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025 tercatat terdapat 14 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang aktif di Kabupaten Purworejo. Jumlah tersebut masih belum sebanding dengan jumlah pelaku usaha perikanan yang meliputi usaha budidaya, perikanan tangkap, usaha garam, serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang mencapai 17.147 unit usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pengawasan masih perlu diperkuat melalui peningkatan peran Pokmaswas, penguatan pembinaan dan kepatuhan pelaku usaha, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, sehingga peningkatan produksi dapat berjalan seiring dengan pelestarian ekosistem pesisir dan perairan sesuai prinsip ekonomi biru.

b. Bidang Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pembangunan sektor pariwisata serta tingkat daya tarik destinasi wisata di daerah.

Jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan dinamika aktivitas pariwisata pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Berikut data kunjungan wisatawan di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025.

Tabel 2.124. Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Purworejo

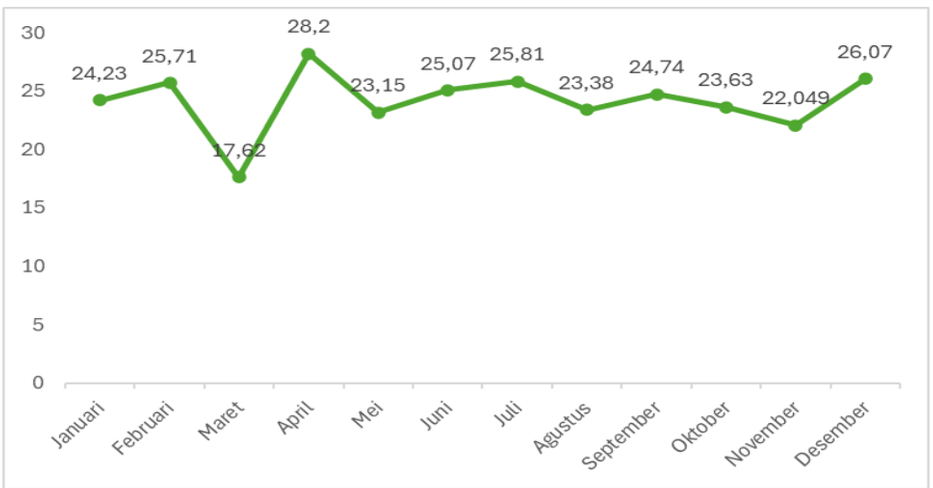
No	Tahun	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	0	25	101	148	150
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	246.911	617.606	636.283	790.969	1.135.629

Sumber: Dinporapar Kabupaten Purworejo, 2025

Secara keseluruhan, data kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa terjadi tren pertumbuhan yang positif dan konsisten dari tahun ke tahun, meskipun pada periode 2022–2023 pertumbuhannya relatif lebih lambat dibandingkan tahun-tahun lainnya. Kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 dan terutama 2025 mengindikasikan adanya peningkatan kinerja atau

perkembangan yang cukup pesat pada periode tersebut. Kondisi ini mencerminkan semakin pulihnya sektor pariwisata pascapandemi serta meningkatnya daya tarik destinasi wisata yang didukung oleh penyelenggaraan berbagai kegiatan promosi, pengembangan destinasi, dan peningkatan kualitas layanan kepariwisataan.

Selain jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian akomodasi juga menjadi salah satu indikator yang menggambarkan perkembangan aktivitas pariwisata di suatu daerah. Tingkat hunian akomodasi mencerminkan tingkat pemanfaatan fasilitas penginapan sebagai dampak dari pergerakan wisatawan. Data tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Purworejo Tahun 2025 disajikan pada diagram berikut.



Gambar 2.53. Tingkat Hunian Akomodasi di Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Sumber: Dinporapar Kabupaten Purworejo, 2025

Dari data tersebut terlihat bahwa tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Purworejo relatif stabil sepanjang tahun, dengan tingkat hunian tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 28,2 persen. Sementara itu, rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,04 malam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas akomodasi masih relatif rendah sehingga masih terdapat peluang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan maupun lama tinggal wisatawan di Kabupaten Purworejo. Kinerja akomodasi tersebut tidak terlepas dari perannya sebagai salah satu penunjang utama aktivitas pariwisata. Sektor ini berkontribusi dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata, sehingga perkembangannya turut memengaruhi daya saing sektor pariwisata secara keseluruhan.

Berdasarkan data perkembangan Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Purworejo, pada periode Tahun 2022–2025 jumlah DTW relatif stabil, yaitu sebanyak 52 destinasi wisata. Komposisi DTW didominasi oleh 33 daya tarik wisata alam, diikuti 14 daya tarik wisata buatan, dan 4 daya tarik wisata budaya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Purworejo masih bertumpu pada potensi wisata alam yang menjadi keunggulan utama daerah, sementara wisata buatan dan budaya berperan sebagai pelengkap dalam memperkaya ragam destinasi yang ditawarkan.

Dari aspek aksesibilitas, sebanyak 24 DTW telah memiliki kondisi akses yang baik, sehingga dapat mendukung mobilitas wisatawan menuju

lokasi wisata. Selain itu, terdapat 9 DTW yang tercatat memiliki akses yang tersedia dengan kondisi baik, sedangkan 18 DTW belum memiliki keterangan mengenai kondisi aksesibilitasnya. Data tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya pendataan yang lebih komprehensif serta peningkatan kualitas akses menuju destinasi wisata yang belum terdokumentasi secara memadai.

Keberadaan 52 DTW tersebut menjadi modal penting dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Purworejo. Namun demikian, selain mempertahankan jumlah destinasi, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan, penyediaan infrastruktur pendukung, serta penguatan promosi agar seluruh potensi wisata dapat berkembang secara optimal. Perbaikan aksesibilitas, khususnya pada destinasi yang belum memiliki informasi kondisi akses maupun yang masih memerlukan peningkatan kualitas, diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan wisatawan, memperluas jangkauan kunjungan, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/764/2022 tentang Penetapan dan Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten Purworejo Tahun 2022, jumlah desa wisata di Kabupaten Purworejo pada periode Tahun 2022–2025 tercatat sebanyak 54 desa wisata. Jumlah tersebut terdiri atas 4 desa wisata dengan klasifikasi berkembang dan 50 desa wisata dengan klasifikasi rintisan. Data tersebut menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata di Kabupaten Purworejo masih didominasi oleh desa wisata pada tahap rintisan, sehingga masih memerlukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar dapat meningkat menjadi desa wisata berkembang, maju, dan mandiri.

Meskipun jumlah desa wisata relatif tetap selama periode tersebut, pengembangan desa wisata masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pengelolaan pada sebagian desa wisata, sehingga aktivitas kepariwisataannya mengalami penurunan bahkan tidak lagi berjalan secara aktif. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pengelola, belum konsistennya kelembagaan desa wisata, minimnya inovasi dalam pengembangan atraksi wisata, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya promosi dan pemasaran destinasi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui peningkatan kapasitas pengelola desa wisata, pendampingan kelembagaan, pengembangan produk wisata yang berbasis potensi lokal, serta penguatan promosi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan langkah tersebut, desa wisata yang saat ini belum aktif diharapkan dapat kembali berkembang sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Selain memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan pengembangan destinasi wisata, kinerja sektor pariwisata juga tercermin pada kontribusinya terhadap penerimaan daerah. Besaran PAD yang didukung oleh sektor pariwisata dapat mencerminkan kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. PAD sektor pariwisata

terdiri atas pajak pada sektor yang terkait langsung dengan pariwisata, yaitu hotel, restoran, dan hiburan, serta retribusi pada objek wisata dan olahraga di Kabupaten Purworejo. Selanjutnya, data mengenai PAD sektor pariwisata dari tahun 2021 hingga 2025 akan menggambarkan sejauh mana sektor ini menyumbang terhadap keuangan daerah.

Tabel 2.125. PAD yang terkait dengan Sektor Pariwisata Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pajak Hotel	399.711.813	470.810.855	624.574.001	621.721.659	588.017.322
2	Pajak Restoran	6.701.487.003	7.423.657.382	9.759.372.345	11.031.020.103	41.642.834.122
3	Pajak Hiburan	49.386.300	125.102.700	180.726.950	190.172.575	198.671.481
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	840.971.500	1.792.534.701	1.672.369.800	1.966.035.000	2.271.075.000
5	Jumlah Total PAD Sektor Pariwisata	7.991.556.616	9.812.105.638	12.237.043.096	13.808.949.337	44.700.597.925
6	Total PAD	438.264.776.270	330.885.725.311	380.642.720.440	448.842.283.387	555.704.043.341
7	Persentase	1,82	2,97	3,21	3,08	8,04

Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2025, diolah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari sektor pariwisata di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa jenis penerimaan. Pada tahun 2021, total PAD sektor pariwisata tercatat sebesar Rp7,99 miliar atau 1,82% dari total PAD daerah. Sumber utama penerimaan berasal dari pajak restoran yang mencapai Rp6,70 miliar, disusul oleh retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp840,97 juta, serta kontribusi yang lebih kecil dari pajak hotel dan pajak hiburan. Tren peningkatan berlanjut pada 2023, dengan total PAD sektor pariwisata mencapai Rp12,24 miliar atau 3,21% dari total PAD. Peningkatan terutama berasal dari kenaikan signifikan pajak restoran yang mencapai Rp9,76 miliar, menunjukkan pertumbuhan aktivitas usaha kuliner yang berkaitan erat dengan sektor pariwisata.

Pada 2024, PAD sektor pariwisata kembali meningkat menjadi Rp13,81 miliar, meskipun persentase kontribusinya terhadap total PAD sedikit menurun menjadi 3,08%. Hal ini terjadi karena total PAD daerah meningkat lebih besar dibandingkan peningkatan PAD sektor pariwisata. Sementara itu, berdasarkan data 2025, PAD sektor pariwisata meningkat sangat signifikan menjadi Rp44,70 miliar, dengan kontribusi terhadap total PAD mencapai 8,04%. Lonjakan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan yang sangat besar pada pajak restoran, yang mencapai lebih dari Rp41,64 miliar. Peningkatan tersebut dapat mengindikasikan adanya perubahan kebijakan pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi sistem pemungutan pajak, maupun pertumbuhan pesat usaha kuliner yang terkait dengan aktivitas pariwisata.

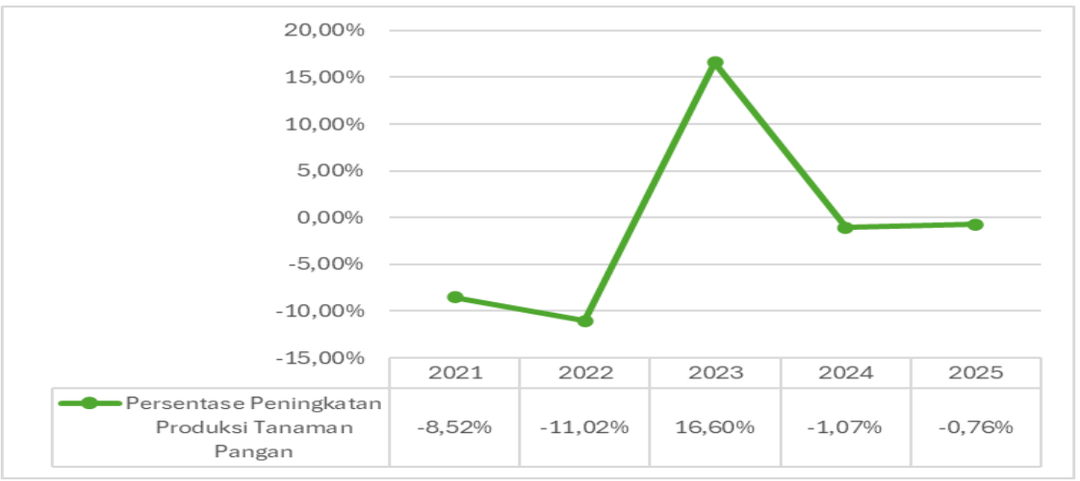
Kinerja sektor pariwisata tidak hanya mencerminkan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perkembangan sektor-sektor

pendukung. Dalam mendukung implementasi ekonomi biru, Kabupaten Purworejo memiliki potensi wisata bahari yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan, terutama di kawasan pesisir selatan. Pengembangan potensi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menjaga kelestarian sumber daya pesisir dan laut sebagai modal pembangunan yang berkelanjutan.

c. Bidang Urusan Pertanian

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu daerah dengan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian. Perkembangan sektor pertanian selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang relatif fluktuatif namun cenderung stabil. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan iklim, ketersediaan air, serangan organisme pengganggu tanaman, serta alih fungsi lahan. Oleh karena itu, penerapan ekonomi hijau menjadi penting melalui pengembangan pertanian berkelanjutan, pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, penggunaan teknologi dan praktik budidaya ramah lingkungan, serta penguatan ketahanan pangan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, menjaga kelestarian lingkungan, dan mendukung kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Perkembangan produksi tanaman pangan di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan relatif stabil namun sedikit menurun. Data berikut menggambarkan kondisi tanaman pangan di Kabupaten Purworejo**.**



Gambar 2.54. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Purworejo

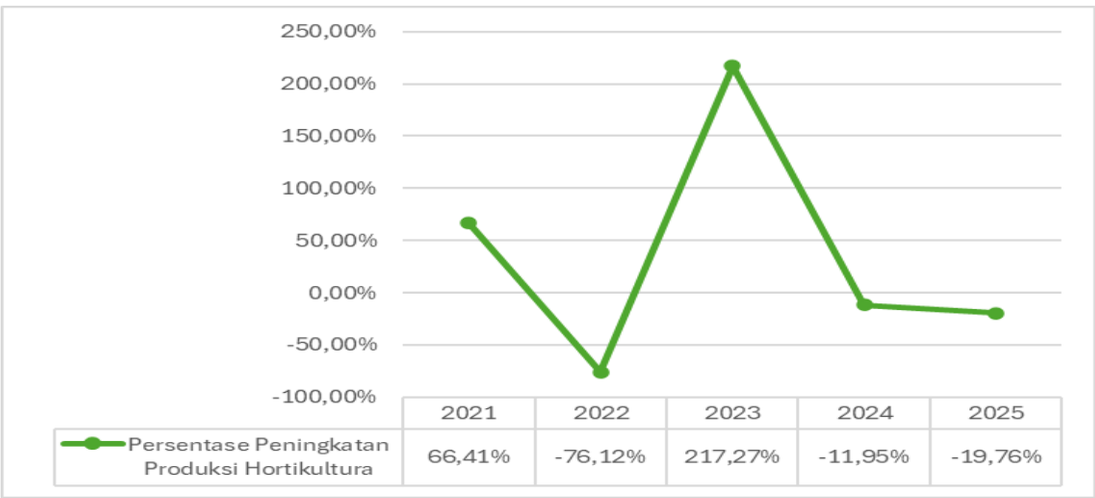
Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Pada tahun 2021, produksi tanaman pangan mengalami penurunan sebesar -8,52%. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan angka -11,02%, yang menunjukkan adanya tekanan terhadap kinerja produksi tanaman pangan dalam dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2023, produksi tanaman pangan mengalami pemulihan yang cukup signifikan dengan peningkatan sebesar 16,60%.

Namun demikian, pada tahun 2024 produksi kembali mengalami sedikit penurunan sebesar -1,07%, dan penurunan yang relatif kecil juga terjadi pada tahun 2025 sebesar -0,76%. Meskipun terjadi penurunan, besarnya perubahan pada dua tahun terakhir relatif kecil sehingga menunjukkan kecenderungan stabilitas produksi tanaman pangan.

Data dari DPUPR Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa lahan pertanian berkurang dari 56.877 hektar pada tahun 2011 menjadi 46.857 hektar pada tahun 2021, mengindikasikan alih fungsi sebesar 10.020 hektar selama periode tersebut. Selain itu, penurunan kontribusi sektor pertanian dipengaruhi oleh berkurangnya daya dukung lahan, lambannya regenerasi petani, keterbatasan dalam mengadopsi teknologi pertanian, perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam, serta rendahnya nilai tambah produk pertanian.

Selain tanaman pangan, peningkatan produksi hortikultura merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui perkembangan sektor pertanian hortikultura dari waktu ke waktu. Komoditas hortikultura meliputi berbagai jenis tanaman seperti sayuran, buah-buahan, tanaman obat, dan tanaman hias yang memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat. Berikut ini data Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura di Kabupaten Purworejo.



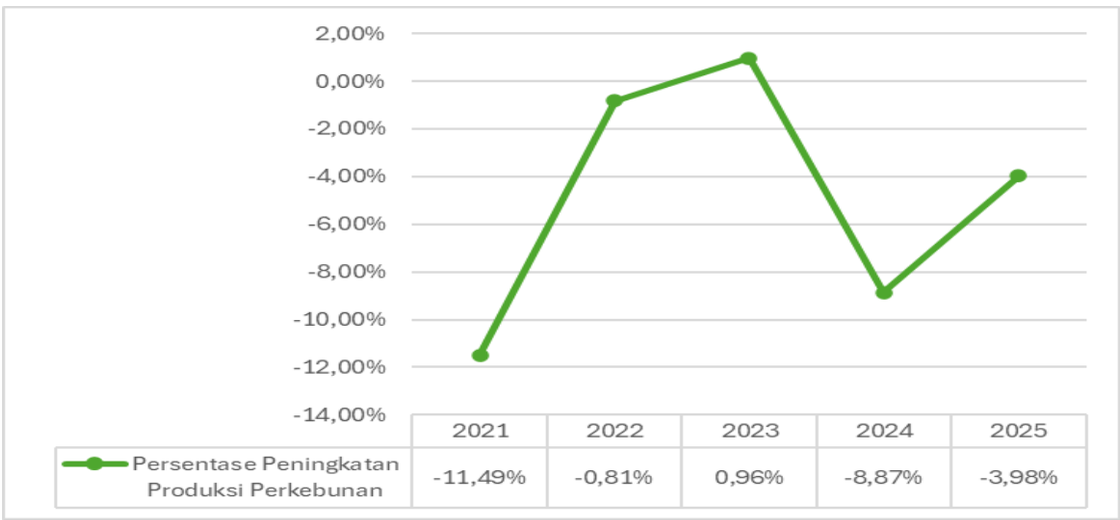
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	66,41%	-76,12%	217,27%	-11,95%	-19,76%

Gambar 2.55. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura
Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Perkembangan produksi hortikultura di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, produksi hortikultura mengalami peningkatan sebesar 66,41%, yang menunjukkan adanya pertumbuhan produksi yang cukup baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2022, produksi hortikultura mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar -76,12%. Pada tahun 2023, produksi hortikultura mengalami lonjakan yang sangat tinggi yaitu sebesar 217,27%. Selanjutnya pada tahun 2024, produksi kembali mengalami penurunan sebesar -11,95%, dan pada tahun 2025 penurunan berlanjut menjadi -19,76%. Penurunan dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya perlambatan kinerja subsektor hortikultura setelah peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2023. Kondisi tersebut dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan kondisi iklim, perubahan luas panen, maupun gangguan organisme pengganggu tanaman.

Subsektor perkebunan merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan sektor pertanian daerah karena berperan dalam mendukung perekonomian masyarakat, penyediaan bahan baku industri, serta peningkatan pendapatan petani. Perkembangan produksi komoditas perkebunan juga menjadi indikator penting dalam melihat kinerja pembangunan pertanian, khususnya dalam upaya meningkatkan produktivitas lahan dan keberlanjutan usaha tani.



	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	-11,49%	-0,81%	0,96%	-8,87%	-3,98%

Gambar 2.56. Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan

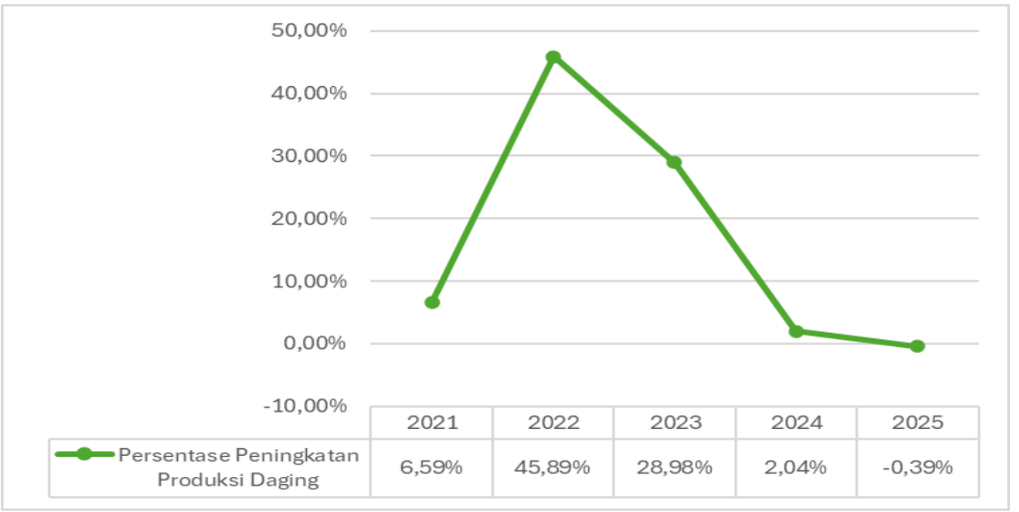
Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Berdasarkan data persentase peningkatan produksi perkebunan di Kabupaten Purworejo, pada tahun 2021 tercatat terjadi penurunan produksi sebesar -11,49%. Pada tahun 2022, penurunan produksi masih terjadi namun dalam skala yang jauh lebih kecil yaitu -0,81%, yang menunjukkan adanya kecenderungan perbaikan kondisi produksi dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2023, subsektor perkebunan mulai menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 0,96%, meskipun peningkatannya relatif terbatas. Namun demikian, pada tahun 2024 produksi perkebunan kembali mengalami penurunan sebesar -8,87%, yang kemudian diikuti penurunan kembali pada tahun 2025 sebesar -3,98%. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan produksi perkebunan masih belum stabil dan cenderung mengalami kontraksi pada beberapa tahun terakhir.

Secara umum, perkembangan produksi perkebunan di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan penurunan ringan, sehingga diperlukan upaya peningkatan produktivitas melalui peremajaan tanaman perkebunan, peningkatan penerapan teknologi budidaya, serta penguatan dukungan sarana dan prasarana pertanian guna menjaga stabilitas produksi dan meningkatkan kesejahteraan petani perkebunan.

Subsektor peternakan merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan sektor pertanian daerah, terutama dalam mendukung penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan peternak. Produksi daging menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja subsektor peternakan karena mencerminkan

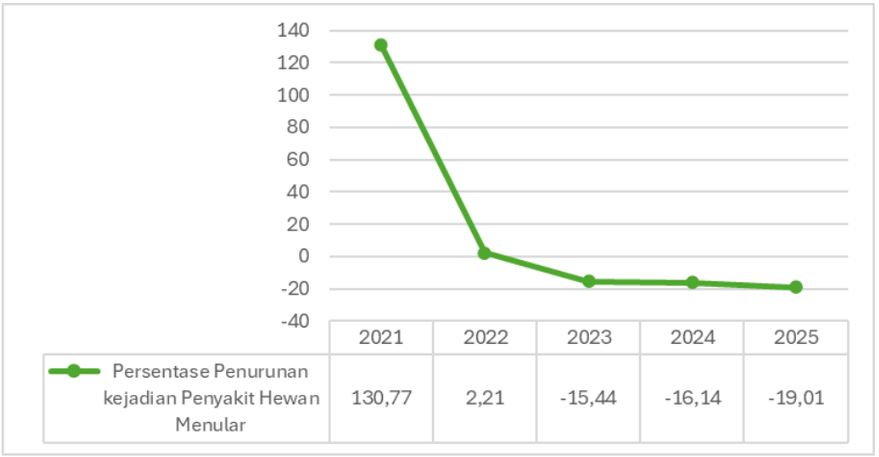
perkembangan populasi ternak, produktivitas, serta efektivitas pengelolaan usaha peternakan.



Gambar 2.57. Persentase Peningkatan Produksi Daging
Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Berdasarkan data persentase peningkatan produksi daging di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025, terlihat bahwa pada tahun 2021 produksi daging mengalami peningkatan sebesar 6,59%. Pada tahun 2022, produksi daging mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 45,89%. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan produksi yang cukup tinggi, yang dipengaruhi oleh pertumbuhan populasi ternak, peningkatan produktivitas, serta meningkatnya aktivitas usaha peternakan. Tren peningkatan masih berlanjut pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 28,98%, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya. Namun demikian, pada tahun 2024 peningkatan produksi daging mulai melambat dengan pertumbuhan hanya sebesar 2,04%. Selanjutnya pada tahun 2025, produksi daging mengalami penurunan sebesar -0,39%. Secara umum, perkembangan produksi daging di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup baik pada awal periode, namun mulai melambat pada dua tahun terakhir.

Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya penguata subsektor peternakan melalui peningkatan populasi ternak, perbaikan manajemen pakan, pengendalian penyakit hewan, serta penguatan dukungan sarana dan prasarana peternakan guna menjaga keberlanjutan peningkatan produksi daging di daerah. Pengendalian penyakit hewan menular merupakan salah satu upaya strategis dalam menjaga kesehatan hewan serta mendukung sektor peternakan yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam menurunkan kejadian penyakit hewan menular tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas ternak, tetapi juga berkontribusi terhadap keamanan pangan asal hewan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan secara berkala terhadap persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular guna mengevaluasi efektivitas program pencegahan dan pengendalian yang telah dilaksanakan. Berikut disajikan data persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular selama periode tahun 2021-2025

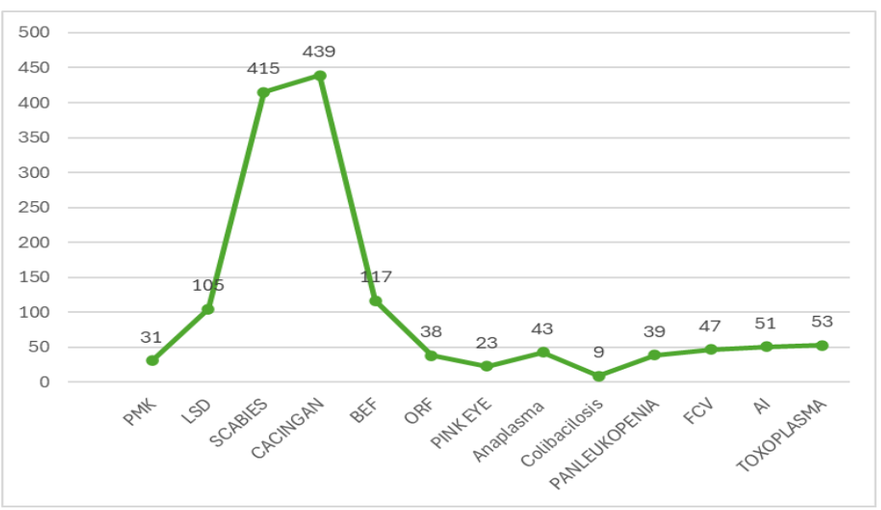


Gambar 2.58. Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular

Sumber: DKPP Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Berdasarkan data yang tersedia, persentase penurunan kejadian Penyakit Hewan Menular selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang secara umum semakin membaik karena mengacu pada indikator bahwa nilai yang semakin kecil mencerminkan kinerja yang semakin baik. Pada tahun 2021, persentase tercatat sebesar 130,77, yang menunjukkan bahwa upaya penurunan kejadian penyakit hewan menular masih belum optimal. Selanjutnya pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 2,21, yang mengindikasikan adanya perbaikan kinerja dalam pengendalian penyakit. Perbaikan tersebut terus berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai mencapai -15,44. Nilai ini menunjukkan bahwa penurunan kejadian penyakit hewan menular semakin efektif. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dan 2025, dengan masing-masing nilai sebesar -16,14 dan -19,01, yang menandakan bahwa upaya pengendalian semakin berhasil dalam menekan kejadian penyakit hewan menular dari tahun ke tahun.

Secara keseluruhan, data menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang konsisten dalam pengendalian penyakit hewan menular selama periode tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan, seperti peningkatan vaksinasi, pengawasan kesehatan hewan, serta pengendalian lalu lintas ternak, mulai memberikan hasil yang optimal dalam menurunkan kejadian penyakit hewan menular.



Gambar 2.59. Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular di Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Sumber : DKPP Kabupaten Purworejo Tahun 2025

Berdasarkan grafik jumlah total kasus penyakit menular tahun 2025, terlihat adanya perbedaan jumlah kasus yang cukup signifikan antar jenis penyakit. Grafik menunjukkan bahwa beberapa penyakit memiliki tingkat kejadian yang jauh lebih tinggi dibandingkan penyakit lainnya. Penyakit dengan jumlah kasus tertinggi adalah Cacingan, dengan total sekitar 440 kasus sepanjang tahun. Penyakit dengan jumlah kasus tinggi berikutnya adalah Scabies dengan sekitar 410–420 kasus. Penyakit ini merupakan penyakit kulit yang mudah menular antar hewan melalui kontak langsung maupun lingkungan yang terkontaminasi. Selanjutnya, penyakit BEF (Bovine Ephemeral Fever) dan LSD (Lumpy Skin Disease) juga menunjukkan jumlah kasus yang cukup signifikan dibandingkan penyakit lainnya, masing-masing sekitar 120 kasus dan 100 kasus. Kedua penyakit ini merupakan penyakit infeksi yang dapat berdampak pada penurunan produktivitas ternak.Beberapa penyakit lain seperti Panleukopenia, Anaplasma, FCV, AI, dan Toxoplasma berada pada tingkat kasus menengah, dengan jumlah sekitar 40–55 kasus. Sementara itu, penyakit PMK, ORF, Pink Eye, dan Colibacilosis memiliki jumlah kasus yang relatif lebih rendah dibandingkan penyakit lainnya. Jumlah kasus paling rendah terlihat pada Colibacilosis, yang hanya sekitar 10 kasus selama tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kejadian penyakit tersebut relatif jarang terjadi atau lebih mudah dikendalikan dibandingkan penyakit lainnya.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa penyakit yang disebabkan oleh parasit dan penyakit kulit merupakan kasus yang paling dominan selama tahun 2025, khususnya Cacingan dan Scabies. Oleh karena itu, upaya pengendalian penyakit sebaiknya difokuskan pada peningkatan sanitasi, manajemen pemeliharaan, serta program pencegahan seperti pemberian obat antiparasit dan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin.

d. Bidang Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam perekonomian Kabupaten Purworejo karena berfungsi sebagai penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi masyarakat serta mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Aktivitas perdagangan di Kabupaten Purworejo sebagian besar masih ditopang oleh pasar rakyat dan jaringan perdagangan skala kecil dan menengah yang tersebar di berbagai kecamatan. Keberadaan sarana distribusi tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pasokan barang kebutuhan pokok serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Melalui mekanisme transaksi di sarana distribusi, kegiatan perdagangan juga berperan dalam pembentukan harga serta menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang di masyarakat. Dalam praktiknya, dinamika distribusi barang juga tercermin pada disparitas harga beberapa komoditas pangan di pasar. Tabel berikut menunjukkan kondisi disparitas harga di Kabupaten Purworejo dan menggambarkan bagaimana harga-harga barang dan jasa dapat bervariasi di berbagai daerah dalam kabupaten tersebut.

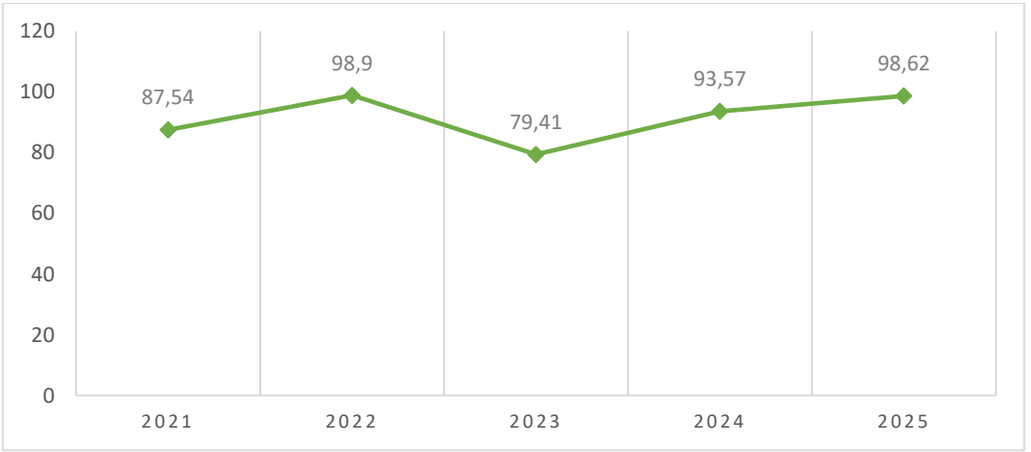
Tabel 2.126. Disparitas Harga Kabupaten Purworejo

No	Komoditi	2021	2022	2023	2024	2025
1	Beras Cap IR 64 Medium	-5%	1%	-4%	1%	-2%
2	Gula Pasir, Kristal Putih, plastik	2%	3%	3%	-3%	0%
3	Minyak Goreng, Kemasan Sederhana					0%
4	Minyak Goreng, Kemasan Premium				-4%	24%
5	Daging Sapi, Lokal, Paha Belakang	21%	8%	4%	9%	-3%
6	Daging Ayam, Broiler/Ras	-7%	-6%	-6%	-3%	9%
7	Telur Ayam, Negeri	-2%	-2%	-1%	-1%	-1%
8	Tepung Terigu, Bogasari, Eceran, Protein Sedang				11%	11%
9	Kedelai, kuning, plastik, Import	8%	28%	-5%	4%	2%
10	Cabe, Merah, Keriting	-1%	1%	1%	0%	-8%
11	Cabe, Rawit, Merah	-11%	-7%	-1%	-2%	14%
12	Bawang, Merah, Lokal	6%	0%	3%	11%	0%
13	Bawang Putih, Impor, Kating	-1%	-1%	1%	3%	-1%
14	Ikan, Laut, Kembung				-3%	-3%
	Disparitas Harga	1%	2%	-1%	2%	3%

Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2026

Disparitas harga komoditas pangan strategis di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi yang relatif terkendali. Pada tahun 2025, rata-rata disparitas harga tercatat sebesar 3%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 2%. Komoditas yang mengalami disparitas harga tertinggi adalah minyak goreng kemasan premium (24%), cabai rawit merah (14%), tepung terigu (11%), dan daging ayam ras (9%), sedangkan beberapa komoditas seperti cabai merah keriting (-8%), daging sapi lokal (-3%), dan ikan laut kembung (-3%) menunjukkan disparitas negatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum stabilitas harga pangan di Kabupaten Purworejo masih terjaga, meskipun beberapa komoditas tertentu masih memerlukan perhatian dalam pengendalian distribusi dan pasokan. Komoditas hortikultura seperti cabai memang cenderung mengalami fluktuasi harga yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh faktor musim, produksi, dan distribusi. Secara umum, disparitas harga pangan dapat dipicu oleh panjangnya rantai pasok, ketidakseimbangan distribusi antarwilayah, serta keterbatasan infrastruktur logistik yang mempengaruhi kelancaran arus barang dari produsen ke konsumen. Sementara itu, beberapa komoditas utama seperti beras, gula pasir, dan bawang putih impor menunjukkan disparitas yang relatif kecil dan stabil dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme distribusi dan pasokan untuk komoditas tersebut relatif lebih terjaga. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi pasar rakyat sebagai pusat distribusi serta penguatan sistem logistik perdagangan daerah tetap diperlukan guna meminimalkan disparitas harga dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo.

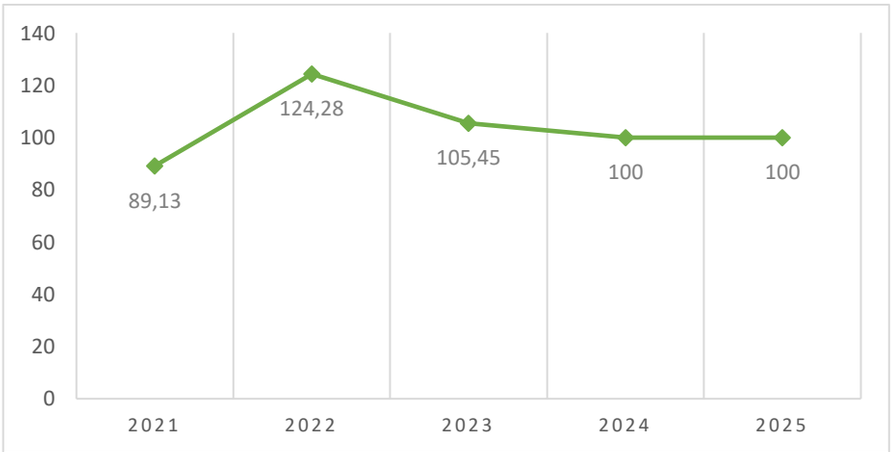
Kondisi stabilitas harga tersebut juga perlu didukung oleh ketersediaan sarana produksi sektor pertanian, khususnya pupuk, karena komoditas pangan yang beredar di pasar sangat dipengaruhi oleh kelancaran produksi di tingkat petani. Oleh karena itu, kinerja realisasi penyaluran pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan komoditas pangan di Kabupaten Purworejo.



Gambar 2.60. Kinerja Realisasi Pupuk di Kabupaten Purworejo
Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, kinerja realisasi penyaluran pupuk di Kabupaten Purworejo secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik, dengan tingkat realisasi yang relatif mendekati target yang telah ditetapkan. Ketersediaan pupuk yang relatif terjaga turut berkontribusi dalam menjaga produktivitas pertanian serta memastikan pasokan komoditas pangan tetap tersedia di pasar.

Selain aspek ketersediaan sarana produksi pertanian, kinerja sektor perdagangan juga dapat dilihat dari indikator Persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah dan masih berlaku. Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan penggunaan alat ukur dalam kegiatan perdagangan sehingga transaksi yang terjadi dapat berlangsung secara adil dan akurat.



Gambar 2.61. Persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah dan masih berlaku di Kabupaten Purworejo
Sumber: DKUKMP Kabupaten Purworejo, 2026

Capaian persentase UTTP bertanda tera sah yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan metrologi legal berjalan cukup efektif. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha, khususnya di pasar rakyat dan jaringan distribusi perdagangan, untuk menggunakan alat ukur yang telah ditera secara resmi. Dengan demikian, keakuratan alat ukur dapat terjamin sehingga kepercayaan konsumen terhadap aktivitas perdagangan tetap terjaga dan potensi kecurangan dalam transaksi dapat diminimalkan.

e. Bidang Urusan Perindustrian

Perindustrian di Kabupaten Purworejo memainkan peranan yang signifikan dalam membentuk struktur perekonomian daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor industri pengolahan, yang merupakan sektor terbesar kedua setelah pertanian, kehutanan, dan perikanan, sangat penting bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purworejo. Sektor ini tidak hanya menyumbang secara substansial terhadap PDRB, tetapi juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi lokal.

Meskipun sektor industri pengolahan menunjukkan pertumbuhan positif, laju pertumbuhan sektor ini belum berhasil mengakselerasi sektor primer di Kabupaten Purwoejo, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu keterkaitan (linkage) antara industri pengolahan dengan sektor pertanian masih relatif terbatas, produktivitas sektor pertanian yang relatif rendah dan fluktuatif, keterbatasan penerapan teknologi dan inovasi dalam kegiatan budidaya maupun pascapanen, struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh usaha skala kecil dan tradisional. Dalam konsep pembangunan ekonomi wilayah, keterkaitan antara sektor pertanian dan industri sebenarnya sangat penting karena agroindustri berperan sebagai penghubung yang mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah dan mendorong berkembangnya sektor lain dalam rantai produksi dan distribusi.

Kondisi tersebut juga tercermin dari beberapa indikator pembangunan industri di Kabupaten Purworejo sebagai berikut.

Tabel 2.127. Kinerja Sektor Perindustrian Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	-20,32	19,15	346,84	-33,87	48.32
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100	79,41	112,19	43,12	27.85
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	80	70	70	75	75

Sumber: Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo, 2026

Berdasarkan data tahun 2021–2025, pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar -20,32, pada tahun 2025 sebesar 48,32. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan industri kecil dan menengah di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi keberlanjutan usaha, permodalan, maupun kapasitas produksi.

Sementara itu, persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang merupakan turunan indikator pembangunan industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) juga menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021 capaian indikator ini mencapai 100 persen, kemudian menurun menjadi 27,85 persen, yang mengindikasikan

bahwa pelaksanaan program pembangunan industri belum sepenuhnya mampu memenuhi target yang direncanakan. Adapun indikator ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini menunjukkan kondisi yang relatif lebih stabil. Pada tahun 2021 capaian indikator ini sebesar 80 persen, kemudian menurun pada tahun 2025 menjadi 75 persen. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan data dan informasi sektor industri sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pembinaan industri daerah.

Secara keseluruhan, dinamika pada indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa pengembangan sektor industri di Kabupaten Purworejo masih memerlukan penguatan, terutama dalam mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi komoditas lokal. Dengan penguatan keterkaitan antara sektor industri pengolahan dan sektor pertanian melalui pengembangan agroindustri, diharapkan pertumbuhan sektor industri dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat di sektor primer.

f. Bidang Urusan Transmigrasi

Urusan transmigrasi di Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung pemerataan pembangunan, pengurangan tekanan penduduk di Pulau Jawa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penempatan penduduk ke wilayah pengembangan baru di luar daerah. Selain itu, program transmigrasi juga berkontribusi dalam penambahan kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan berusaha, serta mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat transmigran maupun masyarakat di wilayah tujuan transmigrasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Purworejo masih berjalan namun dengan jumlah peserta yang relatif terbatas karena bergantung pada kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berikut perbandingan data animo dan realisasi penempatan transmigran di Kabupaten Purworejo dari tahun 2021-2026.

Tabel 2.128. Animo dan Realisasi Penempatan Transmigran

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Animo Transmigran	40	40	36	40	61
2	Penempatan Transmigran (KK)	1	5	2	1	1
3	Penempatan Transmigran (jiwa)	3	19	6	4	3
4	Daerah Tujuan	UPT Sumber Makmur, Kawasan Transmigrasi Lamunti/ Dadaup, Kecamatan Dadahub,	UPT Mahalona Kabupaten Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan	UPT Kahingai Kec. Belantikan Raya Kab. Lamandau Prov.	UPT Mahalona SKP C SP 1 Kec. Towuti Kabupaten Luwu Timur	Satuan Pemukiman Lagading Kawasan Pitu Raise Desa Lagading Kecamatan

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		Kabupaten Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah		Kalimantan Tengah	Prov. Sulawesi Selatan	Pitu Raise Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo, 2026

Secara umum, minat masyarakat Kabupaten Purworejo untuk mengikuti program transmigrasi masih cukup tinggi, namun keterbatasan kuota penempatan menyebabkan jumlah peserta yang dapat diberangkatkan setiap tahun relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah pendaftar. Oleh karena itu, pelaksanaan urusan transmigrasi di Kabupaten Purworejo ke depan perlu didukung melalui peningkatan pembinaan calon transmigran, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta pengembangan keterampilan produktif bagi calon transmigran agar mampu beradaptasi dan berkembang secara mandiri di kawasan transmigrasi.

2.1.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Kinerja Sekretariat Daerah menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki beberapa tugas yaitu membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas serta pelayanan administratif. Pelaksanaan tugas telah diwadahi oleh unsur dalam perangkat daerah tersebut bertanggung jawab kepada Bupati melalui proses pengintegrasian dan sinkronisasi dari tujuan dan kegiatan sebagai pelaksanaan rencana kerja perangkat daerah dalam mencapai visi misi pemerintahan daerah melalui koordinator yaitu Sekretariat Daerah yang mempunyai fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sesuai dengan peraturan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung pencapaian indikator sasaran Pemerintah Daerah pada Indeks Reformasi Birokrasi.

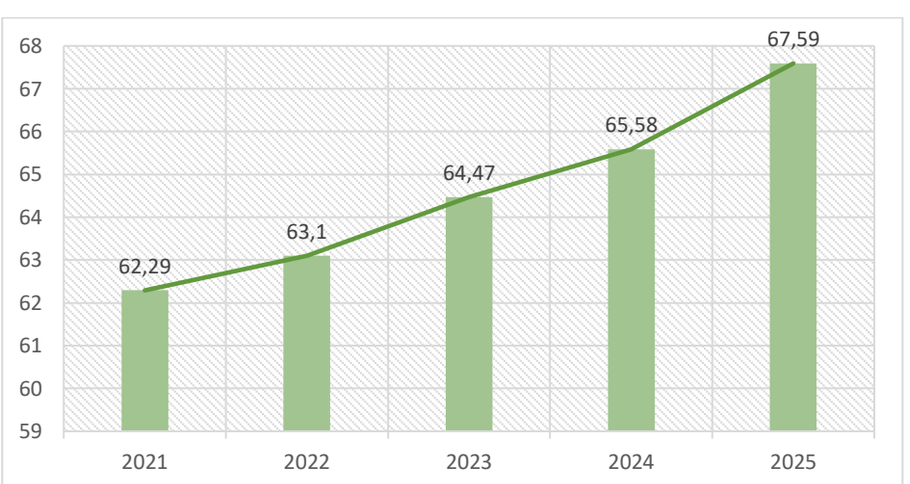
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan yang berkualitas. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program kerja pembangunan. Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo telah dimulai tahun 2019 dengan capaian sebagai berikut:



Gambar 2.62. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purworejo
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Reformasi birokrasi mendorong setiap instansi pemerintah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak Instansi Pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purworejo dari tahun 2020 hingga 2025 mengalami peningkatan nilai dari 63,74 menjadi 82,59. Nilai tersebut masih berada dalam kategori B (baik), yang menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan yang signifikan.

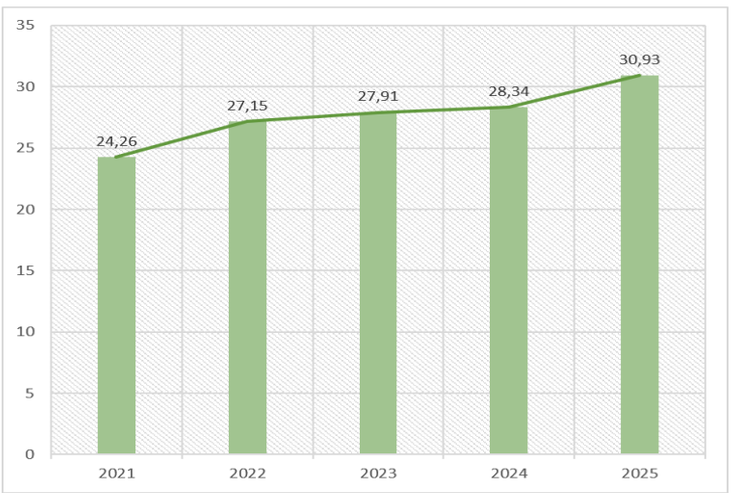
Selanjutnya menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi adalah Nilai SAKIP sebagai komponen yang mencerminkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Semakin baik kualitas implementasi SAKIP, semakin besar peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas reformasi birokrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut adalah capaian nilai SAKIP Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025:



Gambar 2.63. Nilai SAKIP Kabupaten Purworejo
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Nilai SAKIP Kabupaten Purworejo menunjukkan tren yang terus meningkat selama periode 2021–2025. Nilai SAKIP meningkat dari 65,58 pada tahun 2024, dan mencapai 67,59 pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Meskipun nilai SAKIP Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025, masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja. Hal tersebut meliputi penguatan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), peningkatan kualitas indikator kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Nilai SAKIP yang terus meningkat perlu didukung oleh kualitas setiap komponen penilaian agar peningkatan tersebut berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana sistem manajemen kinerja telah berjalan secara efektif. Komponen pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dari Nilai SAKIP Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:



Gambar 2.64. Nilai Sakip Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Purworejo tahun 2021-2025

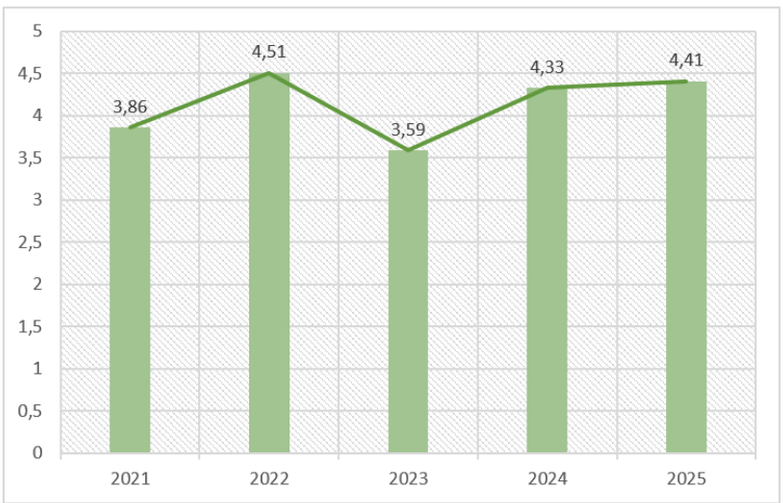
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Nilai komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Kabupaten Purworejo menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025. pada tahun 2024 berada pada nilai **28,34** meningkat menjadi **30,93** pada tahun 2025. Peningkatan nilai tersebut mengindikasikan bahwa proses pengukuran kinerja telah semakin mampu menggambarkan tingkat pencapaian sasaran pembangunan melalui indikator kinerja yang lebih terukur, sedangkan pelaporan kinerja semakin berfungsi sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Meskipun demikian, upaya penyempurnaan masih perlu dilakukan, terutama dalam meningkatkan kualitas indikator yang berorientasi pada hasil (outcome), memperkuat pemanfaatan hasil pengukuran sebagai dasar pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa laporan kinerja tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk mendorong perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, capaian Indeks Pelayanan Publik menjadi salah satu ukuran keberhasilan implementasi Reformasi Birokrasi dalam menghasilkan pelayanan yang semakin berkualitas, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

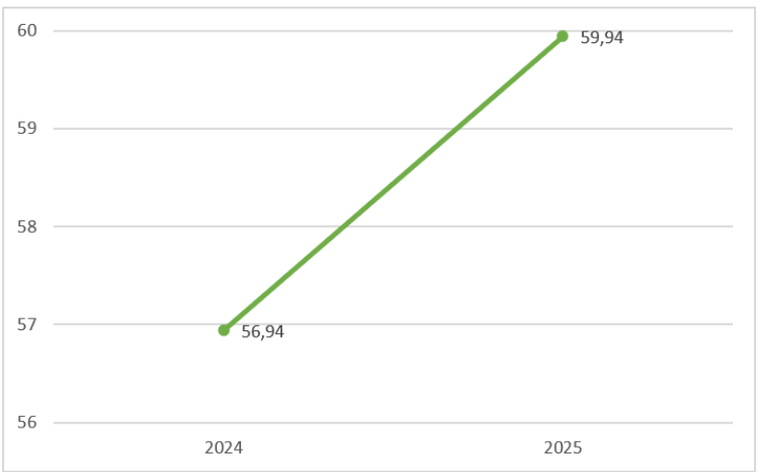
Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan.



Gambar 2.65. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo mengalami kenaikan dari Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Purworejo menunjukkan fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2025. Peningkatan nilai IPP pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya penguatan dalam pemenuhan standar pelayanan publik, baik dari aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun pengelolaan pengaduan masyarakat. Namun, penurunan nilai pada tahun 2023 menjadi evaluasi bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan secara berkesinambungan agar capaian yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Penguatan budaya pelayanan prima, pemanfaatan digitalisasi layanan, serta peningkatan kompetensi aparatur menjadi langkah penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Penunjang reformasi birokrasi juga ditunjukkan melalui kualitas kebijakan yang diukur melalui Indeks Kualitas kebijakan. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen pengukur kualitas proses pengelolaan kebijakan publik yang dikembangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), yang berfungsi sebagai salah satu indikator penting dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). IKK berfokus pada evaluasi empat dimensi (perencanaan, implementasi, evaluasi/keberlanjutan, serta transparansi/ partisipasi) berbasis bukti (*evidence-based*).



Gambar 2.66. Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025
Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan dari 56,94 pada tahun 2024 menjadi 59,94 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas proses penyusunan kebijakan daerah, mulai dari perumusan, implementasi, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan. Meskipun menunjukkan tren yang positif, peningkatan kualitas kebijakan perlu terus didorong melalui penguatan penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), peningkatan koordinasi antarperangkat daerah, pelibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pada periode berikutnya.

b. Sekretariat DPRD

Fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan. Sekretariat DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah yang keberadaannya tidak terpisahkan dengan kinerja DPRD. Sekretariat DPRD sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPJMD dan RKPD. Selain itu, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD. Sampai

dengan tahun 2024 dukungan fungsi DPRD adalah untuk menjamin fungsi legislasi, fungsi *budgeting* dan fungsi pengawasan tercapai 100%. Jumlah anggota DPRD masa bakti 2024-2029 adalah 45 orang, dengan komposisi 10 orang wanita dan 35 pria.

Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam memperoleh pelayanan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.

Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur, mulai berlaku di Tahun 2026.

Tabel 2.129. Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Purworejo

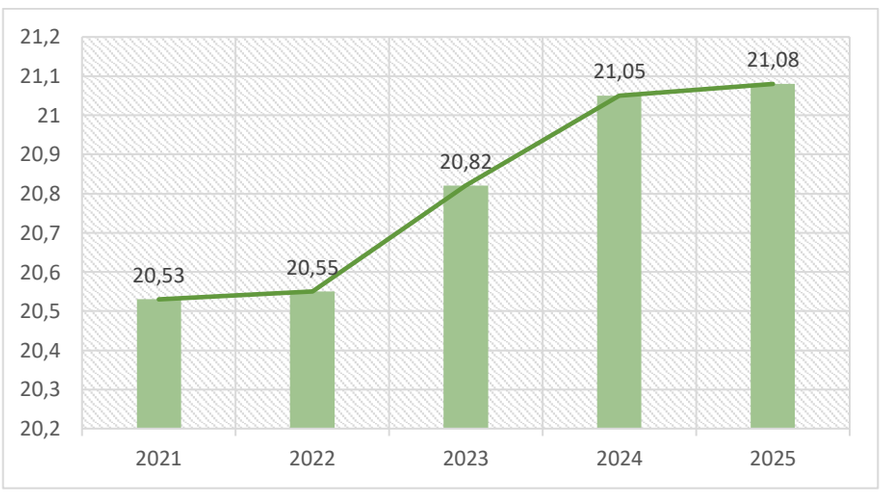
No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo, 2025

2.1.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Komponen nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) terdiri dari empat komponen utama berdasarkan regulasi terbaru: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Penilaian ini mengukur efektivitas dan efisiensi instansi dalam mencapai target, dengan bobot tinggi pada kualitas serta pemanfaatan data kinerja. Urusan Perencanaan mengambil Indikator komponen Perencanaan Kinerja pada Nilai SAKIP. Capaian indikator tersebut sebagai berikut:

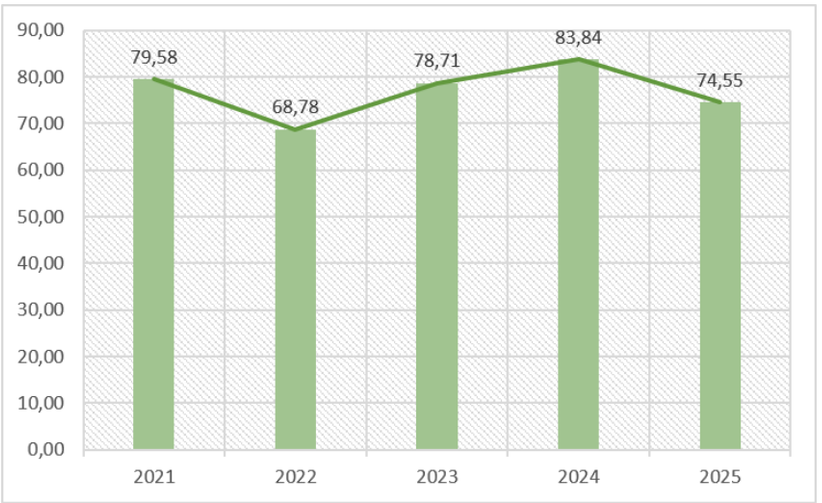


Gambar 2.67. Nilai SAKIP pada Komponen Perencanaan Kinerja Tahun 2021-2025
Sumber: Bapperida, 2025

Salah satu komponen penting dalam SAKIP adalah Perencanaan Kinerja yang menunjukkan seberapa baik instansi menyusun tujuan, indikator, dan sasaran kinerja secara logis, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis. Perencanaan kinerja memiliki bobot maksimal 30. Nilai komponen Perencanaan Kinerja menunjukkan tren meningkat secara konsisten selama 5 tahun terakhir.

b. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kinerja keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan Kualitas tata kelola keuangan daerah yang dapat ditunjukkan melalui pencapaian Indeks Pengeloaan Keuangan Daerah. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan instrumen evaluatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. IPKD mencakup berbagai dimensi, mulai dari perencanaanm penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan dan akuntabilitas kinerja keuangan.



Gambar 2.68. Indeks Penglolaan Keuangan Daerah tahun 2021-2025
Sumber: BPKPAD Kab. Purworejo, 2025

Data menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir terhadap capaian IPKD Kabupaten Purworejo. Tahun 2025 menurun dibandingkan dengan tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya kendala dalam tata kelola keuangan pada periode tersebut. Pemerintah Kabupaten Purworejo merespon penurunan ini dengan langkah-langkah perbaikan yang sistematis, seperti penguatan perencanaan keuangan berbasis kinerja, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta optimalisasi fungsi pengawasan intern.

Pencapaian IPKD ini terkait dengan hasil Opini Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK akan menghasilkan opini. Opini dari hasil pemeriksaan keuangan merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa yang didapat dari data dan fakta hasil pemeriksaan, khususnya mengenai tingkat kewajaran informasi keuangan yang telah disajikan dalam laporan keuangan. Pencapaian pengelolaan

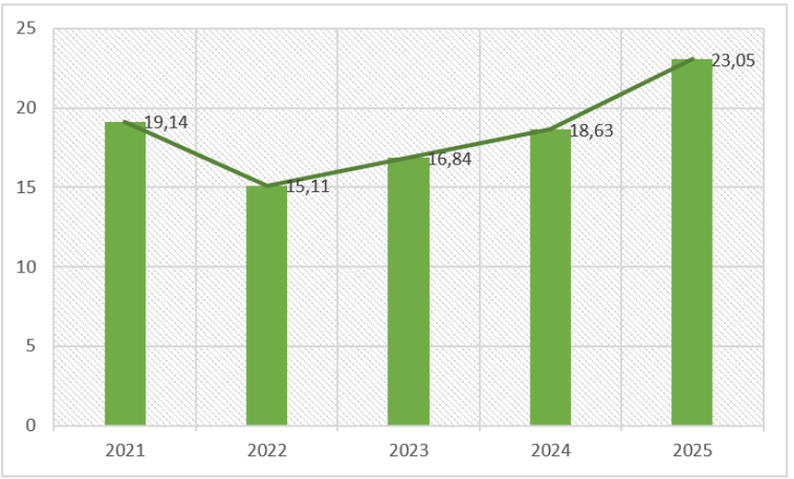
keuangan daerah ditunjukkan pula dalam capaian Pengecualian (WTP) kali kedelapan berturut-turut sejak 2012. Opini Wajar Tanpa WTP adalah opini audit yang diberikan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah satu material. Auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Tabel 2.130. Opini Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2025

Tata kelola keuangan yang baik mendorong optimalisasi potensi pendapatan daerah dan memperkuat kemandirian fiskal. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah. Merupakan Indikator yang menunjukkan derajat desentralisasi fiskal dan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan belanjanya.

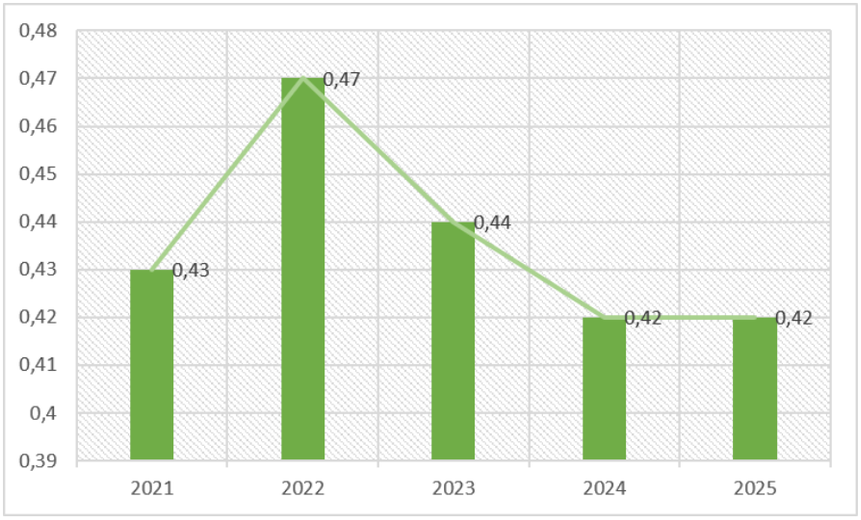


Gambar 2.69. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2021-2025

Sumber : BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2025

Data tersebut menunjukkan adanya pola pemulihan dari tahun 2021 hingga tahun 2025. pada tahun 2025, angka 23,05% menandakan daerah telah masuk ke kategori Kemandirian Sedang (naik dari kategori Rendah).

Komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah Adalah pajak. Jika penerimaan pajak meningkat, maka PAD meningkat dan Tax ratio (berbasis PDRB) juga meningkat. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Purworejo disajikan sebagai berikut:



Gambar 2.70. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025

Sumber : BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2025

Penurunan rasio ini (dari 0,47 ke 0,42) mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan PDRB (ekonomi daerah) lebih cepat daripada laju pertumbuhan penerimaan pajak daerahnya. Dengan kata lain, kue ekonomi membesar, tetapi bagian yang berhasil dipungut sebagai pajak tidak tumbuh sebanding. Angka di kisaran 0,4% merupakan hal yang wajar untuk level Kabupaten, karena sebagian besar aktivitas ekonomi daerah (seperti industri atau perdagangan besar) pajaknya ke Pemerintah Pusat (PPN/PPh). Namun, angka ini menunjukkan masih adanya potensi "Tax Gap", dimana masih ada potensi pajak yang belum tergali.

c. Kepegawaian

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Tabel 2.131. Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Indeks Profesionalitas ASN	51,36	52,88	75,36	82,25	83,62*

Sumber : BKPSDM Kabupaten Purworejo, 2025
**angka belum final, cut off per Juni 2025*

Indeks Profesionalitas ASN yang merupakan ukuran statistik yang menggambarkan tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi pendidikan, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. IP ASN Kabupaten Purworejo meningkat menjadi dari 75,36 ditahun 2023 menjadi 82,25 di tahun 2024. Realisasi capaian tersebut didukung dengan semakin banyaknya ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan jabatannya.

d. Pendidikan dan Pelatihan

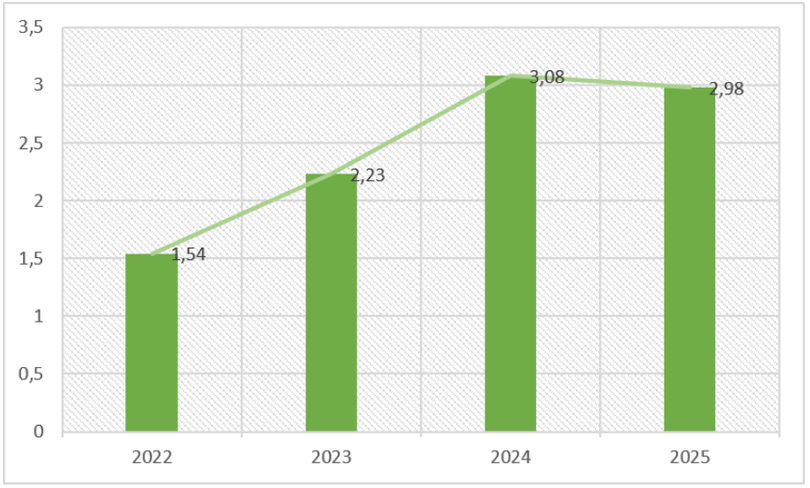
Penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan instrumen krusial dalam mendongkrak angka Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN), terutama pada dimensi Kualifikasi dan Kompetensi. Berdasarkan kebijakan terbaru, setiap ASN memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan. Pelaksanaan urusan pendidikan bertujuan untuk memenuhi standar kualifikasi jabatan. Dimensi kompetensi merupakan unsur dengan bobot nilai yang signifikan dalam IP ASN. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023 dan PP No. 17 Tahun 2020, setiap ASN wajib memenuhi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) pengembangan kompetensi per tahun.

e. Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan menjadi pintu masuk bagi kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti akademisi dan lembaga riset. Kemampuan daerah dalam menjalin jejaring penelitian ini merupakan indikator tinggi rendahnya kapabilitas inovasi.

Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintasvisi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Indikatornya adalah keanekaragaman tenaga kerja, status pengembangan klaster, publikasi ilmiah, aplikasi Kekayaan Intelektual (KI), belanja riset, indeks keunggulan lembaga riset, dan aplikasi merek dagang. Kapabilitas Inovasi ini merupakan salah satu pilar dalam komponen penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis sejak tahun 2022. IDSD dibentuk berdasarkan 12 pilar daya saing wilayah yang diturunkan dari Global Competitiveness Index. Masing-masing pilar kemudian diukur dengansejumlah indikator, yaitu infrastruktur, kualitas sumber daya

manusia, akses ke pasar, kondisi perekonomian, dan sebagainya. Penghitungan skor IDSD dilakukan dengan melakukan standarisasi data dari seluruh indikator tersebut yang kemudian dikompositkan dengan menggunakan rata-rata aritmetika.

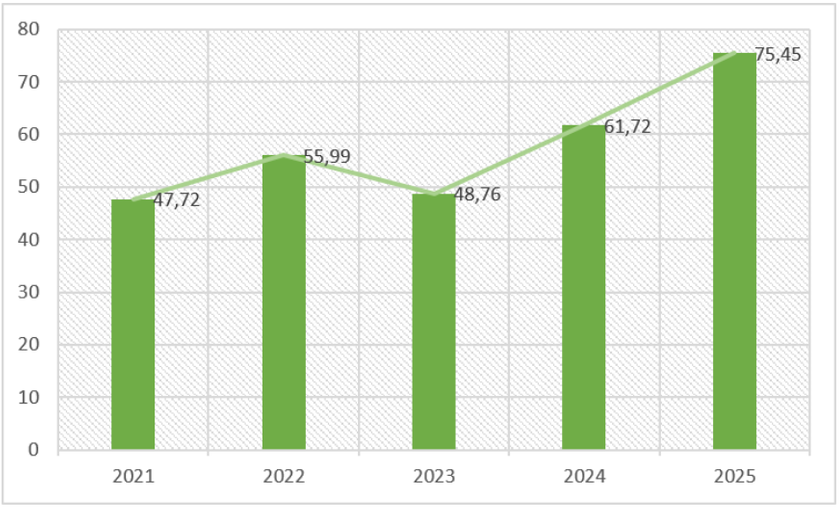


Gambar 2.71. Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025
Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan gambar tersebut, capaian kapabilitas inovasi Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 ketahun 2024, dengan nilai meningkat dari 1,54 menjadi 3,08. Namun menurun di tahun 2025.

Nilai Kapabilitas Inovasi Kabupaten Purworejo mengalami perkembangan yang cukup baik selama periode 2022–2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola inovasi daerah, baik dari aspek kelembagaan, proses pengelolaan inovasi, maupun pelaksanaan inovasi pada perangkat daerah. Namun demikian, pada tahun 2025 nilai Kapabilitas Inovasi mengalami sedikit penurunan menjadi **2,98**, atau turun sebesar **0,10 poin** (3,2%) dibandingkan tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah inovasi yang memenuhi kriteria penilaian, belum optimalnya keberlanjutan inovasi yang telah dikembangkan, perubahan indikator penilaian, atau belum meratanya implementasi inovasi di seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertahankan capaian yang telah diraih sekaligus memperkuat pembinaan inovasi pada seluruh perangkat daerah, meningkatkan kualitas dokumentasi dan eviden inovasi, memastikan keberlanjutan implementasi inovasi, serta memperluas replikasi inovasi.

Peningkatan Kapabilitas Inovasi menunjukkan adanya penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola inovasi melalui pengembangan kelembagaan, tata kelola, dan budaya inovasi. Kondisi tersebut merupakan modal penting dalam meningkatkan kinerja inovasi daerah yang tercermin melalui Indeks Inovasi Daerah (IID). Peningkatan kapasitas tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas, keberlanjutan, serta dokumentasi inovasi agar mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan nilai IID.



Gambar 2.72. Indeks Inovasi Daerah tahun 2021-2025

Sumber: Bapperida tahun 2025

Secara keseluruhan, Indeks Inovasi Daerah menunjukkan tren positif dan meningkat mencapai 75,45 pada tahun 2025. Tahun 2024 yang masih dalam kategori inovatif menjadi sangat inovatif di tahun 2025. Secara keseluruhan, peningkatan nilai IID mencerminkan semakin baiknya kinerja inovasi daerah, yang didukung oleh penguatan tata kelola inovasi, bertambahnya inovasi yang diimplementasikan, serta meningkatnya kualitas pelaporan dan pemenuhan indikator penilaian inovasi daerah.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pasal 47 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) untuk menyelenggarakan SPIP. Ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi dinilai dengan tingkat maturitas. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

K/L/D bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan K/L/D.

Tabel 2.132. Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3,023	3,014	3,309	3,318	3,320

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan nilai dari tahun 2021 hingga 2025.

Dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, terdapat konsep pengawasan intern yang mencakup kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang secara umum bertujuan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Dalam struktur organisasi sektor publik di Indonesia, kegiatan pengawasan intern tersebut dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat Jenderal K/L dan Inspektorat Provinsi/Kabupaten.

Terkait dengan pelaksanaan peran tersebut, kapabilitas dan efektivitas APIP dianggap sebagai dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP, sebagai institusi, telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Tabel 2.133. Nilai Kapabilitas APIP tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Nilai Kapabilitas APIP	-	-	3,05	3,11	2,27

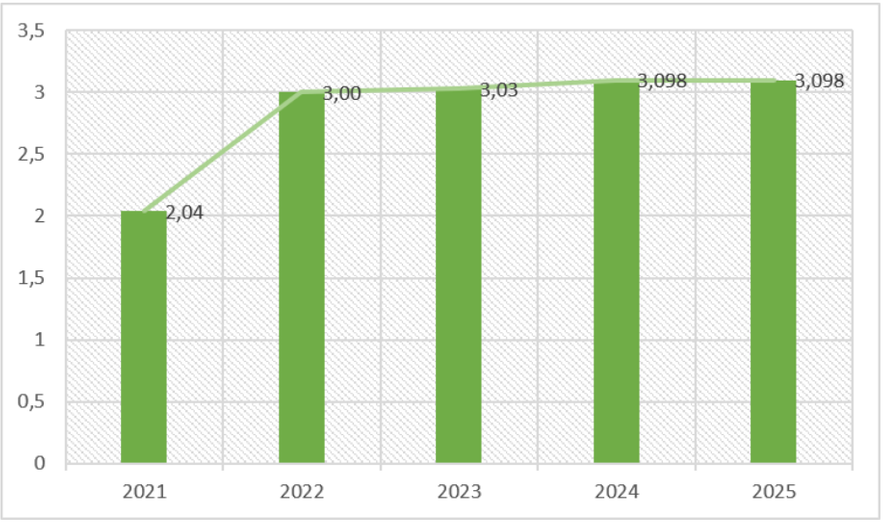
Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

Terbitnya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta Surat Kepala BPKP RI Nomor HM.02.00/S.853/K/D4/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap nilai Kapabilitas APIP sehingga turun di tahun 2025 hal ini diakrenakan adanya perubahan metode perhitungan.

Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP Kabupaten Purworejo berada pada Level 2 dengan skor 2,27. Hal ini menunjukkan kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo telah mampu melaksanakan pengawasan (asurans dan konsultansi/*advisory*) dengan landasan struktur dan prosedur, tapi kualitas serta konsistensi masih belum memadai. Perlunya penguatan koordinasi dengan manajemen/ Kepala Daerah untuk menyelaraskan tujuan pengawasan APIP dengan ekspektasi manajemen agar hasil pengawasan dapat lebih strategis dan bermanfaat, Pemantauan terhadap disiplin pemenuhan kualitas hasil pengawasan, kertas kerja dan progres tindak lanjut secara berkala, dan Penguatan kualitas pengawasan melalui pembagian/ pendelegasian kewenangan yang jelas di internal organisasi APIP serta terselenggaranya pengawasan berbasis risiko dan penjaminan kualitas.

Selain Tingkat maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sebagaimana telah disebutkan diatas, peran Inspektorat yang lain yaitu mengawal terkait

dengan penilaian risiko. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu pada pasal 13 sampai dengan pasal 17, juga dinyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan. Instansi Pemerintah harus mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.



Gambar 2.73. Nilai Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Purworejo tahun 2021-2025
Sumber: Inspektorat Daerah

Nilai Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Purworejo meningkat setiap tahunnya. Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk didalamnya pemerintah daerah, tidak terlepas adanya risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan SPIP. Semakin baik pemerintah daerah dalam mengelola risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya. SPIP yang yang baik diharapkan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pula.

Komponen lain dalam penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi adalah Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Melalui penguatan sistem pengawasan dan komitmen terhadap prinsip integritas, Pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya menciptakan birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Capaian nilai IEPK kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.134. Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi tahun 2021-2025

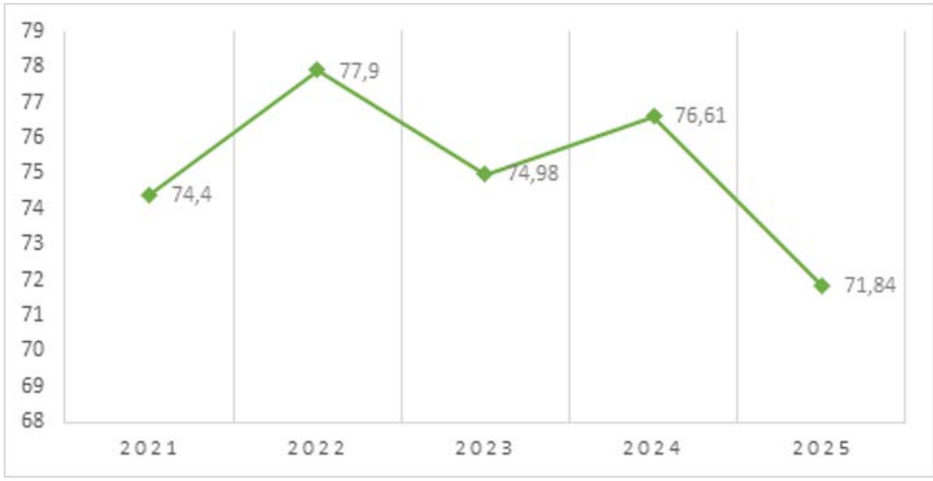
No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	2,27	2,93	2,964	3,096	2,670

Sumber: Inspektorat Daerah tahun 2025

Peningkatan IEPK yang stabil selama lima tahun terakhir menjadi indikator positif terhadap penguatan integritas birokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Capaian ini penting sebagi landasan untuk mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan pembentukan budaya organisasi yang antikorupsi di seluruh lini pemerintahan daerah.

Kinerja urusan pengawasan mencakup internal dan eksternal. Maturitas SPIP mengukur sistem dan proses pengendalian yang dibangun instansi untuk mencegah penyimpangan. Sementara output integritas suatu organisasi dinilai melalui Indeks Integritas Nasional (SPI). Indeks Integritas Nasional (SPI) merupakan potret riil tingkat risiko korupsi dan perilaku integritas yang dirasakan oleh pegawai, masyarakat, dan ahli.

Indeks Integritas Nasional diperoleh melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Survei ini merupakan salah satu upaya perbaikan dari KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mengukur risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. SPI menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan budaya birokrasi BerAKHLAK. Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudut pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan/atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper/ahli dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi. Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.



Gambar 2.74. Survei Penilaian Integritas tahun 2021-2025
Sumber: Inspektorat Daerah tahun 2025

Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator pengelolaan anggran, pengelolaan SDM, transparansi dan pengelolaan PBJ berada pada angka yang relatif baik dalam kategori terjaga terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal. Akan tetapi pada indikator Integritas dalam pelaksanaan tugas dan dan perdagangan pengaruh ada pada kategori waspada. Serta pada indikator sosialisasi anti korupsi berada pada kategori rentan.

Secara umum, pelaksanaan tugas di Kabupaten Purworejo masih menghadapi beberapa risiko dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang elanggar aturan. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko berupa pemberian gratifikasi/suap/ pemerasan masih tinggi di instansi ini, setidaknyadalam satu aspek penilaian integritas pegawai.

Risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih berada pada tingkat yang tinggi, setidaknya dalam satu aspek pengelolaan anggaran. Risiko terjadinya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa diyakini masih ada dalam skala menengah. Kabupaten Purworejo dinilai cukup objektif dalam menjalankan proses promosi/mutasi. Sistem pengawasan internal untuk meminimalkan risiko perdagangan pengaruh (trading influence) di instansi ini sudah cukup baik. Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di Kabupaten Purworejo, dan berdampak cukup efektif terhadap pembentukan perilaku antikorupsi. Meskipun upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Purworejo sudah sangat baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, instansi dapat meningkatkan sistem antikorupsi melalui penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti.

2.1.3.7 Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo memiliki 16 kecamatan yang terdiri dari 469 desa dan 25 kelurahan. Tujuan Perangkat Daerah seluruh kecamatan yaitu Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Sedangkan sasaran Perangkat Daerah seluruh kecamatan yaitu Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat. Tujuan dan sasaran ini memiliki indikator yang sama yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Berikut realisasi IKM di seluruh kecamatan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.135. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Bagelen	81,43	81,67	82,33	90,81	85,17
2	Banyuurip	80,75	84,81	85,19	87,75	87,68
3	Bayan	90,97	91,03	90,96	91,04	92,05
4	Bener	87,95	93,97	85,99	88,38	88,20
5	Bruno	81,25	85,50	83,27	85,97	86,42
6	Butuh	82,75	94,31	88,44	86,00	88,73
7	Gebang	80,66	82,86	86,80	83,63	84,10
8	Grabag	79,89	79,44	79,44	84,32	87,74
9	Kaligesing	79,50	82,81	82,75	87,58	87,86
10	Kemiri	77,96	78,75	80,03	84,77	82,38
11	Kutoarjo	80,13	81,19	88,22	85,54	87,88
12	Loano	84,73	85,47	85,47	85,08	87,06
13	Ngombol	83,46	86,31	85,75	86,24	86,77
14	Pituruh	84,00	84,31	84,35	86,86	86,91
15	Purwodadi	85,25	86,06	90,31	91,94	90,82
16	Purworejo	81,39	84,67	78,47	84,75	87,32
	Rata-Rata	**82,63**	**85,20**	**84,86**	**86,92**	**87,32**

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo, 2026

Beberapa kecamatan mencatatkan kinerja yang sangat baik dengan nilai IKM yang secara konsisten tinggi. Kecamatan seperti Bayan dan Purwodadi tercatat memiliki capaian IKM di atas 90 pada beberapa tahun terakhir, mencerminkan kualitas layanan publik yang prima dan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah di wilayah tersebut. Kenaikan capaian IKM di kecamatan mengindikasikan adanya pembenahan yang signifikan dalam aspek pelayanan publik, baik dari sisi prosedur, kecepatan, maupun kenyaman layanan.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki nilai IKM relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya, meskipun tetap menunjukkan tren peningkatan. Kecamatan Bagelen, Bruno, Gebang, Kemiri, Loano, Ngombol, dan Pituruh pada tahun terakhir cenderung berada di bawah rata-rata kabupaten. Kondisi ini mencerminkan perlunya perhatian dan intervensi lebih lanjut untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah-wilayah tersebut.

2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

Ketahanan Nasional merujuk pada kemampuan suatu negara untuk mempertahankan eksistensinya dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar. Dimensi ketahanan mencakup berbagai bidang yang berkontribusi pada kekuatan suatu negara, diantaranya Dimensi Geografi, Demografi, Sumber kekayaan Alam, Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, serta Pertahanan dan Keamanan.

Pengukuran ketahanan nasional mencakup evaluasi dan pemetaan ketahanan/kemampuan suatu negara dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek militer, ekonomi, maupun sosial. Tujuan utama sistem pengukuran adalah untuk menyediakan data yang akurat dan komprehensif mengenai ketahanan nasional, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis bukti.

Tabel 2.136. Skala dan kategori Indek Ketahanan Nasional

No	Score	Kategori	Keterangan
1	1 - 1,8	Rawan	Apabila kondisi dinamik berada pada kondisi sangat lemah, ancaman sekecil apapun akan membahayakan intergritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara
2	1,8 - 2,6	Kurang Tangguh	Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah, bila tidak segera ada perbaikan yang signifikan maka stabilitas nasional akan goyah
3	2,6 - 3,4	Cukup Tangguh	Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup memadai, beberapa kelemahan internal perlu diperbaiki agar tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional
4	3,4 - 4,2	Tangguh	Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi baik, harus tetap wapada
5	4,2 - 5	Sangat Tangguh	Apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi sangat baik dan prima

Tabel 2.137. Indek Ketahanan Nasional Ipoleksosbud Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Indeks Ketahanan Ipoleksosbud	NA	NA	NA	NA	1,62

Sumber: Data Lemhanas, 2006

Sementara itu salah satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) Pemerintah Daerah adalah terjaganya kondusivitas masyarakat melalui nihilnya kejadian konflik yang berlata belakang Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA). Stabilitas sosial merupakan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah di bidang ekonomi, politik maupun budaya. Dengan terjaganya kerukunan antar warga, diharapkan proses pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa terganggu oleh potensi konflik horizontal.

Tabel 2.138. Jumlah Kejadian Konflik SARA Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Jumlah kejadian konflik SARA	0	0	0	0	0

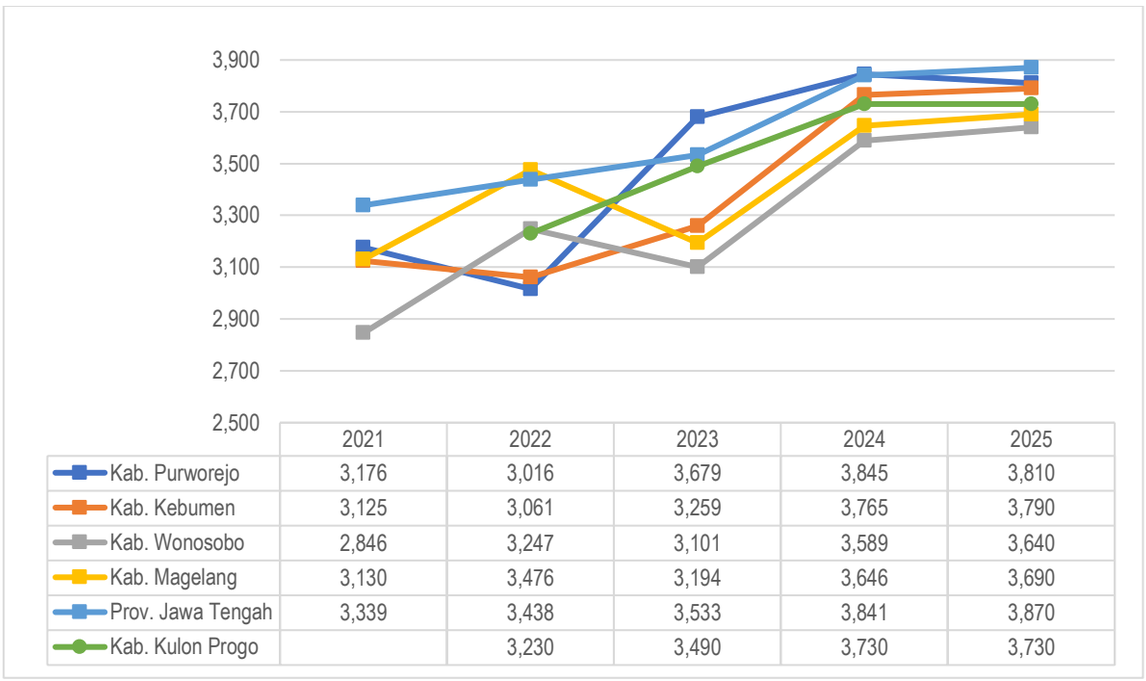
Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Purworejo, 2026

2.1.4. ASPEK DAYA SAING

Daya saing didefinisikan sebagai suatu wilayah menunjukkan kemampuan menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Daya saing daerah dapat dijabarkan pada beberapa fokus: daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah, serta daya saing iklim investasi.

Indeks Daya Saing Daerah

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengeluarkan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), yakni instrumen pengukuran daya saing pada tingkat daerah. IDSD diukur berdasarkan beberapa aspek, antara lain ekosistem inovasi, faktor penguat (*enabling environment*), sumber daya alam (*human capital*), serta faktor pasar (*market*). Di tahun terakhir (2025), Kabupaten Purworejo masih memiliki nilai IDSD tertinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, mencapai 3,81, namun lebih rendah dari rata-rata nilai Provinsi Jawa Tengah (3,87). Kabupaten Purworejo juga memiliki nilai IDSD lebih tinggi dari Kabupaten Kulon Progo (3,73) pada tahun ini. Secara umum Kabupaten Purworejo lebih baik di keempat aspek, dikarenakan tingginya kapabilitas inovasi, sistem keuangan, pasar produk, keterampilan, kesehatan, serta institusi. Lebih lanjut nilai IDSD Kabupaten Purworejo dan daerah sekitarnya dapat diamati pada gambar berikut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Purworejo	3,176	3,016	3,679	3,845	3,810
Kab. Kebumen	3,125	3,061	3,259	3,765	3,790
Kab. Wonosobo	2,846	3,247	3,101	3,589	3,640
Kab. Magelang	3,130	3,476	3,194	3,646	3,690
Prov. Jawa Tengah	3,339	3,438	3,533	3,841	3,870
Kab. Kulon Progo		3,230	3,490	3,730	3,730

Gambar 2.75. Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2020-2024

Sumber: BRIN, 2026

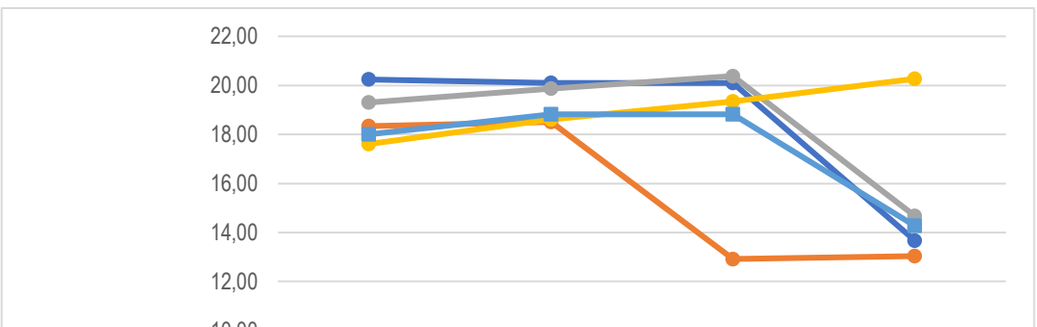
Meskipun demikian, Kabupaten Purworejo mengalami penuruan nilai IDSD dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan nilai terjadi pada Pilar 1 (institusi), Pilar 7 (pasar produk), Pilar 8 (pasar tenaga kerja), Pilar 11 (dinamika bisnis), dan Pilar 12 (kapabilitas inovasi). Hal ini menjadi catatan evaluasi pada tahun 2025, untuk ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya.

2.1.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Pada daya saing ekonomi daerah, dijelaskan beberapa hal, antara lain distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah berdasarkan kriteria bank dunia, PDRB lapangan usaha industri pengolahan (ADHB), distribusi PDRB lapangan usaha industri pengolahan (ADHB), distribusi PDRB lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (ADHB), PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (ADHK), dan laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Distribusi Pengeluaran pada Kelompok Penduduk 40% Terbawah Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Terdapat data mengenai distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia, terpublikasi oleh BPS. Distribusi pengeluaran menunjukkan ketimpangan pendapatan dengan mengelompokkan penduduk dalam tiga kelompok yaitu 40% penduduk dengan pendapatan bawah/ rendah, 40% penduduk dengan pendapatan tengah/ sedang, dan 20% penduduk dengan pendapatan atas/ tinggi. Ketimpangan diukur melalui persentase pengeluaran dari kelompok yang berpendapatan 40% terbawah dibandingkan dengan total pengeluaran seluruh penduduk. Jika di bawah 12% maka ketimpangan tinggi, 12%-17% menunjukkan ketimpangan sedang, dan diatas 17% menunjukkan ketimpangan rendah. Berikut distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan kabupaten di sekitarnya.



	2021	2022	2023	2024
Kab. Purworejo	20,24	20,10	20,10	13,67
Prov. Jawa Tengah	18,34	18,51	12,92	13,04
Kab. Kebumen	19,30	19,86	20,38	14,67
Kab. Wonosobo	17,61	18,61	19,35	20,27
Kab. Magelang	18,01	18,82	18,82	14,27

Gambar 2.76. Distribusi Pengeluaran pada Kelompok Penduduk 40% Terbawah Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2021-2024 (%)

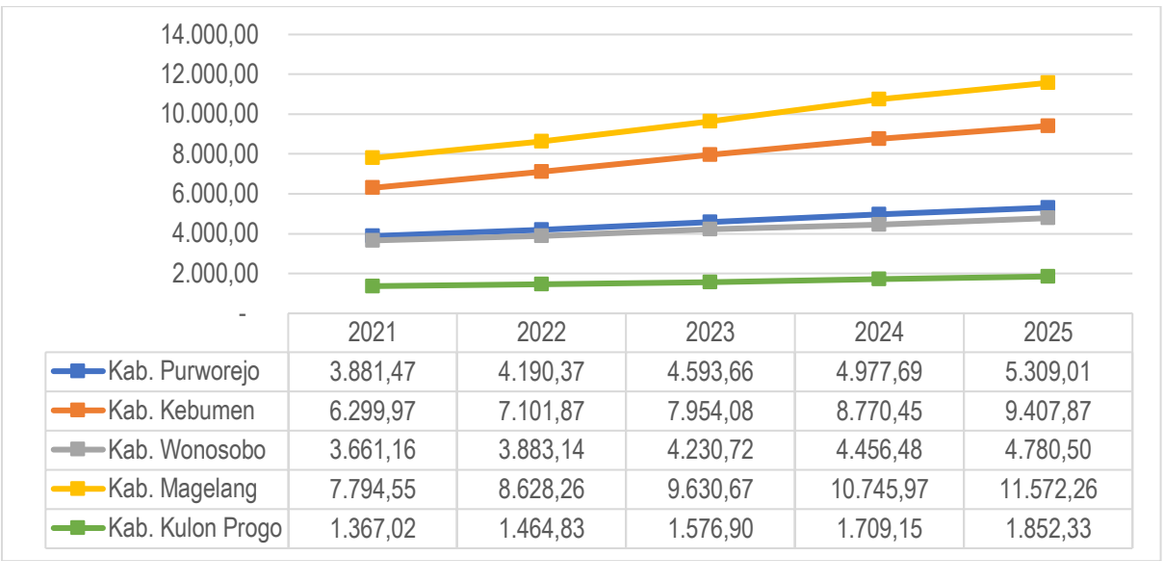
Sumber: BPS, 2025

Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah berdasarkan kriteria Bank Dunia di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Purworejo, dan kabupaten sekitarnya menunjukkan pola yang bervariasi sepanjang 2021–2024. Kabupaten Purworejo relatif stabil di kisaran 20% pada 2021–2023, namun turun tajam menjadi 13,67% pada 2024. Provinsi

Jawa Tengah mengalami penurunan signifikan dari 18,51% pada 2022 menjadi 12,92% di 2023, lalu sedikit naik ke 13,04% di 2024. Kabupaten Kebumen sempat meningkat hingga 20,38% pada 2023 sebelum turun ke 14,67%. Sebaliknya, Kabupaten Wonosobo terus mengalami kenaikan konsisten hingga mencapai 20,27% di 2024. Kabupaten Magelang stabil di 18,82% pada 2022–2023, kemudian menurun menjadi 14,27%. Secara keseluruhan, sebagian besar wilayah mengalami penurunan pada 2024, kecuali Kabupaten Wonosobo.

PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB)

Kontribusi PDRB industri pengolahan di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya, tergambarkan pada gambar di bawah ini, menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Kabupaten Magelang secara jelas mendominasi dengan nilai tertinggi, meningkat dari sekitar 7,79 triliun rupiah pada 2021 menjadi 11,57 triliun rupiah pada 2025, menjadikannya penggerak utama sektor industri di antara kelima kabupaten. Diikuti oleh Kabupaten Kebumen yang juga mencatat pertumbuhan signifikan, dari 6,30 triliun (2021) melonjak hingga 9,41 triliun rupiah (2025), menunjukkan performa yang kuat dan konsisten di posisi kedua.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Purworejo	3.881,47	4.190,37	4.593,66	4.977,69	5.309,01
Kab. Kebumen	6.299,97	7.101,87	7.954,08	8.770,45	9.407,87
Kab. Wonosobo	3.661,16	3.883,14	4.230,72	4.456,48	4.780,50
Kab. Magelang	7.794,55	8.628,26	9.630,67	10.745,97	11.572,26
Kab. Kulon Progo	1.367,02	1.464,83	1.576,90	1.709,15	1.852,33

Gambar 2.77. PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB) Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2021-2025 (miliar rupiah)

Sumber: BPS, 2026

Sementara itu, Kabupaten Purworejo, Wonosobo, dan Kulon Progo berada pada level yang lebih rendah namun tetap mengalami kenaikan nilai PDRB industri pengolahan setiap tahunnya. Kabupaten Purworejo naik dari 3,88 triliun menjadi 5,31 triliun rupiah, Wonosobo dari 3,66 triliun ke 4,78 triliun, sedangkan Kulon Progo, meski memiliki nilai terkecil, tetap tumbuh stabil dari 1,37 triliun menjadi 1,85 triliun rupiah pada 2025. Secara keseluruhan, kelima kabupaten ini berhasil mempertahankan ekspansi sektor industri pengolahan di tengah periode 2021–2025, dengan Kabupaten Magelang dan Kebumen menjadi motor pertumbuhan utama di wilayah tersebut.

Distribusi PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB)

Distribusi kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDRB di lima kabupaten, tergambarkan pada grafik di bawah ini, menunjukkan pola yang relatif stabil namun dengan sedikit variasi selama periode 2021–2025. Kabupaten Magelang secara konsisten menempati posisi tertinggi di antara kabupaten-kabupaten tersebut, dengan pangsa mencapai sekitar 22,81% pada 2021 dan terus meningkat perlahan hingga 24,63% pada 2025, menandakan penguatan peran industri pengolahan di wilayah ini. Kabupaten Kebumen berada di urutan kedua dengan tren kenaikan yang cukup jelas, dari 21,31% menjadi puncak 22,70% pada 2024 sebelum sedikit terkoreksi ke 22,66% pada 2025. Sementara itu, Kabupaten Purworejo relatif stabil di kisaran 19,6–20,1%, dan Kabupaten Wonosobo cenderung menurun tipis dari 18,44% menjadi sekitar 17,8–18% di tahun-tahun akhir.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Purworejo	19,80	19,62	19,81	20,05	20,05
Kab. Kebumen	21,31	21,78	22,23	22,70	22,66
Kab. Wonosobo	18,44	17,99	18,13	17,79	17,88
Kab. Magelang	22,81	23,05	23,69	24,57	24,63
Kab. Kulon Progo	10,81	10,22	9,95	10,10	10,33
Prov. Jawa Tengah	34,30	33,94	34,00	33,82	33,39

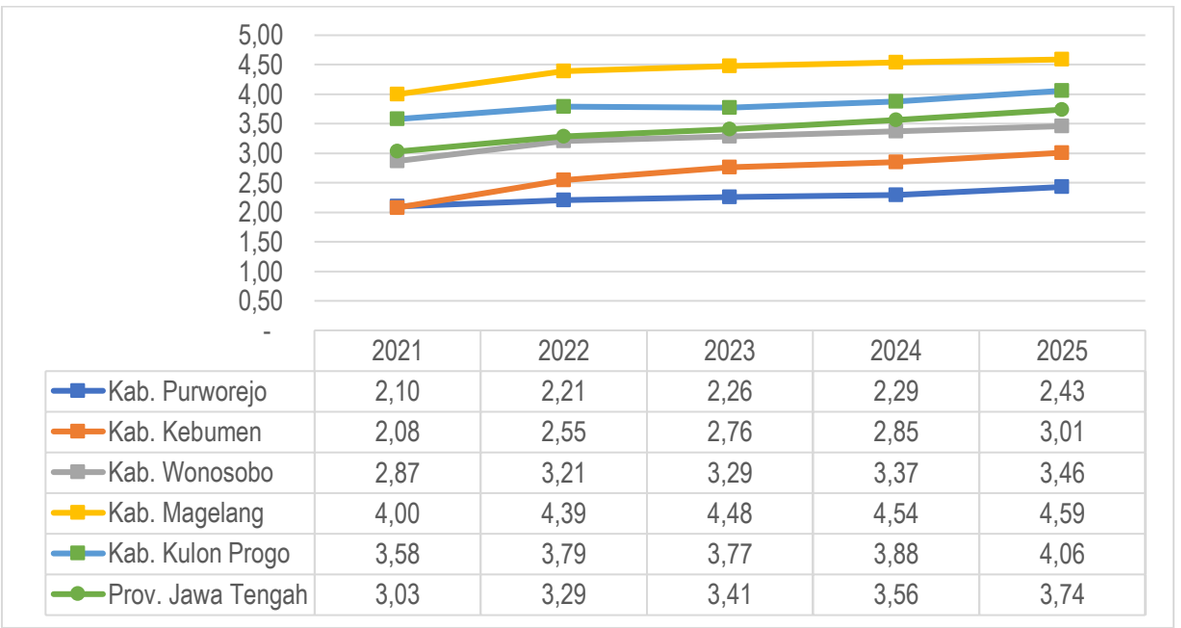
Gambar 2.78. Distribusi PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB) Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitarnya, serta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 (%)

Sumber: BPS, 2026

Sebagai perbandingan, Kabupaten Kulon Progo memiliki kontribusi paling rendah di antara kelima kabupaten, berkisar antara 9,95% hingga 10,81%, dengan fluktuasi kecil namun tanpa tren penguatan signifikan. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan (yang berkisar 33,4–34,3%), kelima kabupaten ini secara kolektif masih berada di bawah rata-rata provinsi, terutama karena pangsa industri pengolahan di tingkat provinsi didorong oleh kabupaten/ kota besar lainnya. Secara keseluruhan, sektor industri pengolahan di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya cenderung mempertahankan stabilitas pangsa, dengan Kabupaten Magelang dan Kebumen sebagai penguat utama, sementara daerah lain lebih stagnan atau sedikit melemah dalam proporsi terhadap ekonomi lokal masing-masing.

Distribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB di lima kabupaten menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup positif dan stabil selama periode 2021–2025, tergambarkan pada grafik di bawah ini, dengan Kabupaten Magelang secara konsisten memimpin di posisi tertinggi. Pangsa sektor ini di Kabupaten Magelang meningkat dari 4,00% pada 2021 menjadi 4,59% pada 2025, menandakan penguatan peran pariwisata dan jasa makanan-minuman di wilayah tersebut. Kabupaten Kulon Progo berada di urutan kedua dengan kontribusi yang relatif tinggi dan terus naik perlahan dari 3,58% menjadi 4,06%, sementara Kabupaten Wonosobo juga menunjukkan peningkatan stabil dari 2,87% ke 3,46%. Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan mencatat kenaikan dari 3,03% menjadi 3,74%, yang masih berada di bawah performa Kabupaten Magelang dan Kulon Progo, namun di atas rata-rata kabupaten lainnya dalam kelompok ini.



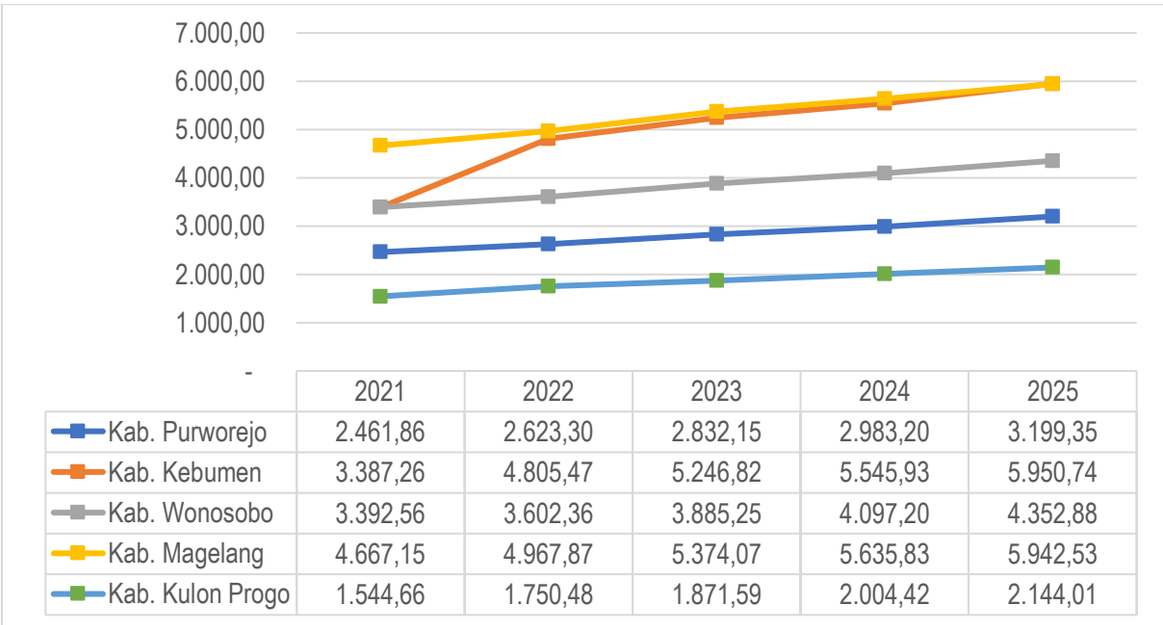
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Purworejo	2,10	2,21	2,26	2,29	2,43
Kab. Kebumen	2,08	2,55	2,76	2,85	3,01
Kab. Wonosobo	2,87	3,21	3,29	3,37	3,46
Kab. Magelang	4,00	4,39	4,48	4,54	4,59
Kab. Kulon Progo	3,58	3,79	3,77	3,88	4,06
Prov. Jawa Tengah	3,03	3,29	3,41	3,56	3,74

Gambar 2.79. Distribusi PDRB Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (ADHB) Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitarnya, serta Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 (%)
Sumber: BPS, 2026

Di sisi lain, Kabupaten Kebumen mengalami lonjakan paling signifikan secara persentase, dari hanya 2,08% pada 2021 melonjak hingga 3,01% pada 2025, menunjukkan percepatan perkembangan sektor akomodasi dan kuliner di daerah tersebut. Kabupaten Purworejo memiliki kontribusi paling rendah di antara kelima kabupaten, meskipun tetap tumbuh perlahan dari 2,10% menjadi 2,43%. Secara keseluruhan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya berhasil memperkuat proporsinya terhadap ekonomi lokal selama lima tahun terakhir, didorong terutama oleh Kabupaten Magelang sebagai pemimpin, diikuti Kulon Progo dan Wonosobo, sementara Kebumen menunjukkan potensi *catch-up* yang menjanjikan dan Purworejo masih relatif tertinggal dalam hal pangsa sektor ini.

PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHB)

Kontribusi PDRB sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil serta sepeda motor, tergambarkan dalam grafik di bawah ini, menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat dan konsisten di kelima kabupaten selama periode 2021–2025. Kabupaten Magelang memimpin dengan nilai tertinggi sepanjang waktu, meningkat dari 4,67 triliun rupiah pada 2021 menjadi sekitar 5,94 triliun rupiah pada 2025, diikuti sangat ketat oleh Kabupaten Kebumen yang mencatat lonjakan paling signifikan di awal periode, dari 3,39 triliun melonjak ke 4,81 triliun pada 2022, sebelum terus naik stabil hingga mencapai 5,95 triliun rupiah pada 2025, hampir menyamai posisi Magelang di tahun terakhir. Kabupaten Wonosobo berada di urutan ketiga dengan pertumbuhan yang lebih landai namun tetap positif, dari 3,39 triliun menjadi 4,35 triliun rupiah.



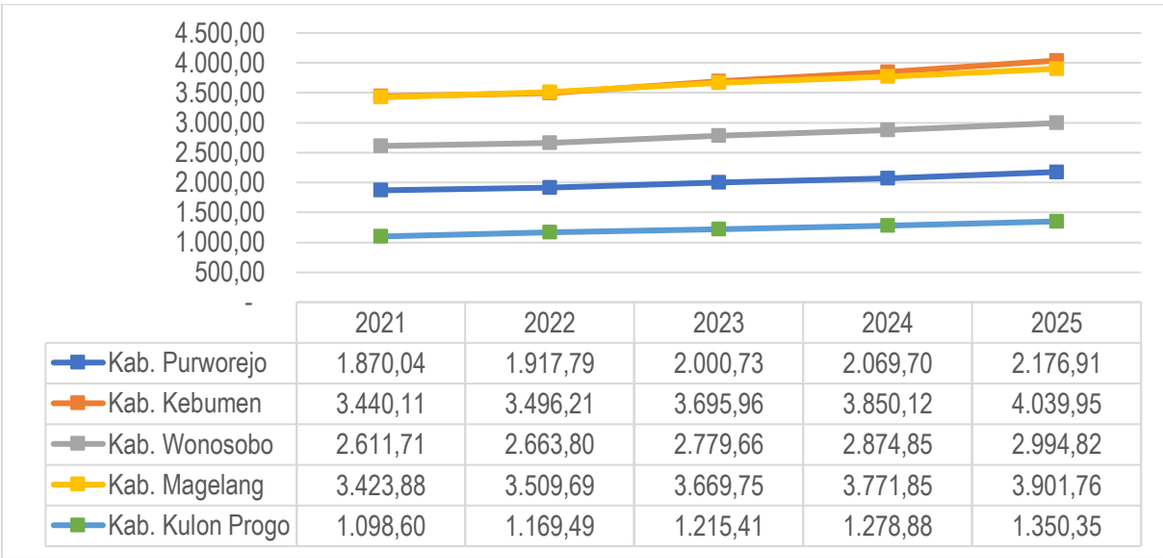
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Purworejo	2.461,86	2.623,30	2.832,15	2.983,20	3.199,35
Kab. Kebumen	3.387,26	4.805,47	5.246,82	5.545,93	5.950,74
Kab. Wonosobo	3.392,56	3.602,36	3.885,25	4.097,20	4.352,88
Kab. Magelang	4.667,15	4.967,87	5.374,07	5.635,83	5.942,53
Kab. Kulon Progo	1.544,66	1.750,48	1.871,59	2.004,42	2.144,01

Gambar 2.80. PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHB) Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2021-2025 (miliar rupiah)
Sumber: BPS, 2026

Sementara itu, Kabupaten Purworejo dan Kulon Progo berada pada level yang lebih rendah namun juga mengalami ekspansi secara bertahap. Purworejo naik dari 2,46 triliun menjadi 3,20 triliun rupiah, sedangkan Kulon Progo, meski memiliki nilai terkecil, tetap tumbuh dari 1,54 triliun menjadi 2,14 triliun rupiah pada 2025. Secara keseluruhan, sektor perdagangan dan reparasi ini menjadi salah satu penggerak ekonomi utama di wilayah tersebut, dengan Kebumen menunjukkan percepatan paling mencolok di awal periode, sementara Magelang dan Wonosobo mempertahankan posisi kuat secara konsisten, mencerminkan vitalitas aktivitas perdagangan ritel serta jasa terkait otomotif di kelima kabupaten selama lima tahun terakhir.

PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil serta sepeda motor (berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan), terdapat pada grafik di bawah ini, menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan positif di kelima kabupaten selama periode 2021–2025. Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Magelang bersaing ketat di posisi teratas, dengan Kebumen memulai dari nilai tertinggi pada 2021 (sekitar 3,44 triliun rupiah) dan terus meningkat hingga mencapai 4,04 triliun rupiah pada 2025, sementara Magelang berada sangat dekat di belakangnya, naik dari 3,42 triliun menjadi 3,90 triliun rupiah. Kabupaten Wonosobo menempati posisi ketiga dengan pertumbuhan yang konsisten namun lebih moderat, dari 2,61 triliun menjadi sekitar 3,00 triliun rupiah, mencerminkan peran perdagangan sebagai salah satu pilar ekonomi yang andal di ketiga kabupaten ini.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Purworejo	1.870,04	1.917,79	2.000,73	2.069,70	2.176,91
Kab. Kebumen	3.440,11	3.496,21	3.695,96	3.850,12	4.039,95
Kab. Wonosobo	2.611,71	2.663,80	2.779,66	2.874,85	2.994,82
Kab. Magelang	3.423,88	3.509,69	3.669,75	3.771,85	3.901,76
Kab. Kulon Progo	1.098,60	1.169,49	1.215,41	1.278,88	1.350,35

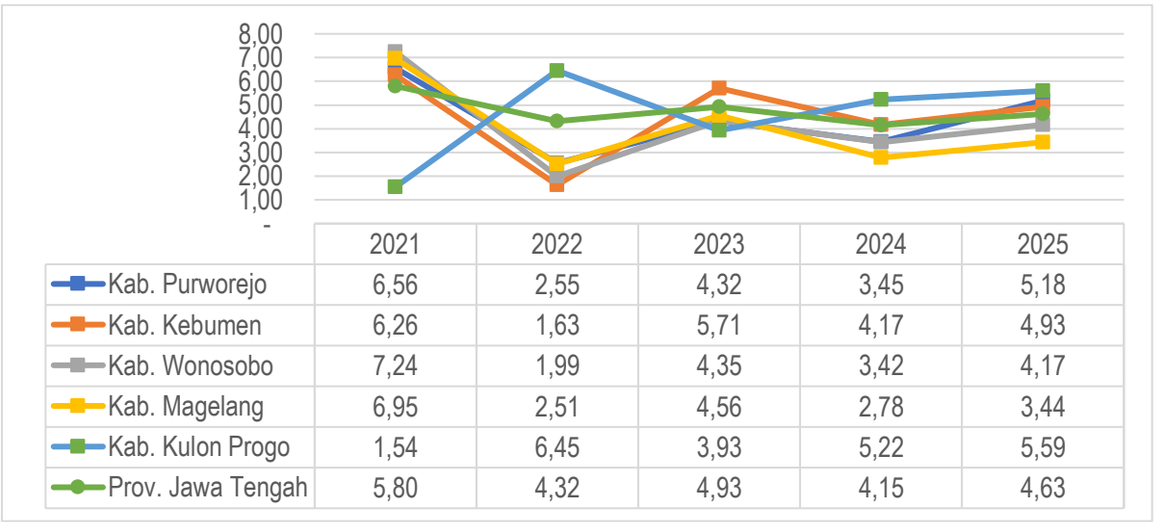
Gambar 2.81. PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2021-2025 (miliar rupiah)

Sumber: BPS, 2026

Kabupaten Purworejo dan Kulon Progo berada pada skala yang lebih kecil namun tetap mengalami ekspansi bertahap. Purworejo tumbuh dari 1,87 triliun menjadi 2,18 triliun rupiah, sedangkan Kulon Progo, meskipun memiliki nilai terkecil, mencatat persentase pertumbuhan relatif tinggi di antara kelompok ini, dari 1,10 triliun melonjak menjadi 1,35 triliun rupiah. Secara keseluruhan, sektor ini berhasil mempertahankan momentum positif di seluruh wilayah, dengan Kebumen dan Magelang sebagai penggerak utama dalam hal nilai absolut, sementara Kulon Progo menonjol dalam laju pertumbuhan relatif, mengindikasikan vitalitas aktivitas perdagangan ritel dan jasa reparasi kendaraan di tengah dinamika ekonomi lokal selama lima tahun tersebut.

Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil serta sepeda motor di lima kabupaten, tergambarkan dalam grafik di bawah ini, menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan selama periode 2021–2025, dengan pola penurunan tajam pada 2022 di hampir seluruh wilayah diikuti pemulihan parsial di tahun-tahun berikutnya. Pada 2021, laju pertumbuhan relatif tinggi di sebagian besar kabupaten (berkisar 6,26% hingga 7,24%), namun tahun 2022 mencatat kontraksi berat, terutama di Kabupaten Kebumen (-73,96%), Wonosobo (-72,51%), dan Magelang (-63,88%), yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pemulihan pasca-pandemi atau gangguan rantai pasok. Kabupaten Kulon Progo menjadi pengecualian dengan lonjakan luar biasa mencapai 318,83% pada 2022, meskipun kemudian melandai. Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan mengalami penurunan moderat (-25,52%) pada 2022, diikuti pemulihan yang lebih stabil dibandingkan kabupaten-kabupaten tersebut.



	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Purworejo	6,56	2,55	4,32	3,45	5,18
Kab. Kebumen	6,26	1,63	5,71	4,17	4,93
Kab. Wonosobo	7,24	1,99	4,35	3,42	4,17
Kab. Magelang	6,95	2,51	4,56	2,78	3,44
Kab. Kulon Progo	1,54	6,45	3,93	5,22	5,59
Prov. Jawa Tengah	5,80	4,32	4,93	4,15	4,63

Gambar 2.82. Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sekitarnya, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025 (%)
Sumber: BPS, 2026

Pada periode 2023–2025, laju pertumbuhan mulai berfluktuasi namun cenderung positif di sebagian besar kabupaten, dengan Kabupaten Kulon Progo kembali menonjol sebagai yang paling konsisten tinggi (berkisar 7–32% di tahun-tahun akhir) dan mencapai 5,59% pada 2025. Kabupaten Purworejo juga menunjukkan pemulihan kuat di 2023 dan 2025 (masing-masing sekitar 69% dan 50%), sementara Kabupaten Kebumen mencatat *rebound* tertinggi pada 2023 (250%) sebelum melandai. Kabupaten Magelang dan Wonosobo relatif lebih rendah di akhir periode (sekitar 3,4-4,2%), dengan fluktuasi yang lebih terbatas. Secara keseluruhan, sektor perdagangan dan reparasi ini mengalami volatilitas tinggi di wilayah tersebut, terutama akibat guncangan awal 2022, namun berhasil pulih secara bertahap, dengan Kabupaten Kulon Progo dan Purworejo sebagai contoh pemulihan yang lebih tangguh dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang lebih stabil di kisaran 4-5%.

2.1.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Pada daya saing sumber daya manusia, dijelaskan mengenai rasio beban ketergantungan. Tabel di bawah ini menyajikan data rasio beban ketergantungan penduduk di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025. Tabel ini membagi penduduk menjadi dua kelompok utama, yaitu penduduk usia produktif (usia 15–64 tahun) dan penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia). Persentase penduduk usia produktif mengalami penurunan secara bertahap dari 68,90% pada tahun 2021 menjadi 67,81% pada tahun 2025. Sebaliknya, persentase penduduk usia tidak produktif terus meningkat dari 31,10% menjadi 32,19% dalam periode yang sama.

Tabel 2.139. Rasio Beban Ketergantungan di Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2025

Proporsi penduduk	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Persentase penduduk usia produktif (%)	68,90	68,68	68,43	68,14	67,81
Persentase penduduk usia tidak produktif (%)	31,10	31,32	31,57	31,86	32,19
Rasio beban ketergantungan (%)	45,13	45,60	46,14	46,76	47,46

Sumber: BPS Kab. Purworejo, 2026, diolah

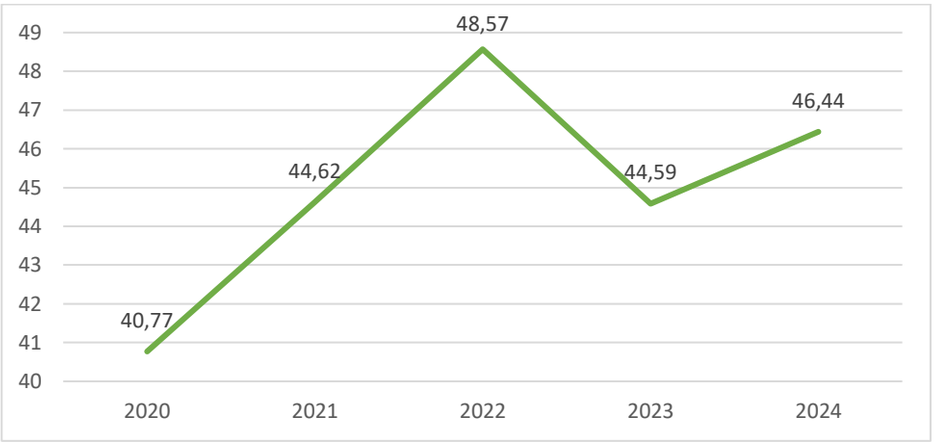
Akibat perubahan tersebut, rasio beban ketergantungan (d*ependency ratio*) di Kabupaten Purworejo menunjukkan tren kenaikan dari 45,13% pada tahun 2021 menjadi 47,46% pada tahun 2025. Hal ini menandakan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung beban lebih banyak penduduk usia tidak produktif. Meskipun kenaikannya relatif lambat, tren ini perlu mendapat perhatian karena dapat memberikan tekanan tambahan terhadap sistem ekonomi, layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial di masa mendatang.

2.1.4.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah

Pada daya saing infrastruktur wilayah, dijelaskan mengenai indeks infrastruktur daerah. Infrastruktur atau prasarana wilayah adalah struktur/ fasilitas dasar seperti transportasi, jalan, akses air bersih/ minum, sanitasi, kelistrikan, telekomunikasi, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk aktivitas masyarakat. Terdapat indeks infrastruktur daerah yang menjadi instrumen strategis untuk menilai dan mengarahkan pembangunan daerah. Indeks infrastruktur daerah pada dasarnya merupakan alat ukur komposit yang digunakan untuk menilai kondisi, ketersediaan, kualitas dan pemerataan infrastruktur di suatu daerah. Melalui perhitungan indeks infrastruktur daerah, akan diketahui sejauh mana tingkat ketersediaan infrastruktur dan kualitas layanan publik di Kabupaten Purworejo. Selain itu melalui perhitungan indikator tersebut, dapat diketahui daya saing daerah dan evaluasi terhadap pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Purworejo. Perhitungan tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purworejo. Dengan kata lain, Indeks Infrastruktur daerah berfungsi sebagai kompas pembangunan, membantu pemerintah dalam memprioritaskan pembangunan, mengukur capaian,

mengurangi tingkat kesenjangan, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat daya saing daerah.

Terdapat tujuh komponen yang menjadi dasar perhitungan indeks infrastruktur daerah di Kabupaten Purworejo, yaitu Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten; Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan; Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman; Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak; Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten; Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah; dan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet. Berikut indeks infrastruktur daerah Kabupaten Purworejo pada tahun 2021-2025.



Gambar 2.83. Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Purworejo
Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026

Secara agregat, indeks infrastruktur daerah menunjukkan fluktuasi yang relatif moderat dalam periode 2021–2025. Indeks infrastruktur daerah memperlihatkan pola fluktuatif moderat, dengan peningkatan pada tahun 2022, kontraksi pada 2023, dan pemulihan hingga 2025. Pola ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purworejo masih menghadapi *shock siklikal*, baik yang bersumber dari keterbatasan fiskal, realokasi anggaran, maupun perubahan prioritas kebijakan pembangunan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, kondisi ini mencerminkan bahwa elastisitas pembangunan infrastruktur terhadap kapasitas fiskal daerah masih relatif tinggi, sehingga keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh stabilitas pembiayaan. Dengan demikian, kinerja yang belum stabil menunjukkan perlunya penguatan *fiscal space* serta diversifikasi sumber pembiayaan infrastruktur.

Lebih lengkap, hasil capaian kondisi infrastruktur daerah per komponen dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.140. Kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Indeks Infrastruktur Daerah	44,62	48,57	44,59	46,44	47,42
2	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	80,01	81,75	63,05	63,28	63,41

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	17,17	19,56	22,43	29,21	31,74
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	2,4	2,5	3,7	4,26	4,93
5	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	67,04	67,27	67,68	68,16	68,78
6	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	33.90	34.40	34,8	36,56	38,32
7	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	43,62	49,11	49,15	49,92	47,60
8	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	57,45	71,25	71,35	73,66	77,13

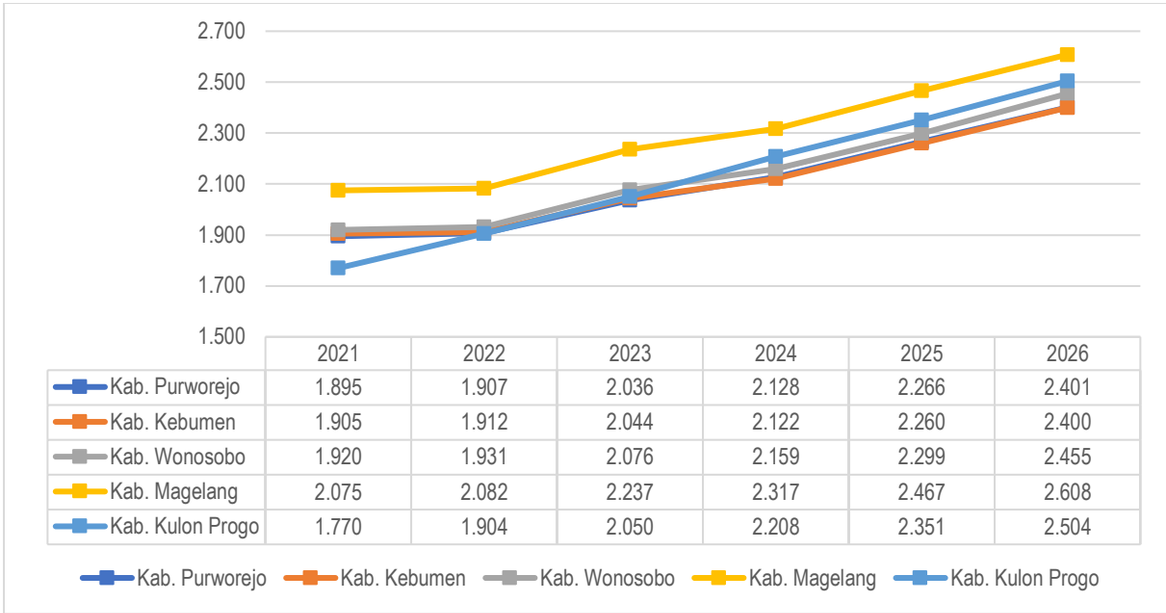
Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026

2.1.4.4. Daya Saing Iklim Investasi

Pada daya saing iklim investasi, dijelaskan beberapa hal, antara lain upah minimum kabupaten dan indeks akses keuangan daerah.

Upah Minimum Kabupaten

Upah Minimum Kabupaten (UMK) di wilayah Purworejo dan sekitarnya menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dan cukup signifikan selama periode 2021–2026, ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Kabupaten Magelang secara konsisten memimpin dengan nilai UMK tertinggi sepanjang periode, dimulai dari 2.075 ribu rupiah pada 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 2.608 ribu rupiah pada 2026, menjadikannya daerah dengan standar upah minimum paling tinggi di antara kelima kabupaten tersebut. Kabupaten Kulon Progo menunjukkan lonjakan paling kuat secara relatif, dari posisi terendah pada 2021 (1.770 ribu rupiah) melonjak tajam menjadi 2.504 ribu rupiah pada 2026, hampir menyusul posisi terdepan. Kabupaten Purworejo, Kebumen, dan Wonosobo berada dalam kelompok menengah dengan nilai yang saling berdekatan, masing-masing mencapai kisaran 2.400–2.455 ribu rupiah pada 2026, dengan Purworejo sedikit unggul di akhir periode.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kab. Purworejo	1.895	1.907	2.036	2.128	2.266	2.401
Kab. Kebumen	1.905	1.912	2.044	2.122	2.260	2.400
Kab. Wonosobo	1.920	1.931	2.076	2.159	2.299	2.455
Kab. Magelang	2.075	2.082	2.237	2.317	2.467	2.608
Kab. Kulon Progo	1.770	1.904	2.050	2.208	2.351	2.504

Gambar 2.84. Upah Minumum Kabupaten Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2021-2026 (ribu rupiah)

Sumber: BPS, 2026

Secara keseluruhan, seluruh kabupaten mengalami peningkatan UMK setiap tahunnya tanpa penurunan, mencerminkan kebijakan penyesuaian upah minimum yang progresif di wilayah tersebut. Kenaikan paling mencolok terjadi antara 2022–2023 di hampir semua kabupaten, diikuti laju pertumbuhan yang lebih stabil namun tetap positif hingga 2026. Pada tahun 2026, Kabupaten Magelang tetap berada di puncak (2.608 ribu rupiah), diikuti Kulon Progo (2.504 ribu rupiah), Wonosobo (2.455 ribu rupiah), Purworejo (2.401 ribu rupiah), dan Kebumen (2.400 ribu rupiah). Pola ini mengindikasikan konvergensi nilai UMK antar-kabupaten di wilayah sekitar Purworejo, dengan selisih antar daerah yang semakin mengecil seiring waktu, meskipun Magelang dan Kulon Progo terus mempertahankan posisi unggul.

2.1.5. PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Purworejo telah dilaksanakan sejak tahun 2021 dengan mendasari Peraturan Bupati Purworejo Nomor 192 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Purworejo. Namun demikian, menindaklanjuti Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah, dasar hukum penyelenggaraan SDI Tingkat Kabupaten Purworejo dimutakhirkan dengan penyusunan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2025 tentang Satu Data Daerah.

Kebijakan Satu Data Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Landasan hukum tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan tata kelola data untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung-jawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman

bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sehingga dapat mendorong keterbukaan dan transparansi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan.

Selain regulasi tersebut, penyelenggaraan SDI Tingkat Kabupaten Purworejo juga telah dilengkapi dengan:

a. Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Kabupaten Purworejo melalui Keputusan Bupati Purworejo Nomor 100.3.3.2/219/2025 dengan keanggotaan tim terdiri dari:
   1) Walidata Daerah, yang dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
   2) Walidata Pendukung, yang terdiri dari seluruh Sekretaris Perangkat Daerah
   3) Produsen Data, yang teridiri dari Produsen Data Statistik dan Produsen Data Geospasial yang terdiri dari seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah yang menghasilkan data
   4) Sekretariat SDI, yang dijabat oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purworejo yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 500.12/11.946/2024. Melalui SOP tersebut, telah diatur alur proses penyelenggaraan SDI di Kabupaten Purworejo yang dimulai dari tahap Perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data, Penyebarluasan Data, serta Monitoring dan Evaluasi.
c. Pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data di Kabupaten Purworejo dilaksanakan melalui **portal DataJo** Kabupaten Purworejo yang telah terintegrasi dengan **Portal Data Pusat** milik Bappenas serta **Portal SIPD e-Walidata** milik Kemendagri. Melalui interoperabilitas ini, pemanfaatan data yang telah terintegrasi dapat dilakukan secara lebih optimal, utamanya dalam penyusunan perencanaan pembangunan.



Gambar 2.85. Portal DataJo Kabupaten Purworejo
Sumber: Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo, 2025

2.1.6. PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan pemantuan dan pengendalian pada pemerintah daerah wajib dilaksanakan dalam rangka menjaga keberhasilan serta keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka pemantauan dan pengendalian tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah dan terus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengendalian Internal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern, yang penerapannya dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Bupati nomor 115 tahun 2022 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai landasan dalam pelaksanaan pengendalian internal oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Selain itu, manajemen risiko juga telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/664/2025 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Untuk memastikan berjalannya manajemen risiko tersebut, telah ditetapkan juga Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/666/2025 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 serta Keputusan Bupati Purworejo nomor 100.3.3.2/662/2025 tentang Pembentukan Komite Pengelola Risiko Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029.

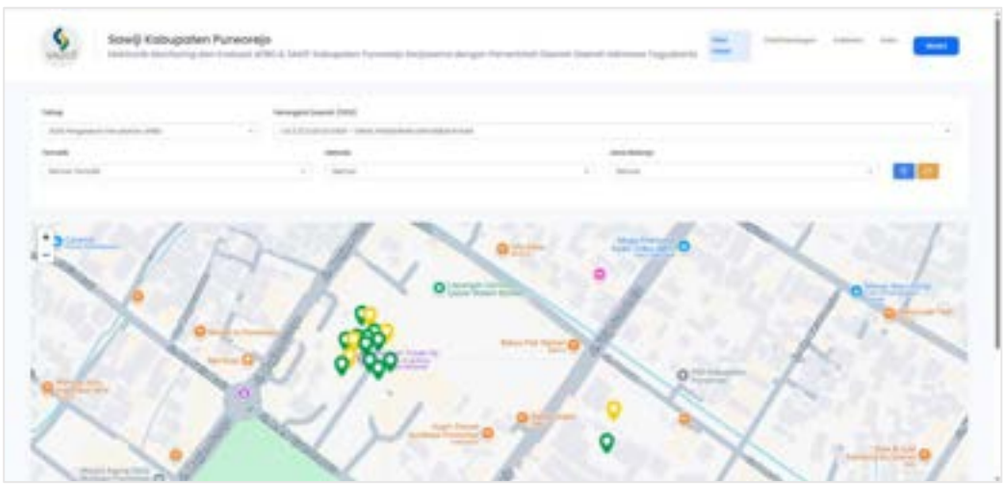
2. Pemantauan dan Pengendalian Berkala

Acuan utama pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pembangunan berkala adalah Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang kemudian secara lebih teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Pemantauan dan pengendalian berkala tersebut dilaksanakan periodik setiap triwulan untuk menghimpun data-data kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi yang akan menentukan akselerasi kinerja pada triwulan berikutnya maupun kebijakan perencanaan pada dokumen perencanaan berikutnya. Data-data kinerja yang dihimpun diantaranya adalah realisasi indikator kinerja, capaian, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja, solusi/ tindak lanjut yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, realisasi fisik dan keuangan, realisasi metadata indikator, serta beberapa data lainnya yang berhubungan dengan capaian kinerja pembangunan.

Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian berkala tersebut, sejak tahun 2022 telah didukung dengan penerapan teknologi informasi berupa aplikasi online berbasis web yang bernama Sistem Akuntabilitas Wahana Evaluasi Kinerja Terintegrasi atau yang biasa dikenal dengan nama Sawiji. Selain memudahkan dalam pelaksanaan pemantauan dan pengendalian berkala, aplikasi tersebut juga telah dilengkapi dengan *dashboard* yang dapat diakses oleh publik sehingga mempermudah masyarakat untuk ikut melakukan pemantauan kinerja Pemerintah Daerah.



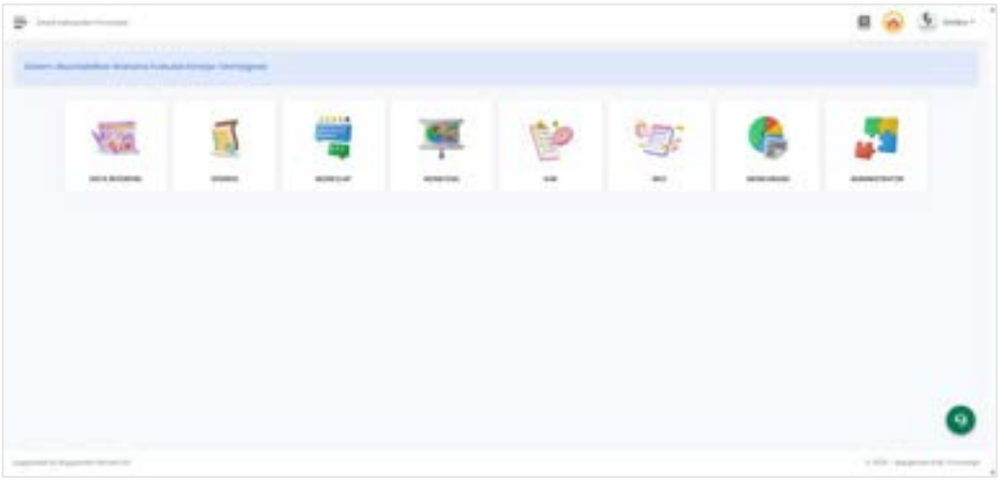
Gambar 2.86. Dashboard Fisik dan Keuangan Aplikasi Sawiji



Gambar 2.87. Dashboard Sebaran Peta Paket Pekerjaan Pada Aplikasi Sawiji



Gambar 2.88. Dashboard Data Aplikasi Sawiji



Gambar 2.89. Modul Yang Tersedia Pada Aplikasi Sawiji

Untuk menjaga kualitas hasil pemantauan dan pengendalian, dilaksanakan desk verifikasi oleh tim evaluasi Bapperida berama semua Perangkat Daerah. Pada beberapa kondisi, jika berdasarkan evaluasi bersama tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian lapangan, maka dilakukan monitoring lapangan untuk mengetahui kondisi lebih nyata dan menggali informasi lebih dalam sehingga dapat menghasilkan rekomendasi serta kebijakan yang akurat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja evaluasi serta kualitas pemantauan dan pengendalian berkala, maka diberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah dengan kinerja evaluasi terbaik. Kriteria penilaian ditentukan melalui 7 kriteria, yaitu Capaian Kinerja Fisik, Capaian Kinerja Keuangan Dibanding Target, Capaian indikator kinerja, Konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan, Konsistensi realisasi keuangan, Keterisian analisis kinerja indikator, serta Keterisian link data dukung. Penghargaan diberikan dalam 2 kategori, yaitu kategori Perangkat Daerah non Kecamatan serta kategori Kecamatan. 3 Perangkat Daerah terbaik masing-masing kategori diberikan piagam penghargaan serta trofi. Selain itu, dalam rangka meningkatkan pengendalian serta kinerja organisasi dan individu, telah ditetapkan reward dan punishment berupa pemberian tambahan penghasilan pegawai. Sesuai Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, realisasi fisik dan keuangan merupakan salah satu komponen yang menentukan nilai tambahan penghasilan pegawai pada suatu Perangkat Daerah. Dengan demikian, pemberian tambahan penghasilan tersebut memiliki peran pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan daerah.



Gambar 2.90. Penerima Penghargaan Perangkat Daerah Dengan Kinerja Evaluasi Terbaik Tahun 2025

3. Pemantauan Dan Pengendalian Tematik

Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian juga dilaksanakan secara tematik. Misalnya dalam hal penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, telah ditetapkan Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/196/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purworejo Dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purworejo, yang salah satu tugasnya adalah menyusun instrumen pemantauan, melaksanakan pemantauan, dan melaporkan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal penanganan stunting ditetapkan Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/225/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting yang tugasnya adalah mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2025 DAN REALISASI RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 yang sekaligus merupakan kinerja akhir RPJMD tahun 2021-2026 dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja tujuan, sasaran dan program dengan penjelasan status capaian berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

a) Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Pemerintah Daerah Sangat Tinggi, apabila capaian kinerja mencapai 91% sampai dengan lebih dari 100%.
b) Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Pemerintah daerah Tinggi, apabila capaian kinerja mencapai 76% sampai dengan 90%.
c) Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Pemerintah Daerah Sedang, apabila capaian kinerja mencapai 66% sampai dengan 75%.
d) Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Pemerintah Daerah Rendah, apabila capaian kinerja mencapai 51% sampai dengan 65%.

e) Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program Pemerintah Daerah Sangat Rendah, apabila capaian kinerja sama dengan sampai kurang dari 50%.

Tabel 2.141. Status Capaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Status Capaian
1	≥ 91%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

2.2.1. EVALUASI KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, yang menjadi tolok ukur utama pencapaian visi dan misi, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan.

a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Pada RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029 telah ditetapkan 15 indikator kinerja utama, yang terdiri dari 5 indikator tujuan daerah serta 10 indikator sasaran daerah. Capaian indikator kinerja utama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

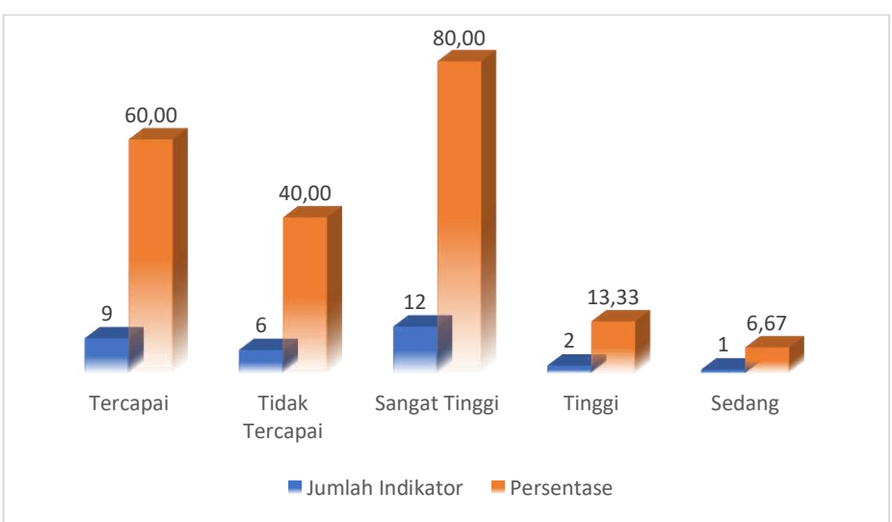
Tabel 2.142. Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori / Status	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
IKU Tujuan Daerah							
Mewujudkan Purworejo berdaya saing, sejahtera, religius, dan inovatif	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	31,56	33,04	104,69	Sangat Tinggi	BPS
	Tingkat Kemiskinan	%	9,04 - 10,22	10,06	101,57	Sangat Tinggi	BPS
	Rasio Gini	Angka	0,335	0,298	111,04	Sangat Tinggi	BPS
	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,86	3,81	98,7	Sangat Tinggi	BRIN
	Indeks Religiusitas Daerah	Angka	76,26	78,32	102,70	Sangat Tinggi	Pemkab Purworejo
Rata-rata Capaian IKU Tujuan Daerah					**103,74**	**Sangat Tinggi**	
IKU Sasaran Daerah							
Meningkatnya kualitas manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,39	75,93	100,72	Sangat Tinggi	BPS
Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	50,18	47,41	94,49	Sangat Tinggi	Pemkab Purworejo

Tujuan/ Sasaran Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori / Status	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,04	76,05	100,01	Sangat Tinggi	Kementerian LH
	Indeks Risiko Bencana	Angka	110,16 - 109,00	86,45	121,52	Sangat Tinggi	BNPB
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16 - 6,16	5,27	102,13	Sangat Tinggi	BPS
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,11	3,72	80,39	Tinggi	BPS
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	86,25	70,24	81,44	Tinggi	Badan Pangan Nasional
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi, serta wilayah yang kondusif	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83	83.87	100.55	Sangat Tinggi	Kementerian PANRB
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	68,02	67,6	99,38	Sangat Tinggi	Kementerian PANRB
	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,6	1,74	66,92	Sedang	Lemhannas
Rata-rata Capaian IKU Sasaran Daerah					**85,12**	**Tinggi**	
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah					**94,43**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida, 2026, data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, dari 15 indikator kinerja utama, jika dilihat dari ketercapaiannya, maka terdapat 9 indikator atau 60% diantaranya tercapai, serta 6 indikator atau 40% tidak tercapai. Apabila dilihat dari kategori/ status capaiannya, maka terdapat 12 indikator tercapai dengan kategori Sangat Tinggi, 2 indikator tercapai dengan kategori Tinggi, serta 1 indikator kategori capainnya Sedang.



Gambar 2.91. Proporsi Ketercapaian Serta Status Kinerja IKU Daerah Tahun 2025

Adapun 5 indikator kinerja utama yang tidak tercapai adalah sebagai berikut:

1. **Indeks Daya Saing Daerah**

   Indeks Daya Saing Daerah IDSD) merupakan instrumen yang dirancang untuk menilai tingkat daya saing pada level provinsi maupun kabupaten/kota, yang pada hakikatnya mencerminkan tingkat produktivitas daerah. IDSD 2025 disusun berdasarkan empat komponen utama daya saing yang kemudian dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Angka IDSD Kabupaten Purworejo tahun 2025 sebesar 3,81 dari target 3,86 atau dengan capaian 98,7%. Meskipun berada diatas angka IDSD Nasional sebesar 3,5, akan tetapi angka IDSD Kabupaten Purworejo masih sedikit dibawah angka Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,87 serta tipis sekali dibawah rata-rata Kabupaten/ Kota se-Jawa tengah sebesar 3,82. Dari 12 pilar yang menghasilkan angka IDSD Kabupaten Purworejo tahun 2025 sebesar 3,81, terdapat 5 pilar yang capaiannya kurang memuaskan yaitu Pilar 8 Pasar Tenaga Kerja, Pilar 9 Sistem Keuangan, Pilar 10 Ukuran Pasar, Pilar 11 Dinamika Bisnis, serta Pilar 12 Kapabilitas Inovasi.

2. **Indeks Infrastruktur Daerah**

   Realisasi Indeks Infrastruktur Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025 adalah sebesar 47,41 dari target 50,18 atau dengan capaian 94,49%. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah:

   - Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alokasi untuk infrastruktur jalan (panjang jaringan jalan kabupaten relatif besar dibandingkan kemampuan pembiayaan tahunan; biaya preservasi dan peningkatan struktur jalan lebih besar dibandingkan pemeliharaan rutin).
   - Terbatasnya kapasitas fiskal daerah sehingga menyebabkan pembiayaan jalan relatif kecil.
   - Belum optimalnya Sistem Manajemen Jalan (Data kondisi jalan belum terbarui secara berkala; Perencanaan berbasis kebutuhan (needs-based planning) belum sepenuhnya diterapkan).
   - Minimnya pemeliharaan rutin (Fokus anggaran pada pembangunan/peningkatan, bukan preservasi; Keterlambatan pemeliharaan menyebabkan biaya rehabilitasi membengkak).
   - Faktor bencana dan perubahan iklim (Curah hujan ekstrem mempercepat kerusakan jalan; Wilayah rawan banjir dan longsor memerlukan desain khusus (biaya lebih tinggi); Siklus perbaikan menjadi lebih pendek akibat tekanan iklim).
   - Masih terbatasnya kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) (kapasitas produksi belum mampu melayani seluruh kebutuhan domestik, idle capacity rendah); tingginya nonrevenue water (NRW); preferensi masyarakat yang menganggap bahwa sumur pribadi dianggap lebih ekonomis.
   - Kurangnya penyediaan PJU dan alat perlengkapan jalan di jalan poros desa sehingga target capaian program tidak tercapai.
   - Masih adanya wilayah lemah sinyal atau bahkan blankspot sehingga layanan akses internet belum bisa maksimal, disisi lain karena faktor ekonomi, biaya berlangganan internet untuk rumah tangga yang

berpenghasilan rendah dianggap sebagai beban tambahan yang berat dibanding kebutuhan pokok.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 mengalami penurunan dari semula 3,89% menjadi 3,72%. Meskipun terus menunjukkan tren positif sejak tahun 2022, akan tetapi TPT Kabupaten Purworejo belum pernah berhasil mencapai target setiap tahunnya. Banyaknya usaha yang berhenti beroperasi menjadi salah satu penyebab jumlah lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, sehingga berdampak pada angka tingkat pengangguran terbuka. Dari sisi angkatan kerja, kurangnya keterampilan dan kompetensi pencari kerja menyebabkan angkatan kerja kurang dapat diterima oleh dunia usaha. Kurangnya tenaga instruktur yang kompeten untuk menyesuaikan pelatihan yang dibutuhkan oleh pangsa pasar saat ini perlu mendapat perhatian serius jika ingin menekan nagka tingkat pengangguran terbuka.

4. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Angka Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 terealisasi sebesar 70,24 dari target 86,25 atau dengan capaian 81,44% dengan kategori Tinggi. Capaian yang belum berhasil mencapai target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemiskinan dan keterbatasan daya beli masyarakat terhadap pangan bernutrisi, pola konsumsi tidak beragam dan tidak seimbang, distribusi pangan belum merata, serta kerentanan wilayah terhadap rawan pangan. Beberapa hal yang mestinya diupayakan adalah penguatan program ketahanan pangan dan bantuan pangan, edukasi konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, serta perlunya intervensi spesifik pada wilayah rentan rawan pangan.

5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 berada pada nilai 67,6 dari target yang ditetapkan sebesar 68,02. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi nilai tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya pada angka 65,58. Kenaikan sebesar 2,02 poin ini didominasi oleh komponen Pengukuran Kinerja yang naik sebesar 1,93 poin, dari semula 17,61 pada tahun 2024 menjadi 19,54 pada tahun 2025. Tersedianya aplikasi manajemen kinerja berupa aplikasi Sawiji sebagai dukungan terhadap penerapan SAKIP menjadi faktor pendorong capaian pada komponen Pengukuran Kinerja tersebut. Sedangkan pada 3 komponen lainnya cenderung tidak terdapat kenaikan yang signifikan, seperti pada komponen Perencanaan Kinerja yang hanya naik 0,03 poin, komponen Pelaporan Kinerja yang hanya naik 0,05 poin, dan bahkan pada komponen Evaluasi Internal tidak mengalami kenaikan sama sekali. Untuk meningkatkan nilai SAKIP pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Purworejo melaksanakan pembinaan terhadap tim SAKIP Kabupaten serta Perangkat Daerah dengan

pendampingan khusus dari Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

6. Indeks Ketahanan Nasional

Indeks Ketahanan Nasional (IKN) merupakan salah satu instrumen strategis untuk mengukur tingkat ketangguhan bangsa dalam menghadapi dinamika, tantangan, serta potensi ancaman di berbagai sektor kehidupan. IKN mencakup dimensi geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya yang secara komprehensif menggambarkan kondisi aktual suatu wilayah. Melalui pengukuran yang terstruktur, IKN dapat memberikan potret objektif mengenai sejauh mana kapasitas bangsa, khususnya pada level daerah, mampu mendukung stabilitas nasional.

Bagi pemerintah daerah, pengukuran IKN difokuskan pada aspek-aspek yang menjadi lingkup kewenangan daerah, terutama dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, serta sosial budaya. Hal ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memperkuat basis ketahanan nasional dari bawah. Sementara itu, dimensi pertahanan dan keamanan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat tidak dimasukkan dalam penghitungan, sehingga fokus pengukuran lebih diarahkan pada aspek pembangunan daerah yang nyata dan dapat dikendalikan langsung oleh pemerintah daerah. Pada Tahun 2025 Target IKN khususnya aspek Ipoleksosbud adalah 2,6 sementara capaiannya adalah 1,62

Sedangkan 9 indikator kinerja utama yang tercapai adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten

PDRB per Kapita Kabupaten Purworejo tahun 2025 berdasarkan catatan BPS sebesar 33,04 Juta Rupiah dari target sebesar 31,56 Juta Rupiah. Capaian PDRB per Kapita pada tahun 2025 tersebut masih didominasi oleh 5 sektor usaha paling dominan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan proporsi 20,23%, Industri Pengolahan 20,05%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 12,08%, Konstruksi 9,88%, dan yang terakhir Jasa Pendidikan 8,87%. Ditinjau dari jenis pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih konsisten memegang proporsi terbesar 78,25%.

2. Tingkat Kemiskinan

Tahun 2025 ini untuk pertama kali sejak beberapa tahun terakhir, realisasi tingkat kemiskinan berhasil mencapai target, yaitu pada angka 10,06% dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 9,04% - 10,22%. Turunnya tingkat kemiskinan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif pada angka 5,27% dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,84%. Optimalisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim memiliki peran penting dalam menekan angka kemiskinan. Keputusan Bupati nomor 100.3.3.2/196/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purworejo Dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purworejo menjadi

langkah nyata pemerintah dalam hal pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

3. Rasio Gini

Rasio Gini Kabupaten Purworejo pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,298 berhasil mencapai target yang ditetapkan sebesar 0,335. Angka ini menunjukkan tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan yang masuk dalam kategori rendah. Rasio Gini dihitung menggunakan dua komponen utama: proporsi kumulatif jumlah penduduk dan proporsi kumulatif pendapatan atau pengeluaran. Upaya Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sampai pelosok desa menjadi salah satu faktor utama ketimpangannya menjadi rendah.

4. Indeks Religiusitas Daerah

Indeks Religiusitas Daerah merupakan indikator yang terdiri dari 5 dimensi yaitu dimensi ideologis, ritualistik, intelektual, pengalaman, serta konsekuensional. Realisasi tahun 2025 sebesar 78,32 dari target 76,26 dipengaruhi oleh dimensi ideologis yang menggambarkan dukungan pemerintah terhadap peningkatan kepercayaan terhadap ajaran agama. Pemerintah Kabupaten Purworejo terus berupaya memperbaiki regulasi untuk menjamin dan menjaga kerukunan kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Purworejo.

5. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur 3 (tiga) dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk yaitu: umur panjang dan hidup sehat yang diukur melalui Angka Harapan Hidup, tingkat pengetahuan yang diukur melalui Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standar hidup layak yang diukur melalui Pengeluaran Per Kapita.

Naiknya angka IPM Kabupaten Purworejo tahun 2025 dibanding tahun 2024 ini didorong oleh kenaikan komponen pembentuknya. Angka Harapan Hidup naik menjadi 76,06 dari sebelumnya 75,64. Rata-rata lama sekolah naik tipis dari 8,65 pada tahun 2024 menjadi 8,74 pada tahun 2025. Begitu juga dengan Harapan lama sekolah yang naik meskipun sangat tipis, yaitu dari 13,55 pada tahun 2024 menjadi 13,58 pada tahun 2025. Sedangkan Pengeluaran Per Kapita sampai saat ini belum terdapat rilis data terbaru. Semakin naiknya angka IPM ini menunjukkan pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo semakin mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Berdasarkan rilis Kementerian Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2025 sebesar 76,05 dari target 76,04 atau dengan capaian 100,01%. Hal ini didorong oleh beberapa hal seperti meningkatnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya kewajiban pengelolaan lingkungan, meningkatnya program/kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh Pemerntah, swasta maupun masyarakat, peningkatan keberhasilan program tidak buang air besar di sungai (ODF). Disisi lain masih terdapat beberapa hambatan seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengolah air limbah yang dihasilkan, belum optimalnya

pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha/ industri, serta masih banyaknya kegiatan pembakaran sampah dan sisa hasil pertanian.

Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan beberapa upaya seperti mendorong pimpinan usaha dan/atau kegiatan untuk pemenuhan anggaran pengelolaan lingkungan, optimalisasi peralatan pengendalian penceamran lingkungan, serta penyediaan SDM yang khusus menangani pengelolaan lingkungan, penegakan sanksi dalam rangka penegakan hukum lingkungan untuk pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai ketentuan, peningkatan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam rangkapengelolaan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan, serta mendorong masyarakat untuk turut serta dalam hal pengawasan lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan di wilayahnya

7. Indeks Risiko Bencana

Menurut perhitungan BNPB, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten Purworejo pada tahun 2021 berada pada nilai 161,63. Angka IRBI ini semakin membaik hingga tahun 2024 menurun menjadi 114,09 seiring meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo. Pada tahun 2025, sesuai rilis terbaru dari BNBP Indeks Risiko Bencana Kabupaten Purworejo berada pada angka 86,45 mengalami peningkatan 24,23% dibanding tahun sebelumnya. Capaian IKD yang sangat tinggi ini dikarenakan adanya hasil kesepakatan metodologi Perhitungan Indeks Risiko Bencana (termasuk IKD) pada tanggal 25 Maret 2025 yaitu:

- Bahaya pada IRBI sekarang berjumlah 11 jenis bahaya, bertambah 2 bahaya dari IRBI sebelumnya. Penambahannya pada bahaya banjir bandang dan likuefaksi.
- Baseline data bahaya dan pada IRBI menggunakan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) tahun 2021.
- Data kerentanan menggunakan data hasil proyeksi kerentanan tahun 2025-2045.
- Data kapasitas tetap menggunakan Indeks Ketahanan Daerah 71 indikator.
- Bobot per komponen IRBI adalah bahaya 40%, kerentanan 30% dan kapasitas 30%. Komponen bahaya sifatnya statis, sedangkan kerentanan dan kapasitas sifatnya dinamis.
- Risiko bencana dirumuskan dengan 3 parameter, yakni ancaman (H), kerentanan (V) dan kapasitas (C) Dimana risiko bencana akan semakin tinggi bila ancaman dan kerentanan tinggi namun kapasitas rendah.

8. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Seiring dengan peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo juga mengalami peningkatan dari 4,84 di tahun 2024 menjadi 5,27 di tahun 2025. Angka ini tipis diatas target yang ditetapkan pada tahun 2025 yaitu pada kisaran 5,16-6,16%. Meskipun sempat mengalami kontraksi di tahun 2024, tren positif di tahun 2025 ini diharapkan dapat terus dijaga supaya dapat memberikan dampak yang lebih luas pada

kesejahteraan masyrakat. Dari sisi laju pertumbuhannya, tren positif tersebut ditopang oleh laju pertumbuhan 5 sektor usaha utama, yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,16%, Informasi dan Komunikasi 9,83%, Jasa Perusahaan 8,84%, Jasa Pendidikan 8,03%, dan Konstruksi 7,97%. Sedangkan menurut proporsinya, 5 sektor usaha paling dominan adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan proporsi 20,23%, Industri Pengolahan 20,05%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 12,08%, Konstruksi 9,88%, dan yang terakhir Jasa Pendidikan 8,87%. Ditinjau dari jenis pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih konsisten memegang proporsi terbesar 78,25%.

9. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Purworejo berada pada angka 83,87 dari target yang ditetapkan pada Perubahan RKPD tahun 2025 sebesar 83,00. Angka ini meningkat dibanding capaian tahun 2024 sebesar 82,59. Ketercapaian serta peningkatan capaian ini sejalan dengan kinerja baik pada beberapa indikator seperti Nilai SAKIP yang meningkat menjadi 67,60 dari 65,58, Indeks Pelayanan Publik meningkat menjadi 4,41 dari semula 4,33, Indeks Inovasi Daerah yang meningkat menjadi 75,45 dari 61,72, termasuk keberhasilan mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan selama 13 tahun berturut-turut.

b. INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)

Pada dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 telah ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Daerah (IKD) dengan capaian pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.143. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**						
1	Penurunan Emisi GRK	TonCO2 eq	1.710.784.090	1.721.721,00	0,10	Sangat Rendah	IUP
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,04	76,05	100,01	Sangat Tinggi	Sasaran Daerah/ IUP
3	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	110,16 - 109,00	86,45	121,52	Sangat Tinggi	Sasaran Daerah/ IUP
4	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	86,25	70,24	81,44	Tinggi	Sasaran Daerah/ IUP
5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	11,3	10,51	93,01	Sangat Tinggi	IUP
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	%	30	47,46	158,20	Sangat Tinggi	IUP
B	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**						
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	31,56	33,04	104,69	Sangat Tinggi	Tujuan Daerah/ IUP
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,22 - 9,04	10,06	101,57	Sangat Tinggi	Tujuan Daerah/ IUP
3	Rasio Gini	Angka	0,34	0,298	87,65	Tinggi	Tujuan Daerah

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4	Indeks Religiusitas Daerah	Angka	76,26	78,32	102,70	Sangat Tinggi	Tujuan Daerah
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,39	75,93	100,72	Sangat Tinggi	Sasaran Daerah
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.16 - 6.16	5,27	102,13	Sangat Tinggi	Sasaran Daerah
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,11	3,72	119,61	Sangat Tinggi	Sasaran Daerah/ IUP
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,89	76,06	100,22	Sangat Tinggi	IUP
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	5	11,00	220,00	Sangat Tinggi	IUP
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14,4	16,25	112,85	Sangat Tinggi	IUP
11	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	90	80,00	88,89	Tinggi	IUP
12	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	84	82,68	98,43	Sangat Tinggi	IUP
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,28	99,63	101,37	Sangat Tinggi	IUP
	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):						
14	Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	74,49	65,37	87,76	Tinggi	IUP
15	Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	83,71	65,37	78,09	Tinggi	IUP
16	Numerasi SD/ Sederajat	%	60,47	53,21	87,99	Tinggi	IUP
17	Numerasi SMP/ Sederajat	%	71,41	70,65	98,94	Sangat Tinggi	IUP
18	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	9,62	8,98	93,35	Sangat Tinggi	IUP
19	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,02	13,58	96,86	Sangat Tinggi	IUP
20	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,18	9,80	106,75	Sangat Tinggi	IUP
21	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	87,06	80,99	93,03	Sangat Tinggi	IUP
22	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	49,35	41,82	84,74	Tinggi	IUP
23	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	31,25	31,97	102,30	Sangat Tinggi	IUP
24	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	58,49	78.790,00	134.706,79	Sangat Tinggi	IUP
25	Persentase Kelompok Kesenian	%	53,61	87,84	163,85	Sangat Tinggi	IUP

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir						
26	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0,15	0,18	122,00	Sangat Tinggi	IUP
27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65,07	64,20	98,66	Sangat Tinggi	IUP
28	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	21,36	#N/A	#N/A	#N/A	IUP
29	Indeks Zakat Nasional	Poin Indeks	0,52	0,53	101,92	Sangat Tinggi	*Mandatory*
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**						
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,86	3,81	98,70	Sangat Tinggi	Tujuan Daerah
2	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	50,18	47,41	94,48	Sangat Tinggi	Sasaran Daerah
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,3	20,05	98,77	Sangat Tinggi	IUP
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,58	2,43	94,19	Sangat Tinggi	IUP
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	265	150	56,60	Rendah	IUP
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,47	3,22	130,36	Sangat Tinggi	IUP
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,03	2,04	100,49	Sangat Tinggi	IUP
8	Disparitas Harga	%	+/- 10	6,9	100,00	Sangat Tinggi	IUP
9	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,68	26,05	97,64	Sangat Tinggi	IUP
10	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,1	2,98	96,13	Sangat Tinggi	IUP
11	Persentase Desa Mandiri	%	25,91	10,02	38,67	Sangat Rendah	IUP
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	40,53	43,22	106,64	Sangat Tinggi	IUP
13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	83,28	77,13	92,62	Sangat Tinggi	IUP
14	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,43	68,52	100,13	Sangat Tinggi	IUP
15	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	66,53	63,41	95,31	Sangat Tinggi	IUP
16	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	39,21	38,33	97,76	Sangat Tinggi	IUP
17	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,61	4,93	106,94	Sangat Tinggi	IUP

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
18	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	34,85	34,33	98,51	Sangat Tinggi	IUP
19	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	70,99	68,92	97,08	Sangat Tinggi	IUP
20	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	5,03	5,03	100,00	Sangat Tinggi	*Mandatory*
D	**ASPEK PELAYANAN UMUM**						
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83	82,59	99,51	Sangat Tinggi	Sasaran Daerah/ IUP
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	68,02	67,6	99,38	Sangat Tinggi	Sasaran Daerah
3	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,6	1,74	66,92	Sedang	Sasaran Daerah
4	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	100,00	Sangat Tinggi	IUP
5	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,23	81,1	126,26	Sangat Tinggi	IUP
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,263 - 0,253	0,15	142,97	Sangat Tinggi	IUP
7	*Return on Asset* (ROA) BUMD	%	4,94	-1,88	-38,06	Sangat Rendah	IUP
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,73	0,67	91,78	Sangat Tinggi	IUP
9	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,33	#N/A	#N/A	#N/A	IUP
10	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,87	#N/A	#N/A	#N/A	IUP
11	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,33	#N/A	#N/A	#N/A	IUP
12	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,45	97,04	100,61	Sangat Tinggi	IUP
13	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,55	3,49	98,31	Sangat Tinggi	IUP
14	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,34	4,41	101,61	Sangat Tinggi	IUP
15	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,42	71,84	92,79	Sangat Tinggi	IUP
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)/ INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH						
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
A	**PENDIDIKAN**						
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,02	13,58	96,86	Sangat Tinggi	Tujuan PD
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,29	8,74	94,08	Sangat Tinggi	Tujuan PD
3	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	9,62	8,98	93,35	Sangat Tinggi	Tujuan PD
4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,18	9,8	106,75	Sangat Tinggi	Tujuan PD
6	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	87,06	85,5	98,21	Sangat Tinggi	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	92,63	92,08	99,41	Sangat Tinggi	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
8	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	99,09	97,7	98,60	Sangat Tinggi	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
9	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)	%	20,76	20,15	97,06	Sangat Tinggi	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
10	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	%	80,33	85,68	106,66	Sangat Tinggi	Sasaran PD
	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):						
11	a. Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	74,49	65,37	87,76	Tinggi	Sasaran PD
12	b. Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	83,71	65,37	78,09	Tinggi	Sasaran PD
13	c. Numerasi SD/ Sederajat	%	63,37	53,21	83,97	Tinggi	Sasaran PD
14	d. Numerasi SMP/ Sederajat	%	72,91	70,65	96,90	Sangat Tinggi	Sasaran PD
B	**KESEHATAN**						
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,89	76,06	100,22	Sangat Tinggi	Tujuan PD
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan	%	90	92,06	102,29	Sangat Tinggi	Tujuan PD
5	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14,4	14,9	96,53	Sangat Tinggi	Sasaran PD
6	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	70,37	100	142,11	Sangat Tinggi	Sasaran PD
7	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	%	40	33,3	83,25	Tinggi	Sasaran PD
8	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	80	80,58	100,73	Sangat Tinggi	Sasaran PD
9	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	%	78	80,26	102,90	Sangat Tinggi	Sasaran PD
10	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di Puskesmas	%	92	92,06	100,07	Sangat Tinggi	Sasaran Sub Unit PD
11	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	%	86	86,2	100,23	Sangat Tinggi	Sasaran Sub Unit PD
12	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjokronegoro	%	92	86,82	94,37	Sangat Tinggi	Sasaran Sub Unit PD
13	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	1,29	1,29	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
14	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
15	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	20,12	20,12	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
16	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	21,8	21,80	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
17	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	21,7	21,70	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
18	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	18,25	18,25	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
19	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
20	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	16,64	16,64	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
21	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	39,65	39,65	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
22	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	46,40	46,40	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
23	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	93,04	93,04	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
24	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	30,89	30,89	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
25	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	33,74	33,74	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
26	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	21,80	21,80	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
C	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
1	Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	%	59,99	60,32	100,55	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	70,99	69,48	97,87	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
3	Persentase Kinerja Penataan Ruang	%	44,7	38,04	85,10	Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
4	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	67,78	0	0,00	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	99,34	0	0,00	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	95,22	95,29	100,07	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
7	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	0	0,00	Sangat Rendah	Permendagri 18 Th 2020
8	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	66,53	63,41	95,31	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
D	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
1	Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Ditangani	%	91,76	92,6	100,92	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,43	68,62	100,28	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	92,11	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5,85	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
7	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	57,14	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
E	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
1	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Tujuan PD
2	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Tujuan PD
3	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sasaran PD
4	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,58	0,85	145,54	Sangat Tinggi	Sasaran PD
5	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Kebakaran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sasaran PD
6	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Sasaran PD
7	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
8	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
11	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
12	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	75	100	133,33	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
13	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	menit	14	8	57,14	Rendah	Permendagri 18 Th 2020
F	**SOSIAL**						

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	%	27	27,45	101,67	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	Angka	73	#N/A	#N/A	#N/A	Tujuan & Sasaran PD
3	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR						
A	**TENAGA KERJA**						
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,89	96,28	99,37	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
2	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	56,8	0	0,00	Sangat Rendah	Tujuan & Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	40,53	43,22	106,64	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,36	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	2,03	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	67,92	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
B	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,263 - 0,253	0,145	144,87	Sangat Tinggi	Tujuan PD

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,37	95,58	100,22	Sangat Tinggi	Tujuan PD
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,56	72,46	112,24	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	73,38	95,58	130,25	Sangat Tinggi	Sasaran PD
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65,07	64,2	98,66	Sangat Tinggi	Sasaran PD
6	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	13,89	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
7	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
8	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 jiwa	12,41	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
C	**PANGAN**						
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	11,3	10,51	106,99	Sangat Tinggi	Tujuan PD
2	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	90,73	90,73	100,00	Sangat Tinggi	Sasaran PD
3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	75	74,78	99,71	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
D	**PERTANAHAN**						
1	Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat dan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	30	21,23	70,77	Sedang	Tujuan & Sasaran PD
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
3	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	14,82	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
4	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
E	**LINGKUNGAN HIDUP**						
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	30	46,9	156,33	Sangat Tinggi	Tujuan PD
2	Indeks Kualitas Air	Angka	75,31	80,75	107,22	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3	Indeks Kualitas Udara	Angka	86,41	81,5	94,32	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
4	Indeks Kualitas Lahan	Angka	58,11	58,24	100,22	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
5	Persentase sampah terkelola	%	50,2	68,87	137,19	Sangat Tinggi	Sasaran PD
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,04	76,05	100,01	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
7	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	26,82	35,14	131,02	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
8	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30	32,5	108,33	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
F	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	9	10,02	111,33	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	90,1	90,11	100,01	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
3	Perekaman KTP elektronik	%	100	99,47	99,47	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
4	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
5	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
6	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	92,5	92,68	100,20	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
G	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
1	Persentase Desa Mandiri	%	25,91	10,02	38,67	Sangat Rendah	Tujuan & Sasaran PD
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,43	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
H	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,23	72,47	112,83	Sangat Tinggi	Tujuan PD
2	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Angka	13,8	31,2	-26,09	Sangat Rendah	Sasaran PD
3	*Demand Satisfied*	Angka	84,2	79,35	94,24	Sangat Tinggi	Sasaran PD
4	*Total Fertility Rate*	Angka	2,1	2,09	100,48	Sangat Tinggi	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive*	%	66,41	58,2	87,64	Tinggi	Permendagri 18 Th 2020

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Prevalence Rate/ mCPR)						
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	9,25	7,91	114,49	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
I	**PERHUBUNGAN**						
1	Rasio Konektivitas	%	76	93	122,37	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
2	Penurunan angka kecelakaan	Angka	562	612	91,10	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
3	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Angka	0,25	0,23	92,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
I	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	0	#N/A	#N/A	#N/A	Tujuan PD
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	85	85,13	100,15	Sangat Tinggi	Sasaran PD
3	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	3,25	#N/A	#N/A	#N/A	Sasaran PD
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	62	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
J	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,03	2,46	121,33	Sangat Tinggi	Tujuan PD
2	Jumlah volume usaha koperasi	Juta Rupiah	503.460	652316	129,57	Sangat Tinggi	Sasaran PD
3	Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi	%	10,03	9,45	94,22	Sangat Tinggi	Sasaran PD
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	42,6	40	93,90	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	1,79	10,22	571,01	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
K	**PENANAMAN MODAL**						
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,68	26,05	97,64	Sangat Tinggi	Tujuan PD
2	Realisasi Penanaman Modal	Miliar Rupiah	128,46	532,57	414,58	Sangat Tinggi	Sasaran PD

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	Angka	96,41	96,44	100,03	Sangat Tinggi	Sasaran PD
4	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	2	217,04	10.852,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
L	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
1	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Angka	9,11	1,91	20,97	Sangat Rendah	Tujuan & Sasaran PD
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,17	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,4	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
4	Peningkatan prestasi olahraga	%	20	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
M	**STATISTIKA**						
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	0	#N/A	#N/A	#N/A	Tujuan PD
2	Indeks Satu Data Indonesia	Angka	59,8	56,44	94,38	Sangat Tinggi	Sasaran PD
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
N	**PERSANDIAN**						
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	0	#N/A	#N/A	#N/A	Tujuan PD
2	Indeks KAMI	Angka	780	803	102,95	Sangat Tinggi	Sasaran PD
O	**KEBUDAYAAN**						
1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	31,25	31,97	102,30	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
P	**PERPUSTAKAAN**						
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	78,5	9,36	11,92	Sangat Rendah	Tujuan & Sasaran PD / Permendagri 18 Th 2020
2	Tingkat Gemar Membaca	Nilai	70,4	56,83	80,72	Tinggi	Tujuan & Sasaran PD / Permendagri 18 Th 2020
Q	**KEARSIPAN**						
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Angka	75,9	84,83	111,77	Sangat Tinggi	Tujuan PD

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	21,74	35,76	164,49	Sangat Tinggi	Sasaran PD
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	55,27	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	76,01	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
	URUSAN PILIHAN						
A	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
1	Nilai produksi perikanan tangkap	Juta Rupiah	8.059,89	9901,76	122,85	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
2	Nilai produksi perikanan budidaya	Juta Rupiah	187.095,64	186887,89	99,89	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
3	Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Juta Rupiah	2.450,04	12426	507,18	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
4	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Angka	4.371,16	4378,55	100,17	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
B	**PARIWISATA**						
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,58	2,43	94,19	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	46,55	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	24,18	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
4	Tingkat hunian akomodasi	%	21,49	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,31	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,34	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
C	**PERTANIAN**						
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	0,25	-0,76	-304,00	Sangat Rendah	Tujuan & Sasaran PD
2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,25	#N/A	#N/A	#N/A	Tujuan & Sasaran PD
3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	0,4	#N/A	#N/A	#N/A	Tujuan & Sasaran PD
4	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	1	1	100,00	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
5	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ ha	6,9	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
6	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-19	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
D	**PERDAGANGAN**						
1	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	4,02	5,18	128,86	Sangat Tinggi	Tujuan PD
2	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Miliar Rupiah	3.106,12	2176,91	70,08	Sedang	Sasaran PD
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	94,46	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
E	**PERINDUSTRIAN**						
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,3	20,05	98,77	Sangat Tinggi	Tujuan PD
2	PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Miliar Rupiah	5.136,04	5309,01	103,37	Sangat Tinggi	Sasaran PD
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	0,5	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan	%	42,61	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP						
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	75	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
F	**TRANSMIGRASI**						
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,89	96,28	99,37	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
2	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	56,8	#N/A	#N/A	#N/A	Tujuan & Sasaran PD
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	40,53	43,22	106,64	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
A	**SEKRETARIAT DAERAH**						
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	58.58.00	59,94	2.439,62	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,34	4,41	101,61	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
3	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Angka	29,63	30,32	102,33	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
4	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
5	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	86,5	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
6	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
7	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	-10	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
B	**SEKRETARIAT DPRD**						
1	Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD	Angka	80,93	#N/A	#N/A	#N/A	Tujuan & Sasaran PD
C	**PERENCANAAN**						
1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Angka	21,56	21,08	97,77	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
D	**KEUANGAN**						
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	84,2	74,55	88,54	Tinggi	Tujuan PD

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	21,7	23,04	106,18	Sangat Tinggi	Sasaran PD
4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,73	0,63	86,30	Tinggi	Sasaran PD
5	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	8,09	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
6	Rasio PAD	%	21,86	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
7	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer *expenditures*)	%	65,26	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
8	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
9	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
10	Manajemen Aset	Angka	4	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
11	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,67	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
12	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	#N/A	#N/A	#N/A	Permendagri 18 Th 2020
13	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
E	**KEPEGAWAIAN**						
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	82,25	82,25	100,00	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	61,1	64,03	104,80	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	16,86	20,81	123,43	Sangat Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	33,45	28,53	85,29	Tinggi	Permendagri 18 Th 2020
F	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	82,25	82,25	100,00	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
G	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						
1	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,11	2,98	95,82	Sangat Tinggi	Tujuan PD
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	63,1	75,45	119,57	Sangat Tinggi	Sasaran PD

No	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Skala Capaian	Ket.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	%	40	44	110,00	Sangat Tinggi	Sasaran PD
H	**INSPEKTORAT DAERAH**						
1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Angka	3,33	3,32	99,70	Sangat Tinggi	Tujuan PD/ Permendagri 18 Th 2020
2	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,16	2,27	71,84	Sedang	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks	Angka	3,17	3,098	97,73	Sangat Tinggi	Sasaran PD
4	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Angka	3,13	2,67	85,30	Tinggi	Sasaran PD
5	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,42	71,84	92,79	Sangat Tinggi	Sasaran PD
I	**KECAMATAN**						
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)						
1	Kecamatan Grabag	Angka	87,57	87,74	100,19	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
2	Kecamatan Ngombol	Angka	86,25	86,57	100,37	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
3	Kecamatan Purwodadi	Angka	92	89	96,74	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
4	Kecamatan Bagelen	Angka	90,84	85,17	93,76	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
5	Kecamatan Kaligesing	Angka	89	88,61	99,56	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
6	Kecamatan Purworejo	Angka	86	87,72	102,00	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
7	Kecamatan Banyuurip	Angka	87,85	87,81	99,95	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
8	Kecamatan Bayan	Angka	92,02	92,05	100,03	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
9	Kecamatan Kutoarjo	Angka	87,6	87,67	100,08	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
10	Kecamatan Butuh	Angka	87,75	88,74	101,13	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
11	Kecamatan Pituruh	Angka	86,9	86,91	100,01	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
12	Kecamatan Kemiri	Angka	85	82,38	96,92	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
13	Kecamatan Bruno	Angka	86,25	87,16	101,06	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
14	Kecamatan Gebang	Angka	83,65	85,19	101,84	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
15	Kecamatan Loano	Angka	85,1	85,1	100,00	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
16	Kecamatan Bener	Angka	88,4	88,45	100,06	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD
J	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						
1	Indeks Ketahanan Ipoleksosbud	Angka	2,6	1,62	62,31	Rendah	Tujuan & Sasaran PD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68,02	69,67	102,43	Sangat Tinggi	Tujuan & Sasaran PD

c. INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)

Selain indikator kinerja utama (IKU), pada RPJMD 2025-2029 juga terdapat 56 (lima puluh enam) indikator utama pembangunan yang ditargetkan pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Capaian indikator utama pembangunan pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.144. Capaian Indikator Utama Daerah (IUP) Tahun 2025

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*
1	Tingkat Kemiskinan	%	10,22 - 9,04	10,06	101,57	Sangat Tinggi	Pemda
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	11,3	10,51	106,99	Sangat Tinggi	DKPP
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	86,25	70,24	81,44	Tinggi	Pemda
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,89	76,06	100,22	Sangat Tinggi	Dinkesda
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	5	11	45,45	Sangat Rendah	Dinkesda
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14,4	16,25	88,62	Tinggi	Dinkesda
7	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	90	80	88,89	Tinggi	Dinkesda
8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	90	82,68	91,87	Sangat Tinggi	Dinkesda
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	98,28	99,63	101,37	Sangat Tinggi	Dinkesda
10	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):						
	Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	74,49	65,37	87,76	Tinggi	Dindikbud
	Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	83,71	65,37	78,09	Tinggi	Dindikbud
	Numerasi SD/ Sederajat	%	60,47	53,21	87,99	Tinggi	Dindikbud
	Numerasi SMP/ Sederajat	%	71,41	70,65	98,94	Sangat Tinggi	Dindikbud
11	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	9,62	8,98	93,35	Sangat Tinggi	Dindikbud
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,02	13,58	96,86	Sangat Tinggi	Dindikbud
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,18	9,80	106,75	Sangat Tinggi	Dindikbud
14	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	87,06	80,99	93,03	Sangat Tinggi	Dindikbud
15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	49,35	41,82	84,74	Tinggi	Dindikbud
16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	31,25	31,97	102,30	Sangat Tinggi	Dindikbud
17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	58.489	78.790	134,71	Sangat Tinggi	Dindikbud
18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%	53,61	87,84	163,85	Sangat Tinggi	Dindikbud
19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0,153	0,183	119,61	Sangat Tinggi	Dinpusip
20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	100	Sangat Tinggi	Bakesbang-pol

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*
21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,23	81,1	126,26	Sangat Tinggi	DINSOSDA LDUKKB
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,263 - 0,253	0,15	142,97	Sangat Tinggi	DPPPAPMD
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,3	20,05	98,77	Sangat Tinggi	Dinperintra nsnaker
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,58	2,43	94,19	Sangat Tinggi	Dinporapar
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	265	150	56,60	Rendah	Dinporapar
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,47	3,22	130,36	Sangat Tinggi	DKUKMP
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,03	2,04	100,49	Sangat Tinggi	DKUKMP
28	*Return on Asset* (ROA) BUMD	%	4,94	-1,88	-38,06	Sangat Rendah	Setda
29	Disparitas Harga	%	+/- 10	6,9	131	Sangat Tinggi	DKUKMP
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,68	26,05	97,64	Sangat Tinggi	DPMPTSP
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,73	0,67	91,78	Sangat Tinggi	BPKPAD
32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,33	NA	NA	NA	Setda
33	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,87	NA	NA	NA	Setda
34	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,1	2,98	95,82	Sangat Tinggi	Bapperida
35	Persentase Desa Mandiri	%	25,91	10,02	38,67	Sangat Rendah	DPPPAPMD
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,11	3,72	83,60	Tinggi	Pemda
37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65,07	64,2	98,66	Sangat Tinggi	DPPPAPMD
38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	40,53	43,22	106,64	Sangat Tinggi	Dinperintra nsnaker
39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	83,28	77,13	92,62	Sangat Tinggi	Dinkominfo
40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,43	68,52	100,13	Sangat Tinggi	Dinperkim-tan
41	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	66,53	63,41	95,31	Sangat Tinggi	DPUPR
42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	39,21	38,33	97,76	Sangat Tinggi	Dinhub
43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,61	4,93	106,94	Sangat Tinggi	DPUPR
44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	34,85	34,33	98,51	Sangat Tinggi	DPUPR
45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	70,99	68,92	97,09	Sangat Tinggi	DPUPR
46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,04	76,05	100,01	Sangat Tinggi	Pemda
47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	%	30	47,46	158,20	Sangat Tinggi	DLHP

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*9*
48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	110,16 - 109,00	86,45	127,43	Sangat Tinggi	Pemda
49	Penurunan Emisi GRK	Ton-CO2eq	1710784	1721721	99,36	Sangat Tinggi	DLHP
50	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83	82,59	99,51	Sangat Tinggi	Pemda
51	Indeks Reformasi Hukum	Angka	96,45	97,04	100,61	Sangat Tinggi	Setda
52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,55	3,49	98,31	Sangat Tinggi	Komdigi
53	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,34	4,41	101,61	Sangat Tinggi	Setda
54	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,42	71,84	92,79	Sangat Tinggi	Inspektorat Daerah
55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	31,56	33,04	104,69	Sangat Tinggi	Pemda
56	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	21,36	NA	NA	NA	-

Sumber: Bapperida, 2026, Data diolah

2.2.2. EVALUASI KINERJA UTAMA (TUJUAN DAN SASARAN) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Evaluasi kinerja pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan terdiri dari 3 indikator tujuan/ sasaran serta 9 indikator program. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.145. Capaian Kinerja Tujuan/ Sasaran dan IKU PD Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan kualitas pendidikan, peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,02	13,58	96,86	Sangat Tinggi	Dindikbud
	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,29	8,74	94,08	Sangat Tinggi	Dindikbud
	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	9,62	8,98	93,35	Sangat Tinggi	Dindikbud
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,18	9,8	106,75	Sangat Tinggi	Dindikbud
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya mutu dan aksesibilitas pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	87,06	85,5	98,21	Sangat Tinggi	Dindikbud
	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	92,63	92,08	99,41	Sangat Tinggi	Dindikbud

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	99,09	97,7	98,60	Sangat Tinggi	Dindikbud
	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)	%	20,76	20,15	97,06	Sangat Tinggi	Dindikbud
	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	%	80,33	85,68	106,66	Sangat Tinggi	Dindikbud
	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):						
	a. Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	74,49	65,37	87,76	Tinggi	Dindikbud
	b. Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	83,71	81,6	97,48	Sangat Tinggi	Dindikbud
	c. Numerasi SD/ Sederajat	%	63,37	53,21	83,97	Tinggi	Dindikbud
	d. Numerasi SMP/ Sederajat	%	72,91	70,65	96,90	Sangat Tinggi	Dindikbud
Rata-rata Capaian IKU					**96,99**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan telah terlaksana dengan sangat baik, dibuktikan dengan 11 indikator kategori capaiannya Sangat Tinggi, sedangkan 2 indikator lainnya capaiannya Tinggi.

Meskipun capaiannya tergolong bagus, akan tetapi 12 dari 13 indikator kinerja utama belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih adanya anak tidak sekolah (ATS) karena belum optimalnya intervensi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), keterbatasan akses pendidikan di beberapa wilayah, kondisi ekonomi masyarakat, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan berkelanjutan.

Beberapa hal yang dapat diupayakan adalah meningkatkan pendataan dan penanganan ATS secara terpadu, memperluas akses layanan pendidikan (formal dan nonformal), serta mengintensifkan sosialisasi dan kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan akses pendidikan dan mendorong partisipasi sekolah.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan terdiri dari 10 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.146. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,89	76,06	100,22	Sangat Tinggi	Dinkesda
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan	Angka	90	92,06	102,29	Sangat Tinggi	Dinkesda
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya Mutu dan Layanan Kesehatan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14,4	14,9	96,528	Sangat Tinggi	Dinkesda
	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	70,37	100	142,11	Sangat Tinggi	Dinkesda
	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	%	40	33,3	83,25	Tinggi	Dinkesda
	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	80	80,58	100,73	Sangat Tinggi	Dinkesda
	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	%	78	80,26	102,9	Sangat Tinggi	Dinkesda
Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjokronegoro	Angka	92	86,82	94,37	Sangat Tinggi	RSUD R.A.A TJOKRO NEGORO
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD dr. Tjitrowardojo	Angka	86,2	86,2	100	Sangat Tinggi	RSUD DR. TJITRO WARDOJO
	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di Puskesmas	Angka	92	92,06	100,07	Sangat Tinggi	Dinkesda
Rata-rata Capaian IKU					**101,87**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Secara umum capaian indikator kinerja utama urusan pemerintahan bidang kesehatan Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian pada angka 101,87%. Dari 10 IKU tersebut, 9 diantaranya terealisasi dengan kategori Sangat Tinggi, dan sisanya 1 indikator teralisasi dengan kategori Tinggi.

Sedangkan dari sisi ketercapaiannya masih terdapat 3 indikator yang belum tercapai.

Beberapa faktor pendorong capaian kinerja tersebut diantaranya:

1. Keterjangkauan akses layanan kesehatan, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.
2. Tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan Jamkesda dan PIRT pangan, sekaligus menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan Dinkesda.
3. Adanya koordinasi dan komitmen antara stakeholder, Dinkesda, Puskesmas dan OPD terkait yang tergabung dalam Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS) dari tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan dalam Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting di Kabupaten Purworejo.
4. Adanya koordinasi antara puskesmas, Dinkesda dan lintas sektor dalam meningkatkan layanan program Hipertensi dan Diabetes Mellitus, Adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
5. Tidak adanya kasus malaria *indegeneous*, optimalisasi kegiatan program TBC, serta mempertahankan *eradikasi frambusia*.
6. Pendaftaran PBPU dan BP PEMDA dengan aplikasi SIBIJAK dan kecukupan anggaran Jamkesda.
7. Adanya koordinasi yang baik antara Dinkesda dengan Fasyankes, komitmen yang baik dari Fasyankes serta pendampingan dari Dinkesda dalam kesiapan Akreditasi.

Adapun beberapa faktor penghambatnya adalah:

1. Sanitasi lingkungan yang kurang baik, masih tingginya gizi buruk/ stunting, penyakit menular dan tidak menular, kasus kematian ibu dan bayi.
2. Unsur layanan Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan mendapatkan nilai paling rendah yaitu 3,54 untuk nilai rata-rata, sehingga masih perlu ditingkatkan untuk optimalisasi layanan.
3. Intervensi penanganan stunting yang dilaksanakan belum menyasar semua kelompok sasaran, serta masih munculnya stunting baru.
4. Gaya hidup tidak sehat dan kurangnya tingkat kepatuhan pengobatan.
5. Kabupaten Purworejo belum dinyatakan eliminasi malaria, sehingga menghambat capaian angka populasi bebas penyakit menular.
6. Adanya penonaktifan PBI JK secara tiba tiba dalam rangka pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
7. Perubahan regulasi yang berdampak pada perubahan instrumen dari lembaga akreditasi.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari 3 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.147. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum, sistem irigasi, penataan ruang, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** 1) Meningkatnya kinerja infrastruktur bidang pekerjaan umum 2) Meningkatnya kinerja sistem irigasi 3) Meningkatnya kinerja penataan ruang	Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	%	59,99	60,32	100,55	Sangat Tinggi	DPUPR
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	70,99	69,48	97,873	Sangat Tinggi	DPUPR
	Persentase Kinerja Penataan Ruang	%	44,7	38,04	85,101	Tinggi	DPUPR
Rata-rata Capaian IKU					**94,51**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara umum telah terlaksana dengan baik. Dari 3 indikator kinerja tersebut diatas, 2 indikator tujuan/ sasaran kategori capaiannya adalah Sangat Tinggi, serta terdapat 1 indikator yang capaiannya Tinggi yaitu pada indikator Persentase Kinerja Penataan Ruang. Faktor-faktor yang mendorong tercapainya kinerja urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum diantaranya:

1. Dukungan pendanaan yang memadai untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur, kebijakan yang mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur bidang pekerjaan umum, serta koordinasi dan sinergi antar instansi dalam mendukung rencana pembangunan daerah.
2. Manajemen Operasi dan Pemeliharaan (OP) yang optimal, kelembagaan petani (P3A/GP3A/IP3A) yang aktif, ketersediaan anggaran yang memadai, ketersediaan sumber air yang stabil, sistem informasi dan data irigasi yang baik, serta koordinasi antar instansi yang efektif.
3. Komitmen dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rencana tata ruang dalam pembangunan, penerapan perizinan berbasis tata ruang (KKPR), ketersediaan dokumen tata ruang sebagai dasar hukum (RTRW dan RDTR), serta kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mematuhi aturan tata ruang.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah ketidaksesuaian rencana pembangunan yang diajukan dengan dokumen tata ruang cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu diperlukan peningkatan upaya sosialisasi kepada masyarakat maupun penyediaan informasi tata ruang yang lebih jelas dan mudah diakses sehingga ketidaksesuaian rencana pembangunan yang diajukan dapat diminimalisir.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman terdiri dari 2 indikator tujuan/ sasaran, dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.148. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani, tertib administrasi pertanahan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** 1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman 2) Meningkatnya luasan kawasan kumuh perkotaan yang ditangani	Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Ditangani	%	91,76	92,6	100,92	Sangat Tinggi	Dinper kimtan
	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,43	68,62	100,28	Sangat Tinggi	Dinper kimtan
Rata-rata Capaian IKU					**100,60**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman telah terlaksana dengan sangat baik. Kedua indikator kinerja utama dapat tercapai dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian bagus ini tak lepas dari hasil koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak terkait, terutama dengan Pokja PKP untuk penanganan kawasan kumuh perkotaan.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.149. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penanganan kebakaran dan non kebakaran, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** i. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat i. Meningkatnya kualitas Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Satpol PP Damkar
	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100	100	Sangat Tinggi	Satpol PP Damkar
Tujuan: Meningkatkan ketahanan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,584	0,85	145,54	Sangat Tinggi	BPBD
Rata-rata Capaian IKU					**115,18**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat telah terlaksana dengan sangat baik. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Ketercapaian indikator Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas didukung oleh komitmen Perangkat Daerah terhadap pencapaian tujuan, ketersediaan anggaran, adanya koordinasi lintas sektoral, serta adanya digitalisasi sebagai upaya efektifitas dalam penanganan pelanggaran perda/perkada.
2. Ketercapaian indikator Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran didukung oleh komitmen Perangkat Daerah terhadap pencapaian tujuan, ketersediaan anggaran, adanya Koordinasi lintas sektoral, atensi positif dari masyarakat terhadap Damkar, serta adanya dukungan dari Redkar dalam penanganan kebakaran.

3. Ketercapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah didukung oleh pelayanan SDM terhadap bencana yang baik, kemampuan SDM yang baik, informasi yang mudah di akses, serta adanya perubahan metodologi Perhitungan IRB.

Meskpiun kinerjanya sudah sangat baik, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM), masih banyaknya pelanggaran Perda Perkada yang terjadi, tingkat kepatuhan PKL dan pengamen terhadap aturan masih rendah, belum semua masyarakat memperoleh sosialisasi Perda Perkada, penindakan tidak efektif, masyarakat yang tidak paham menganggap satpol sewenang-wenang, serta penindakan belum membuat efek jera.
2. Jumlah Pos Damkar yang belum menjangkau seluruh wilayah, luasnya tugas dan fungsi, khususnya sub urusan penyelamatan, keterbatasan sarana dan prasarana Pemadaman Kebakaran, belum adanya *command center* Pemadam Kebakaran, pengaturan jam kerja yang belum sesuai dengan Anjab dan ABK.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Sosial terdiri dari 2 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.150. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Tujuan: Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** i. Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) i. Meningkatnya pelayanan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	%	27	27,45	101,67	Sangat Tinggi	Dinsos daldukkb
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	Angka	73	#N/A	#N/A	#N/A	Dinsos daldukkb
Rata-rata Capaian IKU					**101,67**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan) belum dilakukan survey serta perhitungan pada tahun 2025, sehingga datanya tidak dapat disajikan. Sedangkan pada indikator

Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani, kinerjanya sudah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini didorong oleh beberapa hal, yaitu:

1. Keberlanjutan Program Nasional dan Daerah: Penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang terjadwal secara reguler memberikan kontribusi signifikan terhadap jumlah intervensi.
2. Optimalisasi Rehabilitasi Sosial Luar Panti: Adanya peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi sosial bagi individu dan kelompok masyarakat melalui skema non-panti yang lebih fleksibel.
3. Validitas Data Publikasi: Tersedianya data PPKS dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun (N-1) sebagai acuan pembanding yang jelas (denominator) dalam penghitungan indikator.

Adapun faktor penghambatnya adalag sebagai berikut:

1. Kendala Penyaluran Bansos LKS/LKSA: Bantuan operasional bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) belum dapat direalisasikan karena adanya proses penyesuaian persyaratan administrasi dan validasi kelembagaan yang memerlukan waktu lebih lama di awal tahun anggaran.
2. Ketergantungan Komponen Intervensi: Mengingat definisi operasional indikator mencakup bantuan sosial APBD dan sumber dana lainnya, tertundanya pencairan dua instrumen besar ini (DBHCHT dan LKS) secara langsung mengurangi jumlah penyebut (numerator) dalam perhitungan persentase PPKS yang tertangani pada periode Januari-Maret.

Untuk mengatasi kendala tersebut, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

1. Pendampingan Administrasi LKS/LKSA: Memberikan asistensi teknis kepada pengurus LKS/LKSA dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan pelaporan, sehingga hambatan birokrasi yang menunda pencairan bantuan dapat segera teratasi.
2. Optimalisasi Penanganan Non-Bansos: Mengintensifkan layanan rehabilitasi sosial dasar dan penanganan PPKS melalui respon cepat (TRC) yang tidak bergantung sepenuhnya pada pencairan bantuan tunai/hibah, guna menjaga tren kenaikan angka PPKS yang tertangani.

2.2.3. EVALUASI KINERJA UTAMA (TUJUAN DAN SASARAN) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja terdiri dari 3 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.151. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya akses dan produktivitas kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	%	96,89	96,28	99,37	Sangat Tinggi	Dinperin transnaker
	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	56,8	57,25	100,79	Sangat Tinggi	Dinperin transnaker
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	40,53	43,22	106,64	Sangat Tinggi	Dinperin transnaker
Rata-rata Capaian IKU					**102,27**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Capaian kinerja utama urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja sudah sangat baik, dengan 3 indikator semuanya masuk kategori Sangat Tinggi, meskipun masih terdapat satu indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu Tingkat Kesempatan Kerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Pertumbuhan Angkatan Kerja Baru yang Masif. Pertumbuhan Angkatan Kerja Baru tidak sebanding dengan penciptaan lapangan Pekerjaan, sehingga Angka pengangguran tetap tinggi.
2. Kesenjangan Antara Keahlian dan Kebutuhan Pasar (*Skill Mismatch*). Pada lulusan pendidikan formal tidak memiliki kompetensi yang tidak selaras dengan kebutuhan industri.
3. Lemahnya Dunia Usaha dan Dunia Industri. Dengan kondisi perekonomian yang kurang mendukung kemudian berdampak pada perusahaan tidak membuka lowongan pekerjaan bahkan banyak Pemutusan Hubungan Kerja sehingga muncul Pengangguran baru serta Banyak usaha yang berhenti beroperasi.
4. Kurangnya Efektivitas Informasi Pasar Kerja. Sistem informasi pasar kerja (seperti bursa kerja online atau job fair) belum bisa menjangkau pelosok desa secara optimal, sehingga mereka tetap terdata sebagai pengangguran.
5. Adanya Regulasi dan Kebijakan Pusat. Adanya perubahan kebijakan di tingkat pusat, seperti kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang signifikan atau perubahan regulasi ketenagakerjaan, membuat perusahaan melakukan efisiensi dengan cara membatasi rekrutmen atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

   Untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan beberapa upaya, diantaranya dengan *Job canvasing*, mengarahkan pekerja untuk mengikuti program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), peningkatan kompetensi pekerja, sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, perlu adanya penambahan

kompetensi instruktuk di UPT BLK, serta mengarahkan untuk pekerja informal agar mengikuti BPJS TK program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kerja.

Selain faktor penghambat, terdapat juga beberapa faktor yang menjadi pendorong kinerja, yaitu:

1. Terlaksananya kegiatan penempatan tenaga kerja, terlaksananya kegiatan Pelayanan Antar Kerja, BLK membuat MOU ke perusahaan atau pemberi kerja untuk magang bekerja setelah di latih oleh BLK.
2. Terlaksananya pelatihan produktivitas bagi perusahaan kecil, pelatihan vokasi bagi pencari kerja, serta konsultasi produktivitas bagi perusahaan.
3. Peningkatan dialog bipartit mendorong komunikasi yang sehat antara pengusaha dengan pekerja untuk mencegah demonstrasi dan mogok kerja yang dapat menghentikan aktivitas ekonomi.
4. Penguatan K3 di perusahaan dengan memastikan lingkungan kerja aman dan sehat guna meningkatkan konsentrasi dan produktivitas.
5. Adanya pembinaan Hubungan Industrial dan syarat kerja.
6. Terlaksananya kegiatan pembinaan secara berkesinambungan kepada perusahaan.
7. Terlaksananya kegiatan sosialisasi program jaminan sosial tenaga kerja.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 6 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.152. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, kemandirian desa, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,263 - 0,253	0,145	144,87	Sangat Tinggi	DPPPAPMD
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,37	95,58	100,22	Sangat Tinggi	DPPPAPMD
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,56	72,46	112,24	Sangat Tinggi	DPPPAPMD
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	64,56	72,46	112,24	Sangat Tinggi	DPPPAPMD
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	73,38	95,58	130,25	Sangat Tinggi	DPPPAPMD
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65,07	64,2	98,663	Sangat Tinggi	DPPPAPMD
Rata-rata Capaian IKU					**116,41**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pangan terdiri dari 2 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.153. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	11,3	10,51	106,99	Sangat Tinggi	DKPP
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	90,73	90,73	100,00	Sangat Tinggi	DKPP
Rata-rata Capaian IKU					**103,50**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Capaian indikator kineja utama urusan pemerintahan bidang pangan sangat baik, dengan 2 indikator semuanya tercapai sesuai target yang ditetapkan. Capaian tersebut didorong oleh ketersediaan pangan yang cukup dan merata, adanya program bantuan sosial pangan, diversifikasi konsumsi pangan berbasis lokal, edukasi gizi masyarakat, serta pemanfaatan pekarangan melalui program P2L/KRPL. Selain itu, juga masih terdapat faktor penghambat kinerja seperti kemiskinan dan keterbatasan daya beli masyarakat, pola konsumsi tidak beragam dan tidak seimbang, distribusi pangan belum merata, kerentanan wilayah terhadap rawan pangan, serta minimnya pengolahan dan pemanfaatan pangan lokal non-beras. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa upaya yang dilakukan adalah penguatan program ketahanan pangan dan bantuan pangan, edukasi konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, serta intervensi spesifik pada wilayah rentan rawan pangan.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanahan terdiri dari 1 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.154. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar permukiman, luas kawasan kumuh perkotaan yang ditangani, tertib administrasi pertanahan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat dan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	%	30	21,23	70,77	Sedang	Dinperkimtan
Rata-rata Capaian IKU					**70,77**	**Sedang**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Bidang Lingkungan Hidup terdiri dari 5 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.155. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	30	46,9	156,33	Sangat Tinggi	DLHP
	Indeks Kualitas Air	Angka	75,31	80,75	107,22	Sangat Tinggi	DLHP
	Indeks Kualitas Udara	Angka	86,41	81,5	94,318	Sangat Tinggi	DLHP
	Indeks Kualitas Lahan	Angka	58,11	58,24	100,22	Sangat Tinggi	DLHP
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	75,31	80,75	107,22	Sangat Tinggi	DLHP
	Indeks Kualitas Udara	Angka	86,41	81,5	94,318	Sangat Tinggi	DLHP
	Indeks Kualitas Lahan	Angka	58,11	58,24	100,22	Sangat Tinggi	DLHP
Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase sampah terkelola	%	50,2	68,87	137,19	Sangat Tinggi	DLHP
Rata-rata Capaian IKU					**112,13**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Kinerja urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup pada tahun 2025 sangat baik, dengan rata-rata capaian IKU sebesar 112,13%. Indikator

Indeks Kualitas Udara perlu mendapatkan perhatian karena merupakan satu-satunya indikator yang tidak tercapai meskipun menyandang predikat capaian Sangat Tinggi. Masih banyaknya kegiatan pembakaran sampah dan sisa hasil pertanian menjadi salah satu penyebabnya, disamping juga terdapat faktor pendorong berupa meningkatnya program/kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan diantaranya meningkatkan advokasi dan sinergi dengan DKPP terkait upaya sosialisasi pengelolaan sisa hasil pertanian, advokasi dan sinergi dengan DPPPAPMD terkait upaya sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga, serta mendorong optimalisasi program penghijauan dan konservasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 2 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.156. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	9	10,02	111,33	Sangat Tinggi	Dindukcapil
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	90,1	90,11	100,01	Sangat Tinggi	Dindukcapil
Rata-rata Capaian IKU					**105,67**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Kedua indikator kinerja utama urusan pemerintahan bidang admindukcapil pada tahun 2025 tercapai sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini disorong oleh beberapa hal, yaitu:

1. Dukungan kebijakan dan regulasi dari pusat memberikan arah, target, dan dorongan kuat bagi percepatan implementasi IKD di daerah.
2. Kualitas dan kesiapan SDM yang terlatih dan responsif mempercepat proses pelayanan serta aktivasi IKD kepada masyarakat.
3. Infrastruktur teknologi yang memadai seperti jaringan internet dan perangkat pendukung menjamin kelancaran penggunaan aplikasi IKD.
4. Sosialisasi dan edukasi yang efektif meningkatkan pemahaman serta minat masyarakat untuk mengaktifkan IKD.
5. Inovasi pelayanan seperti jemput bola dan pelayanan keliling mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan cepat.

6. Alur pelayanan yang sederhana, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
7. Petugas yang profesional, ramah, responsif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam melayani.
8. Pelayanan yang cepat dan tepat waktu sesuai standar pelayanan.
9. Adanya sistem pengaduan yang mudah diakses, responsif, dan solutif.

Meskipun telah berhasil mencapai target, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yaitu:

1. Rendahnya literasi digital masyarakat tentang manfaat dari IKD, terutama apabila sudah memiliki dokumen fisiknya.
2. Koneksi internet yang belum merata/stabil, khususnya di wilayah pedesaan atau terpencil.
3. Kurangnya sosialisasi dan edukasi, sehingga kesadaran masyarakat untuk aktivasi IKD masih rendah.
4. Kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi, sehingga enggan beralih ke digital.
5. Masih adanya ketergantungan pada dokumen fisik (KTP-el) dalam berbagai layanan publik.
6. Belum terintegrasinya IKD secara menyeluruh dengan layanan instansi lain, sehingga manfaatnya belum terasa maksimal.
7. Fasilitas pelayanan yang belum memadai, seperti ruang tunggu, kursi yang kurang disaat pemohon banyak.
8. Belum optimalnya digitalisasi layanan dapat memperlambat proses dan mengurangi kemudahan akses bagi masyarakat.

Hambatan-hambatan tersebut diatasi dengan beberapa upaya, yaitu:

1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi langsung, media sosial, dan pendampingan saat pelayanan secara kontinyu.
2. Meningkatkan sosialisasi melalui berbagai kanal (desa, sekolah, instansi, dan media lokal).
3. Memberikan pemahaman terkait keamanan sistem IKD dan jaminan perlindungan data pribadi.
4. Memperkuat koordinasi dan integrasi sistem dengan lembaga/instansi terkait.
5. Melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas pelayanan (ruang tunggu, tempat duduk, AC, display informasi).
6. Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan lingkungan pelayanan.
7. Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial dan elektronik.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 1 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.157. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, kemandirian desa, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	%	25,91	10,02	38,67	Sangat Rendah	DPPPAPMD
Rata-rata Capaian IKU					**38,67**	**Sangat Rendah**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 4 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.158. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan kualitas keluarga, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pelayanan taman makam pahlawan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,23	72,47	112,83	Sangat Tinggi	Dinsosdaldukkb
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya kualitas pengendalian penduduk	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Angka	13,8	31,2	-26,09	Sangat Rendah	Dinsosdaldukkb
	Demand Satisfied	Angka	84,2	79,35	94,24	Sangat Tinggi	Dinsosdaldukkb
	Total Fertility Rate	Angka	2,1	2,09	100,48	Sangat Tinggi	Dinsosdaldukkb
Rata-rata Capaian IKU					**84,52**	**Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Dari keempat indikator kinerja tersebut diatas, indikator tujuan Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) mencapai hasil yang sangat bagus dengan persentase 112,83%. Hal ini didorong beberapa hal, yaitu:

1. Efektivitas Program Ketahanan Keluarga: Keberhasilan sosialisasi dan edukasi melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga

Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam memperkuat fungsi keluarga.
2. Sinergi Lintas Sektor: Adanya kolaborasi yang kuat dalam intervensi dimensi kemandirian ekonomi keluarga melalui pelatihan kewirausahaan dan akses permodalan bagi keluarga pra-sejahtera.
3. Validitas Data SIGA: Optimalisasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang dikelola oleh BKKBN sehingga proses pendataan keluarga dilakukan secara akurat, yang kemudian berimplikasi pada nilai indeks yang representatif.

Sedangkan 1 indikator yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah indikator sasaran Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) yang capaiannya jauh dibawah target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu:
1. Tingginya Angka *Unmet Need*: Masih adanya Pasangan Usia Subur yang ingin menunda anak tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi (*unmet need*), yang secara langsung berkontribusi pada risiko kehamilan tidak direncanakan.
2. Mitos dan Efek Samping Kontrasepsi: Masih kuatnya hambatan psikologis dan pengaruh mitos di masyarakat terkait efek samping penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP).
3. Faktor Perilaku dan Akses: Kurangnya kedisiplinan dalam penggunaan kontrasepsi jangka pendek (seperti pil atau suntik) serta terbatasnya akses layanan kontrasepsi di wilayah-wilayah terpencil pada awal tahun anggaran.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah:
1. Akselerasi Pelayanan KB MKJP: Meningkatkan intensitas pelayanan KB gratis, terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (IUD, Implan, MOW, MOP), yang memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi dalam mencegah KTD.
2. Penguatan KIE Berbasis Kelompok: Melakukan edukasi yang lebih masif melalui kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Balita (BKB) tentang perencanaan keluarga yang matang.
3. Validasi Data PUS secara Real-time: Melakukan penyisiran kembali data PUS melalui aplikasi SIGA untuk mengidentifikasi PUS "ingin tunda anak" dan memberikan pendampingan khusus agar segera menggunakan kontrasepsi.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perhubungan terdiri dari 2 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.159. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Rasio Konektivitas	%	76	93	122,37	Sangat Tinggi	Dinhub
Sasaran: Meningkatnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Penurunan angka kecelakaan	Angka	562	612	91,103	Sangat Tinggi	Dinhub
Rata-rata Capaian IKU					**106,74**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Dari kedua indikator kinerja utama diatas, satu indikator dapat mencapai target, sedangkan satu lainnya belum mencapai target. Indikator Rasio Konektivitas dapat mencapai target karena didorong oleh pembaharuan fasilitas pendukung untuk menggunakan angkutan umum seperti pengaspalan terminal kongsi sehingga membuat penumpang lebih nyaman.

Sedangkan pada indikator Penurunan Angka Kecelakaan terlihat angka kecelakaan pada tahun 2025 masih cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berkendara yang baik, serta cuaca yang tidak kondusif yang menyebabkan beberapa jalan berlubang sehingga mengakibatkan kecelakaan. Beberapa hal yang dilakukan untuk meminimalisasi kecelakaan adalah memperbaiki dan melengkapi alat perlengkapan jalan di lokasi rawan kecelakaan, serta melaksanakan sosialisasi dalam berkendara yang baik dan benar.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari 3 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.160. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Mewujudkan digitalisasi tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Pemerintah Digital	Angka	0	#N/A	#N/A	#N/A	Dinkominfo stasandi
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kematangan digital pemerintahan	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	85	85,13	100,15	Sangat Tinggi	Dinkominfo stasandi

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	3,25	#N/A	#N/A	#N/A	Dinkominfo stasandi
Rata-rata Capaian IKU					**100,15**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Dari 3 indikator kinerja utama tersebut diatas, 2 indikator diantaranya merupakan indikator baru yang merupakan transformasi dari indeks SPBE. Indikator tersebut baru akan merilis data pada tahun 2026. Sedangkan satu indikator lain yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik berhasil terealisasi dengan capaian 100,15%. Mudahnya akses informasi, kepatuhan regulasi, serta transparansi pengelolaan anggaran badan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Purworejo menjadi faktor pendorong capaian tersebut.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terdiri dari 3 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.161. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi terhadap perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,03	2,4631	121,33	Sangat Tinggi	DKUKMP
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya volume usaha koperasi	Jumlah volume usaha koperasi	Juta Rupiah	503460	652316	129,57	Sangat Tinggi	DKUKMP
Meningkatnya kemitraan UMKM dan koperasi	Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi	%	10,03	9,45	94,217	Sangat Tinggi	DKUKMP
Rata-rata Capaian IKU					**116,61**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Secara umum, capaian kinerja urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah pada tahun 2025 sangat baik, dengan semua indikator capaiannya Sangat Tinggi. Capaian pada indikator Rasio

Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB didorong oleh peningkatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, yaitu semakin baiknya tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, dan profesional, serta meningkatnya jumlah koperasi aktif yang menjalankan kegiatan usaha secara produktif. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kendala, diantaranya adalah terbatasnya modal usaha koperasi serta kapasitas SDM pengurus dan pengelola yang belum optimal. Beberapa upaya yang diperlukan yaitu terus melakukan penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, yaitu mendorong penerapan tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*), pembinaan koperasi agar melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin, penataan dan revitalisasi koperasi agar lebih aktif dan produktif.

Sedangkan capaian pada indikator Jumlah volume usaha koperasi didorong oleh meningkatnya partisipasi anggota, penguatan permodalan, pengelolaan koperasi yang profesional, serta dukungan pembinaan dan akses pasar bagi usaha koperasi.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal terdiri dari 3 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.162. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan peranan investasi dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,68	26,05	97,64	Sangat Tinggi	DPMPTSP
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya realisasi penanaman modal dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Realisasi Penanaman Modal	Miliar Rupiah	128,46	532,57	414,58	Sangat Tinggi	DPMPTSP
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	Angka	96,41	96,44	100,03	Sangat Tinggi	DPMPTSP
Rata-rata Capaian IKU					**177,47**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan bidang penanaman modal pada tahun 2025 sangat baik. Capaian pada indikator tujuan Pembentukan Modal Tetap Bruto didorong oleh peningkatan peranan investasi dalam perekonomian daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang didukung oleh potensi unggulan daerah, komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta adanya kebijakan dan perencanaan kinerja yang terarah. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur dan

daya saing daerah, belum optimalnya realisasi investasi pada sektor produktif, serta keterbatasan kualitas data dan pengukuran kinerja yang mendukung indikator PMTB. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan promosi dan fasilitasi investasi pada sektor prioritas, penguatan infrastruktur dan kemudahan berusaha, serta peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi guna mendorong kontribusi investasi terhadap perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Pada indikator Realisasi Penanaman Modal, capaiannya didorong oleh peningkatan realisasi investasi yang didukung oleh kemudahan perizinan melalui sistem OSS, komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta potensi unggulan daerah yang menarik minat investor. Hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur pendukung, belum optimalnya promosi investasi, serta masih adanya kendala dalam kepastian lahan dan kesiapan tenaga kerja. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan promosi investasi yang lebih terarah, penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan penyediaan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk menarik minat investor secara berkelanjutan.

Sedangkan capaian pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan) didorong oleh peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik, sarana dan prasarana yang memadai, penanganan pengaduan yang efektif, serta kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya adalah sebagian masyarakat masih belum memahami prosedur dan persyaratan layanan, terutama terkait penggunaan sistem perizinan online, kendala teknis sistem elektronik, serta masih ditemukan pemohon yang belum melengkapi persyaratan administrasi sehingga memperlambat proses pelayanan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah melakukan sosialisasi secara intensif melalui media sosial, website, dan langsung kepada masyarakat terkait prosedur dan persyaratan layanan, melaksanakan pelatihan dan pembinaan bagi petugas pelayanan agar semakin profesional, responsif, dan adaptif terhadap perubahan, menyediakan informasi yang lebih jelas, ringkas, dan mudah dipahami terkait persyaratan layanan, baik secara online maupun offline, serta mengembangkan inovasi layanan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan masyarakat.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari 1 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.163. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga, peranan pariwisata dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya daya saing pemuda dan olahraga	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Angka	9,11	1,91	20,97	Sangat Rendah	Dinporapar
Rata-rata Capaian IKU					**20,97**	**Sangat Rendah**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Statistik terdiri dari 1 indikator sasaran. Capaian indikator kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.164. Capaian Kinerja Utama (Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Pada Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Indeks Satu Data Indonesia	Angka	59,8	56,44	94,38	Sangat Tinggi	Dinkominfosta
Rata-rata Capaian IKU					**94,38**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Persandian terdiri dari 1 indikator sasaran. Capaian indikator kinerja sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.165. Capaian Kinerja Utama (Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Pada Tahun 2025

Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya layanan persandian dan keamanan informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI	Angka	780	803	102,95	Sangat Tinggi	Dinkominfosta
Rata-rata Capaian IKU					**102,95**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan terdiri dari 1 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.166. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan kualitas pendidikan, peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya peran kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	31,25	31,97	102,30	Sangat Tinggi	Dindikbud
Rata-rata Capaian IKU					**102,30**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan terdiri dari 2 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.167. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatkan budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	78,5	9,36	11,92	Sangat Rendah	Dinpusip
	Tingkat Gemar Membaca	Nilai	70,4	56,83	80,724	Tinggi	Dinpusip
Rata-rata Capaian IKU					**46,32**	**Sangat Rendah**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Rata-rata capaian indikator kinerja utama urusan pemerintahan bidang perpustakaan pada tahun 2025 masih sangat rendah, terutama pada indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Oleh karena itu diperlukan perhatian serius melalui berbagai upaya seperti meningkatkan akses perpustakaan di jenis perpustakaan umum dan khusus, meningkatkan kualitas perpustakaan dan layanan yang disediakan, melakukan kampanye dan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

literasi, mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan literasi masyarakat, seperti program baca buku, diskusi, gerakan membaca rutin minimal 15-30 menit setiap hari, dan lain-lain, pendampingan pemilihan bacaan, serta program literasi keluarga/sekolah (rencana baca mingguan, pojok baca aktif).

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kearsipan terdiri dari 2 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.168. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan budaya literasi masyarakat, tertib arsip perangkat daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Angka	75,9	84,83	111,77	Sangat Tinggi	Dinpusip
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya layanan dan akses arsip serta menjaga keberlanjutan arsip	Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	21,74	35,76	164,49	Sangat Tinggi	Dinpusip
Rata-rata Capaian IKU					**138,13**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Kinerja urusan pemerintahan bidang kearsipan pada tahun 2025 sangat bagus, dengan rata-rata capaian IKU sebesar 138,13%. Capaian ini didorong oleh beberapa hal seperti tersedianya regulasi kearsipan, tersedianya SDM kearsipan, serta tersedianya sarpras kearsipan. Meskipun telah terealisasi dengan sangat baik, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu sebagian Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip belum berpedoman pada regulasi kearsipan, arsiparis/pengelola arsip belum kompeten, serta sarana prasarana kearsipan belum dimnafaatkan sebagaimana peruntukannya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kinerja adalah pembinaan kearsipan pada Perangkat Daerah, pelaksanaan pelatihan/bimtek bagi Arsiparis/Pengelola Arsip Perangkat Daerah, serta pembinaan pemanfaat sarpras kearsipan

2.2.4. EVALUASI KINERJA UTAMA (TUJUAN DAN SASARAN) URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan terdiri dari 3 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.169. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, pengolahan sampah, nilai produksi kelautan dan perikanan, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya nilai produksi kelautan dan perikanan	Nilai produksi perikanan tangkap	Juta Rupiah	8059,9	9901,76	122,85	Sangat Tinggi	DLHP
	Nilai produksi perikanan budidaya	Juta Rupiah	187096	186888	99,889	Sangat Tinggi	DLHP
	Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Juta Rupiah	2450	12426	507,18	Sangat Tinggi	DLHP
Rata-rata Capaian IKU					**243,31**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Kinerja urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan pada tahun 2025 sangat bagus dengan rata-rata capaian sebesar 243,31%. Capaian tersebut didorong beberapa hal, diantaranya:

1. Adanya fasilitasi sarana perikanan tangkap, Peningkatan kapasitas dan kelembagaan nelayan kecil.
2. Adanya fasilitasi sarana pembudidayaan ikan, rekomendasi BBM bersubsidi, dan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya melalui pemberian obat ikan, probiotik, dan pengujian laboratorium.
3. Ketersediaan bahan baku ikan yang cukup dan berkualitas dalam usaha pengolahan dan pemasaran.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pariwisata terdiri dari 1 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.170. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga, peranan pariwisata dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya peranan pariwisata dalam perekonomian daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,58	2,43	94,19	Sangat Tinggi	Dinporapar
Rata-rata Capaian IKU					**94,19**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel tersebut diatas, kinerja urusan pemerintahan bidang pariwisata pada tahun 2025 sudah baik meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Rasio PDRB pada sektor penyediaan akomodasi

makan dan minum sangat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pariwisata di Kabupaten Purworejo. Bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan secara langsung berdampak pada peningkatan permintaan terhadap jasa akomodasi dan konsumsi makanan minuman. Selain itu, berkembangnya usaha hotel, *homestay*, restoran, serta pelaku UMKM kuliner turut memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah. Pemulihan ekonomi pasca pandemi juga menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan kinerja sektor, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan daya beli. Di samping itu, penyelenggaraan berbagai event daerah seperti festival budaya, kegiatan olahraga, dan agenda kepemudaan mampu meningkatkan tingkat hunian serta konsumsi wisatawan.

Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pariwisata menjadikan sektor akomodasi dan makan minum rentan terhadap fluktuasi, terutama ketika terjadi penurunan kunjungan wisatawan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi wisata masih menjadi kendala dalam menarik wisatawan dalam jumlah besar. Kualitas dan daya saing usaha, baik dari sisi pelayanan, standar fasilitas, maupun kapasitas sumber daya manusia, juga masih perlu ditingkatkan. Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah rendahnya lama tinggal wisatawan (*length of stay*), di mana sebagian besar wisatawan hanya melakukan kunjungan singkat tanpa menginap, sehingga berdampak pada rendahnya pengeluaran untuk sektor akomodasi dan konsumsi. Di sisi lain, promosi dan branding pariwisata serta kuliner daerah juga masih belum optimal dibandingkan daerah lain di sekitarnya.

Solusi dan tindak lanjut yang diperlukan dengan strategi komprehensif dan terintegrasi. Penguatan destinasi wisata berbasis kawasan dan desa wisata perlu dilakukan dengan mengintegrasikan potensi wisata, kuliner, dan akomodasi. Pemerintah daerah juga perlu mendorong investasi di sektor ini melalui kemudahan perizinan dan dukungan terhadap pelaku usaha lokal, khususnya UMKM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi di bidang hospitality dan kuliner menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing. Selain itu, penyelenggaraan event daerah secara rutin dan terencana dapat menjadi daya tarik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus memperpanjang lama tinggal. Strategi promosi berbasis digital dan penguatan branding daerah juga perlu ditingkatkan agar potensi Purworejo lebih dikenal secara luas. Tidak kalah penting, perbaikan infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi wisata harus terus diupayakan guna mendukung pertumbuhan sektor secara berkelanjutan.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian terdiri dari 4 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.171. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan produksi pertanian, kecukupan konsumsi pangan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya produksi pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	0,25	-0,76	-304,00	Sangat Rendah	DKPP
	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,25	-19,76	-7904	Sangat Rendah	DKPP
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	0,4	4,86	1215	Sangat Tinggi	DKPP
	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	1	1	100	Sangat Tinggi	DKPP
Rata-rata Capaian IKU					**-1723,25**	**Sangat Rendah**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Secara umum kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian pada tahun 2025 masih jauh dibawah target yang ditetapkan, khususnya pada indikator Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura. Pada kenyataanya memang terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

1. Pada indikator Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan beberapa kendala diantaranya karena perubahan iklim (banjir/kekeringan), serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), alih fungsi lahan pertanian, serta keterbatasan tenaga kerja pertanian.
2. Pada indikator Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura terdapat beberapa hambatan yaitu sifat produk mudah rusak (*perishable*), fluktuasi harga yang tinggi, keterbatasan pascapanen dan rantai dingin, serta serangan hama dan penyakit.
3. Pada indikator Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan kendalanya adalah tanaman tua dan produktivitas rendah, harga komoditas yang fluktuatif, keterbatasan akses teknologi dan pembiayaan, serta gangguan iklim dan hama penyakit.
4. Pada indikator Persentase Peningkatan Produksi Daging terdapat beberapa kendala seperti wabah penyakit hewan (PMK, LSD, dll), keterbatasan pakan terutama saat musim kemarau, skala usaha peternak kecil dan tradisional, serta fluktuasi harga pakan dan ternak.

Beberpa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Penerapan teknologi pertanian adaptif perubahan iklim, Pengendalian OPT terpadu (PHT), Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), serta Modernisasi pertanian (mekanisasi).
2. Pengembangan sistem pascapanen dan cold storage, Penguatan kelembagaan petani dan akses pasar, Diversifikasi produk olahan hortikultura, serta Peningkatan penerapan Good Agricultural Practices (GAP).

3. Percepatan program peremajaan tanaman, Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, Penguatan akses pembiayaan (KUR, kemitraan), serta Penguatan penyuluhan dan teknologi budidaya.
4. Penguatan layanan kesehatan hewan dan vaksinasi rutin, Pengembangan pakan lokal dan cadangan pakan, Peningkatan akses permodalan dan kemitraan usaha, serta Intensifikasi penyuluhan dan pendampingan peternak.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perdagangan terdiri dari 2 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.172. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan daya saing sektor perdagangan, UMKM dan peranan koperasi terhadap perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	4,02	5,18	128,86	Sangat Tinggi	DKUKMP
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Miliar Rupiah	3106,1	2176,91	70,08	Sedang	DKUKMP
Rata-rata Capaian IKU					**99,47**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perindustrian terdiri dari 2 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.173. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan akses dan produktivitas kerja, peranan sektor industri pengolahan dalam perekonomian daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,3	20,05	98,77	Sangat Tinggi	Dinperintransnaker
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya nilai tambah sektor industri pengolahan	PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Miliar Rupiah	5136	5309,01	103,37	Sangat Tinggi	Dinperintransnaker
Rata-rata Capaian IKU					**101,07**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian pada tahun 2025 sangat tinggi dengan rata-rata capaian IKU sebesar 101,07%. Hal ini didorong oleh beberapa hal seperti kemudahan dalam mengurus legalitas usaha, adanya pelatihan kemasan bagi IKM, adanya fasilitasi Pelaporan Produksi bagi IKM melalui SIINAS, serta adanya fasilitasi Promosi Produk IKM melalui pameran di Inacraf.

Sedangkan hambatan-hambatan yangdihadapi diantaranya karena Sumber Daya Manusia yang dimiliki IKM (Industri Kecil Menengah) kurang kompeten, serta akses pasar dan promosi produk IKM yang terbatas. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain perlu adanya peningkatan kompetensi melalui Bimtek dan Pelatihan, serta dukungan pemerintah dalam memfasilitasi pemasaran produk IKM melalui pameran, business matching, e-commerce dan pengembangan pasar ekspor.

2.2.5. EVALUASI KINERJA UTAMA (TUJUAN DAN SASARAN) UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH

a. Sekretariat Daerah

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah terdiri dari 3 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.174. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Sekretariat Daerah Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	58,58	59,94	102,32	Sangat Tinggi	Setda
	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,34	4,41	101,61	Sangat Tinggi	Setda

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** 1) Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat 2) Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Angka	29,63	30,32	102,33	Sangat Tinggi	Setda
Rata-rata Capaian IKU					**102,09**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama pda tahun 2025 semuanya dapat tercapai sesuai target dengan rata-rata capaian 102,09%. Capaian tersebut didorong oleh beberapa faktor yaitu:

1. Penerapan partisipasi publik, serta ketersediaan analis kebijakan yang kompeten dalam menyusun regulasi yang adaptif, harmonis, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Digitalisasi layanan menjadi faktor pendorong dimana layanan mulai beralih ke layanan digital yang mempermudah, mempercepat dan meminimalisir resiko kesalahan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi Sawiji dalam pengukuran kinerja menjadi penentu capaian nilai SAKIP komponen pengkukuran kinerja.

Meskipun telah tercapai, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, yaitu:

1. Lemahnya basis data dan bukti dalam penyusunan regulasi, minimnya pelibatan partisipasi publik yang substansial, serta kurangnya harmonisasi antaraturan yang sering kali menyebabkan kebijakan tumpang tindih dan sulit diimplementasikan di lapangan.
2. Pelayanan publik baru berfokus pada output layanan dan belum berorientasi pada pelayanan public prima yang terdiri dari aspek kebijakan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi, pengaduan, dan inovasi.
3. Aplikasi belum dapat menyajikan data evaluasi kinerja berkala secara mudah sehingga pengukuran kinerja dianggap baru berfokus pada capaian fisik dan keuangan program kegiatan belum dapat memperlihatkan pengukuran atas *outcome* kinerja yang diharapkan, sedangkan Pelaporan kinerja masih memiliki kecenderungan mengganti angaka dari laporan tahun lalu sehingga analisis ketercapaian/ketidaktercapaian anggaran kurang dalam.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah:

1. Memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam penyusunan kebijakan berbasis data, menyediakan platform konsultasi publik yang inklusif, serta melakukan evaluasi dan simplifikasi regulasi secara berkala guna

memastikan kebijakan tetap relevan, harmonis, dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Pembinaan pada aspek kebijakan yaitu pembinaan penyusunan Standar Pelayanan serta Pembinaan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan bekerja sama dengan Ombudsman.
3. Melakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaaatan aplikasi SAWIJI dalam SAKIP, pelaksanaan desk penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, serta melaksanakan koordinasi dengan KEMENTERIAN PANRB melalui Zoom.

b. Sekretariat DPRD

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD terdiri dari 1 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.175. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Sekretariat DPRD Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD	Angka	80,93	#N/A	#N/A	#N/A	Set DPRD
Rata-rata Capaian IKU					**#N/A**	**#N/A**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Indikator kinerja utama unsur pendukung urusan pemerintahan Sekreatariat DPRD pada tahun 2025 belum tersedia data realisasinya dikarenakan baru akan dilakukan pengukuran pada tahun 2026.

2.2.6. EVALUASI KINERJA UTAMA (TUJUAN DAN SASARAN) UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH

a. Perencanaan

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Perencanaan terdiri dari 2 indikator tujuan/ sasaran serta 2 indikator program. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.176. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Unsur Penunjang Perencanaan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Angka	21,56	21,08	97,774	Sangat Tinggi	Bapperida

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah							
Rata-rata Capaian IKU					**97,77**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perencanaan telah terlaksana dengan sangat baik, meskipun indikator kinerja tidak tercapai 100%. Hal ini didorong oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Keselarasan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah) dan komitmen perangkat daerah dalam menjaga sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi faktor penting yang mendorong kualitas perencanaan pembangunan daerah. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi juga semakin diperkuat melalui integrasi kinerja inovasi dalam penilaian kinerja perangkat daerah serta dukungan sistem informasi riset dan inovasi daerah yang mulai terdigitalisasi.
2. Sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, maupun lembaga pendukung riset, yang berkontribusi positif terhadap pelaksanaan fungsi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Sedangkan beberapa hambatan yang dihadapi yaitu:

1. Kapasitas Bapperida dalam mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan terbatas.
2. Kapasitas Perencana Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan masih terbatas.
3. Belum optimalnya pengendalian dalam proses penyusunan perencanaan.

b. Keuangan

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Keuangan terdiri dari 4 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.177. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Unsur Penunjang Keuangan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	84,2	74,55	88,539	Tinggi	BPKPAD
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya akuntabilitas	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi	BPKPAD

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
pengelolaan keuangan daerah							
Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	21,7	23,04	106,18	Sangat Tinggi	BPKPAD
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,73	0,63	86,301	Tinggi	BPKPAD
Rata-rata Capaian IKU					**93,02**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata kinerja tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Keuangan terealisasi dengan kategori sangat tinggi. Terdapat 2 indikator yang tercapai sesuai target dan 2 indikator lainnya belum tercapai. Faktor pendorong capaian tersebut adalah:

1. Sikap proaktif tim anggaran atau BPKPAD secara keseluruhan dalam menanggapi permintaan data internal serta permintaan data ekternal dengan tim pemeriksa BPK, penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan BPK, serta adanya komitmen kuat mulai dari pejabat tinggi untuk mempertahankan opini WTP.
2. Akselerasi penerimaan pajak daerah melalui penguatan kanal pembayaran digital, khususnya optimalisasi platform SIPPOL untuk kemudahan pelayanan PBB secara mandiri, serta koordinasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Penghasil Pendapatan untuk percepatan realisasi target"
3. Pemanfaatan sistem pelaporan pajak khusunya PBB pada SIPPOL Purworejo yang memudahkan pemantauan realisasi secara *real-time*, serta tersedianya basis data wajib pajak di Kabupaten Purworejo yang telah dimutakhirkan.

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi yaitu:

1. Volume permintaan data dukung dari pemeriksa yang cukup besar dalam tenggat waktu yang singkat.
2. Adanya kecenderungan wajib pajak untuk menunda pemenuhan kewajiban pembayaran (PBB) hingga mendekati batas waktu jatuh tempo di akhir tahun, serta ketergantungan yang masih tinggi terhadap dana transfer pusat.
3. Fluktuasi ekonomi dan konsidi geopolitik di awal tahun 2026 yang mempengaruhi daya beli dan tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada diantaranya:

1. Melakukan pendampingan intensif berkaitan dengan peremintaan data baik dari internal ataupaun eksternal selama proses pemeriksaan BPK

berlangsung, serta melakukan percepatan tindak lanjut temuan pemeriksaan dini serta sinkronisasi progres pemenuhan rekomendasi antar unit kerja terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. Adanya kebijakan pemberian insentif pajak daerah di awal tahun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melakukan sosialisasi dan edukasi pajak daerah secara masif kepada masyarakat, serta mengembangkan inovasi layanan jemput bola untuk memudahkan pembayaran PAD di masyarakat.
3. Meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan lapangan terhadap kepatuhan pelaporan pajak daerah, serta melakukan analisis keterkaitan antara pertumbuhan sektor ekonomi tertentu dengan kontribusi pajak.

c. Kepegawaian

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian terdiri dari 1 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.178. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Unsur Penunjang Kepegawaian Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan profesionalitas ASN serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	82,25	82,25	100	Sangat Tinggi	BKPSDM
Rata-rata Capaian IKU					**100,00**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU urusan pemerintahan bidang kepegawaian pada tahun 2025 dapat tercapai 100%. Hal ini didorong oleh keikutsertaan ASN dalam pelatihan teknis, manajerial, atau sosio-kultural minimal 20 jam pelajaran per tahun, serta finalisasi penilaian kinerja pegawai di sistem My ASN secara tepat waktu yang menjadi penentu Indeks Profesionalitas ASN. Hambatan yang dihadapi adalah masih rendahnya digitalisasi data mandiri (MyASN): Kedisiplinan ASN dalam memperbarui data pribadi dan mengunggah bukti dukung (sertifikat, ijazah) secara mandiri di aplikasi MyASN atau portal layanan kepegawaian daerah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan transparansi skor IP ASN : Menampilkan nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN secara terbuka agar setiap pegawai termotivasi untuk menaikkan skor dimensinya, terutama pada aspek kompetensi.

d. Penelitian dan Pengembangan

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 3 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.179. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Penelitian dan Pengembangan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, kapabilitas inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,11	2,98	95,82	Sangat Tinggi	Bapperida
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Angka	63,1	75,45	119,57	Sangat Tinggi	Bapperida
Meningkatnya kualitas serta kemanfaatan riset dan inovasi	Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	%	40	44	110	Sangat Tinggi	Bapperida
Rata-rata Capaian IKU					**105,30**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Kinerja urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan pada tahun 2025 sangat baik dengan rata-rata capaian 105,3% meskipun masih terdapat 1 indikator yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan. Upaya pemerintah untuk mengkonsolidasi dan mendorong kapabiltas inovasi melalui kegiatan di bidang Riset dan Inovasi menjadi faktor pendorong capaian tersebut disamping kendala-kendala yang ada seperti keterbatasan kompetensi SDM, serta kondisi perekonomian masyarat untuk berusaha masih terbatas (daya beli turun). Untuk meminimalisasi kendala, Pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk mengkosolidasi dan mendorong kapabiltas inovasi.

Sedangkan capaian indeks inovasi daerah didorong dengan adanya regulasi integrasi inovasi dengan penilaian kinerja perangkat daerah, disamping masih adanya kendala berupa kapasitas inovasi di perangkat daerah yang terbatas, serta keterbatasan pola penjaringan inovasi masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan bimtek inovasi perangkat daerah, serta terus membangun jejaring penjaringan inovasi masyarakat.

2.2.7. EVALUASI KINERJA UTAMA (TUJUAN DAN SASARAN) UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

a. Inspektorat Daerah

Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Inspektorat Daerah terdiri dari 5 indikator tujuan/ sasaran. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.180. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Inspektorat Daerah Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan							
Meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Angka	3,33	3,32	99,7	Sangat Tinggi	Inpektorat
Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran							
Meningkatnya kualitas pengawasan	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3,16	2,27	71,835	Sedang	Inpektorat
	Nilai Manajemen Risiko Indeks	Angka	3,17	3,098	97,729	Sangat Tinggi	Inpektorat
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Angka	3,13	2,67	85,304	Tinggi	Inpektorat
	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,42	71,84	92,793	Sangat Tinggi	Inpektorat
Rata-rata Capaian IKU					**93,31**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Kinerja unsur pengawasan urusan pemerintahan pada tahun 2025 masih belum berhasil memenuhi target yang ditetapkan meskipun meraih capaian rata-rata 93,31% dengan kategori Sangat Tinggi. Pada IKU tujuan Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah capaian tersebut didorong oleh ketersediaan Kebijakan yang jelas dalam penyelenggaraan SPIP, pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah terkait SPIP, serta komitmen Pimpinan dalam menyelenggarakan SPIP dalam semua lini. Beberapa hambatan yang menyebabkan kinerja tidak tercapai adalah masih dijumpainya Perangkat Daerah yang indikator kinerjanya belum SMART-C, implementasi Manajemen Risiko belum menyeluruh, serta penyelenggaraan pengendalian risiko belum seluruhnya memadai. Beberapa alternatif solusi untuk mendongkrak kinerja tersebut diantaranya adalah:

1. Melakukan review dan penyempurnaan indikator kinerja seluruh Perangkat Daerah agar memenuhi kriteria SMART-C.
2. Merekomendasikan agar Bupati menyusun pedoman teknis penyusunan indikator kinerja yang seragam di seluruh Perangkat Daerah.
3. Mengusulkan perubahan kebijakan/Perkada tentang Manajemen Risiko.
4. Memastikan Perangkat Daerah telah menyusun Manajemen Risiko.
5. Melakukan pendampingan (coaching clinic) implementasi manajemen risiko oleh Inspektorat.
6. Melakukan monitoring/Evaluasi berkala atas implementasi manajemen risiko.
7. Melakukan pemantauan pelaksanaan rencana tindak pengendalian (RTP) atas risiko-risiko utama.
8. Memberikan reward and punishment atas kepatuhan pengendalian.

Dari sisi IKU sasaran, indikator Nilai Kapabilitas APIP perlu mendapatkan perhatian serius untuk meningkatkan capaian dikarenakan capaian saat ini yang hanya pada kategori Sedang, tanpa mengesampingkan

indikator-indikator sasaran yang lain. Beberapa faktor pendorong kinerja IKU sasaran diantaranya adalah:

1. Struktur dan proses pengawasan sudah terbentuk, Perencanaan pengawasan sudah berbasis risiko, Sistem dan perangkat/tools pengawasan sudah tersedia, Mekanisme pengendalian mutu sudah berjalan, Kompetensi SDM sudah secara rutin dikembangkan, Fungsi konsultansi sudah berjalan, serta Budaya integritas dan sistem pengaduan sudah ada.
2. Kebijakan menajemen risiko telah diterapkan, Peningkatan Kapabilitas Unit Pengelola risiko telah dilakukan, serta Rencana Tindak Pengendalian telah disusun.
3. Kebijakan antikorupsi sudah kuat secara normatif, Implementasi antikorupsi kebijakan sudah menjangkau seluruh OPD, SOP antikorupsi sudah mulai dibangun, Program edukasi dan sosialisasi sudah berjalan, Budaya integritas sudah mulai terbentuk, Iklim etis organisasi sudah cukup baik, Audit investigatif sudah berjalan, Tindak lanjut hasil pemeriksaan sudah dilakukan, serta Dukungan anggaran dan SDM sudah tersedia (meski belum merata).
4. Sistem dan upaya pencegahan sudah baik, Transparansi sudah kuat, Pengadaan barang/jasa relatif baik, Sosialisasi antikorupsi sudah masif, serta Iklim integritas mulai terbentuk.

Sedangkan beberapa faktor penghambat kinerja IKU sasaran diantaranya adalah:

1. Pengawasan masih dominan compliance-based (administratif), Kualitas hasil pengawasan belum memberi nilai tambah, Peran APIP belum strategis (belum jadi trusted advisor), Pemanfaatan hasil pengawasan oleh pimpinan belum optimal, Manajemen kinerja APIP masih berbasis output, Pemantauan tindak lanjut belum efektif, Perencanaan SDM belum berbasis kebutuhan strategis, serta Pemanfaatan IT belum optimal dalam mendukung kinerja pengawasan.
2. Manajemen risiko belum dilaksanakan/diimplementasikan secara optimal, Proses pemantauan belum dilakukan berkala dan masih bersifat insidental, serta Belum semua Rencana Tindak Pengendalian dinilai efektifitasnya dalam menurunkan risiko.
3. Regulasi dan kebijakan belum komprehensif, SOP antikorupsi belum terintegrasi dan belum konsisten, Evaluasi efektivitas belum dilakukan, Kesenjangan antara komitmen dan implementasi, Budaya etika belum merata, Audit investigatif sudah dilakukan, tetapi belum ada database/rekapitulasi lengkap, Informasi kasus belum terdokumentasi dengan baik, Tindak lanjut sudah ada, tetapi belum terdokumentasi sebagai perbaikan sistem pengendalian, Manajemen risiko korupsi/FRA (Fraud Risk Assessment) belum mencakup seluruh OPD, serta Pemanfaatan WBS belum optimal.
4. Risiko gratifikasi dan suap masih ada, Risiko Penyalahgunaan wewenang & konflik kepentingan masih ada, Risiko tinggi pada pengelolaan anggaran, PBJ masih berpotensi disalahgunakan, Manajemen SDM belum objektif, serta Sistem pengaduan belum optimal.

Beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Transformasi pengawasan dari *compliance-based* ke *risk & value-based,* Peningkatan kualitas hasil pengawasan dari temuan administratif ke rekomendasi yang strategis (*root cause* & TKMRPI), Penguatan peran APIP agar bisa mengupayakan perubahan dari *watchdog* menjadi *trusted advisor*, serta Peningkatan Penggunaan IT untuk mendukung kinerja.
2. Mengupayakan Integrasio manajemen risiko ke dalam perencanaan (Renstra/Renja) dan penganggaran, Pendampingan (*coaching clinic*) oleh Inspektorat, Menetapkan penanggung jawab risiko (risk owner) di tiap OPD, Melaksanakan mekanisme monitoring berkala (triwulan/semester), serta Menyusun perbaikan RTP jika tidak efektif (continuous improvement).
3. Penyusun pedoman komprehensif risiko korupsi (pihak ketiga, deteksi proaktif, anti penyuapan), Harmonisasi SOP antikorupsi seluruh OPD dan Pengembangan SOP terintegrasi (cegah–deteksi–respons), Penguatan evaluasi dan pengukuran, Pembangunan database/rekapitulasi kasus terintegrasi, Gunakan hasil audit untuk analisis tren dan pencegahan, Merekomendasikan OPD mengalokasikan anggaran khusus antikorupsi (Cegah–Deteksi–Respons), serta Optimalisasi WBS dengan mendorong pemanfaatan internal WBS dan lakukan evaluasi efektivitas & tingkat kepercayaan pelapor.

Pengendalian gratifikasi & konflik kepentingan, Penguatan pengawasan anggaran (prioritas utama), Perbaikan tata kelola PBJ, Reformasi manajemen SDM, Optimalisasi sistem pengaduan (WBS), Penguatan transparansi layanan, serta Penguatan pengawasan berbasis risiko

2.2.8. EVALUASI KINERJA UTAMA (TUJUAN DAN SASARAN) UNSUR KEWILAYAHAN

a. Kecamatan

Kabupaten Purworejo terdiri dari 16 Kecamatan yang tersebar dengan berbagai macam karakteristik kewilayahan. Tolok ukur kinerja utama penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Kecamatan terdiri dari 1 indikator tujuan/ sasaran. Rata-rata capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran pada 16 Kecamatan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.181. Capaian Kinerja Utama (Tujuan/ Sasaran) Kecamatan Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)	Angka	90,1	87,74	97,381	Sangat Tinggi	Kecamatan Grabag
			90,1	86,57	96,082	Sangat Tinggi	Kecamatan Ngombol
			90,1	89	98,779	Sangat Tinggi	Kecamatan Purwodadi
			90,1	85,17	94,528	Sangat Tinggi	Kecamatan Bagelen

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			90,1	88,61	98,346	Sangat Tinggi	Kecamatan Kaligesing
			90,1	87,72	97,358	Sangat Tinggi	Kecamatan Purworejo
			90,1	87,81	97,458	Sangat Tinggi	Kecamatan Banyuurip
			90,1	92,05	102,16	Sangat Tinggi	Kecamatan Bayan
			90,1	87,67	97,303	Sangat Tinggi	Kecamatan Kutoarjo
			90,1	88,74	98,491	Sangat Tinggi	Kecamatan Butuh
			90,1	86,91	96,459	Sangat Tinggi	Kecamatan Pituruh
			90,1	82,38	91,432	Sangat Tinggi	Kecamatan Kemiri
			90,1	86,42	95,916	Sangat Tinggi	Kecamatan Bruno
			90,1	85,19	94,55	Sangat Tinggi	Kecamatan Gebang
			90,1	85,1	94,451	Sangat Tinggi	Kecamatan Loano
			90,1	88,41	98,124	Sangat Tinggi	Kecamatan Bener
Rata-rata Capaian IKU					**96,80**	**Sangat Tinggi**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Indikator kinerja utama pada Kecamatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah). Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Kecamatan capaiannya Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 96,80%. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Penguatan standar pelayanan dan penyederhanaan prosedur, sehingga masyarakat memperoleh kepastian persyaratan dan alur layanan.
2. Peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur, melalui pembinaan internal, pengawasan melekat, serta evaluasi kinerja rutin.
3. Optimalisasi transparansi informasi pelayanan, termasuk penyediaan informasi terbuka mengenai persyaratan dan estimasi waktu layanan.
4. Tindak lanjut hasil SKM tahun sebelumnya, yang digunakan sebagai dasar perbaikan layanan.
5. Komitmen pimpinan dan pegawai dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan desa.
6. Adanya Forum konsultasi publik sebagai sarana dialog partisipasif antara penyelenggara pemerintahan/ penyedia layanan dengan masyarakat pengguna layanan.

Meskipun capaian kinerjanya sudah sangat tinggi, kenyataannya bahwa hanya 1 dari 16 Kecamatan yang pada tahun 2025 berhasil mencapai target yang ditetapkan, 15 Kecamatan lainnya realisasinya dibawah target yang ditetapkan. Beberapa hal menjadi hambatan dlaam pelaksanaan kinerja adalah:

a. Perilaku petugas pelayanan yang belum sepenuhnya profesional sehingga berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
b. Volume pelayanan yang fluktuatif, terutama pada periode tertentu, sehingga mempengaruhi konsistensi waktu penyelesaian.
c. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, termasuk kapasitas ruang tunggu dan fasilitas pendukung.
d. Variasi persepsi masyarakat terhadap perilaku pelaksana, yang memerlukan konsistensi pembinaan agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
e. Keterbatasan SDM pelayanan serta pemanfaatan teknologi belum maksimal.
f. Kurangnya sosialisasi layanan.
g. Waktu pelayanan yang belum konsisten.
h. Banyaknya perubahan kebijakan ditengah tahun pelaksanaan anggaran.

Beberapa upaya untuk meminimalisasi kendala yang ada supaya kinerja dapat maksimal adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme petugas melalui pembinaan, pelatihan pelayanan prima, serta penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala.
2. Optimalisasi dan standardisasi waktu layanan melalui penguatan monitoring SOP dan pengendalian internal.
3. Penyederhanaan sistem dan mekanisme pelayanan, termasuk pengurangan tahapan yang tidak esensial.
4. Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, guna menjaga konsistensi perilaku profesional dan responsif.
5. Penataan dan peningkatan fasilitas pelayanan secara bertahap, sesuai kemampuan anggaran.
6. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi sederhana, seperti media informasi digital atau kanal pengaduan untuk mempercepat respons layanan.
7. Memaksimalkan koordinasi, kolaborasi dan partisipasi antar para seksi
8. Diupayakan adanya kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan kepada masyarakat.

2.2.9. EVALUASI PEMERINTAHAN UMUM

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tolok ukur kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari 3 indikator tujuan/ sasaran serta 5 indikator program. Capaian indikator kinerja tujuan/ sasaran tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.182. Capaian Kinerja Tujuan/ Sasaran dan IKU PD Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Tahun 2025

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Tujuan: Meningkatkan stabilitas wilayah	Indeks Ketahanan Ipoleksosbud	Angka	2,6	1,62	62,31	Rendah	Bakesbangpol

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Capaian Tahun 2025	Kategori Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
di bidang Ipoleksosbud dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah **Sasaran:** Meningkatnya stabilitas wilayah di bidang Ipoleksosbud							
Rata-rata Capaian IKU					**62,31**	**Rendah**	

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026 data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja tujuan dan sasaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2025 kurang memuaskan dengan capaian IKU sebesar 62,31% dengan kategori Rendah. Hal ini disebabkan karena kurang optimalnya koordinasi lintas sektor dan pemenuhan kelengkapan data dukung pengukuran indikator. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian serius untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor serta meningkatkan kualitas pengumpulan dan validitas data indikator.

2.2.10. EVALUASI KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Hasil Capaian Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IP SPM) di Kabupaten Purworejo secara keseluruhan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.183. Indeks Pencapaian SPM pada masing-masing Bidang di Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	IP Penerima Layanan Dasar	IP Mutu Minimal layanan Dasar	TOTAL IP	Kategori Indeks SPM
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Bidang Urusan Pendidikan	80	20	100	Tuntas paripurna
2	Bidang Urusan Kesehatan	80	20	100	Tuntas paripurna
3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	80	20	100	Tuntas paripurna
4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	80	20	100	Tuntas paripurna
5	Bidang Urusan Trantibumlinmas	80	20	100	Tuntas paripurna
6	Bidang Urusan Sosial	80	20	100	Tuntas paripurna
	Total IP Kabupaten Purworejo	**80**	**20**	**100**	**Tuntas paripurna**

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda, 2026, Data diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2025, semua bidang urusan dapat mencapai kategori tuntas paripurna, atau dengan nilai 100. Adapun capaian indikator masing-masing bidang urusan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.184. Capian Indikator SPM Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 - 2025

No	Indikator	Realisasi			Bidang Urusan
		2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**				Pendidikan
	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	98,93%	100%	90,2%	
2	**Pendidikan Dasar**				
	a. Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	87,75%	100%	99,46%	
	b. Rata-rata kemampuan literasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD)	82,10	65,62	69.49	
	c. Rata-rata kemampuan numerasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD)	63,5	49,14	57.57	
	d. Rata-rata kemampuan literasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP)	1	79,18	81.51	
	e. Rata-rata kemampuan numerasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP)	1	68,77	69.91	
3	**Pendidikan Kesetaraan**				
	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	88,13%	100%	16,66%	
4-15	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	Kesehatan
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	
	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	
	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	
	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	
	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	
	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	
	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	
	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	
	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	
	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	
	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan Tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	
16	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	Pekerjaan Umum
17	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	
18	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	Perumahan Rakyat
19	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	
20	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Trantibum-linmas
21	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	

No	Indikator	Realisasi			Bidang Urusan
		2023	2024	2025	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
22	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	
23	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	
25-28	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	Sosial
	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	
	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	
	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%	100%	
29	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	100%	100%	

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda, 2026, Data diolah

2.2.11. EVALUASI KINERJA INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau juga dapat disebut sebagai *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda global PBB tahun 2015-2030 yang telah disepakati bersama 193 negara termasuk Indonesia. Secara keseluruhan, TPB mencakup 4 aspek, 17 tujuan, dan 169 target yang secara umum diselenggarakan guna mengakhiri kemiskinan dan kesenjangan dengan tetap menjaga lingkungan hidup demi kemakmuran bersama.

Kabupaten Purworejo turut mengawal pelaksanaan indikator-indikator dalam SDGs tingkat kabupaten sebagai bagian dari Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Indikator SDGs yang diturunkan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 43 indikator yang terbagi menjadi 20 indikator pada Pilar Sosial, 9 indikator pada Pilar Ekonomi, 6 indikator pada Pilar Lingkungan, dan 8 indikator pada Pilar Tata Kelola, dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 2.185. Target dan Realisasi Indikator SDGs Kabupaten Purworejo Tahun 2025

No	Kode	Indikator SDGs Kab/Kota	Sumber Data	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	6	7
1	1.2.1*	Tingkat Kemiskinan (Proxy)	BPS	10,22 - 9,04	10,06
2	1.4.1*	Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar	BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat		
		a) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum		90,94	98,94
		b) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi dasar		96,28	95,94
		c) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan fasilitas kesehatan dasar		84,89	86,15
3	1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang	Susenas KOR, Sensus	90,61	92,19

No	Kode	Indikator SDGs Kab/Kota	Sumber Data	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	6	7
		didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan (Rumah milik sendiri)	Penduduk, SDKI – BPS		
4	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	BPS	11.30	10,51
5	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	KEMENKES	14.40	8,13 (pendek = 13,42; sangat pendek = 2,84)
6	2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	KEMENKES	5.00	2,115 (kurus = 4,1; sangat kurus = 0,13)
7	3.1.1*	Jumlah kasus kematian Ibu	DINKES	5.00	11.00
8	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya:	BPS		
		a) Ditolong tenaga kesehatan		100.00	100.00
		b) Di fasilitas kesehatan		100.00	100.00
9	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	DINKES	0.01	0.02
10	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan:	DINKES		
		a) Jumlah kasus kronis filariasis (*Proxy*)		0	0
		b) Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk (*Proxy*)		62.00	0,124 (10/800167*10000)
11	3.6.1.*	Kematian akibat kecelakaan lalu lintas	KEPOLISIAN	0	102
12	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Sistem Monitoring Terpadu DJSN	98,56	99,63
13	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun	BPS	28,24	28,82
14	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	KEMENKES	4,55	3,96
17	4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS		
		a) Remaja		99,31	100.00
		b) Dewasa		87,19	89.69
18	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas	BPS		
		a) Rasio APM Perempuan/Laki SD/sederajat		98,36	1.04
		b) Rasio APM Kuintil terbawah/teratas SD/sederajat		98,94	NA
		c) Rasio APK Perempuan/Laki SMP/sederajat		100,18	1.21
		d) Rasio APK Kuintil terbawah/teratas SMP/sederajat		77,51	NA
19	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	99,83	96.57
20	5.b.1*	Proporsi individu yang pernah menggunakan telepon genggam (usia>5 th) dalam 3 bulan terakhir	BPS (Susenas Kor)	81,39	83.61
21	6.1.1*	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum Kabupaten Purworejo yaitu Air Kemasan Bermerek, Air Isi Ulang, Ledeng	BPS (Susenas Kor), Dinkes, PDAM	19,18	22.73

No	Kode	Indikator SDGs Kab/Kota	Sumber Data	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	6	7
22	6.2.1*	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (*Proxy*)	BPS		
		a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak		92,08	86.92
		b) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		84,89	NA
		c) Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka		15,84	8.22
23	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita	BPS	4,41	4,40
24	8.1.1.[a]	PDRB per kapita	BPS	20.493.900	33.040.000
25	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	BPS	4,86	5,44
26	9.c.1	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	BPS	81,79	77,13
27	10.1.1.(b)	Tingkat Kemiskinan (Proxy)	BPS	10,22 - 9,04	10,06
28	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS	90,61	91.32
29	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD		
		a) Jumlah korban meninggal per 100.000 orang		0	0,62
		b) Jumlah korban hilang per 100.000 orang		0	0
		c) Jumlah korban luka per 100.000 orang		0	1,62
		d) Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang		0	417,25
30	12.5.1.(a)	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (*Proxy*)	DLHK	15.887,97	56.267,89
31	13.2.2.[a]	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	BAPPENAS	1.710.784.090	1.721.721,23
32	16.6.1.(a)	Persentase Instansi Pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	BPK	100	100
33	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah kab/kota dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B	Inspektorat	100	100
34	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah kab/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B	Inspektorat	100	100
35	16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik	Ombudsman	1	1
36	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab/Kota	Setwan	22,5	24,44
37	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	BPS	99,89	100
38	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah	BPS	98,97	99.84
39	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS	99,40	99.81
40	10.1.1.(b)	Tingkat Kemiskinan (*Proxy*)	BPS	10,22 - 9,04	10.06
41	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BPS & Kemenkeu	3,79	8.52
42	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB	IUP RPJPD	0,95	0,59
43	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	Kemenkeu dan Kemendagri	4,82	N/A

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026, data diolah

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Beberapa permasalahan yang terkait dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah diantaranya adalah:

1. Meskipun capaian IKU Tujuan Daerah sudah Sangat Tinggi dengan rata-rata capaian 103,74%, akan tetapi kurang selaras dengan capaian IKU Sasaran Daerah yang hanya sebesar 85,12%, sehingga berdampak pada total rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang belum mencapai angka 100%, yaitu sebesar 94,43%.
2. Terdapat 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang perlu mendapatkan perhatian dikarenakan realisasi pada tahun 2025 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan. Indikator tersebut adalah Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Infrastruktur Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Indeks Ketahanan Nasional.
3. Khusus IKU Sasaran Indeks Ketahanan Nasional perlu mendapatkan perhatian lebih dikarenakan pada tahun 2025 hanya terealisasi sebesar 1,74 dari target 2,6 atau dengan capaian hanya 66,92% dengan skala Sedang.
4. Indeks Ketahanan Ipoleksosbud capaiannya pada tahun 2025 masih Rendah dengan realisasi sebesar 1,62 dari target sebesar 2,6 atau dengan capaian hanya 62,31%.
5. Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)pada tahun 2025 masih sangat tinggi yaitu pada angka 31,2 dari target 13,8 atau dengan capaian -26,09% dengan kategori Sangat Rendah.
6. Persentase Desa Mandiri pada tahun 2025 masih Sangat Rendah yaitu pada angka 10,02% dari target sebesar 25,91% atau dengan capaian hanya 38,67%.
7. Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan capaiannya pada tahun 2025 Sangat Rendah dikarenakan mengalami penurunan produksi sebesar -0,76% dari target yang ditetapkan sebesar 0,25%.
8. Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura pada tahun 2025 capaiannya juga Sangat Rendah dikarenakan mengalami penurunan produksi sebesar -19,76% dari target yang ditetapkan sebesar 0,25%.
9. Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan capaiannya pada tahun 2025 Sangat Rendah yaitu sebesar 1,91 dari target 9,11 atau dengan capaian 20,97%.
10. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat capaiannya pada tahun 2025 Sangat Rendah dengan hanya terealisasi sebesar 9,36 dari target 78,5 atau dengan capaian 11,92%.
11. Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat dan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum capaiannya pada tahun 2025 kurang memuaskan karena hanya teralisasi 21,23% dari target 30% atau dengan capaian 70,77% dengan kategori Sedang.
12. PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) pada tahun 2025 berdasarkan catatan BPS hanya terealisasi sebesar 2176,91 Miliar Rupiah dari target sebesar 3106,12 Miliar Rupiah atau dengan capaian 70,08% dengan kategori Sedang.
13. Nilai Kapabilitas APIP pada tahun 2025 hanya terealisasi sebesar 2,27 dari target 3,16 atau 71,84% dengan kategori Sedang.

2.3.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Permasalahan dan tantangan utama pendidikan di Kabupaten Purworejo diantaranya:

1. Rata-rata lama sekolah masyarakat masih belum mencapai target yang diharapkan, sehingga menunjukkan belum optimalnya keberlanjutan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.
2. Peningkatan harapan lama sekolah cenderung melambat, yang mengindikasikan belum kuatnya dorongan bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan lebih lama.
3. Kualitas pembelajaran dasar masih belum merata, terutama dalam kemampuan numerasi yang relatif lebih lemah dibandingkan literasi.
4. Proporsi penduduk yang menempuh pendidikan tinggi masih rendah, sehingga berpotensi membatasi peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
5. Partisipasi pendidikan belum merata pada seluruh kelompok usia, khususnya pada pendidikan anak usia dini, jenjang menengah pertama, dan pendidikan kesetaraan.
6. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan, yang menunjukkan adanya risiko putus sekolah terutama pada jenjang menengah.
7. Minat masyarakat terhadap pendidikan kesetaraan masih rendah, sehingga akses pendidikan bagi kelompok putus sekolah belum optimal.
8. Ketersediaan tenaga pendidik untuk muatan lokal masih terbatas, sehingga penguatan pendidikan berbasis budaya daerah belum berjalan secara maksimal.
9. Pemerataan mutu pendidikan antar satuan pendidikan masih menjadi tantangan, meskipun secara umum kualitas pendidikan menunjukkan peningkatan.
10. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat masih memengaruhi akses dan keberlanjutan pendidikan, sehingga diperlukan intervensi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan utama pendidikan di Kabupaten Purworejo tidak hanya terletak pada peningkatan akses, tetapi juga pada kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari penguatan pendidikan dasar, pencegahan putus sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, hingga perluasan akses pendidikan tinggi dan kesetaraan.

b. Kesehatan

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Angka Harapan Hidup belum optimal, yang menunjukkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih berjalan lambat.
2. Tingginya kasus kematian ibu dan bayi mencerminkan masih adanya kelemahan dalam kualitas dan akses layanan kesehatan ibu dan anak.
3. Permasalahan gizi pada balita dan ibu hamil masih menjadi tantangan, yang berdampak pada kualitas kesehatan generasi mendatang.
4. Kasus stunting masih menunjukkan bahwa pemenuhan gizi, pola asuh, dan kondisi lingkungan belum sepenuhnya baik.
5. Kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta sanitasi yang layak masih rendah.
6. Sistem kesehatan masih menghadapi beban ganda penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular, yang belum tertangani secara optimal.
7. Pengendalian penyakit menular belum maksimal, terutama dalam hal deteksi dini, pengobatan, dan kepatuhan pasien.
8. Peningkatan kasus penyakit tidak menular menunjukkan masih rendahnya penerapan pola hidup sehat di masyarakat.
9. Kepesertaan jaminan kesehatan belum sepenuhnya efektif karena masih banyak peserta yang tidak aktif.
10. Kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masih belum merata, sehingga belum semua masyarakat mendapatkan layanan yang optimal.
11. Kapasitas fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas, masih perlu diperkuat dalam memenuhi standar pelayanan.
12. Upaya promotif dan preventif kesehatan belum berjalan optimal dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju hidup sehat.

Secara keseluruhan, tantangan utama sektor kesehatan di Kabupaten Purworejo terletak pada peningkatan kualitas layanan, penguatan upaya promotif dan preventif, serta perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup sehat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Kurang terpeliharanya jalan dan jembatan serta pengendalian terhadap kendaraan bermuatan sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kemantapan jalan;
b. Sistem drainase perkotaan belum berfungsi optimal karena penanganan masih bersifat parsial/belum dilakukan secara tuntas dari hulu ke hilir;
c. Kurangnya keandalan air pada sumber air/bangunan pengambilan sehingga kinerja layanan irigasi belum optimal;

d. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap air minum aman dan jaringan perpipaan;
e. Kinerja pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah belum optimal sehingga menyebabkan rendahnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman;
f. Masih belum optimalnya penanganan bangunan gedung milik negara;
g. Kurangnya pelatihan tenaga trampil konstruksi serta pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sehingga menyebabkan penyelenggaraan jasa konstruksi kurang optimal;
h. Masih belum optimalnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang akibat ketidaksesuaian kondisi eksisting dengan rencana tata ruang;
i. Belum optimalnya capaian penyusunan RDTR disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat multidimensional, baik dari aspek kelembagaan, teknis, maupun pendanaan

Secara umum, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilaksanakan melalui pendekatan sistemik, terintegrasi, dan berbasis kinerja, dengan menitikberatkan pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas infrastruktur, serta optimalisasi kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Dalam aspek jalan dan jembatan, diperlukan penguatan sistem preservasi melalui penerapan manajemen aset jalan berbasis kondisi yang didukung dengan peningkatan alokasi anggaran pemeliharaan rutin dan berkala. Selain itu, pengendalian kendaraan over dimension over loading (ODOL) harus ditegakkan secara konsisten melalui integrasi kebijakan lintas sektor, serta penegakan hukum yang lebih efektif guna menjaga umur layanan infrastruktur.

Pada sektor drainase perkotaan, solusi diarahkan pada pembangunan sistem drainase yang terintegrasi dari hulu ke hilir berbasis pendekatan kawasan (*catchment area management*). Hal ini mencakup normalisasi saluran, serta penguatan green infrastructure untuk meningkatkan catchment area. Perencanaan dan implementasi harus berbasis masterplan drainase perkotaan yang komprehensif serta didukung dengan sinergi antar perangkat daerah. Dalam pengelolaan sumber daya air dan irigasi, diperlukan peningkatan keandalan sumber air melalui rehabilitasi dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan pengambilan serta jaringan irigasi. Pendekatan manajemen irigasi partisipatif perlu diperkuat dengan melibatkan peran aktif P3A/GP3A/IP3A, sekaligus didukung dengan sistem operasi dan pemeliharaan yang berbasis data dan teknologi.

Pada sektor air minum, percepatan peningkatan akses terhadap air minum aman dilakukan melalui pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) perpipaan secara bertahap dan berkelanjutan, khususnya di kawasan perkotaan dan permukiman padat. Strategi ini harus diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara, pengurangan tingkat kehilangan air (NRW), serta diversifikasi sumber air baku yang berkelanjutan. Sementara itu, dalam pengelolaan air limbah, diperlukan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat (SPALD-T) maupun SPALD-S secara terpadu. Intervensi difokuskan pada

pembangunan infrastruktur, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan regulasi dan pembiayaan, sehingga dapat meningkatkan akses terhadap sanitasi yang layak dan aman. Optimalisasi IPLT Jetis, pembinaan/pelatihan kepada KPP/KSM sanitasi, dan pembangunan jamban sehat individu merupakan strategi untuk mempercepat Program Pembangunan Sanitasi Permukiman.

Pada aspek bangunan gedung negara, solusi diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan melalui penerapan standar teknis bangunan, serta pemanfaatan teknologi konstruksi yang ramah lingkungan, efisien dan berkelanjutan. Dalam sektor jasa konstruksi, peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi dilakukan melalui program pelatihan, sertifikasi kompetensi, serta penguatan sistem pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas hasil pembangunan infrastruktur. Terakhir, dalam penyelenggaraan penataan ruang, diperlukan penguatan konsistensi antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang melalui pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih ketat, penegakan hukum, serta integrasi sistem informasi geospasial. Perlu adanya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja penataan ruang secara keseluruhan.

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapatnya masyarakat yang tinggal di lokasi rawan bencana;
b. Masih terbatas dan kurang memadainya penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan bagi masyarakat;
c. Makin meningkatnya luasan kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
d. Belum optimalnya pengelolaan rusunawa;
e. Masih tingginya rumah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan dan keamanan (RTLH)
f. Kurangnya kesadaran PHBS masyarakat, rendahnya kepatuhan terhadap tata ruang, serta minimnya partisipasi dalam pengelolaan lingkungan permukiman sehingga memunculkan kawasan kumuh baru;
g. Masih tingginya angka backlog perumahan maupun hunian;

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, dilakukan beberapa upaya, antara lain melalukan identifikasi kawasan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana; mengidentifikasi lahan milik pemda yang sesuai untuk relokasi bencana sekaligus melakukan pembangunan rumah terdampak bencana jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Terkait optimalisasi penyediaan PSU perumahan; penyediaan PSU harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dan proyeksi pertumbuhan kawasan, sehingga tidak bersifat parsial atau reaktif. Selain itu, diperlukan penyusunan masterplan PSU yang terintegrasi antar sektor, seperti jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, dan ruang terbuka hijau, guna memastikan keterpaduan antar infrastruktur. Dari sisi regulasi dan

pengendalian, perlu dilakukan penegakan ketentuan terhadap pengembang perumahan agar memenuhi kewajiban penyediaan PSU sesuai ketentuan.

Pemerintah daerah harus memperkuat mekanisme perizinan, pengawasan, serta serah terima PSU dari pengembang kepada pemerintah secara tepat waktu dan sesuai spesifikasi teknis. Optimalisasi instrumen regulasi ini juga harus diiringi dengan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggaran serta insentif bagi pengembang yang patuh. Dalam aspek pembiayaan, diperlukan diversifikasi sumber pendanaan melalui skema pembiayaan alternatif, pemanfaatan dana CSR. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan alokasi APBD secara lebih prioritatif dan berbasis kinerja, khususnya untuk pemenuhan PSU pada kawasan perumahan MBR dan kawasan kumuh. Dari sisi partisipasi masyarakat, perlu didorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan PSU. Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki, tetapi juga menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur yang telah dibangun. Sedangkan terkait kawasan kumuh, perlunya kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang melibatkan partisisipasi masyarakat; pemberdayaan masyarakat melalui penguatan peran KSM; penyediaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data dan pencegahan munculnya kawasan kumuh baru melalui pengawasan pembangunan.

Terkait pengelolaan rusunawa, perlu adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana rusunawa melalui pemeliharaan rutin dan berkala. Penguatan sistem penghunian perlu dilakukan melalui verifikasi dan validasi data penghuni secara berkala guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Selain itu perlu adanya pembekalan bagi pengelola rusunawa terkait kompetensi teknis dan manajerial melalui pelatihan berkelanjutan, termasuk dalam hal pengelolaan aset, pelayanan publik, dan pemeliharaan infrastruktur hunian vertikal. Permasalahan terkait tingginya RTLH bisa mulai diurai dengan mengidentifikasi calon penerima RTLH berbasis DTSEN; dan melaksanakan pembangunan RTLH sesuai dengan standar teknis.

e. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

1. Satpol PP dan Damkar

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya:

a. Terdapat potensi pelanggaran perda/perkada dan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di daerah perbatasan Provinsi maupun perbatasan antar Kabupaten/ Kota;
b. Masih rendahnya kepedulian masyarakat dan kurangnya koordinasi maupun kerjasama dengan instansi terkait;
c. Masih kurangnya jumlah dan kemampuan anggota Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
d. Masih kurangnya sarana dan prasarana sehingga kinerja aparat Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kurang optimal;

e. Masih kurangnya peran serta masyarakat dan kepedulian instansi pemerintah maupun swasta terhadap potensi bahaya kebakaran dan upaya penanggulangan kebakaran;
f. Belum terpenuhinya target minimal cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, dilakukan beberapa upaya, antara lain dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (pelatihan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan kesejahteraan aparat Satpol PP & Damkar); penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (seperti sistem informasi manajemen, aplikasi mobile, dan kamera pengawas, agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi Satpol PP& Damkar); kolaborasi lintas sektoral dan kerjasama dengan instansi lain, seperti kepolisian, dinas terkait, dan masyarakat, untuk meningkatkan sinergi dalam penanganan masalah dan penegakan hukum; serta Perluasan Pelayanan di wilayah-wilayah baru yang belum terjangkau, terutama di daerah-daerah yang rawan kebakaran.

2. BPBD

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan antara lain:

a. Ketersediaan tenaga fungsional teknis kebencanaan masih belum memadai dan kualitas serta kompetensi SDM belum merata, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi dan penanganan darurat.
b. Alokasi anggaran rutin dan tidak terduga belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan program penanggulangan bencana secara menyeluruh, dan ketergantungan pada bantuan provinsi/pusat untuk respons bencana besar menimbulkan kendala dalam penanganan cepat.
c. Minimnya sarana prasarana seperti gudang logistik, peralatan evakuasi, dan sistem peringatan dini, sementara fasilitas pendukung operasional masih belum tersebar merata di wilayah-wilayah rawan
d. Belum optimalnya sinergi antar perangkat daerah serta antara pemerintah daerah dengan stakeholder lainnya (TNI/POLRI, relawan dunia usaha dan prosedur tetap pembagian peran belum sepenuhnya dipahami dalam kondisi darurat
e. Keterbatasan Data dan Informasi Risiko Bencana, Sistem informasi belum terintegrasi secara real-time antar unit terkait dan data spasial dan pemetaan risiko masih minim dan tidak diperbarui secara berkala
f. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana belum merata, program edukasi kebencanaan belum menjangkau seluruh lapisan komunitas
g. Keterbatasan dalam pemanfaatan aplikasi dan platform digital untuk deteksi dini dan respons cepat serta minimnya integrasi sistem informasi dengan pusat data nasional dan regional

Permasalahan dan hambatan tersebut perlu ditangani secara terpadu melalui kebijakan yang adaptif, peningkatan kapasitas kelembagaan, dukungan anggaran yang memadai, serta kolaborasi lintas sektor. Perlu adanya penguatan tata kelola berbasis risiko agar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah lebih tanggap, efektif dan berdaya tahan.

f. Sosial

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal, dan sebagian warga rentan belum memperoleh dukungan sosial yang memadai.
2. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten Purworejo masih belum maksimal, sehingga strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin belum mampu mendorong kemandirian ekonomi

Kabupaten Purworejo masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengeluaran per kapita yang relatif rendah dan angka kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup sebagian penduduk belum optimal. Penanganan terhadap masyarakat rentan, termasuk PPKS, juga belum sepenuhnya efektif, dan potensi lokal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat belum dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, strategi peningkatan kesejahteraan perlu difokuskan pada upaya perlindungan sosial yang lebih efektif dan pemberdayaan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan lebih baik.

2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Berdasarkan kondisi dan capaian pembangunan bidang ketenagakerjaan Kabupaten Purworejo, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam periode pembangunan mendatang. Meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja dan kesempatan kerja menunjukkan tren yang relatif baik, tantangan masih dihadapi pada aspek kualitas tenaga kerja, produktivitas, penciptaan lapangan kerja formal, serta perlindungan sosial tenaga kerja. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, dan memperkuat perlindungan bagi seluruh pekerja.

1. Terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja.
2. Masih terjadinya ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Rendahnya produktivitas tenaga kerja dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah.

4. Dominasi pekerja pada sektor informal yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan perlindungan kerja.
5. Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja formal.
6. Rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal.
7. Belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan perlindungan sosial.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan dan program responsif gender di tingkat pemerintah daerah dan desa masih rendah, sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan belum optimal.
2. Kesadaran masyarakat dan aparat terkait isu pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pencegahan kekerasan terhadap kelompok rentan masih kurang memadai.
3. Keterlibatan perempuan terhadap pendidikan, partisipasi politik, dan kesempatan ekonomi masih terbatas, sehingga pemberdayaan perempuan belum merata.
4. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum menyeluruh karena masih ada korban yang tidak terjangkau atau tidak melapor akibat stigma sosial, keterbatasan informasi, dan keterbatasan layanan purna penanganan.
5. Ketimpangan gender dalam kesehatan reproduksi tetap terjadi, termasuk tingginya angka perempuan melahirkan di usia muda dan persalinan yang tidak di fasilitas kesehatan, yang memperburuk kesetaraan pembangunan manusia.

Kabupaten Purworejo masih terdapat tantangan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pemberdayaan, peningkatan layanan perlindungan, dan upaya mengurangi ketimpangan gender secara menyeluruh.

c. Pangan

Berdasarkan kondisi ketahanan pangan Kabupaten Purworejo, meskipun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menunjukkan kategori tahan dan beberapa indikator mengalami perbaikan, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketimpangan ketahanan pangan antarwilayah, kualitas konsumsi pangan masyarakat, akses pangan, serta penguatan sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan. Adapun permasalahan pembangunan urusan pangan adalah sebagai berikut:

1. Ketahanan pangan antarwilayah belum merata ditunjukkan dengan masih adanya desa rentan/rawan pangan.
2. Penanganan kerawanan pangan belum optimal dan belum terintegrasi lintas sektor.

3. Akses terhadap pangan bergizi belum merata yang ditunjukkan dengan masih terdapat penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan.
4. Kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat belum optimal, tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional.
5. Konsumsi pangan bergizi, khususnya pangan hewani, masih rendah akibat keterbatasan akses, harga, dan pola konsumsi masyarakat.
6. Stabilitas harga dan keterjangkauan pangan masih perlu diperkuat untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.

d. Pertanahan

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya tanah negara yang belum memiliki kejelasan status hukum, baik karena belum terdaftar, belum bersertifikat, maupun adanya tumpang tindih klaim antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta.
2. Masih banyak bidang tanah yang belum memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan yang sah;
3. Masih sering munculnya konflik atau sengketa pertanahan;
4. Pemanfaatan tanah negara seringkali tidak selaras dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga menimbulkan ketidakteraturan pembangunan dan potensi degradasi lingkungan;
5. Distribusi tanah negara dalam rangka reforma agraria sering menghadapi kendala seperti keterbatasan objek tanah, konflik tenurial, dan lambatnya proses legalisasi aset;
6. Data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi. Hal ini menyulitkan identifikasi objek reforma agraria (TORA) serta memperlambat proses redistribusi tanah.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan di atas, diperlukan upaya strategis. Permasalahan terkait belum jelasnya status hukum tanah negara perlu diatasi melalui percepatan inventarisasi dan identifikasi aset tanah negara secara sistematis dan menyeluruh. Pemerintah perlu memperkuat pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang didukung dengan pemanfaatan teknologi geospasial dan sistem informasi pertanahan berbasis digital. Langkah ini penting untuk mengurangi tumpang tindih klaim serta meningkatkan kepastian hukum atas tanah, baik bagi pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Selanjutnya, dalam mengatasi masih banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat, diperlukan strategi percepatan legalisasi aset melalui simplifikasi prosedur administrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah sebagai instrumen perlindungan hak dan akses terhadap pembiayaan ekonomi.

Dalam konteks konflik dan sengketa pertanahan yang masih sering terjadi, diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, cepat, dan berkeadilan. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi peran mediasi pertanahan, pembentukan satuan tugas khusus penanganan konflik agraria, serta integrasi data antar instansi terkait. Pendekatan non-litigasi yang partisipatif perlu dikedepankan guna meminimalisir eskalasi konflik di tingkat masyarakat. Permasalahan ketidaksesuaian pemanfaatan tanah dengan rencana tata ruang wilayah mengindikasikan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, serta integrasi kebijakan pertanahan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Sinkronisasi ini penting untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta mencegah degradasi lingkungan. Adapun dalam pelaksanaan reforma agraria, berbagai kendala seperti keterbatasan objek tanah dan konflik tenurial perlu diatasi melalui optimalisasi identifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), termasuk pemanfaatan tanah terlantar, pelepasan kawasan hutan yang sesuai ketentuan, serta penataan kembali penguasaan tanah yang tidak produktif.

Selain itu, percepatan legalisasi aset harus diiringi dengan program pemberdayaan masyarakat penerima manfaat agar reforma agraria tidak hanya bersifat redistributif, tetapi juga produktif. Terakhir, untuk mengatasi permasalahan data penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) yang belum akurat dan terintegrasi, diperlukan pembangunan sistem basis data pertanahan yang terpadu, mutakhir, dan berbasis satu peta (one map policy). Integrasi data lintas sektor dan lembaga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, serta pelaksanaan kebijakan pertanahan secara efektif dan akuntabel. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, perlu adanya kolaborasi antara Dinperkimtan dengan Kantor Pertanahan.

e. Lingkungan Hidup

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pencemaran pada lingkungan air, udara, dan lahan, termasuk penurunan kualitas air baku akibat limbah domestik dan aktivitas usaha.
2. Terbatasnya pengelolaan sampah, baik dari sisi pengurangan maupun penanganan, serta kapasitas TPA yang semakin terbatas dan rendahnya penerapan 3R di tingkat masyarakat.
3. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam pelestarian lingkungan dan aksi pembangunan rendah karbon, termasuk rendahnya ketaatan terhadap izin lingkungan.
2. Degradasi lahan dan kerusakan lingkungan.
3. Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), tutupan vegetasi, dan keanekaragaman hayati dalam menjaga keseimbangan ekosistem

4. Kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, kekeringan).

Secara umum, pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo masih menghadapi tantangan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan persampahan, peningkatan kualitas ekosistem, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Kondisi tersebut memerlukan sinergi lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain:

1. Adanya gangguan jaringan internet atau kerusakan alat dalam pelayanan
2. Belum optimalnya pelayanan jemput bola karena keterbatasan sarana dan prasarana dan kurangnya koordinasi dengan pihak yang akan dituju (desa/kelurahan) dalam pelaksanaan jemput bola
3. Kurangnya koordinasi dengan lintas Perangkat Daerah lain dan pemangku kepentingan lainnya (LSM, PT, dan Ormas)
4. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti penting dokumen kependudukan misalnya KIA dan Akta kematian.
5. Tempat domisili penduduk yang berlokasi jauh dari kantor pelayanan Adminduk, khusus untuk kepengurusan IKD.

Berdasarkan analisa di atas dapat diformulasikan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang akan datang yaitu:

1. Melakukan pemutakhiran data kependudukan secara terus menerus untuk menjamin validitas data kependudukan;
2. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak, elektronik maupun online tentang perlunya melakukan update data kependudukan dan perkembangan kebijakan adminduk;
3. Meningkatkan kerjasama terhadap instansi terkait perihal pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama yang berkelanjutan;
4. Melakukan Jemput bola kepada masyarakat melalui Desa/Kelurahan, Rumah Sakit/Puskesmas, Lapas, Panti Sosial, maupun Sekolah;
5. Selalu melakukan inovasi untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Banyak desa di Kabupaten Purworejo belum mampu mencapai status desa mandiri karena kapasitas ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola desa yang belum optimal.

2. Penurunan jumlah desa mandiri menunjukkan lemahnya keberlanjutan pembangunan desa dan belum efektifnya strategi peningkatan kapasitas desa.
3. Potensi lokal desa, termasuk sumber daya alam, pariwisata, kebudayaan, dan nilai sosial, belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
4. Kesenjangan pembangunan antar desa menyebabkan perbedaan kualitas hidup dan kesempatan yang signifikan di tingkat desa.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kualitas keluarga masih perlu ditingkatkan, karena meskipun angka iBangga menunjukkan peningkatan, belum semua program pembangunan keluarga tersosialisasi merata hingga ke tingkat desa, sehingga keluarga yang tangguh, mandiri, dan bahagia belum tercapai secara menyeluruh.
2. Pengendalian fertilitas menghadapi tantangan ketidakmerataan, di mana *Total Fertility Rate* (TFR) relatif stabil, namun perbedaan fertilitas antar wilayah desa dan kota serta antar kelompok usia masih menjadi hambatan dalam perencanaan demografi yang seimbang.
3. Kebutuhan keluarga akan layanan kontrasepsi modern belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal, meskipun *demand satisfied* meningkat, masih terdapat kesenjangan akses, informasi, dan hambatan sosial budaya, terutama bagi kelompok rentan seperti remaja dan pasangan usia muda.
4. Tingginya prevalensi kehamilan tidak direncanakan pada tahun terakhir menunjukkan lemahnya keberlanjutan program KB dan edukasi kesehatan reproduksi, terutama di kalangan remaja, pasangan muda, dan wilayah pedesaan, yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan ibu dan anak serta stabilitas ekonomi keluarga.
5. Program keluarga berencana dan pendidikan kesehatan reproduksi masih memerlukan pendekatan lebih holistik dan menyeluruh, termasuk layanan ramah remaja, penguatan edukasi berbasis komunitas, serta keterlibatan tokoh masyarakat agar perubahan perilaku dapat terjadi.

Hal ini menunjukkan perlunya penguatan program keluarga berencana, edukasi kesehatan reproduksi, dan pendekatan holistik berbasis komunitas untuk menciptakan keluarga yang tangguh, mandiri, dan bahagia.

i. Perhubungan

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
2. Belum tercukupinya jumlah kelengkapan jalan yang dibutuhkan di ruas jalan kewenangan kabupaten.

3. Makin menurunnya jumlah angkutan umum yang beroperasi dan jumlah penumpang angkutan umum.
4. Belum optimalnya pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP).
5. Belum optimalnya fungsi Terminal Tipe C.
6. Belum seluruh Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) memiliki KIR.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan di atas, maka pemasangan perlengkapan jalan difokuskan pada ruas jalan kabupaten, wilayah rawan kecelakaan, dan rawan kriminalitas. Untuk meningkatkan jumlah penumpang angkutan umum perlu dilakukan pembinaan supir angkutan umum serta *re-routing* angkutan umum agar lebih menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah potensial Kabupaten Purworejo. Pengelolaan parkir dilakukan melalui pembinaan juru parkir untuk menghindari banyaknya parkir liar di TJU maupun TKP di wilayah perkotaan Kabupaten Purworejo. Optimalisasi fungsi Terminal Tipe C juga diperlukan agar setiap angkutan umum dapat tertib dalam mengangkut penumpang. Untuk meningkatkan jumlah KBWU yang memiliki KIR perlu dilakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat. Dengan meningkatnya KBWU yang telah memiliki KIR maka dapat pula menurunkan angka kecelakaan yang disebabkan oleh faktor kelayakan kendaraan.

j. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya penurunan jumlah informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.
2. Sasaran penyebaran informasi publik belum merata.
3. Belum meratanya akses internet di seluruh rumah tangga di wilayah Kabupaten Purworejo.
4. Masih adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang masuk dalam wilayah *Blank Spot*.
5. Belum optimalnya implementasi *Smart City*.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan di atas, diperlukan optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik di level Perangkat Daerah maupun level Pemerintah Daerah, melaksanakan kerjasama dengan *stakeholder* untuk penyediaan jaringan internet hingga ke seluruh wilayah Kabupaten Purworejo, peningkatan transformasi digital untuk pelayanan publik, serta melaksanakan koordinasi, pendampingan serta evaluasi terhadap Perangkat Daerah penyedia layanan publik demi terwujudnya *Smart City*.

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Berdasarkan kondisi dan capaian kinerja pembangunan bidang urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan tersebut berkaitan dengan kualitas kelembagaan koperasi, kontribusi koperasi

terhadap perekonomian daerah, kemitraan koperasi dengan UMKM, serta pengembangan kewirausahaan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan kesehatan koperasi belum sebanding dengan peningkatan jumlah koperasi.
2. Kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah masih belum optimal ditunjukkan dengan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB yang masih rendah.
3. Kapasitas kelembagaan, manajemen, permodalan, dan pengembangan usaha koperasi masih terbatas.
4. Sinergi dan kemitraan antara koperasi dengan UMKM masih rendah.
5. Ekosistem kewirausahaan daerah belum berkembang secara optimal.
6. Rasio kewirausahaan Kabupaten Purworejo masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga daya saing dan penciptaan wirausaha baru perlu terus ditingkatkan.

l. Penanaman Modal

Berdasarkan kondisi dan capaian kinerja pembangunan bidang urusan penanaman modal, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan tersebut berkaitan dengan tingkat realisasi investasi, struktur investasi, daya saing daerah, serta penguatan faktor-faktor pendukung iklim investasi. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Daya saing investasi Kabupaten Purworejo masih perlu ditingkatkan karena realisasi investasi relatif rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah.
2. Investasi masih terkonsentrasi pada sektor tertentu, sehingga diversifikasi investasi perlu diperkuat.
3. Daya tarik investasi bagi investor skala besar masih perlu diperkuat.
4. Faktor pendukung iklim investasi belum optimal, terutama terkait infrastruktur, proyek siap investasi, dan promosi investasi
5. Promosi dan pemetaan peluang investasi belum optimal untuk menarik investor baru.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan kondisi pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya pemuda serta prestasi olahraga daerah. Meskipun beberapa indikator menunjukkan perkembangan positif, capaian yang dihasilkan masih belum optimal dan belum berlangsung secara konsisten. Permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1) Keterlibatan pemuda dalam organisasi, kegiatan sosial, dan ekonomi belum optimal
2) Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri masih terbatas
3) Dukungan pembinaan olahraga, termasuk peningkatan kualitas SDM, sarana, dan prasarana olahraga, masih perlu diperkuat.

4) Pembinaan atlet belum berkelanjutan dari usia dini
5) Minat dan budaya olahraga masyarakat perlu ditingkatkan
6) Koordinasi lintas sektor belum optimal

n. Statistik

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Data statistik yang disediakan kurang relevan dan *up-to-date*.
2) Data yang diperoleh dari Perangkat Daerah belum seluruhnya valid.

Oleh karena itu, upaya terus-menerus dalam pembaruan data, peningkatan kualitas, dan penyebarluasan informasi harus menjadi prioritas agar dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien di Kabupaten Purworejo. Data yang diperoleh dari Perangkat Daerah perlu dipastikan keabsahannya dan divalidasi agar dapat digunakan oleh Perangkat Daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.

o. Persandian

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Masih adanya serangan siber pada perangkat lunak milik Pemerintah Daerah.
2) Lambatnya pembaruan (*updating*) sistem dan teknologi keamanan informasi untuk menghadapi ancaman siber yang terus berkembang.

Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi fungsi CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) sebagai tim tanggap insiden siber daerah serta pembaruan sistem dan teknologi keamanan informasi perangkat daerah.

p. Perpustakaan

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akses masyarakat ke perpustakaan masih terbatas akibat jarak dan penyebaran fasilitas yang belum merata.
2. Ketersediaan bahan bacaan, baik cetak maupun elektronik, belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan literasi yang beragam.
3. Tingkat keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi belum merata di seluruh wilayah.
4. Budaya membaca masyarakat masih menunjukkan fluktuasi dan belum stabil di berbagai kelompok usia.
5. Pemanfaatan layanan literasi digital dan perpustakaan keliling masih perlu diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.
6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat masih dipengaruhi oleh perubahan metode pengukuran, sehingga perlu strategi adaptif untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian literasi.

Dalam meningkatkan literasi masyarakat Kabupaten Purworejo perlu memperluas akses perpustakaan, menambah koleksi bahan bacaan cetak dan digital, menguatkan kampanye gemar membaca, meningkatkan

kompetensi tenaga perpustakaan, memanfaatkan teknologi digital, menyelaraskan literasi dengan program pembangunan lain, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

q. Kearsipan

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan kearsipan di perangkat daerah masih belum konsisten, sehingga pengawasan dan pengelolaan arsip belum sepenuhnya optimal.
2. Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kearsipan masih perlu penguatan untuk mendukung tata kelola arsip yang berkelanjutan.
3. Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam mengunggah arsip ke Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui JIKN masih rendah, sehingga akses dan pemanfaatan arsip belum maksimal.
4. Pengelolaan arsip dinamis di beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai standar kearsipan, sehingga menimbulkan risiko ketidaklengkapan dan ketertiban administrasi.
5. Digitalisasi dan integrasi arsip masih terbatas, sehingga akses dan pengawasan arsip belum merata di seluruh wilayah.

Sehingga perlu memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan kearsipan, meningkatkan partisipasi perangkat daerah dalam mengunggah arsip ke SIKN melalui JIKN, serta memastikan pengawasan dan pembinaan kearsipan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup positif, ditandai dengan meningkatnya produksi dan nilai produksi pada beberapa subsektor. Namun demikian, capaian tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi produktivitas, daya saing, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan, antara lain sebagai berikut:

1) Daya saing sektor perikanan masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah.
2) Struktur dan skala usaha perikanan serta tingkat produktivitas di Purworejo masih relatif terbatas.
3) Hilirisasi melalui pengolahan dan pemasaran hasil perikanan masih perlu diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah dan memperluas akses pasar
4) Kerusakan ekosistem yang berpengaruh terhadap produksi perikanan baik tangkap dan budidaya.

5) Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan masih menghadapi tantangan akibat perubahan iklim, potensi pencemaran, serta pemanfaatan sumber daya yang perlu dikendalikan.
6) Pembinaan, pengawasan, dan kepatuhan pelaku usaha serta sinergi antar pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung penerapan prinsip ekonomi biru dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan perairan.

b. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif fluktuatif pada berbagai subsektor. Meskipun beberapa komoditas mengalami peningkatan pada periode tertentu, produktivitas sektor pertanian secara umum masih menghadapi berbagai tantangan yang berpengaruh terhadap keberlanjutan produksi, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain sebagai berikut:

1) Berkurangnya daya dukung lahan yang diakibatkan alih fungsi lahan dan degradasi lahan akibat penggunaan pupuk kimia berlebih
2) Keterbatasan infrastruktur pendukung pertanian seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani yang rusak
3) Lambannya regenerasi petani dan keterbatasan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian
4) Skala usaha yang kecil dan keterbatasan modal bagi petani dan peternak
5) Perubahan iklim yang mempengaruhi pola tanam dan hama, dan penyakit hewan
6) Rendahnya nilai tambah produk pertanian.
7) Ancaman penyakit zoonosis serta penyakit infectious baru (pib)

c. Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Purworejo selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pengembangan sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan daya saing destinasi, kualitas layanan, dan keberlanjutan pengelolaan pariwisata. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain sebagai berikut:

1) Lama tinggal wisatawan masih rendah, tercermin dari rata-rata lama menginap yang hanya sekitar 1,04 malam sehingga dampak ekonomi pariwisata belum optimal.
2) Kunjungan wisatawan per bulan belum stabil meski tiap tahunnya cenderung meningkat
3) Sebagian destinasi wisata masih sulit dijangkau dan memerlukan dukungan aksesibilitas.
4) Pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata belum optimal

5) Keterbatasan amenitas dan fasilitas pendukung wisata.
6) Potensi wisata bahari dan potensi lokal berbasis ekonomi biru belum dimanfaatkan secara optimal sebagai daya ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

d. Perdagangan

Kinerja sektor perdagangan Kabupaten Purworejo secara umum menunjukkan kondisi yang cukup baik, ditandai dengan stabilitas harga pangan dan tingginya kepatuhan penggunaan alat ukur perdagangan. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi barang, stabilitas harga, dan penguatan sistem perdagangan daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain sebagai berikut:

1. Penurunan aktivitas perdagangan di pasar rakyat akibat perubahan pola konsumsi masyarakat yang beralih ke ritel modern dan perdagangan daring (online), serta kondisi sarana dan prasarana pasar yang belum sepenuhnya memenuhi standar kenyamanan, kebersihan, dan penataan yang baik.
2. Disparitas harga beberapa komoditas strategis masih relatif tinggi, terutama pada komoditas yang dipengaruhi musim dan distribusi.
3. Efisiensi rantai pasok dan sistem distribusi barang kebutuhan pokok masih perlu ditingkatkan.
4. Infrastruktur logistik perdagangan dan fungsi pasar rakyat sebagai pusat distribusi belum optimal.
5. Stabilitas pasokan pangan masih bergantung pada kelancaran produksi sektor pertanian.
6. Penguatan sistem informasi dan pengendalian perdagangan masih diperlukan untuk menjaga stabilitas harga.

e. Perindustrian

Pembangunan sektor perindustrian di Kabupaten Purworejo menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis, namun kontribusinya terhadap peningkatan nilai tambah sektor primer masih belum optimal. Pengembangan industri daerah masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi pertumbuhan industri kecil dan menengah serta daya saing industri berbasis potensi lokal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang perlu menjadi perhatian antara lain sebagai berikut:

1. Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) masih berfluktuasi dan belum berkelanjutan.
2. Keterkaitan antara sektor industri pengolahan dengan sektor pertanian masih rendah sehingga nilai tambah komoditas lokal belum optimal.
3. Kapasitas usaha industri masih terkendala permodalan, teknologi, dan produktivitas.
4. Capaian sasaran pembangunan industri belum memenuhi target secara konsisten.
5. Pengembangan agroindustri berbasis potensi lokal masih perlu diperkuat.

6. Ketersediaan data dan informasi industri masih perlu ditingkatkan sebagai dasar perencanaan dan pembinaan.

f. Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi di Kabupaten Purworejo masih berjalan dengan baik, namun pelaksanaannya belum mampu mengakomodasi tingginya minat masyarakat karena keterbatasan kuota penempatan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat program transmigrasi belum dapat dirasakan secara optimal. Berikut permasalahan yang perlu menjadi perhatian:

1) Kuota transmigrasi yang terbatas
2) Kesempatan masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi masih bergantung pada kebijakan dan alokasi kuota dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
3) Pembinaan dan peningkatan kapasitas calon transmigran masih perlu diperkuat agar mampu beradaptasi dan mengembangkan usaha di lokasi transmigrasi.
4) Koordinasi penyelenggaraan program transmigrasi antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten masih perlu ditingkatkan untuk memperluas peluang penempatan.

2.3.2.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

a. Sekretariat Daerah

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh pada seluruh perangkat daerah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan.
3. Belum meratanya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan.
4. Belum optimalnya penyusunan kebijakan daerah yang berbasis bukti, evaluasi, dan partisipasi pemangku kepentingan.

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan di atas, diperlukan penguatan reformasi birokrasi, digitalisasi pemerintahan, peningkatan kualitas manajemen kinerja, perbaikan pelayanan publik, dan penguatan kebijakan berbasis bukti.

b. Sekretariat DPRD

Adapun Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo adalah:

1. Terbatasnya kwalitas aparatur Sekretariat DPRD
2. Tupoksi belum dilaksanakan secara optimal
3. Pelaksanaan program kegiatan tidak sesuai dengan kalender kegiatan
4. Kurangnya pemahaman dalam menelaah suatu peraturan Perundang-undangan.

Dalam upaya peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo, maka ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan sebagai berikut:

1. Peningkatkan pelayanan prima.
2. Memanfaatkan anggaran yang ada untuk meningkatkan peran DPRD.
3. Memanfaatkan struktur organisasi yang ada untuk mendukung Otonomi Daerah.
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan dukungan kinerja Anggota DPRD.

c. Perencanaan

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Perencanaan Pembangunan Belum Optimal
2. rumusan kinerja dalam dokumen perencanaan sebagian perangkat daerah yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome)
3. Indikator kinerja yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), yang menyebabkan sulitnya mengukur pencapaian kinerja secara objektif dan tepat
4. Pemanfaatan Data dalam Perencanaan Pembangunan Belum Optimal

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan di atas, diperlukan Upaya Memperkuat penyelarasan antara RPJMD/RKPD dengan RKP Nasional, pengoptimalan pendampingan dan asistensi dalam penyusunan perencanaan Pembangunan, dan Optimalisasi Pemanfaatan Satu Data.

d. Keuangan

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Keuangan Belum Optimal
2. upaya untuk menggali sumber pendanaan lainnya (Non APBD) belum optimal
3. tingginya ketergantungan pada transfer pemerintah pusat
4. Pemanfaatan aset yang belum optimal
5. Pengelolaan pajak daerah yang belum optimal

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan di atas, diperlukan Upaya peningkatan keterbukaan informasi publik terkait pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi sumber pendanaan lain, analisis potensi pendapatan baru dari sektor jasa atau ekonomi kreatif, pengoptimalan pemanfaatan aset, dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah

e. Kepegawaian

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya analisis jabatan (anjab),
2. Evaluasi kinerja pegawai belum optimal dilaksanakan
3. Lemahnya penerapan sistem merit

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan di atas, diperlukan Upaya dengan penerapan Manajemen Talenta (*Talent Pool*), optimalisasi penggunaan SIASN, dan optimalisasi pengeloaan pegawai.

f. Pendidikan Pelatihan

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengembangan kompetensi melalui diklat
2. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Belum Optimal
3. Masih terdapat kesenjangan antara kinerja pegawai dan dan Kompetensi yang dimiliki

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan di atas, diperlukan Upaya dengan Penerapan *Corporate University* (CorpU), Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), dan Link and Match dengan Karir.

g. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas Inovasi Daerah belum optimal
2. Minimnya tenaga peneliti fungsional
3. Hasil penelitian yang seringkali tidak terimplementasi secara optimal dalam kebijakan perencanaan pembangunan

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan di atas, diperlukan Upaya dengan menyusun dokumen strategi jangka panjang sesuai amanat Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023 agar arah pengembangan inovasi daerah memiliki landasan akademis dan teknokratis, Membangun jejaring kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Akademisi, dan Pelaku Usaha untuk menciptakan inovasi.

2.3.2.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut

1. Integrasi manajemen risiko dan pengendalian korupsi ke dalam sistem SPIP masih perlu ditingkatkan
2. Keterbatasan Kapabilitas APIP
3. Fungsi Consulting dan *Early Warning System* Peran Inspektorat sebagai mitra strategis perangkat daerah belum sepenuhnya optimal
4. Belum Optimalnya Pengawasan Berbasis Risiko
5. Keterbatasan Transformasi Digital Pengawasan

Untuk menjawab permasalahan dan tantangan di atas, diperlukan upaya penggunaan SPIP Terintegrasi yang menyatukan penilaian mandiri SPIP dengan Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), manajemen SDM APIP, optimalisasi pendampingan pada perangkat daerah.

2.3.2.6. Pemerintahan Umum

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kesadaran wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan bela negara bagi generasi muda;
2. Masih kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai ideologi Pancasila dimasyarakat;
3. Belum maksimalnya aktualisasi bela negara di masyarakat sesuai dengan tantangan zaman;
4. Masih kurangnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku serta umat beragama;
5. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat belum optimal;
6. Masih banyaknya Ormas yang belum memahami ketentuan peraturan perundang-Undangan dan belum melaksanakan kegiatannya sesuai dengan AD/ART Ormas;
7. Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika
8. Belum efektifnya monitoring dan sinergitas dalam pelaksanaan kewaspadaan dini di daerah;
9. Masih kurangnya dukungan antar Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah dan Forum Masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam deteksi dan cegah dini; ‘

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, dilakukan dengan:

1. Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila melalui penguatan pendidikan wawasan kebangsaan;
2. Penguatan karakter bangsa dan Bela Negara bagi generasi muda;
3. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif melalui fasilitasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
4. Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat;
5. Penguatan Etika dan Budaya Politik;
6. Penguatan Kelembagaan Demokrasi;
7. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat.
8. Penguatan peran Ormas;
9. Penguatan Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dalam menciptakan Harmonisasi kehidupan bermasyarakat dan moderasi beragama;
10. Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya masyarakat.
11. Penguatan kewaspadaan dini di masyarakat;
12. Pencegahan Konflik Sosial masyarakat

2.3.2.7. Kewilayahan

Permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan diantaranya adalah:

1. Masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki nilai IKM relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya, meskipun tetap menunjukkan tren peningkatan.

2. Terbatasnya jumlah SDM di kecamatan.
3. Terbatasnya infrastruktur dan sarana prasarana untuk pelayanan publik.
4. Tantangan digitalisasi di wilayah kecamatan dengan keterbatasan jaringan internet.

Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan di atas, diperlukan perhatian dan intervensi lebih lanjut untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan melalui optimalisasi SDM yang ada serta pemerataan infrastruktur, sarana, dan prasarana pendukung pelayanan publik yang ada di kecamatan. Digitalisasi dan inovasi pelayanan juga diperlukan demi meningkatkan pelayanan publik, diantaranya dengan menerapkan sistem antrean *online*, anjungan mandiri, dan layanan jemput bola untuk desa-desa yang sulit dijangkau. Koneksi internet yang stabil juga sangat penting untuk menjalankan aplikasi pelayanan pusat dan daerah tanpa kendala teknis.

2.3.3. ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Dari berbagai permasalahan yang ada, dirumuskan beberapa isu strategis. Terdapat lima isu strategis yang akan ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan pada tahun 2027, antara lain:

a. Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar

Pemerataan layanan infrastruktur dasar di Kabupaten Purworejo masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Kondisi jalan dan jembatan yang kurang terpelihara, sistem drainase perkotaan yang belum terintegrasi dari hulu ke hilir, rendahnya keandalan sumber air untuk irigasi, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap air minum aman dan sanitasi layak menjadi hambatan utama. Di sektor perumahan dan kawasan permukiman, masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), meningkatnya kawasan kumuh, serta terbatasnya prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) memperparah ketimpangan akses, terutama di wilayah yang rentan bencana dan permukiman padat.

Tantangan tersebut menuntut pendekatan sistemik dan berbasis kinerja untuk mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Diperlukan penguatan manajemen aset jalan, pengembangan SPAM perpipaan dan sistem pengelolaan air limbah terpadu, optimalisasi penanganan RTLH berbasis data, serta penyediaan PSU yang terintegrasi antar sektor. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan penegakan regulasi agar layanan infrastruktur dasar dapat menjangkau seluruh wilayah secara adil dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

b. Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo masih dihadapkan pada tantangan inklusivitas yang memerlukan perhatian serius. Di sektor ketenagakerjaan, tercipta ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, rendahnya produktivitas, dominasi sektor informal, serta terbatasnya perluasan kesempatan kerja formal dan kepesertaan jaminan sosial. Sektor koperasi dan UMKM menunjukkan

kualitas kelembagaan yang belum sebanding dengan jumlahnya, kontribusi terhadap PDRB masih rendah, dan sinergi kemitraan lemah. Sementara itu, investasi relatif rendah dan terkonsentrasi, produktivitas pertanian fluktuatif akibat alih fungsi lahan dan keterbatasan infrastruktur, serta hilirisasi perikanan dan industri pengolahan berbasis lokal belum optimal.

Untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, diperlukan strategi yang memperkuat daya saing sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja layak, dan mendorong diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal. Penguatan pelatihan dan *link-and-match* tenaga kerja, pengembangan ekosistem kewirausahaan, percepatan hilirisasi hasil pertanian dan perikanan, serta perbaikan iklim investasi melalui infrastruktur pendukung dan promosi yang terarah menjadi kunci. Pendekatan ini harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan pelaku usaha mikro.

c. Kualitas Lingkungan Hidup yang Berketahanan Bencana

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo masih menghadapi tekanan dari pencemaran air, udara, dan lahan, terbatasnya pengelolaan sampah dengan kapasitas TPA yang menipis, serta rendahnya penerapan 3R di masyarakat. Degradasi lahan, belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati, serta kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, kekeringan) semakin memperburuk kondisi ekosistem. Di sisi kebencanaan, keterbatasan tenaga fungsional, sarana prasarana, data risiko yang belum terintegrasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mitigasi menjadi tantangan tambahan.

Mewujudkan lingkungan hidup yang berketahanan bencana memerlukan sinergi lintas sektor yang kuat. Pengendalian pencemaran, peningkatan pengelolaan persampahan berbasis 3R, penguatan tutupan vegetasi dan RTH, serta integrasi sistem informasi risiko bencana secara real-time harus menjadi prioritas. Penguatan kapasitas BPBD, edukasi kebencanaan berbasis komunitas, dan penerapan pendekatan berbasis risiko dalam tata kelola akan meningkatkan daya lenting daerah terhadap ancaman lingkungan dan bencana, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

d. Ketahanan Sosial

Ketahanan sosial Kabupaten Purworejo masih menghadapi tantangan dalam perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial masih terbatas, dan angka kemiskinan serta pengeluaran per kapita yang relatif rendah menunjukkan belum meratanya pemenuhan kebutuhan dasar. Di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penerapan kebijakan responsif gender masih rendah, kesadaran masyarakat

terhadap pencegahan kekerasan belum memadai, serta penanganan korban kekerasan belum menyeluruh. Tantangan serupa muncul pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan tingginya kehamilan tidak direncanakan serta kesenjangan akses layanan kontrasepsi dan edukasi kesehatan reproduksi.

Penguatan ketahanan sosial menuntut pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas. Diperlukan peningkatan efektivitas perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak, serta perluasan edukasi kesehatan reproduksi yang ramah terhadap seluruh kelompok usia. Kolaborasi lintas sektor, pelibatan tokoh masyarakat, dan pemanfaatan data yang akurat akan mendorong terciptanya keluarga yang tangguh, mandiri, dan bahagia, sekaligus mengurangi kerentanan sosial secara berkelanjutan.

e. Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Adaptif, Akuntabel, dan Kolaboratif

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo masih dihadapkan pada sejumlah persoalan yang menghambat efektivitas penyelenggaraan urusan. Implementasi reformasi birokrasi belum merata, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam perencanaan dan penganggaran masih terbatas, serta kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya sesuai standar. Di bidang perencanaan, indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan pemanfaatan data masih belum optimal. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, optimalisasi aset dan pajak daerah, penerapan sistem merit kepegawaian, serta kapasitas inovasi daerah masih perlu diperkuat. Pengawasan berbasis risiko dan transformasi digital juga belum berjalan maksimal.

Membangun tata kelola yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif memerlukan penguatan sistem manajemen kinerja, digitalisasi pemerintahan, dan budaya kerja berbasis data. Penerapan SPIP terintegrasi, penguatan kapasitas APIP, pemanfaatan Satu Data, serta kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadi langkah strategis. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, menghasilkan kebijakan berbasis bukti, dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta berkelanjutan

2.4. EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

2.4.1. EVALUASI KINERJA PRIORITAS NASIONAL (PN) RKP 2025 DI DAERAH

Delapan Prioritas Nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2025 maupun RPJMN Tahun 2025-2029 didukung dengan beberapa program/ kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah pengampu. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Sedangkan untuk mengukur keberhasilan dukungan terhadap Prioritas Nasional tersebut, berikut disajikan capaian indikator kinerja utama daerah yang terkait dengan Prioritas Nasional.

Tabel 2.186. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional Sampai Dengan Tahun 2025

Prioritas Nasional	Indikator Daerah Yang Mendukung Prioritas Nasional	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,6	1,74	66,92
	Indeks Religiusitas Daerah	Angka	76,26	77,74	101,94
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,6	1,74	66,92
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,04	76	100,01
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	50,18	47,41	94,49
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,11	3,72	80,39
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	86,25	70,24	81,44
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,39	75,93	100,72
	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,86	3,81	98,7
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,86	3,81	98,7
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	86,25	70,24	81,44
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	31,56	33,04	104,69
	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,86	3,81	98,7
	Tingkat Kemiskinan	%	10,22	10,06	101,57
	Rasio Gini	Angka	0,335	0,298	111,04
	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	5,27	102,13
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,6	1,74	66,92
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83	83.87	100.55.00
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	68,02	67,6	99,38
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,04	76	100,01
	Indeks Religiusitas Daerah	Angka	76,26	77,74	101,94
	Indeks Risiko Bencana	Angka	110,16	86,45	121,52

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026

2.4.2. EVALUASI KINERJA INTERVENSI DAERAH DALAM MENDUKUNG ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2025

Untuk merealisasikan visi dan misi, pada RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan tujuh program unggulan "Pitulungan". Selain itu, program unggulan "Pitulungan" juga dirancang selaras dengan intervensi daerah dalam mendukung arah kebijakan prioritas tahun 2025. Rincian intervensi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

a. Penurunan Kemiskinan

Penurunan angka kemiskinan merupakan prioritas utama baik di tingkat pusat maupun daerah. Program unggulan "Sejahtera Wargane" dirancang untuk menyelesaikan permasalahan di daerah sekaligus melakukan intervensi arah kebijakan prioritas Penurunan Kemiskinan. Secara rinci, intervensi yang telah dilakukan pada tahun 2025 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.187. Intervensi Daerah Dalam Mendukung Penurunan Kemiskinan

Program Unggulan Pitulungan	Kegiatan Unggulan	Intervensi	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*
Sejahtera Wargane	Membangun dan/ atau memperbaiki sanitasi lingkungan	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	DPUPR
	Pembinaan, sosialisasi, dan edukasi tentang fungsi perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Kampanye lingkungan hidup (Hari Peduli Sampah Nasional, World Cleaning Day, Hari Lingkungan Hidup, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional). Dilaksanakan 1 kampanye (Hari Peduli Sampah Nasional) pada tanggal 24 Februari 2026.	DLHP
	Program pembangkit listrik tenaga terbarukan	Fasilitasi pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan. Fasilitasi pengembangan listrik dari biogas.	Setda
	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intranet & pusat data	Dinkominfo
		Penguatan Keamanan Siber dan Perlindungan Data	Dinkominfo
		Pengelolaan Data Statistik	Dinkominfo
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Inspektorat
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat
		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Inspektorat
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat
		Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi. - Telah menyusun Perbup Tambahan Penghasilan Pegawai - Telah menyusun dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Purworejo - Dalam Tahap Penyususunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Setda
		Pengelolaan arsip statis; Pengawasan kearsipan di perangkat daerah; Penguatan unit kearsipan pada perangkat daerah; Pengelolaan depot arsip	Dinpusip
		Pelayanan jemput bola dokumen kependudukan.	Disdukcapil

Program Unggulan Pitulungan	Kegiatan Unggulan	Intervensi	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*
		Jemput bola pelayanan IKD dan rekam KTP-el di laksanakan di SMA/SMK, RS, Dinas/instansi, Badan Usaha, Panti Sosial, Lapas, panti (rehabilitasi jiwa, sosial, anak), lapas anak, lapas dewasa, Lembaga-lembaga disabilitas. Jumlah pelayanan 1477 penduduk. Jemput bola pendataan penduduk non permanen dilaksanakan di Sekolah (pondok) dan perguruan tinggi, jumlah data yang diperoleh 631 orang.	
		Pelayanan jemput bola dokumen pencatatan sipil. Jemput bola pelayanan dokumen pencatatan sipil sampai dengan triwulan I dilaksanakan dalam bentuk pelayanan akta kelahiran semua penduduk dengan sasaran di semua desa dan kelurahan di kab. Purworejo. Hasil yang diperoleh selama triwulan I sebanyak 1633 akta.	Disdukcapil
	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Perangkat Daerah.	Pelatihan PPRG; Fasilitasi dan monev GAP GBS OPD dalam bentuk Rakor PUG dan Rakor PUSPA.	DPPPAPMD
	Penguatan koordinasi, kerja sama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.	1. Rakor Forkare 2. Kampanye PPA 3. Sosialisasi pencegahan pernikahan anak 4. Ramadhan ramah anak	DPPPAPMD
	Pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Pelatihan untuk warga rentan	DPPPAPMD
	Penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan non struktur.	Penyediaan Makanan; Penyediaan Sandang; Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan; Pelayanan Dukungan Psikososial; Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi; Koordinasi, Fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana; Peningkatan kompetensi taruna siaga bencana. Terkait dengan bantuan bencana masih terus diproses, setiap kali ada pengusulan untuk bantuan bencana maka akan di realisasikan.Hingga bulan maret telah ada 119 usulan bantuan bencana.	DINSOSDALD UKKB
	Pengembangan mitigasi dengan Early Warning System (EWS) bencana berbasis internet of thing (IoT).	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD
	Penguatan daerah dan masyarakat yang tangguh bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	BPBD
	Memperbaiki keamanan pangan dan menambah aksesibilitas pangan bagi masyarakat.	Pengawasan pre-market dan post-market IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan). Pelaksanaan pengawasan sarana dan uji sampel.	Dinkesda
		Pembinaan pelaku Usaha pada produsen pangan dan sarana peredaran pangan pada bidang PIRT dan POSS. Terealisasi sebanyak 26 pelaku usaha pada PKP Sukowuwuh.	Dinkesda

Sumber: Bapperida, 2026

b. Peningkatan SDM Berkualitas

Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi penopang utama pengentasan kemajuan peradaban suatu daerah. Arah kebijakan Peningkatan SDM Berkualitas didukung oleh program unggulan "Pinter Bocahe", "Religius Masyarakate", serta "Sehat Penduduke". Secara rinci, intervensi daerah yang telah dilakukan pada tahun 2025 melalui ketiga program unggulan tersebut dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.188. Intervensi Daerah Dalam Mendukung Peningkatan SDM Berkualitas

Program Unggulan Pitulungan	Kegiatan Unggulan	Intervensi	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*
Pinter Bocahe	Pemberian pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk peningkatan kualitas guru	Diklat Calon Kepala Sekolah; Fasilitasi Kelompok Kerja Guru (KKG); Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah; Diklat guru mapel; Peningkatan kapasitas guru PAUD	DINDIKBUD
	Pengembangan pusat pembelajaran masyarakat	Layanan Perpustakaan Menetap dan Keliling;	DINPUSIP
		Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka;	DINPUSIP
		Safari perpustakaan; Telah dilaksanakan di Desa Geparang Kecamatan Purwodadi.	DINPUSIP
		Pelestarian naskah kuno;	DINPUSIP
		Pelatihan keterampilan masyarakat/ perpustakaan berbasis inklusi sosial	DINPUSIP
Religius Masyarakate	Memperluas kesempatan menjalankan ibadah bagi masyarakat sesuai dengan agama yang diakui negara	Pembinaan Anak Beriman dan Berkepribadian. Sudah dilaksanakan sejak awal tahun (Januari). Sub kegiatan pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik (SD) aktivitas anak beriman.	DINDIKBUD
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi dan Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan. Penyaluran dana hibah untuk Forum Kerukunan Umat Beragama	BAKESBANGPOL
Sehat Penduduke	Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk semua warga	Pendampingan pelaksanaan intergrasi layanan terpadu (ILP), Pelaksanaan akreditasi di fasilitas kesehatan, Pelaksanaan promosi kesehatan, Pelayanan cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis sudah rutin dilaksanakan, bahkan dilakukan jemput bola.	DINKESDA
	Mempermudah dan mempercepat proses pengurusan jaminan sosial kesehatan	Pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat	DINKESDA
	Pembangunan dan optimalisasi fasilitas olah raga bagi pemuda dan masyarakat Peningkatan kualitas gizi masyarakat	Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Optimalisasi sarpras yang sudah ada melalui fasilitasi GOR dan Stadion Sarwo Edhie Wibowo	Dinporapar
		Penanganan desa rentan rawan pangan. Terealisasi 1 desa dan berikutnya akan dilaknsakan pada TW II dan III.	DKPP
		Pengawasan dan pembinaan pangan segar asal tumbuhan. Dilakukan pengawasan PSAT pada post market.	DKPP

Program Unggulan Pitulungan	Kegiatan Unggulan	Intervensi	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*
		Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH). DIlaksanakan pada saat menjelang hari raya.	DKPP
		Pengawasan pre-market dan post-market IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)	Dinkesda
		Pembinaan pelaku Usaha pada produsen pangan dan sarana peredaran pangan pada bidang PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan POSS (Pangan Olahan Siap Saji)	Dinkesda
		Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)	Dinkesda
		Sosialisasi dan Edukasi Pangan dan Gizi	Dinkesda

Sumber: Bapperida, 2026

c. Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Berkelanjutan

Pemerintah pusat mencanangkan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan sebagai salah satu arah kebijakan prioritas. Hal ini sejalan dengan kebijakan di level daerah yang juga menetapkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator kinerja utama daerah. Untuk merealisasikan hal tersebut, program unggulan “Alus Dalane”, “Rame Pasare”, serta “Ayem Petanine” dirancang sekaligus untuk melakukan intervensi arah kebijakan prioritas Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Berkelanjutan. Secara rinci, intervensi yang dilakukan pada tahun 2025 melalui ketiga program unggulan tersebut dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.189. Intervensi Daerah Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Berkelanjutan

Program Unggulan Pitulungan	Kegiatan Unggulan	Intervensi	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*
Alus Dalane	Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo	Sedang dalam proses lelang untuk paket-paket pekerjaan: - Pembangunan jalan - Rehabilitasi/Peningkatan Jalan - Penggantian Jembatan - Pemeliharaan rutin dan berkala jalan - Pemeliharaan rutin dan berkala jembatan - Pemeliharaan trotoar - Operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan - Rehabilitasi drainase perkotaan	DPUPR
		Pengaturan dan ketertiban lalu lintas jalan. Telah dilaksanakan posko lebaran dan kegiatan pengaturan lalu lintas secara rutin.	Dinhub
		Penataan parkir. Dilaksanakan penataan parkir di lapangan secara rutin.	Dinhub
		Fasilitasi penyediaan angkutan orang atau barang. Telah dilaksanakan mudik gratis.	Dinhub
Rame Pasare	Fasilitas akses permodalan, pemasaran, pelatihan, dll untuk usaha mikro dan kecil, terutama bagi industri rumahan yang dikelola perempuan	Pembinaan dan fasilitasi pemanfaatan digitalisasi dan teknologi produksi kepada UMKM. Pelaksanaan pelatihan vocational pembuatan tepung Mocaf.	DKUKMP

Program Unggulan Pitulungan	Kegiatan Unggulan	Intervensi	Perangkat Daerah
1	*2*	*3*	*4*
	Menyelenggarakan berbagai festival berbasis agroindustri, religi, dan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata.	Penyelenggaraan pameran dagang lokal (Purworejo Expo, Gebyar UMKM, Dukungan terhadap Festival Layang-Layang). Pelaksanaan Purworejo Expo sudah dilaksanakan di bulan Februari 2026.	DKUKMP
	Peningkatan citra dan positioning kepariwisataan Purworejo	Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata. Kegiatan dilakukan pada bulan Maret yang diberikan kepada 30 orang pelaku yang bekerja di bidang pariwisata.	Dinporapar
		Dukungan promosi digital dan media sosial. Melakukan publikasi event-event kepariwisataan melalui flyer di media sosial (seperti event Pemilihan Pemuda Pelopor, Pemilihan Bagus Roro Purworejo).	Dinkominfo
		Dukungan pemuatan konten digital. Fasilitasi live streaming kegiatan Karawitan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Purworejo melalui kanal Youtube Pemkab Purworejo.	Dinkominfo
	Hilirisasi hasil penelitian/ penerapan teknologi tepat guna.	Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah	Bapperida
	Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja (pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi)	Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata. Kegiatan dilakukan pada bulan Maret yang diberikan kepada 30 orang pelaku yang bekerja di bidang pariwisata.	Dinporapar
Ayem Petanine	Menambah penggunaan alat teknologi pertanian (seperti pompa air, sprayer, traktor tangan, sel surya, dll)	Pengawasan penggunaan alat mesin teknologi pertanian, Pembinaan UPJA. Telah dilaksanakan monitoring pemanfaatan alat dan mesin pertanian; Pelatihan /pembinaan UPJA di desa Keburuhan kecamatan Ngombol.	DKPP

Sumber: Bapperida, 2026

2.4.3. EVALUASI KINERJA DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029, terdapat 6 (enam) program strategis nasional yang dilaksanakan selama lima tahun mendatang, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan dan pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, revitalisasi ekonomi, serta program strategis nasional lain yang ditetapkan oleh Presiden. Program strategis nasional tersebut, pada pelaksanaannya didukung melalui program-program pada masing-masing Perangkat Daerah penanggungjawab program strategis nasional, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.190. Dukungan Program Strategis Nasional Pada RPJMD 2025-2029

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan Di Kabupaten Purworejo
1	*2*	*3*
1	Penanggulangan Kemiskinan	
	a. Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan Di Kabupaten Purworejo
1	*2*	*3*
	penghapusan kemiskinan ekstrem	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Program Penanganan Bencana
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Hubungan Industrial
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penanggulangan Bencana
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Penyuluhan Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa
		Program Perlindungan Perempuan
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		Program Pengembangan Umkm
		Program Pendaftaran Penduduk
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	b. Sekolah Rakyat	Koordinasi Dan Fasilitasi Sekolah Rakyat
	c. Pembangunan 3 juta rumah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Program Pengembangan Perumahan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
2	**Ketahanan Pangan**	
	a. Pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras dalam negeri	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	b. Penyaluran cadangan beras pemerintah	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3	**Kesehatan untuk semua**	
	a. Jaminan kesehatan nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	b. Makan bergizi gratis	Koordinasi Dan Fasilitasi Makan Bergizi Gratis
4	**Perluasan akses pendidikan**	
	a. Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	Program Pengelolaan Pendidikan

No	Program Strategis Nasional	Program Dukungan Di Kabupaten Purworejo
1	*2*	*3*
5	**Pertumbuhan ekonomi**	
	a. Pengendalian inflasi	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	b. Percepatan pembentukan koperasi desa/ kelurahan merah putih	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	c. Kemudahan perizinan daerah	Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6	**Program strategis nasional lain yang ditetapkan oleh Presiden**	Koordinasi Dan Fasilitasi Program Strategis Lain Yang Ditetapkan

Sumber: RPJMD 2025-2029, 2025

Pemerintah Pusat menerbitkan Permendagri Nomor 5 Tahun 2025 dan SEB Mendagri bersama Menteri PPN/ Kepala Bappenas sebagai acuan pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanan Program Strategis Nasional, yang mana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan Program Strategis Nasional dapat dikenakan sangsi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Pedoman lebih teknis kemudian diatur melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.4-180 Tahun 2026 tentang Format dan Indikator Laporan Kinerja Program Strategis Nasional, dimana terdapat 67 indikator evaluasi pada 10 kegiatan Program Strategis Nasional. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Program Strategis Nasional Kabupaten Purworejo, berikut hasil evaluasi capaian kinerja Program Strategis Nasional di Kabupaten Purworejo sampai dengan semester II tahun 2025.

Tabel 2.191. Hasil Evaluasi Kinerja Program Strategis Nasional Kabupaten Purworejo Semester II Tahun 2025

Kode	Program/ Kegiatan/ Indikator	Bobot	Hasil Evaluasi
1	*2*	*3*	*4*
A.	**PENANGGULANGAN KEMISKINAN**	**30**	**15,75**
1	**Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**	**10**	**9**
01.01	Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1,5	1,5
01.02	Melakukan pemutakhiran data penerima bantuan (kemiskinan dan kemiskinan ekstrem) berdasarkan nama dan alamat (by name by address)	1	0,5
01.03	Melakukan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	1	1
01.04	Menyampaikan laporan hasil optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan	1	1
01.05	Pencapaian tingkat kemiskinan (Dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya)	1	0,5

Kode	Program/ Kegiatan/ Indikator	Bobot	Hasil Evaluasi
1	*2*	*3*	*4*
01.06	Pencapaian tingkat kemiskinan ekstrem (Dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya)	1	1
01.07	Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	1	1
01.08	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya)	1	1
01.09	Inovasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1,5	1,5
2	**Sekolah Rakyat**	**10**	**0**
02.01	Mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten/kota berupa penyiapan lahan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	2,5	0
02.02	Mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten/kota berupa perizinan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	2	0
02.03	Mendukung program sekolah rakyat di wilayah kabupaten/kota berupa penyiapan guru serta tenaga pendidik dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem	2,5	0
02.04	Pencapaian jumlah target rombongan belajar dari Sekolah Rakyat	1,5	0
02.05	Inovasi untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1,5	0
3	**Pembangunan 3 Juta Rumah**	**10**	**6,75**
03.01	Menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	0,75	0,75
03.02	Menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	0,75	0,75
03.03	Mempercepat proses pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1,5	0,75
03.04	Mensosialisasikan Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Percepatan Proses Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada masyarakat	1	1
03.05	Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan percepatan proses pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	1
03.06	Pencapaian jumlah unit rumah baru yang terbangun	2,5	0

Kode	Program/ Kegiatan/ Indikator	Bobot	Hasil Evaluasi
1	*2*	*3*	*4*
03.07	Inovasi untuk pembangunan 3 Juta Rumah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (SDA)	2,5	2,5
B.	**KETAHANAN PANGAN**	**8,5**	**7,5**
1	**Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah**	**8,5**	**7,5**
01.01	Memberikan penugasan kepada Organisasi Perangkat Daerah di daerah masing-masing dalam pengadaan dan pengelolaan gabah/beras, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	2	2
01.02	Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah pada wilayah masing-masing dalam mendukung pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras, serta penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP)	2	1
01.03	Pencapaian jumlah Cadangan Pangan Beras	2,5	2,5
01.04	Inovasi untuk pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	2	2
C.	**KESEHATAN UNTUK SEMUA**	**21,5**	**14,2**
1	**Jaminan Kesehatan Nasional**	**11**	**9**
01.01	Menyusun dan menetapkan regulasi untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya	0,5	0,5
01.02	Terdapat program, kegiatan dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program JKN	0,5	0,5
01.03	Persentase data realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program JKN	0,5	0,5
01.04	Memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1,5	1,5
01.05	Memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1,5	0,75
01.06	Melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3	1,5	1,5
01.07	Melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran wajib Pekerja Penerima Upah (PPU) di lingkungan pemerintah daerah	1,5	1,5
01.08	Menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan	1,5	0,25
01.09	Inovasi untuk mempercepat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2	2
2	**Makan Bergizi Gratis**	**10,5**	**5,2**
02.01	Membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan penyelenggaraan program MBG daerah guna mendukung percepatan pelaksanaan program MBG di daerah sesuai dengan kewenangan daerah, berdasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)	1	1
02.02	Memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) berupa sarana dan prasarana kantor	1,5	1,5
02.03	Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Satgas berupa rencana kerja, permasalahan yang dihadapi, dan hasil identifikasi titik lokasi SPPG di daerah masing masing secara tepat waktu dan tepat data kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Sekretaris	1	0,5

Kode	Program/ Kegiatan/ Indikator	Bobot	Hasil Evaluasi
1	*2*	*3*	*4*
	Jenderal dan Kepala Badan Gizi Nasional c.q. Deputi Penyediaan dan Penyaluran		
02.04	Pencapaian persentase ibu hamil dan ibu menyusui yang mendapat bantuan makanan bergizi	1,5	0
02.05	Pencapaian persentase anak balita yang mendapatkan bantuan makanan bergizi	1,5	0
02.06	Pencapaian persentase Siswa dan Santri yang mendapatkan bantuan makanan bergizi sesuai target	2	0,2
02.07	Inovasi untuk program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	2	2
D.	**PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN**	**10**	**7,25**
1	**Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah**	**10**	**7,25**
01.01	Mendukung percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada wilayahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan perundang-undangan	1,5	1,5
01.02	Mendukung percepatan digitalisasi pembelajaran satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada wilayahnya sesuai dengan kewenangan masing-masing dan ketentuan perundang-undangan	2,5	2,5
01.03	Pencapaian persentase madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan pendidikan inklusif	2	2
01.04	Pencapaian persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sarpras, termasuk penyediaan fasilitas untuk mendukung satuan Pendidikan inklusif	2	0,25
01.05	Inovasi untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	2	1
E.	**PERTUMBUHAN EKONOMI**	**30**	**27,5**
1	**Pengendalian Inflasi**	**10**	**10**
01.01	Mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1,5	1,5
01.02	Penganggaran BTT untuk Pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat	1	1
01.03	Data dan informasi 9 langkah konkret pengendalian inflasi	1,5	1,5
01.04	Data, informasi, dan dokumentasi penyampaian laporan harian perkembangan bahan pokok di daerah kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri setiap hari kerja	1	1
01.05	Pencapaian tingkat inflasi	1,5	1,5
01.06	Pencapaian pertumbuhan ekonomi (Dibandingkan dengan data pada tahun sebelumnya)	1,5	1,5
01.07	Inovasi daerah untuk pengendalian inflasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	2	2
2	**Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih**	**10**	**7,5**
02.01	Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan, dan subkegiatan terkait yang mendukung pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah serta menyediakan anggaran yang diperlukan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah	1	0,5

Kode	Program/ Kegiatan/ Indikator	Bobot	Hasil Evaluasi
1	*2*	*3*	*4*
02.02	Menyediakan lahan/tanah dari kabupaten/kota, dan/atau aset desa siap bangun minimal luasan lahan pembangunan 1.000 m² (seribu meter persegi) atau bagi yang tidak memiliki lahan yang cukup dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan di setiap daerah	1	0
02.03	Mempercepat penerbitan perizinan dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	1	0
02.04	Memfasilitasi dan memberikan pendampingan dan penyelesaian dalam hal terjadi konflik pertanahan dan lahan/tanah	1	1
02.05	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	1,5	1,5
02.06	Menyampaikan laporan dukungan pemerintah daerah atas pelaksanaan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koperasi dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan.	1,5	1,5
02.07	Pencapaian jumlah Koperasi Merah Putih	1	1
02.08	Inovasi Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	2	2
3	**Kemudahan Perizinan**	**10**	**10**
03.01	Persyaratan dasar Perizinan Berusaha di daerah telah sesuai dengan ketentuan	1,75	1,75
03.02	Peraturan daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor dan Kepala daerah menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan / atau Investor	1,75	1,75
03.03	Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1,5	1,5
03.04	Penyediaan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	1,5	1,5
03.05	Pencapaian nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai target	1,5	1,5
03.06	Inovasi untuk mempercepat kemudahan perizinan di daerah	2	2
		100	**72,2**

Sumber: Bapperida, 2026

Berdasarkan tabel hasil *self assessment* internal Pemerintah Kabupaten tersebut diatas, nilai evaluasi Pro SN Kabupaten Purworejo adalah 72,2 dari bobot total 100. Sedangkan sampai saat ini Kabupaten Purworejo bukan termasuk dari 12 Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah yang sudah melaksanakan program Sekolah Rakyat. Sehingga jika bobot nilai Sekolah Rakyat dikurangi maka nilai 72,2 tersebut akan menghasilkan persentase sebesar 80,22 dari bobot 90 (bobot tanpa Sekolah Rakyat). Adapaun hasil penilaian resmi dari Itjen Kemendagri menurut informasi akan dirilis serentak pada bulan Juli atau Agustus 2026.

2.4.4. EVALUASI KINERJA DUKUNGAN TERHADAP 35 PROGRAM DELEGASI PROVINSI

Program delegasi merupakan program-program prioritas yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang dirancang untuk menjangkau langsung kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan sebanyak 136 program yang terdiri atas 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 program didelegasikan pelakasanaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah termasuk Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Kabupaten Purworejo menyusun berbagai kegiatan dukungan untuk memestikan keberhasilan program-program tersebut. Berikut merupakan gambaran kegiatan-kegiatan untuk mendukung 35 program delegasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.192. Dukungan 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan
1	*2*	*3*
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*)	Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak
		Fasilitasi pemberdayaan perempuan
		Fasilitasi perlindungan anak
		Fasilitasi penurunan stunting
		Fasilitasi penanggulangan kemiskinan
		Fasilitasi pendidikan
		Penjangkauan Anak-anak terlantar di UPT Tat TWAM ASI
		Penjangkauan Anak-anak terlantar di UPT Tat TWAM ASI
		Fasilitasi perlindungan lansia
		Fasilitasi pemberdayaan disabilitas
		Fasilitasi tenologi tepat guna
		Peningkatan kemampuan potensi PSKS
		Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga kepada masyarakat
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ kelurahan
		Fasilitasi dan pembinaan UMKM
		Fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat
		Fasilitasi pelestaian lingkungan
		Fasilitasi desa wisata
		Fasilitasi dan pembinaan PKK
		Fasilitasi dan pembinaan Karang Taruna
		Fasilitasi BUMDes
		Pemberian akses internet gratis di kecamatan dan kelurahan
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Perbaikan rumah tidak layak huni
		Fasilitasi penanganan rumah bagi korban bencana
		Fasilitasi pengesahan siteplan perumahan bagi pengembang
		Pengelolaan sarana dan prasarana Rusunawa
		Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Pelayanan Konsultasi Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)
3		Pendampingan desa anti korupsi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan
1	*2*	*3*
	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK & KPK	Sosialisasi anti korupsi kepada ASN, perangkat desa, dan pelajar
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Fasilitasi integrasi layanan primer (ILP)
		Pemerataan layanan kesehatan dasar dan Pemenuhan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, dan pos kesehatan desa
		Peningkatan operasional kader Posyandu, termasuk dukungan berupa insentif guna memperkuat peran kader dalam pelaksanaan layanan kesehatan.
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Fasilitasi dan Pemberian Hibah Bibit Ikan Nila Unggul
		Pencegahan Hama Penyakit Ikan melalui Uji Sampel Hama Penyakit Ikan, Fasilitasi pemantauan kesehatan ikan dan pemberian obat ikan
		Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	Fasilitasi, identifikasi/ pemetaan, dan pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan pada semua jenjang
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Layanan rumah perlindungan
		Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam rehabilitasi sosial
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Pendampingan dan monitoring desa wisata
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerja sama antar desa
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
		Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
		Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA)
		Pelatihan Penguatan Taruna Siaga Bencana
		Bantuan Lumbung Sosial
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
		Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran
11	Cek Kesehatan Gratis	Pelayanan cek kesehatan gratis
		Pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Pendampingan pelaksanaan intergrasi layanan terpadu (ILP)

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan
1	*2*	*3*
13	Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas, dan Reformasi Birokrasi
		Peningkatan kinerja DPRD melalui peningkatan kapasitas DPRD
		Peningkatan profesionalitas dan kualitas ASN dengan penerapan sistem merit
		Pelayanan Jemput Bola Dokumen Kependudukan Terintegrasi
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak	Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin
		Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Revisi RTRW; Revisi RDTR Purworejo-Kutoarjo; Penyusunan RDTR Kemiri Pituruh (lanjutan); Penyusunan RDTR KPI (lanjutan); Penyusunan RDTR Bendungan Bener atau Revisi RDTR Border City
		Peningkatan daya tarik wisata melalui pembinaan desa-desa wisata di kawasan BOB dan pengembangan kawasan pesisir selatan
		Pelatihan pengolahan produk turunan kelapa, padi, dan perikanan
		Inovasi/ pembaruan pembinaan perindustrian
		Mendorong peluang investasi untuk hilirisasi kelapa, padi, dan perikanan
		Mempersiapkan kawasan peruntukan industri di Grabag - Ngombol - Purwodadi
		Pengembangan industri garam rakyat
		Mendorong peluang investasi untuk hilirisasi produk turunan garam
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Penjangkauan Anak-Anak terlantar di UPT Tat TWAM ASI
		Bimbingan dan Bantuan kepada LKS/LKSA
		Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin, Petugas Lapangan Penanganan Sosial TKSK
		Bantuan Alat Bantu, Bantuan Sandang, Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
		Bantuan Sosial Bersyarat
		Bantuan KUBE
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Pengelolaan destinasi wisata yang ramah muslim
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Pendampingan HAKI
		Pendampingan P-IRT
		Penerbitan P-IRT
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan
		Pelatihan juru sembelih halal
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan	Fasilitasi peningkatan kawasan perdesaan (kerjasama antar desa atau kerja sama dengan pihak ketiga)

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan
1	*2*	*3*
	lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Fasilitasi kegiatan BUMDesma
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
		Fasilitasi pemerintah desa dalam peningkatan desa mandiri energi
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Pemberdayaan wanita mandiri
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan pemasaran digital dan pembuatan konten promosi desa wisata
		Penyusunan konten
		Pembuatan podcast
		Pelatihan konten kreator
		Pelatihan kejuruan TIK
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Pembinaan dan pelatihan UMKM
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Penyediaan data statistik yang akurat dan relevan
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan
		Pengelolaan taman keanekaragaman hayati Heroes Park yang akan dikembangkan menjadi kebun raya. (FS Kebun Raya)
27	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Pendidikan bela negara bagi pelajar dan masyarakat
		Dialog wawasan kebangsaan dan karakter bangsa
		Dialog forum pembauran kebangsaan
		Koordinasi pendidikan dan pelatihan bela negara bagi guru dan siswa
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Koordinasi kerukunan umat beragama dan penghayat kerpercayaan dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan
		Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan sampai tingkat kecamatan
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Pelatihan kompetensi dasar kader bagi kader Posyandu
		Media KIE Posyandu
		Gerakan Posyandu aktif
		Pemberdayaan Posyandu dalam pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	Pelayanan pada usia lanjut
		Bantuan Penyediaan Permakanan, Bantuan Penyediaan Sandang, Bimbingan sosial kepada keluarga lansia, pemberian layanan kedaruratan, penyediaan perbekallan kesehatan
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi

No	Program Delegasi	Aktivitas/ Kegiatan Dukungan
1	*2*	*3*
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Pembinaan dan pelatihan koperasi
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pelaksanaan POPDA Kabupaten dan fasilitasi pengiriman atlet POPDA
		Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten
		Pendampingan, monitoring, dan evaluasi KONI
		Fasilitasi Pekan Paralimpik Pelajar Daerah bagi disabilitas
		Pelaksanaan pemassalan olahraga rekreasi
		Fasilitasi partisipasi kejuaraan olahraga
		Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Fasilitasi penyelenggaraan SD Inklusi dan unit layanan disabilitas
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan

Sumber: Bapperida, 2026

2.5. EVALUASI INOVASI DAN PROGRAM UNGGULAN

2.5.1. EVALUASI INOVASI

Inovasi pembangunan daerah diperlukan sebagai upaya mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Inovasi dalam pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, kinerja pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya ekosistem riset dan inovasi di daerah, yang menurut Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 terdapat 6 (enam) elemen yang membentuk ekosistem riset dan inovasi tersebut, yaitu :

1. Elemen kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah
2. Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi
3. Elemen kemitraan riset dan inovasi
4. Elemen budaya riset dan inovasi
5. Elemen keterpaduan riset dan inovasi di daerah
6. Elemen penyelarasan dengan perkembangan global

Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi riset dan inovasi di daerah bertugas menumbuhkembangkan ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN RI) melakukan penghitungan daya saing daerah untuk seluruh pemerintah propinsi, kabupaten dan kota, dengan mengacu pada *Global Competitiveness Index*. IDSD Kabupaten Purworejo meningkat dari 3,06 pada tahun 2022, menjadi 3,4 pada tahun 2023. 3,85 pada tahun 2024. Berikut Capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2022 sampai dengan 2024 disandingkan dengan skor IDSD tingkat propinsi serta kabupaten/kota tetangga:

Tabel 2.193. Skor IDSD Kabupaten Purworejo Tahun 2022-2025

No	Skor IDSD	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
1	Nasional	3,26	3,44	3,43	3,43
2	Propinsi Jawa Tengah	3,63	3,89	3,84	3,84
3	Kab. Purworejo	3,06	3,4	3,85	3,85
4	Kab. Kebumen	3,05	3,41	3,77	3,77
5	Kab. Wonosobo	2,86	3,21	3,59	3,59
6	Kab. Magelang	2,9	3,27	3,65	3,65
7	Kab. Temanggung	2,92	3,26	3,65	3,65
8	Kota Magelang	3,5	3,81	4,26	4,26
9	Kab. Kulonprogo	3,23	3,49	3,73	3,73

Sumber data : BRIN RI, 2024
*Keterangan : *) adalah angka sementara*

Indeks Daya Saing Daerah tersebut dibentuk dari 12 pilar di mana salah satunya adalah pilar kapabilitas inovasi. Skor tertinggi dari ke 12 pilar tersebut diperoleh dari pilar-pilar yang terkelompok dalam dimensi lingkungan pendukung, yaitu institusi, infrastruktur, adopsi TIK dan Stabilitas Ekonomi Makro. Sementara skor terendah ada pada pilar sistem keuangan, pasar tenaga kerja serta kapabilitas inovasi. Berikut perkembangan skor pada masing-masing pilar IDSD untuk Kabupaten Purworejo:

Tabel 2.194. Perkembangan Skor Pilar IDSD Kabupaten Purworejo

No	Pilar	2022	2023	2024	2025*)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	Lingkungan Pendukung				
1	Institusi	4,37	4,54	4,93	4,93
2	Infrastruktur	1,97	3,02	4,16	4,16
3	Adopsi TIK	3,19	4,66	4,69	4,69
4	Stabilitas Ekonomi Makro	2,95	3,39	3,69	3,69
	SDM				
5	Kesehatan	4,23	4,23	4,19	4,19
6	Keterampilan	3,33	3,28	4,02	4,02
	Pasar				
7	Pasar Produk	3,32	3,28	4,41	4,41
8	Pasar Tenaga Kerja	2,68	2,60	2,80	2,80
9	Sistem Keuangan	3,24	2,01	1,84	1,84
10	Ukuran Pasar	0,89	4,26	4,29	4,29
	Ekosistem Inovasi				
11	Dinamika Bisnis	5,00	3,33	4,05	4,05
12	Kapabilitas Inovasi	1,54	2,23	3,08	3,08

Sumber data: BRIN RI (2024)

Kapabilitas Inovasi, pilar ini menggambarkan sejauhmana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi, lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda serta sejauhmana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Pilar kapabilitas inovasi daerah mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan 2023, capaiannya pada tahun 2024 adalah sebesar 3,08. Apabila dilihat relatif terhadap pilar-pilar lainnya kondisi kapabilitas inovasi

termasuk lebih lemah dibanding capaian pada pilar yang lainnya, indikator-indikator pembentuk kapabilitas inovasi adalah sebagai berikut:

1. Keanekaragaman dan Kolaborasi
   Hal ini dilihat dari indikator-indikator
   a. **Keanekaragaman Tenaga Kerja**. Proporsi jumlah penduduk bekerja laki-laki terhadap perempuan. Idealnya keanekaragaman gender tergambarkan dengan perbandingan pekerja laki-laki dan perempuan sama dengan 1:1
   b. **Pengembangan Klister**. Jumlah klaster industri yang terbentuk dari sentra industri yang berkembang di daerah tersebut. 1 klaster terdiri dari sentra industri utama, supplier, produsen produk/jasa terkait.
2. Riset
   Hal ini dilihat dari indikator-indikator :
   a. **Publikasi Ilmiah**, Indikator ini diukur dari jumlah Publikasi yang dihasilkan oleh penulis yang berafiliasi daerah ybs/kegiatan riset yang dibiayai oleh Pemda (dalam bentuk artikel, buku, atau prosiding)
   b. **Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI)**. Indikator ini diukur dari jumlah KI (paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, hak cipta, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), dan rahasia dagang) yang diajukan oleh pemohon yang berasal dari daerah bersangkutan
   c. **Belanja Riset**. Diukur berdasarkan total belanja riset yang dikeluarkan oleh pelaku riset (perguruan tinggi, pemerintah daerah, serta industri) untuk melakukan kegiatan riset. Data belanja riset perguruan tinggi menggunakan data dana riset. Data belanja riset pemerintah daerah menggunakan anggaran fungsi penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, belanja riset industri menggunakan data belanja litbang hasil survei litbang industri BRIN.
   d. **Indeks Keunggulan Lembaga Riset**. Indikator ini menggunakan data ranking dari Sinta metric Kemendikbudristek untuk peringkat dari semua lembaga pelaku riset (perguruan tinggi dan lembaga riset daerah).

   Makin banyak lembaga riset unggul di suatu daerah, akan mendukung kegiatan riset di daerah tersebut. Ini berarti banyak pelaku riset unggul yang mendukung untuk menghasilkan invensi sebagai modal terjadinya inovasi yang mendukung daya saing di suatu daerah.
3. Komersialisasi
   Hal ini dilihat dari indikator **aplikasi merek dagang**. Indikator ini menggunakan data jumlah Kekayaan Intelektual (KI) merek dan indikasi geografis (IG) yang dihasilkan oleh pelaku riset (perguruan tinggi, lembaga riset daerah, dan industri).
   Makin banyak aplikasi merek dagang menunjukkan makin banyaknya komersialisasi di suatu daerah. Komersialisasi merupakan salah satu dimensi yang menggambarkan kemampuan kapabilitas inovasi untuk meningkatkan daya saing suatu daerah.

Upaya-upaya pemerintah daerah terkait ekosistem riset dan inovasi di daerah serta peningkatan kapabilitas inovasi di daerah, akan lebih intensif

dilakukan mulai tahun 2027 yang akan datang. Sampai dengan saat ini dalam rangka mengawal inovasi daerah, Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi hasil hasil kelitbangan, ujicoba dan penerapan rancang bangun/ replikasi inovasi. Sedangkan untuk inovasi masyarakat yang terinventarisir melalui kompetisi inovasi masyarakat KRENOVA terdapat 194 inovasi masyarakat, berdasarkan tahun keikutsertaannya di KRENOVA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.195. Jumlah Peserta dan Pemenang Krenova Kabupaten Purworejo

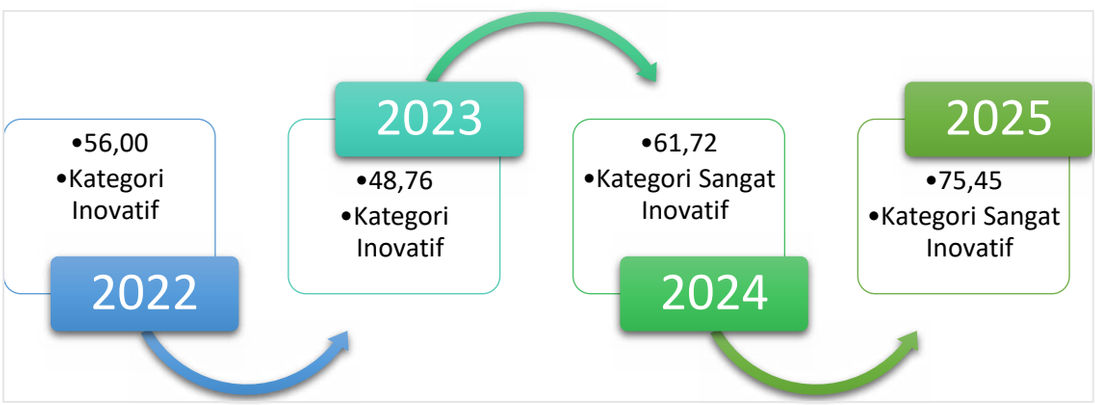
No	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
1	**2**	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Jumlah Peserta Krenova	*30*	*24*	*29*	*29*	*42*
2	Jumlah Pemenang	*6*	*6*	*6*	*6*	*12*

Sumber: Bapperida, 2026

Beberapa diantaranya telah pernah memperoleh fasilitasi melalui program PPBT (Pengusaha Pemula Berbasis Teknologi) Kemenristekdikti, yaitu:

1. Lampu Hemat Energi "SIHEGI"
2. Briket Kokawa (Kotoran Kambing Etawa)

Inovasi perangkat daerah sampai dengan tahun 2025 tercatat terdapat 219 inovasi, yang terdiri dari 101 inovasi perangkat daerah dan 118 inovasi pelayanan Kesehatan. Tingkat kematangan inovasi tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 kematangan inovasi tersebut mengantarkan Kabupaten Purworejo meraih *Innovative Government Award* pada kategori **sangat inovatif** dengan skor IID sebesar 75,45. Perkembangan capaian Indek Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:



Gambar 2.92. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo 2022 s.d 2025

Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2026

Beberapa produk inovasi yang sudah berkembang di Kabupaten Purworejo hingga tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Penerapan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.196. Inovasi yang Sudah Dibangun sampai dengan Tahun 2025

NO	NAMA INOVASI	BIDANG INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	*2*	*3*	*4*
1.	SPMB online	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	e-RAPBS	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Sistem Informasi Manajemen Obat (SIMO) Versi 2.0	Kesehatan	Dinas Kesehatan Daerah
4.	Sistem Informasi Kesehatan Menuju Interoperabilitas SATUSEHAT (SIMAESTRO) Versi 2.0	Kesehatan	Dinas Kesehatan Daerah
5.	SETINJOL (Sedot Tinja Purworejo Online)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	SEMUT IRENG (Semangat Ikut Mengelola Irigasi Bareng-Bareng)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	PAKUeMAS 2025	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	MATRAS LOPIS TANEG 2025	Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
9.	BeNIK Kencana 2025	Sosial	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10.	DIKON KENCAN (Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Keluarga Berencana)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11.	SIMAK	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
12.	KARANGPANDAN 2025	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
13.	Strategi Pemetaan dan Identifikasi Lahan Perikanan Purworejo Kawasan Pesisir (PELIPUR KASIR)	Kelautan dan Perikanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
14.	PELITA	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
15.	PAK SUBUR (Penyerahan Akta Kematian Sebelum Jenazah Dikubur) 2025	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.	PANEN DUREN (Perekaman KTP-el Penduduk Rentan) 2025	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17.	PELAS PEDES	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
18.	KOL PEDES PENTING DALAM KKN	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
19.	Menduan Nyengkir	Perhubungan	Dinas Perhubungan
20.	Simpel Mpu Panjalu 2025	Perhubungan	Dinas Perhubungan
21.	SATU DATA 2025	Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO	NAMA INOVASI	BIDANG INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	*2*	*3*	*4*
22.	Kompak Jo	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
23.	Dolan Purworejo (Website)	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
24.	Calender of Event 2025	Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
25.	Sapugeli 2025 (Safari Perpustakaan Gema Literasi)	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
26.	MAS JARWO (Masyarakat grAtis akSes seJARah purWOrejo)	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27.	Menuju Tertib Ukur 2025 (Menu Terukur 2025)	Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
28.	Forum UMKM GAPURA	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
29.	Purworejo Investment Center (PIC) versi 2.0.	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30.	KLINIK LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
31.	SIPIT 2025	Perindustrian	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja
32.	BLK Purworejo Virtual	Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja
33.	SIAPNO DAMKAR	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
34.	GASPeDaS (Gerakan Aksi Sosialisasi Peraturan Daerah SatPolPP)	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
35.	SURPRISE VERSI 25	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
36.	SAWIJI 2025	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
37.	SINERGI (Sistem Inormasi untuk Kompetensi dan Pengembangan Terintegrasi)	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
38.	SAPA ASN (Sarana Pendampingan ASN)	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
39.	TAKSIKU ADA DI KECAMATAN	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
40.	Perilaku Si Cerdik	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
41.	PORDISTA 2025	ketenteraman, ketertiban umum,	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	NAMA INOVASI	BIDANG INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	*2*	*3*	*4*
		dan pelindungan masyarakat	
42.	e-siska 2025	ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
43.	PELAN MAS JO	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
44.	KETEMU MAS JO	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
45.	E AUDIT PURWOREJO 2025	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah
46.	TERAS PAK BEJO 2025	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Inspektorat Daerah
47.	TV SERASI 2025	Sosial	Sekretariat DPRD
48.	JARI DOIKU: JARIngan DOkumentasi dan Informasi huKUm Sekretariat DPRD Kab. Purworejo	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sekretariat DPRD
49.	Digitalisasi Layanan Kerja Sama (GILA KERJA) 2025	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Pemerintahan
50.	Survey Indeks Kepuasan dan Penyerapan Aspirasi di Purworejo (SIKAP)	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Organisasi
51.	Sistem Informasi Hukum 2025 (SIKUM 2025)	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Hukum
52.	LAPORAN PELAKSANAAN DAK (LAPOR PAK) 2025	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Administrasi Pembangunan
53.	Sistem Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan BUMD (SIMONEL BUMD)	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Perekonomian dan SDA
54.	Pemusatan Pelayanan Registrasi Penyedia (PESAN SI DIA) 2025	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	NAMA INOVASI	BIDANG INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	*2*	*3*	*4*
55.	PANDUAN DAN LAYANAN KEPROTOKOLAN PIMPINAN DI KABUPATEN PURWOREJO SECARA ELEKTRONIK VERSI 2025 (PANDAN KETAN UNIK 2025)	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
56.	Lingkar Ihsan 2025	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Kesejahteraan Rakyat
57.	SISTEM INFORMASI RESERVASI TEMPAT (SMART) 2025	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Umum
58.	TERAP ANGKASA 2	Lingkungan Hidup	Kecamatan Ngombol
59.	PANAS MATENG (Pajak Lunas Masyarakat Anteng)	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Ngombol
60.	GAPURA (Gerakan Peduli Stunting di Grabag) 2025	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Grabag
61.	PENDOK (Pengembangan dan Pemanfaatan Eceng Gondok) 2025	Pertanian	Kecamatan Grabag
62.	Si PATEN JEMPOL	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Purwodadi
63.	POTAS PBB 2025	Keuangan	Kecamatan Purwodadi
64.	PESAT PLUS PLUS – Pengelolaan Sampah Terpadu plus Pelayanan Langsung Urban Sirkular	Lingkungan Hidup	Kecamatan Kaligesing
65.	SIKAT BLACK PANTER (Siaga Kader Trantibum secara Bersama dalam Pencegahan Kebencanaan dan Keamanan serta Penanganan Ketentraman dan Ketertiban)	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Kecamatan Kaligesing
66.	BAKWAN RATNA 2025 (BASIS AKTIVITAS RELAWAN KEDARURATAN DAN BENCANA TAHUN 2025)	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Kecamatan Bagelen
67.	EKSOTIKA BAGELEN (EKSPLORASI WISATA DAN KEBUDAYAAN BAGELEN)	Pariwisata	Kecamatan Bagelen
68.	GEMBLUNG DADI WARAS	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Purworejo
69.	OK PAS VERSI 2025	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Purworejo
70.	JOK PANTER	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Gebang
71.	DESA TERBUKA	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Gebang

NO	NAMA INOVASI	BIDANG INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	*2*	*3*	*4*
72.	SiAP SaT Set WAT WET (Sinergi Antar Program deSA Tambah SEjahTera Wanita Anak disabilaTas terWadahi secara Ekonomi dan Terlindungi)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kecamatan Loano
73.	Klik DESA (Klinik Layanan konsultasi Dana Tranfer Desa)	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Loano
74.	Dolan Deso	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Bener
75.	PUN CAKEB (Pemberdayaan UMKM Untuk Cah Kreatif Bener) 2025	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Bener
76.	Gesit Pro PKK 2025	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Bayan
77.	KABAYAN NGOPI (Kecamatan Bayan Ngolah Pikir)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Bayan
78.	SIMDES BANYUURIP 2025	Kearsipan	Kecamatan Banyuurip
79.	SIPUMA (SISTEM INFORMASI KEPUASAN MASYARAKAT) 2025	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Banyuurip
80.	TAPEL KUDA (Teknik Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa)	Keuangan	Kecamatan Kutoarjo
81.	BANG PAKU (Pengembangan Pengelolaan Sampah Kelurahan Kutoarjo)	Kesehatan	Kecamatan Kutoarjo
82.	SHOJU UMKM BUTUH 2025	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kecamatan Butuh
83.	GERAKAN DARSI SERBU 2025	Sosial	Kecamatan Butuh
84.	ASLI KEKE 2025 (Aksi Stunting Lungo Idola Kemiri Keren)	Kesehatan	Kecamatan Kemiri
85.	SMART KEMIRI 2025 (Showroom Marketing Usaha Mikro Kecil Menengah Kecamatan Kemiri)	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kecamatan Kemiri
86.	INOVASI SADE SAMPAH V 2	Lingkungan Hidup	Kecamatan Pituruh
87.	Posko Kencana	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Kecamatan Pituruh
88.	Sisi Aula 2025	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Bruno
89.	Bruno Pink's 2025	Lingkungan Hidup	Kecamatan Bruno
90.	LAPOR DIREKTUR	Kesehatan	RSUD dr. Tjitrowardaja
91.	ANOMAN OKE Blas T (antar obat aman sampai tujuan ora lali konseling dan edukasi apoteker, Wa Blast, Take A way)	Kesehatan	RSUD dr. Tjitrowardaja
92.	SULTAN BEJO	Kesehatan	RSUD dr. Tjitrowardaja
93.	ANTAR JEMPUT PASIEN	Kesehatan	RSUD dr. Tjitrowardaja
94.	MOMMY PRETTY	Kesehatan	RSUD dr. Tjitrowardaja
95.	Tjitra Homecare	Kesehatan	RSUD dr. Tjitrowardaja

NO	NAMA INOVASI	BIDANG INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	*2*	*3*	*4*
96.	OPPA TESI (Optimalisasi Pelayanan Penyakit Hipertensi)	Kesehatan	Puskesmas Bagelen
97.	SKSD IVA SADANIS (Skrining Kanker Serviks dan Payudara)	Kesehatan	Puskesmas Bagelen
98.	BEDAH SEMAK / SIMILA	Kesehatan	Puskesmas Bener
99.	ANTERLA (Antenatal Care Jemput Bola)	Kesehatan	Puskesmas Bener
100.	PISANG ROJO (PIJET SESARENGAN ROGO RAHARJO)	Kesehatan	Puskesmas Bener
101.	PAULIN (Pantauan KB Pasca Salin)	Kesehatan	Puskesmas Bener
102.	GERUS TB (Gerakan Usut Tuntas TB)	Kesehatan	Puskesmas Bener
103.	BERKAH SIMANIS (Bersama sama Cek Tekanan Darah, Iva dan Sadanis)	Kesehatan	Puskesmas Bener
104.	GERDUS (Gerakan Peduli Sanitasi)	Kesehatan	Puskesmas Bener
105.	TAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DAN TAMAN GIZI KELUARGA (TAGA)	Kesehatan	Puskesmas Kemiri
106.	CAPING (Calon Pengantin Pintar Gizi)	Kesehatan	Puskesmas Kemiri
107.	KARI PEDAS (Kami Kemiri Peduli Stunting)	Kesehatan	Puskesmas Kemiri
108.	JURU TIPAS (KUNJUNGAN RUMAH DAN MOTIVASI KB PADA IBU PASKA SALIN)	Kesehatan	Puskesmas Kemiri
109.	KELAS KASIH JIWA	Kesehatan	Puskesmas Kemiri
110.	PELANGI SENJA (Peduli Lansia Imbangi Senam dan Jalan Sehat)	Kesehatan	Puskesmas Kemiri
111.	Ceting Mama (Cegah Stunting Maju Bersama)	Kesehatan	Puskesmas Winong
112.	Kemilau Cinta Ibu	Kesehatan	Puskesmas Butuh
113.	Jumat Berkah	Kesehatan	Puskesmas Pituruh
114.	Juragan Canting (Jurus Dhahar Tigan Cegah Stunting)	Kesehatan	Puskesmas Sruwohrejo
115.	Kesah Kutho	Kesehatan	Puskesmas
116.	Masbuli Guwa (Puskesmas Butuh Peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa)	Kesehatan	Puskesmas butuh
117.	Perencanaan Berbasis Hasil Pendataan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) di Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Bagelen	Kesehatan	Puskesmas Bagelen
118.	JARING IKAN MAS	Kesehatan	Puskesmas Banyuasin
119.	LanTing Jeng Anik	Kesehatan	Puskesmas Banyuasin
120.	GEMAR MAKAN TOMAT (Gebrak Malaria Bersama Kader dan Tokoh Masyarakat)	Kesehatan	Puskesmas Banyuasin
121.	SigRak Catin - Camil (Sinergi Integrasi Serentak Calon Pengantin dan Calon Ibu Hamil)	Kesehatan	Puskesmas Banyuurip
122.	SiPita Peduli Resti	Kesehatan	Puskesmas Banyuurip
123.	GeMPITa (Gerakan Masyarakat Peduli Ibu dan Balita)	Kesehatan	Puskesmas Banyuurip

NO	NAMA INOVASI	BIDANG INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	*2*	*3*	*4*
124.	GePrek PUS 4T - ALKI (Gerakan Pemberdayaan Serentak PUS 4T-Anemia, Lila Kurang, Penyakit Kronis, Infeksi Menular sexual)	Kesehatan	Puskesmas Banyuurip
125.	21 Hari PeRiGi (21 Hari Perubahan perilaku Kesehatan Gigi)	Kesehatan	Puskesmas Banyuurip
126.	GerDu PanjiMas (Gerakan Terpadu Penangganan Jiwa Masyarakat)	Kesehatan	Puskesmas Banyuurip
127.	Skrining Integrasi RT	Kesehatan	Puskesmas Banyuurip
128.	UKGS Inovatif	Kesehatan	Puskesmas Banyuurip
129.	BerRang Nyantak (Berantas Sarang Nyamuk Serentak)	Kesehatan	Puskesmas Banyuurip
130.	Spot Rumah Gizi plus Klinik Kader	Kesehatan	Puskesmas Banyuurip
131.	Pemicuan Selektif dan CSR Percepatan Desa/Kel ODF	Kesehatan	Puskesmas Banyuurip
132.	Posyandu Difabel	Kesehatan	Puskesmas Banyuurip
133.	Bedah Belukar (Pemberantasan Nyamuk di wilayah endemis malaria dan DB)	Kesehatan	Puskesmas Dadirejo
134.	Gelis Terang Keswamas (Gerakan Lintas Sektor Terpadu dalam Penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat)	Kesehatan	Puskesmas Dadirejo
135.	Gertak Ceting (Gerakan Cegah Stunting)	Kesehatan	Puskesmas Dadirejo
136.	PRODISA (Prolanis DM-HT di Desa melalui UKBM Posyandu Prima)	Kesehatan	Puskesmas Dadirejo
137.	MENTARI	Kesehatan	Puskesmas Kutoarjo
138.	SITORJO (SISTEM INFORMASI PUSKESMAS KUTOARJO)	Kesehatan	Puskesmas Kutoarjo
139.	BERLIAN (Bersama Kendalikan Penyakit Tidak Menular)	Kesehatan	Puskesmas Kutoarjo
140.	CATIN CETAR (CALON PENGANTIN CERDAS DAN PINTAR)	Kesehatan	Puskesmas Kutoarjo
141.	Jupe Ketawa (Jurus Peduli Kesehatan Jiwa)	Kesehatan	Puskesmas Kutoarjo
142.	GREBEK ASIN MANIS (Gerakan Bersama Kendalikan Hipertensi dan DM)	Kesehatan	Puskesmas Grabag
143.	Si ALIN PATROLI KB (Siap Antar KB Pasca Salin Papat Loro Dino Jo Lali KB)	Kesehatan	Puskesmas Grabag
144.	SRIKANDI GREBEG TB	Kesehatan	Puskesmas Grabag
145.	GASEBA (GAul SEhat BAhagia)	Kesehatan	Puskesmas Grabag
146.	SADAR JAMILAH (Satu Kader Jaga Ibu Sampai Melahirkan)	Kesehatan	Puskesmas Grabag
147.	GELANG DAN KALUNG D'KIA (Gerak Langkah Bidan dan Kader Demi Kesehatan Ibu dan Anak)	Kesehatan	Puskesmas Loano
148.	MASNO SEBAR PULSA (Puskesmas Loano Sehar Bar Kumpul Desa)	Kesehatan	Puskesmas Loano
149.	SENAM WAJAH (Setia Mendampingi Jiwa dengan Kunjungan Rumah)	Kesehatan	Puskesmas Loano
150.	Cerdas Hadapi stunting	Kesehatan	Puskesmas Karanggetas
151.	DUREN MANIS	Kesehatan	Puskesmas Kaligesing

NO	NAMA INOVASI	BIDANG INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	*2*	*3*	*4*
152.	(Dukung Rencana Managemen Penyakit Kronis)		
153.	GELANG EMAS (Gerakan Lansia Kunjungan Ke Masyarakat)	Kesehatan	Puskesmas Kaligesing
154.	KEPITING KALIGESING (KELOMPOK PEDULI STUNTING KALIGESING)	Kesehatan	Puskesmas Kaligesing
155.	NAGITA SAYANG ANAK (Pelayanan Gigi Kita Sayang Anak)	Kesehatan	Puskesmas Seborokrapyak
156.	SITANU AKTIF (Sisir Kesehatan Usia Produktif)	Kesehatan	Puskesmas Karanggetas
157.	ZIA SUKA SOSIS (Razia Suspect dan Kasus Tuberculose)	Kesehatan	Puskesmas Karanggetas
158.	CETINGE MAS RANGGA (Cegah Stunting Bersama Puskesmas Karanggetas)	Kesehatan	Puskesmas Karanggetas
159.	MAS RANGGA NABUH GAMELAN (Puskesmas Karanggetas Nabung Uwoh Gawe Merteni Lingkungan)	Kesehatan	Puskesmas Karanggetas
160.	GETAS TBC (Gerakan Berantas TBC)	Kesehatan	Puskesmas Kaligesing
161.	GERBEK TUTI (Gerakan Ber KB Turunkan Resti)	Kesehatan	Puskesmas Bener
162.	DEWI ANJANI (Desa dan Warga ber Integrasi Arisan jambanisasi)	Kesehatan	Puskesmas Winong
163.	KOPI BREAK (Komitmen Pagi, Baris Rapi, Absensi, Koordinasi)	Kesehatan	Puskesmas Winong
164.	TB GEBER TB TOPCER (Gerakan Berantas TB, Temukan, Obati, Pastika Sembuh, Cegah Resisten dan Penularan)	Kesehatan	Puskesmas Winong
165.	TUTIK TURU (Satu Jumantik Satu Rumah)	Kesehatan	Puskesmas Winong
166.	CATIN MANTUL (Calon Pengantin Mandiri Terampil Unggul)	Kesehatan	Puskesmas Winong
167.	KELAS KADER "SRIKANDI"	Kesehatan	Puskesmas Kemiri
168.	GERIVA KB MASPUR (Gerakan IVA untuk ber-KB Puskesmas Purworejo)	Kesehatan	Puskesmas Purworejo
169.	Merpati Pos (Mencari Pasien / Terduga Tb Di Posyandu Dan Posbindu)	Kesehatan	Puskesmas Kutoarjo
170.	CANTING KACA (CegAh stuNTING dengan eduKAsi CAlon pengantin)	Kesehatan	Puskesmas Kutoarjo
171.	BIMA (BUTUH INCAR ASIN-MANIS)	Kesehatan	Puskesmas Butuh
172.	PAK DEDI KASPARI (Pelaksanaan Deteksi Dini Kanker Serviks Pada Saat Safari KB)	Kesehatan	Puskesmas Winong
173.	POSIZI PENTING	Kesehatan	Puskesmas Butuh
174.	Gelas Timah	Kesehatan	Puskesmas Sruwohrejo
175.	Rujak Candisari (Rumah Jamu dan Akupresure) Desa Candisari	Kesehatan	Pusk Banyuurip
176.	POS CERIA	Kesehatan	Puskesmas Purworejo
177.	PENJAS TB (Penjaringan Suspek TB)	Kesehatan	Puskesmas Kemiri

NO	NAMA INOVASI	BIDANG INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	*2*	*3*	*4*
178.	PARAMEKS (Program Screening dan Pengobatan Penyakit Menular Seksual)	Kesehatan	Puskesmas Bubutan
179.	POSYANDU HOLISTIK INTEGRATIF BEASTI SIAGA (berkualitas tingkatkan kesehatan ibu, anak dan keluarga)	Kesehatan	Puskesmas Bubutan
180.	GELAS HEPI ASMARA (GERAKAN KELAS HIPERTENSI DI MASYARAKAT)	Kesehatan	Puskesmas Kemiri
181.	PENJAS-TB (Penjaringan Suspek TB)	Kesehatan	Puskesmas Kemiri
182.	Yuk NGOPI SEK Lur (Yuk NGObrol PIntar SEputar Kesehatan Lur)	Kesehatan	Puskesmas Pituruh
183.	DANDER SIAGA (Bidan Kader Siap Antar Jaga)	Kesehatan	Puskesmas Semawung Daleman
184.	HARUMSANTIK (Hari Jumat Periksa Jentik)	Kesehatan	Puskesmas Mranti Purworejo
185.	PRODISA (Prolanis DM-HT di Desa melalui UKBM Posyandu Prima)	Kesehatan	Puskesmas Dadirejo
186.	BAKAT ISUH 1000HPK (BAPAK ANGKAT IBU ASUH SAMPAI 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN)	Kesehatan	Puskesmas Dadirejo
187.	BABY AND KIDS SPA	Kesehatan	Puskesmas Dadirejo
188.	GEPLAK HITAM MANIS (Gerakan Pelayanan Hipertensi dan Kencing Manis)	Kesehatan	Puskesmas Bruno
189.	GENTING (Gerakan Atasi Stunting dan Wasting)	Kesehatan	Puskesmas Bruno
190.	Mba DarLinG (Mari Bersama Daftar Online di Puskesmas Gebang)	Kesehatan	Puskesmas Gebang
191.	PADU STUNTING (Pelayanan Terpadu Atasi Stunting)	Kesehatan	Puskesmas Kaligesing
192.	Ceting Kaca (CEgah stunTING dengan KelAs CAtin)	Kesehatan	Puskesmas Gebang
193.	PAPA HEBAT (Pemantauan Kepatuhan Hipertensi Terobati)	Kesehatan	Puskesmas Bener
194.	PENYETAN LELE (Penyuluhan Kesehatan Lewat *Google Meet*)	Kesehatan	Puskesmas Bagelen
195.	KON ELING (KONSELING KESEATAN LINGKUNGAN)	Kesehatan	Puskesmas Butuh
196.	DEK RIMAH (DESA KIRIM DAHAK)	Kesehatan	Puskesmas Butuh
197.	KAMU TTM (KADER MUTER TEMUKAN TB DI MASYARAKAT)	Kesehatan	Puskesmas Wirun
198.	NGOYAK MAS DENI (NGOYAK MASYARAKAT UNTUK DETEKSI DINI)	Kesehatan	Puskesmas Wirun
199.	Gelas Timah (GERAKAN LANSIA DITINJAU KE RUMAH)	Kesehatan	Puskesmas Sruwohrejo
200.	TERAS NING KESWA MAS (TERAPI SEFT, SKRINING, KESEHATAN JIWA di MASYARAKAT)	Kesehatan	Puskesmas Bagelen
201.	JUMINAH TB (KUNJUNGAN RUMAH PENDERITA TBC)	Kesehatan	Puskesmas Gebang

NO	NAMA INOVASI	BIDANG INOVASI	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	*2*	*3*	*4*
202.	Keris Gading Kelas Bumil KEK dan Risti Sebagai Upaya Gerakan Atasi Dini Stunting	Kesehatan	Puskesmas Grabag
203.	Jempalitan (jemput, photonewborn, antar ibu bersalin tanpa bayar)	Kesehatan	Puskesmas Butuh
204.	Imunitas (Ingat-ingat Imunisasi Anak Terpadu Tiap Senin)	Kesehatan	Puskesmas Butuh
205.	SKSD Manis (Skrining kanker servik dan payudara dengan mobile IVA Sadanis)	Kesehatan	Puskesmas Bagelen
206.	GEMA SI DINI RONDHO (Gerakan Masyarakat Deteksi Dini Loro Endho)	Kesehatan	Puskesmas Cangkrep
207.	GEMA GADIS MANIS (Gerakan masyarakat jaga disabilitas dari masalah penyakit kronis)	Kesehatan	Puskesmas Cangkrep
208.	Dafolin (Pendaftaran Online Imunisasi Bayi dan Balita di Puskesmas)	Kesehatan	Puskesmas Cangkrep

Sumber: Bapperida, 2025

2.5.2. EVALUASI PROGRAM UNGGULAN

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, terdapat 7 Program unggulan yang disebut dengan "*PITULUNGAN*". Program ini disusun guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan merespon berbagai isu strategis yang ada di Kabupaten Purworejo. Setiap program unggulan mencakup beberapa kegiatan unggulan yang mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Berikut ketujuh program unggulan tersebut.

1) Pinter Bocahe

Pinter bocahe merupakan program prioritas di bidang pendidikan dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun yang bertujuan untuk memastikan seluruh anak usia PAUD, SD, dan SMP mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan inklusif yang diselenggarakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang tidak dapat menempuh jalur pendidikan reguler, yang menekankan aspek akademik dan pembentukan karakter melalui pendidikan moral, penguatan iman dan taqwa, peningkatan literasi, serta nilai-nilai kebangsaan. Program ini juga bertujuan untuk mencetak pemuda berprestasi yang berdaya saing dan menjadi agen perubahan. Melalui program ini, pemuda diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam bidang akademik, seni budaya, olahraga, maupun teknologi. Dengan pendekatan holistik, program ini mendorong terwujudnya generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berbudaya, berkarakter kuat, dan menguasai teknologi sebagai bekal dalam menghadapi tantangan masa depan.

2) Religius Masyarakate

Religius Masyarakate merupakan program prioritas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang religius, harmonis, dan inklusif dalam keberagaman beragama. Program ini berfokus pada pendidikan anak beriman, pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya serta penyediaan dan peningkatan sarana prasarana peribadatan yang layak dan merata bagi seluruh pemeluk agama yang diakui negara sehingga setiap individu dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan aman yang disertai dengan penguatan nilai-nilai toleransi, gotong royong, serta keharmonisan antarumat beragama dalam kehidupan sosial.

3) Sehat Penduduke

Sehat Penduduke merupakan program prioritas yang bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses yang terjangkau, berkualitas, dan berkeadilan terhadap layanan dan edukasi kesehatan. Program ini mengintegrasikan berbagai langkah preventif seperti edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), *open defecation free* (ODF), serta pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga berencana (KB). Selain itu, program ini juga menitikberatkan pada penyediaan fasilitas kesehatan serta sarana dan prasarana olahraga yang memadai, peningkatan kualitas tenaga medis, serta optimalisasi sistem layanan kesehatan agar lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat yang mencakup penyediaan layanan kesehatan gratis bagi peserta kelas 3, termasuk melalui mekanisme pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjamin masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa kendala finansial. Dengan pendekatan yang komprehensif, program ini tidak hanya berfokus pada penyembuhan, tetapi juga pada upaya promotif dan preventif guna meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Berikut merupakan gambaran program Sehat Penduduke dan beberapa kegiatan unggulannya.

4) Sejahtera Wargane

Sejahtera Wargane merupakan program prioritas yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup sandang, pangan, dan papan yang terjangkau serta layak bagi seluruh lapisan masyarakat yang juga berfokus pada optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapat masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dan peningkatan tata kelola dan basis data kemiskian, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap sumber daya, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, makmur, dan sentosa dengan memastikan stabilitas sosial, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesempatan kerja dan usaha yang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

5) Alus Dalane

Alus Dalane merupakan program unggulan yang berfokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang mencakup peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta drainase, dan juga penyediaan kelengkapan jalan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dengan pendanaan yang bersumber dari berbagai mekanisme, termasuk APBD, APBN, dana desa, serta skema kolaboratif lainnya seperti kemitraan dengan sektor swasta dan dana hibah, guna memastikan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purworejo, dilakukan supervisi ke pemerintah desa terkait penataan desa. Dengan pendekatan yang terintegrasi, program ini diharapkan mampu menciptakan infrastruktur yang merata dan akses transportasi yang lebih baik sehingga dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Berikut merupakan gambaran program Alus Dalane dan beberapa kegiatan unggulannya

6) Rame Pasare

Rame Pasare merupakan program prioritas yang berfokus pada optimalisasi sektor ekonomi lokal melalui modernisasi dan penguatan aktivitas ekonomi secara luas yang mencakup revitalisasi pasar tradisional, pengembangan wisata daerah, pengembangan industri lokal, pengembangan infrastruktur perdagangan, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan pemasaran bagi pelaku usaha yang juga berfokus pada pemberdayaan pedagang, pelaku UMKM, dan pelaku pariwisata melalui pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, serta penguatan ekosistem bisnis yang berdaya saing. Dengan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas, program ini diharapkan mampu menciptakan iklim ekonomi yang lebih dinamis, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai sektor.

7) Ayem Petanine

Ayem Petanine merupakan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani atau pekerja di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan melalui optimalisasi infrastruktur usaha tani serta penyediaan akses yang memadai terhadap pupuk, pasar, dan sumber daya pertanian lainnya dengan berfokus pada pengembangan dan perbaikan prasarana serta sarana pertanian, seperti sistem irigasi, jalan usaha tani, dan alat-alat pertanian modern guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani, serta mendorong kebijakan dan dukungan bagi petani dalam mengakses pupuk bersubsidi, permodalan, serta jaringan pemasaran yang lebih luas dan stabil, sehingga hasil panen dapat terserap dengan baik dan memberikan keuntungan maksimal bagi petani. Dengan strategi yang komprehensif, Ayem Petanine berperan dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

Adapun realisasi pelaksanaan program unggulan daerah sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.197. Realisasi Program Unggulan Daerah Sampai Dengan Tahun 2025

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN UNGGULAN	REALISASI/ IMPLEMENTASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	*2*	*3*	*4*
Pinter Bocahe	Pemberian pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk peningkatan kualitas guru	Telah terlaksana diklat guru Mapel PKn, Matematika dan IPA. Sedangkan untuk Diklat Calon Kepala masih dalam tahapan persiapan, koordinasi, dan penyamaan persepsi terkait konsep kegiatan dengan penyelenggara yaitu BBGTK dan koordinasi dengan KSPS terkait pelaksanaan seleksi serta jadwal diklat. Selanjutnya untuk Peningkatan kapasitas Guru PAUD juga sudah dilaksanakan.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pengembangan pusat pembelajaran masyarakat	- Pelaksanaan layanan perpustakaan menetap dan keliling - Melakukan Identifikasi bahan pustaka untuk pengadaan - Telah dilaksanakan di Desa Geparang Kecamatan Purwodadi - Melaksanakan sosialisasi terkait naskah kuno - Melaksanakan stakeholder meeting guna membangun sinergi lintas sektor untuk menyelaraskan peran dan tanggung jawab, sehingga rencana kegiatan dapat terimplementasi secara optimal dan berkelanjutan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Religius Masyarakate	Memperluas kesempatan menjalankan ibadah bagi masyarakat sesuai dengan agama yang diakui negara	Pembinaan anak beriman dan berkepribadian sudah dilaksanakan sejak awal tahun (Januari).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Telah direalisasikan penyaluran dana hibah untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sehat Penduduke	Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk semua warga	Pendampingan pelaksanaan intergrasi layanan terpadu (ILP), Pelaksanaan akreditasi di fasilitas kesehatan, Pelaksanaan promosi kesehatan, Pelayanan cek kesehatan gratis	Dinas Kesehatan Daerah
	Mempermudah dan mempercepat proses pengurusan jaminan sosial kesehatan	Pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat	Dinas Kesehatan Daerah
	Pembangunan dan optimalisasi fasilitas olah raga bagi pemuda dan masyarakat	Fasilitasi sarana dan prasaraan olahraga berupa GOR dan Stadion Sarwo Edhie Wibowo.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN UNGGULAN	REALISASI/ IMPLEMENTASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	*2*	*3*	*4*
	Peningkatan kualitas gizi masyarakat	- Penanganan desa rentan rawan pangan - Pengawasan dan pembinaan pangan segar asal tumbuhan - Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH) - Pengawasan pre-market dan post-market IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) - Pembinaan pelaku Usaha pada produsen pangan dan sarana peredaran pangan pada bidang PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan POSS (Pangan Olahan Siap Saji) - Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) - Sosialisasi dan Edukasi Pangan dan Gizi	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian - Dinas Kesehatan Daerah
Sejahtera Wargane	Membangun dan/ atau memperbaiki sanitasi lingkungan	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pembinaan, sosialisasi, dan edukasi tentang fungsi perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Kampanye lingkungan hidup (Hari Peduli Sampah Nasional, World Cleaning Day, Hari Lingkungan Hidup, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional)	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	Penambahan kuantitas dan kualitas RTH	Pemeliharaan RTH Perkotaan, serta Pengelolaan Heroes Park	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	Program pembangkit listrik tenaga terbarukan	Fasilitasi pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (Biogas)	Sekretariat Daerah
	Pengembangan hutan sebagai kebun raya akademik	Pemeliharaan Heroes Park	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	Kabupaten bersih dan bebas sampah	Operasional dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir	Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan
	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih, berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.	- Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intranet & pusat data - Penguatan Keamanan Siber dan Perlindungan Data - Pengelolaan Data Statistik - Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas - Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi - Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi	- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian - Inspektorat Daerah - Sekretariat Daerah - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN UNGGULAN	REALISASI/ IMPLEMENTASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	*2*	*3*	*4*
		- Pengelolaan arsip statis; Pengawasan kearsipan di perangkat daerah; Penguatan unit kearsipan pada perangkat daerah; Pengelolaan depot arsip - Pelayanan jemput bola dokumen kependudukan - Pelayanan jemput bola dokumen pencatatan sipil	
	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Perangkat Daerah.	Telah dilaksanakan rapat koordinasi PUD serta rapat koordinasi PUSPA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Membentuk lembaga/ forum/ satuan tugas yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa/ kelurahan.	Telah dilaksanakan rapat koordinasi Kecamatan Berdaya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Penguatan koordinasi, kerja sama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.	Telah dilaksanakan Rakor Forkare, Kampanye PPA, Sosialisasi pencegahan pernikahan anak, Ramadhan ramah anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Telah dilaksanakan pelatihan untuk warga rentan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Pengembangan mitigasi dengan Early Warning System (EWS) bencana berbasis internet of thing (IoT).	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Penguatan daerah dan masyarakat yang tangguh bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Memperbaiki keamanan pangan dan menambah aksesibilitas pangan bagi masyarakat.	- Pengawasan pre-market dan post-market IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan) - Pembinaan pelaku Usaha pada produsen pangan dan sarana peredaran pangan pada bidang PIRT dan POSS	Dinas Kesehatan Daerah

PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN UNGGULAN	REALISASI/ IMPLEMENTASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	*2*	*3*	*4*
Alus Dalane	Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo	- Telah dilaksanakan posko lebaran dan kegiatan pengaturan lalu lintas secara rutin - Dilaksanakan penataan parkir di lapangan secara rutin - Telah dilaksanakan mudik gratis	Dinas Perhubungan
Rame Pasare	Fasilitas akses permodalan, pemasaran, pelatihan, dll untuk usaha mikro dan kecil, terutama bagi industri rumahan yang dikelola perempuan	Pelaksanaan pelatihan vocational pembuatan tepung Mocaf	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menangah, dan Perdagangan
	Menyelenggarakan berbagai festival berbasis agroindustri, religi, dan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata.	Penyelenggaraan pameran dagang lokal (Purworejo Expo, Gebyar UMKM, Dukungan terhadap Festival Layang-Layang)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menangah, dan Perdagangan
	Peningkatan citra dan positioning kepariwisataan Purworejo	- Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata - Dukungan promosi digital dan media sosial - Dukungan pemuatan konten digital	- Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
	Hilirisasi hasil penelitian/ penerapan teknologi tepat guna.	Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pemabngunan, Riset, dan Inovasi Daerah
	Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja (pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi)	Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
Ayem Petanine	Menambah penggunaan alat teknologi pertanian (seperti pompa air, sprayer, traktor tangan, sel surya, dll)	Monitoring pemanfaatan alat dan mesin pertanian; Pelatihan /pembinaan UPJA di desa Keburuhan kecamatan Ngombol	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2.6. TELAAH POKOK PIKIRAN DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027 ditelaah dan diselaraskan dengan isu, prioritas pembangunan daerah, dan program prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menunjukkan telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2027.

Tabel 2.198. Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2027

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	5) Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif	5) Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	30%	Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol (Kab. Purworejo)	MWCNU KEC. GRABAG Jl. Kutoarjo-Ketawang KM.8 Desa Sangubanyu Kec. Grabag, Kab. Purworejo	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	TMS, 1 AHU dengan PC NU, usulan MWC agar melalui PCNU
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%		PAC FATAYAT NU KEC. BUTUH Dsn. Butuh Krajan RT 001 RW 001 Desa Butuh, Kecamatan Butuh Hp. 082315728582, Kab. Purworejo		TMS, AHUnya 1 dari pusat sampe ke ranting, dan tahun 2026, Fatayat Kabupaten sudah mendapatkan hibah
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.000 Orang		KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA (KPPI) JL. MAYJEND SUTOYO NO 5 KELURAHAN SINDURJAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, bukan hasil reses
							Yayasan Pusaka Karya Bangsa Desa Girigondo Kec Pituruh, Kab. Purworejo		TMS, bukan hasil reses
							MUSLIMAT NU KEC. BANYUURIP Desa Tegalkuning, Banyuurip (Hj. Sumiyatun 0895414836093), Kab. Purworejo		TMS, bukan hasil reses AHUnya 1 dari pusat sampe ke ranting, dan tahun 2026, Muslimat Kabupaten sudah mendapatkan hibah
							Perkumpulan LSM Surya Mentari Semesta Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, bukan hasil reses dan usulan di luar Dapil

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							JMQH KAB. PURWOREJO. Ponpes Lu'luil Qur'anil Maknun Senepo Blimbingan 002/012, Kel. Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Telp 085643930910 , Kab. Purworejo		TMS, tidak ada dalam hasil reses
							Baledono Krajan RT 003/ RW 008, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, usulan bukan kewenangannya dan di luar Dapil
							Gang plaosan V no 10 RT 001 RW014, Kelurahan Purworejo, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, usulan di luar Dapil
							Yayasan Pusaka Karya Bangsa RT.01 / RW.03 Dusun Garagan Desa Girigondo Kecamatan Pituruh, Kab. Purworejo		TMS, usulan dobel
							Himasal Purworejo Krajan Kulon RT.02 / RW.04 Desa Paitan Kemiri, Kab. Purworejo		TMS, usulan dobel dan tidak ada dalam reses
							Pengurus Cabang "Himasal" Desa Paitan Kemiri Kec Kemiri, Kab. Purworejo		TMS, usulan dobel dan tidak ada dalam reses
							Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo , Kab. Purworejo		TMS, usulan seragam Satgas PGRI bukan kewenangan Bakesbangpol,
2	5) Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif	5) Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan	100%	Bantuan keuangan khusus bidang jalan (Kab. Purworejo)	Desa Winong Kidul RT 003 / RW 004, Desa Winong Kidul, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	MS
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		Desa Pogung Juru Tengah RT 1/RW 2, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		MS
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		PEMDES SUKOWUWUH KEC. BENER Jl. Bedug-Sidomukti KM.5 Sukowuwuh Bener, Kab. Purworejo		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan					Dusun Kedungrejo RW.03 Desa Sokoagung Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo		MS
							Dusun Tepus Rt.01 dan 04 Rw.05, Desa Somorejo Kecamatan , Kab. Purworejo		MS
							Rt.02 Rw.01 Desa Soko Kecamatan Bagelen Jalan Poros ruas jalan Desa Soko-Piji, Kab. Purworejo		MS
							RT 001 RW 001 DESA SEBOROPASAR KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							RT 02 RW 02 DESA AWU AWU KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							dusun dukuh rt 01 rw 06 Desa Sedayu Kecamatan Loano Pengusul Miswan No Hp 082327564234, Kab. Purworejo		MS
							Dusun Lorkali Desa Sedayu Kecamatan Loano Pengusul Idris Efendi, Kab. Purworejo		MS
							PEMDES KALIJAMBE KEC. BENER Jl. Magelang KM.18 Bener, Kab. Purworejo		MS
							PEMDES PEKACANGAN KEC. BENER Jln. Kalijambe-Banyuasin KM.6, Kab. Purworejo		MS
							PEMDES WADAS KEC. BENER Jl. K Hasan Bardi No.1 desa Wadas Bener, Kab. Purworejo		MS
							PEMDES SEMAGUNG KEC. BAGELEN, Kab. Purworejo		MS
							DUKUH KALIGAWE RT 001 RW 001 DESA SIDOMULYO KECAMATAN BUTUH KABUPAYEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							RT 01 RW 01 DESA GIRIREJO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							Jalan desa RT 003/RW 002 Desa Pogungjurutengah, kecamatan bayan, Kab. Purworejo		MS
							Desa Pogungkalangan RT 002/RW 001, Kecamatan Bayan , Kab. Purworejo		MS
							Desa Sumbersari, Kecamatan Banyuurip , Kab. Purworejo		MS
							RT 009 RW 004 DESA WASIAT KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							Dusun Jolodoro Desa Guntur Kecamatan Bener, Kab. Purworejo		MS
							Dusun Pejaten RT 002/ RW 002, Desa Tridadi, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Dusun Kedungdowo Kulon RT 001/ RW 003, Desa Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Dusun Krajan Desa Karangrejo Kecamatan Loano, Kab. Purworejo		MS
							Rabat Beton Jl. Dukuh; Pemdes Kedungmulyo Desa Kedungmulyo rt 2 rw 3 kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo Ketua Bapak Marsino No Hp 081469802109 atau 081316712550, Kab. Purworejo		MS
							PEMERINTAH DESA BRUNOREJO Jalan Dusun Brunokulon Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo (ketua		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							pelaksana Nur Chamid), Kab. Purworejo		
							PEMERINTAH DESA BRONDONG, Dusun Kamijara Desa Brondong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo (ketua pelaksana kegiatan Kholil), Kab. Purworejo		MS
							Jalan Nakula Sadewa Dusun 4 Desa Bandungrejo Kecamatan Bayan, Kab. Purworejo		MS
							Jl. Poros Krandon Babahan 394 M PEMERINTAH DESA SIDOMULYO Desa Sidomulyo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo (kepala desa setiyono hadi no hp 085292502648), Kab. Purworejo		MS
							Dusun Kelapa Sawit RT 01 RW 01 Desa Puspo Kecamatan Bruno Ketua Muhammad Yatin No Hp 08895225249, Kab. Purworejo		MS
							DUSUN SENGORO KULON RT.004/RW.002 DESA KETAWANGREJO KECAAMATAN GRABAG, Kab. Purworejo		MS
							PENGASPALAN JALAN DUSUN SONANGGAN RT.06/RW.03 DESA NAMBANGAN KECAMATAN GRABAG, Kab. Purworejo		MS
							Jalan Dukuh Rt 01 Rw 03 Desa Kedungmulyo Kecamatan Butuh, Kab. Purworejo		MS
							Pemerintah Desa Hulosobo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Desa Kunir Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Desa Purbowono Kecamatan Kaligesing Pengusul Supadmo, Kab. Purworejo		MS
							dusun tugono desa kaligono kecamatan kaligesing pengusul ibnu nurahman w, Kab. Purworejo		MS
							Dusun Krajan RT 07 RW 02 Desa Jatirejo Kecamatan Kaligesing, Kab. Purworejo		MS
							Jalan Desa Kertojayan tembus desa Pasaranom Wilayah Desa Kertojayan, Kab. Purworejo		MS
							Desa Sidomulyo Kecamatan Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Desa Girigondo, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo		MS
							Dusun Krajan Kecamatan loano, Kab. Purworejo		TMS tidak ada proposal
							Jalan Desa Singojoyo - Crogol Desa Brunosari Kec Bruno, Kab. Purworejo		TMS tidak masuk hasil reses. usulan dobel, sama dengan no 1839339
							Dusun Ngulap-ulap Desa Kedungpomahan wetan Kec.Kemiri, Kab. Purworejo		TMS Tidak sesuai (usulan berupa talud jalan)
							Pemerintah Desa Wonosido Kecamatan Pituruh, Kab. Purworejo		TMS, belum ada proposal
							PEMDES KALIWADER KEC. BENER Krajan RT 04 RW 01 Kaliwader Bener, Kab. Purworejo		TMS, proposal berbeda lokasinya dengan usulan
							Jalan Desa Rt 02/Rw 01 Desa Kemiri Kecamatan Gebang Pengusul Gunawan No Hp 081328424340, Kab. Purworejo		TMS, Proposal Tidak Sesuai dengan Kamus Pokir, isi proposal Bantaun Ormas
							Permohonan bantuan talud jalan usaha tani jalan tegal tengah dusun Manisjangan Rt01/Rw03 Desa Seren Kecamatan Gebang Pengusul Lukmantoro No Hp 081227976776, Kab. Purworejo		TMS, Proposal Tidak Sesuai dengan Kamus Pokir, isi proposal JUT

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Jalan Poros Desa Plipiran Dusun Kaliurang Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		TMS, proposalnya alamatnya munggangsari
							Permohonan bantuan akses jalan ke mata air dusun 2 Rt 03/Rw 01 Desa Kemiri Kecamatan Gebang Pengusul Gunawan No Hp 081328424340, Kab. Purworejo		TMS, tidak ada proposal
							JALAN DUSUN DLISEN DESA BRONDONG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, tidak ada proposal
							Pembangunan Jalan Poros Desa RT.06/RW.04 Dusun Teges Desa Tegalsari, Kab. Purworejo		TMS, tidak ditemukan dalam hasil reses
							Dusun Kaliurang Desa Plipiran Kec Bruno, Kab. Purworejo		TMS, tidak ditemukan dalam hasil reses, proposal berbeda dengan usulan
							Jalan lingkungan rt 1 rw 3 Dusun Dukuh Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan, Kab. Purworejo		TMS. Harusnya rekomendasi nol krn tidak ada dalam reses
							desa pekacangan RT 2 RW 1, kecamatan pituruh, Kab. Purworejo		TMS. Harusnya rekomendasi nol krn tidak ada dalam reses
							Dusun Krajan Rt.06 Rw. 2 Desa jatirejo kecamatan kaligesing pengusul suparji, Kab. Purworejo		TMS. Tidak ada dalam hasil reses
							Rt 02/ Rw 02 Desa Ngaglik Kecamatan Gebang Pengusul Sulasmo No Hp 085878896398, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							PEMDES CACABAN KIDUL KEC. BENER Jl. Kalijambe-Banyuasin KM. 9 Desa Cacaban Kidul, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Desa Popongan, Kecamatan Bayan , Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Jalan Desa Singojoyo Crogol Desa Brunosari Kecamatan Bruno , Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Jalan Poros Desa RT.06/ RW.04 Dusun Teges Desa Tegalsari Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Pemerintah Desa Samping Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Pemerintah Desa Kaliharjo, Kecamatan Kaligesing, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							PEMDES BESOLE KEC. BAYAN JL.Sampoerna No. 2 Besole Telp: (0275) 6451094, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							PEMERINTAH DESA LUGU KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Desa Aglik RT 001/ RW 001, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Desa Turus Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Irigasi Usaha Tani mbah badrun Dusun Manisjangan Desa Seren rt 01 rw 03 Kecamatan Gebang Pengusul Lukmanto No Hp 081227976776, Kab. Purworejo		TMS. Tidak sesuai (talud pada JUT)
							Rt 01 Rw 06 Dusun Pandak desa Sudorogo Kecamatan Kaligesing Pengusul Febriawan, Kab. Purworejo		TMS. Tidak sesuai (usulan berupa saluran drainase)
							Rt 02 Rw 05 Berto Desa Sudorogo Kecamatan Kaligesing Pengusul Misriyanto, Kab. Purworejo		TMS. Tidak sesuai (usulan berupa saluran drainase)
							Dusun Pagertengah Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing Pengusul Tukiran, Kab. Purworejo		TMS. Tidak sesuai (usulan berupa saluran drainase)
							Dusun Pakuncen RT 8 RW 4 Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri Ketua Mustangin No Hp 085322263300, Kab. Purworejo		TMS. Tidak sesuai (usulan berupa talud jalan)

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	5) Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif	5) Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan	100%	Bantuan khusus untuk peningkatan sarana dan prasarana pemerintah desa (Kab. Purworejo)	PEMERINTAH DESA KEBONDALEM DESA KEBONDALEM KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN GRABAG, Kab. Purworejo		MS
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		PEMERINTAH DESA TEPUS KULON KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
			Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		PEMERINTAH DESA KALIWATU BUMI DESA KALIWATU BUMI KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							KANTOR PEMERINTAH DESA CENGKAWAKREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							Desa Binangun Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							PEMERINTAH DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							Pemerintah Desa Karangwuluh Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Pemerintah Desa Wonosuko Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo		MS
							KANTOR PEMERINTAH DESA PACOR KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							Desa Sangubanyu, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Desa Prapag Kidul, Kecamatan Pituruh, Kab. Purworejo		MS
							RABAT BETON RW 03 DUSUN SUTOMENGGALAN DESA		TMS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							CENGKAWAKREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		
							PEMERINTAH DESA BOROWETAN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS
							Desa Ngemplak RT 002 / RW 001, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS
							Dusun Sejiwan Lor RT 003 RW 001, Desa Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS
							Desa Kembangkuning, Kecamatan Ngombol, Kab. Purworejo		TMS
							GEDUNG PERTEMUAN DESA SENDANGSARARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO , Kab. Purworejo		TMS
							Desa Binangun Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		TMS
							Desa Binangun Kecamatan Butuh, Kab. Purworejo		TMS
							Kantor Desa Brunosari Kec Bruno, Kab. Purworejo		TMS
							Pos PAUD Amrih Lestari Kecamatan Purworejo Kab.Purworejo, Kab. Purworejo		TMS
							Desa sendangsari, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS. permasalahan kurang sesuai
							Desa Depokrejo, Kecamatan Ngombol, Kab. Purworejo		TMS. peruntukan tdk sesuai Perbup No. 35 Thn 2023
							PEMERINTAH DESA POLOMARTO KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS. peruntukan tdk sesuai Perbup No. 35 Thn 2023
							RW 03 PEMERINTAH DESA KARANGLUAS KECAMATAN		TMS. tidak ada dalam reses

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		
							KANTOR PEMERINTAH DESA BRUNOREJO KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							PEMDES WONOTULUS Jl. Caok-Purworejo KM.7 Krajan 2 RT 03 RW 01 Desa Wonotulus Kec. Purworejo, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Desa Brunosari Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Desa Depokrejo,Kecamatan Ngombol, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							PEMDES GANGGENG Kec. Purworejo Jl. Cangkrep-Bagelen KM. 2 Purworejo, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							PEMDES KLIWONAN Jl. Kenteng-Seborokrapyak KM 5, Kliwonan Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Pemerintah Desa Sangubanyu Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo		TMS. Usulan dobel
4	4) Ketahanan sosial	4) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase organisasi keolahragaan yang aktif	100%	Bantuan peningkatan prasarana olahraga (Kab. Purworejo)	Club BTTC Kedung Pucang, Desa Kedungpucang, Kec. Bener Ketua Dwi Widodo Hp 085817311413, Kab. Purworejo	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	MS
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan olahraga pada satuan pendidikan	100%		Club RBM Dusun Mantenan RT 01 RW 01, Desa Kalijambe Kecamatan Bener Ketua Ahmad Yani No Hp 085877879800, Kab. Purworejo		MS
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit		Club BSC Kaliboto Dusun Kaliboto Kulon RT 01 RW 04, Desa Kaliboto Kecamatan Bener Ketua M Afnan hp 08895876028, Kab. Purworejo		MS
							KLUB BOLA VOLI "KODAYO" DESA KROYO KECAMATAN GEBANG		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				KABUPATEN PURWOREJO 082157111728, Kab. Purworejo		
							Klub Bola Voly Pervog HPG Desa Grabag Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo		MS
							Mandiri Artistic Club Kampung Suronegaran RT.02/ RW.10, Kab. Purworejo		MS
							Desa Brunorejo RT 001 RW 002, Kec. Bruno, Kab. Purworejo , Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Klub Bola Voly PERVOG HPG Desa Grabag Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo		TMS, Dobel 1856617
							Karang Taruna KHARIMA MUDA Desa Wonosuko Kec Kemiri, Kab. Purworejo		TMS, tidak ada dalam reses
							Karang Taruna Desa Pandanrejo Kecamatan Kaligesing, Kab. Purworejo		TMS, tidak ada dalam reses dan tidak mendukung kinerja
							KARANG TARUNA " SETIA BAKTI " DESA KALIGINTUNG KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, Tidak mendukung kinerja
							Karang Taruna Krido Mudo Desa Jono,Kecamatan Bayan, Kab. Purworejo		TMS, Tidak mendukung kinerja
							KARANG TARUNA INDONESIA "TARUNA DHARMA" DESA HULOSOBO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, Tidak mendukung kinerja
							KARANG TARUNA FORKASI I DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, Tidak mendukung kinerja
							Karang Taruna "Tunas Muda" Desa Seren Kecamatan Gebang , Kab. Purworejo		TMS, Tidak mendukung kinerja

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							KARANG TARUNA MERPATI KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, Tidak mendukung kinerja
							Karang Taruna Andesta Desa Tasikmadu Kec Pituruh, Kab. Purworejo		TMS, Tidak mendukung kinerja
							KARANG TARUNA KRIDA MUDA, Dusun Jogowono Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo (ketua karang taruna pambrasto angkoro djati), Kab. Purworejo		TMS, Tidak mendukung kinerja
5	4) Ketahanan sosial	4) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase organisasi keolahragaan yang aktif	100%	Bantuan peningkatan sarana olahraga (Kab. Purworejo)	Karang Taruna "Bala DW" Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		, TMS, Tidak mendukung kinerja dan tidak ada dalam reses
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan olahraga pada satuan pendidikan	100%		PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATAI CABANG PURWOREJO RANTING KUTOARJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	2 Unit		TEAM OLAHRAGA TENIS MEJA ELANG SAKTI GAMBARAN, Kelurahan Sindurjan Rt 6/Rw 4 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo (ketua Budi Handoyo no hp 081328060698), Kab. Purworejo		MS
							Gedung Masterpiece Billiard and Cafe, Jln. Kolonel Sugiono No. 74, Kab. Purworejo		MS
							PADEPOKAN PENCAK SILAT TRI SAKA INDONESIA Cabang Purworejo Alamat Sekretariat : Dsn. Krandon Rt 3/Rw 1 Desa Cangkrep Kidul Kecamatan Purworejo		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Kabupaten Purworejo (Ketua Padepokan I. Wibowo No Hp 085602023353), Kab. Purworejo		
							PADEPOKAN SENI BELA DIRI YOGA BUANA GAGAK BAGELEN, Kelurahan Baledono ngentak Rt 1 / rw 4 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo (ketua Joko Sulistyo No Hp 082221245877), Kab. Purworejo		MS
							PADEPOKAN PENCAK SILAT CEMPAKA PUTIH, Alamat sekretariat Kelurahan Cangreplor Rt 3/Rw 1 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo (ketua Edy Purnomo, SE.,MM No Hp 081328270305), Kab. Purworejo		MS
							PADEPOKAN PENCAK SILAT PANCER SETO, Alamat Sekretariat Kelurahan Baledono SIngodranan Rt 08/Rw 06 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo (ketua ngatoyo No Hp 081225454443), Kab. Purworejo		MS
							PADEPOKAN SENI BELA DIRI PENCAK SILAT INDONESIA TRI SUSILA, Alamat Sekretariat Jl Sinaga No 08 Kelurahan Cangkrep Kidul Rt 2/Rw 4 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo (ketua Eko Setyawan, SP No Hp 082322291889), Kab. Purworejo		MS
							Padepokan Pencak Silat " CAKRA NUSANTARA" Trukan Rt 03 / Rw 04 Kelurahan Pangenjurutengah, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo. Ketua Padepokan : Hermawan Wahyu Utomo, Kab. Purworejo		MS
							Desa Tunggulrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Dusun Krajan RT 002 RW 001, Desa Bedono Karangduwur, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo , Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Desa Ngemplak RT 002/ RW 001, Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo , Kab. Purworejo		TMS, 2026 sudah menerima hibah
							Club Olahraga Sepatu Roda Freestyle "Drift Purworejo" Perum Griya Boromukti Permai Borokulon Kecamatan Banyuurip Ketua Restoris Amanu F, Kab. Purworejo		TMS, Lokasi usulan tidak sesuai DAPIL (di luar DAPIL)
							Club VoorJoner Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak ada dalam reses
							Club Olahraga Axsho Cycling, Kelurahan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak ada dalam reses
							Hardline BMX Club Kelurahan Kledung Karangdalem Kecamatan Banyuurip, Kab. Purworejo		TMS, tidak ada dalam reses
							KARANGTARUNA PEMUDA PEMUDI RW 02 Dusun Sebelik rt 1 rw 2 Desa Banyuasin Kembaran Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo (ketua sudarto no hp 085869023598), Kab. Purworejo		TMS, Tidak mendukung kinerja
							Karang Taruna "Tunas Harapan" Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh, Kab. Purworejo		TMS, Tidak mendukung kinerja
6	4) Ketahanan sosial	4) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	45%	Bantuan alat kesehatan untuk Posyandu (Kab. Purworejo)	Posyandu Cempaka, Desa Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo	DINAS KESEHATAN DAERAH	MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu yang Menerapkan SPM Bidang Kesehatan	100%		Posyandu Kenanga, Desa Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		MS
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		Posyandu Mawar, Desa Cengkawakrejo, Kec, Banyuurip, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Posyandu Melati, Desa Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kab. Puworejo, Kab. Purworejo		MS
							POSYANDU ANGGREK DESA CONDONGSARI RT 02 RW 03 KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							POSYANDU DAHLIA DESA CONDONGSARI RT 01 RW 03 KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							POSYANDU LESTARI I DESA SOKOWATENKECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							POSYANDU MEMBARA RT 001 RW 007 KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, tapi hasil reses tidak menunjukkan spesifik calon penerima manfaat.
							POSYANDU RIMBUN RT 001 RW 006 KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, tapi hasil reses tidak menunjukkan spesifik calon penerima manfaat.
							POSYANDU RINDANG KASIH RT 001 RW 005 KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN		MS, tapi hasil reses tidak menunjukkan spesifik calon penerima manfaat.

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		
							POSYANDU TRUBUS 3 KELURAHAN PANGENREJO RT 003 RW 002 KECAMATAN PURWOREJO KABUATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, tapi hasil reses tidak menunjukkan spesifik calon penerima manfaat.
							Posyandu Aman Sehat Sejahtera, Desa Jrakah, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, nama posyandu yang diusulkan tidak ada
							POSYANDU TERPADU DESA JELOK, KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, nama posyandu yang diusulkan tidak ada
							POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER DESA BAPANGSARI Jl. Jogja KM. 15 Bapangsari, Bagelen, Kab. Purworejo		TMS, tidak ada dalam hasil reses, harusnya rekomendasi nol
							POSYANDU ANGGREK II Keseneng RT.002 RW.001, Kelurahan Keseneng, Kecamatan Purworejo HP. 085702172485, Kab. Purworejo		TMS, tidak ada dalam hasil reses, harusnya rekomendasi nol
7	2) Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Ternak	122.680,61 ST/ tahun	Bantuan bibit domba (Kab. Purworejo)	KELOMPOK TANI MEKAR SARI DUSUN SEMAYAAN RT 04 RW 02 DESA BAJANGREJO KECAMATAN BANYUURI KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	MS
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang Dilaksanakan	1 Dokumen		KELOMPOK TANI NGUDI MAKMUR DUSUN KEPEKSARI RT 01 RW 02 DESA BAJANGSARI KECAMATAN BAYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	303 Ekor		KELOMPOK TANI "BANYUURIP MAJU MAKMUR" DESA BANYUURIP KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							KELOMPOK TANI BERKAH TANI DESA PEKUTAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI NGUDI LESTARI DESA BAJANGREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI KETAN LUSI DUSUN PELAHAN TENGAH RT 001 RW 002 KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Ternak "Gapai Jaya Farm" Desa Kalinongko, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani Tawangrejo Kelurahan Keseneng, Kab. Purworejo		MS
							KT. IBNU TASLIM Dsn. Kediren RT 01 RW 07 Desa Bagelen Kec. Bagelen, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Desa Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS, Duplikasi dengan id. 1857785 KT Ngudi Mulyo / Tahun anggaran 2026 menerima bantuan hibah Cultivator
							Kelompok Petani Peternak" Ngudi Mulyo" Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS, Tahun anggaran 2026 menerima bantuan hibah Cultivator
							Desa Kedungpoh RT 002/ RW 003, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses (MP I 2026 dalam reses desa kedungpoh mengusulkan bantuan kambing)
8	2) Pertumbuhan ekonomi	2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Biofarmaka	4.497,74 Ton/ Tahun	Bantuan bibit hortikultura A (Kab. Purworejo)	Kelompok Tani "Wono Upoyo 2" Desa Wonotopo Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	daerah yang inklusif	pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Dokumen		KELOMPOK TANI MAJU MAKMUR, Desa Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (ketua M. Akrom Mushadad), Kab. Purworejo		MS, hasil reses ada di MP I 2026
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan				
9	2) Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Biofarmaka	4.497,74 Ton/ Tahun	Bantuan bibit jeruk purut (Kab. Purworejo)	KWT. SARI RAHAYU Dusun Karang Sari RT 02 RW 03 Desa Kemanukan Kec. Bagelen , Kab. Purworejo		MS
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Dokumen				
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan				
10	2) Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Ternak	122.680,61 ST/ tahun	Bantuan bibit Kambing Jawa Randu (Kab. Purworejo)	KELOMPOK TANI SUMBER LUHUR III DESA SUMBERSARI KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain yang Dilaksanakan	1 Dokumen		KELOMPOK TANI BUDI RAHAYU, DUSUN MOCORAN RW 1 DESA KALIBOTO KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	303 Ekor		Kelompok Tani Mataram Tani Desa Tegalsari Kecamatan Bruno , Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani Juru Tani Desa Tegalsari Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Kelompok Tani Mulyo Tani Dusun Krajan Desa Gunung Condong, Kec. Bruno, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani sri Wuluh Dusun Kaliwuluh Desa KedungPomahan kulon Kec Kemiri, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani "Sido Dadi" Desa Kroyo Kecamatan Gebang kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani "Sido Rukun" Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani "Tani Makmur" Desa Seren Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Wanita Tani Kenanga Dusun Kalilaos Desa Pakisarum Kec. Bruno, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Wanita Tani Panceng Makmur Dusun Panceng Desa Pakisarum Kec. Bruno, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani Argo Mulyo Desa Pakisarum Kec. Bruno , Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Wanita Tani Hikmah Fajar Dusun Kandang Warak Desa Pakisarum Kec. Bruno, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani Mawar Dusun Kandang Warak Desa Pakisarum, Kec. Bruno, Kab. Purworejo		MS
							Desa Gowong RT 002 RW 001, Kec. Bruno, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							RT 001/ RW 006 Kelurahan Semawung Kembaran, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS, Duplikasi dengan id 1857748, dengan Nama Kelompok yang sama KT Tani Maju (Kambing Jawa Randu) Tahun anggaran 2026 menerima bantuan hibah Pompa
							Kelompok Tani "Tani Maju", Kab. Purworejo		TMS, Tahun anggaran 2026 menerima bantuan hibah Pompa
							Kelompok Tani Sido Lancar Dusun Karang Tengah Desa Sidodadi Kec. kemiri, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai dengan hasil reses
							Kelompok Tani Sido Langgeng Dusun Karang Tengah Desa Sidodadi Kec. kemiri, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai dengan hasil reses. Yang diusulkan di reses adalah bantuan sapi tetapi yang diusulkan di pokir adalah bantuan kambing jawa randu
							Kelompok Tani Serba Guna I Desa Jenarwetan Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
							Kelompok Tani "Sido Maju" Desa Kalitengkek Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
							Kelompok Tani "Karya Tani" Desa Kragilan, Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
							Kelompok Tani "Mekar Sejati" Desa Jati Kecamatan Bener , Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
11	2) Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Populasi Ternak	122.680,61 ST/ tahun	Bantuan bibit Kambing Kaligesing (Kab. Purworejo)	Gapoktan Alam Jaya, RT 2/RW 2 Seborokrapyak, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		MS
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan yang Dikelola	1 Dokumen		Kelompok Tani SIDO MUKTI, Dusun Manisjangan Rt 1/ rw 4, Desa Sidomulyo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo (ketua suprianto no hp 085228781432), Kab. Purworejo		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen		Kelompok Tani "Subur" Desa Sudogoro Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI SEGARAN BERKAH DUSUN SEGARAN RT 03 RW 03 DESA BRUNOSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO HP. 082138898291, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok wanita tani manggis dusun sumbersari desa kaligono kecamatan kaligesing, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani Sido Maju Desa Purbowono Kec Kaligesing, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI WANITA "GUYUB RUKUN" DESA CEPEDAK KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Kelompok Tani Nunggal Roso Desa Tlogorejo Kecamatan Kaligesing Pengusul Saryono, Kab. Purworejo		TMS, Belum masuk simluhtan
							Kelompok Tani Budidoyo Tani Singojoyo RT.02/RW.07 Dea Brunorejo Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
							Kelompok Tani "Budidoyo Tani" Desa Brunorejo Kec Bruno, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
12	2) Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Kopi	166,88 Ton/ Tahun	Bantuan bibit kopi (Kab. Purworejo)	KT. MAKMUR DESA KALIURUP KEC. BENER Dusun Jlamprang RT 01 RW 03 Desa Kaliurip Bener, Kab. Purworejo		MS
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Dokumen		Kelompok Tani " Karya Tani I" Desa Tepansari Kecamatan Loano, Kab. Purworejo		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		Kelompok Tani Suko Mulyo Desa Sukowuwuh Kecamatan Bener, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani Koper Desa Rimun, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI GADING PAUKIR DESA UKIRSARI KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI MULYO TANI DUSUN TEGES DESA TEGALSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani Sedyo Rahayu 05 Dusun 02 RT 02/RW 02,Desa Patutrejo, Kecamatan Grabag , Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI "MUKTI TANI" KELURAHAN KATERBAN KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani Amanah Desa Kedung Pucang Kecamatan Bener ketua Ibnu Abas Hp 082225677710, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Kelompok Tani Ngudi Makmur Dusun Krajan RT 02 RW 01 Desa Bleber Kecamatan Bener Ketua Amat Mujib No Hp 089687540584, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Kelompok Tani Sidodadi Dusun Kaliduren RT 03 RW 01 Desa Bener Kecamatan Bener Ketua Machail No Hp 089672590040, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							KT. "SIDO MAJU" DUSUN MAJIRAN DESA KEMIRI KIDUL KECAMATAN KEMIRI Cp : 081290759186, Kab. Purworejo		MS, SESUAI

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							KELOMPOK TANI " MANDIRI ", DESA CEPEDAK KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							KELOMPOK TANI " ARGO LESTARI " DESA KEMRANGGEN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							KELOMPOK TANI " GIAT TANI " DESA JELOK KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Dusun Kedung Agung RT 001/ RW 002, Desa Ketosari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Desa Joso, Kecamatan Ngombol, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
							Kelompok Tani "Usaha Bersama" Desa Kesidan, Kecamatan Ngombol, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
13	2) Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	100%	Bantuan pembangunan irigasi air tanah dangkal (ATD) (Kab. Purworejo)	kelompok Tani Margo Raharjo Desa Grantung Kecamatan Bayan, Kab. Purworejo		TMS, lokasi yang diusulkan bukan sawah tadah hujan melainkan sawah beririgasi teknis
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Dokumen		Desa Mendiro RT 03/ RW 01, Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, lokasi yang diusulkan bukan sawah tadah hujan melainkan sawah beririgasi teknis
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	22 Unit		BP-SPAMS Tirta Sari Bumi, Dusun Pampriyan Desa Dilem, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo		TMS, tidak ada dalam hasil reses dan proposal yang diuplaod bukan kelembagaan petani sehingga tidak dapat difasilitasi oleh DKPP serta proposal fisik tidak ada. Usulan Air Tanah Dangka harusnya diusulkanoleh kelompok Tani bukan BP-SPAM

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
14	2) Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	100%	Bantuan pembangunan jalan usaha tani (Kab. Purworejo)	KELOMPOK TANI PATABU II DESA BANYUURIP KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Dokumen		Kelompok Tani Patabu IV, Dukuh Kembaran, Desa Banyuurip, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		MS
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	22 Unit		KELOMPOK TANI DEWI SRI TULUS II DESA TULUSREJO KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI "TANI MAJU SATU" DESA CONDONGSARI KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI " WERDI DADI " DESA PEKUTAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI SETYO MANUNGGAL DESA DURENSARI KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI "RUKUN TANI" DESA JOGORESAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani Sehati, desa Kalimiru, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI SIDO MAKMUR DESA NGENTAK KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Kelompok Tani Guyub Tani, Desa Jrakah, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Ngargosari Kecamatan Loano, Kab. Purworejo		MS
							JUT Blok Sirondo - Blok Sendang Persil 5 & 6; Kelompok TANI LESTARI I, Desa Dudukulon Rt 02/Rw 02, Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo (ketua bapak Pono), Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani Argo Lestari II Dusun Gablogan Desa Kemranggen Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI “TANI JAYA” Dk Ngemplak, RT002/ RW001, Desa Wangunrejo, Kecamatan Banyuurip HP. 085292511095, Kab. Purworejo		MS
							Kelompok Tani Sido Mulyo RT 03 RW 03 Desa Munggangsari Kecamatan Garbag, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI "ENGGALREJO" DESA LUBANGLOR KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI BANGUN MULYO DESA DLANGU KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI SRI REJO II, Rt 2 / Rw 1 Desa Gedong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (ketua Bapak Adil No Hp 088221353186), Kab. Purworejo		MS
							KELOMPOK TANI "UNGGUL TANI " DESA ROWOREJO KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							JUT - JL Kasir Blok Alur Kidul RT 02 RW 01; Kelompok Tani Sri Lestari Desa Munggasari Rt 01 Rw 01 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo (ketua Bapak Panut No hp 085842974081). , Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Kelompok Tani Margo Mulyo Kledung Karangdalem Kecamatan Banyuurip, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Kelompok tani Mekar Abadi Desa Bringin Kecamatan Bayan, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Desa Pacor, Kecamatan Kutoarjo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Dusun Kratonrejo RT 002/ RW 006, Desa Harjobinangun, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Wonoyoso Kec. Pituruh , Kab. Purworejo		TMS, belum ada eksisting JUT. Kondisi saat ini masih berupa galengan kecil/pematang dan usulan tidak sesuai dengan hasil reses
							KELOMPOK TANI "MAKMUR JAYA" DESA TEGALREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, Belum ada JUT eksisting masih berupa galengan
							Desa Suren Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, lokasi yang disulkan tidak memenuhi syarat secara teknis karena merupakan jalan poros/ penghubung antar desa
							KELOMPOK TANI "NGUDI BAROKAH" DESA CENGKAWAKREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, lokasi yang disusulkan tidak memenuh syarat secara teknis karena bukan kategori jalan usaha tani tetapi jalan perkampungan

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Desa Kertosono, Kecamatan Bayan , Kab. Purworejo		TMS, syarat administrasi tidak terpenuhi dimana proposal diajukan oleh pemerintah desa bukan kelembagaan petani sehingga tidak dapat difasilitasi oleh DKPP serta tidak sesuai dengan hasil reses
							Kelompok Tani Berkah Kelurahan Kledung Karangdalem Kecamatan Banyuurip, Kab. Purworejo		TMS, syarat teknis tidak terpenuhi dimana lokasi JUT yang diusulkan berada pada jalan inspeksi saluran sekunder
							Kelompok Tani Juru Tengah Desa Banyuurip, Kecamatan Banyuurip, Kab. Purworejo		TMS, syarat teknis tidak terpenuhi dimana lokasi yang diusulkan berada pada jalan inspeksi saluran sekunder
							Kelompok Tani cengkir Legi Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri , Kab. Purworejo		TMS, Tidak ada RAB di proposal, syarat teknis tidak terpenuhi dimana lokasi JUT yang diusulkan merupakan jalan desa sebagai penghubung antar desa
							RT.01/RW.02 Desa Sumbersari, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
							KELOMPOK TANI " SIDODADI" DESA DUDUKULON KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
							KELOMPOK TANI NGUDI TANI ,Dusun Paguan rt 3 / rw 2 Desa Bener Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (Ketua Fathanudin), Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
							Dusun Jururejo RT 003/ RW 001, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
							Desa Keburuhan RT 01-RT 02 / RW 01 Kecamatan Ngombol ,Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
							Blok 1 si Ampel, Desa Tanjungrejo RT 01/ Rw 01, Kecamatan Ngombol,		TMS, tidak sesuai hasil reses

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		
							KT. SIDOREJO Desa Kiyangkongrejo Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo		TMS, usulan tidak sesuai hasil reses
							Kelompok Tani Manunggal Karyo Desa Kalimeneng RT 001 RW 001, Kec. kemiri, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, yang diusulkan adalah bukan kategori JUT melainkan jalan penghubung/poros dan sulan tidak sesuai dengan hasil reses
15	2) Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	100%	Bantuan pembangunan jaringan irigasi tersier (Kab. Purworejo)	KELOMPOK TANI SIDO MAKMUR I DESA PLANDI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Dokumen		Kelompok Tani " Maju Tani" Dsa Blekatuk, Kec. Pituruh , Kab. Purworejo		MS
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	2 Unit		Blok 5-11 Wetan Kililing, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							SALURAN AIR RT 001 RW 005 DESA BRUNOSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, Alamat diproposal yang diupload di SIPD adalah Pemdes bukan kelompok tani; fisik proposal belum diterima OPD
							KT. SRI RAHAYU RT 02 RW 06 Kel. Semawung Kembaran Kec. Kutoarjo (Agus Suleman Hp. 081328277377), Kab. Purworejo		TMS, saluran yang diusulkan bukan kategori saluran tersier yang pengambilan sumber air dari saluran sekunder namun dari sumber air perpompaan
							Kelompok Tani "Tani Rejo" Desa Kerep, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
							Kelompok TANI MAKMUR Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
							KT. SIBLAWONG SIGENDERAN Dsn. Wirun Kidul RT 03 RW 07 Desa Wirun Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Blok 4 Sigayam, Desa Candi Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak sesuai hasil reses
							GAPOKTAN MANUNGGAL DESA ROWODADI KECAMATAN BUTUH, Kab. Purworejo		TMS, usulan dalam SIPD adalah bantuan pembangunan jaringan irigasi tersier namun proposalnya adalah pembangunan jalan usaha tani
16	2) Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	Bantuan rumah burung hantu (Kab. Purworejo)	Kelompok "Tani Makmur" Desa Sendangsari Kec Purwodadi, Kab. Purworejo		MS
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan	1 Laporan		Desa Sendangsari, Kecamatan Purwodadi , Kab. Purworejo		TMS, Duplikasi Usulan Atas Nama Kelompok Tani "Tani Makmur" beralamat Desa Sendangsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	400 Ha				
17	2) Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.373 Ton	Bantuan benih gurami unggul (Kab. Purworejo)	Kelompok Budidaya Ikan "Mina Karya Sejahtera" Kelurahan Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	MS, sesuai
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	16 Kecamatan		Kelompok Pembudidaya Ikan "Mina Tani" Desa Sumbersari, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		MS, sesuai
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14 Unit		KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN "DADI MULYO" DESA JENAR LOR KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Kelompok Pembudidaya Ikan "Mina Mukti" Desa Kedungloteng,		TMS, usulan tidak ditemukan dalam hasil reses

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		
18	2) Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.373 Ton	Bantuan benih ikan lele unggul (Kab. Purworejo)	Kelompok Pembudidaya Ikan "Mina Guron Sejahtera" Kelurahan Sindurjan Kecamatan Sindurjan Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS, sesuai
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	16 Kecamatan		Kelompok Budidaya Ikan " Sari Rahayu" Karangsari, Rt 001/Rw 003, Desa Kemanukan, Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo		MS, sesuai
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14 Unit		KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN "ULAMSARI" BRENGKELAN RT 01 RW 01 KELURAHAN PURWOREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO 085786723732, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Kelompok Budidaya Ikan Mina Lestari Dusun Katisnan RT 02 RW 03, Desa Karangsari Kecamatan Bener Ketua Muhammad Ircham No Hp 088232528697, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Kelompok Budidaya Ikan Suto Makmur Dusun Suto RT 02 RW 06, Desa Bener Kecamatan Bener Ketua Salman No Hp 082135842856, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Kelompok Budidaya Ikan Mina Ulam Sari Dusun Simpu RT 02 RW 01 Desa Ketosari Kecamatan Bener Ketua Rizki Choirul Nurmuizan No Hp 082323911488, Kab. Purworejo		MS, sesuai

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Kelompok Budidaya Ikan Jaman Mina Sentosa Desa Kaliurip Kecamatan Bener Ketua Mukh Basri No Hp 082133659433, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Kelompok Budidaya Ikan Tunas Mulya Dusun Saniten Rt.03 Rw.03 , Desa Bener Kecamatan Bener Ketua Edy Setyawan No Hp 081226434537, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Kelompok Budidaya Ikan Citra Sari Dusun Bendo RT 03 RW 03, Desa Kalijambe Kecamatan Bener Ketua Hamam Faruq No Hp 081327104581, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Kelompok Budidaya Ikan Bener Mina Jaya Bener Krajan RW 04, Desa Bener Kecamatan Bener Ketua Musthofa Afifi No Hp 085228093007, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Kelompok Budidaya Ikan Mina Mekar Abadi RT 02 RW 04 Desa Kaliboto Kulon RT 03 RW 04 Ketua Muhammad Data hp 085727613255, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Kelompok Budidaya Ikan Mina Sumber Makmur Dusun Bandongan RT 03 RW 04, Desa Sendangsari Kecamatan Bener ketua Amat Kuroisin Hp 083817020088, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN " SUMBER MAJU REJEKI " KELURAHAN SUCENJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							KELOMPOK BUDIDAYA IKAN " MINA MAKMUR " DESA BANYUURIP KECAMATAN		MS, sesuai

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		
							KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN "NGUDI REJEKI" DESA GOLOK KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN MAJU LANCAR Dukuh Bambon RT 002 RW 005 Desa Sambeng Kec. Bayan HP. 085292581053, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							KELOMPOK BUDIDAYA IKAN " MINA KRAJAN WETAN " DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO 0819872243, Kab. Purworejo		MS, Sesuai
							KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN "MINA RAHARJO" DESA KROYO KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO 085772265195, Kab. Purworejo		MS, Sesuai
							KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN "NGUDI REJEKI" DESA GOLOK KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, usulan sama dengan id. 1826732
							Kelompok Pembudidaya Ikan "Berkah Tirta" Desa Kalijambe Kecamatan Bener kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, usulan tidak ditemukan dalam hasil reses
							KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN "BERKAH MINA" KELURAHAN PANGENJURUTENGAH KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, usulan tidak sesuai dapil DPRD
							KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN " SITANJUNG MINA SEJAHTERA "		TMS, usulan tidak sesuai dapil DPRD

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							KELURAHAN PANGENJURUTENGAH KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		
19	2) Pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif	2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4.373 Ton	Bantuan benih nila unggul (Kab. Purworejo)	Kelompok Pembudidaya Ikan " Sindurjan Mina Al Barokah", Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo, Kab. Purworejo		MS, sesuai
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	16 Kecamatan		KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN " NILAM SARI ", Dusun 01 Desa Gowong, Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		MS, sesuai
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14 Unit		Popdakan "Mina Sembada" Desa Ngemplak, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, usulan tidak ditemukan dalam hasil reses
20	3) Kualitas lingkungan hidup yang berketahanan bencana	3) Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	69.91%	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R (Kab. Purworejo)	BANK SAMPAH RESIK APIK, Desa Tunjungtejo Rt 01 Rw 01, Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo (ketua Endah Ratnawati), Kab. Purworejo		MS, sesuai
			Pengelolaan Sampah	Jumlah Penanganan Sampah	32.405,76 Ton		BANK SAMPAH RESIK BECIK, Desa Tunjungtejo Rt 1/ Rw 2 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo (ketua Utiyah), Kab. Purworejo		MS, sesuai
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok		Kelompok "Cipta Karsa" Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							BANK SAMPAH " KEMUNING " KELURAHAN KATERBAN KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							KELOMPOK BANK SAMPAH " JEBOR JAYA " DESA KIYANGKONGREJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, sesuai

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							BANK SAMPAH KEMBANG ARUM RT003 RW 010 KELURAHAN KUTOARJO KECAMATAN KUTOARJO, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							BANK SAMPAH " SURYA ABADI " KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							BANK SAMPAH "WIJAYA KUSUMA" DESA HULOSOBO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, Sesuai
							Pemerintah Kelurahan Sindurjan kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Bank Sampah Karang Taruna Pokja III Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan, Kab. Purworejo		TMS, berdasarkan proposal yang diupload dalam SIPD, kelembagaan bank sampah tersebut belum terbentuk, sesuai persyaratan kamus bahwa Bank Sampah harus beroperasi minimal 1 tahun
							Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS, usulan sama dengan ID. 1857755
21	3) Kualitas lingkungan hidup yang berketahanan bencana	3) Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	69.91%	Bantuan Mesin Pencacah Plastik di Pengelolaan Sampah Lanjutan (Kab. Purworejo)	Rumah Daur Ulang Plastik Dauro Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, pengusul bukan kelompok masyarakat namun unit usaha perorangan
			Pengelolaan Sampah	Jumlah Penanganan Sampah	32.405,76 Ton				
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 Kelompok				
22	1) Pemerataan layanan	1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase Rumah Tangga yang memperoleh layanan	95.31%	Bantuan jamban sehat (Kab. Purworejo)	(Sri Budi Mulyono) Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	MS, SESUAI

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	infrastruktur dasar	kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	pengolahan air limbah domestik			Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	PENATAAN RUANG	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayaninya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	300 Rumah Tangga		(Muchamad Miftah Surur) Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	300 Rumah Tangga		Pos Paud Permata Hati Krajan RT.06 / RW.02 Desa Jatirejo Kec Kaligesing, Kab. Purworejo		TMS, Usulan kurang sesuai, karena usulan berada di PAUD/sekolah. Sebaiknya usulan u sekolah ditujukan di Dindikbud, bukan di DPUPR
23	1) Pemerataan layanan infrastruktur dasar	1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Jalan di Perkotaan dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	31.73%	Pembangunan drainase di jalan kabupaten (perkotaan) (Kab. Purworejo)	Desa Clapar, Kecamatan Bagelen , Kab. Purworejo		TMS , Tidak ada dalam reses,
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang Ditangani	8,44 KM				
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	175 KM				
24	1) Pemerataan layanan infrastruktur dasar	1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	17.81%	Penggantian jembatan (Kab. Purworejo)	JEMBATAN SUMBERJO RT 03 DESA HULOSOBO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, jembatan tidak berada pada ruas jalan kabupaten
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang Ditangani	8,44 KM		PEMERINTAH DESA GOWONG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, usulan jembatan tidak berada di jalan kabupaten
			Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	16 Meter				

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
25	1) Pemerataan layanan infrastruktur dasar	1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	17.81%	Rehabilitasi drainase di jalan kabupaten (Kab. Purworejo)	LIMUS RT 03 RW O4 KELURAHAN KEDUNGSARI KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI. Mendukung Fungsi Pelayanan Jalan Akses menuju Kawasan Wisata Heroes Park
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang Ditangani	8,44 KM				
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	175 KM				
26	1) Pemerataan layanan infrastruktur dasar	1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	17.81%	Rehabilitasi jalan poros desa (Kab. Purworejo)	Desa Bapangsari Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo		MS, SESUAI 1. Sesuai dengan SK jalan poros desa no. 180.18/680/2015 2. Belum dianggarkan di APBDes maupun DD 3. Akses menuju fasilitas pendidikan, SD Bapangsari dan perkebunan
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang Ditangani	8,44 KM		Desa Majir, Kecamatan Kutoarjo , Kab. Purworejo		MS, SESUAI 1. Sesuai dengan SK jalan poros desa no. 180.18/680/2015 2. Belum dianggarkan di APBDes maupun DD 3. Akses menuju fasilitas pendidikan, SD Majir dan pertanian
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	60 KM		Desa Pogungrejo RT 2/RW 2, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		MS, SESUAI 1. Sesuai dengan SK jalan poros desa no. 180.18/680/2015 2. Belum dianggarkan di APBDes maupun DD 3. Akses menuju fasilitas pendidikan, SD Pogungrejo dan kawasan pertanian
							Desa Mayungsari Kecamatan Bener, Kab. Purworejo		MS, SESUAI 1. Sesuai dengan SK jalan poros desa no. 180.18/680/2015 2. Belum dianggarkan di APBDes maupun DD 3. Akses menuju fasilitas pendidikan, SD Mayungsari dan perkebunan

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Pemerintah desa Ngasinan Kec Bener, Kab. Purworejo		MS, SESUAI 1. Sesuai dengan SK jalan poros desa no. 180.18/680/2015 2. Belum dianggarkan di APBDes maupun DD 3. Akses menuju fasilitas pendidikan, SD Ngasinani dan perkebunan
							Pemerintah Desa Sukowuwuh Kecamatan Bener, Kab. Purworejo		MS, SESUAI 1. Sesuai dengan SK jalan poros desa no. 180.18/680/2015 2. Belum dianggarkan di APBDes maupun DD 3. Akses menuju fasilitas pendidikan, SD Sukowuwuh dan pertanian
							PEMDES BINANGUN KEC. BUTUH, Kab. Purworejo		MS, SESUAI. 1. Sesuai dengan SK jalan poros desa no. 180.18/680/2015 2. Belum dianggarkan di APBDes maupun DD 3. Akses menuju fasilitas pendidikan, SD Binangun dan kawasan pertanian
							Pemerintah Desa Pekacangan Kec Bener, Kab. Purworejo		MS, SESUAI. 1. Sesuai dengan SK jalan poros desa no. 180.18/680/2015 2. Belum dianggarkan di APBDes maupun DD 3. Akses menuju fasilitas pendidikan, SMP Negeri 37 dan perkebunan
							Desa Kambangan Kecamatan bruno, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat pada hasil reses. Yang diusulkan di hasil reses adalah di jalan Besuki-Karanggedang
							Dusun Sikempong RT 006 RW 006 Desa Cepedak Kec. Bruno, Kab. Purworejo		TMS, usulan tidak berada di jalan poros desa (SK jalan poros desa no. 180.18/680/2015)
							JALAN POROS DESA, DESA GOWONG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, usulan tidak berada di jalan poros desa (SK jalan poros desa no. 180.18/680/2015)

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Jalan Poros Desa Loano Kecamatan Loano, Kab. Purworejo		TMS, usulan tiidak berada di jalan poros desa (SK jalan poros desa no. 180.18/680/2015)
							Dusun Kedung Jeru RT 002/ RW 002, Desa Winong Kidul Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, usulan tiidak berada di jalan poros desa (SK jalan poros desa no. 180.18/680/2015)
27	1) Pemerataan layanan infrastruktur dasar	1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	17.81%	Rehabilitasi jalan poros desa (Kab. Purworejo) >> di SK: "Rehabilitasi jalan ruas kab (Kab. Purworejo)"	Jalan ruang desa manisjangan-nglaris Pemerintah Desa Sidomukti Kecamatan Bener, Kab. Purworejo >> di SK: "Jalan ruas kab manisjangan-nglaris Pemerintah Desa Sidomukti Kecamatan Bener, Kab. Purworejo"		TMS, antara SK dan dan yang diinput di SIPD berbeda
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang Ditangani	8,44 KM				
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	60 KM				
28	1) Pemerataan layanan infrastruktur dasar	1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	69.17%	Rehabilitasi jaringan irigasi (Kab. Purworejo)	Desa Tegalaren RT 001/ RW 001, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, 1. Lokasi yang diusulkan bukan merupakan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Purworejo 2. Lokasi yang diusulkan merupakan Daerah Irigasi Boro yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui BBWS Serayu Opak
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Irigasi Kabupaten yang tertangani	2,8 KM		Kelompok Tani "Kridho Tani" Desa Mayungsari, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, 1. Lokasi yang diusulkan bukan merupakan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Purworejo 2. Proposal mengusulkan RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier) merupakan program pada DKPP
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM		Dusun Sejiwan Lor RT 003 RW 001, Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo , Kab. Purworejo		TMS, 1. Lokasi yang diusulkan merupakan saluran tersier 2. sebaiknya diusulkan melalui RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier) yang merupakan program pada DKPP

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Sejiwan Lor RT 001 RW 003, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo , Kab. Purworejo		TMS, 1. Lokasi yang diusulkan merupakan saluran tersier 2. sebaiknya diusulkan melalui RJIT (Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier) yang merupakan program pada DKPP 3. Proposal yang di upload sama dengan ID usulan no 1860054
29	1) Pemerataan layanan infrastruktur dasar	1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	17.81%	Rehabilitasi talud pengaman badan jalan (Kab. Purworejo)	PEMERINTAH DESA CEPEDAK KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, usulan talud tidak berada di jalan kabupaten
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten yang Ditangani	8,44 KM		Pembangunan Talud Jalan Lingkungan RT 02 RW 04 desa Kemranggen. Pemerintah Desa Kemranggen, Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, usulan talud tidak berada di jalan kabupaten
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	60 KM		Talud Sidorejo Rt 01 RW 02; Pemdes Bendungan Desa Bendungan Rt 01/Rw 02, Desa Bendungan Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Ketua Ahmat Syaifuddin No Hp 085292399515, Kab. Purworejo		TMS, usulan talud tidak berada di jalan kabupaten
							PEMERINTAH DESA BRUNOREJO KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, usulan talud tidak berada di jalan kabupaten
							DUSUN KALICURUG DESA BRUNOSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, usulan talud tidak berada di jalan kabupaten
							PEMERINTAH DESA JATIWANGSAN Jl. Winong Girimulyo Desa Jatiwangsan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo (Kepala Desa Sofian), Kab. Purworejo		TMS, usulan talud tidak berada di jalan kabupaten
							PANITIA PEMBANGUNAN TALUD DESA BLEBER KECAMATAN		TMS, usulan talud tidak berada di jalan kabupaten

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							BENER KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		
							Panitia Pembangunan Talud, Desa Jati, Kecamatan Bener . Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, usulan talud tidak berada di jalan kabupaten
30	4) Ketahanan sosial	4) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	80%	Hibah alat kesenian pada grup/ kelompok kesenian (Kab. Purworejo)	Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen , Kab. Purworejo	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	TMS. proposal fisik belum ada atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional Masyarakat	2 Laporan		KELOMPOK HADROH NUR HIDAYAH Dukuh Bakunglor Desa Kendalrejo, Kec. Pituruh, Telp. 081319232683, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek		GRUP HADROH “SABILUNNAJAH" Jl Winong – Girijoyo Km 4, Desa Girimulyo, Kec. Kemiri HP. 085287976856, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP REBANA NAILUL MUNA DESA ROWODADI MUNA KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							KELOMPOK KESENIAN HADROH DZIKRA NADA DESA KALIWATUBUMI RT 003 RW 003 KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH NURIL MUBIN DESA KEDUNGMULYO RW 04 KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							KESENIAN KENCRENG " AL HASAN " DUSUN PONCOLAN RT 02 RW 05 DESA SUREN KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH MODERN "SABILUNNAJAH" Rt 005 Rw 001		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Desa Girigondo Kec Pituruh , Kab. Purworejo		
							Kelompok An-nasukha Dusun Kaliboto Kulon RT 01 RW 04, Desa Kaliboto Kecamatan Bener Ketua Istiqomah No Hp 081320729483, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH "HIDAYATUSH SHIBYAN" DESA UKIRSARI RT 02 RW 01 KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH AL-MAKSUM KELURAHAN SUCENJURUTENGAH RT 002 RW 001 KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH " QOLBU SYIFA " KELURAHAN SUCENJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP SHOLAWATAN JAWA MASJID PERTAPAN TIBAN SUCENJURUTENGAH KELURAHAN SUCENJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH AR-ROHMAH KELURAHAN SUCENJURUTENGAH RT 005 RW 001 KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH DEWI MASYITOH DESA SUROREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH SENANDUNG KOLBU DESA BANYUURIP KECAMATAN BANYUURIP		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		
							PAGUYUBAN MACAPATAN "SURYAWASESA" DUKUH WETAN RT 01 RW 01 DESA BANYUURIP KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH AL MUBAROKAH DESA SUMBERSARI KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP SHOLAWATAN " NURUL HIDAYAH" DESA BANYUURIP KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH " TOMBO ATI " DESA BENCOREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							KELOMPOK HADROH " NURIL ABSHOR " DESA TANJUNGREJO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							KELOMPOK KESENIAN " BERNADA " DESA BANYUURIP KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP SHOLAWATAN JAWA NURUL HUDA KELURAHAN SUCENJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO TLP.085-6921-2030, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							PAGUYUBAN SENI KUDA LUMPING "MARGO WALUYO" DUSUN DUA RT 05 RW 06 DESA PEKUTAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							TELP. 085963977238/08231986966, Kab. Purworejo		
							GROUP HADROH "ASYIQOL MUTHOFA" MUSHOLA AR RUQOYAH DUSUN DUA RT 005 RW 001 DESA PEKUTAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP SHOLAWAT TREBANG "BAITUL ABIDIN" KELURAHAN SUCENJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP REBANA SYAUQUN NADA DESA WONOSARI KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO NO HP. 087863934710, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH KASYIFUL QUROOB DESA TUMENGGUNGAN KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO NO HP. 085713652865, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Kelompok Hadroh An-Nur Desa Jenarwetan Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Kelompok Hadroh Hayatul Islamiyah Desa Somorejo Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH AL MAFTUH KELURAHAN SUCENJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO , Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH AR ROHMAH DESA SUMBERSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							PURWOREJO HP. 085778203970, Kab. Purworejo		
							GRUP HADROH AL BAROKAH DESA KALIWUNGUKIDUL KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Grup Hadroh Syifaul Qolbi Desa Trirejo Kecamatan Loano, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Kelompok Purwosari Desa Pekacangan Kecamatan Bener, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Kelompok Kesenian Sakinatul Qolbi , Nggandek Rt 01 Rw 02 Desa Ketug Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo (Ketua Lailatunnurul Afifah No Hp 085848220355), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Group Rebana Ar Rohmah RW.03 Desa Pasaranom Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Grup Kesenian IKSANJU Desa Kedungmulyo Kecamatan Butuh, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Grub Hadroh Hubbun Nabi Rt 1/rw 1 Dusun Mranti Desa Sukowuwuh Kecamatan Bener (ketua indah susanti No Hp 085643815362), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH NURUL QOLBI Desa Pakem Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo (Ketua Uji Sulastri No Hp 081327695740), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							SENI HADROH DAN SHOLAWAT EL WAFA Dusun Krendo rt 3 rw 3 Desa Legetan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (Ketua Siti		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Munawaroh No Hp 085227939443), Kab. Purworejo		
							GROUP KESENIAN KUBRO TRADISONAL " BUDI MULYO " DESA KALIJAMBE KECAMATAN BENER, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH " AL-HIKMAH " DESA PENUNGKULAN KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH NURUL MAGHFIROH, Desa Sukowuwuh Rt 2/Rw 3 Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (Ketua Sudarsi No Hp 081328106511), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							PAGUYUBAN SENI KUDA LUMPING “TURONGGO WULUNG" Desa Bandungrejo, RT 02/ RW 03 Kec. Bayan (Budi Santoso 081227321657), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH “AL IRSYAD" Desa Bandungrejo Kec. Bayan (Arjun 085328951661), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							KELOMPOK KESENIAN HADROH “HUBBUL QOLBI” Dusun Popongan Kidul RT. 001 RW. 003, Desa Popongan Kec. Banyuurip (Sunarti 085293183008), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Kelompok Kesenian Kuda Kepang Waris Utomo, Dusun Krajan Desa Gunung Condong Kecamatan bruno, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP SHOLAWATAN AL IMAN DESA REJOSARI KECAMATAN GRABAG, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Grup Hadroh Az Zahra Desa Girijoyo Kec. Kemiri, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Grup Hadroh Gandrung Sholawat Desa Girijoyo Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Grup Hadroh Raudhotul Mustofa Desa Girijoyo Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							KELOMPOK HADROH "SITI MASITOH" Masjid At-Taqwa Desa Wangunrejo, Kecamatan Banyuurip, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH SYAFA'ATUL UMMAH Dukuh Tegalboto Kulon RT 1 RW 1 Desa Tegalrejo, Kec. Banyuurip Hp. 085643194239, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Desa Gunungcondong RT 01/RW 05, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo , Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUB SHOLAWAT JAWA BRONTON NABI, Kelurahan Cangkrep Lor rt 3/rw 1 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo (ketua Bagiono No Hp 085929023979), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Grup Hadroh "Miftahul firdaus" Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							PAGUYUBAN KETHOPRAK LANGEN BUDOYO DESA HULOSOBO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH AS SYAFA'AT Dsn. Krembeng RT 05 RW 02 Desa Hardimulyo Kec. Kaligesing HP. 085292496290, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP REBANA ASYFA Dsn. Katerban RT 01 RW 01 Desa		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Donorejo Kec. Kaligesing HP. 085156592221, Kab. Purworejo		
							GRUP HADROH AL BAROKAH KELURAHAN PANGENREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP REBANA IFADATASSAMI DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO HP. 082326636436, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH ROUHOTUL JANNA DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH MODERN MIFTAHUNNADA DESA SENDANGSARI RT 002 RW 001 KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO TELP. 0852 2977 6274, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Masjid Rahmatan Lil Alamin Desa Tlogorejo, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Sanggar Seni "Mardi Laras" Desa Seren Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH SABILITTAQWA RT 01 RW 04 Kel. Keseneng Purworejo (Ahmad Sujono HP. 08989270118), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH AL QAANITA NADA Kel. Pangenrejo RT 02 RW 04 Kec. Purworejo (HP. 085640140823), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							HADROH NURUL QOLBI Dsn. Sibentar RT 01 RW 02 Desa		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Tlogoguwo Kec. Kaligesing , Kab. Purworejo		
							GROUP HADROH MUSLIMAT NU RANTING BALEDONO RT 06 RW 08 Kel. Baledono Purworejo (Hj. Fatihah HP. 089671315083), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH LA-TAHZAN RT 01 RW 01 Kel. Sindurjan Purworejo (Helmi HP. 08122755147), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							HADROH ZAHROTUL JANNAH RT 05 RW 01 Desa Ganggeng Kec. Purworejo , Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP REBANA SHOUTUL FATA DESA BRUNOSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP REBANA KHOIRUN NADA DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO 081215285932, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUB HADROH NIDAUL FALAH, Dusun Krajan Rt 2/rw 2 Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo (Ketua Jauhariyah No hp 085801208296), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							KELOMPOK HADROH AL-HUSNA, Desa Semawung Kecamatan Purworejo Kabupaten (ketua Rofiah No Hp 081392066977), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Kelompok Hadroh "Miftahul Janah" Desa Roworejo Kec.Grabag, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Grup Hadroh Jamiatus Sholihah Desa Patutrejo Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							GROUP HADROH "AL IMAN" KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN RT 03 RW 04 KECAMATAN KUTARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH "AN-NAJAH" KELURAHAN SEMAWUNGDALEMAN RT 01 RW 05 KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP KASIDAH HIDAYATUNNISA KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							HADROH AL FANAJA Ponpes Al-Fahham Jl. Baledono Krajan No.2 Baledono Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP KESENIAN KUBRO KREASI SISWO UTOMO, Dusun Krandon Rt 1/Rw 4 Desa Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (ketua Muhajir No Hp 088229546735), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							PAGUYUBAN KESENIAN TRADISIONAL CAMPUR BUDOYO REWO-REWO, Desa Redin, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (ketua widodo No hp 082314704403), Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Grup Kesenian Iksanju Desa Kedungmulyo Kecamatan Butuh, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Group Rebana Ar Rohmah RW.03 Desa Pasaranom Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Grup Hadroh As Syakinah Desa Jenarwetan Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Kelompok Seni Hadroh" Nur Hidayah" Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Alat Kesenian Kuda Lumping "Turonggo Sari Desa Sendangsari Kec.Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Kelompok Pengajian "Khoirunisa" RW 4 dan RW O5 Desa Sidomulyo Kec Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Muslimat NU Desa Sidomulyo Kec Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Kelompok Khairunnisa Kampung Tuk songo Kec Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Kelompok"Az zahro" Kelurahan Doplang Kec Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Group Hadroh Qurrota Ayun RT.01 / RW.04 Desa Somongari Kec Kaligesing, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Kelompok Kesenian Hadroh Manaqib santri dalan Pangenrejo RT.02 / RW.06, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Kelompok Kesenian "Mahabbaturrosul Donorati RT.02/RW.02, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Jamaah Sholawat Al Barzanji Firqotun najah desa Donorejo, Kab. Purworejo		TMS, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Desa Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS, Double dengan ID usulan 1857760
							Paguyuban Kesenian Kuda Lumping "Turonggo Mekar Arum" Desa Tegalsari Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, nama kelompok dalam reses berbeda dengan usulan, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Grup Hadroh Qurrrotun Nada Desa Bagelen Kecamatan Baegelen, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							KOMUNITAS MUSIK YOUNG MAHATMA KELURAHAN PANGENREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Grup Hadroh Raudotul Jannah, Dusun Pamriyan Desa Dilem, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GROUP HADROH AZ ZAHRA Dusun Kembar RT 002 RW 003 Desa Tegalrejo Kecamatan Banyuurip Hp.0813 1041 5453, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH "SYIFAUL QULUB" Desa Ketiwijaya RT 002 RW 002 Bayan Hp. O89683095256 , Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Kelompok Kesenian Hadroh "Fatimatus Zahro" TPQ Assyarif Tegalsari RT,01 / RW.02 Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Grup Hadroh Nada Taqwa Sekar Dusun Krajan Semawung, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Masjid Al Mubtadiin Dusun Klesem Desa Kaligono Kec Kaligesing, Kab. Purworejo		TMS. calon penerima adalah masjid bukan kelompok kesenian
							Desa Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS. proposal fisik belum ada, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							Desa Sendangsari, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS. proposal fisik belum ada, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja
							GRUP HADROH SYIFA'UL QULUB DESA TEGALREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS. Tidak terdapat dalam hasil reses, atensi KPK dan kurang mendukung indikator kinerja

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							TPQ Nuurul Ishlah Dusun Purwogondo, Desa Purwosari, Kec.Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS. TPQ bukan kelompok kesenian
							TPQ Nuurul Islah Desa Purwosari Kec.Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS. Usulan sama dengan ID Usulan 1839537. Penerima TPQ bukan kelompok kesenian
31	4) Ketahanan sosial	4) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	78.39%	Pembangunan Unit PAUD/ RA Baru (Kab. Purworejo)	RA BANATUL MASYITOH, DESA MEGULUNG KIDUL, KEC. PITURUH, Kab. Purworejo		MS, SESUAI. RA RA BANATUL MASYITOH belum memiliki gedung, saat ini menempati gedung milik perorangan.
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	628 Satuan Pendidikan		RA AT-TAZKIYAH Kalipuring RT.04/ RW.04 Desa Puspo Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		MS, tapi hasil reses tidak menunjukkan spesifik calon penerima manfaat.
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit		Desa Gowong RT 001/ RW 003, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, permasalahan tidak sesuai.
							RA KHASNU Dusun Bambon RT 02 RW 05 Desa Sambeng Bayan. (Puji Astuti 0856263446), Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses. Usulan tidak sesuai, permasalahan dan proposal adalah pembangunan ruang kelas baru.
							Kelompok Bermain Mranggi Siwi Desa Kemranggen Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		TMS. Usulan tidak sesuai permasalahan. Tidak sesuai hasil reses.
32	4) Ketahanan sosial	4) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	78.39%	Pengadaan alat permainan edukatif (APE) PAUD swasta/ RA (Kab. Purworejo)	TK Borowetan, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	628 Satuan Pendidikan		TK Kuncup Mekar Sukowuwuh Kec Bener, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	40 Paket		POS PAUD PUTRA KARTINI, Desa Girigondo Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo (kepala sekolah Ibu Sumtriyanti Badiyah No Hp 082328136885), Kab. Purworejo		MS, SESUAI

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							TK KENARI SEREN DESA SEREN KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO HP. 085292237372, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Kelompok Bermain "Dewi Sartika" Desa Kaligintung Kecamatan Pituruh, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							TK Tunas Harapan Sumbersari Desa Sumbersari Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS. Dobel dengan ID Usulan 1830779
							TK PANCASILA SOKO Kec. Bagelen . Desa Soko RT 01 RW 01 , Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							POS PAUD MUTIARA ABADI Dsn. Tepus RT 01 RW 05 Desa Somorejo Kec. Bagelen , Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							KELOMPOK BERMAIN MELATI RT 01 RW 01 Desa Durensari Kec. Bagelen (Ernawati 085292115007), Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							TAMAN KANAK-KANAK WIDODO DESA LUGUREJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							POS PAUD SEKAR ARUM DESA SIDARUM KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							TK ISLAM TERPADU BUSTANUL FALAH Dsn. Sigebang Rt 03 Rw 02 Gowog, Bruno HP. 081226419630, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							RAUDHATUL ATHFAL KUNTUM KUSUMA ANI YUDHOYONO KELURAHAN SINDURJAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							KELOMPOK BERMAIN MUMPUNI KELURAHAN PANGENJURUTENGAH KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							POS PAUD AL IMAN DESA LOANO KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							KELOMPOK BERMAIN HIDAYATUL MUBTADI DESA TRIREJO KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							KELOMPOK BERMAIN PUTRA DESA MUDALREJO KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							TK Handayani Desa kalimati Kecamatan Pituruh Ketua Sulastri S.Pd No Hp 082223272216, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Lembaga KB BAKTI PERTIWI, Desa Rejosari Rt 2/Rw 2 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo (Kepala Sekolah Sujinah, S.Pd No Hp 088714487889), Kab. Purworejo		MS, tapi hasil reses tidak menunjukkan spesifik calon penerima manfaat.
							TK TUNAS HARAPAN SUMBERSARI DESA SUMBERSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, tapi hasil reses tidak menunjukkan spesifik calon penerima manfaat. double dg id 1857736
							Desa Sumbersari, Kecamatan purwodadi, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Dusun Bapangan RT 003 RW 03, Kecamatan Bagelen , Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Desa Kedungmulyo RT 03/ RW 02, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Desa Wonodadi RT 01/ RW 01, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Desa Luwenglor RT 002/ RW 002, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Desa Megulung Kidul RT 002/ RW 002, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Dusun Karangsari RT 002 RW 003, Desa Gunung Condong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Dusun Kaligede RT 001/RW 002, Desa Giyombong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Dusun Munggangsari RT 004/ RW 004, Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							KELOMPOK BERMAIN “PERMATA HATI" RT 03 RW 02 DESA POPONGAN KEC.BANYUURIP HP: 08986071504, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							TK Melati Mekar Desa Ngandagan RT 002 RW 001, Kec. pituruh, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							TK Mandiri Desa Sawangan RT 002 RW 001, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							TK Tunas Muda Desa Kerep RT 002 RW 002, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							KELOMPOK BERMAIN MEKAR ABADI DESA MAYUNGSARI		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO HP. 085328141773, Kab. Purworejo		
							TK SETIA BUDI SIDOMUKTI DUSUN KRAJAN 1 RT 03 RW 02 DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							TK MASYITHOH PUCANGAGUNG Desa Pucangagung,Kec.Bayan HP :0853.2813.3183, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							Dusun Sawahlor RT 01 RW 03, Desa Kemranggen, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo , Kab. Purworejo		TMS, triple usulan dengan id. 1857934, 1839311
33	4) Ketahanan sosial	4) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	78.39%	Pengadaan meubelair SD/ MI swasta (Kab. Purworejo)	MI AT-TAQWA DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	416 Satuan Pendidikan		MI GUPPI AT-TAQWA KALIWADER Dusun Ngabean RT 04 RW 02 Desa Kaliwader Kec. Bener, Kab. Purworejo		MS, tapi hasil reses tidak menunjukkan spesifik calon penerima manfaat.
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	40 Paket		MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH "HIDAYATUL INSAN" TEGES DESA TEGALSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS Hasil reses menyebutkan rehabilitasi gedung sekolah, dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk MI, Mts, dan sekolah swasta SD, SMP (smart TV, laptop, komputer, LCD proyektor) (reses pada 29 Februari 2026)- TIDAK ADA MEBELAIR). Usulan tidak sesuai, usulan pada madrasah diniyah.
							SD N Rejosari, Jl. Diponegoro Desa rejosari Rt 2/Rw 4 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. Kepala Sekolah Ibu Siti Muryani, S.Pd.SD		TMS Karena tidak sesuai kamus (yang diusulkan SD Negeri)

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							(No Hp 081238782808), Kab. Purworejo		
							SD N DUDUWETAN, Desa Duduwetan Rt 01 Rw 02 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo (Kepala Sekolah Ngadimah Sp.d.SD, M.Pd No hp 081514029086), Kab. Purworejo		TMS Karena tidak sesuai kamus (yang diusulkan SD Negeri)
							SDN BAYAN Jl. Gajah Mada KM. 07 Desa Besole Kecamatan Bayan (Nurul 081392810198), Kab. Purworejo		TMS Karena tidak sesuai kamus (yang diusulkan SD Negeri)
							SD N BLEKATUK , Desa Dlisengwetan Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo (kepala sekolah Sukarni, S.Pd., M.PD), Kab. Purworejo		TMS Karena tidak sesuai kamus (yang diusulkan SD Negeri)
							MI NU KALIWUNGU DESA KALIWUNGU KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, Hasil reses menyebutkan rehabilitasi gedung sekolah, dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk MI, Mts, dan sekolah swasta SD, SMP (smart TV, laptop, komputer, LCD proyektor) (reses pada 29 Februari 2026)
							MI IMAM PURO CEPEDAK DESA CEPEDAK KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, Hasil reses menyebutkan rehabilitasi gedung sekolah, dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk MI, Mts, dan sekolah swasta SD, SMP (smart TV, laptop, komputer, LCD proyektor) (reses pada 29 Februari 2026)
							MI NU PANGERAN KAJORAN DESA GOWONG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, Hasil reses menyebutkan rehabilitasi gedung sekolah, dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk MI, Mts, dan sekolah swasta SD, SMP (smart TV, laptop, komputer, LCD proyektor) (reses pada 29 Februari 2026)

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							MI MA'ARIF NU PLIPIRAN DESA PLIPIRAN KECAMATAN PLIPIRAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, Hasil reses menyebutkan rehabilitasi gedung sekolah, dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk MI, Mts, dan sekolah swasta SD, SMP (smart TV, laptop, komputer, LCD proyektor) (reses pada 29 Februari 2026)
							SD Negeri Turus Desa Turus, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							SD Negeri Girijoyo Desa Girijoyo, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							SD ISLAM 1 BALEDONO Jl. Brigjen Wiyono No.12 Baledono RT 01 RW 09 Kec. Purworejo , Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							SDN PANGEN GUDANG Jln. Mayjend Sutoyo No.3 Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses. Usulan pada SD Negeri.
							MI NU WATUDUWUR DESA WATUDUWUR KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS. Hasil reses menyebutkan rehabilitasi gedung sekolah, dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan untuk MI, Mts, dan sekolah swasta SD, SMP (smart TV, laptop, komputer, LCD proyektor) (reses pada 29 Februari 2026)
34	4) Ketahanan sosial	4) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	78.39%	Pengadaan peralatan TIK PAUD swasta/ RA (Kab. Purworejo)	TK. TRI WALUYO ASI DESA TEGALREJO RT 02 RW 02 KEC. BANYUURIP (Sumawari HP. 081229208848), Kab. Purworejo		MS, SESUAI

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		inklusifitas sosial masyarakat							
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	628 Satuan Pendidikan		POS PAUD LESTARI DESA TEPUS KULON KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	40 Paket		POS PAUD NURUL ATHFAL DESA SOKOHARJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							TK Mekar Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Dusun Puguh RT 003/ RW 002, Desa Ketosari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Brenggong Rt 001 RW 004, Kab. Purworejo		TMS, double dengan ID usulan 1839040
							KB. TUNAS BANGSA RT 01 RW 03 Desa Banjarsari Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							POS PAUD AISYIYAH MELATI JL PEJATEN RT 01 RW 04 KELURAHAN KESENENG KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							Desa Kaliwungu RT 001/ RW 001, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses. Dalam proposal usulan untuk SD.
							POS PAUD CAHAYA Dsn. Satu RT 03 RW 01 Desa Pacor Kec. Kutoarjo (Fulfah HP. 081225421100), Kab. Purworejo		TMS. Tahun 2026 sudah dapat Hibah APE
35	4) Ketahanan sosial	4) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	78.39%	Rehabilitasi Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru	MADRASAH DINIYYAH AL-IMAN Desa Kalimeneng, Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo		MS, tapi hasil reses tidak menunjukkan spesifik calon penerima manfaat.

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	416 Satuan Pendidikan	Pendidikan Nonformal Kesetaraan (Kab. Purworejo)	TPQ Ishlahul Mubtadi-ien, Desa Kroyo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS. Usulan dalam proposal tidak sesuai. Usulan utk pembangunan kamar santri
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 Ruang				
36	4) Ketahanan sosial	4) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	78.39%	Rehabilitasi ruang guru/ kepala sekolah/ TU SD/ MI swasta (Kab. Purworejo)	SD Negeri Sendangsari Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS Karena tidak sesuai kamus (yang diusulkan SD Negeri)
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	416 Satuan Pendidikan		SD Pius Bakti Utama Kec Kutoarjo, Kab. Purworejo		TMS, permasalahan tidak sesuai.
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Ruang		Sekolah Dasar Pius Bakti Utama Jalan Marditomo no.29 Kutoarjo, Kab. Purworejo		TMS, Permasalahan tidak sesuai. Permasalahan ruang UKS dan saluran air namun usulannya rehab ruang guru/kepala sekolah/TU
							Sekolah Dasar Pius Bakti Utama Jalan Marditomo no.29 Kutoarjo, Kab. Purworejo		TMS. Usulan dalam proposal rehabilitasi UKS.
37	4) Ketahanan sosial	4) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	78.39%	Rehabilitasi ruang kelas SD/ MI swasta (Kab. Purworejo)	MI Imampuro Sukowuwuh Kecamatan Bener, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	416 Satuan Pendidikan		SDN BANDUNGREJO Jl. Sondriyo Desa Bandungrejo Kecamatan Bayan (Nevi 081325381360), Kab. Purworejo		TMS Karena tidak sesuai kamus (yang diusulkan SD Negeri)
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 Ruang		MI IMAM PURO BRENGGONG Jl. Kaligesing KM.5 Desa Brenggong Kec. Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, Permasalahan tidak sesuai dengan usulan. tidak terdapat dalam hasil reses

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		inklusifitas sosial masyarakat					SD PIUS BAKTI UTAMA JALAN MARDITOMO NO.29 KUTOARJO , Kab. Purworejo		TMS, Permasalahan tidak sesuai dengan usulan. tidak terdapat dalam hasil reses, ada 5 usulan yang sama
							SD PIUS BAKTI UTAMA JALAN MARDITOMO NO.29 KUTOARJO, Kab. Purworejo		TMS, permasalahan tidak sesuai.
							Desa Dlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							Desa Sendangsari, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS. Permasalahan tidak sesuai. tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
38	4) Ketahanan sosial	4) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	78.39%	Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas PAUD/ RA (Kab. Purworejo)	Desa Pogungkalangan, Kecamatan Bayan, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik	628 Satuan Pendidikan		KELOMPOK BERMAIN AL HIKMAH DUSUN KRAJAN RT 004 RW 001 DESAKALIURIP KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO HP. 081229557737, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang		TK MARDISIWI RT 001 RW 001 Desa Keburusan Kecamatan Pituruh , Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							TK Masyitoh Kedungpomahan Wetan Dusun Gemelem RT 001 RW 003 Desa Kedungpomahan Wetan Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							TK MELATI NGASINAN DESA NGASINAN KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							TK Mekar Sari Condong Sari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		MS, tapi hasil reses menyebutkan rehab gedung PAUD

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Desa Kunir Kecamatan Butuh kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Brenggong Rt 001 RW 004, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Desa Bajangrejo, Kecamatan Bayan, Kab. Purworejo		TMS, Permasalahan tidak sesuai dengan usulan.
							TK Pertiwi Mayungsari Desa mayungsari Kecamatan Bener, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							Dusun Krajan RT 001/ RW 003 Desa Ketug, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							RA AT-Tazkiyah Desa Puspo Kec Bruno, Kab. Purworejo		TMS, tidak terdapat dalam hasil reses
							Kelompok Bermain Mranggi Siwi Desa Kemranggen Kec Bruno, Kab. Purworejo		TMS. Usulan tidak sesuai. Hasil reses menyebutkan usulan ruang kantor Menggi Siwi
							TK/PAUD Dunia Kecil Jalan Singodranan No 11 RT 04 Rw 07 Purworejo, Kab. Purworejo		TMS. Permasalahan tidak sesuai. Hasil reses menyebutkan usulan alat peraga edukasi. Dalam proposal usulan permohonan bantuan sarpras bukan rehab ruang kelas.
39	1) Pemerataan layanan infrastruktur dasar	1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	41.41%	Penyediaan alat penerangan jalan umum (Kab. Purworejo)	Desa Nglaris, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	DINAS PERHUBUNGAN	MS, sesuai
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2 Jenis		PEMDES SOKOAGUNG KEC. BAGELEN, Kab. Purworejo		MS, sesuai
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	130 Unit		PEMDES SEMONO KEC. BAGELEN, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							PEMDES KEMANUKAN KEC. BAGELEN, Kab. Purworejo		MS, sesuai

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							PEMDES PIJI KEC. BAGELEN, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							PEMDES CLAPAR KEC.BAGELEN, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							PEMDES HARGOROJO KEC. BAGELEN, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Desa Sambeng,kecamatan bayan, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							PEMERINTAH DESA KALINONGKO Dusun Situmbu desa kalinongko kecamatan loano kabupaten purworejo (kepala desa Ngabdul Khamid), Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Desa Malangrejo Kecamatan Banyuurip, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Desa Sumber RT 03 RW 01 Kecamatan Pituruh , Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Jl. Kandon/nglaris Dusun Krandon 5 titik PJU PEMERINTAH DESA KARANGSARI Desa Karangsari Rt 1/Rw 1,Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (kepala desa Adelan), Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Jalan Ketawangrejo-Dukuh Dungus wilayah Makam Bulak Sumur Desa Wonoenggal Kec. Grabag, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Jalan Sangubanyu Jenar Depan SD Negeri Kedungkamal, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Wilayah Desa Semoleter Desa Blimbing Desa Semoleter Kec. Bruno, Kab. Purworejo		MS, sesuai
							Desa Winong Kidul, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS, sesuai, disetujui 18 titik, karena IUP sudah tercukupi

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Jalan Ketawangrejo Dukuh Dungus wilayahnya makam Bulak Sumur Desa Wonoenggal, Kab. Purworejo		TMS, karena tidak melampirkan proposal. Usulan telah diajukan kembali dengan no. 1856393
							Jalan Sangubanyu Jenar depan SD Negeri Kedungkamal Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo		TMS, karena tidak melampirkan proposal. Usulan telah diajukan kembali dengan no. 1856656
							Desa Somoleter Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		TMS, karena tidak melampirkan proposal. Usulan telah diajukan kembali dengan no. 1857891
							PEMDES KETIWIJAYAN Jl.Besole-Sangubanyu Km 05 Kec. Bayan , Kab. Purworejo		TMS, tidak ada dalam reses
							Jalan lingkungan RW 002 Dusun Kedung Agung, Desa Ketosari, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS, usulan berada di ruas jalan lingkungan
40	1) Pemerataan layanan infrastruktur dasar	1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	41.41%	Penyediaan cermin tikungan (Kab. Purworejo)	Desa Winong Kidul, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS, sesuai
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2 Jenis		PEMDES CLAPAR KEC. BAGELEN, Kab. Purworejo		MS, sesuai
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	130 Unit				
41	1) Pemerataan layanan infrastruktur dasar	1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Ditangani	96.02%	Perbaikan rumah tidak layak huni (Kab. Purworejo)	Penerima Sapto Aji Desa Pacor, Kab. Purworejo	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	MS ada usulan di dalam 1 Dapil tapi beda kecamatan. RTLH dalam reses diusulkan di reses Grabag, sedangkan yang di butuh usulnya JUT (Pacor), hadroh, dan sarprass olah raga
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	100 Unit		Penerima Muhlisun RT.002 / RW002 Dusun Sabrang wetan Kec Bruno, Kab. Purworejo		MS, ada direses desa brunosari

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah		a.n WAGISAH Dsn. Santren, Rt. 001 Rw. 001 Desa Loning Kec. Kemiri, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Dusun Kandri Rt 02/Rw 02 Desa Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (atas nama ibu partiyah), Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Penerima Mundofar Rt.02/RW.04 Dusun Kalicuruq Kec Bruno, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							"Mursodo" Pemerintah Desa Wonoenggal Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Ismardiyanto, Keseneng Rt 003/ Rw 001, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Blok Melati RT 001 RW 003, Desa Rejosari, Kec. Kemiri (Sarji Suryo Pramono), Kab. Purworejo		TMS , Tidak ada dalam reses
							Dusun Kidul RT 003 RW 003 Desa Kedungkamal, Kecamtan Grabag, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							ADIJI ROHMAN DUSUN SURODADI RT 08 RW 03 DESA PUSPO KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, tidak ada dalam reses, harusnya rekomendasi nol
							Penerima Muhamad Qoma ruzaman Desa Pacor, Kecamatan Kutoarjo, Kab. Purworejo		TMS, tidak ada dalam reses, Usulan double dengan kode usulan 1839346

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
42	1) Pemerataan layanan infrastruktur dasar	1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Ditangani	96.02%	Perbaikan rumah tidak layak huni dan jamban (Kab. Purworejo)	Cacaban RT 04 Rw 02 Desa Kaliwungu Kecamata Bruno Pengusul Boniyatul, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani	100 Unit		cacaban rt 04 rw 02 Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno Pengusul Hasanudin, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah		cacaban rt 02 rw 02 desa kaliwungu kecamatan bruno pengusul Irmawanto, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							kedungwungu rt 04 rw 03 desa kaliwungu kecamatan bruno pengusul moyan, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							kedungwungu rt 03 rw 03 desa kaliwungu kecamatan bruno pengusul nur chojin , Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Sikempong rt 02 rw 04 Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno Pengusul Siti Choirunisa, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Kalibang Rt 01 Rw 05 Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno Pengusul Supriyadi, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Kalibang rt 05 rw 05 Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno Pengusul Tamto, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Cacaban rt 02 rw 02 Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno Pengusul Wasito, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Penerima Muhammad Qoma Ruzaman Desa Sangubanyu, Kecamatan Grabag , Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Dusun Sabrangwetan RT 001 RW 002 Desa Brunosari Kec. Bruno, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Dusun singojoyo RT 002 RW 005 Desa Brunosari Kec. Bruno, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Dusun Singojoyo RT 002 / RW 005, Desa Brunosari, Kec. Bruno , Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Dusun Sambeng RT 003 RW 001 Desa Gowong Kec. Bruno, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Dusun Sambeng RT 003 RW 001, Desa Gowong Kec. Bruno, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Dusun Kedungwungu RT 001 / RW 003 Desa Kaliwungu, Kec. Bruno , Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Dusun Sigedog RT 003/RW 004 Desa Kaliwungu, Kec. Bruno, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Dusun Sigedog RT 003/ RW 004, Desa Kaliwungu Kec. Bruno, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
							Dusun Crogol RT 004 RW 007 Desa Brunosari Kec. Bruno, Kab. Purworejo		TMS, Tidak Masuk Kriteria karena hanya 1 kerusakan yaitu lantai saja, seharusnya minimal 2 kerusakan
							Nurkholis Dusun Kedungwungu RT.03 RW.03 Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		TMS, Tidak Masuk Kriteria, karena yang diajukan rumah belakang, sedang rumah utama sudah layak huni
							Mundofar RT.002 / RW.004 Dusun Kalicuruq Brunosari Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		TMS, Usulan double dengan kode usulan 1857950
43	5) Tata kelola pemerintahan yang tangkas,	5) Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan	100%	Pembangunan jalan lingkungan kelurahan (Kec. Purworejo)	Jalan Lingkungan Kedungsari Rt 02 Rw 02 Krajan II Kelurahan Kedungsari Kecamatan Purworejo, Kab. Purworejo	KECAMATAN PURWOREJO	MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	adaptif, akuntabel, dan kolaboratif	berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan		Masyarakat Desa/ Kelurahan					
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3 Dokumen		jalan yang terletak di Rt 3 Rw 4, Kelurahan Cangkreplor Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo (lurah cahyo hidayat, S.Pd no hp 0275-3128075), Kab. Purworejo		MS Ada di reses yang dilaksanakan di pangenrejo
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		POKMAS AMANAH KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Pemerintah Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							Kedungwadas RT 01/RW 04 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Purworejo, Kab. Purworejo		MS, SESUAI
							JALAN LINGKUNGAN RT 001 RW 008 KELURAHAN PANGENJURUTENGAH KECAMATAN PURWOREJO, Kab. Purworejo		TMS, Lokasi tersebut merupakan PSU di Perum KBN (Rw 8) Kelurahan, sehingga menjadi kewenangan PD Dinperkimtan.
44	5) Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif	5) Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	Rehabilitasi prasarana peribadatan (Kab. Purworejo)	MUSHOLA ANNUR Dusun Semayu RT 001 RW 002 Desa Kedungpomahan Wetan Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo	SEKRETARIAT DAERAH	MS
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah dokumen fasilitasi kebijakan bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	3 Dokumen		MUSHOLLA HIDAYATUL AMIN Dsn. Ketepeng Rt 05 Rw 01, Desa Watuduwur, Kec. Bruno, Kab. Purworejo		MS
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		MASJID "SALAFIYYAH" Rt 02 Rw 02 Desa Brunosari Kecamatan Bruno No Tlp/Hp. 085228429819, Kab. Purworejo		MS
							MASJID AL AMIN Rt 03 Rw 06 Desa Brunosari Kecamatan Bruno		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							No Tlp/Hp. 082227010269, Kab. Purworejo		
							MASJID “SABILUL MUHTADIN" Rt 05 RW 03 Desa Tegalsari Kecamatan Bruno No Tlp/Hp. 082227447339, Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLLA “AT-TAQWA" Rt 04 RW 01 Desa Pakisarum Kecamatan Bruno No Tlp/Hp. 082241438366, Kab. Purworejo		MS
							MASJID AS-SAHLIYAH Dukuh Keputihan RT 01 RW 04 Desa Brengkol Kecamatan Pituruh, Kab. Purworejo		MS
							Mushola Baitussalam Dusun Karang wetan RT 03 RW 03 Desa Kalisemo Kecamatan Loano Ketua Maryadi No Hp 082226474127, Kab. Purworejo		MS
							Mushola Al Muslim Dusun Keposong RT 01 RW 01 Desa Ketosari Kecamatan Bener Ketua Busro No Hp 088980371714, Kab. Purworejo		MS
							Masjid Al-Ichwan Dusun Katisnan RT 02 RW 03 Desa Karangsari Kecamatan Bener Ketua Sutarno No Hp 082145649023, Kab. Purworejo		MS
							Mushola Al-Iman Dusun Beru Manis RT 01 RW 04 Desa Kalisemo Kecamatan Loano Ketua H Harsidik Budi Prabowo No Hp 081328199580, Kab. Purworejo		MS
							MASJID AT-TAQWA Desa Salam Kec. Gebang, Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLLA AL IKHLAS RT 02 RW 01 Desa Ketosari Kec. Bener, Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLLA BAITUL HUDA Dusun Kebon RT 02 RW 01 Desa Benowo Kec. Bener, Kab. Purworejo		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							BADAN KESEJAHTERAAN MASJID NURUL HUDA RT 01 RW 01 Desa Gesing Kec. Purwodadi 0882003657271, Kab. Purworejo		MS
							MASJID AL IMAN DUSUN TLOGO RT 01 RW 03 Desa Tlogokotes Kec. Bagelen, Kab. Purworejo		MS
							MASJID AL-BAROKAH Dsn. Sembir RT 02 RW 01 Desa Somorejo Kec. Bagelen 081227270029, Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLLA “AL-IBROHIM" Rt 02 RW 04 Desa Cepedak Kecamatan Bruno No Tlp/Hp. 085229760199, Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLLA DAARUNNAJAH DESA PEJAGRAN KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLA BAITUL LATIF Dusun Banaran RT 03 RW 03,Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							MASJID AL HUDA Dusun Kedung Agung RT 02/ RW 02, Desa Ketosari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Mushola Darul Falah Dusun Pesanggarahan RT.02/RW.01 Desa Ngasinan Kec. Bener, Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLA "NURUL KAFI" DESA WATUDUWUR KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLLA ROUDLATUL JANNAH RT 01 RW 07 KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		
							MASJID " AL-ISLAM " DESA JATI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							MASJID AL MUAWANAH Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Sokowaten Banyuurip (Mukhlas 085781239418), Kab. Purworejo		MS
							MASJID JAMI' USWAH HASANAH Dusun Tegalboto RT 02 R 01 Desa Tegalrejo , Kab. Purworejo		MS
							Mushola Al-Furqon Kampung Madyokusuman, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Masjid Baitussyarif, Desa Tegalsari, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLLA BAITUL MUTTAQIN desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							Mushola An Nur Dusun Sibentar Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing Pengusul Pupon, Kab. Purworejo		MS
							Masjid Nuroh Nashir Al-Khamani Desa Patutrejo, Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo		MS
							Musholla Az Zaenuddin Dusun Garagan RT.01/ RW.03 Desa Girigondo Kecamatan Pituruh, Kab. Purworejo		MS
							Masjid Al Iman Desa Keponggok, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Mushola Alhuda Desa Kedungpomahan Wetan Kec Kemiri, Kab. Purworejo		MS
							Mushola Al Falaq Dusun Kedungcuruq Rt 01 Rw 02 Desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing, Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLA DARUSSALAM DESA KUNIR KECAMATAN BUTUH KABPUATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLA AR-ROHMAH Dusun Gunung Asem Rt 1/Rw 2Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo (Ketua takmir Bapak Nur Chamid), Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLA DA'IL FALAH BIMAN, rt 1/rw 3 Desa Limbangan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (Ketua Takmir Muhammad Sodiq), Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLA NURUL IMAN, Dusun Jati Rt 03/Rw 03 Desa Nglaris Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (ketua takmir Agus Susiswo Heri S, S.IP No Hp 085228186402), Kab. Purworejo		MS
							MASJID AL HUDA Dusun I RT 001/ RW 001, Desa Tlepokwetan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS
							MASJID BAITUL UMAR Dusun Krajan rt 06/ rw 1 Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo (ketua takmir Muhadi, S.Ag), Kab. Purworejo		MS
							MUSHOLA AL HIKMAH Desa Roworejo RT 002/ RW 002, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		MS

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Mushola Daarussalamah Desa Kuwurejo Kecamatan Kutoarjo, Kab. Purworejo		MS
							Masjid Ar-Rohman RT.04 / RW.01 Desa Tawangsari Kec Kaligesing, Kab. Purworejo		MS
							Masjid Al Anwar Dusun Tuk Sungo Desa Tlogoguwo Kec Kaligesing, Kab. Purworejo		MS
							Mushola Baitul Aminin Dusun Krajan Rt,.01 RW.02, Kab. Purworejo		MS
							Mushola Al Hidayah Dusun Trukan RT.02 / RW.03 Desa Grabag Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo		MS double input dengan id
							Gereja Jamaat Kristus Indonesia Desa Tlogorejo RT.02/RW.02, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		MS, dpuble input dengan id 1857741
							Musholla Al Hidayah Dusun Trukan RT.02 / RW.03 Desa Grabag Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo		TMS Doubel input 1782520
							Gereja Jamaat Kristus Indonesia Kec.Purwodadi , Kab. Purworejo		TMS double input 1839396
							Musholla AL MUTTAQIN Krajan Wetan Desa Tlogosono rt 1/rw 1 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo (ketua Tambah Sugiyanto), Kab. Purworejo		TMS double input dengan id 1857170
							Pembangunan Masjid Al Iman Desa Kepogok Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo		TMS. double input
							Mushola Ar-Rofi'i Kajoran Kulon Desa Gowong, Kab. Purworejo		TMS. double input
							Mushola Az Zaenuddin Desa Girigondo Kec. Pituruh, Kab. Purworejo		TMS. double input
							Masjid Al Ismailliyah Dusun Krajan Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo		TMS. double input

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							MASJID NURUL ISLAM RT 03 RW 01 Desa Sokoharjo Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo		TMS. mendapatkan Hibah di 2026, hibah tidak dapat diberikan berturut turut
							Masjid Jami' Al- 'Alamin, Desa Brengkol Kecamatan Pituruh, Kab. Purworejo		TMS. Proposal Masuk melebihi Musrenbang, tidak masuk Reses
							Masjid Ar Royan, Jl. Brigjen Katamso No. 195 , RT 1/RW 2 Boro Kulon, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Masjid At Taqwa Dusun Tegaliser Desa Kliwonan Kecamatan Banyuurip, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							MUSHOLA NURUL HUDA Dsn. Pandean RT 02 RW 03 Desa Suren Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Mushola Nurul Huda Desa cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							MASJID AL-HUDA Dusun Kretek RT 02 RW 03 Desa Pacekelan Kec. Purworejo HP. 085647804757, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							MUSHOLLA KI KOJOPATI SAYID KAMUL Lingkungan 1 Desa Tambakrejo Kecamatan Purworejo, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							MUSHOLLA NUR HUDA Dukuh Lor RT 03 RW 01 Desa Sidomulyo Kec. Purworejo , Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Masjid Al Ismailliyah Dusun Krajan Dukuh Carikan RT.001 / RW.001 Brunosari Kec. Bruno , Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Mushola AR-ROFII Kajoran Kulon Desa Gowong 2025, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Masjid Bisalamin Aminin, Desa Guntur, Kecamatan Bener,		TMS. tidak ada dalam reses

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume/ Target	Usulan	Lokasi	Perangkat Daerah Terkait	Validasi/ Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
							Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo		
							MASJID JAMI' DAARUSH SHOLIHIN Jl. Krajan No.4 Kelurahan Baledono Purworejo, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							MASJID AL-HIKMAH, Dusun Katerban Rt 5/Rw 1 Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo (ketua takmir Muhasim), Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses
							Mushola Al Irsyad Dusun Gemelem Desa Kedungpomahan Wetan Kec. Kemiri, Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses. Yang direses adanya masjid al iman kedungpomahan kulon
							Masjid al-amin Desa Kalicebong Desa Dilem, Kecamatan Kemiri , Kab. Purworejo		TMS. tidak ada dalam reses. Yang direses adanya masjid al iman kedungpomahan kulon dan masjid jami baiturohom desa purbayan

Sumber: Bapperida, 2026

2.7. PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN PURWOREJO

Penghargaan yang diterima Pemerintah Daerah menjadi motivasi kuat untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan publik (pendidikan, kesehatan, lingkungan), memperkuat komitmen pembangunan daerah, dan mendorong kinerja lebih baik lagi agar tidak hanya mempertahankan, tapi juga melampaui standar yang telah dicapai, dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat. Hal ini dapat menjadi validasi atas kerja keras dan pemicu semangat bagi jajaran pemerintah serta seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi.

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah banyak memperoleh penghargaan baik di level nasional maupun regional sebagai berikut.

2.7.1. Penghargaan Tingkat Nasional

Penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo pada level nasional meliputi:

1. ***Innovative Government Award*** **(IGA)**

   Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) memperoleh penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). IGA adalah penghargaan tahunan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diberikan kepada pemerintah daerah atas keberhasilan dalam menerapkan inovasi yang berdampak nyata pada peningkatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. IGA bertujuan mengukur mendorong, dan mengapresiasi inovasi daerah agar tercipta budaya inovasi berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah.

   Pada tahun 2025 Kabupaten Purworejo kembali memperoleh penghargaan IGA dengan predikat "**Kabupaten Sangat Inovatif**". Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen kuat Pemkab Purworejo dalam membangun budaya inovasi di seluruh sektor pemerintahan. Dalam dua tahun terakhir, skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Purworejo menunjukkan peningkatan signifikan, dari 48 pada tahun 2023, naik menjadi 61,72 di tahun 2024, dan pada 2025 mencapai skor 75,45. Kenaikan skor ini mencerminkan perbaikan yang konsisten dalam pengembangan dan implementasi inovasi di perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, hingga partisipasi masyarakat.



Gambar 2.93. Penghargaan IGA Kabupaten Purworejo Tahun 2025
Sumber: Bapperida Kabupaten Purworejo, 2025

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah memperoleh penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada pemerintah daerah atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Predikat ini merupakan pengakuan formal bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. WTP bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan negara guna memastikan setiap rupiah APBD dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pada tahun 2025, Kabupaten Purworejo kembali menorehkan prestasi gemilang dengan mempertahankan predikat Opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2024. Keberhasilan ini menandai pencapaian WTP 13 kali secara berturut-turut, yang membuktikan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.



Gambar 2.94. Penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2025
Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2025

3. Kabupaten Layak Anak

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPPPAPMD) memperoleh penghargaan **Kabupaten Layak Anak Peringkat PRATAMA** Tahun 2025. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah anugerah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk Pemerintah Daerah yang dinilai berhasil memenuhi hak anak dan perlindungan khusus anak, dengan kategori seperti Pratama, Madya, Nindya, hingga Utama, serta Provinsi Layak Anak (PROVILA). Penghargaan ini bertujuan mendorong pemenuhan hak anak dalam berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan partisipasi, serta menjadi cerminan komitmen daerah terhadap anak-anak.


MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR : 318/MEN/TK.05/7/2025

Dengan ini memberikan penghargaan Kepada :

Pemerintah Kabupaten Purworejo

Sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat PRATAMA Tahun 2025

Jakarta, 23 Juli 2025

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia

Arifatul Choiri Fauzi

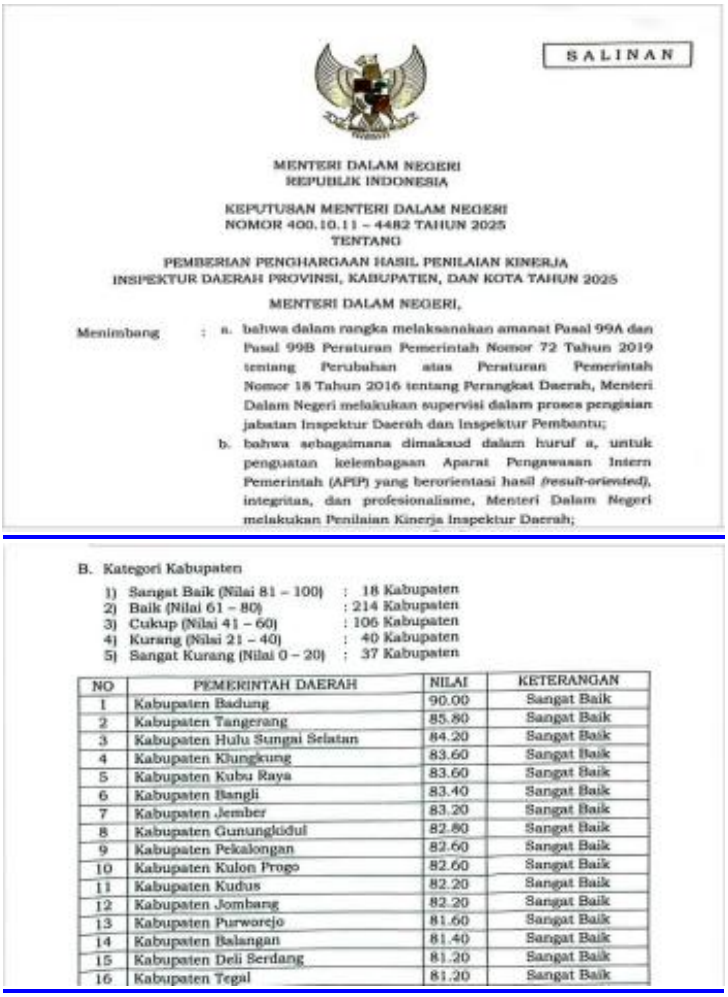
Gambar 2.95. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Peringkat PRATAMA Tahun 2025
Sumber: DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, 2025

4. Anggaraksa Dharma

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Inspektorat Daerah memperoleh penghargaan Anggaraksa Dharma yang dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja Inspektur Daerah yang menunjukkan dedikasi, intregitas dan profesionalisme tertinggi dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Daerah dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan teladan dan standar kinerja yang dapat menjadi acuan bagi seluruh Inspektorat Daerah serta menguatkan komitmen terhadap akuntabilitas, transparansi, dan pencegahan korupsi dalam pemerintahan daerah.

Dalam konteks Inspektorat/APIP, penghargaan Anggaraksa Dharma mencerminkan komitmen aparatur pengawasan untuk:

- Menjaga integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
- Mengawal pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran agar sesuai ketentuan;
- Menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan beretika;
- Mengabdi pada kepentingan publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 400.10.11 – 4482 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN HASIL PENILAIAN KINERJA
INSPEKTUR DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2025

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 99A dan Pasal 99B Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan supervisi dalam proses pengisian jabatan Inspektur Daerah dan Inspektur Pembantu;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk penguatan kelembagaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berorientasi hasil *(result-oriented)*, integritas, dan profesionalisme, Menteri Dalam Negeri melakukan Penilaian Kinerja Inspektur Daerah;

B. Kategori Kabupaten

1) Sangat Baik (Nilai 81 – 100) : 18 Kabupaten
2) Baik (Nilai 61 – 80) : 214 Kabupaten
3) Cukup (Nilai 41 – 60) : 106 Kabupaten
4) Kurang (Nilai 21 – 40) : 40 Kabupaten
5) Sangat Kurang (Nilai 0 – 20) : 37 Kabupaten

NO	PEMERINTAH DAERAH	NILAI	KETERANGAN
1	Kabupaten Badung	90.00	Sangat Baik
2	Kabupaten Tangerang	85.80	Sangat Baik
3	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	84.20	Sangat Baik
4	Kabupaten Klungkung	83.60	Sangat Baik
5	Kabupaten Kubu Raya	83.60	Sangat Baik
6	Kabupaten Bangli	83.40	Sangat Baik
7	Kabupaten Jember	83.20	Sangat Baik
8	Kabupaten Gunungkidul	82.80	Sangat Baik
9	Kabupaten Pekalongan	82.60	Sangat Baik
10	Kabupaten Kulon Progo	82.60	Sangat Baik
11	Kabupaten Kudus	82.20	Sangat Baik
12	Kabupaten Jombang	82.20	Sangat Baik
13	Kabupaten Purworejo	81.60	Sangat Baik
14	Kabupaten Balangan	81.40	Sangat Baik
15	Kabupaten Deli Serdang	81.20	Sangat Baik
16	Kabupaten Tegal	81.20	Sangat Baik

Gambar 2.96. Penghargaan Anggaraksa Dharma Tahun 2025
Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, 2025

5. Pasar Tertib Ukur

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DINKUKMP) memperoleh penghargaan Pasar Tertib Ukur. Pasar Tertib Ukur yang selanjutnya disingkat PTU adalah suatu predikat bidang metrologi legal yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga – Kementerian Perdagangan RI kepada pasar yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja metrologi legal di tahun 2024 yang diserahkan di akhir tahun 2025. Penghargaan diberikan kepada 17 Pasar Daerah yaitu: Pasar Baledono, Pasar Butuh, Pasar Gebang, Pasar Grabag, Pasar Jenar Wetan, Pasar Kaliboto, Pasar Kemiri, Pasar Kutoarjo, Pasar Lugosobo, Pasar Maron, Pasar Mundusari, Pasar Ngori, Pasar Pagi Liwung, Pasar Seren, Pasar Soko, Pasar Winong, dan Pasar Wirotaman. Capaian ini telah meningkat dari periode sebelumnya yaitu hanya terdapat 10 pasar yang memiliki predikat Pasar Tertib Ukur.



Gambar 2.97. Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2025

Sumber: DINKUKMP Kabupaten Purworejo, 2025

6. Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-20

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui TP PKK Kabupaten Purworejo Pokja 3 memperoleh Juara I Kategori Menu Keluarga dalam Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-20 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lomba ini bertujuan untuk mempresentasikan menu inovasi makanan dengan olahan ikan dalam menu keluarga dan variasi makanan dengan bahan baku ikan supaya dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat dan di gemari oleh anak-anak yang kurang dalam konsumsi makanan dengan bahan baku ikan.



Gambar 2.98. Penghargaan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional ke-20

Sumber: DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, 2025

2.7.2. Penghargaan Tingkat Regional

Penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo pada level regional meliputi:

1. Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPPPAPMD) memperoleh penghargaan **Posyantek Desa Berprestasi** pada ajang perlombaan Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi adalah kompetisi tahunan yang di selenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong inovasi teknologi sederhana, aplikatif, dan berdaya guna tinggi dari masyarakat, dengan kategori Inovasi TTG dan TTG Unggulan serta Posyantek Desa Berprestasi dan Kabupaten Purworejo yang diwakili oleh Posyantek Desa Gawe Rejo dari Desa Rejosari Kecamatan Kemiri mendapat Peringkat ke-2.


PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 800.1.12.6/0807544

Dasar : Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100.3.3.1/333 tanggal 15 Agustus 2025
tentang Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Diberikan kepada :

POSYANTEK DESA GAWE REJO

DESA REJOSARI, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO

Sebagai :

JUARA II

KATEGORI LOMBA POSYANTEK DESA BERPRESTASI

Semarang, 15 Agustus 2025

Gambar 2.99. Penghargaan TTG Posyantek Desa Berprestasi
Sumber: DPPPAPMD Kabupaten Purworejo, 2025

2. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Awards

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (DINKOMINFOSTASANDI) memperoleh penghargaan KIP Awards dengan predikat "**MENUJU INFORMATIF**". KIP Awards adalah penghargaan bergengsi yang diberikan oleh Komisi Informasi (KI) kepada badan publik (pemerintah, BUMN/BUMD, lembaga publik, hingga lembaga penyiaran) yang paling berkomitmen dan berhasil dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik, serta menjadi apresiasi bagi mereka yang berperan besar dalam mendorong transparansi dan pelayanan informasi yang baik bagi

masyarakat, sering kali menjadi puncak dari proses monitoring dan evaluasi KI.

Penghargaan ini merupakan wujud komitmen dalam menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi publik yang responsif. Dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, Kabupaten Purworejo berhasil meraih predikat MENUJU INFORMATIF dengan skor nilai 85,13. KIP Awards menjadi bentuk apresiasi terhadap badan publik, yang dinilai berhasil menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Dalam tiga tahun terakhir, skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Purworejo menunjukkan peningkatan, dari skor 82,22 pada tahun 2023, naik menjadi 84,66 di tahun 2024, dan pada 2025 meraih skor 85,13. Kenaikan skor ini mencerminkan perbaikan yang konsisten dalam tata kelola keterbukaan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.



Gambar 2.100. Penghargaan KIP Awards dengan Predikat Menuju Informatif
Sumber: Dinkominfostasandi Kab. Purworejo, 2026

3. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) Berkomitmen Terbaik Dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui RSUD R.A.A. Tjokronegoro memperoleh penghargaan dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen dalam kategori "FKRTL Berkomitmen Terbaik dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Kantor Cabang Tahun 2025" untuk Kategori Rumah Sakit Kelas C. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen setiap tahunnya memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) di wilayah kerjanya sebagai bentuk

penghargaan atas komitmen dan kinerja dalam mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penilaian penghargaan tersebut dilakukan berdasarkan beberapa indikator, antara lain capaian pemanfaatan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan diantaranya penggunaan layanan BPJS Kesehatan dan tingkat pemanfaatan antrean online melalui aplikasi Mobile JKN. Selain itu, penilaian juga mencakup aspek administrasi lainnya, meliputi inovasi pelayanan rumah sakit yang mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta upaya promosi layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi dari seluruh tahapan penilaian tersebut, RSUD R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima penghargaan FKRTL Berkomitmen Terbaik dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Kantor Cabang Tahun 2025 untuk kategori Rumah Sakit Kelas C.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Bidang Pelayanan RSUD R.A.A. Tjokronegoro, Anny Retno Priastuti, SKM., MM, yang mewakili manajemen rumah sakit, bertempat di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kebumen pada Kamis, 9 Oktober 2025. Penerimaan penghargaan ini menjadi salah satu indikator keberhasilan RSUD R.A.A. Tjokronegoro Kabupaten Purworejo dalam mendukung Program JKN serta menjadi motivasi untuk terus meningkatkan mutu.



Gambar 2.101. Penghargaan FKRTL Berkomitmen Terbaik dalam Pelayanan Kesehatan Program JKN Tingkat Kantor Cabang Tahun 2025

Sumber: RSUD R.A.A. Tjokronegoro, 2025

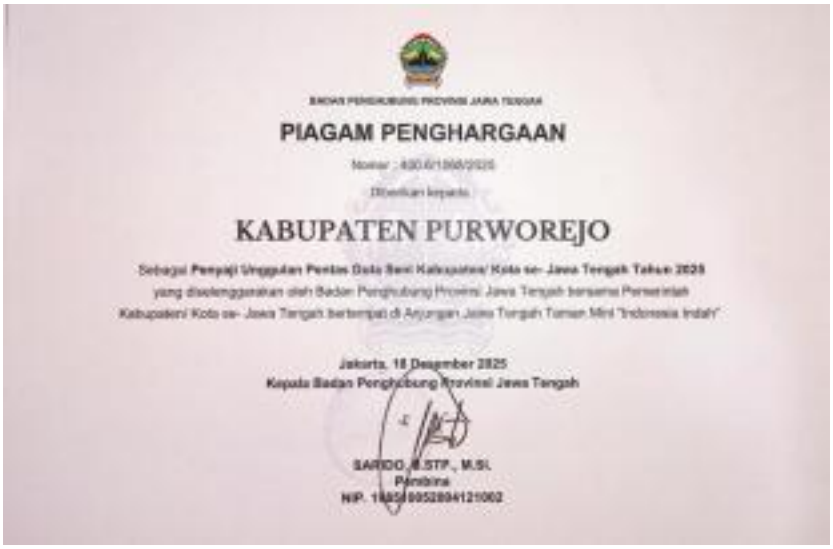
4. Penyaji Unggulan Pentas Duta Seni Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memperoleh penghargaan Penyaji Unggulan Pentas Duta Seni Kebupatan/ Kota se Jawa Tengah dari Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan dalam penyajian Pentas Duta Seni Kabupaten/ Kota yang tampil di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.

Kabupaten Purworejo kembali menunjukkan keunggulannya di bidang seni dan budaya dengan meraih Juara Unggulan pada Penganugrahan Duta Seni Award 2025 yang diselenggarakan di Wisma Perdamaian, Semarang, 18 Desember 2025. Pada ajang ini, Kabupaten Purworejo menampilkan Kesenian Cingpoling, salah satu Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang menjadi kebanggaan masyarakat Purworejo.

Pentas Duta Seni Award 2025 diikuti oleh berbagai kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purworejo berhasil mencuri perhatian dengan penampilan Cingpoling yang memukau. Cingpoling, yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda (WBTb), menjadi bukti kekayaan budaya Kabupaten Purworejo.

Penganugrahan Duta Seni Award 2025 ini bertujuan untuk mempromosikan dan melestarikan seni dan budaya di Jawa Tengah. Kabupaten Purworejo berharap dapat terus mengembangkan dan melestarikan kesenian Cingpoling sebagai salah satu identitas budaya daerah.


PIAGAM PENGHARGAAN

KABUPATEN PURWOREJO

Jakarta, 18 Desember 2025

Gambar 2.102. Penyaji Unggulan Pentas Duta Seni Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah

Sumber: Dindikbud Kabupaten Purworejo, 2025

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2027 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2027 berdasarkan proyeksi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Kabupaten Purworejo tahun 2027 yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2027.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Purworejo dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional maupun regional serta arah kebijakan dan target Nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi di Kabupaten Purworejo.

3.1.1 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Global

Sejak akhir tahun 2025 hingga memasuki tahun 2026, perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian perdagangan dan eskalasi geopolitik yang meningkatkan volatilitas pasar keuangan, mengganggu rantai pasok, serta menambah tekanan pada harga komoditas strategis, terutama energi. Di tengah tekanan tersebut, sektor manufaktur global tetap menunjukkan resiliensi, tercermin dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) manufaktur global yang masih berada pada zona ekspansif pada Januari–Februari 2026, dengan dukungan utama berasal dari aktivitas produksi di kawasan Asia. Sementara itu, proses disinflasi global terus berlanjut namun melambat, sehingga arah kebijakan moneter antarnegara menjadi semakin beragam, dengan bank sentral utama cenderung berhati-hati dalam melanjutkan pelonggaran suku bunga. Secara keseluruhan, prospek ekonomi global tetap moderat, dengan pertumbuhan yang semakin ditopang oleh negara berkembang, khususnya Asia. Sementara, risiko utama masih berasal dari proteksionisme, gangguan pasokan, gejolak geopolitik, dan potensi tekanan stagflasi.

3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Meski dinamika perekonomian global masih diliputi ketidakpastian, perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid dengan tumbuh kuat di 5,11%, dengan akselerasi pada triwulan IV mencapai 5,39% (yoy). Kinerja ini ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, investasi, belanja Pemerintah, serta ekspor yang tetap terjaga. Dari sisi produksi, pertumbuhan terutama berasal dari industri pengolahan, perdagangan, pertanian, transportasi, akomodasi dan mamin (makanan dan minuman), serta informasi dan komunikasi, sementara sektor pertambangan masih mengalami kontraksi. Secara spasial, seluruh wilayah tumbuh positif, dengan kinerja tertinggi di Sulawesi sementara Jawa masih menjadi pusat aktivitas manufaktur dan perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dengan jumlah penduduk bekerja yang meningkat. Memasuki 2026, prospek pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga, namun mulai dibayangi risiko eksternal. Kondisi global masih menghadapi risiko pemulihan konsumsi yang belum sepenuhnya ekspansif, ketegangan geopolitik yang semakin mengarah pada konflik fisik, serta gangguan pada aktivitas perdagangan dan investasi global. Situasi ini terus diwaspada dari sisi risiko rambatannya terhadap domestik. Rambatan dapat terjadi melalui tekanan terhadap Rupiah dan harga instrumen porfotolio di pasar keuangan, serta aktivitas sektor riil berupa gangguan terhadap konsumsi, perdagangan eksternal, investasi, termasuk risiko terhadap keterbatasan ruang fiskal.

Pemerintah terus memastikan stabilitas makroekonomi terjaga serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Selama tujuh tahun terakhir, Indonesia secara konsisten mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5%, yang mencerminkan akumulasi pertumbuhan ekonomi nasional hingga sekitar 35%. Stabilitas makroekonomi tetap terjaga dengan inflasi Desember 2025 berada pada level 2,92%. Kinerja pasar keuangan menunjukkan tren positif dengan indeks saham yang terus mencetak rekor, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, serta aktivitas sektor riil yang tetap ekspansif, tercermin dari PMI manufaktur sebesar 51,2 dan indeks kepercayaan konsumen yang meningkat ke level 123,5. Posisi eksternal Indonesia juga tetap solid, ditopang surplus neraca perdagangan serta cadangan devisa yang mencapai USD 156,1 miliar. Namun demikian di tahun 2026, kondisi ekonomi nasional mulai terguncang akibat perang Amerika Serikat dan Iran. Nilai tukar rupiah mencapai Rp18.000,00 per dolar Amerika Serikat.

Dari sisi pembiayaan dan investasi, pertumbuhan kredit perbankan tetap terjaga mendekati 8%, sementara realisasi penanaman modal asing (FDI) menunjukkan tren peningkatan. Kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia dan prospek pertumbuhan jangka panjang.

Dari sisi kualitas pertumbuhan, berbagai indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan yang nyata. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik menjadi 70,59% pada Agustus 2025, mencerminkan meningkatnya

keterlibatan penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. Penciptaan lapangan kerja didukung melalui penguatan sektor riil dan berbagai program pembiayaan, antara lain penyaluran Kredit Program seperti KUR, Kredit Alsintan, KIPK, dan Kredit Perumahan, serta pelaksanaan Program Padat Karya Tunai dan program magang bagi lulusan perguruan tinggi.

Seiring dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka terus menurun dan tercatat sebesar 4,85 persen. Perbaikan kesejahteraan masyarakat juga terlihat dari menurunnya tingkat kemiskinan nasional, tercatat sebesar 8,47% pada Maret 2025. Tingkat kemiskinan ekstrem turut menurun menjadi 0,85% pada periode yang sama, menandakan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem yang semakin mendekati nol. Rasio gini juga menunjukkan tren penurunan dan berada di level 0,375 yang mencerminkan perbaikan pemerataan pendapatan

Dalam lima tahun kedepan Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8,0% di tahun 2029, sedangkan tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,80 - 6,50 % (menyesuaikan dokumen KEM PPKF 2027).

3.1.3 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah

Di tengah ketidakpastian iklim ekonomi global, perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2025 mampu tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi Jateng pada Tahun 2025 sebesar 5,37% (C to C). Bahkan, angka ini lebih tinggi dari capaian nasional yang tumbuh 5,11%. Kontribusi ekonomi Jawa Tengah didominasi oleh 4 lapangan usaha, yakni industri pengolahan yang menyumbang 33,43%; perdagangan 13,44%; pertanian 12,88; dan sektor konstruksi 11,82%. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga mendominasi dengan kontribusi sebesar 60,64%.

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2027 diproyeksikan tetap tumbuh positif. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, dan meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. serta dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2027
1	*2*	*3*	*4*
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60 - 7,40
2	PDRB per kapita	Juta Rp	56,0 - 59,8
3	Inflasi	%	1,50 - 3,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,42-4,08
5	Tingkat Kemiskinan	%	8,50-7,50

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2027
1	*2*	*3*	*4*
6	Rasio Gini	Angka	0,358 - 0,363

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dan Rakortekbang 2026

Tahun 2027 merupakan tahap "Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah" dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahun kedua ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu "Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi". Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan daerah tersebut antara lain:

1. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. penguatan promosi pariwisata berbasis digital;
3. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan prasarana sarana destinasi wisata;
4. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;
5. peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata;
6. penguatan integrasi antar destinasi wisata;
7. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata;
8. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata; city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;
9. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang- Yogyakarta-Surakarta;
10. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital;
11. penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah agar lebih efektif;
12. peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata desa;
13. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
14. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
15. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan
16. peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
17. penguatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK bidang keahlian layanan pariwisata, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana,

perhotelan, dan perbankan syariah termasuk ekonomi kreatif dan kewirausahaan halal;
18. revitalisasi kurikulum SMK seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, layanan pariwisata dan perbankan syariah selaras dengan kebutuhan usaha dan industri;
19. penguatan integrasi tema pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan syariah dalam kurikulum SMA dan SLB berbasis project integratif dan lintas;
20. penguatan kemitraan DUDI melalui sinkronisasi kompetensi dan penyusunan Memorandum of Agreement (MoA) untuk kegiatan spesifik antara lain dengan perusahaan atau hotel syariah, restoran halal, biro perjalanan haji-umrah, bank syariah, UMKM kriya lokal, desa wisata halal, serta perguruan tinggi termasuk dukungan program magang dan sertifikasi halal;
21. peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan karya budaya dan cagar budaya sebagai salah satu daya tarik wisata melalui pemetaan karya budaya dan cagar budaya potensial, pemeliharaan prasarana sarana kebudayaan, peningkatan upaya diplomasi budaya tingkat nasional/internasional, serta penguatan SDM/lembaga/komunitas kebudayaan sebagai agen diplomasi budaya;
22. penguatan event olahraga pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan;
23. perluasan literasi berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan dan literasi ekonomi berbasis syariah melalui pelibatan pemangku kepentingan;
24. mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif berbasis kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan;
25. peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun startup berbasis syariah.

3.1.4 Proyeksi dan Arah kebijakan Ekonomi Kabupaten Purworejo

Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 tetap konsisten mempertimbangkan beberapa asumsi ekonomi makro dan memperhatikan kinerja perekonomian Kabupaten Purworejo, kondisi perekonomian regional, nasional dan global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2027 diharapkan dapat berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan penurunan tingkat pengangguran terbuka serta penurunan angka kemiskinan. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2027 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2. Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2027
1	*2*	*3*	*4*
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,73
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,93

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun 2027
1	*2*	*3*	*4*
4	Tingkat Kemiskinan	%	9,06

Sumber: BA Rakortekbang dan hasil analisis 2026

Pada tahun kedua pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Purworejo, arah kebijakan pembangunan tahun 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur yang berbasis lingkungan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur difokuskan untuk mendukung konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus ini diwujudkan melalui upaya sebagai berikut:

1. Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
4. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat.
5. Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien, 396 transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan daerah dikaji secara komprehensif untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan, ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut:

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD)

adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan realisasi penjualan industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya sejak merencanakan hingga pengawasan, sedangkan untuk Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan untuk Kabupaten Purworejo dengan penetapan pejabat yang berwenang.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo didominasi oleh Pendapatan Retribusi yaitu terutama didukung oleh pendapatan BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit, disusul pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan terakhir Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Mulai tahun 2024 terdapat perubahan yang signifikan pada pendapatan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah karena amanah Perda Kabupaten Purworejo 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 62 ayat 3 terdapat pengalihan pencatatan pendapatan pelayanan kesehatan pada BLUD, yang sebelumnya tercatat di lain-lain pendapatan yang sah menjadi pendapatan retribusi daerah sebagai amanah Perda Kabupaten Purworejo 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 62 ayat 3. Persentase proporsi PAD Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Persentase Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2025, APBD 2026 dan Target 2027

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	APBD Tahun 2026	Target Tahun 2027
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Daerah	30,48%	26,92%	28,09%	29,44%	25,86%
2	Retribusi Daerah	5,63%	5,06%	66,84%	67,00%	69,57%
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,16%	3,81%	3,47%	2,94%	2,85%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59,74%	64,22%	1,60%	0,62%	1,72%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (1+2+3+4)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BPKPAD Purworejo, Bapperida Purworejo, data diolah 2026

Asumsi yang digunakan dalam menentukan proyeksi pendapatan daerah pada RKPD 2027 adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing jenis pungutan, yaitu sebagai berikut:
   a. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (HKPD)
   b. Pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan mempertimbangkan masa pajak daerah. Untuk masa pajak daerah yang ditetapkan sebelum 5 Januari 2025, belum diberlakukan opsen pajak.
   c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan: 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
   d. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
   e. Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
   f. Optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, berasal dari penyesuaian tarif Retribusi Daerah sesuai dengan Perda Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2023 tentang PDRD, penambahan wajib retribusi baru dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah yang menjadi penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
   g. Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah
   h. Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau

optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi retribusi jasa usaha. Untuk itu, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai BMD.

i. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun pengelolaan aset yang lebih optimal dan Produktif sebagai upaya peningkatan PAD dengan melakukan langkah langkah sebagai berikut:
   1) Meminta Pengguna Barang Perangkat Daerah untuk menginventaris Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang terdiri dari RKBMD Pengadaan, RKBMD Pemeliharaan, RKBMD Pemanfaatan, RKBMD RKBMD Pemindahtanganan, RKBMD Penghapusan.
   2) Memindahkan aset yang tidak digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dari Pengguna Barang ke Pengelola Barang untuk dapat dilakukan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
   3) Memetakan skema pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tepat yaitu Pinjam Pakai, Sewa, Kerjasasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Serah Guna (BSG)/Bangun Guna Serah (BGS), dan Kerjasama Penyedian Infrastruktur (KSPI) dengan mempedomani ketentuan perundang undangan yang berlaku yaitu Permendagri 19 tahun 2016 jo Permendagri 7 tahun 2024.
   4) Melakukan penilaian harga wajar sewa bersama KPKNL, kontribusi tetap dan bagi hasil untuk KSP oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
   5) Merumuskan target pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah secara rinci per obyek tanah.

j. Selain pemanfaatan aset, Pemerintah Kabupaten Purworejo juga melaksanakan kegiatan untuk peningkatan PAD melalui pemindahtanganan Barang Milik Daerah antara lain:
   1) Penjualan kendaraan bekas melalui lelang
   2) Penjualan bongkaran gedung
   3) Penjualan hasil tebangan pohon ayoman.

k. Optimalisasi penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu dengan meningkatkan kinerja BUMD sehingga dapat menghasilkan Deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

l. Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan sama dengan tahun 2025 yang bersumber dari jasa giro dan pendapatan bunga.

2. Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer diproyeksikan sebagai berikut:
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Perimbangan (DBH dan DAU), DAK Fisik dan Non Fisik, Insentif Fiskal dan Dana Desa yang dicantumkan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 sama dengan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
   b. Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja

pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

c. Penggunaan Dana Desa mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa *Universal Health Coverage (UHC).*
d. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dicantumkan dalam Rnacangan Awal RKPD Tahun 2027 sama dengan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2026, sedangkan untuk bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dicantumkan nol rupiah karena belum ada informasi resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
e. Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah

3. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini belum dapat diproyeksikan dikarenakan:
   a. Pendapatan hibah belum dapat dipastikan perolehannya pada Tahun 2027 karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan perjanjian hibah daerah antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Pihak Ketiga.
   b. Pendapatan hibah yang berasal dari sumbangan pihak ketiga juga belum dapat dipastikan karena pengalokasian pendapatan ini berdasarkan kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Pihak Ketiga.
   c. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak bisa diprediksi karena merupakan dana dari pemerintah yang bersifat insidental.

Memperhatikan dinamika lingkungan yang berkembang dan potensi pendapatan daerah Kabupaten Purworejo, pendapatan daerah Kabupaten Purworejo tahun 2027 diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.4. Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2027

No	Uraian	Tahun 2027 (Rp)	%
1	2	3	4
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**613.789.863.610,00**	**25,14%**
4.1.01	Pajak Daerah	158.723.571.436,00	6,50%
4.1.02	Retribusi Daerah	427.037.686.611,00	17,49%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	17.494.173.415,00	0,72%
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10.534.432.148,00	0,43%
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.827.456.908.000**	**74,86%**
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.740.424.404.000,00	71,29%
4.2.02	Transfer antar daerah	87.032.504.000,00	3,57%
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0**	**0,00%**
	Jumlah Pendapatan Daerah	**2.441.246.771.610,00**	**100,00%**

Sumber : BPKPAD Kabupaten Purworejo, 2027

Proporsi sumber pendapatan daerah Kabupaten Purworejo masih didominasi oleh pendapatan transfer yaitu 74,86%, sedangkan pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sebesar 25,14%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat dikatakan belum proporsional, karena prosentase proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah masih rendah sehingga perlu dilakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan yang belum optimal terutama dari sumber Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Purworejo Tahun 2023 s.d tahun 2027 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Purworejo Tahun 2023 s.d tahun 2027

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	APBD Tahun 2026	Proyeksi/target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	**PENDAPATAN**	**2.256.523.589.409,53**	**2.408.792.210.223,00**	**2.411.368.894.399,00**	**2.454.873.465.679,00**	**2.441.246.771.610,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**379.937.415.349,53**	**448.821.696.856,00**	**555.841.285.197,00**	**585.545.557.679,00**	**613.789.863.610,00**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	102.276.349.264,00	104.218.544.345,00	156.150.266.963,00	172.410.552.413,00	158.723.571.436,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	19.224.909.728,00	319.427.778.313,00	371.509.317.098,00	392.304.643.551,00	427.037.686.611,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	14.457.361.320,00	16.119.649.871,00	19.274.773.345,00	17.206.181.666,00	17.494.173.415,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	243.978.795.037,53	9.055.724.327,00	8.906.927.791,00	3.624.180.049,00	10.534.432.148,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.874.941.153.899,00**	**1.958.558.013.367,00**	**1.855.527.609.202,00**	**1.869.327.908.000,00**	**1.827.456.908.000,00**
4.2.01	**Transfer Pemerintah Pusat**	**1.730.465.289.780,00**	**1.812.249.208.453,00**	**1.755.061.617.765,00**	**1.757.424.404.000,00**	**1.740.424.404.000,00**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**1.314.410.737.780,00**	**1.418.035.604.453,00**	**1.441.409.000.569,00**	**1.440.393.632.000,00**	**1.423.393.632.000,00**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	32.334.378.132,00	29.857.280.000,00	33.590.045.100,00	14.988.197.000,00	14.988.197.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	957.767.136.834,00	1.028.441.374.978,00	1.040.886.124.073,00	1.128.465.020.000,00	1.111.465.020.000,00

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	APBD Tahun 2026	Proyeksi/target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	48.952.081.524,00	86.119.209.955,00	45.878.356.752,00	-	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	275.357.141.290,00	273.617.739.520,00	321.054.474.644,00	296.940.415.000,00	296.940.415.000,00
4.2.01.05	**Dana Desa**	**384.401.231.000,00**	**386.689.738.000,00**	**307.088.516.196,00**	**317.030.772.000,00**	**317.030.772.000,00**
4.2.01.06	**Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal**	**31.653.321.000,00**	**7.523.866.000,00**	**6.564.101.000,00**	-	-
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**144.475.864.119,00**	**146.308.804.914,00**	**100.465.991.437,00**	**111.903.504.000,00**	**87.032.504.000,00**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	124.577.393.119,00	123.330.794.714,00	85.869.941.637,00	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	124.577.393.119,00	123.330.794.714,00	85.869.941.637,00	87.032.504.000,00	87.032.504.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	19.898.471.000,00	22.978.010.200,00	14.596.049.800,00	24.871.000.000,00	-
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	19.898.471.000,00	22.978.010.200,00	14.596.049.800,00	24.871.000.000,00	-
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	**1.645.020.161,00**	**1.412.500.000,00**	-	-	-
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**1.645.020.161,00**	**1.412.500.000,00**	-	-	-

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	APBD Tahun 2026	Proyeksi/target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.645.020.161,00	-	-	-	-
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.645.020.161,00				
4.3.1.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		1.412.500.000			
4.3.1.04.04	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri		1.412.500.000			
4.3.1.04.04.01	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Luar Negeri		1.412.500.000			
4.3.02	**Dana Darurat**	-				
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	-	-	-	-	-
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan					
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS				-	-

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	APBD Tahun 2026	Proyeksi/target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)	**2.256.523.589.409,53**	**2.408.792.210.223,00**	**2.396.314.016.699,00**	**2.454.873.465.679,00**	**2.441.246.771.610,00**

Sumber: BPKPAD Kabupaten Purworejo Tahun 2026, Data Diolah

Dari tabel diatas, terlihat bahwa terjadi penurunan pendapatan dibandingkan tahun 2026. Hal tersebut disebabkan antara lain :

1. Target/proyeksi PAD pada tahun 2027 turun dibandingkan target tahun 2026. Hal ini disebabkan karena Penetapan target Opsen PKB dan Opsen BBNKB Tahun Anggaran 2025 sebelumnya mengacu pada data potensi yang disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Setelah dilakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan rasionalisasi target Tahun Anggaran 2027 agar lebih mencerminkan potensi riil penerimaan. Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa opsen merupakan jenis penerimaan yang relatif baru bagi pemerintah kabupaten/kota, yang dipengaruhi oleh capaian pemungutan PKB dan BBNKB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diproyeksikan turun sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 Tentang tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Atau Dana Desa Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yaitu pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pembiayaan 25 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Purworejo.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi dari strategi tersebut dijabarkan dalam 4 (empat) arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah, sebagai berikut:

1. Upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul akibat adanya peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi;
2. Optimalisasi pungutan PAD melalui perbaikan tatakelola dan administrasi Pendapatan Asli Daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terus digali untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
   a. Intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan Retribusi Daerah.

      Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) maka terdapat banyak hal yang harus disesuaikan baik dari aspek belanja maupun pendapatan. Regulasi tersebut mengatur tentang restrukturisasi pajak daerah dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak daerah dapat dilakukan salah satunya untuk menyederhanakan administrasi perpajakan agar manfaat yang diperoleh lebih besar dari biaya pemungutan. Selain itu, restrukturisasi pajak juga akan mempermudah pemantauan pemungutan pajak serta mendukung

masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dengan adanya simplifikasi. Terkait implementasi UU HKPD mulai tahun 2024. beberapa tahapan yang perlu dilakukan adalah analisis rasio NJOP, simulasi SPPT, dan menyusun rekomendasi dasar pembuatan naskah akademik untuk rancangan peraturan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah persiapan dalam penyelenggaran pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan regulasi terbaru yang diharapkan pada tahun 2026 telah dapat diimplementasikan pemungutan pajak dan retribusi yang sesuai.

b. Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan
c. Pemenuhan sarana dan prasarana dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Teknologi Informasi dan digitalisasi/elektronifikasi pendukung pelayanan pembayaran Pendapatan Daerah serta peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia aparatur pendapatan dan pengelola pajak dan retribusi daerah
d. Tertib pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan penyempurnaan dasar hukum berupa SOP yang mengacu kepada Perda dan Perbup tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diterbitkan;
e. Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
f. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak;
g. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
h. Bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendorong optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan penanganan piutang PKB dengan Pengalokasian Pendanaan untuk Kegiatan/Sub Kegiatan Mendukung Pencapaian PKB dan BBNKB beserta Opsennya;

   Adapun rencana kegiatan sinergitas dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB meliputi:

   1) Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan perpajakan, baik kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh di seluruh kecamatan, bekerja sama antara BPKPAD Kabupaten Purworejo dan UPPD Purworejo.
   2) Pelaksanaan sosialisasi keselamatan berkendara yang terintegrasi dengan edukasi kepatuhan pajak, dilaksanakan secara kolaboratif antara UPPD Purworejo, Satlantas Polres Purworejo, dan BPKPAD, baik secara periodik maupun menyesuaikan agenda kegiatan Satlantas.
   3) Pelaksanaan program GADIS PANTURA pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai

upaya peningkatan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas maupun pribadi ASN.

4) Pelaksanaan kegiatan Buser 74 sebagai bagian dari upaya validasi data registrasi kendaraan bermotor Bersama UPPD Purworejo, Satlantas Polres Purworejo, dan BPKPAD Kabupaten Purworejo.
5) Monitoring dan evaluasi program SAMSAT BUDIMAN guna memastikan efektivitas pelayanan dan peningkatan penerimaan pajak.
6) Dukungan terhadap kegiatan Government Auto Show (GAS) atau kegiatan sejenis melalui penyediaan doorprize dan sarana pendukung lainnya sebagai stimulus peningkatan kepatuhan wajib pajak.
7) Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi pengendalian opsen PKB dan opsen BBNKB secara triwulanan yang melibatkan BPKPAD Kabupaten Purworejo, UPPD Purworejo, dan Satlantas Polres Purworejo

Untuk pembiayaan kegiatan sinergitas pengelolaan pajak opsen PKB dan BBNKB tersebut telah dialokasikan angagran minimal sebesar 1.5% dari penerimaan opsen PKB dan BBNKB tahun 2025 yang termuat dalam 3 sub kegiatan yaitu Sub kegiatan pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, Sub kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah danSub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah.

i. Pengembangan dan peningkatan realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui OPD yang menangani pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
j. Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan wajib pajak;
k. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan menjaga tingkat Kesehatan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba yang dicapai, sebagai kontribusi pada pendapatan asli daerah;
l. Sosialisasi dan/atau penyuluhan terkait regulasi Pajak dan Retribusi;
m. Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) sebagai sumber pendapatan daerah; dan
n. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3. Inventarisasi serta optimalisasi penggunaan dan pemanfaatsn aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
4. Optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Mengingat kemampuan pendapatan asli daerah yang sangat terbatas, maka pemerintah daerah perlu menggali sumber-sumber pendanaan lain di luar APBD Kabupaten Purworejo seperti mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan, badan-badan sosial, komunitas, dan organisasi yang ada di Kabupaten Purworejo termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan daerah, serta sumber pembiayaan lain.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Struktur belanja daerah dalam RKPD Tahun 2027 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a) Belanja Pegawai
      1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      2) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN;
      3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;

   b) Belanja Barang Dan Jasa
      1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD;
      2) Barang dan jasa dimaksud berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan

kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

c) Belanja Bunga
   1) Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana maksud Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
   2) Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo memiliki kewajiban pembayaran bunga utang yang dianggarkan pembayarannya pada SKPKD mulai tahun 2027 sampai dengan berakhirnya kewajiban pembayaran atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
   3) Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun 2027 merencanakan belanja bunga sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas pinjaman senilai Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

d) Belanja Subsidi
   1) Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat.
   2) Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2027 tidak merencanakan untuk menganggarkan belanja subsidi.

e) Belanja hibah
   1) Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari Pemerintah Daerah diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2) Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan

urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3) Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
4) Alokasi anggaran belanja hibah yang dicantumkan dalam RKPD Tahun 2027 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 dan dicantumkan dalam lampiran 3a dan lampiran 3b Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah.

f) Belanja Bantuan Sosial
1) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
2) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam RKPD tahun 2027 dan menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 dan dicantumkan dalam lampiran 4a dan lampiran 4b Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2027 yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.

2. Belanja Modal
a) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria : a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c) batas minimal kapitalisasi aset.
b) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada tahun 2027 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Belanja Tidak Terduga (BTT)
   a) BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
   b) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
      1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
      2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
      3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      4) bantuan kepada Pemerintah Daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
      1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan
      2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, yaitu:
         a) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
         b) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
      3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
      4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Belanja Transfer

   Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD dan diuraikan kedalam jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja transfer sebagaimana dimaksud dirinci atas jenis:

   a. Belanja bagi hasil

      Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh

persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dengan ketentuan:

1) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto;
2) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
3) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo pada akhir Tahun Anggaran 2026, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2027.

Dalam hal masih terdapat sisa kurang bagi hasil untuk PKB dan BBNKB sampai dengan TA 2027 dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan kembali sebesar sisa kurang dimaksud pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada Tahun Anggaran 2027.

Belanja bagi hasil Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2027 direncanakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2027 dan kurang salur belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2026.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan adalah bantuan keuangan daerah kabupaten kepada desa dalam jenis bantuan keuangan yang bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo kepada pemerintah desa pada Tahun 2027 direncanakan antar lain bantuan keuangan bidang kepariwisataan, bantuan keuangan bidang jalan, bantuan keuangan siltap staf perangkat desa, bantuan keuangan sarana dan prasarana pemerintah desa, bantuan keuangan DD, dan ADD,

bantuan keuangan insentif Ketua RT dan RW serta bantuan keuangan kepada desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan gambaran kondisi daerah dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan serta berdasarkan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan mempedomani kebijakan dan program strategis Pemerintah Pusat di Daerah untuk percepatan pembangunan perekonomian (Perpres Nomor 79 Tahun 2019, amanat global dan nasional (TPB/SDGs, SPM) serta mempertimbangkan kondisi perekonomian, sosial dan kesehatan masyarakat, maka Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2027 diarahkan pada:

1. Melaksanakan program prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2027 sesuai dengan visi misi daerah sebagaimna tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029;
2. Melaksanakan program prioritas yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 pada periode pertama
3. Melaksanakan program prioritas yang mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Tengah;
4. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi Pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan; serta mandatory untuk belanja infrastruktur (minimal 40%), pelatihan ASN, anggaran pengawasan (APIP) dan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi anggaran;
6. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG's);
7. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
8. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; dan
9. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu penggunaan Dana Desa diarahkan untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri serta penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah (Stunting, Kemiskinan Ekstrim dan Ketahanan Pangan)

Realisasi dan Proyeksi/target Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2027 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6. Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2027

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	APBD Tahun 2026	Proyeksi/target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	**BELANJA**	**2.283.247.949.834,00**	**2.412.067.407.593,00**	**2.361.944.551.178,00**	**2.517.739.465.679,00**	**2.607.848.667.165,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.468.395.150.359,00**	**1.646.965.396.160,00**	**1.655.660.493.456,00**	**1.782.265.297.464,00**	**1.735.983.920.367,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	841.365.218.836,00	966.227.667.123,73	1.020.876.756.492,00	970.742.783.690,00	905.257.790.199,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	508.858.261.536,00	554.573.604.307,27	553.171.742.995,00	728.550.043.177,00	761.407.129.314,00
5.1.03	Belanja Bunga	173.234.168,00	-	-	-	2.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	111.786.580.179,00	121.455.043.609,00	74.999.495.519,00	79.476.857.797,00	65.296.479.554,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.211.855.640,00	4.709.081.120,00	6.612.498.450,00	3.495.612.800,00	1.522.521.300,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**263.302.583.155,00**	**195.601.121.874,00**	**216.216.505.408,00**	**204.627.244.434,00**	**344.019.314.250,00**
5.2.01	Belanja Tanah	-	-	-	5.064.316.320,00	
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	59.316.349.901,00	82.515.623.101,00	67.629.434.891,00	34.569.835.600,00	37.066.390.900,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	141.703.379.809,00	24.424.808.327,00	57.605.747.110,00	36.811.528.290,00	185.775.583.200,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	56.043.062.972,00	84.341.053.291,00	82.993.244.705,00	119.910.292.524,00	113.443.341.150,00

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	APBD Tahun 2026	Proyeksi/target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.044.509.843,00	4.244.637.155,00	7.693.648.902,00	8.211.271.700,00	7.733.999.000,00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	195.280.630,00	75.000.000,00	294.429.800,00	60.000.000,00	
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**-**	**-**	**-**	**14.176.979.379,00**	**3.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	-	-	-	14.176.979.379,00	3.000.000.000,00
05.04	**BELANJA TRANSFER**	**551.550.216.320,00**	**569.500.889.559,00**	**490.067.552.314,00**	**516.669.944.402,00**	**524.845.432.548,00**
6.1.01	Belanja Bagi Hasil	11.955.971.218,00	12.745.328.782,00	12.828.893.700,00	20.627.100.204,00	23.100.000.000,00
6.1.03	Belanja Bantuan Keuangan	539.594.245.102,00	556.755.560.777,00	477.238.658.614,00	496.042.844.198,00	501.745.432.548,00

Sumber : Bapperida dan BPKPAD Tahun 2026

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang dirinci sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan bersumber dari a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); b) pencairan dana cadangan; c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; d) penerimaan pinjaman daerah; e) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau f) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Purworejo berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. pengeluaran pembiayaan dapat digunakan untuk a) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b) penyertaan modal daerah; c) pembentukan dana cadangan; d) pemberian pinjaman daerah; dan/atau e) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Purworejo digunakan untuk penyertaan modal (investasi) dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Penyertaan modal daerah tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2027 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian *(prudential)* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

A. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD. Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut ini.

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2027 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Penerimaan pembiayaan daerah direncanakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan pembiayaan utang daerah. Penerimaan pembiayaan utang daerah dianggarkan guna memenuhi kebutuhan dana untuk Pembangunan Pasar Kutoarjo sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai berikut ini.

1. Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2027 merencanakan pembentukan dana cadangan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk persiapan pilkada tahun 2029
2. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah. Perda tersebut mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020.
3. Sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2025 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo mempunyai kewajiban untuk melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai berikut :

Tabel 3.7. Rencana penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

No	Nama BUMD	Modal Dasar (Rp)	Modal Disetor (Rp)	Kekurangan Modal Disetor Tahun 2027 (Rp)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perumda Air Minum Tirta Perwitasari	50.000.000.000	20.599.999.999,33	2.000.000.000	-	1.100.000.000			
2	Perumda Graha Husada Medika	12.000.000.000	4.500.000.000	-	500.000.000	550.000.000	750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
3	Perumda Aneka Usaha Purworejo	20.000.000.000	5.142.663.512	-	750.000.000	275.000.000	375.000.000	500.000.000	500.000.000
4	PT BPR BKK Purworejo	38.710.000.000	9.800.000.000	-	500.000.000	275.000.000	375.000.000	500.000.000	500.000.000
5	PT BKK Jateng	12.950.000.000	2.540.000.000	-	500.000.000	275.000.000	375.000.000	500.000.000	500.000.000
6	PT. Bank BPD Jateng	87.500.000.000	52.374.000.000	-	750.000.000	3.025.000.000	3.750.000.000	5.000.000.000	5.500.000.000
7	PT PRPP Jawa Tengah	1.000.000.000	266.200.000	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**222.160.000.000**	**95.222.863.511,33**	**2.000.000.000**	**3.000.000.000**	**5.500.000.000**	**5.625.000.000**	**7.500.000.000**	**8.000.000.000**

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2025.

4. Pada Tahun Anggaran 2027 direncanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp5.500.000.000,00 dengan rincian yaitu :
   1) PT. BPD Bank Jateng sebesar Rp3.025.000.000,00
   2) PT BPR BKK Jateng (Perseroda) sebesar Rp275.000.000,00
   3) PT BPR BKK Purworejo (Perseroda) sebesar Rp275.000.000,00
   4) Perumda Aneka Usaha Purworejo sebesar Rp275.000.000,00
   5) Perumda Graha Husada Medika sebesar Rp550.000.000,00, dan
   6) Perumda Air Minum Tirta Perwitasari sebesar Rp1.100.000.000,00.
5. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa sebelum melakukan penyertaan modal, penasehat investasi harus menyusun analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko. Penyertaan modal dapat dialokasikan anggaran sesuai dengan hasil penilaian kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
6. Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2027 tidak memiliki kewajiban pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo atas pinjaman daerah, tidak menganggarkan pemberian pinjaman daerah, tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menganggarkan pembentukan dana abadi daerah, dan tidak memiliki kewajiban pembayaran pembiayaan utang daerah.

.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2027 diproyeksikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Purworejo Tahun 2023-2027

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025	APBD Tahun 2026	Proyeksi/target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**115.212.747.060,79**	**88.466.494.300,00**	**83.220.758.378,00**	**62.866.000.000,00**	**166.601.895.555,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**134.779.576.984,79**	**88.466.494.300,00**	**85.220.758.378,00**	**65.616.000.000,00**	**187.101.895.555,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	134.779.576.984,79	88.466.494.300,00	85.220.758.378,00	65.616.000.000,00	87.101.895.555,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan					
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-				100.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**19.566.829.924,00**	-	**2.000.000.000,00**	**2.750.000.000,00**	**20.500.000.000,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan					15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.646.053.924,00		2.000.000.000,00	2.750.000.000,00	5.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17.920.776.000,00	-			
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah					
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-					
	PEMBIAYAAN NETTO	**115.212.747.060,79**	**88.466.494.300,00**	**83.220.758.378,00**	**62.866.000.000,00**	**166.601.895.555,00**

Sumber: BPKPAD, Bapperida Hasil Analisis, 2026

Dari uraian tersebut di atas maka kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Kerangka Pendanaan Kabupaten Purworejo Tahun 2027

No	Uraian	Proyeksi/Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)
4	**PENDAPATAN**	**2.441.246.771.610,00**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**613.789.863.610,00**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	158.723.571.436,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	427.037.686.611,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.494.173.415,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.534.432.148,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.827.456.908.000,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.740.424.404.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87.032.504.000,00
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah**	**- ,00**
	Jumlah Pendapatan Daerah (4.1+4.2+4.3)	**2.441.246.771.610,00**
5	**BELANJA**	**2.607.848.667.165,00**
5.1	**Belanja Operasi**	**1.735.983.920.367,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	905.257.790.199,00
5.1.02	Belanja Barang	761.407.129.314,00
5.1.03	Belanja Bunga	2.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	65.296.479.554,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.522.521.300,00
5.2	**Belanja Modal**	**344.019.314.250,00**
5.2.01	Belanja Tanah	
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	37.066.390.900,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	185.775.583.200,00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.443.341.150,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.733.999.000,00

No	Uraian	Proyeksi/Target Tahun 2027
(1)	(2)	(3)
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**3.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000,00
5.4	**Belanja Transfer**	**524.845.432.548,00**
5.4.01	Belanja Bagi hasil	23.100.000.000,00
5.4.02	Belanja bantuan Keuangan	501.745.432.548,00
	Total Jumlah Belanja (5.1+5.2+5.3+5.4)	**2.607.848.667.165,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(166.601.895.555,00)**
6	**PEMBIAYAAN**	**166.601.895.555,00**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**187.101.895.555,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	87.101.895.555,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000.000,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**20.500.000.000,00**
06.02.01	Pembentukan dana cadangan	15.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.500.000.000,00
	Pembiayaan Daerah	**166.601.895.555,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**-**

Sumber: BPKPAD dan Bapperida 2026

3.2.5. Sumber Pendanaan Lainnya

Sumber pendanaan pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Purworejo, selain bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terdapat juga sumber pendanaan pembangunan lainnya. Kabupaten Purworejo juga telah menginisiasi sumber pembiayaan diluar APBD, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 105 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2018. Adapun rincian sumber pendanaan lainnya dapat dilihat dalam tabel 3.10 dan 3.11 berikut:

Tabel 3.10 Realisasi Sumber Pendanaan Lainnya Tahun 2025

NO	PROGRAM	LOKUS	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Rumah Bencana	Desa Pakisarum, Kec. Bruno	2 unit	CSR BAZNAS Kabupaten	10.000.000,00
		Desa Brondong, Kec. Bruno	1 unit	CSR BAZNAS Kabupaten	5.000.000,00
2	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Desa Wirun Kec. Kutoarjo	10 unit	APBN	200.000.000,00
		Desa Bandung Kidul Kec. Bayan	8 unit	APBN	160.000.000,00
		Desa Awu-Awu Kec. Ngombol	10 unit	APBN	200.000.000,00
		Desa Sidodadi Kec. Kemiri	14 unit	APBN	280.000.000,00
3	Pembangunan Baru/PB Rumah Bencana	Desa Sukowuwuh, Kec. Bener	5 unit	APBD Prov	200.000.000,00
		Desa Redin, Kec. Gebang	1 unit	APBD Prov	40.000.000,00
4	Rehabilitasi RTLH	Desa Somoleter, Kec. Bruno	3 unit	APBD Prov	60.000.000,00
		Desa Lubang Sampang Kec. Butuh	5 unit	APBD Prov	100.000.000,00
		Desa Semawung Kec. Purworejo	1 unit	APBD Prov	20.000.000,00
		Desa Ketawangrejo Kec. Grabag	1 unit	APBD Prov	20.000.000,00
		Desa Plipir, Kec. Purworejo	1 unit	Basnaz Kabupaten	10.000.000,00
		Kel. Purworejo, Kec. Purworejo	1 unit	Basnaz Kabupaten	10.000.000,00
		Desa Semawung, Kec. Purworejo	1 unit	Basnaz Kabupaten	10.000.000,00
		Desa Sekartejo Kec. Pituruh	1 unit	Basnaz Kabupaten	10.000.000,00
		Desa Tridadi Kec. Loano	1 unit	Basnaz Kabupaten	10.000.000,00
		Desa Loano Kec. Loano	2 unit	Basnaz Kabupaten	20.000.000,00

NO	PROGRAM	LOKUS	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU
1	2	3	4	5	6
		Kel. Katerban, Kec. Kutoarjo	1 unit	Basnaz Kabupaten	10.000.000,00
		Desa Pakisarum, Kec. Bruno	4 unit	Basnaz Kabupaten	40.000.000,00
		Desa Pucangagung Kec. Bayan	1 unit	Basnaz Kabupaten	10.000.000,00
5	Pembangunan SPAM Perdesaan	Desa Watuduwur, Kec. Bruno	50 SR	APBD Prov	500.000.000,00
		Desa Mayungsari, Kec. Bener	50 SR	APBD Prov	500.000.000,00
		Desa Blimbing, Kec. Bruno	50 SR	APBD Prov	500.000.000,00
		Desa Brondong, Kec. Bruno	50 SR	APBD Prov	500.000.000,00
		Desa Sedayu, Kec. Loano	50 SR	APBD Prov	500.000.000,00
		Desa Benowo, Kec. Bener	50 SR	APBD Prov	500.000.000,00
6	Pembangunan Tangki Septik Individu	Desa Sudorogo, Kec. Kaligesing	25 SR	DAK	496.532.000,00
		Desa Prapag Lor Kec. Pituruh	26 SR	DAK	496.532.000,00
		Desa Kalijering Kec. Pituruh	27 SR	DAK	496.532.000,00
		Desa Purbayan Kec. Kemiri	28 SR	DAK	496.532.000,00
		Desa Kedungpomahan Wetan Kec. Kemiri	29 SR	DAK	496.532.000,00
		Desa Kedungpomahan Kulon Kec. Kemiri	30 SR	DAK	496.532.000,00
		Desa Girimulyo, Kec. Kemiri	31 SR	DAK	496.532.000,00
		Desa Puspo, Kec. Bruno	32 SR	DAK	496.532.000,00
		Desa Watuduwur, Kec. Bruno	33 SR	DAK	496.532.000,00

NO	PROGRAM	LOKUS	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU
1	2	3	4	5	6
		Desa Kalitapas, Kec. Bener	34 SR	DAK	496.532.000,00
		Desa Ketosari, Kec. Bener	35 SR	DAK	496.532.000,00
		Desa Mayungsari, Kec. Bener	36 SR	DAK	496.532.000,00
		Desa Sawangan, Kec. Pituruh	37 SR	DAK	496.532.000,00
		Desa Seboro Krapyak, Kec. Banyuurip	27 SR	APBN	400.000.000,00
7	Inpres Peningkatan Jaringan Irigasi	D.I. Gondosuli	1 paket	APBN	2.186.555.000,00
		D.I. Karangpencil	1 paket	APBN	747.626.000,00
		D.I. Planditan	1 paket	APBN	1.727.163.000,00
		D.I. Siwatu Kiri	1 paket	APBN	1.938.845.000,00
		D.I. Mranti	1 paket	APBN	3.453.815.000,00
		D.I. Kalisemo	1 paket	APBN	3.650.000.000,00
		D.I. Condong	1 paket	APBN	1.740.402.000,00
		D.I. Tegal Duren	1 paket	APBN	1.168.291.000,00
8	Inpres Rehabilitasi Jaringan Irigasi	D.I. Kalikalong	1 paket	APBN	1.009.747.000,00
9	Pelebaran Jalan Klepu Pituruh	Pituruh	600 m	APBD Prov	3.250.000.000,00
10	Rehabilitasi Ruas jalan Diponegoro	Purwodadi	1000 m	APBD Prov	4.000.000.000,00
11	Rehabilitasi Ruas jalan Wilopo	Purworejo	1.200 m	APBD Prov	3.250.000.000,00
12	Rekonstruksi Jalan Bruno-Brondong-Watuduwur-Gowong	Bruno	1.129 m	APBD Prov	3.250.000.000,00
13	Kampung Nelayan Merah Putih	Desa Jatimalang	1 paket	APBN	21.000.000.000,00
		Desa Kertojayan	2 paket	APBN	21.000.000.000,00

NO	PROGRAM	LOKUS	VOLUME	SUMBER DANA	PAGU
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					**84.652.360.000,00**

Sumber: Bapperida, data diolah, 2026

Tabel 3.11
Realisasi Pelaksanaan TJSLP Kabupaten Purworejo Tahun 2025

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH DANA TJSLP YANG DISALURKAN	Keterangan
1	2	3	4
1	Bank Jateng	331.500.000	BUMD
2	Baznas Purworejo	7.599.602.306	Lembaga Sosial
3	BMT BINAMAS	1.329.662.986	Swasta
4	Perumda Air Minum Tirta Perwitasari	160.221.986	BUMD
5	Perumda Graha Husada Medika	22.544.606	BUMD
6	PT BAGELEN RAHARJA SEJAHTERA	73.450.000	Swasta
7	PT BPR BKK jateng (Perseroda)	50.960.000	BUMD
8	PT BPR BKK Purworejo (PERSERODA)	-	BUMD
9	PT Charoen Pokphand Jaya Farm	138.400.000	Swasta
10	PT. Cahaya Permata Medika (RSIA Permata Purworejo)	30.205.000	Swasta
11	PT. Indotama Omicron Kahar	219.823.000	Swasta
12	RS Amanah Umat Purworejo	1.750.000	Swasta
13	RSU ANANDA PURWOREJO	21.898.820	Swasta
14	Universitas Muhammadiyah Purworejo	7.050.000	Swasta
Total		**9.987.068.704**	

Sumber: Bapperida, data diolah, 2026

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 yaitu: "**Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)**". Visi tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut.

Tabel 4.1. Penjelasan Makna Visi Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Unsur Visi	Penjelasan
Berdaya Saing	Masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan di masa datang.
Sejahtera	Terciptanya masyarakat adil dan makmur yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.
Religius	Masyarakat yang memiliki ketaqwaan terhadap Tuhan YME, menjalani kehidupan sehari-hari berlandaskan nilai, norma, dan etika ajaran agama, dan bersikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda.
Inovatif	Pemerintah dan masyarakat dapat memecahkan setiap masalah yang dihadapi dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki serta mampu mengelola dan mengembangkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan (meliputi elemen *Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment*).
Berseri	Kata Berseri merupakan akronim dari kata Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif. "Berseri" memiliki arti "Tampak Cerah" yang kemudian dimaknai sebagai pengharapan untuk menciptakan masa dengan yang cerah. "Purworejo Berseri" mempunyai makna sebagai upaya memperkuat fondasi pembangunan dengan tujuan menciptakan masa depan yang cerah menuju Indoensia Emas 2045. Melalu inovasi, kolaborasi, dan dedikasi, Purworejo membangunan landasan yang kokoh untuk generasi mendatang. Pemerintah bersama masyarakat memastikan kemakmuran yang berkelanjutan, harmoni dengan alam, serta kemajuan berkesinambungan di berbagai sektor kehidupan.

Guna mewujudkan Visi, rumusan Misi Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2029 antara lain:

a. Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera,
b. Misi 2: Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah,
c. Misi 3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana,

d. Misi 4: Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ekonomi lokal, serta
e. Misi 5: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Kelima misi tersebut yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dan telah diselaraskan dengan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045, misi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, serta misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Tabel berikut ini menunjukkan sinkronisasi visi Kabupaten Purworejo terhadap nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.2. Sinkronisasi Visi Kabupaten Purworejo dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Nasional		**Jawa Tengah**		**Purworejo**	
RPJPN 2025-2045	**RPJMN 2025-2029**	**RPJPD 2025-2045**	**RPJMD 2025-2029**	**RPJPD 2025-2045**	**RPJMD 2025-2029**
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan	Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045	Purworejo Maju, Sejahtera, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing (Pejuang)	Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)
Kaca Kunci					
	Indonesia Maju		Jawa Tengah Maju Berkelanjutan		Purworejo Berdaya Saing Sejahtera Religius Inovatif

Sumber: RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Sementara itu, tabel di bawah ini menunjukkan sinkronisasi Misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Tabel 4.3. Sinkronisasi Misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita)	**Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029**	**Misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029**
Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	**Misi 1:** Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang	**Misi 1:** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan

Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita)	Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global	Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera
Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	**Misi 5:** Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan	
Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	**Misi 4:** Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif	**Misi 2:** Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah
Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	**Misi 2:** Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan Berkelanjutan	**Misi 3:** Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		**Misi 4:** Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ketahanan pangan
Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	**Misi 6:** Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah	

Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita)	Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029
mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi	
Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri		
Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		
Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	**Misi 3:** Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas	**Misi 5:** Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi
Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		
Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan		

Sumber: RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2027 disusun berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025, capaian kinerja RPJMD, identifikasi masalah daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, memperhatikan isu-isu yang berkembang baik di tingkat provinsi maupun nasional, kebijakan dan program strategis pemerintah pusat di daerah, serta amanat global (*Sustainable Development Goals*) dan nasional (Standar Pelayanan Minimal). Hal ini dilakukan guna menjamin sinergitas arah kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Kabupaten Purworejo memiliki satu tujuan daerah. Masing-masing tujuan memiliki indikator yang ditargetkan hingga tahun 2030. Satu tujuan

ini dirinci kembali ke dalam lima sasaran daerah. Seluruh target di masing-masing indikator diharapkan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Kabupaten Purworejo. Tabel berikut ini menunjukkan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran, beserta dengan indikatornya di Kabupaten Purworejo.

Tabel 4.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan Sasaran Kabupaten Purworejo

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Visi: Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri) Misi: 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera, 2: Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah, 3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, 4: Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ekonomi lokal, serta 5: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten
			Tingkat Kemiskinan
			Rasio Gini
			Indeks Daya Saing Daerah
			Indeks Religius Daerah
		Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia yang Sehat, Berkarakter, Berbudaya, dan Sejahtera	Indeks Pembangunan Manusia
		Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur Daerah
		Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah yang Berketahanan Iklim	Penurunan Emisi GRK
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
			Indeks Risiko Bencana (IRB)
		Sasaran 4: Meningkatnya Produktivitas Pemerataan dan Inklusivitas Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
			Tingkat Pengangguran Terbuka
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
		Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Reformasi Birokrasi
			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Lebih lanjut, penjabaran visi ke dalam tujuan dan sasaran daerah beserta targetnya di tahun 2027 dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 4.5. Tujuan dan Sasaran Kabupaten Purworejo Tahun 2027

Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
Penguatan Infrastruktur berbasis Lingkungan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Tujuan: Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	36,98**	2.607.848.667.165
		Tingkat Kemiskinan	%	9,06*	
		Rasio Gini	Angka	0,296**	
		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,88	
		Indeks Religius Daerah	Angka	83,04	
Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76,73*	276.314.882.428
Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	53,95	179.555.354.804
Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,13	21.403.579.884

Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target 2027	Pagu Indikatif (Rp)
konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	86,43**	
Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40*	124.766.493.687
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	2,93	
		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	72,83***	
Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,89**	2.005.808.356.362
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	72,89	
		Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,8	

Keterangan:
**Hasil Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah, diolah*
***Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2025*
****Sesuai Surat Kepala Bappeda Prov. Jawa Tengah No. 500.1/ 139/ 2026 tanggal 12 Mei 2026*
Sumber: RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2025-2029, dianalisis

Keseluruhan pencapaian target-target pembangunan daerah (tujuan dan sasaran daerah) dikoordinatori oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Sangat penting adanya sinergi aktivitas antar unit kerja di masing-masing perangkat daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan. Selanjutnya, tabel berikut ini menunjukkan sinergitas antara sasaran Kabupaten Purworejo dengan sasaran pembangunan di nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.6. Sinergitas Sasaran Kabupaten, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator	Satuan	Target Rancangan RKP	Target Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah	Target Kabupaten Purworejo	Sasaran Daerah Kabupaten Purworejo
1	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8-6,5	5,6-7,4	5,40	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia
2	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	PDRB Per Kapita	Rp	5.800-5.840 US$	56,0 - 59,8	36,98	Tujuan: Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
3	Penurunan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	6,0-6,5	8,50-7,50	9,06	Tujuan: Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
4	Penurunan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,30-4,87	4,42-4,08	2,93	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif
5	Penurunan Kemiskinan	Rasio Gini	Rasio	0,362-0,367	0,358 - 0,363	0,296	Tujuan: Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif
6	Sumber Daya Manusia Berkualitas	Indeks Modal Manusia/ Indeks Pembangunan Manusia*	Indeks	0,575	0,628 – 0,643	76,73*	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia
7	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	%	39,57	6,69	*(tidak ditargetkan)*	-
8	Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,84	75,78	76,13	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

Sumber: Rancangan RKP, Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, dan Tim Penyusun, 2026

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

4.2.1. Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Pelaksanaan RPJMN secara konkret dituangkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang saat ini sedang disusun Kementerian PPN/ Bappenas. Dalam rangka menciptakan pondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2027, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut.

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2027 diarahkan pada *"***Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Puunggung Pertumbuhan Ekonomi***"*. Hal ini tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Adapun prioritas Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 antara lain:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah.

2. Peningkatan perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan.
3. Peningkatan sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.

Mendasari RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, tema pembangunan tahun 2027 Kabupaten Purworejo yakni "**Penguatan Insfrastruktur berbasis Lingkungan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah**".

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis yang diperoleh dari hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2024, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, serta tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat lima isu strategis dalam RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ini, antara lain: pemerataan layanan infrastruktur dasar, pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, kualitas lingkungan hidup yang berketahanan bencana, ketahanan social, serta tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif. Berdasarkan kelima isu strategis tersebut, melalui pendekatan holistik, terdapat lima poin prioritas pembangunan pada tahun 2027 yakni sebagai berikut.

1. Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan insfrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi.
2. Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan insfratruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Pengembangan insfrastuktur tahan bencana dan peningkatan konektivtas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
4. Pemenuhan dan peningkatan insfrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat.
5. Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratis dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien, transparan, dan adaptif, terhadap kebutuhan pengembangan insfratruktur berwawasan lingkungan.

Berikut ini ditunjukkan keselarasan tema dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo pada tahun 2027.



Gambar 4.1. Keselarasan Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo Tahun 2027

(Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029)

Selanjutnya, tabel berikut ini menunjukkan pagu indikatif per prioritas pembangunan serta sinergitasnya dengan prioritas nasional.

Tabel 4.7. Prioritas Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2027

No	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2027	Pagu Indikatif (Rp)
1	PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	179.555.354.804
2	PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	124.766.493.687

No	Prioritas Nasional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2027	Pagu Indikatif (Rp)
	pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.		
3	PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	21.403.579.884
4	PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	276.314.882.428
5	PN 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	2.005.808.356.362
		Total	**2.607.848.667.165**

Sumber: Tim Penyusun, 2026

4.2.2. Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Sasaran pembangunan ditujukan melalui strategi dan arah kebijakan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029. Tabel berikut ini menunjukkan keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, prioritas pembangunan, dan strategi Kabupaten Purworejo pada tahun 2027.

Tabel 4.8. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Prioritas Pembangunan, dan Strategi Kabupaten Purworejo Tahun 2027

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Prioritas 2027	Strategi 2027
Visi: Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)	Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia	Prioritas 4. Pemenuhan dan peningkatan insfrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial	1) Meningkatkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata
				2) Meningkatkan ekosistem sosial budaya melalui pemajuan kebudayaan,

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Prioritas 2027	Strategi 2027
Misi: 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya, dan sejahtera, 2: Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah, 3: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, 4: Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi pelaku ekonomi lokal yang mendukung ekonomi lokal, serta 5: Meningkatkan kualitas tata kelola			yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	keluarga berkualitas dan sejahtera, pengarusutamaan gender, budaya literasi, serta pengembangan potensi dan prestasi pemuda olahraga
				3) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas
		Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah	Prioritas 1: Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan insfrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	4) Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan
		Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Prioritas 3. Pengembangan insfrastuktur tahan bencana dan peningkatan konektivtas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	5) Meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana, serta lingkungan hidup berkualitas melalui pengelolaan sumber daya alam secara efisien
		Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif	Prioritas 2. Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan insfratruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk	6) Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan

Visi dan Misi	Tujuan	Sasaran	Prioritas 2027	Strategi 2027
pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.			meningkatkan pertumbuhan ekonomi	yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa
				7) Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian
		Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif	Prioritas 5. Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratis dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien, transparan, dan adaptif, terhadap kebutuhan pengembangan insfratruktur berwawasan lingkungan	8) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah
				9) Meningkatkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi dan digitalisasi pemerintahan
				10) Meningkatkan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan kolaborasi antar pihak

Sumber: RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Selanjutnya, tabel berikut ini menunjukkan strategi dan arah kebijakan Kabupaten Purworejo pada tahun 2027.

Tabel 4.9. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Purworejo Tahun 2027

Strategi 2027	Arah Kebijakan 2027
1) Meningkatkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata	a) Peningkatan pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui layanan pendidikan inklusif baik formal maupun nonformal, peningkatan mutu, pembentukan karakter melalui pengembangan kurikulum lokal sesuai nilai-nilai luhur budaya daerah, dan kualitas pendidikan yang didukung oleh pemenuhan sarana prasarana yang memadai, pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas, serta tata kelola perizinan satuan pendidikan guna menjamin mutu dan kepatuhan terhadap standar nasional pendidikan,
2) Meningkatkan ekosistem sosial	a) Peningkatan budaya gemar membaca dan pengembangan literasi masyarakat serta pelestarian dan pemanfaatan naskah kuno sebagai

Strategi 2027	Arah Kebijakan 2027
budaya melalui pemajuan kebudayaan, keluarga berkualitas dan sejahtera, pengarusutamaan gender, budaya literasi, serta pengembangan potensi dan prestasi pemuda olahraga	bagian dari upaya membangun masyarakat yang cerdas, berbudaya, dan berkarakter.
	b) Peningkatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, perbaikan tata kelola dan basis data, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan dan miskin secara kolaboratif dan multisektor, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk
	c) Peningkatan pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan keluarga dalam pengendalian jumlah penduduk serta pembentukan keluarga sejahtera dan terencana
	d) Peningkatan kesetaraan gender melalui penguatan peran dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang, peningkatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak, penurunan kekerasan berbasis gender, dan penyediaan data pilah gender yang berkualitas,
	e) Peningkatan peran dan kapasitas pemuda dalam pembangunan serta peningkatan prestasi pemuda di bidang keolahragaan dan non keolahragaan melalui pembinaan, pengembangan dan optimalisasi fasilitas olahraga
	f) Peningkatan peran kebudayaan berbasis kearifan lokal, nilai-nilai sejarah dalam pembentukan karakter serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi perlindungan, pengembangan, pembinaan, serta pemanfaatan objek pemajuan budaya, kesenian tradisional, cagar budaya, dan museum
3) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas	a) Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar, pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan secara optimal, sistem rujukan yang terintegrasi, serta memastikan akses dan keterjangkauan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat dengan menjamin pelayanan kesehatan secara menyeluruh
	b) Peningkatan pemetaan, penataan, dan distribusi sumberdaya kesehatan daerah dalam rangka menyediakan sumberdaya kesehatan yang kompeten dan sesuai standar
	c) Peningkatan pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat sehingga terwujud masyarakat dengan kualitas hidup yang sehat
4) Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman, aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung pertumbuhan	a) Peningkatan pengembangan sistem transportasi umum yang aman, terjangkau, dan terintegrasi, serta pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi untuk mendukung konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi
	b) Peningkatan penyediaan infrastruktur jalan dan bangunan pelengkap beserta infrastruktur dasar permukiman yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dalam rangka optimalisasi penyediaan pangan dan kemudahan akses menuju destinasi wisata

Strategi 2027	Arah Kebijakan 2027
ekonomi di perkotaan dan perdesaan	c) Peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau, utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan korban bencana di perkotaan maupun pedesaan
5) Meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim dan bencana, serta lingkungan hidup berkualitas melalui pengelolaan sumber daya alam secara efisien	a) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan efisien yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendorong penerapan teknologi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif
	b) Peningkatan ketersediaan dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan maupun pedesaan, serta konservasi lingkungan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan berbagai sektor lainnya,
	c) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terintegrasi hulu hilir dengan pengelolaan sampah serta limbah secara terpadu
	d) Peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, penguatan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat, monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi pada wilayah rawan bencana, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan
6) Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas perekonomian daerah melalui peningkatan produktivitas pariwisata, industri, dan perdagangan yang inklusif, ekosistem investasi yang kondusif, serta kemandirian desa	a) Peningkatan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat menuju pariwisata berkelanjutan
	b) Peningkatan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam dengan mempertimbangkan skema yang lebih inklusif menuju industri hijau
	c) Peningkatan sistem distribusi perdagangan dan jejaring pemasaran produk lokal
	d) Peningkatan produktivitas desa berorientasi pada kemandirian, kerja sama, perbaikan tata kelola dan lembaga ekonomi desa, serta pemberdayaan masyarakat
	e) Peningkatan investasi daerah melalui penguatan koordinasi, jejaring investor, insentif, dan integrasi antar pemangku kepentingan
	f) Peningkatan pengembangan titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, mendorong klaster ekonomi lokal sesuai karakteristik wilayah, serta pengendalian alih fungsi lahan pertanian
	g) Peningkatan reforma agraria dengan fokus pada kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), legalitas kepemilikan tanah, serta penyelesaian sengketa tanah,
	h) Peningkatan angkatan kerja yang berkualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usaha yang disertai penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan hubungan industrial
	i) Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yang disertai perluasan jejaring pemasaran produk lokal melalui kemitraan strategis
	j) Peningkatan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemberdayaan sosial ekonomi kelompok rentan, penguatan kebijakan, perlindungan sosial yang

Strategi 2027	Arah Kebijakan 2027
	berkeadilan, peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan terhadap PPKS serta pelaksanaan rehabilitasi sosial yang terpadu dan berkelanjutan untuk menurunkan ketimpangan pengeluaran penduduk
7) Meningkatkan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian	a) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat
	b) Peningkatan kemandirian dan skala ekonomi pertanian melalui modernisasi pertanian berbasis teknologi dan penguatan kelembagaan/ korporasi petani guna meningkatkan skala usaha pertanian,
	c) Peningkatan produksi perikanan melalui penguatan sistem usaha perikanan yang disertai diversifikasi komoditas dan peningkatan kualitas produk olahan perikanan menuju ekonomi biru
	d) Peningkatan sistem irigasi untuk menjamin ketersedian air sepanjang musim
8) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	a) Peningkatan integritas dan profesionalitas ASN serta penerapan sistem meritokrasi
	b) Peningkatan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terintegrasi dan transparan berbasis kinerja, risiko, dan riset
	c) Peningkatan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas pemerintah daerah dengan peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan tata laksana organisasi, perekonomian, pembangunan, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat, serta dukungan ekonomi dan keuangan syariah
	d) Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah, penyempurnaan sistem, peningkatan rasio penerimaan daerah terhadap PDRB, serta pemanfaatan barang milik daerah
	e) Peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahankorupsi
9) Meningkatkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas inovasi dan digitalisasi pemerintahan	a) Peningkatan inovasi, digitalisasi, integrasi sistem, serta keterbukaan informasi dan layanan publik
	b) Peningkatan infrastruktur kelurahan serta dukungan pada kecamatan berdaya
	c) Peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan pada usia produktif (terutama generasi milenial dan Z) dan pencatatan sipil, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan melalui kerja sama dengan instansi terkait lain (non pemerintah) sesuai dengan standar yang berlaku
	d) Peningkatan sistem dan kolaborasi satu data dengan berbagai instansi
	e) Peningkatan sistem pengaduan dan umpan balik masyarakat yang responsif dan partisipatif
10) Meningkatkan kondusivitas wilayah dengan mendorong partisipasi masyarakat dan	a) Peningkatan ideologi Pancasila dan demokrasi, serta peningkatan kapasitas, integritas, dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi
	b) Peningkatan sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, peningkatan toleransi antarumat beragama, moderasi beragama dan

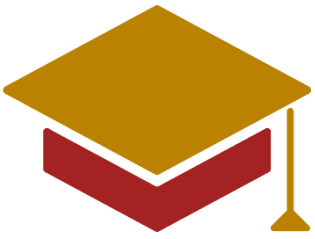
Strategi 2027	Arah Kebijakan 2027
kolaborasi antar pihak	wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan, dan pelatihan, serta mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan

Sumber: RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Purworejo tahun 2027, dilakukan dengan menerapkan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tematik dalam hal ini ditunjukkan dengan proses perumusan prioritas yang memperhatikan tema pembangunan tahun berkenaan. Selanjutnya, penjabaran tema pembangunan menjadi program dan kegiatan pembangunan dalam rangkaian proses perencanaan serta penyelarasan dengan penganggaran menunjukkan penerapan pendekatan Holistik dalam merumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2026. Dalam proses perencanaan pembangunan tahun 2027 melibatkan berbagai pemangku kepentingan meliputi pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dunia usah, serta media (*pentahelix*) yang menggambarkan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purworejo juga menerapkan pendekatan Integratif. Sedangkan pendekatan Spasial ditunjukkan dengan adanya lokasi program prioritas yang telah ditetapkan secara jelas.

Kabupaten Purworejo memiliki program unggulan Pitulungan. Program ini disusun guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan merespon berbagai isu strategis yang ada di Kabupaten Purworejo. Berikut ketujuh program Pitulungan tersebut.

a. Pinter Bocahe



Pinter bocahe merupakan program prioritas di bidang pendidikan dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun yang bertujuan untuk memastikan seluruh anak usia PAUD, SD, dan SMP mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan inklusif yang diselenggarakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang tidak dapat menempuh jalur pendidikan reguler, yang menekankan aspek akademik dan pembentukan karakter melalui pendidikan moral, penguatan iman dan taqwa, peningkatan literasi, serta nilai-nilai kebangsaan. Program ini juga bertujuan untuk mencetak pemuda berprestasi yang berdaya saing dan menjadi agen perubahan. Melalui program ini, pemuda diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam bidang akademik, seni budaya, olahraga, maupun teknologi. Dengan pendekatan holistik, program ini mendorong terwujudnya generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berbudaya, berkarakter kuat, dan menguasai teknologi sebagai bekal dalam menghadapi tantangan masa depan.

b. Religius Masyarakate



Religius Masyarakate merupakan program prioritas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang religius, harmonis, dan inklusif dalam keberagaman beragama. Program ini berfokus pada pendidikan anak beriman, pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya serta penyediaan dan peningkatan sarana prasarana peribadatan yang layak dan merata bagi seluruh pemeluk agama yang diakui negara sehingga setiap individu dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan aman yang disertai dengan penguatan nilai-nilai toleransi, gotong royong, serta keharmonisan antarumat beragama dalam kehidupan sosial.

c. Sehat Penduduke



Sehat Penduduke merupakan program prioritas yang bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses yang terjangkau, berkualitas, dan berkeadilan terhadap layanan dan edukasi kesehatan. Program ini mengintegrasikan berbagai langkah preventif seperti edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), *open defecation free* (ODF), serta pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga berencana (KB). Selain itu, program ini juga menitikberatkan pada penyediaan fasilitas kesehatan serta sarana dan prasarana olahraga yang memadai, peningkatan kualitas tenaga medis, serta optimalisasi sistem layanan kesehatan agar lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat yang mencakup penyediaan layanan kesehatan gratis bagi peserta kelas 3, termasuk melalui mekanisme pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjamin masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa kendala finansial. Dengan pendekatan yang komprehensif, program ini tidak hanya berfokus pada penyembuhan, tetapi juga pada upaya promotif dan preventif guna meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

d. Sejahtera Wargane



Sejahtera Wargane merupakan program prioritas yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup sandang, pangan, dan papan yang terjangkau serta layak bagi seluruh lapisan masyarakat yang juga berfokus pada optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapat masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dan peningkatan tata kelola dan basis data kemiskian, pemberdayaan ekonomi,

peningkatan akses terhadap sumber daya, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, makmur, dan sentosa dengan memastikan stabilitas sosial, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesempatan kerja dan usaha yang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat.

e. Alus Dalane



Alus Dalane merupakan program unggulan yang berfokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang mencakup peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta drainase, dan juga penyediaan kelengkapan jalan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dengan pendanaan yang bersumber dari berbagai mekanisme, termasuk APBD, APBN, dana desa, serta skema kolaboratif lainnya seperti kemitraan dengan sektor swasta dan dana hibah, guna memastikan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purworejo, dilakukan supervisi ke pemerintah desa terkait penataan desa. Dengan pendekatan yang terintegrasi, program ini diharapkan mampu menciptakan infrastruktur yang merata dan akses transportasi yang lebih baik sehingga dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi lokal dan nasional.

f. Rame Pasare



Rame Pasare merupakan program prioritas yang berfokus pada optimalisasi sektor ekonomi lokal melalui modernisasi dan penguatan aktivitas ekonomi secara luas yang mencakup revitalisasi pasar tradisional, pengembangan wisata daerah, pengembangan industri lokal, pengembangan infrastruktur perdagangan, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan pemasaran bagi pelaku usaha yang juga berfokus pada pemberdayaan pedagang, pelaku UMKM, dan pelaku pariwisata melalui pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, serta penguatan ekosistem bisnis yang berdaya saing. Dengan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas, program ini diharapkan mampu menciptakan iklim ekonomi yang lebih dinamis, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai sektor.

g. Ayem Petanine

Ayem Petanine merupakan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani atau pekerja di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan melalui optimalisasi infrastruktur usaha tani serta penyediaan akses yang memadai terhadap pupuk, pasar, dan sumber daya pertanian lainnya dengan berfokus pada pengembangan dan perbaikan prasarana serta sarana pertanian, seperti sistem irigasi, jalan usaha tani, dan alat-alat pertanian modern guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani, serta mendorong kebijakan dan dukungan bagi petani dalam mengakses pupuk bersubsidi, permodalan, serta jaringan pemasaran yang lebih luas dan stabil, sehingga hasil panen dapat terserap dengan baik dan memberikan keuntungan maksimal bagi petani. Dengan strategi yang komprehensif, Ayem Petanine berperan dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

4.3. Dukungan Sasaran dan Prioritas Daerah

Pada subbab ini, dijelaskan mengenai sasaran dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4.3.1. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dasar yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatur dalam beberapa regulasi, antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan komitmen Pemerintah Daerah, implementasi SPM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga memperoleh pelayanan yang layak dan merata sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, terdapat enam jenis SPM yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial. Dalam rangka mendukung pencapaian SPM, telah ditetapkan sejumlah sasaran dan prioritas daerah. Prioritas daerah dalam mendukung pencapaian SPM diarahkan pada pemenuhan layanan dasar tidak hanya dalam hal jenis tetapi juga mutu pelayanan. Tabel berikut ini menunjukkan sasaran dan prioritas daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung pencapaian SPM.

Tabel 4.10. Sasaran, Prioritas Daerah, dan Program yang Mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No	SPM Bidang	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas 2027	Program
1	Pendidikan	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Rata-rata kemampuan literasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) Rata-rata kemampuan numerasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) Rata-rata kemampuan literasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) Rata-rata kemampuan numerasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Meningkatnya Kualitas Manusia yang Sehat, Berkarakter, Berbudaya, dan Sejahtera	Pemenuhan dan peningkatan insfrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2	Kesehatan	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Meningkatnya Kualitas Manusia yang Sehat, Berkarakter, Berbudaya, dan Sejahtera	Pemenuhan dan peningkatan insfrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

No	SPM Bidang	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas 2027	Program
		Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan Tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan Pokok air minum sehari-hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan insfrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM; PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
4	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan insfrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
5	Trantibum-linmas	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratis dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM;

No	SPM Bidang	Indikator	Sasaran Daerah	Prioritas 2027	Program
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Berbasis Teknologi Informasi; Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah yang Berketahanan Iklim	yang efisien, transparan, dan adaptif, terhadap kebutuhan pengembangan insfratruktur berwawasan lingkungan; Pengembangan insfrastuktur tahan bencana dan peningkatan konektivtas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
6	Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Meningkatnya Kualitas Manusia yang Sehat, Berkarakter, Berbudaya, dan Sejahtera	Pemenuhan dan peningkatan insfrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL; PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN; PROGRAM REHABILITASI SOSIAL; PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL; PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Sumber: Tim Penyusun, 2026

4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pada penyusunan perencanaan tahunan, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat/ reses sebagai bahan perumusan kegiatan disertakan dengan lokasi serta kelompok sasaran, selaras dengan pencapaian pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat pada enam daerah pemilihan (Dapil) yang meliputi: Dapil 1 (Kec. Kaligesing dan Kec. Purworejo), Dapil 2 (Kec. Bagelen, Kec. Ngombol, dan Kec. Purwodadi), Dapil 3 (Kec. Banyuurip dan Kec Bayan), Dapil 4 (Kec. Butuh, Kec. Grabag, dan Kec. Kutoarjo), Dapil 5 (Kec. Bruno, Kec. Kemiri, dan Kec. Pituruh), serta Dapil 6 (Kec. Bener, Kec. Gebang, dan Kec. Loano).

Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat/ reses dilaksanakan dan merangkum berbagai aspirasi warga Kabupaten Purworejo untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan tahunan. Berikut ini ialah daftar permasalahan/ usulan dari DPRD Kabupaten Purworejo untuk perencanaan tahun 2027:

a. Bidang kesatuan bangsa dan politik:
   - Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol

b. Bidang keuangan
   - Bantuan keuangan khusus bidang jalan
   - Bantuan khusus untuk peningkatan sarana dan prasarana pemerintah desa

c. Bidang kepemudaan dan olahraga
   - Bantuan peningkatan prasarana olahraga
   - Bantuan peningkatan sarana olahraga

d. Bidang kesehatan
   - Bantuan alat kesehatan untuk Posyandu

e. Bidang pertanian
   - Bantuan bibit domba
   - Bantuan bibit hortikultura A
   - Bantuan bibit jeruk purut
   - Bantuan bibit Kambing Jawa Randu
   - Bantuan bibit Kambing Kaligesing
   - Bantuan bibit kopi
   - Bantuan bibit sapi
   - Bantuan pembangunan irigasi air tanah dangkal (ATD)
   - Bantuan pembangunan jalan usaha tani
   - Bantuan pembangunan jaringan irigasi tersier
   - Bantuan rumah burung hantu

f. Bidang kelautan dan perikanan
   - Bantuan benih gurami unggul
   - Bantuan benih ikan lele unggul
   - Bantuan benih nila unggul

g. Bidang lingkungan hidup

- Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R
- Bantuan Mesin Pencacah Plastik di Pengelolaan Sampah Lanjutan

h. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- Bantuan jamban sehat
- Pembangunan drainase di jalan kabupaten (perkotaan)
- Penggantian jembatan
- Rehabilitasi drainase di jalan kabupaten
- Rehabilitasi jalan poros desa
- Rehabilitasi jaringan irigasi
- Rehabilitasi talud pengaman badan jalan

i. Bidang pendidikan
- Pembangunan Unit PAUD/ RA Baru
- Pengadaan alat permainan edukatif (APE) PAUD swasta/ RA
- Pengadaan meubelair SD/ MI swasta
- Pengadaan peralatan TIK PAUD swasta/ RA
- Rehabilitasi Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal Kesetaraan
- Rehabilitasi ruang guru/ kepala sekolah/ TU SD/ MI swasta
- Rehabilitasi ruang kelas SD/ MI swasta
- Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas PAUD/ RA

j. Bidang kebudayaan
- Hibah alat kesenian pada grup/ kelompok kesenian

k. Bidang perhubungan
- Penyediaan alat penerangan jalan umum
- Penyediaan cermin tikungan

l. Bidang perumahan dan kawasan permukiman
- Perbaikan rumah tidak layak huni
- Perbaikan rumah tidak layak huni dan jamban

m. Bidang kewilayahan
- Pembangunan jalan lingkungan kelurahan

n. Bidang kesejahteraan rakyat
- Rehabilitasi prasarana peribadatan

Tabel di bawah ini menunjukkan keterkaitan isu strategis, prioritas pembangunan, dan pokok-pokok pikiran DPRD.

Tabel 4.11. Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Tahun 2027, dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Isu Strategis	Prioritas 2027	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Pemerataan layanan infrastruktur dasar	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan insfrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Bantuan jamban sehat
		Pembangunan drainase di jalan kabupaten (perkotaan)
		Penggantian jembatan
		Rehabilitasi drainase di jalan kabupaten
		Rehabilitasi jalan poros desa
		Rehabilitasi jaringan irigasi
		Rehabilitasi talud pengaman badan jalan
		Penyediaan alat penerangan jalan umum

Isu Strategis	Prioritas 2027	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
		Penyediaan cermin tikungan
		Perbaikan rumah tidak layak huni
		Perbaikan rumah tidak layak huni dan jamban
Pertumbuhaan ekonomi daerah yang inklusif	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan insfratruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Bantuan bibit domba
		Bantuan bibit hortikultura A
		Bantuan bibit jeruk purut
		Bantuan bibit Kambing Jawa Randu
		Bantuan bibit Kambing Kaligesing
		Bantuan bibit kopi
		Bantuan bibit sapi
		Bantuan pembangunan irigasi air tanah dangkal (ATD)
		Bantuan pembangunan jalan usaha tani
		Bantuan pembangunan jaringan irigasi tersier
		Bantuan rumah burung hantu
		Bantuan benih gurami unggul
		Bantuan benih ikan lele unggul
		Bantuan benih nila unggul
Kualitas lingkungan hidup yang berketahanan bencana	Pengembangan insfrastuktur tahan bencana dan peningkatan konektivtas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R
		Bantuan Mesin Pencacah Plastik di Pengelolaan Sampah Lanjutan
Ketahanan sosial	Pemenuhan dan peningkatan insfrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Bantuan peningkatan prasarana olahraga
		Bantuan peningkatan sarana olahraga
		Bantuan alat kesehatan untuk Posyandu
		Hibah alat kesenian pada grup/ kelompok kesenian
		Pembangunan Unit PAUD/ RA Baru
		Pengadaan alat permainan edukatif (APE) PAUD swasta/ RA
		Pengadaan meubelair SD/ MI swasta
		Pengadaan peralatan TIK PAUD swasta/ RA
		Rehabilitasi Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Nonformal Kesetaraan
		Rehabilitasi ruang guru/ kepala sekolah/ TU SD/ MI swasta
		Rehabilitasi ruang kelas SD/ MI swasta
		Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas PAUD/ RA
Tata kelola pemerintahan yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratis dan berbasis data spasial untuk mendukung	Bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol
		Bantuan keuangan khusus bidang jalan
		Bantuan khusus untuk peningkatan sarana dan prasarana pemerintah desa

Isu Strategis	Prioritas 2027	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	pelayanan publik yang efisien, transparan, dan adaptif, terhadap kebutuhan pengembangan insfratruktur berwawasan lingkungan	Pembangunan jalan lingkungan kelurahan (Kec. Purworejo)
		Rehabilitasi prasarana peribadatan

Sumber: Tim Penyusun, 2026

4.4. Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan salah satu cara untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

a. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, arah pembangunan Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi lima kawasan, yaitu (1) kawasan pertumbuhan; (2) kawasan komoditas unggul; (3) kawasan swasembada pangan, air, dan energi; (4) kawasan afirmasi, dan (5) kawasan konservasi/rawan bencana. Arah pembangunan Kabupaten Purworejo dalam konstelasi kewilayahan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebagai kawasan swasembada pangan, air, dan energi Dieng-Serayu-Bogowonto yang meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purworejo.



Gambar 4.2. Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Salah satu *highlight* indikasi intervensi nasional untuk mendukung Kabupaten Purworejo sebagai kawasan swasembada pangan, air, dan energi

yaitu pembangunan Bendungan Bener (yang sebelumnya berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional). Bendungan Bener dapat mendukung swasembada air khususnya dalam peningkatan irigasi pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air baku, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Bendungan dengan tampungan sekitar 92 juta m^3 ini akan bermanfaat mengairi lahan irigasi seluas 15.519 hektar. Selain itu, bendungan ini dapat menyuplai air baku untuk keperluan rumah tangga, kota dan industri sebesar 1.500 liter per detik ke tiga kabupaten, yakni Purworejo, Kebumen dan Kulon Progo, termasuk Bandara YIA. Bendungan Bener juga mempunyai potensi menyuplai energi listrik sebesar 10 MW dan mereduksi debit banjir dari 584 m^3/detik menjadi 178 m^3/detik (70%) pada debit banjir kala ulang 25 tahun (Q25). Terdapat pula sejumlah fungsi lainnya seperti perikanan, pariwisata dan konservasi DAS Bogowonto di bagian hulu. Dengan adanya proyek ini, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pangan, air, dan energi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Selain Pembangunan Bendungan Bener, program lainnya yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 yaitu:

- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini D.I. Wadaslintang;
- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah;
- Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi), pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan);
- Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura;
- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura;
- Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area* WS Serayu-Bogowonto;
- Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau;
- Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian, reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian, optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian, dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik;
- Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas, mitigasi OPT dan kesehatan hewan, peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani,

peningkatan kualitas pasca panen melalui peningkatan prasarana pasca panen;

- Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/ gapoktan, penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani, pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani, perluasan akses asuransi usaha tani, peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang, pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama; dan
- Pengembangan pusat / laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian.

b. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan wilayah Jawa Tengah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pembangunan wilayah di Jawa Tengah diarahkan untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk memadukan fungsi budidaya dan lindung serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir.

Dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP). Pertimbangan penentuan wilayah tersebut diantaranya adanya keterkaitan pengembangan dari aspek fisik, alam, sosial, ekonomi dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi pembangunan dan keterpaduan pengembangan wilayah antar Kabupaten/Kota. Selain itu pembagian Wilayah Pengembangan (WP) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Pembagian wilayah pengembangan Jawa Tengah meliputi WP Bregasmalang, WP Petanglong, WP Kedungsapur, WP Jekuti, WP Banglor, WP Subosukawonosraten, WP Gelangmanggung, WP Wonobanjar, WP Keburejo, serta WP Cibalingmas.

WP Keburejo meliputi Kabupaten Kebumen dan Purworejo yang diarahkan pengembangannya pada peningkatan perwujudan perkotaan

Kebumen sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta menyelaraskan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kabupaten Kulon Progo sebagai koridor pengembangan ekonomi. Pengembangan wisata diarahkan pada koridor Kebumen–Purworejo–Borobudur–Magelang dan koridor wisata pantai-Geopark Karangsambung Karangbolong-KSPN Dieng sebagai pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai disertai dengan peningkatan aksesibilitas. Kawasan industri diprioritaskan di Kabupaten Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otoritas Borobudur dengan fokus pada pengembangan industri manufaktur dan pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam dan pengembangan wilayah serta upaya mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami dan gerakan tanah.



Gambar 4.3. Arah Pengembangan Wilayah WP Keburejo
Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

Kabupaten Purworejo memiliki peran strategis dalam mendukung Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi "Pengembangan Geo-Tourism (Geopark Karangsambung dan Pantai) yang Terintegrasi dengan Borobudur dan Terpadu dengan Pariwisata DIY". Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas, memperkuat konektivitas antar destinasi, meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal, serta mendorong pemerataan pembangunan wilayah selatan dan barat Purworejo. Dalam upaya mendorong peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata perlu didorong pengembangan kawasan yang berorientasi transit (*Transit Oriented Development*). Keberadaan Stasiun Tipe A Kutoarjo dan Terminal Tipe B di Kecamatan

Kutoarjo dapat dijadikan simpul untuk menghubungkan ke destinasi wisata Candi Borobudur melalui penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan "Trans Jateng Koridor Kutoarjo-Borobudur".

Perlu didorong penyempurnaan pembangunan terminal Tipe B Kutoarjo yang terintegrasi dengan Stasiun Kutoarjo sebagai simpul perekonomian (sebagai Daya Tarik Wisata dan Sentra Oleh-Oleh UMKM serta pusat Kuliner Khas Purworejo). Perlu adanya inisiasi untuk memperpanjang trayek layanan "Trans Jateng", tidak hanya sampai Terminal Tipe B Kutoarjo, tetapi sampai ke Kabupaten Kebumen dan Destinasi Wisata Dieng. Sekaligus mendorong perpanjangan layanan Kereta Api Prameks dari semula Yogyakarta-Kutoarjo menjadi Yogyakarta-Kutoarjo-Kebumen. Dalam upaya mendorong peningkatan aksesibilitas dan konektivitas ke DTW, juga perlu didorong adanya peningkatan jalan provinsi yang mendukung pengembangan koridor wisata Kebumen-Purworejo-Borobudur-Magelang, akses ke Jalan Nasional (JJLS) dan perbatasan dengan Provinsi DIY.

Keberadaan Terminal Tipe B Kutoarjo di Kabupaten Purworejo tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi yang mendukung konektivitas antarwilayah di Kabupaten Purworejo, tetapi juga sebagai pusat UMKM "*Keburejo Hangout Point*" yang memfasilitasi pelaku UMKM lokal untuk mempromosikan dan menjual produk khas Purworejo. Pemerintah Kabupaten Purworejo, melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP), telah secara aktif menempatkan UMKM-UMKM unggulan di area terminal tersebut.

Dari sisi transportasi, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo juga merencanakan pelaksanaan *re-routing* angkutan pedesaan (angkudes) sebagai bagian dari upaya penataan sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Salah satu rute prioritas yang diusulkan adalah penyediaan angkutan lanjutan dari Terminal Kutoarjo menuju kawasan wisata pantai di selatan Purworejo. Rute ini diharapkan dapat mendukung mobilitas wisatawan serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Dengan sinergi antara penguatan konektivitas transportasi dan pengembangan ekonomi lokal berbasis UMKM, Terminal Tipe B Kutoarjo memiliki potensi besar sebagai model terminal terpadu yang tidak hanya melayani pergerakan orang dan barang, tetapi juga menggerakkan perekonomian daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung "Pengembangan *Geo-Tourism* (*Geopark* Karangsambung dan Pantai) yang Terintegrasi dengan Borobudur dan Terpadu dengan Pariwisata DIY, perlu adanya upaya sinergis dan strategis dalam rangka mewujudkan pengembangan wisata alam di wilayah utara yang terintegrasi dengan Borobudur dan pengembangan wisata pantai di pesisir selatan yang terintegrasi dengan Geopark Karangsambung sekaligus Yogyakarta International Airport (YIA).

Kawasan sekitar BOB terus dikembangkan melalui pembangunan infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan masyarakat pariwisata, serta pelestarian lingkungan berbasis wisata alam dan budaya. Sebagai langkah lanjutan, strategi pemasaran pariwisata terus diperkuat dengan menyusun paket wisata tematik yang menghubungkan destinasi wisata di Purworejo dengan kawasan Borobudur dan pariwisata DIY. Sinergi antarwilayah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta memperluas peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal di sektor pariwisata.

Dalam kerangka arah kebijakan pengembangan wilayah, WP Keburejo diarahkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sektor pertanian. Kebijakan ini sejalan dengan karakteristik wilayah yang memiliki potensi lahan pertanian produktif, sentra perikanan budidaya dan tangkap, serta pengembangan komoditas lokal. Dukungan program di wilayah ini difokuskan pada peningkatan produksi pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan, seperti kelapa, padi, serta perikanan tangkap dan budidaya. Penguatan dilakukan tidak hanya pada peningkatan hasil produksi di sektor hulu, tetapi juga pada pengembangan nilai tambah melalui pengolahan, pengemasan, dan distribusi produk (hilirisasi). Hal ini mencerminkan upaya Kabupaten Purworejo untuk membangun sistem pertanian yang modern, efisien, dan berorientasi pasar, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan. Perlu didorong peningkatan produksi pertanian melalui berbagai upaya, diantaranya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana berupa pengadaan alsintan, penyediaan benih/bibit berkualitas, penjaminan kualitas pakan ternak, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi dan pengembangan korporasi produksi. Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian juga perlu didorong kegiatan peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi, dan saluran irigasi pergaraman; peningkatan pasokan sumber air baku pertanian melalui rehabilitasi embung, dan mendorong perbaikan tata kelola pertanian modern berbasis integrated farming dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian.

Sedangkan dalam upaya hilirisasi pertanian, perlu didorong penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian, penjaminan keamanan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner unit usaha produk hewan, pemasaran dan bransing produk, pengembangan pelabuhan perikanan, pengelolaan kawasan konservasi, pelatihan diversifikasi olahan ikan, fasilitasi kemasan dan jejaring pemasaran.

Kabupaten Purworejo memiliki dukungan terhadap pengembangan episentrum pertumbuhan ekonomi baru berbasis wilayah pada WP Keburejo, antara lain:

1) Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Pengembangan *geotourism* (Geopark Purworejo dan Pantai) yang terintegrasi dengan Borobudur dan terpadu dengan pariwisata DIY; dan
2) Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: kelapa, tanaman pangan, garam, sapi potong, kambing, ayam buras, perikanan tangkap dan budidaya) Pengembangan sektor industri garam, gula dan pengolahan ikan.

Dalam rangka mencapai rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru, terutama dalam hal pemenuhan infrastruktur layanan dasar terutama air minum, perlu didorong optimalisasi sistem SPAM Regional Keburejo, yang melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Dari total kapasitas rencana sebesar 200 lps, baru sekitar 50 lps yang terbangun. Perlu upaya kolaborasi pendanaan dari pemerintah pusat, memerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam merealisasikan optimalisasi SPAM tersebut. Salah satunya adanya penambahan Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Layanan (JDL) dan Sambungan Rumah (SR). Wilayah Pengembangan Keburejo sebagai salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi baru, perlu didorong pengelolaan kawasan yang mengharmonisasikan kebutuhan keanekaragaman hayati dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Perlu adanya sinergitas pengelolaan cagar biosfer Merapi-Merbabu-Menoreh

Salah satu bentuk dukungannya yaitu melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di beberapa kawasan strategis. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menyusun RDTR Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 106 Tahun 2023. Selain itu, RDTR Kawasan Pariwisata Sekitar Badan Otorita Borobudur (BOB) yang meliputi wilayah Kecamatan Bener, Loano, dan Kaligesing juga dikembangkan sebagai bagian dari konektivitas destinasi wisata di wilayah barat Borobudur. Sebagai langkah integratif antara pengembangan industri dan pariwisata, disusun RDTR Kawasan Peruntukan Industri Purwodadi–Ngombol–Grabag turut disusun sesuai amanat Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2021–2041.

c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten

Dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, Kabupaten Purworejo telah menetapkan pembagian wilayah pengembangan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo. Wilayah pengembangan ini disusun dengan memperhatikan kondisi geografis, potensi sumber daya, jaringan

infrastruktur, serta pola kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk memperkuat keterpaduan pembangunan antar wilayah, mendorong pemerataan pertumbuhan, serta mempermudah penetapan prioritas pembangunan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Berdasarkan RTRW, Kabupaten Purworejo terbagi ke dalam 7 (tujuh) Wilayah Pengembangan (WP) sebagai berikut.



Gambar 4.4. Peta Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Purworejo
(Sumber: RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029)

1) WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo

Deliniasi Wilayah Pengembangan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Bayan, Kecamatan Kutoarjo dan Kecamatan Gebang. Arah pengembangan wilayah di kawasan tersebut berupa kegiatan **pusat kantor pemerintahan** yang didukung sektor **perdagangan dan jasa skala regional, industri** dan **perumahan** serta **penyediaan tenaga kerja terampil**. Sektor industri yang dikembangkan yaitu industri kecil dan menengah. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

a) Peningkatan infrastruktur dalam rangka mendorong peningkatan sektor perdagangan dan jasa skala regional
   - Peningkatan pasokan sumber air baku, melalui pengembangan SPAM Regional Keburejo sub sistem Balingasal serta revitalisasi pipa

transmisi dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) di wilayah perkotaan Purworejo;
- Peningkatan, dan pengembangan terminal tipe B dan tipe C.
- Revitalisasi Pasar Daerah Kutoarjo, di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta mendorong penataan PKL sesuai dengan regulasi yang berlaku.

b) Pengembangan industri kecil dan menengah yang memenuhi kriteria/persyaratan teknis, ekonomis dan lingkungan
- Optimalisasi dan integrasi layanan Rumah Kemasan dan PLUT KUKM untuk mendukung hilirisasi produk lokal dan hasil riset inovasi dalam pengembangan UMKM.

c) Pengembangan kawasan koridor jalan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan sosial;
- Reaktivasi jalur lambat/jalur sepeda trase Purworejo-Kutoarjo

b) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
- Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh serta mendorong pencegahan muncul dan berkembangnya permukiman kumuh yang baru
- Peningkatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat; utamanya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), korban bencana dan relokasi program pemerintah
- Pengembangan jaringan f*iber optic* di kawasan perkotaan dalam rangka mendukung *smart city*

Optimalisasi wisata dengan tema *Urban Heritage Tourism*

a) Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan integrasi antar moda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata *Urban Heritage Tourisme*

b) Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan, melalui :
- Mendorong *event tourism* berskala lokal dan regional.
- Mendorong pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) *Urban Heritage Tourism* (Alun-Alun Purworejo, *Art Centre*, Masjid Agung Purworejo, dll) melalui penataan fasad bangunan dan bangunan pemerintahan di sekitarnya.
- Mendorong promosi budaya lokal melalui pengembangan event budaya dan pengembangan paket-paket wisata (*travel package*).

Peningkatan upaya penyediaan tenaga kerja terampil melalui Balai Latihan Kerja Pemerintah dan fasilitasi lembaga swasta.

2) WP Kawasan Perbatasan (*Border City*)

Deliniasi Wilayah Pengembangan Kawasan Perbatasan/border city meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan

Bagelan. Arahan pengembangan wilayah di Kawasan tersebut yaitu mewujudkan ruang wilayah pengembangan sebagai kota perbatasan yang didukung oleh **sektor pariwisata, perdagangan dan jasa,** serta **perumahan** dengan memperhatikan **ketahanan terhadap bencana**. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

a) Pengembangan sektor pariwisata maritim beserta infrastruktur pendukung;
   - Pengembangan atraksi pariwisata berbasis potensi lokal
   - Penyelenggaraan event-event wisata berskala lokal maupun regional

b) Pengembangan koridor sektor perdagangan dan jasa sebagai pendukung optimalisasi pariwisata maritim dan perikanan

c) Pengembangan dan peningkatan infrastruktur dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata maritim dan sektor perdagangan barang dan jasa
   - Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sepanjang koridor Jalan arteri Primer dan Kolektor Primer untuk mendukung keberadaan Bandara YIA

d) Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang adaptif terhadap bencana, berkelanjutan dan ramah lingkungan
   - Penyediaan kawasan perumahan dan permukiman yang adaptif terhadap bencana, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
   - Peningkatan upaya mitigasi bencana, penyediaan jalur evakuasi bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi bencana melalui pembinaan terhadap Desa Tangguh Bencana (DESTANA)

3) WP Kawasan Perkotaan Kemiri Pituruh

Wilayah pengembangan Perkotaan Kemiri Pituruh terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kemiri, Kecamatan Butuh dan Kecamatan Pituruh. Arah Pengembangan di kawasan tersebut berupa **kawasan agropolitan** yang didukung perdagangan barang dan jasa serta sektor pariwisata. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

a) Pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan, hortikultura maupun perkebunan yang mendukung pengembangan agribisnis
   - Pengembangan kampung benih hortikultura (*horticultural seed community*), fasilitasi pelabelan bibit/benih tanaman hortikultura, serta optimalisasi peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP)
   - Pengembangan agribisnis perkebunan dan pertanian

b) Pengembangan sarana dan prasarana, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas air dan penyediaan gudang dan fasilitas penyimpanan
   - Peningkatan/rehabilitasi, pemeliharaan Jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier
   - Pembangunan/rehabilitasi, pemeliharaan Jalan Usaha Tani (JUT)
   - Pembangunan sarana persampahan yang terintegrasi dengan kawasan permukiman dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat
   - Pengembangan Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Jaringan Distribusi Layanan serta Sambungan Rumah (SR) untuk penyediaan air minum yang bersumber dari SPAM Regional Keburejo sub sistem Balingasal

c) Pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengembangan agribisnis
   - Pembinaan Desa Wisata melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
   - Fasilitasi kelembagaan dan pembinaan lembaga keuangan desa

d) Pengembangan *smart village fisheries* dalam rangka mendukung budidaya perikanan air tawar terintegrasi
   - Pembenihan, pembesaran dan pemasaran benih lele

e) Perluasan layanan kesehatan hewan dalam mendukung peningkatan populasi ternak

4) WP Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Wilayah Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri terdiri dari 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Grabag dan Kecamatan Ngombol. Arah pembangunan wilayah di Kawasan tersebut berupa peruntukan **industri** yang didukung sektor pariwisata dan pertanian. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

a) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagai pendukung Kawasan Industri Kebumen
   - Optimalisasi serapan air baku SPAM Regional Keburejo sub sistem Jembangan

b) Pengembangan kawasan pariwisata pantai
   - Pengembangan pariwisata berbasis potensi kawasan pesisir berupa wisata kesehatan (*health tourism*) terapi garam di Pantai Jetis, wisata tambak, dan Agro tourism
   - Penyelenggaraan event pariwisata berskala nasional seperti festival layang-layang

c) Pengembangan kawasan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pertanian
   - Pengembangan Kampung Nelayan Modern (KALAMO) yang terintegrasi dengan TPI Kertojayan

- Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Keburuhan beserta sarana dan prasarana pendukungnya
- Pengembangan budidaya tambak udang terintegrasi
- Pengembangan kawasan hortikultura dan kawasan perkebunan kelapa

d) Peningkatan upaya mitigasi bencana
e) Penyediaan peta mitigasi bencana dan optimalisasi *Early Warning System* (EWS)
f) Peningkatan upaya mitigasi bencana, penyediaan jalur evakuasi bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi bencana melalui pembinaan terhadap Destana

5) WP Kawasan Bendungan Bener

Wilayah Pengembangan Bendungan Bener yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Bener dan Kecamatan Gebang. Arah pengembangan wilayah di kawasan tersebut berupa **penyedia air baku**, pembangkit listrik tenaga air, kawasan konservasi, serta pariwisata. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut :

a) Pengembangan kawasan pengendali banjir (*flood control area*) dengan mempertimbangkan kapasitas tampungan dan debit banjir, perubahan ekosistem sungai, pergeseran sedimentasi dan dampak terhadap lingkungan
b) Pengembangan kawasan konservasi DAS dengan fokus utama menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat, serta mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dan kegiatan manusia
c) Penyediaan pasokan air baku untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan perdagangan, termasuk melayani area Bandara YIA
   - Pembangunan Jaringan Distribusi Layanan (JDL), Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan Sambungan Rumah (SR) penyediaan air minum dari sistem Bendungan Bener;
   - Penyusunan *Real Demand Survey* (RDS) untuk rencana wilayah pelayanan yang mengambil sumber air baku dari Bendungan Bener
d) Peningkatan fungsi dan kinerja sistem irigasi serta menambah luas areal pelayanan irigasi
   - Rehabilitasi/Peningkatan jaringan irigasi premium yang akan terkoneksi ke jaringan pemanfaatan Bendungan Bener.
   - Peningkatan integrasi jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier kewenangan kabupaten yang terkoneksi dengan jaringan pemanfaatan Bendungan Bener

e) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 10 MW
   - Fasilitasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 10 MW

f) Pengembangan sektor wisata dengan atraksi berupa wisata bendungan dengan tetap memperhatikan keletarian lingkungan
   - Pengembangan atraksi wisata berbasis kawasan dengan *highlights* pada wisata air dan wisata petualangan (*adventure*)
   - Penyediaan pusat kuliner dan pusat oleh-oleh

6) WP Kawasan Otoritatif Borobudur

Deliniasi Wilayah Pengembangan Kawasan Otoritatif Borobudur meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Kaligesing dan Kecamatan Loano. Arah pengembangan wilayah di Kawasan tersebut berupa sektor **pariwisata** melalui perbaikan skema pola pengelolaan pariwisata daerah yang disertai pengembangan ekonomi kreatif serta peningkatan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

a) Peningkatan pengembangan pariwisata dengan mengedepankan konsep 3 S (*something to see, something to do, dan something to buy*) serta konsep 6 A (*Attraction, Amenities, Accessibilities, Ancillary, Activity dan Available Package*)
   - Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan beserta bangunan pelengkapnya sebagai akses menuju destinasi wisata
   - Penyediaan sarana transportasi, terminal dan area parkir yang memadai
   - Penyediaan fasilitas pendukung (amenitas) di sekitar destinasi wisata yang meliputi akomodasi, tempat ibadah, dan fasilitas umum.
   - Menyusun pengembangan paket wisata (travel package) dengan mempertimbangkan analisis pasar
   - Digitalisasi dalam pemasaran pariwisata untuk meningkatkan popularitas kawasan BOB sebagai destinasi wisata, dengan mendorong penggunaan kecerdasan buatan (*artificial inteligence*)
   - Penyelenggaraan event-event pariwisata berskala lokal dan regional (kontes kambing etawa, grebek durian, kenduri kopi, *bird watching* dll)

b) Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis komunitas dengan pelibatan masyarakat lokal secara aktif
   - Mendorong pengembangan produk unggulan lokal, seperti kuliner khas, kerajinan tangan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi kawasan
   - Pemberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola potensi daerah seperti manajemen pemasaran, pengembangan produk wisata serta

meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola desa wisata secara profesional
- Pelatihan kepada pokdarwis terkait mitigasi resiko bencana serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempromosikan wisata dan menjangkau pasar yang lebih luas
- Optimalisasi pemanfaatan rumah kopi; pelatihan *blending, rosting*, barista dan *digital marketing*

7) WP Kawasan Perkotaan Bruno

Wilayah Pengembangan Perkotaan Bruno terdiri dari 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Bruno. Arah pengembangan wilayah di kawasan tersebut berupa pengembangan kawasan perkotaan perbatasan berbasis **pertanian hortikultura** dan perikanan serta pariwisata yang didukung peningkatan layanan dasar. Dalam rangka mewujudkan arah pengembangan di wilayah tersebut, terdapat indikasi kebutuhan rencana program 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

a) Pengembangan komoditas unggulan tanaman hortikultura
b) Pengembangan budidaya perikanan air tawar yang terintegrasi dari hulu menuju hilir
c) Pengembangan pariwisata minat khusus (*special interest tourism*)
d) Peningkatkan/pengembangan infrastruktur yang menunjang aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang mendukung akses menuju destinasi wisata Dieng maupun DTW lokal
    a. Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jalan beserta bangunan pelengkap yang menuju destinasi wisata
e) Pengembangan Kawasan perkotaan yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dasar
    - Fasilitasi pembangunan SMA/SMK Negeri
    - Penambahan ruang kelas baru level menengah pertama
    - Penyediaan sarana dan prasarana penunjang sekolah
    - Peningkatan kapasitas layanan kesehatan
f) Peningkatan upaya mitigasi bencana
    - Penyediaan peta mitigasi bencana dan optimalisasi *Early Warning System* (EWS)
    - Peningkatan upaya mitigasi bencana, penyediaan jalur evakuasi bencana, peningkatan kapasitas masyarakat dalam upaya mitigasi bencana melalui pembinaan terhadap Desa Tangguh Bencana (DESTANA)
    - Inventarisasi kawasan yang rawan bencana dan pendataan rumah terdampak bencana
g) Penuntasan status tanah (*Governement Ground*), sampai dengan dilekati Hak Atas Tanah (HAT)
h) Penguatan branding Purworejo di kawasan perbatasan

4.5. Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi pembangunan daerah diperlukan sebagai upaya mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Inovasi dalam pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah, kinerja pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya ekosistem riset dan inovasi di daerah, yang menurut Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 terdapat 6 (enam) elemen yang membentuk ekosistem riset dan inovasi tersebut, yaitu:

a. Elemen kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah
b. Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi
c. Elemen kemitraan riset dan inovasi
d. Elemen budaya riset dan inovasi
e. Elemen keterpaduan riset dan inovasi di daerah
f. Elemen penyelarasan dengan perkembangan global

Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi riset dan inovasi di daerah bertugas menumbuhkembangkan ekosistem riset dan inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah.

Sesuai tema pembangunan daerah tahun 2027, yaitu "Penguatan Infrastruktur berbasis Lingkungan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah", maka rencana inovasi yang akan dibangun/ dikembangkan pada tahun 2027 direncanakan sebagai berikut:

a. Membangun minimal dua inovasi pada setiap perangkat daerah yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang paling mendasar pada tahun 2027;
b. Melanjutkan dan mengembangkan inovasi-inovasi yang telah dibangun sebelum tahun 2027, memperbarui agar sesuai dengan dinamika perkembangan pelaku inovasi maupun sasaran inovasi tersebut.

Tabel berikut ini menunjukkan sub kegiatan yang akan dibangun inovasi atau dikembangkan inovasinya pada tahun 2027.

Tabel 4.12. Rencana Sub Kegiatan yang Akan Dibangun Inovasi atau Dikembangkan Inovasinya pada Tahun 2027

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan yang Akan Dibangun Inovasi atau Dikembangkan Inovasinya
1	Dinperkimtan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
2	Dinperkimtan	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
3	Satpol PP Damkar	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
4	DINSOSDALDUKKB	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5	DPPPAPMD	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
6	DKPP	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan yang Akan Dibangun Inovasi atau Dikembangkan Inovasinya
7	DKPP	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
8	Disdukcapil	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
9	Dinhub	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
10	Dinhub	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
11	Dinkominfostasandi	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
12	DKUKMP	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
13	DPMPTSP	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
14	DPMPTSP	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
15	Dinporapar	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota
16	Dinporapar	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
17	Dinpusip	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
18	Dinperintransnaker	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
19	Dinperintransnaker	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
20	Bapperida	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
21	BKPSDM	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
22	Inspektorat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
23	Kec. Grabag	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
24	Kec. Purwodadi	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
25	Kec. Bagelen	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
26	Kec. Purworejo	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
27	Kec. Banyuurip	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
28	Kec. Bayan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
29	Kec. Kutoarjo	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
30	Kec. Butuh	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
31	Kec. Pituruh	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
32	Kec. Pituruh	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

No	Perangkat Daerah	Sub Kegiatan yang Akan Dibangun Inovasi atau Dikembangkan Inovasinya
33	Kec. Kemiri	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
34	Kec. Bruno	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
35	Kec. Bruno	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
36	Kec. Gebang	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
37	Kec. Loano	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
38	Kec. Bener	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
39	Kec. Bener	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sumber: SIPD-RI, 2026

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 beserta kebutuhan pendanaannya. Penyusunan rencana kerja ini merupakan penjabaran dari prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya serta mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Pada bab ini juga dijabarkan dukungan rencana kerja pada tahun 2027 terhadap Prioritas Nasional, Program Delegasi Provinsi, Program Unggulan "Pitulungan", penerapan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), dan Satu Data Indonesia.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2027

Program prioritas, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2027 mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 serta bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) PENDIDIKAN

a. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran:

1. **Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sesuai standar.** Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik sebesar 78,39%. Pencapaian target program didukung melalui kegiatan Pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan PAUD, dan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan dengan rincian sebagai berikut Pembangunan Ruang Kelas Baru; Pembangunan, sarana, prasarana dan utilitas; Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas,Pembangunan unit sekolah baru PAUD; Pembangunan/Relokasi Gedung SD Sebomenggalan; Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik; Rehabilitasi ruang guru/ruang kepala sekolah/TU; Rehabilitasi ruang kelas; Pembangunan Laboratorium Sekolah; Pembangunan Perpustakaan Sekolah; Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah; Pengadaan peralatan TIK; Pengadaan Mebel sekolah.

Program ini juga mendukung prioritas nasional 2 mengenai revitalisasi sarana prasarana sekolah/ madrasah.

2. **Meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan seluruh jenjang**. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase satuan pendidikan yang memiliki kualitas pembelajaran dengan kategori baik sebesar 61,96 %. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan PAUD, dan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan dengan rincian sebagai berikut Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan; Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah; Pengelolaan dana BOP untuk PAUD dan Sekolah Nonformal/Kesetaraan serta BOS untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; Pengelolaan dana BOP/BOS; Peningkatan kapasitas pengelola dana BOP/BOS; Hibah BOP Kesetaraan; Operasional UPT SPNF; Penanganan Anak Tidak Sekolah; Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi, ATS, dan anak beresiko putus sekolah; Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP); Fasilitasi Komunitas Belajar; Operasional Dewan Pendidikan; Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan; Pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan, dan intoleransi; Akreditasi sekolah; Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa; Fasilitasi Program Indonesia Pintar; Hibah kepada SD Swasta, MI Negeri, dan MI Swasta; Program Anak Beriman dan Berkeprobadian; Operasional Penyelenggaraan SD Inklusi dan ULD; Penyelenggaraan ujian sekolah; Fasilitasi Penyusunan RAPBS; Pengembangan konten digital; Hibah kepada MTS Negeri, SMP Swasta, dan MTs Swasta; Pelaksanaan SPMB.
3. **Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang.** Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan sebesar 56,72% dan Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Terakhir S-1/ D-IV dan Bersertifikat Pendidik di Seluruh Jenjang sebesar 68,08%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan PAUD, dan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan dengan rincian sebagai berikut Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan; Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan; Hibah kinerja pendidik PAUD; Pengelolaan data dan peningkatan kapasitas pendidik; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan; Diklat Calon Kepala

Sekolah; Evaluasi kinerja kepala sekolah dasar; Diklat Mata pelajaran.

b. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang Telah Ditetapkan sebesar 15,54%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar, Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar.

c. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat yang Berizin sebesar 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

d. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya penggunaan bahasa daerah. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan dan Menerapkan Pembiasaan Penggunaan Bahasa Jawa sebesar 87,22%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu jenjang SD dan SMP.

2) KESEHATAN

a. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran:

1. **Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar.** Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 51,85% dan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 99,65%. Pencapaian target pada program didukung melalui pengendalian dan pengawasan perizinan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya; peningkatan mutu pelayanan fasilitasi kesehatan; pemusnahan obat dan BMHP; distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan; pembangunan Puskesmas Banyuasin; kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan; pengadaan peralatan Labkesda; pengadaan alat kalibrasi UPAK; pengadaan obat dan BMHP;

Hibah PMI; operasional Labkesda; penyediaan rumah singgah; pengembangan puskesmas; Operasional Pelayanan Puskesmas; Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan; Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional termasuk pemeriksaan spesimen HPV DNA; Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat baik untuk bantu iuran bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 ataupun layanan klaim Jamkesda di luar cakupan BPJS; Pendampingan ILP ke puskesmas/Desa/Kelurahan; Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya; Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT); Penyediaan *Telemedicine* di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2. **Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular.** Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) sebesar 90,63%, *Neglected Tropical Diseases* (NTDs) sebesar 96,2%, Angka Kematian Dengue sebesar 0,3%, *Annual Parasite Incidence* (API) sebesar 0,01 per 1.000 penduduk, Persentase Diabetes Melitus Terkendali sebesar 37%, Insiden HIV sebesar 0,092 per 1.000 penduduk, Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap sebesar 96%, Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebesar 67%, Persentase Hipertensi terkendali sebesar 5,67%. Pencapaian target pada program didukung melalui pengelolaan Layanan Imunisasi; pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA; pelayanan kesehatan kerja; pelayanan kesehatan lingkungan; pelayanan kesehatan malaria; Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat; pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV); pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis; Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa; Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular; Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular; Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan; Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat. Program ini juga mendukung prioritas nasional 4 mengenai pemeriksaan kesehatan gratis.
3. **Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar.** Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Jumlah Kasus Kematian Ibu sebesar 5 kasus, Jumlah Kematian Balita sebesar 81 kasus, Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik sebesar 55,56%, Persentase Lanjut Usia yang Mandiri sebesar 85%, Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebesar 65%, Prevalensi Obesitas sebesar 21,5%, Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun sebesar 10,4%, Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan sebesar

1,7%. Pencapaian target pada program didukung melalui pelayanan kesehatan balita; pelayanan kesehatan bayi baru lahir; pelayanan kesehatan gizi masyarakat; pencegahan dan percepatan penurunan stunting; pemberian makanan tambahan untuk balita stunting dan bumil KEK; pelayanan kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; Pelayanan Kesehatan Reproduksi; Promosi Kesehatan; Pengelolaan Surveilans Kesehatan; Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak; Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah; Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan; Pengelolaan dan penetapan Kawasan tanpa rokok; pelaksanaan cek kesehatan gratis; pelaksanaan program spesialis keliling (speling).

4. **Tersedianya data dan sistem informasi kesehatan.** Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional sebesar 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

b. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Tersedianya SDM kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi sebesar 5,3 per 1.000 penduduk. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizininan praktik, pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan, pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten.

c. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Tersedianya obat, alat kesehatan dan optikal serta makanan yang aman dan bermutu. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu sebesar 97% dan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah sebesar 90%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi alat

kesehatan kelas 1 tertentu dan pkrt kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga; pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan; pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM); pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga; pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan.

d. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Terwujudnya desa siaga aktif mandiri. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri sebesar 49,59%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat; Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat; Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM); Pendampingan pelaksanaan ILP di Puskesmas Pembantu dan Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan (UPKD/K).

3) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 69,17%, persentase Ketersediaan Dokumen Daerah Irigasi sebesar 87,50%, dan persentase Kondisi Kelembagaan Pengelola Irigasi sebesar 56,50%. Beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut diantaranya melalui rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, penyusunan desain perencanaan untuk penguatan database dan survey kondisi (e-PAKSI), penguatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi melalui pembinaan P3A, fasilitasi Komisi Irigasi Kabupaten dan Unit Pengelola Irigasi (UPI), penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED) rehabilitasi jaringan irigasi serta biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan. Program ini juga mendukunga prioritas nasional 2 mengenai swasembada air.

b. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya rumah tangga dengan akses air minum aman. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase rumah

tangga dengan akses air minum aman sebesar 31,61%. Beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut diantaranya melalui penyusunan DED SPAM dan review dokumen RISPAM; peningkatan sistem penyediaan jaringan air minum perpipaan, peningkatan kapasitas pengelola SPAM (KPSPAM/BPSPAM) berupa bimbingan teknis dan administrasi pengelolaan SPAM, dan pembinaan terhadap desa pasca konstruksi penerima program SPAM, agar terwujud keberlanjutan program.

c. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

   Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik sebesar 95,31%. Beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut diantaranya melalui revitalisasi IPLT Jetis, optimalisasi penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja, peningkatan kapasitas pengelola Sistem Pengelolaan air Limbah Domestik (SPALD), dan penyediaan fasilitas buang air besar individu dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.

d. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

   Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat. Pada tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase drainase jalan di perkotaan dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat sebesar 31,73%. Beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut diantaranya rehabilitasi jaringan drainase dan operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan.

e. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

   Program penataan bangunan gedung diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya bangunan gedung dengan kondisi baik. Pada tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik sebesar 88,69%. Beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut diantaranya Pembangunan gedung negara; Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.

f. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Program penyelenggaran jalan diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik. Pada tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik sebesar 17,81%. Beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut diantaranya penyusunan dokumen perencanaan teknis (DED) jalan, survey kondisi jalan dan jembatan, pembangunan jalan; pemeliharaan rutin dan berkala jalan, rehabilitasi jalan serta penggantian dan pemeliharaan berkala jembatan.

g. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Program pengembangan jasa konstruksi diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi. Pada tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi sebesar 100%. Aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut yaitu Pelatihan untuk Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis; Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi; dan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi.

h. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Program penyelenggaraan tata ruang diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja penyusunan dokumen RTR, meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR dan terselenggaranya pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) sebesar 66,67%; Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) sebesar 91,91% dan persentase Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tata Ruang sebesar 37,5%. Beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut diantaranya pelaksanaan persetujuan substansi RDTR kabupaten; penetapan RDTR kabupaten; sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang, penyusunan peta dasar, penyusunan RDTR kabupaten, penyusunan RTRW kabupaten, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR.

4) PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja pengembangan perumahan. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase peningkatan kinerja pengembangan perumahan sebesar 100%. Beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut diantaranya identifikasi lahan-lahan sebagai lokasi relokasi perumahan, pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana,

identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten serta pendataan dan verifikasi calon penerima rumah bagi korban bencana kabupaten.

b. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangani. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangani sebesar 95,27%. Beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut diantaranya koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh, pembinaan Pokmas dan pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh.

c. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya rumah tidak layak huni yang ditangani. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Ditangani sebesar 96,02%. Beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut diantaranya perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di luar kawasan kumuh serta pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru. Program ini juga mendukung prioritas nasional 6 mengenai fasilitasi koordinasi 3 juta rumah.

d. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya perumahan yang dilengkapi demgan prasarana, sarana dan utilitas umum. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang diserahkan sebesar 74,29%. Beberapa aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut diantaranya penyediaan PSU perumahan, verifikasi serta penyerahan PSU dari pengembang dan koordinasi serta sinkronisasi dalam rangka penyusunan PSU.

5) KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

a. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) sebesar 100% serta Persentase Penegakan Perda dan Perkada sebesar 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan

Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota; dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan non kebakaran. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap dengan target 77% serta Persentase Pelayanan Non Kebakaran dengan target 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota; Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran; Investigasi Kejadian Kebakaran, serta Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

c. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya layanan pencengahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat pasca bencana. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Terpenuhinya Unsur Penanggulangan Bencana (Persentase Layanan Penanganan Pra Bencana, Layanan Penanganan Saat Terjadi Bencana, dan Layanan Penanganan Pasca Bencana) sebesar 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; serta Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

6) SOSIAL

a. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya pemberdayaan sosial. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina sebesar 18,00%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang; Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan sebesar 100%. Pencapaian target

pada program didukung melalui Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

c. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya rehabilitasi sosial. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial sebesar 5,5%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial termasuk fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan, pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial, Pemberian bimbingan sosial, layanan data dan pengaduan, layanan kedaruratan, layanan rujukan, penyediaan alat bantu bagi disabilitasi, perbekalan kesehatan, penyediaan permakanan dan sandang; Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota.

d. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya rehabilitasi sosial. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial sebesar 99,53%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; Pengelolaan UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi dalam Penjangkauan anak-anak terlantar kewenangan kabupaten/kota; Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat; Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Buruh Tembakau; Fasilitasi penyaluran bantuan sosial untuk LKSA, Panti, PAYMD, PAY, dan Yayasan Sosial; Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; Verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan jaminan kesehatan dan bantuan sosial. Program ini juga mendukung prioritas nasional 6 mengenai Prokesra bantuan sosial terintegrasi.

e. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Saat dan Pasca Bencana sebesar 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota termasuk

Fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana dan Peningkatan kompetensi taruna siaga bencana; Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota termasuk pelayanan dukungan psikososial, penanganan khusus kelompok rentan, penyediaan makanan, sandang, dan tempat penampungan pengungsi.

f. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai Standar sebesar 65%. Pencapaian target pada program didukung melalui Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota; Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota; Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota; Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

5.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) TENAGA KERJA

a. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pada tahun 2027, Program Perencanaan Tenaga Kerja ditujukan untuk mencapai sasaran meningkatnya pemanfaatan rencana tenaga kerja yang disusun. Sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun dengan target sebesar 100%, yang dicapai melalui pendampingan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (RTK Mikro) pada perusahaan di Kabupaten Purworejo serta optimalisasi pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK Makro) yang telah disusun pada tahun 2026.

b. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi sebesar 88,60% dan Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 9,38%. Pencapaian target tersebut didukung melalui pelaksanaan kegiatan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), dan pelaksanaan konsultansi produktivitas kepada perusahaan kecil.

c. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Program Penempatan Tenaga Kerja diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja dengan target sebesar 67,96%. Pencapaian target tersebut didukung melalui penyelenggaraan Job

Fair, layanan penempatan tenaga kerja (antar kerja), fasilitasi perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan, serta penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja untuk meningkatkan akses terhadap kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pasar kerja.

d. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Program Hubungan Industrial diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya sarana hubungan industrial dan syarat kerja. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja dengan target sebesar 57,34%. Pencapaian target tersebut didukung melalui operasional Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, fasilitasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja, fasilitasi penyusunan dan pengesahan peraturan perusahaan, pendataan dan penyediaan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan organisasi pengusaha serta serikat pekerja/serikat buruh, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, serta penutupan perusahaan.

2) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Kabupaten sebesar 14,2%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang terdiri dari koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG, pelatihan PPRG, fasilitasi dan mone GAP GBS Perangkat daerah Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Berdaya, Koordinasi Peneriamaan Penganugerahan Ekapraya, dan pengelolaan data SIDA; kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota; kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari Koordinasi Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini (SERAT KARTINI), fasilitasi Dharma Wanita Persatuan (DWP), fasilitasi Gabungan Organisasi Wanita (GOW).

b. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Menurunnya kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani sebesar 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Penguatan

dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

c. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas keluarga. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalu Hasil Penilaian PUSPAGA sebesar 230. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

d. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 61,78. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota terdiri dari Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota, Fasilitasi FORKARE.

e. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 69,60. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3) PANGAN

a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya rasio lumbung pangan yang aktif. Pada tahun 2027 sasaran program tersebut diukur melalui Rasio Lumbung Pangan yang aktif dengan target sebesar 41,18 %. Kegiatan pada program ini meliputi Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, yang diwujudkan dengan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik.

b. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya angka kecukupan energi dan protein. Di tahun 2027, program ini

ditargetkan untuk pencapaian Angka Kecukupan Energi sebesar 1.900 kkal/kapita/hari dan Angka Kecukupan Protein sebesar 56,1 gram/kapita/hari. Pencapaian target tersebut didukung melalui gerakan pangan murah, Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya, pemantauan stok pangan, pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah, penyusunan dokumen PPH, penyusunan Neraca Bahan Pangan, dan Sosialisasi B2SA dan pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman pangan.

c. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran menurunnya penanganan desa rentan rawan pangan. Pada tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian indikator persentase penanganan desa rentan rawan pangan dengan target sebesar 19,85%. Pencapaian target tersebut didukung melalui kegiatan pelatihan di desa rentan rawan pangan, penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan, sosialisasi gerakan selamatkan pangan, serta koordinasi dan monitoring kegiatan penanganan kerawanan pangan.

d. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pangan segar aman asal tumbuhan. Pada tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Pangan Segar Aman dengan target 100%. Pencapaian target tersebut didukung melalui kegiatan pelatihan keamanan pangan, pelatihan pengawas keamanan pangan, pembinaan dan monioring kepada pelaku usaha pangan segar, penyediaan alat uji cepat keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan segar di peredaran, pengawasan pangan segar asal tumbuhan, serta sosialisasi keamanan pangan.

4) PERTANAHAN

a. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk Persentase penanganan sengketa tanah garapan sebesar 40%. Aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut yaitu mediasi penyelesaian kasus pertanahan.

b. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH
Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penerbitan Izin membuka tanah. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Permohonanan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui sebesar 40%. Aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah.

c. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebesar 40%. Aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan capaian program tersebut yaitu Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten.

5) LINGKUNGAN HIDUP

a. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Perencanaan Lingkungan Hidup diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti sebesar 100%. Pencapaian target pada program ini didukung melalui Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RDTR Purworejo-Kutoarjo, Dokumen KLHS Revisi RTRW Kabupaten Purworejo, dan evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Purworejo sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

b. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Pengendalian Pencemaran yang Dilaksanakan sebesar 92,33%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan inventarisasi sumber pencemar dan penyusunan data kualitas lahan, pemantauan kualitas air dan kualitas udara, penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan aksi pembangunan rendah karbon, serta pengelolaan laboratorium lingkungan hidup sebagai dasar pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

c. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayai (KEHATI) diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya proporsi luasan ruang terbuka hijau perkotaan. Pada tahun 2027, sasaran program ini diukur melalui Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan sebesar 7,234%. Pencapaian target tersebut didukung melalui pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan, penanganan kebersihan kawasan perkotaan, pemeliharaan Taman Segitiga Kali Jali serta pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (Heroes Park) yang akan dikembangkan menjadi kebun raya sebagai salah satu upaya mendukung implementasi Program Pitulungan Sejahtera Wargane.

d. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun. Pada tahun 2027, sasaran program ini diukur melalui Persentase Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilaksanakan sebesar 73%. Pencapaian target program ini didukung melalui kegiatan fasilitasi pemenuhan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang terintegrasi dengan persetujuan lingkungan melalui OSS.

e. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Pemenuhan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan dengan target sebesar 76%. Pencapaian target tersebut didukung melalui penyusunan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha yang berkaitan dengan persetujuan lingkungan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

f. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang aktif. Pada tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif sebesar 11,51%. Pencapaian target tersebut didukung melalui pendampingan kegiatan Program Kampung Iklim, pendampingan Kegiatan Program Sekolah Adiwiyata, pendampingan kegiatan Saka Kalpataru, Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan dan kampanye lingkungan hidup, serta kegiatan rehabilitasi lahan kritis dengan pelibatan masyarakat yang berada di sekitar lahan kritis.

g. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada tahun 2027 sasaran tersebut diukur melalui pencapaian Persentase penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat sebesar 100%. Pencapaian target tersebut

didukung melalui kegiatan Penilaian Program Kampung Iklim dan Penilaian Program Sekolah Adiwiyata.

h. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas penangamnan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan yang Ditangani dengan target sebesar 100%. Pencapaian target tersebut didukung melalui penerimaan, verifikasi, penelaahan, tindak lanjut, serta penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk koordinasi dengan instansi terkait dan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Program Pengelolaan Sampah diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya layanan penanganan dan pengurangan sampah. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Penanganan Sampah dengan target sebesar 69,91% dan Persentase Pengurangan Sampah dengan target sebesar 23,65%. Pencapaian target tersebut didukung melalui peningkatan layanan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang diarahkan pada transformasi menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), serta pengadaan lahan untuk mendukung pengembangan TPST. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mengarahkan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari *landfill* (pembuangan akhir) menuju pengolahan sampah terpadu. Selain itu, pengurangan sampah dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan penyediaan sarana dan prasarana pada bank sampah, serta penguatan kegiatan pemilahan dan pendaurulangan sampah di bank sampah, TPS3R, sebagai upaya mendukung terwujudnya ekonomi hijau dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Program ini juga mendukung prioritas nasional 2 mengenai pengendalian sampah.

6) ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital sebesar 99,93%. Pencapaian target tersebut didukung melalui kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Dalam meningkatkan capaian kinerja Program Pendaftaran Penduduk dilakukan layanan jemput bola melalui inovasi PANEN DUREN (Perekaman KTP-el Penduduk Rentan). PANEN DUREN merupakan pelayanan perekaman KTP elektronik dengan sasaran penduduk dengan keterbatasan mobilitas baik karena mengalami gangguan fisik, mental, jompo,

maupun keterbatasan lain. Layanan ini diutamakan untuk masyarakat rentan dalam rangka intervensi dalam pendataan kemiskinan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan capaian kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilakukan sosialisasi dan jemput bola ke desa/kelurahan, sekolah, dan tempat pelayanan umum lainnya.

b. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui pencapaian Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Digital sebesar 93,00%. Pencapaian target tersebut didukung melalui kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

c. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui pencapaian Persentase Desa/Kelurahan Pengguna yang Memanfaatkan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik sebesar 41%. Pencapaian target tersebut didukung melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

d. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas profil kependudukan. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui pencapaian Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku sebesar 100%. Pencapaian target tersebut didukung melalui kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

7) PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran:

1. **Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.** Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan desa sebesar 100,00%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan; Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa; Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa; Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; Fasilitasi Penyusunan Profil Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa termasuk untuk pelaksanaan pembayaran jaminan kesehatan bagi aparatur pemerintah desa serta jaminan ketenagakerjaan bagi BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Selain itu program ini juga berfokus pada peningkatan desa berkembang dan maju, serta pengembangan desa mandiri.

2. **Meningkatnya kerja sama desa.** Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Bumdesma Mandiri dan Kerja Sama Desa yang Aktif sebesar 20.47%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa.

b. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat sebesar 98,19%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut terdiri dari fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat atau fasilitasi TMMD, fasilitasi pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), pembinaan pasar desa, fasilitasi Tim Penggerak PKK, peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna.

8) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 sebesar 11,3 per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan

- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk terdiri dari Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat, Fasilitasi Koordinasi dan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas, Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota; dan
- Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Fasilitasi Pembentukan dan

Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB, Koordinasi Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, Fasilitasi Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga SIGA.

b. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)sebesar 69,09%, dan Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) sebesar 8,1%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan:

- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal terdiri dari Pelaksanaan Promosi dan KIE melalui media massa cetak, elektronik, media luar ruangan, Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan, Audit Kasus Stunting;
- Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) terdiri dari Fasilitasi Pelayanan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) / PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana);
- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Distribusi Alat Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan, Fasilitasi Peningkatan dan Pelayanan KB Pria, Fasilitasi Pelayanan KB MKJP.

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS). Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina sebesar 89,75%, Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reporduksi dan Perencanaan Keluarga sebesar 69,37%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan:

- Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri dari Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) dan Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga termasuk pemilihan serta fasilitasi Duta Genre.
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri dari

Pembinaan dan pengembangan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

9) PERHUBUNGAN

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten dengan indikator Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten sebesar 41,41%; Meningkatnya Penyelenggaraan Angkutan Umum, Terminal dan Titik Parkir yang Tersedia dengan indikator Persentase Angkutan Umum, Terminal dan Titik Parkir yang Tersedia sebesar 64,78%; serta Meningkatnya Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana dengan indikator Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana sebesar 95,28%.

Pencapaian target pada program ini didukung melalui kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan aktivitas penyediaan, rehabilitasi, dan pemeliharaan perlengkapan jalan (PJU, rambu, marka, *warning light*, APILL, dll); Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan aktivitas pengawasan, rehabilitasi, dan pemeliharaan Terminal Tipe C; Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan aktivitas pengelolaan parkir; Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan aktivitas registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor, penyediaan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, sosialisasi SOP pengujian berkala kendaraan bermotor, pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor, koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor; Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan aktivitas Pemeliharaan dan Operasional Perlintasan Sebidang, Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas, serta Forum Lalu Lintas; Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan aktivitas Pengawasan, Pelaksanaan, Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin; Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan aktivitas evaluasi jaringan trayek, pengendalian dan pengawasan angkutan, penyediaan bus mudik gratis; serta Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan aktivitas koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan umum.

10) KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui indikator Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebesar 64,00%.

Pencapaian target pada program ini didukung melalui kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan aktivitas pelaksanaan *Pers Conference*, Advertorial Berita/ Iklan di media massa cetak dan siber, pelayanan informasi publik, sosialisasi/diseminasi informasi, Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik (Pelaksanaan *Critical Voice Point*/CVP), Penyelenggaraan event *Kominfo Goes to Community, Kominfo Goes To Radio*, *Talk Show* Radio Kominfo Berirama, Pengelolaan Media Komunikasi Publik (LPPL Irama FM), bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), Penyusunan Konten/ *Podcast*.

b. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya jumlah aplikasi yang dibangun/ dikembangkan. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui indikator Persentase pembangunan/ pengembangan aplikasi sesuai dengan Peta Rencana SPBE sebesar 40%.

Pencapaian target pada program ini didukung melalui kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan aktivitas pelatihan pengelolaan sub domain desa, Pelaksanaan Layanan Pengelolaan Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Pembuatan, Updating dan Penghapusan Nama Domain); serta Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan aktivitas penyediaan layanan zoom meeting, koordinasi penyelenggaraan SPBE, fasilitasi penyelenggaraan audit TIK, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan *smart city, Penyediaan layanan Command Center,* Penyediaan layananan pemantauan kota, Penyediaan layanan informasi melalui videotron, penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, Penyediaan layanan pengembangan/pembangunan aplikasi, penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Daerah, sewa domain, hosting, dan IP publik. Program ini juga mendukung prioritas nasional 7 mengenai transformasi digital.

11) KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

a. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya koperasi dengan akuntabilitas baik. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Koperasi yang Memiliki

Akuntabilitas Baik dengan target sebesar 45,77%. Pencapaian target tersebut didukung melalui pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi guna meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta akuntabilitas pengelolaan koperasi. Selain itu juga dilakukan fasilitasi pembubaran koperasi yang tidak aktif sebagai upaya penataan kelembagaan koperasi. Program ini juga mendukung prioritas nasional 6 mengenai koperasi desa/ kelurahan merah putih.

b. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang sehat. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Koperasi Sehat dengan target sebesar 54,46%. Pencapaian target tersebut didukung melalui pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kabupaten, sebagai upaya meningkatkan tata kelola, kinerja usaha, dan kepatuhan koperasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya koperasi yang memiliki SDM yang berkompeten. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase SDM Koperasi yang Tersertifikasi dengan target sebesar 45,47%. Pencapaian target tersebut didukung melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kabupaten, pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi bagi pengurus dan pengelola koperasi. Selain itu, pelaksanaan program ini juga diarahkan untuk mendukung implementasi Program Prioritas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi.

d. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya perkembangan usaha koperasi. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Koperasi Aktif yang Berkembang Usahanya dengan target sebesar 5,28%. Pencapaian target tersebut didukung melalui pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah kabupaten, pemberian hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Purworejo untuk memperkuat pembinaan dan pengembangan koperasi, serta fasilitasi permodalan dan kemitraan bagi koperasi, termasuk pemberdayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), sebagai bagian dari dukungan terhadap implementasi Program Prioritas Nasional dalam penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi.

e. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya UMKM yang berkualitas dilihat pada aspek kelembagaan, legalitas, dan kemitraan. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase UMKM yang Berkualitas dengan target sebesar 13,97%. Pencapaian target tersebut didukung melalui fasilitasi integrasi basis data tunggal UMKM, fasilitasi perizinan berusaha bagi usaha mikro, verifikasi dan monitoring pemberian rekomendasi BBM bagi pelaku usaha, pembentukan klaster UMKM, pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro, serta pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL). Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan legalitas usaha, memperluas kemitraan, dan meningkatkan daya saing UMKM di Kabupaten Purworejo.

f. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Program Pengembangan UMKM diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya UMKM yang mengalami peningkatan usaha pada aspek jumlah tenaga kerja, penjualan produk, dan area pemasaran. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase UMKM yang Mengalami Peningkatan Usaha dengan target sebesar 2,32%. Pencapaian target tersebut didukung melalui optimalisasi peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) dalam penyelenggaraan inkubasi bisnis, layanan konsultasi dan pendampingan usaha, pelatihan manajerial, pelatihan vokasional, serta PLUT Academy sebagai upaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, memperluas akses pasar, meningkatkan nilai penjualan, dan mendorong penyerapan tenaga kerja.

12) PENANAMAN MODAL

a. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Penyediaan Informasi Potensi Penanaman Modal yang Siap Dipublikasikan dengan target sebesar 100%. Pencapaian target tersebut didukung melalui penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten Purworejo yang memuat potensi dan peluang investasi sesuai dengan karakteristik serta keunggulan daerah, yang dilanjutkan dengan penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) sebagai dokumen proyek investasi yang siap dipromosikan dan ditawarkan kepada calon investor. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi investasi, memperkuat promosi potensi daerah, serta mendorong peningkatan minat dan realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo.

b. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program Promosi Penanaman Modal diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Jumlah kepeminatan (LOI) dengan target sebesar 9 LOI. Pencapaian target tersebut didukung melalui penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, pelaksanaan temu investor, serta promosi potensi dan peluang investasi Kabupaten Purworejo melalui berbagai media dan forum investasi. Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas jangkauan promosi investasi, meningkatkan minat calon investor, dan mendorong realisasi penanaman modal di Kabupaten Purworejo.

c. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Program Pelayanan Penanaman Modal diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas layanan penanaman modal sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dengan target sebesar 100%. Pencapaian target tersebut didukung melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha secara terpadu satu pintu sesuai kewenangan pemerintah kabupaten serta penyediaan layanan perizinan berusaha berbasis risiko.

d. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Tingkat Kepatuhan Pelaporan LKPM dengan target sebesar 79,20%. Pencapaian target tersebut didukung melalui kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait penyampaian LKPM, serta kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal.

e. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan dengan target sebesar 100%. Pencapaian target tersebut didukung melalui pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten, optimalisasi pemanfaatan OSS dan Si-Ida, serta penyediaan data dan informasi penanaman modal yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi guna mendukung pelayanan perizinan, pengambilan kebijakan, dan promosi penanaman modal.

13) KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya daya saing kepemudaan. Pada tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian indikator Persentase Pemuda Berprestasi sebesar 7,40% yang diwujudkan melalui penguatan organisasi kepemudaan, latihan dasar kepemimpinan, pemilihan pemuda pelopor, seleksi jambore pemuda, pengembangan kepemimpinan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, penguatan wirausaha pemuda, dan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan.

b. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Persentase Organisasi Olahraga yang Aktif dengan target sebesar 100%. Pencapaian target tersebut didukung melalui penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB), pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi, pelaksanaan olahraga rekreasi masyarakat, fasilitasi partisipasi atlet dalam berbagai kejuaraan, fasilitasi pembinaan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), pemberian hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Purworejo, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi kelompok masyarakat, serta rehabilitasi, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas olahraga termasuk GOR Butuh dan GOR Sarwo Edhie Wibowo.

c. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kapasitas kepramukaan. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase organisasi kepramukaan yang aktif sebesar 100% yang diwujudkan melalui pemberian hibah kepada Kwarcab Kabupaten Purworejo dan pendampingan kepada organisasi kepramukaan.

14) STATISTIK

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui indikator Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%.

Pencapaian target pada program ini didukung melalui kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan aktivitas pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam Sistem Statistik Nasional, peningkatan kualitas statistik sektoral, koordinasi penyusunan data statistik sektoral dan geospasial, serta penyelenggaraan Forum Satu Data.

15) PERSANDIAN

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya keamanan informasi pemerintah. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah sebesar 87,91%. Pencapaian target pada program ini didukung melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan aktivitas pengelolaan sumber daya keamanan informasi dan persandian Pemerintah Daerah, penyediaan layanan keamanan informasi dan persandian Pemerintah Daerah, dan penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan persandian Pemerintah Daerah (Audit dan Sertifikasi ISO atau Re-Sertifikasi ISO serta Konsultasi dan Bimbingan Sertifikasi ISO se-Kabupaten).

16) KEBUDAYAAN

a. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan sebesar 80,00%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan:

- Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kajian dan pengusulan WBTB, operasional Gedung Kesenian, Pentas Kesenian Tradisional, Pembinaan grup kesenian, dan Rintisan Sekolah Budaya; dan
- Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari fasilitasi Dewan Kesenian Purworejo, Fasilitasi Pepadi.

b. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir sebesar 88,09%. Pencapaian target pada program didukung melalui Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari pelatihan senin tradisional.

c. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Keterlibatan Masyarakat Pelaku Sejarah Lokal sebesar 7,25%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari pelaksanaan Grebeg Budaya dan Jumenengan.

d. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu sebesar 35,56%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota; dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari pelindungan dan pemanfaatan Cagar Budaya termasuk direncanakan untuk pelindungan terhadap situs Bhumi Perdikan Kayu Arahiwang.

e. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya tata kelola museum. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Peningkatan Kunjungan Museum sebesar 2%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu, Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Tosan Aji, Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Museum Tosan Aji.

17) PERPUSTAKAAN

a. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Terwujudnya perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi sebesar 11,7%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan:
- Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari pemeliharaan gedung dan sarpras perpustakaan, pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca, pendampingan Duta Baca dan Bunda Literasi, pengembangan literasi berbasis inklusi sosial, safari perpustakaan dan sosialisasi budaya baca;
- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar, pembinaan perpustakaan umum dan khusus, pengadaan dan pengelolaan bahan pustaka, pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik, layanan perpustakaan keliling dan menetap, pengambangan perpustakaan, peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan, penyusunan data dan informasi perpustakaan.

b. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Terlaksananya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan sebesar 36,84%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan

Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno.

18) KEARSIPAN

a. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip sesuai Kaidah Kearsipan dengan Kategori Cukup sebesar 41,86%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota; dan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota.

b. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah sebesar 66,99%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota; Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun; Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

5.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1) KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Produksi Perikanan Tangkap dengan target sebesar 178,20 ton. Pencapaian target tersebut didukung melalui fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan, penyelenggaraan pelayanan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), peningkatan kapasitas nelayan kecil, koordinasi, validasi, dan pelaporan data perikanan tangkap, koordinasi dan *sampling* data produksi perikanan tangkap, serta penyusunan data dan informasi perikanan tangkap.

b. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya. Di tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui Produksi Perikanan Budidaya dengan target sebesar 4.373,00 ton. Pencapaian target didukung melalui pemberian rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya, serta penyaluran hibah benih ikan kepada

kelompok pembudidaya ikan guna meningkatkan produktivitas usaha budidaya.

c. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diperiksa atau diawasi. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa atau Diawasi dengan target sebesar 100%. Pencapaian target didukung melalui pelaksanaan pengawasan terhadap usaha penangkapan ikan, usaha pembudidayaan ikan, usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta kegiatan ekstraksi garam guna memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar 258,56 ton yang didukung melalui penyediaan data usaha pengolahan dan pemasaran hasul perikanan, pembinaan penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta kampanye gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) guna mendorong peningkatan konsumsi ikan dan memperkuat pemasaran hasil perikanan.

2) PARIWISATA

a. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dengan target sebanyak 1.137.000 orang dan Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara sebanyak 289 orang. Pencapaian target didukung melalui operasional destinasi wisata yang dikelola Pemerintah Daerah, yaitu Kolam Renang Arta Tirta, Pantai Dewa Ruci, Goa Seplawan, Geger Menjangan, serta pemeliharaan Alun-alun Purworejo dan Alun-alun Kutoarjo. Adapun alokasi anggaran untuk pemeliharaan hotel dan Ganeca Convention Hall akan disesuaikan melihat perkembangan proses pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaan (KSP). Selain itu, pada tahun 2027 juga direncanakan kegiatan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). Pengembangan desa wisata direncanakan melalui kegiatan pendampingan dan peningkatan kesiapan desa wisata, termasuk dalam rangka mewujudkan desa wisata ramah muslim sebagai implementasi program delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta monitoring pengelolaan desa wisata dan monitoring pelaku usaha sektor pariwisata.

b. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas layanan pemasaran pariwisata Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Layanan Pemasaran Pariwisata sebesar 33%. Pencapaian target didukung melalui penyelenggaraan berbagai event pariwisata, antara lain Festival Layang-layang, Gumebyar Taun Anyar, dan Purworejo Spektakuler. Selain itu, dilakukan penyusunan dan penyebarluasan materi promosi wisata, pengumpulan data event pariwisata, pengiriman delegasi Mas dan Mbak Jawa Tengah, serta promosi pariwisata melalui media cetak, media elektronik, dan berbagai media lainnya, baik di dalam maupun di luar daerah.

c. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya fasilitasi sub sektor ekonomi kreatif. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual sebesar 21,43%. Pencapaian target didukung melalui pembinaan dan pendampingan sertifikasi kekayaan intelektual pada pelaku ekraf dan pengiriman delegasi untuk mengikuti pameran ekonomi kreatif.

d. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya sebesar 96%. Pencapaian target tersebut didukung melalui kegiatan pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata, dan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata.

3) PERTANIAN

a. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran:

1) Meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis yang diukur melalui indikator a) Jumlah Produksi Padi sebesar 393.536,67 ton/tahun. b) Jumlah Produksi Jagung sebesar 6.694,66 ton/tahun. c) Jumlah Produksi Cabai sebesar 3.290,27 ton/tahun. d) Jumlah Produksi Durian sebesar 5.924,13 ton/tahun. e) Jumlah Produksi Biofarmaka sebesar 4.497,74 ton/tahun. f) Jumlah Produksi Kelapa sebesar 37.194,36 ton/tahun. g) Jumlah Produksi Kopi sebesar 166,88 ton/tahun. h) Jumlah Produksi Tembakau sebesar 296,82 ton/tahun. Pencapaian target produksi komoditas pertanian strategis didukung melalui fasilitasi penyediaan sarana

pertanian, pelatihan, pembinaan, dan evaluasi Unit Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA), sertifikasi padi organik, penyaluran hibah bibit tanaman kepada kelompok tani yang meliputi tanaman hortikultura, kopi dan jeruk purut, penyediaan sarana usaha tani tembakau, serta penjaminan kemurnian Sumber Daya Genetik (SDG) tembakau.

2) Meningkatnya populasi ternak dengan indikator Jumlah Populasi Ternak sebesar 122.680,61 ST/tahun. Pencapaian target tersebut didukung melalui penyaluran hibah ternak kepada kelompok tani, meliputi Kambing Kaligesing, Kambing Jawarandu, domba, dan sapi, serta pelayanan inseminasi buatan. Program ini juga mendukung prioritas nasional 2 mengenai peningkatan produksi daging, susu, dan telur.

b. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kemanfaatan prasarana pertanian yang disediakan. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian sebesar 100%. Pencapaian target pada program ini melalui pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani dan penanggulangan penyakit ternak yang dispesifikkan pada Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing dan Penyusunan Dokumen Updating Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

c. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Penurunan kasus penyakit hewan menular strategis dengan target sebesar 288 Kasus. Pencapaian target pada program ini diwujudkan melalui aktivitas berupa pengawasan bahan pangan asal hewan, pengujian bahan pangan asal hewan, layanan kesehatan hewan, pelatihan kader zoonosis, surveilans penyakit hewan, dan pelatihan juru sembelih halal sebagai implementasi program delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

d. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Fasilitasi Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar 100%. Pencapaian target pada program ini diwujudkan melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu, gerakan pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT) dan penyaluran hibah rumah burung hantu kepada kelompok tani sebagai salah satu upaya pengendalian hama secara alami di kawasan pertanian.

e. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan kapasitas kelompok tani. Pada tahun 2027, sasaran program tersebut diukur melalui Persentase Penerapan Teknologi Pertanian sebesar 24,00% dan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dengan target sebesar 260 Skor. Pencapaian target didukung melalui fasilitasi Komisi Penyuluhan, pembinaan kelompok ekonomi petani, penilaian kelas kelompok tani, pembinaan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), penyelenggaraan sekolah lapang, serta penyusunan programa penyuluhan bagi penyuluh pertanian di 16 Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan di Purworejo sebagai acuan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang disusun berdasarkan kebutuhan petani dan mendukung penerapan pertanian cerdas iklim guna meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan keberlanjutan usaha pertanian. Selain itu, program ini juga didukung melalui penyelenggaraan Festival Tembakau dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

4) PERDAGANGAN

a. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pasar rakyat yang memenuhi indikator pasar ber-SNI. Pada tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Pasar Rakyat menuju Ber-SNI dengan target 12,90% yang didukung melalui pemeliharaan dan operasional 31 pasar daerah, monitoring dan evaluasi pengelolaan pasar daerah, dan pembinaan pengelola pasar daerah. Sementara itu, rencana pembangunan Pasar Kutoarjo pada tahun 2027 direncanakan menggunakan skema pinjaman daerah. Pembangunan Pasar Kutoarjo akan dialokasikan mendasari hasil proses persetujuan pinjaman oleh DPRD, kesiapan dokumen perencanaan yang pada tahun 2026 sedang disusun, meliputi *feasibility study* (FS), *detail engineering design* (DED), dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta mempertimbangkan progres pengakhiran kerja sama dengan PT Karsa Bayu Bangun Perkasa. Selain itu, debagai bagian dari tahapan pelaksanaan pembangunan Pasar Kutoarjo, pada tahun 2027 juga direncanakan pembangunan pasar darurat sebagai lokasi relokasi sementara bagi pedagang selama proses pembangunan pasar utama berlangsung. Penyediaan pasar darurat dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas perdagangan, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi terhadap pedagang, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan selama masa konstruksi.

b. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta terjaminnya distribusi pupuk bersubsidi sampai dengan Kios pupuk lengkap. Pada tahun 2027, sasaran tersebut diukur melalui indikator Disparitas Harga dengan target sebesar ±10% dan Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi sampai dengan Kios Pupuk Lengkap sebesar 94,47%. Pencapaian target tersebut didukung melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan serta peningkatan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), monitoring penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi, pelaksanaan operasi pasar, pemantauan harga dan stok bapokting, pembinaan pelaku usaha distribusi bapokting, pembinaan pelaku usaha distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi, serta pembinaan petugas pemantau harga, stok, dan pelaku usaha bapokting.

c. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang. Sasaran tersebut diukur melalui Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang sebesar 2% pada tahun 2027. Pencapaian target tersebut didukung melalui aktivitas turut serta dalam penyelenggaraan pameran dagang lokal yaitu Purworejo Expo, dan Pameran Gebyar UMKM (Hari UMKM Nasional).

d. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku sebesar 100%. Pencapaian target tersebut didukung melalui pelayanan tera/tera ulang pada alat UTTP, verifikasi peralatan standar tera/tera ulang UTTP, sosialisasi dan pengawasan metrologi legal.

e. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya omzet pelaku usaha yang dipromosikan penggunaan produk dalam negeri. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase peningkatan omzet pelaku usaha yang dipromosikan sebesar 2%. Program ini diwujudkan melalui aktivitas promosi penggunakan produk dalam negeri melalui iklan digital dan melibatkan konten kreator lokal, *business matching* pada produk unggulan, dan koordinasi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Purworejo.

5) PERINDUSTRIAN

a. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya produktivitas IKM tiap tahunnya. Di tahun 2027 program ini

ditargetkan untuk pencapaian Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah sebesar 8,40%. Pencapaian target tersebut didukung melalui pelatihan pelintingan dan *blending* rokok serta *workshop* pelaporan data produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Selain itu, dilakukan fasilitasi Rumah Kemasan, penguatan IKM kopi yang terintegrasi dengan Rumah Kopi Purworejo, peningkatan kapasitas IKM unggulan pada industri gula kelapa dan industri pengolahan ketela, penguatan industri bambu, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam negeri melalui optimalisasi peran Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Program ini juga mendukung prioritas nasional 2 mengenai hilirisasi industri.

b. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya layanan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan sebesar 100%.

c. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya tingkat kepatuhan pelaporan informasi industri. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri sebesar 40,34% yang dilaksanakan melalui pendampingan pelaporan data produksi industri pada aplikasi SIINAS dan pendataan industri melalui aplikasi Sistem Informasi Pendataan Industri Terintegrasi (SIPIT).

6) TRANSMIGRASI

a. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya pelaksanaan penempatan transmigran. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase penempatan transmigran sebesar 100%. Pencapaian target tersebut didukung melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi, pembekalan calon transmigran, pemindahan dan penempatan transmigran, serta pendampingan proses penempatan transmigran di lokasi tujuan.

5.2.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

A. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) SEKRETARIAT DAERAH

a. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas produk hukum daerah, Meningkatnya kualitas kebijakan tata pemerintahan dan kerja sama daerah, dan Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2027, program

ini ditargetkan untuk pencapaian Indeks Reformasi Hukum 97,06, Persentase Pelaksanaan administrasi tata pemerintahan dan kerjasama 100%, dan Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; Administrasi Tata Pemerintahan; Fasilitasi Kerjasama Daerah; dan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Program ini juga mendukung prioritas nasional 4 mengenai fasilitasi satuan tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) daerah.

b. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan administrasi pembangunan daerah, Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan barang dan jasa, dan Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan sumber daya alam. Pada tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja sesuai Target sebesar 100%. Indeks Tata Kelola Pengadaan sebesar 72,50; Persentase Kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebesar 100%, Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB sebesar 5,38%, Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB sebesar 5,92%, dan Return on Asset (ROA) BUMD sebesar 5,78%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

2) SEKRETARIAT DPRD

a. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan dan Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun n sebesar 100%; Persentase Penetapan Raperda Tahun n sebesar 100%, dan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Pembahasan Kebijakan Anggaran; Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan; Peningkatan Kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; dan Fasilitasi Tugas DPRD.

B. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) PERENCANAAN

a. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah 100%. Pencapaian

target pada program didukung melalui kegiatan Kegiatan pada program ini diarahkan pada Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah.

b. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia dan Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan. Pada tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 100% dan Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2) KEUANGAN

a. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya tata kelola anggaran daerah, Meningkatnya tata kelola perbendaharaan daerah, dan Meningkatnya tata kelola akutansi daerah. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD 100%, Tertib Pengelolaan Kas Daerah 100%, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 100%, Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan 100%, dan Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah. Pada Tahun 2027, selain pelaksanaan kegiatan rutin pengelolaan keuangan daerah, direncanakan pengaktifan Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan pemanfaatan skema pinjaman daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Pengaktifan sub kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap rencana pinjaman daerah didukung oleh analisis kemampuan

keuangan daerah, proyeksi kapasitas fiskal, perhitungan kemampuan pengembalian pinjaman, serta perencanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga secara berkelanjutan.

b. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya tata kelola aset daerah. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah dan Meningkatnya tata kelola pajak daerah. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian pencapaian Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 100% dan Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah.

3) KEPEGAWAIAN

a. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian dan Meningkatnya tata kelola pengembangan karir dan kompetensi ASN. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Pegawai Yang Dipetakan Kompetensinya 100%, Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Dengan Kompetensinya 95,50%, Persentase ASN Berkinerja Baik 97,60%, dan Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Mutasi dan Promosi ASN; Pengembangan Kompetensi ASN; dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

4) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya layanan pengembangan komperensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase ASN Yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional 100% dan Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi teknis 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis; dan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

5) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan HKI dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk peningkatan Persentase hasil riset

yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan sebesar 50%, Tingkat Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual 3,21%, dan Jumlah inovasi yang dimiliki daerah 235 inovasi. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dan Invensi dan Inovasi.

C. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) INSPEKTORAT DAERAH

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan, Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat, Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi, dan Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebesar 83,30%, Persentase Laporan Pengawasan bidang pemerintah dan aparatur yang Diterbitkan 100%, Persentase Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diterbitkan sebesar 100% dan Persentase Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Diterbitkan 100%, Persentase Laporan Pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang Diterbitkan 100%, dan Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat berkadar pengawasan 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. APIP sebagai penjamin kualitas dan pendampingan bagi perangkat daerah dalam proses perencanaan hingga evaluasi, optimalisasi aktivitas pencegahan korupsi dan manajemen risiko di pemerintah kabupaten Purworejo.

b. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas kebijakan teknik dan fasilitasi pengawasan, Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Kebijakan Teknis dan Fasilitasi Pengawasan yang Ditetapkan 100% dan Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur 100%, Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat 100%, Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan 100%, dan

Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi 100%. Pencapaian target pada program didukung melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan Pendampingan dan Asistensi.

D. Unsur Kewilayahan

1) KECAMATAN

a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian indikator Persentase Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar 100%.

Pencapaian target pada program ini didukung melalui kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum; serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat. Aktivitas pada program ini diarahkan pada Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum); operasional pelayanan administrasi kependudukan (PATEN); serta monitoring pembangunan; Monitoring PBB.

b. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian indikator Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan sebesar 100%.

Pencapaian target pada program ini didukung melalui kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan. Aktivitas pada program ini diarahkan pada penyelenggaraan Musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan; serta Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi fasilitasi PKK, Karang Taruna, UMKM, Bumdes/Bumdesma, disabilitas, Kecamatan Layak Anak (KLA), Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), Satgas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Kecamatan Berdaya.

c. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian indikator Persentase

Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 100%.

Pencapaian target pada program ini didukung melalui kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum; serta Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Aktivitas pada program ini diarahkan pada Fasilitasi penyelenggaraan hari besar dan hari raya; serta Monev Penegakan Perda.

d. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian indikator Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 100%.

Pencapaian target pada program ini didukung melalui kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. Aktivitas pada program ini diarahkan pada Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam); Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval, dan Paskibraka; serta pelaksanaan Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi terkait wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.

e. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian indikator Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar 100%.

Pencapaian target pada program ini didukung melalui kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Aktivitas pada program ini diarahkan pada Fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades; Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa (Konferensi Kades dan Sekdes); Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades); Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Fasilitasi seleksi Perangkat Desa; Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan partisipatif; serta Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.

E. Unsur Pemerintahan Umum

1) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

a. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target 0,70%. Pencapaian target pada program

ini didukung melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

b. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatanya etika dan budaya politik. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik dengan target 3,16%. Pencapaian target pada program ini didukung melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

c. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif dengan target 30%. Pencapaian target pada program ini didukung melalui Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

d. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Peningkatan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya di Wilayah sebesar 100%. Pencapaian target pada program ini didukung melalui Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

e. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Program ini diarahkan untuk mencapai sasaran Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Konflik Sosial yang Ditangani dengan target 100 %. Pencapaian target pada program ini didukung melalui Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

F. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pada program ini diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah; Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Penataan Organisasi; Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan; Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD; dan Layanan Administrasi DPRD. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah sebesar 100% yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah.

Kegiatan pada program juga ini diarahkan pada peningkatan pelayanan BLUD. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BLUD Bidang Kesehatan sebesar 85,00%. Program ini diwujudkan melalui peningkatan pelayanan BLUD yang dilaksanakan oleh RSUD Tjitrowardojo, RSUD Tjokronegoro, dan seluruh Puskesmas di Kabupaten Purworejo.

Disamping itu, untuk Sekretariat Daerah, kegiatan pada program ini diarahkan pada Penataan Organisasi, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Di tahun 2027, program ini ditargetkan untuk pencapaian Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Minimal 88,31 sebesar 60% dan Rata-rata nilai Sakip Perangkat Daerah sebesar 70,45.

Berikut rencana program dalam pagu indikatif dalam RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Target dan Pagu Indikatif Program Prioritas Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2027

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sesuai standar	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	%	78,39	126.028.820.831	Dindikbud
				Meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan seluruh jenjang	Persentase satuan pendidikan yang memiliki kualitas pembelajaran dengan kategori baik	%	61,96		Dindikbud
				Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan	Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi	%	68,08		Dindikbud

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				tenaga kependidikan di seluruh jenjang	Pendidikan Terakhir S-1/ D-IV dan Bersertifikat Pendidik di Seluruh Jenjang				
					Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	56,72		Dindikbud
2	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan	Persentase satuan pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal yang telah ditetapkan	%	15,54	13.560.000	Dindikbud
3	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi,	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat yang Berizin	%	100	4.808.100	Dindikbud

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat								
4	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya penggunaan bahasa daerah	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan dan menerapkan pembiasaan penggunaan bahasa jawa	%	87,22	205.676.200	Dindikbud
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
5	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	51,85	112.705.781.538	Dinkesda
					Cakupan Kepesertaan	%	99,65		Dinkesda

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Jaminan Kesehatan Nasiona				
				Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate	%	90,63		Dinkesda
					Neglected Tropical Diseases (NTDs)	%	96,2		Dinkesda
					Angka Kematian Dengue	%	0,3		Dinkesda
					Annual Parasite Incidence (API)	Per 1.000 penduduk	0,01		Dinkesda
					Persentase Diabetes Melitus Terkendali	%	37		Dinkesda
					Insiden HIV	Per 1.000 penduduk	0,092		Dinkesda
					Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	96		Dinkesda
					Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	%	67		Dinkesda
					Persentase Hipertensi terkendali	%	5,67		Dinkesda
				Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	5		Dinkesda
					Jumlah Kematian Balita	Kasus	81		Dinkesda
					Persentase Puskesmas dengan	%	55,56		Dinkesda

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Peningkatan Aktifitas Fisik				
					Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	%	85		Dinkesda
					Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	65		Dinkesda
					Prevalensi Obesitas	%	21,5		Dinkesda
					Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	%	10,4		Dinkesda
					Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	%	1,7		Dinkesda
				Tersedianya data dan sistem informasi kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100		Dinkesda
6	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tersedianya SDM kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi	Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	Per 1.000 penduduk	5,3	1.583.771.160	Dinkesda
7	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN	Tersedianya obat, alat kesehatan dan optikal serta	Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta	%	97	442.342.600	Dinkesda

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	MAKANAN MINUMAN	makanan yang aman dan bermutu	Makanan yang Aman dan Bermutu				
					Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	90,0		Dinkesda
8	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terwujudnya desa siaga aktif mandiri	Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	%	49,59	2.595.454.200	Dinkesda
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN						

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			UMUM DAN PENATAAN RUANG						
9	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	%	69,17	9.542.896.600	DPUPR
					Persentase Ketersediaan Dokumen Daerah Irigasi	%	87,5		DPUPR
					Persentase Kondisi Kelembagaan Pengelola Irigasi	%	56,65		DPUPR
10	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatknya ruma tangga dengan akses air minum aman	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	%	31,61	2.098.051.000	DPUPR
11	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh layanan	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan	%	95,31	8.681.472.000	DPUPR

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Konektivitas Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah	SISTEM AIR LIMBAH	pengolahan air limbah domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik				
12	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persentase Drainase Jalan di Perkotaan dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	%	31,73	2.850.000.000	DPUPR
13	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya bangunan gedung dengan kondisi baik	Persentase Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	%	88,69	6.390.000.000	DPUPR
14	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	17,81	131.420.607.278	DPUPR

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah							
15	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	%	100	130.000.000	DPUPR
16	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kinerja penyusunan dokumen RTR, meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR dan terselenggaranya pengenaan sanksi administrati terhadap pelanggaran tata ruang	Persentase Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)	%	66,67	642.000.000	DPUPR
					Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	%	91,91		DPUPR

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Persentase Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tata Ruang	%	37,5		DPUPR
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
17	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya kinerja pengembangan perumahan	Persentase Peningkatan Kinerja Pengembangan Perumahan	%	100	276.928.700	Dinperkim-tan
18	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangan	Persentase Luas Kawasan Kumuh 0-10 Ha yang Ditangani	%	95,27	888.957.254	Dinperkim-tan
19	Pembangunan, rehabilitasi, dan	Sasaran 2:	PROGRAM PERUMAHAN DAN	Meningkatnya rumah tidak layak	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	96,02	529.707.000	Dinperkim-tan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah	KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	huni yang ditangani	(RTLH) yang Ditangani				
20	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya perumahan yang dilengkapi demgan prasarana, sarana dan utilitas umum	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Diserahkan	%	74,29	387.660.160	Dinperkim-tan
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
21	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban,	Persentase Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	2.622.317.031	Satpol PP Damkar

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi		Ketentraman, Keindahan)					
				Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	100		Satpol PP Damkar
22	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indikator: Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan non kebakara	Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap	%	77	796.127.931	Satpol PP Damkar
					Persentase Pelayanan Non Kebakaran	%	100		Satpol PP Damkar
23	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indikator: Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya layanan pencengahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase layanan penanganan pra bencana	%	100	4.621.006.725	BPBD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase layanan penanganan saat terjadi bencana	%	100		BPBD
				Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase layanan penanganan pasca benca na	%	100		BPBD
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
24	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	%	18,00	21.259.000	DINSOS-DALDUKKB
25	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi,	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	%	100	1.498.700	DINSOS-DALDUKKB

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat								
26	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	%	5,5	216.012.100	DINSOS-DALDUKKB
27	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	99,53	1.639.902.300	DINSOS-DALDUKKB
28	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator:	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Saat dan Pasca Bencana	%	100	136.196.900	DINSOS-DALDUKKB

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia							
29	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai Standar	%	65	76.923.600	DINSOS-DALDUKKB
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
30	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya pemanfaatan rencana tenaga kerja yang disusun	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	%	100	13.009.400	Dinperin-transnaker

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka							
31	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi	%	88,60	1.351.045.133	Dinperin-transnaker
					Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	%	9,38		Dinperin-transnaker
32	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	%	67,96	95.749.100	Dinperintransnaker
33	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya sarana hubungan industrial dan syarat kerja	Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	%	57,34	593.177.900	Dinperintransnaker

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka							
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
34	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembanguna	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Kabupaten	%	14,2	303.712.000	DPPPAPMD
35	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani	%	100	381.737.000	DPPPAPMD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
36	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga	Hasil Penilaian PUSPAGA	Angka	230	17.101.100	DPPPAPMD
37	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensi	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	61,78	125.857.200	DPPPAPMD
38	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi,	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	69,60	231.251.000	DPPPAPMD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
39	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya rasio lumbung pangan yang aktif	Rasio Lumbung Pangan Aktif	%	41,18	24.957.200	DKPP
40	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein	Angka Kecukupan Energi	Kkal/ Kapita/ Hari	1900	653.853.600	DKPP
					Angka Kecukupan Protein	Gram/ Kapita/ Hari	56,1		DKPP
41	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya penanganan desa rentan rawan pangan	Persentase penanganan desa rentan rawan pangan	%	19,85	125.172.800	DKPP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Indikator: Indeks Ketahanan Pangan (IKP)							
42	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pangan segar aman asal tumbuhan	Persentase Pangan Segar Aman	%	100	79.000.000	DKPP
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
43	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan	Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	%	60	118.793.920	Dinperkim-tan
44	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA	Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	%	60	16.253.000	Dinperkim-tan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pertumbuhan ekonomi	Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah							
45	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Meningkatnya permohonan izin membuka tanah negara yang disetujui	Persentase Permohonanan Izin Membuka Tanah Negara yang Disetujui	%	60	170.381.920	Dinperkim-tan
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
46	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indikator: Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100	249.999.911	DLHP
47	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran yang Dilaksanakan	%	92,33	651.785.335	DLHP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pertumbuhan ekonomi hijau	Penanggulangan Bencana Indikator: Indeks Risiko Bencana							
48	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indikator: Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya proporsi luasan ruang terbuka hijau perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan	%	7,234	4.644.555.150	DLHP
49	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indikator: Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun	Persentase Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Dilaksanakan	%	73	16.437.000	DLHP
50	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indikator: Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan	Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dalam Pemenuhan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	%	76	83.954.000	DLHP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
51	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indikator: Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang aktif	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif	%	11,51	199.529.100	DLHP
52	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indikator: Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup kepada masyaraka	Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	%	100	60.000.000	DLHP
53	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indikator: Indeks Risiko Bencana	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan yang Ditangani	%	100	9.070.300	DLHP
54	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung	Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Daerah dalam	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya layanan penanganan dan pengurangan sampah	Persentase Penanganan Sampah	%	69,91	10.071.114.432	DLHP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pertumbuhan ekonomi hijau	Penanggulangan Bencana Indikator: Indeks Risiko Bencana							
					Persentase Pengurangan Sampah	%	23,65		DLHP
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
55	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital	%	99,93	882.886.600	Disdukcapil
56	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Digital	%	93	46.271.400	Disdukcapil

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi							
57	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Desa dan Kelurahan Pengguna yang Memanfaatkan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	%	41	209.127.100	Disdukcapil
58	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku	%	100	5.296.800	Disdukcapil

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	berwawasan lingkungan								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
59	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase Desa yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa	%	100	7.003.166.100	DPPPAPMD
				Meningkatnya kerja sama desa	Persentase Bumdesma Mandiri dan Kerja Sama Desa yang Aktif	%	20,47		DPPPAPMD
60	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	98,19	3.141.779.800	DPPPAPMD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	inklusifitas sosial masyarakat	Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi							
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
61	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19	per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun	11,3	486.905.000	DINSOS-DALDUKKB
62	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	%	69,09	1.963.527.400	DINSOS-DALDUKKB

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need	%	8,1		DINSOS-DALDUKKB
63	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	%	90,75	3.967.800.000	DINSOS-DALDUKKB
					Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reporduksi dan Perencanaan Keluarga	%	70,50		DINSOS-DALDUKKB
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
64	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat	Sasaran 2: Meningkatnya Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	41,41	15.411.645.972	Dinhub

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	Infrastruktur Wilayah Indikator: Indeks Infrastruktur Daerah							
				Meningkatnya Penyelenggaraan Angkutan Umum, Terminal dan Titik Parkir yang Tersedia	Persentase Angkutan Umum, Terminal, dan Titik Parkir yang Tersedia	%	64,78		Dinhub
				Meningkatnya Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana	Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana	%	95,28		Dinhub
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
65	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	64	1.169.282.633	Dinkominfostasandi

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	berwawasan lingkungan								
66	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya jumlah aplikasi yang dibangun/ dikembangkan	Persentase pembangunan/ pengembangan aplikasi sesuai dengan Peta Rencana SPBE	%	40	2.880.511.900	Dinkominfostasandi
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
67	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi dengan akuntabilitas baik	Persentase Koperasi yang Memiliki Akuntabilitas Baik	%	45,77	15.927.200	DKUKMP
68	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan	Sasaran 4:	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN	Meningkatnya koperasi seha	Persentase Koperasi Sehat	%	54,46	35.567.500	DKUKMP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	KSP/USP KOPERASI						
69	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya koperasi yang memiliki SDM yang berkompeten	Persentase SDM Koperasi yang Tersertifikasi	%	45,47	100.198.100	DKUKMP
70	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya perkembangan usaha koperasi	Persentase Koperasi Aktif yang Berkembang Usahanya	%	5,28	133.812.700	DKUKMP
71	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya UMKM yang berkualitas dilihat pada aspek kelembagaan, legalitas, dan kemitraan	Persentase UMKM yang Berkualitas	%	13,97	200.000.000	DKUKMP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pertumbuhan ekonomi								
72	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya UMKM yang mengalami peningkatan usaha pada aspek jumlah tenaga kerja, penjualan produk, dan area pemasaran	Persentase UMKM yang mengalami Peningkatan Usaha	%	2,32	661.983.800	DKUKMP
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
73	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan	Persentase Penyediaan Informasi Potensi Penanaman Modal yang Siap Dipublikasikan	%	100	110.761.100	DPMPTSP
74	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Jumlah kepeminatan (LOI)	LOI	9	165.585.000	DPMPTSP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pertumbuhan ekonomi								
75	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas layanan penanaman modal sesuai norma, standar prosedur dan kriteria	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	%	100	167.388.400	DPMPTSP
76	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM	Tingkat Kepatuhan Pelaporan LKPM	%	79,2	153.222.808	DPMPTSP
77	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Disediakan	%	100	20.837.300	DPMPTSP
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
78	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda Berprestasi	%	7,4	277.019.599	Dinporapar
79	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Organisasi Keolahragaan yang Aktif	%	100	6.853.691.000	Dinporapar
80	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kapasitas kepramukaan	Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif	%	100	361.841.000	Dinporapar

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
81	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	63.780.000	Dinkomin-fostasandi
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
82	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien.	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	87,91	1.352.522.000	Dinkomin-fostasandi

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi							
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
83	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	%	80	2.341.611.900	Dindikbud
84	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%	88,09	71.296.500	Dindikbud

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	inklusifitas sosial masyarakat								
85	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Persentase Keterlibatan Masyarakat Pelaku Sejarah Lokal	%	7,25	520.222.000	Dindikbud
86	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	%	35,56	280.379.400	Dindikbud
87	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	%	2	958.530.900	Dindikbud

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat								
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
88	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terwujudnya perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	%	11,7	1.309.174.900	Dinpusip
89	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Manusia Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terlaksananya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan	%	36,84	46.271.400	Dinpusip

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
90	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip sesuai Kaidah Kearsipan dengan Kategori Cukup	%	41,86	302.454.300	Dinpusip
91	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	%	66,99	37.956.300	Dinpusip

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
92	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	178,2	126.575.500	DLHP
93	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	4373	576.975.800	DLHP
94	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diperiksa atau diawasi	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa atau Diawasi	%	100	78.503.600	DLHP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pertumbuhan ekonomi								
95	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Jumlah produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Ton	258,56	70.750.000	DLHP
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
96	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	1.137.000	4.636.171.100	Dinporapar
					Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	289		Dinporapar
97	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya kualitas layanan pemasaran pariwisata	Persentase Layanan Pemasaran Pariwisata	%	33	693.884.996	Dinporapar

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi							
98	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya fasilitasi sub sektor ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	21,43	65.084.300	Dinporapar
99	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten	Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Meningkat Kapasitasnya	%	96,0	115.529.000	Dinporapar
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
100	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis	Jumlah Produksi Padi	Ton/ Tahun	393.536,67	4.349.766.800	DKPP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pertumbuhan ekonomi								
					Jumlah Produksi Jagung	Ton/ Tahun	6.694,66		DKPP
					Jumlah Produksi Cabai	Ton/ Tahun	3.290,27		DKPP
					Jumlah Produksi Durian	Ton/ Tahun	5.924,13		DKPP
					Jumlah Produksi Biofarmaka	Ton/ Tahun	4.497,74		DKPP
					Jumlah Produksi Kelapa	Ton/ Tahun	37.194,36		DKPP
					Jumlah Produksi Kopi	Ton/ Tahun	166,88		DKPP
					Jumlah Produksi Tembakau	Ton/ Tahun	296,82		DKPP
				Meningkatnya populasi ternak	Jumlah Populasi Ternak	ST/th	122.680,61		DKPP
101	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya kemanfaatan prasarana pertanian yang disediakan	Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	%	100	3.228.609.500	DKPP
102	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Kasus	288	419.843.000	DKPP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pertumbuhan ekonomi								
103	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Fasilitasi Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	217.920.400	DKPP
104	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan kapasitas kelompok tani	Persentase Penerapan Teknologi Pertanian	%	24	611.804.750	DKPP
					Skor Kapasitas Kelompok Tani	Skor	270		DKPP
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
105	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya pasar rakyat yang memenuhi indikator pasar ber-SNI	Persentase Pasar Rakyat menuju Ber-SNI	%	12,9	103.500.553.200	DKUKMP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pertumbuhan ekonomi								
106	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta terjaminnya distribusi pupuk bersubsidi sampai dengan Kios pupuk lengkap	Disparitas Harga	%	+/- 10	206.750.000	DKUKMP
					Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi sampai dengan Kios Pupuk Lengkap	%	94,47		DKUKMP
107	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang	Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pameran Dagang	%	2	276.893.000	DKUKMP
108	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	100	94.026.500	DKUKMP

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pertumbuhan ekonomi								
109	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya omzet pelaku usaha yang dipromosikan penggunaan produk dalam negeri	Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha yang Dipromosikan	%	2	60.500.000	DKUKMP
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
110	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya produktivitas IKM tiap tahunnya	Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah	%	8,40	633.673.500	Dinperin-transnaker
111	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya layanan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan	Persentase Perizinan Industri Kewenangan Kabupaten yang Memenuhi Komitmen Perizinan	%	100	10.000.000	Dinperin-transnaker

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
112	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Laju Pertumbuhan Ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaporan informasi industri	Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	%	40,34	22.000.000	Dinperin-transnaker
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
113	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Sasaran 4: Meningkatnya Pertumbuhan Daerah yang Inklusif Indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pelaksanaan penempatan transmigran	Persentase Penempatan Transmigrasi	%	100	69.429.700	Dinperin-transnaker
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
			SEKRETARIAT DAERAH						
114	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan,	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,06	13.747.003.800	Setda

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi							
				Meningkatnya kualitas kebijakan tata pemerintahan dan kerja sama daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	%	100		Setda
				Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100		Setda
115	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan administrasi pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja sesuai Target	%	100	658.437.200	Setda
				Meningkatnya kualitas kebijakan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	72,5		Setda

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				pengelolaan barang dan jasa					
				Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan sumber daya alam	Persentase Kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	100		Setda
					Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,38		Setda
					Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,92		Setda
					Return on Asset (ROA) BUMD	%	5,78		Setda
			SEKRETARIAT DPRD						
116	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundangundanga n	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun n	%	100	18.602.977.650	Set. DPRD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Persentase Penetapan Raperda Tahun n	%	100		Set. DPRD
				Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100		Set. DPRD
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
			PERENCANAAN						
117	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah	%	100	519.000.000	Bapperida
118	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan	%	100	814.601.000	Bapperida

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		pembangunan Manusia	Pembangunan Manusia				
				Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur,	1%	100		Bapperida
			KEUANGAN						
119	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	%	100	531.294.205.548	BPKPAD
				Meningkatnya tata kelola	Tertib Pengelolaan Kas Daerah	%	100		BPKPAD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				perbendaharaan daerah					
				Meningkatnya tata kelola akutansi daerah	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	%	100		BPKPAD
					Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan	%	100		BPKPAD
					Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	100		BPKPAD
120	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	560.499.038	BPKAD
121	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan	%	100	3.637.315.264	BPKAD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi			Pendapatan Asli Daerah				
				Meningkatnya tata kelola pajak daerah	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah	%	100		BPKAD
			KEPEGAWAIAN						
122	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase ASN Berkinerja Baik	%	97,60	583.056.044	BKPSDM
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian	%	100		BKPSDM

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Meningkatnya tata kelola pengembangan karir dan kompetensi ASN	Persentase Pegawai yang Dipetakan Kompetensinya	%	100		BKPSDM
					Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	95,5		BKPSDM
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
123	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan komperensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manejerial, dan Fungsional	%	100	1.388.123.500	BKPSDM
					Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100		BKPSDM
			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
124	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang	Sasaran 5. Meningkatnya Tata	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan	Persentase hasil riset yang dimanfaatkan	%	50	849.997.100	Bapperida

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi		HKI dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah	dalam penyusunan kebijakan				
					Tingkat Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	%	3,21		Bapperida
					Jumlah inovasi yang dimiliki daerah	Inovasi	235		Bapperida
			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
			INSPEKTORAT DAERAH						
125	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	%	83,3	1.392.724.200	Inspektorat Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	infrastruktur berwawasan lingkungan								
				Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang Diterbitkan	%	100		Inspektorat Daerah
				Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diterbitkan		100		Inspektorat Daerah
				Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Diterbitkan	%	100		Inspektorat Daerah
				Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Persentase Laporan Pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang Diterbitkan	%	100		Inspektorat Daerah
				Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat berkadar pengawasan	%	100		Inspektorat Daerah
126	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas kebijakan teknik dan fasilitasi pengawasan	Persentase kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan	%	100	415.113.700	Inspektorat Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi							
				Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatu	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur	%	100		Inspektorat Daerah
				Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100		Inspektorat Daerah
				Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	%	100		Inspektorat Daerah
				Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	Persentase pendampingan/ asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	%	100		Inspektorat Daerah

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			UNSUR KEWILAYAHAN						
			KECAMATAN						
127	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	368.082.900	Semua Kecamatan
128	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	%	100	15.322.049.900	Semua Kecamatan
129	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN	Meningkatnya koordinasi	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi	%	100	279.683.700	Semua Kecamatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	DAN KETERTIBAN UMUM	ketentraman dan ketertiban umum	Ketentraman dan Ketertiban Umum				
130	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	424.366.700	Semua Kecamatan
131	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi,	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	1.317.974.500	Semua Kecamatan

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi							
			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						
			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
132	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Ketahanan Nasional	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	0,7	1.449.056.000	Bakes-bangpol
133	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi,	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Meningkatanya etika dan budaya politik	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik	%	3,16	1.859.500.000	Bakes-bangpol

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Ketahanan Nasional	PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
134	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Ketahanan Nasional	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	30	2.087.009.000	Bakes-bangpol
135	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Ketahanan Nasional	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Wilayah	%	100	424.978.000	Bakes-bangpol

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
136	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Indeks Ketahanan Nasional	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Ditangani	Kejadian	100	975.000.000	Bakes-bangpol
137	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	Sasaran 5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsif Berbasis Teknologi Informasi, serta Wilayah yang Kondusif Indikator: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	1.397.265.195.554	Semua Perangkat Daerah
				Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat	Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	Angka	65		Dinkesda (Sub Unit: Puskesmas)

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	%	93,0		Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjitro-wardojo)
					Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjokronegoro	%	92		Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjokro-negoro)
				Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan	Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjitrowardojo	%	100		Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjitro-wardojo)
					Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjokronegoro	%	100		Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjokro-negoro)
					Persentase Ketercapaian Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis di RSUD Tjokronegoro	%	100		Dinkesda (Sub Unit: RSUD Tjokro-negoro)
				Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	Angka	88,00		Setda
					Rata-Rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,89		Setda

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah/ Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome Program	Indikator Program	Satuan	Target Program	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100		Setda
				Total Pagu Indikatif				**2.607.848.667.165**	

5.2. Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2027

Pada Periode RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, terdapat 7 Program unggulan yang disebut dengan "Pitulungan". Program ini disusun guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan merespon berbagai isu strategis yang ada di Kabupaten Purworejo. Setiap program unggulan mencakup beberapa kegiatan unggulan yang mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Berikut rencana implementasi ketujuh program unggulan tersebut pada tahun 2027.

1) Pinter Bocahe

Pinter bocahe merupakan program prioritas di bidang pendidikan dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun yang bertujuan untuk memastikan seluruh anak usia PAUD, SD, dan SMP mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan inklusif yang diselenggarakan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan kesetaraan bagi anak-anak yang tidak dapat menempuh jalur pendidikan reguler, yang menekankan aspek akademik dan pembentukan karakter melalui pendidikan moral, penguatan iman dan taqwa, peningkatan literasi, serta nilai-nilai kebangsaan. Program ini juga bertujuan untuk mencetak pemuda berprestasi yang berdaya saing dan menjadi agen perubahan. Melalui program ini, pemuda diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, baik dalam bidang akademik, seni budaya, olahraga, maupun teknologi. Dengan pendekatan holistik, program ini mendorong terwujudnya generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, berbudaya, berkarakter kuat, dan menguasai teknologi sebagai bekal dalam menghadapi tantangan masa depan. Kegiatan unggulan yang dijabarkan implementasinya pada tahun 2027 ini merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sebelumnya termuat dalam dokumen KPU. Berikut merupakan gambaran program Pinter Bocahe dan beberapa kegiatan unggulannya, serta rencana implementasi pada tahun 2027.

Tabel 5.2. Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Pinter Bocahe dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
Pinter Bocahe	Pemberian beasiswa pendidikan bagi peserta didik berprestasi	Pemberian Beasiswa Kepada Siswa Berprestasi, ATS, Anak Beresiko putus Sekolah,	DINDIKBUD
	Fasilitasi teknologi informasi yang mendukung pendidikan dan pembelajaran yang inovatif	Pengadaan Peralatan TIK	DINDIKBUD
	Pembinaan dan pemberian penghargaan bagi masyarakat berprestasi	Pemberian Hadiah Penghargaan Kepada Masyarakat Berprestasi	Sekretariat Daerah
		Penghargaan Kejuaraan Atlet Berprestasi	Dinporapar
		Pengiriman atlet untuk mengikuti Kejuaraan	Dinporapar

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
		Pembinaan atlet melalui POPDA Kab, POPDA Kedu dan POPDA Provinsi	Dinporapar
	Pemberian pendidikan dan pelatihan lanjutan untuk peningkatan kualitas guru	Diklat Calon Kepala Sekolah; Fasilitasi Kelompok Kerja Guru (KKG); Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah; Diklat guru mapel; Peningkatan kapasitas guru PAUD	DINDIKBUD
	Pembaruan sarana prasarana sekolah untuk menjamin mutu pendidikan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; Rehabilitasi Ruang Guru; Rehab Perpustakaan; Pengadaan Meubelair; Pembangunan ruang kelas baru; Rehabilitasi ruang kelas; Pengadaan alat peraga edukatif	DINDIKBUD
	Pengembangan pusat pembelajaran masyarakat	Layanan Perpustakaan Menetap dan Keliling; Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka; Safari perpustakaan; Pelestarian naskah kuno; Pelatihan keterampilan masyarakat/ perpustakaan berbasis inklusi sosial	DINPUSIP

Sumber: Tim Penyusun, 2026

2) Religius Masyarakate

Religius Masyarakate merupakan program prioritas yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang religius, harmonis, dan inklusif dalam keberagaman beragama. Program ini berfokus pada pendidikan anak beriman, pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya serta penyediaan dan peningkatan sarana prasarana peribadatan yang layak dan merata bagi seluruh pemeluk agama yang diakui negara sehingga setiap individu dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan aman yang disertai dengan penguatan nilai-nilai toleransi, gotong royong, serta keharmonisan antarumat beragama dalam kehidupan sosial. Kegiatan unggulan yang dijabarkan implementasinya pada tahun 2027 ini merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sebelumnya termuat dalam dokumen KPU. Berikut merupakan gambaran program Religius Masyarakate dan beberapa kegiatan unggulannya, serta rencana implementasi pada tahun 2027.

Tabel 5.3. Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Religius Masyarakate dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
Religius Masyarakate	Pemberian insentif bulanan, pelatihan peningkatan kompetensi, pemberian penghargaan bagi guru agama non	Hibah insentif pengajar keagamaan	Sekretariat Daerah

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
	formal, dan masyarakat berprestasi di bidang keagamaan		
	Memperluas kesempatan menjalankan ibadah bagi masyarakat sesuai dengan agama yang diakui negara	Fasilitasi Perjalanan Ibadah dan Ziarah Bagi Tokoh Agama berprestasi	Sekretariat Daerah
		Pembinaan Anak Beriman dan Berkepribadian	DINDIKBUD
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Fasilitasi dan Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan	BAKESBANGPOL
	Fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan	Hibah Sarana dan Prasarana Peribadatan serta Pondok Pesantren	Sekretariat Daerah

Sumber: Tim Penyusun, 2026

3) Sehat Penduduke

Sehat Penduduke merupakan program prioritas yang bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses yang terjangkau, berkualitas, dan berkeadilan terhadap layanan dan edukasi kesehatan. Program ini mengintegrasikan berbagai langkah preventif seperti edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sanitasi total berbasis masyarakat (STBM), *open defecation free* (ODF), serta pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan keluarga berencana (KB). Selain itu, program ini juga menitikberatkan pada penyediaan fasilitas kesehatan serta sarana dan prasarana olahraga yang memadai, peningkatan kualitas tenaga medis, serta optimalisasi sistem layanan kesehatan agar lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat yang mencakup penyediaan layanan kesehatan gratis bagi peserta kelas 3, termasuk melalui mekanisme pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menjamin masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa kendala finansial. Dengan pendekatan yang komprehensif, program ini tidak hanya berfokus pada penyembuhan, tetapi juga pada upaya promotif dan preventif guna meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Kegiatan unggulan yang dijabarkan implementasinya pada tahun 2027 ini merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sebelumnya termuat dalam dokumen KPU. Berikut merupakan gambaran program Sehat Penduduke dan beberapa kegiatan unggulannya, serta rencana implementasi pada tahun 2027.

Tabel 5.4. Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Sehat Penduduke dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
Sehat Penduduke	Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk semua warga	Pendampingan pelaksanaan intergrasi layanan terpadu (ILP), Pelaksanaan akreditasi di fasilitas kesehatan, Pelaksanaan promosi kesehatan, Pelayanan cek kesehatan gratis	DINKESDA
	Mempermudah dan mempercepat proses pengurusan jaminan sosial kesehatan	Pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS dan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat	Dinkesda
	Pembangunan dan optimalisasi fasilitas olah raga bagi pemuda dan masyarakat	Pemeliharaan GOR dan Stadion Sarwo Edhi Wibowo	Dinporapar
		Rehabilitasi GOR Butuh	Dinporapar
		Pemeliharaan Alun-alun Purworejo dan Kutoarjo sebagai ruang terbuka publik	Dinporapar
		Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana olahraga	Dinporapar
	Peningkatan kualitas gizi masyarakat	Sosialisasi pola konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)	DKPP
		Penanganan desa rentan rawan pangan	DKPP
		Pengawasan dan pembinaan pangan segar asal tumbuhan	DKPP
		Pekarangan Pangan Bergizi	DKPP
		Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH)	DKPP
		Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar Asal Ikan	DLHP
		Kampanye Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	DLHP
		Pengawasan pre-market dan post-market IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)	Dinkesda
		Penyelenggaraan kursus Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dinkesda
		Pembinaan pelaku Usaha pada produsen pangan dan sarana peredaran pangan pada bidang PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan POSS (Pangan Olahan Siap Saji)	Dinkesda
		Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)	Dinkesda
		Pertemuan peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans Gizi	Dinkesda
		Sosialisasi dan Edukasi Pangan dan Gizi	Dinkesda
		Pemberian Makanan Tambahan	Dinkesda

Sumber: Tim Penyusun, 2026

4) Sejahtera Wargane

Sejahtera Wargane merupakan program prioritas yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup sandang, pangan, dan papan yang terjangkau serta layak bagi seluruh lapisan masyarakat yang juga berfokus pada optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapat masyarakat, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dan peningkatan tata kelola dan basis data kemiskian, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap sumber daya, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, makmur, dan sentosa dengan memastikan stabilitas sosial, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesempatan kerja dan usaha yang diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Kegiatan unggulan yang dijabarkan implementasinya pada tahun 2027 ini merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sebelumnya termuat dalam dokumen KPU. Berikut merupakan gambaran program Sejahtera Wargane dan beberapa kegiatan unggulannya, serta rencana implementasi pada tahun 2027.

Tabel 5.5. Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Sejahtera Wargane dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulannya	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
Sejahtera Wargane	Melaksanakan program perumahan rakyat dengan merenovasi dan membangun bagi masyarakat yang membutuhkan	Pembangunan Baru Rumah Tidak Layak Huni (PB RTLH)	Dinperkimtan
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (PK RTLH)	Dinperkimtan
	Membangun dan/ atau memperbaiki sanitasi lingkungan	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DPUPR
		Pembangunan Jamban sehat Individu	DPUPR
		Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	DPUPR
		Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP) sanitasi	DPUPR
	Ketahanan iklim berbasis masyarakat	Pelaksanaan Program Kampung Iklim	DLHP
		Revegetasi lahan kritis	DLHP
		Penerapan pertanian cerdas iklim	DKPP
	Sinergitas stakeholder dalam pengelolaan sampah dan limbah industri	Sosialisasi, edukasi, regulasi pembatasan timbulan sampah	DLHP
		Pembinaan dan pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	DLHP
	Pembinaan, sosialisasi, dan	Kampanye lingkungan hidup (Hari Peduli Sampah Nasional,	DLHP

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulannya	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
	edukasi tentang fungsi perlindungan dan konservasi sumber daya alam	World Cleaning Day, Hari Lingkungan Hidup, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional)	
		Penyelenggaraan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Saka Kalpataru, Sekolah Adiwiyata, Program Kampung Iklim)	DLHP
	Penambahan kuantitas dan kualitas RTH	Pemeliharaan RTH Perkotaan	DLHP
		Pengelolaan Heroes Park	DLHP
	Penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission	Inventarisasi gas rumah kaca	DLHP
		Pelaporan pembangunan rendah karbon	DLHP
		Revegetasi Lahan Kritis	DLHP
		Pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	DLHP
		Penerapan pertanian cerdas iklim (Irigasi Intermittent – berselang, pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik, penggunaan varietas rendah emisi, pengendalian hama ramah lingkungan)	DKPP
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) untuk kendaraan bermotor yang lolos uji emisi	Dinhub
		Efisiensi Energi Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan penggunaan lampu LED	Dinhub
		Pemasangan *Area Traffic Control System* (ATCS)	Dinhub
	Program pembangkit listrik tenaga terbarukan	Fasilitasi pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan	Setda
	Pengembangan hutan sebagai kebun raya akademik	Pengembangan heroes park sebagai kebun raya	DLHP
		Pemeliharaan heroes park	DLHP
	Kabupaten bersih dan bebas sampah	Peningkatan kapasitas TPA Jetis	DLHP
		Operasional dan Pemeliharaan TPA	DLHP
		Penyediaan kontainer sampah di TPS3R	DLHP
		Fasilitasi penyediaan sarana pengelolaan sampah pada TPS, TPS3R, dan Bank Sampah	DLHP
	Sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Dinkominfo-stasandi
	Pengembangan inovasi dan kompetensi teknologi informasi bagi ASN.	Fasilitasi dan Pembinaan Inovasi	Bapperida
		Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah	
		Lomba Inovasi Daerah melalui Innovative Government Award (IGA)	
	Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah yang bersih,	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Intranet & pusat data	Dinkominfo-stasandi
		Penguatan Keamanan Siber dan Perlindungan Data	Dinkominfo-stasandi

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulannya	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
	berkeadilan, responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.		
		Pengelolaan Data Statistik	Dinkominfo-stasandi
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Pengawasan dengan tujuan tertentu	Inspektorat
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Inspektorat
		Peningkatan profesionalitas dan kualitas ASN dengan penerapan sistem merit	BKPSDM
		Peningkatan Kinerja, Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
		Pengelolaan arsip statis; Pengawasan kearsipan di perangkat daerah; Penguatan unit kearsipan pada perangkat daerah; Pengelolaan depot arsip	Dinpusip
		Pelayanan jemput bola dokumen kependudukan	Disdukcapil
		Pelayanan jemput bola dokumen pencatatan sipil	Disdukcapil
	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Perangkat Daerah.	Pelatihan PPRG; Fasilitasi dan monev GAP GBS OPD	DPPPPAPMD
	Membentuk lembaga/ forum/ satuan tugas yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat desa/ kelurahan.	Pelatihan bagi Tim Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) Kecamatan	DPPPAPMD
	Pemberian bantuan hukum, pendidikan, pembinaan, dan pengembangan organisasi perempuan dan perempuan difabel.	Fasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin	Sekretariat Daerah
		Pemberian bantuan hukum kepada perempuan dan anak korban kekerasan	DPPPAPMD
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Disabilitas	DINSOS-DALDUKKB
	Penguatan koordinasi, kerja sama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring	Fasilitasi Forkare; Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak; Pelatihan Trust and safety trainning internet aman; Kampanye Perlindungan	DPPPAPMD

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulannya	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
	dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak.	Perempuan dan Anak di sekolah; Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO; Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan; Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	
	Pemberian advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi, dan sinkronisasi kegiatan peningkatan kualitas keluarga.	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga; Koordinasi PUSPAGA	DPPPAPMD
		Pembinaan dan pengembangan Kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	DINSOS-DALDUKKB
	Pencegahan, perlindungan, dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penanganan kasus kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	DPPPAPMD
	Pelestarian warisan budaya, kepurbakalaan, permuseuman, tata nilai budaya, seni tradisional, tradisi, adat, dan tradisi.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum; Konser;vasi Koleksi Museum; Pemeliharaan Objek Cagar Budaya; Penetapan Objek Diduga Cagar Budaya; Grebeg Budaya; Jumenengan; Rintisan Sekolah Budaya; Kajian WBTb	DINDIKBUD
	Penguatan mitigasi kebencanaan secara terstruktur dan non struktur.	Pemberdayaan masyarakat Dalam pencegahan dan Penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Satpol PP Damkar
		Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Satpol PP Damkar
		Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Satpol PP Damkar
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD
		Penyusunan Rencana Kontijensi	BPBD
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota	BPBD
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	BPBD
		Pembangunan Gedung untuk Gudang Logistik	BPBD
		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulannya	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
		Penyediaan Makanan; Penyediaan Sandang; Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan; Pelayanan Dukungan Psikososial; Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi; Koordinasi, Fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana; Peningkatan kompetensi taruna siaga bencana	DINSOS-DALDUKKB
	Pengembangan mitigasi dengan *Early Warning System* (EWS) bencana berbasis internet of thing (IoT).	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD
		Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BPBD
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD
	Pemberian penyuluhan dini dan pelatihan untuk mengurangi risiko dampak bencana.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	BPBD
		Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	BPBD
	Penguatan daerah dan masyarakat yang tangguh bencana	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	BPBD
		Pelatihan Mitigasi kepada masyarakat daerah rawan bencana, lembaga pendidikan dan Komunitas	BPBD
		Pembentukan Destana	BPBD
		Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana,	BPBD
		Pelatihan dan sosialisasi Keluarga tangguh bencana	BPBD
	Memperbaiki keamanan pangan dan menambah aksesibilitas pangan bagi masyarakat.	Pembinaan dan pengawasan pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	DKPP
		Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH)	DKPP
		Pembinaan dan Pengawasan Pangan Segar Asal Ikan	DLHP
		Koordinasi penguatan kelembagaan keamanan pangan	DKPP
		Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah	DKPP
		Gelar pangan murah	DKPP
		Kampanye Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	DLHP
		Pengawasan pre-market dan post-market IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)	Dinkesda

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulannya	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
		Penyelenggaraan kursus Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Dinkesda
		Pembinaan pelaku Usaha pada produsen pangan dan sarana peredaran pangan pada bidang PIRT dan POSS	Dinkesda

Sumber: Tim Penyusun, 2026

5) Alus Dalane

Alus Dalane merupakan program unggulan yang berfokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang mencakup peningkatan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta drainase, dan juga penyediaan kelengkapan jalan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dengan pendanaan yang bersumber dari berbagai mekanisme, termasuk APBD, APBN, dana desa, serta skema kolaboratif lainnya seperti kemitraan dengan sektor swasta dan dana hibah, guna memastikan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Selain itu, untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purworejo, dilakukan supervisi ke pemerintah desa terkait penataan desa. Dengan pendekatan yang terintegrasi, program ini diharapkan mampu menciptakan infrastruktur yang merata dan akses transportasi yang lebih baik sehingga dapat memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Kegiatan unggulan yang dijabarkan implementasinya pada tahun 2027 ini merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sebelumnya termuat dalam dokumen KPU. Berikut merupakan gambaran program Alus Dalane dan beberapa kegiatan unggulannya, serta rencana implementasi pada tahun 2027.

Tabel 5.6. Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Alus Dalane dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
Alus Dalane	Pemerataan pembangunan infrastruktur di semua wilayah Kabupaten Purworejo	Pembangunan jalan	DPUPR
		Rehabilitasi/Peningkatan Jalan	DPUPR
		Penggantian Jembatan	DPUPR
		Pemeliharaan rutin dan berkala jalan	DPUPR
		Pemeliharaan rutin dan berkala jembatan	DPUPR
		Pemeliharaan trotoar	DPUPR
		Operasi dan pemeliharaan drainase perkotaan	DPUPR
		Rehabilitasi drainase perkotaan	DPUPR
		Penyediaan alat perlengkapan jalan	Dinhub
		Pengaturan dan ketertiban lalu lintas jalan	Dinhub

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
		Fasilitasi pengujian kendaraan angkutan	Dinhub
		Penataan parkir	Dinhub
		Fasilitasi dan pengelolaan terminal penumpang	Dinhub
		Fasilitasi penyediaan angkutan orang atau barang	Dinhub
	Penggunaan material yang ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur		

Sumber: Tim Penyusun, 2026

6) Rame Pasare

Rame Pasare merupakan program prioritas yang berfokus pada optimalisasi sektor ekonomi lokal melalui modernisasi dan penguatan aktivitas ekonomi secara luas yang mencakup revitalisasi pasar tradisional, pengembangan wisata daerah, pengembangan industri lokal, pengembangan infrastruktur perdagangan, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan pemasaran bagi pelaku usaha yang juga berfokus pada pemberdayaan pedagang, pelaku UMKM, dan pelaku pariwisata melalui pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, serta penguatan ekosistem bisnis yang berdaya saing. Dengan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan dan inklusivitas, program ini diharapkan mampu menciptakan iklim ekonomi yang lebih dinamis, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai sektor. Kegiatan unggulan yang dijabarkan implementasinya pada tahun 2027 ini merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sebelumnya termuat dalam dokumen KPU. Berikut merupakan gambaran program Rame Pasare dan beberapa kegiatan unggulannya, serta rencana implementasi pada tahun 2027.

Tabel 5.7. Kegiatan Unggulan Program Pitulungan Rame Pasare dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
Rame Pasare	Menciptakan iklim investasi yang kondusif	Penyusunan dokumen IPRO *(investment ready to offer)*	DPMPTSP
		Meningkatkan peranan gugus tugas investasi sebagai fasilitator bagi investor dalam melakukan penanaman modal	DPMPTSP
	Memperbesar peluang kepada pelaku ekonomi lokal untuk berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan	Penyusunan Katalog UMKM sebagai bahan pameran dagang	DKUKMP
		Kolaborasi Buka Pasar: ajang temu peluang untuk UMKM lokal	DKUKMP
	Fasilitas akses permodalan,	Pembinaan dan fasilitasi pemanfaatan digitalisasi dan	DKUKMP

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
	pemasaran, pelatihan, dll untuk usaha mikro dan kecil, terutama bagi industri rumahan yang dikelola perempuan	teknologi produksi kepada UMKM	
		Inkubasi Bisnis UMKM	DKUKMP
		Klasterisasi UMKM melalui peningkatan peran Forum UMKM	DKUKMP
	Menyelenggarakan berbagai festival berbasis agroindustri, religi, dan budaya untuk meningkatkan daya tarik wisata.	Penyelenggaraan event-event pariwisata (Purworejo Spektakuler, Pengiriman Mas Mbak Jateng, Festival Layang-Layang, Gumebyar Taun Anyar)	Dinporapar
		Penyelenggaraan pameran dagang lokal (Purworejo Expo, Gebyar UMKM, Dukungan terhadap Festival Layang-Layang)	DKUKMP
	Pengembangan pariwisata kreatif	Pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif	Dinporapar
		Sosialisasi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha ekonomi kreatif	Dinporapar
	Peningkatan citra dan positioning kepariwisataan Purworejo	Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Dinporapar
		Penyelenggaraan event-event pariwisata (Purworejo Spektakuler, Pengiriman Mas Mbak Jateng, Festival Layang-Layang, Gumebyar Taun Anyar)	Dinporapar
		Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata	Dinporapar
		Dukungan promosi digital dan media sosial	Dinkominfostasandi
		Dukungan pemuatan konten digital	Dinkominfostasandi
	Memperkuat kolaborasi pengembangan pariwisata kreatif	Sosialisasi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha ekonomi kreatif	Dinporapar
	Membuka peluang baru dalam sektor ekonomi kreatif, pariwisata budaya, dan kerja sama komunitas	Sosialisasi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha ekonomi kreatif	Dinporapar
		Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata	Dinporapar
	Penguatan kapabilitas inovasi dan riset daerah yang mendukung ekosistem yang berkualitas	Pelaksanaan Riset Unggulan Daerah,	Bapperida
		Penyusunan Analisis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Bapperida
		Penerbitan Jurnal Integral	Bapperida
		Penyusunan Policy Brief	Bapperida
		Koordinasi Forum Komunikasi Riset dan Inovasi	Bapperida
		Koordinasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Bapperida
	Hilirisasi hasil penelitian/	Fasilitasi dan Pembinaan Inovasi	Bapperida

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulan	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
	penerapan teknologi tepat guna.	Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah	Bapperida
		Lomba Inovasi Daerah melalui Innovative Government Award (IGA)	Bapperida
		Pelaksanaan Lomba Kreativitas Inovasi Masyarakat (Krenova) Kabupaten	Bapperida
		Pengembangan Sistem Informasi Untuk Risert, Pengembangan Riset dan Inovasi daerah (Surprise)	Bapperida
		Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Bapperida
		Dukungan Layanan Sistem Inovasi Daerah	Bapperida
	Inovasi teknologi tepat guna bagi pelaku ekonomi kreatif	Sosialisasi dan fasilitasi hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha ekonomi kreatif	Dinporapar
		Fasilitasi dan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM/IKM/Ekraf untuk mengembangkan desain, kualitas, dan produksi kemasan produk	Dinporapar, Dinperin-transnaker, DKUKMP
		Pelatihan pelaku usaha ekonomi kreatif	Dinporapar
	Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja (pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi)	Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Dinperin-transnaker
		Pembinaan Lembanga Pelatihan Kerja Swasta	Dinperin-transnaker
		Sertifikasi kompetensi tenaga kerja bidang pariwisata	Dinporapar

Sumber: Tim Penyusun, 2026

7) Ayem Petanine

Ayem Petanine merupakan program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani atau pekerja di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan kehutanan melalui optimalisasi infrastruktur usaha tani serta penyediaan akses yang memadai terhadap pupuk, pasar, dan sumber daya pertanian lainnya dengan berfokus pada pengembangan dan perbaikan prasarana serta sarana pertanian, seperti sistem irigasi, jalan usaha tani, dan alat-alat pertanian modern guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi usaha tani, serta mendorong kebijakan dan dukungan bagi petani dalam mengakses pupuk bersubsidi, permodalan, serta jaringan pemasaran yang lebih luas dan stabil, sehingga hasil panen dapat terserap dengan baik dan memberikan keuntungan maksimal bagi petani. Dengan strategi yang komprehensif, Ayem Petanine berperan dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi

daerah dan nasional. Kegiatan unggulan yang dijabarkan implementasinya pada tahun 2027 ini merupakan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang sebelumnya termuat dalam dokumen KPU. Berikut merupakan gambaran program Ayem Petanine dan beberapa kegiatan unggulannya, serta rencana implementasi pada tahun 2027.

Tabel 5.8. Kegiatan Unggulan Program Ayem Petanine dan Rencana Implementasinya pada Tahun 2027

Program Unggulan (Pitulungan)	Kegiatan Unggulannya	Rencana Implementasi 2027	Pelaksana
Ayem Petanine	Menambah penggunaan alat teknologi pertanian (seperti pompa air, sprayer, traktor tangan, sel surya, dll)	Pengawasan penggunaan alat mesin teknologi pertanian, Pembinaan UPJA	DKPP
		Fasilitasi Penyediaan sarana pertanian (alsintan)	DKPP
		Pelatihan, Pembinaan, dan Evaluasi UPJA	DKPP
	Revitalisasi sistem pertanian	Penilaian Kelas Kelompok Tani	DKPP
		Pembinaan Kelompok Ekonomi Petani	DKPP
		Penguatan kelembagaan usaha tani	
	Mengoptimalisasi pemakaian pupuk organik	Sekolah Lapang pupuk organik	DKPP
	Pengembangan infrastruktur pertanian dalam arti luas	Pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi tersier	DKPP
		Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	DPUPR
		Pembinaan P3A	DPUPR
		Pemeliharaan rutin dan berkala jaringan irigasi permukaan	DPUPR
		Survey Hidrologi	DPUPR
		Rehabilitasi bendungan	DPUPR
	Memperkuat akses pada informasi dan teknologi pertanian	Sekolah Lapang teknologi budidaya	DKPP
		Penyuluhan pertanian terkait penerapan teknologi pertanian	DKPP
	Modernisasi pertanian	Penyuluhan penerapan teknologi modern	DKPP
		Pengawalan digitalisasi data petani (e-RDKK/pupuk bersubsidi)	DKPP
		Fasilitasi penyediaan sarana pertanian	DKPP

Sumber: Tim Penyusun, 2026

5.3. Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027 Kabupaten Purworejo terhadap Prioritas Nasional (PN)

Terdapat delapan prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, antara lain 1) Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); 2) Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; 3) Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; 4) Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; 5) Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6) Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; 7) Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan 8) Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tabel berikut ini menunjukkan dukungan program daerah tahun 2027 Kabupaten Purworejo terhadap Prioritas Nasional.

Tabel 5.9. Dukungan Program Daerah terhadap Prioritas Nasional

Asta Cita	Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional	Pelaksana
Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Bakesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Bakesbangpol
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Bakesbangpol
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Bakesbangpol
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bakesbangpol
Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,	Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	DKPP
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DKPP
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DKPP
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DKPP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DKPP

Asta Cita	Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional	Pelaksana
ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DKPP
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DKPP
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DKPP
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DKPP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DLHP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DLHP
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DLHP
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DLHP
Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DPUPR
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DPUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinperkimtan
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinperkimtan
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinperkimtan
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinperkimtan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinhub
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DKUKMP
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DKUKMP
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DKUKMP
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DKUKMP
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DKUKMP
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DKUKMP
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DKUKMP

Asta Cita	Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional	Pelaksana
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DKUKMP
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DKUKMP
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DKUKMP
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DKUKMP
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinporapar
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinporapar
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinporapar
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinporapar
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinperin-transnaker
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinperin-transnaker
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinperin-transnaker
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinperin-transnaker
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinperin-transnaker
Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dindikbud
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Dindikbud
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Dindikbud
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Dindikbud
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinkesda
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinkesda
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinkesda
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinkesda
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINSOS-DALDUKKB
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINSOS-DALDUKKB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINSOS-DALDUKKB
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DPPPAPMD
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DPPPAPMD
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DPPPAPMD

Asta Cita	Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional	Pelaksana
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DPPPAPMD
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DPPPAPMD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinporapar
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinporapar
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinporapar
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinpusip
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Dinpusip
Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinperin-transnaker
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinperin-transnaker
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinperin-transnaker
Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPPPAPMD
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPPPAPMD
Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Dinperkimtan
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Dinperkimtan
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Dinperkimtan
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP Damkar
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satpol PP Damkar
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Disdukcapil
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Disdukcapil
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Disdukcapil

Asta Cita	Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional	Pelaksana
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinkominfo-stasandi
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinkominfo-stasandi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinkominfo-stasandi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinkominfo-stasandi
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinpusip
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinpusip
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Setda
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Setda
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Set. DPRD
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bapperida
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bapperida
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Bapperida
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKPAD
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKPAD
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKPAD
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Daerah
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Semua Kecamatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Semua Kecamatan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Semua Kecamatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Semua Kecamatan

Asta Cita	Prioritas Nasional	Program Daerah yang Mendukung Prioritas Nasional	Pelaksana
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Semua Kecamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Semua Perangkat Daerah
Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dindikbud
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dindikbud
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dindikbud
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dindikbud
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Dindikbud
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOS-DALDUKKB
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	DINSOS-DALDUKKB
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS-DALDUKKB
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOS-DALDUKKB
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOS-DALDUKKB
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINSOS-DALDUKKB
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHP
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHP
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLHP
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLHP
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLHP
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLHP
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLHP
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLHP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLHP

Sumber: Tim Penyusun, 2026

Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) didukung oleh 5 program di Kabupaten Purworejo. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru didukung

oleh 13 program di Kabupaten Purworejo. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi didukung oleh 33 program di Kabupaten Purworejo. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas didukung oleh 21 program di Kabupaten Purworejo. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri didukung oleh 3 program di Kabupaten Purworejo. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan didukung oleh 2 program di Kabupaten Purworejo. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan didukung oleh 40 program di Kabupaten Purworejo. Sementara itu, Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur didukung oleh 20 program di Kabupaten Purworejo. Seluruh program di Kabupaten Purworejo mendukung prioritas nasional, sehingga tingkat dukungannya ialah 100%.

Di samping itu, terdapat 6 (enam) program strategis nasional yang dilaksanakan selama lima tahun mendatang, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan dan pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras dalam negeri serta penyaluran cadangan beras pemerintah, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, revitalisasi ekonomi, serta program strategis nasional lain yang ditetapkan oleh Presiden. Di samping itu, pada Rancangan RKP tahun 2027 belum terdapat Kegiatan Prioritas Utama, sehingga Kabupaten Purworejo belum dapat melakukan sinergitas kegiatan di Kabupaten Purworejo terhadap kegiatan prioritas utama di tingkat nasional. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan sinergi pembangunan antara Kabupaten Purworejo dan nasional, tabel berikut ini menunjukkan keselarasan dan dukungan program strategis nasional di Kabupaten Purworejo.

Tabel 5.10. Dukungan Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional	Implementasi di Kabupaten Purworejo	Target 2027	Satuan	Perangkat Daerah
1	**Pengentasan Kemiskinan**				
	a. Penanggulangan Kemiskinan	Fasilitasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi buruh tembakau	912	Orang	DINSOS-DALDUKKB
		Fasilitasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bagi LKS/LKSA, Panti, PAYMD, PAY dan Yayasan Sosial	9	Lembaga	DINSOS-DALDUKKB

No	Program Strategis Nasional	Implementasi di Kabupaten Purworejo	Target 2027	Satuan	Perangkat Daerah
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	43	Ton	DKPP
		Penyusunan dan Penetapan RKPD	1	Dokumen	Bapperida
		Fasilitasi koordinasi pemutakhiran data dengan operator data desa/ kelurahan	1	Laporan	DINSOS-DALDUKKB
		Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	1	Laporan	Bapperida
		Pembinaan UMKM, Fasilitasi & Pembinaan BUMDes/BUMDesma	1	Laporan	Kec. Purworejo
		Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Jemput Bola (KIA, KTP, Penduduk Rentan)	41650	Dokumen	Disdukcapil
	b. Sekolah Rakyat	Fasilitasi koordinasi pembangunan sekolah rakyat	1	Laporan	DINSOS-DALDUKKB
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	20	Dokumen	DLHP
	c. Pembangunan 3 juta rumah	Penyelenggaraan PBG, SLF dan RTB	1	Dokumen	DPUPR
		Bansos Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	17	Unit Rumah	Dinperkimtan
		Fasilitasi koordinasi pembangunan 3 juta rumah	1	Laporan	Dinperkimtan
2	**Ketahanan Pangan**				
	a. Kampung Nelayan Merah Putih	Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil	25	Orang	DLHP
		Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan	10	Kelompok	DLHP
	b. Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	- Penyusunan Naskah Akademis (2026) - Penyusunan Fakta Analisis (2027)	1	Dokumen	DPUPR
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	1	Laporan	DKPP
		Fasilitasi koordinasi update data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	1	Laporan	DKPP
	c. Pangan Akuatik	Pengawasan Usaha Garam	2	Pelaku Usaha	DLHP
	d. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Fasilitasi Komisi penyuluhan	1	Laporan	DKPP
		Penyusunan Program Penyuluhan	1	Laporan	DKPP

No	Program Strategis Nasional	Implementasi di Kabupaten Purworejo	Target 2027	Satuan	Perangkat Daerah
	e. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	Operasi Jaringan Irigasi	250	DI	DPUPR
		Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	288	KM	DPUPR
		Pemeliharaan Berkala Jaringan irigasi	0,5	KM	DPUPR
		Pemeliharaan Darurat Jaringan Irigasi	5	Titik Bencana	DPUPR
		Sosialisasi dan Evaluasi Musim Tanam	10	Kegiatan	DPUPR
		Pengamanan Jaringan Irigasi	1	Kegiatan	DPUPR
		Penyediaan Alat, Bahan, dan Penunjang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	3	Paket	DPUPR
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	2	Unit	DKPP
	f. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/ Beras Dalam Negeri	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	43	Ton	DKPP
	g. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	43	Ton	DKPP
3	**Kesehatan untuk semua**				
	a. Jaminan kesehatan nasional	Revisi Perbup tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan daerah	1	Perbup	Dinkesda
		Pembayaran iuran PBPU dan BP Kelas 3 dan Bantuan Iuran mandiri aktif kelas 3	191000	Orang	Dinkesda
		Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi SIBIJAK (Aplikasi Managemen Sistem Pembiayaan Jaminan Kesehatan)	1	Aplikasi	Dinkesda
		Belanja obat obatan dan Bahan Medis Habis Pakai	84	Paket	Dinkesda
	b. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD dr. Tjitrowardojo	1	Laporan	RSUD dr. Tjitrowardojo
		Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD RAA Tjokronegoro	1	Laporan	RSUD RAA Tjokronegoro
	d. Penuntasan TBC	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1	Laporan	Dinkesda
	e. Stunting	Koordinasi percepatan penurunan stunting	1	Laporan	Bapperida
		Pelayanan penanganan stunting di Puskesmas	1	Laporan	Puskesmas

No	Program Strategis Nasional	Implementasi di Kabupaten Purworejo	Target 2027	Satuan	Perangkat Daerah
		Pelayanan penanganan stunting di RSUD	1	Laporan	RSUD
		Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1	Laporan	Dinkesda
		Koordinasi percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan	1	Laporan	Kecamatan
	f. Makan bergizi gratis	Fasilitasi Koordinasi Satuan Tugas MBG Daerah	1	Laporan	Bag Kesra Setda
4	**Perluasan akses pendidikan**				
	a. Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	Revitalisasi Pendidikan Sekolah Dasar	1	Laporan	Dindikbud
		Revitalisasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Laporan	Dindikbud
		Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	Laporan	Dindikbud
	b. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	Fasilitasi koordinasi digitalisasi pembelajaran	1	Laporan	Dindikbud
	c. Makan Bergizi Gratis	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	1	Laporan	Dinkesda
		Pengadaan Alat Uji Cepat Keamanan Pangan	1	Laporan	DKPP
		Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Peredaran (Post Market)	1	Laporan	DKPP
5	**Pertumbuhan ekonomi**				
	a. Pengendalian inflasi	Gerakan Pangan Murah (GPM)	1	Laporan	DKPP
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1	Laporan	DKPP
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	1	Laporan	DKPP
		Pemantauan harga dan stok bapokting di Pasar Daerah yang dilaksanakan oleh petugas	4	Laporan	DKUKMP
		Fasilitasi koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1	Laporan	Bag. PSDA Setda
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan	BPKPAD
		Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	1	Laporan	DKUKMP
		Koordinasi ketersediaan dan peningkatan akses barang	1	Laporan	DKUKMP

No	Program Strategis Nasional	Implementasi di Kabupaten Purworejo	Target 2027	Satuan	Perangkat Daerah
		kebutuhan pokok dan barang penting			
	b. Percepatan pembentukan koperasi desa/ kelurahan merah putih	Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM Koperasi	1	Laporan	DKUKMP
		Koordinasi terkait penetapan lahan gerai bagi Kelurahan	1	Laporan	DKUKMP
		Pendampingan penerbitan izin kelengkapan KDKMP	1	Laporan	DKUKMP
		Pengawasan bagi lahan yang tidak sesuai fungsi/ menyalahai aturan penggunaan	1	Laporan	DKUKMP
		Pemeriksaaan dan Pengawasan terhadap KDKMP	1	Laporan	DKUKMP
		Pelaporan Progres Pelaksanaan Program KDKMP kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan	1	Laporan	DKUKMP
	c. Kemudahan perizinan daerah	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pelayanan perizinan berusaha	1	Laporan	DPMPTSP
		Pelaksanaan kegiatan penyusunan Perbup Pemberian Insentif/Kemudahan dan penetapan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor	1	Laporan	DPMPTSP
		Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kemudahan pelayanan perizinan berusaha	1	Laporan	DPMPTSP
		Pelaksanaan kegiatan layanan konsultasi perizinan	1	Laporan	DPMPTSP
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Inovasi : Klinik Investasi)	1	Laporan	DPMPTSP
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha (Inovasi : LARIZ BOSS 2.0)	1	Laporan	DPMPTSP
6	**Program strategis nasional lain yang ditetapkan oleh Presiden**				

Sumber: Tim Penyusun, 2026

Di samping telah terpetakannya implementasi riil atas Program Strategis Nasional (ProSN), terdapat *mapping* atas dukungan ProSN dari SIPD-RI. Tabel

berikut ini menunjukkan dukungan ProSN dari SIPD-RI meliputi program beserta indikator dan targetnya, kegiatan, sub kegiatan beserta target indikatornya, serta pagu indikatif tahun 2027.

Tabel 5.11. Rencana Pelaksanaan Dukungan Program Strategis Nasional (ProSN) pada Tahun 2027

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
1	**Pengentasan Kemiskinan**									
	a. Penanggulangan Kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,53 %	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	720 Orang	1.118.467.900	DINSOS-DALDUKKB
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,53 %	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	720 Orang	1.118.467.900	DINSOS-DALDUKKB
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi	1900 kkal/kapita/ hari	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ KotaKabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Ton	498.493.400	DKPP
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah	100 %	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/ RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	241.000.000	Bapperida

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,53 %	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	87 Usulan	57.684.400	DINSOS-DALDUKKB
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	315.367.200	Bapperida
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1.048.682.200	Kecamatan
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital	99,93%	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	166000 Dokumen	870.790.600	Disdukcapil
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital	99,93%	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan	41650 Dokumen	9.536.000	Disdukcapil

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
						Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			
	b. Sekolah Rakyat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial	99,53 %	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	87 Usulan	57.684.400	DINSOS-DALDUKKB
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dalam Pemenuhan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	76 %	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen	49.101.500	DLHP
	c. Pembangunan 3 juta rumah	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	88,69%	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim	1 Dokumen	300.000.000	DPUPR

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
						Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Ditangani	96,02%	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah	431.582.000	Dinperkim-tan
2	**Ketahanan Pangan**									
	a. Kampung Nelayan Merah Putih	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	178,2Ton	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang	50.000.000	DLHP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	178,2Ton	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembanga	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan	10 Kelompok	10.036.500	DLHP

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
						n Kelembagaan Nelayan Kecil	Pengembangan Kelembagaannya			
	b. Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)	66,67%	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio Lumbung Pangan Aktif	41,18%	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	24.957.200	DKPP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	100%	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 Dokumen	330.109.500	DKPP
	c. Pangan Akuatik	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa atau Diawasi	100%	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	2 Pelaku Usaha	11.000.000	DLHP

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
					Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota					
	d. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penerapan Teknologi Pertanian	24%	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	16 Unit	40.000.000	DKPP
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penerapan Teknologi Pertanian	24%	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	16 Unit	40.000.000	DKPP
	e. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	69,17%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	288 KM	3.917.981.600	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	69,17%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	288 KM	3.917.981.600	DPUPR

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
					Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	69,17%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	288 KM	3.917.981.600	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	69,17%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	288 KM	3.917.981.600	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	69,17%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	288 KM	3.917.981.600	DPUPR

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
					Daerah Kabupaten/Kota					
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	69,17%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	288 KM	3.917.981.600	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	69,17%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	288 KM	3.917.981.600	DPUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	69,17%	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	288 KM	3.917.981.600	DPUPR
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Kemanfaatan	100%	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	15 Unit	209.000.000	DKPP

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		PRASARANA PERTANIAN	Prasarana Pertanian			Jaringan Irigasi Usaha Tani				
	f. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/ Beras Dalam Negeri	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi	1900Kkal/ Kapita/ Hari	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Ton	498.493.400	DKPP
	g. Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi	1900Kkal/ Kapita/ Hari	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Ton	498.493.400	DKPP
3	**Kesehatan untuk semua**									
	a. Jaminan kesehatan nasional	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	51,85%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	70.502.223.835	Dinkesda
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	51,85 %	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	84 Paket	9.718.249.478	Dinkesda
	b. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Ketercapaian Layanan Penunjang	100%	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan	1 Unit Kerja	66.000.000.000	RSUD R.A.A TJOKRO-NEGORO

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
	Berkualitas di Kabupaten/Kota	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Medis dan Nonmedis di RSUD Tjokronegoro				Penunjang Pelayanan			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	93%	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	318.584.764.000	RSUD DR. TJITRO-WARDOJO
	d. Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	51,85%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang	1.366.651.308	Dinkesda
	e. Stunting	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	315.367.200	Bapperida
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.Jumlah Kematian Balita	81 Kasus	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44881 Orang	37.135.500	Puskesmas

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis di RSUD Tjokronegoro	100%	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	66.000.000.000	RSUD R.A.A TJOKRO-NEGORO
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	93%	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	318.584.764.000	RSUD DR. TJITRO-WARDOJO
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	51,85%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen	70.502.223.835	Dinkesda
	f. Makan bergizi gratis	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama	100%	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	150.000.000	Bag Kesra Setda

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
4	**Perluasan akses pendidikan**									
	a. Pembangunan dan revitalisasi pendidikan dasar dan menengah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	78,39%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	30.000.000	Dindikbud
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	78,39%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	20.765.100	Dindikbud
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	78,39%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	56.038.500	Dindikbud
	b. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	78,39%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	11 Konten Digital	13.811.200	Dindikbud
	c. Makan Bergizi Gratis	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu	97%	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	12 Dokumen	6.278.200	Dinkesda

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
					Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Aman	100%	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	37.000.000	DKPP
5	**Pertumbuhan ekonomi**									
	a. Pengendalian inflasi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi	1900Kkal/ Kapita/ Hari	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	50.000.000	DKPP

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Kecukupan Energi	1900Kkal/ Kapita/ Hari	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	10.000.000	DKPP
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga	+/- 10%	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan	37.500.000	DKUKMP
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	5,38	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	15.603.800	Bag. PSDA Setda
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	100%	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	3.000.000.000	BPKPAD

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga	+/-10 %	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan	37.500.000	DKUKMP
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas Harga	+/-10 %	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan	47.500.000	DKUKMP
	b. Percepatan pembentukan koperasi desa/ kelurahan merah putih	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif yang Berkembang Usahanya	5.28 %	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Unit Usaha	133.812.700	DKUKMP

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
						Restrukturisasi Usaha				
	c. Kemudahan perizinan daerah	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100%	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	136.519.000	DPMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kepeminatan (LOI)	9LOI	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	165.585.000	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100%	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	136.519.000	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai	100%	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu	Penyediaan dan pengelolaan Layanan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi	35 Pelaku Usaha	30.869.400	DPMPTSP

No	Program Strategis Nasional	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah
			Norma Standar Prosedur dan Kriteria		Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah kepeminatan (LOI)	9LOI	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	165.585.000	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100%	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha	136.519.000	DPMPTSP
6	**Program strategis nasional lain yang ditetapkan oleh Presiden**									

Sumber: SIPD-RI, 2026, dianalisis

5.4. Dukungan Program Daerah RKPD Tahun 2027 Kabupaten Purworejo Terhadap Program Delegasi Provinsi

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan sinergi pembangunan antara Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo, ditetapkanlah sejumlah program pembangunan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Program Delegasi merupakan program-program prioritas yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang dirancang untuk menjangkau langsung kebutuhna masyarakat di tingkat lokal. Secara keseluruhan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan sebanyak 136 program yang terdiri atas 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 program didelegasikan pelakasanaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah termasuk Kabupaten Purworejo.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan, Pemerintah Kabupaten Purworejo menyusun berbagai kegiatan dukungan untuk memestikan keberhasilan program-program tersebut. Berikut merupakan gambaran kegiatan-kegiatan untuk mendukung 35 program delegasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 5.12. Dukungan 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah

No	Program Delegasi Gubernur	Implementasi di Kabupaten Purworejo	Target 2027	Satuan	Perangkat Daerah
1	Melahirkan Pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa;	Pelaksanaan Validasi dan Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (VPSO-PKB)	494	Desa/ Kelurahan	BPKPAD
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	700	Orang	BKPSDM
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	Orang	BKPSDM
		Pengiriman peserta mengikuti pelatihan Pimpemdagri	10	Orang	BKPSDM

No	Program Delegasi Gubernur	Implementasi di Kabupaten Purworejo	Target 2027	Satuan	Perangkat Daerah
		Peningkatan Kapasitas bagi pimpinan PD dan Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Purworejo	66	Orang	BKPSDM
		Fasiliasi pelatihan perangkat desa di tingkat provinsi	1	Laporan	DPPPAPMD
		Fasilitasi ASN penerima beasiswa	4	Orang	BKPSDM
2	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Daya Tarik WIsata Kabupaten/Kota	3	Daya Tarik Wisata	Dinporapar
		Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	2	Usaha Pariwisata	Dinporapar
3	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go* internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;	Fasilitasi koordinasi pelaksanaan Kampung siaga bencana	2	Kampung	DINSOS-DALDUKKB
		Pemberdayaan melalui Kemitraan Bisnis dan Kemitraan Pemasaran	1	Laporan	DKUKMP
		Fasilitasi Sistem Informasi Desa (SID) di desa-desa	1	Laporan	DPPPAPMD
		Pelatihan pengelolaan domain desa	1	Laporan	Dinkominfo-stasandi
		Pelatihan pencegahan dan mitigasi	210	Orang	BPBD
4	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional;	Pendataan rumah tidak layak huni	1	Dokumen	Dinperkimtan
		Koordinasi penyiapan data backlog perumahan	1	Laporan	Dinperkimtan
5	Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;	Koordinasi kerukunan umat beragama dan penghayat kerpercayaan	40	Orang	Bakesbangpol

No	Program Delegasi Gubernur	Implementasi di Kabupaten Purworejo	Target 2027	Satuan	Perangkat Daerah
		Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan	1	Paket	Bakesbangpol
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (FKUB/FKDM/FASI)	1	Dokumen	Kecamatan
7	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center);	Fasilitasi Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi disabilitas	80	Orang	DINSOS-DALDUKKB
		Fasilitasi Kecamatan Berdaya	16	Kecamatan	DPPPAPMD
8	Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru;	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	45	Desa Wisata	Dinporapar
9	Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru;	Koordinasi Wilayah Pengembangan (WP) Keburejo	1	Laporan	Bapperida
10	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK dan KPK;	Sosialisasi Antikorupsi/Gratifikasi	1	Laporan	Inspektorat Daerah
		Monitoring dan Evaluasi Desa Anti Korupsi	1	Laporan	Inspektorat Daerah
11	Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa;	Spesialis keliling setiap desa	68	Desa/ Kelurahan	Dinkesda
		Pelayanan Puskesmas Keliling oleh Puskesmas	494	Desa/ Kelurahan	Dinkesda
		Pelayanan Puskesmas Pembantu	308	Puskesmas Pembantu	Dinkesda
		Pelaksanaan Posyandu ILP dan Poskesdes	494	Desa/ Kelurahan	Dinkesda
12	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap	Fasilitasi, identifikasi/ pemetaan, dan pemenuhan kebutuhan layanan	1	Laporan	Dindikbud

No	Program Delegasi Gubernur	Implementasi di Kabupaten Purworejo	Target 2027	Satuan	Perangkat Daerah
	Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta;	pendidikan pada semua jenjang			
13	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas di setiap Kecamatan;	Sosialisasi Kecamatan Berdaya dan RPPA ke 16 Kecamatan	32	Orang	DPPPAPMD
		Layanan Rumah Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan	3	Orang	DPPPAPMD
		Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Harian di UPT Rumah Pelayanan Sosial	37	Orang	DINSOS-DALDUKKB
14	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu;	Penyediaan 1 bidan di setiap puskesmas pembantu	62	Posyandu	Dinkesda
15	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak;	Fasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang berperkara di pengadilan melalui LBH	15	Perkara	Bag Hukum Setda
		Pelaksanaan Perbup tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi ASN	1	Laporan	Bag Hukum Setda
16	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis;	Fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM	1	Laporan	DKUKMP
17	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;	Pelatihan juru sembelih halal	1	Laporan	DKPP
		Operasional Rumah Potong Hewan	1	Laporan	DKPP
18	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata;	Pelatihan pemasaran digital dan pembuatan konten promosi desa wisata	10	Orang	Dinporapar
19	Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM;	Pembinaan UMKM per wilayah	780	Unit Usaha	DKUKMP
20	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di	Pengelolaan ruang terbuka hijau perkotaan	33,5	Ha	DLHP

No	Program Delegasi Gubernur	Implementasi di Kabupaten Purworejo	Target 2027	Satuan	Perangkat Daerah
	kawasan perkotaan maupun wilayah desa;				
21	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;	Pembinaan dan pelatihan koperasi	80	Koperasi	DKUKMP
22	Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;	Pemberian hadiah bagi atlet yang berprestasi pada tahun berjalan	20	Orang	Dinporapar
23	Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan;	Penyelenggaraan sekolah inklusi	154	Satuan Pendidikan	Dindikbud
		Fasilitasi bimbingan sosial kepada keluarga PGOT	22	Orang	DINSOS-DALDUKKB
24	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;	Pemanfaatan aplikasi e-siska	1	Dokumen	BPBD
		Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	100	Orang	BPBD
		Penyusunan dokumen KRB	1	Dokumen	BPBD
		Pemeliharaan peralatan PB	2	Laporan	BPBD
25	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila;	Fasilitasi dan Pemberian Hibah Bibit Ikan Nila Unggul	2	Paket	DLHP
26	BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah);	Rapat koordinas dengan BUMDes bersama TA, PD Menghadiri MAD BUMDes (laporan pertanggungjawaban tahun lalu dan rencana program kegiatan tahun depan)	1	Dokumen	DPPPAPMD
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa	1	Laporan	DPPPAPMD
27	Penguatan BPBD dan Tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat;	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	210	Orang	BPBD
		Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	350	Orang	Satpol PP Damkar
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	494	Desa/ Kelurahan	Satpol PP Damkar
28	Cek kesehatan gratis;	Cek kesehatan gratis bayi baru lahir	6513	Orang	Dinkesda
		Cek kesehatan gratis balita dan prasekolah	44881	Orang	Dinkesda

No	Program Delegasi Gubernur	Implementasi di Kabupaten Purworejo	Target 2027	Satuan	Perangkat Daerah
		Cek kesehatan gratis usia anak sekolah	127510	Orang	Dinkesda, Dindikbud
		Cek kesehatan gratis usia produktif	339297	Orang	Dinkesda
		Cek kesehatan gratis lansia	99994	Orang	Dinkesda
29	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Harian di UPT Rumah Pelayanan Sosial	37	Orang	DINSOS-DALDUKKB
		Fasilitasi pembuatan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	13	Orang	DINSOS-DALDUKKB
30	Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya;	Fasilitasi koordinasi pemanfaatan energi baru terbarukan di desa	1	Laporan	Bag. PSDA Setda
31	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;	Fasilitasi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil	1	Laporan	DLHP
32	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau;	Rapat koordinasi persiapan update Data Industri pada Aplikasi SIPIT (Sistem Informasi Pendataan Industri Terintegrasi)	1	Laporan	Dinperin-transnaker
		Fasilitasi Promosi Produk IKM pada Pameran Tk. Nasional, Provinsi (Jateng Expo) dan Kabupaten	1	Laporan	Dinperin-transnaker
		Fasilitasi Rumah Pangan Kita (RPK)	24	Kali	DKPP
33	Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan;	Rapat Koordinasi kerukunan umat beragama dan penghayat kerpercayaan	40	Orang	Bakesbangpol
		Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan	40	Paket	Bakesbangpol
34	Peningkatan operasional kader Posyandu;	Bimtek dan Rapat Koordinasi TP Posyandu	1	Paket	Dinkesda
35	Peningkatan kualitas hidup lansia.	Pelaksanaan Posyandu ILP	494	Desa/ Kelurahan	Dinkesda
		Pemeriksaan Kesehatan sesuai standar pada usia lanjut (sekilas Geriatri)	208,222	Orang	Dinkesda

Sumber: Tim Penyusun, 2026

Pada tahun 2027, Provinsi Jawa Tengah mengusung tema "Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi". Dukungan Kabupaten Purworejo terhadap tema tersebut antara lain:

Tabel 5.13. Dukungan Kabupaten Purworejo terhadap Tema Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

No	Indikator Tematik Tahun 2027	Satuan	Target	Implementasi di Kabupaten Purworejo	Perangkat Daerah
	Pariwisata				
1	Jumlah DTW alam yang dikembangkan	Unit	5	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata	Dinporapar
2	Jumlah desa/ kampung wisata baru yang dicanangkan	Unit	45	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata	Dinporapar
3	Jumlah usaha pariwisata ramah muslim yang ditetapkan	Unit	5	Monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata	Dinporapar
4	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	1.137.000	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinporapar
5	Jumlah konten kreator yang dilatih	Orang	10	Pelatihan pemasaran digital dan pembuatan konten promosi desa wisata	Dinporapar
	Ekonomi Syariah				
6	Jumlah produk tersertifikasi halal	Produk	18.111	Fasilitasi koordinasi sertifikasi produk halal	DKUKMP
7	Jumlah RPH/ RPU yang tersertifikasi halal	Unit	0	Operasional Rumah Potong Hewan	DKPP
8	Jumlah dana zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun	Rupiah	9.005.000.000	Fasilitasi koordinasi dana zakat, infaq, sekedah, dan dana sosial keagamaan lainnya	Bag. Kesra Setda
9	Jumlah penyaluran pembiayaan syariah	Rupiah	0	Fasilitasi koordinasi penyaluran pembiayaan syariah	Bag. PSDA Setda
10	Jumlah tukang jagal yang tersertifikat halal	Orang	4	Pelatihan juru sembelih halal	DKPP

Sumber: Hasil Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah & Tim Penyusun 2026

5.5. Super Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Pemerintah Kabupaten Purworejo menerapkan konsep/ pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, konsep tematik-holistik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/ atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Konsep integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara itu, konsep tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Konsep THIS ini juga terpadu dengan perencanan adaptif. Perencanaan adaptif merupakan proses merancang

strategi yang bisa diubah dengan cepat saat menghadapi masalah baru atau perubahan zaman. Hal ini diartikan pada proses perencanaan daerah tahun 2027 ini, program dan kegiatan yang dilakukan telah mengantisipasi isu terkini seperti permasalahan di tingkat global, nasional, regional, dan daerah, serta menjawab permasalahan terkini yang dialami masyarakat.

Penerapan Kebijakan dengan Konsep Tematik

Konsep/ pendekatan tematik telah diterapkan dalam penentuan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2027. Tema pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2027 yakni, "Penguatan Infrastruktur berbasis Lingkungan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah". Tema ini didukung oleh 5 prioritas, antara lain 1) Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi; 2) Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 3) Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau; 4) Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat; dan 5) Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien, transpara, dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan. Hal ini mendasari perencanaan jangka menengah, serta isu strategis pada tahun berkenaan. Berikut ini penerapan kebijakan konsep tematik pada pagu tiap tema pembangunan/ prioritas pembangunan.

Tabel 5.14. Prioritas Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2027

No	Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)
1	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi	179.555.354.804
2	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	124.766.493.687
3	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau	21.403.579.884
4	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat	276.314.882.428
5	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan	2.005.808.356.362

Sumber: Tim Penyusun, 2026

Penerapan Kebijakan dengan Konsep Holistik

Penerapan konsep/ pendekatan holistik dalam perencanaan di Kabupaten Purworejo di tahun 2027 yakni perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari penggalian data, permasalahan, penentuan isu strategis, dilanjutkan dengan penentuan tema dan prioritas pembangunan, serta penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, dan aktivitas yang

dilaksanakan pada tahun rencana, yakni 2027. Berikut ini menjukkan penerapan konsep holistik dalam perencanaan daerah tahun 2027 ini.

Tabel 5.15. Permasalahan, Isu Strategis, dan Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
Pemerataan layanan infrastruktur dasar di Kabupaten Purworejo masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Kondisi jalan dan jembatan yang kurang terpelihara, sistem drainase perkotaan yang belum terintegrasi dari hulu ke hilir, rendahnya keandalan sumber air untuk irigasi, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap air minum aman dan sanitasi layak menjadi hambatan utama. Di sektor perumahan dan kawasan permukiman, masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), meningkatnya kawasan kumuh, serta terbatasnya prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) memperparah ketimpangan akses, terutama di wilayah yang rentan bencana dan permukiman padat. Tantangan tersebut menuntut pendekatan sistemik dan berbasis kinerja untuk mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Diperlukan penguatan manajemen aset jalan, pengembangan SPAM perpipaan dan sistem pengelolaan air limbah terpadu, optimalisasi penanganan RTLH berbasis data, serta penyediaan PSU yang terintegrasi antar sektor. Upaya ini harus disertai dengan peningkatan kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan penegakan regulasi agar layanan infrastruktur dasar dapat menjangkau seluruh wilayah secara adil dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Pemerataan Layanan Infrastruktur Dasar	Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas jaringan infrastruktur yang menghubungkan antar pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo masih dihadapkan pada tantangan inklusivitas yang memerlukan perhatian serius. Di sektor ketenagakerjaan, tercipta ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, rendahnya produktivitas, dominasi sektor informal, serta terbatasnya perluasan kesempatan kerja formal dan kepesertaan jaminan sosial. Sektor koperasi dan UMKM menunjukkan kualitas kelembagaan yang belum sebanding dengan jumlahnya, kontribusi terhadap PDRB masih rendah, dan sinergi kemitraan lemah. Sementara itu, investasi relatif rendah dan terkonsentrasi, produktivitas pertanian fluktuatif akibat alih fungsi lahan dan keterbatasan infrastruktur, serta hilirisasi perikanan dan industri pengolahan berbasis lokal belum optimal. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, diperlukan strategi yang memperkuat daya saing sumber daya manusia, memperluas kesempatan kerja layak, dan mendorong diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal. Penguatan pelatihan dan link-and-match tenaga kerja, pengembangan ekosistem kewirausahaan, percepatan hilirisasi hasil pertanian dan perikanan, serta perbaikan iklim investasi melalui infrastruktur pendukung dan promosi yang terarah menjadi kunci. Pendekatan ini harus melibatkan seluruh	Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif	Pengembangan sistem ekonomi lokal yang inklusif dengan pengembangan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
pemangku kepentingan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan pelaku usaha mikro.		
Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Purworejo masih menghadapi tekanan dari pencemaran air, udara, dan lahan, terbatasnya pengelolaan sampah dengan kapasitas TPA yang menipis, serta rendahnya penerapan 3R di masyarakat. Degradasi lahan, belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau dan keanekaragaman hayati, serta kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi (banjir, longsor, kekeringan) semakin memperburuk kondisi ekosistem. Di sisi kebencanaan, keterbatasan tenaga fungsional, sarana prasarana, data risiko yang belum terintegrasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mitigasi menjadi tantangan tambahan. Mewujudkan lingkungan hidup yang berketahanan bencana memerlukan sinergi lintas sektor yang kuat. Pengendalian pencemaran, peningkatan pengelolaan persampahan berbasis 3R, penguatan tutupan vegetasi dan RTH, serta integrasi sistem informasi risiko bencana secara real-time harus menjadi prioritas. Penguatan kapasitas BPBD, edukasi kebencanaan berbasis komunitas, dan penerapan pendekatan berbasis risiko dalam tata kelola akan meningkatkan daya lenting daerah terhadap ancaman lingkungan dan bencana, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	Kualitas Lingkungan Hidup yang Berketahanan Bencana	Pengembangan infrastruktur tahan bencana dan peningkatan konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau
Ketahanan sosial Kabupaten Purworejo masih menghadapi tantangan dalam perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan. Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial masih terbatas, dan angka kemiskinan serta pengeluaran per kapita yang relatif rendah menunjukkan belum meratanya pemenuhan kebutuhan dasar. Di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penerapan kebijakan responsif gender masih rendah, kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kekerasan belum memadai, serta penanganan korban kekerasan belum menyeluruh. Tantangan serupa muncul pada pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan tingginya kehamilan tidak direncanakan serta kesenjangan akses layanan kontrasepsi dan edukasi kesehatan reproduksi. Penguatan ketahanan sosial menuntut pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas. Diperlukan peningkatan efektivitas perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak, serta perluasan edukasi kesehatan reproduksi yang ramah terhadap seluruh kelompok usia. Kolaborasi lintas sektor, pelibatan tokoh masyarakat, dan pemanfaatan data yang akurat	Ketahanan Sosial	Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
akan mendorong terciptanya keluarga yang tangguh, mandiri, dan bahagia, sekaligus mengurangi kerentanan sosial secara berkelanjutan.		
Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Purworejo masih dihadapkan pada sejumlah persoalan yang menghambat efektivitas penyelenggaraan urusan. Implementasi reformasi birokrasi belum merata, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam perencanaan dan penganggaran masih terbatas, serta kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya sesuai standar. Di bidang perencanaan, indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan pemanfaatan data masih belum optimal. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, optimalisasi aset dan pajak daerah, penerapan sistem merit kepegawaian, serta kapasitas inovasi daerah masih perlu diperkuat. Pengawasan berbasis risiko dan transformasi digital juga belum berjalan maksimal. Membangun tata kelola yang tangkas, adaptif, akuntabel, dan kolaboratif memerlukan penguatan sistem manajemen kinerja, digitalisasi pemerintahan, dan budaya kerja berbasis data. Penerapan SPIP terintegrasi, penguatan kapasitas APIP, pemanfaatan Satu Data, serta kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan menjadi langkah strategis. Dengan demikian, pemerintahan daerah dapat lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, menghasilkan kebijakan berbasis bukti, dan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta berkelanjutan	Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas, Adaptif, Akuntabel, dan Kolaboratif	Pengembangan sistem tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan berbasis data spasial untuk mendukung pelayanan publik yang efisien. transparan. dan adaptif terhadap kebutuhan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan

Sumber: Tim Penyusun, 2026

Penerapan Kebijakan dengan Konsep Integratif

Penerapan konsep/ pendekatan integratif dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang melibatkan semua perangkat daerah: penanganan kemiskinan melalui 1 perangkat daerah 1 desa dampingan, penanganan stunting yang melibatkan semua perangkat daerah, kegiatan SDGs yang didukung banyak program dan anggaran di semua perangkat daerah. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah juga dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak usia sekolah tidak sekolah, pelaksanaan kabupaten sehat, TMMD, dan lain sebagainya. Penerapan konsep integratif terkait pelibatan *stakeholders* di luar perangkat daerah, yakni aktor non pemerintah: akademisi, tim penggerak PKK, lembaga amil zakat, BAZNAS, komunitas tertentu, kelompok masyarakat, media massa, TJLSP, dan lain sebagainya.

Penerapan Kebijakan dengan Konsep Spasial

Penerapan konsep/ pendekatan spasial diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Purworejo. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan, dan infrastruktur yang

dilaksanakan dengan pendekatan kewilayahan di tiap-tiap kecamatan. Diperhatikan kesenjangan antar wilayah, kemudian dipetakan secara spasial mengenai data awal dan hasil intervensinya. Program kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah tahun 2027 yang disusun juga memperhatikan Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Purworejo. hal ini dilaksanakan guna menghindari ketimpangan antar wilayah. Gambar berikut ini menunjukkan pembagian WP di Kabupaten Purworejo.



Gambar 5.1. Peta Wilayah Pengembangan (WP) di Kabupaten Purworejo

Sumber: RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2025-2029

Selanjutnya, tabel berikut ini menunjukkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing WP pada tahun 2027.

Tabel 5.16. Kegiatan yang Akan Dilaksanakan di Masing-Masing WP Tahun 2027

No	Kecamatan	Kegiatan
	WP Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo	
1	Purworejo	Pemeliharaan Berkala Jalan Brigjend Katamso
		Pemeliharan Berkala Jalan Veteran
		Peningkatan Jalan Brigjen Wiyono
		Rehabilitasi Daerah Irigasi Kebangsan
2	Kutoarjo	Peningkatan Jalan Suren - Wareng
		Pemeliharan berkala jalan Marditomo
		Pembangunan Pasar Induk Kutoarjo
3	Banyuurip	Peningkatan Jalan Bencorejo - Angkrukketip
		Peningkatan Jalan Kedungsari - Boro Wetan
		Penggantian Jembatan Dusun Surobayan RT 01 RW 01 Desa Surorejo
4	Bayan	Peningkatan Jalan Sambeng-Seren
		Peningkatan Jalan Sumbersari -Tanjungrejo
		Pengadaan PJU di Desa Ketiwijayan, Sambeng
		Pembangunan drainase di jalan kabupaten
	WP Kawasan Perbatasan (Border City)	

No	Kecamatan	Kegiatan
5	Purwodadi	Pembangunan Drainase Jalan Panembahan Senopati Km 2, Desa Jenarwetan
		Pengadaan PJU di ruas jalan Bencorejo-Angkrukketip
6	Bagelen	Penggantian jembatan Ruas Jalan Tlogokates - Batas DIY
		Pengadaan PJU di Desa Clapar, Hargorojo, Sokoagung, Semono, Kemanukan, Piji, Clapar.
	WP Kawasan Perkotaan Kemiri Pituruh	
7	Kemiri	Peningkatan Jalan Wonosido - Kemranggen
		Pembangunan Jalan Usaha Tani
8	Butuh	Rehab GOR Butuh
		Pengadaan PJU di Desa Kedungsri
9	Pituruh	Peningkatan Jalan Pituruh kesawen - Megulung
		Pengadaan PJU Desa Prapag Kidul, Sumber, Prapag Kidul
	WP Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	
10	Grabag	Rehabulitasi Jalan Poros Desa Ketawang - Pantai
		Rekonstruksi Jalan Diponegoro
		Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N Rejosari
		Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N 38 Purworejo
		Pengadaan PJU di Desa Wonoenggal, Kedungkamal
11	Ngombol	Peningkatan Jalan Piono - Cokroyasan
		Pengadaan PJU di ruas jalan Laban-Gesing
	WP Kawasan Bendungan Bener	
12	Bener	Peningkatan Jalan Bener - Guntur
		Rehabilitasi Daerah Irigasi Krengseng
		Pengadaan PJU di Desa Karangsari, Nglaris
13	Gebang	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Gintungan-Jetis
		Pengadaan PJU di Desa Winong Kidul
	WP Kawasan Otoritatif Borobudur	
14	Kaligesing	Pemeliharaan Berkala Jembatan Hulosobo
		Pemeliharaan Berkala Jembatan Kaliharjo 1 (Ruas Jalan Somongari - Jatirejo)
		Peningkatan Jalan Pandanrejo - Ngaran
		Pembangunan Ruang Kelas Baru SD N Kaligesing
15	Loano	Pembangunan Jalan Trirejo - Karangrejo Lanjutan
		Optimalisasi IPLT Jetis
		Pembangunan Puskesmas Banyuasin
		Rehabilitasi Daerah Irigasi Kedung Miring
		Rehabilitasi Bendung Dung Lemper
		Pengadaan PJU di Desa Kalinongko
	WP Kawasan Perkotaan Bruno	
16	Bruno	Peningkatan Jalan Bruno - Brondong - Watuduwur - Gowong
		Rehabilitasi Daerah Irigasi (Kombang III, Klereng I, Klereng II, dan Klereng III)
		Rehabilitasi Bendung Blade dan Kedung Minger
		Pembangunan ruang kelas SMP N 21 Purworejo
		Pengadaan PJU di Desa Somoleter

Sumber: Tim Penyusun, 2026

5.6. Dukungan Program RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 terhadap Satu Data Indonesia

Pemerintah Kabupaten Purworejo turut mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat kabupaten melalui Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Satu Data Daerah sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola

data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Dukungan Program Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2027 secara lebih lanjut dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.17. Dukungan Program RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 terhadap Satu Data Indonesia

No	Program	Anggaran	Pelaksana
1.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.319.283.333	Dinkominfostasandi
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	63.780.000	Dinkominfostasandi
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.080.191.900	Dinkominfostasandi
4.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	519.000.000	Bapperida
5.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	108.289.600	Seluruh Perangkat Daerah

Dinkominfostasandi selaku Walidata Daerah, memiliki proporsi dukungan terbesar dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Purworejo. Melalui program-program tersebut, Walidata Daerah bersama Sekretariat Satu Data Indonesia yang berkedudukan di Bapperida beserta seluruh Produsen Data (seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah) melalui Walidata Pendukung (Sekretaris Perangkat Daerah) memiliki peran sebagai berikut:

a. Walidata Daerah mengoordinasikan penyusunan usulan Daftar Data yang selanjutnya dijadikan acuan dalam pengumpulan, pemeriksaan, serta publikasi data;
b. Walidata Daerah memeriksa kesesuaian dan kelengkapan data yang disampaikan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung sehingga data yang terkumpul telah dipastikan akurasinya;
c. Walidata Daerah menyebarluaskan data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Daerah (aplikasi DataJo) sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan;
d. Walidata Daerah menyelenggarakan Forum Satu Data Tingkat Kabupaten di setiap semester sebagai forum koordinasi dan komunikasi bersama seluruh anggota dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

5.7. Rencana Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Terdapat 29 (dua puluh sembilan) jenis pelayanan

dasar untuk kabupaten yang terbagi dalam enam bidang urusan, ditunjukkan pada berikut.

Tabel 5.18. Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Purworejo Tahun 2027

No	Indikator	Target 2027	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
1	**Pendidikan Anak Usia Dini** Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Pendidikan	Dindikbud
2	**Pendidikan Dasar** a. Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar b. Rata-rata kemampuan literasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) c. Rata-rata kemampuan numerasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SD) d. Rata-rata kemampuan literasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP) e. Rata-rata kemampuan numerasi berdasarkan hasil Asesmen Nasional (SMP)	100% 76,99 66,27 84,81 74,41		
3	**Pendidikan Kesetaraan** Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%		
4-15	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan Tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	Kesehatan	Dinkesda
16	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	100%	Pekerjaan Umum	DPUPR
17	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%		

No	Indikator	Target 2027	Bidang Urusan	Perangkat Daerah
18	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Perumahan Rakyat	Dinpekim-tan
19	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%		
20	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Trantibum-linmas	Satpol PP Damkar
21	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%		
22	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Trantibum-linmas	BPBD
23	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%		
24	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%		
25 - 28	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100% 100% 100% 100%	Sosial	DINSOS-DALDUKKB
29	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%		

Sumber: RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2025-2029

Selanjutnya, tabel berikut ini menunjukkan rencana pelaksanaan SPM di Kabupaten Purworejo pada tahun 2027.

Tabel 5.19. Rencana Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Purworejo Tahun 2027

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
SPM Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	56.038.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	350.000.000	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.986.094.746	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	557.270.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	-	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.019.200	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	77.692.300	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	-	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	105.000.000	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	9.590.000	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	9.323.700	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	385.000.000	

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.000.000	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	600.000.000	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	898.026.000	
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	-	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	157.825.300	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.815.000.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	320.000.000	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.765.100	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.400.000.000	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	112.935.800	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	900.000.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	180.000.000	
	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	16.189.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Kekhususan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	998.234.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	705.060.000	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	58.524.300	
	Literasi dan Numerasi	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	35.645.085	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.724.000	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	-	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	7.500.000	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	455.706.200	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	510.016.600	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6.413.810.500	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	3.327.097.000	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	14.214.000	
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	8.371.100	
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	66.042.700	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	270.951.300	
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	400.000.000	

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	91.188.000	
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	13.811.200	
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.888.441.000	
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.027.840.300	
SPM Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	24.856.500	DINAS KESEHATAN DAERAH
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	18.421.000	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	29.680.000	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
		Advokasi, Pemberdayaan,	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	25.870.000	UPT PUSKESMAS BAYAN

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	42.930.000	UPT PUSKESMAS BENER
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	21.346.000	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	26.424.000	UPT PUSKESMAS BRUNO
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	30.816.000	UPT PUSKESMAS BUBUTAN

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	22.845.000	UPT PUSKESMAS BUTUH
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	81.267.000	UPT PUSKESMAS CANGKREP
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	49.844.000	UPT PUSKESMAS DADIREJO
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	11.312.000	UPT PUSKESMAS GEBANG
		Advokasi, Pemberdayaan,	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.710.000	UPT PUSKESMAS GRABAG

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	44.134.000	UPT PUSKESMAS KALIGESING
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	40.032.000	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	11.585.000	UPT PUSKESMAS KEMIRI
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	20.794.000	UPT PUSKESMAS KUTOARJO

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	36.419.000	UPT PUSKESMAS LOANO
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	20.850.000	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	54.360.000	UPT PUSKESMAS PITURUH
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17.584.000	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
		Advokasi, Pemberdayaan,	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	45.600.000	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	70.614.000	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	33.360.000	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	43.537.000	UPT PUSKESMAS WINONG
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	41.226.000	UPT PUSKESMAS WIRUN

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
	Pelayanan Kesehatan Balita	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	37.135.500	DINAS KESEHATAN DAERAH
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.192.455.200	DINAS KESEHATAN DAERAH
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	48.584.500	DINAS KESEHATAN DAERAH
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	110.614.700	DINAS KESEHATAN DAERAH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.376.000	UPT PUSKESMAS BAGELEN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.840.000	UPT PUSKESMAS BANYUASIN

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96.460.000	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.940.000	UPT PUSKESMAS BAYAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	82.680.000	UPT PUSKESMAS BENER
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.137.000	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	157.248.000	UPT PUSKESMAS BRUNO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	101.952.000	UPT PUSKESMAS BUBUTAN

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.908.000	UPT PUSKESMAS BUTUH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.847.000	UPT PUSKESMAS CANGKREP
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.332.000	UPT PUSKESMAS DADIREJO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94.360.000	UPT PUSKESMAS GEBANG
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	103.456.000	UPT PUSKESMAS GRABAG
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.036.000	UPT PUSKESMAS KALIGESING

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	107.568.000	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	129.427.000	UPT PUSKESMAS KEMIRI
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.922.000	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.448.000	UPT PUSKESMAS LOANO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68.380.000	UPT PUSKESMAS MRANTI
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	112.719.000	UPT PUSKESMAS NGOMBOL

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.835.000	UPT PUSKESMAS PITURUH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.854.000	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	55.744.000	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	86.124.000	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.160.000	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.824.000	UPT PUSKESMAS WINONG

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	179.280.000	UPT PUSKESMAS WIRUN
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.763.800	DINAS KESEHATAN DAERAH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.572.000	UPT PUSKESMAS BAGELEN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	780.000	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.248.000	UPT PUSKESMAS BAYAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	624.000	UPT PUSKESMAS BENER

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.666.000	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.340.000	UPT PUSKESMAS BRUNO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	260.000	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	546.000	UPT PUSKESMAS BUTUH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.857.000	UPT PUSKESMAS CANGKREP
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.744.000	UPT PUSKESMAS DADIREJO

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.872.000	UPT PUSKESMAS GEBANG
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	104.000	UPT PUSKESMAS KALIGESING
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.346.000	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.836.000	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.170.000	UPT PUSKESMAS LOANO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.142.000	UPT PUSKESMAS MRANTI

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.430.000	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.456.000	UPT PUSKESMAS PITURUH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.616.000	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.816.000	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.716.000	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.990.000	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.704.000	UPT PUSKESMAS WINONG
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.276.000	UPT PUSKESMAS WIRUN
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	73.683.250	DINAS KESEHATAN DAERAH
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.288.695.708	DINAS KESEHATAN DAERAH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.521.000	UPT PUSKESMAS BAGELEN

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.954.000	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.912.000	UPT PUSKESMAS BAYAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.812.000	UPT PUSKESMAS BENER
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	962.000	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.430.000	UPT PUSKESMAS BRUNO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	910.000	UPT PUSKESMAS BUBUTAN

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.312.000	UPT PUSKESMAS BUTUH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.704.000	UPT PUSKESMAS CANGKREP
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.080.000	UPT PUSKESMAS DADIREJO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.314.000	UPT PUSKESMAS GEBANG
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.508.000	UPT PUSKESMAS KALIGESING
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.680.000	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.745.000	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.641.600	UPT PUSKESMAS LOANO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.120.000	UPT PUSKESMAS MRANTI
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.080.000	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.600.000	UPT PUSKESMAS PITURUH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.992.000	UPT PUSKESMAS PURWOREJO

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.720.000	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.150.000	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.496.000	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.412.000	UPT PUSKESMAS WINONG
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.900.000	UPT PUSKESMAS WIRUN
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	20.485.400	DINAS KESEHATAN DAERAH

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	20.993.560	DINAS KESEHATAN DAERAH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.900.000	UPT PUSKESMAS BAGELEN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.443.000	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	572.000	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.744.000	UPT PUSKESMAS BAYAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.186.000	UPT PUSKESMAS BENER

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.758.000	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	7.410.000	UPT PUSKESMAS BRUNO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.554.000	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.392.000	UPT PUSKESMAS BUTUH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.588.000	UPT PUSKESMAS CANGKREP
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.976.000	UPT PUSKESMAS DADIREJO

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.426.000	UPT PUSKESMAS GEBANG
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.938.000	UPT PUSKESMAS KALIGESING
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.340.000	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.706.000	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.876.000	UPT PUSKESMAS LOANO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.744.000	UPT PUSKESMAS MRANTI

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.797.000	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.888.000	UPT PUSKESMAS PITURUH
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.864.000	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.120.000	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.630.000	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.056.000	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.172.000	UPT PUSKESMAS WINONG
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.744.000	UPT PUSKESMAS WIRUN
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	19.351.200	DINAS KESEHATAN DAERAH
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	17.396.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	12.907.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.383.412.000	DINAS KESEHATAN DAERAH

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	429.941.700	DINAS KESEHATAN DAERAH
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	7.707.042.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	912.016.350	
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	509.768.700	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9.718.249.478	
			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	809.796.870	
			Pengembangan Puskesmas	-	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	15.000.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	50.000.000	
			Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.151.464.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	21.346.600	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	18.000.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	156.401.000	UPT PUSKESMAS BAGELEN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	15.292.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	5.265.000	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	47.428.000	

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	12.566.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	131.674.000	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	1.590.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	6.071.000	UPT PUSKESMAS BAYAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	126.285.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	20.449.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	4.238.000	UPT PUSKESMAS BENER
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	153.693.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	9.895.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.860.000	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	95.882.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	4.249.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	6.565.000	UPT PUSKESMAS BRUNO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	508.419.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	24.890.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.392.000	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	90.422.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	15.777.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.743.000	UPT PUSKESMAS BUTUH
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	95.151.200	

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	22.054.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	6.872.000	UPT PUSKESMAS CANGKREP
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	111.502.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	7.256.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	3.068.000	UPT PUSKESMAS DADIREJO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	143.715.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	11.302.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	10.556.000	UPT PUSKESMAS GEBANG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	241.370.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	5.316.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Layanan Imunisasi	7.982.000	UPT PUSKESMAS GRABAG

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	117.844.800	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	18.714.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	6.838.000	UPT PUSKESMAS KALIGESING
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	195.934.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	4.802.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.990.000	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	141.820.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	1.718.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	254.708.000	UPT PUSKESMAS KEMIRI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	21.408.000	

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.256.000	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	169.179.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	26.651.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.898.000	UPT PUSKESMAS LOANO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	120.772.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	19.760.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.340.000	UPT PUSKESMAS MRANTI
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	129.228.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	13.318.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pengelolaan Layanan Imunisasi	8.320.000	UPT PUSKESMAS NGOMBOL

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Daerah Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	242.546.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	10.026.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	10.400.000	UPT PUSKESMAS PITURUH
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	224.336.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	6.216.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	5.785.000	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	244.885.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	6.268.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	5.629.000	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	130.084.000	

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	15.544.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.120.000	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	116.279.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	12.397.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	3.549.000	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	67.194.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	4.023.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.483.000	UPT PUSKESMAS WINONG
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	180.652.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	3.676.000	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Layanan Imunisasi	4.264.000	UPT PUSKESMAS WIRUN

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	83.650.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	947.000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	182.175.000	DINAS KESEHATAN DAERAH
SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2.900.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	47.686.000	
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	100.000.000	
			Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.533.786.000	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
	Daerah Kabupaten/Kota				
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	32.435.000	
			Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.900.000.000	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	115.616.000	
			Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-	
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.317.700	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.355.300	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.559.400	
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5.706.200	
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	2.655.200	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3.841.600	

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
		Pengembangan Perumahan			
SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan informasi rawan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	249.429.800	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	100.000.000	
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	110.073.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	168.406.900	
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	3.124.330.435	
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	38.990.500	
			Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	-	
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	28.600.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12.040.000	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	125.009.990	
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	231.669.000	

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	5.947.200	
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	6.748.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	75.082.231	
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	93.216.600	
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	199.995.000	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	19.125.300	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	162.020.000	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	30.000.100	
	Pelayananan Ketenteraman	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	6.339.700	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
	dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota	(PPNS) Kabupaten/Kota			DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	521.906.600	
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	49.588.600	
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	2.330.300	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	390.116.500	
	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	5.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	12.499.700	
			Penyediaan Makanan	82.255.000	
			Penyediaan Sandang	14.995.500	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.448.000	
SPM Bidang Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Pelayanan Dukungan Psikososial	5.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
	pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	dan Sosial Kabupaten/Kota			PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	12.499.700	
			Penyediaan Makanan	82.255.000	
			Penyediaan Sandang	14.995.500	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2.448.000	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.500.000	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	39.220.000	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	8.249.800	
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	2.109.900	

SPM	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Perangkat Daerah
			Pemberian Layanan Kedaruratan	1.250.000	
			Pemberian Layanan Rujukan	61.477.600	
			Penyediaan Alat Bantu	13.748.000	
			Penyediaan Permakanan	74.500.000	
			Penyediaan Sandang	6.970.000	

Sumber: SIPD-RI, 2026

5.8. Rencana Kegiatan, Aktivitas, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial, dan Hibah pada Tahun 2027

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dijabarkan dalam matrik yang disertai dengan indikator, sasaran, pagu, lokasi, sumber dana serta prakiraan maju tahun 2028. Tabel berikut ini menunjukkan rincian matrik masing-masing perangkat daerah.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						660.771.799.297,00							724.739.892.627,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						656.599.758.597,00							720.551.332.827,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						656.599.758.597,00							720.551.332.827,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						530.346.893.466,00							580.287.679.610,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*530.346.893.466,00*							*580.287.679.610,00*	
			1.Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	530.346.893.466,00						100 %	580.287.679.610,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.591.600,00					-		191.320.100,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.591.600,00					-		191.320.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	58.383.000,00						22 Dokumen	50.586.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	89.073.300,00						24 Laporan	88.313.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.135.300,00						1 Dokumen	52.421.100,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						58.383.000,00							50.586.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	58.383.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	50.586.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						89.073.300,00							88.313.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	89.073.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Laporan	88.313.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						3.135.300,00							52.421.100,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.135.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	52.421.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						528.873.391.416,00					-		578.025.365.360,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						528.873.391.416,00					-		578.025.365.360,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5488 Orang/bulan		405 Orang/bulan	405 Orang/bulan	33.011.724.777,00						5488 Orang/bulan	578.000.442.360,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	22.607.600,00						44 Laporan	24.923.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	-		-	4929 Orang/bulan	495.839.059.039,00						-	0,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						33.011.724.777,00							578.000.442.360,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5488 Orang/bulan		405 Orang/bulan	405 Orang/bulan	33.011.724.777,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD				5488 Orang/bulan	578.000.442.360,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						22.607.600,00							24.923.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	22.607.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	24.923.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan						495.839.059.039,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	-		-	4929 Orang/bulan	495.839.059.039,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru				-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						68.534.400,00					-		70.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						68.534.400,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	68.534.400,00						11 Laporan	70.000.000,00	
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						68.534.400,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	68.534.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.611.600,00					-		10.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.611.600,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	10.611.600,00						16 Dokumen	10.000.000,00	
	1.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						10.611.600,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	10.611.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.328.000,00					-		3.405.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.328.000,00					-		3.405.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	0,00						17 Dokumen	2.011.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang		0 Orang	200 Orang	1.328.000,00						200 Orang	1.394.000,00	
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0,00							2.011.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	2.011.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						1.328.000,00							1.394.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang		0 Orang	200 Orang	1.328.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				200 Orang	1.394.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						191.918.200,00					-		212.958.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						191.918.200,00					-		212.958.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	5 Paket	12.521.400,00						5 Paket	13.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	11.741.200,00						5 Paket	12.942.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	84.949.400,00						12 Paket	92.656.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	14.794.100,00						7 Paket	16.240.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.298.200,00						2 Paket	7.020.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	720.000,00						12 Laporan	3.170.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	56.178.000,00						12 Laporan	61.936.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.715.900,00						4 Dokumen	5.194.000,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.521.400,00							13.800.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	5 Paket	12.521.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	13.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						11.741.200,00							12.942.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	11.741.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	12.942.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						84.949.400,00							92.656.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	84.949.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	92.656.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.794.100,00							16.240.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	14.794.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Paket	16.240.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.298.200,00							7.020.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.298.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	7.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						720.000,00							3.170.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	720.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	3.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						56.178.000,00							61.936.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	56.178.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	61.936.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.715.900,00							5.194.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.715.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Dokumen	5.194.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		283.643.100,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		283.643.100,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	28 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						Unit	0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						14 Unit	201.771.100,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	23 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						Unit	81.872.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						Unit	0,00	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							201.771.100,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Unit	201.771.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							81.872.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	81.872.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						552.890.000,00					-		567.146.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						552.890.000,00					-		567.146.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	374.690.000,00						12 Laporan	408.678.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	178.200.000,00						12 Laporan	158.468.000,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						374.690.000,00							408.678.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	374.690.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	408.678.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						178.200.000,00							158.468.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	178.200.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	158.468.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						497.628.250,00					-		923.842.050,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						497.628.250,00					-		923.842.050,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	142.130.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	93 Unit		89 Unit	89 Unit	171.300.000,00						93 Unit	592.430.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	4.944.250,00						20 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit		86 Unit	86 Unit	151.357.000,00						86 Unit	5.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit		17 Unit	17 Unit	126.067.000,00						17 Unit	158.782.050,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						2 Unit	25.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						171.300.000,00							592.430.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	93 Unit		89 Unit	89 Unit	171.300.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				93 Unit	592.430.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.944.250,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	4.944.250,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Unit	5.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						151.357.000,00							158.782.050,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit		86 Unit	86 Unit	151.357.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				86 Unit	158.782.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						126.067.000,00							142.130.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit		17 Unit	17 Unit	126.067.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Unit	142.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						126.028.820.831,00							139.481.184.017,00	
		Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana sesuai standar						*126.028.820.831,00*							*139.381.184.017,00*	
			1.Persentase Satuan Pendidikan yang Sarana/ Prasarananya dalam Kondisi Baik	85.21 %		76.60 %	78.39 %	4.607.026.000,00						80.19 %	5.186.341.583,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						67.272.574.185,00					Masyarakat		78.161.683.517,00	
		Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik						67.272.574.185,00					Masyarakat		78.161.683.517,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						Unit	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0,00						Ruang	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0,00						Ruang	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit		8 Unit	9 Unit	898.026.000,00						9 Unit	750.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		0 Ruang	4 Ruang	340.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0,00						Ruang	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		1 Ruang	2 Ruang	170.000.000,00						1 Ruang	100.000.000,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	13 Paket		100 Paket	40 Paket	464.000.000,00						13 Paket	550.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00						Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		2 Ruang	2 Ruang	600.000.000,00						1 Ruang	350.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit		8 Unit	12 Unit	320.000.000,00						10 Unit	928.413.583,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	35 Ruang		8 Ruang	31 Ruang	1.815.000.000,00						20 Ruang	2.025.000.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket		20 Paket	0 Paket	0,00						10 Paket	482.928.000,00	
	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						0,00							0,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						898.026.000,00							750.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit		8 Unit	9 Unit	898.026.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				9 Unit	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						340.000.000,00							0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		0 Ruang	4 Ruang	340.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						170.000.000,00							100.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		1 Ruang	2 Ruang	170.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Ruang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						464.000.000,00							550.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	13 Paket		100 Paket	40 Paket	464.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				13 Paket	550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar						0,00							0,00	
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	3 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						600.000.000,00							350.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		2 Ruang	2 Ruang	600.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Ruang	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						320.000.000,00							928.413.583,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit		8 Unit	5 Unit	320.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	928.413.583,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						1.815.000.000,00							2.025.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	35 Ruang		8 Ruang	31 Ruang	1.815.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Ruang	2.025.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						0,00							482.928.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket		20 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Paket	482.928.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						36.990.382.500,00					Masyarakat		43.123.536.100,00	
		Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik						36.990.382.500,00					Masyarakat		43.123.536.100,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00						4 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		1 Ruang	7 Ruang	900.000.000,00						4 Ruang	820.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		Ruang	0 Ruang	0,00						2 Ruang	460.000.000,00	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00						1 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		1 Unit	1 Unit	180.000.000,00						3 Unit	360.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket		10 Paket	10 Paket	413.292.000,00						10 Paket	680.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		Ruang	4 Ruang	1.400.000.000,00						1 Ruang	250.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00						1 Ruang	105.000.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket		0 Paket	1 Paket	400.000.000,00						5 Paket	500.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Unit	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						900.000.000,00							820.000.000,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		1 Ruang	7 Ruang	900.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Ruang	820.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						0,00							460.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Ruang	460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium						0,00							200.000.000,00	
		Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Ruang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						180.000.000,00							360.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Unit	360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						413.292.000,00							680.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket		10 Paket	10 Paket	413.292.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Paket	680.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						1.400.000.000,00							250.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang		Ruang	4 Ruang	1.400.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Ruang	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							105.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Ruang	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						400.000.000,00							500.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket		0 Paket	2 Paket	400.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						19.060.338.946,00					Masyarakat		15.926.307.100,00	
		Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik						19.060.338.946,00					Masyarakat		15.926.307.100,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang		0 Ruang	3 Ruang	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		0 Unit	2 Unit	350.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		2 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	7 Paket		23 Paket	40 Paket	705.060.000,00						7 Paket	137.500.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00						-	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		6 Ruang	10 Ruang	557.270.000,00						1 Ruang	150.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						0,00							100.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						0,00							0,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang		0 Ruang	3 Ruang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						350.000.000,00							0,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		0 Unit	2 Unit	350.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						0,00							75.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Unit		2 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						705.060.000,00							137.500.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	7 Paket		23 Paket	40 Paket	705.060.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Paket	137.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	0 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						557.270.000,00							150.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		6 Ruang	10 Ruang	557.270.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Ruang	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						2.705.525.200,00					Masyarakat		2.269.657.300,00	
		Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Sarana/Prasarananya dalam kondisi baik						2.705.525.200,00					Masyarakat		2.269.657.300,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00						-	0,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00						1 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		4 Ruang	2 Ruang	385.000.000,00						1 Ruang	66.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru						0,00							0,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	0 Ruang		0 Ruang	1 Ruang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan						0,00							35.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						385.000.000,00							66.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		4 Ruang	2 Ruang	385.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Ruang	66.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Meningkatnya kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan seluruh jenjang						*126.028.820.831,00*							*139.381.184.017,00*	
			1.Persentase satuan pendidikan yang memiliki kualitas pembelajaran dengan kategori baik	54,06%		61,87%	61,96%	102.109.553.500,00						80.19 %	5.186.341.583,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						67.272.574.185,00					Masyarakat		78.161.683.517,00	
		Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik						67.272.574.185,00					Masyarakat		78.161.683.517,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	801 Peserta Didik		3780 Peserta Didik	1601 Peserta Didik	455.706.200,00						801 Peserta Didik	455.706.200,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	489 Satuan Pendidikan		489 Satuan Pendidikan	489 Satuan Pendidikan	7.500.000,00						489 Satuan Pendidikan	10.543.500,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	489 Satuan Pendidikan		489 Satuan Pendidikan	489 Satuan Pendidikan	51.603.700.000,00						489 Satuan Pendidikan	52.613.130.079,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	489 Orang		489 Orang	489 Orang	118.523.500,00						489 Orang	41.296.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	130.244.400,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	489 Satuan Pendidikan		489 Satuan Pendidikan	489 Satuan Pendidikan	3.327.097.000,00						489 Satuan Pendidikan	11.456.204.900,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20376 Peserta Didik		20376 Peserta Didik	20376 Peserta Didik	157.825.300,00						20376 Peserta Didik	332.557.600,00	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						455.706.200,00							455.706.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	801 Peserta Didik		3780 Peserta Didik	1601 Peserta Didik	455.706.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				801 Peserta Didik	455.706.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						7.500.000,00							10.543.500,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	489 Satuan Pendidikan		489 Satuan Pendidikan	489 Satuan Pendidikan	7.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				489 Satuan Pendidikan	10.543.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						51.603.700.000,00							52.613.130.079,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	489 Satuan Pendidikan		489 Satuan Pendidikan	489 Satuan Pendidikan	51.603.700.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja				489 Satuan Pendidikan	52.613.130.079,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						118.523.500,00							41.296.600,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	489 Orang		489 Orang	489 Orang	118.523.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				489 Orang	41.296.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						30.000.000,00							130.244.400,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	130.244.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						3.327.097.000,00							11.456.204.900,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	489 Satuan Pendidikan		489 Satuan Pendidikan	489 Satuan Pendidikan	3.327.097.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				489 Satuan Pendidikan	11.456.204.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						157.825.300,00							332.557.600,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	20376 Peserta Didik		20376 Peserta Didik	20376 Peserta Didik	157.825.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20376 Peserta Didik	332.557.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						36.990.382.500,00					Masyarakat		43.123.536.100,00	
		Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik						36.990.382.500,00					Masyarakat		43.123.536.100,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1100 Peserta Didik		1100 Peserta Didik	1100 Peserta Didik	112.935.800,00						1100 Peserta Didik	167.629.900,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	731 Peserta Didik		731 Peserta Didik	731 Peserta Didik	270.951.300,00						731 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	577 Satuan Pendidikan		577 Satuan Pendidikan	577 Satuan Pendidikan	66.042.700,00						577 Satuan Pendidikan	80.822.800,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	89 Satuan Pendidikan		89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	29.137.000.000,00						89 Satuan Pendidikan	30.275.645.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	227 Orang		227 Orang	227 Orang	29.340.200,00						227 Orang	46.570.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	11 Konten Digital		11 Konten Digital	1 Konten Digital	13.811.200,00						11 Konten Digital	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.765.100,00						1 Dokumen	20.765.100,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	16.189.800,00						Kegiatan	0,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	89 Satuan Pendidikan		89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	2.027.840.300,00						89 Satuan Pendidikan	6.327.084.600,00	
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						112.935.800,00							167.629.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1100 Peserta Didik		1100 Peserta Didik	1100 Peserta Didik	112.935.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1100 Peserta Didik	167.629.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						270.951.300,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	731 Peserta Didik		731 Peserta Didik	731 Peserta Didik	270.951.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				731 Peserta Didik	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						66.042.700,00							80.822.800,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	577 Satuan Pendidikan		577 Satuan Pendidikan	577 Satuan Pendidikan	66.042.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				577 Satuan Pendidikan	80.822.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						29.137.000.000,00							30.275.645.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	89 Satuan Pendidikan		89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	29.137.000.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja				89 Satuan Pendidikan	30.275.645.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						29.340.200,00							46.570.000,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	227 Orang		227 Orang	227 Orang	29.340.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				227 Orang	46.570.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						13.811.200,00							0,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	11 Konten Digital		11 Konten Digital	1 Konten Digital	13.811.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Konten Digital	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						20.765.100,00							20.765.100,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.765.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	20.765.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						16.189.800,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	16.189.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Kegiatan	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						2.027.840.300,00							6.327.084.600,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	89 Satuan Pendidikan		89 Satuan Pendidikan	89 Satuan Pendidikan	2.027.840.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				89 Satuan Pendidikan	6.327.084.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						19.060.338.946,00					Masyarakat		15.926.307.100,00	
		Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kualitas proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini						19.060.338.946,00					Masyarakat		15.926.307.100,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	425 Satuan Pendidikan		424 Satuan Pendidikan	425 Satuan Pendidikan	998.234.800,00						425 Satuan Pendidikan	1.005.740.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	802 Satuan Pendidikan		794 Satuan Pendidikan	794 Satuan Pendidikan	11.320.800.000,00						802 Satuan Pendidikan	11.419.200.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	125 Orang		50 Orang	50 Orang	28.316.600,00						100 Orang	28.316.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	56.038.500,00						1 Dokumen	137.271.700,00	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						998.234.800,00							1.005.740.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	425 Satuan Pendidikan		424 Satuan Pendidikan	425 Satuan Pendidikan	998.234.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				425 Satuan Pendidikan	1.005.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						11.320.800.000,00							11.419.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	802 Satuan Pendidikan		802 Satuan Pendidikan	794 Satuan Pendidikan	11.320.800.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler DAK Non Fisik-BOP PAUD				802 Satuan Pendidikan	11.419.200.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						28.316.600,00							28.316.600,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	125 Orang		50 Orang	50 Orang	28.316.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Orang	28.316.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						56.038.500,00							137.271.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	56.038.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	137.271.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	41.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						2.705.525.200,00					Masyarakat		2.269.657.300,00	
		Meningkatnya jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memiliki indeks kualitas pembelajaran dengan label capaian baik						2.705.525.200,00					Masyarakat		2.269.657.300,00	
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik		139 Peserta Didik	150 Peserta Didik	105.000.000,00						150 Peserta Didik	170.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan		10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	77.692.300,00						10 Satuan Pendidikan	90.612.600,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan		10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	2.116.900.000,00						10 Satuan Pendidikan	1.852.599.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.019.200,00						1 Dokumen	8.750.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	246 Peserta Didik		246 Peserta Didik	246 Peserta Didik	9.323.700,00						246 Peserta Didik	37.105.700,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						105.000.000,00							170.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik		139 Peserta Didik	150 Peserta Didik	105.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				150 Peserta Didik	170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						77.692.300,00							90.612.600,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan		10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	77.692.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Satuan Pendidikan	90.612.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						2.116.900.000,00							1.852.599.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	10 Satuan Pendidikan		10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	2.116.900.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja				10 Satuan Pendidikan	1.852.599.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						2.019.200,00							8.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.019.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	8.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						9.323.700,00							37.105.700,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	246 Peserta Didik		246 Peserta Didik	246 Peserta Didik	9.323.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				246 Peserta Didik	37.105.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Terpenuhinya kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di seluruh jenjang						*126.028.820.831,00*							*139.381.184.017,00*	
			3.Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	85.73 %		52.51 %	56.72 %	14.021.619.331,00							2.873.278.800,00	
			3.Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan Terakhir S-1/ D-IV dan Bersertifikat Pendidik di Seluruh Jenjang	54,06%		61,87%	61,96%								5.186.341.583,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						67.272.574.185,00					Masyarakat		78.161.683.517,00	
		Meningkatnya jumlah guru Sekolah Dasar yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik						67.272.574.185,00					Masyarakat		78.161.683.517,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	520 Orang		520 Orang	472 Orang	6.413.810.500,00						520 Orang	7.352.481.100,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4863 Orang		4863 Orang	4695 Orang	510.016.600,00						4863 Orang	529.744.600,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	0 Orang	0,00						50 Orang	12.063.870,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	16 Komunitas		16 Komunitas	16 Komunitas	5.724.000,00						16 Komunitas	5.724.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang		180 Orang	180 Orang	35.645.085,00						180 Orang	35.645.085,00	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						6.413.810.500,00							7.352.481.100,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	520 Orang		520 Orang	472 Orang	6.413.810.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				520 Orang	7.352.481.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						510.016.600,00							529.744.600,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4863 Orang		4863 Orang	4695 Orang	510.016.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4863 Orang	529.744.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						0,00							12.063.870,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				50 Orang	12.063.870,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						5.724.000,00							5.724.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	16 Komunitas		16 Komunitas	16 Komunitas	5.724.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Komunitas	5.724.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						35.645.085,00							35.645.085,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	180 Orang		180 Orang	180 Orang	35.645.085,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				180 Orang	35.645.085,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						36.990.382.500,00					Masyarakat		43.123.536.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya jumlah guru Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik						36.990.382.500,00					Masyarakat		43.123.536.100,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	120 Orang		150 Orang	150 Orang	1.888.441.000,00						120 Orang	2.096.866.800,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	960 Orang		960 Orang	600 Orang	91.188.000,00						960 Orang	109.856.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	89 Orang		50 Orang	50 Orang	8.371.100,00						89 Orang	8.371.200,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	90 Orang		90 Orang	90 Orang	14.214.000,00						90 Orang	14.924.700,00	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						1.888.441.000,00							2.096.866.800,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	120 Orang		150 Orang	150 Orang	1.888.441.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				120 Orang	2.096.866.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						91.188.000,00							109.856.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	960 Orang		960 Orang	600 Orang	91.188.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				960 Orang	109.856.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						8.371.100,00							8.371.200,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	89 Orang		50 Orang	50 Orang	8.371.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				89 Orang	8.371.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						14.214.000,00							14.924.700,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	90 Orang		90 Orang	90 Orang	14.214.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				90 Orang	14.924.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						19.060.338.946,00					Masyarakat		15.926.307.100,00	
		Meningkatnya jumlah guru PAUD yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik						19.060.338.946,00					Masyarakat		15.926.307.100,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang		250 Orang	40 Orang	4.986.094.746,00						250 Orang	5.288.200,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1854 Orang		1854 Orang	1854 Orang	58.524.300,00						1854 Orang	2.867.990.600,00	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						4.986.094.746,00							5.288.200,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	250 Orang		250 Orang	40 Orang	4.986.094.746,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				250 Orang	5.288.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						58.524.300,00							2.867.990.600,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1854 Orang		1854 Orang	1854 Orang	58.524.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1854 Orang	2.867.990.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	41.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						2.705.525.200,00					Masyarakat		2.269.657.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya jumlah guru Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang memenuhi kualifikasi Pendidikan terakhir S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik						2.705.525.200,00					Masyarakat		2.269.657.300,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	9.590.000,00						50 Orang	9.590.000,00	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						9.590.000,00							9.590.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	9.590.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				50 Orang	9.590.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						13.560.000,00							2.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal pendidikan						*13.560.000,00*							*2.500.000,00*	
			1.Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal yang Telah Ditetapkan	100 %		15.54 %	15.54 %	13.560.000,00						95.35 %	2.500.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						13.560.000,00					-		2.500.000,00	
		Ditetapkannya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Pendidikan Dasar						13.560.000,00					-		2.500.000,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	43 Orang		43 Orang	43 Orang	13.560.000,00						Orang	0,00	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						Dokumen	0,00	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0,00							0,00	
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						13.560.000,00							0,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	43 Orang		43 Orang	43 Orang	13.560.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0,00							2.500.000,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Dokumen	2.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						4.808.100,00							15.488.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan						*4.808.100,00*							*15.488.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat yang Berizin	100 %		100 %	100 %	4.808.100,00						100 %	15.488.000,00	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						780.000,00					-		10.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berizin						780.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	780.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						780.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	780.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						4.028.100,00					-		5.488.000,00	
		Meningkatnya jumlah Satuan pendidikan PAUD dan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berizin						4.028.100,00					-		5.488.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.932.800,00						1 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.095.300,00						Dokumen	2.988.000,00	
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						1.932.800,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.932.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						2.095.300,00							2.988.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.095.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Dokumen	2.988.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						205.676.200,00							764.481.200,00	
		Meningkatnya penggunaan bahasa daerah						*205.676.200,00*							*764.481.200,00*	
			1.Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan dan Menerapkan Pembiasaan Penggunaan Bahasa Jawa	100 %		87.22 %	87.22 %	205.676.200,00						95.34 %	764.481.200,00	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						205.676.200,00					-		764.481.200,00	
		Diterapkannya pembiasaan penggunaan dan pengembangan bahasa Jawa di satuan pendidikan						205.676.200,00					-		764.481.200,00	
			Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	489 Orang		489 Orang	489 Orang	205.676.200,00						489 Orang	764.481.200,00	
	1.01.06.2.01.0010	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota						205.676.200,00							764.481.200,00	
		Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	489 Orang		489 Orang	489 Orang	205.676.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				489 Orang	764.481.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						4.172.040.700,00							4.188.559.800,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						4.172.040.700,00							4.188.559.800,00	
6.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						2.341.611.900,00							1.275.850.000,00	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan						*2.341.611.900,00*							*1.275.850.000,00*	
			1.Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	80 %		70 %	80 %	2.341.611.900,00						80 %	1.275.850.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						267.514.900,00					-		307.291.000,00	
		Terkelolanya objek kebudayaan masyarakat						267.514.900,00					-		307.291.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	267.514.900,00						1000 Orang	307.291.000,00	
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						267.514.900,00							307.291.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	267.514.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1000 Orang	307.291.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.074.097.000,00					-		968.559.000,00	
		Meningkatnya jumlah kesenian tradisional masyarakat yang dilestarikan						2.074.097.000,00					-		968.559.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	100 Objek		199 Objek	1 Objek	1.548.509.100,00						100 Objek	955.471.100,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	525.587.900,00						2 Laporan	13.087.900,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						1.548.509.100,00							955.471.100,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	100 Objek		199 Objek	1 Objek	1.548.509.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Objek	955.471.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						525.587.900,00							13.087.900,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	525.587.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	13.087.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						71.296.500,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional						*71.296.500,00*							*300.000.000,00*	
			1.Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	68.26 %		54.61 %	58.02 %	71.296.500,00						61.43 %	300.000.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						71.296.500,00					-		300.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah Kesenian Tradisonal Masyarakat Yang Dibina						71.296.500,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	60 Orang		60 Orang	60 Orang	71.296.500,00						60 Orang	300.000.000,00	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						71.296.500,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	60 Orang		60 Orang	60 Orang	71.296.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				60 Orang	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						520.222.000,00							520.222.000,00	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah						*520.222.000,00*							*520.222.000,00*	
			1.Persentase Keterlibatan Masyarakat Pelaku Sejarah Lokal	7.32 %		7.23 %	7.23 %	520.222.000,00						7.28 %	520.222.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						520.222.000,00					-		520.222.000,00	
		Meningkatnya jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah						520.222.000,00					-		520.222.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	520.222.000,00						500 Orang	520.222.000,00	
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota						520.222.000,00							520.222.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	520.222.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				500 Orang	520.222.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						280.379.400,00							1.040.517.200,00	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan						*280.379.400,00*							*1.040.517.200,00*	
			1.Persentase Cagar Budaya yang Dikelola secara Terpadu	38.73 %		32.04 %	33.80 %	280.379.400,00						35.56 %	1.040.517.200,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						49.444.400,00					-		75.000.000,00	
		Ditetapkannya objek yang diduga Cagar Budaya menjadi cagar budaya Peringkat Kabupaten/Kota						49.444.400,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek		10 Objek	10 Objek	49.444.400,00						Objek	75.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						49.444.400,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 Objek		10 Objek	10 Objek	49.444.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Objek	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						230.935.000,00					-		965.517.200,00	
		Terkelolanya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						230.935.000,00					-		965.517.200,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	141 Objek		101 Objek	111 Objek	208.290.000,00						121 Objek	419.903.400,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek		5 Objek	5 Objek	22.645.000,00						5 Objek	545.613.800,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						208.290.000,00							419.903.400,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	141 Objek		101 Objek	111 Objek	208.290.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				121 Objek	419.903.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya						22.645.000,00							545.613.800,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek		5 Objek	5 Objek	22.645.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Objek	545.613.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
10.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						958.530.900,00							1.051.970.600,00	
		Meningkatnya tata kelola museum						*958.530.900,00*							*1.051.970.600,00*	
			1.Persentase Peningkatan Kunjungan Museum	2 %		2 %	2 %	958.530.900,00						2 %	1.051.970.600,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						958.530.900,00					-		1.051.970.600,00	
		Meningkatnya jumlah kunjungan museum						958.530.900,00					-		1.051.970.600,00	
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.236.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	21 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00						7 Orang	0,00	
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit		1 Unit	1 Unit	766.686.000,00						1 Unit	766.868.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	165.608.900,00						-	85.102.600,00	
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu						26.236.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.236.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman						0,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	21 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum						766.686.000,00							766.868.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit		1 Unit	1 Unit	766.686.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	766.868.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						165.608.900,00							85.102.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	165.608.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	85.102.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KESEHATAN DAERAH KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS KESEHATAN DAERAH						243.347.835.498,00							287.886.675.843,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						243.347.835.498,00							287.886.675.843,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						243.347.835.498,00							287.886.675.843,00	
11.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						198.600.012.092,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*138.021.060.000,00*							*150.063.442.249,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	138.021.060.000,00						100 %	150.063.442.249,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						44.680.000,00					-		77.500.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						44.680.000,00					-		77.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	29.568.500,00						1 Dokumen	55.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	3.111.500,00						6 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00						0 Dokumen	12.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.568.500,00							55.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	29.568.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	55.500.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.111.500,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	3.111.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Laporan	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	12.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						137.015.210.000,00					-		148.408.984.549,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						137.015.210.000,00					-		148.408.984.549,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2105 Orang/bulan		2105 Orang/bulan	2105 Orang/bulan	136.938.337.000,00						2105 Orang/bulan	148.196.215.549,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan		26 Laporan	26 Laporan	76.873.000,00						26 Laporan	212.769.000,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						136.938.337.000,00							148.196.215.549,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2105 Orang/bulan		2105 Orang/bulan	2105 Orang/bulan	136.938.337.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2105 Orang/bulan	148.196.215.549,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						76.873.000,00							212.769.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan		26 Laporan	26 Laporan	76.873.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				26 Laporan	212.769.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.637.000,00					-		18.799.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.637.000,00					-		18.799.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.637.000,00						1 Laporan	18.799.000,00	
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.637.000,00							18.799.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.637.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	18.799.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
	1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.944.000,00					-		16.506.600,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.944.000,00					-		16.506.600,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.944.000,00						1 Dokumen	16.506.600,00	
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.944.000,00							16.506.600,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.944.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	16.506.600,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						198.143.300,00					-		366.800.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						198.143.300,00					-		366.800.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.270.200,00						1 Paket	5.876.300,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.672.200,00						1 Paket	8.662.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.603.200,00						1 Paket	106.714.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.321.500,00						1 Paket	8.629.400,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	76.608.200,00						1 Paket	8.529.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.288.000,00						1 Laporan	7.905.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.379.000,00						1 Laporan	216.581.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.001.000,00						1 Dokumen	3.903.600,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.270.200,00							5.876.300,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.270.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	5.876.300,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.672.200,00							8.662.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.672.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	8.662.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.603.200,00							106.714.200,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.603.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	106.714.200,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.321.500,00							8.629.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.321.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	8.629.400,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						76.608.200,00							8.529.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	76.608.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	8.529.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.288.000,00							7.905.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.288.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	7.905.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						75.379.000,00							216.581.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.379.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	216.581.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.001.000,00							3.903.600,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.001.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	3.903.600,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						404.421.700,00					-		431.977.600,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						404.421.700,00					-		431.977.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	363.689.700,00						12 Laporan	384.498.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.732.000,00						12 Laporan	47.479.000,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						363.689.700,00							384.498.600,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	363.689.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	384.498.600,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						40.732.000,00							47.479.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.732.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	47.479.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						341.024.000,00					-		742.874.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						341.024.000,00					-		742.874.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	39.950.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	117.033.000,00						11 Unit	359.505.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	122 Unit		122 Unit	122 Unit	2.400.000,00						122 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit		64 Unit	64 Unit	34.999.000,00						64 Unit	39.290.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	55.843.000,00						3 Unit	124.560.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	3.358.000,00						8 Unit	65.464.000,00	
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	17112 Ha		17112 Ha	17112 Ha	83.431.000,00						17112 Ha	109.105.000,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							39.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	39.950.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						117.033.000,00							359.505.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	117.033.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Unit	359.505.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.400.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	122 Unit		122 Unit	122 Unit	2.400.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				122 Unit	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						34.999.000,00							39.290.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit		64 Unit	64 Unit	34.999.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				64 Unit	39.290.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						55.843.000,00							124.560.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	55.843.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Unit	124.560.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.358.000,00							65.464.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	3.358.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Unit	65.464.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah						83.431.000,00							109.105.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	17112 Ha		17112 Ha	17112 Ha	83.431.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17112 Ha	109.105.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
12.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						112.705.781.538,00							147.401.546.230,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar						*102.946.887.338,00*							*135.120.677.435,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)	71.716.630.035,00						98.60 (%)	77.010.501.248,00	
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51,85 %	20.594.708.898,00						33.33 %	49.726.637.252,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						20.594.708.898,00					-		50.526.637.252,00	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar						20.594.708.898,00					-		50.526.637.252,00	
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit		0 Unit	2 Unit	7.707.042.000,00						2 Unit	22.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	11 Unit		1 Unit	11 Unit	0,00						11 Unit	9.000.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit		1 Unit	1 Unit	809.796.870,00						1 Unit	1.200.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	800.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	350 Unit		30 Unit	15 Unit	912.016.350,00						15 Unit	800.000.000,00	
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	0 Unit		0 Unit	1 Unit	509.768.700,00						0 Unit	3.000.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit		150 Unit	300 Unit	507.893.800,00						300 Unit	299.625.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	84 Paket		72 Paket	84 Paket	9.718.249.478,00						84 Paket	13.178.693.952,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	429.941.700,00						27 Paket	98.318.300,00	
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas						7.707.042.000,00							22.000.000.000,00	
		Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1 Unit		0 Unit	1 Unit	7.707.042.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	22.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						0,00							9.000.000.000,00	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	11 Unit		1 Unit	11 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Unit	9.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						809.796.870,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	0 Unit		1 Unit	1 Unit	809.796.870,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	1.200.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						0,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						912.016.350,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	350 Unit		30 Unit	15 Unit	912.016.350,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Unit	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						509.768.700,00							3.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	0 Unit		0 Unit	1 Unit	509.768.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						507.893.800,00							299.625.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	300 Unit		150 Unit	150 Unit	507.893.800,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)				300 Unit	299.625.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						9.718.249.478,00							13.178.693.952,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	84 Paket		72 Paket	84 Paket	9.718.249.478,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				84 Paket	13.178.693.952,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						429.941.700,00							98.318.300,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	429.941.700,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)				27 Paket	98.318.300,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						91.798.254.440,00					-		96.484.092.059,00	
		Tercapainya Mutu dan Layanan Kesehatan sesuai standar						91.798.254.440,00					-		96.484.092.059,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.061.900,00						4 Dokumen	8.349.331,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	70.502.223.835,00						4 Dokumen	75.761.280.430,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	7 Unit		0 Unit	7 Unit	45.140.500,00						7 Unit	45.140.736,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	29 Unit		29 Unit	29 Unit	16.242.800,00						29 Unit	17.048.416,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1 Unit	1 Unit	245.714.200,00						1 Unit	479.745.250,00	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						8.061.900,00							8.349.331,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	8.061.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Dokumen	8.349.331,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						70.502.223.835,00							75.761.280.430,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	70.502.223.835,00	Kab. Purworejo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Dokumen	75.761.280.430,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						45.140.500,00							45.140.736,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	7 Unit		0 Unit	7 Unit	45.140.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Unit	45.140.736,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						16.242.800,00							17.048.416,00	
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	29 Unit		29 Unit	63 Unit	16.242.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				29 Unit	17.048.416,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						245.714.200,00							479.745.250,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit		1 Unit	1 Unit	245.714.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	479.745.250,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						153.754.000,00					-		213.174.900,00	
		Terlaksananya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Izin operasional						153.754.000,00					-		213.174.900,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	40 Unit		44 Unit	25 Unit	4.335.000,00						30 Unit	13.148.200,00	
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	30 Unit		0 Unit	30 Unit	0,00						30 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	30 Unit		32 Unit	30 Unit	149.419.000,00						30 Unit	100.026.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						4.335.000,00							13.148.200,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	40 Unit		44 Unit	25 Unit	4.335.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 Unit	13.148.200,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	30 Unit		0 Unit	30 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 Unit	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						149.419.000,00							100.026.700,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	30 Unit		32 Unit	30 Unit	149.419.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				30 Unit	100.026.700,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular						*82.198.424.440,00*							*85.280.865.283,00*	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %	4.068.149.310,00						90.94 %	3.046.533.768,00	
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		0,92	0,962	4.068.149.310,00						27 %	3.046.533.768,00	
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %	4.068.149.310,00						0.20 %	3.046.533.768,00	
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000	4.068.149.310,00						0.01 Per 1000	3.046.533.768,00	
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		0,36	37 %	4.068.149.310,00						39 %	3.046.533.768,00	
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000	4.068.149.310,00						0.20 Per 1000	3.046.533.768,00	
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %	4.068.149.310,00						97 %	3.046.533.768,00	
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %	4.068.149.310,00						70 %	3.046.533.768,00	
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %	4.068.149.310,00						6.17 %	3.046.533.768,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						91.798.254.440,00					-		96.484.092.059,00	
		Tersedianya layanan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular						91.798.254.440,00					-		96.484.092.059,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239112 Orang		239112 Orang	239112 Orang	12.907.000,00						239112 Orang	15.964.592,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7033 Orang		7033 Orang	7033 Orang	17.396.000,00						7033 Orang	20.491.106,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	7843 Orang	1.288.695.708,00						7843 Orang	289.900.600,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8985 Orang		8985 Orang	8985 Orang	73.683.250,00						8985 Orang	74.687.140,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	13.480.625,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	13.445.421,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.126.486.000,00						1 Dokumen	297.457.314,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	94.450.400,00						1 Dokumen	557.696.700,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.547.500,00						1 Dokumen	13.621.850,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.480.000,00						1 Dokumen	100.812.804,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	36.805.000,00						1 Laporan	50.556.550,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	46.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1614 Orang		1614 Orang	1614 Orang	16.866.500,00						1614 Orang	33.294.500,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	518 Orang		518 Orang	518 Orang	10.899.500,00						518 Orang	74.687.140,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	218 Orang		218 Orang	218 Orang	403.685.652,00						218 Orang	820.187.481,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						-	4.264.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	520 Paket		104 Paket	104 Paket	620.490.200,00						-	458.609.200,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	67.473.800,00						-	75.782.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1616 Orang		0 Orang	404 Orang	18.000.000,00						-	18.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	59.270.000,00						-	35.498.300,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	127.930.800,00						-	100.701.800,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						12.907.000,00							15.964.592,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239112 Orang		239112 Orang	239112 Orang	12.907.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				239112 Orang	15.964.592,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						17.396.000,00							20.491.106,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7033 Orang		7033 Orang	7033 Orang	17.396.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7033 Orang	20.491.106,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.288.695.708,00							289.900.600,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	7843 Orang	1.288.695.708,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				7843 Orang	289.900.600,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						73.683.250,00							74.687.140,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8985 Orang		8985 Orang	8985 Orang	73.683.250,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)				8985 Orang	74.687.140,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						0,00							13.480.625,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	13.480.625,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						0,00							13.445.421,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	13.445.421,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.126.486.000,00							297.457.314,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.126.486.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	297.457.314,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						94.450.400,00							557.696.700,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	94.450.400,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	557.696.700,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						10.547.500,00							13.621.850,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.547.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	13.621.850,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						76.480.000,00							100.812.804,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.480.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	100.812.804,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						36.805.000,00							50.556.550,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	36.805.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	50.556.550,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						0,00							46.000.000,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	46.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						16.866.500,00							33.294.500,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1614 Orang		1614 Orang	1614 Orang	16.866.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1614 Orang	33.294.500,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						10.899.500,00							74.687.140,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	518 Orang		518 Orang	518 Orang	10.899.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				518 Orang	74.687.140,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						403.685.652,00							820.187.481,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	218 Orang		218 Orang	218 Orang	403.685.652,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)				218 Orang	820.187.481,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						0,00							4.264.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	4.264.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						620.490.200,00							458.609.200,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	520 Paket		104 Paket	104 Paket	620.490.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				-	458.609.200,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						67.473.800,00							75.782.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	67.473.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	75.782.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1616 Orang		0 Orang	404 Orang	18.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	18.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						59.270.000,00							35.498.300,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	59.270.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	35.498.300,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						127.930.800,00							100.701.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	127.930.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				-	100.701.800,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar						*82.198.424.440,00*							*85.280.865.283,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus	8.212.138.695,00						4 Kasus	6.621.704.437,00	
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus	8.212.138.695,00						80 Kasus	6.621.704.437,00	
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %	8.212.138.695,00						74.07 %	6.621.704.437,00	
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %	8.212.138.695,00						81 %	6.621.704.437,00	
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %	8.212.138.695,00						75 %	6.621.704.437,00	
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.80 %	21.50 %	8.212.138.695,00						21.40 %	6.621.704.437,00	
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %	8.212.138.695,00						9.40 %	6.621.704.437,00	
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %	8.212.138.695,00						20 %	6.621.704.437,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						91.798.254.440,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan berdasarkan Siklus Hidup						91.798.254.440,00					-		96.484.092.059,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	6706 Orang	110.614.700,00						9145 Orang	120.615.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9136 Orang		9136 Orang	6510 Orang	48.584.500,00						9136 Orang	50.444.600,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6513 Orang		6513 Orang	6513 Orang	1.192.455.200,00						6513 Orang	75.167.967,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44881 Orang		44881 Orang	44881 Orang	37.135.500,00						44881 Orang	37.263.600,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	127510 Orang	20.993.560,00						127510 Orang	616.795.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	452396 Orang		452396 Orang	452396 Orang	19.351.200,00						452396 Orang	24.677.354,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	133326 Orang		133326 Orang	133326 Orang	20.485.400,00						133326 Orang	44.485.400,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	5535 Orang	10.763.800,00						5535 Orang	230.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	5.151.464.000,00						27 Dokumen	3.944.730.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	29 Dokumen		29 Dokumen	29 Dokumen	234.024.400,00						29 Dokumen	474.894.796,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	404 Orang		404 Orang	404 Orang	21.346.600,00						404 Orang	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	101.888.000,00						1 Dokumen	152.991.400,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1 Tatanan		0 Tatanan	1 Tatanan	50.000.000,00						1 Tatanan	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	278.785.035,00						3 Dokumen	50.702.235,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	27.000 Orang		0 Orang	6750 Orang	6.082.000,00						-	6.081.785,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						110.614.700,00							120.615.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	6706 Orang	110.614.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				9145 Orang	120.615.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						48.584.500,00							50.444.600,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9136 Orang		9136 Orang	6510 Orang	48.584.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				9136 Orang	50.444.600,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						1.192.455.200,00							75.167.967,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6513 Orang		6513 Orang	6513 Orang	1.192.455.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				6513 Orang	75.167.967,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						37.135.500,00							37.263.600,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44881 Orang		44881 Orang	44881 Orang	37.135.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44881 Orang	37.263.600,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						20.993.560,00							616.795.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	127510 Orang	20.993.560,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				127510 Orang	616.795.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						19.351.200,00							24.677.354,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	452396 Orang		452396 Orang	452396 Orang	19.351.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				452396 Orang	24.677.354,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						20.485.400,00							44.485.400,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	133326 Orang		133326 Orang	133326 Orang	20.485.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				133326 Orang	44.485.400,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10.763.800,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	5535 Orang	10.763.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5535 Orang	230.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						5.151.464.000,00							3.944.730.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	5.151.464.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				27 Dokumen	3.944.730.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						234.024.400,00							474.894.796,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	29 Dokumen		29 Dokumen	29 Dokumen	234.024.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				29 Dokumen	474.894.796,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						21.346.600,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	404 Orang		404 Orang	404 Orang	21.346.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				404 Orang	35.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						101.888.000,00							152.991.400,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	101.888.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	152.991.400,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1 Tatanan		0 Tatanan	1 Tatanan	50.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Tatanan	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						278.785.035,00							50.702.235,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	278.785.035,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Dokumen	50.702.235,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah						6.082.000,00							6.081.785,00	
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	27.000 Orang		0 Orang	6750 Orang	6.082.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	6.081.785,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
		Tersedianya data dan sistem informasi kesehatan						*159.064.200,00*							*177.642.019,00*	
			1.Persentase Fasilitas Kesehatan yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	65 %		100%	100 %	159.064.200,00						61 %	177.642.019,00	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						159.064.200,00					-		177.642.019,00	
		Tercapainya pemanfatan ERM di fasilitas Pelayanan Kesehatan						159.064.200,00					-		177.642.019,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	159.064.200,00						1 Dokumen	177.642.019,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						159.064.200,00							177.642.019,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	159.064.200,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	177.642.019,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
13.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						1.583.771.160,00							965.996.000,00	
		Tersedianya SDM kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar profesi						*1.583.771.160,00*							*965.996.000,00*	
			1.Rasio Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis terhadap Populasi	5.60 Per 1000		5.3 Per 1000	5.3 Per 1000	1.583.771.160,00						5.4 Per 1000	965.996.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						7.184.160,00					-		32.000.000,00	
		Tercapainya tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik						7.184.160,00					-		32.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.249.260,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.934.900,00						1 Dokumen	7.000.000,00	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						1.934.900,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.934.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						5.249.260,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.249.260,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						193.175.000,00					-		106.000.000,00	
		Tercapainya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang memiliki Standar Ketenagaan Minimal						193.175.000,00					-		106.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	182.175.000,00						1 Dokumen	95.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00						-	11.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						182.175.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	182.175.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				1 Dokumen	95.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.02.0004	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan						11.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	11.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.383.412.000,00					-		827.996.000,00	
		Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Teknis Sesuai Standar						1.383.412.000,00					-		827.996.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	325 Orang		250 Orang	325 Orang	1.383.412.000,00						325 Orang	827.996.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.383.412.000,00							827.996.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	325 Orang		250 Orang	325 Orang	1.383.412.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum (DAU)				325 Orang	827.996.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						193.175.000,00					-		106.000.000,00	
		Terwujudnya Puskesmas dengan SDMK sesuai standar						193.175.000,00					-		106.000.000,00	
14.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						442.342.600,00							243.173.000,00	
		Tersedianya obat, alat kesehatan dan optikal serta makanan yang aman dan bermutu						*432.342.600,00*							*195.773.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Peredaran Obat, Alat Kesehatan dan Optikal, serta Makanan yang Aman dan Bermutu	98.50 %		95 %	97 %	432.342.600,00						97.50 %	195.773.000,00	
			2.Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100 %		89.7 %	90%	332.101.200,00						90 %	95.531.600,00	
			2.Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dari Lintas Sektor yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100 %		89.7 %	90 %	100.241.400,00						90 %	100.241.400,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						184.778.600,00					-		27.331.600,00	
		Tersedianya Obat, Alat Kesehatan dan Optikal serta Makanan yang Aman dan Bermutu						184.778.600,00					-		27.331.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	184.778.600,00						1 Dokumen	27.331.600,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						184.778.600,00							27.331.600,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	184.778.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan				1 Dokumen	27.331.600,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
		Terwujudnya Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang sesuai standar						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						134.299.000,00					-		37.400.000,00	
		Terwujudnya Produk Pangan Industri Rumah Tangga yang Memenuhi Ketentuan Keamanan Pangan						134.299.000,00					-		37.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	28 Dokumen		140 Dokumen	16 Dokumen	134.299.000,00						20 Dokumen	37.400.000,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						134.299.000,00							37.400.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	28 Dokumen		140 Dokumen	1 Dokumen	134.299.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Dokumen	37.400.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						6.278.200,00					-		37.400.000,00	
		Tercapainya Sarana Tempat Pengelolaan Pangan (Jasa Boga dan Depot Air Minum) yang memenuhi persyaratan						6.278.200,00					-		37.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	6.278.200,00						12 Dokumen	37.400.000,00	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						6.278.200,00							37.400.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	6.278.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	37.400.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						6.745.400,00					-		30.800.000,00	
		Tercapainya Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajajan yang mendapatkan Pembinaan						6.745.400,00					-		30.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	6.745.400,00						100 Dokumen	30.800.000,00	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						6.745.400,00							30.800.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	6.745.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Dokumen	30.800.000,00	DINAS KESEHATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						100.241.400,00					-		100.241.400,00	
		Tercapainya produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang memenuhi persyaratan saat dilakukan pengawasan						100.241.400,00					-		100.241.400,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Unit		80 Unit	80 Unit	100.241.400,00						80 Unit	100.241.400,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						100.241.400,00							100.241.400,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80 Unit		80 Unit	80 Unit	100.241.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				80 Unit	100.241.400,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
15.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2.595.454.200,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*144.710.200,00*							*281.058.000,00*	
			1.Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	144.710.200,00						47 %	281.058.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						869.416.500,00					-		903.908.380,00	
		Terwujudnya Pokjanal Desa Siaga di Tingkat Kecamatan yang Aktif						869.416.500,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	869.416.500,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						24.856.500,00							59.348.380,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.856.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	59.348.380,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.186.500,00					-		85.798.020,00	
		Terwujudnya Desa Sehat Utama dan Mandiri						30.186.500,00					-		85.798.020,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.186.500,00						1 Dokumen	85.798.020,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						30.186.500,00							85.798.020,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.186.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	85.798.020,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.695.851.200,00					-		1.340.072.700,00	
		Tercapainya Posyandu yang Menerapkan SPM Bidang Kesehatan						1.695.851.200,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.695.851.200,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						89.667.200,00							135.911.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	89.667.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota				1 Dokumen	135.911.600,00	DINAS KESEHATAN DAERAH
		UPT PUSKESMAS KEMIRI						3.799.445.033,00							3.605.004.185,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.799.445.033,00							3.605.004.185,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.799.445.033,00							3.605.004.185,00	
16.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.286.358.133,00							3.091.917.285,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*3.286.358.133,00*							*3.091.917.285,00*	
			Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	3.286.358.133,00						70 %	3.091.917.285,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.286.358.133,00					-		3.091.917.285,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kemiri						3.286.358.133,00					-		3.091.917.285,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.286.358.133,00						1 Unit Kerja	3.091.917.285,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.286.358.133,00							3.091.917.285,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.286.358.133,00	Kab. Purworejo	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				1 Unit Kerja	3.091.917.285,00	UPT PUSKESMAS KEMIRI
17.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						460.181.900,00							460.181.900,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						460.181.900,00					-		460.181.900,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-			
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular														
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	318 Orang	129.427.000,00						9145 Orang		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	254.708.000,00						27 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	54.638.900,00						27 Dokumen		
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80 Orang		16 Orang	16 Orang	21.408.000,00						-		
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						129.427.000,00							129.427.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	318 Orang	129.427.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat		9145 Orang	129.427.000,00	UPT PUSKESMAS KEMIRI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						254.708.000,00							254.708.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	254.708.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat		27 Dokumen	254.708.000,00	UPT PUSKESMAS KEMIRI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						54.638.900,00							54.638.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	54.638.900,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat		27 Dokumen	54.638.900,00	UPT PUSKESMAS KEMIRI
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						21.408.000,00							21.408.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80 Orang		16 Orang	16 Orang	21.408.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	4. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan penataan lingkungan sosial yang mendorong interaksi, partisipasi, dan inklusifitas sosial masyarakat		-	21.408.000,00	UPT PUSKESMAS KEMIRI
18.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						52.905.000,00							52.905.000,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*52.905.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	11.585.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						11.585.000,00					-		11.585.000,00	
		Terwujudnya Pokjanal Desa Siaga di Tingkat Kecamatan yang Aktif						11.585.000,00					-		11.585.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.585.000,00						1 Dokumen	11.585.000,00	UPT PUSKESMAS KEMIRI
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						11.585.000,00							11.585.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.585.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	11.585.000,00	UPT PUSKESMAS KEMIRI
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						41.320.000,00					-		41.320.000,00	
		Tercapainya Posyandu yang Menerapkan SPM Bidang Kesehatan						41.320.000,00							41.320.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.320.000,00						1 Dokumen	41.320.000,00	UPT PUSKESMAS KEMIRI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						41.320.000,00							41.320.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.320.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	41.320.000,00	UPT PUSKESMAS KEMIRI
		UPT PUSKESMAS MRANTI						1.777.392.999,00							1.873.249.280,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.777.392.999,00							1.873.249.280,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.777.392.999,00							1.873.249.280,00	
19.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.431.618.999,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.431.618.999,00*							*1.527.475.280,00*	
			Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.431.618.999,00						70 %	1.527.475.280,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.431.618.999,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Mranti						1.431.618.999,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.431.618.999,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.431.618.999,00							1.527.475.280,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.431.618.999,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				1 Unit Kerja	1.527.475.280,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
20.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						292.888.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*292.888.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus	284.412.000,00	
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus	284.412.000,00	
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %	284.412.000,00	
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %	284.412.000,00	
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %	284.412.000,00	
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %	284.412.000,00	
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %	284.412.000,00	
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %	284.412.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*292.888.000,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)	20.858.000,00	
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %	20.858.000,00	
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													*292.888.000,00*	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %	29.334.000,00	
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %	29.334.000,00	
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %	29.334.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000	29.334.000,00	
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %	29.334.000,00	
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000	29.334.000,00	
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %	29.334.000,00	
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %	29.334.000,00	
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %	29.334.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						292.888.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar											-		96.484.092.059,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	224 Orang	68.380.000,00						9145 Orang	68.380.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	5140 Orang	3.744.000,00						127510 Orang	3.744.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	222 Orang	1.142.000,00						5535 Orang	1.142.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	100 Orang	3.120.000,00						7843 Orang	3.120.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	129.228.000,00						27 Dokumen	129.228.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.976.000,00						1 Dokumen	1.976.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.380.000,00						1 Dokumen	3.380.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	60.904.000,00						27 Dokumen	60.904.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	156.000,00						3 Dokumen	156.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.340.000,00						-	2.340.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang		20 Orang	20 Orang	13.318.000,00						-	13.318.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00						-	5.200.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						68.380.000,00							68.380.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	224 Orang	68.380.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	68.380.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						3.744.000,00							3.744.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	5140 Orang	3.744.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	3.744.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.142.000,00							1.142.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	222 Orang	1.142.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	1.142.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.120.000,00							3.120.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	100 Orang	3.120.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	3.120.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						129.228.000,00							129.228.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	129.228.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	129.228.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.976.000,00							1.976.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.976.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	1.976.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						3.380.000,00							3.380.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.380.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	3.380.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						60.904.000,00							60.904.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	60.904.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	60.904.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						156.000,00							156.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	156.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	156.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						2.340.000,00							2.340.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.340.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	2.340.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						13.318.000,00							13.318.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 Orang		20 Orang	20 Orang	13.318.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	13.318.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						5.200.000,00							5.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	5.200.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
21.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						52.886.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*52.886.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	52.886.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						52.886.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						52.886.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.886.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						52.886.000,00							52.886.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.886.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	52.886.000,00	UPT PUSKESMAS MRANTI
		UPT PUSKESMAS CANGKREP						2.156.817.000,00							2.315.006.455,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.156.817.000,00							2.315.006.455,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.156.817.000,00							2.315.006.455,00	
22.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.663.025.000,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.663.025.000,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.663.025.000,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.663.025.000,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Cangkrep						1.663.025.000,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.663.025.000,00						1 Unit Kerja	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.663.025.000,00							1.821.214.455,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.663.025.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				1 Unit Kerja	1.821.214.455,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
23.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						304.974.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						304.974.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu						304.974.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	164 Orang	71.847.000,00						9145 Orang	71.847.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2356 Orang	3.588.000,00						127510 Orang	3.588.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	65 Orang	2.857.000,00						5535 Orang	2.857.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	396 Orang	3.704.000,00						7843 Orang	3.704.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	111.502.000,00						27 Dokumen	111.502.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.210.000,00						1 Dokumen	2.210.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.198.000,00						1 Dokumen	3.198.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	82.808.000,00						27 Dokumen	82.808.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	410.000,00						3 Dokumen	410.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.872.000,00						-	6.872.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	853 Orang		53 orang	200 Orang	7.256.000,00						-	7.256.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.722.000,00						-	8.722.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						71.847.000,00							71.847.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	164 Orang	71.847.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	71.847.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						3.588.000,00							3.588.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2356 Orang	3.588.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	3.588.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						2.857.000,00							2.857.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	65 Orang	2.857.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	2.857.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.704.000,00							3.704.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	396 Orang	3.704.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	3.704.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						111.502.000,00							111.502.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	111.502.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	111.502.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						2.210.000,00							2.210.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.210.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	2.210.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						3.198.000,00							3.198.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.198.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	3.198.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						82.808.000,00							82.808.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	82.808.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	82.808.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						410.000,00							410.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	410.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	410.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						6.872.000,00							6.872.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.872.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	6.872.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						7.256.000,00							7.256.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	853 Orang		53 Orang	200 Orang	7.256.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	7.256.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						8.722.000,00							8.722.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.722.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	8.722.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
24.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						188818000							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*188.818.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	11.585.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						81.267.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						81.267.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	81267000						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						81267000							81.267.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	81267000	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	81.267.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						107551000					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						107551000					-		1.340.072.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	107551000						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						107551000							107.551.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	107551000	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	107.551.000,00	UPT PUSKESMAS CANGKREP
		UPT PUSKESMAS PURWOREJO						2.465.945.234,00							2.537.377.472,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.465.945.234,00							2.537.377.472,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.465.945.234,00							2.537.377.472,00	
25.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.945.958.734,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.945.958.734,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.945.958.734,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.945.958.734,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Purworejo						1.945.958.734,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.945.958.734,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.945.958.734,00							2.017.390.972,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1945958734	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				1 Unit Kerja	2.017.390.972,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
26.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						384.178.500,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						384.178.500,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu						384.178.500,00					-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular														
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	229 Orang	26.854.000,00						9145 Orang	26.854.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	5450 Orang	6864000						127510 Orang	6.864.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	255 Orang	5616000						5535 Orang	5.616.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	367 Orang	4992000						7843 Orang	4.992.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	244885000						27 Dokumen	244.885.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3640000						1 Dokumen	3.640.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6318000						1 Dokumen	6.318.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	40098500						27 Dokumen	40.098.500,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	130000						3 Dokumen	130.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5785000						-	5.785.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	200 Orang		120 Orang	20 Orang	6268000						-	6.268.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32728000						-	32.728.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						26.854.000,00							26.854.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	229 Orang	26.854.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	26.854.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						6.864.000,00							6.864.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	5450 Orang	6.864.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	6.864.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						5.616.000,00							5.616.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	255 Orang	5.616.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	5.616.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						4.992.000,00							4.992.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	367 Orang	4.992.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	4.992.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						244.885.000,00							244.885.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	244.885.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	244.885.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						3.640.000,00							3.640.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.640.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	3.640.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						6.318.000,00							6.318.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.318.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	6.318.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						40.098.500,00							40.098.500,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	40.098.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	40.098.500,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						130.000,00							130.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	130.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	130.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						5.785.000,00							5.785.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.785.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	5.785.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						6.268.000,00							6.268.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	200 Orang		120 Orang	20 Orang	6.268.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	6.268.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						32.728.000,00							32.728.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.728.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	32.728.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
27.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						135.808.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*135.808.000,00*							52.905.000,00	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	135.808.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						17.584.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						17.584.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.584.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						17.584.000,00							17.584.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.584.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	17.584.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						118.224.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						118.224.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	118.224.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						118.224.000,00							118.224.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	118.224.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	118.224.000,00	UPT PUSKESMAS PURWOREJO
		UPT PUSKESMAS WINONG						1.992.310.427,00							2.058.521.770,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.992.310.427,00							2.058.521.770,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.992.310.427,00							2.058.521.770,00	
28.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.456.055.227,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.456.055.227,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.456.055.227,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.456.055.227,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Winong						1.456.055.227,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1456055227						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1456055227							1.522.266.570,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1456055227	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				1 Unit Kerja	1.522.266.570,00	UPT PUSKESMAS WINONG
29.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						335.318.200,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						335.318.200,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-			
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular														
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	217 Orang	57.824.000,00						9145 Orang	57.824.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3474 Orang	3172000						127510 Orang	3.172.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	131 Orang	2704000						5535 Orang	2.704.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	272 Orang	9412000						7843 Orang	9.412.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	180652000						27 Dokumen	180.652.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2236000						1 Dokumen	2.236.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6955000						1 Dokumen	6.955.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	52996200						27 Dokumen	52.996.200,00	UPT PUSKESMAS WINONG
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	78000						3 Dokumen	78.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2483000						-	2.483.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	140 Orang		20 Orang	30 Orang	3676000						-	3.676.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13130000						-	13.130.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						57.824.000,00							57.824.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	217 Orang	57.824.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	57.824.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						3.172.000,00							3.172.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3474 Orang	3.172.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	3.172.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						2.704.000,00							2.704.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	131 Orang	2.704.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	2.704.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						9.412.000,00							9.412.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	272 Orang	9.412.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	9.412.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						180.652.000,00							180.652.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	180.652.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	180.652.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						2.236.000,00							2.236.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.236.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	2.236.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						6.955.000,00							6.955.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.955.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	6.955.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						52.996.200,00							52.996.200,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	52.996.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	52.996.200,00	UPT PUSKESMAS WINONG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						78.000,00							78.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	78.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	78.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						2.483.000,00							2.483.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.483.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	2.483.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.676.000,00							3.676.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	140 Orang		20 Orang	30 Orang	3.676.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	3.676.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						13.130.000,00							13.130.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.130.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	13.130.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
30.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						200.937.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*200.937.000,00*							52.905.000,00	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	200.937.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						43.537.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						43537000					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43537000						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						43537000							43.537.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43537000	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	43.537.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						157400000					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						157400000					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	157400000						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						157400000							157.400.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	157400000	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Winong || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	157.400.000,00	UPT PUSKESMAS WINONG
		UPT PUSKESMAS GEBANG						2.933.425.383,00							2.822.350.427,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.933.425.383,00							2.822.350.427,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2933425383							2.822.350.427,00	
31.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.451.218.383,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*2.451.218.383,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	2.451.218.383,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.451.218.383,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Gebang						2451218383					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2451218383						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2451218383							2.340.143.427,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja		27 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2451218383	Kab. Purworejo	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				27 Unit Kerja	2.340.143.427,00	UPT PUSKESMAS GEBANG
32.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						449.037.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						449.037.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular														
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	512 Orang	2.314.000,00	Kab. Purworejo					7843 Orang	2.314.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1742000	Kab. Purworejo					1 Dokumen	1.742.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7956000	Kab. Purworejo					1 Dokumen	7.956.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	456 Orang	94360000	Kab. Purworejo					9145 Orang	94.360.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	7376 Orang	6426000	Kab. Purworejo					127510 Orang	6.426.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	207 Orang	1872000	Kab. Purworejo					5535 Orang	1.872.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	241370000	Kab. Purworejo					27 Dokumen	241.370.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	44495000	Kab. Purworejo					27 Dokumen	44.495.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	182000	Kab. Purworejo					3 Dokumen	182.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10556000	Kab. Purworejo					-	10.556.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	425 Orang		85 Orang	85 Orang	5316000	Kab. Purworejo					-	5.316.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32448000	Kab. Purworejo					-	32.448.000,00	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						2.314.000,00							2.314.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	512 Orang	2.314.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	2.314.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.742.000,00							1.742.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.742.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	1.742.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						7.956.000,00							7.956.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.956.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	7.956.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						94.360.000,00							94.360.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	456 Orang	94.360.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	94.360.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						6.426.000,00							6.426.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	7376 Orang	6.426.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	6.426.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.872.000,00							1.872.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	207 Orang	1.872.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	1.872.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						241.370.000,00							241.370.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	241.370.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	241.370.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						44.495.000,00							44.495.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	44.495.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	44.495.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						182.000,00							182.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	182.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	182.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.556.000,00							10.556.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.556.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	10.556.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						5.316.000,00							5.316.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	425 orang		85 Orang	85 Orang	5.316.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	5.316.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						32.448.000,00							32.448.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.448.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	32.448.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
33.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						33.170.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*33.170.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	33.170.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						11.312.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						11312000					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11312000						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						11312000							11.312.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11312000	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	11.312.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						21.858.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						21.858.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.858.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						21.858.000,00							21.858.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.858.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	21.858.000,00	UPT PUSKESMAS GEBANG
		UPT PUSKESMAS WIRUN						1.479.022.165,00							1.566.977.343,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.479.022.165,00							1.566.977.343,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1479022165							1.566.977.343,00	
34.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.033.476.165,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.033.476.165,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.033.476.165,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.033.476.165,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Wirun						1033476165					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1033476165						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1033476165							1.121.431.343,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1033476165	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				1 Unit Kerja	1.121.431.343,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
35.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						383.560.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						383.560.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular														
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	209 Orang	179.280.000,00						9145 Orang	179.280.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	1442 Orang	3744000						127510 Orang	3.744.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	129 Orang	3276000						5535 Orang	3.276.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	206 Orang	3900000						7843 Orang	3.900.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	83650000						27 Dokumen	83.650.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	858000						1 Dokumen	858.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4329000						1 Dokumen	4.329.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	86091000						27 Dokumen	86.091.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	130000						3 Dokumen	130.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4264000						-	4.264.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	198 Orang		18 Orang	45 Orang	947000						-	947.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13091000						-	13.091.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						179.280.000,00							179.280.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	209 Orang	179.280.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	179.280.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						3.744.000,00							3.744.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	1442 Orang	3.744.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	3.744.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						3.276.000,00							3.276.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	129 Orang	3.276.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	3.276.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.900.000,00							3.900.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	206 Orang	3.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	3.900.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						83.650.000,00							83.650.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	83.650.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	83.650.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						858.000,00							858.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	858.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	858.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.329.000,00							4.329.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.329.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	4.329.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						86.091.000,00							86.091.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	86.091.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	86.091.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						130.000,00							130.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	130.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	130.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						4.264.000,00							4.264.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.264.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	4.264.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						947.000,00							947.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	198 Orang		18 Orang	45 Orang	947.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	947.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						13.091.000,00							13.091.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.091.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	13.091.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
36.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						61.986.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*61.986.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	61.986.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						41.226.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						41226000					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41226000						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						41226000							41.226.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41226000	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	41.226.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20760000					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						20760000					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20760000						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						20760000							20.760.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20760000	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Desa Wirun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	20.760.000,00	UPT PUSKESMAS WIRUN
		UPT PUSKESMAS BAYAN						2.869.872.500,00							3.125.383.066,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.869.872.500,00							3.125.383.066,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2869872500							3.125.383.066,00	
37.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.503.650.000,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*2.503.650.000,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	2.503.650.000,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.503.650.000,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bayan						2503650000					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2503650000						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2503650000							2.759.160.566,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja		27 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2503650000	Kab. Purworejo	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				27 Unit Kerja	2.759.160.566,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
38.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						291.482.500,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						291.482.500,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular														
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	503 Orang	38.940.000,00						9145 Orang	38.940.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	5867 Orang	3744000						127510 Orang	3.744.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	175 Orang	1248000						5535 Orang	1.248.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	45 Orang	2912000						7843 Orang	2.912.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	126285000						27 Dokumen	126.285.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1612000						1 Dokumen	1.612.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4160000						1 Dokumen	4.160.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	57682500						27 Dokumen	57.682.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	117000						3 Dokumen	117.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6071000						-	6.071.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	339 Orang		139 Orang	50 Orang	20449000						-	20.449.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 laporan	1 Laporan	28262000						-	28.262.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						38.940.000,00							38.940.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	503 Orang	38.940.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	38.940.000,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						3.744.000,00							3.744.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	5867 Orang	3.744.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	3.744.000,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.248.000,00							1.248.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	175 Orang	1.248.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	1.248.000,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						2.912.000,00							2.912.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	45 Orang	2.912.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	2.912.000,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						126.285.000,00							126.285.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	126.285.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	126.285.000,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.612.000,00							1.612.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.612.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	1.612.000,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.160.000,00							4.160.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.160.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	4.160.000,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						57.682.500,00							57.682.500,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	57.682.500,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	57.682.500,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						117.000,00							117.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	117.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	117.000,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						6.071.000,00							6.071.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.071.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	6.071.000,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						20.449.000,00							20.449.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	339 Orang		139 Orang	50 Orang	20.449.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	20.449.000,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						28.262.000,00							28.262.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kabl/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.262.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	28.262.000,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
39.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						74.740.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*74.740.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	74.740.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25.870.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						25870000					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25870000						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						25870000							25.870.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25870000	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	25.870.000,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						48870000					-		1.340.072.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						48870000					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48870000						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						48870000							48.870.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48870000	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	48.870.000,00	UPT PUSKESMAS BAYAN
		UPT PUSKESMAS BENER						4.035.334.461,00							4.087.433.987,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.035.334.461,00							4.087.433.987,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4035334461							4.087.433.987,00	
40.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.623.200.461,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*3.623.200.461,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	3.623.200.461,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.623.200.461,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bener						3623200461					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3623200461						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3623200461							3.675.299.987,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja		27 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3623200461	Kab. Purworejo	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				27 Unit Kerja	3.675.299.987,00	UPT PUSKESMAS BENER
41.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						306.739.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						306.739.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	681 Orang	1.812.000,00						7843 Orang	1.812.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1222000						1 Dokumen	1.222.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2236000						1 Dokumen	2.236.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	683 Orang	82680000						9145 Orang	82.680.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	6553 Orang	4186000						127510 Orang	4.186.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	205 Orang	624000						5535 Orang	624.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	153693000						27 Dokumen	153.693.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	44100000						27 Dokumen	44.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4238000						-	4.238.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3250 Orang		650 Orang	650 Orang	9895000						-	9.895.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2053000						-	2.053.000,00	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.812.000,00							1.812.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	681 Orang	1.812.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	1.812.000,00	UPT PUSKESMAS BENER
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.222.000,00							1.222.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.222.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	1.222.000,00	UPT PUSKESMAS BENER
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.236.000,00							2.236.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.236.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	2.236.000,00	UPT PUSKESMAS BENER
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						82.680.000,00							82.680.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	683 Orang	82.680.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	82.680.000,00	UPT PUSKESMAS BENER
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						4.186.000,00							4.186.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	6553 Orang	4.186.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	4.186.000,00	UPT PUSKESMAS BENER
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						624.000,00							624.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	205 Orang	624.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	624.000,00	UPT PUSKESMAS BENER
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						153.693.000,00							153.693.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	153.693.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	153.693.000,00	UPT PUSKESMAS BENER
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						44.100.000,00							44.100.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	44.100.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	44.100.000,00	UPT PUSKESMAS BENER
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						4.238.000,00							4.238.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.238.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	4.238.000,00	UPT PUSKESMAS BENER
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						9.895.000,00							9.895.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3250 Orang		650 Orang	650 Orang	9.895.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	9.895.000,00	UPT PUSKESMAS BENER
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						2.053.000,00							2.053.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.053.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	2.053.000,00	UPT PUSKESMAS BENER
42.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						105.395.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*105.395.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	105.395.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.930.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						42930000					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	42930000						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						42930000							42.930.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	42930000	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	42.930.000,00	UPT PUSKESMAS BENER
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						62465000					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						62465000					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	62465000						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						62465000							62.465.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	62465000	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	62.465.000,00	UPT PUSKESMAS BENER
		UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK						1.418.385.381,00							1.418.437.349,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.418.385.381,00							1.418.437.349,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.418.385.381,00							1.418.437.349,00	
43.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.029.056.081,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.029.056.081,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.029.056.081,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.029.056.081,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Seborokrapyak						1029056081					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1029056081						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1029056081							1.029.108.049,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1029056081	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				1 Unit Kerja	1.029.108.049,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
44.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						294.859.300,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						294.859.300,00					-		460.181.900,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-			
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular														
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar														
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	100 Orang	55.744.000,00						9145 Orang	55.744.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	1049 Orang	3.120.000,00						127510 Orang	3.120.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	104 Orang	10.816.000,00						5535 Orang	10.816.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	162 Orang	5.720.000,00						7843 Orang	5.720.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	130.084.000,00						27 Dokumen	130.084.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	676.000,00						1 Dokumen	676.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	988.000,00						1 Dokumen	988.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	45.012.300,00						27 Dokumen	45.012.300,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	102.000,00						3 Dokumen	102.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	5.629.000,00						-	5.629.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	104 Orang	15.544.000,00						-	15.544.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	21.424.000,00						-	21.424.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						55.744.000,00							55.744.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	100 Orang	55.744.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	55.744.000,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						3.120.000,00							3.120.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	1049 Orang	3.120.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	3.120.000,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10.816.000,00							10.816.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	104 Orang	10.816.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	10.816.000,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						5.720.000,00							5.720.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	162 Orang	5.720.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	5.720.000,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						130.084.000,00							130.084.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	130.084.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	130.084.000,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						676.000,00							676.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	676.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	676.000,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						988.000,00							988.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	988.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	988.000,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						45.012.300,00							45.012.300,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	45.012.300,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	45.012.300,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						102.000,00							102.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	102.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	102.000,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						5.629.000,00							5.629.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-		-	1 Dokumen	5.629.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	5.629.000,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						15.544.000,00							15.544.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	104 Orang	15.544.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	15.544.000,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						21.424.000,00							21.424.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	1 Laporan	21.424.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	21.424.000,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
45.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						94.470.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*94.470.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		42 %	49,59 %	94.470.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						45.600.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						45.600.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.600.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						45.600.000,00							45.600.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	45.600.000,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						48.870.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						48.870.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.870.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						48.870.000,00							48.870.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.870.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Seborokrapyak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	48.870.000,00	UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK
		UPT PUSKESMAS BAGELEN						1.698.168.000,00							1.710.139.980,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.698.168.000,00							1.710.139.980,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.698.168.000,00							1.710.139.980,00	
46.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.281.500.000,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.281.500.000,00*							*1.821.214.455,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.281.500.000,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.281.500.000,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bagelen						1.281.500.000,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.281.500.000,00						1 Unit Kerja	1.293.471.980,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.287.700.000,00							1.290.258.537,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.287.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				27 Unit Kerja	1.290.258.537,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
47.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						416.668.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						416.668.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	141 Orang	52.376.000,00						9145 Orang	52.376.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2528 Orang	3.900.000,00						127510 Orang	3.900.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	87 Orang	13.572.000,00						5535 Orang	13.572.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	192 Orang	1.521.000,00						7843 Orang	1.521.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	156.401.000,00						27 Dokumen	156.401.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.380.000,00						1 Dokumen	3.380.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.016.000,00						1 Dokumen	3.016.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	404 Orang		404 Orang	3443 Orang	15.292.000,00						404 Orang	15.292.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	97.852.000,00						27 Dokumen	97.852.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	28.000,00						3 Dokumen	28.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	69.330.000,00						-	69.330.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						52.376.000,00							52.376.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	141 Orang	52.376.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Bagelen || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	52.376.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						3.900.000,00							3.900.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2528 Orang	3.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Bagelen || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	3.900.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						13.572.000,00							13.572.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	87 Orang	13.572.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Bagelen || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	13.572.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.521.000,00							1.521.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	192 Orang	1.521.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Bagelen || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	1.521.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						156.401.000,00							156.401.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	156.401.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Bagelen || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	156.401.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						3.380.000,00							3.380.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.380.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Bagelen || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	3.380.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						3.016.000,00							3.016.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.016.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Bagelen || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	3.016.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						15.292.000,00							15.292.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	404 Orang		404 Orang	3443 Orang	15.292.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Bagelen || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				404 Orang	15.292.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						97.852.000,00							97.852.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	97.852.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Bagelen || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	97.852.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						28.000,00							28.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	28.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Bagelen || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	28.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						69.330.000,00							69.330.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	69.330.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	69.330.000,00	UPT PUSKESMAS BAGELEN
		UPT PUSKESMAS KUTOARJO						1.706.826.200,00							1.709.384.737,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.706.826.200,00							1.709.384.737,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.706.826.200,00							1.709.384.737,00	
48.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.287.700.000,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.287.700.000,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.287.700.000,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.287.700.000,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kutoarjo						1.287.700.000,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.287.700.000,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.287.700.000,00							1.290.258.537,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.287.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				27 Unit Kerja	1.290.258.537,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
49.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						384.035.200,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						384.035.200,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	106 Orang	19.922.000,00						9145 Orang	19.922.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	6126 Orang	4.706.000,00						127510 Orang	4.706.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	113 Orang	4.836.000,00						5535 Orang	4.836.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	174 Orang	3.745.000,00						7843 Orang	3.745.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	169.179.000,00						27 Dokumen	169.179.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.328.000,00						1 Dokumen	3.328.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.360.000,00						1 Dokumen	11.360.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	114.766.200,00						27 Dokumen	114.766.200,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	142.000,00						3 Dokumen	142.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.256.000,00						-	2.256.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	565 Orang		113 Orang	113 Orang	26.651.000,00						-	26.651.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.144.000,00						-	23.144.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						19.922.000,00							19.922.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	106 Orang	19.922.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	19.922.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						4.706.000,00							4.706.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	6126 Orang	4.706.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	4.706.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.836.000,00							4.836.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	113 Orang	4.836.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	4.836.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.745.000,00							3.745.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	174 Orang	3.745.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	3.745.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						169.179.000,00							169.179.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	169.179.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	169.179.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						3.328.000,00							3.328.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.328.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	3.328.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						11.360.000,00							11.360.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.360.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	11.360.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						114.766.200,00							114.766.200,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	114.766.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	114.766.200,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						142.000,00							142.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	142.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	142.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						2.256.000,00							2.256.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.256.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	2.256.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						26.651.000,00							26.651.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	565 Orang		113 Orang	113 Orang	26.651.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	26.651.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						23.144.000,00							23.144.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.144.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	23.144.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
50.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						35.091.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*35.091.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	35.091.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.794.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						20.794.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.794.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						20.794.000,00							20.794.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.794.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	20.794.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						14.297.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						14.297.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.297.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						14.297.000,00							14.297.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.297.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	14.297.000,00	UPT PUSKESMAS KUTOARJO
		UPT PUSKESMAS PITURUH						4.189.772.821,00							3.566.737.880,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.189.772.821,00							3.566.737.880,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.189.772.821,00							3.566.737.880,00	
51.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.656.721.821,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*3.656.721.821,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	3.656.721.821,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.656.721.821,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Pituruh						3.656.721.821,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.656.721.821,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.656.721.821,00							3.033.686.880,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.656.721.821,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				27 Unit Kerja	3.033.686.880,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
52.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						431.191.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.191.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	300 Orang	50.835.000,00						9145 Orang	50.835.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3376 Orang	17.888.000,00						127510 Orang	17.888.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	250 Orang	1.456.000,00						5535 Orang	1.456.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	450 Orang	2.600.000,00						7843 Orang	2.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	224.336.000,00						27 Dokumen	224.336.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00						1 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.201.000,00						1 Dokumen	18.201.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	61.000.000,00						27 Dokumen	61.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	260.000,00						3 Dokumen	260.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00						-	10.400.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	650 Orang		300 Orang	70 Orang	6.216.000,00						-	6.216.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.099.000,00						-	34.099.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						50.835.000,00							50.835.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	300 Orang	50.835.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	50.835.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						17.888.000,00							17.888.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3376 Orang	17.888.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	17.888.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.456.000,00							1.456.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	250 Orang	1.456.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	1.456.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						2.600.000,00							2.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	450 Orang	2.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	2.600.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						224.336.000,00							224.336.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	224.336.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	224.336.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						3.900.000,00							3.900.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	3.900.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						18.201.000,00							18.201.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.201.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	18.201.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						61.000.000,00							61.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	61.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	61.000.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						260.000,00							260.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	260.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	260.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.400.000,00							10.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	10.400.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						6.216.000,00							6.216.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	650 Orang		300 Orang	70 Orang	6.216.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	6.216.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						34.099.000,00							34.099.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.099.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	34.099.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
53.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						101.860.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*101.860.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	101.860.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.360.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						54.360.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.360.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						54.360.000,00							54.360.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.360.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	54.360.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						47.500.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						47.500.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.500.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						47.500.000,00							47.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Pituruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	47.500.000,00	UPT PUSKESMAS PITURUH
		UPT PUSKESMAS BANYUURIP						1.871.650.716,00							2.060.399.921,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.871.650.716,00							2.060.399.921,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.871.650.716,00							2.060.399.921,00	
54.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.491.040.716,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.491.040.716,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.491.040.716,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.491.040.716,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Banyuurip						1.491.040.716,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.491.040.716,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.491.040.716,00							1.723.577.921,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.491.040.716,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Banyuurip || 1	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				27 Unit Kerja	1.723.577.921,00	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
55.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						302.170.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						302.170.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	261 Orang	96.460.000,00						9145 Orang	96.460.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3394 Orang	572.000,00						127510 Orang	572.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	131.674.000,00						27 Dokumen	131.674.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	520.000,00						1 Dokumen	520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	390.000,00						1 Dokumen	390.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	70.964.000,00						27 Dokumen	70.964.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6875 Orang		5375 Orang	375 Orang	1.590.000,00						-	1.590.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						96.460.000,00							96.460.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	261 Orang	96.460.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Banyuurip || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	96.460.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						572.000,00							572.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3394 Orang	572.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Banyuurip || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	572.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						131.674.000,00							131.674.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	131.674.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Banyuurip || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	131.674.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						520.000,00							520.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	520.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Banyuurip || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	520.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						390.000,00							390.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	390.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Banyuurip || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	390.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						70.964.000,00							70.964.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	70.964.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Banyuurip || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	70.964.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						1.590.000,00							1.590.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	6875 Orang		5375 Orang	375 Orang	1.590.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Banyuurip || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	1.590.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
56.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						78.440.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*78.440.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	78.440.000,00						47 %	11.585.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						29.680.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						29.680.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	29.680.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						29.680.000,00							29.680.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	29.680.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Banyuurip || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	29.680.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						48.760.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						48.760.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.760.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						48.760.000,00							4.972.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.760.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Desa Banyuurip || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	4.972.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUURIP
		UPT PUSKESMAS GRABAG						4.604.242.947,00							4.075.412.966,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.604.242.947,00							4.075.412.966,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						4.604.242.947,00							4.075.412.966,00	
57.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.203.172.147,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*4.203.172.147,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	4.203.172.147,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						4.203.172.147,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Grabag						4.203.172.147,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.203.172.147,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						4.203.172.147,00							3.554.628.329,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja		27 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.203.172.147,00	Kab. Purworejo	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				27 Unit Kerja	3.554.628.329,00	UPT PUSKESMAS GRABAG
58.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						346.255.800,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						346.255.800,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00						1 Dokumen	37.818.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	455 Orang	103.456.000,00						9145 Orang	61.952.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	117.844.800,00						27 Dokumen	98.979.540,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	85.675.000,00						27 Dokumen	119.674.597,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.982.000,00						-	7.982.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7220 Orang		38 Orang	38 Orang	18.714.000,00						-	5.676.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.984.000,00						-	175.686.500,00	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.600.000,00							37.818.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	37.818.000,00	UPT PUSKESMAS GRABAG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						103.456.000,00							61.952.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	455 Orang	103.456.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	61.952.000,00	UPT PUSKESMAS GRABAG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						117.844.800,00							98.979.540,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	117.844.800,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	98.979.540,00	UPT PUSKESMAS GRABAG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						85.675.000,00							119.674.597,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	85.675.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	119.674.597,00	UPT PUSKESMAS GRABAG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						7.982.000,00							7.982.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.982.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	7.982.000,00	UPT PUSKESMAS GRABAG
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						18.714.000,00							5.676.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	7220 Orang		38 Orang	38 Orang	18.714.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	5.676.000,00	UPT PUSKESMAS GRABAG
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						9.984.000,00							175.686.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.984.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	175.686.500,00	UPT PUSKESMAS GRABAG
59.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						54.815.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*54.815.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	54.815.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.710.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						3.710.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.710.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						3.710.000,00							3.710.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.710.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	3.710.000,00	UPT PUSKESMAS GRABAG
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						51.105.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						51.105.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.105.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						51.105.000,00							9.306.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.105.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	9.306.000,00	UPT PUSKESMAS GRABAG
		UPT PUSKESMAS NGOMBOL						3.852.726.753,00							3.586.875.688,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.852.726.753,00							3.586.875.688,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.852.726.753,00							3.586.875.688,00	
60.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.248.650.753,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*3.248.650.753,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	3.248.650.753,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.248.650.753,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Ngombol						3.248.650.753,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.248.650.753,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.248.650.753,00							2.902.853.468,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja		27 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.248.650.753,00	Kab. Purworejo	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				27 Unit Kerja	2.902.853.468,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
61.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						486.980.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						486.980.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	252 Orang	112.719.000,00						9145 Orang	66.528.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2048 Orang	4.797.000,00						127510 Orang	26.532.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	110 Orang	1.430.000,00						5535 Orang	7.260.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	413 Orang	2.080.000,00						7843 Orang	13.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	242.546.000,00						27 Dokumen	303.435.220,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.664.000,00						1 Dokumen	8.184.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00						1 Dokumen	9.240.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	93.882.000,00						27 Dokumen	99.451.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	156.000,00						3 Dokumen	264.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.320.000,00						-	8.320.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang		10 Orang	10 Orang	10.026.000,00						-	7.524.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.760.000,00						-	85.008.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						112.719.000,00							66.528.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	252 Orang	112.719.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Ngombol || Desa Kembangkuning || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	66.528.000,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						4.797.000,00							26.532.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2048 Orang	4.797.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Ngombol || Desa Kembangkuning || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	26.532.000,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.430.000,00							7.260.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	110 Orang	1.430.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Ngombol || Desa Kembangkuning || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	7.260.000,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						2.080.000,00							13.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	413 Orang	2.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Ngombol || Desa Kembangkuning || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	13.200.000,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						242.546.000,00							303.435.220,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	242.546.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Ngombol || Desa Kembangkuning || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	303.435.220,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.664.000,00							8.184.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.664.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Ngombol || Desa Kembangkuning || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	8.184.000,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.600.000,00							9.240.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Ngombol || Desa Kembangkuning || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	9.240.000,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						93.882.000,00							99.451.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	93.882.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Ngombol || Desa Kembangkuning || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	99.451.000,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						156.000,00							264.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	156.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Ngombol || Desa Kembangkuning || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	264.000,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						8.320.000,00							8.320.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.320.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Ngombol || Desa Kembangkuning || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	8.320.000,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						10.026.000,00							7.524.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	50 Orang		10 Orang	10 Orang	10.026.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Ngombol || Desa Kembangkuning || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	7.524.000,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						6.760.000,00							85.008.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.760.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Ngombol || Desa Kembangkuning || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	85.008.000,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
62.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						117.096.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*117.096.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48,59 %	49,59 %	117.096.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.850.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						20.850.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.850.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						20.850.000,00							20.850.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.850.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	20.850.000,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						96.246.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						96.246.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	96.246.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						96.246.000,00							28.226.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	96.246.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	28.226.000,00	UPT PUSKESMAS NGOMBOL
		UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN						2.094.735.060,00							2.398.857.802,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.094.735.060,00							2.398.857.802,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.094.735.060,00							2.398.857.802,00	
63.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.691.818.060,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.691.818.060,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.691.818.060,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.691.818.060,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Semawung Daleman						1.691.818.060,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.691.818.060,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.691.818.060,00							1.770.148.382,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja		27 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.691.818.060,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				27 Unit Kerja	1.770.148.382,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
64.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						319.922.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						319.922.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	273 Orang	86.124.000,00						9145 Orang	89.443.200,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2189 Orang	6.630.000,00						127510 Orang	30.888.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	188 Orang	1.716.000,00						5535 Orang	16.896.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	361 Orang	5.150.000,00						7843 Orang	19.140.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	116.279.000,00						27 Dokumen	125.626.930,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.924.000,00						1 Dokumen	11.748.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.740.000,00						1 Dokumen	31.746.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	63.776.000,00						27 Dokumen	84.926.490,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	78.000,00						3 Dokumen	1.320.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.120.000,00						-	2.120.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80 Orang		5 Orang	15 Orang	12.397.000,00						-	12.397.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.988.000,00						-	103.089.800,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						86.124.000,00							89.443.200,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	273 Orang	86.124.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	89.443.200,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						6.630.000,00							30.888.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2189 Orang	6.630.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	30.888.000,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.716.000,00							16.896.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	188 Orang	1.716.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	16.896.000,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						5.150.000,00							19.140.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	361 Orang	5.150.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	19.140.000,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						116.279.000,00							125.626.930,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	116.279.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	125.626.930,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.924.000,00							11.748.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.924.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	11.748.000,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12.740.000,00							31.746.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.740.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	31.746.000,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						63.776.000,00							84.926.490,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	63.776.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	84.926.490,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						78.000,00							1.320.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	78.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	1.320.000,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						2.120.000,00							2.120.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.120.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	2.120.000,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						12.397.000,00							12.397.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80 Orang		5 Orang	15 Orang	12.397.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	12.397.000,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						10.988.000,00							103.089.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.988.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	103.089.800,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
65.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						82.995.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*82.995.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48,59 %	49,59 %	82.995.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						70.614.000,00					-		903.908.380,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						70.614.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.614.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						70.614.000,00							70.614.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.614.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	70.614.000,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						12.381.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						12.381.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.381.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						12.381.000,00							28.754.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.381.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	28.754.000,00	UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN
		UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO						1.450.957.400,00							1.759.246.284,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.450.957.400,00							1.759.246.284,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.450.957.400,00							1.759.246.284,00	
66.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.080.000.000,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.080.000.000,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.080.000.000,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.080.000.000,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Sruwohrejo						1.080.000.000,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.080.000.000,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.080.000.000,00							1.321.014.604,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja		27 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.080.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				27 Unit Kerja	1.321.014.604,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
67.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						212.077.400,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						212.077.400,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	131 Orang	40.160.000,00						9145 Orang	58.080.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2165 Orang	4.056.000,00						127510 Orang	6.732.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	115 Orang	2.990.000,00						5535 Orang	5.280.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	208 Orang	2.496.000,00						7843 Orang	8.118.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	67.194.000,00						27 Dokumen	63.566.580,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.560.000,00						1 Dokumen	2.640.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.730.000,00						1 Dokumen	4.356.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	62.800.200,00						27 Dokumen	112.464.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	130.000,00						3 Dokumen	528.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.549.000,00						-	3.549.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	600 Orang		120 Orang	120 Orang	4.023.000,00						-	6.072.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.389.200,00						-	118.929.800,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						40.160.000,00							58.080.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	131 Orang	40.160.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	58.080.000,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						4.056.000,00							6.732.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2165 Orang	4.056.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	6.732.000,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						2.990.000,00							5.280.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	115 Orang	2.990.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	5.280.000,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						2.496.000,00							8.118.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	208 Orang	2.496.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	8.118.000,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						67.194.000,00							63.566.580,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	67.194.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	63.566.580,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.560.000,00							2.640.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.560.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	2.640.000,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.730.000,00							4.356.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.730.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	4.356.000,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						62.800.200,00							112.464.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	62.800.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	112.464.000,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						130.000,00							528.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	130.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	528.000,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						3.549.000,00							3.549.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.549.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	3.549.000,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.023.000,00							6.072.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	600 Orang		120 Orang	120 Orang	4.023.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	6.072.000,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						20.389.200,00							118.929.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.389.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	118.929.800,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
68.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						158.880.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*158.880.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	158.880.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						33.360.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						33.360.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.360.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						33.360.000,00							33.360.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.360.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	33.360.000,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						125.520.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						125.520.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.520.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						125.520.000,00							14.556.300,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.520.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Sruwohrejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	14.556.300,00	UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO
		UPT PUSKESMAS BUTUH						2.756.027.400,00							2.808.866.896,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.756.027.400,00							2.808.866.896,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.756.027.400,00							2.808.866.896,00	
69.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.374.106.000,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*2.374.106.000,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	2.374.106.000,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.374.106.000,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Butuh						2.374.106.000,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.374.106.000,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.374.106.000,00							2.272.995.517,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.374.106.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				1 Unit Kerja	2.272.995.517,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
70.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						292.014.400,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						292.014.400,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	219 Orang	40.908.000,00						9145 Orang	82.236.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2862 Orang	2.392.000,00						127510 Orang	26.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	110 Orang	546.000,00						5535 Orang	11.880.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	299 Orang	3.312.000,00						7843 Orang	14.256.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	95.151.200,00						27 Dokumen	119.823.994,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.756.000,00						1 Dokumen	17.952.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.914.000,00						1 Dokumen	15.840.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00						27 Dokumen	55.938.385,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	71.000,00						3 Dokumen	792.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.743.000,00						-	2.743.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	75 Orang		15 Orang	15 Orang	22.054.000,00						-	7.920.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	47.167.200,00						-	130.548.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						40.908.000,00							82.236.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	219 Orang	40.908.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	82.236.000,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						2.392.000,00							26.400.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2862 Orang	2.392.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	26.400.000,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						546.000,00							11.880.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	110 Orang	546.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	11.880.000,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.312.000,00							14.256.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	299 Orang	3.312.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	14.256.000,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						95.151.200,00							119.823.994,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	95.151.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	119.823.994,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						2.756.000,00							17.952.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.756.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	17.952.000,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.914.000,00							15.840.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.914.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	15.840.000,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						70.000.000,00							55.938.385,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	55.938.385,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						71.000,00							792.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	71.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	792.000,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						2.743.000,00							2.743.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.743.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	2.743.000,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						22.054.000,00							7.920.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	75 Orang		15 Orang	15 Orang	22.054.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	7.920.000,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						47.167.200,00							130.548.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	47.167.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	130.548.000,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
71.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						89.907.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*89.907.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	89.907.000,00						47 %	11.585.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						22.845.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						22.845.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.845.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						22.845.000,00							22.845.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.845.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	22.845.000,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						67.062.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						67.062.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	67.062.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						67.062.000,00							26.697.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	67.062.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Butuh || Desa Butuh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	26.697.000,00	UPT PUSKESMAS BUTUH
		UPT PUSKESMAS LOANO						3.643.853.843,00							3.528.051.569,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.643.853.843,00							3.528.051.569,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.643.853.843,00							3.528.051.569,00	
72.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.279.235.243,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*3.279.235.243,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	3.279.235.243,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.279.235.243,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Loano						3.279.235.243,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.279.235.243,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.279.235.243,00							2.985.324.269,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.279.235.243,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				1 Unit Kerja	2.985.324.269,00	UPT PUSKESMAS LOANO
73.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						264.548.600,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						264.548.600,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	119 Orang	52.448.000,00						9145 Orang	86.572.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3506 Orang	5.876.000,00						127510 Orang	15.840.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	102 Orang	1.170.000,00						5535 Orang	9.504.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	292 Orang	1.641.600,00						7843 Orang	4.488.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	120.772.000,00						27 Dokumen	127.633.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.144.000,00						1 Dokumen	8.976.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.549.000,00						1 Dokumen	10.032.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	42.624.000,00						27 Dokumen	101.334.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	52.000,00						3 Dokumen	198.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.898.000,00						-	1.898.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	510 Orang		102 Orang	102 Orang	19.760.000,00						-	3.036.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.614.000,00						-	117.436.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						52.448.000,00							86.572.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	119 Orang	52.448.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	86.572.000,00	UPT PUSKESMAS LOANO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						5.876.000,00							15.840.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3506 Orang	5.876.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	15.840.000,00	UPT PUSKESMAS LOANO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						1.170.000,00							9.504.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	102 Orang	1.170.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	9.504.000,00	UPT PUSKESMAS LOANO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.641.600,00							4.488.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	292 Orang	1.641.600,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	4.488.000,00	UPT PUSKESMAS LOANO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						120.772.000,00							127.633.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	120.772.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	127.633.000,00	UPT PUSKESMAS LOANO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.144.000,00							8.976.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.144.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	8.976.000,00	UPT PUSKESMAS LOANO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						3.549.000,00							10.032.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.549.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	10.032.000,00	UPT PUSKESMAS LOANO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						42.624.000,00							101.334.200,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	42.624.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	101.334.200,00	UPT PUSKESMAS LOANO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						52.000,00							198.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	52.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	198.000,00	UPT PUSKESMAS LOANO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						1.898.000,00							1.898.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.898.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	1.898.000,00	UPT PUSKESMAS LOANO
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						19.760.000,00							3.036.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	510 Orang		102 Orang	102 Orang	19.760.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	3.036.000,00	UPT PUSKESMAS LOANO
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						13.614.000,00							117.436.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.614.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	117.436.000,00	UPT PUSKESMAS LOANO
74.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						100.070.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*100.070.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	100.070.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						36.419.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						36.419.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.419.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						36.419.000,00							36.419.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.419.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	36.419.000,00	UPT PUSKESMAS LOANO
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						63.651.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						63.651.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.651.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						63.651.000,00							19.361.100,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.651.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Loano || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	19.361.100,00	UPT PUSKESMAS LOANO
		UPT PUSKESMAS BRUNO						5.810.921.408,00							5.555.890.922,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.810.921.408,00							5.555.890.922,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						5.810.921.408,00							5.555.890.922,00	
75.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.872.809.408,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*4.872.809.408,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	4.872.809.408,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						4.872.809.408,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bruno						4.872.809.408,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.872.809.408,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						4.872.809.408,00							4.708.404.502,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja		27 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.872.809.408,00	Kab. Purworejo	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				27 Unit Kerja	4.708.404.502,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
76.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						856.934.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						856.934.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	4590 Orang	157.248.000,00						9145 Orang	223.938.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	5210 Orang	7.410.000,00						127510 Orang	28.512.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	61 Orang	2.340.000,00						5535 Orang	4.026.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	72 Orang	1.430.000,00						7843 Orang	4.752.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	508.419.000,00						27 Dokumen	324.700.420,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.132.000,00						1 Dokumen	12.804.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.446.000,00						1 Dokumen	13.332.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	118.560.000,00						27 Dokumen	94.788.100,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	133.000,00						3 Dokumen	528.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.565.000,00						-	6.565.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3900 Orang		780 Orang	780 Orang	24.890.000,00						-	858.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.361.000,00						-	95.452.500,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						157.248.000,00							223.938.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	4590 Orang	157.248.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	223.938.000,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						7.410.000,00							28.512.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	5210 Orang	7.410.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	28.512.000,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						2.340.000,00							4.026.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	61 Orang	2.340.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	4.026.000,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.430.000,00							4.752.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	72 Orang	1.430.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	4.752.000,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						508.419.000,00							324.700.420,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	508.419.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	324.700.420,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						2.132.000,00							12.804.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.132.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	12.804.000,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						4.446.000,00							13.332.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.446.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	13.332.000,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						118.560.000,00							94.788.100,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	118.560.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	94.788.100,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						133.000,00							528.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	133.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	528.000,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						6.565.000,00							6.565.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.565.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	6.565.000,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						24.890.000,00							858.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3900 Orang		780 Orang	780 Orang	24.890.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	858.000,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						23.361.000,00							95.452.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kabl/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.361.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	95.452.500,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
77.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						81.178.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*81.178.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	81.178.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						26.424.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						26.424.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.424.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						26.424.000,00							26.424.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.424.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	26.424.000,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.754.000,00					-		1.340.072.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						54.754.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.754.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						54.754.000,00							10.806.400,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.754.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	10.806.400,00	UPT PUSKESMAS BRUNO
		UPT PUSKESMAS BRAGOLAN						3.218.547.741,00							3.567.547.031,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.218.547.741,00							3.567.547.031,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.218.547.741,00							3.567.547.031,00	
78.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.897.355.741,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*2.897.355.741,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	2.897.355.741,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.897.355.741,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bragolan						2.897.355.741,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.897.355.741,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.897.355.741,00							2.994.554.551,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja		27 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.897.355.741,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				27 Unit Kerja	2.994.554.551,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
79.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						250.230.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						250.230.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	131 Orang	59.137.000,00						9145 Orang	112.728.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	1008 Orang	4.758.000,00						127510 Orang	7.590.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	174 Orang	3.666.000,00						5535 Orang	9.768.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	194 Orang	962.000,00						7843 Orang	3.960.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	95.882.000,00						27 Dokumen	148.427.180,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.054.000,00						1 Dokumen	14.784.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.448.000,00						1 Dokumen	32.472.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	52.950.000,00						27 Dokumen	153.406.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	104.000,00						3 Dokumen	264.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.860.000,00						-	2.860.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	870 Orang		174 Orang	174 Orang	4.249.000,00						-	3.696.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.160.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						59.137.000,00							112.728.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	131 Orang	59.137.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	112.728.000,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						4.758.000,00							7.590.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	1008 Orang	4.758.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	7.590.000,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						3.666.000,00							9.768.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	174 Orang	3.666.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	9.768.000,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						962.000,00							3.960.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	194 Orang	962.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	3.960.000,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						95.882.000,00							148.427.180,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	95.882.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	148.427.180,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						2.054.000,00							14.784.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.054.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	14.784.000,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						6.448.000,00							32.472.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.448.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	32.472.000,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						52.950.000,00							153.406.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	52.950.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	153.406.000,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						104.000,00							264.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	104.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	264.000,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						2.860.000,00							2.860.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.860.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	2.860.000,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.249.000,00							3.696.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	870 Orang		174 Orang	174 Orang	4.249.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	3.696.000,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						17.160.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.160.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	0,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
80.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						70.962.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*70.962.000,00*							52.905.000,00	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	70.962.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						21.346.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						21.346.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.346.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						21.346.000,00							21.346.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.346.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	21.346.000,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						49.616.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						49.616.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.616.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						49.616.000,00							61.691.300,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.616.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bragolan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas					1 Dokumen	61.691.300,00	UPT PUSKESMAS BRAGOLAN
		UPT PUSKESMAS KALIGESING						2.798.065.676,00							3.196.955.537,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.798.065.676,00							3.196.955.537,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.798.065.676,00							3.196.955.537,00	
81.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.331.460.676,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*2.331.460.676,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	2.331.460.676,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.331.460.676,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Kaligesing						2.331.460.676,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.331.460.676,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.331.460.676,00							2.530.342.137,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.331.460.676,00	Kab. Purworejo	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				1 Unit Kerja	2.530.342.137,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
82.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						366.209.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						366.209.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	373 Orang	1.508.000,00						7843 Orang	19.937.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.664.000,00						1 Dokumen	1.452.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00						1 Dokumen	2.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	266 Orang	63.036.000,00						9145 Orang	59.400.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3574 Orang	2.938.000,00						127510 Orang	39.050.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	219 Orang	104.000,00						5535 Orang	5.775.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	195.934.000,00						27 Dokumen	160.429.500,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	78.400.000,00						27 Dokumen	124.172.400,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	26.000,00						3 Dokumen	528.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.838.000,00						-	6.838.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2250 Orang		450 Orang	450 Orang	4.802.000,00						-	5.775.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.359.000,00						-	177.518.000,00	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						1.508.000,00							19.937.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	373 Orang	1.508.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	19.937.500,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.664.000,00							1.452.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.664.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	1.452.000,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.600.000,00							2.640.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.600.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	2.640.000,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						63.036.000,00							59.400.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	266 Orang	63.036.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	59.400.000,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						2.938.000,00							39.050.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3574 Orang	2.938.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	39.050.000,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						104.000,00							5.775.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	219 Orang	104.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	5.775.000,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						195.934.000,00							160.429.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	195.934.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	160.429.500,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						78.400.000,00							124.172.400,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	78.400.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	124.172.400,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						26.000,00							528.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	26.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	528.000,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						6.838.000,00							6.838.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.838.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	6.838.000,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.802.000,00							5.775.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2250 Orang		450 Orang	450 Orang	4.802.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	5.775.000,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						8.359.000,00							177.518.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.359.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	177.518.000,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
83.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						100.396.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*100.396.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	100.396.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						44.134.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						44.134.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	44.134.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						44.134.000,00							44.134.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	44.134.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	44.134.000,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						56.262.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						56.262.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	56.262.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						56.262.000,00							18.964.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	56.262.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	18.964.000,00	UPT PUSKESMAS KALIGESING
		UPT PUSKESMAS KARANGGETAS						1.916.311.873,00							1.683.435.846,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.916.311.873,00							1.683.435.846,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.916.311.873,00							1.683.435.846,00	
84.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.436.178.873,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.436.178.873,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.436.178.873,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.436.178.873,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Karanggetas						1.436.178.873,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.436.178.873,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.436.178.873,00							1.218.796.846,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.436.178.873,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				1 Unit Kerja	1.218.796.846,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
85.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						376.963.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						376.963.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	720 Orang	107.568.000,00						9145 Orang	107.568.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2324 Orang	2.340.000,00						127510 Orang	2.340.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	119 Orang	8.346.000,00						5535 Orang	8.346.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	283 Orang	4.680.000,00						7843 Orang	4.680.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	141.820.000,00						27 Dokumen	141.820.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.210.000,00						1 Dokumen	2.210.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.980.000,00						1 Dokumen	5.980.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	81.969.000,00						27 Dokumen	81.969.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	130.000,00						3 Dokumen	130.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.990.000,00						-	2.990.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2250 Orang		450 Orang	450 Orang	1.718.000,00						-	1.718.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.212.000,00						-	1.718.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						107.568.000,00							107.568.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	720 Orang	107.568.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	107.568.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						2.340.000,00							2.340.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	2324 Orang	2.340.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	2.340.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.346.000,00							8.346.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	119 Orang	8.346.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	8.346.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						4.680.000,00							4.680.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	283 Orang	4.680.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	4.680.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						141.820.000,00							141.820.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	141.820.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	141.820.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						2.210.000,00							2.210.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.210.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	2.210.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						5.980.000,00							5.980.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.980.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	5.980.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						81.969.000,00							81.969.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	81.969.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	81.969.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						130.000,00							130.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	130.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	130.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						2.990.000,00							2.990.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.990.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	2.990.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						1.718.000,00							1.718.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2250 Orang		450 Orang	450 Orang	1.718.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	1.718.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						17.212.000,00							1.718.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.212.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	1.718.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
86.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						103.170.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*103.170.000,00*							*52.905.000,00*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	103.170.000,00						47 %	11.585.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						40.032.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						40.032.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.032.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						40.032.000,00							40.032.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.032.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	40.032.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						63.138.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						63.138.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.138.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						63.138.000,00							63.138.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.138.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Pituruh || Desa Karanggetas || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	63.138.000,00	UPT PUSKESMAS KARANGGETAS
		UPT PUSKESMAS DADIREJO						1.955.816.596,00							1.880.754.884,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.955.816.596,00							1.880.754.884,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.955.816.596,00							1.880.754.884,00	
87.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.566.890.396,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.566.890.396,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.566.890.396,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.566.890.396,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Dadirejo						1.566.890.396,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.566.890.396,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.566.890.396,00							1.491.828.684,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.566.890.396,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				1 Unit Kerja	1.491.828.684,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
88.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						271.079.200,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						271.079.200,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	135 Orang	36.332.000,00						9145 Orang	36.332.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3541 Orang	1.976.000,00						127510 Orang	1.976.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	56 Orang	3.744.000,00						5535 Orang	3.744.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	167 Orang	2.080.000,00						7843 Orang	2.080.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	143.715.000,00						27 Dokumen	143.715.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	988.000,00						1 Dokumen	988.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.046.000,00						1 Dokumen	7.046.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	43.096.200,00						27 Dokumen	43.096.200,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	104.000,00						3 Dokumen	104.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.068.000,00						-	3.068.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2150 Orang		230 Orang	450 Orang	11.302.000,00						-	11.302.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.628.000,00						-	17.628.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						36.332.000,00							36.332.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	135 Orang	36.332.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	36.332.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						1.976.000,00							1.976.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3541 Orang	1.976.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	1.976.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						3.744.000,00							3.744.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	56 Orang	3.744.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	3.744.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						2.080.000,00							2.080.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	167 Orang	2.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	2.080.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						143.715.000,00							143.715.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	143.715.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	143.715.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						988.000,00							988.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	988.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	988.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						7.046.000,00							7.046.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.046.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	7.046.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						43.096.200,00							43.096.200,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	43.096.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	43.096.200,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						104.000,00							104.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	104.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	104.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						3.068.000,00							3.068.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.068.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	3.068.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						11.302.000,00							11.302.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	2150 Orang		230 Orang	450 Orang	11.302.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	11.302.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						17.628.000,00							17.628.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.628.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	17.628.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
89.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						117.847.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*117.847.000,00*							*52905000*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	117.847.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						49.844.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						49.844.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.844.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						49.844.000,00							49.844.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.844.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	49.844.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						68.003.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						68.003.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	68.003.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						68.003.000,00							68.003.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	68.003.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bagelen || Desa Dadirejo || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	68.003.000,00	UPT PUSKESMAS DADIREJO
		UPT PUSKESMAS BUBUTAN						2.064.455.000,00							1.966.334.433,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.064.455.000,00							1.966.334.433,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.064.455.000,00							1.966.334.433,00	
90.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.719.500.000,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.719.500.000,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.719.500.000,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.719.500.000,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Bubutan						1.719.500.000,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.719.500.000,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.719.500.000,00							1.621.379.433,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	27 Unit Kerja		27 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.719.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				27 Unit Kerja	1.621.379.433,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
91.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						279.413.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						279.413.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	222 Orang	101.952.000,00						9145 Orang	101.952.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3506 Orang	8.554.000,00						127510 Orang	8.554.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	42 Orang	260.000,00						5535 Orang	260.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	289 Orang	910.000,00						7843 Orang	910.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	90.422.000,00						27 Dokumen	90.422.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.560.000,00						1 Dokumen	1.560.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.976.000,00						1 Dokumen	1.976.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	51.120.000,00						27 Dokumen	51.120.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	148.000,00						3 Dokumen	148.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.392.000,00						-	2.392.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	130 Orang		10 orang	30 Orang	15.777.000,00						-	15.777.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.342.000,00						-	4.342.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						101.952.000,00							101.952.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	222 Orang	101.952.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	101.952.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						8.554.000,00							8.554.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	3506 Orang	8.554.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	8.554.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						260.000,00							260.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	42 Orang	260.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	260.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						910.000,00							910.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	289 Orang	910.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	910.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						90.422.000,00							90.422.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	90.422.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	90.422.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.560.000,00							1.560.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.560.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	1.560.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						1.976.000,00							1.976.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.976.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	1.976.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						51.120.000,00							51.120.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	51.120.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	51.120.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						148.000,00							148.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	148.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	148.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						2.392.000,00							2.392.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.392.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	2.392.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						15.777.000,00							15.777.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	130 Orang		10 orang	30 Orang	15.777.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	15.777.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						4.342.000,00							4.342.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.342.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	4.342.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
92.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						65.542.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*65.542.000,00*							*52905000*	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48.59 %	49,59 %	65.542.000,00						47 %	11.585.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						30.816.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						30.816.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.816.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						30.816.000,00							30.816.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.816.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	30.816.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						34.726.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						34.726.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.726.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						34.726.000,00							34.726.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.726.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purwodadi || Desa Bubutan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	34.726.000,00	UPT PUSKESMAS BUBUTAN
		UPT PUSKESMAS BANYUASIN						2.018.496.075,00							1.906.546.815,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.018.496.075,00							1.906.546.815,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.018.496.075,00							1.906.546.815,00	
93.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.737.195.075,00							209.317.362.038,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						*1.737.195.075,00*							*1.821.214.455,00*	
			1.Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di Puskesmas	75 %		60 %	65 %	1.737.195.075,00						70 %	1.821.214.455,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.737.195.075,00					-		59.243.919.789,00	
		Terlaksananya Pelayanan BLUD Puskesmas Banyuasin						1.737.195.075,00					-		59.243.919.789,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.737.195.075,00						1 Unit Kerja	59.243.919.789,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.737.195.075,00							1.625.245.815,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.737.195.075,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD				1 Unit Kerja	1.625.245.815,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
94.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						189.921.000,00							147.401.546.230,00	
		Terlaksananya layanan siklus hidup sesuai standar													*405.543.000,00*	
			1.Jumlah Kasus Kematian Ibu	4 Kasus		5 Kasus	5 Kasus							4 Kasus		
			2.Jumlah Kematian Balita	78 Kasus		86 Kasus	81 Kasus							80 Kasus		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Aktifitas Fisik	100 %		37.04 %	55.56 %							74.07 %		
			4.Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	85 %		80%	85 %							81 %		
			5.Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	80 %		55 %	65 %							75 %		
			6.Prevalensi Obesitas	21.20 %		21.8 %	21.50 %							21.40 %		
			7.Persentase Merokok penduduk 10-21 tahun	7.40 %		11.40 %	10.40 %							9.40 %		
			8.Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan	25 %		1%	1,7 %							20 %		
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan sesuai standar													*54.638.900,00*	
			2.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80 (%)		99.64 (%)	99,65 (%)							98.60 (%)		
			2.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	41.11 %		51.85%	51.85 %							33.33 %		
		Terkendalinya penyakit menular dan penyakit tidak menular													-	
			1.Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	91.56 %		90.31 %	90.63 %							90.94 %		
			2.Neglected Tropical Diseases (NTDs)	27 %		92%	96,20%							27 %		
			3.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.34 %	0.30 %							0.20 %		
			4.Annual Parasite Incidence (API)	0.01 Per 1000		0.01 Per 1000	0.01 Per 1000							0.01 Per 1000		
			5.Persentase Diabetes Melitus Terkendali	45 %		36%	37 %							39 %		
			6.Insiden HIV	0.25 Per 1000		0.095 Per 1000	0.092 Per 1000							0.20 Per 1000		
			7.Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	99 %		95 %	96 %							97 %		
			8.Persentase Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	75 %		65 %	67 %							70 %		
			9.Persentase Hipertensi terkendali	7.17 %		5.17 %	5.67 %							6.17 %		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						189.921.000,00					-		96.484.092.059,00	
		Terlaksananya layanan kesehatan yang bermutu											-		96.484.092.059,00	
		Terselenggaranya layanan penyakit menular dan tidak menular												1 Dokumen	408.913.314,00	
		Terselenggaranya layanan siklus hidup sesuai standar												1 Dokumen	804.741.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	164 Orang	59.840.000,00						9145 Orang	59.840.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	1677 Orang	1.443.000,00						127510 Orang	1.443.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	91 Orang	780.000,00						5535 Orang	780.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	159 Orang	5.954.000,00						7843 Orang	5.954.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	47.428.000,00						27 Dokumen	47.428.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	858.000,00						1 Dokumen	858.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.080.000,00						1 Dokumen	2.080.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	33.232.000,00						27 Dokumen	33.232.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	52.000,00						3 Dokumen	52.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.265.000,00						-	5.265.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	401 Orang		37 Orang	91 Orang	12.566.000,00						-	12.566.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.423.000,00						-	20.423.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						59.840.000,00							59.840.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9145 Orang		9145 Orang	164 Orang	59.840.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				9145 Orang	59.840.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						1.443.000,00							1.443.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	127510 Orang		127510 Orang	1677 Orang	1.443.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				127510 Orang	1.443.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						780.000,00							780.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	5535 Orang		5535 Orang	91 Orang	780.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				5535 Orang	780.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						5.954.000,00							5.954.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7843 Orang		7843 Orang	159 Orang	5.954.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				7843 Orang	5.954.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						47.428.000,00							47.428.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	47.428.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	47.428.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						858.000,00							858.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	858.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	858.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.080.000,00							2.080.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	2.080.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						33.232.000,00							33.232.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27 Dokumen		27 Dokumen	1 Dokumen	33.232.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				27 Dokumen	33.232.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						52.000,00							52.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	52.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				3 Dokumen	52.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						5.265.000,00							5.265.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.265.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	5.265.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						12.566.000,00							12.566.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	401 Orang		37 Orang	91 Orang	12.566.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	12.566.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						20.423.000,00							20.423.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.423.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				-	20.423.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
95.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						91.380.000,00							2.329.779.100,00	
		Terwujudnya desa siaga aktif mandiri						*91.380.000,00*							52.905.000,00	
			Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri	50 %		48,59 %	49,59 %	91.380.000,00						47 %	11.585.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						18.421.000,00					-		903.908.380,00	
		Terlaksanya Pokjanal Desa Siaga Aktif di Kecamatan						18.421.000,00					-		903.908.380,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.421.000,00						1 Dokumen	903.908.380,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						18.421.000,00							18.421.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.421.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	18.421.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						72.959.000,00					-		1.340.072.700,00	
		Terselenggaranya posyandu yang melaksanakan SPM Kesehatan						72.959.000,00					-		1.340.072.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	72.959.000,00						1 Dokumen	1.340.072.700,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						72.959.000,00							72.959.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	72.959.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Banyuasin Kembaran || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas				1 Dokumen	72.959.000,00	UPT PUSKESMAS BANYUASIN
		RSUD R.A.A TJOKRONEGORO						66.000.000.000,00							68.648.475.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						66.000.000.000,00							68.648.475.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						66.000.000.000,00							68.648.475.000,00	
96.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						66.000.000.000,00							68.648.475.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat						66.000.000.000,00						-	68.648.475.000,00	
			Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjokronegoro	93,50%		91,50%	92%									
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan														
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjokronegoro	100%		100%	100%									
		Meningkatnya Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis														
			Persentase Ketercapaian Layanan Penunjang Medis dan Nonmedis di RSUD Tjokronegoro	100%		100%	100%									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						66.000.000.000,00					-		68.648.475.000,00	
		Terlaksananya Kinerja Perencanaan BLUD						66.000.000.000,00					-		68.648.475.000,00	
		Terlaksananya Kinerja Keuangan BLUD		100 Unit Kerja		100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	66.000.000.000,00						100 Unit Kerja	68.648.475.000,00	
		Terlaksananya Kinerja Pelayanan Umum dan Kepegawaian BLUD														
		Terlaksananya Kinerja Pelayanan Medis BLUD														
		Terlaksananya Kinerja Pelayanan Keperawatan BLUD														
		Terlaksananya Kinerja Pelayanan Penunjang Medis BLUD														
		Terlaksananya Kinerja Pelayanan Penunjang Non Medis BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja		100 Unit Kerja	1 Unit Kerja	66.000.000.000,00						100 Unit Kerja	68.648.475.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						66.000.000.000,00							68.648.475.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja		100 Unit Kerja	1 Unit Kerja	66.000.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Kelurahan Borokulon || 0	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				100 Unit Kerja	68.648.475.000,00	RSUD R.A.A TJOKRONEGORO
		RSUD DR. TJITROWARDOJO						318.584.764.000,00							256.584.764.449,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						318.584.764.000,00							256.584.764.449,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						318.584.764.000,00							256.584.764.449,00	
97.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						318.584.764.000,00							256.584.764.449,00	
		Meningkatnya kualitas layanan BLUD kepada masyarakat												-	68.648.475.000,00	
			Persentase Capaian Indikator Nasional Mutu (INM) Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	90,00%		92,90%	93%									
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan														
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan di RSUD Tjitrowardojo	100%		100%	100%									
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						318.584.764.000,00					-		256.584.764.449,00	
		Terlaksananya Kinerja Penunjang dan Manajemen BLUD											-		256.584.764.449,00	
		Terlaksananya Kinerja Pelayanan Medis dan Keperawatan BLUD														
		Terlaksananya Kinerja Tata Usaha dan Rumah Tangga BLUD														
		Terlaksananya Kinerja Perencanaan dan Humas BLUD														
		Terlaksananya Kinerja Keuangan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja		27 Unit Kerja	1 Unit Kerja	318.584.764.000,00						29 Unit Kerja	256.584.764.449,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						318.584.764.000,00							256.584.764.449,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja		27 Unit Kerja	1 Unit Kerja	318.584.764.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Doplang || 0	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD Pendapatan dari BLUD				29 Unit Kerja	256.584.764.449,00	RSUD DR. TJITROWARDOJO

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						181.942.603.278,00							284.096.862.928,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						181.942.603.278,00							284.096.862.928,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						181.942.603.278,00							284.096.862.928,00	
98.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						20.187.576.400,00							32.798.629.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*20.187.576.400,00*							*32.176.629.000,00*	
			1.Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	20.187.576.400,00						100 %	32.176.629.000,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						210.185.400,00					-		154.334.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						210.185.400,00					-		154.334.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	163.104.200,00						22 Dokumen	104.334.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	45.081.200,00						24 Laporan	48.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						163.104.200,00							104.334.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	163.104.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	104.334.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.081.200,00							48.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	45.081.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Laporan	48.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.869.358.000,00					-		22.044.000.000,00	
		Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.869.358.000,00					-		22.044.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	40.000.000,00						44 Laporan	44.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan		200 Orang/bulan	195 Orang/bulan	16.829.358.000,00						190 Orang/bulan	22.000.000.000,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.829.358.000,00							22.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan		200 Orang/bulan	200 Orang/bulan	16.829.358.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				190 Orang/bulan	22.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						40.000.000,00							44.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	40.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	44.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						161.307.000,00					-		97.995.000,00	
		Terlayaninya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah						161.307.000,00					-		97.995.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	131.307.000,00						1 Dokumen	80.027.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	30.000.000,00						11 Laporan	17.968.000,00	
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						30.000.000,00							17.968.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	30.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	17.968.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						131.307.000,00							80.027.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	131.307.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	80.027.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						5.000.000,00					-		5.500.000,00	
		Terlayaninya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						5.000.000,00					-		5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	5.000.000,00						16 Dokumen	5.500.000,00	
	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	5.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						52.596.800,00					-		66.000.000,00	
		Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						52.596.800,00					-		66.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	5.367.000,00						17 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	47.229.800,00						30 Orang	55.000.000,00	
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.367.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	5.367.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						47.229.800,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	47.229.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 Orang	55.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						430.673.200,00					-		903.800.000,00	
		Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah						430.673.200,00					-		903.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.332.000,00						1 Dokumen	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	139.534.400,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	16.992.000,00						12 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	140.720.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.656.000,00						1 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	46.849.800,00						17 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	29.992.800,00						3 Paket	90.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	5.990.100,00						8 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	8.606.100,00						18 Paket	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.990.100,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	5.990.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Paket	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.606.100,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	8.606.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				18 Paket	22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.656.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.656.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						29.992.800,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	29.992.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.332.000,00							1.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.332.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						46.849.800,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	46.849.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Paket	75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						16.992.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	16.992.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						140.720.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	140.720.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						139.534.400,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	139.534.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						488.560.000,00					-		6.900.000.000,00	
		Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						488.560.000,00					-		6.900.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00						100 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						2 Unit	2.600.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		0 Unit	2 Unit	79.982.000,00						6 Unit	3.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		0 Unit	10 Unit	408.578.000,00						10 Unit	800.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						5 Unit	100.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						79.982.000,00							3.000.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		0 Unit	2 Unit	79.982.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Unit	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar						0,00							2.600.000.000,00	
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	2.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Unit	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						408.578.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		0 Unit	19 Unit	408.578.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						661.206.000,00					-		600.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						661.206.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	174.140.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	487.066.000,00						12 Laporan	400.000.000,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						174.140.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	174.140.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						487.066.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	487.066.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.308.690.000,00					-		2.027.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.308.690.000,00					-		2.027.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	15 Unit		14 Unit	14 Unit	170.000.000,00						14 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	537.500.000,00						2 Unit	700.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		56 Unit	56 Unit	345.650.000,00						56 Unit	720.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	196.840.000,00						6 Unit	280.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		43 Unit	43 Unit	21.500.000,00						43 Unit	95.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit		17 Unit	17 Unit	12.200.000,00						17 Unit	22.000.000,00	
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0.975 Ha		0.975 Ha	0.975 Ha	25.000.000,00						0.975 Ha	30.000.000,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						196.840.000,00							280.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	196.840.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Unit	280.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						345.650.000,00							720.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		56 Unit	79 Unit	345.650.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				56 Unit	720.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						170.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	15 Unit		14 Unit	10 Unit	170.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Unit	180.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.500.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		43 Unit	138 Unit	21.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				43 Unit	95.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						537.500.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	537.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.200.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit		17 Unit	25 Unit	12.200.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Unit	22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0.975 Ha		0.975 Ha	0,975 Ha	25.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0.975 Ha	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
99.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						9.542.896.600,00							5.100.661.000,00	
		Meningkatnya jaringan irigasi dalam kondisi baik						*9.542.896.600,00*							*5.100.661.000,00*	
			1.Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	72.45 %		69.02 %	69.88 %	9.542.896.600,00						70.74 %	5.100.661.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					Masyarakat		21.327.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan SDA dalam 1 (Satu) Wilayah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					Masyarakat		21.327.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	21.327.000,00	
	1.03.02.2.01.0130	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota						20.000.000,00							21.327.000,00	
		Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	21.327.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						9.522.896.600,00					Masyarakat		5.079.334.000,00	
		Tertanganinya Saluran Irigasi Kabupaten						9.522.896.600,00					Masyarakat		5.079.334.000,00	
			Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	UNIT		UNIT	2 UNIT	2.665.000.000,00						UNIT	0,00	
			Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	UNIT		UNIT	1 UNIT	0,00						UNIT	0,00	
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00						2 Dokumen	170.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	20 Lembaga		10 Lembaga	20 Lembaga	120.000.000,00						20 Lembaga	130.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	7 Lembaga		7 Lembaga	7 Lembaga	74.915.000,00						7 Lembaga	104.334.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	288 KM		288 KM	288 KM	3.917.981.600,00						288 KM	4.675.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.9 KM		1 KM	2 KM	2.595.000.000,00						0.8 KM	0,00	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						2.595.000.000,00							0,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.9 KM		1 KM	2,20 KM	2.595.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0.8 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						3.917.981.600,00							4.675.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	288 KM		288 KM	288 KM	3.917.981.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				288 KM	4.675.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota						120.000.000,00							130.000.000,00	
		Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	20 Lembaga		10 Lembaga	20 Lembaga	120.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Lembaga	130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi						74.915.000,00							104.334.000,00	
		Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	7 Lembaga		7 Lembaga	7 Lembaga	74.915.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Lembaga	104.334.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0048	Peningkatan Bendung Irigasi						0,00							0,00	
		Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	UNIT		UNIT	0 UNIT	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				UNIT	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa						150.000.000,00							170.000.000,00	
		Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi						2.665.000.000,00							0,00	
		Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	UNIT		UNIT	5 UNIT	2.665.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				UNIT	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
100.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						2.098.051.000,00							4.002.435.000,00	
		Meningkatknya rumah tangga dengan akses air minum aman						*2.098.051.000,00*							*4.002.435.000,00*	
			1.Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman	31.38 %		31.34 %	31.35 %	2.098.051.000,00						31.36 %	4.002.435.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						2.098.051.000,00					Masyarakat		4.002.435.000,00	
		Terlayani Penambahan Sambungan Rumah melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan Penambahan Jaringan Perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu						2.098.051.000,00					Masyarakat		4.002.435.000,00	
			Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Desa		6 Desa	10 Desa	50.000.000,00						10 Desa	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	115.616.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Lembaga		25 Lembaga	20 Lembaga	32.435.000,00						20 Lembaga	32.435.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	366 SR		SR	364 SR	0,00						SR	1.820.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	3 Liter/Detik		2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	1.900.000.000,00						3 Liter/Detik	2.000.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						115.616.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	115.616.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						1.900.000.000,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	3 Liter/Detik		2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	1.900.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kemiri || Desa Kedungpomahankulo n || 1 || Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bener || Desa Mayungsari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Liter/Detik	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Desa		6 Desa	6 Desa	50.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Desa	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						0,00							1.820.000.000,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	366 SR		SR	0 SR	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				SR	1.820.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						32.435.000,00							32.435.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Lembaga		25 Lembaga	20 Lembaga	32.435.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Lembaga	32.435.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
101.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						8.681.472.000,00							13.420.000.000,00	
		Meningkatnya rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik						*8.581.472.000,00*							*13.420.000.000,00*	
			1.Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	95.27 %		95.23 %	95.24 %	8.581.472.000,00						95.25 %	13.420.000.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						8.681.472.000,00					Masyarakat		13.420.000.000,00	
		Terlayaninya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						8.681.472.000,00					Masyarakat		13.420.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	0 Unit		0 Unit	1 Unit	2.900.000.000,00						1 Unit	3.300.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						2.900.000.000,00							3.300.000.000,00	
		Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	0 Unit		0 Unit	1 Unit	2.900.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Loano || Desa Jetis || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	3.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						100.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Terlayaninya Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						8.681.472.000,00					Masyarakat		13.420.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-		-	-	47.686.000,00						-	33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	-	5.533.786.000,00						-	9.900.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	77.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja						100.000.000,00							77.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-		-	120 Unit	100.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	77.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0048	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						47.686.000,00							33.000.000,00	
		Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-		-	20 Orang	47.686.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	33.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						5.533.786.000,00							9.900.000.000,00	
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	300 Rumah Tangga	5.533.786.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	9.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
102.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						2.850.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Meningkatnya drainase jalan di perkotaan dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat						*2.850.000.000,00*							*1.000.000.000,00*	
			1.Persentase Drainase Jalan di Perkotaan dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	32.61 %		31.00 %	31.40 %	2.850.000.000,00						31.81 %	1.000.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.850.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
		Tertanganinya Saluran Drainase Jalan di Perkotaan pada Kabupaten/Kota						2.850.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Sistem Drainase Perkotaan		2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00						2 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1.850.000.000,00						0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan						1.850.000.000,00							0,00	
		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.850.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Sistem Drainase Perkotaan		2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
103.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						6.390.000.000,00							145.530.000.000,00	
		Meningkatnya bangunan gedung dengan kondisi baik						*6.390.000.000,00*							*145.530.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Bangunan Gedung dengan Kondisi Baik	91.67 %		87.50 %	88.69 %	6.390.000.000,00						89.88 %	145.530.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						6.390.000.000,00					Masyarakat		145.530.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota						6.390.000.000,00					Masyarakat		145.530.000.000,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00						1 Dokumen	330.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						300.000.000,00							330.000.000,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	330.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota						6.390.000.000,00					Masyarakat		145.530.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	6.090.000.000,00						-	145.200.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						6.090.000.000,00							145.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	2 Bangunan Gedung	6.090.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	145.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
104.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						131.420.607.278,00							80.986.637.928,00	
		Meningkatnya jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi baik						*131.420.607.278,00*							*80.986.637.928,00*	
			1.Persentase Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	19.79 %		17.15 %	17.81 %	131.420.607.278,00						18.47 %	80.986.637.928,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						131.420.607.278,00					Masyarakat		80.986.637.928,00	
		Tertanganinya Jalan dan Jembatan Kabupaten						131.420.607.278,00					Masyarakat		80.986.637.928,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	9 Dokumen		8 Dokumen	7 Dokumen	672.000.000,00						7 Dokumen	635.524.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	757.79 KM		757.79 KM	757.79 KM	50.000.000,00						757.79 KM	183.484.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	0.6 KM		0 KM	0.44 KM	2.267.000.000,00						0.4 KM	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0 KM		0 KM	1 KM	0,00						0 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.6 KM		0 KM	0.5 KM	9.350.000.000,00						0.5 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	105 KM		95 KM	95 KM	41.383.079.278,00						104 KM	20.408.372.684,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM		5 KM	4 KM	62.213.528.000,00						4 KM	54.284.257.244,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.5 KM		1 KM	2.5 KM	3.890.000.000,00						1 KM	0,00	
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	8 Meter		12 Meter	8 Meter	10.820.000.000,00						0 Meter	4.700.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	16 Meter		8 Meter	8 Meter	775.000.000,00						8 Meter	775.000.000,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						672.000.000,00							635.524.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	9 Dokumen		8 Dokumen	7 dokumen Dokumen	672.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Dokumen	635.524.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						50.000.000,00							183.484.000,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	757.79 KM		757.79 KM	757,79 KM	50.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				757.79 KM	183.484.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						41.383.079.278,00							20.408.372.684,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	105 KM		95 KM	175 KM	41.383.079.278,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				104 KM	20.408.372.684,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						2.267.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	0.6 KM		0 KM	0,2 KM	2.267.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0.4 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan						62.213.528.000,00							54.284.257.244,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM		5 KM	60 KM	62.213.528.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 KM	54.284.257.244,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						9.350.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.6 KM		0 KM	1 KM	9.350.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0.5 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan						10.820.000.000,00							4.700.000.000,00	
		Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	8 Meter		12 Meter	16 Meter	10.820.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Meter	4.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						3.890.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	1.5 KM		1 KM	6 KM	3.890.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan						775.000.000,00							775.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	16 Meter		8 Meter	6 Meter	775.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Meter	775.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0 KM		0 KM	0 KM	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 KM	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
105.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						130.000.000,00							171.500.000,00	
			Persentase Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	-		-	100 %	30.000.000,00						-	44.000.000,00	
			-	-		-	-	100.000.000,00						-	127.500.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						30.000.000,00					-		44.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						30.000.000,00					-		44.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	-		-	-	30.000.000,00						-	44.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						30.000.000,00							44.000.000,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	-		-	15 Orang	30.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	44.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		27.500.000,00	
		Tersedianya Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00					-		27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	27.500.000,00	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						25.000.000,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	27.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						75.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						75.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	15 Badan Usaha		15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	75.000.000,00						15 Badan Usaha	100.000.000,00	
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	15 Badan Usaha		15 Badan Usaha	15 Badan Usaha	75.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Badan Usaha	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
106.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						642.000.000,00							1.087.000.000,00	
		Meningkatnya kinerja penyusunan dokumen RTR, meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR dan terselenggaranya pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang						*530.000.000,00*							*852.000.000,00*	
			1.Persentase Kinerja Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang (RTR)	100 %		50.00 %	66.67 %	530.000.000,00						77.78 %	852.000.000,00	
			2.Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (RTR)	91.18 %		91.08 %	91.10 %	530.000.000,00						91.11 %	852.000.000,00	
			3.Persentase Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tata Ruang	75.00 %		25.00 %	37.50 %	530.000.000,00						50.00 %	852.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						127.000.000,00					Masyarakat		337.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						127.000.000,00					Masyarakat		337.000.000,00	
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						Dokumen	94.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	Dokumen	12.000.000,00						Dokumen	24.000.000,00	
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						Laporan	219.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						12.000.000,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Dokumen	24.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota						100.000.000,00							94.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Dokumen	94.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						15.000.000,00							219.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Laporan	219.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						310.000.000,00					-		520.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						310.000.000,00					-		520.000.000,00	
			Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta		1 Peta	Peta	12.000.000,00						Peta	50.000.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						Dokumen	235.000.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	198.000.000,00						1 Dokumen	235.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar						12.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta		1 Peta	1 Peta	12.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Peta	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						198.000.000,00							235.000.000,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	198.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	235.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota						100.000.000,00							235.000.000,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Dokumen	235.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						185.000.000,00					-		190.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						185.000.000,00					-		190.000.000,00	
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	94.000.000,00						1 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	28 Layanan		20 Layanan	25 Layanan	91.000.000,00						26 Layanan	65.000.000,00	
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						94.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	94.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						91.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	28 Layanan		20 Layanan	20 Layanan	91.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				26 Layanan	65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					-		40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah						20.000.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	2 Kasus		2 Kasus	2 Kasus	20.000.000,00						2 Kasus	40.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR						20.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	2 Kasus		2 Kasus	2 Kasus	20.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Kasus	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						5.799.577.254,00							7.288.572.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.494.148.414,00							7.127.046.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						5.494.148.414,00							7.127.046.000,00	
107.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.410.895.300,00							3.459.169.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*3.408.895.300,00*							*3.435.169.000,00*	
			1.Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	3.408.895.300,00						100 %	3.435.169.000,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.537.000,00					Perangkat Daerah		9.557.200,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.537.000,00					Perangkat Daerah		9.557.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	625.000,00						1 Dokumen	625.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	8.287.000,00						22 Dokumen	8.307.200,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	625.000,00						24 Laporan	625.000,00	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.287.000,00							8.307.200,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	8.287.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	8.307.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						625.000,00							625.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	625.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Laporan	625.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						625.000,00							625.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	625.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	625.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.926.779.000,00					Perangkat Daerah		3.053.338.048,00	
		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.926.779.000,00					Perangkat Daerah		3.053.338.048,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	625.000,00						44 Laporan	625.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan		29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2.926.154.000,00						29 Orang/bulan	3.052.713.048,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.926.154.000,00							3.052.713.048,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan		29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2.926.154.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				29 Orang/bulan	3.052.713.048,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						625.000,00							625.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	625.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	625.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						375.000,00					-		375.000,00	
		Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						375.000,00					-		375.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	375.000,00						11 Laporan	375.000,00	
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						375.000,00							375.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	375.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	375.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						375.000,00					-		375.000,00	
		Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						375.000,00					-		375.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		0 Dokumen	16 Dokumen	375.000,00						16 Dokumen	375.000,00	
	1.04.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						375.000,00							375.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		0 Dokumen	16 Dokumen	375.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	375.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						375.000,00					-		375.000,00	
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						375.000,00					-		375.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	375.000,00						17 Dokumen	375.000,00	
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						375.000,00							375.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	375.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	375.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						129.743.700,00					-		73.000.000,00	
		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						129.743.700,00					-		73.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	1.472.000,00						2 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	2.496.000,00						12 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	59.242.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	37.111.200,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	34 Paket		34 Paket	34 Paket	17.508.300,00						34 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	5.769.400,00						5 Paket	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.765.900,00						12 Paket	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	3.378.900,00						18 Paket	2.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.765.900,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.765.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.378.900,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	3.378.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				18 Paket	2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						37.111.200,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	37.111.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.769.400,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	5.769.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						17.508.300,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	34 Paket		34 Paket	34 Paket	17.508.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				34 Paket	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.496.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	2.496.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						59.242.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	59.242.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.472.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	1.472.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						182.320.200,00					-		177.893.752,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						182.320.200,00					-		177.893.752,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.572.200,00						12 Laporan	60.893.752,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	119.748.000,00						12 Laporan	117.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						62.572.200,00							60.893.752,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.572.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	60.893.752,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						119.748.000,00							117.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	119.748.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	117.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						161.390.400,00					-		144.255.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						161.390.400,00					-		144.255.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.370.400,00						1 Unit	13.875.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	113.800.000,00						21 Unit	110.380.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit		45 Unit	45 Unit	23.220.000,00						45 Unit	20.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						113.800.000,00							110.380.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	113.800.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				21 Unit	110.380.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						24.370.400,00							13.875.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.370.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	13.875.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						23.220.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit		45 Unit	45 Unit	23.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				45 Unit	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
108.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						276.928.700,00							232.771.000,00	
		Meningkatnya kinerja pengembangan perumahan						*276.928.700,00*							*230.771.000,00*	
			1.Persentase Peningkatan Kinerja Pengembangan Perumahan	100 %		100 %	100 %	276.928.700,00						100 %	230.771.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						14.593.800,00					Masyarakat		15.706.300,00	
		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tersusun						14.593.800,00					Masyarakat		15.706.300,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.706.200,00						1 Dokumen	5.706.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	3.317.700,00						1 Dokumen	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.355.300,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.559.400,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.655.200,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						1.355.300,00							1.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.355.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana						2.655.200,00							3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.655.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						3.317.700,00							3.500.000,00	
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	3.317.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	3.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						1.559.400,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.559.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						5.706.200,00							5.706.300,00	
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.706.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	5.706.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						258.493.300,00					-		202.064.700,00	
		Jumlah Dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						258.493.300,00					-		202.064.700,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.027.900,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	256.465.400,00						1 Laporan	200.064.700,00	
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun						256.465.400,00							200.064.700,00	
		Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	256.465.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	200.064.700,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						2.027.900,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.027.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	2.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						3.841.600,00					-		15.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Siteplan Perumahan						3.841.600,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.841.600,00						1 Laporan	15.000.000,00	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan						3.841.600,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.841.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
109.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						888.957.254,00							118.347.000,00	
		Meningkatnya luas kawasan kumuh 0-10 Ha yang ditangani						*888.957.254,00*							*118.347.000,00*	
			1.Persentase Luas Kawasan Kumuh 0-10 Ha yang Ditangani	100 %		93.69 %	95.27 %	888.957.254,00						96.85 %	118.347.000,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						15.000.000,00					Masyarakat		20.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha						15.000.000,00					Masyarakat		20.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat		0 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	15.000.000,00						2 Kelompok Masyarakat	20.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	2 Kelompok Masyarakat		0 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	15.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Kelompok Masyarakat	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						873.957.254,00					Masyarakat		98.347.000,00	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha						873.957.254,00					Masyarakat		98.347.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00						1 Laporan	43.347.000,00	
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha		2 Ha	2 Ha	743.957.254,00						1 Ha	55.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						55.000.000,00							43.347.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	43.347.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						743.957.254,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	2 Ha		2 Ha	2 Ha	743.957.254,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Ha	55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
110.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						529.707.000,00							2.189.619.000,00	
		Meningkatnya rumah tidak layak huni yang ditangani						*529.707.000,00*							*2.189.619.000,00*	
			1.Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Ditangani	100 %		93.40 %	96.02 %	529.707.000,00						98.72 %	2.189.619.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						529.707.000,00					-		2.189.619.000,00	
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Ditangani						529.707.000,00					-		2.189.619.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	98.125.000,00						1 Laporan	98.125.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah		100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	431.582.000,00						100 Unit Rumah	2.091.494.000,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						431.582.000,00							2.091.494.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	100 Unit Rumah		100 Unit Rumah	100 Unit Rumah	431.582.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Unit Rumah	2.091.494.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						98.125.000,00							98.125.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	98.125.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	98.125.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
111.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						387.660.160,00							1.127.140.000,00	
		Meningkatnya perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum						*387.660.160,00*							*1.127.140.000,00*	
			1.Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang Diserahkan	100 %		65.71 %	74.29 %	387.660.160,00						82.86 %	1.127.140.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						387.660.160,00					-		1.127.140.000,00	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan PSU Perumahan						387.660.160,00					-		1.127.140.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00						6 Laporan	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	6 Lokasi		6 Lokasi	6 Lokasi	377.660.160,00						6 Lokasi	1.115.140.000,00	
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang						10.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Laporan	12.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						377.660.160,00							1.115.140.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	6 Lokasi		6 Lokasi	6 Lokasi	377.660.160,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Lokasi	1.115.140.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						305.428.840,00							161.526.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						305.428.840,00							161.526.000,00	
112.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						118.793.920,00							45.039.000,00	
		Meningkatnya penanganan sengketa tanah garapan						*118.793.920,00*							*45.039.000,00*	
			1.Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	100 %		20 %	40 %	118.793.920,00						60 %	45.039.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						118.793.920,00					-		45.039.000,00	
		Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						118.793.920,00					-		45.039.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	118.793.920,00						1 Berita Acara	45.039.000,00	
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						118.793.920,00							45.039.000,00	
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	118.793.920,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Berita Acara	45.039.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
113.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						16.253.000,00							16.000.000,00	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)						*16.253.000,00*							*16.000.000,00*	
			1.Persentase Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	100 %		20 %	40 %	16.253.000,00						60 %	16.000.000,00	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						16.253.000,00					-		16.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penetapan Subjek Tanah Reforma Agraria						16.253.000,00					-		16.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.253.000,00						1 Laporan	16.000.000,00	
	2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.						16.253.000,00							16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.253.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	16.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
114.	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH						170.381.920,00							100.487.000,00	
		Meningkatnya permohonan izin membuka tanah negara yang disetujui						*170.381.920,00*							*100.487.000,00*	
			1.Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan	100 %		20 %	40 %	170.381.920,00						60 %	100.487.000,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah						170.381.920,00					-		100.487.000,00	
		Jumlah Dokumen Permohonan Izin Membuka Tanah						170.381.920,00					-		100.487.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	170.381.920,00						1 Dokumen	100.487.000,00	
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah						170.381.920,00							100.487.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	170.381.920,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	100.487.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN						13.353.859.062,00							13.681.884.300,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.353.859.062,00							13.681.884.300,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						13.353.859.062,00							13.681.884.300,00	
115.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.935.414.100,00							10.760.104.300,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah (Satpol PP Damkar)						*9.935.414.100,00*							*10.730.104.300,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	9.935.414.100,00						100 %	10.730.104.300,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.548.500,00					Aparatur		45.467.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.548.500,00					Aparatur		45.467.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	960.000,00						1 Dokumen	1.113.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	16.641.100,00						22 Dokumen	31.379.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	5.947.400,00						24 Laporan	12.975.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.641.100,00							31.379.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	24 Dokumen	16.641.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	31.379.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.947.400,00							12.975.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	5.947.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Laporan	12.975.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						960.000,00							1.113.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.113.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.344.899.600,00					Aparatur		10.014.194.000,00	
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.344.899.600,00					Aparatur		10.014.194.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	6.560.600,00						44 Laporan	14.194.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan		110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	9.338.339.000,00						110 Orang/bulan	10.000.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.338.339.000,00							10.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan		110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	9.338.339.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				110 Orang/bulan	10.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						6.560.600,00							14.194.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	6.560.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	14.194.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.566.300,00						Aparatur		5.000.000,00	
		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.566.300,00						Aparatur		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	3.566.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	5.000.000,00	
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.566.300,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	3.566.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4.859.800,00					Aparatur		35.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4.859.800,00					Aparatur		35.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	4.859.800,00						17 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	142 Paket	0,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	30.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	110 Paket	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						4.859.800,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	4.859.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	5.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Orang	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						184.275.700,00					Aparatur		223.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						184.275.700,00					Aparatur		223.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.287.800,00						2 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.880.000,00						12 Laporan	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.123.400,00						12 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	107.165.400,00						1 Paket	115.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	31 Paket		31 Paket	31 Paket	6.518.300,00						31 Paket	7.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	8.575.200,00						5 Paket	9.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	7.114.800,00						14 Paket	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	19.610.800,00						35 Paket	21.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.114.800,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	7.114.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Paket	8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						19.610.800,00							21.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	19.610.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Paket	21.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						107.165.400,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	107.165.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.575.200,00							9.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	8.575.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	9.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.518.300,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	31 Paket		31 Paket	31 Paket	6.518.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				31 Paket	7.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.880.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.880.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.123.400,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.123.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						7.287.800,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.287.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	4.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan						0,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						10 Unit	0,00	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						89.725.200,00					-		127.873.300,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						89.725.200,00					-		127.873.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00						12 Laporan	112.873.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.725.200,00						12 Laporan	15.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						75.000.000,00							112.873.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	112.873.300,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						14.725.200,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.725.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						284.539.000,00					Aparatur		308.570.000,00	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						284.539.000,00					Aparatur		308.570.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.959.000,00						1 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	174.410.000,00						20 Unit	183.690.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	34.880.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		25 Unit	30 Unit	17.210.000,00						30 Unit	30.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							34.880.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	34.880.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						174.410.000,00							183.690.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	174.410.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Unit	183.690.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.210.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		25 Unit	25 Unit	17.210.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 Unit	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						48.959.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	48.959.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
116.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.622.317.031,00							2.151.380.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)						*1.842.736.831,00*							*1.378.880.000,00*	
			1.Persentase Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban. Ketentraman. Keindahan)	100 %		100 %	100 %	1.842.736.831,00						100 %	1.378.880.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.842.736.831,00					Masyarakat dan Aparatur		1.378.880.000,00	
		Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota						1.842.736.831,00					Masyarakat dan Aparatur		1.378.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	100 Orang		0 Orang	100 Orang	49.588.600,00						100 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	134.484.331,00						1 Dokumen	165.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	6.650.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.624.500,00						1 Dokumen	6.500.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	1.122.152.500,00						12 laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.330.300,00						2 Laporan	8.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	521.906.600,00						4 Unit	869.180.000,00	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						134.484.331,00							165.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	134.484.331,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	165.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						5.624.500,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.624.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	6.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas						49.588.600,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	100 Orang		0 Orang	100 Orang	49.588.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Orang	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						1.122.152.500,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	1.122.152.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 laporan	180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						2.330.300,00							8.200.000,00	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.330.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	8.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						521.906.600,00							869.180.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	10 Unit	521.906.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Unit	869.180.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota						6.650.000,00							0,00	
		Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	6.650.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada						*779.580.200,00*							*772.500.000,00*	
			1.Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100 %		100 %	100 %	779.580.200,00						100 %	772.500.000,00	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						763.240.500,00					-		700.500.000,00	
		Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						763.240.500,00					-		700.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	247.308.300,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	104.077.700,00						5 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan		5 laporan	6 laporan	10.500.000,00						8 laporan	17.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	390.116.500,00						12 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	3 laporan		3 laporan	3 laporan	11.238.000,00						3 laporan	13.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						10.500.000,00							17.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan		5 laporan	6 laporan	10.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 laporan	17.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah						11.238.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	3 laporan		3 laporan	3 laporan	11.238.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 laporan	13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						104.077.700,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	104.077.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Laporan	120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						390.116.500,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	390.116.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				12 Laporan	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						247.308.300,00							200.000.000,00	
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	247.308.300,00	Kab. Purworejo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						16.339.700,00					-		72.000.000,00	
		Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota yang Dibina						16.339.700,00					-		72.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	42.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.339.700,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS						10.000.000,00							42.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	42.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						6.339.700,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.339.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
117.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						796.127.931,00							770.400.000,00	
		Meningkatnya kualitas penanganan kebakaran dan non kebakaran						*796.127.931,00*							*760.400.000,00*	
			1.Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap	80 %		76 %	77 %	796.127.931,00						78 %	760.400.000,00	
			2.Persentase Pelayanan Non Kebakaran	100 %		100 %	100 %	796.127.931,00						100 %	760.400.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						501.077.200,00					-		480.400.000,00	
		Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten						501.077.200,00					-		480.400.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	120 Orang		120 Orang	120 Orang	17.500.000,00						120 Orang	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.995.000,00						1 Dokumen	260.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	93.216.600,00						12 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit		51 Unit	1 Unit	190.365.600,00						0 Unit	0,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						93.216.600,00							170.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	93.216.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	170.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						199.995.000,00							260.400.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.995.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	260.400.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						17.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	120 Orang		120 Orang	50 Orang	17.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				120 Orang	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						190.365.600,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit		51 Unit	10 Unit	190.365.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						81.830.231,00					-		95.000.000,00	
		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						81.830.231,00					-		95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	494 Desa/Kelurahan		494 Desa/Kelurahan	494 Desa/Kelurahan	6.748.000,00						494 Desa/Kelurahan	10.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	350 Orang		350 Orang	350 Orang	75.082.231,00						350 Orang	75.000.000,00	
			Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	200 Orang		0 Orang	200 Orang	0,00						150 Orang	10.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						75.082.231,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	350 Orang		350 Orang	350 Orang	75.082.231,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				350 Orang	75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						6.748.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	494 Desa/Kelurahan		494 Desa/Kelurahan	494 Desa/Kelurahan	6.748.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				494 Desa/Kelurahan	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0004	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	200 Orang		0 Orang	200 Orang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				150 Orang	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						211.145.400,00					-		180.000.000,00	
		Jumlah Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						211.145.400,00					-		180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan		0 Laporan	4 Laporan	19.125.300,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	30.000.100,00						12 Laporan	160.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	0 Unit		0 Unit	3 Unit	162.020.000,00						0 Unit	0,00	
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia						30.000.100,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	30.000.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						19.125.300,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	19.125.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						162.020.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	0 Unit		0 Unit	3 Unit	162.020.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						2.075.100,00					-		15.000.000,00	
		Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran yang sesuai standar						2.075.100,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	-	2.075.100,00						-	15.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						2.075.100,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	1 Laporan	2.075.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. PURWOREJO
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						9.982.417.935,00							6.151.469.500,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.982.417.935,00							6.151.469.500,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						9.982.417.935,00							6.151.469.500,00	
118.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.361.411.210,00							4.007.979.500,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah (BPBD)						*5.361.411.210,00*							*4.007.979.500,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	5.361.411.210,00						100 %	4.007.979.500,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						44.488.300,00					-		38.604.500,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						44.488.300,00					-		38.604.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.199.800,00						1 Dokumen	14.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		23 Dokumen	22 Dokumen	25.914.200,00						22 Dokumen	18.172.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	5.374.300,00						24 Laporan	5.912.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.914.200,00							18.172.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		23 Dokumen	22 Dokumen	25.914.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	18.172.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.374.300,00							5.912.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	5.374.300,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Laporan	5.912.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						13.199.800,00							14.520.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.199.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	14.520.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.606.663.810,00					-		3.120.337.600,00	
		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.606.663.810,00					-		3.120.337.600,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	16.014.200,00						44 Laporan	13.026.800,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan		51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	4.590.649.610,00						51 Orang/bulan	3.107.310.800,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.590.649.610,00							3.107.310.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan		51 Orang/bulan	51 Orang/bulan	4.590.649.610,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				51 Orang/bulan	3.107.310.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						16.014.200,00							13.026.800,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	16.014.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	13.026.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.888.500,00					-		4.840.000,00	
		Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.888.500,00					-		4.840.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.888.500,00						11 Laporan	4.840.000,00	
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.888.500,00							4.840.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.888.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	4.840.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						973.400,00					-		5.142.500,00	
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						973.400,00					-		5.142.500,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	973.400,00						17 Dokumen	5.142.500,00	
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						973.400,00							5.142.500,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	973.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	5.142.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						129.396.400,00					-		185.122.600,00	
		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						129.396.400,00					-		185.122.600,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.199.500,00						2 Dokumen	4.879.100,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	2.896.000,00						11 Laporan	3.194.400,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	49.399.000,00						12 Laporan	77.841.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	56.918.400,00						4 Paket	72.672.600,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	2.877.500,00						4 Paket	7.138.800,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.882.000,00						4 Paket	10.996.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.360.000,00						4 Paket	3.696.400,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.864.000,00						4 Paket	4.703.600,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.360.000,00							3.696.400,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.360.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	3.696.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.864.000,00							4.703.600,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.864.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	4.703.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						56.918.400,00							72.672.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	56.918.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	72.672.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.882.000,00							10.996.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	7.882.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	10.996.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.877.500,00							7.138.800,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	2.877.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	7.138.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.896.000,00							3.194.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	2.896.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	3.194.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						49.399.000,00							77.841.200,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	49.399.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	77.841.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.199.500,00							4.879.100,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.199.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	4.879.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						46.955.000,00					-		140.950.000,00	
		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan						46.955.000,00					-		140.950.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						20 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						4 Unit	42.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	46.955.000,00						1 Unit	38.950.000,00	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	51 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Unit	60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Unit	42.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						46.955.000,00							38.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	46.955.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	38.950.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						191.678.800,00					-		153.101.400,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						191.678.800,00					-		153.101.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	123.674.800,00						12 Laporan	126.007.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.004.000,00						12 Laporan	27.094.400,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						123.674.800,00							126.007.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	123.674.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	126.007.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						68.004.000,00							27.094.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.004.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	27.094.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						339.367.000,00					-		359.880.900,00	
		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara						339.367.000,00					-		359.880.900,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	47.575.000,00						1 Unit	47.575.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	203.580.000,00						26 Unit	221.067.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	42.204.800,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	25.880.000,00						20 Unit	28.810.100,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit		21 Unit	21 Unit	18.372.000,00						21 Unit	20.224.000,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							42.204.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	42.204.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						203.580.000,00							221.067.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	203.580.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				26 Unit	221.067.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.880.000,00							28.810.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	25.880.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Unit	28.810.100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						47.575.000,00							47.575.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	47.575.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	47.575.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						18.372.000,00							20.224.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit		21 Unit	21 Unit	18.372.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				21 Unit	20.224.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
119.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						4.621.006.725,00							2.143.490.000,00	
		Meningkatnya layanan penanganan bencana pada saat pasca bencana						*413.354.600,00*							*393.880.000,00*	
			3.Persentase layanan penanganan pasca bencana	100 %		100 %	100 %	413.354.600,00						100 %	393.880.000,00	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						413.354.600,00					-		393.880.000,00	
		Persentase Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						413.354.600,00					-		393.880.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.160.000,00						1 Dokumen	14.080.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.774.600,00						1 Dokumen	19.800.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.160.000,00						1 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	269.260.000,00						1 Kegiatan	85.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						52.160.000,00							14.080.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	52.160.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	14.080.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						269.260.000,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	269.260.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Kegiatan	85.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						70.774.600,00							19.800.000,00	
		Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.774.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	19.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						11.160.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.160.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	80.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota						0,00							120.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Meningkatnya layanan pencengahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						*3.804.385.935,00*							*1.257.140.000,00*	
			1.Persentase layanan penanganan pra bencana	100 %		100 %	100 %	3.804.385.935,00						100 %	1.257.140.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						349.429.800,00					-		102.500.000,00	
		Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten						349.429.800,00					-		102.500.000,00	
			Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	249.429.800,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300 Orang		300 Orang	100 Orang	100.000.000,00						300 Orang	102.500.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						100.000.000,00							102.500.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300 Orang		300 Orang	100 Orang	100.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				300 Orang	102.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota						249.429.800,00							0,00	
		Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	249.429.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						3.454.956.135,00					-		1.154.640.000,00	
		Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						3.454.956.135,00					-		1.154.640.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00						2 Dokumen	210.000.000,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	260.000.000,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 Keluarga		0 Keluarga	25 Keluarga	13.155.300,00						25 Keluarga	19.360.000,00	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan		2 laporan	2 laporan	3.124.330.435,00						2 laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	140 Unit		10 Unit	12 Unit	38.990.500,00						32 Unit	72.110.000,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang		500 Orang	300 Orang	110.073.000,00						500 Orang	125.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						38.990.500,00							72.110.000,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	140 Unit		10 Unit	12 Unit	38.990.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				32 Unit	72.110.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						110.073.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang		500 Orang	300 Orang	110.073.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				500 Orang	125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam						13.155.300,00							19.360.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	25 Keluarga		0 Keluarga	25 Keluarga	13.155.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				25 Keluarga	19.360.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						0,00							210.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						3.124.330.435,00							250.000.000,00	
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan		2 laporan	2 laporan	3.124.330.435,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 laporan	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						0,00							260.000.000,00	
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	260.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			-	-		-	-	403.266.190,00						-	492.470.000,00	
		Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						3.454.956.135,00					-		1.154.640.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	168.406.900,00						-	218.170.000,00	
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						168.406.900,00							218.170.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	210 Orang	168.406.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	218.170.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						403.266.190,00					-		492.470.000,00	
		Terlayaninya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						403.266.190,00					-		492.470.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	231.669.000,00						1 Dokumen	283.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	15 Orang		15 Orang	15 Orang	125.009.990,00						15 Orang	116.300.000,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	15 Orang		15 Orang	15 Orang	12.040.000,00						15 Orang	19.360.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.947.200,00						1 Laporan	42.350.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.600.000,00						1 Laporan	31.460.000,00	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						5.947.200,00							42.350.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.947.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	42.350.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						231.669.000,00							283.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	231.669.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	283.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						12.040.000,00							19.360.000,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	15 Orang		15 Orang	15 Orang	12.040.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Orang	19.360.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						125.009.990,00							116.300.000,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	15 Orang		15 Orang	150 Orang	125.009.990,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Orang	116.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						28.600.000,00							31.460.000,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	31.460.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						13.344.800.300,00							18.282.170.400,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.926.567.900,00							11.869.811.000,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						6.926.567.900,00							11.869.811.000,00	
120.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.834.775.300,00							4.755.287.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*4.834.775.300,00*							*4.753.037.000,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.834.775.300,00						100 %	4.753.037.000,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						42.322.600,00					-		12.250.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.						42.322.600,00					-		12.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	23.735.400,00						22 Dokumen	8.750.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	11.867.200,00						24 Laporan	2.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.720.000,00						1 Dokumen	750.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						23.735.400,00							8.750.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	23.735.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	8.750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11.867.200,00							2.750.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	11.867.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Laporan	2.750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						6.720.000,00							750.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.720.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.946.264.600,00					-		4.226.825.000,00	
		Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat daerah						3.946.264.600,00					-		4.226.825.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.934.633.000,00						37 Orang/bulan	4.221.719.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	220 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	11.631.600,00						44 Laporan	5.106.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.934.633.000,00							4.221.719.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.934.633.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				37 Orang/bulan	4.221.719.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						11.631.600,00							5.106.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	220 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	11.631.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	5.106.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						996.800,00					-		750.000,00	
		Tersusunnya laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah.						996.800,00					-		750.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	55 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	996.800,00						11 Laporan	750.000,00	
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						996.800,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	55 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	996.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.142.400,00					-		750.000,00	
		Tersusunnya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah.						3.142.400,00					-		750.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	85 Laporan		17 Dokumen	17 Dokumen	3.142.400,00						17 Dokumen	750.000,00	
	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						3.142.400,00							750.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	85 Laporan		17 Dokumen	17 Dokumen	3.142.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						144.136.900,00					-		92.439.000,00	
		Tersusunnya dokumen administrasi umum perangkat daerah.						144.136.900,00					-		92.439.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		2 Paket	2 Paket	5.472.000,00						2 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		4 Paket	4 Paket	12.370.600,00						4 Paket	12.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	44.415.000,00						1 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		2 Paket	2 Paket	11.633.500,00						2 Paket	8.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	5.631.800,00						1 Paket	5.271.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.920.000,00						12 Laporan	1.418.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	59.214.000,00						12 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.480.000,00						2 Dokumen	750.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.472.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		2 Paket	2 Paket	5.472.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	4.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.370.600,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		4 Paket	4 Paket	12.370.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	12.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						44.415.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	44.415.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	35.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.633.500,00							8.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		2 Paket	2 Paket	11.633.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	8.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.631.800,00							5.271.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	5.631.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	5.271.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.920.000,00							1.418.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.920.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	1.418.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						59.214.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	59.214.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.480.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.480.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						53.077.000,00					-		0,00	
		Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.						53.077.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		5 Unit	8 Unit	37.912.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		5 Unit	2 Unit	15.165.000,00						Unit	0,00	
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						37.912.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		5 Unit	8 Unit	37.912.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.165.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		5 Unit	2 Unit	15.165.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						405.507.000,00					-		257.500.000,00	
		Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.						405.507.000,00					-		257.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	224.987.000,00						12 Laporan	82.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	180.520.000,00						12 Laporan	175.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						224.987.000,00							82.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan		12 Laporan	12 Laporan	224.987.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	82.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						180.520.000,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	180.520.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	175.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						239.328.000,00					-		164.773.000,00	
		Tersusunnya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.						239.328.000,00					-		164.773.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	40.150.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		9 Unit	9 Unit	92.250.000,00						9 Unit	52.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit		1 Unit	1 Unit	37.110.000,00						1 Unit	38.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		15 Unit	15 Unit	4.121.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		12 Unit	12 Unit	9.940.000,00						12 Unit	5.843.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit		2 Unit	2 Unit	42.777.000,00						2 Unit	24.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit		11 Unit	11 Unit	9.170.000,00						11 Unit	4.580.000,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							40.150.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	40.150.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						92.250.000,00							52.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45 Unit		9 Unit	9 Unit	92.250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				9 Unit	52.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						37.110.000,00							38.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit		1 Unit	1 Unit	37.110.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	38.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.121.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		15 Unit	15 Unit	4.121.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.940.000,00							5.843.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		12 Unit	12 Unit	9.940.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Unit	5.843.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						42.777.000,00							24.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		2 Unit	2 Unit	42.777.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	24.200.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.170.000,00							4.580.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	55 Unit		11 Unit	11 Unit	9.170.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Unit	4.580.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
121.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						21.259.000,00							16.738.000,00	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial						*14.759.000,00*							*16.738.000,00*	
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Dibina	21.50 %		16.50 %	18.00 %	14.759.000,00						19.50 %	16.738.000,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.930.000,00					-		3.000.000,00	
		Terlaksananya pengumpulan sumbangan melalui undian yang mendapatkan izin sesuai ketentuan.						1.930.000,00					-		3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.930.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						1.930.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.930.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						19.329.000,00					-		13.738.000,00	
		Terbinanya potensi sumber kesejahteraan sosial lembaga dan non-lembaga.						19.329.000,00					-		13.738.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Keluarga		0 Keluarga	23 Keluarga	3.250.000,00						26 Keluarga	7.238.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Lembaga		0 Lembaga	12 Lembaga	9.579.000,00						14 Lembaga	6.500.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang		6 Orang	7 Orang	3.250.000,00						Orang	0,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	120 orang		35 Orang	40 Orang	3.250.000,00						Orang	0,00	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						3.250.000,00							7.238.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Keluarga		0 Keluarga	23 Keluarga	3.250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				26 Keluarga	7.238.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						9.579.000,00							6.500.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Lembaga		0 Lembaga	12 Lembaga	9.579.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Lembaga	6.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						3.250.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang		6 Orang	7 Orang	3.250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						3.250.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	120 Orang		35 Orang	40 Orang	3.250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
122.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						1.498.700,00							784.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan						*1.498.700,00*							*784.000,00*	
			Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	100 %		100 %	100 %	1.498.700,00						100 %	784.000,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						1.498.700,00					-		784.000,00	
		Terfasilitasinya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke desa/kelurahan asal.						1.498.700,00					-		784.000,00	
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		3 Orang	3 Orang	1.498.700,00						3 Orang	784.000,00	
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						1.498.700,00							784.000,00	
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		3 Orang	3 Orang	1.498.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Orang	784.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
123.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						216.012.100,00							257.270.000,00	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial						*216.012.100,00*							*164.270.000,00*	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial	7.00 %		5.00 %	5.50 %	216.012.100,00						6.00 %	164.270.000,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						214.263.900,00					-		254.750.000,00	
		Terehabilitasinya penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.						214.263.900,00					-		254.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	91 Orang		17 Orang	20 Orang	74.500.000,00						22 Orang	90.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 orang		0 Orang	20 Orang	6.970.000,00						24 Orang	12.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang		11 Orang	12 Orang	13.748.000,00						Orang	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	435 Orang		70 Orang	80 Orang	39.220.000,00						90 Orang	90.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang		20 Orang	22 Orang	8.249.800,00						24 Orang	2.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang		0 Orang	10 Orang	4.500.000,00						12 Orang	8.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	81 Orang		0 Orang	25 Orang	2.109.900,00						27 Orang	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Orang		0 Orang	20 Orang	1.250.000,00						22 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang		20 Orang	22 Orang	61.477.600,00						24 Orang	45.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang		10 Orang	13 Orang	750.000,00						Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Orang		0 Orang	12 Orang	1.488.600,00						Orang	0,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						74.500.000,00							90.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	91 Orang		17 Orang	20 Orang	74.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Orang	90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						6.970.000,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang		0 Orang	20 Orang	6.970.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Orang	12.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						13.748.000,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang		11 Orang	12 Orang	13.748.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						39.220.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	435 Orang		70 Orang	80 Orang	39.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				90 Orang	90.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						8.249.800,00							2.750.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	92 Orang		20 Orang	22 Orang	8.249.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Orang	2.750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						4.500.000,00							8.500.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang		0 Orang	10 Orang	4.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Orang	8.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						2.109.900,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	81 Orang		0 Orang	25 Orang	2.109.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				27 Orang	3.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						1.250.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	66 Orang		0 Orang	20 Orang	1.250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Orang	3.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						61.477.600,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang		20 Orang	22 Orang	61.477.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Orang	45.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						750.000,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang		10 Orang	13 Orang	750.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan						1.488.600,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	39 Orang		0 Orang	12 Orang	1.488.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						1.748.200,00					-		2.520.000,00	
		Terehabilitasinya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA, di luar panti sosial.						1.748.200,00					-		2.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.748.200,00						1 Dokumen	2.520.000,00	
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						1.748.200,00							2.520.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	4 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.748.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.520.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
124.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						1.639.902.300,00							6.611.856.000,00	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial						*1.639.902.300,00*							*6.611.856.000,00*	
			Persentase Pemenuhan Perlindungan dan Jaminan Sosial	98.54 %		99.50 %	99.53 %	1.639.902.300,00						97.94 %	6.611.856.000,00	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar						395.000.000,00					-		395.000.000,00	
		Terlayaninya anak-anak terlantar melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial.						395.000.000,00					-		395.000.000,00	
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	178 Orang		30 Orang	37 Orang	395.000.000,00						37 Orang	395.000.000,00	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar						395.000.000,00							395.000.000,00	
		Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	178 Orang		30 Orang	37 Orang	395.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				37 Orang	395.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						1.244.902.300,00					-		6.216.856.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terdatanya fakir miskin untuk mendapatkan layanan perlindungan dan jaminan sosial.						1.244.902.300,00					-		6.216.856.000,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	65000 Orang		12500 Orang	12750 Orang	22.000.000,00						13000 Orang	289.856.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13500 Orang		2600 Orang	2650 Orang	46.750.000,00						2700 Orang	4.422.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3700 Orang		700 Orang	720 Orang	1.118.467.900,00						740 Orang	1.500.000.000,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	445 Usulan		85 Usulan	87 Usulan	57.684.400,00						89 Usulan	5.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						22.000.000,00							289.856.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	65000 Orang		12500 Orang	12750 Orang	22.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				13000 Orang	289.856.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						46.750.000,00							4.422.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	13500 Orang		2600 Orang	2650 Orang	46.750.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2700 Orang	4.422.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						1.118.467.900,00							1.500.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3700 Orang		700 Orang	720 Orang	1.118.467.900,00	Kab. Purworejo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)				740 Orang	1.500.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						57.684.400,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	445 Usulan		85 Usulan	87 Usulan	57.684.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				89 Usulan	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
125.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						136.196.900,00							157.829.000,00	
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana						*136.196.900,00*							*157.829.000,00*	
			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Kebutuhan Dasar pada Saat dan Pasca Bencana	100 %		100 %	100 %	136.196.900,00						100 %	157.829.000,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						117.198.200,00					-		117.829.000,00	
		Tersusunnya laporan pelaksanaan bantuan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.						117.198.200,00					-		117.829.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1635 Orang		300 Orang	315 Orang	82.255.000,00						330 Orang	67.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	675 orang		125 Orang	130 Orang	14.995.500,00						135 Orang	29.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	205 Orang		35 Orang	38 Orang	12.499.700,00						41 Orang	12.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	145 Orang		25 Orang	27 Orang	5.000.000,00						29 Orang	5.329.000,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		Orang	1 Orang	2.448.000,00						1 Orang	2.500.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						82.255.000,00							67.500.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1635 Orang		300 Orang	315 Orang	82.255.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				330 Orang	67.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						14.995.500,00							29.750.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	675 Orang		125 Orang	130 Orang	14.995.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				135 Orang	29.750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						12.499.700,00							12.750.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	205 Orang		35 Orang	38 Orang	12.499.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				41 Orang	12.750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						5.000.000,00							5.329.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	145 Orang		25 Orang	27 Orang	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				29 Orang	5.329.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						2.448.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang		0 Orang	1 Orang	2.448.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Orang	2.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						18.998.700,00					-		40.000.000,00	
		Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana.						18.998.700,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kampung		1 Kampung	2 Kampung	7.500.000,00						3 Kampung	40.000.000,00	
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	105 Orang		0 Orang	52 Orang	11.498.700,00						Orang	0,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						7.500.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Kampung		1 Kampung	2 Kampung	7.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Kampung	40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana						11.498.700,00							0,00	
		Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	105 Orang		0 Orang	52 Orang	11.498.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Orang	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
126.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						76.923.600,00							70.047.000,00	
		Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan						*76.923.600,00*							*70.047.000,00*	
			Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai Standar	72.50 %		62.50 %	65.00 %	76.923.600,00						67.50 %	70.047.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						76.923.600,00					-		70.047.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan sesuai standar.						76.923.600,00					-		70.047.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	44.998.200,00						1 Dokumen	37.500.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	445 Makam		437 Makam	439 Makam	20.000.000,00						441 Makam	20.750.000,00	
			Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8 Orang		0 Orang	2 Orang	2.425.800,00						2 Orang	3.750.000,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	800 orang		150 Orang	155 Orang	9.499.600,00						160 Orang	8.047.000,00	
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						44.998.200,00							37.500.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	44.998.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	37.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						20.000.000,00							20.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	445 Makam		437 Makam	439 Makam	20.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				441 Makam	20.750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.07.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						2.425.800,00							3.750.000,00	
		Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	8 orang		0 Orang	2 Orang	2.425.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Orang	3.750.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						9.499.600,00							8.047.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	800 Orang		150 Orang	155 Orang	9.499.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				160 Orang	8.047.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						6.418.232.400,00							6.412.359.400,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						6.418.232.400,00							6.412.359.400,00	
127.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						486.905.000,00							465.576.000,00	
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk						*486.905.000,00*							*465.576.000,00*	
			Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19	8.7 per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun		12.3 per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun	11.3 per 1.000 wanita pada kelompok umur 15-19 tahun	486.905.000,00						10.4 Per 1000	465.576.000,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						457.285.000,00					-		463.128.000,00	
		Tersusunnya dokumen profil kependudukan daerah.						457.285.000,00					-		463.128.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00						1 Dokumen	5.074.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.185.000,00						1 Unit	34.453.200,00	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						3.500.000,00							5.074.800,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	5.074.800,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain						30.185.000,00							34.453.200,00	
		Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.185.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	34.453.200,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						29.620.000,00					-		2.448.000,00	
		Terpadu dan tersinkronisasinya kebijakan pengendalian kuantitas penduduk antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.						29.620.000,00					-		2.448.000,00	
			Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	48 Kampung KB		44 Kampung KB	45 Kampung KB	2.000.000,00						-	2.448.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.620.000,00						-	0,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	5 Laporan / Dokumen		1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	20.000.000,00						-	0,00	
	2.14.02.2.01.0040	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas						2.000.000,00							2.448.000,00	
		Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	48 Kampung KB		44 Kampung KB	45 Kampung KB	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	2.448.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0053	Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota						7.620.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pemanfaatan (PJPK) dan Rencana Aksi Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.620.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.02.2.01.0055	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	5 Laporan / Dokumen		1 Laporan / Dokumen	1 Laporan / Dokumen	20.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						457.285.000,00						-	463.128.000,00	
		Tersusunnya dokumen profil kependudukan daerah.						457.285.000,00					-		463.128.000,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	423.600.000,00						-	423.600.000,00	
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						423.600.000,00							423.600.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	423.600.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana Dana Alokasi Umum (DAU)				-	423.600.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
128.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						1.963.527.400,00							1.960.636.400,00	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)						*1.963.527.400,00*							*1.960.636.400,00*	
			Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8.85 %		8,20%	8,10%	1.963.527.400,00						8.98 %	1.960.636.400,00	
			Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate)	72.00 %		67.74 %	69.09 %	1.963.527.400,00						70.47 %	1.960.636.400,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						289.064.400,00					-		289.130.600,00	
		Terlaksananya promosi pembangunan keluarga berencana (Bangga Kencana) sesuai kearifan budaya lokal di tingkat kecamatan						289.064.400,00					-		289.130.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.759.000,00						1 Laporan	15.420.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	240.170.000,00						12 Laporan	240.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	60 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	47.135.400,00						12 Dokumen	33.710.600,00	
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK						1.759.000,00							15.420.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.759.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	15.420.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						240.170.000,00							240.000.000,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	60 laporan		12 Laporan	12 Laporan	240.170.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana				12 Laporan	240.000.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal						47.135.400,00							33.710.600,00	
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	60 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	47.135.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	33.710.600,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						372.750.000,00					-		370.500.000,00	
		Terdayagunakannya tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB).						372.750.000,00					-		370.500.000,00	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4300 Orang		840 Orang	850 Orang	372.750.000,00						860 Orang	370.500.000,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						372.750.000,00							370.500.000,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	4300 Orang		840 Orang	850 Orang	372.750.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana Dana Alokasi Umum (DAU)				860 Orang	370.500.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						1.301.713.000,00					-		1.301.005.800,00	
		Terpenuhinya fasilitas kesehatan yang siap melayani program keluarga berencana (KB).						1.301.713.000,00					-		1.301.005.800,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3975 Orang		775 Orang	785 Orang	1.229.713.000,00						795 Orang	1.233.133.800,00	
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	67 Orang		10 Orang	12 Orang	1.500.000,00						14 Orang	1.272.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60 laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.500.000,00						-	66.600.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						1.229.713.000,00							1.233.133.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3975 Orang		775 Orang	785 Orang	1.229.713.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana				795 Orang	1.233.133.800,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria						1.500.000,00							1.272.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	67 Orang		10 Orang	12 Orang	1.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Orang	1.272.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						70.500.000,00							66.600.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60 laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana				-	66.600.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
129.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						3.967.800.000,00							3.986.147.000,00	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)						*3.967.800.000,00*							*3.986.147.000,00*	
			Persentase Keluarga yang Mendapat Layanan Tribina	91.06 %		89,75%	90,75%	3.967.800.000,00						90.16 %	3.986.147.000,00	
			Persentase Remaja Calon Pengantin yang Mendapat Edukasi Kesehatan Reporduksi dan Perencanaan Keluarga	73.0 %		69,37%	70,50%	3.967.800.000,00						69.0 %	3.986.147.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						5.000.000,00					-		4.881.600,00	
		Terbinanya kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.						5.000.000,00					-		4.881.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	5.000.000,00						16 Laporan	4.881.600,00	
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						5.000.000,00							4.881.600,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	80 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Laporan	4.881.600,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						3.962.800.000,00					-		3.981.265.400,00	
		Terlibatkannya elemen masyarakat dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.						3.962.800.000,00					-		3.981.265.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.250.000,00						12 Laporan	67.465.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	1800 Keluarga		1769 Keluarga	1779 Keluarga	3.914.550.000,00						-	3.913.800.000,00	
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga						48.250.000,00							67.465.400,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	48.250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	67.465.400,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						3.914.550.000,00							3.913.800.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	1800 Keluarga		1769 Keluarga	1779 Keluarga	3.914.550.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana Dana Alokasi Umum (DAU)				-	3.913.800.000,00	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						15.397.625.000,00							17.978.303.514,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						15.397.625.000,00							17.978.303.514,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						5.252.679.100,00							6.955.804.014,00	
130.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.193.020.800,00							4.925.899.814,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*4.192.020.800,00*							*4.923.099.814,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.192.020.800,00						100 %	4.923.099.814,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.667.600,00					-		37.570.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.667.600,00					-		37.570.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	25.000.000,00						22 Dokumen	31.920.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	2.667.600,00						22 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	1.650.000,00	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							31.920.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	31.920.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.667.600,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	2.667.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	4.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1.000.000,00							1.650.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.491.847.900,00					-		4.008.547.414,00	
		Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.491.847.900,00					-		4.008.547.414,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		34 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.486.590.000,00						38 Orang/bulan	3.993.170.114,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	5.257.900,00						44 Laporan	15.377.300,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.486.590.000,00							3.993.170.114,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		34 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.486.590.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				38 Orang/bulan	3.993.170.114,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.257.900,00							15.377.300,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	5.257.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	15.377.300,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						343.500,00					-		343.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						343.500,00					-		343.500,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	343.500,00						11 Laporan	343.500,00	
	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						343.500,00							343.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	343.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	343.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.000.000,00					-		2.800.000,00	
		Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.000.000,00					-		2.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	1.000.000,00						17 Dokumen	2.800.000,00	
	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.000.000,00							2.800.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	2.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						140.405.200,00					-		139.641.900,00	
		Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						140.405.200,00					-		139.641.900,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.741.100,00						3 Paket	4.125.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	3.256.500,00						16 Paket	3.583.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.488.900,00						1 Paket	39.039.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	2.606.000,00						3 Paket	2.748.900,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	1.248.700,00						6 Paket	1.375.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.420.000,00						12 Laporan	6.020.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	85.844.000,00						12 Laporan	79.951.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2.800.000,00						2 Dokumen	2.800.000,00	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.741.100,00							4.125.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.741.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	4.125.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.256.500,00							3.583.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	3.256.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Paket	3.583.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.488.900,00							39.039.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.488.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	39.039.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.606.000,00							2.748.900,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	2.606.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	2.748.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.248.700,00							1.375.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	1.248.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Paket	1.375.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.420.000,00							6.020.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.420.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	6.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						85.844.000,00							79.951.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	85.844.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	79.951.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.800.000,00							2.800.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2.800.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	2.800.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		153.786.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan						0,00					-		153.786.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		4 Unit	1 Unit	0,00						5 Unit	76.730.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						5 Unit	36.228.000,00	
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							76.730.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		4 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Unit	76.730.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							36.228.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Unit	36.228.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						201.197.600,00					-		248.813.000,00	
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						201.197.600,00					-		248.813.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	53.921.600,00						12 Laporan	61.769.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	147.276.000,00						12 Laporan	187.044.000,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						53.921.600,00							61.769.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	53.921.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	61.769.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						147.276.000,00							187.044.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	147.276.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	187.044.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						329.559.000,00					-		334.398.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara						329.559.000,00					-		334.398.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	39.950.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	124.390.000,00						15 Unit	124.390.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit		43 Unit	44 Unit	30.260.000,00						43 Unit	31.640.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		4 Unit	5 Unit	118.749.000,00						Unit	126.218.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		7 Unit	20 Unit	12.200.000,00						9 Unit	12.200.000,00	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							39.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	39.950.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						124.390.000,00							124.390.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	124.390.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Unit	124.390.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.260.000,00							31.640.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit		43 Unit	44 Unit	30.260.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				43 Unit	31.640.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						118.749.000,00							126.218.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		4 Unit	5 Unit	118.749.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	126.218.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.200.000,00							12.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		7 Unit	20 Unit	12.200.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				9 Unit	12.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
131.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						303.712.000,00							568.626.500,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan						*303.712.000,00*							*568.626.500,00*	
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) Tingkat Kabupaten	14.50 %		14,10%	14.20 %	303.712.000,00						14.30 %	568.626.500,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						55.209.300,00					-		117.650.000,00	
		Meningkatnya Anggaran Responsif Gender (ARG) tingkat kabupaten						55.209.300,00					-		117.650.000,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.209.300,00						1 Laporan	117.650.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						55.209.300,00							117.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.209.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	117.650.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						40.000.000,00					-		50.067.500,00	
		Terlaksanaya Organisasi Wanita yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas di Sektor Ipoleksosbud						40.000.000,00					-		50.067.500,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	0 orang		0 orang	60 orang	40.000.000,00						-	50.067.500,00	
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						40.000.000,00							50.067.500,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	0 orang		0 orang	60 orang	40.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	50.067.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						208.502.700,00					-		400.909.000,00	
		Terfasilitasinya Organisasi Wanita Kewenangan Kabupaten yang Terfasilitasi						208.502.700,00					-		400.909.000,00	
			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	208.502.700,00						-	400.909.000,00	
	2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						208.502.700,00							400.909.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	208.502.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	400.909.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
132.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						381.737.000,00							847.508.900,00	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						*381.737.000,00*							*847.508.900,00*	
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani	100 %		100 %	100 %	381.737.000,00						100 %	847.508.900,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						52.685.300,00					-		501.270.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota						52.685.300,00					-		501.270.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	52.685.300,00						-	501.270.000,00	
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						52.685.300,00							501.270.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	52.685.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	501.270.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						259.691.700,00					-		276.878.900,00	
		Terlaksananya Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan						259.691.700,00					-		276.878.900,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	20 Orang	27.033.000,00						-	27.030.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	20 Orang		20 Orang	12 Orang	8.000.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	12 Orang		10 Orang	12 Orang	34.220.000,00						-	34.220.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	20 Orang		20 Orang	12 Orang	20.200.000,00						-	20.200.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	55 Orang		50 Orang	50 Orang	132.302.700,00						-	149.492.900,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	3 Orang		3 Orang	12 Orang	37.936.000,00						-	37.936.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						27.033.000,00							27.030.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	20 Orang	27.033.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				-	27.030.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.03.2.02.0011	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	20 Orang		20 Orang	12 Orang	8.000.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				-	8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						34.220.000,00							34.220.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	12 Orang		10 Orang	12 Orang	34.220.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				-	34.220.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.03.2.02.0013	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						20.200.000,00							20.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	20 Orang		20 Orang	12 Orang	20.200.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				-	20.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						132.302.700,00							149.492.900,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	55 Orang		50 Orang	50 Orang	132.302.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	149.492.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						37.936.000,00							37.936.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	3 Orang		3 Orang	12 Orang	37.936.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				-	37.936.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.360.000,00						-	69.360.000,00	
		Terlaksananya Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan						69.360.000,00						-	69.360.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	16 Lembaga		16 Lembaga	16 Lembaga	69.360.000,00						-	69.360.000,00	
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						69.360.000,00							69.360.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	16 Lembaga		16 Lembaga	16 Lembaga	69.360.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				-	69.360.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
133.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						17.101.100,00							52.340.000,00	
		Meningkatnya kualitas keluarga						*17.101.100,00*							*52.340.000,00*	
			Hasil Penilaian PUSPAGA	245 Angka		225 Angka	230 Angka	17.101.100,00						235 Angka	52.340.000,00	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						17.101.100,00						-	52.340.000,00	
		Terlaksananya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas dan dikembangkan						17.101.100,00						-	52.340.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	16 Lembaga		16 Lembaga	16 Lembaga	17.101.100,00						16 Lembaga	52.340.000,00	
	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						17.101.100,00							52.340.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	16 Lembaga		16 Lembaga	16 Lembaga	17.101.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Lembaga	52.340.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
134.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						125.857.200,00							300.967.200,00	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif						*125.857.200,00*							*300.967.200,00*	
			1.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62.00 Angka		61.70 Angka	61.78 Angka	125.857.200,00						61.86 Angka	300.967.200,00	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						125.857.200,00					-		300.967.200,00	
		Terlaksananya kegiatan pemenuhan hak anak yang dilaksanakan						125.857.200,00					-		300.967.200,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	100 Orang		106 Orang	100 Orang	80.257.200,00						-	92.978.400,00	
			Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	4 Lembaga		4 Lembaga	150 Lembaga	45.600.000,00						-	207.988.800,00	
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						80.257.200,00							92.978.400,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	100 Orang		106 Orang	100 Orang	80.257.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	92.978.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.06.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						45.600.000,00							207.988.800,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	4 Lembaga		4 Lembaga	150 Lembaga	45.600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	207.988.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
135.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						231.251.000,00							260.461.600,00	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak						*231.251.000,00*							*260.461.600,00*	
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	69.90 Angka		69.50 Angka	69.60 Angka	231.251.000,00						69.70 Angka	260.461.600,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						122.000.000,00					-		151.217.600,00	
		Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak lingkup daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan						122.000.000,00					-		151.217.600,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						-	49.217.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	102.000.000,00						-	102.000.000,00	
	2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						20.000.000,00							49.217.600,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	49.217.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						102.000.000,00							102.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	1 Kegiatan		0 Kegiatan	1 Kegiatan	102.000.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				-	102.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						109.251.000,00						-	109.244.000,00	
		Terlaksananya Anak Korban Kekerasan yang Tertangani						109.251.000,00						-	109.244.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	33.857.000,00						-	33.850.000,00	
			Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	15 Orang		15 Orang	12 Orang	8.000.000,00						-	8.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	15 Orang		10 Orang	12 Orang	29.174.000,00						-	29.174.000,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	15 Orang		15 Orang	12 Orang	38.220.000,00						-	38.220.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						33.857.000,00							33.850.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	33.857.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				-	33.850.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.07.2.02.0018	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	15 Orang		15 Orang	12 Orang	8.000.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				-	8.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.07.2.02.0020	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						29.174.000,00							29.174.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	15 Orang		10 Orang	12 Orang	29.174.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				-	29.174.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.08.07.2.02.0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						38.220.000,00							38.220.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	15 Orang		15 Orang	12 Orang	38.220.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				-	38.220.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						10.144.945.900,00							11.022.499.500,00	
136.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						7.003.166.100,00							7.263.758.900,00	
		Meningkatnya kerja sama desa						*7.003.166.100,00*							*7.263.758.900,00*	
			1. Persentase Bumdesma Mandiri dan Kerja Sama Desa yang Aktif	21.75 %		20.04 %	20.47 %	60.612.900,00						20.90 %	75.716.900,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						7.003.166.100,00					-		7.263.758.900,00	
		Terlaksanya Bumdes/ Bumdesma Maju dan kerjasama desa yang aktif						7.003.166.100,00					-		7.263.758.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.612.900,00						1 Dokumen	75.716.900,00	
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						60.612.900,00							75.716.900,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.612.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	75.716.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa						*7.003.166.100,00*							*7.263.758.900,00*	
			2. Persentase Desa yang Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	6.942.553.200,00						100 %	7.188.042.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						7.003.166.100,00					-		7.263.758.900,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.969.500,00						1 Dokumen	54.533.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.052.119.800,00						1 Dokumen	6.163.766.100,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	469 Orang		503 Orang	469 Orang	147.294.300,00						469 Orang	218.867.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan		1 Laporan	340 Laporan	367.420.400,00						1 Laporan	324.380.400,00	
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.602.900,00						1 Dokumen	7.460.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.807.800,00						1 Dokumen	60.300.000,00	
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	469 Orang		100 Orang	469 Orang	0,00						469 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	70 Desa		30 Desa	29 Desa	217.338.500,00						50 Desa	238.734.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						28.969.500,00							54.533.600,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.969.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	54.533.600,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						6.052.119.800,00							6.163.766.100,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.052.119.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	6.163.766.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						147.294.300,00							218.867.900,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	469 Orang		503 Orang	469 Orang	147.294.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				469 Orang	218.867.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						367.420.400,00							324.380.400,00	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan		1 Laporan	340 Laporan	367.420.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	324.380.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa						4.602.900,00							7.460.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.602.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	7.460.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						59.807.800,00							60.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.807.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	60.300.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	469 Orang		100 Orang	469 Orang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				469 Orang	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						217.338.500,00							238.734.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	70 Desa		30 Desa	29 Desa	217.338.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				50 Desa	238.734.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
137.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						3.141.779.800,00							3.758.740.600,00	
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan						*3.141.779.800,00*							*3.758.740.600,00*	
			1.Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Pemberdayaan Masyarakat	100 %		98,08%	98,19%	3.141.779.800,00						98,76%	3.758.740.600,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.141.779.800,00					-		3.758.740.600,00	
		Terlaksananya lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan						3.141.779.800,00					-		3.758.740.600,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga	466.051.400,00						6 Lembaga	818.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.030.400,00						1 Dokumen	5.872.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.748.900,00						1 Laporan	33.823.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.786.949.100,00						1 Laporan	1.965.644.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00						1 Dokumen	935.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						466.051.400,00							818.400.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga	466.051.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Lembaga	818.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						8.030.400,00							5.872.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.030.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	5.872.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						30.748.900,00							33.823.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.748.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	33.823.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						1.786.949.100,00							1.965.644.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.786.949.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	1.965.644.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						850.000.000,00							935.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	935.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						23.286.703.610,00							37.365.187.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						14.458.759.160,00							20.795.723.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						14.458.759.160,00							20.795.723.000,00	
138.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.575.775.560,00							20.126.934.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*13.575.775.560,00*							*20.122.134.000,00*	
			1.Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	100%							100%		
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						59.750.700,00					Aparatur		38.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						59.750.700,00					Aparatur		38.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.860.200,00						1 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	23.647.600,00						22 Dokumen	17.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	7.242.900,00						22 Laporan	4.000.000,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						23.647.600,00							17.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	23.647.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	17.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.242.900,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	7.242.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						28.860.200,00							16.500.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.860.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	16.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.439.866.500,00					Aparatur		19.090.234.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.439.866.500,00					Aparatur		19.090.234.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	7.822.500,00						44 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/bulan		205 Orang/bulan	205 Orang/bulan	12.432.044.000,00						198 Orang/bulan	19.082.234.000,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.432.044.000,00							19.082.234.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/bulan		205 Orang/bulan	88 Orang/bulan	12.432.044.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				198 Orang/bulan	19.082.234.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.822.500,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	7.822.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	8.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					Aparatur		1.500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					Aparatur		1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00						1 Laporan	1.500.000,00	
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	1.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						513.200,00					Aparatur		800.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						513.200,00					Aparatur		800.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	513.200,00						16 Dokumen	800.000,00	
	2.09.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						513.200,00							800.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	513.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						460.000,00					Aparatur		46.800.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						460.000,00					Aparatur		46.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	460.000,00						17 Dokumen	800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00						50 Orang	15.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0 Orang	0 Orang	0,00						100 Orang	20.000.000,00	
	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						460.000,00							800.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	460.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						0,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Orang	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				50 Orang	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						244.123.600,00					Aparatur		297.500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						244.123.600,00					Aparatur		297.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.600.000,00						2 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.792.000,00						12 Laporan	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	74.409.000,00						12 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	138.947.400,00						2 Paket	185.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	5.937.800,00						5 Paket	6.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.415.500,00						4 Paket	8.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		5 Paket	6 Paket	4.021.000,00						6 Paket	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	4.000.900,00						5 Paket	4.000.000,00	
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.021.000,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		5 Paket	5 Paket	4.021.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Paket	3.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.000.900,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	8 Paket	4.000.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	4.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						138.947.400,00							185.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	138.947.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	185.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.415.500,00							8.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	5 Paket	8.415.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	8.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.937.800,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	5.937.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	6.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.792.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.792.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						74.409.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	74.409.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						6.600.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Aparatur		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Aparatur		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						558.078.960,00					Aparatur		370.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah						558.078.960,00					Aparatur		370.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.612.960,00						12 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	467.466.000,00						12 Laporan	285.000.000,00	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.612.960,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.612.960,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						467.466.000,00							285.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	467.466.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	285.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						272.982.600,00					Aparatur		282.100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						272.982.600,00					Aparatur		282.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	51.849.000,00						1 Unit	54.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	151.550.000,00						17 Unit	160.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	22 Unit	15.580.000,00						22 Unit	17.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit		14 Unit	14 Unit	8.540.000,00						14 Unit	9.500.000,00	
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0.0716 Ha		0.0716 Ha	0.0716 Ha	1.503.600,00						0.0716 Ha	1.600.000,00	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						151.550.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		17 Unit	10 Unit	151.550.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Unit	160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.580.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit		22 Unit	22 Unit	15.580.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Unit	17.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						51.849.000,00							54.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	51.849.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	54.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.540.000,00							9.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit		14 Unit	14 Unit	8.540.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Unit	9.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah						1.503.600,00							1.600.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	0.0716 Ha		0.0716 Ha	0.0716 Ha	1.503.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0.0716 Ha	1.600.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
139.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						24.957.200,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya rasio lumbung pangan yang aktif						*24.957.200,00*							*30.000.000,00*	
			Rasio Lumbung Pangan Aktif	58,82%		35,29%	41,18%							47,06%		
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						24.957.200,00					Masyarakat		30.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						24.957.200,00					Masyarakat		30.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	24.957.200,00						1 Laporan	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						24.957.200,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	24.957.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
140.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						653.853.600,00							525.749.000,00	
		Meningkatnya angka kecukupan energi dan protein						*653.853.600,00*							*515.749.000,00*	
			Angka Kecukupan Energi	1.990 kkal/kapita/hari		1.880 kkal/kapita/hari	1900 kkal/kapita/hari							1950 kkal/kapita/hari		
			Angka Kecukupan Protein	56,4 gram/kap/hari		56 gram/kap/hari	56,1 gram/kap/hari							56,21 gram/kap/hari		
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						74.646.000,00					Masyarakat		70.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Ketersediaan Pangan						74.646.000,00					Masyarakat		70.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Informasi Stok Pangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.646.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						50.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan						14.646.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.646.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						80.714.200,00					Masyarakat		85.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang						80.714.200,00					Masyarakat		85.000.000,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.500.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	7.214.200,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						7.214.200,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	7.214.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						73.500.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						498.493.400,00					Masyarakat		370.749.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota						498.493.400,00					Masyarakat		370.749.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30 ton		40 ton	40 Ton	498.493.400,00						30 ton	370.749.000,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						498.493.400,00							370.749.000,00	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	30 ton		40 ton	40 Ton	498.493.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 ton	370.749.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
141.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						125.172.800,00							91.022.000,00	
		Meningkatnya penanganan desa rentan rawan pangan						*125.172.800,00*							*91.022.000,00*	
			Persentase penanganan desa rentan rawan pangan	42,75%		12,21%	19,85%							27,48%		
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						10.000.000,00					Masyarakat		5.400.000,00	
		Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						10.000.000,00					Masyarakat		5.400.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	5.400.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						10.000.000,00							5.400.000,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	5.400.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						115.172.800,00					Masyarakat		85.622.000,00	
		Tertanganinya Kerawanan Pangan						115.172.800,00					Masyarakat		85.622.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	115.172.800,00						1 Laporan	85.622.000,00	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						115.172.800,00							85.622.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	115.172.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	85.622.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
142.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						79.000.000,00							22.018.000,00	
		Meningkatnya pangan segar aman asal tumbuhan						*79.000.000,00*							*22.018.000,00*	
			Persentase Pangan Segar Aman	100%		100%	100%							100%		
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						79.000.000,00					Masyarakat		22.018.000,00	
		Tersedianya Data Pengawasan Pangan Segar						79.000.000,00					Masyarakat		22.018.000,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.000.000,00						1 Dokumen	11.518.000,00	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						22.000.000,00							3.000.000,00	
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						37.000.000,00							11.518.000,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	11.518.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						20.000.000,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8.827.944.450,00							16.569.464.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						8.827.944.450,00							16.569.464.000,00	
143.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						4.349.766.800,00							7.041.202.000,00	
		Meningkatnya populasi ternak						*3.237.991.600,00*							*3.450.000.000,00*	
			Jumlah Populasi Ternak	128.284 ST/tahun		120.868 ST/tahun	122.680,61 ST/tahun							128.284 ST/tahun		
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						1.074.612.700,00								
		Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	848.443.100,00						1 Dokumen		
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						848.443.100,00							1.000.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	848.443.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						2.163.378.900,00					Masyarakat		2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lainnya						2.163.378.900,00					Masyarakat		2.000.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	300 Ekor		808 Ekor	300 Ekor	2.163.378.900,00						300 Ekor	2.000.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						2.163.378.900,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	300 Ekor		808 Ekor	303 Ekor	2.163.378.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				300 Ekor	2.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Meningkatnya produksi komoditas pertanian strategis						*2.186.387.900,00*							*5.041.202.000,00*	
			Jumlah Produksi Padi	396.496 Ton/tahun		392.555 Ton/tahun	393.536,67 Ton/tahun							396.496 Ton/tahun		
			Jumlah Produksi Jagung	6.755 Ton/tahun		6.675 Ton/tahun	6.694,66 Ton/tahun							6.755 Ton/tahun		
			Jumlah Produksi Cabai	3.330 Ton/tahun		3.277 Ton/tahun	3.290,27 Ton/tahun							3.330 Ton/tahun		
			Jumlah Produksi Durian	5.969 Ton/tahun		5.909 Ton/tahun	5.924,13 Ton/tahun							5.969 Ton/tahun		
			Jumlah Produksi Biofarmaka	4.532 Ton/tahun		4.487 Ton/tahun	4.497,74 Ton/tahun							4.532 Ton/tahun		
			Jumlah Produksi Kelapa	37.642 Ton/tahun		37.046 Ton/tahun	37.194,36 Ton/tahun							37.642 Ton/tahun		
			Jumlah Produksi Kopi	169 Ton/tahun		166 Ton/tahun	166,88 Ton/tahun							169 Ton/tahun		
			Jumlah Produksi Tembakau	301 Ton/tahun		295 Ton/tahun	296,82Ton/tahun							301Ton/tahun		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						1.111.775.200,00					Masyarakat		3.591.202.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						1.111.775.200,00					Masyarakat		3.591.202.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	381.310.000,00						1 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	730.465.200,00						1 Laporan	3.091.202.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						730.465.200,00							3.091.202.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	730.465.200,00	Kab. Purworejo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	3.091.202.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						381.310.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	381.310.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						1.074.612.700,00					Masyarakat		1.450.000.000,00	
		Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan						1.074.612.700,00					Masyarakat		1.450.000.000,00	
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	226.169.600,00						1 Varietas Unggul Baru (VUB)	450.000.000,00	
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman						226.169.600,00							450.000.000,00	
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	1 Varietas Unggul Baru (VUB)		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	226.169.600,00	Kab. Purworejo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				1 Varietas Unggul Baru (VUB)	450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
144.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						3.228.609.500,00							7.562.629.000,00	
		Meningkatnya kemanfaatan prasarana pertanian yang disediakan						*3.228.609.500,00*							*7.562.629.000,00*	
			Persentase Kemanfaatan Prasarana Pertanian	100%		100%	100%							100%		
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						330.109.500,00					Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian						330.109.500,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00						0 Laporan	0,00	
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	330.109.500,00						0 Dokumen	0,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Laporan	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota						330.109.500,00							0,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	330.109.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						2.868.500.000,00					Masyarakat		7.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian						2.868.500.000,00					Masyarakat		7.500.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	35 Unit		49 Unit	38 Unit	2.659.500.000,00						35 Unit	5.250.000.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	15 Unit		20 Unit	15 Unit	209.000.000,00						15 Unit	2.250.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						2.659.500.000,00							5.250.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	35 Unit		49 Unit	22 Unit	2.659.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Unit	5.250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						0,00							0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						209.000.000,00							2.250.000.000,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	15 Unit		20 Unit	2 Unit	209.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Unit	2.250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						30.000.000,00					Masyarakat		62.629.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing						30.000.000,00					Masyarakat		62.629.000,00	
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	-		-	1 Laporan	30.000.000,00						-	62.629.000,00	
	3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						30.000.000,00							62.629.000,00	
		Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	62.629.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
145.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						419.843.000,00							396.843.000,00	
		Menurunnya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis						*399.843.000,00*							*356.843.000,00*	
			Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	270 kasus		294 kasus	288 kasus							270 kasus		
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					Masyarakat		20.000.000,00	
		Terlaksananya Layanan Pengendalian Penyakit Hewan Menular						20.000.000,00					Masyarakat		20.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						12.000.000,00					Masyarakat		20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan						12.000.000,00					Masyarakat		20.000.000,00	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan		0 laporan	1 laporan	12.000.000,00						1 laporan	20.000.000,00	
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						12.000.000,00							20.000.000,00	
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 laporan		0 laporan	1 laporan	12.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 laporan	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						304.843.000,00					Masyarakat		306.843.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner						304.843.000,00					Masyarakat		306.843.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	284.843.000,00						1 Laporan	286.843.000,00	
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						284.843.000,00							286.843.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	284.843.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	286.843.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						83.000.000,00					Masyarakat		50.000.000,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						83.000.000,00					Masyarakat		50.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	83.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						83.000.000,00							50.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	83.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
146.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						217.920.400,00							151.749.000,00	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian						*217.920.400,00*							*151.749.000,00*	
			Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%		100%	100%							100%		
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						217.920.400,00					Masyarakat		151.749.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian						217.920.400,00					Masyarakat		151.749.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	250 Ha		250 Ha	450 Ha	217.920.400,00						250 Ha	151.749.000,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						217.920.400,00							151.749.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	250 Ha		250 Ha	400 Ha	217.920.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				250 Ha	151.749.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
147.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						611.804.750,00							1.417.041.000,00	
		Meningkatnya penerapan teknologi pertanian dan kapasitas kelompok tani						*611.804.750,00*							*1.417.041.000,00*	
			Persentase Penerapan Teknologi Pertanian	33%		21,01%	24%							27,02%		
			Skor Kapasitas Kelompok Tani	300 Skor		260 skor	270 Skor							280 skor		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						611.804.750,00					Masyarakat		1.417.041.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Pertanian						611.804.750,00					Masyarakat		1.417.041.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	16 Unit	40.000.000,00						-	475.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	2500 Unit	571.804.750,00						-	942.041.000,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						40.000.000,00							475.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	16 Unit	40.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	475.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						571.804.750,00							942.041.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	2500 Unit	571.804.750,00	Kab. Purworejo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)				-	942.041.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN						26.567.847.928,00							28.295.575.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						25.715.043.028,00							26.834.281.000,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						25.715.043.028,00							26.834.281.000,00	
148.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.728.597.800,00							9.510.415.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*9.725.597.800,00*							*9.499.415.000,00*	
			1. Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	9.725.597.800,00						100 %	9.499.415.000,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						24.740.400,00					Aparatur		28.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						24.740.400,00					Aparatur		28.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	4.300.000,00						1 Dokumen	4.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	17.474.000,00						22 Dokumen	17.474.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.966.400,00						1 Laporan	6.226.000,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						17.474.000,00							17.474.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	17.474.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	17.474.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.966.400,00							6.226.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.966.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	6.226.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						4.300.000,00							4.300.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	4.300.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	4.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.975.546.800,00					Aparatur		8.861.541.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.975.546.800,00					Aparatur		8.861.541.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	6.267.800,00						44 Laporan	14.358.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/bulan		108 Orang/bulan	101 Orang/bulan	8.969.279.000,00						108 Orang/bulan	8.847.183.500,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.969.279.000,00							8.847.183.500,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	108 Orang/bulan		108 Orang/bulan	101 Orang/bulan	8.969.279.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				108 Orang/bulan	8.847.183.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						6.267.800,00							14.358.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	6.267.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	14.358.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.000.000,00					Aparatur		7.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.000.000,00					Aparatur		7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	3.000.000,00						11 Laporan	7.000.000,00	
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	3.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						3.000.000,00					Aparatur		6.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						3.000.000,00					Aparatur		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		0 Dokumen	16 Dokumen	3.000.000,00						16 Dokumen	6.000.000,00	
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						3.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		0 Dokumen	16 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Aparatur		6.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Aparatur		6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						17 Dokumen	6.000.000,00	
	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						212.765.700,00					Aparatur		185.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						212.765.700,00					Aparatur		185.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00						2 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	11.968.000,00						12 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	69.962.000,00						12 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	87.780.000,00						1 Paket	56.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.000.000,00						1 Paket	16.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.000.000,00						1 Paket	13.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.989.500,00						1 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.566.200,00						1 Paket	5.000.000,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.989.500,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.989.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	8.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.566.200,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.566.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						87.780.000,00							56.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	87.780.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	56.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.000.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	13.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						16.000.000,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	16.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.968.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	11.968.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	12.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						69.962.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	69.962.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						79.334.400,00					Aparatur		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						79.334.400,00					Aparatur		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	79.334.400,00						0 Unit	0,00	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						79.334.400,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	79.334.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						151.859.500,00					Aparatur		151.859.500,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						151.859.500,00					Aparatur		151.859.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.931.500,00						12 Laporan	100.931.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.928.000,00						12 Laporan	50.928.000,00	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.931.500,00							100.931.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.931.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	100.931.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						50.928.000,00							50.928.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.928.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	50.928.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						278.351.000,00					Aparatur		265.014.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						278.351.000,00					Aparatur		265.014.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	108.931.000,00						3 Unit	109.544.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	30 Unit	97.520.000,00						29 Unit	87.580.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		5 Unit	1 Unit	43.960.000,00						6 Unit	39.950.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	15.130.000,00						15 Unit	15.130.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit		17 Unit	19 Unit	12.810.000,00						17 Unit	12.810.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							39.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		5 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Unit	39.950.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						97.520.000,00							87.580.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	30 Unit	97.520.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				29 Unit	87.580.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.130.000,00							15.130.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	15.130.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Unit	15.130.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						108.931.000,00							109.544.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	108.931.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Unit	109.544.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.810.000,00							12.810.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit		17 Unit	19 Unit	12.810.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Unit	12.810.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
149.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						249.999.911,00							75.000.000,00	
		Meningkatnya rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti						*249.999.911,00*							*75.000.000,00*	
			1.Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	249.999.911,00						100 %	75.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						84.999.984,00					Aparatur		0,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup						84.999.984,00					Aparatur		0,00	
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	84.999.984,00						1 Dokumen	0,00	
	2.11.02.2.01.0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota						84.999.984,00							0,00	
		RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	84.999.984,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						164.999.927,00					Aparatur		75.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)						164.999.927,00					Aparatur		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	164.999.927,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						164.999.927,00							75.000.000,00	
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	164.999.927,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
150.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						651.785.335,00							519.448.000,00	
		Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup						*651.785.335,00*							*509.448.000,00*	
			1.Persentase Pengendalian Pencemaran yang Dilaksanakan	93.33 %		92.00 %	92.33 %	651.785.335,00						92.67 %	509.448.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						651.785.335,00					Aparatur dan Masyarakat		519.448.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup						651.785.335,00					Aparatur dan Masyarakat		519.448.000,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	21 Lokasi		19 Lokasi	21 Lokasi	91.417.200,00						21 Lokasi	64.375.000,00	
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	37.124.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	35.259.178,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	61.006.077,00						2 Dokumen	47.467.000,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan		0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00						1 Kegiatan	10.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	464.102.880,00						1 Dokumen	310.482.000,00	
			Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	2 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						2 Unit	15.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						0,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						35.259.178,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	35.259.178,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						0,00							10.000.000,00	
		Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Kegiatan		0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Kegiatan	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK						0,00							37.124.000,00	
		Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	37.124.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						91.417.200,00							64.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	21 Lokasi		19 Lokasi	21 Lokasi	91.417.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				21 Lokasi	64.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota						0,00							15.000.000,00	
		Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	2 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						61.006.077,00							47.467.000,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	61.006.077,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	47.467.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						0,00							5.000.000,00	
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						464.102.880,00							310.482.000,00	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	464.102.880,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	310.482.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
151.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						4.644.555.150,00							6.200.000.000,00	
		Meningkatnya proporsi luasan ruang terbuka hijau perkotaan						*4.644.555.150,00*							*6.200.000.000,00*	
			1.Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau terhadap Luas Perkotaan	7.237 %		7.234 %	7.234 %	4.644.555.150,00						7.235 %	6.200.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						4.644.555.150,00					Aparatur dan Masyarakat		6.200.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan ruang Terbuka Hijau Perkotaan						4.644.555.150,00					Aparatur dan Masyarakat		6.200.000.000,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	33.50 Ha		31.05 Ha	33.50 Ha	4.176.772.600,00						33.50 Ha	5.519.305.000,00	
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	467.782.550,00						1 Unit	680.695.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						4.176.772.600,00							5.519.305.000,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	33.50 Ha		31.05 Ha	33,50 Ha	4.176.772.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				33.50 Ha	5.519.305.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya						467.782.550,00							680.695.000,00	
		Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	467.782.550,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	680.695.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
152.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						16.437.000,00							13.157.000,00	
		Meningkatnya pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun						*16.437.000,00*							*13.157.000,00*	
			1.Persentase Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Dilaksanakan	80 %		71 %	73 %	16.437.000,00						76 %	13.157.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						16.437.000,00					Masyarakat		13.157.000,00	
		Terlaksananya Layanan Pemenuhan Komitmen Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan LB3						16.437.000,00					Masyarakat		13.157.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.437.000,00						1 Dokumen	13.157.000,00	
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0 Usaha		0 Usaha	0 Usaha	0,00						0 Usaha	0,00	
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)						16.437.000,00							13.157.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.437.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	13.157.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3						0,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0 Usaha		0 Usaha	0 Usaha	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Usaha	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
153.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						83.954.000,00							67.897.000,00	
		Meningkatnya ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pemenuhan kewajiban pengelolaan lingkungan						*83.954.000,00*							*67.897.000,00*	
			1.Persentase Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan dalam Pemenuhan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	83 %		73 %	76 %	83.954.000,00						78 %	67.897.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						83.954.000,00					Masyarakat		67.897.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						83.954.000,00					Masyarakat		67.897.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40 Badan Usaha		40 Badan Usaha	40 Badan Usaha	34.852.500,00						40 Badan Usaha	14.827.500,00	
			Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00						1 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	49.101.500,00						20 Dokumen	23.069.500,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						49.101.500,00							23.069.500,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	49.101.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Dokumen	23.069.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						0,00							30.000.000,00	
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Orang	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						34.852.500,00								14.827.500,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	40 Badan Usaha		40 Badan Usaha	40 Badan Usaha	34.852.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				40 Badan Usaha	14.827.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
154.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						199.529.100,00							96.320.000,00	
		Meningkatnya lembaga kemasyarakatan bidang lingkungan hidup yang aktif						*199.529.100,00*							*96.320.000,00*	
			1.Persentase Lembaga Kemasyarakatan Bidang Lingkungan Hidup yang Aktif	14.63 %		7.99 %	11.51 %	199.529.100,00						12.55 %	96.320.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						199.529.100,00					Masyarakat		96.320.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan						199.529.100,00					Masyarakat		96.320.000,00	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	37 Lembaga		0 Lembaga	34 Lembaga	29.337.600,00						35 Lembaga	10.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	600 Orang		600 Orang	600 Orang	60.191.500,00						600 Orang	19.562.000,00	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00						2 Dokumen	66.758.000,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						110.000.000,00							66.758.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	66.758.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup						60.191.500,00							19.562.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	600 Orang		600 Orang	600 Orang	60.191.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				600 Orang	19.562.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						29.337.600,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	37 Lembaga		0 Lembaga	34 Lembaga	29.337.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Lembaga	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
155.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						60.000.000,00							58.708.000,00	
		Meningkatnya penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat						*60.000.000,00*							*58.708.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100 %		100 %	100 %	60.000.000,00						100 %	58.708.000,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						60.000.000,00					Masyarakat		58.708.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penghargaan Lingkungan Hidup						60.000.000,00					Masyarakat		58.708.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas		2 Entitas	2 Entitas	60.000.000,00						2 Entitas	58.708.000,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						60.000.000,00							58.708.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas		2 Entitas	2 Entitas	60.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Entitas	58.708.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
156.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						9.070.300,00							8.752.000,00	
		Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat terkait pencemaran lingkungan hidup						*9.070.300,00*							*8.752.000,00*	
			1.Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Pencemaran Lingkungan yang Ditangani	100 %		100 %	100 %	9.070.300,00						100 %	8.752.000,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						9.070.300,00					Masyarakat		8.752.000,00	
		Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan						9.070.300,00					Masyarakat		8.752.000,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	10 Pengaduan		10 Pengaduan	10 Pengaduan	9.070.300,00						10 Pengaduan	8.752.000,00	
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						9.070.300,00							8.752.000,00	
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	10 Pengaduan		10 Pengaduan	10 Pengaduan	9.070.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Pengaduan	8.752.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
157.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						10.071.114.432,00							10.284.584.000,00	
		Meningkatnya layanan penanganan dan pengurangan sampah						*10.071.114.432,00*							*10.284.584.000,00*	
			1.Persentase Penanganan Sampah	27.58 %		26.97 %	69,91 %	10.071.114.432,00						27.27 %	10.284.584.000,00	
			2.Persentase Pengurangan Sampah	24.05 %		23.51 %	23.65 %	10.071.114.432,00						23.78 %	10.284.584.000,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						10.071.114.432,00					Aparatur dan Masyarakat		10.284.584.000,00	
		Terkelolanya timbulan sampah di kabupaten						10.071.114.432,00					Aparatur dan Masyarakat		10.284.584.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	41.520.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00						1 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	12 Kelompok		12 Kelompok	7 Kelompok	293.125.000,00						12 Kelompok	602.500.000,00	
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	17136 Ton		25396 Ton	25523 Ton	4.596.271.432,00						17136 Ton	4.596.886.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit		1 Unit	3 Unit	5.140.198.000,00						1 Unit	5.000.198.000,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						293.125.000,00							602.500.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	12 Kelompok		12 Kelompok	7 Kelompok	293.125.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Kelompok	602.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						5.140.198.000,00							5.000.198.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 Unit		1 Unit	3 Unit	5.140.198.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	5.000.198.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						41.520.000,00							0,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	0 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	41.520.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah						0,00							85.000.000,00	
		Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	85.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						4.596.271.432,00							4.596.886.000,00	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	17136 Ton		25396 Ton	25523 Ton	4.596.271.432,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17136 Ton	4.596.886.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						852.804.900,00							1.461.294.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						852.804.900,00							1.461.294.000,00	
158.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						126.575.500,00							327.150.000,00	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap						*126.575.500,00*							*327.150.000,00*	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	194.54 Ton		173.01 Ton	178.20 Ton	126.575.500,00						183.54 Ton	327.150.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						46.539.000,00					Masyarakat		247.150.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan						46.539.000,00					Masyarakat		247.150.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	46.539.000,00						2 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 Unit		6 Unit	0 Unit	0,00						2 Unit	127.150.000,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						46.539.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	46.539.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						0,00							127.150.000,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	3 Unit		6 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	127.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						60.036.500,00					Masyarakat		50.000.000,00	
		Terlaksananya Temu Kelompok/Himpunan Nelayan						60.036.500,00					Masyarakat		50.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok		0 Kelompok	10 Kelompok	10.036.500,00						10 Kelompok	15.000.000,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang		0 Orang	50 Orang	50.000.000,00						25 Orang	35.000.000,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						50.000.000,00							35.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	25 Orang		0 Orang	50 Orang	50.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				25 Orang	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						10.036.500,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok		0 Kelompok	10 Kelompok	10.036.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Kelompok	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						20.000.000,00					Masyarakat		20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						20.000.000,00					Masyarakat		20.000.000,00	
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan		0 Layanan	1 Layanan	20.000.000,00						1 Layanan	20.000.000,00	
			Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						0,00							0,00	
		Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan		0 Layanan	1 Layanan	20.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Layanan	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00					Masyarakat		10.000.000,00	
		Terselenggaranya Layanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan						0,00					Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	10 Rekomendasi		10 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0,00						10 Rekomendasi	10.000.000,00	
	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT						0,00							10.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	10 Rekomendasi		10 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Rekomendasi	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
159.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						576.975.800,00							898.727.000,00	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						*576.975.800,00*							*898.727.000,00*	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	4640.66 Ton		4287.25 Ton	4373 Ton	576.975.800,00						4460.46 Ton	898.727.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						0,00					Masyarakat		20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil						0,00					Masyarakat		20.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok		0 Kelompok	0 Kelompok	0,00						10 Kelompok	20.000.000,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok		0 Kelompok	0 Kelompok	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Kelompok	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						576.975.800,00					Masyarakat		878.727.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						576.975.800,00					Masyarakat		878.727.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.500.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10 Unit		0 Unit	10 Unit	7.500.000,00						10 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit		37 Unit	14 Unit	509.975.800,00						30 Unit	703.727.000,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						59.500.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						509.975.800,00							703.727.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit		37 Unit	14 Unit	509.975.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 Unit	703.727.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						7.500.000,00							15.000.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10 Unit		0 Unit	10 Unit	7.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
160.	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						78.503.600,00							81.022.000,00	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan yang diperiksa atau diawasi						*78.503.600,00*							*81.022.000,00*	
			1.Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan yang Diperiksa atau Diawasi	100 %		100 %	100 %	78.503.600,00						100 %	81.022.000,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						78.503.600,00					Masyarakat		81.022.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan						78.503.600,00					Masyarakat		81.022.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	8 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	11.000.000,00						4 Pelaku Usaha	9.522.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	16 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	16.000.000,00						8 Pelaku Usaha	22.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	29 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	11 Pelaku Usaha	11.647.600,00						17 Pelaku Usaha	33.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	22 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	39.856.000,00						16 Pelaku Usaha	16.500.000,00	
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						11.647.600,00							33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	29 Pelaku Usaha		5 Pelaku Usaha	11 Pelaku Usaha	11.647.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Pelaku Usaha	33.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						16.000.000,00							22.000.000,00	
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	16 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	16.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Pelaku Usaha	22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						39.856.000,00							16.500.000,00	
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	22 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	39.856.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Pelaku Usaha	16.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam						11.000.000,00							9.522.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	8 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	11.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Pelaku Usaha	9.522.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
161.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						70.750.000,00							154.395.000,00	
		Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan						*70.750.000,00*							*154.395.000,00*	
			1.Jumlah Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	251.97 Ton		245.97 Ton	258.56 Ton	70.750.000,00						248.97 Ton	154.395.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						10.750.000,00					Aparatur dan Masyarakat		10.750.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan						10.750.000,00					Aparatur dan Masyarakat		10.750.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.750.000,00						1 Dokumen	10.750.000,00	
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						10.750.000,00							10.750.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.750.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	10.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						10.000.000,00					Aparatur dan Masyarakat		10.000.000,00	
		Terkendalinya penggunaan bahan pengawet berbahaya						10.000.000,00					Aparatur dan Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha		0 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10.000.000,00						10 Unit Usaha	10.000.000,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	10 Unit Usaha		0 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit Usaha	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						50.000.000,00					Aparatur dan Masyarakat		133.645.000,00	
		Terjaminnya stok dan distribusi bahan baku bagi unit / industri pengolah ikan						50.000.000,00					Aparatur dan Masyarakat		133.645.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00						2 Pelaku Usaha	73.645.000,00	
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Ton		11 Ton	8 Ton	50.000.000,00						8 Ton	60.000.000,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Ton		11 Ton	8 Ton	50.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Ton	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						0,00							73.645.000,00	
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha		1 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Pelaku Usaha	73.645.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. PURWOREJO
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						7.706.417.565,00							5.842.553.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						7.706.417.565,00							5.842.553.000,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						7.706.417.565,00							5.842.553.000,00	
162.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.562.835.665,00							4.817.552.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*6.562.835.665,00*							*4.792.552.000,00*	
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %		100 %	100 %	6.562.835.665,00						100 %	4.792.552.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.839.600,00					-		14.200.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.839.600,00					-		14.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.920.000,00						1 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	9.867.100,00						22 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	10.052.500,00						22 Laporan	5.700.000,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.867.100,00							6.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	9.867.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.052.500,00							5.700.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	10.052.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	5.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						2.920.000,00							2.500.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.920.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.812.780.515,00					-		4.004.352.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.812.780.515,00					-		4.004.352.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	3.881.800,00						44 Laporan	4.300.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	58 Orang/bulan	5.808.898.715,00						65 Orang/bulan	4.000.052.000,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.808.898.715,00							4.000.052.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	58 Orang/bulan	5.808.898.715,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				65 Orang/bulan	4.000.052.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.881.800,00							4.300.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	3.881.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	4.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.991.000,00					-		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						3.991.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	3.991.000,00						11 Laporan	10.000.000,00	
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.991.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	3.991.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						166.352.300,00					-		229.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						166.352.300,00					-		229.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	4.142.100,00						2 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.560.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	59.981.000,00						12 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	66.070.200,00						12 Paket	92.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	13.522.600,00						22 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	5.107.300,00						5 Paket	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	130 Paket		130 Paket	4 Paket	5.485.300,00						130 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	14 Paket	9.483.800,00						25 Paket	16.000.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.485.300,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	130 Paket		130 Paket	4 Paket	5.485.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				130 Paket	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.483.800,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	14 Paket	9.483.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				25 Paket	16.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						66.070.200,00							92.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	66.070.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	92.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.107.300,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	5.107.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						13.522.600,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	13.522.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Paket	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.560.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.560.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						59.981.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	59.981.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.142.100,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	4.142.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						286.586.250,00					-		275.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						286.586.250,00					-		275.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	211.424.250,00						12 Laporan	220.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.162.000,00						12 Laporan	55.000.000,00	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						211.424.250,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	211.424.250,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						75.162.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.162.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						270.286.000,00					-		285.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						270.286.000,00					-		285.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	48.916.000,00						4 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	9 Unit	146.280.000,00						26 Unit	135.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	21 Unit	1.680.000,00						40 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit		46 Unit	20 Unit	14.200.000,00						46 Unit	22.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	25 Unit	15.250.000,00						7 Unit	18.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						146.280.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	9 Unit	146.280.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				26 Unit	135.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.680.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	21 Unit	1.680.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				40 Unit	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.200.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit		46 Unit	20 Unit	14.200.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				46 Unit	22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						48.916.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	48.916.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Unit	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.250.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	25 Unit	15.250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Unit	18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						166.352.300,00					-		229.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
163.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						882.886.600,00							877.394.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						*882.886.600,00*							*877.394.000,00*	
			1.Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Digital	99.97 %		99.91 %	99.93 %	882.886.600,00						99.94 %	877.394.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						870.790.600,00					-		840.394.000,00	
		Terlaksananya Layanan Pendaftaran penduduk Digital						870.790.600,00					-		840.394.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	166000 Dokumen		166000 Dokumen	166000 Dokumen	870.790.600,00						166000 Dokumen	840.394.000,00	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						870.790.600,00							840.394.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	166000 Dokumen		166000 Dokumen	166000 Dokumen	870.790.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				166000 Dokumen	840.394.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk						0,00					-		22.000.000,00	
		Tertatanya Layanan Pendaftaran penduduk digital						0,00					-		22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	35000 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						35000 Dokumen	22.000.000,00	
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						0,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	35000 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				35000 Dokumen	22.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						12.096.000,00					-		15.000.000,00	
		Terselenggaranya Layanan pendaftaran penduduk digital						12.096.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	41650 Dokumen		41650 Dokumen	41650 Dokumen	9.536.000,00						41650 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	2.560.000,00						0 Laporan	5.000.000,00	
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk						9.536.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	41650 Dokumen		41650 Dokumen	41650 Dokumen	9.536.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				41650 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk						2.560.000,00							5.000.000,00	
		Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	2.560.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Laporan	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
164.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL						46.271.400,00							39.739.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						*46.271.400,00*							*39.739.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Digital	96.75 %		91.75 %	93 %	46.271.400,00						94.25 %	39.739.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						27.516.400,00					-		30.739.000,00	
		Terselenggaranya Layanan pencatatan sipil digital						27.516.400,00					-		30.739.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	44000 Dokumen		44000 Dokumen	44000 Dokumen	27.516.400,00						44000 Dokumen	30.739.000,00	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						27.516.400,00							30.739.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	44000 Dokumen		44000 Dokumen	44000 Dokumen	27.516.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44000 Dokumen	30.739.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						18.755.000,00					-		9.000.000,00	
		Terselenggaranya Layanan pencatatan sipil digital yang meningkat						18.755.000,00					-		9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	18.755.000,00						1 Laporan	9.000.000,00	
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil						18.755.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	18.755.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
165.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						209.127.100,00							102.571.000,00	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						*209.127.100,00*							*102.571.000,00*	
			1.Persentase Desa dan Kelurahan Pengguna yang Memanfaatkan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	100 %		23 %	41 %	209.127.100,00						61 %	102.571.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						24.995.000,00					-		90.000.000,00	
		Tersedianya Data Kependudukan						24.995.000,00					-		90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	0 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	14.023.000,00						0 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	0 Dokumen		0 Dokumen	99 Dokumen	10.972.000,00						0 Dokumen	60.000.000,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						14.023.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	0 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	14.023.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						10.972.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	0 Dokumen		0 Dokumen	99 Dokumen	10.972.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						7.040.000,00					-		10.000.000,00	
		Tertatanya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan						7.040.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	7.040.000,00						0 Dokumen	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						7.040.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	7.040.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						177.092.100,00					-		2.571.000,00	
		Terlaksananya Layanan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						177.092.100,00					-		2.571.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	177.092.100,00						1 Laporan	2.571.000,00	
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						177.092.100,00							2.571.000,00	
		Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	177.092.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	2.571.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
166.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						5.296.800,00							5.297.000,00	
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan						*5.296.800,00*							*5.297.000,00*	
			1.Persentase Kesesuaian Profil dengan Regulasi yang Berlaku	100 %		100 %	100 %	5.296.800,00						100 %	5.297.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						5.296.800,00					-		5.297.000,00	
		Tersedianya Profil Kependudukan						5.296.800,00					-		5.297.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.296.800,00						1 Dokumen	5.297.000,00	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						5.296.800,00							5.297.000,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.296.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	5.297.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERHUBUNGAN KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PERHUBUNGAN						22.361.453.722,00							26.938.728.478,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						22.361.453.722,00							26.938.728.478,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						22.361.453.722,00							26.938.728.478,00	
167.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.949.807.750,00							8.500.227.978,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*6.949.807.750,00*							*8.488.727.978,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100%			100%	6.949.807.750,00							8.488.727.978,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						52.645.300,00					-		77.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						52.645.300,00					-		77.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.157.400,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	47.693.200,00						22 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	3.794.700,00						22 Laporan	15.000.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						47.693.200,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	47.693.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.794.700,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	3.794.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1.157.400,00							12.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.157.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.056.260.200,00					-		7.218.622.619,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.056.260.200,00					-		7.218.622.619,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	16.186.200,00						44 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	6.040.074.000,00						65 Orang/bulan	7.193.622.619,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.040.074.000,00							7.193.622.619,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6.040.074.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				65 Orang/bulan	7.193.622.619,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						16.186.200,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	16.186.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.078.600,00					-		5.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.078.600,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.078.600,00						11 Laporan	5.000.000,00	
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.078.600,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.078.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0,00					-		35.505.359,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0,00					-		35.505.359,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	35.505.359,00	
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							35.505.359,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	35.505.359,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						737.000,00					-		5.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						737.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	737.000,00						17 Dokumen	5.000.000,00	
	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						737.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	737.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						158.856.700,00					-		194.400.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						158.856.700,00					-		194.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.436.500,00						2 Dokumen	4.800.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	605.000,00						12 Laporan	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.911.000,00						12 Laporan	72.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	64.176.000,00						11 Paket	85.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	6.511.000,00						2 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.615.500,00						2 Paket	7.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.944.300,00						1 Paket	6.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.657.400,00						1 Paket	6.500.000,00	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.944.300,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.944.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	6.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.657.400,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.657.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	6.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						64.176.000,00							85.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	64.176.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Paket	85.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.615.500,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.615.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.511.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	6.511.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						605.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	605.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70.911.000,00							72.600.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.911.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	72.600.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.436.500,00							4.800.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.436.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	4.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		95.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		95.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	95.000.000,00	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	95.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						235.118.950,00					-		323.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						235.118.950,00					-		323.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.619.950,00						12 Laporan	123.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	132.499.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						102.619.950,00							123.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.619.950,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	123.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						132.499.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	132.499.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						445.111.000,00					-		546.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						445.111.000,00					-		546.200.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	116.400.000,00						1 Unit	87.300.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit		31 Unit	12 Unit	267.300.000,00						19 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						2 Unit	79.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		53 Unit	19 Unit	13.590.000,00						58 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	7 Unit	3.861.000,00							9.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							79.900.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	79.900.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						267.300.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit		31 Unit	12 Unit	267.300.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				19 Unit	350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.590.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit		53 Unit	19 Unit	13.590.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				58 Unit	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						116.400.000,00							87.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	116.400.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	87.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.861.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	7 Unit	3.861.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
168.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						15.411.645.972,00							18.438.500.500,00	
		Meningkatnya Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten						*11.170.299.919,00*							*12.239.000.000,00*	
			Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	44.49 %		40.09 %	41.41 %	0,00						42.29 %	255.500.000,00	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						0,00					Masyarakat		255.500.000,00	
		Ditetapkan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota						0,00					Masyarakat		255.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	255.500.000,00	
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota						0,00							255.500.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Dokumen	255.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						10.257.770.119,00					Masyarakat		10.780.500.000,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan						10.257.770.119,00					Masyarakat		10.780.500.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	380 Unit		140 Unit	130 Unit	2.941.294.400,00						370 Unit	3.580.500.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2650 Unit		1579 Unit	1170 Unit	7.316.475.719,00						1210 Unit	7.200.000.000,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						2.941.294.400,00							3.580.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	380 Unit		140 Unit	130 Unit	2.941.294.400,00	Kab. Purworejo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain				370 Unit	3.580.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						7.316.475.719,00							7.200.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2650 Unit		1579 Unit	1170 Unit	7.316.475.719,00	Kab. Purworejo	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain				1210 Unit	7.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						908.931.000,00					-		1.199.500.000,00	
		Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						908.931.000,00					-		1.199.500.000,00	
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.637.400,00						3 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	88.228.000,00						2 Laporan	32.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	817.065.600,00						12 Laporan	825.500.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	330.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						817.065.600,00							825.500.000,00	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	817.065.600,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	825.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						3.637.400,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.637.400,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	12.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas						0,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						88.228.000,00							32.000.000,00	
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	88.228.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	32.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota						3.598.800,00					-		3.500.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin						3.598.800,00					-		3.500.000,00	
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.598.800,00						3 Laporan	3.500.000,00	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin						3.598.800,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.598.800,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Laporan	3.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya Penyelenggaraan Angkutan Umum, Terminal dan Titik Parkir yang Tersedia						*4.066.424.700,00*							*5.779.050.500,00*	
			Persentase Angkutan Umum, Terminal, dan Titik Parkir yang Tersedia	66.75%		63.72%	64.78%	4.066.424.700,00							5.779.050.500,00	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						335.533.300,00					-		730.550.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Terminal Tipe C						335.533.300,00					-		730.550.500,00	
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	178.698.300,00						4 Dokumen	295.000.500,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	156.835.000,00						4 Unit	435.550.000,00	
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C						178.698.300,00							295.000.500,00	
		Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	178.698.300,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	295.000.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						156.835.000,00							435.550.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	156.835.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	435.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						3.505.673.500,00					-		4.230.000.000,00	
		Terwujudnya Layanan Perparkiran yang Tertib dan Terkelola Dengan Baik						3.505.673.500,00					-		4.230.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.505.673.500,00						12 Laporan	4.230.000.000,00	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						3.505.673.500,00							4.230.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.505.673.500,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	4.230.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						220.251.300,00					-		603.500.000,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang						220.251.300,00					-		603.500.000,00	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Unit		3 Unit	5 Unit	165.550.300,00						6 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	54.701.000,00						12 Laporan	303.500.000,00	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						54.701.000,00							303.500.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	54.701.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	303.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						165.550.300,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Unit		3 Unit	5 Unit	165.550.300,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				6 Unit	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						4.966.600,00					-		215.000.000,00	
		Diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Daerah Kabupaten/Kota						4.966.600,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.966.600,00						12 Laporan	215.000.000,00	
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota						4.966.600,00							215.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.966.600,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	215.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yang Terlaksana						*174.921.353,00*							*420.450.000,00*	
			Persentase Pengujian Kendaraan Bermotor yang terlaksana	98.88%		93.48%	95.28%	174.921.353,00								
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						174.921.353,00					-		420.450.000,00	
		Terlayaninya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						174.921.353,00					-		420.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen		2000 Dokumen	2000 Dokumen	50.000.000,00						2000 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	2000 Unit		2000 Unit	2000 Unit	18.928.300,00						2000 Unit	22.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	6.752.000,00						10 Laporan	7.150.000,00	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00						4 Laporan	6.500.000,00	
			JumlahLaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00						4 Laporan	4.300.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	17 Unit		17 Unit	17 Unit	99.241.053,00						17 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang		3 Orang	0 Orang	0,00						3 Orang	10.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						0,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang		3 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Orang	10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						18.928.300,00							22.500.000,00	
		Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	2000 Unit		2000 Unit	2000 Unit	18.928.300,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2000 Unit	22.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen		2000 Dokumen	2000 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2000 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						0,00							4.300.000,00	
		Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	4.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						99.241.053,00							120.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	17 Unit		17 Unit	22 Unit	99.241.053,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17 Unit	120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						6.752.000,00							7.150.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	6.752.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Laporan	7.150.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						0,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	6.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						10.305.166.336,00							10.805.988.099,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						10.305.166.336,00							10.805.988.099,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8.888.864.336,00							10.291.325.599,00	
169.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.839.069.803,00							4.975.964.399,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						4.839.069.803,00							4.975.964.399,00	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	-		-	100 %	4.839.069.803,00						-	4.921.514.399,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						31.940.000,00					Aparatur		59.400.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						31.940.000,00					Aparatur		59.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.102.000,00						1 Dokumen	2.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	29.678.000,00						22 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	1.160.000,00						22 Laporan	2.200.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.678.000,00							55.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	29.678.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.160.000,00							2.200.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	1.160.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	2.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1.102.000,00							2.200.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.102.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.944.571.403,00					Aparatur		4.276.549.635,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.944.571.403,00					Aparatur		4.276.549.635,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.205.700,00						44 Laporan	2.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.943.365.703,00						34 Orang/bulan	4.274.349.635,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.943.365.703,00							4.274.349.635,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.943.365.703,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				34 Orang/bulan	4.274.349.635,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.205.700,00							2.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.205.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	2.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.136.000,00					Aparatur		1.650.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.136.000,00					Aparatur		1.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.136.000,00						11 Laporan	1.650.000,00	
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.136.000,00							1.650.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.136.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	1.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.000.000,00					Aparatur		1.100.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.000.000,00					Aparatur		1.100.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	1.000.000,00						16 Dokumen	1.100.000,00	
	2.16.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						1.000.000,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	1.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.440.000,00					Aparatur		4.180.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.440.000,00					Aparatur		4.180.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	5.440.000,00						17 Dokumen	4.180.000,00	
	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.440.000,00							4.180.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	5.440.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	4.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						126.693.400,00					Aparatur		144.100.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						126.693.400,00					Aparatur		144.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	1.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.144.000,00						2 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.056.000,00						12 Laporan	2.750.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.818.000,00						12 Laporan	19.800.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	52.852.800,00						11 Paket	58.300.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	10.205.200,00						15 Paket	11.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	12.015.000,00						4 Paket	13.200.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	10.575.500,00						7 Paket	13.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	12.026.900,00						17 Paket	13.200.000,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.575.500,00							13.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	10.575.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Paket	13.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12.026.900,00							13.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	12.026.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Paket	13.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						52.852.800,00							58.300.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	52.852.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Paket	58.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.015.000,00							13.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	12.015.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	13.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	1.650.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.205.200,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	10.205.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Paket	11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.056.000,00							2.750.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.056.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	2.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						17.818.000,00							19.800.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.818.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	19.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.144.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.144.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Aparatur		136.456.764,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Aparatur		136.456.764,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	Unit	0,00						5 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	0,00						Unit	136.456.764,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	Unit	0,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		Unit	Unit	0,00						Unit	0,00	
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							136.456.764,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	136.456.764,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						526.164.000,00					Aparatur		156.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						526.164.000,00					Aparatur		156.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00						12 Laporan	112.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	424.164.000,00						12 Laporan	44.000.000,00	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						102.000.000,00							112.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	112.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						424.164.000,00							44.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	424.164.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						202.125.000,00					Aparatur		196.328.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						202.125.000,00					Aparatur		196.328.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	Unit	24.600.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	31.620.000,00						7 Unit	30.415.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	76.440.000,00						2 Unit	82.313.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 Unit		125 Unit	125 Unit	9.415.000,00						125 Unit	11.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	137 Unit		137 Unit	137 Unit	53.950.000,00						137 Unit	66.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	6.100.000,00						11 Unit	6.600.000,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						76.440.000,00							82.313.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	76.440.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	82.313.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						31.620.000,00							30.415.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	31.620.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Unit	30.415.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						9.415.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 Unit		125 Unit	125 Unit	9.415.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				125 Unit	11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						53.950.000,00							66.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	137 Unit		137 Unit	137 Unit	53.950.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				137 Unit	66.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						24.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.100.000,00							6.600.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	6.100.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Unit	6.600.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
170.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						1.169.282.633,00							1.256.698.300,00	
		Meningkatnya jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten						1.169.282.633,00							1.256.698.300,00	
			Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	-		-	64 %	1.169.282.633,00						-	1.256.698.300,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.169.282.633,00					Mayarakat		1.256.698.300,00	
		Terselenggaranya komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota						1.169.282.633,00					Mayarakat		1.256.698.300,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	216.182.000,00						1 Laporan	243.114.300,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	744.226.333,00						-	712.734.000,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	17.810.000,00						-	14.300.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	20.999.800,00						-	23.100.000,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	124.253.800,00						-	135.300.000,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	45.810.700,00						-	128.150.000,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						216.182.000,00							243.114.300,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	216.182.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	243.114.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						45.810.700,00							128.150.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	100 %	45.810.700,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	128.150.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						744.226.333,00							712.734.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	300 Orang	744.226.333,00	Kab. Purworejo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	712.734.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						124.253.800,00							135.300.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	2 Rekomendasi	124.253.800,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	135.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						17.810.000,00							14.300.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	10 Komunitas	17.810.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	14.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten						20.999.800,00							23.100.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	4 Konten	20.999.800,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	23.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
171.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						2.880.511.900,00							4.058.662.900,00	
		Meningkatnya jumlah aplikasi yang dibangun/ dikembangkan														
			Persentase pembangunan/ pengembangan aplikasi sesuai dengan Peta Rencana SPBE	-		-	40 %	2.780.015.900,00						-	3.946.799.500,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						100.496.000,00					Aparatur		111.863.400,00	
		Terselenggaranya kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara						100.496.000,00					Aparatur		111.863.400,00	
			Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	100%		100%	100%	100.496.000,00						1 Dokumen	111.863.400,00	
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa						100.496.000,00							111.863.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.496.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	111.863.400,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.780.015.900,00					Aparatur		3.946.799.500,00	
		Terselenggaranya perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo						2.780.015.900,00					Aparatur		3.946.799.500,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	12.975.000,00						-	22.000.000,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.716.100,00						4 Laporan	27.500.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	149.992.800,00						3 Dokumen	195.800.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	205.933.000,00						-	247.500.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	1.843.568.600,00						-	2.750.819.500,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	517.830.400,00						-	703.180.000,00	
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						49.716.100,00							27.500.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.716.100,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Laporan	27.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						149.992.800,00							195.800.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	149.992.800,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	195.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						1.843.568.600,00							2.750.819.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	41 Titik	1.843.568.600,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	2.750.819.500,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						12.975.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	4 Dokumen	12.975.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	22.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						205.933.000,00							247.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	2 Layanan	205.933.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	247.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						517.830.400,00							703.180.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	41 Titik	517.830.400,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	703.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						63.780.000,00							141.975.900,00	
172.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						63.780.000,00							141.975.900,00	
		Meningkatnya jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						63.780.000,00								
			Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-		-	100 %	63.780.000,00						-	141.975.900,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						63.780.000,00					Mayarakat		141.975.900,00	
		Terselenggaranya layanan statistik sektoral						63.780.000,00					Mayarakat		141.975.900,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-		-	-	20.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	49.463.700,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00						100 %	12.277.100,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	13.780.000,00						-	80.235.100,00	
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						30.000.000,00							12.277.100,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 %	12.277.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						0,00							49.463.700,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang		50 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				50 Orang	49.463.700,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional						13.780.000,00							80.235.100,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	100 %	13.780.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	80.235.100,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						1.352.522.000,00							372.686.600,00	
173.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						1.352.522.000,00							372.686.600,00	
		Meningkatnya keamanan informasi pemerintah						*1.352.522.000,00*							*372.686.600,00*	
			Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah				87.91%	*1.352.522.000,00*								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.352.522.000,00					Aparatur		372.686.600,00	
		Terlaksananya Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah						1.352.522.000,00					Aparatur		372.686.600,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	37.522.000,00						1 Laporan	51.700.000,00	
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						37.522.000,00							51.700.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	37.522.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	51.700.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		-						1.352.522.000,00					Aparatur		372.686.600,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	-	50.000.000,00						-	159.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	1.265.000.000,00						-	161.486.600,00	
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						50.000.000,00							159.500.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	159.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						1.265.000.000,00							161.486.600,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	1.265.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	161.486.600,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN						116.883.319.100,00							14.761.938.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						12.744.596.400,00							11.073.690.000,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						12.744.596.400,00							11.073.690.000,00	
174.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						11.597.107.100,00							9.742.810.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*11.596.107.100,00*							*9.602.810.000,00*	
			1. Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	11.596.107.100,00						100 %	9.602.810.000,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.126.000,00					-		37.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.126.000,00					-		37.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	580.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	16.946.000,00						22 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		Laporan	22 Laporan	600.000,00						22 Laporan	10.000.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.946.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	16.946.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						600.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		Laporan	22 Laporan	600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						580.000,00							2.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	580.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.828.395.000,00					-		8.218.810.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.828.395.000,00					-		8.218.810.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		Laporan	44 Laporan	1.000.000,00						44 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121 Orang/bulan		118 Orang/bulan	121 Orang/bulan	10.827.395.000,00						121 Orang/bulan	8.213.810.000,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.827.395.000,00							8.213.810.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121 Orang/bulan		118 Orang/bulan	121 Orang/bulan	10.827.395.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				121 Orang/bulan	8.213.810.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		Laporan	44 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					-		15.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.000.000,00						11 Laporan	15.000.000,00	
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	15.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.056.000,00					-		20.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.056.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	1.056.000,00						16 Dokumen	20.000.000,00	
	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						1.056.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	1.056.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.140.000,00					-		5.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.140.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	1.140.000,00						17 Dokumen	5.000.000,00	
	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.140.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	1.140.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						180.057.900,00					-		372.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						180.057.900,00					-		372.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	3.400.000,00						2 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	69.877.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	66.066.000,00						12 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	17.487.600,00						22 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	12.996.000,00						3 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		Paket	3 Paket	5.008.200,00						3 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket		12 Paket	15 Paket	5.223.100,00						15 Paket	7.000.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.008.200,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		Paket	3 Paket	5.008.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	5.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.223.100,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket		12 Paket	15 Paket	5.223.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Paket	7.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						66.066.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	66.066.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.996.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	12.996.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						17.487.600,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	17.487.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Paket	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						69.877.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	69.877.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.400.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	3.400.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						65.353.000,00					-		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						65.353.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	50 Unit	65.353.000,00						Unit	0,00	
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						65.353.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	50 Unit	65.353.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						215.266.200,00					-		220.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						215.266.200,00					-		220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	85.266.200,00						12 Laporan	140.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00						12 Laporan	80.000.000,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						85.266.200,00							140.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	85.266.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	140.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						130.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	80.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						286.713.000,00					-		855.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						286.713.000,00					-		855.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	156.933.000,00						26 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	18.660.000,00						20 Unit	55.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	6.710.000,00						2 Unit	180.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	70.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						156.933.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	156.933.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				26 Unit	400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.660.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	60 Unit	18.660.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Unit	55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.710.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	26 Unit	6.710.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	180.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						286.713.000,00					-		855.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	60.450.000,00						-	150.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						60.450.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	60.450.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
175.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						15.927.200,00							14.240.000,00	
		Meningkatnya koperasi dengan akuntabilitas baik						*15.927.200,00*							*14.240.000,00*	
			1.Persentase Koperasi yang Memiliki Akuntabilitas Baik	49.30 %		44.01 %	45.77 %	15.927.200,00						47.54 %	14.240.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						15.927.200,00					-		14.240.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi						15.927.200,00					-		14.240.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	738 Unit Usaha		284 Unit Usaha	738 Unit Usaha	15.927.200,00						738 Unit Usaha	14.240.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						15.927.200,00							14.240.000,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	738 Unit Usaha		284 Unit Usaha	738 Unit Usaha	15.927.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				738 Unit Usaha	14.240.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
176.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						35.567.500,00							30.843.000,00	
		Meningkatnya koperasi sehat						*35.567.500,00*							*30.843.000,00*	
			1.Persentase Koperasi Sehat	55.80 %		53.57 %	54.46 %	35.567.500,00						54.91 %	30.843.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						35.567.500,00					-		30.843.000,00	
		Terukurnya Kesehatan KSP/USP						35.567.500,00					-		30.843.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	454 Unit Usaha		Unit Usaha	454 Unit Usaha	35.567.500,00						454 Unit Usaha	30.843.000,00	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan						35.567.500,00							30.843.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	454 Unit Usaha		Unit Usaha	454 Unit Usaha	35.567.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				454 Unit Usaha	30.843.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
177.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						100.198.100,00							213.318.000,00	
		Meningkatnya koperasi yang memiliki SDM yang berkompeten						*100.198.100,00*							*213.318.000,00*	
			1.Persentase SDM Koperasi yang Tersertifikasi	58.02 %		41.28 %	45.47 %	100.198.100,00						49.65 %	213.318.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.198.100,00					-		213.318.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kualitas SDM koperasi						100.198.100,00					-		213.318.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 Orang		2140 Orang	240 Orang	100.198.100,00						240 Orang	213.318.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						100.198.100,00							213.318.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	240 Orang		2140 Orang	240 Orang	100.198.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				240 Orang	213.318.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
178.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						133.812.700,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya perkembangan usaha koperasi						*133.812.700,00*							*3.000.000,00*	
			1.Persentase Koperasi Aktif yang Berkembang Usahanya	10.56 %		3.52 %	5.28 %	133.812.700,00						7.04 %	3.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						133.812.700,00					-		3.000.000,00	
		Meningkatnya koperasi yang berkembang usahanya						133.812.700,00					-		3.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1 Unit Usaha		Unit Usaha	15 Unit Usaha	133.812.700,00						1 Unit Usaha	3.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						133.812.700,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1 Unit Usaha		Unit Usaha	15 Unit Usaha	133.812.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit Usaha	3.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
179.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						200.000.000,00							447.520.000,00	
		Meningkatnya UMKM yang berkualitas dilihat pada aspek kelembagaan, legalitas, dan kemitraan						*200.000.000,00*							*447.520.000,00*	
			1.Persentase UMKM yang Berkualitas	20.26 %		11.87 %	13.97 %	200.000.000,00						16.07 %	447.520.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						200.000.000,00					-		447.520.000,00	
		Meningkatnya usaha mikro yang produktif						200.000.000,00					-		447.520.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	50.000.000,00						-	68.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	430 Orang	125.000.000,00						-	259.520.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	2100 Unit Usaha	25.000.000,00						-	120.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						125.000.000,00							259.520.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	430 Orang	125.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	259.520.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM						25.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	2100 Unit Usaha	25.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	120.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						50.000.000,00							68.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	68.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
180.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						661.983.800,00							621.959.000,00	
		Meningkatnya UMKM yang mengalami peningkatan usaha pada aspek jumlah tenaga kerja, penjualan produk, dan area pemasaran						*661.983.800,00*							*621.959.000,00*	
			1.Persentase UMKM yang mengalami Peningkatan Usaha	3.29 %		2 %	2.32 %	661.983.800,00						2.65 %	621.959.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						661.983.800,00					-		621.959.000,00	
		Meningkatnya jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil						661.983.800,00					-		621.959.000,00	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	3200 Unit Usaha	618.608.800,00						-	521.959.000,00	
			Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	35 Orang	43.375.000,00						-	100.000.000,00	
	2.17.08.2.01.0012	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha						43.375.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	35 Orang	43.375.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM						618.608.800,00							521.959.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	3200 Unit Usaha	618.608.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	521.959.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						104.138.722.700,00							3.688.248.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						104.138.722.700,00							3.688.248.000,00	
181.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						103.500.553.200,00							3.219.148.000,00	
		Meningkatnya pasar rakyat yang memenuhi indikator pasar ber-SNI						*103.500.553.200,00*							*3.219.148.000,00*	
			1.Persentase Pasar Rakyat menuju Ber-SNI	22.58 %		9.68 %	12.90 %	103.500.553.200,00						16.13 %	3.219.148.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						103.468.655.100,00					-		3.169.148.000,00	
		Terkelolanya Sarana Distribusi Perdagangan						103.468.655.100,00					-		3.169.148.000,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	31 Unit		31 Unit	31 Unit	3.468.655.100,00						31 Unit	3.169.148.000,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	100.000.000.000,00						0 Unit	0,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						100.000.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit		1 Unit	3 Unit	100.000.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						3.468.655.100,00							3.169.148.000,00	
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	31 Unit		31 Unit	31 Unit	3.468.655.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				31 Unit	3.169.148.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						31.898.100,00					-		50.000.000,00	
		Terbinanya Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						31.898.100,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	31.898.100,00						4 Dokumen	50.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						31.898.100,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	31.898.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
182.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						206.750.000,00							67.000.000,00	
		Meningkatnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting serta terjaminnya distribusi pupuk bersubsidi sampai dengan Kios pupuk lengkap						*206.750.000,00*							*67.000.000,00*	
			1.Disparitas Harga	10 %		10 %	+/-10 %	206.750.000,00						10 %	25.000.000,00	
			2.Persentase Distribusi Pupuk Bersubsidi sampai dengan Kios Pupuk Lengkap	94.53 %		94.45 %	94.47 %	206.750.000,00						94.49 %	67.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						47.500.000,00					-		25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						47.500.000,00					-		25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	47.500.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						47.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	47.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Laporan	25.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						135.000.000,00					-		30.000.000,00	
		Tersedianya Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						135.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	97.500.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	37.500.000,00						4 Laporan	20.000.000,00	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						37.500.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	37.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Laporan	20.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						97.500.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	97.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						24.250.000,00					-		12.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						24.250.000,00					-		12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	24.250.000,00						2 Laporan	12.000.000,00	
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						24.250.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	24.250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	12.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
183.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						276.893.000,00							282.903.000,00	
		Meningkatnya omzet pelaku usaha yang difasilitasi pameran dagang						*276.893.000,00*							*282.903.000,00*	
			1.Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha yang Difasilitasi Pameran Dagang	2 %		2 %	2 %	276.893.000,00						2 %	282.903.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						276.893.000,00					-		282.903.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang						276.893.000,00					-		282.903.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	256.693.000,00						100 Pelaku Usaha	250.000.000,00	
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 Produk		Produk	30 Produk	20.200.000,00						30 Produk	32.903.000,00	
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal						256.693.000,00							250.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	256.693.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Pelaku Usaha	250.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor						20.200.000,00							32.903.000,00	
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 Produk		Produk	30 Produk	20.200.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 Produk	32.903.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
184.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						94.026.500,00							94.027.000,00	
		Meningkatnya alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku						*94.026.500,00*							*94.027.000,00*	
			1.Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	100 %		100 %	100 %	94.026.500,00						100 %	94.027.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						94.026.500,00					-		94.027.000,00	
		Terlayaninya metrologi legal dan pengawasannya						94.026.500,00					-		94.027.000,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6358 Unit		6358 Unit	6358 Unit	66.342.000,00						6358 Unit	44.027.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	40 Orang		40 Orang	40 Orang	27.684.500,00						40 Orang	50.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						66.342.000,00							44.027.000,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	6358 Unit		6358 Unit	6358 Unit	66.342.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6358 Unit	44.027.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						27.684.500,00							50.000.000,00	
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	40 Orang		40 Orang	40 Orang	27.684.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				40 Orang	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
185.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						60.500.000,00							25.170.000,00	
		Meningkatnya omzet pelaku usaha yang dipromosikan penggunaan produk dalam negeri						*60.500.000,00*							*25.170.000,00*	
			1.Persentase Peningkatan Omzet Pelaku Usaha yang Dipromosikan	2 %		2 %	2 %	60.500.000,00						2 %	25.170.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						60.500.000,00					-		25.170.000,00	
		Terlaksananya Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						60.500.000,00					-		25.170.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM		50 UMKM	50 UMKM	19.000.000,00						50 UMKM	10.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM		UMKM	100 UMKM	41.500.000,00						100 UMKM	15.170.000,00	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						41.500.000,00							15.170.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	100 UMKM		UMKM	100 UMKM	41.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 UMKM	15.170.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						19.000.000,00							10.000.000,00	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	50 UMKM		50 UMKM	50 UMKM	19.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				50 UMKM	10.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						3.696.442.923,00							3.481.606.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						3.696.442.923,00							3.481.606.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.696.442.923,00							3.481.606.000,00	
186.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.078.648.315,00							2.845.975.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*3.077.988.315,00*							*2.843.475.000,00*	
			1. Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	3.077.988.315,00						100 %	2.843.475.000,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.916.000,00					Aparatur		6.827.360,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.916.000,00					Aparatur		6.827.360,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	4.916.000,00						22 Dokumen	5.827.360,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	500.000,00						22 Laporan	500.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.916.000,00							5.827.360,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	4.916.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22 Dokumen	5.827.360,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	500.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				22 Laporan	500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						500.000,00							500.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.214.539.000,00					Aparatur		2.008.650.524,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.214.539.000,00					Aparatur		2.008.650.524,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	550.000,00						44 Laporan	1.210.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.213.989.000,00						25 Orang/bulan	2.007.440.524,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.213.989.000,00							2.007.440.524,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.213.989.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25 Orang/bulan	2.007.440.524,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						550.000,00							1.210.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	550.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				44 Laporan	1.210.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						160.000,00					-		500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						160.000,00					-		500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	160.000,00						11 Laporan	500.000,00	
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						160.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	160.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				11 Laporan	500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						160.000,00					Aparatur		500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						160.000,00					Aparatur		500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	160.000,00						17 Dokumen	500.000,00	
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						160.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	160.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				17 Dokumen	500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						115.920.735,00					Aparatur		125.721.531,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						115.920.735,00					Aparatur		125.721.531,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	180.000,00						2 Dokumen	500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00						12 Laporan	500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.830.000,00						12 Laporan	63.573.796,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	37.371.600,00						1 Paket	44.721.600,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	11.440.475,00						10 Paket	8.327.475,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.702.400,00						2 Paket	3.702.400,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.783.000,00						2 Paket	2.783.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.613.260,00						2 Paket	1.613.260,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.783.000,00							2.783.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.783.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	2.783.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.613.260,00							1.613.260,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.613.260,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	1.613.260,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						37.371.600,00							44.721.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	37.371.600,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Paket	44.721.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.702.400,00							3.702.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.702.400,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Paket	3.702.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						11.440.475,00							8.327.475,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	11.440.475,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Paket	8.327.475,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						58.830.000,00							63.573.796,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.830.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	63.573.796,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						180.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	180.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						633.937.580,00					Aparatur		605.277.585,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						633.937.580,00					Aparatur		605.277.585,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.849.085,00						12 Laporan	195.849.085,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	438.088.495,00						12 Laporan	409.428.500,00	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						195.849.085,00							195.849.085,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.849.085,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	195.849.085,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						438.088.495,00							409.428.500,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	438.088.495,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	409.428.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108.015.000,00					Aparatur		98.498.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						108.015.000,00					Aparatur		98.498.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00						1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	34.880.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	39.950.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		5 Unit	5 Unit	10.835.000,00						4 Unit	8.668.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							39.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	39.950.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						38.220.000,00							34.880.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	34.880.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.835.000,00							8.668.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		5 Unit	5 Unit	10.835.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	8.668.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
187.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						110.761.100,00							91.054.000,00	
		Meningkatnya kualitas informasi potensi penanaman modal yang siap dipublikasikan						*110.761.100,00*							*91.054.000,00*	
			1.Persentase Penyediaan Informasi Potensi Penanaman Modal yang Siap Dipublikasikan	100 %		100 %	100 %	110.761.100,00						100 %	91.054.000,00	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						110.761.100,00					Masyarakat		91.054.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten						110.761.100,00					Masyarakat		91.054.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	110.761.100,00						-	91.054.000,00	
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						110.761.100,00							91.054.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	110.761.100,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	91.054.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
188.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						165.585.000,00							155.417.000,00	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal						*165.585.000,00*							*155.417.000,00*	
			1.Jumlah Kepeminatan (LOI)	9 Minat		9 Minat	9 Minat	165.585.000,00						9 Minat	155.417.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						165.585.000,00					Masyarakat		155.417.000,00	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal						165.585.000,00					Masyarakat		155.417.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	165.585.000,00						1 Dokumen	155.417.000,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						165.585.000,00							155.417.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	165.585.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	155.417.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
189.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						167.388.400,00							157.388.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan penanaman modal sesuai norma, standar prosedur dan kriteria						*167.388.400,00*							*157.388.000,00*	
			1.Persentase Pelayanan Penanaman Modal sesuai Norma Standar Prosedur dan Kriteria	100 %		100 %	100 %	167.388.400,00						100 %	157.388.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						167.388.400,00					-		157.388.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Penanaman Modal Sesuai Standar Operasional Pelayanan						167.388.400,00					-		157.388.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha		35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	30.869.400,00						35 Pelaku Usaha	30.869.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha		2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	136.519.000,00						2500 Pelaku Usaha	126.519.000,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						136.519.000,00							126.519.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2500 Pelaku Usaha		2500 Pelaku Usaha	2500 Pelaku Usaha	136.519.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2500 Pelaku Usaha	126.519.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						30.869.400,00							30.869.000,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	35 Pelaku Usaha		35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	30.869.400,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				35 Pelaku Usaha	30.869.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
190.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						153.222.808,00							210.935.000,00	
		Meningkatnya kepatuhan pelaporan LKPM						*153.222.808,00*							*210.935.000,00*	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						153.222.808,00					-		210.935.000,00	
		Terpenuhinya Kepatuhan LKPM						153.222.808,00					-		210.935.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 Kegiatan Usaha		10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	45.150.000,00						10 Kegiatan Usaha	24.514.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha		250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	108.072.808,00						250 Pelaku Usaha	166.421.000,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	0 Kegiatan Usaha	0,00								
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						108.072.808,00							166.421.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250 Pelaku Usaha		250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	108.072.808,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				250 Pelaku Usaha	166.421.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						45.150.000,00							24.514.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	10 Kegiatan Usaha		10 Kegiatan Usaha	10 Kegiatan Usaha	45.150.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Kegiatan Usaha	24.514.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	0 Kegiatan Usaha	0,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
191.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						20.837.300,00							20.837.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan						*20.837.300,00*							*20.837.000,00*	
			1.Persentase Jenis Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Disediakan	100 %		100 %	100 %	20.837.300,00						100 %	20.837.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.837.300,00					-		20.837.000,00	
		Terkelolanya Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi						20.837.300,00					-		20.837.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.837.300,00						4 Dokumen	20.837.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						20.837.300,00							20.837.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.837.300,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	20.837.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. PURWOREJO
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						18.370.416.507,00							21.074.436.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						12.859.747.111,00							15.145.702.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						12.859.747.111,00							15.145.702.000,00	
192.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.367.195.512,00							5.536.399.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*5.367.195.512,00*							*5.535.399.000,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	100%							100%		
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.223.100,00					Aparatur		50.500.000,00	
		Terlaksananya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.223.100,00					Aparatur		50.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	21.100.000,00						22 Dokumen	45.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	3.123.100,00						22 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						21.100.000,00							45.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	24 Dokumen	21.100.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	45.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.123.100,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	3.123.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	4.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	1.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.736.130.412,00					-		4.974.209.500,00	
		Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.736.130.412,00					-		4.974.209.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan		26 Laporan	26 Laporan	1.455.412,00						26 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan		49 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.734.675.000,00						49 Orang/bulan	4.973.209.500,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.734.675.000,00							4.973.209.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan		49 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.734.675.000,00	Kab. Purworejo	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)				49 Orang/bulan	4.973.209.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.455.412,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan		26 Laporan	26 Laporan	1.455.412,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				26 Laporan	1.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.991.000,00					Aparatur		2.695.000,00	
		Terlayaninya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah						1.991.000,00					Aparatur		2.695.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.991.000,00						11 Laporan	2.695.000,00	
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.991.000,00							2.695.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.991.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	2.695.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						133.622.400,00					Aparatur		152.103.000,00	
		Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah						133.622.400,00					Aparatur		152.103.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.252.000,00						2 Dokumen	3.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	57.668.000,00						12 Laporan	68.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.447.600,00						1 Paket	42.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	28 Paket		28 Paket	28 Paket	17.975.700,00						28 Paket	19.800.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.855.000,00						4 Paket	8.294.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	4.011.500,00						6 Paket	5.280.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.412.600,00						12 Paket	4.129.000,00	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.011.500,00							5.280.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	4.011.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Paket	5.280.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.412.600,00							4.129.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.412.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	4.129.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.447.600,00							42.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.447.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	42.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.855.000,00							8.294.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.855.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	8.294.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.252.000,00							3.800.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.252.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	3.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						17.975.700,00							19.800.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	28 Paket		28 Paket	28 Paket	17.975.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				28 Paket	19.800.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						57.668.000,00							68.200.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	57.668.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	68.200.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						265.026.200,00					Aparatur		132.400.000,00	
		Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						265.026.200,00					Aparatur		132.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	73.152.200,00						12 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	191.874.000,00						12 Laporan	52.400.000,00	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						73.152.200,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	73.152.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	80.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						191.874.000,00							52.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	191.874.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	52.400.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						205.202.400,00					Aparatur		224.491.500,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						205.202.400,00					Aparatur		224.491.500,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	87.450.000,00						16 Unit	91.103.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	15.874.400,00						14 Unit	18.910.500,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	8.758.000,00						1 Unit	12.478.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	93.120.000,00						-	102.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						87.450.000,00							91.103.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	87.450.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Unit	91.103.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.874.400,00							18.910.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	15.874.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Unit	18.910.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						93.120.000,00							102.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	93.120.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	102.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.758.000,00							12.478.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	2 Unit	8.758.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	12.478.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
193.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						277.019.599,00							378.441.000,00	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan						*277.019.599,00*							*378.441.000,00*	
			1.Persentase Pemuda Berprestasi	7.411 %		7.400 %	7.403 %	121.720.820,00						7.406 %	232.141.500,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						155.298.779,00					Masyarakat		146.299.500,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pemuda						155.298.779,00					Masyarakat		146.299.500,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	-	31.460.549,00						-	18.772.800,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	76.626.700,00						-	76.626.700,00	
			Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	-	15.464.530,00						-	18.153.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	31.747.000,00						-	32.747.000,00	
	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota						76.626.700,00							76.626.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota Yang ditingkatkan kapasitasnya	-		-	20 Orang	76.626.700,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	76.626.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota						31.747.000,00							32.747.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	50 Orang	31.747.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	32.747.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota						15.464.530,00							18.153.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas kepemimpinannya	-		-	50 Orang	15.464.530,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	18.153.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota						31.460.549,00							18.772.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	31.460.549,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	18.772.800,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						121.720.820,00					Masyarakat		232.141.500,00	
		Terlaksananya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri						121.720.820,00					Masyarakat		232.141.500,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	121.720.820,00						-	232.141.500,00	
	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota						121.720.820,00							232.141.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	121.720.820,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	232.141.500,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
194.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						6.853.691.000,00							8.869.021.000,00	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga						*6.853.691.000,00*							*8.869.021.000,00*	
			1.Persentase Organisasi Keolahragaan yang Aktif	100 %		100 %	100 %	6.853.691.000,00						100 %	8.869.021.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						3.945.988.600,00					Masyarakat		6.258.418.600,00	
		Terlaksananya pembinaan olahraga pada satuan pendidikan						3.945.988.600,00					Masyarakat		6.258.418.600,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	-		-	5 Kegiatan	1.697.639.100,00						-	1.722.559.600,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	2 Unit	2.248.349.500,00						-	4.535.859.000,00	
	2.19.03.2.01.0007	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar						1.697.639.100,00							1.722.559.600,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	-		-	5 Kegiatan	1.697.639.100,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	1.722.559.600,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						2.248.349.500,00							4.535.859.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	2 Unit	2.248.349.500,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	4.535.859.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						460.830.200,00					Masyarakat		463.730.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten						460.830.200,00					Masyarakat		463.730.200,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Kegiatan	330.605.800,00						-	318.105.800,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	40 Orang	130.224.400,00						-	145.624.400,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						130.224.400,00							145.624.400,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	40 Orang	130.224.400,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	145.624.400,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						330.605.800,00							318.105.800,00	
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	1 Kegiatan	330.605.800,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	318.105.800,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						99.603.000,00					Masyarakat		99.603.000,00	
		Terlaksananya Atlet yang dibina						99.603.000,00					Masyarakat		99.603.000,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	20 Orang	99.603.000,00						-	99.603.000,00	
	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						99.603.000,00							99.603.000,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	20 Orang	99.603.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	99.603.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						2.300.000.000,00					Masyarakat		2.000.000.000,00	
		Terbinanya organisasi olahraga						2.300.000.000,00					Masyarakat		2.000.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	3 Kerja Sama	2.300.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						2.300.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	3 Kerja Sama	2.300.000.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						47.269.200,00					Masyarakat		47.269.200,00	
		Terbinanya Olahraga Rekreasi						47.269.200,00					Masyarakat		47.269.200,00	
			Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	20 Orang	47.269.200,00						-	47.269.200,00	
	2.19.03.2.05.0012	Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat						47.269.200,00							47.269.200,00	
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemasalan Olahraga di Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta yang terfasilitasi dalam Pemasalan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota	-		-	20 Orang	47.269.200,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	47.269.200,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
195.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						361.841.000,00							361.841.000,00	
		Meningkatnya kapasitas kepramukaan						*361.841.000,00*							*361.841.000,00*	
			Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	100%		100%	100%							100%		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						361.841.000,00					-		361.841.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya organisasi kepramukaan yang aktif						361.841.000,00					-		361.841.000,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	361.841.000,00						1 Organisasi	361.841.000,00	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah						361.841.000,00							361.841.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	361.841.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Organisasi	361.841.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.510.669.396,00							5.928.734.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						5.510.669.396,00							5.928.734.000,00	
196.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						4.636.171.100,00							4.787.476.000,00	
		Meningkatnya kunjungan wisatawan						*4.636.171.100,00*							*4.787.476.000,00*	
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	1.107.357 orang		1.135.806 orang	1.137.000 orang							949.163 orang		
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	324 orang		277 orang	289 orang							300 orang		
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						40.399.300,00					-		11.099.400,00	
		Terlaksananya kegiatan Pembinaan Pengelola Daya Tarik Wisata						40.399.300,00					-		11.099.400,00	
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	40.399.300,00						39 Laporan	11.099.400,00	
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						40.399.300,00							11.099.400,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	40.399.300,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				39 Laporan	11.099.400,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						2.135.390.800,00					Masyarakat		2.700.467.279,00	
		Terlaksananya pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata						2.135.390.800,00					Masyarakat		2.700.467.279,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Unit		4 Unit	2 Unit	2.135.390.800,00						4 Unit	2.700.467.279,00	
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						2.135.390.800,00							2.700.467.279,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Unit		4 Unit	2 Unit	2.135.390.800,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Unit	2.700.467.279,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						2.445.582.400,00					Masyarakat		2.053.721.300,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata						2.445.582.400,00					Masyarakat		2.053.721.300,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	2.245.582.400,00						5 Unit	1.853.721.300,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	-		-	1 Dokumen	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						2.245.582.400,00							1.853.721.300,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	2.245.582.400,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	1.853.721.300,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	-		-	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						14.798.600,00					Masyarakat		22.188.021,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Rekomendasi Perizinan Usaha Pariwisata						14.798.600,00					Masyarakat		22.188.021,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	12 Pelaku Usaha	14.798.600,00						-	22.188.021,00	
	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha						14.798.600,00							22.188.021,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	12 Pelaku Usaha	14.798.600,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	22.188.021,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
197.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						693.884.996,00							996.762.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan pemasaran pariwisata						*693.884.996,00*							*996.762.000,00*	
			1.Persentase Layanan Pemasaran Pariwisata	48 %		28 %	33 %	693.884.996,00						38 %	996.762.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						693.884.996,00					-		996.762.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Pariwisata						693.884.996,00					-		996.762.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	34.619.096,00						2 Dokumen	35.136.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi		3 Promosi	3 Promosi	158.883.400,00						3 Promosi	276.979.400,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	500.382.500,00						4 Kegiatan	684.646.400,00	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						34.619.096,00							35.136.200,00	
		Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	34.619.096,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	35.136.200,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						500.382.500,00							684.646.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	500.382.500,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Kegiatan	684.646.400,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						158.883.400,00							276.979.400,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi		3 Promosi	3 Promosi	158.883.400,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Promosi	276.979.400,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
198.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						65.084.300,00							15.125.000,00	
		Meningkatnya fasilitasi sub sektor ekonomi kreatif						*65.084.300,00*							*15.125.000,00*	
			1.Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	42.86 %		14.29 %	21.43 %	65.084.300,00						28.57 %	15.125.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						65.084.300,00					-		15.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengembangan ekosistem ekraf melalui pembentukan Komite Ekonomi Kreatif, Fasilitasi HAKI dan pelatihan						65.084.300,00					-		15.125.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	55.084.300,00						2 Dokumen	5.125.000,00	
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-		-	1 Kegiatan	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran						55.084.300,00							5.125.000,00	
		Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	55.084.300,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	5.125.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Terlaksananya pengembangan ekosistem ekraf melalui pembentukan Komite Ekonomi Kreatif, Fasilitasi HAKI dan pelatihan						65.084.300,00					-		15.125.000,00	
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	-		-	1 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				-	10.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
199.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						115.529.000,00							129.371.000,00	
		Meningkatnya SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkompeten						*115.529.000,00*							*129.371.000,00*	
			Persentase Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekraf yang Meningkat Kapasitasnya	77%		69%	96,00%							73%		
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						115.529.000,00					-		129.371.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilatih						115.529.000,00					-		129.371.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	80 Orang		80 Orang	80 Orang	37.200.000,00						80 Orang	40.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang		10 Orang	10 Orang	22.859.000,00						10 Orang	23.871.000,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang		100 Orang	100 Orang	55.470.000,00						100 Orang	65.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						55.470.000,00							65.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100 Orang		100 Orang	100 Orang	55.470.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				100 Orang	65.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						37.200.000,00							40.500.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	80 Orang		80 Orang	80 Orang	37.200.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				80 Orang	40.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						22.859.000,00							23.871.000,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	10 Orang		10 Orang	10 Orang	22.859.000,00	Kab. Purworejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Orang	23.871.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						6.329.282.900,00							4.568.836.725,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						6.329.282.900,00							4.568.836.725,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5.988.872.300,00							2.952.368.325,00	
200.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.633.426.000,00							1.040.100.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*4.633.426.000,00*							*965.100.000,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.633.426.000,00						100 %	965.100.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.582.900,00					Aparatur		41.150.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.582.900,00					Aparatur		41.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	149.700,00						1 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	17.963.500,00						22 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	1.469.700,00						22 Laporan	6.000.000,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						17.963.500,00							35.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	17.963.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.469.700,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	1.469.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						149.700,00							150.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	149.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	150.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.013.924.900,00					Aparatur		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.013.924.900,00					Aparatur		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.690.900,00						44 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.012.234.000,00						35 Orang/bulan	0,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.012.234.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.012.234.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Orang/bulan	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.690.900,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.690.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.806.800,00					Aparatur		2.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.806.800,00					Aparatur		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	1.806.800,00						11 Laporan	2.000.000,00	
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.806.800,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	1.806.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4.997.600,00					Aparatur		25.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						4.997.600,00					Aparatur		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	4.997.600,00						17 Dokumen	25.000.000,00	
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						4.997.600,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	4.997.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						101.555.400,00					Aparatur		167.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						101.555.400,00					Aparatur		167.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.650.400,00						2 Dokumen	12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.120.000,00						12 Laporan	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.676.000,00						12 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	42.638.400,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	23 Paket		1 Paket	18 Paket	4.850.800,00						23 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	3 Paket	4.196.600,00						3 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		1 Paket	9 Paket	13.052.100,00						8 Paket	23.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket		1 Paket	13 Paket	7.371.100,00						28 Paket	15.000.000,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						13.052.100,00							23.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		1 Paket	9 Paket	13.052.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Paket	23.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.371.100,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	28 Paket		1 Paket	13 Paket	7.371.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				28 Paket	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						42.638.400,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	42.638.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.196.600,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	3 Paket	4.196.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						4.850.800,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	23 Paket		1 Paket	18 Paket	4.850.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				23 Paket	10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.120.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.120.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	3.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24.676.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.676.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.650.400,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.650.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	12.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Aparatur		120.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Aparatur		120.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						5 Unit	40.000.000,00	
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Unit	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						280.916.400,00					Aparatur		300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						280.916.400,00					Aparatur		300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	280.916.400,00						12 Laporan	300.000.000,00	
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						280.916.400,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	280.916.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						210.642.000,00					Aparatur		384.950.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						210.642.000,00					Aparatur		384.950.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	3 Unit	74.231.000,00						4 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	5 Unit	59.300.000,00						7 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	39.950.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 Unit		16 Unit	18 Unit	1.440.000,00						120 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		34 Unit	27 Unit	19.310.000,00						41 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit		21 Unit	21 Unit	12.401.000,00						31 Unit	20.000.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							39.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	39.950.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						59.300.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	5 Unit	59.300.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Unit	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.440.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	125 Unit		16 Unit	18 Unit	1.440.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				120 Unit	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.310.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		34 Unit	27 Unit	19.310.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				41 Unit	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						74.231.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		3 Unit	3 Unit	74.231.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Unit	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12.401.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit		21 Unit	21 Unit	12.401.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				31 Unit	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
201.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						1.309.174.900,00							1.844.268.325,00	
		Terwujudnya perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan						*1.309.174.900,00*							*1.844.268.325,00*	
			Persentase Perpustakaan yang Terakreditasi	15.98 %		10.27 %	11.70 %	1.309.174.900,00						13.12 %	1.844.268.325,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						827.514.000,00					Pemustaka		1.023.385.970,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						827.514.000,00					Pemustaka		1.023.385.970,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2100 Eksemplar		3500 Eksemplar	1990 Eksemplar	225.217.900,00						2000 Eksemplar	310.000.000,00	
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.923.400,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1.903.500,00						1 Perpustakaan	3.700.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	25 Layanan		21 Layanan	22 Layanan	516.393.100,00						23 Layanan	490.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan		10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	33.130.500,00						10 Perpustakaan	50.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan		10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	4.109.900,00						10 Perpustakaan	18.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan		6 Perpustakaan	2 Perpustakaan	28.997.000,00						2 Perpustakaan	106.685.970,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130 Orang		70 Orang	100 Orang	8.838.700,00						110 Orang	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						33.130.500,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan		10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	33.130.500,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Perpustakaan	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						28.997.000,00							106.685.970,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan		6 Perpustakaan	2 Perpustakaan	28.997.000,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Perpustakaan	106.685.970,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota						516.393.100,00							490.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	25 Layanan		21 Layanan	22 Layanan	516.393.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah				23 Layanan	490.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						4.109.900,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan		10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	4.109.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Perpustakaan	18.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.838.700,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130 Orang		70 Orang	100 Orang	8.838.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				110 Orang	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						8.923.400,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.923.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						225.217.900,00							310.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2100 Eksemplar		3500 Eksemplar	1990 Eksemplar	225.217.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2000 Eksemplar	310.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						1.903.500,00							3.700.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	1.903.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Perpustakaan	3.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						481.660.900,00					Pemustaka		820.882.355,00	
		Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						481.660.900,00					Pemustaka		820.882.355,00	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang		1 Orang	1 Orang	20.000.000,00						1 Orang	5.882.355,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	6 Perpustakaan		2 Perpustakaan	3 Perpustakaan	19.470.400,00						4 Perpustakaan	53.000.000,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	6 Lokus		4 Lokus	4 Lokus	122.165.800,00						5 Lokus	258.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	9 Orang		3 Orang	9 Orang	294.952.700,00						9 Orang	24.000.000,00	
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	25.072.000,00						1 Perpustakaan	480.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							5.882.355,00	
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	1 Orang		1 Orang	1 Orang	20.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Orang	5.882.355,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						19.470.400,00							53.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	6 Perpustakaan		2 Perpustakaan	3 Perpustakaan	19.470.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Perpustakaan	53.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						25.072.000,00							480.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	25.072.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Perpustakaan	480.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						294.952.700,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	9 Orang		3 Orang	9 Orang	294.952.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah				9 Orang	24.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						122.165.800,00							258.000.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	6 Lokus		4 Lokus	4 Lokus	122.165.800,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Lokus	258.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						827.514.000,00					Pemustaka		1.023.385.970,00	
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	-		-	1 Eksemplar	0,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah				-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
202.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						46.271.400,00							68.000.000,00	
		Terlaksananya pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten						*46.271.400,00*							*68.000.000,00*	
			1.Persentase Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten yang Dilestarikan	52.63 %		31.58 %	36.84 %	46.271.400,00						42.11 %	68.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						46.271.400,00					Pemustaka		68.000.000,00	
		Koleksi Naskah Kuno yang Dialihmediakan						46.271.400,00					Pemustaka		68.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	30 Orang		32 Orang	30 Orang	11.884.000,00						30 Orang	32.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar		1 Eksemplar	1 Eksemplar	34.387.400,00						1 Eksemplar	36.000.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						11.884.000,00							32.000.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	30 Orang		32 Orang	30 Orang	11.884.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 Orang	32.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						34.387.400,00							36.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar		1 Eksemplar	1 Eksemplar	34.387.400,00	Kab. Purworejo	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Eksemplar	36.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						340.410.600,00							1.616.468.400,00	
203.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						302.454.300,00							1.556.160.900,00	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis						*302.454.300,00*							*1.556.160.900,00*	
			1.Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip sesuai Kaidah Kearsipan dengan Kategori Cukup	48.84 %		39.53 %	41.86 %	302.454.300,00						44.19 %	1.556.160.900,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						67.182.900,00					Aparatur		237.075.200,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah sesuai Kaidah Kearsipan						67.182.900,00					Aparatur		237.075.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	45.793.500,00						2 Laporan	170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	19 Instansi		Instansi	19 Instansi	21.389.400,00						19 Instansi	67.075.200,00	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						45.793.500,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	45.793.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	170.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota						21.389.400,00							67.075.200,00	
		Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	19 Instansi		Instansi	19 Instansi	21.389.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				19 Instansi	67.075.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						92.391.800,00					Aparatur		912.976.700,00	
		Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis						92.391.800,00					Aparatur		912.976.700,00	
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip		100 Arsip	100 Arsip	92.391.800,00						100 Arsip	912.976.700,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						92.391.800,00							912.976.700,00	
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	100 Arsip		100 Arsip	100 Arsip	92.391.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Arsip	912.976.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						142.879.600,00					Aparatur		406.109.000,00	
		Terlaksananya Layanan Kearsipan melalui JIKN pada Perangkat Daerah						142.879.600,00					Aparatur		406.109.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	96.852.200,00						5 Laporan	311.249.200,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	3 Pengguna		0 Pengguna	1 Pengguna	46.027.400,00						1 Pengguna	94.859.800,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						46.027.400,00							94.859.800,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	3 Pengguna		0 Pengguna	1 Pengguna	46.027.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Pengguna	94.859.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						96.852.200,00							311.249.200,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	96.852.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Laporan	311.249.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
204.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						37.956.300,00							60.307.500,00	
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK						*37.956.300,00*							*60.307.500,00*	
			1.Tingkat Digitalisasi Arsip Daerah	66.35 %		60.98 %	66.99 %	26.917.800,00						63.99 %	41.334.300,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						11.038.500,00					Aparatur		18.973.200,00	
		Terlaksananya pemusnahan arsip oleh perangkat daerah						11.038.500,00					Aparatur		18.973.200,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	600 Arsip		0 Arsip	100 Arsip	11.038.500,00						400 Arsip	18.973.200,00	
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						11.038.500,00							18.973.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	600 Arsip		0 Arsip	100 Arsip	11.038.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				400 Arsip	18.973.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan						15.583.500,00					Aparatur		25.000.000,00	
		Terselamatkannya Arsip dari Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan						15.583.500,00					Aparatur		25.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar		1 Daftar	1 Daftar	15.583.500,00						1 Daftar	25.000.000,00	
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						15.583.500,00							25.000.000,00	
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Daftar		1 Daftar	1 Daftar	15.583.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Daftar	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota						11.334.300,00					Aparatur		16.334.300,00	
		Terlaksananya autentikasi arsip statis dan arsip alih media						11.334.300,00					Aparatur		16.334.300,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip		100 Arsip	100 Arsip	11.334.300,00						100 Arsip	16.334.300,00	
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						11.334.300,00							16.334.300,00	
		Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip		100 Arsip	100 Arsip	11.334.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Arsip	16.334.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA						10.375.436.133,00							10.576.096.433,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELA DASAR						2.052.981.533,00							1.041.221.510,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						2.052.981.533,00							1.041.221.510,00	
205.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						13.009.400,00							28.546.320,00	
		Meningkatnya pemanfaatan rencana tenaga kerja yang disusun						*13.009.400,00*							*28.546.320,00*	
			1.Persentase Rencana Tenaga Kerja yang Disusun	100.00 %		100.00 %	100.00 %	13.009.400,00						100.00 %	28.546.320,00	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						13.009.400,00					Masyarakat		28.546.320,00	
		Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja						13.009.400,00					Masyarakat		28.546.320,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	4 Orang		4 Orang	4 Orang	13.009.400,00						4 Orang	28.546.320,00	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						0,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Dokumen	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						13.009.400,00							28.546.320,00	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	4 Orang		4 Orang	4 Orang	13.009.400,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				4 Orang	28.546.320,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
206.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						1.351.045.133,00							44.873.180,00	
		Meningkatnya kompetensi pencari kerja dan produktivitas tenaga kerja						*1.351.045.133,00*							*44.873.180,00*	
			1.Persentase Pencari Kerja yang Memiliki Kompetensi	89.00 %		88.5 %	88.6 %	1.334.751.333,00						88.7 %	26.950.000,00	
			2.Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	14.06 %		7.81 %	9.38 %	1.334.751.333,00						10.94 %	26.950.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						1.315.039.333,00					-		0,00	
		Terlaksananya Layanan Pelatihan Pencari kerja di Balai Latihan Kerja						1.315.039.333,00					-		0,00	
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 Unit		0 Unit	20 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	480 Orang	1.315.039.333,00						-	0,00	
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				0 Unit	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						1.315.039.333,00							0,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	480 Orang	1.315.039.333,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						16.293.800,00					-		17.923.180,00	
		Terlaksananya Pembinaan LPKS						16.293.800,00					-		17.923.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100 Lembaga		100 Lembaga	100 Lembaga	16.293.800,00						100 Lembaga	17.923.180,00	
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						16.293.800,00							17.923.180,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	100 Lembaga		100 Lembaga	37 Lembaga	16.293.800,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				100 Lembaga	17.923.180,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil						19.712.000,00					-		26.950.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil						19.712.000,00					-		26.950.000,00	
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan		10 Perusahaan	10 Perusahaan	19.712.000,00						10 Perusahaan	26.950.000,00	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						19.712.000,00							26.950.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan		10 Perusahaan	10 Perusahaan	19.712.000,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				10 Perusahaan	26.950.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
207.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						95.749.100,00							257.550.650,00	
		Meningkatnya pencari kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja						*95.749.100,00*							*257.550.650,00*	
			1.Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja	68.04 %		67.94 %	67.96 %	95.749.100,00						67.99 %	257.550.650,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						64.842.800,00					-		82.612.700,00	
		Terlaksananya Layanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						64.842.800,00					-		82.612.700,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang		50 Orang	100 Orang	7.000.000,00						100 Orang	7.700.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	5 Orang		5 Orang	5 Orang	7.030.000,00						5 Orang	10.256.840,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2250 Orang		2150 Orang	2175 Orang	50.812.800,00						2200 Orang	64.655.860,00	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja						50.812.800,00							64.655.860,00	
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2250 Orang		2150 Orang	2175 Orang	50.812.800,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				2200 Orang	64.655.860,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						7.000.000,00							7.700.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang		50 Orang	50 Orang	7.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				100 Orang	7.700.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						7.030.000,00							10.256.840,00	
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	5 Orang		5 Orang	5 Orang	7.030.000,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				5 Orang	10.256.840,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						24.016.300,00					-		135.317.930,00	
		Terlaksananya Informasi Pasar Kerja						24.016.300,00					-		135.317.930,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang		300 Orang	300 Orang	24.016.300,00						300 Orang	135.317.930,00	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						24.016.300,00							135.317.930,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang		300 Orang	300 Orang	24.016.300,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				300 Orang	135.317.930,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						6.890.000,00					-		39.620.020,00	
		Terlaksananya Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)						6.890.000,00					-		39.620.020,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	6.890.000,00						50 Orang	39.620.020,00	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						6.890.000,00							39.620.020,00	
		Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	6.890.000,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				50 Orang	39.620.020,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
208.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						593.177.900,00							710.251.360,00	
		Meningkatnya sarana hubungan industrial dan syarat kerja						*593.177.900,00*							*710.251.360,00*	
			1.Persentase Sarana Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	59.688 %		56.563 %	57.34 %	593.177.900,00						58.125 %	710.251.360,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						53.099.700,00					-		30.249.340,00	
		Terlaksananya Pengesahan dan Pendaftaran PP dan PKB yang disahkan						53.099.700,00					-		30.249.340,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	36.600.000,00						1 Laporan	12.099.670,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	2 Perusahaan		2 Perusahaan	2 Perusahaan	16.499.700,00						2 Perusahaan	18.149.670,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						16.499.700,00							18.149.670,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	2 Perusahaan		2 Perusahaan	2 Perusahaan	16.499.700,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				2 Perusahaan	18.149.670,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						36.600.000,00							12.099.670,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	36.600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	12.099.670,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						540.078.200,00					-		680.002.020,00	
		Terlaksananya Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja						540.078.200,00					-		680.002.020,00	
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	22 Asosiasi dan Serikat Pekerja		22 Asosiasi dan Serikat Pekerja	22 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.200.000,00						22 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11.132.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	129.448.200,00						1 Lembaga	131.393.020,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	35.750.000,00						5 Perkara	39.325.000,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	268 Orang		268 Orang	268 Orang	365.680.000,00						268 Orang	498.152.000,00	
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						35.750.000,00							39.325.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	35.750.000,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				5 Perkara	39.325.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						9.200.000,00							11.132.000,00	
		Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	22 Asosiasi dan Serikat Pekerja		22 Asosiasi dan Serikat Pekerja	22 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.200.000,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				22 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11.132.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						129.448.200,00							131.393.020,00	
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	129.448.200,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Lembaga	131.393.020,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						365.680.000,00							498.152.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	268 Orang		268 Orang	268 Orang	365.680.000,00	Kab. Purworejo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				268 Orang	498.152.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8.322.454.600,00							9.534.874.923,00	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						8.253.024.900,00							9.458.502.253,00	
209.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.587.351.400,00							8.622.502.253,00	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	-		-	100 %	7.587.351.400,00						-	8.622.502.253,00	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.324.900,00					-		55.543.353,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.324.900,00					-		55.543.353,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	2.035.000,00						-	2.035.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	22 Dokumen	13.407.600,00						-	48.607.653,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	24 Laporan	6.882.300,00						-	4.900.700,00	
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						13.407.600,00							48.607.653,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	22 Dokumen	13.407.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	48.607.653,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.882.300,00							4.900.700,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	24 Laporan	6.882.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	4.900.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						2.035.000,00							2.035.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	2.035.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	2.035.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.040.736.000,00					-		6.891.596.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.040.736.000,00					-		6.891.596.600,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	56 Orang/bulan	6.040.736.000,00						-	6.891.596.600,00	
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.040.736.000,00							6.891.596.600,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	56 Orang/bulan	6.040.736.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	6.891.596.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000,00					-		5.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	11 Laporan	2.000.000,00						-	5.000.000,00	
	3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	11 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.736.000,00					-		13.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.736.000,00					-		13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	17 Dokumen	2.736.000,00						-	13.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00						-	0,00	
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	0 Paket	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2.736.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	17 Dokumen	2.736.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	13.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						267.063.500,00					-		296.616.300,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						267.063.500,00					-		296.616.300,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	3.624.000,00						-	3.624.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	2 Dokumen	9.668.500,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	8.992.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	67.427.000,00						-	122.432.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	11 Paket	65.003.400,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	37 Paket	52.183.000,00						-	96.676.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	21.286.600,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	17.460.300,00						-	17.463.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	17 Paket	21.418.700,00						-	21.420.800,00	
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						17.460.300,00							17.463.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	17.460.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	17.463.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						21.418.700,00							21.420.800,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	17 Paket	21.418.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	21.420.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						65.003.400,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	11 Paket	65.003.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						21.286.600,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	12 Paket	21.286.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						3.624.000,00							3.624.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	2 Dokumen	3.624.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	3.624.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						52.183.000,00							96.676.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	37 Paket	52.183.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	96.676.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						8.992.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	1 Laporan	8.992.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						67.427.000,00							122.432.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	67.427.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	122.432.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						9.668.500,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-		-	2 Dokumen	9.668.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						85.673.000,00					-		50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						85.673.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	20 Unit	85.673.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00						-	50.000.000,00	
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						85.673.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	20 Unit	85.673.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						753.094.000,00					-		781.196.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						753.094.000,00					-		781.196.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	281.020.000,00						-	309.122.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	472.074.000,00						-	472.074.000,00	
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						281.020.000,00							309.122.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	281.020.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	309.122.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						472.074.000,00							472.074.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	472.074.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	472.074.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						413.724.000,00					-		529.550.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						413.724.000,00					-		529.550.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	240.087.000,00						-	442.363.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	8 Unit	86.980.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	56.157.000,00						-	56.187.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	60 Unit	30.500.000,00						-	31.000.000,00	
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						86.980.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	8 Unit	86.980.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						56.157.000,00							56.187.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	30 Unit	56.157.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	56.187.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						240.087.000,00							442.363.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	5 Unit	240.087.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	442.363.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.500.000,00							31.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	60 Unit	30.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	31.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRAS DAN TENAGA KERJA
210.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						633.673.500,00							800.000.000,00	
		Meningkatnya produktivitas IKM tiap tahunnya						*633.673.500,00*							*800.000.000,00*	
			1.Persentase Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah	8.72 %		8.26 %	8.4 %	633.673.500,00						8.53 %	800.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						633.673.500,00					-		800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Layanan Pengembangan Industri Kabupaten						633.673.500,00					-		800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	261.600.900,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	372.072.600,00						1 Dokumen	450.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						261.600.900,00							350.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	261.600.900,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						372.072.600,00							450.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	372.072.600,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				1 Dokumen	450.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
211.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						10.000.000,00							11.000.000,00	
		Meningkatnya layanan perizinan industri kewenangan kabupaten yang memenuhi ketentuan perizinan						*10.000.000,00*							*11.000.000,00*	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		11.000.000,00	
		Meningkatnya ketertiban pemenuhan izin usaha industri						10.000.000,00					-		11.000.000,00	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	11.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						10.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
212.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						22.000.000,00							25.000.000,00	
		Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaporan informasi industri						*22.000.000,00*							*25.000.000,00*	
			1.Tingkat Kepatuhan Pelaporan Informasi Industri	41.28 %		39.91 %	40.34 %	22.000.000,00						40.7 %	25.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						22.000.000,00					-		25.000.000,00	
		Tersedianya data industri yang mutakhir dan terpublikasi						22.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						22.000.000,00							25.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						69.429.700,00							76.372.670,00	
213.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						69.429.700,00							76.372.670,00	
		Meningkatnya pelaksanaan penempatan transmigran						*69.429.700,00*							*76.372.670,00*	
			1.Persentase Penempatan Transmigrasi	100.00 %		100.00 %	100.00 %	69.429.700,00						100.00 %	76.372.670,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						69.429.700,00					-		76.372.670,00	
		Terlaksananya Layanan Transmigrasi						69.429.700,00					-		76.372.670,00	
			Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	0 Lokasi		0 Lokasi	0 Lokasi	0,00						0 Lokasi	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.357.000,00						1 Laporan	12.492.700,00	
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0 Lokasi		0 Lokasi	0 Lokasi	0,00						0 Lokasi	0,00	
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga		5 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	58.072.700,00						5 Kepala Keluarga	63.879.970,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						11.357.000,00							12.492.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.357.000,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				1 Laporan	12.492.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						58.072.700,00							63.879.970,00	
		Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	5 Kepala Keluarga		5 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	58.072.700,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				5 Kepala Keluarga	63.879.970,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	0 Lokasi		0 Lokasi	0 Lokasi	0,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				0 Lokasi	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	0 Lokasi		0 Lokasi	0 Lokasi	0,00	Kab. Purworejo	Dana Bagi Hasil (DBH)				0 Lokasi	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SEKRETARIAT DAERAH KAB. PURWOREJO
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		SEKRETARIAT DAERAH						42.281.634.600,00							37.946.352.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						42.281.634.600,00							37.946.352.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						42.281.634.600,00							37.946.352.000,00	
1,	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						27.876.193.600,00							25.503.862.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, serta Keuangan Perangkat Daerah						*27.306.845.300,00*							*25.171.699.200,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	27.306.845.300,00						100 %	25.171.699.200,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.280.000,00					Aparatur		10.257.100,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.280.000,00					Aparatur		10.257.100,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111 Dokumen	7 Dokumen	46 Dokumen	44 Dokumen	17.400.000,00						22 Dokumen	9.025.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2.880.000,00						1 Dokumen	1.231.800,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						17.400.000,00							9.025.300,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111 Dokumen	7 Dokumen	46 Dokumen	44 Dokumen	17.400.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	9.025.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						2.880.000,00							1.231.800,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	2.880.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.231.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.737.495.000,00					Aparatur		16.065.795.300,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											Aparatur		16.065.795.300,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/bulan	125 Orang/bulan	133 Orang/bulan	123 Orang/bulan	16.731.337.000,00						133 Orang/bulan	16.057.980.300,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	220 Laporan	0 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	6.158.000,00						44 Laporan	7.815.000,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.731.337.000,00							16.057.980.300,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	133 Orang/bulan	125 Orang/bulan	133 Orang/bulan	123 Orang/bulan	16.731.337.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				133 Orang/bulan	16.057.980.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						6.158.000,00							7.815.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	220 Laporan	0 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	6.158.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	7.815.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000,00					Aparatur		1.157.800,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000,00					Aparatur		1.157.800,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	44 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	11 Laporan	2.000.000,00						11 Laporan	1.157.800,00	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.000.000,00							1.157.800,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	44 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	11 Laporan	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	1.157.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.000.000,00					Aparatur		4.500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.000.000,00					Aparatur		4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	68 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	17 Dokumen	2.000.000,00						17 Dokumen	4.500.000,00	
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2.000.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	68 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	17 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	4.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.562.471.300,00					Aparatur		2.615.763.600,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.562.471.300,00					Aparatur		2.615.763.600,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.410.800,00						1 Paket	32.108.700,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	47.804.600,00						1 Paket	103.556.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	103.118.400,00						1 Paket	103.118.400,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	2 Paket	3 Paket	3 Paket	30.078.500,00						3 Paket	24.517.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.628.000,00						1 Dokumen	27.194.400,00	
			Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	25 Paket	3 Paket	5 Paket	4 Paket	38.456.300,00						5 Paket	38.458.200,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.073.005.100,00						12 Laporan	1.071.250.300,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.211.957.000,00						12 Laporan	1.212.021.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.012.600,00						2 Dokumen	3.538.500,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						30.410.800,00							32.108.700,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.410.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	32.108.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						47.804.600,00							103.556.500,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	47.804.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	103.556.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						103.118.400,00							103.118.400,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	103.118.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	103.118.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.078.500,00							24.517.600,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	2 Paket	3 Paket	3 Paket	30.078.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	24.517.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						20.628.000,00							27.194.400,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.628.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	27.194.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/ Material						38.456.300,00							38.458.200,00	
		Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	25 Paket	3 Paket	5 Paket	4 Paket	38.456.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	38.458.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.073.005.100,00							1.071.250.300,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.073.005.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	1.071.250.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.211.957.000,00							1.212.021.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	1.211.957.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	1.212.021.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						7.012.600,00							3.538.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7.012.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	3.538.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						698.278.000,00					Aparatur		141.730.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						698.278.000,00					Aparatur		141.730.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0 Unit	1 Unit	639.680.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	160 Unit	18 Unit	150 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	0 Unit	0 Unit	12 Unit	58.598.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	13 Unit	3 Unit	0 Unit	0,00						10 Unit	141.730.000,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						639.680.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	0 Unit	1 Unit	639.680.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	160 Unit	18 Unit	150 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						58.598.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	0 Unit	0 Unit	12 Unit	58.598.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							141.730.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	13 Unit	3 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	141.730.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.935.163.900,00					Aparatur		2.373.794.200,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.935.163.900,00					Aparatur		2.373.794.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	736.592.300,00						12 Laporan	862.339.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.198.571.600,00						12 Laporan	1.511.455.200,00	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						736.592.300,00							862.339.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	736.592.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	862.339.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.198.571.600,00							1.511.455.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.198.571.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	1.511.455.200,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.653.381.000,00					Aparatur		1.532.937.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.653.381.000,00					Aparatur		1.532.937.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	399.060.000,00						9 Unit	363.450.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	145 Unit	19 Unit	29 Unit	15 Unit	507.400.000,00						29 Unit	508.070.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	9.510.000,00						30 Unit	8.825.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	60 Unit	60 Unit	45 Unit	32.050.000,00						60 Unit	42.800.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	25 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	620.232.000,00						5 Unit	485.737.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	420 Unit	84 Unit	84 Unit	48 Unit	85.129.000,00						84 Unit	124.055.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						399.060.000,00							363.450.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	399.060.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				9 Unit	363.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						507.400.000,00							508.070.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	145 Unit	19 Unit	29 Unit	15 Unit	507.400.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				29 Unit	508.070.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						9.510.000,00							8.825.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	150 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	9.510.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 Unit	8.825.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						32.050.000,00							42.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	60 Unit	60 Unit	45 Unit	32.050.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				60 Unit	42.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						620.232.000,00							485.737.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit	620.232.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Unit	485.737.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						85.129.000,00							124.055.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	420 Unit	84 Unit	84 Unit	48 Unit	85.129.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				84 Unit	124.055.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.199.015.100,00					Aparatur		1.051.552.200,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.199.015.100,00					Aparatur		1.051.552.200,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	167.469.000,00						2 Orang/Bulan	171.189.500,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	229.375.100,00						2 Paket	254.062.700,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	13.171.000,00						3 Orang	26.300.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	789.000.000,00						2 Orang/Bulan	600.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						167.469.000,00							171.189.500,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	167.469.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Orang/Bulan	171.189.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						229.375.100,00							254.062.700,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	229.375.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	254.062.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						13.171.000,00							26.300.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	13.171.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Orang	26.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						789.000.000,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	789.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Orang/Bulan	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.498.761.000,00					Aparatur		1.374.212.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.498.761.000,00					Aparatur		1.374.212.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	871.883.100,00						1 Paket	747.331.600,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	626.877.900,00						1 Paket	626.880.400,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						871.883.100,00							747.331.600,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	871.883.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	747.331.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						626.877.900,00							626.880.400,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	626.877.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	626.880.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah						*373.448.300,00*							*186.462.900,00*	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten	88,31	87,56	87,98	88,00	373.448.300,00						88,01	186.462.900,00	
			Rata-rata Nilai SAKIP Kabupaten	80,20	68,02	70,45	72,89							75,33		
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						373.448.300,00					Aparatur		186.462.900,00	
		Terlaksananya Penataan Organisasi						373.448.300,00					Aparatur		186.462.900,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	112.386.500,00						1 Dokumen	40.401.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	84.986.900,00						1 Laporan	44.986.900,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	176.074.900,00						1 Dokumen	101.074.900,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						112.386.500,00							40.401.100,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	112.386.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	40.401.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						84.986.900,00							44.986.900,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	84.986.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	44.986.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						176.074.900,00							101.074.900,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	176.074.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	101.074.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						*193.900.000,00*							*145.699.900,00*	
			Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	100%	100%	100%	193.900.000,00						100%	145.699.900,00	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						193.900.000,00					Aparatur		145.699.900,00	
		Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan						193.900.000,00					Aparatur		145.699.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.759.000,00						1 Laporan	29.761.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	104.143.000,00						1 Laporan	46.188.000,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59.998.000,00						1 Laporan	69.750.900,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						29.759.000,00							29.761.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	29.759.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	29.761.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						104.143.000,00							46.188.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	104.143.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	46.188.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						59.998.000,00							69.750.900,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	59.998.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	69.750.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
2,	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						13.747.003.800,00							12.010.835.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah						*420.000.000,00*							*427.526.500,00*	
			Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama	100%	100%	100%	100%	420.000.000,00						100%	427.526.500,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						405.000.000,00					Aparatur		409.061.500,00	
		Terlayaninya Administrasi Tata Pemerintahan						405.000.000,00					Aparatur		409.061.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	270.000.000,00						1 Dokumen	270.411.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	17.831.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	120.000.000,00						4 Dokumen	120.818.600,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						270.000.000,00							270.411.100,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	270.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	270.411.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						15.000.000,00							17.831.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	17.831.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						120.000.000,00							120.818.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	20 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Dokumen	120.818.600,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						15.000.000,00					Aparatur		18.465.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah						15.000.000,00					Aparatur		18.465.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	18.465.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						15.000.000,00							18.465.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	18.465.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat						*12.928.434.800,00*							*11.166.128.600,00*	
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	12.928.434.800,00						100%	11.166.128.600,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						12.928.434.800,00					Aparatur		11.166.128.600,00	
		Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						12.928.434.800,00					Aparatur		11.166.128.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.738.360.000,00						1 Dokumen	10.750.054.980,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.074.800,00						1 Dokumen	22.798.320,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	393.275.300,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						12.738.360.000,00							10.750.054.980,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	12.738.360.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	10.750.054.980,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						40.074.800,00							22.798.320,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.074.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	22.798.320,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						150.000.000,00							393.275.300,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	393.275.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah						*398.569.000,00*							*417.179.900,00*	
			Indeks Reformasi Hukum	97,89	96,45	97,05	97,06	398.569.000,00						97,01	417.179.900,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						398.569.000,00					Aparatur		417.179.900,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						398.569.000,00					Aparatur	6 Dokumen	417.179.900,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	935 Dokumen	100.000.000,00								
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 Kasus	11 Kasus	11 Kasus	11 Kasus	265.623.000,00								
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	10 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	32.946.000,00								
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						100.000.000,00							137.610.900,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	935 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Dokumen	137.610.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						265.623.000,00							244.623.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	55 Kasus	11 Kasus	11 Kasus	11 Kasus	265.623.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Kasus	244.623.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						32.946.000,00							34.946.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	10 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	32.946.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	34.946.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3,	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						658.437.200,00							431.655.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam						*276.092.600,00*							*273.553.800,00*	
			Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	5,44	5,33	5,35	5,38	276.092.600,00						5,40	273.553.800,00	
			Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	5,98	5,87	5,89	5,92							5,94		
			Retrun On Asset (ROA) BUMD	7,04	4,94	5,36	5,78							6,20		
			Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	100%							100%		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						110.592.600,00					Aparatur		107.772.600,00	
		Terlaksananya Kebijakan Perekonomian						110.592.600,00					Aparatur	5 Dokumen	107.772.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	54.254.700,00						2 Dokumen	54.254.700,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.603.800,00						1 Laporan	13.783.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.378.600,00						1 Dokumen	21.378.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.355.500,00						1 Dokumen	14.355.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	4.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						54.254.700,00							54.254.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	10 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	54.254.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	54.254.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						15.603.800,00							13.783.800,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.603.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	13.783.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						21.378.600,00							21.378.600,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21.378.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	21.378.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						14.355.500,00							14.355.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.355.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	14.355.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)						5.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	4 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	4.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						165.500.000,00					Aparatur		165.781.200,00	
		Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						165.500.000,00					Aparatur		165.781.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.281.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00						1 Dokumen	5.500.000,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Purworejo	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						10.000.000,00							10.281.200,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	10.281.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						5.500.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah						*144.690.600,00*							*84.264.300,00*	
			Persentase Perangkat Daerah dengan Capaian Kinerja Sesuai Target	100%	100%	100%	100%	144.690.600,00						100%	84.264.300,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						144.690.600,00					Aparatur		84.264.300,00	
		Terlaksananya Administrasi Pembangunan						144.690.600,00					Aparatur	25 Laporan	84.264.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	25 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	104.690.600,00						5 Laporan	42.133.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100 Laporan	1 Laporan	20 Laporan	5 Laporan	40.000.000,00						20 Laporan	42.131.300,00	
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						104.690.600,00							42.133.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	25 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	104.690.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Laporan	42.133.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						40.000.000,00							42.131.300,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100 Laporan	1 Laporan	20 Laporan	5 Laporan	40.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Laporan	42.131.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Barang dan Jasa						*237.654.000,00*							73.836.900,00	
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	73,50	71,00	72,00	72,50	237.654.000,00						72,50	73.836.900,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						237.654.000,00					Aparatur		73.836.900,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						237.654.000,00					Aparatur	100%	73.836.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00						1 Dokumen	26.670.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00						1 Dokumen	26.165.400,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	110 Orang	1 Dokumen	22 Orang	22 Orang	42.654.000,00						22 Orang	21.000.900,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						135.000.000,00							26.670.600,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	26.670.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						60.000.000,00							26.165.400,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	26.165.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						42.654.000,00							21.000.900,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	110 Orang	1 Dokumen	22 Orang	22 Orang	42.654.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Orang	21.000.900,00	SEKRETARIAT DAERAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

SEKRETARIAT DPRD KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		SEKRETARIAT DPRD						56.273.321.245,00							69.492.690.178,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						56.273.321.245,00							69.492.690.178,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						56.273.321.245,00							69.492.690.178,00	
217.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						37.670.343.595,00							42.421.588.773,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*37.668.443.595,00*							*42.421.588.773,00*	
			Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %		100 %	100 %	37.668.443.595,00						100 %	42.421.588.773,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.627.200,00					-		25.241.489,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.627.200,00					-		25.241.489,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00						1 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	16.827.200,00						22 Dokumen	17.532.176,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	1.900.000,00						24 Laporan	5.209.313,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.827.200,00							17.532.176,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	16.827.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	22 Dokumen	17.532.176,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.900.000,00							5.209.313,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	1.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	24 Laporan	5.209.313,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1.900.000,00							2.500.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	2.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.533.717.600,00					-		4.823.882.723,00	
		Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.533.717.600,00					-		4.823.882.723,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	12.687.129,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	11.507.600,00						44 Laporan	12.270.825,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.522.210.000,00						32 Orang/bulan	4.798.924.769,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.522.210.000,00							4.798.924.769,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.522.210.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	32 Orang/bulan	4.798.924.769,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							12.687.129,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	0 Dokumen	12.687.129,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						11.507.600,00							12.270.825,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	11.507.600,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	44 Laporan	12.270.825,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						469.671.500,00					-		555.392.645,00	
		Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah						469.671.500,00					-		555.392.645,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	9.756.000,00						3 Dokumen	25.097.310,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.810.000,00						12 Laporan	44.993.025,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.345.000,00						12 Laporan	218.086.628,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.400.000,00						1 Paket	76.085.730,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	116.312.300,00						1 Paket	128.234.311,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.433.000,00						1 Paket	25.834.883,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.622.500,00						1 Paket	12.813.806,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	21.992.700,00						1 Paket	24.246.952,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.622.500,00							12.813.806,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	11.622.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Paket	12.813.806,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						21.992.700,00							24.246.952,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	21.992.700,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Paket	24.246.952,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.400.000,00							76.085.730,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Paket	76.085.730,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						23.433.000,00							25.834.883,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.433.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Paket	25.834.883,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						9.756.000,00							25.097.310,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	9.756.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	3 Dokumen	25.097.310,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						116.312.300,00							128.234.311,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	116.312.300,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Paket	128.234.311,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasiltasi Kunjungan Tamu						40.810.000,00							44.993.025,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.810.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	12 Laporan	44.993.025,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						195.345.000,00							218.086.628,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	195.345.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	12 Laporan	218.086.628,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.928.237.567,00					-		2.137.132.526,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.928.237.567,00					-		2.137.132.526,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	370.386.767,00						5 Laporan	403.651.710,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.557.850.800,00						12 Laporan	1.733.480.816,00	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						370.386.767,00							403.651.710,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	370.386.767,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	5 Laporan	403.651.710,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.557.850.800,00							1.733.480.816,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.557.850.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	12 Laporan	1.733.480.816,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						987.375.000,00					-		1.306.521.563,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						987.375.000,00					-		1.306.521.563,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	233.550.000,00						7 Unit	257.488.875,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	465.960.000,00						25 Unit	513.720.900,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		5 Unit	5 Unit	204.850.000,00						5 Unit	225.847.125,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	24.750.000,00						50 Unit	245.227.500,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit		28 Unit	28 Unit	58.265.000,00						28 Unit	64.237.163,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						204.850.000,00							225.847.125,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		5 Unit	5 Unit	204.850.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	5 Unit	225.847.125,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						465.960.000,00							513.720.900,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	465.960.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	25 Unit	513.720.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.750.000,00							245.227.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	24.750.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	50 Unit	245.227.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						233.550.000,00							257.488.875,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	233.550.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	7 Unit	257.488.875,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						58.265.000,00							64.237.163,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit		28 Unit	28 Unit	58.265.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	28 Unit	64.237.163,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						28.421.630.128,00					-		31.027.555.035,00	
		Terlayaninya Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						28.421.630.128,00					-		31.027.555.035,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	27.821.802.128,00						45 Orang/Bulan	30.369.777.781,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	68.400.000,00						45 Orang	71.877.884,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	531.428.000,00						1 Paket	585.899.370,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						27.821.802.128,00							30.369.777.781,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	27.821.802.128,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	45 Orang/Bulan	30.369.777.781,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						531.428.000,00							585.899.370,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	531.428.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Paket	585.899.370,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						68.400.000,00							71.877.884,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	68.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	45 Orang	71.877.884,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						2.309.084.600,00					-		2.545.862.792,00	
		Terlayaninya Administrasi DPRD						2.309.084.600,00					-		2.545.862.792,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	171.748.600,00						1 Laporan	189.361.652,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.137.336.000,00						4 Paket	2.356.501.140,00	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						171.748.600,00							189.361.652,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	171.748.600,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Laporan	189.361.652,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						2.137.336.000,00							2.356.501.140,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.137.336.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	4 Paket	2.356.501.140,00	SEKRETARIAT DPRD
218.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						18.602.977.650,00							27.071.101.405,00	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan						*7.844.814.600,00*							*8.841.453.134,00*	
			1.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %		100 %	100 %	7.844.814.600,00						100 %	8.841.453.134,00	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						514.218.000,00					-		713.861.059,00	
		Terbahasnya Kebijakan Anggaran						514.218.000,00					-		713.861.059,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	241.318.550,00						1 Dokumen	310.695.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	82.036.500,00						1 Dokumen	131.359.016,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	96.644.950,00						1 Dokumen	167.931.698,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.600.000,00						1 Dokumen	14.994.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.618.000,00						1 Dokumen	88.881.345,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						96.644.950,00							167.931.698,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	96.644.950,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	167.931.698,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						80.618.000,00							88.881.345,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.618.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	88.881.345,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						241.318.550,00							310.695.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	241.318.550,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	310.695.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						82.036.500,00							131.359.016,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	82.036.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	131.359.016,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						13.600.000,00							14.994.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	14.994.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						49.431.000,00					-		75.682.216,00	
		Terawasinya Penyelenggaraan Pemerintahan						49.431.000,00					-		75.682.216,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.450.000,00						1 Dokumen	2.701.125,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00						1 Laporan	1.918.350,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00						1 Laporan	1.918.350,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00						1 Laporan	1.792.665,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00						1 Laporan	2.067.188,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.981.000,00						1 Dokumen	65.284.538,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						1.250.000,00							1.918.350,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Laporan	1.918.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						1.250.000,00							1.918.350,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Laporan	1.918.350,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						1.250.000,00							2.067.188,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Laporan	2.067.188,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						1.250.000,00							1.792.665,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Laporan	1.792.665,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						2.450.000,00							2.701.125,00	
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.450.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	2.701.125,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						41.981.000,00							65.284.538,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.981.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	65.284.538,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						7.284.915.600,00					-		8.053.828.209,00	
		Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat						7.284.915.600,00					-		8.053.828.209,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.278.865.600,00						3 Dokumen	8.047.158.084,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00						1 Dokumen	6.670.125,00	
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						6.050.000,00							6.670.125,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.050.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	6.670.125,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						7.278.865.600,00							8.047.158.084,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.278.865.600,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	3 Dokumen	8.047.158.084,00	SEKRETARIAT DPRD
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan						*10.754.413.050,00*							*18.227.729.921,00*	
			1.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun n	100 %		100 %	100 %	10.754.413.050,00						100 %	18.227.729.921,00	
			2.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	10.754.413.050,00						100 Persentase	18.227.729.921,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						1.311.130.000,00					-		2.057.853.678,00	
		Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						1.311.130.000,00					-		2.057.853.678,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	477.050.000,00						15 Dokumen	1.093.098.983,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.610.000,00						1 Dokumen	12.270.825,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	474.870.000,00						5 Dokumen	564.030.180,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	347.600.000,00						5 Dokumen	388.453.690,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						11.610.000,00							12.270.825,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.610.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	12.270.825,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						477.050.000,00							1.093.098.983,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	477.050.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	15 Dokumen	1.093.098.983,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						347.600.000,00							388.453.690,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	347.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	5 Dokumen	388.453.690,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						474.870.000,00							564.030.180,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	474.870.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	5 Dokumen	564.030.180,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						2.649.451.050,00					-		3.614.426.645,00	
		Meningkatnya Kapasitas DPRD						2.649.451.050,00					-		3.614.426.645,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.080.000.000,00						1 Dokumen	1.131.165.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	985.011.850,00						1 Dokumen	1.632.096.585,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.494.000,00						1 Dokumen	2.629.463,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	50 Orang		60 Orang	60 Orang	312.900.000,00						60 Orang	551.913.264,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84 Orang		84 Orang	84 Orang	269.045.200,00						84 Orang	296.622.333,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						1.080.000.000,00							1.131.165.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.080.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	1.131.165.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						312.900.000,00							551.913.264,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	50 Orang		60 Orang	60 Orang	312.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	60 Orang	551.913.264,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						269.045.200,00							296.622.333,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	84 Orang		84 Orang	84 Orang	269.045.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	84 Orang	296.622.333,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						2.494.000,00							2.629.463,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.494.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	2.629.463,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						985.011.850,00							1.632.096.585,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	985.011.850,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	1.632.096.585,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						6.793.832.000,00					-		12.555.449.598,00	
		Terfasilitasinya Tugas DPRD						6.793.832.000,00					-		12.555.449.598,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.060.000,00						1 Dokumen	18.892.440,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.508.672.000,00						1 Dokumen	2.798.284.136,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.267.100.000,00						1 Dokumen	9.738.273.022,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						5.267.100.000,00							9.738.273.022,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.267.100.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	9.738.273.022,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						18.060.000,00							18.892.440,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.060.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	18.892.440,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						1.508.672.000,00							2.798.284.136,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.508.672.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)			Aparatur & Masyarakat	1 Dokumen	2.798.284.136,00	SEKRETARIAT DPRD

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						6.463.704.650,00							6.420.350.799,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.463.704.650,00							6.420.350.799,00	
	5.01	PERENCANAAN						5.613.707.550,00							5.672.394.799,00	
219.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.280.106.550,00							4.604.071.999,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*4.280.106.550,00*							*4.543.289.999,00*	
			1.Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.280.106.550,00						100 %	4.543.289.999,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.507.600,00					Aparatur, Masyarakat		13.729.500,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.507.600,00					Aparatur, Masyarakat		13.729.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	836.400,00						1 Dokumen	4.818.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	21.864.800,00						22 Dokumen	7.033.900,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	4.806.400,00						22 Laporan	1.876.800,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						21.864.800,00							7.033.900,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	21.864.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	7.033.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.806.400,00							1.876.800,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	0 Laporan	4.806.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	1.876.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						836.400,00							4.818.800,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	836.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	4.818.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.545.442.000,00					-		3.939.228.108,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.545.442.000,00					-		3.939.228.108,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.800.000,00						44 Laporan	1.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		29 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.543.642.000,00						27 Orang/bulan	3.937.428.108,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.543.642.000,00							3.937.428.108,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		29 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.543.642.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				27 Orang/bulan	3.937.428.108,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.800.000,00							1.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.800.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	1.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.200.000,00					-		4.028.200,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.200.000,00					-		4.028.200,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.200.000,00						17 Dokumen	4.028.200,00	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						3.200.000,00							4.028.200,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.200.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	4.028.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						187.298.600,00					-		135.758.400,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						187.298.600,00					-		135.758.400,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.140.500,00						1 Dokumen	6.867.700,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00						1 Laporan	3.975.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	109.362.000,00						1 Laporan	60.782.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	35.574.000,00						12 Paket	38.220.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	12.940.300,00						4 Paket	12.530.400,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.928.500,00						1 Paket	6.770.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.184.200,00						4 Paket	5.160.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.369.100,00						4 Paket	1.453.100,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.184.200,00							5.160.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	5.184.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	5.160.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.369.100,00							1.453.100,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	8.369.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	1.453.100,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.574.000,00							38.220.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	35.574.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	38.220.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.928.500,00							6.770.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.928.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	6.770.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						12.940.300,00							12.530.400,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	12.940.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	12.530.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.800.000,00							3.975.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	3.975.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						109.362.000,00							60.782.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	109.362.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	60.782.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.140.500,00							6.867.700,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.140.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	6.867.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	60 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	10 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	-				0 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						173.623.350,00					-		170.209.791,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						173.623.350,00					-		170.209.791,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	109.951.350,00						12 Laporan	109.427.791,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.672.000,00						12 Laporan	60.782.000,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						109.951.350,00							109.427.791,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	109.951.350,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	109.427.791,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						63.672.000,00							60.782.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.672.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	60.782.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						343.035.000,00					-		341.118.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						343.035.000,00					-		341.118.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	103.454.000,00						1 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	146.280.000,00						4 Unit	143.358.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	39.950.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.060.000,00						1 Unit	37.810.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit		13 Unit	13 Unit	19.281.000,00						13 Unit	20.000.000,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							39.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	39.950.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						146.280.000,00							143.358.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	9 Unit	146.280.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Unit	143.358.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.060.000,00							37.810.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	42 Unit	30.060.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	37.810.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						103.454.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	103.454.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						19.281.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit		13 Unit	30 Unit	19.281.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				13 Unit	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
220.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						519.000.000,00							528.697.800,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah						*519.000.000,00*							*528.697.800,00*	
			1.Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Daerah	100 %		100 %	100 %	519.000.000,00						100 %	528.697.800,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						312.000.000,00					Masyarakat		317.780.800,00	
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas						312.000.000,00					Masyarakat		317.780.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	241.000.000,00						2 Dokumen	246.130.800,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	71.000.000,00						2 Dokumen	71.650.000,00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						71.000.000,00							71.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	71.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	71.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						241.000.000,00							246.130.800,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	241.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	246.130.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						67.000.000,00					-		67.810.000,00	
		Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang valid dan termutakhirkan						67.000.000,00					-		67.810.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	23.000.000,00						3 Dokumen	23.704.700,00	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	86 Orang		86 Orang	86 Orang	44.000.000,00						86 Orang	44.105.300,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						23.000.000,00							23.704.700,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	23.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Dokumen	23.704.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						44.000.000,00							44.105.300,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	86 Orang		86 Orang	86 Orang	44.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				86 Orang	44.105.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						140.000.000,00					-		143.107.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelaporan pembangunan daerah						140.000.000,00					-		143.107.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	140.000.000,00						14 Laporan	143.107.000,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						140.000.000,00							143.107.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	16 Laporan		14 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Laporan	143.107.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
221.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						814.601.000,00							539.625.000,00	
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia						*427.000.000,00*							*269.778.600,00*	
			1."Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia"	100 %		100 %	100 %	427.000.000,00						100 %	269.778.600,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						427.000.000,00					-		269.778.600,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.						427.000.000,00					-		269.778.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	315.367.200,00						1 Laporan	201.972.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	111.632.800,00						1 Laporan	67.806.200,00	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						111.632.800,00							67.806.200,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	111.632.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	67.806.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						315.367.200,00							201.972.400,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	315.367.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	201.972.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan						*387.601.000,00*							*269.846.400,00*	
			1.Persentase Kualitas dan Pemanfaatan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan	100 %		100 %	100 %	387.601.000,00						100 %	269.846.400,00	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						112.601.000,00					-		112.601.400,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian SDA						112.601.000,00					-		112.601.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	69.520.900,00						1 Laporan	67.755.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.080.100,00						1 Laporan	44.845.600,00	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						69.520.900,00							67.755.800,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	69.520.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	67.755.800,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						43.080.100,00							44.845.600,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.080.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	44.845.600,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						275.000.000,00					-		157.245.000,00	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur kewilayahan						275.000.000,00					-		157.245.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	215.000.000,00						1 Laporan	96.780.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00						1 Laporan	60.465.000,00	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						215.000.000,00							96.780.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	215.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	96.780.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						60.000.000,00							60.465.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	60.465.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						849.997.100,00							747.956.000,00	
222.	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						849.997.100,00							747.956.000,00	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil riset, inovasi, dan HKI dalam mendukung penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah						*849.997.100,00*							*747.956.000,00*	
			1.Persentase hasil riset yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	75 %		45 %	50 %	849.997.100,00						60 %	747.956.000,00	
			2.Tingkat Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	3.36 %		3.16 %	3.21 %	849.997.100,00						3.26 %	747.956.000,00	
			3.Jumlah inovasi yang dimiliki daerah	295 Inovasi		215 Inovasi	235 Inovasi	849.997.100,00						255 Inovasi	747.956.000,00	
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						557.851.500,00					-		493.030.000,00	
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						557.851.500,00					-		493.030.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.905.000,00						1 Laporan	24.124.000,00	
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	7 Naskah		7 Naskah	7 Naskah	532.946.500,00						7 Naskah	468.906.000,00	
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						532.946.500,00							468.906.000,00	
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	7 Naskah		7 Naskah	7 Naskah	532.946.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Naskah	468.906.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						24.905.000,00							24.124.000,00	
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.905.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	24.124.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						292.145.600,00					-		254.926.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Layanan Sub Sistem Inovasi Daerah						292.145.600,00					-		254.926.000,00	
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	2 Pelatihan		2 Pelatihan	2 Pelatihan	23.085.200,00						2 Pelatihan	23.600.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	183.190.000,00						1 Laporan	145.014.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.295.200,00						1 Laporan	26.114.000,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.545.200,00						1 Laporan	16.174.000,00	
			Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	44.030.000,00						1 Sistem Informasi	44.024.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						25.295.200,00							26.114.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.295.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	26.114.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.						16.545.200,00							16.174.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.545.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	16.174.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						183.190.000,00							145.014.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	183.190.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	145.014.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						44.030.000,00							44.024.000,00	
		Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	44.030.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Sistem Informasi	44.024.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02.0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi						23.085.200,00							23.600.000,00	
		Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	2 Pelatihan		2 Pelatihan	2 Pelatihan	23.085.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Pelatihan	23.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH						555.989.350.850,00							596.872.315.387,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						555.989.350.850,00							596.872.315.387,00	
	5.02	KEUANGAN						555.989.350.850,00							596.872.315.387,00	
223.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						20.497.331.000,00							18.442.898.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*20.497.331.000,00*							*18.442.898.000,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah													
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.004.000,00					Aparatur		21.666.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.004.000,00					Aparatur		21.666.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	10.980.200,00						22 Dokumen	14.599.085,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	6.023.800,00						22 Laporan	7.066.915,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.980.200,00							14.599.085,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	10.980.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	14.599.085,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.023.800,00							7.066.915,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	6.023.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	7.066.915,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.137.632.200,00					Aparatur		16.934.302.375,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.137.632.200,00					Aparatur		16.934.302.375,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	7.211.200,00						44 Laporan	12.267.187,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan		96 Orang/bulan	96 Orang/bulan	19.130.421.000,00						96 Orang/bulan	16.922.035.188,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.130.421.000,00							16.922.035.188,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	96 Orang/bulan		96 Orang/bulan	96 Orang/bulan	19.130.421.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				96 Orang/bulan	16.922.035.188,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.211.200,00							12.267.187,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	7.211.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	12.267.187,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					Aparatur		990.486,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					Aparatur		990.486,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	0,00						11 Laporan	990.486,00	
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							990.486,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	990.486,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.320.400,00					Aparatur		246.527.821,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						196.320.400,00					Aparatur		246.527.821,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	1.468.530,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.500,00						1 Dokumen	14.646.051,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.463.000,00						1 Laporan	52.948.665,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.002.000,00						1 Paket	120.342.065,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.994.200,00						1 Paket	9.573.338,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.000.000,00						1 Paket	13.061.979,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.314.700,00						1 Paket	9.641.914,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.547.000,00						1 Paket	24.845.279,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.314.700,00							9.641.914,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.314.700,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	9.641.914,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.547.000,00							24.845.279,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.547.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	24.845.279,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.002.000,00							120.342.065,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.002.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	120.342.065,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.000.000,00							13.061.979,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	13.061.979,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							1.468.530,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	1.468.530,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.994.200,00							9.573.338,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.994.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	9.573.338,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						42.463.000,00							52.948.665,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.463.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	52.948.665,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						9.999.500,00							14.646.051,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	14.646.051,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						790.907.400,00					Aparatur		830.370.587,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						790.907.400,00					Aparatur		830.370.587,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	305.586.600,00						12 Laporan	336.909.227,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	485.320.800,00						12 Laporan	493.461.360,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						305.586.600,00							336.909.227,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	305.586.600,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	336.909.227,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						485.320.800,00							493.461.360,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	485.320.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	493.461.360,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						355.467.000,00					Aparatur		409.040.731,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						355.467.000,00					Aparatur		409.040.731,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.760.000,00						2 Unit	25.748.888,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit		47 Unit	47 Unit	231.930.000,00						47 Unit	257.599.125,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	44.044.875,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		44 Unit	44 Unit	21.900.000,00						44 Unit	32.193.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit		42 Unit	42 Unit	36.917.000,00						42 Unit	49.454.843,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							44.044.875,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	44.044.875,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						231.930.000,00							257.599.125,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit		47 Unit	47 Unit	231.930.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				47 Unit	257.599.125,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.900.000,00							32.193.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		44 Unit	44 Unit	21.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Unit	32.193.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.760.000,00							25.748.888,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	20.760.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	25.748.888,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						36.917.000,00							49.454.843,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit		42 Unit	42 Unit	36.917.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				42 Unit	49.454.843,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	-		-	100 %	0,00						-	0,00	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Aparatur		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Aparatur		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	-				-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	-				-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	-				-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
224.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						531.294.205.548,00							573.855.052.387,00	
		Meningkatnya tata kelola akutansi daerah						*182.200.000,00*							*271.173.216,00*	
			1.Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %		100 %	100 %	182.200.000,00						100 %	271.173.216,00	
			2.Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 %		100 %	100 %	182.200.000,00						100 %	271.173.216,00	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						172.200.000,00					Aparatur		256.204.573,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						172.200.000,00					Aparatur		256.204.573,00	
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	29 Lembaga		29 Lembaga	29 Lembaga	16.951.500,00						29 Lembaga	22.531.793,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.968.000,00						1 Dokumen	3.155.024,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.020.000,00						1 Dokumen	26.983.136,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	18.068.500,00						15 Dokumen	8.621.550,00	
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.012.000,00						1 Dokumen	6.718.194,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	11.700.000,00						18 Laporan	18.237.445,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	42 Orang		42 Orang	42 Orang	27.480.000,00						42 Orang	39.617.235,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	82.000.000,00						4 Dokumen	109.625.985,00	
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.714.211,00	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						18.068.500,00							8.621.550,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	18.068.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				15 Dokumen	8.621.550,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						11.700.000,00							18.237.445,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	11.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Laporan	18.237.445,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						82.000.000,00								109.625.985,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	82.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	109.625.985,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						4.012.000,00								6.718.194,00	
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.012.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	6.718.194,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						10.020.000,00								26.983.136,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.020.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	26.983.136,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						1.968.000,00								3.155.024,00	
		Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.968.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	3.155.024,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						0,00								20.714.211,00	
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	20.714.211,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						27.480.000,00								39.617.235,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	42 Orang		42 Orang	42 Orang	27.480.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42 Orang	39.617.235,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota						16.951.500,00								22.531.793,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	29 Lembaga		29 Lembaga	29 Lembaga	16.951.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				29 Lembaga	22.531.793,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						10.000.000,00						Aparatur		14.968.643,00	
		Pelaksanaan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						10.000.000,00						Aparatur		14.968.643,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00							1 Dokumen	14.968.643,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						10.000.000,00							14.968.643,00	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	14.968.643,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Meningkatnya tata kelola anggaran daerah						*530.888.040.548,00*							*573.302.335.289,00*	
			1.Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD	100%		100%	100%	530.888.040.548,00						100 %	573.302.335.289,00	
			2.Persentase Realisasi Bantuan Keuangan terhadap Anggaran Bantuan Keuangan	100%		100%	100%	530.888.040.548,00						100 %	573.302.335.289,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						481.500.000,00					Aparatur		503.993.653,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						481.500.000,00					Aparatur		503.993.653,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	61.102.424,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	36.149.873,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	262.000.000,00						3 Dokumen	207.823.565,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	219.500.000,00						3 Dokumen	198.917.791,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						0,00							0,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						0,00							61.102.424,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	61.102.424,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						262.000.000,00							207.823.565,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	262.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	207.823.565,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						219.500.000,00							198.917.791,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	219.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	198.917.791,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						0,00							36.149.873,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	36.149.873,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						530.406.540.548,00					Aparatur dan Masyarakat		572.798.341.636,00	
		Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						530.406.540.548,00					Aparatur dan Masyarakat		572.798.341.636,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	501.806.540.548,00						1 Laporan	543.482.091.636,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.100.000.000,00						1 Laporan	24.255.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000,00						1 Laporan	4.961.250.000,00	
	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah						0,00							100.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						501.806.540.548,00							543.482.091.636,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	501.806.540.548,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	543.482.091.636,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						3.000.000.000,00							4.961.250.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	4.961.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						23.100.000.000,00							24.255.000.000,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	24.255.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Meningkatnya tata kelola Perbendaharaan daerah						*223.965.000,00*							*281.543.882,00*	
			1.Tertib Pengelolaan Kas Daerah	100%		100%	100%	223.965.000,00						100 %	281.543.882,00	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						223.965.000,00					Aparatur		281.543.882,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						223.965.000,00					Aparatur		281.543.882,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	27.005.500,00						24 Dokumen	28.371.735,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	26.926.000,00						18 Dokumen	31.231.620,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.600.000,00						4 Dokumen	10.396.575,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	36.302.000,00						4 Dokumen	38.243.520,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	7.891.500,00						16 Dokumen	8.328.065,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00						12 Dokumen	71.103.202,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	42 Laporan		42 Laporan	42 Laporan	14.040.000,00						42 Laporan	14.815.395,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	84 Orang		84 Orang	84 Orang	18.000.000,00						84 Orang	27.950.580,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.200.000,00						1 Dokumen	51.103.190,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						27.005.500,00							28.371.735,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	27.005.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24 Dokumen	28.371.735,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						7.891.500,00							8.328.065,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	7.891.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				16 Dokumen	8.328.065,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						26.926.000,00							31.231.620,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	26.926.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				18 Dokumen	31.231.620,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						9.600.000,00							10.396.575,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	10.396.575,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						14.040.000,00							14.815.395,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	42 Laporan		42 Laporan	42 Laporan	14.040.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				42 Laporan	14.815.395,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						36.302.000,00							38.243.520,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	36.302.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				4 Dokumen	38.243.520,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						50.000.000,00							71.103.202,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	71.103.202,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						34.200.000,00							51.103.190,00	
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	51.103.190,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						18.000.000,00							27.950.580,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	84 Orang		84 Orang	84 Orang	18.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				84 Orang	27.950.580,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		-						530.406.540.548,00					Aparatur dan Masyarakat		572.798.341.636,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-		-	-	2.500.000.000,00						-	0,00	
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						2.500.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-		-	1 Laporan	2.500.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
225.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						560.499.038,00							641.291.000,00	
		Meningkatnya tata kelola aset daerah						*555.999.038,00*							*641.291.000,00*	
			1.Persentase Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	*100%*		*100%*	*100%*	555.999.038,00						100 %	641.291.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						560.499.038,00					Aparatur dan Masyarakat		641.291.000,00	
		Terlaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah						560.499.038,00					Aparatur dan Masyarakat		641.291.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.800.000,00						5 Dokumen	4.815.600,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	17.510.800,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.700.000,00						1 Laporan	4.069.900,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00						1 Laporan	104.982.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	324.999.800,00						1 Laporan	343.418.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.700.000,00						2 Laporan	5.027.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	44.999.900,00						1 Laporan	52.284.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.800.000,00						2 Laporan	2.945.700,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	33.999.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang		40 Orang	40 Orang	2.000.000,00						40 Orang	2.477.900,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.499.600,00						1 Dokumen	5.603.800,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.999.738,00						1 Dokumen	64.154.400,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						54.999.738,00							64.154.400,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.999.738,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	64.154.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						4.499.600,00							5.603.800,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.499.600,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	5.603.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						0,00							17.510.800,00	
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	17.510.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						30.000.000,00							33.999.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	33.999.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						90.000.000,00							104.982.400,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	104.982.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						324.999.800,00							343.418.800,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	324.999.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	343.418.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						44.999.900,00							52.284.400,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	44.999.900,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	52.284.400,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						2.700.000,00							5.027.800,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	5.027.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						1.800.000,00							4.815.600,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Dokumen	4.815.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						1.800.000,00							2.945.700,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Laporan	2.945.700,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						2.700.000,00							4.069.900,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	4.069.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						2.000.000,00							2.477.900,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang		40 Orang	40 Orang	2.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				40 Orang	2.477.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
226.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						3.637.315.264,00							3.933.074.000,00	
		Meningkatnya tata kelola pajak daerah						*3.637.315.264,00*							*3.933.074.000,00*	
			1.Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100%		100%	100%	3.465.710.064,00						100 %	3.745.188.500,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						3.637.315.264,00					Aparatur dan Masyarakat		3.933.074.000,00	
		Telaksananya pengelolaan pajak daerah						3.637.315.264,00					Aparatur dan Masyarakat		3.933.074.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.955.434.400,00						12 Dokumen	2.046.839.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	94.906.000,00						2 Dokumen	59.003.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.370.100,00						1 Dokumen	19.114.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1004100 Dokumen		1004100 Dokumen	1004100 Dokumen	163.553.500,00						1004100 Dokumen	176.547.600,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.686.200,00						1 Dokumen	12.578.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	270.000.000,00						1 Laporan	319.322.900,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	480.000.000,00						1 Laporan	556.337.800,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	142.458.400,00						1 Layanan	111.702.100,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	75000 Obyek Pajak		75000 Obyek Pajak	75000 Obyek Pajak	20.000.000,00						75000 Obyek Pajak	33.908.500,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit		3 Unit	3 Unit	309.301.464,00						3 Unit	409.834.300,00	
		Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah						3.637.315.264,00					Aparatur dan Masyarakat		3.933.074.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.955.434.400,00						12 Dokumen	2.046.839.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	94.906.000,00						2 Dokumen	59.003.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.370.100,00						1 Dokumen	19.114.500,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1004100 Dokumen		1004100 Dokumen	1004100 Dokumen	163.553.500,00						1004100 Dokumen	176.547.600,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.686.200,00						1 Dokumen	12.578.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	270.000.000,00						1 Laporan	319.322.900,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	480.000.000,00						1 Laporan	556.337.800,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	142.458.400,00						1 Layanan	111.702.100,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	75000 Obyek Pajak		75000 Obyek Pajak	75000 Obyek Pajak	20.000.000,00						75000 Obyek Pajak	33.908.500,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit		3 Unit	3 Unit	309.301.464,00						3 Unit	409.834.300,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						9.686.200,00							12.578.500,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.686.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	12.578.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						480.000.000,00							556.337.800,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	480.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	556.337.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						309.301.464,00							409.834.300,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	3 Unit		3 Unit	3 Unit	309.301.464,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Unit	409.834.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						270.000.000,00							319.322.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	270.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	319.322.900,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						20.000.000,00							33.908.500,00	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	75000 Obyek Pajak		75000 Obyek Pajak	75000 Obyek Pajak	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				75000 Obyek Pajak	33.908.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						163.553.500,00							176.547.600,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1004100 Dokumen		1004100 Dokumen	1004100 Dokumen	163.553.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1004100 Dokumen	176.547.600,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						142.458.400,00							111.702.100,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	142.458.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Layanan	111.702.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						1.955.434.400,00							2.046.839.300,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.955.434.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Dokumen	2.046.839.300,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						20.370.100,00							19.114.500,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.370.100,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	19.114.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						94.906.000,00							59.003.000,00	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	94.906.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	59.003.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
		Meningkatnya tata kelola pendapatan daerah						*3.637.315.264,00*							*3.933.074.000,00*	
			1.Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	100%		100%	100%	171.605.200,00						100 %	187.885.500,00	
		Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah						3.637.315.264,00					Aparatur dan Masyarakat		3.933.074.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	99.605.200,00						30 Laporan	98.170.500,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	72.000.000,00						10 Laporan	89.715.000,00	
		Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah						3.637.315.264,00					Aparatur dan Masyarakat		3.933.074.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	99.605.200,00						30 Laporan	98.170.500,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	72.000.000,00						10 Laporan	89.715.000,00	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						99.605.200,00							98.170.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	99.605.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				30 Laporan	98.170.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						72.000.000,00							89.715.000,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	72.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10 Laporan	89.715.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						6.163.348.944,00							6.079.615.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.163.348.944,00							6.079.615.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						4.775.225.444,00							5.029.225.000,00	
227.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.192.169.400,00							4.085.413.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*4.192.169.400,00*							*4.085.413.000,00*	
			1.Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.192.169.400,00						100 %	4.085.413.000,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29.826.300,00					-		12.570.569,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29.826.300,00					-		12.570.569,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.396.600,00						1 Dokumen	1.890.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		24 Dokumen	22 Dokumen	15.879.400,00						22 Dokumen	8.110.862,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	12.550.300,00						44 Laporan	2.569.707,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.879.400,00							8.110.862,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		24 Dokumen	22 Dokumen	15.879.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	8.110.862,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.550.300,00							2.569.707,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44 Laporan		44 Laporan	22 Laporan	12.550.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	2.569.707,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1.396.600,00							1.890.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.396.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.890.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.687.376.600,00					-		3.605.021.843,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.687.376.600,00					-		3.605.021.843,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	3.499.600,00						22 Laporan	4.851.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.683.877.000,00						34 Orang/bulan	3.600.170.843,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.683.877.000,00							3.600.170.843,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan		34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.683.877.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				34 Orang/bulan	3.600.170.843,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.499.600,00							4.851.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan		22 Laporan	44 Laporan	3.499.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	4.851.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.736.000,00					-		1.774.474,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.736.000,00					-		1.774.474,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.736.000,00						1 Dokumen	1.774.474,00	
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2.736.000,00							1.774.474,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.736.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.774.474,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						106.538.600,00					-		95.035.114,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						106.538.600,00					-		95.035.114,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.732.000,00						1 Dokumen	2.526.930,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.420.400,00						4 Dokumen	4.812.964,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	51.610.000,00						12 Laporan	20.876.058,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.076.200,00						12 Paket	42.160.537,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.700.000,00						2 Paket	5.209.974,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	6.970.997,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.400.000,00						2 Paket	4.760.154,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.600.000,00						4 Paket	7.717.500,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.400.000,00							4.760.154,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.400.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	4.760.154,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.600.000,00							7.717.500,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	7.717.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.076.200,00							42.160.537,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.076.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	42.160.537,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							6.970.997,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	6.970.997,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.732.000,00							2.526.930,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.732.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.526.930,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						3.700.000,00							5.209.974,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.700.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	5.209.974,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						51.610.000,00							20.876.058,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	51.610.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	20.876.058,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.420.400,00							4.812.964,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.420.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Dokumen	4.812.964,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						182.571.900,00					-		154.221.464,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						182.571.900,00					-		154.221.464,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	117.440.000,00						12 Laporan	96.935.350,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	65.131.900,00						12 Laporan	57.286.114,00	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						117.440.000,00							96.935.350,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	117.440.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	96.935.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						65.131.900,00							57.286.114,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	65.131.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	57.286.114,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						183.120.000,00					-		216.789.536,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						183.120.000,00					-		216.789.536,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	66.420.000,00						1 Unit	79.199.741,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	43.490.000,00						9 Unit	51.519.825,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	44.044.875,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit		75 Unit	75 Unit	1.680.000,00						75 Unit	2.381.400,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit		29 Unit	29 Unit	17.770.000,00						29 Unit	25.269.300,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit		13 Unit	13 Unit	6.710.000,00						13 Unit	10.087.875,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	3.090.000,00						2 Unit	4.286.520,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							44.044.875,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	44.044.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						43.490.000,00							51.519.825,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	43.490.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				9 Unit	51.519.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.680.000,00							2.381.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit		75 Unit	75 Unit	1.680.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				75 Unit	2.381.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.770.000,00							25.269.300,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit		29 Unit	29 Unit	17.770.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				29 Unit	25.269.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						66.420.000,00							79.199.741,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	66.420.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	79.199.741,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.710.000,00							10.087.875,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit		13 Unit	13 Unit	6.710.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				13 Unit	10.087.875,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.090.000,00							4.286.520,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	3.090.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	4.286.520,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
228.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						583.056.044,00							943.812.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian						*409.852.000,00*							*615.767.000,00*	
			1.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Kepegawaian	100 %		100 %	100 %	409.852.000,00						100 %	615.767.000,00	
			2.Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100 %		100 %	100 %	409.852.000,00						100 %	615.767.000,00	
			3.Persentase ASN Berkinerja Baik	99 %		97 %	97.5 %	409.852.000,00						98 %	615.767.000,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						179.052.000,00					-		301.843.950,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						179.052.000,00					-		301.843.950,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.000.000,00						12 Dokumen	21.219.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	50.921.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	123.052.000,00						1 Dokumen	229.703.750,00	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						123.052.000,00							229.703.750,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	123.052.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	229.703.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian						16.000.000,00							21.219.200,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	21.219.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						40.000.000,00							50.921.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	50.921.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						138.300.000,00					-		195.996.750,00	
		Terlayaninya Mutasi dan Promosi ASN						138.300.000,00					-		195.996.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00						1 Dokumen	150.669.650,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000,00						1 Dokumen	1.696.800,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen		800 Dokumen	800 Dokumen	32.000.000,00						800 Dokumen	43.630.300,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						105.000.000,00							150.669.650,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	150.669.650,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						32.000.000,00							43.630.300,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen		800 Dokumen	800 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				800 Dokumen	43.630.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						1.300.000,00							1.696.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.300.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.696.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						92.500.000,00					-		117.926.300,00	
		Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						92.500.000,00					-		117.926.300,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	37.500.000,00						6 Orang	46.761.100,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	35.980.000,00						30 Orang	35.487.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.020.000,00						1 Dokumen	35.677.600,00	
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						19.020.000,00							35.677.600,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.020.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	35.677.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						37.500.000,00							46.761.100,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	37.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Orang	46.761.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						35.980.000,00							35.487.600,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	35.980.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 Orang	35.487.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir dan kompetensi ASN						*158.204.044,00*							*328.045.000,00*	
			1.Persentase Pegawai yang Dipetakan Kompetensinya	100 %		100 %	100 %	158.204.044,00						100 %	328.045.000,00	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						173.204.044,00					-		328.045.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN						173.204.044,00					-		328.045.000,00	
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	250 Orang		250 Orang	250 Orang	15.000.000,00						250 Orang	18.940.500,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	15.000.000,00						150 Orang	20.150.900,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.204.044,00						1 Dokumen	288.953.600,00	
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						143.204.044,00							288.953.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.204.044,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	288.953.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						15.000.000,00							20.150.900,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	15.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				150 Orang	20.150.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						15.000.000,00							18.940.500,00	
		Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	250 Orang		250 Orang	250 Orang	15.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				250 Orang	18.940.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.388.123.500,00							1.050.390.000,00	
229.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						1.388.123.500,00							1.050.390.000,00	
		Meningkatnya layanan pengembangan komperensi dasar, kader, manajerial, dan fungsional						*1.388.123.500,00*							*1.050.390.000,00*	
			1.Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	100 %		100 %	100 %	1.388.123.500,00						100 %	1.050.390.000,00	
			2.Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manejerial, dan Fungsional	100 %		100 %	100 %	1.388.123.500,00						100 %	1.050.390.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						1.102.123.500,00					-		788.923.500,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis						1.102.123.500,00					-		788.923.500,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	700 Orang		700 Orang	700 Orang	1.102.123.500,00						700 Orang	788.923.500,00	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						1.102.123.500,00							788.923.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	700 Orang		700 Orang	700 Orang	1.102.123.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				700 Orang	788.923.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						221.000.000,00					-		196.466.500,00	
		Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						221.000.000,00					-		196.466.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	221.000.000,00						1 Laporan	196.466.500,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						221.000.000,00							196.466.500,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	221.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	196.466.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.03	Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri						65.000.000,00					-		65.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri						65.000.000,00					-		65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	10 Orang		10 Orang	10 Orang	65.000.000,00						10 Orang	65.000.000,00	
	5.04.02.2.03.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	10 Orang		10 Orang	10 Orang	65.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Orang	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

INSPEKTORAT DAERAH KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		INSPEKTORAT DAERAH						15.000.050.000,00							16.789.509.530,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						15.000.050.000,00							16.789.509.530,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						15.000.050.000,00							16.789.509.530,00	
230.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.192.212.100,00							14.852.154.800,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*13.192.212.100,00*							*14.852.154.800,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	13.192.212.100,00						100 %	14.852.154.800,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.653.700,00					-		21.619.950,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.653.700,00					-		21.619.950,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	525.000,00						1 Dokumen	577.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	16.692.700,00						22 Dokumen	18.361.970,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	2.436.000,00						22 Laporan	2.680.480,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.692.700,00							18.361.970,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	24 Dokumen	16.692.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	18.361.970,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.436.000,00							2.680.480,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	2.436.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	2.680.480,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						525.000,00							577.500,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	525.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	577.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.674.751.100,00					-		11.019.437.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.674.751.100,00					-		11.019.437.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.783.100,00						44 Laporan	1.961.410,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	9.672.968.000,00						63 Orang/bulan	11.017.475.590,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.672.968.000,00							11.017.475.590,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	9.672.968.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				63 Orang/bulan	11.017.475.590,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.783.100,00							1.961.410,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.783.100,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	1.961.410,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						912.600,00					-		6.932.640,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						912.600,00					-		6.932.640,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	912.600,00						11 Laporan	6.932.640,00	
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						912.600,00							6.932.640,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	912.600,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	6.932.640,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.850.571.300,00					-		2.047.858.700,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.850.571.300,00					-		2.047.858.700,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	19.054.600,00						17 Dokumen	20.960.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang		63 Orang	63 Orang	20.060.000,00						63 Orang	22.057.860,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang		63 Orang	63 Orang	17.335.000,00						63 Orang	19.079.830,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63 Orang		63 Orang	63 Orang	1.794.121.700,00						63 Orang	1.985.761.010,00	
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						19.054.600,00							20.960.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	19.054.600,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	20.960.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1.794.121.700,00							1.985.761.010,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63 Orang		63 Orang	63 Orang	1.794.121.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				63 Orang	1.985.761.010,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						17.335.000,00							19.079.830,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang		63 Orang	63 Orang	17.335.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				63 Orang	19.079.830,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						20.060.000,00							22.057.860,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Orang		63 Orang	63 Orang	20.060.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				63 Orang	22.057.860,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						375.265.300,00					-		439.458.910,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						375.265.300,00					-		439.458.910,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	39.852.000,00						2 Dokumen	43.837.200,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.299.800,00						2 Dokumen	25.837.020,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.888.000,00						12 Laporan	23.320.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	177.183.000,00						12 Laporan	194.901.300,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	49.631.400,00						12 Paket	54.594.540,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	10.312.900,00						27 Paket	17.507.270,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	27.471.800,00						5 Paket	34.174.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.292.700,00						2 Paket	11.334.400,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket		26 Paket	27 Paket	25.333.700,00						26 Paket	33.952.380,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.292.700,00							11.334.400,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.292.700,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	11.334.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						25.333.700,00							33.952.380,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	26 Paket		26 Paket	26 Paket	25.333.700,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				26 Paket	33.952.380,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						49.631.400,00							54.594.540,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	49.631.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	54.594.540,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						27.471.800,00							34.174.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	27.471.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	34.174.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.312.900,00							17.507.270,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	10.312.900,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				27 Paket	17.507.270,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.888.000,00							23.320.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.888.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	23.320.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						177.183.000,00							194.901.300,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	177.183.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	194.901.300,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						19.299.800,00							25.837.020,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.299.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	25.837.020,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						39.852.000,00							43.837.200,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	39.852.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	43.837.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						418.230.000,00					-		426.124.800,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						418.230.000,00					-		426.124.800,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		26 Unit	2 Unit	14.728.000,00						3 Unit	13.543.200,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		15 Unit	12 Unit	387.572.000,00						10 Unit	395.602.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	15.930.000,00						1 Unit	16.978.700,00	
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						14.728.000,00							13.543.200,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		26 Unit	7 Unit	14.728.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Unit	13.543.200,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						387.572.000,00							395.602.900,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		15 Unit	24 Unit	387.572.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	395.602.900,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15.930.000,00							16.978.700,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	3 Unit	15.930.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	16.978.700,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						391.756.100,00					-		392.320.500,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						391.756.100,00					-		392.320.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	153.561.100,00						12 Laporan	165.385.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	237.570.000,00						12 Laporan	226.248.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	625.000,00						12 Laporan	687.500,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						625.000,00							687.500,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	625.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	687.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						153.561.100,00							165.385.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	153.561.100,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	165.385.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						237.570.000,00							226.248.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	237.570.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	226.248.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						461.072.000,00					-		498.402.300,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						461.072.000,00					-		498.402.300,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.014.000,00						1 Unit	222.362.800,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	135.740.000,00						4 Unit	132.484.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	43.945.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		0 Unit	10 Unit	4.893.000,00						0 Unit	5.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit		68 Unit	68 Unit	48.200.000,00						68 Unit	61.677.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit		19 Unit	19 Unit	28.265.000,00						19 Unit	32.433.500,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							43.945.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	43.945.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						135.740.000,00							132.484.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	7 Unit	135.740.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Unit	132.484.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.893.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		0 Unit	10 Unit	4.893.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	5.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						48.200.000,00							61.677.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit		68 Unit	68 Unit	48.200.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				68 Unit	61.677.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.014.000,00							222.362.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.014.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	222.362.800,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						28.265.000,00							32.433.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit		19 Unit	28 Unit	28.265.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				19 Unit	32.433.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
231.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						1.392.724.200,00							1.357.749.770,00	
		Meningkatnya efektivitas tindak lanjut aduan masyarakat berkadar pengawasan	*Persentase Tindak Lanjut Aduan Masyarakat berkadar pengawasan*	*100%*		*100%*	*100%*	*1.392.724.200,00*							*1.357.749.770,00*	
		Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	*Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan*	*85,00%*		*82,74%*	*83,30%*									
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	*Persentase Laporan Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang Diterbitkan*	*100%*		*100%*	*100%*									
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Laporan Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diterbitkan*	*100%*		*100%*	*100%*									
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	*Persentase Laporan Pengawasan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Diterbitkan*	*100%*		*100%*	*100%*									
		Meningkatnya kualitas pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	*Persentase Laporan Pengawasan Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi yang Diterbitkan*	*100%*		*100%*	*100%*									
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.008.226.600,00					Aparatur		1.100.572.520,00	
		Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Pemerintahan dan Aparatur														
		Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Kesejahteraan Rakyat														
		Tersusunnya laporan penyelenggaraan pengawasan internal Bidang Perekonomian dan Pembangunan														
		Tersusunnya kesepakatan, kerja Sama Pengawasan Internal														
		Tersusunnya Laporan Hasil Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						1.008.226.600,00					Aparatur		1.100.572.520,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	367.193.200,00						6 Dokumen	403.912.850,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	23.960.000,00						1 Kesepakatan	26.359.190,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	29 Laporan		29 Laporan	29 Laporan	114.214.000,00						29 Laporan	128.359.220,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	87.796.900,00						60 Laporan	90.252.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	52 Laporan		52 Laporan	52 Laporan	309.714.000,00						52 Laporan	305.327.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	88.116.500,00						28 Laporan	112.032.470,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.232.000,00						1 Laporan	34.329.790,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						309.714.000,00							305.327.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	52 Laporan		52 Laporan	263 Laporan	309.714.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				52 Laporan	305.327.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						87.796.900,00							90.252.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Laporan		60 Laporan	136 Laporan	87.796.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				60 Laporan	90.252.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						17.232.000,00							34.329.790,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	17.232.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	34.329.790,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						88.116.500,00							112.032.470,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	28 Laporan		28 Laporan	30 Laporan	88.116.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				28 Laporan	112.032.470,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						114.214.000,00							128.359.220,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	29 Laporan		29 Laporan	255 Laporan	114.214.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				29 Laporan	128.359.220,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						23.960.000,00							26.359.190,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	3 Kesepakatan	23.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Kesepakatan	26.359.190,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						367.193.200,00							403.912.850,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	367.193.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Dokumen	403.912.850,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						384.497.600,00					-		257.177.250,00	
		Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Pemerintahan dan Aparatur						384.497.600,00					-		257.177.250,00	
		Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Kesejahteraan Rakyat														
		Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Perekonomian dan Pembangunan														
		Tersusunnya laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	99 Laporan		99 Laporan	99 Laporan	255.917.200,00						99 Laporan	230.424.590,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	128.580.400,00						2 Laporan	26.752.660,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						128.580.400,00							26.752.660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	42 Laporan	128.580.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	26.752.660,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						255.917.200,00							230.424.590,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	99 Laporan		99 Laporan	30 Laporan	255.917.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				99 Laporan	230.424.590,00	INSPEKTORAT DAERAH
232.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						415.113.700,00							579.604.960,00	
		Meningkatnya kualitas kebijakan teknik dan fasilitasi pengawasan	*Persentase kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan yang ditetapkan*	*100%*		*100%*	*100%*	*415.113.700,00*							*579.604.960,00*	
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Pemerintahan dan Aparatur	*Persentase pendampingan/asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur*	*100%*		*100%*	*100%*									
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Kesejahteraan Rakyat	*Persentase pendampingan/asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat*	*100%*		*100%*	*100%*									
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	*Persentase pendampingan/asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan*	*100%*		*100%*	*100%*									
		Meningkatnya efektivitas pendampingan dan asistensi Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi	*Persentase pendampingan/asistensi/ evaluasi Perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi*	*100%*		*100%*	*100%*									
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						83.238.100,00					-		87.871.630,00	
		Tersusunnya rekomendasi hasil penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan						83.238.100,00					-		87.871.630,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	7.685.500,00						3 Rekomendasi	5.689.970,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	75.552.600,00						3 Rekomendasi	82.181.660,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						75.552.600,00							82.181.660,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	75.552.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Rekomendasi	82.181.660,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						7.685.500,00							5.689.970,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	3 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	7.685.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Rekomendasi	5.689.970,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						331.875.600,00					-		491.733.330,00	
		Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Pemerintahan dan Aparatur														
		Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat														
		Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan														
		Terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi perangkat daerah Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi						331.875.600,00					-		491.733.330,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	77.557.500,00						2 Kegiatan	78.141.250,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	165 perangkat daerah		165 perangkat daerah	165 perangkat daerah	124.515.200,00						165 perangkat daerah	186.344.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	168 perangkat daerah		168 perangkat daerah	168 perangkat daerah	113.485.300,00						168 perangkat daerah	209.297.880,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 perangkat daerah		6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	16.317.600,00						6 perangkat daerah	17.949.360,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						16.317.600,00							17.949.360,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 perangkat daerah		6 perangkat daerah	6 perangkat daerah	16.317.600,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 perangkat daerah	17.949.360,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						113.485.300,00							209.297.880,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	168 perangkat daerah		168 perangkat daerah	41 perangkat daerah	113.485.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				168 perangkat daerah	209.297.880,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						77.557.500,00							78.141.250,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	4 Kegiatan	77.557.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Kegiatan	78.141.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						124.515.200,00							186.344.840,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	165 perangkat daerah		165 perangkat daerah	41 perangkat daerah	124.515.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				165 perangkat daerah	186.344.840,00	INSPEKTORAT DAERAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN GRABAG KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN GRABAG						2.305.858.600,00							3.410.867.127,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.305.858.600,00							3.410.867.127,00	
	7.01	KECAMATAN						2.305.858.600,00							3.410.867.127,00	
233.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.146.191.900,00							3.002.382.127,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*2.145.691.900,00*							*2.968.282.127,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.143.391.900,00						100 %	2.965.532.127,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.550.000,00					Aparatur		20.350.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.550.000,00					Aparatur		20.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00						1 Dokumen	1.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	2.000.000,00						23 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		6 Laporan	22 Laporan	300.000,00						22 Laporan	2.750.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00							16.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen		23 Dokumen	22 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				23 Dokumen	16.500.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300.000,00							2.750.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		6 Laporan	22 Laporan	300.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	2.750.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						250.000,00							1.100.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.100.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.934.714.000,00					Aparatur		2.475.449.727,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.934.714.000,00					Aparatur		2.475.449.727,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		26 Laporan	44 Laporan	250.000,00						44 Laporan	5.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.934.464.000,00						20 Orang/bulan	2.469.949.727,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.934.464.000,00							2.469.949.727,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.934.464.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Orang/bulan	2.469.949.727,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						250.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		26 Laporan	44 Laporan	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000,00					Aparatur		3.300.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000,00					Aparatur		3.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	250.000,00						11 Laporan	3.300.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						250.000,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	3.300.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						500.000,00					Aparatur		1.100.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						500.000,00					Aparatur		1.100.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		1 Dokumen	16 Dokumen	500.000,00						16 Dokumen	1.100.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						500.000,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	1.100.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						52.731.300,00					-		89.100.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						52.731.300,00					-		89.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	995.500,00						2 Dokumen	3.300.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	6.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1 Laporan	12 Laporan	4.975.000,00						12 Laporan	17.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	12 Paket	20.496.000,00						12 Paket	23.100.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket		1 Paket	25 Paket	11.263.600,00						25 Paket	16.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	4 Paket	5.000.500,00						4 Paket	6.600.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		1 Paket	15 Paket	4.000.600,00						15 Paket	6.600.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	20 Paket	5.000.100,00						20 Paket	8.800.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.000.600,00							6.600.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		1 Paket	1 Paket	4.000.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Paket	6.600.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.100,00							8.800.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Paket	8.800.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.496.000,00							23.100.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	1 Paket	20.496.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	23.100.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.500,00							6.600.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	6.600.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						11.263.600,00							16.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket		1 Paket	1 Paket	11.263.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				25 Paket	16.500.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00							6.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	6.600.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						4.975.000,00							17.600.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1 Laporan	12 Laporan	4.975.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	17.600.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						995.500,00							3.300.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	995.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	3.300.000,00	KECAMATAN GRABAG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18.887.000,00					-		204.611.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18.887.000,00					-		204.611.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	0 Unit	0,00						3 Unit	22.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	4 Unit	9.225.000,00						Unit	33.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	3 Unit	9.662.000,00						Unit	18.700.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	0 Unit	0,00						Unit	130.911.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Unit	22.000.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.225.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	9.225.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	33.000.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.662.000,00							18.700.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	1 Unit	9.662.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	18.700.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							130.911.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	130.911.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66.514.600,00					-		59.910.400,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66.514.600,00					-		59.910.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	33.335.300,00						12 Laporan	38.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	33.179.300,00						12 Laporan	21.410.400,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						33.335.300,00							38.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	33.335.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	38.500.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						33.179.300,00							21.410.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	33.179.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	21.410.400,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70.045.000,00					-		148.561.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						70.045.000,00					-		148.561.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.275.000,00						1 Unit	78.711.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		3 Unit	6 Unit	10.540.000,00						6 Unit	13.035.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	38.368.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	7.300.000,00						20 Unit	11.066.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	6.710.000,00						10 Unit	7.381.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							38.368.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	38.368.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.540.000,00							13.035.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		3 Unit	4 Unit	10.540.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Unit	13.035.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.300.000,00							11.066.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	10 Unit	7.300.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Unit	11.066.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.275.000,00							78.711.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.275.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	78.711.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.710.000,00							7.381.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	6.710.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	7.381.000,00	KECAMATAN GRABAG
234.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						11.545.800,00							25.300.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*11.545.800,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		-	100 %	9.045.800,00						-	21.450.000,00	
			-	-		-	-	2.500.000,00						-	3.850.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						9.045.800,00					Masyarakat		21.450.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						9.045.800,00					Masyarakat		21.450.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.045.800,00						2 Laporan	18.150.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00						1 Laporan	3.300.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						8.045.800,00							18.150.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.045.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	18.150.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							3.300.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	3.300.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.500.000,00					-		3.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.500.000,00					-		3.850.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00						1 Laporan	3.850.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						2.500.000,00							3.850.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	3.850.000,00	KECAMATAN GRABAG
235.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						45.246.000,00							166.100.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*45.246.000,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	-		-	100 %	45.246.000,00						-	166.100.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						45.246.000,00					Masyarakat		166.100.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						45.246.000,00					Masyarakat		166.100.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.195.000,00						1 Laporan	133.100.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	11.051.000,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	33.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						11.051.000,00							33.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	11.051.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Lembaga Kemasyarakatan	33.000.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						34.195.000,00							133.100.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	10 Laporan	34.195.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	133.100.000,00	KECAMATAN GRABAG
236.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						8.005.000,00							27.115.000,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*8.005.000,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-		-	100 %	8.005.000,00						-	27.115.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						8.005.000,00					Masyarakat		27.115.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						8.005.000,00					Masyarakat		27.115.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.505.000,00						4 Laporan	21.615.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00						1 Laporan	5.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						7.505.000,00							21.615.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.505.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Laporan	21.615.000,00	KECAMATAN GRABAG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						500.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN GRABAG
237.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						19.413.400,00							25.300.000,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*19.413.400,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-		-	100 %	19.413.400,00						-	25.300.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						19.413.400,00					Masyarakat		25.300.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						19.413.400,00					Masyarakat		25.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.915.000,00						1 Dokumen	19.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		Orang	100 Orang	2.498.400,00						Orang	5.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						2.498.400,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang		Orang	100 Orang	2.498.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Orang	5.500.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						16.915.000,00							19.800.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.915.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	19.800.000,00	KECAMATAN GRABAG
238.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						75.456.500,00							164.670.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*75.456.500,00*								
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		-	100 %	75.456.500,00						-	164.670.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						75.456.500,00					Masyarakat		164.670.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						75.456.500,00					Masyarakat		164.670.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00						1 Dokumen	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.469.000,00						1 Dokumen	7.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.001.000,00						2 Dokumen	79.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.972.000,00						1 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	9.014.500,00						6 Dokumen	39.820.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						9.014.500,00							39.820.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	9.014.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Dokumen	39.820.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						30.001.000,00							79.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.001.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	79.200.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						33.000.000,00							33.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	33.000.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						1.469.000,00							7.700.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.469.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	7.700.000,00	KECAMATAN GRABAG
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.972.000,00							4.950.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.972.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	4.950.000,00	KECAMATAN GRABAG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN NGOMBOL KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN NGOMBOL						2.135.784.176,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.135.784.176,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						2.135.784.176,00							0,00	
239.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.903.378.576,00							0,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*1.901.378.576,00*							*0,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.901.378.576,00								
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	2.000.000,00						22 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	900.000,00						24 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	7 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Laporan		24 Laporan	22 Laporan	900.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Laporan	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						100.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.610.988.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.610.988.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.500.000,00						44 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.609.488.000,00						22 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.609.488.000,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.609.488.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						750.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						750.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	0,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						750.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						53.260.400,00					-		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						53.260.400,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	14.700.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.571.200,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.390.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	1.272.600,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.326.600,00						2 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.272.600,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	1.272.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.326.600,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.326.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14.700.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	14.700.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.390.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	7.390.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						12.571.200,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.571.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						21.085.176,00					-		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						21.085.176,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	3 Unit	21.085.176,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.085.176,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	3 Unit	21.085.176,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						140.538.500,00					-		0,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						140.538.500,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	16.164.500,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	124.374.000,00						12 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.164.500,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	16.164.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						124.374.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	124.374.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.756.500,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.756.500,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	16.956.500,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	10.540.000,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	4.990.000,00						10 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	3.050.000,00						8 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.540.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	6 Unit	10.540.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Unit	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.990.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	4.990.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						16.956.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	16.956.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.050.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	2 Unit	3.050.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Unit	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
240.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						19.835.800,00							0,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*19.835.800,00*							*0,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik				100 %	19.835.800,00								
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.500.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.500.000,00						1 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						4.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	4.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						2.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10.887.000,00					-		0,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10.887.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.117.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	6.120.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.650.000,00						1 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.117.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.117.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						6.120.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	6.120.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.650.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	2.650.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						2.448.800,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum						2.448.800,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.448.800,00						1 Dokumen	0,00	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						2.448.800,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.448.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
241.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						62.424.800,00							0,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*62.424.800,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-		-	100 %	62.424.800,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						62.424.800,00					-		0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						62.424.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	48.027.600,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.397.200,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						14.397.200,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.397.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						48.027.600,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	48.027.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Laporan	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
242.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10.829.800,00							0,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*10.829.800,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-		-	100 %	10.829.800,00						-	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10.829.800,00					-		0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						10.829.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.272.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.557.800,00						1 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						4.272.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	4.272.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						6.557.800,00							0,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	6.557.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
243.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						19.981.400,00							0,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*19.981.400,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-		-	100 %	19.981.400,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						19.981.400,00					-		0,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						19.981.400,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	13.104.800,00						6 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	57 Orang		57 Orang	57 Orang	4.025.000,00						57 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21 Orang		21 Orang	21 Orang	2.851.600,00						21 Orang	0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						2.851.600,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21 Orang		21 Orang	57 Orang	2.851.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				21 Orang	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						4.025.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	57 Orang		57 Orang	57 Orang	4.025.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				57 Orang	0,00	KECAMATAN NGOMBOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						13.104.800,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	13.104.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
244.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						119.333.800,00							0,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*119.333.800,00*								
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		-	100 %	119.333.800,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						119.333.800,00					-		0,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						119.333.800,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	70.500.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.234.800,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.131.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.258.400,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.310.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	14.450.000,00						6 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	6.449.600,00						5 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						6.449.600,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	6.449.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						14.450.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen		6 Dokumen	4 Dokumen	14.450.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						19.131.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.131.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						70.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	70.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						3.234.800,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.234.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.310.000,00							0,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.310.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						4.258.400,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.258.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	0,00	KECAMATAN NGOMBOL

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN PURWODADI KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN PURWODADI						2.094.801.300,00							3.613.703.966,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.094.801.300,00							3.613.703.966,00	
	7.01	KECAMATAN						2.094.801.300,00							3.613.703.966,00	
245.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.920.622.500,00							3.213.929.300,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*1.918.122.500,00*							*3.212.154.300,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.918.122.500,00						100 %	3.212.154.300,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.125.000,00					-		2.395.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.125.000,00					-		2.395.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000,00						1 Dokumen	145.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	1.000.000,00						20 Dokumen	1.125.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	1.000.000,00						16 Laporan	1.125.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.000.000,00							1.125.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Dokumen	1.125.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							1.125.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Laporan	1.125.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						125.000,00							145.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	145.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.631.067.000,00					-		2.790.100.600,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.631.067.000,00					-		2.790.100.600,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	1.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.630.067.000,00						18 Orang/bulan	2.788.500.600,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.630.067.000,00							2.788.500.600,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.630.067.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				18 Orang/bulan	2.788.500.600,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							1.600.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	1.600.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						125.000,00					-		325.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						125.000,00					-		325.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.000,00						1 Laporan	325.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						125.000,00							325.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	325.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						125.000,00					-		325.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						125.000,00					-		325.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000,00						1 Dokumen	325.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						125.000,00							325.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	325.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						49.291.000,00					-		58.678.700,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						49.291.000,00					-		58.678.700,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000,00						1 Dokumen	215.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00						1 Laporan	825.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.212.000,00						1 Laporan	9.300.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.152.000,00						1 Paket	21.700.700,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.877.300,00						1 Paket	11.768.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.955.300,00						1 Paket	11.890.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.018.800,00						1 Paket	1.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.950.600,00						1 Paket	1.680.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.018.800,00							1.300.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.018.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	1.300.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.950.600,00							1.680.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.950.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	1.680.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19.152.000,00							21.700.700,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.152.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	21.700.700,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.955.300,00							11.890.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.955.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	11.890.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.877.300,00							11.768.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.877.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	11.768.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							825.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	825.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						6.212.000,00							9.300.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.212.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	9.300.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						125.000,00							215.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	215.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		59.580.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		59.580.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	42.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	17.580.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	42.000.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							17.580.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	17.580.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						154.459.500,00					-		169.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						154.459.500,00					-		169.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	42.889.500,00						12 Laporan	50.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	111.570.000,00						12 Laporan	118.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.889.500,00							50.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	42.889.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	50.600.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						111.570.000,00							118.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	111.570.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	118.500.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.305.000,00					-		133.100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.305.000,00					-		133.100.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	2 Unit	17.785.000,00						1 Unit	51.870.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		7 Unit	7 Unit	15.810.000,00						5 Unit	28.760.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	35.750.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		12 Unit	12 Unit	7.830.000,00						8 Unit	11.860.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		7 Unit	7 Unit	3.660.000,00						6 Unit	4.860.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							35.750.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	35.750.000,00	KECAMATAN PURWODADI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.810.000,00							28.760.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		7 Unit	3 Unit	15.810.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Unit	28.760.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.830.000,00							11.860.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		12 Unit	11 Unit	7.830.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Unit	11.860.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						17.785.000,00							51.870.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	17.785.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	51.870.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.660.000,00							4.860.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		7 Unit	7 Unit	3.660.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Unit	4.860.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						125.000,00					-		325.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						125.000,00					-		325.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	-	125.000,00						-	325.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						125.000,00							325.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-		-	4 Dokumen	125.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	325.000,00	KECAMATAN PURWODADI
246.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						16.960.000,00							19.640.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*16.160.000,00*							*19.640.000,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	16.160.000,00						100 %	19.640.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						9.435.000,00					-		11.150.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						9.435.000,00					-		11.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00						1 Dokumen	940.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.835.000,00						1 Laporan	9.460.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	800.000,00						1 Laporan	750.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						800.000,00							940.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	800.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	940.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						7.835.000,00							9.460.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.835.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	9.460.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						800.000,00							750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	800.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	750.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.525.000,00					-		8.490.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.525.000,00					-		8.490.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.525.000,00						1 Laporan	8.490.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						7.525.000,00							8.490.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.525.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	8.490.000,00	KECAMATAN PURWODADI
247.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						68.308.800,00							171.548.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*68.308.800,00*							*171.548.000,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	68.308.800,00						100 %	171.548.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						68.308.800,00					-		171.548.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						68.308.800,00					-		171.548.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.700.000,00						1 Laporan	146.900.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	18.608.800,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	24.648.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						18.608.800,00							24.648.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	18.608.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Lembaga Kemasyarakatan	24.648.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						49.700.000,00							146.900.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.700.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	146.900.000,00	KECAMATAN PURWODADI
248.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.000.000,00							35.260.000,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*1.500.000,00*							*35.260.000,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	1.500.000,00						100 %	35.260.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3.000.000,00					-		35.260.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						3.000.000,00					-		35.260.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00						1 Laporan	12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00						1 Laporan	22.760.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.500.000,00							12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	12.500.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.500.000,00							22.760.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	22.760.000,00	KECAMATAN PURWODADI
249.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						29.160.000,00							37.433.000,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*29.160.000,00*							*37.433.000,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	29.160.000,00						100 %	37.433.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						29.160.000,00					-		37.433.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						29.160.000,00					-		37.433.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.260.000,00						1 Dokumen	18.693.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang		50 Orang	50 Orang	11.900.000,00						50 Orang	18.740.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						11.900.000,00							18.740.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang		50 Orang	50 Orang	11.900.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				50 Orang	18.740.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						17.260.000,00							18.693.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.260.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	18.693.000,00	KECAMATAN PURWODADI
250.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						56.750.000,00							135.893.666,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*50.710.000,00*							*135.893.666,00*	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	50.710.000,00						100 %	135.893.666,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						56.750.000,00					-		135.893.666,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						56.750.000,00					-		135.893.666,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.180.000,00						Dokumen	76.580.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.120.000,00						1 Dokumen	9.126.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.140.000,00						1 Dokumen	27.845.666,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.250.000,00						1 Dokumen	1.350.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.020.000,00						1 Dokumen	7.965.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.020.000,00						1 Dokumen	8.954.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.020.000,00						1 Dokumen	4.073.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						3.020.000,00							4.073.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.020.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	4.073.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						3.020.000,00							7.965.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.020.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	7.965.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						3.020.000,00							8.954.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.020.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	8.954.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						11.140.000,00							27.845.666,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.140.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	27.845.666,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						33.180.000,00							76.580.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.180.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Dokumen	76.580.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						2.120.000,00							9.126.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.120.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	9.126.000,00	KECAMATAN PURWODADI
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.250.000,00							1.350.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1.250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.350.000,00	KECAMATAN PURWODADI

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN BAGELEN KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN BAGELEN						2.019.956.676,00							2.567.134.109,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.019.956.676,00							2.567.134.109,00	
	7.01	KECAMATAN						2.019.956.676,00							2.567.134.109,00	
251.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.879.192.176,00							2.316.905.285,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*1.877.192.176,00*							*2.314.705.285,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%	100%	1.877.192.176,00						85.60 %	2.314.705.285,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00					-		2.200.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00					-		2.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	125.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		15 Dokumen	22 Dokumen	1.375.000,00						22 Dokumen	1.650.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		6 Laporan	22 Laporan	500.000,00						22 Laporan	550.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.375.000,00							1.650.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		15 Dokumen	22 Dokumen	1.375.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	1.650.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						500.000,00							550.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		6 Laporan	24 Laporan	500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	550.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						125.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	125.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	0,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.658.622.000,00					-		2.071.280.235,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.658.622.000,00					-		2.071.280.235,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		26 Laporan	44 Laporan	500.000,00						44 Laporan	550.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.658.122.000,00						22 Orang/bulan	2.070.730.235,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.658.122.000,00							2.070.730.235,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		22 Orang/bulan	13 Orang/bulan	1.658.122.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Orang/bulan	2.070.730.235,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						500.000,00							550.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		26 Laporan	44 Laporan	500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	550.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						500.000,00					-		550.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						500.000,00					-		550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	500.000,00						11 Laporan	550.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						500.000,00							550.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		0 Laporan	11 Laporan	500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	550.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						500.000,00					-		550.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						500.000,00					-		550.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	500.000,00						16 Dokumen	550.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						500.000,00							550.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	550.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					-		550.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					-		550.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	500.000,00						17 Dokumen	550.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						500.000,00							550.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	550.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						26.935.876,00					-		32.627.320,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						26.935.876,00					-		32.627.320,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.332.000,00						1 Dokumen	1.465.200,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00						1 Dokumen	275.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.229.000,00						1 Laporan	5.751.900,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.837.600,00						12 Paket	7.521.360,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	6.601.200,00						6 Paket	7.261.320,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.033.776,00						1 Paket	4.405.610,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.652.300,00						2 Paket	2.917.530,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	3.029.400,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.652.300,00							2.917.530,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	7 Paket	2.652.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	2.917.530,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							3.029.400,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	3.029.400,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.837.600,00							7.521.360,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	6.837.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	7.521.360,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.033.776,00							4.405.610,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	4.033.776,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	4.405.610,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.332.000,00							1.465.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.332.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.465.200,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.601.200,00							7.261.320,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	16 Paket	6.601.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Paket	7.261.320,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.229.000,00							5.751.900,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	5.229.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	5.751.900,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						250.000,00							275.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	275.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						121.546.300,00					-		133.700.930,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						121.546.300,00					-		133.700.930,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.542.300,00						1 Laporan	29.196.530,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	95.004.000,00						1 Laporan	104.504.400,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.542.300,00							29.196.530,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	26.542.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	29.196.530,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						95.004.000,00							104.504.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	95.004.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	104.504.400,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.588.000,00					-		75.446.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.588.000,00					-		75.446.800,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.218.000,00						1 Unit	5.739.800,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		11 Unit	1 Unit	15.810.000,00						1 Unit	17.391.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	5.680.000,00						24 Unit	6.248.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		7 Unit	10 Unit	3.660.000,00						10 Unit	4.026.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.810.000,00							17.391.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		11 Unit	10 Unit	15.810.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	17.391.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.680.000,00							6.248.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	5.680.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Unit	6.248.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.218.000,00							5.739.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.218.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	5.739.800,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.660.000,00							4.026.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		7 Unit	6 Unit	3.660.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	4.026.000,00	KECAMATAN BAGELEN
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.588.000,00					-		75.446.800,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	38.220.000,00						-	42.042.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							42.042.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	42.042.000,00	KECAMATAN BAGELEN
252.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						21.675.000,00							91.762.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*16.860.000,00*							*88.577.500,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%		100%	100%	16.860.000,00						85.60 %	88.577.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						0,00					-		67.787.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0,00					-		67.787.500,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	32.527.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00						1 Laporan	35.260.500,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						0,00							35.260.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	35.260.500,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0,00							32.527.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	32.527.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						16.860.000,00					-		20.790.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						16.860.000,00					-		20.790.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		Laporan	0 Laporan	0,00						1 Laporan	1.100.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							1.100.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN BAGELEN
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		-	undefined undefined	4.815.000,00						-	3.184.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	-	0,00						-	1.144.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	-	16.860.000,00						-	18.546.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						0,00							1.144.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	1.144.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						16.860.000,00							18.546.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	16.860.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	18.546.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4.815.000,00					-		3.184.500,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						4.815.000,00					-		3.184.500,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	-	4.815.000,00						-	3.184.500,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						4.815.000,00							3.184.500,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	1 Laporan	4.815.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	3.184.500,00	KECAMATAN BAGELEN
253.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						47.418.700,00							69.489.500,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*47.418.700,00*							*69.489.500,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100%		100%	100%	47.418.700,00						85.60 %	69.489.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						47.418.700,00					-		69.489.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						47.418.700,00					-		69.489.500,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	39.478.400,00						1 Laporan	57.656.500,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	7.940.300,00						3 Lembaga Kemasyarakatan	11.833.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						7.940.300,00							11.833.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan		3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	7.940.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Lembaga Kemasyarakatan	11.833.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						39.478.400,00							57.656.500,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	39.478.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	57.656.500,00	KECAMATAN BAGELEN
254.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						4.006.000,00							12.303.500,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*4.006.000,00*							*12.303.500,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%		100%	100%	4.006.000,00						85.60 %	12.303.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						4.006.000,00					-		12.303.500,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						4.006.000,00					-		12.303.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.006.000,00						1 Laporan	12.303.500,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						4.006.000,00							12.303.500,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.006.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	12.303.500,00	KECAMATAN BAGELEN
255.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						37.606.800,00							41.759.824,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*37.606.800,00*							*41.759.824,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%		100%	100%	37.606.800,00						85.60 %	41.759.824,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						37.606.800,00					-		41.759.824,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						37.606.800,00					-		41.759.824,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.240.000,00						Dokumen	16.705.344,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	135 Orang		135 Orang	135 Orang	17.366.800,00						135 Orang	16.287.480,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						17.366.800,00							16.287.480,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	135 Orang		135 Orang	565 Orang	17.366.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				135 Orang	16.287.480,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.240.000,00							16.705.344,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.240.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Dokumen	16.705.344,00	KECAMATAN BAGELEN
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						37.606.800,00					-		41.759.824,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	0,00						-	8.767.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						0,00							8.767.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	0 Orang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	8.767.000,00	KECAMATAN BAGELEN
256.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						30.058.000,00							34.914.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*29.438.000,00*							*34.232.000,00*	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		100%	100%	29.438.000,00						85.60 %	34.232.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						30.058.000,00					-		34.914.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						30.058.000,00					-		34.914.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00						1 Dokumen	19.450.200,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.408.000,00						1 Dokumen	1.548.800,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.880.000,00						1 Dokumen	3.168.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	310.000,00						1 Dokumen	341.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00						1 Dokumen	682.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.220.000,00						1 Dokumen	9.042.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00						1 Dokumen	682.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						620.000,00							682.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	682.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						620.000,00							682.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	620.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	682.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						8.220.000,00							9.042.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	9.042.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						2.880.000,00							3.168.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.880.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	3.168.000,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						16.000.000,00							19.450.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	19.450.200,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						1.408.000,00							1.548.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.408.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.548.800,00	KECAMATAN BAGELEN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						310.000,00							341.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	310.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	341.000,00	KECAMATAN BAGELEN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN KALIGESING KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN KALIGESING						1.739.699.493,00							1.946.779.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.739.699.493,00							1.946.779.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.739.699.493,00							1.946.779.000,00	
257.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.639.793.093,00							1.861.064.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*1.638.543.093,00*							*1.851.814.000,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.638.543.093,00						100 %	1.851.814.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						788.000,00					-		800.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						788.000,00					-		800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00						1 Dokumen	250.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	250.000,00						22 Dokumen	250.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	288.000,00						22 Laporan	300.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						250.000,00							250.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	250.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						288.000,00							300.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	288.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	300.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						250.000,00							250.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	250.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.442.448.993,00					-		1.648.683.215,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.442.448.993,00					-		1.648.683.215,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	250.000,00						44 Laporan	250.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.442.198.993,00						22 Orang/bulan	1.648.433.215,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.442.198.993,00							1.648.433.215,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan		22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	1.442.198.993,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Orang/bulan	1.648.433.215,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						250.000,00							250.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	250.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000,00					-		250.000,00	
		Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000,00					-		250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	250.000,00						2 Laporan	250.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						250.000,00							250.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	250.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						250.000,00					-		250.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000,00					-		250.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	250.000,00						16 Dokumen	250.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						250.000,00							250.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	250.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000,00					-		250.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000,00					-		250.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00						1 Dokumen	250.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						250.000,00							250.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	250.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						53.607.700,00					-		66.083.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						53.607.700,00					-		66.083.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.070.000,00						12 Laporan	8.350.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.262.400,00						1 Paket	17.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.252.300,00						1 Paket	9.253.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.912.000,00						1 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.784.800,00						1 Paket	12.980.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.826.200,00						1 Paket	8.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.784.800,00							12.980.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.784.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	12.980.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.826.200,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.826.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	8.000.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						16.262.400,00							17.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.262.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	17.500.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.912.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2.912.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						9.252.300,00							9.253.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.252.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	9.253.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.070.000,00							8.350.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.070.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	8.350.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.000.400,00					-		62.348.185,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						59.000.400,00					-		62.348.185,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.998.400,00						12 Laporan	30.248.185,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	34.002.000,00						12 Laporan	32.100.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.998.400,00							30.248.185,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.998.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	30.248.185,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						34.002.000,00							32.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	34.002.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	32.100.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.198.000,00					-		82.399.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.198.000,00					-		82.399.600,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	8.650.000,00						1 Unit	10.300.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		0 Unit	8 Unit	21.080.000,00						8 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	38.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	8.760.000,00						15 Unit	10.599.600,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	6.488.000,00						11 Unit	8.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							38.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	38.500.000,00	KECAMATAN KALIGESING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						21.080.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		0 Unit	8 Unit	21.080.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.760.000,00							10.599.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	8.760.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Unit	10.599.600,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8.650.000,00							10.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	8.650.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	10.300.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.488.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	6.488.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Unit	8.000.000,00	KECAMATAN KALIGESING
258.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						8.488.000,00							10.190.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*8.488.000,00*							*10.190.000,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	8.488.000,00						100 %	10.190.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						5.996.000,00					-		5.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						5.996.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.996.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						5.996.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.996.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						2.492.000,00					-		5.190.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						2.492.000,00					-		5.190.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.492.000,00						1 Laporan	5.190.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.492.000,00							5.190.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.492.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	5.190.000,00	KECAMATAN KALIGESING
259.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						42.353.400,00							33.106.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*42.353.400,00*							*33.106.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	42.353.400,00						100 %	33.106.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						42.353.400,00					-		33.106.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						42.353.400,00					-		33.106.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	31.659.000,00						1 Laporan	22.400.100,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.694.400,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	10.705.900,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10.694.400,00							10.705.900,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	10.694.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Lembaga Kemasyarakatan	10.705.900,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						31.659.000,00							22.400.100,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	31.659.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	22.400.100,00	KECAMATAN KALIGESING
260.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						8.352.000,00							13.863.000,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*8.352.000,00*							*13.863.000,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	8.352.000,00						100 %	13.863.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						8.352.000,00					-		13.863.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						8.352.000,00					-		13.863.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.456.000,00						1 Laporan	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.896.000,00						1 Laporan	8.363.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						3.456.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.456.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						4.896.000,00							8.363.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.896.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	8.363.000,00	KECAMATAN KALIGESING
261.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						14.560.000,00							14.560.000,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*14.560.000,00*							*14.560.000,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	14.560.000,00						100 %	14.560.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						14.560.000,00					-		14.560.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						14.560.000,00					-		14.560.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.560.000,00						1 Dokumen	14.560.000,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						14.560.000,00							14.560.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.560.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	14.560.000,00	KECAMATAN KALIGESING
262.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						26.153.000,00							13.996.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*26.153.000,00*							*13.456.000,00*	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	26.153.000,00						100 %	13.456.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						26.153.000,00					-		13.996.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						26.153.000,00					-		13.996.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.536.000,00						1 Dokumen	790.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00						1 Dokumen	9.626.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.125.000,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	992.000,00						1 Dokumen	540.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	540.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						992.000,00							540.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	992.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	540.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						2.000.000,00							540.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	540.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						4.000.000,00							9.626.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	9.626.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						16.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN KALIGESING
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						1.536.000,00							790.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.536.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	790.000,00	KECAMATAN KALIGESING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.125.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.125.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN KALIGESING

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN PURWOREJO KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN PURWOREJO						12.754.695.800,00							14.693.089.317,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						12.754.695.800,00							14.693.089.317,00	
	7.01	KECAMATAN						12.754.695.800,00							14.693.089.317,00	
263.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.456.796.400,00							14.236.628.013,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah (Kec. Purworejo)						*12.444.296.400,00*							*14.236.628.013,00*	
			1.Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	12.444.296.400,00						100 %	14.236.628.013,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.957.800,00					-		31.832.632,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.957.800,00					-		31.832.632,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.457.800,00						1 Dokumen	1.516.112,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	110 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	7.500.000,00						22 Dokumen	16.571.360,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	5.000.000,00						22 Laporan	13.745.160,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.500.000,00							16.571.360,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen		22 Dokumen	19 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	16.571.360,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							13.745.160,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	21 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	13.745.160,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1.457.800,00							1.516.112,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.457.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.516.112,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.703.409.000,00					-		12.368.734.973,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.703.409.000,00					-		12.368.734.973,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	7.500.000,00						44 Laporan	13.888.160,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/bulan		115 Orang/bulan	115 Orang/bulan	10.695.909.000,00						115 Orang/bulan	12.354.846.813,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.695.909.000,00							12.354.846.813,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	155 Orang/bulan		115 Orang/bulan	115 Orang/bulan	10.695.909.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				115 Orang/bulan	12.354.846.813,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.500.000,00							13.888.160,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	37 Laporan	7.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	13.888.160,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						3.000.000,00					-		7.402.824,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						3.000.000,00					-		7.402.824,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	3.000.000,00						16 Dokumen	7.402.824,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						3.000.000,00							7.402.824,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	7.402.824,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					-		11.580.400,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					-		11.580.400,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	5.000.000,00						17 Dokumen	11.580.400,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5.000.000,00							11.580.400,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	11.580.400,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						343.525.300,00					-		377.273.416,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						343.525.300,00					-		377.273.416,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.866.000,00						1 Dokumen	6.101.368,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	47.590.400,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	123.816.000,00						15 Paket	128.768.640,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	99.937.900,00						15 Paket	107.549.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	13.622.400,00						15 Paket	14.167.296,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	24.915.500,00						15 Paket	25.913.992,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	45.367.500,00						15 Paket	47.182.720,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						24.915.500,00							25.913.992,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	24.915.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Paket	25.913.992,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						45.367.500,00							47.182.720,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	45.367.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Paket	47.182.720,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						123.816.000,00							128.768.640,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	123.816.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Paket	128.768.640,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.622.400,00							14.167.296,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	13.622.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Paket	14.167.296,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						99.937.900,00							107.549.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	99.937.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Paket	107.549.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							47.590.400,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	47.590.400,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.866.000,00							6.101.368,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.866.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	6.101.368,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						37.717.900,00					-		39.564.824,00	
		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan						37.717.900,00					-		39.564.824,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	5 Unit	37.717.900,00						5 Unit	39.564.824,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						37.717.900,00							39.564.824,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	6 Unit	37.717.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Unit	39.564.824,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						980.817.400,00					-		1.000.432.784,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						980.817.400,00					-		1.000.432.784,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.599.400,00						12 Laporan	126.463.376,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	859.218.000,00						12 Laporan	873.969.408,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						121.599.400,00							126.463.376,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.599.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	126.463.376,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						859.218.000,00							873.969.408,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	859.218.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	873.969.408,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						369.369.000,00					-		399.806.160,00	
		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara						369.369.000,00					-		399.806.160,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	126.974.000,00						15 Unit	132.052.960,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit		23 Unit	23 Unit	121.210.000,00						23 Unit	144.487.200,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	36.982.400,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	102 Unit		102 Unit	102 Unit	82.965.000,00						102 Unit	86.283.600,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							36.982.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	36.982.400,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						121.210.000,00							144.487.200,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit		23 Unit	24 Unit	121.210.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				23 Unit	144.487.200,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						126.974.000,00							132.052.960,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	126.974.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Unit	132.052.960,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						82.965.000,00							86.283.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	102 Unit		102 Unit	102 Unit	82.965.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				102 Unit	86.283.600,00	KECAMATAN PURWOREJO
264.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						47.513.200,00							109.420.064,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*47.513.200,00*							*109.420.064,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	47.513.200,00						100 %	109.420.064,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						26.411.700,00					-		77.563.512,00	
		Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						26.411.700,00					-		77.563.512,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen		1 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00						9 Dokumen	60.495.344,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	16.411.700,00						1 Laporan	17.068.168,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						16.411.700,00							17.068.168,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	16.411.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	17.068.168,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00							60.495.344,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				9 Dokumen	60.495.344,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						18.246.500,00					-		28.887.352,00	
		Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						18.246.500,00					-		28.887.352,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.746.500,00						3 Dokumen	5.976.360,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	11.380.512,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00						1 Laporan	11.530.480,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						5.746.500,00							5.976.360,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	5.746.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Dokumen	5.976.360,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						5.000.000,00							11.380.512,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	11.380.512,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.500.000,00							11.530.480,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	11.530.480,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						2.855.000,00					-		2.969.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						2.855.000,00					-		2.969.200,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.855.000,00						1 Dokumen	2.969.200,00	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						2.855.000,00							2.969.200,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.855.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.969.200,00	KECAMATAN PURWOREJO
265.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*116.558.200,00*							*178.099.480,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	116.558.200,00						100 %	178.099.480,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						105.038.800,00					-		112.761.480,00	
		Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						105.038.800,00					-		112.761.480,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	105.038.800,00						6 Laporan	112.761.480,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						105.038.800,00							112.761.480,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	105.038.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Laporan	112.761.480,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	11.519.400,00						14 Lembaga Kemasyarakatan	65.338.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						11.519.400,00							65.338.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan		14 Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	11.519.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Lembaga Kemasyarakatan	65.338.000,00	KECAMATAN PURWOREJO
266.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						26.475.000,00							44.423.600,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*26.475.000,00*							*44.423.600,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	26.475.000,00						100 %	44.423.600,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						26.475.000,00					-		44.423.600,00	
		Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						26.475.000,00					-		44.423.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	18.975.000,00						6 Laporan	33.132.320,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.500.000,00						2 Laporan	11.291.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						18.975.000,00							33.132.320,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	18.975.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Laporan	33.132.320,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						7.500.000,00							11.291.280,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	11.291.280,00	KECAMATAN PURWOREJO
267.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						33.741.000,00							47.961.680,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*33.741.000,00*							*47.961.680,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	33.741.000,00						100 %	47.961.680,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						33.741.000,00					-		47.961.680,00	
		Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						33.741.000,00					-		47.961.680,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	22.787.000,00						2 Dokumen	36.569.520,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	130 Orang		130 Orang	130 Orang	10.954.000,00						130 Orang	11.392.160,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						10.954.000,00							11.392.160,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	130 Orang		130 Orang	32 Orang	10.954.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				130 Orang	11.392.160,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						22.787.000,00							36.569.520,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	22.787.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	36.569.520,00	KECAMATAN PURWOREJO
268.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						73.612.000,00							76.556.480,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*73.612.000,00*							*76.556.480,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	73.612.000,00						100 %	76.556.480,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						73.612.000,00					-		76.556.480,00	
		Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						73.612.000,00					-		76.556.480,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	4.920.000,00						1 Dokumen	5.116.800,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.820.000,00						1 Dokumen	2.589.600,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	33.880.000,00						2 Dokumen	36.953.280,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.735.000,00						1 Dokumen	4.578.080,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.710.000,00						1 Dokumen	1.778.400,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.018.000,00						1 Dokumen	1.767.168,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	14.282.500,00						3 Dokumen	13.423.904,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.018.000,00							1.767.168,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.018.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.767.168,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						14.282.500,00							13.423.904,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	14.282.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Dokumen	13.423.904,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						33.880.000,00							36.953.280,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	33.880.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	36.953.280,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						4.920.000,00							5.116.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	4.920.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	5.116.800,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						2.820.000,00							2.589.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2.820.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.589.600,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.710.000,00							1.778.400,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.710.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.778.400,00	KECAMATAN PURWOREJO
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						3.735.000,00							4.578.080,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.735.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	4.578.080,00	KECAMATAN PURWOREJO
		Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						73.612.000,00					-		76.556.480,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	-	10.246.500,00						-	10.349.248,00	
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						10.246.500,00							10.349.248,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-		-	1 Dokumen	10.246.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	10.349.248,00	KECAMATAN PURWOREJO
		KELURAHAN PURWOREJO						718.725.800,00							1.184.560.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						718.725.800,00							1.184.560.000,00	
	7.01	KECAMATAN						718.725.800,00							1.184.560.000,00	
269.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*718.725.800,00*							*1.184.560.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	718.725.800,00						100 %	1.184.560.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						250.000.000,00							515.840.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	250.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				14 Unit	515.840.000,00	KELURAHAN PURWOREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						468.725.800,00							668.720.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	468.725.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Purworejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	668.720.000,00	KELURAHAN PURWOREJO
		KELURAHAN PANGENREJO						1.451.172.900,00							849.680.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.451.172.900,00							849.680.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.451.172.900,00							849.680.000,00	
270.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*1.451.172.900,00*							*849.680.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	1.451.172.900,00						100 %	849.680.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						1.292.250.000,00							497.120.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	1.292.250.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Pangenrejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				14 Unit	497.120.000,00	KELURAHAN PANGENREJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						158.922.900,00							352.560.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	158.922.900,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Pangenrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	352.560.000,00	KELURAHAN PANGENREJO
		KELURAHAN KEDUNGSARI						888.490.800,00							823.680.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						888.490.800,00							823.680.000,00	
	7.01	KECAMATAN						888.490.800,00							823.680.000,00	
271.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*888.490.800,00*							*823.680.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	888.490.800,00						100 %	823.680.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						738.644.000,00							522.080.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	4 Unit	738.644.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Kedungsari || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Unit	522.080.000,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						149.846.800,00							301.600.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	149.846.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Kedungsari || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	301.600.000,00	KELURAHAN KEDUNGSARI
		KELURAHAN CANGKREP KIDUL						521.092.400,00							822.920.160,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						521.092.400,00							822.920.160,00	
	7.01	KECAMATAN						521.092.400,00							822.920.160,00	
272.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*521.092.400,00*							*822.920.160,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	521.092.400,00						100 %	822.920.160,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						370.000.000,00							564.996.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	370.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkrepkidul || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				14 Unit	564.996.000,00	KELURAHAN CANGKREP KIDUL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						151.092.400,00							257.924.160,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	151.092.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkrepkidul || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	257.924.160,00	KELURAHAN CANGKREP KIDUL
		KELURAHAN CANGKREP LOR						628.630.400,00							874.640.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						628.630.400,00							874.640.000,00	
	7.01	KECAMATAN						628.630.400,00							874.640.000,00	
273.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*628.630.400,00*							*874.640.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	628.630.400,00						100 %	874.640.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						425.000.000,00							468.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	425.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				14 Unit	468.000.000,00	KELURAHAN CANGKREP LOR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						203.630.400,00							406.640.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	203.630.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Cangkreplor || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	406.640.000,00	KELURAHAN CANGKREP LOR
		KELURAHAN TAMBAKREJO						574.393.800,00							869.440.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						574.393.800,00							869.440.000,00	
	7.01	KECAMATAN						574.393.800,00							869.440.000,00	
274.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*574.393.800,00*							*869.440.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	574.393.800,00						100 %	869.440.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						383.711.000,00							520.465.920,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	383.711.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Tambakrejo || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				14 Unit	520.465.920,00	KELURAHAN TAMBAKREJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						190.682.800,00							348.974.080,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	190.682.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Tambakrejo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	348.974.080,00	KELURAHAN TAMBAKREJO
		KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH						554.027.200,00							931.840.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						554.027.200,00							931.840.000,00	
	7.01	KECAMATAN						554.027.200,00							931.840.000,00	
275.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*554.027.200,00*							*931.840.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	554.027.200,00						100 %	931.840.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						300.000.000,00							490.880.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	300.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Pangenjurutengah || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Unit	490.880.000,00	KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						254.027.200,00							440.960.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	254.027.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Pangenjurutengah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	440.960.000,00	KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH
		KELURAHAN DOPLANG						507.015.900,00							797.680.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						507.015.900,00							797.680.000,00	
	7.01	KECAMATAN						507.015.900,00							797.680.000,00	
276.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*507.015.900,00*							*797.680.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	507.015.900,00						100 %	797.680.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						324.074.000,00							466.960.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	3 Unit	324.074.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Doplang || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				14 Unit	466.960.000,00	KELURAHAN DOPLANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						182.941.900,00							330.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	182.941.900,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Doplang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	330.720.000,00	KELURAHAN DOPLANG
		KELURAHAN SINDURJAN						631.593.400,00							864.240.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						631.593.400,00							864.240.000,00	
	7.01	KECAMATAN						631.593.400,00							864.240.000,00	
277.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*631.593.400,00*							*864.240.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	631.593.400,00						100 %	864.240.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						409.139.000,00							452.400.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	409.139.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Unit	452.400.000,00	KELURAHAN SINDURJAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						222.454.400,00							411.840.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	222.454.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Sindurjan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	411.840.000,00	KELURAHAN SINDURJAN
		KELURAHAN PADUROSO						414.015.400,00							668.720.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						414.015.400,00							668.720.000,00	
	7.01	KECAMATAN						414.015.400,00							668.720.000,00	
278.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*414.015.400,00*							*668.720.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	414.015.400,00						100 %	668.720.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						342.800.000,00							533.312.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	342.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Paduroso || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Unit	533.312.000,00	KELURAHAN PADUROSO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						71.215.400,00							135.408.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	71.215.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Paduroso || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	135.408.000,00	KELURAHAN PADUROSO
		KELURAHAN MRANTI						471.250.500,00							761.280.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						471.250.500,00							761.280.000,00	
	7.01	KECAMATAN						471.250.500,00							761.280.000,00	
279.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*471.250.500,00*							*761.280.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	471.250.500,00						100 %	761.280.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						347.980.000,00							457.600.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	347.980.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				14 Unit	457.600.000,00	KELURAHAN MRANTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						123.270.500,00							303.680.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	123.270.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mranti || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	303.680.000,00	KELURAHAN MRANTI
		KELURAHAN MUDAL						433.175.100,00							680.160.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						433.175.100,00							680.160.000,00	
	7.01	KECAMATAN						433.175.100,00							680.160.000,00	
280.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*433.175.100,00*							*680.160.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	433.175.100,00						100 %	680.160.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						349.740.000,00							483.224.144,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	349.740.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mudal || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				14 Unit	483.224.144,00	KELURAHAN MUDAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						83.435.100,00							196.935.856,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	83.435.100,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Mudal || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	196.935.856,00	KELURAHAN MUDAL
		KELURAHAN KESENENG						417.245.800,00							758.160.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						417.245.800,00							758.160.000,00	
	7.01	KECAMATAN						417.245.800,00							758.160.000,00	
281.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*417.245.800,00*							*758.160.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	417.245.800,00						100 %	758.160.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						325.245.400,00							484.640.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	5 Unit	325.245.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Keseneng || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				14 Unit	484.640.000,00	KELURAHAN KESENENG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						92.000.400,00							273.520.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	92.000.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Keseneng || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	273.520.000,00	KELURAHAN KESENENG
		KELURAHAN BALEDONO						633.909.100,00							1.050.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						633.909.100,00							1.050.400.000,00	
	7.01	KECAMATAN						633.909.100,00							1.050.400.000,00	
282.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						8.961.296.700,00							12.115.499.640,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*633.909.100,00*							*1.050.400.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	633.909.100,00						100 %	1.050.400.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
		Hasil Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						8.856.257.900,00					-		12.002.738.160,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	14 Pokmas / Ormas	2.662.453.400,00						14 Pokmas / Ormas	4.901.146.744,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.182.285.100,00						14 Unit	7.036.253.416,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						323.701.700,00							578.735.352,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	14 Unit		14 Unit	2 Unit	323.701.700,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Baledono || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Unit	578.735.352,00	KELURAHAN BALEDONO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						310.207.400,00							471.664.648,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas		14 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	310.207.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Purworejo || Kelurahan Baledono || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Pokmas / Ormas	471.664.648,00	KELURAHAN BALEDONO

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN BANYUURIP KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN BANYUURIP						4.689.625.350,00							5.325.683.517,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						4.689.625.350,00							5.325.683.517,00	
	7.01	KECAMATAN						4.689.625.350,00							5.325.683.517,00	
283.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.318.586.450,00							4.920.827.317,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah (Kec. Banyuurip)						*4.318.586.450,00*							*4.911.327.317,00*	
			1.Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.318.586.450,00						100 %	4.911.327.317,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.671.000,00					-		18.039.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.671.000,00					-		18.039.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	9.606.000,00						22 Dokumen	9.474.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	8.065.000,00						22 Laporan	8.565.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.606.000,00							9.474.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	9.606.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	9.474.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.065.000,00							8.565.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	8.065.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	8.565.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.663.925.000,00					-		4.229.797.367,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerahh						3.663.925.000,00					-		4.229.797.367,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	8.405.000,00						44 Laporan	9.905.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.655.520.000,00						40 Orang/bulan	4.219.892.367,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.655.520.000,00							4.219.892.367,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3.655.520.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				40 Orang/bulan	4.219.892.367,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						8.405.000,00							9.905.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	8.405.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	9.905.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						3.370.000,00					-		9.500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						3.370.000,00					-		9.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	3.370.000,00						16 Dokumen	9.500.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						3.370.000,00							9.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	3.370.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	9.500.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.944.000,00					-		24.110.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.944.000,00					-		24.110.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	30 Paket	0,00						Paket	9.500.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	2.944.000,00						6 Orang	14.610.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							9.500.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	30 Paket	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Paket	9.500.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2.944.000,00							14.610.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	2.944.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Orang	14.610.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.877.200,00					-		150.399.700,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						168.877.200,00					-		150.399.700,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.180.000,00						2 Dokumen	5.180.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	12 Laporan	14.992.000,00						Laporan	5.975.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.985.000,00						12 Laporan	30.715.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	31.500.000,00						4 Paket	30.518.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	37.479.300,00						4 Paket	39.479.800,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	31.322.500,00						4 Paket	21.600.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.564.700,00						4 Paket	6.575.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.853.700,00						4 Paket	10.356.300,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.564.700,00							6.575.600,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.564.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	6.575.600,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.853.700,00							10.356.300,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.853.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	10.356.300,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						31.500.000,00							30.518.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	31.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	30.518.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						31.322.500,00							21.600.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	31.322.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	21.600.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						37.479.300,00							39.479.800,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	37.479.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	39.479.800,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						14.992.000,00							5.975.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		Laporan	12 Laporan	14.992.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Laporan	5.975.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						24.985.000,00							30.715.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.985.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	30.715.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.180.000,00							5.180.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.180.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	5.180.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						46.442.800,00					-		39.762.800,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						46.442.800,00					-		39.762.800,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		4 Unit	5 Unit	46.442.800,00						Unit	39.762.800,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						46.442.800,00							39.762.800,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		4 Unit	5 Unit	46.442.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	39.762.800,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						246.706.450,00					-		293.018.450,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						246.706.450,00					-		293.018.450,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.772.450,00						12 Laporan	62.772.450,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	185.934.000,00						12 Laporan	230.246.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.772.450,00							62.772.450,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.772.450,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	62.772.450,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						185.934.000,00							230.246.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	185.934.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	230.246.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						168.650.000,00					-		156.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						168.650.000,00					-		156.200.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	62.080.000,00						4 Unit	47.590.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	31.620.000,00						8 Unit	33.360.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	36.880.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		Unit	25 Unit	0,00						Unit	6.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	30.630.000,00						35 Unit	24.070.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.100.000,00						14 Unit	8.100.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							36.880.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	36.880.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						31.620.000,00							33.360.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	31.620.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Unit	33.360.000,00	KECAMATAN BANYUURIP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							6.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		Unit	25 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	6.200.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.630.000,00							24.070.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit		35 Unit	35 Unit	30.630.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Unit	24.070.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						62.080.000,00							47.590.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	62.080.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Unit	47.590.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.100.000,00							8.100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit		14 Unit	14 Unit	6.100.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Unit	8.100.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
284.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						42.552.000,00							54.685.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*42.552.000,00*							*54.685.000,00*	
			2.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	42.552.000,00						100 %	54.685.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						42.552.000,00					-		54.685.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						42.552.000,00					-		54.685.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	27.552.000,00						5 Laporan	29.830.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	24.855.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						27.552.000,00							29.830.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	27.552.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Laporan	29.830.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						15.000.000,00							24.855.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	24.855.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
285.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.428.823.400,00							2.149.612.850,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*91.452.000,00*							*98.018.200,00*	
			3.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	91.452.000,00						100 %	98.018.200,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						91.452.000,00					-		98.018.200,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						91.452.000,00					-		98.018.200,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	75.000.000,00						7 Laporan	84.383.200,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	16.452.000,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	13.635.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						16.452.000,00							13.635.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	16.452.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Lembaga Kemasyarakatan	13.635.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						75.000.000,00							84.383.200,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	75.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Laporan	84.383.200,00	KECAMATAN BANYUURIP
286.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						23.996.400,00							25.372.000,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*23.996.400,00*							*25.372.000,00*	
			4.Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	23.996.400,00						100 %	25.372.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						23.996.400,00					-		25.372.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						23.996.400,00					-		25.372.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.174.900,00						4 Laporan	11.935.200,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	13.821.500,00						2 Laporan	13.436.800,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						10.174.900,00							11.935.200,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.174.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Laporan	11.935.200,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						13.821.500,00							13.436.800,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	13.821.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	13.436.800,00	KECAMATAN BANYUURIP
287.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						54.585.400,00							65.350.600,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*54.585.400,00*							65.350.600,00	
			5.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	54.585.400,00						100 %	65.350.600,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						54.585.400,00					-		65.350.600,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						54.585.400,00					-		65.350.600,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	29.585.400,00						1 Dokumen	30.735.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	25.000.000,00						100 Orang	34.615.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						25.000.000,00							34.615.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang		100 Orang	100 Orang	25.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Orang	34.615.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						29.585.400,00							30.735.600,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	29.585.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	30.735.600,00	KECAMATAN BANYUURIP
288.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						158.453.100,00							161.430.400,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*158.453.100,00*							*161.430.400,00*	
			6.Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	158.453.100,00						100 %	161.430.400,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						158.453.100,00					-		161.430.400,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						158.453.100,00					-		161.430.400,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.999.600,00						1 Dokumen	26.750.400,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.326.400,00						1 Dokumen	6.326.400,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.412.400,00						1 Dokumen	38.412.800,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.055.000,00						1 Dokumen	10.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.680.000,00						1 Dokumen	1.880.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.670.000,00						1 Dokumen	5.870.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	49.999.700,00						2 Dokumen	64.130.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	7.310.000,00						Dokumen	7.510.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						7.310.000,00							7.510.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	7.310.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Dokumen	7.510.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						5.670.000,00							5.870.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.670.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	5.870.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						49.999.700,00							64.130.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	49.999.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	64.130.800,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						36.412.400,00							38.412.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.412.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	38.412.800,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						39.999.600,00							26.750.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.999.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	26.750.400,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						9.326.400,00							6.326.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.326.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	6.326.400,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.680.000,00							1.880.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.680.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.880.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						8.055.000,00							10.550.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.055.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	10.550.000,00	KECAMATAN BANYUURIP
		KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM						438.032.700,00							680.423.600,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						438.032.700,00							680.423.600,00	
	7.01	KECAMATAN						438.032.700,00							680.423.600,00	
289.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.428.823.400,00							2.149.612.850,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*438.032.700,00*							*680.423.600,00*	
			3.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	438.032.700,00						100 %	680.423.600,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.337.371.400,00					-		2.051.594.650,00	
		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan						1.337.371.400,00					-		2.051.594.650,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	521.376.200,00						9 Pokmas / Ormas	918.324.950,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	815.995.200,00						2 Unit	1.133.269.700,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						300.000.000,00							378.478.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Kelurahan Kledung Karangdalem || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				2 Unit	378.478.200,00	KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						138.032.700,00							301.945.400,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	138.032.700,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Kelurahan Kledung Karangdalem || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				9 Pokmas / Ormas	301.945.400,00	KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM
		KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN						449.460.800,00							741.750.250,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						449.460.800,00							741.750.250,00	
	7.01	KECAMATAN						449.460.800,00							741.750.250,00	
290.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.428.823.400,00							2.149.612.850,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*449.460.800,00*							*741.750.250,00*	
			3.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	449.460.800,00						100 %	741.750.250,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.337.371.400,00					-		2.051.594.650,00	
		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan						1.337.371.400,00					-		2.051.594.650,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	521.376.200,00						9 Pokmas / Ormas	918.324.950,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	815.995.200,00						2 Unit	1.133.269.700,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						240.000.000,00							387.088.300,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	240.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Kelurahan Kledungkradenan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				2 Unit	387.088.300,00	KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						209.460.800,00							354.661.950,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	209.460.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Kelurahan Kledungkradenan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				9 Pokmas / Ormas	354.661.950,00	KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN
		KELURAHAN BOROKULON						449.877.900,00							629.420.800,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						449.877.900,00							629.420.800,00	
	7.01	KECAMATAN						449.877.900,00							629.420.800,00	
291.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						1.428.823.400,00							2.149.612.850,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*449.877.900,00*							*629.420.800,00*	
			3.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	449.877.900,00						100 %	629.420.800,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.337.371.400,00					-		2.051.594.650,00	
		Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan kelurahan						1.337.371.400,00					-		2.051.594.650,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	521.376.200,00						9 Pokmas / Ormas	918.324.950,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	815.995.200,00						2 Unit	1.133.269.700,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						275.995.200,00							367.703.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	275.995.200,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Kelurahan Borokulon || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	367.703.200,00	KELURAHAN BOROKULON
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						173.882.700,00							261.717.600,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	9 Pokmas / Ormas		9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	173.882.700,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Banyuurip || Kelurahan Borokulon || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				9 Pokmas / Ormas	261.717.600,00	KELURAHAN BOROKULON

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN BAYAN KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN BAYAN						3.301.901.142,00							3.292.370.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						3.301.901.142,00							3.292.370.000,00	
	7.01	KECAMATAN						3.301.901.142,00							3.292.370.000,00	
292.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.966.842.442,00							2.998.370.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah (Kec. Bayan)						*2.966.342.442,00*							*2.982.120.000,00*	
			1.Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.966.342.442,00						100 %	2.982.120.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.937.000,00					Aparatur		7.250.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.937.000,00					Aparatur		7.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	5.000.000,00						22 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	1.437.000,00						20 Laporan	1.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.437.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	1.437.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						500.000,00							750.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	750.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.589.137.342,00					Aparatur		2.643.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.589.137.342,00					Aparatur		2.643.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	3.800.000,00						44 Laporan	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.585.337.342,00						25 Orang/bulan	2.640.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.585.337.342,00							2.640.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan		25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	2.585.337.342,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				25 Orang/bulan	2.640.000.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.800.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	3.800.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						500.000,00					-		750.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						500.000,00					-		750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		1 Dokumen	16 Dokumen	500.000,00						16 Dokumen	750.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						500.000,00							750.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		1 Dokumen	16 Dokumen	500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	750.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						67.587.100,00					Aparatur		70.750.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						67.587.100,00					Aparatur		70.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.893.900,00						2 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.436.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	29.106.000,00						2 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	13.145.800,00						2 Paket	13.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.256.000,00						2 Paket	3.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.742.200,00						2 Paket	2.750.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.007.200,00						2 Paket	5.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.742.200,00							2.750.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.742.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	2.750.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.007.200,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.007.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	5.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						29.106.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	29.106.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.256.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.256.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	3.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						13.145.800,00							13.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	13.145.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	13.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.436.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.436.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.893.900,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.893.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						31.480.000,00					Aparatur		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						31.480.000,00					Aparatur		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	31.480.000,00						20 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						31.480.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	57 Unit	31.480.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Unit	0,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						157.784.000,00					Aparatur		162.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						157.784.000,00					Aparatur		162.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	56.900.000,00						12 Laporan	57.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.884.000,00						12 Laporan	105.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						56.900.000,00							57.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	56.900.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	57.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						100.884.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.884.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	105.000.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						113.417.000,00					Aparatur		114.120.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						113.417.000,00					Aparatur		114.120.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	22.310.000,00						2 Unit	26.190.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		5 Unit	8 Unit	21.080.000,00						8 Unit	23.700.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	34.880.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit		28 Unit	27 Unit	18.003.000,00						27 Unit	19.350.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	13.804.000,00						10 Unit	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							34.880.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	34.880.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						21.080.000,00							23.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		5 Unit	5 Unit	21.080.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Unit	23.700.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.003.000,00							19.350.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 Unit		28 Unit	27 Unit	18.003.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				27 Unit	19.350.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						22.310.000,00							26.190.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	22.310.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	26.190.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						13.804.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	11 Unit	13.804.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN BAYAN
293.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						27.886.000,00							23.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*27.886.000,00*							*23.500.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	27.886.000,00						100 %	23.500.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						27.886.000,00					Masyarakat		23.500.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						27.886.000,00					Masyarakat		23.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	25.386.000,00						2 Laporan	20.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00						1 Laporan	3.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						25.386.000,00							20.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	25.386.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	20.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN BAYAN
294.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						579.482.700,00							751.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*129.482.700,00*							*106.500.000,00*	
			2.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	129.482.700,00						100 %	106.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						129.482.700,00					Masyarakat		106.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						129.482.700,00					Masyarakat		106.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	114.430.000,00						1 Laporan	90.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	15.052.700,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						15.052.700,00							16.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	15.052.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Lembaga Kemasyarakatan	16.000.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						114.430.000,00							90.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	114.430.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	90.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
295.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						19.295.000,00							19.500.000,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*19.295.000,00*							*19.500.000,00*	
			2.Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	19.295.000,00						100 %	19.500.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						19.295.000,00					Masyarakat		19.500.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						19.295.000,00					Masyarakat		19.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	19.295.000,00						4 Laporan	19.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						19.295.000,00							19.500.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	19.295.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Laporan	19.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
296.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						31.026.000,00							33.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*31.026.000,00*							*33.500.000,00*	
			2.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	31.026.000,00						100 %	33.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						31.026.000,00					Masyarakat		33.500.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						31.026.000,00					Masyarakat		33.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.940.500,00						1 Dokumen	18.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 Orang		70 Orang	70 Orang	14.085.500,00						70 Orang	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						14.085.500,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 Orang		70 Orang	70 Orang	14.085.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				70 Orang	15.000.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						16.940.500,00							18.500.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.940.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	18.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
297.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						127.369.000,00							111.000.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*127.369.000,00*							*111.000.000,00*	
			2.Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	127.369.000,00						100 %	111.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						127.369.000,00					Desa/Kelurahan		111.000.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						127.369.000,00					Desa/Kelurahan		111.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.317.500,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.488.000,00						1 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.464.000,00						1 Dokumen	62.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.308.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.423.500,00						1 Dokumen	8.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.980.000,00						1 Dokumen	26.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	3.388.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						3.388.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	3.388.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						5.423.500,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.423.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						22.980.000,00							26.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.980.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	26.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						43.464.000,00							62.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.464.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	62.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						41.317.500,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.317.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						6.488.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.488.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN BAYAN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						4.308.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.308.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BAYAN
		KELURAHAN SUCEN JURUTENGAH						450.000.000,00							645.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						450.000.000,00							645.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						450.000.000,00							645.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
298.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						579.482.700,00							751.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*450.000.000,00*							*645.000.000,00*	
			2.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	450.000.000,00						100 %	645.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						450.000.000,00					-		645.000.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						450.000.000,00					-		645.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	142.939.600,00						1 Pokmas / Ormas	145.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		1 Unit	2 Unit	307.060.400,00						2 Unit	500.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						307.060.400,00							500.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		1 Unit	2 Unit	307.060.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bayan || Kelurahan Sucenjurutengah || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	500.000.000,00	KELURAHAN SUCEN JURUTENGAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						142.939.600,00							145.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	142.939.600,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Bayan || Kelurahan Sucenjurutengah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Pokmas / Ormas	145.000.000,00	KELURAHAN SUCEN JURUTENGAH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN KUTOARJO KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN KUTOARJO						7.577.647.150,00							9.257.543.538,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						7.577.647.150,00							9.257.543.538,00	
	7.01	KECAMATAN						7.577.647.150,00							9.257.543.538,00	
299.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.166.968.350,00							8.733.178.718,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah (Kec. Kutoarjo)						*7.165.888.350,00*							*8.731.990.718,00*	
			1.Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100 %		100 %	100 %	7.165.888.350,00						100 %	8.731.990.718,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.807.600,00					Aparatur		7.488.360,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.807.600,00					Aparatur		7.488.360,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	290.000,00						1 Dokumen	319.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	4.777.600,00						23 Dokumen	5.255.360,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	1.740.000,00						22 Laporan	1.914.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.777.600,00							5.255.360,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen		23 Dokumen	22 Dokumen	4.777.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				23 Dokumen	5.255.360,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.740.000,00							1.914.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	1.740.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	1.914.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						290.000,00							319.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	290.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	319.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.476.231.400,00					Aparatur		6.917.898.273,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.476.231.400,00					Aparatur		6.917.898.273,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	4.534.400,00						44 Laporan	4.987.840,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	5.471.697.000,00						60 Orang/bulan	6.912.910.433,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.471.697.000,00							6.912.910.433,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	53 Orang/bulan	5.471.697.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				60 Orang/bulan	6.912.910.433,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.534.400,00							4.987.840,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	4.534.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	4.987.840,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						540.000,00					Aparatur		594.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						540.000,00					Aparatur		594.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	540.000,00						11 Laporan	594.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						540.000,00							594.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	540.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	594.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						540.000,00					Aparatur		594.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						540.000,00					Aparatur		594.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	540.000,00						16 Dokumen	594.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						540.000,00							594.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	540.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	594.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						540.000,00					Aparatur		594.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						540.000,00					Aparatur		594.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	540.000,00						17 Dokumen	594.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						540.000,00							594.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	540.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	594.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						271.827.800,00					Aparatur		299.010.580,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						271.827.800,00					Aparatur		299.010.580,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.653.100,00						1 Dokumen	19.433.700,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	912.000,00						12 Laporan	990.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	37.346.000,00						12 Laporan	41.096.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	72.387.000,00						7 Paket	79.228.380,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	77.972.100,00						7 Paket	85.394.100,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	20.152.500,00						7 Paket	22.140.800,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	22.316.500,00						7 Paket	24.807.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	23.088.600,00						7 Paket	25.920.400,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						22.316.500,00							24.807.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	22.316.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Paket	24.807.200,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						23.088.600,00							25.920.400,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	23.088.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Paket	25.920.400,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						72.387.000,00							79.228.380,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	72.387.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Paket	79.228.380,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.152.500,00							22.140.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	20.152.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Paket	22.140.800,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						77.972.100,00							85.394.100,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	77.972.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				7 Paket	85.394.100,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						912.000,00							990.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	912.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	990.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						37.346.000,00							41.096.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	37.346.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	41.096.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						17.653.100,00							19.433.700,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.653.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	19.433.700,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						519.406.750,00					Aparatur		583.221.925,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						519.406.750,00					Aparatur		583.221.925,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	10 Unit	69.152.000,00						10 Unit	74.209.300,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	10 Unit	152.903.000,00						10 Unit	168.023.900,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	102.951.750,00						1 Unit	123.419.725,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	194.400.000,00						0 Unit	217.569.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						69.152.000,00							74.209.300,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	14 Unit	69.152.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	74.209.300,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						152.903.000,00							168.023.900,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	17 Unit	152.903.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	168.023.900,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						102.951.750,00							123.419.725,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	3 Unit	102.951.750,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	123.419.725,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						194.400.000,00							217.569.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	194.400.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	217.569.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						455.619.800,00					Aparatur		444.777.080,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahTersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						455.619.800,00					Aparatur		444.777.080,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	69.971.000,00						12 Laporan	65.448.680,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	385.648.800,00						12 Laporan	379.328.400,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						69.971.000,00							65.448.680,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	69.971.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	65.448.680,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						385.648.800,00							379.328.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	385.648.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	379.328.400,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						435.455.000,00					Aparatur		479.000.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						435.455.000,00					Aparatur		479.000.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	274.316.000,00						8 Unit	306.762.500,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit		12 Unit	23 Unit	84.320.000,00						23 Unit	91.245.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	38.368.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		26 Unit	40 Unit	32.499.000,00						40 Unit	35.915.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		5 Unit	11 Unit	6.100.000,00						11 Unit	6.710.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							38.368.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	38.368.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						84.320.000,00							91.245.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit		12 Unit	21 Unit	84.320.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				23 Unit	91.245.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						32.499.000,00							35.915.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		26 Unit	45 Unit	32.499.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				40 Unit	35.915.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						274.316.000,00							306.762.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	274.316.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Unit	306.762.500,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.100.000,00							6.710.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		5 Unit	10 Unit	6.100.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Unit	6.710.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
300.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						25.189.200,00							22.208.120,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*25.189.200,00*							*22.208.120,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	25.189.200,00						100 %	22.208.120,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						24.191.200,00					Masyarakat		21.110.320,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						24.191.200,00					Masyarakat		21.110.320,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.191.200,00						1 Dokumen	21.110.320,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						24.191.200,00							21.110.320,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.191.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	21.110.320,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						998.000,00					Masyarakat		1.097.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						998.000,00					Masyarakat		1.097.800,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	998.000,00						1 Laporan	1.097.800,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						998.000,00							1.097.800,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	998.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	1.097.800,00	KECAMATAN KUTOARJO
301.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3.191.007.100,00							6.705.879.895,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*188.862.200,00*							*295.254.300,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	188.862.200,00						100 %	295.254.300,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						188.862.200,00					Masyarakat		295.254.300,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						188.862.200,00					Masyarakat		295.254.300,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan		7 Laporan	8 Laporan	174.144.600,00						8 Laporan	279.376.900,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.717.600,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	15.877.400,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						14.717.600,00							15.877.400,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.717.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Lembaga Kemasyarakatan	15.877.400,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						174.144.600,00							279.376.900,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan		7 Laporan	9 Laporan	174.144.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Laporan	279.376.900,00	KECAMATAN KUTOARJO
302.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						74.771.200,00							82.248.320,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*74.771.200,00*							*82.248.320,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	74.771.200,00						100 %	82.248.320,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						74.771.200,00					Masyarakat		82.248.320,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						74.771.200,00					Masyarakat		82.248.320,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	36.450.800,00						4 Laporan	42.280.920,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.320.400,00						1 Laporan	39.967.400,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						36.450.800,00							42.280.920,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	36.450.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Laporan	42.280.920,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						38.320.400,00							39.967.400,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	38.320.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	39.967.400,00	KECAMATAN KUTOARJO
303.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						20.718.400,00							32.434.600,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*20.718.400,00*							*32.434.600,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	20.718.400,00						100 %	32.434.600,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.718.400,00					Aparatur dan Masyarakat		32.434.600,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.718.400,00					Aparatur dan Masyarakat		32.434.600,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.718.400,00						1 Dokumen	32.434.600,00	
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.718.400,00							32.434.600,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.718.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	32.434.600,00	KECAMATAN KUTOARJO
304.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						101.137.800,00							92.219.480,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*101.137.800,00*							*92.219.480,00*	
			1.Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	101.137.800,00						100 %	92.219.480,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						101.137.800,00					Masyarakat		92.219.480,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						101.137.800,00					Masyarakat		92.219.480,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	30.085.800,00						1 Dokumen	12.441.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.048.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.424.000,00						1 Dokumen	45.140.480,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	3.380.000,00						2 Dokumen	3.718.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00						1 Dokumen	9.240.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00						1 Dokumen	9.680.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						8.400.000,00							9.240.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	9.240.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						8.800.000,00							9.680.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	8.800.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	9.680.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						40.424.000,00							45.140.480,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.424.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	45.140.480,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						30.085.800,00							12.441.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	30.085.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	12.441.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						10.048.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10.048.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						3.380.000,00							3.718.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	3.380.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	3.718.000,00	KECAMATAN KUTOARJO
		KELURAHAN KUTOARJO						601.956.700,00							1.305.354.490,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						601.956.700,00							1.305.354.490,00	
	7.01	KECAMATAN						601.956.700,00							1.305.354.490,00	
305.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3.191.007.100,00							6.705.879.895,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*601.956.700,00*							*1.305.354.490,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	601.956.700,00						100 %	1.305.354.490,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.002.144.900,00					Masyarakat		6.410.625.595,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.002.144.900,00					Masyarakat		6.410.625.595,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas		35 Pokmas / Ormas	35 Pokmas / Ormas	976.229.800,00						35 Pokmas / Ormas	2.255.443.850,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit		23 Unit	23 Unit	2.025.915.100,00						23 Unit	4.155.181.745,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						335.000.000,00							715.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit		23 Unit	4 Unit	335.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				23 Unit	715.000.000,00	KELURAHAN KUTOARJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						266.956.700,00							590.354.490,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas		35 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	266.956.700,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Kutoarjo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Pokmas / Ormas	590.354.490,00	KELURAHAN KUTOARJO
		KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN						450.953.100,00							1.057.944.250,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						450.953.100,00							1.057.944.250,00	
	7.01	KECAMATAN						450.953.100,00							1.057.944.250,00	
306.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3.191.007.100,00							6.705.879.895,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*450.953.100,00*							*1.057.944.250,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	450.953.100,00						100 %	1.057.944.250,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.002.144.900,00					Masyarakat		6.410.625.595,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.002.144.900,00					Masyarakat		6.410.625.595,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas		35 Pokmas / Ormas	35 Pokmas / Ormas	976.229.800,00						35 Pokmas / Ormas	2.255.443.850,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit		23 Unit	23 Unit	2.025.915.100,00						23 Unit	4.155.181.745,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						318.258.800,00							715.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit		23 Unit	4 Unit	318.258.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Kembaran || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				23 Unit	715.000.000,00	KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						132.694.300,00							342.944.250,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas		35 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	132.694.300,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Kembaran || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Pokmas / Ormas	342.944.250,00	KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN
		KELURAHAN BAYEM						447.925.000,00							832.766.220,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						447.925.000,00							832.766.220,00	
	7.01	KECAMATAN						447.925.000,00							832.766.220,00	
307.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3.191.007.100,00							6.705.879.895,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*447.925.000,00*							*832.766.220,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	447.925.000,00						100 %	832.766.220,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.002.144.900,00					Masyarakat		6.410.625.595,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.002.144.900,00					Masyarakat		6.410.625.595,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas		35 Pokmas / Ormas	35 Pokmas / Ormas	976.229.800,00						35 Pokmas / Ormas	2.255.443.850,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit		23 Unit	23 Unit	2.025.915.100,00						23 Unit	4.155.181.745,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						362.000.000,00							605.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit		23 Unit	5 Unit	362.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Bayem || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)				23 Unit	605.000.000,00	KELURAHAN BAYEM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						85.925.000,00							227.766.220,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas		35 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	85.925.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Bayem || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Pokmas / Ormas	227.766.220,00	KELURAHAN BAYEM
		KELURAHAN KATERBAN						546.475.900,00							1.203.630.120,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						546.475.900,00							1.203.630.120,00	
	7.01	KECAMATAN						546.475.900,00							1.203.630.120,00	
308.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3.191.007.100,00							6.705.879.895,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*546.475.900,00*							*1.203.630.120,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	546.475.900,00						100 %	1.203.630.120,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.002.144.900,00					Masyarakat		6.410.625.595,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.002.144.900,00					Masyarakat		6.410.625.595,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas		35 Pokmas / Ormas	35 Pokmas / Ormas	976.229.800,00						35 Pokmas / Ormas	2.255.443.850,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit		23 Unit	23 Unit	2.025.915.100,00						23 Unit	4.155.181.745,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						364.071.500,00							742.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit		23 Unit	3 Unit	364.071.500,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Katerban || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)				23 Unit	742.500.000,00	KELURAHAN KATERBAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						182.404.400,00							461.130.120,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas		35 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	182.404.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Katerban || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Pokmas / Ormas	461.130.120,00	KELURAHAN KATERBAN
		KELURAHAN BANDUNG						449.414.000,00							1.089.312.840,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						449.414.000,00							1.089.312.840,00	
	7.01	KECAMATAN						449.414.000,00							1.089.312.840,00	
309.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3.191.007.100,00							6.705.879.895,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*449.414.000,00*							*1.089.312.840,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	449.414.000,00						100 %	1.089.312.840,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.002.144.900,00					Masyarakat		6.410.625.595,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.002.144.900,00					Masyarakat		6.410.625.595,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas		35 Pokmas / Ormas	35 Pokmas / Ormas	976.229.800,00						35 Pokmas / Ormas	2.255.443.850,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit		23 Unit	23 Unit	2.025.915.100,00						23 Unit	4.155.181.745,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						325.000.000,00							788.191.800,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit		23 Unit	4 Unit	325.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Bandung || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)				23 Unit	788.191.800,00	KELURAHAN BANDUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						124.414.000,00							301.121.040,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas		35 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	124.414.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Bandung || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Pokmas / Ormas	301.121.040,00	KELURAHAN BANDUNG
		KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN						505.420.200,00							921.617.675,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						505.420.200,00							921.617.675,00	
	7.01	KECAMATAN						505.420.200,00							921.617.675,00	
310.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						3.191.007.100,00							6.705.879.895,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*505.420.200,00*							*921.617.675,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	505.420.200,00						100 %	921.617.675,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.002.144.900,00					Masyarakat		6.410.625.595,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						3.002.144.900,00					Masyarakat		6.410.625.595,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas		35 Pokmas / Ormas	35 Pokmas / Ormas	976.229.800,00						35 Pokmas / Ormas	2.255.443.850,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit		23 Unit	23 Unit	2.025.915.100,00						23 Unit	4.155.181.745,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						321.584.800,00							589.489.945,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	23 Unit		23 Unit	3 Unit	321.584.800,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				23 Unit	589.489.945,00	KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						183.835.400,00							332.127.730,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	35 Pokmas / Ormas		35 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	183.835.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Kutoarjo || Kelurahan Semawung Daleman || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				35 Pokmas / Ormas	332.127.730,00	KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN BUTUH KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN BUTUH						2.711.443.900,00							2.692.644.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.711.443.900,00							2.692.644.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.711.443.900,00							2.692.644.000,00	
311.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.504.012.700,00							2.523.809.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*2.502.512.700,00*							*2.522.554.000,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.502.512.700,00						100 %	2.522.554.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.625.000,00					-		5.854.700,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.625.000,00					-		5.854.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000,00						1 Dokumen	128.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	2.500.000,00						22 Dokumen	4.375.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	1.000.000,00						22 Laporan	1.351.700,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.500.000,00							4.375.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	4.375.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00							1.351.700,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	1.351.700,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						125.000,00							128.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	128.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.290.932.000,00					-		2.267.871.700,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.290.932.000,00					-		2.267.871.700,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.000.000,00						44 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.289.932.000,00						14 Orang/bulan	2.266.871.700,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.289.932.000,00							2.266.871.700,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.289.932.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Orang/bulan	2.266.871.700,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000,00					-		255.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000,00					-		255.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	250.000,00						11 Laporan	255.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						250.000,00							255.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	255.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						250.000,00					-		250.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						250.000,00					-		250.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		0 Dokumen	16 Dokumen	250.000,00						16 Dokumen	250.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						250.000,00							250.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		0 Dokumen	16 Dokumen	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	250.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000,00					-		255.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000,00					-		255.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	250.000,00						17 Dokumen	255.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						250.000,00							255.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	255.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						62.587.200,00					-		76.307.700,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						62.587.200,00					-		76.307.700,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.332.000,00						2 Dokumen	1.358.800,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	2.726.700,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	699.800,00						12 Laporan	715.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00						12 Laporan	13.093.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	25.200.000,00						12 Paket	25.706.500,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	28 Paket		56 Paket	28 Paket	15.144.800,00						28 Paket	21.288.100,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	5.424.800,00						5 Paket	5.517.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.467.800,00						12 Paket	2.517.400,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 Paket		23 Paket	33 Paket	3.318.000,00						33 Paket	3.384.700,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.467.800,00							2.517.400,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.467.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	2.517.400,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.318.000,00							3.384.700,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 Paket		23 Paket	33 Paket	3.318.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				33 Paket	3.384.700,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.200.000,00							25.706.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	25.200.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	25.706.500,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.424.800,00							5.517.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	5.424.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	5.517.500,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.332.000,00							1.358.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.332.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	1.358.800,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						15.144.800,00							21.288.100,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	28 Paket		56 Paket	28 Paket	15.144.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				28 Paket	21.288.100,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.06.0008	Fasiltasi Kunjungan Tamu						699.800,00							715.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	699.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	715.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.500.000,00							13.093.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	13.093.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.500.000,00							2.726.700,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	2.726.700,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.841.000,00					-		51.720.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.841.000,00					-		51.720.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0 Unit	20 Unit	9.210.000,00						20 Unit	12.720.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	3 Unit	15.631.000,00						3 Unit	24.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						9.210.000,00							12.720.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		0 Unit	20 Unit	9.210.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Unit	12.720.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.631.000,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	3 Unit	15.631.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Unit	24.000.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	0,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.134.500,00					-		41.961.400,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.134.500,00					-		41.961.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.998.500,00						12 Laporan	15.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.136.000,00						12 Laporan	26.661.400,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.998.500,00							15.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.998.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	15.300.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						26.136.000,00							26.661.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.136.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	26.661.400,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						80.143.000,00					-		79.333.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						80.143.000,00					-		79.333.500,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	21.243.000,00						1 Unit	21.667.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	15.810.000,00						9 Unit	16.117.600,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	35.581.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						5 Unit	1.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	3.650.000,00						15 Unit	3.723.400,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.220.000,00						2 Unit	1.244.500,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							35.581.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	35.581.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.810.000,00							16.117.600,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	15.810.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				9 Unit	16.117.600,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Unit	1.000.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.650.000,00							3.723.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	5 Unit	3.650.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Unit	3.723.400,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						21.243.000,00							21.667.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	21.243.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	21.667.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.220.000,00							1.244.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	1.244.500,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	0,00	KECAMATAN BUTUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
312.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						24.584.700,00							18.665.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik														
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	24.584.700,00						-	18.665.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						0,00					-		0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						0,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		Laporan	0 Laporan	0,00						2 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	0,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						23.584.700,00					-		15.665.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						23.584.700,00					-		15.665.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.470.000,00						2 Dokumen	4.200.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	20.379.700,00						2 Laporan	7.965.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	1.735.000,00						8 Laporan	3.500.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						1.470.000,00							4.200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.470.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	4.200.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						20.379.700,00							7.965.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	20.379.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	7.965.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.735.000,00							3.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	1.735.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Laporan	3.500.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.000.000,00					-		3.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.000.000,00					-		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00						1 Laporan	3.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN BUTUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
313.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						63.149.500,00							63.933.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan														
			Persentase Penyelenggaranaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	63.149.500,00						-	63.933.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						63.149.500,00					-		63.933.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						63.149.500,00					-		63.933.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	45.933.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13.149.500,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						13.149.500,00							18.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	13.149.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Lembaga Kemasyarakatan	18.000.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							45.933.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Laporan	45.933.000,00	KECAMATAN BUTUH
314.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						6.565.000,00							6.565.000,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*6.565.000,00*							*6.565.000,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	6.565.000,00						100 %	6.565.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5.340.000,00					-		5.065.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						5.340.000,00					-		5.065.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.220.000,00						1 Laporan	2.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.120.000,00						1 Laporan	2.565.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.220.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	2.500.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						3.120.000,00							2.565.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.120.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	2.565.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.225.000,00					-		1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						1.225.000,00					-		1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.225.000,00						1 Laporan	1.500.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						1.225.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.225.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN BUTUH
315.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						20.075.000,00							17.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*20.075.000,00*							*17.000.000,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	20.075.000,00						100 %	17.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.075.000,00					-		17.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						20.075.000,00					-		17.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.505.000,00						1 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang		Orang	0 Orang	0,00						50 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang		50 Orang	50 Orang	3.570.000,00						50 Orang	4.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						3.570.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	50 Orang		50 Orang	50 Orang	3.570.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				50 Orang	4.000.000,00	KECAMATAN BUTUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang		Orang	0 Orang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				50 Orang	0,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						16.505.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.505.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN BUTUH
316.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						93.057.000,00							62.672.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*90.844.000,00*							*60.459.000,00*	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	90.844.000,00						100 %	60.459.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						93.057.000,00					-		62.672.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						93.057.000,00					-		62.672.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00						Dokumen	11.615.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.213.000,00						1 Dokumen	2.213.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.400.000,00						1 Dokumen	37.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.310.000,00						1 Dokumen	1.310.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.503.000,00						1 Dokumen	2.503.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.418.000,00						1 Dokumen	5.418.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.213.000,00						1 Dokumen	2.213.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						2.213.000,00							2.213.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.213.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.213.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.503.000,00							2.503.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.503.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.503.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						5.418.000,00							5.418.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.418.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	5.418.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						37.400.000,00							37.400.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.400.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	37.400.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						42.000.000,00							11.615.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Dokumen	11.615.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						2.213.000,00							2.213.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.213.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.213.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.310.000,00							1.310.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.310.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.310.000,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUTUH
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	0,00	KECAMATAN BUTUH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN PITURUH KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN PITURUH						2.183.462.100,00							3.277.782.590,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.183.462.100,00							3.277.782.590,00	
	7.01	KECAMATAN						2.183.462.100,00							3.277.782.590,00	
317.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.946.301.000,00							2.939.245.790,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*1.946.301.000,00*								
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.945.801.000,00						-	2.939.245.790,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00					Aparatur		6.591.840,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00					Aparatur		6.591.840,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	962.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	1.740.000,00						23 Dokumen	4.788.740,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	760.000,00						22 Laporan	840.600,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.740.000,00							4.788.740,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	1.740.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				23 Dokumen	4.788.740,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						760.000,00							840.600,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	760.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	840.600,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						500.000,00							962.500,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	962.500,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.649.696.000,00					Aparatur		2.556.097.550,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.649.696.000,00					Aparatur		2.556.097.550,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	850.000,00						44 Laporan	1.732.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.648.846.000,00						20 Orang/bulan	2.554.365.550,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.648.846.000,00							2.554.365.550,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.648.846.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Orang/bulan	2.554.365.550,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						850.000,00							1.732.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	850.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	1.732.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					Aparatur		2.750.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					Aparatur		2.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		Laporan	11 Laporan	1.000.000,00						11 Laporan	2.750.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.000.000,00							2.750.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		Laporan	11 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	2.750.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						250.000,00					Aparatur		275.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						250.000,00					Aparatur		275.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	250.000,00						12 Dokumen	275.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						250.000,00							275.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	275.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Aparatur		550.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Aparatur		550.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	500.000,00						17 Dokumen	550.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						500.000,00							550.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	550.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						62.274.500,00					Aparatur		81.726.700,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						62.274.500,00					Aparatur		81.726.700,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	1.465.200,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	1.650.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	992.000,00						12 Laporan	1.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00						12 Laporan	8.800.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.710.600,00						1 Paket	21.681.600,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket		1 Paket	16 Paket	15.571.900,00						16 Paket	24.587.300,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	4 Paket	7.500.000,00						4 Paket	9.429.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	3 Paket	2.000.000,00						3 Paket	3.983.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		1 Paket	8 Paket	7.000.000,00						8 Paket	9.029.300,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							3.983.800,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	3.983.800,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.000.000,00							9.029.300,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Paket	9.029.300,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19.710.600,00							21.681.600,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.710.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	21.681.600,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.500.000,00							9.429.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	9.429.500,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							1.465.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan				1 Dokumen	1.465.200,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						15.571.900,00							24.587.300,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket		1 Paket	1 Paket	15.571.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Paket	24.587.300,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						992.000,00							1.100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	992.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	1.100.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						8.000.000,00							8.800.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	8.800.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.500.000,00							1.650.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	1.650.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Aparatur		27.487.400,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					Aparatur		27.487.400,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						5 Unit	14.692.200,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	7.295.200,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	5.500.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							14.692.200,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Unit	14.692.200,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							7.295.200,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	7.295.200,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	5.500.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.922.500,00					Aparatur		108.139.300,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						126.922.500,00					Aparatur		108.139.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.428.500,00						12 Laporan	42.271.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	88.494.000,00						12 Laporan	65.868.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						38.428.500,00							42.271.300,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.428.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	42.271.300,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						88.494.000,00							65.868.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	88.494.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	65.868.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						102.658.000,00					Aparatur		155.628.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						102.658.000,00					Aparatur		155.628.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	31.734.000,00						4 Unit	77.677.600,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	15.810.000,00						15 Unit	17.380.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	38.368.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit		29 Unit	29 Unit	14.970.000,00						29 Unit	18.744.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	1.924.000,00						5 Unit	3.458.400,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							38.368.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	38.368.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.810.000,00							17.380.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	8 Unit	15.810.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				15 Unit	17.380.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.970.000,00							18.744.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit		29 Unit	32 Unit	14.970.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				29 Unit	18.744.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						31.734.000,00							77.677.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	31.734.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Unit	77.677.600,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.924.000,00							3.458.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	1.924.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Unit	3.458.400,00	KECAMATAN PITURUH
318.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						28.921.400,00							57.236.200,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*28.921.400,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	28.921.400,00						-	57.236.200,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						18.921.400,00					Masyarakat		25.611.200,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						18.921.400,00					Masyarakat		25.611.200,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.128.800,00						1 Dokumen	8.936.400,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		Laporan	5 Laporan	10.463.800,00						5 Laporan	10.231.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.328.800,00						1 Laporan	6.443.300,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						4.128.800,00							8.936.400,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.128.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	8.936.400,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						10.463.800,00							10.231.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.463.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Laporan	10.231.500,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						4.328.800,00							6.443.300,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.328.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	6.443.300,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						3.000.000,00					Masyarakat		20.625.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						3.000.000,00					Masyarakat		20.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	20.625.000,00	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						3.000.000,00							20.625.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	20.625.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.000.000,00					Masyarakat		11.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.000.000,00					Masyarakat		11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	7.000.000,00						1 Laporan	11.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						7.000.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	11.000.000,00	KECAMATAN PITURUH
319.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						89.272.200,00							200.115.200,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*89.272.200,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100 %		100 %	100 %	89.272.200,00						-	200.115.200,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						89.272.200,00					Masyarakat		200.115.200,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						89.272.200,00					Masyarakat		200.115.200,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	78.870.800,00						1 Laporan	178.915.400,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.401.400,00						1 Lembaga Kemasyarakatan	21.199.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10.401.400,00							21.199.800,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.401.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Lembaga Kemasyarakatan	21.199.800,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						78.870.800,00							178.915.400,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	78.870.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	178.915.400,00	KECAMATAN PITURUH
320.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.888.300,00							12.488.300,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*2.888.300,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	2.888.300,00						-	12.488.300,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.888.300,00					Masyarakat		12.488.300,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						2.888.300,00					Masyarakat		12.488.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.520.300,00						1 Laporan	11.029.700,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	368.000,00						1 Laporan	1.458.600,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.520.300,00							11.029.700,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.520.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	11.029.700,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						368.000,00							1.458.600,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	368.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	1.458.600,00	KECAMATAN PITURUH
321.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						25.664.700,00							28.231.500,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*25.664.700,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	25.664.700,00						-	28.231.500,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						25.664.700,00					Masyarakat		28.231.500,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						25.664.700,00					Masyarakat		28.231.500,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.230.200,00						1 Dokumen	17.398.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang		Orang	350 Orang	8.434.500,00						350 Orang	10.832.800,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						8.434.500,00							10.832.800,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	350 Orang		Orang	350 Orang	8.434.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				350 Orang	10.832.800,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						17.230.200,00							17.398.700,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.230.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	17.398.700,00	KECAMATAN PITURUH
322.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						90.414.500,00							40.465.600,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*90.414.500,00*								
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	90.414.500,00						-	40.465.600,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						90.414.500,00					Masyarakat		40.465.600,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						90.414.500,00					Masyarakat		40.465.600,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.537.600,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.333.800,00						1 Dokumen	2.428.500,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.155.400,00						1 Dokumen	26.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.875.000,00						1 Dokumen	1.409.900,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.391.300,00						1 Dokumen	3.824.200,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.142.600,00						1 Dokumen	2.906.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	3.978.800,00						2 Dokumen	3.196.800,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						3.978.800,00							3.196.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	3.978.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	3.196.800,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						4.391.300,00							3.824.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.391.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	3.824.200,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						4.142.600,00							2.906.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.142.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.906.200,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						37.155.400,00							26.700.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	37.155.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	26.700.000,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						34.537.600,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.537.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Dokumen	0,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						4.333.800,00							2.428.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.333.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.428.500,00	KECAMATAN PITURUH
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.875.000,00							1.409.900,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.875.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.409.900,00	KECAMATAN PITURUH

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN KEMIRI KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN KEMIRI						2.360.005.276,00							4.176.313.460,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.360.005.276,00							4.176.313.460,00	
	7.01	KECAMATAN						2.360.005.276,00							4.176.313.460,00	
323.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.169.229.276,00							3.249.379.660,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*2.169.229.276,00*							*3.249.379.660,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.169.229.276,00						100 %	3.249.379.660,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.650.000,00					Aparatur		44.461.840,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.650.000,00					Aparatur		44.461.840,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00						1 Dokumen	500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	3.840.000,00						22 Dokumen	30.517.760,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	2.560.000,00						20 Laporan	13.444.080,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.840.000,00							30.517.760,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	26 Dokumen	3.840.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	30.517.760,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.560.000,00							13.444.080,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan		20 Laporan	22 Laporan	2.560.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Laporan	13.444.080,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						250.000,00							500.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	500.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.953.950.356,00					Aparatur		2.855.035.040,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.953.950.356,00					Aparatur		2.855.035.040,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.920.000,00						44 Laporan	13.843.960,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.952.030.356,00						14 Orang/bulan	2.841.191.080,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.952.030.356,00							2.841.191.080,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.952.030.356,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Orang/bulan	2.841.191.080,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.920.000,00							13.843.960,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	1.920.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	13.843.960,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						125.000,00					Masyarakat		5.226.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						125.000,00					Masyarakat		5.226.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	125.000,00						16 Dokumen	5.226.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						125.000,00							5.226.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	125.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	5.226.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						43.242.200,00					Aparatur		93.534.480,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						43.242.200,00					Aparatur		93.534.480,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	750.000,00						2 Dokumen	9.899.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.665.000,00						12 Laporan	29.871.400,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.400.000,00						1 Paket	10.920.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	7.954.400,00						17 Paket	13.638.170,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	8.096.800,00						3 Paket	15.415.400,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	4.809.500,00						5 Paket	6.937.450,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	4.566.500,00						14 Paket	6.852.560,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.809.500,00							6.937.450,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	4.809.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	6.937.450,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.566.500,00							6.852.560,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	10 Paket	4.566.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Paket	6.852.560,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.400.000,00							10.920.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.400.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Paket	10.920.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.096.800,00							15.415.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	8.096.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	15.415.400,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						7.954.400,00							13.638.170,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	19 Paket	7.954.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Paket	13.638.170,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						8.665.000,00							29.871.400,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.665.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	29.871.400,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						750.000,00							9.899.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	750.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	9.899.500,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.963.720,00					Aparatur		132.120.300,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.963.720,00					Aparatur		132.120.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.959.720,00						12 Laporan	36.348.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.004.000,00						0 Laporan	95.772.300,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.959.720,00							36.348.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.959.720,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	36.348.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						68.004.000,00							95.772.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.004.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Laporan	95.772.300,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.298.000,00					Masyarakat		119.002.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.298.000,00					Masyarakat		119.002.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	14.938.000,00						4 Unit	26.481.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	10.540.000,00						8 Unit	20.540.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	51.935.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	4.990.000,00						10 Unit	18.460.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	610.000,00						2 Unit	1.586.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							51.935.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	51.935.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.540.000,00							20.540.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	2 Unit	10.540.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Unit	20.540.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.990.000,00							18.460.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	7 Unit	4.990.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	18.460.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						14.938.000,00							26.481.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	1 Unit	14.938.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Unit	26.481.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						610.000,00							1.586.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	610.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	1.586.000,00	KECAMATAN KEMIRI
324.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						11.000.000,00							65.639.600,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*11.000.000,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	11.000.000,00						-	65.639.600,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10.000.000,00					Masyarakat		51.047.100,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						10.000.000,00					Masyarakat		51.047.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	15.756.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						Laporan	23.752.040,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00						2 Laporan	11.539.060,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						2.000.000,00							15.756.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	15.756.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						5.000.000,00							23.752.040,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Laporan	23.752.040,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.000.000,00							11.539.060,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	11.539.060,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.000.000,00					Masyarakat		14.592.500,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.000.000,00					Masyarakat		14.592.500,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00						1 Laporan	14.592.500,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1.000.000,00							14.592.500,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	14.592.500,00	KECAMATAN KEMIRI
325.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						67.000.000,00							279.415.760,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*67.000.000,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	67.000.000,00						-	279.415.760,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						67.000.000,00					Masyarakat		279.415.760,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						67.000.000,00					Masyarakat		279.415.760,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	60.000.000,00						6 Laporan	252.375.760,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	27.040.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						7.000.000,00							27.040.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	7.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Lembaga Kemasyarakatan	27.040.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						60.000.000,00							252.375.760,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	60.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Laporan	252.375.760,00	KECAMATAN KEMIRI
326.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						9.856.000,00							110.188.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*9.856.000,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	4.928.000,00						-	110.188.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						9.856.000,00					Masyarakat		110.188.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						9.856.000,00					Masyarakat		110.188.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.928.000,00						4 Laporan	43.225.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.928.000,00						2 Laporan	66.963.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						4.928.000,00							43.225.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.928.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Laporan	43.225.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						4.928.000,00							66.963.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	4.928.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	66.963.000,00	KECAMATAN KEMIRI
327.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						17.360.000,00							159.497.000,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*17.360.000,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	17.360.000,00						-	159.497.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						17.360.000,00					Masyarakat		159.497.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						17.360.000,00					Masyarakat		159.497.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.840.000,00						1 Dokumen	88.868.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 Orang		80 Orang	80 Orang	3.520.000,00						80 Orang	70.629.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						3.520.000,00							70.629.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	80 Orang		80 Orang	55 Orang	3.520.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				80 Orang	70.629.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						13.840.000,00							88.868.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.840.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	88.868.000,00	KECAMATAN KEMIRI
328.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						85.560.000,00							312.193.440,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*85.560.000,00*								
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	85.560.000,00						-	312.193.440,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						85.560.000,00					Masyarakat		312.193.440,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						85.560.000,00					Masyarakat		312.193.440,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00						0 Dokumen	97.780.800,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	13.494.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	99.250.320,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	21.445.320,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00						1 Dokumen	16.016.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	13.650.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	19.838.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00						2 Dokumen	16.679.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.560.000,00						1 Dokumen	14.040.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						2.560.000,00							14.040.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.560.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	14.040.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						3.000.000,00							19.838.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	19.838.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						7.000.000,00							16.679.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	16.679.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						20.000.000,00							99.250.320,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	99.250.320,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						42.000.000,00							97.780.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	97.780.800,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						5.000.000,00							13.494.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	13.494.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						3.000.000,00							13.650.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	13.650.000,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						3.000.000,00							21.445.320,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	21.445.320,00	KECAMATAN KEMIRI
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						0,00							16.016.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	16.016.000,00	KECAMATAN KEMIRI

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN BRUNO KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN BRUNO						2.481.256.492,00							3.407.602.985,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.481.256.492,00							3.407.602.985,00	
	7.01	KECAMATAN						2.481.256.492,00							3.407.602.985,00	
329.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.320.030.792,00							2.923.636.045,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*2.320.030.792,00*							*2.920.886.045,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.320.030.792,00						100 %	2.920.886.045,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.870.000,00					Aparatur		8.031.485,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.870.000,00					Aparatur		8.031.485,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	500.000,00						1 Dokumen	1.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	3.750.000,00						22 Dokumen	3.647.145,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	3.620.000,00						22 Laporan	3.284.340,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.750.000,00							3.647.145,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	3.647.145,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.620.000,00							3.284.340,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	3.620.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	3.284.340,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						500.000,00							1.100.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.100.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.009.948.222,00					Aparatur		2.513.807.286,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat						2.009.948.222,00					Aparatur		2.513.807.286,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	3.375.000,00						44 Laporan	2.519.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.006.573.222,00						18 Orang/bulan	2.511.288.286,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.006.573.222,00							2.511.288.286,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.006.573.222,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				18 Orang/bulan	2.511.288.286,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.375.000,00							2.519.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	3.375.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	2.519.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.500.000,00					Aparatur		1.650.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.500.000,00					Aparatur		1.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		Laporan	11 Laporan	1.500.000,00						11 Laporan	1.650.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.500.000,00							1.650.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		Laporan	11 Laporan	1.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	1.650.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						750.000,00					Aparatur		1.100.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						750.000,00					Aparatur		1.100.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	750.000,00						16 Dokumen	1.100.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						750.000,00							1.100.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	750.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	1.100.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						875.000,00					Aparatur		2.062.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						875.000,00					Aparatur		2.062.500,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	875.000,00						17 Dokumen	2.062.500,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						875.000,00							2.062.500,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	875.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	2.062.500,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						68.198.500,00					Aparatur		92.195.840,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat						68.198.500,00					Aparatur		92.195.840,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	2.688.100,00						5 Dokumen	2.955.260,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.920.000,00						6 Laporan	1.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.900.000,00						12 Laporan	27.137.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	20.084.400,00						11 Paket	24.291.960,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	7.795.400,00						17 Paket	10.653.830,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.002.500,00						3 Paket	3.720.200,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	10.332.900,00						5 Paket	11.366.300,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.475.200,00						4 Paket	10.421.290,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.332.900,00							11.366.300,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	7 Paket	10.332.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Paket	11.366.300,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.475.200,00							10.421.290,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	15 Paket	6.475.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	10.421.290,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.084.400,00							24.291.960,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	1 Paket	20.084.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Paket	24.291.960,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.002.500,00							3.720.200,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3.002.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	3.720.200,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						7.795.400,00							10.653.830,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	7.795.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Paket	10.653.830,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.920.000,00							1.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.920.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Laporan	1.650.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.900.000,00							27.137.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.900.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	27.137.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.688.100,00							2.955.260,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	2.688.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Dokumen	2.955.260,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.568.000,00					Aparatur		64.007.020,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						24.568.000,00					Aparatur		64.007.020,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	4 Unit	24.568.000,00						Unit	64.007.020,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.568.000,00							64.007.020,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	24.568.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				Unit	64.007.020,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.047.070,00					Aparatur		106.132.014,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						90.047.070,00					Aparatur		106.132.014,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.687.070,00						12 Laporan	18.239.814,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.360.000,00						12 Laporan	87.892.200,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.687.070,00							18.239.814,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	14.687.070,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	18.239.814,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						75.360.000,00							87.892.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.360.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	87.892.200,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						116.274.000,00					Aparatur		134.649.900,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						116.274.000,00					Aparatur		134.649.900,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	38.024.000,00						2 Unit	55.163.900,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	26.350.000,00						8 Unit	26.070.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	38.368.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		Unit	9 Unit	6.490.000,00						10 Unit	7.139.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.190.000,00						1 Unit	7.909.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							38.368.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	38.368.000,00	KECAMATAN BRUNO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						26.350.000,00							26.070.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	6 Unit	26.350.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Unit	26.070.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.490.000,00							7.139.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		Unit	9 Unit	6.490.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	7.139.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						38.024.000,00							55.163.900,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	3 Unit	38.024.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	55.163.900,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7.190.000,00							7.909.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.190.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	7.909.000,00	KECAMATAN BRUNO
330.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						27.248.700,00							83.686.320,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*24.093.700,00*							*80.686.320,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	24.093.700,00						100 %	80.686.320,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						24.093.700,00					Masyarakat		80.686.320,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						24.093.700,00					Masyarakat		80.686.320,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.939.900,00						1 Dokumen	5.434.220,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	17.138.300,00						4 Laporan	66.232.320,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.015.500,00						2 Laporan	9.019.780,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						3.939.900,00							5.434.220,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.939.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	5.434.220,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						17.138.300,00							66.232.320,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	17.138.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Laporan	66.232.320,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.015.500,00							9.019.780,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.015.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	9.019.780,00	KECAMATAN BRUNO
			-	-		-	-	3.155.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3.155.000,00					Masyarakat		3.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3.155.000,00					Masyarakat		3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	1 Laporan	3.155.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						3.155.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-		-	1 Laporan	3.155.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	3.000.000,00	KECAMATAN BRUNO
331.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						55.983.600,00							204.614.050,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*55.983.600,00*							*204.614.050,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	55.983.600,00						100 %	204.614.050,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						55.983.600,00					Masyarakat		204.614.050,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						55.983.600,00					Masyarakat		204.614.050,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	46.926.000,00						6 Laporan	184.715.520,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.057.600,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	19.898.530,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						9.057.600,00							19.898.530,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	9.057.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Lembaga Kemasyarakatan	19.898.530,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						46.926.000,00							184.715.520,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	46.926.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Laporan	184.715.520,00	KECAMATAN BRUNO
332.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						14.569.000,00							54.998.680,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*14.569.000,00*							*54.998.680,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	14.569.000,00						100 %	54.998.680,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.705.000,00					Masyarakat		52.149.680,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						13.705.000,00					Masyarakat		52.149.680,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.115.000,00						1 Laporan	29.671.180,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.590.000,00						1 Laporan	22.478.500,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						9.115.000,00							29.671.180,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	9.115.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	29.671.180,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						4.590.000,00							22.478.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.590.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	22.478.500,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						864.000,00					Masyarakat		2.849.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						864.000,00					Masyarakat		2.849.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	864.000,00						1 Laporan	2.849.000,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						864.000,00							2.849.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	864.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	2.849.000,00	KECAMATAN BRUNO
333.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						14.814.600,00							46.330.240,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*14.814.600,00*							*46.330.240,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	14.814.600,00						100 %	46.330.240,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						14.814.600,00					Masyarakat		46.330.240,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						14.814.600,00					Masyarakat		46.330.240,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.814.600,00						1 Dokumen	28.647.740,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang		90 Orang	80 Orang	2.000.000,00						60 Orang	17.682.500,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						2.000.000,00							17.682.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang		90 Orang	90 Orang	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				60 Orang	17.682.500,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						12.814.600,00							28.647.740,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.814.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	28.647.740,00	KECAMATAN BRUNO
334.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						48.609.800,00							94.337.650,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*48.609.800,00*							*94.337.650,00*	
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	48.609.800,00						100 %	94.337.650,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						48.609.800,00					Masyarakat		94.337.650,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						48.609.800,00					Masyarakat		94.337.650,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.495.000,00						1 Dokumen	10.065.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	2.681.800,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.600.000,00						1 Dokumen	16.192.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.345.000,00						1 Dokumen	5.692.500,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.018.800,00						1 Dokumen	25.122.350,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.655.000,00						2 Dokumen	23.804.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.496.000,00						2 Dokumen	10.780.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						2.496.000,00							10.780.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.496.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	10.780.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						8.018.800,00							25.122.350,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.018.800,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	25.122.350,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						9.655.000,00							23.804.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	9.655.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	23.804.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						5.600.000,00							16.192.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	16.192.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						18.495.000,00							10.065.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.495.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	10.065.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						2.000.000,00							2.681.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.681.800,00	KECAMATAN BRUNO
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						2.345.000,00							5.692.500,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.345.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	5.692.500,00	KECAMATAN BRUNO

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN GEBANG KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN GEBANG						2.709.350.000,00							3.467.373.906,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.709.350.000,00							3.467.373.906,00	
	7.01	KECAMATAN						2.709.350.000,00							3.467.373.906,00	
335.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.528.760.000,00							3.231.373.906,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah (Kec. Gebang)						*2.526.340.000,00*							*3.231.373.906,00*	
			1.Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.526.340.000,00						100 %	3.231.373.906,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.840.000,00					-		7.250.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.840.000,00					-		7.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	5.120.000,00						1 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen		22 Dokumen	21 Dokumen	3.380.000,00						21 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	4.340.000,00						6 Laporan	500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.380.000,00							750.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen		22 Dokumen	21 Dokumen	3.380.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				21 Dokumen	750.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.340.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	4.340.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Laporan	500.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						5.120.000,00							6.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5.120.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.084.984.000,00					-		2.898.048.906,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.084.984.000,00					-		2.898.048.906,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		26 Laporan	44 Laporan	1.940.000,00						44 Laporan	275.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan		29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2.083.044.000,00						29 Orang/bulan	2.897.773.906,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.083.044.000,00							2.897.773.906,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan		29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	2.083.044.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				29 Orang/bulan	2.897.773.906,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.940.000,00							275.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		26 Laporan	44 Laporan	1.940.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	275.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.149.000,00					-		150.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.149.000,00					-		150.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		0 Laporan	6 Laporan	1.149.000,00						6 Laporan	150.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.149.000,00							150.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		0 Laporan	125000 Laporan	1.149.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Laporan	150.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.210.000,00					-		175.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.210.000,00					-		175.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.210.000,00						12 Dokumen	175.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						1.210.000,00							175.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.210.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	175.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.420.000,00					-		1.150.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.420.000,00					-		1.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.210.000,00						1 Dokumen	850.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.210.000,00						1 Dokumen	300.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.210.000,00							300.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.210.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	300.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1.210.000,00							850.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.210.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	850.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						83.236.000,00					-		80.100.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						83.236.000,00					-		80.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	960.000,00						12 Dokumen	800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.858.000,00						12 Laporan	8.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	26.880.000,00						2 Paket	31.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.608.400,00						2 Paket	16.400.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	11.400.000,00						2 Paket	9.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.786.000,00						2 Paket	6.900.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	8.743.600,00						2 Paket	7.200.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.786.000,00							6.900.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.786.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	6.900.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.743.600,00							7.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	8.743.600,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	7.200.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26.880.000,00							31.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	26.880.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	31.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.400.000,00							9.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	11.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	9.200.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						20.608.400,00							16.400.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.608.400,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Paket	16.400.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						7.858.000,00							8.600.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.858.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	8.600.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						960.000,00							800.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	960.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	800.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						79.379.000,00					-		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						79.379.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	4 Unit	4.036.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	36.638.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	8.093.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	4 Unit	30.612.000,00						0 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						4.036.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	4 Unit	4.036.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.638.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	36.638.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.093.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	8.093.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.612.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	4 Unit	30.612.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.118.000,00					-		144.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						160.118.000,00					-		144.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.338.000,00						12 Laporan	34.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	131.780.000,00						12 Laporan	110.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.338.000,00							34.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.338.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	34.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						131.780.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	131.780.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	110.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						103.424.000,00					-		100.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						103.424.000,00					-		100.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	29.384.000,00						3 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	21.080.000,00						11 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	8.640.000,00						8 Unit	9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	6.100.000,00						11 Unit	6.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Unit	35.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						21.080.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	21.080.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					11 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.640.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	8.640.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					8 Unit	9.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						29.384.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	29.384.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					3 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.100.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	6.100.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					11 Unit	6.500.000,00	KECAMATAN GEBANG
336.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						11.945.000,00							12.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*11.945.000,00*							*12.000.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	11.945.000,00						100 %	12.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						11.945.000,00					-		12.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						11.945.000,00					-		12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.945.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						11.945.000,00							12.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.945.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)					1 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
337.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						488.615.000,00							692.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*50.095.000,00*							*102.000.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	50.095.000,00						100 %	102.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						50.095.000,00					-		102.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						50.095.000,00					-		102.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	34.880.000,00						4 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakatan		25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	15.215.000,00						25 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						15.215.000,00							12.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakatan		25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	15.215.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				25 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						34.880.000,00							90.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	34.880.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Laporan	90.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
338.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						9.900.000,00							6.000.000,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*9.900.000,00*							*6.000.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	9.900.000,00						100 %	6.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						9.900.000,00					-		6.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						9.900.000,00					-		6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.900.000,00						1 Laporan	6.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						9.900.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.900.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
339.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						26.320.000,00							37.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*26.320.000,00*							*27.000.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	26.320.000,00						100 %	27.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						26.320.000,00					-		37.000.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						26.320.000,00					-		37.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen		6 Dokumen	3 Dokumen	17.680.000,00						3 Dokumen	17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang		0 Orang	30 Orang	3.840.000,00						0 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 Orang		0 Orang	75 Orang	4.800.000,00						0 Orang	10.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						4.800.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0 Orang		0 Orang	75 Orang	4.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Orang	10.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						3.840.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0 Orang		0 Orang	30 Orang	3.840.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Orang	10.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						17.680.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen		6 Dokumen	3 Dokumen	17.680.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Dokumen	17.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
340.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						82.330.000,00							79.000.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*78.618.000,00*							*69.000.000,00*	
			1.Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	78.618.000,00						100 %	69.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						82.330.000,00					-		79.000.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						82.330.000,00					-		79.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.981.000,00						0 Dokumen	17.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.712.000,00						1 Dokumen	6.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.200.000,00						2 Dokumen	18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.521.000,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.568.000,00						3 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	22.636.000,00						3 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.712.000,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						3.712.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.712.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						5.568.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.568.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						22.636.000,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	22.636.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Dokumen	16.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						19.200.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	18.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						23.981.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.981.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	17.000.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						3.712.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.712.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	6.500.000,00	KECAMATAN GEBANG
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						3.521.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.521.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Desa Bendosari || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN GEBANG
		KELURAHAN LUGOSOBO						438.520.000,00							590.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						438.520.000,00							590.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						438.520.000,00							590.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
341.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						488.615.000,00							692.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*438.520.000,00*							*590.000.000,00*	
			1.Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	438.520.000,00						100 %	590.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						438.520.000,00					-		590.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						438.520.000,00					-		590.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	138.520.000,00						1 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.000.000,00						2 Unit	460.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						300.000.000,00							460.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Kelurahan Lugosobo || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	460.000.000,00	KELURAHAN LUGOSOBO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						138.520.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	138.520.000,00	Provinsi Jawa Tengah || Kab. Purworejo || Kecamatan Gebang || Kelurahan Lugosobo || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Pokmas / Ormas	130.000.000,00	KELURAHAN LUGOSOBO

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN LOANO KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN LOANO						1.997.404.100,00							2.119.448.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.997.404.100,00							2.119.448.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.997.404.100,00							2.119.448.000,00	
342.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.798.891.000,00							1.960.426.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*1.798.641.000,00*							*1.959.926.000,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.798.641.000,00						100 %	1.959.926.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.950.000,00					-		5.375.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.950.000,00					-		5.375.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	4.405.000,00						21 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	1.295.000,00						21 Laporan	875.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.405.000,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	4.405.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				21 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.295.000,00							875.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	1.295.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				21 Laporan	875.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						250.000,00								
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4 Dokumen		- Dokumen	1 Dokumen	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	500.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.556.517.000,00					-		1.760.537.900,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.556.517.000,00					-		1.760.537.900,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	2.500.000,00						44 Laporan	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.554.017.000,00						17 Orang/bulan	1.757.537.900,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.554.017.000,00							1.757.537.900,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.554.017.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Orang/bulan	1.757.537.900,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	2.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						350.000,00					-		500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah						350.000,00					-		500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	350.000,00						6 Laporan	500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						350.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	350.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Laporan	500.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						250.000,00					-		250.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						250.000,00					-		250.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	250.000,00						12 Dokumen	250.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						250.000,00							250.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	250.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						38.606.000,00					-		43.604.100,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						38.606.000,00					-		43.604.100,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00						12 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.930.000,00						12 Laporan	3.930.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	8.064.000,00						11 Paket	9.480.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	7.000.000,00						3 Paket	7.890.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.986.000,00						12 Paket	9.678.100,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	5.836.000,00						3 Paket	5.836.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	4.790.000,00						8 Paket	4.790.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.836.000,00							5.836.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	5.836.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	5.836.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.790.000,00							4.790.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	4.790.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				8 Paket	4.790.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						8.064.000,00							9.480.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	8.064.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Paket	9.480.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.986.000,00							9.678.100,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.986.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	9.678.100,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						7.000.000,00							7.890.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	7.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Paket	7.890.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						3.930.000,00							3.930.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.930.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	3.930.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.903.000,00					-		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.903.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	8.903.000,00						0 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.903.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	8.903.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	0,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						111.800.000,00					-		75.674.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah						111.800.000,00					-		75.674.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.292.000,00						12 Laporan	13.442.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.508.000,00						12 Laporan	62.232.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						10.292.000,00							13.442.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.292.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	13.442.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						101.508.000,00							62.232.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.508.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	62.232.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						76.515.000,00					-		74.485.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						76.515.000,00					-		74.485.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	20.855.000,00						3 Unit	20.855.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	48.760.000,00						4 Unit	46.730.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.680.000,00						3 Unit	5.680.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.220.000,00						2 Unit	1.220.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						48.760.000,00							46.730.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	48.760.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Unit	46.730.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.680.000,00							5.680.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	8 Unit	5.680.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Unit	5.680.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.855.000,00							20.855.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	20.855.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Unit	20.855.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.220.000,00							1.220.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Unit	1.220.000,00	KECAMATAN LOANO
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.950.000,00					-		5.375.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	250.000,00						-	500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						250.000,00							500.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	250.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				-	500.000,00	KECAMATAN LOANO
343.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						26.978.100,00							19.327.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik						*26.978.100,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	20.978.100,00						-	19.327.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						17.000.000,00					-		14.700.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						17.000.000,00					-		14.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.000.000,00						3 Dokumen	14.700.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00						0 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Laporan	0,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						17.000.000,00							14.700.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Dokumen	14.700.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						6.978.100,00						-	978.800,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						6.978.100,00						-	978.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00						0 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	978.100,00						1 Laporan	978.800,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						3.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Laporan	0,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						978.100,00							978.800,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	978.100,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	978.800,00	KECAMATAN LOANO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3.000.000,00					-		3.648.200,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3.000.000,00					-		3.648.200,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00						1 Laporan	3.648.200,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						3.000.000,00							3.648.200,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	3.648.200,00	KECAMATAN LOANO
344.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						62.225.000,00							48.142.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan						*62.225.000,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100 %		100 %	100 %	62.225.000,00						-	48.142.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						62.225.000,00					-		48.142.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						62.225.000,00					-		48.142.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.600.000,00						6 Laporan	37.517.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.625.000,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	10.625.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10.625.000,00							10.625.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.625.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Lembaga Kemasyarakatan	10.625.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						51.600.000,00							37.517.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Laporan	37.517.000,00	KECAMATAN LOANO
345.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						12.175.000,00							20.648.000,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						*12.175.000,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	12.175.000,00						-	20.648.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12.175.000,00					-		20.648.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						12.175.000,00					-		20.648.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00						2 Laporan	9.440.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.175.000,00						2 Laporan	11.208.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						7.000.000,00							9.440.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	7.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	9.440.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						5.175.000,00							11.208.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.175.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	11.208.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					-		0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						0,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00						0 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Laporan	0,00	KECAMATAN LOANO
346.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						32.240.000,00							37.016.000,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum						*32.240.000,00*								
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	32.240.000,00						-	37.016.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						32.240.000,00					-		37.016.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						32.240.000,00					-		37.016.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	19.048.000,00						3 Dokumen	16.360.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	21 Orang		21 Orang	21 Orang	3.125.000,00						21 Orang	3.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21 Orang		21 Orang	21 Orang	10.067.000,00						21 Orang	17.531.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						10.067.000,00							17.531.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	21 Orang		21 Orang	21 Orang	10.067.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				21 Orang	17.531.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						3.125.000,00							3.125.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	21 Orang		21 Orang	21 Orang	3.125.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				21 Orang	3.125.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						19.048.000,00							16.360.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	19.048.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Dokumen	16.360.000,00	KECAMATAN LOANO
347.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						64.895.000,00							33.889.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						*64.895.000,00*								
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	64.895.000,00						-	33.889.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						64.895.000,00					-		33.889.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						64.895.000,00					-		33.889.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	18.400.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00						1 Dokumen	4.435.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.495.000,00						1 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	6.100.000,00						21 Dokumen	3.094.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						5 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen		0 Dokumen	21 Dokumen	5.000.000,00						21 Dokumen	5.390.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	8.700.000,00						21 Dokumen	10.370.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	21 Dokumen	3.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	21 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						5.000.000,00							5.390.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen		0 Dokumen	21 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				21 Dokumen	5.390.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						8.700.000,00							10.370.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	8.700.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				21 Dokumen	10.370.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						19.495.000,00							6.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.495.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	6.600.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						18.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	18.400.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						4.200.000,00							4.435.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	4.435.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						0,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						6.100.000,00							3.094.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21 Dokumen		21 Dokumen	21 Dokumen	6.100.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				21 Dokumen	3.094.000,00	KECAMATAN LOANO
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	0,00	KECAMATAN LOANO

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN BENER KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KECAMATAN BENER						2.155.851.400,00							2.958.795.400,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.155.851.400,00							2.958.795.400,00	
	7.01	KECAMATAN						2.155.851.400,00							2.958.795.400,00	
348.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.913.763.400,00							2.469.178.400,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*1.913.763.400,00*							*2.469.178.400,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.913.763.400,00						100 %	2.469.178.400,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.450.000,00					Aparatur		10.576.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.450.000,00					Aparatur		10.576.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	760.000,00						1 Dokumen	800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	2.436.000,00						23 Dokumen	5.844.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	1.254.000,00						22 Laporan	3.932.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.436.000,00							5.844.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	2.436.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				23 Dokumen	5.844.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.254.000,00							3.932.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	1.254.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	3.932.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						760.000,00							800.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	760.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	800.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.634.332.000,00					Aparatur		2.097.637.800,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.634.332.000,00					Aparatur		2.097.637.800,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	6.472.000,00						44 Laporan	6.972.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.627.860.000,00						18 Orang/bulan	2.090.665.800,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.627.860.000,00							2.090.665.800,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan		18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	1.627.860.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				18 Orang/bulan	2.090.665.800,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						6.472.000,00							6.972.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	6.472.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	6.972.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						760.000,00					-		1.200.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						760.000,00					-		1.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	760.000,00						11 Laporan	1.200.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						760.000,00							1.200.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	760.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	1.200.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						600.000,00					Aparatur		850.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						600.000,00					Aparatur		850.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	600.000,00						16 Dokumen	850.000,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						600.000,00							850.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				16 Dokumen	850.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.330.500,00					Aparatur		12.812.200,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.330.500,00					Aparatur		12.812.200,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	1.330.500,00						17 Dokumen	2.879.700,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	0 Orang	0,00						20 Orang	9.932.500,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.330.500,00							2.879.700,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	1.330.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	2.879.700,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							9.932.500,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang		20 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Orang	9.932.500,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						45.925.900,00					Aparatur		83.896.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						45.925.900,00					Aparatur		83.896.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.796.000,00						1 Dokumen	2.996.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.231.000,00						2 Dokumen	1.758.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00						12 Laporan	1.875.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.078.000,00						12 Laporan	38.626.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	14.137.200,00						11 Paket	19.632.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	6.865.500,00						14 Paket	7.855.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.615.000,00						4 Paket	7.558.400,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.326.900,00						4 Paket	1.719.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	1.676.300,00						6 Paket	1.876.400,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.326.900,00							1.719.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.326.900,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	1.719.200,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.676.300,00							1.876.400,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	1.676.300,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Paket	1.876.400,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14.137.200,00							19.632.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	14.137.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Paket	19.632.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.615.000,00							7.558.400,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.615.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	7.558.400,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.796.000,00							2.996.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.796.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	2.996.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.865.500,00							7.855.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	6.865.500,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				14 Paket	7.855.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.200.000,00							1.875.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	1.875.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						13.078.000,00							38.626.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.078.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	38.626.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.231.000,00							1.758.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.231.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	1.758.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.000.000,00					Aparatur		51.600.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.000.000,00					Aparatur		51.600.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	3 Unit	20.000.000,00						1 Unit	34.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	17.600.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							34.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	3 Unit	20.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	34.000.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							17.600.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Unit	17.600.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.956.000,00					Aparatur		94.476.400,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.956.000,00					Aparatur		94.476.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.236.400,00						12 Laporan	40.876.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	79.719.600,00						12 Laporan	53.600.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.236.400,00							40.876.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.236.400,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	40.876.400,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						79.719.600,00							53.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	79.719.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	53.600.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.409.000,00					Aparatur		116.130.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90.409.000,00					Aparatur		116.130.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	31.659.000,00						1 Unit	37.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.540.000,00						10 Unit	20.800.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00						1 Unit	41.880.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	5.110.000,00						24 Unit	8.570.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	18 Unit	4.880.000,00						18 Unit	7.880.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						38.220.000,00							41.880.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	38.220.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	41.880.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.540.000,00							20.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.540.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				10 Unit	20.800.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.110.000,00							8.570.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		24 Unit	24 Unit	5.110.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				24 Unit	8.570.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						31.659.000,00							37.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	31.659.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	37.000.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4.880.000,00							7.880.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit		18 Unit	18 Unit	4.880.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				18 Unit	7.880.000,00	KECAMATAN BENER
349.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						15.760.000,00							24.654.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik													*24.654.000,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	15.000.000,00						-	23.454.000,00	
			-	-			-	760.000,00						-	1.200.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						15.000.000,00					Masyarakat		23.454.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						15.000.000,00					Masyarakat		23.454.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00						2 Dokumen	23.454.000,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						15.000.000,00							23.454.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	23.454.000,00	KECAMATAN BENER

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						760.000,00					Masyarakat		1.200.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						760.000,00					Masyarakat		1.200.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	760.000,00						1 Laporan	1.200.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						760.000,00							1.200.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	760.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Laporan	1.200.000,00	KECAMATAN BENER
350.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						69.443.000,00							113.760.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan													*113.760.000,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	100 %		100 %	100 %	69.443.000,00						-	113.760.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						69.443.000,00					Masyarakat		113.760.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						69.443.000,00					Masyarakat		113.760.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	54.732.000,00						9 Laporan	88.760.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.711.000,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						14.711.000,00							25.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	14.711.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				5 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						54.732.000,00							88.760.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	54.732.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				9 Laporan	88.760.000,00	KECAMATAN BENER
351.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						45.000.000,00							88.877.000,00	
		Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum													*88.877.000,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	45.000.000,00						-	88.877.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						45.000.000,00					Masyarakat		88.877.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						45.000.000,00					Masyarakat		88.877.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	20.940.000,00						3 Laporan	37.654.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	24.060.000,00						2 Laporan	51.223.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.940.000,00							37.654.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	20.940.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Laporan	37.654.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						24.060.000,00							51.223.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	24.060.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Laporan	51.223.000,00	KECAMATAN BENER
352.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						27.100.000,00							45.736.000,00	
		Meningkatnya kualitas urusan pemerintahan umum													*45.736.000,00*	
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	27.100.000,00						-	45.736.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						27.100.000,00					Masyarakat		45.736.000,00	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						27.100.000,00					Masyarakat		45.736.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.100.000,00						1 Dokumen	30.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	204 Orang		204 Orang	204 Orang	5.000.000,00						204 Orang	15.536.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						5.000.000,00							15.536.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	204 Orang		204 Orang	204 Orang	5.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				204 Orang	15.536.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						22.100.000,00							30.200.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.100.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	30.200.000,00	KECAMATAN BENER
353.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						84.785.000,00							216.590.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa													*216.590.000,00*	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	84.785.000,00						-	216.590.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						84.785.000,00					Masyarakat		216.590.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						84.785.000,00					Masyarakat		216.590.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.800.000,00						1 Dokumen	45.554.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00						0 Dokumen	9.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	29.350.000,00						2 Dokumen	63.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.590.000,00						0 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000,00						0 Dokumen	16.536.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.745.000,00						3 Dokumen	45.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00						0 Laporan	31.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						13.800.000,00							16.536.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	16.536.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						7.745.000,00							45.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.745.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3 Dokumen	45.500.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						29.350.000,00							63.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	29.350.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	63.000.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						24.800.000,00							45.554.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.800.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	45.554.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						7.500.000,00							9.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	9.500.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa						1.590.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.590.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN BENER
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan						0,00							31.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				0 Laporan	31.000.000,00	KECAMATAN BENER

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. PURWOREJO

TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						9.398.444.681,00							34.787.736.100,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						9.398.444.681,00							34.787.736.100,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						9.398.444.681,00							34.787.736.100,00	
354.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.602.901.681,00							2.773.568.300,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, pelayanan umum, kepegawaian, serta keuangan perangkat daerah						*2.602.901.681,00*							*2.773.568.300,00*	
			Persentase Ketercapaian Kinerja, Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.602.901.681,00						100 %	2.773.568.300,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.483.200,00					Aparatur		32.485.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja						27.483.200,00					Aparatur		32.485.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.160.000,00						1 Dokumen	7.160.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	19.893.200,00						22 Dokumen	22.895.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	2.430.000,00						22 Laporan	2.430.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						19.893.200,00							22.895.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	19.893.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Dokumen	22.895.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.430.000,00							2.430.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	2.430.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				22 Laporan	2.430.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						5.160.000,00							7.160.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.160.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Dokumen	7.160.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.194.743.381,00					Aparatur		2.341.510.000,00	
		Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.194.743.381,00					Aparatur		2.341.510.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	2.035.000,00						44 Laporan	2.035.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.192.708.381,00						23 Orang/bulan	2.339.475.000,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.192.708.381,00							2.339.475.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		22 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.192.708.381,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				23 Orang/bulan	2.339.475.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.035.000,00							2.035.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	44 Laporan		44 Laporan	44 Laporan	2.035.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				44 Laporan	2.035.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.210.000,00					Aparatur		1.210.000,00	
		Persentase layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.210.000,00					Aparatur		1.210.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.210.000,00						11 Laporan	1.210.000,00	
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.210.000,00							1.210.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	1.210.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				11 Laporan	1.210.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.241.600,00					Aparatur		1.241.600,00	
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.241.600,00					Aparatur		1.241.600,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	1.241.600,00						17 Dokumen	1.241.600,00	
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.241.600,00							1.241.600,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen		17 Dokumen	12 Dokumen	1.241.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				17 Dokumen	1.241.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						98.903.500,00					Aparatur		123.011.700,00	
		Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						98.903.500,00					Aparatur		123.011.700,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.130.000,00						2 Dokumen	3.950.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.600.000,00						12 Laporan	1.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.628.000,00						12 Laporan	67.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	23.377.200,00						12 Paket	28.828.800,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	6.182.600,00						20 Paket	6.184.900,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.194.000,00						4 Paket	8.248.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.600.000,00						12 Paket	3.600.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.191.700,00						12 Paket	3.200.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.600.000,00							3.600.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	20 Paket	3.600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	3.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.191.700,00							3.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	20 Paket	3.191.700,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	3.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.377.200,00							28.828.800,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	23.377.200,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Paket	28.828.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.194.000,00							8.248.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.194.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				4 Paket	8.248.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.182.600,00							6.184.900,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	6.182.600,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				20 Paket	6.184.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.600.000,00							1.800.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	1.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.628.000,00							67.200.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.628.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	67.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.130.000,00							3.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.130.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				2 Dokumen	3.950.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.680.000,00					Aparatur		88.200.000,00	
		Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan						88.680.000,00					Aparatur		88.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.600.000,00						12 Laporan	36.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	52.080.000,00						12 Laporan	51.600.000,00	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.600.000,00							36.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	36.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						52.080.000,00							51.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	52.080.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Laporan	51.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						190.640.000,00					Aparatur		185.910.000,00	
		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara						190.640.000,00					Aparatur		185.910.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	67.900.000,00						1 Unit	67.900.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	59.300.000,00						6 Unit	58.580.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00						1 Unit	39.950.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	19.480.000,00						12 Unit	19.480.000,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							39.950.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.960.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	39.950.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						59.300.000,00							58.580.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	7 Unit	59.300.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				6 Unit	58.580.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.480.000,00							19.480.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	19.480.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Unit	19.480.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						67.900.000,00							67.900.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	67.900.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1 Unit	67.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
355.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						1.449.056.000,00							1.681.723.800,00	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan						*1.449.056.000,00*							*1.681.723.800,00*	
			1.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.21 Persentase		0.24 Persentase	0.24 Persentase	1.449.056.000,00						0.24 Persentase	1.681.723.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.449.056.000,00					Masyarakat		1.681.723.800,00	
		Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.449.056.000,00					Masyarakat		1.681.723.800,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	62.000.000,00						100 Orang	129.590.800,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1320 Orang		1320 Orang	1320 Orang	452.128.000,00						1320 Orang	557.133.000,00	
			Jumlah Paskibraka	30 Orang		30 Orang	30 Orang	934.928.000,00						30 Orang	995.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						452.128.000,00							557.133.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1320 Orang		1320 Orang	1520 Orang	452.128.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1320 Orang	557.133.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						62.000.000,00							129.590.800,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	62.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Orang	129.590.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						934.928.000,00							995.000.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	30 Orang		30 Orang	30 Orang	934.928.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				30 Orang	995.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
356.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1.859.500.000,00							25.958.089.000,00	
		Meningkatanya etika dan budaya politik						*1.859.500.000,00*							*25.958.089.000,00*	
			1.Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik	4.14 %		2.96 %	3.16 %	1.859.500.000,00						3.55 %	25.958.089.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1.859.500.000,00					Masyarakat		25.958.089.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1.859.500.000,00					Masyarakat		25.958.089.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	63.800.000,00						100 Orang	98.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3400 Orang		3400 Orang	3400 Orang	1.795.700.000,00						3400 Orang	25.859.289.000,00	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						1.795.700.000,00							25.859.289.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3400 Orang		3400 Orang	3400 Orang	1.795.700.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				3400 Orang	25.859.289.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						63.800.000,00							98.800.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	63.800.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Orang	98.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
357.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						2.087.009.000,00							2.591.755.000,00	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan						*2.087.009.000,00*							*2.591.755.000,00*	
			1.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	50 %		50 %	50 %	2.087.009.000,00						50 %	2.591.755.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						2.087.009.000,00					Masyarakat		2.591.755.000,00	
		Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						2.087.009.000,00					Masyarakat		2.591.755.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	65.000.000,00						100 Orang	110.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	2.022.009.000,00						1000 Orang	2.481.555.000,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						2.022.009.000,00							2.481.555.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	2.022.009.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1000 Orang	2.481.555.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						65.000.000,00							110.200.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	65.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Orang	110.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
358.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						424.978.000,00							616.000.000,00	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat						*424.978.000,00*							*616.000.000,00*	
			1.Persentase Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Wilayah	100 %		100 %	100 %	424.978.000,00						100 %	616.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						424.978.000,00					Masyarakat		616.000.000,00	
		Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						424.978.000,00					Masyarakat		616.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	65.600.000,00						100 Orang	65.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	359.378.000,00						1000 Orang	550.400.000,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						359.378.000,00							550.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	359.378.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				1000 Orang	550.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						65.600.000,00							65.600.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	65.600.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				100 Orang	65.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
359.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						975.000.000,00							1.166.600.000,00	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan						*975.000.000,00*							*1.166.600.000,00*	
			1.Jumlah Kejadian Konflik SARA	0 Kali		0 Kali	0 Kali	975.000.000,00						0 Kali	1.166.600.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						975.000.000,00					Masyarakat		1.166.600.000,00	
		Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						975.000.000,00					Masyarakat		1.166.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000.000,00						12 Dokumen	650.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang		500 Orang	500 Orang	375.000.000,00						500 Orang	515.800.000,00	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						375.000.000,00							515.800.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	500 Orang		500 Orang	500 Orang	375.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				500 Orang	515.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						600.000.000,00							650.800.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Purworejo	Dana Alokasi Umum (DAU)				12 Dokumen	650.800.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program dan kegiatan prioritas pada tahun 2027 telah ditunjukkan pada 41 (empat puluh satu) matrik perangkat daerah di atas. Selanjutnya berikut ini ditunjukkan aktivitas indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2027.

Tabel 5.4. Rincian Aktivitas per Sub Kegiatan per Perangkat Daerah Indikatif pada Tahun 2027

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen MR, IEPK	2.678.800
						Penyusunan dokumen perencanaan, SPIP	55.704.200
				1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan data dasar pembangunan	76.988.000
						Penyusunan Laporan Kinerja PD	12.085.300
				1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rapat Koordinasi Penyusunan Data Statistik Sektoral	3.135.300
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33.011.724.777
				1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	22.607.600
				1.01.01.2.02.0009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.708.490.660
						Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.930.543.438
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.087.637.357
						Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.000.000
						Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.000.000
						Belanja Tunjangan Beras PNS	5.454.948.147
						Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.246.981.047
						Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	13.145.406.540
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	38.460.800
						Belanja Tunjangan Keluarga PNS	10.451.612.192
						Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.487.438.425
						Gaji pokok guru PNSD	115.725.787.308
						Gaji Pokok Guru PPPK	124.465.160.730
						Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	299.732.027
						Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	323.614.544
						Iuran Jaminan Kematian PNS	899.192.053
						Iuran Jaminan Kematian PPPK	970.846.729
						Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.000.000.000
						Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	669.039.596
						Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	722.355.446
						Tambahan Penghasilan (Tamsil Guru) PNS	17.500.000
						Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK	54.500.000
						Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK	77.762.032.800
						Tunjangan Profesi Guru PNS	95.373.779.200
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	43.554.100
						Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	24.980.300
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.611.600
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(blank)	
				1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi antikorupsi (IEPK)	1.328.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.521.400
				1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.741.200
				1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Penambah Daya Tahan Tubuh	84.949.400
				1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.794.100
				1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	6.298.200
				1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	720.000
				1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.178.000
				1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.715.900

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(blank)	
				1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	(blank)	
				1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(blank)	
				1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	(blank)	
				1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	374.690.000
				1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.200.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan, Pajak dan Penyediaan BBM Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000
				1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan, Pajak dan Penyediaan BBM Kendaraan Operasional	171.300.000
				1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.944.250
				1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	151.357.000
				1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.067.000
				1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan/Relokasi Gedung SD Sebomenggalan	-
				1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	(blank)	
				1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	(blank)	
				1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Talud dan Pagar SDN 1 Donorejo Kecamatan Kaligesing	100.000.000
						Pembangunan Talud dan Pagar SDN Kalijering Kecamatan Pituruh	100.000.000
						Pembangunan Talud dan Pagar SDN Mangguljoyo Kecamatan Bener	100.000.000
						Pembangunan Talud Drainase SDN Kesawen Kecamatan Pituruh	100.000.000
						Pembangunan Talud SDN Mayungsari Kecamatan Bener	98.026.000
						Pembangunan Talud SDN Sendangsari Kecamatan Bener	100.000.000
						Pembangunan Talud SDN Somogede Kecamatan Pituruh	100.000.000
						Pembangunan Talud SDN Sudorogo Kecamatan Kaligesing	100.000.000
						Pembangunan Talud SDN Watuduwur Kecamatan Bruno	100.000.000
				1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Ruang Guru SDN 2 Kedungpomahan Kecamatan Kemiri	95.000.000
						Rehabilitasi Ruang Guru SDN 2 Redin Kecamatan Gebang	95.000.000
						Rehabilitasi Ruang Guru SDN Prigelan Kecamatan Pituruh	95.000.000
						Rehabilitasi Ruang Guru SDN Seboropasar Kecamatan Ngombol	55.000.000
				1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	(blank)	
				1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Hargorojo Kecamatan Bagelen	85.000.000
						Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Jombang Kecamatan Ngombol	-
						Rehabilitasi Ruang Perpustakaan SDN Kaliwatukranggan Kecamatan Butuh	85.000.000
				1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Meubelair SDN Jatirejo Kecamatan Kaligesing	50.000.000
						Meubelair SDN Sangubanyu Kecamatan Grabag	50.000.000
						Meubelair SDN Wangunrejo Kecamatan Banyuurip	50.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Maubelair SDN 1 Katerban Kecamatan Kutoarjo	-
						Maubelair SDN Dilem Kecamatan Kemiri	50.000.000
						Meubelair SDN 1 Bruno Kecamatan Bruno	-
						Meubelair SDN 1 Mudalrejo Kecamatan Loano	-
						Meubelair SDN 1 Wirun Kecamatan Kutoarjo	-
						Meubelair SDN 2 Cepedak Kecamatan Bruno	-
						Meubelair SDN 2 Katerban Kecamatan Kutoarjo	-
						Meubelair SDN Bencorejo Kecamatan Banyuurip	-
						Meubelair SDN Brunosari Kecamatan Bruno	-
						Meubelair SDN Cacabanlor Kecamatan Bener	-
						Meubelair SDN Girijoyo Kecamatan Kemiri	-
						Meubelair SDN Jolodoro Kecamatan Bener	-
						Meubelair SDN Kaliboto Kecamatan Bener	-
						Meubelair SDN Kalijambe Kecamatan Bener	-
						Meubelair SDN Kalikotes Kecamatan Pituruh	50.000.000
						Meubelair SDN Kaliurip Kecamatan Kemiri	-
						Meubelair SDN Karangrejo Kecamatan Loano	-
						Meubelair SDN Karangsari Kecamatan Bener	-
						Meubelair SDN Kedungpucang Kecamatan Bener	-
						Meubelair SDN Kese Kecamatan Grabag	-
						Meubelair SDN Kuwurejo Kecamatan Kutoarjo	-
						Meubelair SDN Loano Kecamatan Loano	50.000.000
						Meubelair SDN Lubanglor Kecamatan Butuh	-
						Meubelair SDN Pakem Kecamatan Gebang	-
						Meubelair SDN Pangen Gudang Kecamatan Purworejo	-
						Meubelair SDN Plaosan Kecamatan Purworejo	-
						Meubelair SDN Prajuritan Kecamatan Kutoarjo	-
						Meubelair SDN Purbowono Kecamatan Kaligesing	-
						Meubelair SDN Sambeng Kecamatan Bayan	-
						Meubelair SDN Senepo Kecamatan Kutoarjo	-
						Meubelair SDN Sindurjan Kecamatan Purworejo	-
						Meubelair SDN Tlogosono Kecamatan Gebang	-
						Meubelair SDN Turus Kecamatan Kemiri	-
						Meubelair SDN Wonotulus Kecamatan Purworejo	-
						Meubeler SDN Plipiran Kecamatan Bruno	50.000.000
						Pengadaan meubelair MI AT-TAQWA DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER	14.000.000
						Pengadaan meubelair MI GUPPI AT-TAQWA KALIWADER Dusun Ngabean RT 04 RW 02 Desa Kaliwader Kec. Bener	100.000.000
				1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Lomba-Lomba SD	455.706.200
				1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendampingan CPNS & PPPK baru	29.766.100
						PPPK Paruh Waktu	6.384.044.400
				1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Apresiasi GTK	30.000.000
						Diklat Calon Kepala Sekolah	379.924.500
						Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah Dasar	26.834.200
						Fasilitasi PAK Pendidik SD dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	26.185.100
						Pemberkasan dan Verifikasi Sertifikasi Pendidik SD	28.458.800
						Seleksi Substansi Calon Kepala Sekolah	18.614.000
				1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Akreditasi SD	1.920.000
						Pecegahan dan penganan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	5.580.000
				1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Barang dan Jasa BOSP	32.914.386.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Barang dan Jasa BOSP Kinerja	1.097.500.000
						Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.959.702.000
						Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	7.592.112.000
						Hibah BOS SD	5.040.000.000
				1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BOS Sekolah Dasar	118.523.500
				1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	(blank)	
				1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	(blank)	
				1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Operasional Dewan Pendidikan	30.000.000
				1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Fasilitasi KKG	5.724.000
				1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembagunan Ruang Kelas Baru SDN Kaligesing Kecamatan Kaligesing	250.000.000
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Rejosari Kecamatan Grabag	350.000.000
				1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pavingisasi SDN Duduwetan Kecamatan Grabag	-
						Pavingisasi SDN Semawung Kecamatan Purworejo	-
						Rehabilitasi Pagar dan Gapura SDN Kemiri Kecamatan Kemiri	-
						Rehabilitasi Talud SDN Nglaris Kecamatan Bener	-
						Rehabilitasi Toilet/ Jamban SDN 1 Katerban Kecamatan Kutoarjo	64.000.000
						Rehabilitasi Toilet/ Jamban SDN Blekatuk Kecamatan Pituruh	64.000.000
						Rehabilitasi Toilet/ Jamban SDN Singojoyo Kecamatan Bruno	64.000.000
						Rehabilitasi Toilet/ Jamban SDN Sokoagung Kecamatan Bagelen	64.000.000
						Rehabilititasi Pagar dan Gapura SDN Sendangsari Kecamatan Purwodadi	-
						Rehabilititasi Talud/Pagar Gapura SDN Tirtodranan Kecamatan Purworejo	-
						Rehabilititasi Toilet/ Jamban SDN 1 Gintungan Kecamatan Gebang	64.000.000
						Rehabilititasi Toilet/ Jamban SDN Bakurejo Kecamatan Grabag	-
						Rehbilitasi Pagar dan Gapura SDN Banyuurip Kecamatan Banyuurip	-
				1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Pendidik SD dan sosialisasi antikorupsi (IEPK)	756.585
						Peningkatan Kompetensi Pendidik SD	34.888.500
				1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Hibah Bansek SD Swasta, MI Negeri, dan MI Swasta	1.499.486.000
						Anak Beriman dan Berkepribadian	1.628.131.300
						Operasional Penyelenggaraan SD Inklusi dan ULD	47.212.000
						Ujian SD	152.267.700
				1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi ruang kelas MI Imampuro Sukowuwuh Kecamatan Bener	200.000.000
						Rehabilitasi Ruang Kelas MI Salafiyah Wareng Kecamatan Butuh	-
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 1 Donorejo Kecamatan Kaligesing	255.000.000
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Banyuyoso Kecamatan Grabag	-
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Bendungan Kecamatan Grabag	255.000.000
						Rehabilitasi Ruang kelas SDN Hargorojo Kecamatan Bagelen	255.000.000
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Kemiri Kecamatan Gebang	255.000.000
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Maduretno Kecamatan Purwodadi	255.000.000
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Sukogelap Kecamatan Kemiri	340.000.000
						Rehabilitasi Ruang Kelas SDN Tegalmiring Kecamatan Banyuurip	-
						Rehabilititasi Ruang Kelas SDN 2 Ganggeng Kecamatan Purworejo	-
						Revitalisasi SD N Wonosari,	-
				1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Fasilitasi Program Indonesia Pintar	12.889.500
						Pemberian Beasiswa Kepada Siswa Berprestasi, ATS, Anak Beresiko putus Sekolah	144.935.800
				1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Peralatan TIK SDN 2 Bayem, Kecamatan Kutoarjo	-

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Pengadaan Peralatan TIK SDN Grabag, Kecamatan Grabag	-
						Pengadaan Peralatan TIK SDN Jatiwangsan, Kecamatan Kemiri	-
						Pengadaan Peralatan TIK SDN Kembaran, Kecamatan Loano	-
						Pengadaan Peralatan TIK SDN Ketawangrejo, Kecamatan Grabag	-
						Pengadaan Peralatan TIK SDN Kroyolor, Kecamatan Kemiri	-
						Pengadaan Peralatan TIK SDN Maduretno, Kecamatan Purwodadi	-
						Pengadaan peralatan TIK SDN Sangubanyu, Kecamatan Grabag	-
						Pengadaan Peralatan TIK SDN Sidomulyo, Kecamatan Purworejo	-
						Pengadaan Peralatan TIK SDN Wonosri, Kecamatan Ngombol	-
						Peralatan TIK SD (DAU)	-
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	(blank)	
				1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilasi Ruang Kelas MTs An Nawawi 04 Donorejo, Kaligesing	-
						Rehabilitasi Ruang Kelas Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Purworejo, MTs MA'ARIF NU BENER	-
						Rehabilitasi ruang kelas MTs Al Anshory Kec. Grabag	-
						Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Purworejo Kec. Purworejo	500.000.000
						Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 12 Purworejo Kec. Kutoarjo	400.000.000
				1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	(blank)	
				1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	(blank)	
				1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rehabilitasi Talud SMPN 24 Purworejo	180.000.000
				1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Pengadaan Mebel Guru SMPN 1 Purworejo	103.323.000
						Pengadaan Mebel SMP Negeri 12 Purworejo	-
						Pengadaan Mebel SMP Negeri 13 Purworejo	-
						Pengadaan Mebel SMP Negeri 14 Purworejo	-
						Pengadaan Mebel SMP Negeri 16 Purworejo	-
						Pengadaan Mebel SMP Negeri 2 Purworejo	103.323.000
						Pengadaan Mebel SMP Negeri 24 Purworejo	-
						Pengadaan Mebel SMP Negeri 3 Purworejo	103.323.000
						Pengadaan Mebel SMP Negeri 38 Purworejo	-
						Pengadaan Mebel SMP Negeri 8 Purworejo	103.323.000
				1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi PIP	12.787.800
						Pemberian Beasiswa Kepada Siswa Berprestasi, ATS, Anak Berisiko putus Sekolah	100.148.000
				1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	270.951.300
				1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	PPPK Paruh Waktu	1.888.441.000
				1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Administrasi Kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.341.200
						DIKLAT BAHASA JAWA	4.977.600
						DIKLAT MAPEL BAHASA INDONESIA	4.977.600
						DIKLAT MAPEL BAHASA INGGRIS	4.977.600
						DIKLAT MAPEL BIMBINGAN KONSELING	4.977.600
						DIKLAT MAPEL INFORMATIKA	4.977.600
						DIKLAT MAPEL IPA	4.977.600
						DIKLAT MAPEL IPS	4.977.600
						DIKLAT MAPEL MATEMATIKA	4.977.600
						DIKLAT MAPEL PAI	4.977.600
						DIKLAT MAPEL PKn	4.977.600
						DIKLAT MAPEL PRAKARYA	4.977.600
						DIKLAT MAPEL SENI BUDAYA	4.977.600
						DIKLAT MAPELPENJASORKES	4.977.600
						PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH	10.578.000
						RAKOR TU	4.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						RAPAT KOORDINASI	6.560.000
				1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Fasilitasi Penyusunan RAPBS	55.499.200
						Kelembagaan dan manajemen sekolah	10.543.500
				1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Barang dan Jasa BOSP	17.917.464.000
						Barang dan Jasa BOSP Kinerja	420.000.000
						Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	6.428.136.000
						Hibah BOSP	4.371.400.000
				1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BOS Sekolah Menengah Pertama	29.340.200
				1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	13.811.200
				1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Pelatihan Aplikasi Bidang Pendidikan	8.371.100
				1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP)	20.765.100
				1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Sosialisasi pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	16.189.800
				1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Hibah Bansek ke MTs Negeri	382.050.000
						Hibah Bansek ke SMP Swasta dan MTs Swasta	1.258.900.000
						Pelaksanaan SPMB	226.901.400
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian	143.916.900
						Proses Belajar dan ujian bagi Peserta Didik	16.072.000
				1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 21 Purworejo	1.050.000.000
						Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 38 Purworejo	350.000.000
				1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	DIKLAT KEPALA SEKOLAH	177.900
						Diklat Kepala sekolah dan sosialisasi antikorupsi dan gratifikasi (IEPK)	13.680.000
						DIKLAT TATA USAHA	356.100
				1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	(blank)	
				1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Peralatan TIK SMP BRUDERAN PURWOREJO	-
						Pengadaan Peralatan TIK SMPN 10 Purworejo	-
						Pengadaan Peralatan TIK SMPN 5 Purworejo	200.000.000
						Pengadaan Peralatan TIK SMPN 6 Purworejo	200.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Hibah Pembangunan Talud Pos PAUD Brojowisnu	-
						Pembangunan Pagar KB Nur Hikmah Bajangrejo Banyuurip	-
						Pembangunan pagar TK Kartini Karangrejo Loano	-
				1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	0001.Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK PAMEKAR BUDI	6.000.000
						0002.Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK PANCASILA SOKO	6.000.000
						0003. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK KUNCUP HARAPAN	6.000.000
						0004. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK SERBAGUNA	6.000.000
						0005. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK KRENDETAN	6.000.000
						0006. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK MARDI PUTRA	6.000.000
						0007. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB SERBAGUNA	18.000.000
						0008. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PELANGI MANIS JAYA	12.000.000
						0009. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MELATI	6.000.000
						0010. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MUTIARA HATI	24.000.000
						0011. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PELANGI INDAH	18.000.000
						0012. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PEMBINA	12.000.000
						0013. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AISYIYAH	24.000.000
						0014. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MANDARAVA	12.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						0015. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP MUTIARA ABADI	12.000.000
						0016. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP CAHAYA IBU	18.000.000
						0017. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP HI PERMATA HATI	24.000.000
						0018. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP TRI LESTARI	12.000.000
						0019. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PAMEKAR BUDI PIJI	12.000.000
						0020. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP GOTONG ROYONG	12.000.000
						0021. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TKIT SALSABILA 5 PURWOREJO	30.000.000
						0022. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK CENGKAWAKREJO	12.000.000
						0023. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK TUNAS KARYA GOLOK	12.000.000
						0024. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK BOROWETAN	6.000.000
						0025. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK AISYIYAH 1 BANYUURIP	6.000.000
						0026. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK NURUL HUDA BAJANGREJO	6.000.000
						0027. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK KUTILANG	6.000.000
						0028. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK NGUDI BASUKI	6.000.000
						0029. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK BOROKULON	6.000.000
						0030. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK PERINTIS	6.000.000
						0031. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK RINDANGKASIH	6.000.000
						0032. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK BOROWETAN	6.000.000
						0033. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK NGUDI BASUKI	6.000.000
						0034. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PERMATAHATI	18.000.000
						0035. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AL IKHWAN	12.000.000
						0036. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AISYIYAH 1 BANYUURIP	18.000.000
						0037. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB NUR ANNISA	12.000.000
						0038. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TUNAS KASIH	12.000.000
						0039. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TUNAS KARYA GOLOK	12.000.000
						0040. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB SALSABILA 5	18.000.000
						0041. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TRAJUMAS	18.000.000
						0042. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB HIDAYATUS SHIBYAN	18.000.000
						0043. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB NUR HIKMAH	18.000.000
						0044. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP SEKARSARI	6.000.000
						0045. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP TUNAS KUMALA	12.000.000
						0046. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP TEGAL KUNING	12.000.000
						0047. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP KASIH IBU	18.000.000
						0048. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PERTIWI SOKOWATEN	12.000.000
						0049. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB HARAPAN BANGSA	12.000.000
						0050. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PUTRA BANGSA	12.000.000
						0051. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP KUNCUP PERTIWI	6.000.000
						0052. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP HIDAYATUL AULAD	12.000.000
						0053. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP CERDAS CERIA	6.000.000
						0054. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP TUNAS HARAPAN	12.000.000
						0055. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TPA TRAJUMAS	6.000.000
						0056. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK PERTIWI GRANTUNG	6.000.000
						0057. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK PKK JONO	6.000.000
						0058. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK PERTIWI JRAKAH	6.000.000
						0059. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK IT DARUSSALAM	6.000.000
						0060. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TUNAS MELATI	30.000.000
						0061. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP TUNAS MATAHARI	18.000.000
						0062. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP BINTANG	6.000.000
						0063. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP ROUDLOTUS SIBYAN	12.000.000
						0064. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB REMBULAN	12.000.000
						0065. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP INSAN MULIA	18.000.000
						0066. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP AL-HIKMAH	12.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						0067. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP CERIA	12.000.000
						0068. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP AN NAJJAH	12.000.000
						0069. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP HARAPAN IBU	12.000.000
						0070. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TPA TUNAS MELATI	6.000.000
						0071. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PUTRA PERTIWI	18.000.000
						0072. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AISYIYAH JONO	12.000.000
						0073. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB SINAR HARAPAN	6.000.000
						0074. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PERMATA BUNDA	12.000.000
						0075. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP GARUDA TUNAS BANGSA	12.000.000
						0076. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP GENERASI BANGSA	6.000.000
						0077. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP SEKAR	6.000.000
						0078. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB BINA LOKA	6.000.000
						0079. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP CIPTA TARUNA	18.000.000
						0080. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB KHASANAH	6.000.000
						0081. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PELANGI	18.000.000
						0082. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PUTRA PERDANA	6.000.000
						0083. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP RAHAYU	12.000.000
						0084. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK ABA BENER	6.000.000
						0085. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK KUNCUP MEKAR KAMIJORO	6.000.000
						0086. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK PERTIWI KARANGSARI	6.000.000
						0087. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK SETIA BUDI SIDOMUKTI	6.000.000
						0088. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK LESTARI PERTIWI WADASE	6.000.000
						0089. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK MANDALA PURI BENOWO	6.000.000
						0090. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK WAHYU LESTARI KALIWADER	6.000.000
						0091. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK LESTARI BENER	12.000.000
						0092. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK PERTIWI KEDUNGPUCANG	6.000.000
						0093. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK AL HIDAYAH CACABAN LOR	12.000.000
						0094. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK RAHAYU KALIURIP	6.000.000
						0095. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK TUNAS MELATI SENDANGSARI	6.000.000
						0096. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK CAHAYA PEKACANGAN	6.000.000
						0097. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AL HIKMAH	36.000.000
						0098. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB GIRI PUSPITA	12.000.000
						0099. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MEKAR ABADI	12.000.000
						0100. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TUNAS MASYITOH	12.000.000
						0101. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB DARUL ULUM	18.000.000
						0102. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MADANI	12.000.000
						0103. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AL HIDAYAH	24.000.000
						0104. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP TUNAS BANGSA	12.000.000
						0105. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AL HUDA	12.000.000
						0106. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP CAHAYA NUSA	18.000.000
						0107. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MURTIARA HATI	18.000.000
						0108. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MUTIARA HIKMAH	6.000.000
						0109. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB BINA INSANI	12.000.000
						0110. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TUNAS MUDA	18.000.000
						0111. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP BUDI LUHUR	6.000.000
						0112. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK ABA KALIWUNGU	6.000.000
						0113. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK EKA BHAKTI	6.000.000
						0114. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK BROJOWISNU	6.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						0115. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK ISLAM TERPADU BUSTANUL FALAH	6.000.000
						0116. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK ARGOSARI	6.000.000
						0117. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK AL HIDAYAH PAKISARUM	12.000.000
						0118. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK MUTIARA WATUDUWUR	6.000.000
						0119. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB HARAPAN BANGSA	6.000.000
						0120. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MRANGGI SIWI	18.000.000
						0121. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB KARTIKA SOMOLETER	12.000.000
						0122. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB CONDONGSARI	18.000.000
						0123. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP TUNAS HARAPAN	18.000.000
						0124. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PERMATA	6.000.000
						0125. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP DWIKARTI	18.000.000
						0126. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MENTARI	18.000.000
						0127. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AN NAJAH	18.000.000
						0128. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB LESTARI	18.000.000
						0129. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP BROJOWISNU	12.000.000
						0130. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP BUKIT CERIA	12.000.000
						0131. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AN NI'MAH	6.000.000
						0132. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP BINA HARAPAN BANGSA	6.000.000
						0133. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB ANANDA	18.000.000
						0134. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PAUD MUTIARA PLIPIRAN	12.000.000
						0135. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK KUNCUP MEKAR	6.000.000
						0136. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK MEKAR	6.000.000
						0137. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB KASIH IBU	12.000.000
						0138. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MAWAR	6.000.000
						0139. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB CAHAYA BUNDA	12.000.000
						0140. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AL BAROKAH	12.000.000
						0141. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB KUNCUP MEKAR	12.000.000
						0142. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP TUNAS JAYA	12.000.000
						0143. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP TUNAS BANGSA	18.000.000
						0144. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP HIDAYATUL MUBTADIIN	12.000.000
						0145. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP KAROMAH	12.000.000
						0146. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP AL MUROFIQ	12.000.000
						0147. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP HARAPAN BUNDA	6.000.000
						0148. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP AL FURQON	6.000.000
						0149. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP ROUDHOTUL WARDAH	6.000.000
						0150. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP KINANTI	6.000.000
						0151. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB SEKAR ARUM	6.000.000
						0152. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB SADEWA	12.000.000
						0153. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP HI MEKAR	6.000.000
						0154. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP KINASIH	6.000.000
						0155. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK LKMD WINONGLOR	6.000.000
						0156. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK MASYITHOH LUGOSOBO	12.000.000
						0157. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK TRI BHAKTI NGEMPLAK	6.000.000
						0158. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TKIT ASH SHIDDIQIYYAH	6.000.000
						0159. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK TUNAS MUDA	6.000.000
						0160. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK BUNAYA	6.000.000
						0161. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK DHARMA BAKTI	6.000.000
						0162. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK MEKAR GEBANG	6.000.000
						0163. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK TUNGGUK RAHAYU	6.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						0164. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK DHARMA SIWI	6.000.000
						0165. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MAJU MAKMUR	12.000.000
						0166. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB HANDAYANI	18.000.000
						0167. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB YOGA UTAMA	12.000.000
						0168. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TELAGASARI	18.000.000
						0169. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AMONG PUTRO	12.000.000
						0170. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AISYIYAH GEBANG	6.000.000
						0171. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TIARA	6.000.000
						0172. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TUNAS PINTAR	18.000.000
						0173. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP KARYA BHAKTI	24.000.000
						0174. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP TUNAS JAYA	18.000.000
						0175. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP LOKASARI	12.000.000
						0176. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - SPS AL IMAN	18.000.000
						0177. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP AS SHIIBA	12.000.000
						0178. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP CERIA	6.000.000
						0179. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP HARAPAN BANGSA	12.000.000
						0180. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PERMATA HATI	6.000.000
						0181. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP MASITA	6.000.000
						0182. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP MELATI	6.000.000
						0183. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP KENARI	12.000.000
						0184. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB BENSARI	12.000.000
						0185. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP BINAYOGA	6.000.000
						0186. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PERMATA	6.000.000
						0187. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK ABA AL AMIN	6.000.000
						0188. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK BERINGIN	6.000.000
						0189. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK PAMARDISIWI 1	6.000.000
						0190. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK TERATAI PUTIH	6.000.000
						0191. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK ABA AL AMIN	6.000.000
						0192. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK MELATI PUTIH	6.000.000
						0193. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PUTRA AGUNG	30.000.000
						0194. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB KUNCUP MELATI	24.000.000
						0195. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB ROUDLOTUL HIDAYAH	12.000.000
						0196. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB NURUL HIDAYAH	18.000.000
						0197. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PELITA HATI	30.000.000
						0198. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB HARAPAN BUNDA	18.000.000
						0199. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MENUR HARAPAN BANGSA	12.000.000
						0200. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB BHAKTI PERTIWI	18.000.000
						0201. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AL MUSLIMUN	24.000.000
						0202. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB SETULUS HATI	12.000.000
						0203. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB DHARMA BAKTI INDONESIA	18.000.000
						0204. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB BINA INSAN	18.000.000
						0205. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB RA KARTINI	12.000.000
						0206. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB SURYA BAKU	12.000.000
						0207. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB BINTANG KEJORA	12.000.000
						0208. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AL IKHLAS	12.000.000
						0209. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MUTIARA GADING	18.000.000
						0210. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB BHAKTI SIWI	18.000.000
						0211. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB KASIH MULIA	6.000.000
						0212. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP KEMBANGSIH	12.000.000
						0213. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MUTIARA SELATAN	6.000.000
						0214. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PERTIWI	6.000.000
						0215. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB LESTARI	12.000.000
						0216. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PUSPA BANGSA	12.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						0217. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TUNAS BANGSA	6.000.000
						0218. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB KASIH	6.000.000
						0219. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB LESTARI	18.000.000
						0220. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP SAKINAH	6.000.000
						0221. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - POS PAUD MELATI I	6.000.000
						0222. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - POS PAUD MELATI 2	6.000.000
						0223. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PERMATA HATI	12.000.000
						0224. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB ANANDA	12.000.000
						0225. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP CITRA	6.000.000
						0226. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PERMATA BUNDA	6.000.000
						0227. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PELITA	6.000.000
						0228. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB KARTINI	6.000.000
						0229. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB HARAPAN BUNDA	6.000.000
						0230. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB CERDAS CERIA 2	6.000.000
						0231. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB NURUL FAJRI	12.000.000
						0232. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK MARDISIWI	6.000.000
						0233. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK SARROJA	18.000.000
						0234. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK MASYITOH	6.000.000
						0235. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK TUNAS BANGSA	6.000.000
						0236. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK TRI SIWI	6.000.000
						0237. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK AL AMIN WINONG	12.000.000
						0238. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK BHAKTI SIWI	6.000.000
						0239. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AISYIYAH	6.000.000
						0240. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AL FIRDAUS	12.000.000
						0284. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB INAYAH	12.000.000
						0285. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AL ARIF	6.000.000
						0286. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP TRI LESTARI	12.000.000
						0287. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP CAHAYA	12.000.000
						0288. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP KENCANA LOKA	6.000.000
						0289. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP NURUL ATHFAL	12.000.000
						0290. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP LESTARI	12.000.000
						0291. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP SURYA HARAPAN	12.000.000
						0292. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP KASIH BUNDA	12.000.000
						0293. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP MEKAR SARI	6.000.000
						0294. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP SEKAR ARUM	12.000.000
						0295. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB CAHAYA HATI	12.000.000
						0296. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP MUTIARA HATI	12.000.000
						0297. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PERMATA BUNDA	12.000.000
						0298. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK MARDISIWI LOANO	6.000.000
						0299. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK SIWI UTOMO MARON	6.000.000
						0300. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK SIWI PENI JETIS	6.000.000
						0301. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK MASYITHOH GUYANGAN	6.000.000
						0302. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK AL MAUNAH TRIDADI	12.000.000
						0303. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK TRI PENI KEBON GUNUNG	6.000.000
						0304. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK AL BAROKAH KALIKALONG	6.000.000
						0305. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB. HIDAYATUL MUBTADI	12.000.000
						0306. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB. TUNAS BANGSA	18.000.000
						0307. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB. HARAPAN BUNDA	12.000.000
						0308. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP AL IMAN	18.000.000
						0309. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP MEKAR ABADI	24.000.000
						0310. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP TUNAS BANGSA	6.000.000
						0311. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP MELATI	12.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						0312. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP MUTIARA INSANI	18.000.000
						0313. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP BERLIAN	12.000.000
						0314. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP TUNAS CENDEKIA	12.000.000
						0315. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB BHAKTI PERTIWI	12.000.000
						0316. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB BINA LESTARI	12.000.000
						0317. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB BINA SIWI	6.000.000
						0318. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PERMATA HATI	12.000.000
						0319. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB HARAPAN IBU	12.000.000
						0320. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TELADAN	6.000.000
						0321. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TUNAS JAYA	6.000.000
						0322. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PAMARDI PUTRA	12.000.000
						0323. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB HANDAYANI	6.000.000
						0324. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK LESTARI	6.000.000
						0325. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK ABA	6.000.000
						0326. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK SRINI WONOBOYO	6.000.000
						0327. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK GAYATRI	6.000.000
						0328. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK PERTIWI JERUKEN	6.000.000
						0329. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK PERMATA HATI	6.000.000
						0330. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TK WAHYU SIWI	6.000.000
						0331. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PENYEJUK HATI	12.000.000
						0332. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MUTIARA ISLAM	6.000.000
						0333. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AISYIYAH TANJUNG	6.000.000
						0334. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP AMALIA	12.000.000
						0335. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP ANAK CERDAS	6.000.000
						0336. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP HARAPAN BUNDA	6.000.000
						0337. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP MELATI	6.000.000
						0338. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP LESTARI	6.000.000
						0339. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP SUMBER WARAS	6.000.000
						0340. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PERMATA HATI	6.000.000
						0341. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP MELATI	6.000.000
						0342. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP HARAPAN BUNDA	6.000.000
						0343. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP INSAN CERDAS	12.000.000
						0344. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PELITA HARAPAN	6.000.000
						0345. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PANGUDI LUHUR	6.000.000
						0346. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP SUMBER WARAS	6.000.000
						0347. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP HARAPAN BANGSA	12.000.000
						0348. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP PELITA BANGSA	6.000.000
						0349. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP LESTARI	6.000.000
						0350. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - PP WAHYU PRASIWI	12.000.000
						0351. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PENYEJUK HATI	6.000.000
						0352. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB AL HUDA	12.000.000
						0353. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB LESTARI	6.000.000
						0354. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB RAHAYU	6.000.000
						0355. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MUTIARA ISLAM	12.000.000
						0356. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PERMATA HATI	12.000.000
						0357. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB BUNGA HARAPAN	6.000.000
						0358. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB 'AISYIYAH	18.000.000
						0359. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TUNAS RIMBA	12.000.000
						0360. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB DEWI SARTIKA	18.000.000
						0361. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB DEWI SARTIKA	30.000.000
						0362. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB SINAR INDAH	12.000.000
						0363. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB KARTINI	12.000.000
						0364. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB PERMATA HATI	18.000.000
						0365. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB BHAKTI PERTIWI	12.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						0366. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB BUKIT RIMBA	12.000.000
						0367. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB QURRATA'AYUN	12.000.000
						0368. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - POS PAUD ASSAKINAH	12.000.000
						0369. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - POS PAUD KELANA SARI	12.000.000
						0370. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - POS PAUD ANANDA BANGKIT	18.000.000
						0371. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - POS PAUD MARDISIWI	18.000.000
						0372. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - POS PAUD SEKAR ARUM	18.000.000
						0373. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - POS PAUD KUSUMA	6.000.000
						0374. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - POS PAUD TUNAS PERTIWI	6.000.000
						0375. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - POS PAUD KENANGA	6.000.000
						0376. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - POS PAUD PERMATA HATI	18.000.000
						0377. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - TPA 'AISYIYAH	12.000.000
						0378. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - POS PAUD PUTRA KARTINI	18.000.000
						0379. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TUNAS BANGSA	12.000.000
						0380. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TUNAS BANGSA	6.000.000
						0381. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MUTIARA HATI	12.000.000
						0382. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB TUNAS BANGSA PETUGURAN	6.000.000
						0383. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB LESTARI	12.000.000
						0384. Hibah Kinerja Pendidik PAUD- KB HARAPAN BANGSA, Alamat: DESA TERSIDI KIDUL KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0385. Hibah Kinerja Pendidik PAUD- KB PELITA HATI, Alamat: DESA SEMAMPIR KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0386. Hibah Kinerja Pendidik PAUD- POS PAUD KEMUNING, Alamat: DESA KEMBANGKUNING KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0387. Hibah Kinerja Pendidik PAUD- POS PAUD KARTINI, Alamat: DESA KARANGANYAR KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0388. Hibah Kinerja Pendidik PAUD- POS PAUD HARAPAN BANGSA, Alamat: DESA LUWENGKIDUL KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0389. Hibah Kinerja Pendidik PAUD- KB TUNAS HARAPAN , Alamat: DESA LUWENGLOR KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0390. Hibah Kinerja Pendidik PAUD- TK ABA, Alamat: DESA/ KELURAHAN PUWWODADI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0391. Hibah Kinerja Pendidik PAUD- TK SERUNI IX, Alamat: DESA/ KELURAHAN NAMPUREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0392. Hibah Kinerja Pendidik PAUD- TK BINAMASQU, Alamat: DESA/ KELURAHAN SENDANGSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0393. Hibah Kinerja Pendidik PAUD- TK TERATAI , Alamat: DESA/ KELURAHAN BLENDUNG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0394. Hibah Kinerja Pendidik PAUD- TK WIYATA YOGA, Alamat: DESA/ KELURAHAN PURWOSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0395. Hibah Kinerja Pendidik PAUD- TK PANGUDI LUHUR, Alamat: DESA/ KELURAHAN JENARWETAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						0396. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK TUNAS HARAPAN, Alamat: DESA/ KELURAHAN SUMBERSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0397. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH, Alamat: DESA PURWODADI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0398. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KELOMPOK BERMAIN KUSUMA BANGSA, Alamat: DESA SIDOHARJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000
						0399. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KELOMPOK BERMAIN KUNCUP MEKAR, Alamat: DESA JENARLOR KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0400. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD ASUH ASIH, Alamat: DESA JOGOBOYO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000
						0401. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD DIAN IBU, Alamat: DESA SENDANGSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0402. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD GOTONG ROYONG, Alamat: DESA KENTENGREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0403. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD HARAPAN BUNDA, Alamat: DESA PUNDENSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0404. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD KARTINI, Alamat: DESA KEPONGGOK KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0405. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KELOMPOK BERMAIN KUNCUP MELATI, Alamat: DESA BUBUTAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0406. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KELOMPOK BERMAIN AZ-ZAHRA, Alamat: DESA JOGORESAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0407. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA, Alamat: DESA KETANGI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0408. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD MULIA, Alamat: DESA JATIKONTAL KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0409. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD TUNAS JAYA, Alamat: DESA BLENDUNG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0410. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD ASSALAMAH, Alamat: DESA KARANGSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0411. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KELOMPOK BERMAIN SEKAR SIWI, Alamat: DESA KEDUREN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0412. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KELOMPOK BERMAIN MUTIARA DESA, Alamat: DESA BRAGOLAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0413. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA, Alamat: DESA BANJARSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0414. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA, Alamat: DESA WATUKURO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						0415. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD PUSPA MEKAR, Alamat: DESA BRONDONGREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0416. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD BUDI MULIA, Alamat: DESA JENAR KIDUL KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0417. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD PERMATA HATI, Alamat: DESA PLANDI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0418. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PAUD TPQ AL MUSTAQIM, Alamat: DESA TLOGOREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0419. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PAUD TPQ AL MUSTAQIM KARANGMULYO, Alamat: DESA KARANGMULYO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0420. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK ASSA'ADAH, Alamat: JL. KRAJAN NO. 10 RT 01 RW 08 BALEDONO, KEC. PURWOREJO, KAB. PURWOREJO	6.000.000
						0421. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK MASYITHOH 1, Alamat: BRENGKELAN RT 01 RW V1, KEC. PURWOREJO KAB PURWOREJO	6.000.000
						0422. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK WIYATA KARYA, Alamat: KRAJAN 1 RT 01 RW 01 KEDUNGSARI, KEC. PURWOREJO KAB PURWOREJO	12.000.000
						0423. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK KARTIKA IX-28, Alamat: JL.LETJEND SOEPRAPTO NO.80A PURWOREJO , KEC. PURWOREJO, KAB. PURWOREJO	6.000.000
						0424. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK ABA 2 PURWOREJO, Alamat: JL. BRIGJEND KATAMSO 170 A KELURAHAN PANGENREJI, KEC. PURWOREJO, KAB. PURWOREJO	6.000.000
						0425. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK HANDAYANI, Alamat: KELURAHAN CANGKREP KIDUL KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0426. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK TUNAS RIMBA PURWOREJO, Alamat: JL. DR SETIABUDI NO. 60 PURWOREJO, KEC. PURWOREJO, KAB. PURWOREJO	6.000.000
						0427. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK MUTIARA IBU, Alamat: JL DEWI SARTIKA NO 3A SINDURJAN, KEC. PURWOREJO KA. PURWOREJO	6.000.000
						0428. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK ABA 3 PURWOREJO, Alamat: JLN. NYAI WANGEN RRT 01 RW 01 MUDAL, KEC. PURWOREJO, KAB. PURWOREJO	6.000.000
						0429. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK TUNAS HARAPAN PANGEN, Alamat: JL BRIGJEND KATAMSO KM 2 RT 02 RW 04 PANGENREJO, KEC. PURWOREJO, KAB PURWOREJO	6.000.000
						0430. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB 'AISYIYAH PANGEN, Alamat: KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0431. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB 'AISYIYAH PURWOREJO, Alamat: KELURAHAN SINDURJAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000
						0432. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB ALFA KID'S, Alamat: KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0433. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB 'AISYIYAH BALEDONO, Alamat: KELURAHAN BALEDONO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0434. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB SERUNI, Alamat: KELURAHAN PENGEN JURUTENGAH KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0435. Hibah Kinerja Pendidik PAUD - KB MUMPUNI	24.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						0436. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB ANAK HEBAT EL FIRDAUS, Alamat: DESA SEMAWUNG KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0437. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB KEMALA BHAYANGKARI, Alamat: KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0438. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB MUNAWAROH, Alamat: KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0439. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB FUN ISLAMIC SCHOOL, Alamat: KELURAHAN PURWOREJO KECAMATAN PURWOREJO KBUPATEN PURWOREJO	30.000.000
						0440. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TPA ALFA KIDS, Alamat: KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0441. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TPA AZ ZAHRA, Alamat: KELURAHAN CANGKREP LOR KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000
						0442. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TPA AISYIYAH PANGEN, Alamat: KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0443. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP TPQ ALHIDAYAH, Alamat: KELURAHAN CANGKREP LOR KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000
						0444. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD KEPODANG, Alamat: KELURAHAN CANGKREP LOR KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0445. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD AMRIH LESTARI, Alamat: KELURAHAN CANGKREP KIDUL KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0446. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-POS PAUD BINA BUAH HATI, Alamat: DESA SIDOREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0447. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP PERMATA BUNDA, Alamat: DESA SIDOMULYO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0448. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB TUNAS MULIA, Alamat: KELURAHAN PADUROSO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0449. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TPA PRASETIYA BANGSA ISLAMIC SCHOOL, Alamat: KELURAHAN SINDURJAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						0450. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP DUNIA KECIL, Alamat: KELURAHAN BALEDONO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000
						0451. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP ANANDA, Alamat: KELURAHAN SINDURJAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000
						0452. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP KARTINI, Alamat: DESA SUDIMORO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0453. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PAUD AL- BADAWI, Alamat: KELURAHAN BALEDONO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0454. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP MITRA BUNDA, Alamat: DESA WONOTULUS , KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWIREJO	6.000.000
						0455. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP PURNAMASARI, Alamat: DESA SEMAWUNG KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						0456. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP MELATI, Alamat: KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0457. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP DEWI SARTIKA, Alamat: KELURAHAN PURWOREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0458. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP SHAFIRA, Alamat: DESA GANGGENG KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0459. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP SETYO UTAMI, Alamat: KELURAHAN TAMBAKREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0460. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP TUNAS HARAPAN, Alamat: DESA BRENGGONG KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000
						0461. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP TUNAS BANGSA, Alamat: DESA PACEKELAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						241. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB AL MUTTAQIN	24.000.000
						242. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB DARUL ULUM, Alamat: DESA BEDONO PAGERON KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	24.000.000
						243. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB AL BAROKAH, Alamat: DESA KEDUNGLO KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	12.000.000
						244. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB MELATI, Alamat: DESA BEDONO KARANGDUWUR KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	18.000.000
						245. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB SARROJA, Alamat: DESA KEMIRI KIDUL KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	12.000.000
						246. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB ROUDHOTUL HUDA, Alamat: DESA WALED KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	12.000.000
						247. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB TERATAI, Alamat: DESA GESIKAN KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	12.000.000
						248. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB AL IKHSAN, Alamat: DESA WANUROJO KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	18.000.000
						249. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB ISLAM ALIFAH, Alamat: DESA KEMIRI LOR KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	6.000.000
						250. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP MAHARDIKA, Alamat: DESA KARANGLUAS KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	18.000.000
						251. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP AL IMAN, Alamat: DESA GIRIJOYO KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	24.000.000
						252. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP BAKTI PERTIWI, Alamat: DESA KALIGLAGAH KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	24.000.000
						253. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP BINTANG HARAPAN, Alamat: DESA WONOSUKO KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	12.000.000
						254. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP AN-NUR, Alamat: DESA TURUS KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	12.000.000
						255. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP CAHAYA BUNDA, Alamat: DESA GUNUNG TEGES KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	6.000.000
						256. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TPA NUSA, Alamat: DESA REJOSARI KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	30.000.000
						257. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB HARAPAN IBU, Alamat: DESA JATIWANGSAN KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	12.000.000
						258. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP KARTINI, Alamat: DESA PAITAN KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	18.000.000
						259. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB DESI GROUP, Alamat: DESA KEMIRI LOR KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	6.000.000
						260. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB AL IMAN, Alamat: DESA REJOWINANGUN KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	6.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						261. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB BHAKTI SIWI, Alamat: DESA KALIMENENG KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	12.000.000
						262. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB AR ROHMAH, Alamat: DESA SIDODADI KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	12.000.000
						263. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB AL IKHLAS, Alamat: DESA KEDUNGPOMAHAN KULON KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	6.000.000
						264. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB ANGGREK, Alamat: DESA SUKOGELAP KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	6.000.000
						265. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB BINA PUTRA, Alamat: DESA ROWOBAYEM KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	6.000.000
						266. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP MAWAR, Alamat: DESA KALIURIP KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	18.000.000
						267. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP NURUL ILMI, Alamat: DESA KEMIRI KIDUL KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	6.000.000
						268. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP MARDISIWI, Alamat: DESA REJOSARI KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	6.000.000
						269. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP AL AMIN, Alamat: DESA WINONG KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	6.000.000
						270. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-PP LESTARI, Alamat: DESA GEDONG KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	6.000.000
						271. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TPA AISYIYAH, Alamat: DESA KEMIRI KIDUL KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	6.000.000
						272. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TPA SARROJA, Alamat: DESA KEMIRI KIDUL KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	6.000.000
						273. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK PAMARDIRINI, Alamat: DESA KEPUH, KUTOARJO, PURWOREJO	6.000.000
						274. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK DIAN LESTARI, Alamat: KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN, KUTOARJO, PURWOREJO	6.000.000
						275. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK INDRIYA SANNA II, Alamat: KELURAHAN KATERBAN, KUTOARJO, PURWOREJO	6.000.000
						276. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TKIT ULUL ALBAB 3, Alamat: DESA TUNTUNGPAIT, KUTOARJO, PURWOREJO	6.000.000
						277. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TKIT ULUL ALBAB 5, Alamat: PERUM ARGOPENI, KUTOARJO, PURWOREJO	12.000.000
						278. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK PALUPI, Alamat: PRINGGOWIJAYAN ,KUTOARJO, PURWOREJO	6.000.000
						279. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-TK KHOIRU UMMAH, Alamat: TEPUS KULON ,KUTOARJO, PURWOREJO	12.000.000
						280. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB AISYIYAH , Alamat: KELURAHAN KUTOARJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000
						281. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB SETIA BUDI, Alamat: DESA TEPUS WETAN KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000
						282. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB KREATIF CAHAYA, Alamat: KELURAHAN BANDUNG KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000
						283. Hibah Kinerja Pendidik PAUD-KB MIFTAHUL ILMI, Alamat: DESA KARANGWULUH KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000
						PAUD KABUPATEN PURWOREJO	-
						Pengelolaan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	5.307.400
						Rapat Koordinasi Hibah Kinerja Pendidik PAUD	30.787.346
				1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Peningkatan Kapasitas Guru TK Bersertifikasi	50.054.300

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Peningkatan Kapasitas Guru TK PNS	8.470.000
				1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Hibah Bansek TK/RA	969.000.000
						Pendampingan Bansek	29.234.800
				1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Hibah BOP PAUD	11.176.800.000
						TK Negeri Pembina Bagelen	26.400.000
						TK Negeri Pembina Kec.Bayan	51.600.000
						TK NEGERI PEMBINA KEC.PURWOREJO	54.600.000
						UPT SPNF	11.400.000
				1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Pendampingan BOP	28.316.600
				1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Fasilitasi Pokja Bunda PAUD	23.295.400
						Gebyar PAUD	14.847.100
						Penyusunan KSP PAUD	17.896.000
				1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan RKB RA Masyitoh Sucenjurutengah	-
						Pembangunan Ruang Kelas Baru RA Al Iman Bulus	-
				1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan gedung baru RA AT-TAZKIYAH Kalipuring RT.04/ RW.04 Desa Puspo Kecamatan Bruno	150.000.000
						Pembangunan Gedung baru RA BANATUL MASYITOH, DESA MEGULUNG KIDUL, KEC. PITURUH	200.000.000
				1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rehab area bermain TK. Perintis Kelurahan Kledungkarangdalem	-
				1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Administrasi Hibah	1.264.000
						Bantuan Alat Penunjang Kelengkapan Kegiatan Pembelajaran TK " Taman Putra	-
						Hibah APE TK Brojowisnu	-
						Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) KB KUNCUP MEKAR Desa Dlangu Rt 2 Rw 2 Kecamatan Butuh	-
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) Kelompok Bermain "Dewi Sartika" Desa Kaligintung Kecamatan Pituruh	22.000.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) KELOMPOK BERMAIN HIDAYATUL MUBTADI DESA TRIREJO KECAMATAN LOANO	20.000.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) KELOMPOK BERMAIN MELATI RT 01 RW 01 Desa Durensari Kec. Bagelen	23.150.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) KELOMPOK BERMAIN MUMPUNI KELURAHAN PANGENJURUTENGAH KECAMATAN PURWOREJO	20.000.000
						Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Kelompok Bermain Pamardi Putra Mudalrejo Kecamatan Loano	20.000.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) Lembaga KB BAKTI PERTIWI, Desa Rejosari Rt 2/Rw 2 Kecamatan Grabag	20.000.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) POS PAUD AL IMAN DESA LOANO KECAMATAN LOANO	20.000.000
						Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) POS PAUD MELATI Desa Karangrejo Kec. Loano	20.000.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) POS PAUD MUTIARA ABADI Dsn. Tepus RT 01 RW 05 Desa Somorejo Kec. Bagelen , Kab. Purworejo	22.646.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) POS PAUD PUTRA KARTINI, Desa Girigondo Kecamatan Pituruh	20.000.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) POS PAUD SEKAR ARUM DESA SIDARUM KECAMATAN KUTOARJO	20.000.000
						Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) RA KHODIJAH Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo	-
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) RAUDHATUL ATHFAL KUNTUM KUSUMA ANI YUDHOYONO KELURAHAN SINDURJAN KECAMATAN PURWOREJO	20.000.000
						Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Taman Kanak[Kanak Widodo Lugurejo Kecamatan Butuh	20.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) TK Wolo Desa Nambangan Kecamatan Grabag	-
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) TK Borowetan, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo	24.500.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) TK Handayani Desa kalimati Kecamatan Pituruh	20.000.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) TK ISLAM TERPADU BUSTANUL FALAH Dsn. Sigebang Rt 03 Rw 02 Gowog, Bruno	25.000.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) TK KENARI SEREN DESA SEREN KECAMATAN GEBANG	20.000.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) TK Kuncup Mekar Sukowuwuh Kec Bener	22.000.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) TK PANCASILA SOKO Kec. Bagelen . Desa Soko RT 01 RW 01 , Kab. Purworejo	21.500.000
						Pengadaan Alat permainan Edukatif (APE) TK Tri Mardisiwi Trirejo Loano	20.000.000
						Pengadaan alat permainan edukatif (APE) TK TUNAS HARAPAN SUMBERSARI DESA SUMBERSARI KECAMATAN PURWODADI	20.000.000
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	-
						Pengadaan APE KB Kartika Somoleter Bruno	22.000.000
						Pengadaan APE PAUD KB Permata Hati Popongan	22.000.000
						Pengadaan APE PP Assakinah Pituruh	22.000.000
						Pengadaan APE PP Tunas Bangsa Butuh	22.000.000
						Pengadaan APE TK Mahkota Kiangkog Kutoarjo	22.000.000
						Pengadaan APE TK Masyithoh Guyangan Loano	22.000.000
						Pengadaan APE TK Melati Mekar Pituruh	22.000.000
						Pengadaan APE TK Tunas Harapan Kroya, Kec. Gebang	24.000.000
						Pengadaan peralatan TIK POS PAUD LESTARI DESA TEPUS KULON KECAMATAN KUTOARJO	15.000.000
						Pengadaan peralatan TIK POS PAUD NURUL ATHFAL DESA SOKOHARJO KECAMATAN KUTOARJO	15.000.000
						Pengadaan peralatan TIK TK Mekar Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan	25.000.000
						Pengadaan peralatan TIK TK. TRI WALUYO ASI DESA TEGALREJO RT 02 RW 02 KEC. BANYUURIP	30.000.000
				1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehab Ruang Guru TK Mardisiwi Desa Kaliboto Kec.Bener	-
				1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehab Ruang Kelas KELOMPOK BERMAIN AL HIKMAH DUSUN KRAJAN RT 004 RW 001 DESAKALIURIP KECAMATAN BENER	100.000.000
						Rehab ruang kelas TK Kolopaking Desa Kalisemo Bener	-
						Rehab Ruang Kelas TK Masyitoh Kedungpomahan Wetan Dusun Gemelem RT 001 RW 003 Desa Kedungpomahan Wetan Kecamatan Kemiri	100.000.000
						Rehab Ruang Kelas TK Mekar Sari Condong Sari, Kec. Banyuurip	50.000.000
						Rehab Ruang Kelas TK MELATI NGASINAN DESA NGASINAN KECAMATAN BENER	100.000.000
						Rehab ruang kelas TK Pertiwi Desa Kedung Pucang Bener	-
						Rehab Ruang Kelas TK Pertiwi Pogungkalangan Desa Pogungkalangan, Kecamatan Bayan	-
						Rehab ruang kelasTK Bina Siwi Clapar Bagelen	-
						Rehabilitasi Ruang Kelas TK MARDISIWI RT 001 RW 001 Desa Keburusan Kecamatan Pituruh	63.000.000
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	144.270.000
						Rehabilitasi ruang kelas TK ABA Plipiran Bruno	-
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Beasiswa untuk ATS yang kembali bersekolah	100.000.000
						Pengelolaan Anak Tidak Sekolah (ATS)	5.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan data dan Peningkatan Kapasitas Pendidik Nonformal/Kesetaraan	9.590.000
				1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Operasional UPT SPNF	25.515.800
						Pembinaan dan Pengembangan PKBM	52.176.500
				1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Hibah BOP Kesetaraan	1.727.000.000
						Pengelolaan BOP	12.600.000
						UPT SPNF	377.300.000
				1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	SPM Kesetaraan	2.019.200
				1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru Madrasah Miftahul 'Ulum Bengkal	-
						Pembangunan Ruang Kelas Baru RA Al Iman Bulus	-
				1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Penyusunan KSP Kesetaraan	9.323.700
				1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Belanja alat tulis kantor	-
						Belanja Foto Copy	-
						Pengadaan peralatan TIK	-
				1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehab Ruang Kelas MADRASAH DINIYYAH AL-IMAN Desa Kalimeneng, Kecamatan Kemiri	150.000.000
						Rehab Ruang Kelas UPT SPNF	235.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	(blank)	
				1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Tari	13.560.000
				1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	(blank)	
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Koordinasi pengawasan dan pegendalian perizinan pendidikan	140.000
						Rapat Koordinasi pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan	640.000
			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Koordinasi pengawasan dan pengendalian perizinan PAUD	1.932.800
				1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Koordinasi pembinaan PAUD	2.095.300
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.01.06.2.01.0010	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota	Festival Tunas Bahasa Ibu SD dan SMP	205.676.200
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Fasilitasi Dewan Kesenian Purworejo	103.407.300
						Fasilitasi Pepadi	164.107.600
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Hibah Alat Kesenian	85.000.000
						Kajian dan Pengusulan WBTB	144.576.100
						Operasional Gedung Kesenian	107.981.800
						Pentas Kesenian Tradisional	1.210.951.200
				2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Pembinaan Grup Kesenian	25.587.900
						Rintisan Sekolah Budaya	500.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pelatihan Seni Tradisional	71.296.500
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Grebeg Budaya	304.411.000
						Jumenengan	215.811.000
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya	49.444.400
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jasa PPPK Paruh Waktu	93.120.000
						Penyusunan Perda Cagar Budaya	115.170.000
				2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Pemanfaatan Cagar Budaya	22.645.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Konservasi Koleksi	19.162.700
						Operasional Museum	7.073.300
				2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	(blank)	
				2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Belajar Bersama di Museum	50.000.000
						Isi ulang tabung pemadam kebakaran	7.158.000
						Jamasan Tosan Aji	66.686.000
						Kajian Koleksi Museum	74.250.000
						Lomba Cerdas Cermat Museum	13.928.700
						Lomba Video Alur Kisah	1.000.000
						Museum Keliling	24.835.000
						Pameran Temporer Museum	150.000.000
						Pembuatan Katalog Koleksi Museum	83.720.000
						Pemeliharaan AC	500.000
						Pemeliharaan Bangunan Museum	20.000.000
						Pemeliharaan CCTV	500.000
						Pemeliharaan Taman	8.871.500
						Pemutakhiran data Koleksi	50.000.000
						Pengayaan materi koleksi	40.522.000
						Penggantian Label atau Caption	25.000.000
						Penggantian Penyangga Koleksi	49.878.000
						Penggantian Pustek Koleksi	20.000.000
						Pentas Di Museum	35.000.000
						Perbaikan Vitrin	25.000.000
						Seminar Hasil Kajian	17.656.800
						Sosialisasi Museum dan Penyebarluasan Informasi Koleksi	2.180.000
				2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	165.608.900
DINAS KESEHATAN DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan (mendukung SPIP, MR, IEPK)	15.328.000
						Penyusunan Dokumen Perencanaan (mendukung SPIP, MR, IEPK)	14.240.500
				1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan laporan kinerja (mendukung SPIP, MR, IEPK)	3.111.500
				1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Koordinasi Penyusunan Data Sektoral	12.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133.496.793.596
						Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN	3.441.543.404
				1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	76.873.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.637.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	10.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.944.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Alat Listrik	5.270.200
				1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.672.200
				1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Makan minum harian pegawai	25.603.200
				1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan kartu kendali surat masuk dan surat keluar	2.286.500
						Penyediaan Kertas Kop lambang Emas	542.000
						Penyediaan sarana publikasi informasi	296.000
						Penyediaan stopmap kop dinas	1.197.000
				1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Alat Tulis	72.169.600
						Penyediaan alat tulis kantor	4.438.600
				1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Jamuan Tamu	4.288.000
				1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.379.000
				1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.001.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan sarana komunikasi kantor	3.626.500
						Penyediaan sumber daya air	77.319.200
						Penyediaan sumber daya listrik	282.744.000
				1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Keamanan	40.482.000
						Pengirian Barang/ Paket	250.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000
				1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.033.000
				1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	2.400.000
				1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.259.000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.740.000
				1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	55.843.000
				1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan AC	3.050.000
						Penyediaan bahan bakar genset	308.000
				1.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah (Sewa Tanah)	83.431.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Banyuasin	7.702.737.000
						Pelaporan kegiatan pembangunan puskesmas Banyuasin	4.305.000
						Pembangunan Puskesmas Bubutan	-
				1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Pelaksanaan Renovasi Puskesmas Bruno	-
				1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Hibah PMI	200.000.000
						Operasional Labkesda	484.208.870
						Penyediaan Rumah Singgah	99.988.000
						UPAK/Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan	25.600.000
				1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	(blank)	
				1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	(blank)	
				1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Labkesda	911.463.350
						Pelaporan Pengadaan Alat Laboratorium	553.000
				1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Pelaksanaan pengadaan alat kalibrasi	24.608.000
						Pelaporan kegiatan Pengadaan alat kalibrasi	2.951.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Pengadaan Alat Kalibrasi UPAK	482.209.700
				1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kalibrasi Alat Kesehatan	164.811.400
						Kalibrasi Alat Kesehatan (DAK)	209.705.000
						Pemeliharaan Alat Kesehatan	133.377.400
				1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Obat dan BMHP	20.731.000
						Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Obat dan BMHP	1.612.000
						Pengadaan Obat dan BMHP	9.695.906.478
				1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	78.272.700
						Pelayanan distribusi Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Reagen, Vaksin ke 27 Puskesmas dan Fasyankes	3.305.000
						Pemeliharaan aplikasi persediaan obat SIMO IF Dinkesda dan SIMO Puskesmas	77.000.000
						Pemusnahan Obat dan BMHP Rusak/ Kadaluarsa	180.000.000
						Penyediaan tenaga outsourching penjaga malam	40.482.000
						Penyediaan tenaga PPPK paruh waktu	36.824.000
						Pertemuan rekonsiliasi Obat Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Reagen, Vaksin dengan Puskesmas dan RSUD Setiap Bulan	14.058.000
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.560.000
						Monitoring pelaksanaan dan pelaporan pelayanan ibu hamil	1.325.500
						Penyediaan Buku KIA	104.169.200
						Pertemuan evaluasi pelayanan Kesehatan ibu hamil termasuk desk capaian SPM	2.560.000
				1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Koordinasi Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	1.646.000
						Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal (pelatihan)	46.938.500
				1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cetak Buku KIA Bayi Kecil	17.670.000
						Jasa Pemeriksaan Sampel Skrining BBL dan Sampel Konfirmasi	1.148.350.000
						Jasa Pengemasan,Pengiriman Sampel Skrining BBL dan Sampel Konfirmasi	9.594.000
						Koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	13.001.200
						Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	3.840.000
				1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	8.375.500
						Peningkatan Kapasitas Petugas	12.180.000
						Penyediaan Buku Bagan SDIDTK	12.100.000
						Sosialisasi dan Orientasi PKAT (Pemeriksaan Kesehatan Anak Terintegrasi)	4.480.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Monev pengelolaan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar	469.560
						Monev Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	2.076.000
						Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	7.048.000
						Rapat Koordinasi dan Advokasi TP UKS Kabupaten	6.152.000
						Sosialisasi dan Edukasi Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Usia Pendidikan Dasar	5.248.000
				1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Koordinasi dan Konsultasi Teknis Program Pelayanan Usia Produktif tingkat Provinsi	1.193.000
						Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar di Puskesmas	4.480.000
						Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	238.200

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Pertemuan Evaluasi Hasil Capaian CKG Usia Produktif	6.720.000
						Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai standar	6.720.000
				1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pelayanan PJP pada lansia resti	-
						Pencatatan dan Pelaporan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	2.919.400
						Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan pelaporan Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut ke Provinsi Jawa Tengah	906.000
						Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam memberikan Pelayanan PJP pada lansia Resti	9.100.000
						Pertemuan Sosialisasi Catpor CKG pada pengelolaan pelayanan kesehatan usia lanjut	1.800.000
						Pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	5.760.000
				1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	5.607.000
						Penguatan Programer PTM	7.300.000
				1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.579.000
						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus	13.817.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Konsultasi dan Koordinasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	620.000
						Monitoring dan Evaluasi pelayanan kesehatan ODGJ berat	702.000
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODGJ	105.000
						Pertemuan Penguatan Surveilans Data Kesehatan Jiwa dan Kelompok Rentan	4.100.000
						Sosialisasi Kabupaten/Kota Tesertifikasi Bebas Pasung Tingkat Kabupaten	5.236.800
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Skrining Tuberkulosis dan Penemuan Kasus TBC	1.288.695.708
				1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Optimalisasi pemeriksaan skrining HIV pada populasi berisiko dan populasi kunci	73.683.250
				1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	(blank)	
				1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	(blank)	
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Koordinasi, Konsultasi dan Monev Perbaikan Gizi Masyarakat	11.638.500
						Pemberian Makanan Tambahan	4.952.160.000
						Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS)	28.396.800
						Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam Perbaikan Gizi Masyarakat	94.856.000
						Sosialisasi dan Edukasi Pangan dan Gizi	64.412.700
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelaksanaan kegiatan Inspeksi Keshatan Lingkungan	531.653.000
						Pengangkutan dan pengolahan limbah	540.000.000
						Sosialisasi&koordinasi STBM, SKAMRT, PKAM,OSS,SKUDR, TPP,TFU	54.833.000
				1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kampanye dan Penggerakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat (DAK NF)	126.234.000
						Koordinasi dan Konsultasi Teknis Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	906.000
						Koordinasi dan Konsultasi Teknis Program Promosi Kesehatan tingkat Provinsi	1.480.000
						Pencatatan dan Pelaporan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.281.000
						Pengadaan Buku Bacaan Kader Media KIE Posyandu	41.520.000
						Pengadaan Lembar Balik Posyandu Media KIE Posyandu	49.305.000
						Pengadaan Media KIE Promosi Kesehatan	6.002.400
						Sosialisasi dan Koordinasi Promosi Kesehatan untuk Mendukung GERMAS	7.296.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Monitoring dan evaluasi pencatatan pelaoran pegelolaan pelayanan kesehatan tradisional	828.000
						Pencatatan dan Pelaporan Kesehatan Tradisional	893.900
						Peningkatan Kapsitas petugas Kesehatan Tradisional	3.140.000
						Pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi terkait Perizinan Kesehatan Trad	3.200.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	paket data internet untuk laporan mingguan sistem kewaspadaan dini respon KLB	8.195.900
						Penggandaan Laporan Kegiatan Haji dan Surveilans	1.254.500
						Penyelidikan Epidemiologi dan Pengendalian KLB/Wabah/Infeksi Emerging	1.976.000
						Pertemuan Program Surveilans Kesehatan dan Surveilans Kesehatan Haji	33.100.000
						Program Surveilans Kesehatan Haji dan Surveilans Kesehatan	41.500.000
						Verifikasi Sinyal/Rumor	8.424.000
				1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Konsultasi dan Koordinas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	3.100.000
						Monev P3LP, Disabilitas dan KTPA	1.170.000
						Pengelolaaan Pelayanan Keswa Napza, Disabilitas dan KTPA	203.000
						Pertemuan Renval dan Bimbingan Teknis program P3LP, Disabilitas dan KtPA	16.400.000
						Sosialisasi, Pertemuan Renval, dan Bimbingan Teknis Program P3LP, Disabilitas dan KtPA	473.600
				1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Koordinasi upaya pengurangan krisis dan pasca krisis kesehatan serta penyediaan posko kesehatan	10.547.500
				1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3	65.907.283.835
						bantuan iuran bagi peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3	1.540.000.000
						Koordinasi kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat	14.620.000
						Pembayaran layanan kesehatan klaim jamkesda di luar cakupan BPJS	3.000.000.000
						Pembelian pulsa untuk mendukung pelayanan Jamkesda	2.000.000
						Penyediaan dokumen SK pembayaran PBPU dan BP PEMDA	30.000.000
						Pertemuan Penguatan programer JKN dan Jamkesda	8.320.000
				1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Pendampingan lokus KKS	32.620.000
						Rakor Kab. Sehat	43.860.000
				1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Telemedicine di faskes	45.140.500
				1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pendampingan ILP ke puskesmas/Desa/Kelurahan	79.360.000
						Pertemuan evaluasi ILP dan pelayanan Kesehatan TPMD/B	12.080.000
						Pertemuan Penguatan pelaksanaan Pelayanan UPKD/K, Klinik, TPMD/B	10.448.000
				1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pendampingan Kesiapan Akreditasi	16.242.800
				1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi	1.305.000
						Pengambilan Vaksin Logistik dan Koordinasi ke Provinsi	15.320.000
						Pertemuan Sosialisasi, Koordinasi dan Evaluasi Imunisasi	20.180.000
				1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	(blank)	
				1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Penyediaan dan Pengelolaan SPGDT	245.714.200
				1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Koordinasi dan Konsultasi Tingkat Provinsi	3.579.000
						Tatalaksana TBC, Pertemaun TPMD, Monev dan Valdat Prog TBC, Penemuan Kasus ILTB	13.287.500
				1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Konsultasi dan Koordinasi Tingkat Provinsi	2.386.000
						Valdat dan Refreshing SIHA, Tatalaksana HIV dan VL	8.513.500

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Juru Malaria Desa	248.424.000
						Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi	7.158.000
						Pemeliharaan Eliminasi Malaria	6.500.000
						Pengadaan Larvasida Malaria	19.459.930
						Pengadaan RDT Combo Malaria	79.801.722
						Rapat Koordinasi Pemeliharaan Eliminasi Malaria	42.342.000
				1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Rapat Evaluasi Pelaksaaan Kawasan Tanpa Rokok	3.200.000
						Rapat Koordinasi Anggota Satgas KTR dan Sosialisasi Tahapan KTR 2027-2028	16.000.000
						Rapat Koordinasi dan Sosialisasi KTR	5.400.000
						Verifikasi Penetapan KTR	25.400.000
				1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Monitoring Pelayanan Kesehatan reproduksi	2.743.000
						Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan Reproduksi	14.880.000
						Pertemuan evaluasi pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.126.000
						Pertemuan Koordinasi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.971.000
						Pertemuan penguatan layanan skrining layak hamil bagi Catin dan PUS	11.280.000
				1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Desk Capaian SPM Bidang Kesehatan	14.848.000
						Laporan Desk Capaian SPM Bidang Kesehatan	152.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pertemuan Verifikasi dan analisis data MPDN	83.520.000
						Desiminasi rekomendasi hasil pengkajian kematian ibu dan bayi	17.048.000
						laporan pertemuan verifikasi dan analisis MPDN	718.035
						Pengkajian kasus kematian ibu dan bayi	23.600.000
						Peningkatan Kapasitas Petugas	63.030.000
						Pertemuan Evaluasi dan koordinasi pelaksanaan program layanan KIA dan Gizi	90.869.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	(blank)	
				1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Laporan Pengiriman Spesimen Potensial KLB/Wabah/Infeksi Emerging	93.195.000
						Pemeriksaan Spesimen HPV DNA	220.500.000
						Pemeriksaan Spesimen Potensial KLB/Wabah/Infeksi Emerging	54.385.000
						Pengambilan Spesimen HPV DNA	147.000.000
						Pengepakan Spesimen HPV DNA	61.250.000
						Pengiriman Spesimen Potensial KLB/Wabah/Infeksi Emerging	44.160.200
				1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Koordinasi dan Konsultasi Program Pengelolaan Kesehatan Kerja	4.938.000
						Monitoring dan Evaluasi Kesehatan Kerja	650.000
						Pembinaan Kebugaran di Tempat Kerja	12.000.000
						Pembinaan Kesehatan Kerja	12.565.800
						Pembinaan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja (Pos UKK)	26.880.000
						Pertemuan Evaluasi Kesehatan Kerja	5.760.000
						Pertemuan Renwal dan Bimtek Kesehatan Kerja	4.680.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Orang Dengan Masalah Kejiwaan	2.360.000
						Monev Skrining Keswa Napza	975.000
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODMK	65.000
						Sosialisasi Deteksi Dini Keswa dan Napza	1.800.000
						Sosialisasi Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fayankes dan Sekolah	12.800.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Koordinasi dan Konsultasi Penyakit Menular ke Provinsi Jateng	10.737.000
						Koordinasi Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	3.250.000
						Monev, Valdat dan Refreshing Tata Laksana Penyakit Menular	45.283.000
				1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Pertemuan Sosialisasi Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Pengelolaan Penyakit Tidak Menular	29.728.000
						Rakor dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	98.202.800
				1.02.02.2.02.0059	Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Sosialisasi Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza di Fayankes dan Sekolah	6.082.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	159.064.200
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Rapat koordinasi dan penguatan standar perizinan berusaha faskes	4.335.000
				1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(blank)	
				1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Penguatan Implementasi Tata Kelola Mutu Faskes	71.988.000
						Workshoop Pemantauan Mutu Pelayanan Internal Puskesmas	77.431.000
				1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	(blank)	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Koordinasi perizinan praktik tenaga kesehatan	1.934.900
				1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Monitoring dan evaluasi praktik tenaga kesehatan	5.249.260
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kredensialing Tenaga Kesehatan	3.306.000
						Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan	178.869.000
				1.02.03.2.02.0004	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Penyusunan Dokumen Rencana dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.900.000
						Penyusunan Peta Jabatan	4.100.000
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Diklat/Bimtek	1.318.907.000
						Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	64.505.000
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Bimbingan Teknis Kefarmasian	6.631.500
						Pendampingan CAPA	4.100.100
						Pengawasan / Monev Sarana Kefarmasian	-
						Pengawasan dan Pengendalian (DAK POM)	174.047.000
			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	BIMTEK CARA PRODUKSI PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA	6.470.000
						PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PKRT	3.530.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan	25.768.000
						PEMERIKSAAN SARANA IRTP	5.095.000
						PENDAMPINGAN CAPA IRTP	6.537.000
						PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	96.899.000
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Inspeksi Kesehatan Lingkungan TPM/DAM	1.158.200
						Kursus/Pelatihan Keamanan Pangan TPM/DAM	5.120.000
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Inspeksi Kesehatan Lingkungan	1.745.400
						Penyuluhan Keamanan Pangan Siap Saji	5.000.000
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	BIMTEK CPPOB-IRT	7.680.000
						PENGAWASARAN SARANA IRTP	3.453.400
						PENGUJIAN SAMPEL PANGAN	89.108.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Konsultasi dan Koordinasi Teknis Pokjanal Desa Siaga	2.630.000
						Rakor Pokjanal Posyandu	13.410.500
						Rapat Koordinasi Rakor Tim Pokjanal Posyandu tingkat Kecamatan	8.816.000
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Giat Saka Bakti Husada dan Pembentukan Pangkalan	7.880.000
						Konsultasi dan Koordinasi Teknis ke Propinsi terkait PHBS	1.240.000
						Monev dan Supervisi Pelaksanaan PHBS	650.000
						Penyediaan Media Promosi Kesehatan Sosialisasi PHBS	6.140.000
						Penyusunan laporan Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	1.596.500
						Rakor Penyusunan Perbup PHBS	7.680.000
						Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Poskestren	5.000.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bantuan alat kesehatan untuk Posyandu	43.480.800
						Konsultasi dan Koordinasi Tehnis ke Provinsi tentang Posyandu	1.110.000
						Konsultasi dan Koordinasi Teknis ke Propinsi Terkait Posyandu	453.000
						Lomba Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten	16.376.400
						Monev Ke Puskesmas	650.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Rapat Koordinasi Lomba Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten	3.840.000
						Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu	3.397.000
						Workshop Kader Posyandu	20.360.000
UPT PUSKESMAS KEMIRI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Belanja Jasa BLUD	1.200.028.654
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	58.000.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	29.500.000
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.872.201.479
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	48.000.000
						Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	58.600.000
						Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.028.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	129.427.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	254.708.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	54.638.900
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	21.408.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	11.585.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	41.320.000
UPT PUSKESMAS MRANTI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	531.681.531
						Belanja Jasa Pelayanan Bagi ASN	846.971.399
						Belanja Pegawai BLUD	32.966.069
						SILPA BLUD	20.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kelas ibu balita	37.800.000
						Kelas Ibu Hamil	9.076.000
						Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	21.504.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	3.744.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	1.142.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	3.120.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak)	1.248.000
						Penyediaan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	97.020.000
						Penyediaan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK	30.960.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Inspeksi kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum (TFU), Sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes	1.976.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Survei dan pengendalian vektor	1.300.000
						Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan Surveilans Kualitas Udara dalam Ruang	1.300.000
						Verifikasi sinyal/rumor, PE/pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/Wabah, PE penyakit menular lainnya, keracunan makanan dan penyehatan lingkungan	780.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pemberian Insentif UKM bagi Pegawai Puskesmas	60.904.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pelacakan, pelaporan dan pelaksanaan otopsi verbal kematian ibu dan bayi/balita	156.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pelayanan Imunisasi termasuk penemuan kasus KIPI dan PD3I	2.340.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Fasilitasi pelaksanaan First Aider Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) di sekolah	12.928.000
						Tindak lanjut hasil skrining kesehatan jiwa di UKBM/Lembaga	390.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular	5.200.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi	28.288.000
						Pendampingan pelaksanaan ILP di pustu dan Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan (UPKD/K)	24.598.000
UPT PUSKESMAS CANGKREP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	belanja barjas blud	15.000.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	34.000.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.000.000
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	919.597.950
						penyediaan barang dan jasa blud	682.427.050
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	71.847.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.588.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.857.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.704.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	111.502.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.210.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.198.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	82.808.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	410.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	6.872.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	7.256.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	8.722.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	81.267.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	107.551.000
UPT PUSKESMAS PURWOREJO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	734.189.979
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	34.800.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	18.000.000
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.158.968.755
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.854.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.864.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	5.616.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.992.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	244.885.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.640.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.318.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pemberian Insentif UKM bagi Pegawai Puskesmas	40.098.500
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	130.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	5.785.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	6.268.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	32.728.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17.584.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	118.224.000
UPT PUSKESMAS WINONG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	608.122.091
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (BPJS 4%)	24.000.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK (BPJS 4%)	10.000.000
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	813.933.136

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.824.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.172.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.704.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.412.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	180.652.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.236.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.955.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	52.996.200
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	78.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.483.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	3.676.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	13.130.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	43.537.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	157.400.000
UPT PUSKESMAS GEBANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.394.271.327
						Belanja Pegawai BLUD	56.947.056
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94.360.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.426.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.872.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.314.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	241.370.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.742.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.956.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	44.495.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	182.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	10.556.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.316.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	32.448.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi,Kesehatan,Advokasi,Kemitraan,dan Pemberdayaan Masyarakat	11.312.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi, Pengembangan,dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21.858.000
UPT PUSKESMAS WIRUN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	991.092.165
						Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	16.504.000
						Honor Pejabat Pengadaan	680.000
						Iuran Jaminan Kesehatan PNS BPJS 4%	16.800.000
						Iuran Jaminan Kesehatan PPPK BPJS 4%	8.400.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	179.280.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.744.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.276.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.900.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Penyediaan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	910.000
						Penyediaan PMT Lokal Bumil KEK dan Resiko KEK	82.740.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	858.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.329.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	86.091.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	130.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	4.264.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	947.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	13.091.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	41.226.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.760.000
UPT PUSKESMAS BAYAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.043.730.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	48.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	24.000.000
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.374.735.000
						Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	6.555.000
						Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.630.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.940.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.744.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.248.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.912.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	126.285.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.612.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.160.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	57.682.500
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	117.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	6.071.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	20.449.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	28.262.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	25.870.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48.870.000
UPT PUSKESMAS BENER	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.082.993.461
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60.000.000
						Belanja iuran premi PPPK	30.000.000
						Belanja Jasa Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Pelayanan Operasional - [PUSKESMAS BENER]	80.360.000
						Belanja Jasa Pegawai Pemerintahan Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional - [PUSKESMAS BENER]	71.568.000
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.183.920.000
						Belanja komputer PC	21.186.000
						Belanja Modal Alat Pendingin	11.823.000
						Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	9.494.000
						Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.122.000
						Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit komputer lainnya	14.734.000
						Penyediaan Barjas BLUD	50.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	82.680.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.186.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	624.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.812.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	153.693.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.222.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.236.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	44.100.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	4.238.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	9.895.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2.053.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	42.930.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	62.465.000
UPT PUSKESMAS SEBOROKRAPYAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa	935.930.081
						Belanja Modal	24.326.000
						Belanja pegawai	22.800.000
						SILPA	46.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	55.744.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.120.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.816.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.720.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	130.084.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	676.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	988.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	45.012.300
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	102.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	5.629.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	15.544.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	21.424.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	45.600.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	48.870.000
UPT PUSKESMAS BAGELEN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	497.500.000
						Belanja Barang dan Jasa BLUD dana SILPA	73.000.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.000.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sumber dana SiLPA	1.300.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.000.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Sumber Dana SiLPA	700.000
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	680.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.376.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	3.900.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.572.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Orang Terduga Tuberkulosis	1.521.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	156.401.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.380.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.016.000
				1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	15.292.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	97.852.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	28.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	69.330.000
UPT PUSKESMAS KUTOARJO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	559.932.400
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.278.600
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.426.200
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	698.062.800
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	19.922.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.706.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.836.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.745.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	169.179.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.328.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	11.360.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	114.766.200
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	142.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	2.256.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	26.651.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23.144.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	20.794.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.297.000
UPT PUSKESMAS PITURUH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.575.898.926
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN (PNS dan PPPK Penuh Waktu)	2.000.791.245
						Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60.824.054
						Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Penuh Waktu	19.207.596
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Kesehatan ibu hamil	50.835.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan kesehatan pada usia pendidikan dasar	17.888.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.456.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.600.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	224.336.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.900.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.201.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	61.000.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	260.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	10.400.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	6.216.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	34.099.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	54.360.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	47.500.000
UPT PUSKESMAS BANYUURIP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	562.192.309
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.000.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.104.977
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	852.624.430
						Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	23.750.000
						Belanja Modal Alat Pendingin	18.369.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita	96.460.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	572.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	131.674.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Inspeksi kesling di Sarana Tempat dan Fasilitas Umum (TFU), Sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes	520.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan Surveilans Kualitas Udara dalam Ruang	390.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pemberian Insentif UKM bagi Pegawai Puskesmas	70.964.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Fasilitasi pelaksanaan First Aider Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) di sekolah	1.590.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	29.680.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi	48.760.000
UPT PUSKESMAS GRABAG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.010.937.640
						Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.107.917.795
						Premi 4% BPJS PNS	50.590.027
						Premi 4% BPJS PPPK	33.726.685
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	103.456.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	117.844.800
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.600.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	85.675.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pelayanan Imunisasi termasuk penemuan kasus KIPI dan PD3I	7.982.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	18.714.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Deteksi dini dan cek kesehatan gratis pemantauan dan tindak lanjut penyakit tidak menular	9.984.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3.710.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	51.105.000
UPT PUSKESMAS NGOMBOL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.519.391.931
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.729.258.822
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	112.719.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.797.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.430.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.080.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	242.546.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.664.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.600.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	93.882.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	156.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	8.320.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	10.026.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	6.760.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	20.850.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	96.246.000
UPT PUSKESMAS SEMAWUNG DALEMAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	776.802.108
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	24.512.520

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	16.341.680
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	874.161.752
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	86.124.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.630.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.716.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.150.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Belanja Bahan dan Penyiapan PMT Lokal BUMIL KEK	43.860.000
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan kesehatan Gizi Masyarakat	736.000
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	71.683.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.924.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.740.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	63.776.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	78.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.120.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	12.397.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	10.988.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	70.614.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12.381.000
UPT PUSKESMAS SRUWOHREJO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.080.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.160.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.056.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.990.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.496.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	67.194.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.560.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.730.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	62.800.200
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	130.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	3.549.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4.023.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	20.389.200
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	33.360.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	125.520.000
UPT PUSKESMAS BUTUH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.003.642.400
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS (BPJS 4%)	35.000.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK (BPJS 4%)	20.000.000
						Jasa Pelayanan Kesehatan ASN	1.315.463.600
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	40.908.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.392.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	546.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.312.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	95.151.200
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.756.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.914.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Pemberian Insentif UKM bagi Pegawai Puskesmas	70.000.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	71.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	2.743.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	22.054.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	47.167.200
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	22.845.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	67.062.000
UPT PUSKESMAS LOANO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.379.026.012

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.830.176.950
						Belanja pegawai	70.032.281
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	52.448.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.876.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.170.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.641.600
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	120.772.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.144.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.549.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	42.624.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	52.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.898.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	19.760.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	13.614.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	36.419.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	63.651.000
UPT PUSKESMAS BRUNO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.005.891.763
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.681.685.645
						Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	65.388.000
						Belanja Modal Alat Pendingin	13.479.000
						Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.524.000
						Belanja Modal Mebel	2.581.000
						Iuran Jaminan Kesehatan PNS BPJS 4%	67.260.000
						Iuran Jaminan Kesehatan PPPK BPJS 4%	32.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelaksanaan Kelas ibu balita	89.712.000
						Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil	65.664.000
						Pelaksanaan Kelas ibu Hamil	1.872.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas) dan pemantauan minum TTD	7.410.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	2.340.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.430.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	508.419.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.132.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.446.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	118.560.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	133.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	6.565.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	1.209.000
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	23.681.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	23.361.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Intervensi pemberdayaan masyarakat berdasarkan siklus hidup dan unit Pelayanan Kesehtan Desa/ Kelurahan	25.020.000
						Partisipasi dalam Musrembangdes petugas UPKD/K	468.000
						Tindak Lanjut Kunjungan Rumah di UPKD/K	936.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	54.754.000
UPT PUSKESMAS BRAGOLAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.320.095.372
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	26.400.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	36.690.415
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.514.169.954
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.137.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.758.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.666.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	962.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	95.882.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.054.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6.448.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	52.950.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	104.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.860.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	4.249.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	17.160.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	21.346.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	49.616.000
UPT PUSKESMAS KALIGESING	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	954.413.797
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	33.114.294
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	15.000.000
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.328.932.585
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.036.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.938.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	104.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.508.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	195.934.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.664.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.600.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	78.400.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	26.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	6.838.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	4.802.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	8.359.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	44.134.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	56.262.000
UPT PUSKESMAS KARANGGETAS	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	465.041.256
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	22.500.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.240.293
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	875.507.324

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	62.890.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	107.568.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2.340.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	8.346.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.680.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	141.820.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.210.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5.980.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	81.969.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	130.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.990.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	1.718.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	17.212.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	40.032.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	63.138.000
UPT PUSKESMAS DADIREJO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang Jasa BLUD	714.631.780
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	31.655.320
						BelanjaIuran Janiman Kesehatan PPPK	29.220.296
						Brlanja jasa pelayanan Kesehatan bagi ASN	791.383.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	36.332.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.976.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	3.744.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.080.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	143.715.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	988.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	7.046.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	43.096.200
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	104.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	3.068.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	11.302.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	17.628.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	49.844.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	68.003.000
UPT PUSKESMAS BUBUTAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa	1.631.500.000
						Belanja Barang dan Jasa dari SILPA	50.000.000
						Belanja pegawai	38.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengeloalan Pelayanan Ibu Hamil	2.678.000
						Pengelolaan Pelayanan Ibu Hamil	99.274.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.554.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	260.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	910.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	90.422.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.560.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.976.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	51.120.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	148.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	2.392.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	15.777.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	4.342.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	30.816.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	34.726.000
UPT PUSKESMAS BANYUASIN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.686.815.075
						Belanja Modal BLUD	11.380.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Belanja Pegawai BLUD	39.000.000
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.840.000
				1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.443.000
				1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	780.000
				1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	5.954.000
				1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	47.428.000
				1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	858.000
				1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.080.000
				1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	33.232.000
				1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	52.000
				1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Pengelolaan Layanan Imunisasi	5.265.000
				1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	12.566.000
				1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	20.423.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	18.421.000
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	72.959.000
RSUD R.A.A TJOKRONEGORO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD	44.458.239.910
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	20.221.538.090
						Belanja Modal BLUD	670.222.000
						Iuran Jaminan Kesehatan PNS BPJS 4%	400.000.000
						Iuran Jaminan Kesehatan PPPK BPJS 4%	250.000.000
RSUD DR. TJITROWARDOJO	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	AP Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.195.000
						Belanja Barang dan Jasa BLUD	243.432.076.000
						Belanja Modal BLUD	74.306.260.000
						Belanja Pegawai BLUD	152.688.000
						Pengawasan Konstruksi	692.545.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pendukung MR, SPIP, IEPK	1.094.500
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	162.009.700
				1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.081.200
				1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.829.358.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000
				1.03.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kegiatan pada UPTD Laboratorium Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	131.307.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.367.000
				1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47.229.800
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor	5.990.100
				1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.606.100
				1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.656.000
				1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.992.800
				1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.332.000
				1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	46.849.800
				1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.992.000
				1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.720.000
				1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	139.534.400
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.982.000
				1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Pengadaan Alat Berat	-
				1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	-
				1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Alat Bantu Kerja	-
						Pengadaan Alat Uji Laboratorium Konstruksi	75.000.000
						Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	333.578.000
				1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.140.000
				1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	487.066.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.840.000
				1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	345.650.000
				1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan Peralatan Berat (mendukung PAD)	170.000.000
				1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.500.000
				1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	537.500.000
				1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya	12.200.000
				1.03.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	25.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.0130	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Sistem Hidrologi	18.045.000
						Pengelolaan Sistem Hidrologi	1.955.000
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bekokok I	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bekokok II	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bengkal	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bleber	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Dupo	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gupit	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gusti Ngisor	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Jrakah	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Juweh	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kalisemo	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kebangsan	375.800.000
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kedung Miring	400.000.000
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kedungminger	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kemranggen II	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kombang III	600.000.000
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Krandon	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Krengseng	563.400.000
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mentosaran	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mranti I	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Mudal	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ngaglik II	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pandek	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Pending	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Penungkulan	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Podang	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Putak	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sudorogo	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tembalak Duwur	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tlogokotes	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Tuk Gunting	-
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Klereng I	327.900.000
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Klereng II	327.900.000
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Winong	-
				1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Operasi Jaringan Irigasi	87.161.600
						Pemeliharaan Berkala Jaringan irigasi	1.716.820.000
						Pemeliharaan Darurat Jaringan Irigasi	145.130.000
						Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	1.231.305.000
						Pengamanan Jaringan irigasi	149.775.000
						Penyediaan Alat, Bahan, dan Penunjang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	546.360.000
						Sosialisasi dan Evaluasi Musim Tanam	41.430.000
				1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi	120.000.000
				1.03.02.2.02.0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Operasional Pengelola Irigasi Tingkat Pengamat	30.300.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Operasional Sekretariat Komisi Irigasi	44.615.000
				1.03.02.2.02.0048	Peningkatan Bendung Irigasi	Peningkatan Bendung Bulus	-
						Peningkatan Bendung Mudal	-
				1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Penyusunan Rencana Teknis/DED Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	10.000.000
						Penyusunan Rencana Teknis/DED Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 1	50.000.000
						Penyusunan Rencana Teknis/DED Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 2	50.000.000
						Penyusunan Rencana Teknis/DED Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi Paket 3	15.000.000
						Survei Kondisi Jaringan Irigasi	25.000.000
				1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Rehabilitasi Bendung Banyu Surup	-
						Rehabilitasi Bendung Bekokok II	-
						Rehabilitasi Bendung Blade	563.700.000
						Rehabilitasi Bendung Bojong	-
						Rehabilitasi Bendung Dung Lemper	373.900.000
						Rehabilitasi Bendung Gladak	-
						Rehabilitasi Bendung Juweh	-
						Rehabilitasi Bendung Kalisat	-
						Rehabilitasi Bendung Kedung Minger	563.700.000
						Rehabilitasi Bendung Kinger	-
						Rehabilitasi Bendung Klereng III	563.700.000
						Rehabilitasi Bendung Krasak	-
						Rehabilitasi Bendung Ngaglik II	-
						Rehabilitasi Bendung Pakisan	-
						Rehabilitasi Bendung Sedayu II	-
						Rehabilitasi Bendung Srapah	-
						Rehabilitasi Bendung Tawangsari	600.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, SYTRATEGI DAN TEKNIS SPAM	115.616.000
				1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Peningkatan KP-SPAMS TIRTA SARI BUMI DESA DILEM KEC. KEMIRI	-
						Peningkatan SPAM BPSPAM TIRTA SARI desa Mayungsari Kecamatan Bener	1.450.000.000
						Peningkatan SPAM KPSPAM TIRTO WENING Desa Kedungpomahan Kulon Kecamatan Kemiri	450.000.000
				1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM DESA	50.000.000
				1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	-
				1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN SPAM	32.435.000
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	2.900.000.000
				1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	100.000.000
				1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	UKL-IPL dan Pertek	100.000.000
				1.03.05.2.01.0048	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	47.686.000
				1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Pembangunan Jamban Sehat (Pokir)	23.444.000
						Pembangunan Jamban Sehat APBD	5.510.342.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan A Yani	1.850.000.000
				1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	1.000.000.000
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	300.000.000
				1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Gedung Dinperkimtan	-
						Pembangunan Gedung DLHP	-
						Pembangunan Gedung DPUPR	-
						Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perhubungan	-
						Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Semawung Daleman	2.900.000.000
						Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Semawung Kembaran	2.900.000.000
						Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sindurjan	-
						Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Sucenjurutengah	-
						Pembangunan Pagar Polres Purworejo	290.000.000
						Rehabilitasi Gedung Kantor Dinperkimtan	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Penyusunan DED Jalan/Jembatan	672.000.000
				1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey kepada desa (Monitoring dan evaluasi kegiatan)	20.000.000
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	30.000.000
				1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Mitigasi Longsor	1.000.000.000
						Pemeliharaan Trotoar	1.000.000.000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	34.406.479.278
						Penanganan Drainase Jalan Jenar - Purwodadi	861.000.000
						Penanganan drainase di jalan kabupaten (Kelurahan Kedungsari Kec. Purworejo)	-
						Penanganan Drainase Jalan Brijend Wiyono (RW 08 Kelurahan Baledono, Purworejo)	-
						Penanganan Longsor	2.000.000.000
						Penanganan Longsor Desa Gowong	1.470.000.000
						Rehabilitasi Drainase Jalan Cangkrep - Ag. Putro - Kedungsari	645.600.000
				1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan	Pembangunan Jalan Trirejo - Karangrejo Lanjutan	2.267.000.000
				1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Peningkatan Jalan Tridadi - Sumowono	-
						Peningkatan Jalan Banyuurip-Bencorejo	-
						Peningkatan Jalan Bencorejo - Angkrukketip	4.882.000.000
						Peningkatan Jalan Brenggong-Tlogorejo	-
						Peningkatan Jalan Gesing - Watukoro	-
						Peningkatan Jalan Karangrejo-Ngaran	-
						Peningkatan Jalan Ngombol - Wunut	-
						Peningkatan Jalan Pekacangan - Kaliwader	-
						Peningkatan Jalan Somorejo - Tepus	-
						Peningkatan Jalan Tridadi-Sumowono	-
						Peningkatan Jalan Angkruketip - Sangubanyu	-
						Peningkatan Jalan Bapangsari - Tlogokotes Lanjutan	-
						Peningkatan Jalan Bayan - Sambeng	-

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Peningkatan Jalan Bener - Guntur	4.502.000.000
						Peningkatan Jalan Brengkol - Megulung	-
						Peningkatan Jalan Bruno - Brondong - Watuduwur - Gowong	-
						Peningkatan Jalan Bruno - Cempedak	-
						Peningkatan Jalan Bruno - Girijoyo	-
						Peningkatan Jalan Butuh - Kedungsri	-
						Peningkatan Jalan Doplang-Sucen	-
						Peningkatan Jalan Gebang - Tlogosono	-
						Peningkatan Jalan Jeketro - Donorejo	-
						Peningkatan Jalan Jenar - Purwodadi	-
						Peningkatan Jalan Jono - Wareng	-
						Peningkatan Jalan Kaliglagah - Wonosido	-
						Peningkatan Jalan Kalijambe - Cacaban Lor	-
						Peningkatan Jalan Kalikotes - Kaligintung	-
						Peningkatan Jalan Kalikotes Kaligintung	-
						Peningkatan Jalan Kalimeneng - Purbayan	-
						Peningkatan Jalan Karangduwur - Winong	-
						Peningkatan Jalan Karangrejo - Tridadi	-
						Peningkatan Jalan Kedungsari - Boro Wetan	4.882.000.000
						Peningkatan Jalan Kemiri - Pakisarum Lanjutan	-
						Peningkatan Jalan Kenteng-Bencorejo	-
						Peningkatan jalan Ketawang - Dungus	-
						Peningkatan Jalan Ketawang - Laban Lanjutan	-
						Peningkatan Jalan Kluwung - Kedungpomahan	3.430.000.000
						Peningkatan Jalan Laban - Gesing	-
						Peningkatan Jalan Pakisarum - Cempedak	-
						Peningkatan Jalan Pandanrejo - Ngaran	3.988.000.000
						Peningkatan Jalan Pandanrejo-Donorejo	-
						Peningkatan Jalan Pekacangan-Kaliwader	-
						Peningkatan Jalan Pemotongan Hewan	-
						Peningkatan jalan Pendowo - Jenar	-
						Peningkatan Jalan Piono - Cokroyasan	1.705.000.000
						Peningkatan Jalan Pituruh - Megulung Lanjutan	-
						Peningkatan Jalan Pituruh kesawen - Megulung	4.882.000.000
						Peningkatan Jalan Popongan-Banyuurip	-
						Peningkatan Jalan Pucangagung - Sambeng	-
						Peningkatan Jalan Ruas Jalan Gintungan-Jetis	4.250.000.000
						Peningkatan Jalan Ruas Jalan Lugosobo-Sucen	-
						Peningkatan Jalan S. Parman	-
						Peningkatan Jalan Sambeng-Seren	4.882.000.000
						Peningkatan Jalan Sruwoh - Kedungsri	-
						Peningkatan Jalan Sumbersari - Tanjungrejo	4.882.000.000
						Peningkatan Jalan Suren - Sruwoh	-
						Peningkatan Jalan Suren - Wareng	2.940.000.000
						Peningkatan Jalan Tegalmiring - Piono	-
						Peningkatan Jalan Tlogokotes - Batas DIY (Lanjutan)	-
						Peningkatan Jalan Tlogosono - Redin	-
						Peningkatan Jalan Tumbakanyar - Banyuasin	-
						Peningkatan Jalan Tunjungan - Wonoroto	-
						Peningkatan Jalan Tursino - Dilem	2.113.528.000
						Peningkatan Jalan Wonosido - Kemranggen	3.280.000.000
						Rehabilitasi Jalan Banyuasin - Pagerharjo	-
						Rehabilitasi Jalan Cempedak - Karanggedang - Kemranggen	-
						Rehabilitasi Jalan Kaligesing - Ngaran	-
						Rehabilitasi Jalan Kedungsari - Borowetan	-
						Rehabilitasi Jalan Kemanukan - Somongari	-

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Rehabilitasi Jalan Ketawang - Pantai	3.508.000.000
						Rehabilitasi Jalan Manisjangan - Nglaris	-
						Rehabilitasi Jalan Somongari - Jatirejo - Bts.DIY	-
						Rehabilitasi Jalan Tegalgondo - Wonorejo Kulon	-
						Rehabilitasi Jalan Tridadi - Pucungroto	-
						Rehabilitasi Jalan Winong - Girijoyo	-
						Rehabilitasi Jalan Batoh - Dewi - Tanjungrejo	-
						Rehabilitasi Jalan Bruno - Brondong - Watuduwur - Gowong	1.705.000.000
						Rehabilitasi Jalan Cangkrep - Ag. Putro - Kedungsari	-
						Rehabilitasi Jalan Cangkrep-Kedungsari-Ganggeng	-
						Rehabilitasi jalan Cepedak - Kemranggen	-
						Rehabilitasi Jalan Gebang - Megulung	-
						Rehabilitasi Jalan Guyangan - Ngombol	-
						Rehabilitasi Jalan Kalirejo - Hargorojo	-
						Rehabilitasi Jalan Kemanukan - Soko	-
						Rehabilitasi Jalan Kesawen - Kaliglagah	-
						Rehabilitasi Jalan Kutoarjo - Karangduwur	-
						Rehabilitasi Jalan Lengkong - Banyuurip	-
						Rehabilitasi Jalan Pakisarum - Cempedak	-
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Sukowuwuh Kecamatan Bener, Kab. Purworejo	881.000.000
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan	-
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Pogungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo	100.000.000
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Banyuyoso Kecamatan Grabag	63.000.000
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Bapangsari Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo	150.000.000
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Binangun Kec. Butuh Kab. Purworejo	350.000.000
						Rehabilitasi Jalan Poros DESA Brondong - Desa Kambangan Kecamatan Bruno	-
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Kebongunung, Kecamatan Loano	-
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Kedungmulyo - Bendungan Kec. Grabag Kab. Purworejo	-
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Kertosono, Kecamatan Banyuurip	-
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Majir, Kecamatan Kutoarjo , Kab. Purworejo	350.000.000
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Mayungsari Kecamatan Bener, Kab. Purworejo	418.000.000
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Mendiro Kecamatan Ngombol	700.000.000
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Ngasinan Kec Bener, Kab. Purworejo	350.000.000
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Ngemplak Kec. Gebang	-
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Pekacangan Kec Bener, Kab. Purworejo	500.000.000
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Rimun, Kecamatan Loano	-
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Semawung Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	-
						Rehabilitasi Jalan Poros Desa Tlogoguwo Kec. Kaligesing Kab. Purworejo	-
						Rehabilitasi Jalan Sambeng - Pucangagung	-
						Rehabilitasi Jalan Soko - Semagung	-
						Rehabilitasi Jalan Tambakrejo - Sdomulyo	-
						Rehabiltiasi Jalan Poros Desa Brondong-Kambangan-Margolangu	2.520.000.000
						Ruas Jalan Sawit-Krandegan	-
				1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Peleliharaan Berkala Jalan Kuncen - Krajan (Brigjend Wiyono)	2.845.000.000
						Pemeliharaan Berkala Jalan Brigjend Katamso	2.455.000.000
						Pemeliharaan Berkala Jalan Dewi Sartika	-
						Pemeliharaan Berkala Jalan Jenar - Purwodadi	-
						Pemeliharaan Berkala Jalan Kartini	-

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Pemeliharaan Berkala Jalan Mardihusodo	-
						Pemeliharaan Berkala Jalan Setiabudi	-
						Pemeliharaan Berkala Jalan Tentara Pelajar	-
						Pemeliharan Berkala Jalan Veteran	2.775.000.000
						Pemeliharan berkalan jalan Marditomo	1.275.000.000
				1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan	Pengantian Jembatan Krasak (Ruas Jalan Tumbakanyar - Banyuasin)	-
						Penggantian Jembatan Jatingarang (Ruas Jalan Jatingarang - Krandegan)	-
						Penggantian Jembatan (Ruas Jalan Kabupaten Hargorojo - Batas DIY)	-
						Penggantian Jembatan (Ruas Jalan Soko - Semagung)	-
						Penggantian Jembatan 1 (Ruas Jalan Popongan - Banyuuurip)	3.720.000.000
						Penggantian Jembatan 1 (Ruas Jalan Tlogokotes - Batas DIY)	2.690.000.000
						Penggantian Jembatan 2 (Ruas Jalan Popongan - Banyuurip)	-
						Penggantian Jembatan Bencorejo 1 (Ruas Jl. Bencorejo - Angkruketip)	-
						Penggantian Jembatan Bengkal Desa Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	-
						Penggantian Jembatan Doplang (Ruas Jl. Doplang - Sucen)	-
						Penggantian Jembatan Jatirejo (Ruas Jalan Somongari - Jatirejo)	-
						Penggantian Jembatan Kaliharjo 1 (Ruas Jalan Kaliharjo - Somongari)	-
						Penggantian Jembatan Kebangsan (Ruas Jalan Cangkrep - Kemanukan)	-
						Penggantian Jembatan Kedungagung 1 (Ruas Jl. Sruwoh - Kedungsri)	-
						Penggantian Jembatan Loano Kulon - Ruas Jalan Purworejo - Loano	-
						Penggantian Jembatan Mundusari (Ruas Jalan Tamansari - Sruwoh)	4.410.000.000
						Penggantian jembatan Semame (Ruas Jalan Kalimeneng - Purbayan)	-
						Penggantian Jembatan Sembir (Ruas Jalan Kabupaten Somorejo - Tlogokotes)	-
						Penggantian Jembatan Soko (Ruas Jalan Kutoarjo-Karangduwur)	-
						Penggantian Jembatan Somongari (Ruas Jalan Somongari - Jatirejo - Bts. DIY)	-
						Penggantian Jembatan Suren (Ruas Jalan Katerban - Pringgokusuma)	-
						Penggantian Jembatan Tepan (Ruas Jl. Tumbakanyar - Banyuasin)	-
				1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Gintungan - Gebang	-
						Rekonstruksi Jalan Diponegoro	3.890.000.000
						Rekonstruksi Jalan Seren - Winong	-
						Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Grabag - Wunut (54)	-
						Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Klepu - Pituruh	-
						Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Purwodadi - Krendetan	-
				1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Pemeliharaan Berkala Jembatan Bogowonto (Ruas Jalan WR Supratman)	-
						Pemeliharaan Berkala Jembatan Kaliharjo 1 (Ruas Jalan Somongari - Jatirejo)	475.000.000
						Pemeliharaan Berkala Jembatan Kebangsan (Ruas Jalan Cangkrep - Kemanukan)	-
						Pemeliharaan Berkala Jembatan Kodil (Ruas Jalan Tumbakanyar - Banyuasin)	-
						Pemeliharaan Berkala Jembatan Hulosobo	300.000.000
				1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Rekonstruksi/ Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Bubutan - Watukuro	-
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	30.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	25.000.000
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	75.000.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Penetapan RDTR Kemiri-Pituruh	12.000.000
				1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Persetujuan Substansi RDTR Kemiri-Pituruh	100.000.000
				1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi RDTR BOB	15.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	Peta Dasar RDTR Purworejo-Kutoarjo	12.000.000
				1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Penyusunan RDTR Purworejo-Kutoarjo	198.000.000
				1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Penyusunan RTRW Purworejo	100.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Operasionalisasi FPR	94.000.000
				1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Operasional KKPR	91.000.000
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Operasional Pengenaan Sanksi RTR	20.000.000
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rapat dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	3.359.000
						Rapat Forum OPD	2.560.000
						Rapat Penyusunan Managemen Resiko, SPIP dan IEPK	2.368.000
				1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rapat dan Koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	625.000
				1.04.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Rapat dan Koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Walidata	625.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.926.154.000
				1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	625.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rapat dan Koordinasi dalam rangka penyusunan laporan penatausahaan Barang Milik Daerah	375.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rapat koordinasi dan monitoring ke Rusunawa maupun OPD terkait (BPKPAD)	375.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Koordinasi Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	375.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.765.900
				1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Kebersihan	3.378.900

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Minum Harian Pegawai	37.111.200
				1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.769.400
				1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan alat tulis kantor	17.508.300
				1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi dan Jamuan Kunjungan Tamu	2.496.000
				1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.242.000
				1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rapat Koordinasi dan penataan Arsip	1.472.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Jasa Telepon	10.801.000
						Penyediaan Listrik	37.583.600
						Penyediaan sumber daya air	14.187.600
				1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	80.964.000
						Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	38.784.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Operasional	113.800.000
				1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Ringan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.370.400
				1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	23.220.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Penyusunan Dokumen Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	256.000
						Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	250.200
						Rapat Koordinasi dan tinjauan lapangan	820.000
						Rapat pembentukan tim dan rencana kerja	29.100
				1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Pelaporan Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	495.500
						Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1.265.000
						Rapat Koordinasi Persiapan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	894.700
				1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Koordinasi Persiapan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	438.700
						Pelaporan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	302.000
						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.577.000
				1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.089.000
						Koordinasi Persiapan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	441.400
						Pelaporan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	29.000
				1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi Persiapan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.122.200
						Pelaporan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	244.000
						Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	3.340.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Monitoring dan Koordinasi pengelolaan Rusunawa (Mendukung PUG)	500.000
						Pelaksanaan kegiatan pengelolaan Rusunawa: Penyediaan Listrik dan Air (Mendukung PUG)	47.110.000
						Pelaksanaan Kegiatan: Penyediaan Gaji, BPJS, JKK, JKM Pegawai Rusunawa (Mendukung PUG)	159.918.000
						Pembinaan dan Sosialisasi kepada penghuni Rusunawa (Mendukung PUG)	6.400.000
						Pemeliharaan Rutin Gedung Rusunawa (Mendukung PUG)	35.671.600
						Penyusunan laporan kegiatan kelembagaan Rusunawa (Mendukung PUG)	3.253.500
						Persiapan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Mendukung PUG)	3.612.300
				1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penyusunan laporan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	441.500
						Rapat dan Koordinasi pengelolaan Rusunawa	1.140.000
						Rapat Internal Persiapan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	446.400
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Pelaksanaan kegiatan (Inovasi : SIPERUMBAKPUR)	2.836.000
						Pelaporan kegiatan (Inovasi : SIPERUMBAKPUR)	179.500
						Persiapan pelaksanaan kegiatan (Inovasi: SIPERUMBAKPUR)	826.100
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan Hasil Pembinaan Pokmas di Permukiman Kumuh	2.409.000
						Pelaksanaan Pembinaan Pokmas	8.890.000
						Rapat Koordinasi persiapan kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3.701.000
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Pelaporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	5.810.500
						Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	46.309.500
						Rapat Persiapan pengelolaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2.880.000
				1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Laporan Hasil Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	5.376.500
						Pelaksanaan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	65.758.760
						Rapat Koordinasi persiapan kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	3.864.740
				1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	4.738.000
						Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	98.650.000
						Pelaksanaan Persiapan Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	4.612.000
						Fasilitasi Inovasi PAKUeMAS	635.957.254
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Koordinasi Persiapan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Mendukung PUG)	3.849.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Monitoring, Evaluasi dan Laporan Kegiatan (Mendukung PUG)	2.363.000
						Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Mendukung PUG)	405.402.000
						Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Mendukung PUG)	19.968.000
				1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Monev/ Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	89.285.000
						Penyusunan laporan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	7.267.000
						Penyusunan Perumusan bahan pengawasan dan pengendalian	1.573.000
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Pelaksanaan verifikasi/ pengukuran lapangan terhadap PSU perumahan yang akan diserahkan ke Pemda bersama Tim Verifikasi	3.700.000
						Penyusunan Laporan hasil Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	547.500
						Rapat persiapan dan koordinasi kegiatan dengan Tim Verifikasi Kabupaten Purworejo	5.752.500
				1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.724.000
						Jasa Konsultan Pengawas Perbaikan Jalan Perumahan Griya Butuh Permai	7.920.000
						Jasa Konsultan Perencana Perbaikan Jalan Perumahan Griya Butuh Permai	11.880.000
						Koordinasi Persiapan kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	1.404.400
						Koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan PSU di Perumahan	8.345.000
						Penyusunan laporan kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	252.000
						Perbaikan Jalan Perumahan Griya Butuh Permai	290.163.000
						Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perbaikan jalan/ Drainase lingkungan perumahan	6.368.000
						Updating database perumahan	41.603.760
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.293.920
						Pelaporan Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000
						Persiapan Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	16.003.000
						Pelaporan Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	125.000
						Persiapan Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	125.000
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Penerbitan Izin Membuka Tanah	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	168.081.920
						Pelaporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	2.050.000
						Persiapan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	250.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.361.100
						Penyusunan MR, SPIP, IEPK	1.280.000
				1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.947.400
				1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	960.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.338.339.000
				1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.560.600
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.566.300
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	(blank)	
				1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.859.800
				1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(blank)	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.114.800
				1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.610.800
				1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.165.400
				1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.575.200
				1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	6.518.300
				1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.880.000
				1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.123.400
				1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.287.800
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000
				1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.725.200
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000
				1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.410.000
				1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.210.000
				1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.959.000
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	46.164.331
						Sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	88.320.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.624.500
				1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Fasilitasi Inovasi Pelatihan Satlinmas Mandiri Terampil (SIPELITA)	2.362.600
						HUT Satpol Damkar Linmas Tk Kabupaten	9.360.000
						HUT Satpol PP Tk. Provinsi	14.800.000
						Jambore Tk. Provinsi	23.066.000
				1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Dukungan Pelaksanaan Pilkades (POLRI)	408.000.000
						Dukungan Pelaksanaan Pilkades (Satpol PP)	98.400.000
						Dukungan Pelaksanaan Pilkades (TNI)	408.000.000
						Dukungan Pilkades	76.597.000
						Koordinasi Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.306.000
						Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	122.849.500
				1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	2.330.300
				1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	521.906.600
				1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	6.650.000
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10.500.000
				1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Kepala Daerah	11.238.000
				1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	104.077.700
				1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Pemberantasan BKC Ilegal	310.116.500
						Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	80.000.000
				1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000
						Pengumpulan Informasi BKC Ilegal	195.582.300
						Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan Pemberantasan BKC ilegal	31.726.000
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	(blank)	
				1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	10.000.000
				1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	6.339.700
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	93.216.600

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	199.995.000
				1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	17.500.000
				1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	190.365.600
				1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	(blank)	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	2.075.100
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	75.082.231
				1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	6.748.000
				1.05.04.2.04.0004	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	(blank)	
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	30.000.100
				1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	18.875.300
						Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan	250.000
				1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	162.020.000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Mendukung SPIP, IEPK dan MR	25.914.200
				1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.374.300
				1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	13.199.800
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.590.649.610
				1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan	16.014.200
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.888.500
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	973.400
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.360.000
				1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.795.200
						peralatan rumah tangga lainnya (Home use)	1.068.800
				1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.918.400

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakjan dan penggandaan	7.882.000
				1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Alat Tulis Kantor	2.377.500
						Benda Pos	500.000
				1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.896.000
				1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.399.000
				1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.199.500
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	(blank)	
				1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(blank)	
				1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.955.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.674.800
				1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.004.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000
				1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	203.580.000
				1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.880.000
				1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung	47.575.000
				1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.372.000
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	100.000.000
				1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen KRB	249.429.800
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Penyediaan Peralatan keselamatan petugas	38.990.500
				1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	110.073.000
				1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelaksanaan Pelatihan Keluarga Tangguh Bencana	13.155.300
				1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	(blank)	
				1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	(blank)	
				1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	29.898.000
						Pembangunan Gedung Logistik BPBD	2.913.618.400
						Penyelenggaraan Pusdalops	180.814.035
				1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	(blank)	
				1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur	73.134.000
						Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat	95.272.900
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	5.947.200
				1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	231.669.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12.040.000
				1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	125.009.990
				1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	28.600.000
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	10.000.000
				1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	52.160.000
				1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	269.260.000
				1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Bencana	70.774.600
				1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Penyusunan JITUPASNA dan R3P	11.160.000
				1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	(blank)	
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan ASB Perubahan Tahun 2027	320.000
						Penyusunan ASB Tahun 2028	720.000
						Penyusunan Berita Acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2027	5.921.000
						Penyusunan DPA Perubahan Tahun 2027	1.720.000
						Penyusunan DPA Tahun 2028	1.958.000
						Penyusunan GAP GBS Perubahan Tahun 2027	720.000
						Penyusunan GAP GBS Tahun 2028	320.000
						Penyusunan KAK Tahun 2028	240.000
						Penyusunan PK Perubahan Tahun 2027	65.600
						Penyusunan RKA Tahun 2028	720.000
						Penyusunan RKT Dinsosdaldukkb Tahun 2028	385.600
						Penyusunan RUP Perubahan Tahun 2027	400.000
						Penyusunan RUP Tahun 2028	240.000
						Penyusunan KAK Perubahan Tahun 2027	240.000
						Penyusunan MR Dinsosdaldukkb	4.322.000
						Penyusunan PK Tahun 2027	385.600
						Penyusunan Renja Dinsosdaldukkb Tahun 2028	1.964.800
						Penyusunan Renja Perubahan Dinsosdaldukkb Tahun 2027	1.571.200
						Penyusunan RKA Perubahan Tahun 2027	328.000
						Penyusunan RKO Perubahan Tahun 2027	240.000
						Penyusunan RKO Tahun 2028	648.000
						Penyusunan RKT Perubahan Tahun 2027	305.600
				1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen SKM Dinsosdaldukkb Tahun N	1.288.000
						Penyusunan Laporan Fisik, keuangan, dan Program Bulanan Dinsosdaldukkb Tahun N	3.039.200
						Penyusunan Laporan SPIP Tahun N	3.036.000
						Penyusunan Laporan SPM Dinsosdaldukkb Tahun N	968.000
						Penyusunan Laporan Triwulanan Dinsosdaldukkb Tahun N	1.280.000
						Penyusunan LKJIP Dinsosdaldukkb Tahun N-1	1.288.000
						Penyusunan LKPJ Dinsosdaldukkb Tahun N-1	320.000
						Penyusunan LPPD Dinsosdaldukkb Tahun N-1	648.000
				1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Pengelolaan Walidata pendukung statistik sektoral daerah	1.440.000
						Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dan Pengelolaan PPID Perangkat Daerah	5.280.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Fasilitasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinsosdaldukkb	3.934.633.000
				1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2026	2.592.400
						Penyusunan Laporan Keuangan Fungsional Bulanan	1.707.000
						Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2027	1.579.400
						Penyusunan Laporan Realsiasi Anggaran Bulanan	4.916.400
						Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Gaji	836.400
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Pemanfaatan ASET BMD Dinsosdaldukkb	196.800
						Penyusunan Laporan Penatausahaan BMD	400.000
						Penyusunan RKBMD	400.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan dokumen kepegawaian	3.142.400
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Fasilitasi Penyedian komponen instalasi listrik dan penerangan	5.472.000
				1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Fasilitasi Penyediaan peralatan rumah tangga	12.370.600
				1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Fasilitasi bahan logistik kantor	44.415.000
				1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Fasilitasi Barang Cetakan dan Penggandaan	11.633.500
				1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Fasilitasi Penyediaan Bahan Material	5.631.800
				1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi kunjungan tamu	1.920.000
				1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi Dinsosdaldukkb	51.054.000
						Fasilitasi Inovasi Arsa Sogana	4.960.000
						Sosialisasi dan Internalisasi IEPK bagi ASN Dinsosdaldukkb	3.200.000
				1.06.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Fasilitasi Penatausahaan Arsip Dinamis	3.480.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	(blank)	
				1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.912.000
				1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
				1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor	15.165.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi	82.647.000
						Penyediaan Jasa Listrik	119.940.000
						Penyediaan Sumber Daya Air	22.400.000
				1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor (Outsourcing Keamanan)	27.360.000
						Penyediaan Tenaga Pendukung Pelayanan Umum Kantor (P3K Paruh Waktu)	153.160.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan dan pembayaran jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan dinas	43.960.000
				1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan dan pembayaran jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	92.250.000
				1.06.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Penyediaan dan pembayaran jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	37.110.000
				1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Penyediaan dan pembayaran jasa pemeliharaan mebel	4.121.000
				1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.940.000
				1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.777.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.170.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pelaksanaan Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1.930.000
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Koordinasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	3.250.000
				1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	3.860.000
						Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Kabupaten / Kota	5.719.000
				1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Pembinaan dan Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam Mendukung Pengentasan Masalah Sosial	3.250.000
				1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan	3.250.000
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kbaupaten/Kota untuk dipulangkan ke Daerah/ Kelurahan Asal	1.498.700
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Penyediaan permakanan bagi PPKS Kewenangan Kabupaten/Kota sesuai Standar gizi minimal kewenangan kabupaten	74.500.000
				1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Penyediaan sandang bagi PPKS kewenangan kabupaten/kota	6.970.000
				1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Fasilitasi penyediaan alat bantu disabilitas	13.748.000
				1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Fasilitasi Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi Disabilitas	39.220.000
				1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pelaksanaan Bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan, pengemis dan masyarakat	8.249.800
				1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Fasilitasi Pelaksanaan program sekolah rakyat	4.500.000
				1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Pengelolaan dan penyediaan layanan data dan pengaduan bagi masyarakat kabupaten/kota	2.109.900
				1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Penyediaan dan pengelolaan layanan kedaruratan bagi masyarakat kabupaten/kota	1.250.000
				1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan	Pengelolaan dan Koordinasi layanan rujukan sosial	61.477.600
				1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi pendataan dan penyusunan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan	750.000
				1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Penyediaan dan distribusi perbekalan kesehatan di luar panti	1.488.600

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Fasilitasi Koordinasi dan penguatan kemitraan antar lembaga dalam rehabilitasi sosial kewenangan kabupaten/kota	1.748.200
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Pengelolaan UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi dalam Penjangkauan anak-anak terlantar kewenangan kabupaten/kota	395.000.000
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Koordinasi pemutakhiran data sosial dan ekonomi	22.000.000
				1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pembinaan, Pendampingan dan Fasilitasi Bantuan Sosial Pengembangan Ekonomi Masyarakat	46.750.000
				1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Buruh Tembakau	582.200.000
						Fasilitasi penyaluran bantuan sosial untuk LKSA, Panti, PAYMD, PAY, dan Yayasan Sosial	536.267.900
				1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan jaminan kesehatan dan bantuan sosial	57.684.400
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Fasilitasi bantuan penyediaan makanan bagi korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	82.255.000
				1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Fasilitasi bantuan penyediaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	14.995.500
				1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Fasilitasi penanganan khusus bagi kelompok rentan korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota	12.499.700
				1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Fasilitasi pelaynaan dukungan psikososial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota	5.000.000
				1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Fasilitasi penyediaan tempat penampungan pengungsi korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota	2.448.000
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Fasilitasi lumbung sosial penanganan bencana	7.500.000
				1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Peningkatan kompetensi taruna siaga bencana	11.498.700
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana TMP sesuai standara Kemensos	44.998.200
				1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan pemeliharaan rutin Taman Makam Pahlawan Nasional	20.000.000
				1.06.07.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengelolaan layanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional	2.425.800
				1.06.07.2.01.0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan ziarah dan studi di TMP Nasional	9.499.600
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.0040	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas	Fasilitasi Koordinasi dan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas	2.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				2.14.02.2.01.0053	Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan PJPK	7.620.000
				2.14.02.2.01.0055	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Advokasi dan Pembinaan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mas PK)	3.140.000
						Advokasi dan Promosi Edukasi Kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SD/Sederajat dan SMP)	13.720.000
						Advokasi dan Promosi Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK)	3.140.000
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Fasilitasi Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga SIGA	3.500.000
				2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Fasilitasi Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	30.185.000
				2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Koordinasi Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	423.600.000
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Audit Kasus Stunting	1.759.000
				2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Penyuluhan Program dan Pembinaan Tenaga Lini Lapangan	240.170.000
				2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Pelaksanaan Promosi dan KIE melalui media massa cetak, elektronik, media luar ruangan	47.135.400
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Fasilitasi Pelayanan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) / PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana)	372.750.000
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Fasilitasi Pelayanan KB MKJP	1.229.713.000
				2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Fasilitasi Peningkatan dan Pelayanan KB Pria	1.500.000
				2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Distribusi Alat Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan	70.500.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Pembinaan dan pengembangan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.000.000
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas dan organisasi kemasyarakatan	6.584.000
						Pemilihan dan fasilitasi Duta Genre	28.342.600
						Pencatatan dan pelaporan hasil pemantauan pendampingan sasaran beresiko stunting	8.323.400
						Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemsyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	5.000.000
				2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pendampingan keluarga berisiko stunting	3.914.550.000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pencermatan dalam rangka penyusunan dokumen MR, IEPK, GAB/GBS,SAKIP	250.000
						Forum OPD dan Forum Konsultasi Publik,	15.260.000
						Pencermatan dalam rangka penyusunan dokumen ASB, KUA PPAS, KAK, RKO, RUP	1.811.000
						Pencermatan dalam rangka penyusunan dokumen DPA dan DPA Perubahan	1.333.500
						Pencermatan dalam rangka penyusunan dokumen Renja, Renja Perubahan, RKT	2.023.500
						Pencermatan dalam rangka penyusunan dokumen RKA dan RKA Perubahan	4.322.000
				2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Alat Tulis Kantor	-
						Pencermatan dalam rangka penyusunan dokumen LKjIP, LKPJ,LPPD,SPIP,SKM	2.370.100
						Pencermatan penyusunan dokumen laporan bulanan dan triwulan	297.500
				2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyusunan Dokumen Data Dasar Pembangunan	1.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.486.590.000
				2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Akhir Tahun	5.257.900
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.08.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	343.500
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.741.100
				2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.256.500
				2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Penambah Daya Tahan Tubuh	35.488.900

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Cetak dan Penggandaan	2.606.000
				2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material Kantor	1.248.700
				2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.420.000
				2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85.844.000
				2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penyediaan Peralatan Penataan Arsip DInamis pada SKPD	2.800.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	(blank)	
				2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(blank)	
				2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	53.921.600
				2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa PPPK Paruh Waktu Operator Layanan Operasional	63.972.000
						Penyediaan Jasa PPPK Paruh Waktu Penata Layanan Operasional	70.452.000
						Penyediaan Jasa PPPK Paruh Waktu Pengelola Umum Operasional	12.852.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	43.960.000
				2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan bermotor perorangan	124.390.000
				2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.260.000
				2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	118.749.000
				2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12.200.000
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Monev GAP GBS OPD	3.200.000
						Pelatihan PPRG	7.680.000
						Rakor Kecamatan Berdaya	3.200.000
						Rakor Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	6.400.000
						Rakor Tim Pengarusutamaan Gender (PUG)	27.049.300
						Rapat Penerimaan Penganugerahan Ekapraya (PPE)	6.400.000
						Rapat Tim Pengelola Data SIGA	1.280.000
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Pembekalan Perempuan di Bidang Politik, Hukum dan Ekonomi	40.000.000
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Diklat Perempuan Penggerak SERAT KARTINI	18.425.600
						Rakor SERAT KARTINI	6.400.000
						Rapat Kerja GOW	18.710.500
						rapat pengurus DWP	113.692.600
						Seminar bagi Pengurus dan Anggota GOW	51.274.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	Pelatihan Pembekalan Pengasuhan Keluarga Rentan	11.000.000
						Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	28.036.100
						Workshop TPPO	13.649.200
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Penanganan Sosial Bagi Perempuan Korban Kekerasan	4.850.000
						Penjangkauan dan Pendampingan bagi Korban Kekerasan Perempuan	22.183.000
				2.08.03.2.02.0011	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Biaya pelayanan Kesehatan bagi perempuan korban kekerasan	8.000.000
				2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Pendampingan tenaga ahli penanganan kasus bagi perempuan	2.220.000
						tenaga ahli hukum	20.000.000
						tenaga ahli psikolog	12.000.000
				2.08.03.2.02.0013	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Gelar Kasus	17.200.000
						Gelar kasus bagi perempuan korban kekerasan	3.000.000
				2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Konsultasi kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan	27.560.000
						Monitoring kasus Perempuan Korban Kekerasan	1.875.000
						Fasilitasi Gelar Kasus	51.000.000
						fasilitasi pendampingan kasus	51.867.700
				2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Rumah Perlindungan	37.936.000
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Pelatihan Manajemen Kasus	20.050.000
						Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan kasus KtP,KtA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak	4.420.000
						Pelatihan Penerapan Kode Etik Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual	14.715.000
						Pelatihan Psychological First Aid	14.587.500
						Pelatihan Trauma Healing, Manajemen Stres dan Konselor	15.587.500
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Keluarga	17.101.100
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jambore / Festival Hari Anak	56.396.000
						Penyuluhan Forkare di Sekolah	9.600.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Rapat FORKARE	14.261.200
				2.08.06.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Evaluasi DRPPA	33.927.000
						Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)	3.200.000
						Rapat Tim Pelaksana KPLA	3.200.000
						Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak	5.273.000
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak di Sekolah	9.065.300
						Pelatihan Trust and Safety Trainning internet aman	10.934.700
				2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak	39.400.000
						Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) jejaring PPA	3.280.000
						Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	4.560.000
						Sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	23.830.000
						Sosialisasi SOP Integrasi Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	13.400.000
						Sosiaslisasi Pencegahan KTP, KTA, TPPO, ABH dan Perkawinan Anak	17.530.000
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Penanganan sosial	4.650.000
						Penjangkauan dan pendampingan	7.000
						Penjangkauan dan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan	29.200.000
				2.08.07.2.02.0018	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Biaya pelayanan Kesehatan bagi anak korban kekerasan	8.000.000
				2.08.07.2.02.0020	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Gelar Kasus	29.174.000
				2.08.07.2.02.0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jasa Tenaga Ahli	12.000.000
						Jasa tenaga ahli pendampingan korban pada anak	24.000.000
						Pendampingan tenaga Ahli kasus kekerasan bagi anak	2.220.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	17.750.000
						Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	9.298.000
						Persiapan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.921.500
				2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	5.941.371.900
						Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	110.747.900
				2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	144.657.700
						Koordinasi dan Konsultasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.563.000
						Persiapan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.073.600

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	60.612.900
				2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	356.408.500
						Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	6.933.000
						Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	4.078.900
				2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	3.353.000
						Konsultasi Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	375.000
						Persiapan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	874.900
				2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	46.344.500
						Konsultasi Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	12.893.000
						Persiapan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	762.500
				2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	49.929.000
						Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	8.252.000
						Persiapan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1.626.800
				2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-
						Persiapan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	-
				2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	29.113.900
						Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	23.620.000
						Pelaksanaan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	159.840.000
						Persiapan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4.764.600
				2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3.737.000
						Persiapan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1.263.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Konsultasi & koordinasi Posyandu	40.075.000
						Koordinasi Pelaksanaan KPMD	4.160.000
						Koordinasi pelaksanaan pemberian Insentif RTRW	12.800.000
						Koordinasi pelaksanaan Posyandu	23.680.000
						Monitoring KPMD	625.000
						Monitoring Posyandu	10.000.000
						Monitoring RTRW	7.500.000
						Pelaksanaan kegiatan KPMD	3.504.000
						Pelaksanaan kegiatan Posyandu	40.020.500
						Pelaksanaan kegiatan RTRW	7.963.500
						Pembinaan RTRW	152.000.000
						Persiapan pelaksanaan KPMD	795.900
						Persiapan pelaksanaan pemberian insentif RTRW	3.675.700
						Persiapan pelaksanaan Posyandu	2.339.800
						Sosialisasi Kader Posyandu	156.912.000
				2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Desk tindak lanjut inovasi pasar desa	5.200.000
						Monitoring & pembinaan pasar desa	1.875.000
						Persiapan pelaksanaan fasilitasi pasar desa	955.400
				2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1.400.100

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Hadiah lomba TTG Tingkat Kabupaten	12.515.000
						Konsultasi & koordinasi TTG	2.386.000
						Koordinasi & lomba TTG	5.000.000
						Lomba TTG tingkat Kabupaten	2.085.800
						Monitoring/pembinaan persiapan lomba TTG	1.250.000
						Pameran Gelar TTG	1.212.000
						Sosialisasi lomba & pembinaan TTG	4.900.000
				2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kegiatan TMMD	51.200.000
						Material Bantuan Keuangan	-
						Material TMMD Sky.I (Kab)	345.051.800
						Material TMMD Sky.II (Kab)	345.051.800
						Material TMMD Sky.III (Kab)	345.051.800
						Material TMMD Sky.IV (Kab)	345.051.800
						Pelaksanaan Program TMMD	8.718.500
						Pelaksanaan Upacara TMMD	203.538.400
						Penyuluhan TMMD	33.600.000
						Penyusunan Laporan TMMD	1.160.000
						Persiapan Pelaksanaan TMMD	40.339.000
						Rakor Persiapan Upacara	12.800.000
						Rakor Program TMMD	8.186.000
						Sosialisasi TMMD	23.200.000
						Survei Lokasi, Koordinasi, Monitoring	24.000.000
				2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Belanja pakaian batik tradisional	40.400.000
						Bimtek AKU HATINYA PKK mendukung penurunan stunting dan untuk ketahanan keluarga	6.400.000
						Bimtek diversifikasi pengolahan hasil pertanian,peternakan dan perikanan dengan konsep B2SA	3.200.000
						Cuci tangan pakai sabun (CTPS)	4.800.000
						honorarium narasumber atau pembahas,moderator,pembawa acara, dan panitia	124.000.000
						Jambore kader POSYANDU tingkat kab.pwr	19.200.000
						Juri lomba pokja 1 s/d pokja 4	8.344.000
						Kegiatan lomba pokja 1, pokja2, pokja 3, pokja 4	16.688.000
						Kursus singkat/pelatihan lomba menu dan merangkai	10.440.000
						Lomba cerdas cermat KISAH,KRISAN,PKBN	6.400.000
						Lomba fashion berkelanjutan dengan konsep zero waste	6.400.000
						Lomba menu B2SA	3.200.000
						Lomba pojok baca	6.400.000
						Lomba vlog rabu pon	1.280.000
						Pelatihan MC moderator dan dirigent	6.400.000
						Pelatihan PARALEGAL	11.040.000
						Pelatihan usaha ekonomi produktif dan ekonomi kreatif	6.400.000
						pembinaan dan evaluasi administrasi PKK	20.000.000
						Peningkatan kapasitas TP.PKK desa/kelurahan	23.680.000
						Peningkatan mutu kader	19.200.000
						peningkatan SDM TP.PKK	155.520.000
						Persiapan pelaksanaan fasilitasi TP PKK	52.633.000
						Piala/trophy	8.995.000
						Rakon PKK	16.640.000
						Rakor dengan ketua pembina/pembina	6.400.000
						Rakor PKK Kab. dengan kecamatan	57.600.000
						Rapat inti TP. PKK Kab.	12.800.000
						rapat kerja PKK tingkat provinsi	145.300.000
						Rapat koordinasi pokja 1 s/d pokja 4	2.880.000
						Rapat koordinasi pokja 4	6.400.000
						Rapat pleno TP. PKK Kab.	15.360.000
						Sosialisasi GEMASANLOKA	6.400.000
						Sosialisasi KISAH	6.400.000
						Sosialisasi P4GN	6.400.000
						Sosialisasi rumah sehat dan layak huni	6.400.000
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.647.600
				2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.242.900
				2.09.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	28.860.200
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.432.044.000
				2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.822.500

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(blank)	
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Retribusi Daerah	513.200
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	460.000
				2.09.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	(blank)	
				2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(blank)	
				2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	(blank)	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.021.000
				2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.900
				2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	106.726.200
						Penyediaan Pakan Rusa	32.221.200
				2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.415.500
				2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	5.937.800
				2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.792.000
				2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.409.000
				2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.600.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	(blank)	
				2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Telepon	7.500.000
						Belanja Tagihan Air	18.144.000
						Belanja Tagihan Listrik	64.968.960
				2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Beban Jasa Tenaga Supir	13.200.000
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	1.008.000
						Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	576.000
						Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	7.920.000
						Belanja Jasa Tenaga Keamanan	132.714.000
						Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	312.048.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000
				2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	151.550.000
				2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000
						Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.280.000
				2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.849.000
				2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.540.000
				2.09.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	1.503.600

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	24.957.200
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Gerakan Pangan Murah (GPM)	43.536.000
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	6.464.000
				2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan	Pemantauan Stok Pangan	14.646.000
				2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Neraca Bahan Makanan	10.000.000
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	498.493.400
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Penyusunan PPH	7.214.200
				2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Inovasi : Singkong Bermartabat)	61.780.000
						Sosialisasi B2SA	11.720.000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10.000.000
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Monitoring Kegiatan	18.010.000
						Pelatihan di Desa Rentan Rawan Pangan	81.041.200
						Sosialisasi Gerakan Selamatkan Pangan	16.121.600
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Keamanan Pangan	5.316.000
						Pembinaan dan Monitoring ke Pelaku Usaha Pangan Segar	12.500.000
						Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan	4.184.000
				2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Uji Cepat Keamanan Pangan	28.909.000
						Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Peredaran (Post Market)	8.091.000
				2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Pelatihan Pengawas Keamanan Pangan Segar	12.970.000
						Sosialisasi Keamanan Pangan	7.030.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Fasilitasi Penyediaan Sarana Pertanian	68.024.600
						Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kelompok Tani Penerima Hibah	10.000.000
						Pelatihan, Pembinaan, dan Evaluasi UPJA	15.000.000
						Sarana Usaha Tani Tembakau	597.440.600
						Sertifikasi Padi Organik	40.000.000
				3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	AP Hibah Tanaman	4.590.000
						Bibit Hortikultura A	225.240.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Bibit Jeruk Purut	26.440.000
						Bibit Kopi	125.040.000
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	AP Hibah Ternak	4.998.000
						Belanja Hibah Kambing Kaligesing	442.549.100
						Monitoring Pasca Droping Ternak	500.000
						Pelayanan Inseminasi Buatan (IB)	397.468.000
						Proses Seleksi Ternak	2.250.000
						Proses Survey Harga	500.000
						Sarana Pendukung Seleksi Ternak	178.000
				3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	SDG Tanaman	226.169.600
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	AP Hibah Ternak	45.482.000
						Belanja Hibah Kambing Jawarandu	560.228.200
						Belanja Hibah Ternak Domba	346.781.700
						Belanja Hibah Ternak Sapi	1.208.775.000
						Survey Harga Ternak	2.112.000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Penyusunan Masterplan Kawasan Pembangunan Pertanian	-
				3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Update Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Purworejo	330.109.500
			Pembangunan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	AP Hibah Pembangunan Jalan Usaha Tani	109.500.000
						Pembangunan Jalan Usaha Tani	2.550.000.000
				3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	(blank)	
				3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	AP Hibah Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	9.000.000
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	200.000.000
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.27.03.2.03.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Penanggulangan Penyakit Ternak di Wilayah Sumber Bibit	30.000.000
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Belanja alkes tindakan bedah	1.743.000
						Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	18.257.000
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Pengeluaran SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan)	12.000.000
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Koordinasi dan Surveilans Penyakit Hewan Menular	20.000.000
				3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Koordinasi Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Inovasi: Subali Sapira)	273.593.600
						Operasional Puskeswan	11.249.400

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Operasional Rumah Potong Hewan	21.640.700
						Pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha)	12.565.000
						Pembinaan dan Pendampingan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2.500.000
						Pembinaan dan Pengawasan Higiene Sanitasi dan Kualitas Produk untuk Pedagang Bahan Pangan Asal Hewan	29.854.300
						Pengawasan Pemotongan Hewan Kurban	16.440.000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	AP Hibah Rumah Burung Hantu	3.628.400
						Hibah Rumah Burung Hantu	5.000.000
						PENGENDALIAN OPT	159.526.600
						SEKOLAH LAPANG PENGENDALIAN HAMA TERPADU	49.765.400
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Fasilitasi Komisi penyuluhan	10.000.000
						Penyusunan Programa Penyuluhan	30.000.000
				3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Festival Tembakau (DBHCHT)	160.644.000
						Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani (DBHCHT)	289.160.750
						Pembinaan Kelompok Ekonomi Petani	15.000.000
						Pembinaan KTNA	15.000.000
						Penilaian Kelas Kelompok Tani	10.000.000
						Sekolah Lapang	82.000.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (mendukung MR, SPIP, dan IEPK)	17.474.000
				2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (mendukung MR, SPIP, dan IEPK)	2.966.400
				2.11.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	4.300.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.641.894.500
						Belanja Insentid Bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	73.114.327
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	10.862.460
						Belanja Iuran Jaminan Kematian	28.504.411
						Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	46.002.235
						Belanja Iutan Jaminan Kesehatan	276.557.640
						Belanja Pembulatan Gaji	67.200
						Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.623.197.184
						Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondis Kerja	919.741.816
						Belanja Tunjangan Beras	278.376.000
						Belanja Tunjangan Fungsional	113.260.000
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum	197.680.000
						Belanja Tunjangan Jabatan	137.970.000
						Belanja Tunjangan Keluarga	434.000.000
						Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	188.051.227
				2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.006.900
						Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2.260.900
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengelolaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3.000.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Retribusi Daerah	3.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(blank)	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Alat listrik kantor	6.989.500
				2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan alat rumah tangga	4.566.200
				2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Minum Harian Pegawai	87.780.000
				2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	13.000.000
				2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	16.000.000
				2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Jamuan Tamu	11.968.000
				2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.962.000
				2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Administrasi Pengelolaan Arisp Dinamis	2.500.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop	79.334.400
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Pemakaian Air	7.798.000
						Belanja Tagihan Pemakaian Internet	3.840.000
						Belanja Tagihan Pemakaian Listrik	86.188.000
						Belanja Tagihan Pemakaian Telepon	3.105.500
				2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.928.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kendaraan Dinas	43.960.000
				2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	97.520.000
				2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.130.000
				2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor - Tempat Kerja	108.931.000
				2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Alat Pendingin	12.810.000
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	Evaluasi RPPLH	84.999.984
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Penyusunan Dokumen KLHS Reviu RDTR Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo	78.397.784
						Penyusunan Dokumen KLHS Reviu RTRW	86.602.143
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	(blank)	
				2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Penyusunan Laporan PEP Aksi Pembangunan Rendah Karbon	35.259.178
				2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	(blank)	

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Aktivitas Inventarisasi GRK	-
				2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Aktivitas : Inventarisasi Sumber Pencemar dan Penyusunan data kualitas lahan	49.435.900
						Aktivitas : Pemantauan Kualitas Air	32.038.400
						Aktivitas : Pemantauan Kualitas Udara	9.942.900
				2.11.03.2.01.0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	(blank)	
				2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Mitigasi Perubahan Iklim-efisiensi energi (pelatihan ketahanan iklim, rencana aksi hasil PEP)	-
				2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	61.006.077
				2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	(blank)	
				2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Akreditasi Lanjutan	52.733.000
						Peningkatan Kapasitas Personil Laboratorium	46.671.000
						Aktivitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	5.060.000
						Operasional Laboratorium	359.638.880
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DED Tugu Batas Wilayah	-
						Pemeliharaan Crane	350.000.000
						Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	1.714.674.900
						Pemeliharaan Taman Segitiga Kali Jali	150.000.000
						Penanganan Kebersihan Perkotaan	1.962.097.700
						Pengadaan Crane	-
						Rekonstruksi Tugu Taman	-
				2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Pengelolaan Heroes Park	442.262.550
						Penyusunan Perbup Kebun Raya	25.520.000
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Aktivitas Fasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan Limbah B3	16.437.000
				2.11.05.2.01.0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	(blank)	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Aktivitas Pembahasan Perbup Petunjuk Pelaksanaan Perda PPLH	11.858.500
						Aktivitas Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan/Persetujuan Teknis	27.619.000
						Aktivitas Sosialisasi dan Pembinaan Persetujuan Lingkungan	9.624.000
				2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	(blank)	
				2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Aktivitas Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Persetujuan Lingkungannya Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	34.852.500

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pendampingan Kegiatan Program Kampung Iklim (PROKLIM)	16.360.300
						Pendampingan Kegiatan Program Sekolah Adiwiyata	52.670.700
						Pendampingan Kegiatan Saka Kalpataru	40.969.000
				2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan dan kampanye lngkungan	60.191.500
				2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Pelestarian Lingkungan Hidup	29.337.600
						Revegetasi Lahan Kritis	-
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penilaian Program Kampung Iklim (Proklim)	38.295.600
						Penilaian Program Sekolah Adiwiyata	21.704.400
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Aktivitas Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH	9.070.300
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Belanja AP Hibah Untuk Bank Sampah	15.568.000
						Hibah Sarana dan Prasarana bank Sampah	277.557.000
				2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas TPA Tahap 1	-
						Penyediaan Sarana Pengelolaan Persampahan	-
						Transformasi Dari TPA ke TPST	5.140.198.000
				2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Penyusunan Perbup terkait Kompensasi Dampak negatif TPA dan Penyusunan Perbup Pemisahan Operator dan Regulator Pengelolaan Sampah	41.520.000
				2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	(blank)	
				2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Operasional Layanan Persampahan	4.396.271.432
						Penyusunan Reviu Amdal TPA	200.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Koordinas, valdasi dan pelaporan data perikanan tangkap	5.965.000
						koordinasi dan sampling data produksi perikanan tangkap	2.500.000
						Penyusunan Data dan Informasi Perikanan Tangkap	38.074.000
				3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	(blank)	
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Peningkatan Kapasitas Nelayan Kecil	50.000.000
				3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan	10.036.500

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	(blank)	
				3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan TPI	20.000.000
			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	(blank)	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	(blank)	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(blank)	
				3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya	59.500.000
				3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Alat Tulis Kantor Rekomendasi BBM	1.401.800
						AP Hibah Budidaya Ikan	17.032.200
						Cetak Penggandaan Rekpmendasi BBM	495.000
						Hibah Budidaya Ikan Gurami	101.041.800
						Hibah Budidaya Ikan Lele	321.544.800
						Hibah Budidaya Ikan Nila	62.381.200
						Perjalanan Dinas	6.079.000
				3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Pembinaan dan Pemantauan Pembudaya Ikan	7.500.000
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan Usaha Pembudidaya Ikan	11.647.600
				3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dan atau Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	16.000.000
				3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan	39.856.000
				3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Pengawasan Usaha Garam	11.000.000
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	10.750.000
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Pembinaan Penerapan Persyaratan Perijinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	10.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kampanye GEMARIKAN	50.000.000
				3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	(blank)	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Desk Penyusunan DPA, DPPA, RKA, RKAP	1.091.000
						Fasilitasi Penyusunan PK, RKT dan Perubahan PK, RKT	371.400
						Penyusunan Kertas Kerja (rko, kak, asb, rup), SPIP, MR, IEPK,GAP, GBS	5.123.000
						Penyusunan Renja	3.281.700
				2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Desk / Pencermatan SPIP, MR	596.500
						Desk/Pencermatan LKPJ, LKjIP, LPPD, Data Dasar	443.500
						Fasilitasi Forum konsultasi publik (FKP)	7.400.000
						Fasilitasi Pelaksanaan SKM dan FKP	652.500
						Fasilitasi Penyusunan Laporan Bulanan dan Triwulanan	960.000
				2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	2.920.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.808.898.715
				2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Desk Penyusunan Laporan Akhir Tahun (CALK, LRA, Neraca)	361.500
						Fasilitasi Penyusunan Laporan keuangan bulanan, semesteran (Fungsional dan LRA)	600.000
						Fasilitasi Penyusunan Laporan keuangan SKPD	2.407.800
						Fasilitasi Penyusunan Laporan Rekonsiliasi gaji	512.500
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Monev BMD di Kecamatan	3.991.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.485.300
				2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.483.800
				2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.070.200
				2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.107.300
				2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	13.522.600
				2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.560.000
				2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi antar pimpinan ke D.I. Yogyakarta	16.821.000
						Koordinasi dan konsultasi antar pimpinan ke DKI Jakarta	19.664.000
						Koordinasi dan konsultasi antar pimpinan ke Prov. Jawa Tengah	23.496.000
				2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis	2.862.100
						Rapat koordinasi Pemusnah Arsip	1.280.000
				2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	211.424.250
				2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.162.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000
				2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	146.280.000
				2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	1.680.000
				2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000
				2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.916.000
				2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.250.000
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan Dokumen Kependudukan	38.914.000
						Pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk	52.172.600
						Pengadaan Ribbon KTP el dan KIA	779.704.000
			Penataan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	(blank)	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Jemput Bola Dokumen Pendaftaran penduduk	9.536.000
				2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran penduduk	2.560.000
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	19.924.400
						Perawatan Arsip Vital	7.592.000
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pelayanan Jemput Bola Dokumen Pencatatan Sipil	3.712.000
						Penerbitan Formulir Pencatatan Sipil	15.043.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Pengelolaan Website Disdukcapil	624.000
						Penyusunan Buku Data Semester	13.399.000
				2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	10.972.000
			Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyusunan SOP dan SP Kependudukan	7.040.000
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Inovasi Penyelenggaraan Adminduk	3.200.000
						Fasilitasi Layanan Online	24.362.100
						Keamanan Informasi Adminduk	12.521.000
						Koordinasi dan Konsultasi Pengelolaan Informasi Adminduk	28.544.000
						Peningkatan pelayanan publik dan pemenuhan standar SMKI	108.465.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penyusunan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Draft Profil Kependudukan	3.824.800
						Rapat Persiapan Penyusunan Profil Kependudukan	1.472.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
DINAS PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.318.200
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (mendukung MR)	375.000
				2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.294.700
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (mendukung SPIP)	500.000
				2.15.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.157.400
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.040.074.000
				2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	16.186.200
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.078.600
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	737.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.944.300
				2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.657.400
				2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.176.000
				2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.615.500
				2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	6.511.000
				2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	605.000
				2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Evaluasi Implementasi ZI	10.880.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.111.000
						Sosialisasi Anti Korupsi (mendukung IEPK)	1.920.000
				2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.436.500
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(blank)	
				2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.619.950
				2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.499.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000
				2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	267.300.000
				2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.590.000
				2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	116.400.000
				2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.861.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	(blank)	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21.897.400
						Penyediaan Cermin Tikung di Desa Clapar Kecamatan Bagelen (Ruas Jalan Bagelen-Soko)	15.164.000
						Penyediaan Cermin Tikung di Desa Kliwonan Kecamatan Banyuurip (Ruas Jalan Tegalmiring-Piono)	-
						Penyediaan Cermin Tikung di Kelurahan Purworejo (Ruas Jalan H. Agus Salim)	-
						Penyediaan Lampu Penerangan Jalan Umum	120.448.000
						Penyediaan Marka Jalan	457.000.000
						Penyediaan PJU di Desa Borowetan Kecamatan Banyuurip (Ruas Jalan Kedungsari-Borowetan)	73.500.000
						Penyediaan PJU di Desa Clapar, Kecamatan Bagelen (Ruas Jalan Bagelen-Soko)	98.000.000
						Penyediaan PJU di Desa Grabag Kecamatan Grabag (Ruas Jalan Grabag-Wunut)	-
						Penyediaan PJU di Desa Hargorojo Kecamatan Bagelen (Ruas Jalan Bagelen-Hargorojo)	73.500.000
						Penyediaan PJU di Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing (Ruas Jalan Karangrejo-Ngaran)	-
						Penyediaan PJU di Desa Kalinongko Kecamatan Loano (Ruas Jalan Purworejo-Loano)	73.500.000
						Penyediaan PJU di Desa Karangsari Kecamatan Bener (Ruas Jalan Manisjangan-Nglaris)	73.500.000
						Penyediaan PJU di Desa Karangsari Kecamatan Purwodadi (Ruas Jalan Bubutan-Watukuro)	-
						Penyediaan PJU di Desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing (Ruas Jalan Brenggong-Tlogorejo)	-
						Penyediaan PJU di Desa Kedungkamal Kecamatan Grabag (Ruas Jalan Angkrukketip-Sangubanyu)	147.000.000
						Penyediaan PJU di Desa Kedungsari Kecamatan Butuh (Ruas Jalan Kedungsri-Sidomulyo)	-
						Penyediaan PJU di Desa Kedungsri Kecamatan Butuh (Ruas Jalan Sruwoh-Kedungsri)	73.500.000
						Penyediaan PJU di Desa Malangrejo Kecamatan Banyuurip (Ruas Jalan Banyurip-Bencorejo)	73.500.000
						Penyediaan PJU di Desa Nglaris Kecamatan Bener (Ruas Jalan Manisjangan-Nglaris)	-
						Penyediaan PJU di Desa Prapagkidul Kecamatan Pituruh (Ruas Jalan Pituruh-Kesawen-Megulung)	73.500.000
						Penyediaan PJU di Desa Sambeng Kecataman Bayan (Ruas Jalan Bayan-Sambeng)	147.000.000
						Penyediaan PJU di Desa Somoleter Kecamatan Bruno (Ruas Jalan Blimbing-Somoleter)	147.000.000
						Penyediaan PJU di Desa Sudimoro Kecamatan Purworejo (Ruas Jalan Karangrejo-Ngaran)	-
						Penyediaan PJU di Desa Sumber Kecamatan Pituruh (Ruas Jalan Gebang-Megulung)	73.500.000
						Penyediaan PJU di Desa Winong Kidul Kecamatan Gebang (Ruas Jalan Winong-Pucangagung)	441.000.000
						Penyediaan PJU di Desa Wonoenggal Kecamatan Grabag (Ruas Jalan Ketawang-Dungus)	147.000.000
						Penyediaan PJU di Desa Wonosuko Kecamatan Kemiri (Ruas Jalan Kluwung-Kedungpomahan)	-
						Penyediaan PJU di Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo (Ruas Jalan Purworejo-Loano)	-
						Penyediaan PJU di Ruas Jalan Banyuasin-Cacaban Lor	73.500.000
						Penyediaan PJU di Ruas Jalan Bencorejo-Angkrukketip	73.500.000
						Penyediaan PJU di Ruas Jalan Bubutan-Watukuro	73.500.000
						Penyediaan PJU di Ruas Jalan Diponegoro	-
						Penyediaan PJU di Ruas Jalan Ganggeng-Brenggong	73.500.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Penyediaan PJU di Ruas Jalan Laban-Gesing	73.500.000
						Penyediaan PJU di Ruas Jalan Sawit-Krandegan	73.500.000
						Penyediaan PJU di Ruas Jalan Sruwohrejo-Wonorejokulon	-
						Penyediaan PJU di Ruas Jalan Wonosari-Keburuhan	-
						Penyediaan Rambu dan Cermin Tikung	170.785.000
						Penyediaan ZOSS di Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen (Ruas Jalan Kemanukan-Soko)	-
				2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan Alat Perlengkapan Jalan	38.845.000
						Pemeliharaan APILL	204.503.000
						Pemeliharaan LPJU	6.850.808.200
						Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	83.504.900
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	138.814.619
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	178.698.300
				2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	156.835.000
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3.333.423.500
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (mendukung PUG)	149.850.000
						Monitoring Perparkiran	22.400.000
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	(blank)	
				2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-
				2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	18.928.300
				2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	50.000.000
				2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	(blank)	
				2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	99.241.053
				2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.752.000
				2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	(blank)	
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Operasional dan Pemeliharaan Perlintasan Sebidang	692.853.600
						Pengaturan Lalu Lintas	82.719.000
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	41.493.000
				2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.637.400
				2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	-
				2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	88.228.000
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Sistem Informasi Jaringan dan Zona Lalu Lintas (SIJAZLIN)	1.452.600

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	2.146.200
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Evaluasi Jaringan Trayek	5.886.000
						Pembinaan Pengemudi	5.028.000
						Pemilihan Awak Angkutan	12.535.000
						Pengawasan Angkutan	28.695.000
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2.557.000
				2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.550.300
						Penyediaan Bus Mudik Gratis	135.000.000
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Arek Angkut	1.906.000
						Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	3.060.600
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah	8.460.000
						Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	11.965.000
						Persiapan Penyusunan Dokumen Perencanaan	5.413.000
						Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah, MR, SPIP dan IEPK	3.840.000
				2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persiapan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	520.000
						Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	640.000
				2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Persiapan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	590.000
						Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	512.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.943.365.703
				2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	320.000
						Persiapan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	885.700
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persiapan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	176.000
						Rapat Koordinasi Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	960.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	417.900
						Persiapan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	70.100
						Rapat Koordinasi Pengelolaan Retribusi Daerah	512.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sosialisasi Anti Korupsi	5.440.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Alat listrik kantor	10.575.500
				2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.026.900
				2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Minum Harian Pegawai	52.852.800
				2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.015.000
				2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(blank)	
				2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan alat tulis kantor	8.205.200
						Penyediaan Materai	2.000.000
				2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.056.000
				2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.818.000
				2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.144.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(blank)	
				2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	(blank)	
				2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(blank)	
				2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.000.000
				2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Outsourcing	317.064.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - PPPK Paruh Waktu	107.100.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	76.440.000
				2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kenadaraan Dinas Operasional	31.620.000
				2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	9.415.000
				2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Komputer/Notebook	40.150.000
						Pemeliharaan Printer	13.800.000
				2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	24.600.000
				2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana Kantor	6.100.000
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Advetorial Blow Up Berita	184.240.000
						Pendukung Kegiatan Relasi Media	31.942.000
				2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Bimtek PPID	8.920.000
						Pendukung Kegiatan Penyampaian Informasi	36.890.700
						Penyediaan Spanduk Informasi	-
				2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Hibah LPPL	300.000.000
						Panitia Seleksi DEWAS LPPL	37.124.000
						Penyediaan Spanduk Informasi	46.350.000
						PMKP	65.779.500
						Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal	294.972.833

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				2.16.02.2.01.0029	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	CVP	117.396.800
						Pendukung Kegiatan Monitoring Informasi	6.857.000
				2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Bimtek Komunitas Informasi Publik	9.920.000
						Pendukung Kegiatan Kemitraan Komunitas Informasi Publik	7.890.000
				2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten	Editing dokumenter	6.046.800
						Pendukung Kegiatan Penyusunan Konten	1.049.000
						Podcast	13.904.000
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Koordinasi dan konsultasi pengelolaan nama domain	8.085.000
						Pelaksanaan Layanan Pengelolaan Domain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Pembuatan, Updating dan Penghapusan Nama Domain)	45.120.000
						Pelaporan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain	206.500
						Pelatihan pengelolaan domain desa	7.680.000
						Penyediaan Sarpras Pendukung Operasional Pengelolaan Nama Domain (SSL, Email, IP Publik)	34.880.000
						Persiapan pelaksanaan pengelolaan nama domain dan subdomain	684.500
						Rapat Koordinasi Pengelolaan Sub Domain Perangkat Daerah	3.840.000
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Evaluasi Penyelenggaraan SPBE	3.840.000
						Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan SPBE	13.068.000
						Pelaporan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	224.500
						Penyediaan layanan video conference	19.200.000
						Persiapan pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1.335.600
						Rakor tim pelaksana SPBE	3.520.000
						Sosialisasi Kebijakan SPBE	8.528.000
				2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Evaluasi Smart City (rakor persiapan, desk, interviu)	7.680.000
						Forum Smart City	9.388.000
						Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Smart City	18.249.000
						Pelaporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	164.000
						Penyediaan layanan informasi kota cerdas	51.295.800
						Penyediaan layananan pemantauan kota	54.000.000
						Rapat koordinasi Dewan Smart City	3.840.000
						Rapat koordinasi pengelolaan aplikasi Lekjo	1.536.000
						Rapat koordinasi Tim Pelaksana Smart City	3.840.000
				2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	Koordinasi dan Konsultasi internal serta eksternal pemerintah daerah	26.600.000
						Pemerataan Layanan Akses Internet Bagi Masyarakat	495.360.000
						Penyediaan Layanan Akses Internet Bagi Perangkat Daerah	1.144.320.000
						Penyusunan Bahan Kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan telekomunikasi	175.265.000
						Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Akses Internet	2.023.600
				2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Pelaksanaan Audit TIK	5.120.000
						Pelaporan Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital)	175.000
						Rapat Koordinasi penerapan manajemen SPBE	5.120.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Rapat Koordinasi tatakelola SPBE	2.560.000
				2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi	1.160.000
						Koordinasi dan konsultasi pengembangan aplikasi	7.229.000
						Koordinasi pengembangan aplikasi	1.920.000
						Pelatihan SPL untuk perangkat daerah	3.200.000
						Peningkata kapasitas tenaga Programmer	14.284.000
						Penyediaan layanan pengembangan/pembangunan aplikasi	178.140.000
				2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Koordinasi dan Konsultasi internal serta eksternal pemerintah daerah	280.400
						Operasional Layanan Pusat Data	14.208.000
						Pemeliharaan titik layanan jaringan intra pemerintah daerah	156.256.000
						Penambahan titik layanan jaringan intra pemerintah daerah	284.086.000
						Peningkatan Layanan Pusat Data	63.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Bimtek Statistik Sektoral	14.304.000
						Koordinasi dan Konsultansi Pengumpulan Data, Input Data, Verifikasi Data dan Publikasi Data Statistik Sektoral	15.646.000
						Pelaporan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	50.000
				2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	(blank)	
				2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Forum Satu Data	19.952.000
						Pelaporan Sub Kegiatan Koordinas dan Kolaborasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	48.000
				2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Koordinasi dan Konsultansi Inovasi DataJO	4.977.000
						Pelaporan Sub Kegiatan Pengelolaan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	378.000
						Pendukung Sub Kegiatan Pengelolaan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	2.025.000
						Statistik Sektoral dan Geospasial	6.400.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Bimtek Tim Tanggap Insiden Siber	37.522.000
				2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Sertifikasi ISO	50.000.000
				2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Belanja Firewall Fortinet Fortigate 601F	1.265.000.000
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik	5.377.600
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Mendukung MR, SPIP, IEPK, ZI)	11.568.400
				2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600.000
				2.17.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	580.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PNS	5.919.426.974
						PPPK	4.295.755.082
						RETRIBUSI	612.212.944

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Bulanan/triwulanan/semesteran	1.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.056.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.140.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.008.200
				2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.223.100
				2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.066.000
				2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.996.000
				2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	17.487.600
				2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.237.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (mendukung IEPK, ZI dll)	15.640.000
				2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.400.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	65.353.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Jurnal/ Surat Kabar/ Majalah	1.332.000
						Tagihan Air	14.798.000
						Tagihan Listrik	62.536.200
						Tagihan Telepon	6.600.000
				2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	130.000.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000
				2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	156.933.000
				2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.660.000
				2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan Gedung	60.450.000
				2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Alat Pendingin	6.710.000
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pembubaran Koperasi tidak aktif	12.330.000
						Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	3.597.200

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Penghargaan Koperasi	7.640.000
						Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	27.927.500
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta KApasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100.198.100
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Fasilitasi Kemitraan Koperasi	15.559.500
						Fasilitasi Permodalan Koperasi	11.313.200
						Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	106.940.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	PELATIHAN UMKM	68.181.000
						PEMBENTUKAN CLUSTER UMKM	21.998.600
						PEMBERDAYAAN MELALUI KEMITRAAN USAHA MIKRO	23.845.600
						PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL (PEDAGANG KAKI LIMA)	10.974.800
				2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO	23.750.000
						VERIFIKASI DAN MONITORING PEMBERIAN REKOMENDASI BBM	1.250.000
				2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	FASILITASI INTEGRASI BASIS DATA TUNGGAL UMKM	50.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.0012	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Inkubasi Bisnis	43.375.000
				2.17.08.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM	Konsultasi dan Pendampingan Usaha	461.313.800
						Pelatihan Manajerial	94.475.000
						Pelatihan Vocational	16.820.000
						PLUT Academy	46.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan Pasar Induk Kutoarjo	100.000.000.000
				3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Fasilitasi Operasional Pasar Daerah	3.401.785.100
						Koordinasi Pelaksanaan Inovasi Aplikasi Ijin Menempati Pasar (IMPAS)	4.800.000
						Sertifikasi SNI Pasar Rakyat	62.070.000
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan Penerapan Standar Pengelolaan Pasar Menuju SNI	31.898.100

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi Sinkronisasi Ketersediaan dan Peningkatan Akses Bapokting	26.620.000
						Pembinaan Pelaku Usaha Distribusi Bapokting	20.880.000
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Bapokting	12.780.000
						Pembinaan Petugas Pemantau Harga, Stok dan Pelaku Usaha Bapokting	24.720.000
				3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Operasi Pasar	97.500.000
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Monitoring Penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.350.000
						Pembinaan Pelaku Usaha Distribusi Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	13.900.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Penyelenggaraaan Purworejo Expo 2027	156.466.500
						Penyelenggaraan Pameran UMKM	50.000.000
						Penyelenggaraan Pameran UMKM Festival Layang-Layang	50.226.500
				3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Penyusunan Katalog UMKM Orientasi Ekspor	20.200.000
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP	57.360.000
						Verifikasi Peralatan Standar Tera / Tera Ulang UTTP	8.982.000
				3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pengawasan Metrologi Legal	13.911.700
						Sosialisasi Metrologi Legal	13.772.800
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan Influencer Marketing Lokal	28.720.000
						Promosi Penggunaan Produk melalui Iklan Digital	11.500.000
						Tim P3DN Kabupaten Purworejo	1.280.000
				3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Business Matching	19.000.000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Mendukung IEPK, MR, dan SPIP)	4.916.000
				2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi	500.000
				2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung	500.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN DPMPTSP	2.213.989.000
				2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan	550.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan BMD	160.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan Laporan Administrasi Kepegawaian	160.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan komponen instalasi listrik	2.783.000
				2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	1.613.260
				2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Minum Harian Pegawai	37.371.600
				2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.702.400
				2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Pengadaan ATK	11.440.475
				2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(blank)	
				2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	58.830.000
				2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penyusunan Laporan Arsip Dinamis	180.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Air	8.400.000
						Pembayaran Listrik	183.699.085
						Pembayaran Telepon	3.750.000
				2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Umum (Outsoucing)	416.448.920
						Penataan Ruang Kerja Hijau	6.855.575
						PPPK Paruh Waktu	14.784.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Jabatan	43.960.000
				2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	38.220.000
				2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	15.000.000
				2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor	10.835.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan IPRO	101.575.000
						Penyusunan Peta Potensi Investasi	9.186.100
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Inovasi : Klinik Investasi)	165.585.000
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha (Inovasi : LARIZ BOSS 2.0)	136.519.000
				2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	30.869.400
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	108.072.808
				2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	45.150.000
				2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	(blank)	

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Koordinasi Pemenuhan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	20.837.300
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan (mendukung MR, SPIP dan IEPK)	21.100.000
				2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja (mendukung MR, SPIP dan IEPK)	3.123.100
				2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata	1.000.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	4.734.675.000
				2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan	1.455.412
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan BMD pada SKPD	1.991.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.011.500
				2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.412.600
				2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.447.600
				2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	6.855.000
				2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.252.000
				2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	17.975.700
				2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.668.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.152.200
				2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.874.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.450.000
				2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.874.400
				2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	93.120.000
				2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.758.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.0019	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/Kota	Pemilihan Pemuda Pelopor	38.372.300
						Seleksi Jambore Pemuda	38.254.400
				2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Penguatan Wirausaha Pemula (Inovasi :Jawara Muda)	31.747.000
				2.19.02.2.01.0021	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas kepemimpinan pemuda tingkat kabpuaten/kota	Pengembangan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	15.464.530

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				2.19.02.2.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan	31.460.549
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Latihan Dasar Kepemimpinan	23.431.000
						Penguatan Organisasi Kepemudaan	98.289.820
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.0007	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	POPDA Kab, POPDA Kedu dan POPDA Provinsi	1.697.639.100
				2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	AP Hibah Olahraga	13.219.400
						Fasiltasi penyediaan sarana dan prasarana olah raga kepada kelompok masyarakat	732.377.200
						Operasional dan Pemeliharaan GOR dan Stadion SEW	1.002.752.900
						Pengembangan Fasilitas Olahraga	-
						Rehab GOR Butuh	500.000.000
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga	Pengiriman atlet untuk mengikuti Kejuaraan	130.224.400
				2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota	Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)	330.605.800
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Penghargaan Kejuaraan/Atlet Berprestasi (POPDA Provinsi, PEPARPREDA, FORDA)	99.603.000
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Fasilitasi KORMI	150.000.000
						Fasilitasi NPCI	150.000.000
						Hibah KONI	2.000.000.000
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.0012	Peningkatan Partisipasi dan Pemassalan Olahraga di Masyarakat	OLAHRAGA REKREASI	47.269.200
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Fasilitasi Operasional Kwarcab Purworejo	350.000.000
						Pembinaan dan Pendampingan Organisasi Kepramukaan	11.841.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata	40.399.300
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Operasional dan Pemeliharaan Alun-alun Purworejo dan Kutoarjo	2.135.390.800
						Pemeliharaan Ganesha Convention Hall	-
						Pemeliharaan Hotel	-
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Operasional dan Pemeliharaan Daya Tarik Wisata	2.245.582.400

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	RIPPARDA	200.000.000
			Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha	14.798.600
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Pengumpulan Data Event Pariwisata	8.323.096
						Penyebaran Informasi Pariwisata melalui Photo On The Spot	25.933.000
						Pertemuan pelaku usaha pariwisata	363.000
				3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	FESTIVAL LAYANG-LAYANG	235.499.500
						GUMEBYAR TAUN ANYAR	100.000.000
						PENGIRIMAN MAS MBAK JATENG (mendukung PUG)	64.883.000
						PURWOREJO SPEKTAKULER	100.000.000
				3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pembuatan dan penyebaran materi promosi wisata (Inovasi Dolan Purworejo)	158.883.400
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Pameran Ekonomi Kreatif (Mendukung PUG)	55.084.300
				3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Fasilitasi HKI	10.000.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Pelatihan SDM Ekraf (mendukung PUG)	55.470.000
				3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata (mendukung PUG)	37.200.000
				3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Sertifikasi Kompetensi SDM Pariwisata (mendukung PUG)	22.859.000
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan (Mendukung MR, SPIP, IEPK)	17.963.500
				2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja (Mendukung MR, SPIP, IEPK)	1.469.700
				2.23.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Walidata pendukung Statistik Sektoral	149.700
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.012.234.000
				2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	1.690.900
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.806.800
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.997.600
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	13.052.100
				2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.371.100
				2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.638.400
				2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.196.600

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	4.850.800
				2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.120.000
				2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.676.000
				2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.650.400
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	(blank)	
				2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(blank)	
				2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.916.400
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000
				2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.300.000
				2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	1.440.000
				2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.310.000
				2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.231.000
				2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan sarpras gedung kantor	12.401.000
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	5.938.500
						Sosialisasi dan Pelatihan Instrumen Akreditasi	27.192.000
				2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Purworejo	28.997.000
				2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Perpustakaan Keliling	18.200.000
						Layanan Perpustakaan menetap	498.193.100
				2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan Khusus	480.000
						Pembinaan Perpustakaan Umum	3.629.900
				2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	(blank)	
				2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rakor pengelola perpustakaan	8.838.700
				2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Pengumpulan dan Penyusunan Data Perpustakaan	8.923.400
				2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Pengadaan dan Pengelolaan Bahan Pustaka	225.217.900
				2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan perpustakaan elektronik	1.903.500
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pendampingan Duta Baca dan bunda literasi	20.000.000
				2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Pelatihan keterampilan masyarakat	19.470.400

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Gedung dan sarpras perpustakaan	25.072.000
				2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	DAK NF	276.480.000
						Pemberian Penghargaan Perpustakaan	18.472.700
				2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Safari Perpustakaan	26.069.800
						Sosialisasi Budaya Baca	96.096.000
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Sosialisasi Naskah Kuno	11.884.000
				2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Penelusuran dan pengalihmediaan naskah kuno	34.387.400
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Kearsipan	45.793.500
				2.24.02.2.01.0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/Kota	21.389.400
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Akuisisi Arsip Statis	36.260.900
						Inovasi Mas Jarwo	2.626.000
						Pengelolaan Depot Arsip	36.584.000
						Pengolahan Arsip Statis	16.920.900
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Bimtek JIKN	39.977.200
						Monev JIKN	-
						Rakor JIKN	6.050.200
						Sosialisasi JIKN	-
				2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Bimtek Pengelola Arsip	31.307.200
						Pameran Kearsipan	-
						Pengiriman Arsiparis Teladan Tingkat Nasional	20.024.800
						Penyusunan Peraturan Bupati	-
						Rakor Pengelola Arsip	8.237.000
						Sosialisasi Kearsipan Pemerintah Desa	37.283.200
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan Arsip	11.038.500
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Akibat Perubahan SOTK	15.583.500
			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Autentikasi Arsip Statis	11.334.300
DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	RTK Makro	-

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	13.009.400
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	(blank)	
				2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Pelatihan Instalasi Listrik DBHCHT	99.406.400
						Pelatihan Las	82.214.400
						Pelatihan Las DBHCHT	82.649.400
						Pelatihan Menjahit	80.459.400
						Pelatihan Menjahit DBHCHT	80.883.100
						Pelatihan Operator Mesin Bubut DBHCHT	131.923.333
						Pelatihan Pembuat Roti dan Kue DBHCHT	82.381.800
						Pelatihan Pembuatan Mebel DBHCHT	82.430.400
						Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue	81.887.800
						Pelatihan Perbaikan Alat Listrik Rumah Tangga	68.581.400
						Pelatihan Perbaikan Alat Rumah Tangga DBHCHT	69.016.400
						Pelatihan Sablon DBHCHT	66.459.100
						Pelatihan Servis Sepeda Motor	72.600.400
						Pelatihan Servis Sepeda Motor DBHCHT	73.035.400
						Pelatihan Stir Mobil DBHCHT	95.075.200
						Pelatihan Stir Mobil di Kelurahan Purworejo	-
						Pelatihan TIK	66.035.400
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Bimtek Pembinaan Kepada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	16.293.800
			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Pelatihan Perusahaan kecil untuk meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerjanya	19.712.000
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Koordinasi dan Konsultasi (Layanan AK 1)	50.812.800
				2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	7.000.000
				2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Fasilitasi dan Sosialisasi Terhadap Perusahaan dan Disabilitas	7.030.000
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	24.016.300
			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Orientasi Pra Pemberangkatan CPMI	6.890.000
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Bimtek Penyusunan PP dan Fasilitasi Pengesahan PP	16.499.700
				2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana HI dan Jamsos TK serta Pengupahan (Inovasi : SI-HIJO)	36.600.000
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	35.750.000
				2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi SP/SB,Non Afiliasi	9.200.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit	129.448.200
				2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Belanja Operasional Pendukung	46.480.000
						DBHCHT - Jaminan Sosial	282.240.000
						PAD - Jaminan Sosial	36.960.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan (mendukung MR, SPIP dan IEPK)	528.000
						Penyusunan Renja Perangkat Daerah	12.879.600
				3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.882.300
				3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	2.035.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.040.736.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rapat Koordinasi Penatausahaan Barang Milik Daerag pada SKPD	2.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	(blank)	
				3.31.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rapat Koordinasi Kepegawaian	2.736.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat Listrik	17.460.300
				3.31.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Alat Rumah Tangga	21.418.700
				3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Dinas	37.837.800
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor UPT BLK	27.165.600
				3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.286.600
				3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Langganan Media Cetak	3.624.000
				3.31.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan ATK	52.183.000
				3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.992.000
				3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.427.000
				3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.668.500
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PC ALL IN One	27.448.000
						Pengadaan APAR	1.605.000
						Pengadaan Scanner	56.620.000
				3.31.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Telepon, Air dan Listrik	281.020.000
				3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor	472.074.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	86.980.000
				3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	56.157.000
				3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	240.087.000
				3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	30.500.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk Industri Kreatif di Dalam Negeri	243.203.300
						Penguatan Sentra Industri Bambu	18.397.600
				3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DAU - Fasilitasi Rumah Kemasan	48.546.600
						DAU - Penguatan IKM Kopi	44.264.000
						DAU - Peningkatan kapasitas IKM Unggulan (Industri Gula Kelapa)	36.856.400
						DAU - Peningkatan kapasitas IKM Unggulan (Industri Pengolahan Ketela)	39.907.300
						DBHCHT - Bimtek Blending Rokok	44.343.600
						DBHCHT - Bimtek Pelintingan Rokok	88.971.300
						DBHCHT - Workshop Pelaporan Data Produksi IHT Melalui SIINas	69.183.400
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian melalui SIINAS	10.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitasi pendataan industri melalui aplikasi SIPIT (Inovasi : SIPIT)	22.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi	11.357.000
				3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembekalan Calon Transmigran	13.900.000
						Pemindahan dan Penempatan Transmigran	18.935.700
						Pendampingan Pemindahan dan Penempatan Transmigran	25.237.000
				3.32.03.2.01.0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	(blank)	
				3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	(blank)	
SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (Mendukung MR, SPIP)	17.400.000
				4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.880.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.731.337.000
				4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	6.158.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah	2.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Kepegawaian	720.000
						Rapat Pengembangan SDM	1.280.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Alat Listrik	30.410.800

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.804.600
				4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Minum Harian Pegawai	103.118.400
				4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan	30.078.500
				4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	20.628.000
				4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/ Material	38.456.300
				4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelenggaraan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.073.005.100
				4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Fasilitasi Rapat Koordinasi Sekretariat Daerah	66.400.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.132.757.000
						Rapat Anti Kecurangan	3.200.000
						Rapat Anti Korupsi (Mendukung IEPK)	3.200.000
						Rapat Koordinasi Pengembangan Pelayanan Publik	3.200.000
						Rapat Pengembangan Inovasi	3.200.000
				4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip OPD	7.012.600
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	639.680.000
				4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Kursi Susun	-
				4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor	58.598.000
				4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Pompa Air	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	736.592.300
				4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BPJS Kesehatan	39.600.000
						Jasa PPPK Paruh Waktu	42.552.000
						Penyediaan Jasa Pengemudi	185.034.000
						Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan	374.022.000
						Penyediaan Jasa Tenga Keamanan	1.214.460.000
						Penyediaan tenaga PPPK paruh waktu	342.903.600
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	399.060.000
				4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	507.400.000
				4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Penyediaan Pemeliharaan Mebel	9.510.000
				4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Pemeliharaan Peralatan Kantor	32.050.000
				4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Kantor	208.440.000
						Pemeliharaan Rumah Dinas	411.792.000
						Penyediaan Sanitasi dan Pengharum	-
				4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Penyediaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	85.129.000
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	167.469.000
				4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Kada	137.398.600
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Wakada	91.976.500
				4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical Check Up Kada	4.611.000
						Medical Check Up Wakada	8.560.000
				4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pelaksanaan Penunjang Operasional	789.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	871.883.100
				4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	626.877.900
			Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kontribusi Asosiasi Forsesdasi	10.000.000
						Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan	49.837.500
						Penyusunan Dokumen Kelembagaan	52.549.000
				4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Penyusunan Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik	46.944.400
						Penyusunan Laporan Fasilitasi Tata Laksana	38.042.500
				4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Penyusunan Dokumen Peningkatan Kinerja	29.846.000
						Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi	146.228.900
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan pelayanan keprotokolan pimpinan	28.831.000
						Pelaksanaan rapat koordinasi petugas protokol perangkat daerah terkait keprotokolan dan PANDAN KETAN UNIK	928.000
				4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan koordinasi kegiatan pelayanan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan guna membuat notulensi rapat / sambutan / release kegiatan pimpinan daerah	86.121.000
						Pelaksanaan Rapat Koordinasi, Internal dan Eksternal terkait Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.120.000
						Pembuatan sarana publikasi dan sarana pendukung fasilitasi komunikasi pimpinan	16.902.000
				4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan pelayanan pendokumentasian tugas pimpinan	37.981.000
						Pembuatan laporan dan hasil dokumentasi foto kegiatan pimpinan	2.019.200
						Pengolahan bahan dokumentasi video kegiatan pimpinan	15.117.000
						Penyediaan sarana pendukung pendokumentasian tugas pimpinan	4.880.800
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan	33.970.900
						Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi kegiatan administrasi pemerintah	236.029.100
				4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Koordinasi pelaksanaan administrasi wilayah	9.777.400
						Koordinasi pengelolaan data kewilayahan	5.222.600
				4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Koordinasi dan evaluasi kegiatan otonomi daerah	80.937.000
						Koordinasi penyusunan LKPJ Bupati	17.243.800
						Koordinasi penyusunan LPPD	18.229.800
						Koordinasi penyusunan SPM	3.589.400
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Fasilitasi Hibah Insentif Guru Ngaji dan Pengajar Keagamaan	7.311.800.000
						Fasilitasi Hibah Rehabilitasi Pondok Pesantren	-
						Fasilitasi Hibah Rehabilitasi Prasarana Peribadatan	2.199.560.000
						Fasilitasi Hibah Sarana Prasarana Peribadatan dan Hibah Insentif Guru Ngaji dan Pengajar Keagamaan	140.794.200
						Fasilitasi Pelaksanaan Haji Daerah	973.820.000
						Fasilitasi Pengajian dan Peringatan Hari Besar Keagamaan	889.067.700
						Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	69.866.000
						Koordinasi Pelaksanaan Fasilitasi Bina Mental Spiritual	76.452.100
						Perjalanan ibadah atau wisata rohani bagi masyarakat berprestasi di bidang keagamaan	1.077.000.000
				4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	40.074.800
				4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	105.274.000
						Persiapan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	44.726.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah	100.000.000
				4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Hukum Litigasi / Non litigasi dan pemberian bantuan hukum bagi Masyarakat Miskin	265.623.000
				4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum	Pengelolaan JDIH Kabupaten Purworejo	32.946.000
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Evaluasi pelaksanaan kerja sama daerah	3.364.400
						Fasilitasi pembahasan kerja sama daerah	11.635.600
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Monev dan Pembinaan BUMD BLUD	54.254.700
				4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Koordinasi, monitoring dan evaluasi distribusi perekonomian	15.603.800
				4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	21.378.600
				4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Peningkatan Kapasitas Petugas BUMD BLUD	14.355.500
				4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	TPAKD	5.000.000
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah	38.843.400
						Peresmian Proyek	32.515.200
						Rakorpim	33.332.000
				4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Kegiatan Perangkat Daerah	40.000.000
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	135.000.000
				4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	60.000.000
				4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	42.654.000
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBHCHT	150.000.000
				4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2.776.500
						Koordinasi, Sinkronisasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	7.223.500
				4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	5.500.000
SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(mendukung SPIP)	16.827.200
				4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (mendukung MR)	1.900.000
				4.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah(mendukung IEPK)	1.900.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.522.210.000
				4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-
				4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(mendukung SPIP)	11.507.600
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	11.622.500
				4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.992.700
				4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.400.000
				4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.433.000
				4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.756.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	116.312.300
				4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.810.000
				4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195.345.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.386.767
				4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.557.850.800
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	204.850.000
				4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	465.960.000
				4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.750.000
				4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	233.550.000
				4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.265.000
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	27.821.802.128
				4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	531.428.000
				4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	68.400.000
			Layanan Administrasi DPRD	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	171.748.600
				4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.137.336.000
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah	11.610.000
				4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	477.050.000
				4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	347.600.000
				4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik	474.870.000
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	96.644.950
				4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	80.618.000
				4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	241.318.550
				4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	82.036.500
				4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	13.600.000
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1.250.000
				4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1.250.000
				4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.250.000
				4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1.250.000
				4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2.450.000
				4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah	41.981.000
			Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	1.080.000.000
				4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	312.900.000
				4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	269.045.200
				4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.494.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	985.011.850
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	6.050.000
				4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Pelaksaan Reses	7.278.865.600
			Fasilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.267.100.000
				4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	18.060.000
				4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.508.672.000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD Final	2.127.500
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	10.469.700
						Pengumpulan dan Verifikasi Data Perencanaan, Kinerja, MR, SPIP, IEPK, dan Inovasi	8.779.400
						Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	487.900
						Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	300
				5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.806.400
				5.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Belanja alat tulis kantor	836.400
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.543.642.000
				5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan dan Koordinasi Laporan Keuangan OPD	1.800.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Kepegawaian dan IEPK	3.200.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Alat Listrik	5.184.200
				5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Alat Kebersihan dan Rumah Tangga	8.369.100
				5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Minum Harian Pegawai	35.574.000
				5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan	6.928.500
				5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Alat Kantor Lainnya	1.740.000
						Penyediaan ATK	11.200.300
				5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Jamuan Tamu	4.800.000
				5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi Inovasi	1.920.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.442.000
				5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis	4.140.500
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(blank)	
				5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	(blank)	
				5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Listrik, Air, dan Telepon	109.951.350
				5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PPPK Paruh Waktu	63.672.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000
				5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	146.280.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Komputer/ Notebook	19.710.000
						Pemeliharaan Printer	10.350.000
				5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	103.454.000
				5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarpras Gedung	19.281.000
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2028	27.567.200
						Penyusunan Ranwal RKPD 2028	25.038.800
						Penyusunan Ranwal RKPD 2029	18.394.000
				5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Forum Lintas PD	19.417.600
						Musrenbang Kabupaten - RKPD Tahun 2028 (mendukung PUG)	30.089.300
						Penyusunan dan Penetapan Perubahan RKPD 2027	24.300.000
						Penyusunan dan Penetapan RKPD 2028	167.193.100
						Penyusunan Perubahan RPJMD 2025-2029	-
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Internal dan Eksternal Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	11.829.800
						Penyusunan Dokumen Analisis Data	6.700.000
						Penyusunan Profil Pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	4.470.200
				5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Semester I 2027	16.850.000
						Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Semester II 2027	16.850.000
						Koordinasi Internal dan Eksternal Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	10.300.000
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	12.710.000
						Pelaksanaan evaluasi RTP Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	10.760.700
						Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD	20.433.200
						Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD	2.410.300
						Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RKPD serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	571.500
						Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sawiji	61.080.000
						Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Perangkat Daerah	32.034.300
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Assistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	19.200.000
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	92.432.800
				5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Assistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia	22.400.000
						Fasilitasi Sektoral Bidang Pembangunan Manusia (Tematik Room)	10.144.000
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	266.823.200
						Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	9.600.000
						Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting	6.400.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.120.000
						Forum TJSLP	20.904.000
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	43.496.900
				5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.120.000
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	37.960.100
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	178.000.000
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	30.400.000
						Fasilitasi Inovasi Sistem Informasi Infrastruktur Kabupaten Purworejo	6.600.000
				5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6.400.000
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	53.600.000
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Analisis IDSD	29.388.200
						Penerbitan Jurnal Integral	38.006.400
						Riset Unggulan Daerah	465.551.900
				5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Koordinasi Konsultasi FKRI Provinsi	1.505.000
						Penyenggaraan FKRI Kabupaten	23.400.000
			Invensi dan Inovasi	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pendaftaran HKI	11.235.200
						Rakor HKI	5.940.000
						Workshop Drafting Paten	8.120.000
				5.05.03.2.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Fasilitasi Hilirisasi Hasil Inovasi	16.545.200
				5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	IGA (Innovative Government Award)	9.200.000
						Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah	112.796.000
						Krenova	61.194.000
				5.05.03.2.02.0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Koordinasi Konsultasi dan Benchmarking	4.465.000
						Pengembangan Rancang Bangun Inovasi	39.565.000
				5.05.03.2.02.0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Bimtek Inovasi	23.085.200
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Mendukung SPIP, MR, IEPK)	10.980.200
				5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Mendukung SPIP, MR, IEPK)	6.023.800

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.130.421.000
				5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.211.200
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	(blank)	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.314.700
				5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.547.000
				5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.002.000
				5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.000.000
				5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(blank)	
				5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	6.994.200
				5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.463.000
				5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	9.999.500
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(blank)	
				5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(blank)	
				5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	305.586.600
				5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	485.320.800
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000
				5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga	231.930.000
				5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.900.000
				5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.760.000
				5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.917.000
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	(blank)	
				5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	(blank)	
				5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	262.000.000
				5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	219.500.000
				5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	(blank)	

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	27.005.500
				5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	7.891.500
				5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	26.926.000
				5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	9.600.000
				5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	14.040.000
				5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas [-] Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,	36.302.000
				5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	50.000.000
				5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	34.200.000
				5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	18.000.000
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	18.068.500
				5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	11.700.000
				5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	82.000.000
				5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4.012.000
				5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	10.020.000
				5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penyusunan Analisis LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.968.000
				5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	(blank)	

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	27.480.000
				5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	16.951.500
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	(blank)	
				5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	2.500.000.000
				5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Alokasi Dana Desa	153.712.234.600
						Analisi Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	61.108.000
						Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa (Renja)	-
						Bantuan Keuangan Khusus Bidang Jalan (Pokir)	5.998.566.700
						Bantuan Keuangan Khusus Bidang Jalan (Renja)	-
						Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa (Pokir)	1.099.145.200
						Bantuan Keuangan Khusus Untuk Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintah Desa (Renja)	-
						Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa	5.824.430.000
						Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bidang Jalan	-
						Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bidang Pariwisata	250.000.000
						Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Bidang Sarana dan Prasarana	-
						Belanja Bantuan Keuangan Kusus (Penyesuaian)	-
						Dana Desa	317.030.772.000
						Insentif RT dan RW	16.932.000.000
						Siltap Staf Perangkat Desa	898.284.048
				5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.000.000.000
				5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	23.100.000.000
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	10.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Penyusunan Standar Harga	54.999.738
				5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	4.499.600
				5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	(blank)	
				5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	30.000.000
				5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Inventarisasi BMD	90.000.000
				5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	324.999.800
				5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Penilaian Barang Milik Daerah	44.999.900
				5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.700.000
				5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Optimalisasi PBMD	1.800.000
				5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan BMD	1.800.000
				5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan BMD	2.700.000
				5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan BMD Kab/Kota	2.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	9.686.200
				5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	480.000.000
				5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyediaan Alat Meter Air untuk Wajib Pajak Air Tanah untuk mendukung sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	83.185.300
						Penyediaan Jasa Tenaga Ahli/Pemutakhiran Aplikasi E-BPHTB untuk mendukung Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Daerah	48.483.832
						Penyediaan Jasa Tenaga Ahli/Pemutakhiran Aplikasi SIMPATDA untuk mendukung Penyediaan Sarana dan Prasarana Pajak Daerah	48.483.832
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	129.148.500
				5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	270.000.000
				5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian PBB dan BPHTB	20.000.000
				5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah	163.553.500
				5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	142.458.400
				5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Penagihan Pajak Daerah	1.955.434.400
				5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20.370.100
				5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pegendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	94.906.000
				5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	99.605.200
				5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	72.000.000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	1.373.000
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.898.400
						Penyusunan Manajemen Risiko	3.840.000
						Penyusunan PUG	768.000
				5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.014.300
						Penyusunan Dokumen SPIP	1.536.000
				5.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.396.600
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji PNS	3.683.877.000
				5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.499.600
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	IEPK	1.536.000
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.200.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.400.000
				5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.600.000
				5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.076.200
				5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000
				5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.732.000
				5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	3.700.000
				5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51.610.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.420.400
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.440.000
				5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.131.900
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000
				5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.490.000
				5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	1.680.000
				5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.770.000
				5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.420.000
				5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.710.000
				5.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.090.000
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	45.684.000
						Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	72.208.000
						Perpanjangan Kontrak bagi PPPK	5.160.000
				5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	11.260.000
						Pembekalan ASN yang akan Purna	4.740.000
				5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	33.608.200
						Sosialisasi Sistem Informasi Kepegawaian	6.391.800
			Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Pengelolaan Mutasi/Promosi Manajerial ASN	99.930.000
						Pengelolaan Mutasi/Promosi Non Manajerial ASN	5.070.000
				5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	32.000.000
				5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	1.300.000
			Pengembangan Kompetensi ASN	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Pengelolaan Assessment Center	143.204.044
				5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	15.000.000
				5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	3.360.000
						Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	11.640.000
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Penilaian kinerja bagi Perangkat Daerah	5.570.000
						Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13.450.000
				5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	37.500.000
				5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Evaluasi Penerapan Peraturan Disiplin	14.780.000
						Pembinaan Disiplin ASN	21.200.000
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Inovasi SINERGI dan SAPA ASN	10.000.000
						Pengiriman peserta untuk mengikuti pengembangan kompetensi teknis	290.246.000
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	801.877.500

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pengiriman Pelatihan Fungsional	19.866.000
						Pengiriman Pelatihan Kepemimpinan Struktural	91.810.000
						Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	109.324.000
			Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	5.04.02.2.03.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	5.402.000
						Pengiriman peserta mengikuti pelatihan Pimpemdagri	59.598.000
INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah	6.740.000
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Mendukung SPIP, IEPK, MR dan ZI)	9.952.700
				6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.436.000
				6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	525.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.672.968.000
				6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.783.100
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan BMD	912.600
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	15.312.000
						Pengelolaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3.742.600
				6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Peserta Diklat	1.648.196.000
						Penyelenggaran Pelatihan Kantor Sendiri (In House Training)	145.925.700
				6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	17.335.000
				6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.060.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen InstalasiListrik	10.292.700
				6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan Fasilitasi Ruang Kerja	2.968.000
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.365.700
				6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.631.400
				6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	27.471.800
				6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	10.312.900
				6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Makan dan Minum Tamu	15.888.000
				6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal	177.183.000
				6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.299.800
				6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Fasilitasi Inovasi Halo Inspektur dan Si Tuntas	39.852.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pemenuhan Sarana Prasarana Kearsipan	14.728.000
				6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Fasilitasi pekerjaan administrasi atau tim pengawas	387.572.000
				6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Fasilitasi Ruang Kerja	15.930.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	625.000
				6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemeliharaan Jaringan Listrik	1.965.000
						Penyediaan Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.596.100
				6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Gaji PPPK Paruh Waktu	122.238.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.332.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.960.000
				6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.740.000
				6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Pemenuhan Fasilitasi Ruang Kerja	4.893.000
				6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Kantor	48.200.000
				6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemenuhan Fasilitasi Ruang Kerja	200.014.000
				6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana Prasana Gedung Kantor	28.265.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja	309.714.000
				6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	87.796.900
				6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	17.232.000
				6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	88.116.500
				6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	114.214.000
				6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	23.960.000
				6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Gelar Pengawasan Daerah	247.786.000
						Koordinasi Pengawasan	18.667.000
						Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah	54.073.700
						Pemutakhiran Data TLHP APIP Lainnya	6.660.000
						Pemutakhiran Data TLHP BPK RI	28.966.500
						Pemutakhiran Data TLHP Inspektorat Provinsi	11.040.000
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	25.810.400
						Pengawasan AI (Audit Investigasi)	102.770.000
				6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Audit Kinerja Tematik	19.452.000
						Konsinyering	77.546.000
						Monitoring TL Pengawasan Pelaksanaan SPMB	182.000
						Pendampingan dan Pengawasan ProSN	10.340.000
						Pengawasan PDTT	25.153.200
						Pengawasan Pelaksanaan ProSN	123.244.000
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Konsinyering Penyusunan Renbinwas dan PKPT	48.542.000
						Penyusunan Kebijakan Teknis Bidang Pengawasan	23.170.600
						Sosialisasi PKPT	3.840.000
				6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Fasilitasi Pengawasan	7.685.500
			Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi UPD	16.317.600
				6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Konsinyering Rakor Tim Manajemen Oversight	32.804.000
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	80.681.300

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Fasilitasi Kegiatan MCSP KPK RI	58.565.500
						Pendampingan/Penilaian Desa Antikorupsi	12.472.000
						Reviu Belanja Melampaui Tahun Anggaran	4.890.000
						Reviu Penyerapan Realisasi Anggaran	1.630.000
				6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Koordinasi dan Konsultasi UPG	19.231.000
						Koordinasi Pelaksanaan SPI	19.231.000
						Koordinasi Pelaporan LHKPN	19.231.000
						Rapat Koordinasi Pelaporan LHKPN	6.400.000
						Rapat Koordinasi SPI	6.400.000
						Sosialisasi SPI	1.184.000
						Sosialisasi UPG	52.838.200
KECAMATAN GRABAG	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan (Mendukung MR, SPIP, IEPK)	2.000.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja PD	300.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen Penyelenggaraan Walidata	250.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.520.000
						Gaji Pokok PNS	840.000.000
						Gaji Pokok PPPK	126.000.000
						Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.040.000
						Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	240.000
						Iuran Jaminan Kematian PNS	6.263.933
						Iuran Jaminan Kematian PPPK	720.000
						Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60.000.000
						Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.000.000
						Pembulatan Gaji PNS	42.000
						Pembulatan Gaji PPPK	28.000
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	389.521.632
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	38.648.435
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	189.000.000
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	21.000.000
						Tunjangan Beras PNS	35.000.000
						Tunjangan Beras PPPK	8.400.000
						Tunjangan Fungsional PPPK	9.940.000
						Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.000.000
						Tunjangan Jabatan PNS	75.600.000
						Tunjangan Keluarga PNS	66.100.000
						Tunjangan Keluarga PPPK	10.500.000
						Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.900.000
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	250.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	250.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	500.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	4.000.600
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga	5.000.100
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor	20.496.000
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.500
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Belanja ATK Kantor	11.263.600
				7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.975.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	995.500

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	(blank)	
				7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin	9.225.000
				7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	9.662.000
				7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Listrik	33.335.300
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Kebersihan	11.592.000
						Jasa Tenaga Supir	21.587.300
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Roda Dua	10.540.000
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.300.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	7.275.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	6.710.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan	2.206.400
						Fasilitasi Kegiatan Kesenian	3.285.400
						Fasilitasi Stunting	2.554.000
				7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Paten	1.000.000
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Intensifikasi PBB	2.500.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Desa	1.655.000
						Musrenbang Kecamatan (Mendukung PUG)	9.396.000
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi PKK	11.475.000
						Fasilitasi Posyantekdes	2.935.000
						Fasilitasi UMKM	1.905.000
						Inovasi "Gebyar PBB Mantap"	4.725.000
						Monitoring Bangub	1.655.000
						Monitoring Pertanian	1.655.000
						Rakor Pemberdayaan	9.845.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PAM Hari Besar	2.030.000
						Patroli Kamtibmas	750.000
						Pemantauan & pengendalian Bencana Alam	625.000
						Pembinaan Linmas	4.100.000
				7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi FASI/LPTQ	500.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	2.498.400
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forkompincam	16.915.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Alokasi Dana Desa	2.019.500
						Fasilitasi Bantuan RT/RW	500.000
						Fasilitasi Dana Desa	1.655.000
						Fasilitasi Siskeudes	1.655.000
						Pembinaan Penyusunan APBDes	1.655.000
						Pembinaan Penyusunan RKPDes	1.530.000
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades	15.095.000
						Konferensi Sekdes	14.906.000
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pilkades	33.000.000
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pergantian Antar Waktu BPD	1.469.000
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pengisian Kekosongan Perangkat Desa	1.972.000
KECAMATAN NGOMBOL	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan ASB	100.000
						Penyusunan ASB Perubahan	100.000
						Penyusunan DPA	100.000
						Penyusunan DPA Perubahan	100.000
						Penyusunan GAP GBS	100.000
						Penyusunan KAK	100.000
						Penyusunan KAK Perubahan	100.000
						Penyusunan MR	100.000
						Penyusunan PK	100.000
						Penyusunan PK Perubahan	100.000
						Penyusunan Ranwal, Rankhir, Renja OPD	100.000
						Penyusunan Ranwal, Rankhir, Renja Perubahan OPD	100.000
						Penyusunan RKA	100.000
						Penyusunan RKA Perubahan	100.000
						Penyusunan RKO	100.000
						Penyusunan RKO Perubahan	100.000
						Penyusunan RKT	100.000
						Penyusunan RKT Perubahan	100.000
						Penyusunan RUP	100.000
						Penyusunan RUP Perubahan	100.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan IEPK	50.000
						Penyusunan Laporan Bulanan (Fisik, Keuangan, Program)	50.000
						Penyusunan Laporan Triwulanan	50.000
						Penyusunan LKJIP	175.000
						Penyusunan LKPJ	175.000
						Penyusunan LPPD	175.000
						Penyusunan SKM	50.000
						Penyusunan SPIP	175.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen Penyelenggaraan Walidata Pendukung	100.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja pegawai	1.609.488.000
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	125.000
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan (fungsional)	1.000.000
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan (LRA)	125.000
						Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	125.000
						Penyusunan Laporan Rekon Gaji	125.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	750.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.272.600
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.326.600
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.700.000
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggadaan	7.390.000
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/ Material	12.571.200
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penyediaan Bahan Material Arsip Dinamis	2.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop	21.085.176
				7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Listrik dan Telepon	16.164.500
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Jasa Kantor	116.118.000
						Koordinasi dan Evaluasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.256.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	emeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.540.000
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	16.956.500
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung	3.050.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rakor Bidang Sosial dengan PKH/ TKSK	2.260.000
						Rakor Dengan Instansi Vertikal	2.240.000
				7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Kegiatan PORCAM	2.000.000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	2.117.000
				7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi dan Rapat Konvergensi Stunting	6.120.000
				7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rakor Tim Paten	1.325.000
						Sosialisasi Pelayanan Paten	1.325.000
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Monitoring Pembangunan	2.448.800
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang RKPD	14.397.200

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Batuan Keuangan Provinsi/Kabupaten Kepada Desa	1.536.000
						Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Berdaya (RPPA, Lansia, Disabilitas)	7.296.000
						Pembinaan BUMDES	1.344.000
						Pembinaan dan Fasilitasi KDMP	15.872.000
						Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UMKM	4.736.000
						Pembinaan PKK	17.243.600
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Patroli Kamtibmas	2.168.000
						Pembinaan Linmas	2.104.000
				7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan LPTQ	4.867.000
						Rakor Keagamaan	1.690.800
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Hari Jadi Kabupaten Purworejo	2.851.600
				7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi Penanganan Kebencanaan	4.025.000
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forkompincam	13.104.800
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan APBDesa/APBDesa Perubahan	3.648.000
						Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.801.600
				7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	(blank)	
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi ADD	3.648.000
						Fasilitasi DD	3.648.000
						Fasilitasi Rakor RT/RW	3.648.000
						Fasilitasi Siskeudes	3.506.000
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kepala Desa	14.333.500
						Konferensi Perangkat Desa	4.797.500
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rakor Persiapan Pilkades	70.500.000
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rakor BPD	3.234.800
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.310.000
				7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa	4.258.400
KECAMATAN PURWODADI	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	mendukung MR, SPIP dan IEPK	250.000
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	750.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	125.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.630.067.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.000.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	125.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	125.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	125.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.018.800
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.950.600
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.152.000
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.955.300
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	10.877.300
				7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(blank)	
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.212.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	125.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(blank)	
				7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.889.500
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.570.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	15.810.000
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.830.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.785.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan AC Kantor	3.660.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	800.000
				7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.928.000
						Fasilitasi PKH Puskesmas	1.003.000
						Fasilitasi Stunting	3.904.000
				7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	800.000
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Intensifikasi PBB	7.525.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan	18.608.800
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	BUMDes/BUMDesma	3.965.000
						Fasilitasi Bangub	2.810.000
						Karang Taruna	3.840.000
						Koperasi Desa Merah Putih	5.370.000
						Parade Budaya	9.850.000
						Pemberdayaan Bidang Seni dan Keagamaan	4.090.000
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26.000
						PKK	6.385.000
						Pokdarwis (inovasi)	5.370.000
						Rakor Evaluasi PPPA/KLA/KIM	2.624.000
						UMKM	5.370.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rakor Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.500.000
				7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	1.500.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peringatan HUT Kemerdekaan RI	11.900.000
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forum Kordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	17.260.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.020.000
				7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.020.000
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Penatausahaan Aset Desa	3.020.000
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.140.000
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa	33.180.000
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rakor BPD	2.120.000
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	1.250.000
KECAMATAN BAGELEN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Mendukung SPIP, MR, dan IEPK)	1.375.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja	500.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	125.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS	1.523.075.172
						Gaji dan Tunjangan PPPK	135.046.828
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan	500.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Penatausahaan BMD	500.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pendapatan Daerah	500.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Penyusunan Dokumen Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Alat listrik kantor	2.652.300
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	(blank)	
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Minum Harian Pegawai	6.837.600
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.033.776
				7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bahan Bacaan	1.332.000
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	6.601.200
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5.229.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penyusunan Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	250.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Telepon dan Listrik	26.542.300
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Gaji dan Jaminan Asuransi PPPK Paruh Waktu	27.000.000
						Tenaga Outsourcing	68.004.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Mobil Dinas	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Motor Dinas	15.810.000
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaaan Komputer, Laptop dan Printer	5.680.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	5.218.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan AC	3.660.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	(blank)	
				7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(blank)	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rapat Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat	-
				7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Monev Pembangunan	5.660.000
						Rakor Bidang Pendidikan	4.800.000
						Rakor Bidang Sosial	6.400.000
				7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(blank)	
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rakor terkait PBB	4.815.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi Musrenbang	7.940.300
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi KDMP, MBG, BumDes dan Kecamatan Berdaya	10.600.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Fasilitasi PKK	16.197.700
						Fasilitasi Stunting , Inovasi Teko Mas dan Eksotika	12.680.700
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Kebencanaan	4.006.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Fasilitasi HUT RI	17.366.800
				7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	(blank)	
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rakor Forkompimcam	20.240.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	Fasilitasi Perdes dan Perkades	620.000
				7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi Desa	620.000
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rakor APBDes, DD, ADD	8.220.000
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Sekdes	2.880.000
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pilkades	16.000.000
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Penguatan BPD	1.408.000
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	310.000
KECAMATAN KALIGESING	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Mendukung SPIP, MR dan IEPK)	250.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	288.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	250.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.442.198.993
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	250.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	250.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	250.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	250.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	4.784.800
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.826.200
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.262.400

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.912.000
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	9.252.300
				7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.000.000
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.070.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.998.400
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.002.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.080.000
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Laptop dan Printer	8.760.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.650.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Perlatan Kantor dan Rumah Tangga	6.488.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Fasilitasi Stunting	2.496.000
						'Monev Pembangunan wilayah	3.500.000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	'Pelayanan PATEN	956.000
						Persiapan Perencanaan Kegiatan Pelayanan	1.536.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan	9.494.400
						Pra Musrenbang	1.200.000
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasiitasi Karang Taruna	2.400.000
						Fasilitasi Bangub	3.024.000
						Fasilitasi Olahraga	4.320.000
						Fasilitasi P2TP2A	2.400.000
						Fasilitasi PKK	6.100.000
						Fasilitasi TTG	2.880.000
						Fasilitasi UMKM	2.400.000
						Pagelaran Budaya	3.360.000
						Penanggulan Kemiskinan	2.400.000
						UMKM Expo	2.375.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pengamanan Hari Raya (PAM Hari Raya)	1.776.000
						Persiapan pelaksanaan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.680.000
				7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi LPTQ MTQ	576.000
						Koordinasi Tokoh Agama dan Tomas Se-Kecamatan Kaligesing	4.320.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forum Pimpinan Kecamatan	14.560.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi Desa	992.000
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Dana Desa	2.000.000
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kepala Desa	2.000.000
						Konferensi Perangkat Desa	2.000.000
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	16.500.000
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi BPD	1.536.000
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa	1.125.000
KECAMATAN PURWOREJO	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen MR, EIPK, dan SPIP	2.560.000
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.320.000
						Penyusunan laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.060.000
						Rapat Koordinasi Perencanaan Ranwal Renja n+2 (Kelurahan + Pokmas)	2.560.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	660.000
						Penyusunan Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000
						Rapat Koordinasi dan Evaluasi Renja	3.840.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Koordinasi Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	720.000
						Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	737.800
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.695.909.000
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	6.770.000
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	730.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Sewa Tanah Eks Bengkok dan BMD	2.540.000
						Penyusunan laporan Pelaksanaan Sewa Tanah Eks Bengkok dan BMD	460.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	24.915.500
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.367.500
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.816.000
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.622.400
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	99.937.900
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.866.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	37.717.900
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.599.400
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	859.218.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	47.430.000
						Kelurahan	73.780.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	126.974.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.965.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Monitoring Pembangunan	4.251.700
						Rapat koordinasi lintas sektor Kecamatan	12.160.000
				7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	(1) Fasilitasi Koordinasi lintas sektor dalam mendukung implementasi ILP di desa dan kelurahan	2.560.000
						(2) Fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan aksi konvergengi stunting	2.240.000
						(3) Monev pelaksanaan aksi konvergensi stunting di tingkat desa/kelrahan	2.240.000
						(4) Fasiitasi inovasi PD Kecamatan	2.960.000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	(1) FGD Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Berbasis kebutuhan Masyarakat	5.746.500
				7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	(1) Rapat Percepatan pencapaian SPM Tingkat Kecamatan melalui sinergi kelurahan dan desa	2.000.000
						(2) Monitoring SPM	3.000.000
				7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Forum Konsultasi Publik (FKP)	3.724.000
						Rapat Koordinasi Penyusunan SKM	3.776.000
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dalamPemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum	2.855.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan	3.277.600
						Evaluasi Desa dan Kelurahan	4.977.600
						Fasilitasi & Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	6.257.600
						Fasilitasi & Pembinaan BUMDes/BUMDesma	6.257.600
						Fasilitasi dan Pembinaan PKK	22.301.000
						Kecamatan Berdaya	9.455.200
						Kecamatan Layak Anak	6.257.600
						Koordinasi BanGub	6.257.600
						Pembinaan Kader Kesehatan Jiwa Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.531.000
						Pembinaan Kader Posyandu	6.695.600
						Pembinaan Karang Taruna	6.677.600
						Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	13.415.200
						Pembinaan UMKM	6.677.600

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbang Kecamatan	11.519.400
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Forum Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Kecamatan	7.340.000
						Monitoring Trantibum di wilayah Kecamatan Purworejo	4.275.000
						Pembinaan / Pelatihan Bela Negara dan Kelinmasan Desa dan Kelurahan	7.360.000
				7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	PKUB dan FKDM	7.500.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Fasilitasi kegiatan Upacara hari hari Besar Nasioanal	10.954.000
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Fasilitasi Tugas Forkompimcam	22.787.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.018.000
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	14.282.500
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	33.880.000
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4.920.000
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.820.000
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.710.000
				7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	3.735.000
				7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.246.500
KELURAHAN PURWOREJO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan Jalan Setapak Kelurahan Purworejo	250.000.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	468.725.800
KELURAHAN PANGENREJO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Aspal Jalan Kelurahan Pangenrejo	150.000.000
						Pembangunan Rabat Beton Kelurahan Pangenrejo	200.000.000
						Pokir Pembangunan Jalan Poros Kelurahan Pangenrejo	942.250.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	158.922.900
KELURAHAN KEDUNGSARI	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Rabat Beton Jalan Makam Candi Sari Kelurahan Kedungsari	200.000.000
						Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 03 RW 02 Kelurahan Kedungsari	50.000.000
						Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 04 RW 02 Kelurahan Kedungsari	88.711.000
						Pokir Jalan Lingkungan Kedungsari Rt 02 Rw 02 Krajan II Kelurahan Kedungsari	199.936.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Pokir Pembangunan Jalan Kedungwadas RT 01/RW 04 Kelurahan Kedungsari	199.997.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	149.846.800
KELURAHAN CANGKREP KIDUL	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	370.000.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	151.092.400
KELURAHAN CANGKREP LOR	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Drainase Kelurahan Cangkreplor	125.000.000
						Pembangunan Rabat Beton Kelurahan Cangkreplor	200.000.000
						Pokir Pembangunan Jalan Lingkungan RT 003 RW 004, Kelurahan Cangkreplor	100.000.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Insentif Kader Kesehatan Kelurahan Cangkreplor	45.000.000
						Insentif Ketua RT RW Kelurahan Cangkreplor	117.000.000
						Musrenbang Kelurahan Cangkreplor	3.630.400
						Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kelurahan Cangkreplor	1.000.000
						Pemberdayaan PKK Kelurahan Cangkreplor	20.000.000
						Pemberdayaan Posyandu Kelurahan Cangkreplor	15.000.000
						Pemberdayaan RT RW Kelurahan Cangkreplor	2.000.000
KELURAHAN TAMBAKREJO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan jalan desa berupa rabat beton Kelurahan Tambakrejo	383.711.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	190.682.800
KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Drainase Kelurahan Pangenjurutengah	100.000.000
						Pembangunan Jalan Aspal Kelurahan Pangenjurutengah	200.000.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Insentif Kader Posyandu Kelurahan Pangenjurutengah	45.000.000
						Insentif RT/RW Kelurahan Pangenjurutengah	138.000.000
						Musrenbang Kelurahan Pangenjurutengah	3.630.400
						Pembinaan RT/RW Kelurahan Pangenjurutengah	7.178.400
						Pertemuan LPMK Kelurahan Pangenjurutengah	4.840.000
						Pertemuan PKK Kelurahan Pangenjurutengah	21.488.400
						Pertemuan Posyandu Kelurahan Pangenjurutengah	21.870.000
						Pertemuan RT/RW Kelurahan Pangenjurutengah	12.020.000
KELURAHAN DOPLANG	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Jalan Rabat Beton Kelurahan Doplang	88.295.000
						Pembangunan Senderan RT 03 RW 06 Kelurahan Doplang	35.779.000
						Rehab Drainase dan Selokan Si Jambu Kelurahan Doplang	200.000.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Insentif Kader Kelurahan Doplang	18.000.000
						Insentif RT/RW Kelurahan Doplang	96.000.000
						Intensifikasi PBB Kelurahan Doplang	5.384.000
						Kegiatan Ketua RT/RW Kelurahan Doplang	9.480.000
						Kegiatan Lansia Kelurahan Doplang	15.000.000
						Kegiatan LPMK Kelurahan Doplang	5.447.500
						Kegiatan Pembinaan PKK Kelurahan Doplang	15.000.000
						Kegiatan Posyandu Kelurahan Doplang	15.000.000
						Musrenbang Kelurahan Doplang	3.630.400
KELURAHAN SINDURJAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Kelurahan Sindurjan	200.000.000
						Pembangunan Senderan Drainase Kelurahan Sindurjan	100.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Pokir Pembangunan Jalan Lingkungan RT 002 RW 001 dan Rt 003 Rw 006 Kelurahan Sindurjan	109.139.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bimtek ILP (Integrasi Layanan Primer) Kelurahan Sindurjan	12.268.000
						Insentif Kader Kesehatan Kelurahan Sindurjan	24.000.000
						Insentif Ketua RT/RW Kelurahan Sindurjan	135.000.000
						Kegiatan Pembinaan Kader Posyandu Kelurahan Sindurjan	12.865.000
						Kegiatan Pembinaan LPMK Kelurahan Sindurjan	5.300.000
						Kegiatan Pembinaan PKK Kelurahan Sindurjan	20.491.000
						Kegiatan Pembinaan RT RW Kelurahan Sindurjan	9.140.000
						Musrenbang Kelurahan Sindurjan	3.390.400
KELURAHAN PADUROSO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Peningkatan Jalan Aspal Sipathuk Kelurahan Paduroso	200.000.000
						Pembangunan Revitalisasi Lapangan Kelurahan Paduroso	142.800.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Bimtek LPMK Kelurahan Paduroso	3.675.000
						Insentif Kader Posyandu Kelurahan Paduroso	6.000.000
						Insentif RT/RW Kelurahan Paduroso	27.000.000
						Kegiatan Posyandu Balita dan PAUD Kelurahan Paduroso	9.000.000
						Musrenbang Kelurahan Paduroso	2.430.400
						Pembinaan PKK Kelurahan Paduroso	11.410.000
						Pembinaan Posyandu Kelurahan Paduroso	8.500.000
						Pembinaan RT RW Kelurahan Paduroso	3.200.000
KELURAHAN MRANTI	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Drainase Kelurahan Mranti Tahun 2027	200.000.000
						Pembangunan Rabat Beton Kelurahan Mranti Tahun 2027	132.980.000
						Pengadaan Sarpras Pendukung Program ILP Kelurahan Mranti	15.000.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Insentif Kader Posyandu Kelurahan Mranti	24.000.000
						Insentif Ketua RT/RW Kelurahan Mranti	75.000.000
						Kegiatan Musrenbang Kelurahan Mranti	3.150.500
						Kegiatan PKK Kelurahan Mranti	8.000.000
						Kegiatan Posbindu Kelurahan Mranti	5.120.000
						Kegiatan Posyandu Kelurahan Mranti	8.000.000
KELURAHAN MUDAL	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PEMBANGUNAN SARPRAS DRAINASE	200.000.000
						PEMBANGUNAN SARPRAS JALAN PEMUKIMAN	149.740.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	FASILITASI KEGIATAN KELEMBAGAAN	9.600.000
						FASILITASI KEGIATAN PKK	15.004.700
						FASILITASI KEGIATAN POSYANDU	4.800.000
						INSENTIF GURU PAUD	8.880.000
						INSENTIF KADER POSYANDU	9.000.000
						INSENTIF KETUA RT DAN RW	33.000.000
						MUSRENBANG KELURAHAN	3.150.400
KELURAHAN KESENENG	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan jalan lingkungan RT 01/03 Kelurahan Keseneng	95.000.000
						Pembangunan jalan lingkungan RT 02/01 dan RT 03/01 Kelurahan Keseneng	105.000.000
						Pembangunan Jalan Lingkungan RT.03/04 Kelurahan Keseneng	42.812.800
						Pembangunan Saluran Drainase RT.03 RW.02 Kelurahan Keseneng	74.994.600
						Pengadaan Modal Alat Kesehatan Kelurahan Keseneng	7.438.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Insentif Kader Kesehatan Kelurahan Keseneng	12.000.000
						Insentif RT Kelurahan Keseneng	42.000.000
						Insentif RW Kelurahan Keseneng	12.000.000
						Kegiatan Pertemuan LPMK Kelurahan Keseneng	3.840.000
						Kegiatan Pertemuan PKK Kelurahan Keseneng	9.410.000
						Kegiatan Pertemuan RT/RW Kelurahan Keseneng	3.200.000
						Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan Keseneng	3.150.400

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Rapat intentifikasi PBB Kel. Keseneng	6.400.000
KELURAHAN BALEDONO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN BALEDONO	323.701.700
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN BALEDONO	310.207.400
KECAMATAN BANYUURIP	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.606.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.173.000
						Koordinasi SPIP	2.338.000
						Penyusunan MR dan IEPK	3.554.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji Pokok PNS	1.838.120.667
						Gaji Pokok PPPK	80.960.000
						Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.981.670
						Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	164.664
						Iuran Jaminan Kematian PNS	11.945.164
						Iuran Jaminan Kematian PPPK	493.992
						Iuran Jaminan Kesehatan PNS	53.126.086
						Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.195.403
						Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	26.403.000
						Pembulatan Gaji PNS	60.110
						Pembulatan Gaji PPPK	2.912
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	718.047.344
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	31.084.032
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	365.166.424
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	19.315.968
						Tunjangan Beras PNS	97.332.480
						Tunjangan Beras PPPK	4.455.520
						Tunjangan Fungsional PPPK	5.040.000
						Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.000.000
						Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.520.000
						Tunjangan Jabatan PNS	152.180.000
						Tunjangan Keluarga PNS	169.439.256
						Tunjangan Keluarga PPPK	5.219.320
						Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	33.265.988
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.405.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3.370.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	(blank)	
				7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.944.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.564.700
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.853.700
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.500.000
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.322.500
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	37.479.300
				7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.992.000
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.985.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.180.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.442.800

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.772.450
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Kebersihan Outsorsing	147.342.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.592.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.620.000
				7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	(blank)	
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.630.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	62.080.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.100.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan PKH	2.590.000
						Fasilitasi Pekan Olahraga Kab	8.064.000
						Forum Kesehatan Desa/Kelurahan	2.240.000
						Konsultasi dan Koordinasi Tapem	250.000
						Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting	5.120.000
						Pembinaan DPO	9.288.000
				7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Intensifikasi PBB	8.920.000
						Rapat Monitoring Survey Kepuasaan Masyarakat	2.560.000
						Rapat Pemungut PBB	3.520.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang	13.252.000
						Pra Musrenbang	3.200.000
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah	3.200.000
						Fasilitasi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat	3.460.000
						Fasilitasi Pembinaan Kesenian	3.008.000
						Fasilitasi Pembinaan PKK Kecamatan	25.600.000
						Koordinasi Satgas KDMP	9.800.000
						Pembinaan BUMDES	3.460.000
						Pembinaan GSIB dan KLA	3.460.000
						Pembinaan Karangtaruna/milenial	2.240.000
						Pembinaan UMKM. OVOP dan KUBE	3.460.000
						Raker PKK Kecamatan	17.312.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Patroli Trantip	1.200.000
						Rapat Koordinasi Sinergitas	8.974.900
				7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pengiriman MTQ	9.841.000
						Rapat Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat	3.980.500

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Fasilitasi Hari Jadi Purworejo	11.660.000
						Koordinasi FKDM	3.840.000
						Koordinasi FKUB	4.480.000
						Penyelenggaraan HUT RI	5.020.000
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Monitoring Forkompincam	4.800.000
						Rakor/Sosialisasi Forkompimcam	24.785.400
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	Penyusunan Perdes dan Perkades	7.310.000
				7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.670.000
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.380.000
						Koordinasi Percepatan Pengajuan DD	7.419.700
						Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa	5.380.000
						Pencermatan LRA DD	5.380.000
						Pendampingan APBDes	7.420.000
						Pendampingan Perubahan APBDes	2.880.000
						Rakor Percepatan ADD dan Penelitian SPJ ADD	5.380.000
						Sosialisasi APBDes	5.380.000
						Sosialisasi Perubahan APBDes	5.380.000
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades/Kalur	18.352.400
						Konferensi Sekdes/Seklur	18.060.000
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala	39.999.600
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	9.326.400
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.680.000
				7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rakor Penyusunan RKPDes	8.055.000
KELURAHAN KLEDUNG KARANGDALEM	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Belanja Modal Pekerjaaan Pembangunan Talud jalan Poros Kelurahan Kledung Karangdalem	-
						Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Kel Kledung Karangdalem	200.000.000
						Pembangunan Talud Jalan Poros Kel Kledung Karangdalem	100.000.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan Kelompok Tani	5.380.000
						FASILITASI KEGIATAN PKK	12.518.700
						Fasilitasi Kegiatan RT/RW	5.376.000
						Honor Kader Posyandu	24.000.000
						Insentif RT	51.000.000
						Intensifikasi PBB	4.056.000
						Kegiatan Hansip/ Linmas	4.996.000
						Kegiatan Posyandu	8.640.000
						Musrenbang	5.120.000
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12.000.000
						Pembinaan LPMK	4.096.000
						Pengantar RT RW	850.000
KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Rabat Beton Lingkungan IV	200.000.000
						Pembangunan Talud Jalan Poros Kradenan	40.000.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	FASILITASI KEGIATAN PKK	10.951.300
						Fasilitasi Kegiatan Posyandu ILP	20.069.500
						Fasilitasi Pembinaan Ketua RT/Ketua RW	8.204.000
						Honor Kader Posyandu	21.000.000
						Insentif RT	96.000.000
						Insentif RW	33.000.000
						Intensifikasi PBB	6.020.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Kegiatan Hansip/ Linmas	6.916.000
						Kegiatan Posbindu	-
						Musrenbang	3.200.000
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-
						Pembinaan LPMK	4.100.000
KELURAHAN BOROKULON	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR RW 4 DAN SALURAN KOWI	200.000.000
						PEMBANGUNAN JARINGAN PJU RW 2	75.995.200
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	FASILITASI KEGIATAN PKK	10.100.700
						Fasilitasi Kegiatan RT/RW	7.680.000
						Fasilitasi Posyandu ODGJ dan Difabel	8.772.000
						Honor Kader Posyandu	24.000.000
						Insentif RT	84.000.000
						Insentif RW	24.000.000
						Intensifikasi PBB	2.304.000
						Kegiatan Hansip/ Linmas	1.920.000
						Musrenbang	-
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-
						Pembinaan LPMK	1.920.000
						Pengantar RT RW	1.750.000
						Rakorbang/ Musrenbang Tingkat Kelurahan	7.436.000
KECAMATAN BAYAN	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan (mendukung MR, SPIP dan IEPK)	1.615.000
						Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.385.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.437.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	500.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.585.337.342
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.800.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	500.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.742.200
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih)	5.007.200
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (minum harian pegawai)	29.106.000
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (cetak banner)	3.256.000
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.145.800
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	9.436.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.893.900
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Kursi Aula Kelurahan Sucenjurutengah	31.480.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.900.000
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, jasa tenaga pengemudi)	100.884.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas roda empat	38.220.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas roda dua	21.080.000
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Personal Komputer / Laptop dan Printer	18.003.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Gedung Kantor Kecamatan, Gedung Kantor Kelurahan, dan Rumah Dinas Camat)	22.310.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Mesin Potong Rumput, Sound System, Televisi, AC Unit)	13.804.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi PBB	3.381.000
						Fasilitasi Pekan Olahraga Kabupaten	8.268.000
						'Monev ODF, Stunting, Posyandu, Posbindu, Pamsimas, Monev Pembangunan, PKH/TKSK, Pendidikan, Disabilitas (DPO), Satgas MBG	9.864.000
						Persiapan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2.045.000
						Sosialisasi Bulan Dana PMI	1.828.000
				7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)	2.500.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan (mendukung PUG)	15.052.700
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah	480.000
						Fasilitasi Kegiatan TP PKK Kecamatan	63.286.500
						Pameran UMKM Kecamatan Bayan	22.326.800
						Persiapan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.578.700
						Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Gubernur (RTLH, Ketahanan Masyarakat, KPMD)	5.926.000
						Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat - (GSIB, Kecamatan Layak Anak (KLA), Karang Taruna, Teknologi Tepat Guna , BUMDes/BUMDesma, Koperasi Desa Merah Putih, Kecamatan Berdaya)	17.832.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi PHBI	1.024.000
						Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan LPTQ	4.308.000
						Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam	3.646.000
						Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.946.000
						Sosialisasi Kamtibmas	3.663.000
						Sosialisasi Kegiatan Linmas	3.708.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Fasilitasi Paskibra dan Upacara HUT RI	14.085.500
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam)	16.940.500

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.388.000
				7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pembinaan Administgrasi Desa	5.423.500
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi ADD	2.828.000
						Fasilitasi Dana Desa (DD)	7.588.000
						Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Ketua RT-RW	3.928.000
						Fasilitasi Siskeudes	2.728.000
						Fasiltasi Penyusunan RKPDesa/RAPBDesa/ APBDesa	5.908.000
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades / Kalur dan Sekdes / Seklur	32.896.000
						Pembinaan Perangkat Desa	10.568.000
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	41.317.500
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	6.488.000
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	4.308.000
KELURAHAN SUCEN JURUTENGAH	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.346.600
						Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	296.289.800
						Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8.424.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan Karang Taruna	2.240.000
						Fasilitasi Kegiatan Kelompok Tani	3.360.000
						FASILITASI KEGIATAN PKK	21.650.000
						Fasilitasi Kegiatan RT / RW	75.957.100
						Intensifikasi PBB	1.490.000
						MUSRENBANG KELURAHAN	3.162.500
						Operasional Penggerakan Pelayanan KB	27.000.000
						Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Kelurahan	30.000
						Pelatihan Ekonomi Kreatif	2.390.000
						Pelatihan Kader Posyandu	2.440.000
						Pembinaan Hansip/ Linmas	1.730.000
						Pembinaan LPMK	1.490.000
KECAMATAN KUTOARJO	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen MR dan IEPK	371.900
						Penyusunan Dokumen Perencanaan	4.405.700
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen SPIP	175.000
						Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.565.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyusunan Data Statistik Sektoral	290.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	5.471.697.000
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	4.534.400
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah	540.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Retribusi Daerah	540.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	540.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan/Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.316.500
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan/Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	23.088.600

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik	72.387.000
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan/Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.152.500
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan/Pengadaan Bahan/Material	77.972.100
				7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kec Kutoarjo	912.000
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi	37.346.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis	17.653.100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel Kec Kutoarjo	69.152.000
				7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Kec Kutoarjo	152.903.000
				7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	102.951.750
				7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	194.400.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.971.000
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kec Kutoarjo	385.648.800
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Roda 2	84.320.000
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32.499.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	274.316.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	6.100.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Inovasi Perangkat Daerah	3.589.600
						Fasilitasi KIM	3.200.000
						Fasilitasi Komda Lansia	3.008.000
						Fasilitasi Peningkatan Gizi Masyarakat	3.200.000
						Fasilitasi Posyandu	3.008.000
						Intensifikasi PBB	5.000.000
						Sosialisasi Forum Konsultasi Publik	3.185.600
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyediaan ATK PATEN	998.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang	14.717.600
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Bantuan Gubernur	3.520.000
						Fasilitasi KLA	3.456.000
						Fasilitasi GSIB	3.520.000
						Fasilitasi P2TP2A	3.520.000
						Fasilitasi PKK	28.059.100
						Fasilitasi Porkab	7.881.000
						Fasilitasi Posyantekdes	3.456.000
						Koperasi Desa Merah Putih	14.400.000
						Pameran UMKM	106.332.500

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Monitoring Bencana	11.250.000
						Monitoring Kamtibmas	13.965.600
						Sosialisasi Linmas	5.617.600
						Sosialisasi PKL	5.617.600
				7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi MTQ	4.090.000
						Penilaian MTQ	34.230.400
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forkompimcam	20.718.400
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Desa	3.840.000
						Fasilitasi LKPPD	4.560.000
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Dana Desa	8.800.000
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kades dan Lurah	22.966.400
						Konferensi Sekdes dan Seklur	17.457.600
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pilkades	30.085.800
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi BPD	10.048.000
				7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi RPJMDes	3.380.000
KELURAHAN KUTOARJO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Drainase Kelurahan Kutoarjo	135.000.000
						Pembangunan Rabat Beton Kelurahan Kutoarjo	200.000.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Intensifikasi PBB Kelurahan Kutoarjo	4.580.000
						Musrenbang Kelurahan Kutoarjo	5.830.500
						Pemberian Insentif Kader Posyandu Kelurahan Kutoarjo	36.000.000
						Pemberian Insentif Ketua RT RW Kelurahan Kutoarjo	192.000.000
						Pemberian Makanan Tambahan Kelurahan Kutoarjo	-
						Pembinaan FKK Kelurahan Kutoarjo	-
						Pembinaan Hansip dan Linmas Kelurahan Kutoarjo	-
						Pembinaan LPMK Kelurahan Kutoarjo	1.700.000
						Pembinaan RT RW Kelurahan Kutoarjo	8.840.300
						Pengelolaan Makam Gunung Tuel Kelurahan Kutoarjo	-
						PKK Kelurahan Kutoarjo	18.005.900
KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	PEMBANGUNAN DRAINASE KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	118.258.800
						PEMBANGUNAN RABAT BETON KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	200.000.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	INSENTIF POSYANDU KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	15.000.000
						INSENTIF RT RW KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	51.000.000
						INTENSIFIKASI PBB KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	8.107.700
						LPMK KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	7.741.200
						MUSRENBANG KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	5.654.600
						PKK KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	26.877.200
						POSYANDU KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	7.311.400
						RAPAT RT RW KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN	11.002.200
KELURAHAN BAYEM	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Drainase Kelurahan Bayem	200.000.000
						Pembangunan Rabat Beton Kelurahan Bayem	162.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Insentif Kader Kesehatan Kelurahan Bayem	12.000.000
						Insentif Ketua RT Kelurahan Bayem	30.000.000
						Insentif Ketua RW Kelurahan Bayem	12.000.000
						Intensifikasi PBB Kelurahan Bayem	3.963.500
						Kegiatan LPMK Kelurahan Bayem	3.765.000
						Kegiatan Musrenbang Kelurahan Bayem	4.643.800
						Kegiatan Pembinaan Ketua Rt dan RW Kelurahan Bayem	6.114.000
						Kegiatan PKK Kelurahan Bayem	13.438.700
KELURAHAN KATERBAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Bangunan Pembuang Air Kotor Kelurahan Katerban	164.071.500
						Pembangunan Rabat Beton Kelurahan Katerban Tahun 2027	200.000.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi Intensifikasi PBB	3.840.000
						Fasilitasi Musrenbang Kelurahan Katerban	3.840.000
						Fasilitasi Rapat Ketua RT RW Kelurahan Katerban	15.360.000
						Fasilitasi Rapat LPMK Katerban	1.920.000
						Fasilitasi Rapat PKK Kelurahan Katerban	28.444.400
						Insentif Kader Posyandu Kel. Katerban	24.000.000
						Layanan Insentif RT RW Kelurahan Katerban	105.000.000
KELURAHAN BANDUNG	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Drainase Kelurahan Bandung	200.000.000
						Pembangunan Jalan Rabat Beton Kelurahan Bandung	125.000.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi Keg Ints PBB Kelurahan Bandung	7.640.000
						FASILITASI KEG LPMK KELURAHAN BANDUNG	4.465.000
						Fasilitasi Keg PKK Kelurahan Bandung	21.601.900
						Fasilitasi Kegiatan RT RW Kelurahan Bandung	11.498.700
						Fasilitasi Musrenbang	4.208.400
						Layanan yang diberikan Posyandu Kelurahan Bandung	18.000.000
						Layanan yang diberikan RT Kelurahan Bandung	39.000.000
						Layanan yang diberikan RW Kelurahan Bandung	18.000.000
KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Drainase Kelurahan Semawung Daleman	121.584.800
						Pembangunan Rabat Beton Kelurahan Semawung Daleman	200.000.000
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	FASILITASI KEG RT/RW KEL SEMAWUNG DALEMAN	6.194.000
						FASILITASI KEG. PKK KEL SEMAWUNG DALEMAN	46.472.100
						FASILITASI KEGIATAN INTENSIFIKASI PBB KEL SEMAWUNG DALEMAN	8.359.600
						FASILITASI KEGIATAN LPMK KEL SEM DALEMAN	5.050.000
						FASILITASI KEGIATAN MUSRENBANG KEL SEMAWUNG DALEMAN	6.759.700
						INSENTIF POSYANDU KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN	24.000.000
						INSENTIF RT/RW KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN	87.000.000
KECAMATAN BUTUH	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Mendukung MR, SPIP dan IEPK)	1.000.000
						Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Mendukung MR, SPIP dan IEPK)	1.500.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan konsultasi penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	750.000
						Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	125.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	458

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.040.000
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20.957.957
						Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.002.320
						Belanja Gaji Pokok PNS	1.123.610.718
						Belanja Gaji Pokok PPPK	33.381.063
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.848.524
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	96.054
						Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.601.670
						Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	288.162
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	79.893.894
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.565.630
						Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.062
						Belanja Tunjangan Beras PNS	57.374.440
						Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.027.760
						Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.760.000
						Belanja Tunjangan Jabatan PNS	60.320.000
						Belanja Tunjangan Keluarga PNS	130.444.300
						Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	33.945.377
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	480.976.372
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	16.880.720
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	210.440.239
						Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	8.463.280
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	750.000
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	250.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	250.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	250.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pelaporan Hasil Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	250.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.467.800
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.318.000
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	25.200.000
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.424.800
				7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.332.000
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.144.800
				7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	699.800
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kontribusi Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.500.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pembinaan Pengelolaan Arsip	1.500.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Kursi Lipat	9.210.000
				7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Komputer/Lap Top	8.545.000
						Pengadaan Printer	7.086.000
				7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
				7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Beban tagihan air	2.867.200
						Beban tagihan listrik	11.758.050
						Belanja Jasa Langganan Telepon	373.250

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	1.210.000
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	154.000
						Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	154.000
						Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional	104.000
						Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	96.000
						Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasiona	1.210.000
						Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	13.200.000
						Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	10.008.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	15.810.000
				7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	(blank)	
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri	21.243.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.220.000
				7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	belanja cetak	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan kepada masyarakat	250.000
						Koordinasi Internal kegiatan pelayanan kepada masyarakat	416.000
						Rakor Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	804.000
				7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM)	2.525.000
						Monev bidang kesehatan	375.000
						Penyelenggaraan Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM)	5.335.800
						Monev bidang pekerjaan umum	250.000
						Monev bidang pendidikan	250.000
						Monev bidang sosial	250.000
						Musrenbang Tematik Stunting di Kecamatan	6.113.900
						Pelatihan Kontingen PORKAB	3.680.000
						Pengiriman Atlet Kontingen PORKAB	800.000
						Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	800.000
				7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Koordinasi, konsultasi, monitoring/evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	135.000
						Rapat Koordinasi Peningkatan Efektifitas Pelayanan Kepada Masyarakat	800.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Rapat Koordinasi Peningkatan Inovasi Kecamatan	800.000
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Monitoring PBB	125.000
						Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Pembinaan/Evaluasi penarikan setoran/tunggakan PBB-P2	875.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi/Pembinaan/ Monitoring/ Pendampingan Musrenbang Desa	750.000
						Musrenbang RKPD di Kecamatan	9.718.400
						Rapat Koordinasi Musrenbang RKPD	2.681.100
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.200.000
						Fasilitasi/Pembinaan Kegiatan PKK	25.105.000
						Fasilitasi Fasilitasi Kegiatan Program Kecamatan Berdaya	3.450.000
						Fasilitasi Kegiatan BUMDesa/BUMDesma	3.825.000
						Fasilitasi Kegiatan UMKM	6.770.000
						Koordinasi satgas Koperasi Desa Merah Putih Tingkat Kecamatan	7.650.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pembinaan, Koordinasi, konsultasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Wilyah Kecamatan	620.000
						Rapat koordinasi/sosialisasi/pembinaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Wilyah Kecamatan	1.600.000
				7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Monitoring pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	500.000
						Rapat Koordinasi Penyelenggaraan FASI, FKUB, Penyelenggaraan Hari Besar dan Hari Raya	2.620.000
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi, konsultasi, pembinaan, sosialisasi, monitoring/pematauan, dan evaluasi/pelaporan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	500.000
						Rapat Koordinasi/sosialisasi/pembinaan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	725.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahananan Nasional	3.570.000
				7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	(blank)	
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi, konsultasi, pemantauan/monitoring, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penyelesaian permasalahan di Wilayah Kecamatan	-
						Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	16.505.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.196.000
						Persiapan Pelaksanaan Penyusunan Perdes dan Perkades	17.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.503.000
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes)	2.624.000
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	2.750.000
						Persiapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes)	44.000
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kepala Desa	24.512.000
						Konferensi Sekretaris Desa	12.168.000
						Konferensi Perangkat Desa	720.000
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rapat Koordinasi Tim Fasilitasi Pilkades	6.400.000
						Monitoring Pelaksanaan Pilkades	2.250.000
						Pembekalan Bakal Calon	10.240.000
						Pembentukan Tim Fasilitasi Pilkades	2.598.000
						Santiaji Panitia Pilkades	10.272.000
						Sosialisasi (Kades, BPD, Tokoh Masyarakat)+Tim	10.240.000
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.213.000
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Pengawasan dan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.310.000
				7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	(blank)	
				7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	(blank)	
KECAMATAN PITURUH	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.356.000
						Penyusunan MR, SPIP dan IEPK	384.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	760.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	500.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.648.846.000
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	850.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.000.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	250.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	500.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.710.600
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000
				7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	(blank)	
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	15.571.900
				7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	992.000
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.000.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.500.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	(blank)	
				7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(blank)	
				7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	38.428.500
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.494.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	15.810.000
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya	14.970.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	31.734.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	1.924.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	4.128.800
				7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi PORCAM	5.376.000
						Fasilitasi Stunting	4.087.800
						Monev Stunting	1.000.000
				7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	INOVASI " JEMBATANI " (Jemput bola Pembuatan KTP lansia dan disabilitas integratif	4.328.800
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Monitoring Pembangunan	3.000.000
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Monitoring PBB	7.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Kecamatan	10.401.400
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	BANK SAMPAH	4.463.800
						BUMDES	4.163.800
						INOVASI "SEKAR DIGITAL" (Pemasaran UMKM Digital berdaya saing)	3.288.800
						Karang Taruna	7.077.600
						KLA	3.928.800
						KUBE	-
						PKK	27.991.100
						SATGAS KDMP TINGKAT KECAMATAN	19.200.000
						TTG	-
						UMKM	8.756.900
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Linmas	2.020.300
						Monitoring Bencana	500.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi FKUB	368.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Fasilitasi Karnaval	2.560.000
						Fasilitasi Paskibraka	2.880.000
						Penyelenggaraan Hari Jadi	2.560.000
						Penyelenggaraan HUT RI	434.500
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	17.230.200
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.978.800
				7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	375.000
						Fasilitasi Pembinaan Administrasi Desa	4.016.300
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi APBDes, DD dan ADD	4.142.600
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Konferensi Kepala Desa	18.577.700
						Fasilitasi Konferensi Sekdes	18.577.700
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	34.537.600
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pembinaan BPD	4.333.800
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	1.875.000
KECAMATAN KEMIRI	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Mendukung SPIP, MR dan IEPK)	3.840.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.560.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	250.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.952.030.356
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.920.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	125.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.809.500
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.566.500
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.400.000
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.096.800
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	7.954.400
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.665.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	750.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.959.720

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.004.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.540.000
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.990.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.938.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	610.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	2.000.000
				7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Bidang Pekerjaan umum : Pamsimas, Monev pembangunan	1.230.000
						Fasilitasi Kesehatan : Posyandu, Posbindu, monev ODF, monev stunting/TPPS, PMI	1.530.000
						Fasilitasi Sosial : PKH, poskesos, permakanan	960.000
						Pendidikan : ATS, kelompok belajar, kejar paket, re-grouping sekolah, sekolah lansia, PORCAM, grup kesenian	1.280.000
				7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	3.000.000
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Monitoring PBB	1.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Fasilitasi Musrenbang Kecamatan	3.565.000
						Monitoring Musrenbang Desa	875.000
						Pra Musrenbang Stunting	2.560.000
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Bidang PMD dan Inovasi Kecamatan	15.520.000
						Fasilitasi KDMP dan Satgas MBG	15.360.000
						Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan	13.760.000
						Fasilitasi PKK (Mendukung PUG)	15.360.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Bencana Alam	1.408.000
						Fasilitasi KST (Kader Siaga Trantib)	1.280.000
						Fasilitasi Linmas	960.000
						Fasilitasi PKL	1.280.000
				7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi FASI	1.280.000
						Fasilitasi FKUB	1.280.000
						Fasilitasi Hari Raya dan Hari Besar	960.000
						Fasilitasi MTQ	1.408.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Fasilitasi Hari Jadi	1.600.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Fasilitasi Karnaval	1.920.000
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	13.840.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan RKPDes , APBDes	2.560.000
				7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pembinaan Administrasi Desa	1.400.000
						Fasilitasi Penyusunan LKPPD	1.600.000
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan DD dan ADD	7.000.000
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Konferensi Dinas Kepala Desa dan Sekretaris Desa	20.000.000
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades	42.000.000
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Mendukung PUG)	5.000.000
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.000.000
				7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi RKPDEs	1.720.000
						Fasilitasi RPJMDes	1.280.000
				7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	(blank)	
KECAMATAN BRUNO	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan (mendukung SPIP, MR, IEPK)	3.750.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.620.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	500.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.006.573.222
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.125.000
						Pelaporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	250.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.500.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	750.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	875.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.332.900
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.475.200
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.084.400
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.002.500
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	7.795.400
				7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.920.000
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15.900.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis (Mendukung Inovasi JUMILAH)	2.688.100

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.568.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.687.070
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.360.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.350.000
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.490.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	38.024.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.190.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Monev kegiatan pelayanan kepada masyarakat	1.125.000
						Pelaporan Perencanaan Kegiatan Pelayanan	111.300
						Persiapan Perencanaan Kegiatan Pelayanan	463.600
						Rakor Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	2.240.000
				7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Kegiatan Pendidikan Tingkat Kecamatan	3.140.000
						Fasilitasi Kegiatan Sosial Kecamatan	1.920.000
						Fasilitasi Koordinasi Kegiatan Kesehatan Tingkat Kecamatan	1.585.000
						Fasilitasi Penanganan Stunting	1.585.000
						Forum Komunikasi Kecamatan Sehat	3.200.000
						Forum Konsultasi Publik	3.520.000
						Pelaporan Kegiatan Pelayanan	216.000
						Persiapan Kegiatan Pelayanan	1.972.300
				7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Kecamatan	3.015.500
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Fasilitasi PBB	3.155.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Monitoring Musrenbang Tingkat Desa	2.250.000
						Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (mendukung PUG)	5.847.600
						Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	960.000
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Bantuan Gubernur (Bangub)	1.390.000
						Fasilitasi Olahraga	6.195.000
						Fasilitasi OVOP	1.140.000
						Fasilitasi P2TP2A	560.000
						Fasilitasi PKK (Mendukung PUG)	18.199.100
						Fasilitasi Teknologi Tepat Guna	1.265.000
						Fasilitasi UMKM dan UMKM Expo	5.875.000
						Fasiltasi KPMD	640.000
						Koordinasi Satgas Koperasi Desa Merah Putih	3.170.000
						Pelaporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	483.000
						Pembinaan BUMDES	2.440.000
						Penanggulangan Kemiskinan	1.515.000
						Persiapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	4.053.900

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Penanggulangan Bencana	5.367.000
						Fasilitasi Pengamanan Keramaian	1.345.000
						Fasilitasi Pengamanan Pilkades	2.050.000
						Pelaporan Kegiatan	353.000
				7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	4.590.000
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Fasilitasi Penegakan Perda	864.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	2.000.000
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12.814.600
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.496.000
				7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.223.800
						Fasilitasi Penyusunan LPPD dan LKPD	960.000
						Pembinaan Administrasi Desa	2.835.000
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi DD/ADD (Mendukung Inovasi GERTAK)	6.055.000
						Fasilitasi Siskeudes	3.600.000
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.600.000
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18.495.000
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	2.000.000
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.345.000
KECAMATAN GEBANG	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, MR, IEPK, SPIP	3.380.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.340.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Koordinasi Penyusunan Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	5.120.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.424.365.226
						Penyediaan Tambahan Pengahasilan ASN	658.678.774
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan	1.940.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan BMD	1.149.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pengelolaan Retribusi Daerah	1.210.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.210.000
				7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.210.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.786.000
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.743.600
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Minum Harian Pegawai	26.880.000
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.400.000
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	20.608.400
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.858.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	960.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	4.036.000
				7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.638.000
				7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.093.000
				7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Alat Pendingin	30.612.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.338.000
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Outsourching	80.964.000
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.544.000
						PPPK Paruh Waktu	18.272.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Perorangan	21.080.000
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.640.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor	29.384.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	6.100.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi PORCAM	1.920.000
						Monev PBB	2.345.000
						Monev Stunting	3.840.000
						Pelayanan Masyarakat	3.840.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Kecamatan	15.215.000
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Inovasi Pemberdayaan UMKM	5.760.000
						Koordinasi Karang Taruna	3.840.000
						Rakor KDMP	5.760.000
						Rapat Tim Penggerak PKK	19.520.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	4.950.000
						Koordinasi Kebencanaan	4.950.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Paskibra	4.800.000
				7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.840.000
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forkompimcam	17.680.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	Penyusunan Perdes Perkades	3.712.000
				7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kearsipan Desa	5.568.000
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi penerapan dan penggunaan Siskeudes	5.568.000
						Fasilitasi pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	17.068.000
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Konferensi Kepala Desa/Kelurahan	11.520.000
						Konferensi Sekretaris Desa/Kelurahan	7.680.000
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pilkades	23.981.000
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	3.712.000
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.521.000
KELURAHAN LUGOSOBO	KECAMATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Drainase RT 002 RW 002 (DAU MS)	58.001.600
						Pembangunan Drainase RT 003 RW 001 (DAU MS)	26.008.450
						Pembangunan Rabat Beton RT 001 RW 005	36.548.050
						Pembangunan Rabat Beton RT 002 RW 002 (DAU MS)	22.084.800
						Pembangunan Rabat Beton RT 003 RW 004 (DAU MS)	93.905.150
						Pembangunan Rabat Beton RW 003	63.451.950
				7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	138.520.000
KECAMATAN LOANO	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rakor dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-
						Rakor Dokumen Perencanaan PD: Renja, Perubahan Renja, RKT, RKT Perubahan, PK, PK Perubahan, RKO, RKO Perubahan, KAK, KAK Perubahan, ASB, ASB Perubahan, RUP (Rencana Umum Pengadaan) , RUP Perubahan, Renstra Perubahan	3.285.000
						Rakor Penyusunan Dokumen RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan	450.000
						Rapat Koordinasi dan Penyusunan MR	670.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rakor dan Penyusunan SPIP	420.000
						Rakor dan Penyusunan SPIP, IEPK	375.000
						Rakor Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Laporan Data Dasar Pembangunan, LKPJ, LKJiP	500.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	250.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.120.910.206
						Penyediaan Tambahan Penghasilan ASN	433.106.794
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rakor Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (CaLK,LRA,Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Keuangan Akhir Tahun)	800.000
						Rakor Penyusunan Laporan Pajak, Laporan Keuangan (SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran, SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan) termasuk Register Penutupan Kas dan BA Pemeriksaan Kas	1.700.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekon Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	350.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rekon Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	250.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.836.000
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.790.000
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Penyediaan Minum Harian Pegawai	8.064.000
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.986.000
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Pengadaan Penyediaan ATK	7.000.000
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rakor dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	3.930.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip	2.000.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Laptop	-
						Pengadaan Mebel	-
						Pengadaan Printer	-
						Pengadaan Proyektor	8.903.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.292.000
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.508.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.760.000
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Laptop/ PC Unit	2.920.000
						Pemeliharaan Printer	2.760.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.855.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.220.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	(blank)	
				7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasilitasi Grup Kesenian	3.000.000
						Fasilitasi Kelompok Disabilitas	5.000.000
						Fasilitasi Porcam/ Porkab	4.000.000
						Koordinasi Stunting	5.000.000
						Pembinaan Linmas	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rakor Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat	3.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Monev Pembangunan	-
						Posyandu	3.000.000
				7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	978.100
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Monitoring PBB (Inovasi RRT Menuju PBB Lunas)	3.000.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Kecamatan	8.115.000
						Sosialisasi Pelaksanaan Musrenbang Desa	2.510.000
				7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	-
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Bidang Produk Unggulan (OVOP)	-
						Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan UMKM	3.700.000
						Pelaksanaan KLA dan GSIB	3.000.000
						Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Bumdes/ Bumdesma/ Kopdes	10.150.000
						Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi Lomba Kampung Cantik/ Proklim	3.000.000
						Pelaksanaan Pembinaan Karang Taruna di Tingkat Kecamatan	3.250.000
						Pelaksanaan Rakor dan Fasilitasi Kegiatan PKK	20.000.000
						Penyusunan Profil Desa	3.500.000
						Rakor Kecamatan Berdaya	5.000.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Monitoring Bencana Alam	7.000.000
						Sosialisasi Bhabinkamtibmas	-
				7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Penyelenggaraan Lomba MTQ/ LPTQ	5.175.000
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Sosialisasi Penegakan Perda	-
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan Hari Jadi dan HUT RI	10.067.000
				7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	3.125.000
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.048.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	3.000.000
				7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan Administrasi Desa	5.000.000
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi dan Rekomendasi DD/ADD	5.000.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Fasilitasi Penyusunan APBDesa	3.700.000
						Fasilitasi Siskeudes	-
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Konferensi Kepala Desa dan Sekretaris Desa	19.495.000
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pilkades 15 Desa	18.400.000
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Pembinaan BPD	4.200.000
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Seleksi Perangkat Desa	-
				7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Fasilitasi Penyusunan RKPDes	6.100.000
						Fasilitasi Penyusunan RPJMDes	-
				7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-
KECAMATAN BENER	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Renja 2027 Kecamatan Bener	2.304.000
						Penyusunan Dokumen Perencanaan (mendukung MR, SPIP dan IEPK)	132.000
				7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	"Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : Laporan Bulanan (Fisik, Keuangan, Program), Laporan Triwulanan, Dokumen LKJIP, Dokumen LKPJ, Dokumen LPPD, Laporan SPIP, Laporan SKM"	1.254.000
				7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan data statistik sektoral	760.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1.627.860.000
				7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan rekonsiliasi gaji, Laporan keuangan bulanan (fungsional), Laporan keuangan bulanan (LRA), Laporan keuangan semesteran, Laporan akhir tahun (CaLK; LRA; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Penjabaran APB	6.000.000
						Penyusunan SK tim kegiatan	472.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : Penyusunan Laporan RKBMD Murn, Laporan RKBMD Perubahan, Laporan RKPBMD Murni , Laporan RKPBMD Perubahan, Laporan Semesteran, Laporan Pemanfaatan Aset, Laporan Triwulanan	760.000
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	"Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah : Data retribusi dan wajib retribusi, Data potensi retribusi murn, Data potensi retribusi perubahan, Data laporan realisasi bulanan, Data piutang"	600.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Koordinasi Pelaksanaan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian: DUK, Nominatif Pegawai, Rekap Kehadiran, Dokumen Realisasi Pengembangan Kompetensi, Laporan Realisasi Disiplin Pegawai	1.330.500
				7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(blank)	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan/pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa alat listrik	1.326.900
				7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan/pengadaan Peralatan Rumah Tangga berupa peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.676.300
				7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor berupa minum harian pegawai Kecamatan	14.137.200
				7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.615.000
				7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.796.000
				7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material berupa Alat tulis kantor	6.865.500
				7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu berupa penyediaan snack tamu	1.200.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.078.000
				7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD berupa penyediaan ATK Arsip	1.231.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Laptop 3 unit	20.000.000
				7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(blank)	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kecamatan Bener	36.236.400
				7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	"Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (P3K Paruh waktu, tenaga outsorcing keamanan)"	79.719.600
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (1 unit)	38.220.000
				7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 10 unit	10.540.000
				7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (komputer, laptop dan printer) pada SKPD	5.110.000
				7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya : Rehab ruang arsip dan kamar mandi Kecamatan Bener	31.659.000
				7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (AC) pada SKPD	4.880.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Fasiklitasi ATS	960.000
						Inovasi Dolan Deso Tematik Stunting Kolaborasi dengan Puskesmas dan Penyuluh KB	3.220.000
						Monitoring PBB	3.120.000
						Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting (Pra Musrenbang Stunting)	1.556.000
						Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi Pekan Olah Raga di Tingkat Kecamatan	6.144.000
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	760.000
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Forum Musrenbang Perencanaan di Kecamatan dengan keterlibatan Kepala Desa, PKK, BPD, Karang Taruna, Disabilitas (PUG)	146.500
						Pelaksanaan Forum Musrenbang Perencanaan di Kecamatan dengan keterlibatan Kepala Desa, PKK, BPD, Karangtaruna, Disabilitas	14.564.500
				7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Satgas KDMP	11.520.000
						Inovasi Pelita Pentas Bener	2.880.000
						Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan UMKM	3.840.000
						Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Disabilitas	960.000
						Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi GSIB	3.200.000
						Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi KLA	2.240.000
						Pelaksanaan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Bumdes/ Bumdesma/ Kopdes	2.980.000
						Pelaksanaan Rakor dan Fasilitasi kegiatan PKK	23.808.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
						Pelaksanaan Rakor dan Fasilitasi Kegiatan PKK (PUG)	104.000
						Penanggulangan Kemiskinan	3.200.000
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Monitoring Kebencanaan	5.060.000
						Pelatihan Linmas	5.380.000
						Pelatihan Mitigasi Bencana	5.060.000
						Sosialisasi Kamtibmas	5.440.000
				7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Penyelenggaraan Hari Besar dan Hari Raya	8.320.000
						Penyelenggaraan Lomba MTQ/ LPTQ	12.540.000
						Penyelenggaraan PKUB	3.200.000
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Penyelenggaraan HUT RI, Hari Jadi, Karnaval	5.000.000
				7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (4 kali)	22.100.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.800.000
				7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, meliputi Siskeudes, DD, ADD, RKPDesa/RAPBDesa/ APBDesa	7.745.000
				7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Konferensi Kepala Desa dan Konferensi Sekretaris Desa	29.350.000
				7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (23 desa)	24.800.000
				7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Rakor Badan Permusyawaratan Desa	7.500.000
				7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Fasilitasi Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.590.000
				7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	(blank)	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelenggaran Forum OPD	10.745.400
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.012.500
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, MR, SPIP, dan IEPK	8.135.300
				8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.430.000
				8.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyusunan Data Statistik Sektoral	5.160.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN	2.192.708.381
				8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan	2.035.000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Penatausahaan BMD	1.210.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.241.600
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik	3.600.000

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	3.191.700
				8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	23.377.200
				8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.194.000
				8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Pengadaan Bahan / Material	6.182.600
				8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.600.000
				8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.628.000
				8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis	2.130.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.600.000
				8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.080.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan	43.960.000
				8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	59.300.000
				8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.480.000
				8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	67.900.000
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dialog Forum Pembauran Kebangsaan	15.979.800
						Dialog Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	15.979.800
						Pendidikan Bela Negara	420.168.400
				8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Koordinasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, dan Karakter Bangsa	15.821.400
						Pemancangan Bambu Runcing Di Makam Pejuang	19.118.600
						Rakor Forum Pembauran Kebangsaan	27.060.000
				8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Koordinasi Pembentukan Paskibraka	35.987.300
						Studi Lintas Nusa Paskibraka	150.896.000
						Pelaksanaan Tugas Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni	106.056.100
						Pelaksanaan Tugas Upacara HUT RI 17 Agustus	66.929.100
						Pemusatan Pendidikan Dan Pelatihan Paskibraka	271.717.700
						Pengukuhan Paskibraka	66.954.600
						Recruitment Dan Seleksi Paskibraka	132.107.200
						Studi Kepemimpinan Paskibraka	104.280.000
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	210.572.500
						Penyaluran Hibah Bantuan Keuangan Parpol	1.585.127.500

PERANGKAT DAERAH/ SUB UNIT	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	PAGU (Rp)
				8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Bimtek Pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol	23.979.800
						Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Dan Pemantauan Situasi Politik Daerah	39.820.200
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dialog Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	73.009.400
						Pendampingan Dan Pengendalian Dana Hibah Ormas	100.000.000
						Penyaluran Hibah Ormas	1.848.999.600
				8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Koordinasi Pemberdayaan Dan Pengawasan Ormas	34.086.000
						Koordinasi Pengendalian Dana Hibah Ormas	30.914.000
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dialog Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	29.141.200
						Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan	262.682.000
						Sosialisasi Pencegahan Peredaran Narkoba	67.554.800
				8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kerpercayaan	14.822.000
						Koordinasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	4.340.000
						Koordinasi Pencegahan Peredaran Narkoba	46.438.000
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Dialog Kewaspadaan Dini Masyarakat	85.109.200
						Kerja Sama Intelijen Daerah	60.108.000
						Koordinasi Kewaspadaan Dini	131.299.000
						Koordinasi Penanganan Konflik di Daerah	95.923.800
						Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing (TKA), dan Lembaga Asing	2.560.000
				8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Forkompimda Kabupaten	600.000.000

Berikut ini merupakan daftar nama calon penerima, alamat, dan besaran alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum dan khusus serta perangkat daerah pemberi bantuan keuangan tahun anggaran 2027.

1). UMUM

PERTIMBANGAN TAPD TENTANG DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5

2). KHUSUS

PERTIMBANGAN TAPD TENTANG DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH				
SUB KEGIATAN 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
A	**Dana Desa**			
1	0001 - DANA DESA - DESA HARJOBINANGUN	DESA HARJOBINANGUN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	293.563.000,00	DPPPAPMD
2	0002 - DANA DESA - DESA PATUTREJO	DESA PATUTREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	286.880.000,00	DPPPAPMD
3	0003 - DANA DESA - DESA KETAWANGREJO	DESA KETAWANGREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	348.906.000,00	DPPPAPMD
4	0004 - DANA DESA - DESA MUNGGANGSARI	DESA MUNGGANGSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	285.568.000,00	DPPPAPMD
5	0005 - DANA DESA - DESA KERTOJAYAN	DESA KERTOJAYAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	260.128.000,00	DPPPAPMD
6	0006 - DANA DESA - DESA PASARANOM	DESA PASARANOM, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	302.559.000,00	DPPPAPMD
7	0007 - DANA DESA - DESA UKIRSARI	DESA UKIRSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	277.330.000,00	DPPPAPMD
8	0008 - DANA DESA - DESA NAMBANGAN	DESA NAMBANGAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	323.824.000,00	DPPPAPMD
9	0009 - DANA DESA - DESA SUMBERAGUNG	DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	339.534.000,00	DPPPAPMD
10	0010 - DANA DESA - DESA BENDUNGAN	DESA BENDUNGAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	260.376.000,00	DPPPAPMD
11	0011 - DANA DESA - DESA ROWODADI	DESA ROWODADI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	250.899.000,00	DPPPAPMD
12	0012 - DANA DESA - DESA BAKUREJO	DESA BAKUREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	296.264.000,00	DPPPAPMD
13	0013 - DANA DESA - DESA DUDUWETAN	DESA DUDUWETAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	244.440.000,00	DPPPAPMD
14	0014 - DANA DESA - DESA DUDUKULON	DESA DUDUKULON, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	248.234.000,00	DPPPAPMD
15	0015 - DANA DESA - DESA REJOSARI	DESA REJOSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	286.802.000,00	DPPPAPMD
16	0016 - DANA DESA - DESA TRIMULYO	DESA TRIMULYO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	254.222.000,00	DPPPAPMD
17	0017 - DANA DESA - DESA TULUSREJO	DESA TULUSREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	241.600.000,00	DPPPAPMD
18	0018 - DANA DESA - DESA TEGALREJO	DESA TEGALREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	253.605.000,00	DPPPAPMD
19	0019 - DANA DESA - DESA KALIREJO	DESA KALIREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	341.191.000,00	DPPPAPMD
20	0020 - DANA DESA - DESA WONOENGGAL	DESA WONOENGGAL, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	243.747.000,00	DPPPAPMD
21	0021 - DANA DESA - DESA BANYUYOSO	DESA BANYUYOSO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	245.172.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
22	0022 - DANA DESA - DESA GRABAG	DESA GRABAG, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	313.247.000,00	DPPPAPMD
23	0023 - DANA DESA - DESA AGLIK	DESA AGLIK, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	283.455.000,00	DPPPAPMD
24	0024 - DANA DESA - DESA ROWOREJO	DESA ROWOREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	257.849.000,00	DPPPAPMD
25	0025 - DANA DESA - DESA TUNGGULREJO	DESA TUNGGULREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	251.318.000,00	DPPPAPMD
26	0026 - DANA DESA - DESA KEDUNGKAMAL	DESA KEDUNGKAMAL, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	348.908.000,00	DPPPAPMD
27	0027 - DANA DESA - DESA SANGUBANYU	DESA SANGUBANYU, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	269.037.000,00	DPPPAPMD
28	0028 - DANA DESA - DESA DUKUHDUNGUS	DESA DUKUHDUNGUS, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	264.420.000,00	DPPPAPMD
29	0029 - DANA DESA - DESA TLEPOKWETAN	DESA TLEPOKWETAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	250.825.000,00	DPPPAPMD
30	0030 - DANA DESA - DESA TLEPOKKULON	DESA TLEPOKKULON, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	245.413.000,00	DPPPAPMD
31	0031 - DANA DESA - DESA KUMPULREJO	DESA KUMPULREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	253.759.000,00	DPPPAPMD
32	0032 - DANA DESA - DESA KESE	DESA KESE, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	246.975.000,00	DPPPAPMD
33	0033 - DANA DESA - DESA NGENTAK	DESA NGENTAK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	250.467.000,00	DPPPAPMD
34	0034 - DANA DESA - DESA GIRIREJO	DESA GIRIREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.473.000,00	DPPPAPMD
35	0035 - DANA DESA - DESA WERO	DESA WERO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	244.727.000,00	DPPPAPMD
36	0036 - DANA DESA - DESA PAGAK	DESA PAGAK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	251.180.000,00	DPPPAPMD
37	0037 - DANA DESA - DESA MALANG	DESA MALANG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	253.299.000,00	DPPPAPMD
38	0038 - DANA DESA - DESA DEPOKREJO	DESA DEPOKREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	245.670.000,00	DPPPAPMD
39	0039 - DANA DESA - DESA KEBURUHAN	DESA KEBURUHAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	250.521.000,00	DPPPAPMD
40	0040 - DANA DESA - DESA AWU-AWU	DESA AWU-AWU, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	255.500.000,00	DPPPAPMD
41	0041 - DANA DESA - DESA KUMPULSARI	DESA KUMPULSARI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	251.671.000,00	DPPPAPMD
42	0042 - DANA DESA - DESA KESIDAN	DESA KESIDAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	251.887.000,00	DPPPAPMD
43	0043 - DANA DESA - DESA WONOROTO	DESA WONOROTO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	229.682.000,00	DPPPAPMD
44	0044 - DANA DESA - DESA PEJAGRAN	DESA PEJAGRAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	238.894.000,00	DPPPAPMD
45	0045 - DANA DESA - DESA WONOSARI	DESA WONOSARI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	293.371.000,00	DPPPAPMD
46	0046 - DANA DESA - DESA WONOSRI	DESA WONOSRI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	264.725.000,00	DPPPAPMD
47	0047 - DANA DESA - DESA JERUKEN	DESA JERUKEN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	217.148.000,00	DPPPAPMD
48	0048 - DANA DESA - DESA TANJUNGREJO	DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	218.024.000,00	DPPPAPMD
49	0049 - DANA DESA - DESA KALITANJUNG	DESA KALITANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	219.122.000,00	DPPPAPMD
50	0050 - DANA DESA - DESA KUWUKAN	DESA KUWUKAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	219.936.000,00	DPPPAPMD
51	0051 - DANA DESA - DESA KEDONDONG	DESA KEDONDONG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	212.524.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
52	0052 - DANA DESA - DESA RASUKAN	DESA RASUKAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.560.000,00	DPPPAPMD
53	0053 - DANA DESA - DESA LABAN	DESA LABAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	311.361.000,00	DPPPAPMD
54	0054 - DANA DESA - DESA WASIAT	DESA WASIAT, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	251.393.000,00	DPPPAPMD
55	0055 - DANA DESA - DESA TUNJUNGAN	DESA TUNJUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	242.415.000,00	DPPPAPMD
56	0056 - DANA DESA - DESA RINGGIT	DESA RINGGIT, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	246.932.000,00	DPPPAPMD
57	0057 - DANA DESA - DESA KALIWUNGUKIDUL	DESA KALIWUNGUKIDUL, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	218.631.000,00	DPPPAPMD
58	0058 - DANA DESA - DESA KALIWUNGULOR	DESA KALIWUNGULOR, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	242.682.000,00	DPPPAPMD
59	0059 - DANA DESA - DESA COKROYASAN	DESA COKROYASAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	258.997.000,00	DPPPAPMD
60	0060 - DANA DESA - DESA BOJONG	DESA BOJONG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	225.150.000,00	DPPPAPMD
61	0061 - DANA DESA - DESA KARANGTALUN	DESA KARANGTALUN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	244.429.000,00	DPPPAPMD
62	0062 - DANA DESA - DESA SUSUK	DESA SUSUK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	237.386.000,00	DPPPAPMD
63	0063 - DANA DESA - DESA KLANDARAN	DESA KLANDARAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	218.835.000,00	DPPPAPMD
64	0064 - DANA DESA - DESA BRIYAN	DESA BRIYAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	217.796.000,00	DPPPAPMD
65	0065 - DANA DESA - DESA NGOMBOL	DESA NGOMBOL, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	226.479.000,00	DPPPAPMD
66	0066 - DANA DESA - DESA JOSO	DESA JOSO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	239.482.000,00	DPPPAPMD
67	0067 - DANA DESA - DESA CANDI	DESA CANDI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	244.583.000,00	DPPPAPMD
68	0068 - DANA DESA - DESA PULUTAN	DESA PULUTAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	305.550.000,00	DPPPAPMD
69	0069 - DANA DESA - DESA WALIKORO	DESA WALIKORO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.246.000,00	DPPPAPMD
70	0070 - DANA DESA - DESA SRUWOH	DESA SRUWOH, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	223.334.000,00	DPPPAPMD
71	0071 - DANA DESA - DESA WONOBOYO	DESA WONOBOYO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	245.493.000,00	DPPPAPMD
72	0072 - DANA DESA - DESA KEMBANGKUNING	DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	202.501.000,00	DPPPAPMD
73	0073 - DANA DESA - DESA JOMBANG	DESA JOMBANG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	242.745.000,00	DPPPAPMD
74	0074 - DANA DESA - DESA MENDIRO	DESA MENDIRO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.209.000,00	DPPPAPMD
75	0075 - DANA DESA - DESA WUNUT	DESA WUNUT, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	235.916.000,00	DPPPAPMD
76	0076 - DANA DESA - DESA SUMBERREJO	DESA SUMBERREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	345.016.000,00	DPPPAPMD
77	0077 - DANA DESA - DESA WINGKOSIGROMULYO	DESA WINGKOSIGROMULYO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	301.090.000,00	DPPPAPMD
78	0078 - DANA DESA - DESA WINGKOHARJO	DESA WINGKOHARJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	209.905.000,00	DPPPAPMD
79	0079 - DANA DESA - DESA SINGKILKULON	DESA SINGKILKULON, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	224.020.000,00	DPPPAPMD
80	0080 - DANA DESA - DESA SINGKILWETAN	DESA SINGKILWETAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	217.266.000,00	DPPPAPMD
81	0081 - DANA DESA - DESA TUMENGGUNGAN	DESA TUMENGGUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	219.606.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
82	0082 - DANA DESA - DESA CURUG	DESA CURUG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	218.040.000,00	DPPPAPMD
83	0083 - DANA DESA - DESA WINGKOSANGGRAHAN	DESA WINGKOSANGGRAHAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	244.744.000,00	DPPPAPMD
84	0084 - DANA DESA - DESA WINGKOMULYO	DESA WINGKOMULYO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	297.465.000,00	DPPPAPMD
85	0085 - DANA DESA - DESA WINGKOTINUMPUK	DESA WINGKOTINUMPUK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	238.693.000,00	DPPPAPMD
86	0086 - DANA DESA - DESA PIYONO	DESA PIYONO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	237.540.000,00	DPPPAPMD
87	0087 - DANA DESA - DESA TANJUNG	DESA TANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	253.421.000,00	DPPPAPMD
88	0088 - DANA DESA - DESA SECANG	DESA SECANG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	242.287.000,00	DPPPAPMD
89	0089 - DANA DESA - DESA SEBOROPASAR	DESA SEBOROPASAR, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	336.996.000,00	DPPPAPMD
90	0090 - DANA DESA - DESA JATIMALANG	DESA JATIMALANG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	286.587.000,00	DPPPAPMD
91	0091 - DANA DESA - DESA JATIKONTAL	DESA JATIKONTAL, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	251.520.000,00	DPPPAPMD
92	0092 - DANA DESA - DESA GEDANGAN	DESA GEDANGAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	244.227.000,00	DPPPAPMD
93	0093 - DANA DESA - DESA KARANGANYAR	DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	246.322.000,00	DPPPAPMD
94	0094 - DANA DESA - DESA JOGOBOYO	DESA JOGOBOYO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	366.915.000,00	DPPPAPMD
95	0095 - DANA DESA - DESA WATUKURO	DESA WATUKURO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	217.781.000,00	DPPPAPMD
96	0096 - DANA DESA - DESA KARANGSARI	DESA KARANGSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	347.377.000,00	DPPPAPMD
97	0097 - DANA DESA - DESA BANJARSARI	DESA BANJARSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	338.123.000,00	DPPPAPMD
98	0098 - DANA DESA - DESA KEBONSARI	DESA KEBONSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	330.839.000,00	DPPPAPMD
99	0099 - DANA DESA - DESA SIDOHARJO	DESA SIDOHARJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	335.507.000,00	DPPPAPMD
100	0100 - DANA DESA - DESA JOGORESAN	DESA JOGORESAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	287.235.000,00	DPPPAPMD
101	0101 - DANA DESA - DESA GEPARANG	DESA GEPARANG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	361.821.000,00	DPPPAPMD
102	0102 - DANA DESA - DESA NAMPUREJO	DESA NAMPUREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	336.694.000,00	DPPPAPMD
103	0103 - DANA DESA - DESA KENTENGREJO	DESA KENTENGREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	241.359.000,00	DPPPAPMD
104	0104 - DANA DESA - DESA NAMPU	DESA NAMPU, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	216.635.000,00	DPPPAPMD
105	0105 - DANA DESA - DESA GESING	DESA GESING, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	216.231.000,00	DPPPAPMD
106	0106 - DANA DESA - DESA KEPONGGOK	DESA KEPONGGOK, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	251.707.000,00	DPPPAPMD
107	0107 - DANA DESA - DESA BUBUTAN	DESA BUBUTAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	239.293.000,00	DPPPAPMD
108	0108 - DANA DESA - DESA TEGALAREN	DESA TEGALAREN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	314.718.000,00	DPPPAPMD
109	0109 - DANA DESA - DESA SUKOMANAH	DESA SUKOMANAH, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	249.577.000,00	DPPPAPMD
110	0110 - DANA DESA - DESA BLENDUNG	DESA BLENDUNG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	244.845.000,00	DPPPAPMD
111	0111 - DANA DESA - DESA GUYANGAN	DESA GUYANGAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	240.199.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
112	0112 - DANA DESA - DESA BONGKOT	DESA BONGKOT, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	245.867.000,00	DPPPAPMD
113	0113 - DANA DESA - DESA PURWODADI	DESA PURWODADI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	266.061.000,00	DPPPAPMD
114	0114 - DANA DESA - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	243.346.000,00	DPPPAPMD
115	0115 - DANA DESA - DESA PURWOSARI	DESA PURWOSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	361.429.000,00	DPPPAPMD
116	0116 - DANA DESA - DESA JENARWETAN	DESA JENARWETAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	278.566.000,00	DPPPAPMD
117	0117 - DANA DESA - DESA JENARKIDUL	DESA JENARKIDUL, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	245.053.000,00	DPPPAPMD
118	0118 - DANA DESA - DESA JENARLOR	DESA JENARLOR, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	277.652.000,00	DPPPAPMD
119	0119 - DANA DESA - DESA PUNDENSARI	DESA PUNDENSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	255.710.000,00	DPPPAPMD
120	0120 - DANA DESA - DESA KESUGIHAN	DESA KESUGIHAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	337.973.000,00	DPPPAPMD
121	0121 - DANA DESA - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	251.594.000,00	DPPPAPMD
122	0122 - DANA DESA - DESA PLANDI	DESA PLANDI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	248.376.000,00	DPPPAPMD
123	0123 - DANA DESA - DESA BRAGOLAN	DESA BRAGOLAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	360.778.000,00	DPPPAPMD
124	0124 - DANA DESA - DESA KETANGI	DESA KETANGI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	294.060.000,00	DPPPAPMD
125	0125 - DANA DESA - DESA KARANGMULYO	DESA KARANGMULYO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	253.454.000,00	DPPPAPMD
126	0126 - DANA DESA - DESA KEDUREN	DESA KEDUREN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	275.373.000,00	DPPPAPMD
127	0127 - DANA DESA - DESA SUMBEREJO	DESA SUMBEREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	250.204.000,00	DPPPAPMD
128	0128 - DANA DESA - DESA BRONDONGREJO	DESA BRONDONGREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	245.578.000,00	DPPPAPMD
129	0129 - DANA DESA - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	232.371.000,00	DPPPAPMD
130	0130 - DANA DESA - DESA DADIREJO	DESA DADIREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	327.249.000,00	DPPPAPMD
131	0131 - DANA DESA - DESA TLOGOKOTES	DESA TLOGOKOTES, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	340.449.000,00	DPPPAPMD
132	0132 - DANA DESA - DESA BAPANGSARI	DESA BAPANGSARI, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	298.858.000,00	DPPPAPMD
133	0133 - DANA DESA - DESA BUGEL	DESA BUGEL, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	248.060.000,00	DPPPAPMD
134	0134 - DANA DESA - DESA BAGELEN	DESA BAGELEN, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	308.374.000,00	DPPPAPMD
135	0135 - DANA DESA - DESA KRENDETAN	DESA KRENDETAN, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	294.090.000,00	DPPPAPMD
136	0136 - DANA DESA - DESA SOMOREJO	DESA SOMOREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	313.250.000,00	DPPPAPMD
137	0137 - DANA DESA - DESA HARGOROJO	DESA HARGOROJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	275.480.000,00	DPPPAPMD
138	0138 - DANA DESA - DESA DURENSARI	DESA DURENSARI, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	322.936.000,00	DPPPAPMD
139	0139 - DANA DESA - DESA SEMONO	DESA SEMONO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	260.238.000,00	DPPPAPMD
140	0140 - DANA DESA - DESA SOKOAGUNG	DESA SOKOAGUNG, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	321.360.000,00	DPPPAPMD
141	0141 - DANA DESA - DESA KALIREJO	DESA KALIREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	256.170.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
142	0142 - DANA DESA - DESA CLAPAR	DESA CLAPAR, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	339.528.000,00	DPPPAPMD
143	0143 - DANA DESA - DESA SOKO	DESA SOKO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	278.575.000,00	DPPPAPMD
144	0144 - DANA DESA - DESA SEMAGUNG	DESA SEMAGUNG, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	254.876.000,00	DPPPAPMD
145	0145 - DANA DESA - DESA PIJI	DESA PIJI, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	280.625.000,00	DPPPAPMD
146	0146 - DANA DESA - DESA KEMANUKAN	DESA KEMANUKAN, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	367.981.000,00	DPPPAPMD
147	0147 - DANA DESA - DESA JATIREJO	DESA JATIREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	316.817.000,00	DPPPAPMD
148	0148 - DANA DESA - DESA SOMONGARI	DESA SOMONGARI, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	330.544.000,00	DPPPAPMD
149	0149 - DANA DESA - DESA DONOREJO	DESA DONOREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
150	0150 - DANA DESA - DESA HULOSOBO	DESA HULOSOBO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	353.046.000,00	DPPPAPMD
151	0151 - DANA DESA - DESA KALIHARJO	DESA KALIHARJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	284.815.000,00	DPPPAPMD
152	0152 - DANA DESA - DESA KALIGONO	DESA KALIGONO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
153	0153 - DANA DESA - DESA TLOGOGUWO	DESA TLOGOGUWO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
154	0154 - DANA DESA - DESA PANDANREJO	DESA PANDANREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	244.638.000,00	DPPPAPMD
155	0155 - DANA DESA - DESA TAWANGSARI	DESA TAWANGSARI, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	270.822.000,00	DPPPAPMD
156	0156 - DANA DESA - DESA TLOGOBULU	DESA TLOGOBULU, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	255.518.000,00	DPPPAPMD
157	0157 - DANA DESA - DESA PURBOWONO	DESA PURBOWONO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	264.117.000,00	DPPPAPMD
158	0158 - DANA DESA - DESA NGARAN	DESA NGARAN, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	255.278.000,00	DPPPAPMD
159	0159 - DANA DESA - DESA KEDUNGGUBAH	DESA KEDUNGGUBAH, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	353.637.000,00	DPPPAPMD
160	0160 - DANA DESA - DESA JELOK	DESA JELOK, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	259.425.000,00	DPPPAPMD
161	0161 - DANA DESA - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	344.300.000,00	DPPPAPMD
162	0162 - DANA DESA - DESA GUNUNGWANGI	DESA GUNUNGWANGI, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	319.910.000,00	DPPPAPMD
163	0163 - DANA DESA - DESA HARDIMULYO	DESA HARDIMULYO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	276.797.000,00	DPPPAPMD
164	0164 - DANA DESA - DESA SUDOROGO	DESA SUDOROGO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	287.146.000,00	DPPPAPMD
165	0165 - DANA DESA - DESA SUMOWONO	DESA SUMOWONO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	278.821.000,00	DPPPAPMD
166	0166 - DANA DESA - DESA NGADIREJO	DESA NGADIREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	265.358.000,00	DPPPAPMD
167	0167 - DANA DESA - DESA PUCUNGROTO	DESA PUCUNGROTO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	229.740.000,00	DPPPAPMD
168	0168 - DANA DESA - DESA PACEKELAN	DESA PACEKELAN, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	324.568.000,00	DPPPAPMD
169	0169 - DANA DESA - DESA PLIPIR	DESA PLIPIR, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	248.860.000,00	DPPPAPMD
170	0170 - DANA DESA - DESA BRENGGONG	DESA BRENGGONG, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	294.117.000,00	DPPPAPMD
171	0171 - DANA DESA - DESA GANGGENG	DESA GANGGENG, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	286.274.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
172	0172 - DANA DESA - DESA SEMAWUNG	DESA SEMAWUNG, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
173	0173 - DANA DESA - DESA WONOROTO	DESA WONOROTO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	245.000.000,00	DPPPAPMD
174	0174 - DANA DESA - DESA SIDOREJO	DESA SIDOREJO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	291.262.000,00	DPPPAPMD
175	0175 - DANA DESA - DESA WONOTULUS	DESA WONOTULUS, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	251.473.000,00	DPPPAPMD
176	0176 - DANA DESA - DESA SIDOMULYO	DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	349.261.000,00	DPPPAPMD
177	0177 - DANA DESA - DESA SUDIMORO	DESA SUDIMORO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	247.011.000,00	DPPPAPMD
178	0178 - DANA DESA - DESA DONORATI	DESA DONORATI, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	245.455.000,00	DPPPAPMD
179	0179 - DANA DESA - DESA SEBOROKRAPYAK	DESA SEBOROKRAPYAK, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	233.767.000,00	DPPPAPMD
180	0180 - DANA DESA - DESA TRIWARNO	DESA TRIWARNO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	348.762.000,00	DPPPAPMD
181	0181 - DANA DESA - DESA BAJANGREJO	DESA BAJANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	333.741.000,00	DPPPAPMD
182	0182 - DANA DESA - DESA BENCOREJO	DESA BENCOREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	244.769.000,00	DPPPAPMD
183	0183 - DANA DESA - DESA SUROREJO	DESA SUROREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	260.240.000,00	DPPPAPMD
184	0184 - DANA DESA - DESA WANGUNREJO	DESA WANGUNREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	249.228.000,00	DPPPAPMD
185	0185 - DANA DESA - DESA CENGKAWAKREJO	DESA CENGKAWAKREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	288.738.000,00	DPPPAPMD
186	0186 - DANA DESA - DESA POPONGAN	DESA POPONGAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	356.814.000,00	DPPPAPMD
187	0187 - DANA DESA - DESA BOROWETAN	DESA BOROWETAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	278.465.000,00	DPPPAPMD
188	0188 - DANA DESA - DESA TEGALREJO	DESA TEGALREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	343.745.000,00	DPPPAPMD
189	0189 - DANA DESA - DESA BANYUURIP	DESA BANYUURIP, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	266.264.000,00	DPPPAPMD
190	0190 - DANA DESA - DESA MALANGREJO	DESA MALANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	247.748.000,00	DPPPAPMD
191	0191 - DANA DESA - DESA TEGALKUNING	DESA TEGALKUNING, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	244.524.000,00	DPPPAPMD
192	0192 - DANA DESA - DESA KLIWONAN	DESA KLIWONAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	338.432.000,00	DPPPAPMD
193	0193 - DANA DESA - DESA KERTOSONO	DESA KERTOSONO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	254.946.000,00	DPPPAPMD
194	0194 - DANA DESA - DESA TANJUNGANOM	DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	286.264.000,00	DPPPAPMD
195	0195 - DANA DESA - DESA SAWIT	DESA SAWIT, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	250.419.000,00	DPPPAPMD
196	0196 - DANA DESA - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	312.579.000,00	DPPPAPMD
197	0197 - DANA DESA - DESA PAKISREJO	DESA PAKISREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	244.859.000,00	DPPPAPMD
198	0198 - DANA DESA - DESA CANDINGASINAN	DESA CANDINGASINAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
199	0199 - DANA DESA - DESA SOKOWATEN	DESA SOKOWATEN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	248.995.000,00	DPPPAPMD
200	0200 - DANA DESA - DESA GOLOK	DESA GOLOK, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	241.097.000,00	DPPPAPMD
201	0201 - DANA DESA - DESA CANDISARI	DESA CANDISARI, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	267.374.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
202	0202 - DANA DESA - DESA CONDONGSARI	DESA CONDONGSARI, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	277.036.000,00	DPPPAPMD
203	0203 - DANA DESA - DESA JONO	DESA JONO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	253.623.000,00	DPPPAPMD
204	0204 - DANA DESA - DESA POGUNGJURUTENGAH	DESA POGUNGJURUTENGAH, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	303.020.000,00	DPPPAPMD
205	0205 - DANA DESA - DESA POGUNGREJO	DESA POGUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	259.889.000,00	DPPPAPMD
206	0206 - DANA DESA - DESA BANJAREJO	DESA BANJAREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	247.190.000,00	DPPPAPMD
207	0207 - DANA DESA - DESA POGUNGKALANGAN	DESA POGUNGKALANGAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	251.379.000,00	DPPPAPMD
208	0208 - DANA DESA - DESA KETIWIJAYAN	DESA KETIWIJAYAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	243.044.000,00	DPPPAPMD
209	0209 - DANA DESA - DESA KRANDEGAN	DESA KRANDEGAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	285.993.000,00	DPPPAPMD
210	0210 - DANA DESA - DESA TANJUNGREJO	DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	257.090.000,00	DPPPAPMD
211	0211 - DANA DESA - DESA DEWI	DESA DEWI, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	249.706.000,00	DPPPAPMD
212	0212 - DANA DESA - DESA TANGKISAN	DESA TANGKISAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	254.971.000,00	DPPPAPMD
213	0213 - DANA DESA - DESA JATINGARANG	DESA JATINGARANG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	261.397.000,00	DPPPAPMD
214	0214 - DANA DESA - DESA BANDUNGKIDUL	DESA BANDUNGKIDUL, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	369.173.000,00	DPPPAPMD
215	0215 - DANA DESA - DESA BANDUNGREJO	DESA BANDUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	277.440.000,00	DPPPAPMD
216	0216 - DANA DESA - DESA BESOLE	DESA BESOLE, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	362.428.000,00	DPPPAPMD
217	0217 - DANA DESA - DESA BOTOREJO	DESA BOTOREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	250.371.000,00	DPPPAPMD
218	0218 - DANA DESA - DESA BOTODALEMAN	DESA BOTODALEMAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	248.393.000,00	DPPPAPMD
219	0219 - DANA DESA - DESA DUKUHREJO	DESA DUKUHREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	270.170.000,00	DPPPAPMD
220	0220 - DANA DESA - DESA GRANTUNG	DESA GRANTUNG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
221	0221 - DANA DESA - DESA KALIMIRU	DESA KALIMIRU, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	254.182.000,00	DPPPAPMD
222	0222 - DANA DESA - DESA BRINGIN	DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	307.993.000,00	DPPPAPMD
223	0223 - DANA DESA - DESA BAYAN	DESA BAYAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	275.906.000,00	DPPPAPMD
224	0224 - DANA DESA - DESA PEKUTAN	DESA PEKUTAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	332.104.000,00	DPPPAPMD
225	0225 - DANA DESA - DESA JRAKAH	DESA JRAKAH, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	294.430.000,00	DPPPAPMD
226	0226 - DANA DESA - DESA SAMBENG	DESA SAMBENG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	312.054.000,00	DPPPAPMD
227	0227 - DANA DESA - DESA PUCANGAGUNG	DESA PUCANGAGUNG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	346.774.000,00	DPPPAPMD
228	0228 - DANA DESA - DESA KEBONDALEM	DESA KEBONDALEM, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	238.138.000,00	DPPPAPMD
229	0229 - DANA DESA - DESA TUNTUNGPAIT	DESA TUNTUNGPAIT, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	238.902.000,00	DPPPAPMD
230	0230 - DANA DESA - DESA KIYANGKONGREJO	DESA KIYANGKONGREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	257.394.000,00	DPPPAPMD
231	0231 - DANA DESA - DESA SUREN	DESA SUREN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
232	0232 - DANA DESA - DESA KARANGWULUH	DESA KARANGWULUH, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	249.789.000,00	DPPPAPMD
233	0233 - DANA DESA - DESA PURWOSARI	DESA PURWOSARI, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	290.512.000,00	DPPPAPMD
234	0234 - DANA DESA - DESA KEPUH	DESA KEPUH, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	262.975.000,00	DPPPAPMD
235	0235 - DANA DESA - DESA MAJIR	DESA MAJIR, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	290.078.000,00	DPPPAPMD
236	0236 - DANA DESA - DESA KUWUREJO	DESA KUWUREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	258.730.000,00	DPPPAPMD
237	0237 - DANA DESA - DESA PRINGGOWIJAYAN	DESA PRINGGOWIJAYAN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	281.082.000,00	DPPPAPMD
238	0238 - DANA DESA - DESA SIDARUM	DESA SIDARUM, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	248.288.000,00	DPPPAPMD
239	0239 - DANA DESA - DESA PACOR	DESA PACOR, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	284.721.000,00	DPPPAPMD
240	0240 - DANA DESA - DESA TUNGGORONO	DESA TUNGGORONO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	369.762.000,00	DPPPAPMD
241	0241 - DANA DESA - DESA TEPUSKULON	DESA TEPUSKULON, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	284.188.000,00	DPPPAPMD
242	0242 - DANA DESA - DESA SUKOHARJO	DESA SUKOHARJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	244.737.000,00	DPPPAPMD
243	0243 - DANA DESA - DESA KEMADULOR	DESA KEMADULOR, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	241.531.000,00	DPPPAPMD
244	0244 - DANA DESA - DESA KALIGESING	DESA KALIGESING, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	287.401.000,00	DPPPAPMD
245	0245 - DANA DESA - DESA TEPUSWETAN	DESA TEPUSWETAN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	282.571.000,00	DPPPAPMD
246	0246 - DANA DESA - DESA WIRUN	DESA WIRUN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	347.482.000,00	DPPPAPMD
247	0247 - DANA DESA - DESA KARANGREJO	DESA KARANGREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	255.823.000,00	DPPPAPMD
248	0248 - DANA DESA - DESA TURSINO	DESA TURSINO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	294.854.000,00	DPPPAPMD
249	0249 - DANA DESA - DESA KEDUNGMULYO	DESA KEDUNGMULYO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	270.601.000,00	DPPPAPMD
250	0250 - DANA DESA - DESA MANGUNJAYAN	DESA MANGUNJAYAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	254.096.000,00	DPPPAPMD
251	0251 - DANA DESA - DESA KARANGANOM	DESA KARANGANOM, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	223.506.000,00	DPPPAPMD
252	0252 - DANA DESA - DESA TANJUNGANOM	DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	253.147.000,00	DPPPAPMD
253	0253 - DANA DESA - DESA SIDOMULYO	DESA SIDOMULYO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	240.463.000,00	DPPPAPMD
254	0254 - DANA DESA - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	215.790.000,00	DPPPAPMD
255	0255 - DANA DESA - DESA LANGENREJO	DESA LANGENREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	246.429.000,00	DPPPAPMD
256	0256 - DANA DESA - DESA TAMANSARI	DESA TAMANSARI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	243.389.000,00	DPPPAPMD
257	0257 - DANA DESA - DESA WARENG	DESA WARENG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
258	0258 - DANA DESA - DESA KETUG	DESA KETUG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	289.794.000,00	DPPPAPMD
259	0259 - DANA DESA - DESA ROWODADI	DESA ROWODADI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	248.042.000,00	DPPPAPMD
260	0260 - DANA DESA - DESA KEDUNGSARI	DESA KEDUNGSARI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	251.944.000,00	DPPPAPMD
261	0261 - DANA DESA - DESA SRUWOHDUKUH	DESA SRUWOHDUKUH, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	211.186.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
262	0262 - DANA DESA - DESA WONODADI	DESA WONODADI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	231.446.000,00	DPPPAPMD
263	0263 - DANA DESA - DESA WONOREJOWETAN	DESA WONOREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	220.289.000,00	DPPPAPMD
264	0264 - DANA DESA - DESA WONOREJOKULON	DESA WONOREJOKULON, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	324.998.000,00	DPPPAPMD
265	0265 - DANA DESA - DESA KUNIREJOKULON	DESA KUNIREJOKULON, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	256.716.000,00	DPPPAPMD
266	0266 - DANA DESA - DESA KUNIREJOWETAN	DESA KUNIREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	221.036.000,00	DPPPAPMD
267	0267 - DANA DESA - DESA KEDUNGSRI	DESA KEDUNGSRI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	238.131.000,00	DPPPAPMD
268	0268 - DANA DESA - DESA KEDUNGAGUNG	DESA KEDUNGAGUNG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	244.828.000,00	DPPPAPMD
269	0269 - DANA DESA - DESA SRUWOHREJO	DESA SRUWOHREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	346.040.000,00	DPPPAPMD
270	0270 - DANA DESA - DESA LUGUREJO	DESA LUGUREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	254.286.000,00	DPPPAPMD
271	0271 - DANA DESA - DESA LUGU	DESA LUGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	254.727.000,00	DPPPAPMD
272	0272 - DANA DESA - DESA KUNIR	DESA KUNIR, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	256.781.000,00	DPPPAPMD
273	0273 - DANA DESA - DESA LUBANGDUKUH	DESA LUBANGDUKUH, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	221.627.000,00	DPPPAPMD
274	0274 - DANA DESA - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	217.474.000,00	DPPPAPMD
275	0275 - DANA DESA - DESA POLOMARTO	DESA POLOMARTO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	248.510.000,00	DPPPAPMD
276	0276 - DANA DESA - DESA TEGALGONDO	DESA TEGALGONDO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	220.282.000,00	DPPPAPMD
277	0277 - DANA DESA - DESA LUBANGLOR	DESA LUBANGLOR, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	250.249.000,00	DPPPAPMD
278	0278 - DANA DESA - DESA LUBANGINDANGAN	DESA LUBANGINDANGAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	248.777.000,00	DPPPAPMD
279	0279 - DANA DESA - DESA LUBANGKIDUL	DESA LUBANGKIDUL, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	247.122.000,00	DPPPAPMD
280	0280 - DANA DESA - DESA LUBANGSAMPANG	DESA LUBANGSAMPANG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	256.105.000,00	DPPPAPMD
281	0281 - DANA DESA - DESA DLANGU	DESA DLANGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	287.998.000,00	DPPPAPMD
282	0282 - DANA DESA - DESA ANDONG	DESA ANDONG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	240.678.000,00	DPPPAPMD
283	0283 - DANA DESA - DESA KALIWATUBUMI	DESA KALIWATUBUMI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
284	0284 - DANA DESA - DESA KALIWATUKRANGGAN	DESA KALIWATUKRANGGAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	277.777.000,00	DPPPAPMD
285	0285 - DANA DESA - DESA PANGGELDLANGU	DESA PANGGELDLANGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	246.519.000,00	DPPPAPMD
286	0286 - DANA DESA - DESA BINANGUN	DESA BINANGUN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	249.353.000,00	DPPPAPMD
287	0287 - DANA DESA - DESA BUTUH	DESA BUTUH, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	291.443.000,00	DPPPAPMD
288	0288 - DANA DESA - DESA KLEPU	DESA KLEPU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	334.011.000,00	DPPPAPMD
289	0289 - DANA DESA - DESA WIRONATAN	DESA WIRONATAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
290	0290 - DANA DESA - DESA KENDALREJO	DESA KENDALREJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	290.448.000,00	DPPPAPMD
291	0291 - DANA DESA - DESA KALIMATI	DESA KALIMATI, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	352.844.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
292	0292 - DANA DESA - DESA PEPE	DESA PEPE, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	300.280.000,00	DPPPAPMD
293	0293 - DANA DESA - DESA TUNJUNGTEJO	DESA TUNJUNGTEJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	343.932.000,00	DPPPAPMD
294	0294 - DANA DESA - DESA SEKARTEJO	DESA SEKARTEJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	247.433.000,00	DPPPAPMD
295	0295 - DANA DESA - DESA TERSIDILOR	DESA TERSIDILOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	259.090.000,00	DPPPAPMD
296	0296 - DANA DESA - DESA TERSIDIKIDUL	DESA TERSIDIKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	219.049.000,00	DPPPAPMD
297	0297 - DANA DESA - DESA TASIKMADU	DESA TASIKMADU, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	352.313.000,00	DPPPAPMD
298	0298 - DANA DESA - DESA PANGKALAN	DESA PANGKALAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	216.808.000,00	DPPPAPMD
299	0299 - DANA DESA - DESA SUMBER	DESA SUMBER, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	246.913.000,00	DPPPAPMD
300	0300 - DANA DESA - DESA GUMAWANGREJO	DESA GUMAWANGREJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	216.217.000,00	DPPPAPMD
301	0301 - DANA DESA - DESA KEBURUSAN	DESA KEBURUSAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	251.829.000,00	DPPPAPMD
302	0302 - DANA DESA - DESA WONOYOSO	DESA WONOYOSO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	222.209.000,00	DPPPAPMD
303	0303 - DANA DESA - DESA TAPEN	DESA TAPEN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	246.313.000,00	DPPPAPMD
304	0304 - DANA DESA - DESA WARU	DESA WARU, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	222.458.000,00	DPPPAPMD
305	0305 - DANA DESA - DESA BLEKATUK	DESA BLEKATUK, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	224.572.000,00	DPPPAPMD
306	0306 - DANA DESA - DESA DLINSENWETAN	DESA DLINSENWETAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	244.836.000,00	DPPPAPMD
307	0307 - DANA DESA - DESA DLINSENKULON	DESA DLINSENKULON, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	218.292.000,00	DPPPAPMD
308	0308 - DANA DESA - DESA SEMAMPIR	DESA SEMAMPIR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	222.142.000,00	DPPPAPMD
309	0309 - DANA DESA - DESA PETUGURAN	DESA PETUGURAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	253.618.000,00	DPPPAPMD
310	0310 - DANA DESA - DESA PEKACANGAN	DESA PEKACANGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	257.060.000,00	DPPPAPMD
311	0311 - DANA DESA - DESA KARANGGETAS	DESA KARANGGETAS, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	340.266.000,00	DPPPAPMD
312	0312 - DANA DESA - DESA LUWENGKIDUL	DESA LUWENGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	253.438.000,00	DPPPAPMD
313	0313 - DANA DESA - DESA SAMBENG	DESA SAMBENG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	220.372.000,00	DPPPAPMD
314	0314 - DANA DESA - DESA MEGULUNGKIDUL	DESA MEGULUNGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	279.227.000,00	DPPPAPMD
315	0315 - DANA DESA - DESA PITURUH	DESA PITURUH, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
316	0316 - DANA DESA - DESA SIKAMBANG	DESA SIKAMBANG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	254.452.000,00	DPPPAPMD
317	0317 - DANA DESA - DESA NGAMPEL	DESA NGAMPEL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
318	0318 - DANA DESA - DESA PRIGELAN	DESA PRIGELAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	246.375.000,00	DPPPAPMD
319	0319 - DANA DESA - DESA NGANDAGAN	DESA NGANDAGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	338.453.000,00	DPPPAPMD
320	0320 - DANA DESA - DESA KARANGANYAR	DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	417.787.000,00	DPPPAPMD
321	0321 - DANA DESA - DESA MEGULUNGLOR	DESA MEGULUNGLOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	245.211.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
322	0322 - DANA DESA - DESA PRAPAGKIDUL	DESA PRAPAGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	250.940.000,00	DPPPAPMD
323	0323 - DANA DESA - DESA KEMBANGKUNING	DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	364.509.000,00	DPPPAPMD
324	0324 - DANA DESA - DESA LUWENGLOR	DESA LUWENGLOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	260.206.000,00	DPPPAPMD
325	0325 - DANA DESA - DESA BRENGKOL	DESA BRENGKOL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	335.309.000,00	DPPPAPMD
326	0326 - DANA DESA - DESA GIRIGONDO	DESA GIRIGONDO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	345.238.000,00	DPPPAPMD
327	0327 - DANA DESA - DESA PRAPAGLOR	DESA PRAPAGLOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	477.107.000,00	DPPPAPMD
328	0328 - DANA DESA - DESA KALIKOTES	DESA KALIKOTES, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	305.590.000,00	DPPPAPMD
329	0329 - DANA DESA - DESA KESAWEN	DESA KESAWEN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	242.384.000,00	DPPPAPMD
330	0330 - DANA DESA - DESA KEDUNGBATUR	DESA KEDUNGBATUR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	216.849.000,00	DPPPAPMD
331	0331 - DANA DESA - DESA POLOWANGI	DESA POLOWANGI, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	316.856.000,00	DPPPAPMD
332	0332 - DANA DESA - DESA KALIJERING	DESA KALIJERING, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	313.569.000,00	DPPPAPMD
333	0333 - DANA DESA - DESA SOMOGEDE	DESA SOMOGEDE, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	312.874.000,00	DPPPAPMD
334	0334 - DANA DESA - DESA KALIGONDANG	DESA KALIGONDANG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	262.298.000,00	DPPPAPMD
335	0335 - DANA DESA - DESA KALIGINTUNG	DESA KALIGINTUNG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	362.970.000,00	DPPPAPMD
336	0336 - DANA DESA - DESA SAWANGAN	DESA SAWANGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	451.587.000,00	DPPPAPMD
337	0337 - DANA DESA - DESA WONOSIDO	DESA WONOSIDO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	276.145.000,00	DPPPAPMD
338	0338 - DANA DESA - DESA PAMRIYAN	DESA PAMRIYAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	279.039.000,00	DPPPAPMD
339	0339 - DANA DESA - DESA WALED	DESA WALED, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	245.642.000,00	DPPPAPMD
340	0340 - DANA DESA - DESA KROYOKULON	DESA KROYOKULON, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	327.642.000,00	DPPPAPMD
341	0341 - DANA DESA - DESA REJOSARI	DESA REJOSARI, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	243.097.000,00	DPPPAPMD
342	0342 - DANA DESA - DESA GESIKAN	DESA GESIKAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	255.544.000,00	DPPPAPMD
343	0343 - DANA DESA - DESA PAITAN	DESA PAITAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	293.170.000,00	DPPPAPMD
344	0344 - DANA DESA - DESA GEDONG	DESA GEDONG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	254.708.000,00	DPPPAPMD
345	0345 - DANA DESA - DESA ROWOBAYEM	DESA ROWOBAYEM, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	286.060.000,00	DPPPAPMD
346	0346 - DANA DESA - DESA KEMIRIKIDUL	DESA KEMIRIKIDUL, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	364.425.000,00	DPPPAPMD
347	0347 - DANA DESA - DESA BEDONOKLUWUNG	DESA BEDONOKLUWUNG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	294.117.000,00	DPPPAPMD
348	0348 - DANA DESA - DESA BEDONOPAGERON	DESA BEDONOPAGERON, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	288.825.000,00	DPPPAPMD
349	0349 - DANA DESA - DESA BEDONOKARANGDUWUR	DESA BEDONOKARANGDUWUR, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	287.812.000,00	DPPPAPMD
350	0350 - DANA DESA - DESA REBUG	DESA REBUG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	286.495.000,00	DPPPAPMD
351	0351 - DANA DESA - DESA LONING	DESA LONING, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	287.776.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
352	0352 - DANA DESA - DESA WINONG	DESA WINONG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	292.901.000,00	DPPPAPMD
353	0353 - DANA DESA - DESA SUTORAGAN	DESA SUTORAGAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	284.616.000,00	DPPPAPMD
354	0354 - DANA DESA - DESA JATIWANGSAN	DESA JATIWANGSAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	260.836.000,00	DPPPAPMD
355	0355 - DANA DESA - DESA GIRIMULYO	DESA GIRIMULYO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	342.079.000,00	DPPPAPMD
356	0356 - DANA DESA - DESA GIRIJOYO	DESA GIRIJOYO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	299.557.000,00	DPPPAPMD
357	0357 - DANA DESA - DESA TURUS	DESA TURUS, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	316.705.000,00	DPPPAPMD
358	0358 - DANA DESA - DESA DILEM	DESA DILEM, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	273.733.000,00	DPPPAPMD
359	0359 - DANA DESA - DESA KEDUNGLO	DESA KEDUNGLO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	319.400.000,00	DPPPAPMD
360	0360 - DANA DESA - DESA WONOSUKO	DESA WONOSUKO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	273.968.000,00	DPPPAPMD
361	0361 - DANA DESA - DESA SIDODADI	DESA SIDODADI, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	256.579.000,00	DPPPAPMD
362	0362 - DANA DESA - DESA KALIMENENG	DESA KALIMENENG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	258.406.000,00	DPPPAPMD
363	0363 - DANA DESA - DESA KEMIRILOR	DESA KEMIRILOR, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	371.367.000,00	DPPPAPMD
364	0364 - DANA DESA - DESA KEREP	DESA KEREP, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	272.416.000,00	DPPPAPMD
365	0365 - DANA DESA - DESA KROYOLOR	DESA KROYOLOR, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	287.857.000,00	DPPPAPMD
366	0366 - DANA DESA - DESA SAMPING	DESA SAMPING, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	353.524.000,00	DPPPAPMD
367	0367 - DANA DESA - DESA WONOSARI	DESA WONOSARI, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	254.446.000,00	DPPPAPMD
368	0368 - DANA DESA - DESA KALIGLAGAH	DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	266.580.000,00	DPPPAPMD
369	0369 - DANA DESA - DESA KAPITERAN	DESA KAPITERAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	227.386.000,00	DPPPAPMD
370	0370 - DANA DESA - DESA WANUROJO	DESA WANUROJO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	260.967.000,00	DPPPAPMD
371	0371 - DANA DESA - DESA REJOWINANGUN	DESA REJOWINANGUN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	305.011.000,00	DPPPAPMD
372	0372 - DANA DESA - DESA KALIURIP	DESA KALIURIP, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	257.033.000,00	DPPPAPMD
373	0373 - DANA DESA - DESA KEDUNGPOMAHANWETAN	DESA KEDUNGPOMAHANWETAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	316.958.000,00	DPPPAPMD
374	0374 - DANA DESA - DESA KARANGLUAS	DESA KARANGLUAS, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	252.921.000,00	DPPPAPMD
375	0375 - DANA DESA - DESA KEDUNGPOMAHANKULON	DESA KEDUNGPOMAHANKULON, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	302.231.000,00	DPPPAPMD
376	0376 - DANA DESA - DESA SUKOGELAP	DESA SUKOGELAP, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	252.870.000,00	DPPPAPMD
377	0377 - DANA DESA - DESA GUNUNGTEGES	DESA GUNUNGTEGES, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	261.484.000,00	DPPPAPMD
378	0378 - DANA DESA - DESA PURBAYAN	DESA PURBAYAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	264.227.000,00	DPPPAPMD
379	0379 - DANA DESA - DESA PUSPO	DESA PUSPO, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
380	0380 - DANA DESA - DESA PLIPIRAN	DESA PLIPIRAN, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	330.201.000,00	DPPPAPMD
381	0381 - DANA DESA - DESA PAKISARUM	DESA PAKISARUM, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
382	0382 - DANA DESA - DESA BRUNOREJO	DESA BRUNOREJO, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
383	0383 - DANA DESA - DESA BRUNOSARI	DESA BRUNOSARI, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
384	0384 - DANA DESA - DESA SOMOLETER	DESA SOMOLETER, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	308.770.000,00	DPPPAPMD
385	0385 - DANA DESA - DESA BLIMBING	DESA BLIMBING, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
386	0386 - DANA DESA - DESA GOWONG	DESA GOWONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	362.090.000,00	DPPPAPMD
387	0387 - DANA DESA - DESA BRONDONG	DESA BRONDONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
388	0388 - DANA DESA - DESA CEPEDAK	DESA CEPEDAK, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
389	0389 - DANA DESA - DESA GUNUNGCONDONG	DESA GUNUNGCONDONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	301.827.000,00	DPPPAPMD
390	0390 - DANA DESA - DESA KEMRANGGEN	DESA KEMRANGGEN, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	269.390.000,00	DPPPAPMD
391	0391 - DANA DESA - DESA KARANGGEDANG	DESA KARANGGEDANG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	263.977.000,00	DPPPAPMD
392	0392 - DANA DESA - DESA GIYOMBONG	DESA GIYOMBONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	287.529.000,00	DPPPAPMD
393	0393 - DANA DESA - DESA KAMBANGAN	DESA KAMBANGAN, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	277.315.000,00	DPPPAPMD
394	0394 - DANA DESA - DESA WATUDUWUR	DESA WATUDUWUR, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	368.025.000,00	DPPPAPMD
395	0395 - DANA DESA - DESA KALIWUNGU	DESA KALIWUNGU, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
396	0396 - DANA DESA - DESA TEGALSARI	DESA TEGALSARI, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
397	0397 - DANA DESA - DESA WINONGKIDUL	DESA WINONGKIDUL, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	305.993.000,00	DPPPAPMD
398	0398 - DANA DESA - DESA SEREN	DESA SEREN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	337.250.000,00	DPPPAPMD
399	0399 - DANA DESA - DESA GINTUNGAN	DESA GINTUNGAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	331.409.000,00	DPPPAPMD
400	0400 - DANA DESA - DESA BULUS	DESA BULUS, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	304.590.000,00	DPPPAPMD
401	0401 - DANA DESA - DESA RENDENG	DESA RENDENG, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	281.635.000,00	DPPPAPMD
402	0402 - DANA DESA - DESA KROYO	DESA KROYO, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
403	0403 - DANA DESA - DESA WINONGLOR	DESA WINONGLOR, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	289.874.000,00	DPPPAPMD
404	0404 - DANA DESA - DESA MLARAN	DESA MLARAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	280.778.000,00	DPPPAPMD
405	0405 - DANA DESA - DESA PELUTAN	DESA PELUTAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	244.177.000,00	DPPPAPMD
406	0406 - DANA DESA - DESA BENDOSARI	DESA BENDOSARI, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	239.175.000,00	DPPPAPMD
407	0407 - DANA DESA - DESA GEBANG	DESA GEBANG, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	250.363.000,00	DPPPAPMD
408	0408 - DANA DESA - DESA SALAM	DESA SALAM, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	253.231.000,00	DPPPAPMD
409	0409 - DANA DESA - DESA PAKEM	DESA PAKEM, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	303.339.000,00	DPPPAPMD
410	0410 - DANA DESA - DESA WONOTOPO	DESA WONOTOPO, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	253.688.000,00	DPPPAPMD
411	0411 - DANA DESA - DESA SIDOLEREN	DESA SIDOLEREN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	267.350.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
412	0412 - DANA DESA - DESA PENUNGKULAN	DESA PENUNGKULAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	363.621.000,00	DPPPAPMD
413	0413 - DANA DESA - DESA REDIN	DESA REDIN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	362.588.000,00	DPPPAPMD
414	0414 - DANA DESA - DESA TLOGOSONO	DESA TLOGOSONO, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	258.237.000,00	DPPPAPMD
415	0415 - DANA DESA - DESA NGEMPLAK	DESA NGEMPLAK, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	247.724.000,00	DPPPAPMD
416	0416 - DANA DESA - DESA KRAGILAN	DESA KRAGILAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	259.709.000,00	DPPPAPMD
417	0417 - DANA DESA - DESA PRUMBEN	DESA PRUMBEN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	265.016.000,00	DPPPAPMD
418	0418 - DANA DESA - DESA NGAGLIK	DESA NGAGLIK, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	273.304.000,00	DPPPAPMD
419	0419 - DANA DESA - DESA KEMIRI	DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	336.825.000,00	DPPPAPMD
420	0420 - DANA DESA - DESA KALITENGKEK	DESA KALITENGKEK, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	297.333.000,00	DPPPAPMD
421	0421 - DANA DESA - DESA KALINONGKO	DESA KALINONGKO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	296.146.000,00	DPPPAPMD
422	0422 - DANA DESA - DESA TRIREJO	DESA TRIREJO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	294.000.000,00	DPPPAPMD
423	0423 - DANA DESA - DESA KARANGREJO	DESA KARANGREJO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	275.609.000,00	DPPPAPMD
424	0424 - DANA DESA - DESA KALIKALONG	DESA KALIKALONG, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	255.825.000,00	DPPPAPMD
425	0425 - DANA DESA - DESA RIMUN	DESA RIMUN, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	262.492.000,00	DPPPAPMD
426	0426 - DANA DESA - DESA TEPANSARI	DESA TEPANSARI, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	317.650.000,00	DPPPAPMD
427	0427 - DANA DESA - DESA KALIGLAGAH	DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	269.717.000,00	DPPPAPMD
428	0428 - DANA DESA - DESA TRIDADI	DESA TRIDADI, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	256.216.000,00	DPPPAPMD
429	0429 - DANA DESA - DESA BANYUASINSEPARE	DESA BANYUASINSEPARE, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	297.597.000,00	DPPPAPMD
430	0430 - DANA DESA - DESA GUYANGAN	DESA GUYANGAN, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	245.620.000,00	DPPPAPMD
431	0431 - DANA DESA - DESA KALISEMO	DESA KALISEMO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	310.351.000,00	DPPPAPMD
432	0432 - DANA DESA - DESA LOANO	DESA LOANO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
433	0433 - DANA DESA - DESA JETIS	DESA JETIS, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	307.113.000,00	DPPPAPMD
434	0434 - DANA DESA - DESA KEDUNGPOH	DESA KEDUNGPOH, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	298.195.000,00	DPPPAPMD
435	0435 - DANA DESA - DESA MARON	DESA MARON, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	279.834.000,00	DPPPAPMD
436	0436 - DANA DESA - DESA KEBON GUNUNG	DESA KEBON GUNUNG, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	282.437.000,00	DPPPAPMD
437	0437 - DANA DESA - DESA MUDALREJO	DESA MUDALREJO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	302.880.000,00	DPPPAPMD
438	0438 - DANA DESA - DESA KEMEJING	DESA KEMEJING, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	274.576.000,00	DPPPAPMD
439	0439 - DANA DESA - DESA BANYUASINKEMBARAN	DESA BANYUASINKEMBARAN, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	280.561.000,00	DPPPAPMD
440	0440 - DANA DESA - DESA SEDAYU	DESA SEDAYU, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	313.502.000,00	DPPPAPMD
441	0441 - DANA DESA - DESA NGARGOSARI	DESA NGARGOSARI, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	277.901.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
442	0442 - DANA DESA - DESA BENOWO	DESA BENOWO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	287.884.000,00	DPPPAPMD
443	0443 - DANA DESA - DESA KALITAPAS	DESA KALITAPAS, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	255.427.000,00	DPPPAPMD
444	0444 - DANA DESA - DESA KALIWADER	DESA KALIWADER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	329.658.000,00	DPPPAPMD
445	0445 - DANA DESA - DESA KEDUNGPUCANG	DESA KEDUNGPUCANG, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	344.542.000,00	DPPPAPMD
446	0446 - DANA DESA - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	308.050.000,00	DPPPAPMD
447	0447 - DANA DESA - DESA KALIBOTO	DESA KALIBOTO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
448	0448 - DANA DESA - DESA KALIURIP	DESA KALIURIP, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
449	0449 - DANA DESA - DESA KEDUNGLOTENG	DESA KEDUNGLOTENG, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	262.554.000,00	DPPPAPMD
450	0450 - DANA DESA - DESA WADAS	DESA WADAS, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	304.575.000,00	DPPPAPMD
451	0451 - DANA DESA - DESA CACABANKIDUL	DESA CACABANKIDUL, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	295.319.000,00	DPPPAPMD
452	0452 - DANA DESA - DESA CACABANLOR	DESA CACABANLOR, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	254.411.000,00	DPPPAPMD
453	0453 - DANA DESA - DESA PEKACANGAN	DESA PEKACANGAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	316.630.000,00	DPPPAPMD
454	0454 - DANA DESA - DESA MEDONO	DESA MEDONO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	256.870.000,00	DPPPAPMD
455	0455 - DANA DESA - DESA BLEBER	DESA BLEBER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	280.587.000,00	DPPPAPMD
456	0456 - DANA DESA - DESA BENER	DESA BENER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
457	0457 - DANA DESA - DESA KARANGSARI	DESA KARANGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	304.108.000,00	DPPPAPMD
458	0458 - DANA DESA - DESA GUNTUR	DESA GUNTUR, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
459	0459 - DANA DESA - DESA LEGETAN	DESA LEGETAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	319.329.000,00	DPPPAPMD
460	0460 - DANA DESA - DESA KETOSARI	DESA KETOSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	298.376.000,00	DPPPAPMD
461	0461 - DANA DESA - DESA KAMIJORO	DESA KAMIJORO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	270.803.000,00	DPPPAPMD
462	0462 - DANA DESA - DESA JATI	DESA JATI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	301.524.000,00	DPPPAPMD
463	0463 - DANA DESA - DESA MAYUNGSARI	DESA MAYUNGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	282.456.000,00	DPPPAPMD
464	0464 - DANA DESA - DESA KALIJAMBE	DESA KALIJAMBE, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
465	0465 - DANA DESA - DESA SUKOWUWUH	DESA SUKOWUWUH, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	348.152.000,00	DPPPAPMD
466	0466 - DANA DESA - DESA LIMBANGAN	DESA LIMBANGAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	373.456.000,00	DPPPAPMD
467	0467 - DANA DESA - DESA NGLARIS	DESA NGLARIS, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	293.993.000,00	DPPPAPMD
468	0468 - DANA DESA - DESA SIDOMUKTI	DESA SIDOMUKTI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	259.613.000,00	DPPPAPMD
469	0469 - DANA DESA - DESA NGASINAN	DESA NGASINAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	306.976.000,00	DPPPAPMD
470	0470 - DANA DESA - DESA-DESA DI KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN PURWOREJO	184.611.873.000,00	DPPPAPMD
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN DANA DESA		**317.030.772.000,00**	
B	**Alokasi Dana Desa**			
	ADD SILTAP DAN NONSILTAP			

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
1	1001 - ADD - DESA HARJOBINANGUN	DESA HARJOBINANGUN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	438.234.400,00	DPPPAPMD
2	1002 - ADD - DESA PATUTREJO	DESA PATUTREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	358.110.400,00	DPPPAPMD
3	1003 - ADD - DESA KETAWANGREJO	DESA KETAWANGREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	470.723.400,00	DPPPAPMD
4	1004 - ADD - DESA MUNGGANGSARI	DESA MUNGGANGSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	330.130.400,00	DPPPAPMD
5	1005 - ADD - DESA KERTOJAYAN	DESA KERTOJAYAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	327.980.400,00	DPPPAPMD
6	1006 - ADD - DESA PASARANOM	DESA PASARANOM, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	362.270.400,00	DPPPAPMD
7	1007 - ADD - DESA UKIRSARI	DESA UKIRSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	351.609.400,00	DPPPAPMD
8	1008 - ADD - DESA NAMBANGAN	DESA NAMBANGAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	410.973.400,00	DPPPAPMD
9	1009 - ADD - DESA SUMBERAGUNG	DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	436.472.400,00	DPPPAPMD
10	1010 - ADD - DESA BENDUNGAN	DESA BENDUNGAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	351.966.400,00	DPPPAPMD
11	1011 - ADD - DESA ROWODADI	DESA ROWODADI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	323.094.400,00	DPPPAPMD
12	1012 - ADD - DESA BAKUREJO	DESA BAKUREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	330.491.400,00	DPPPAPMD
13	1013 - ADD - DESA DUDUWETAN	DESA DUDUWETAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	296.663.400,00	DPPPAPMD
14	1014 - ADD - DESA DUDUKULON	DESA DUDUKULON, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	297.248.400,00	DPPPAPMD
15	1015 - ADD - DESA REJOSARI	DESA REJOSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	356.862.400,00	DPPPAPMD
16	1016 - ADD - DESA TRIMULYO	DESA TRIMULYO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	271.566.400,00	DPPPAPMD
17	1017 - ADD - DESA TULUSREJO	DESA TULUSREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	349.886.400,00	DPPPAPMD
18	1018 - ADD - DESA TEGALREJO	DESA TEGALREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	324.202.400,00	DPPPAPMD
19	1019 - ADD - DESA KALIREJO	DESA KALIREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	322.032.400,00	DPPPAPMD
20	1020 - ADD - DESA WONOENGGAL	DESA WONOENGGAL, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	296.384.400,00	DPPPAPMD
21	1021 - ADD - DESA BANYUYOSO	DESA BANYUYOSO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	296.287.400,00	DPPPAPMD
22	1022 - ADD - DESA GRABAG	DESA GRABAG, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	412.372.400,00	DPPPAPMD
23	1023 - ADD - DESA AGLIK	DESA AGLIK, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	328.085.400,00	DPPPAPMD
24	1024 - ADD - DESA ROWOREJO	DESA ROWOREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	298.617.400,00	DPPPAPMD
25	1025 - ADD - DESA TUNGGULREJO	DESA TUNGGULREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	352.288.400,00	DPPPAPMD
26	1026 - ADD - DESA KEDUNGKAMAL	DESA KEDUNGKAMAL, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	326.060.400,00	DPPPAPMD
27	1027 - ADD - DESA SANGUBANYU	DESA SANGUBANYU, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	403.238.400,00	DPPPAPMD
28	1028 - ADD - DESA DUKUHDUNGUS	DESA DUKUHDUNGUS, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	351.204.400,00	DPPPAPMD
29	1029 - ADD - DESA TLEPOKWETAN	DESA TLEPOKWETAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	296.754.400,00	DPPPAPMD
30	1030 - ADD - DESA TLEPOKKULON	DESA TLEPOKKULON, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	243.229.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
31	1031 - ADD - DESA KUMPULREJO	DESA KUMPULREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	351.664.400,00	DPPPAPMD
32	1032 - ADD - DESA KESE	DESA KESE, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	294.806.400,00	DPPPAPMD
33	1033 - ADD - DESA NGENTAK	DESA NGENTAK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.628.400,00	DPPPAPMD
34	1034 - ADD - DESA GIRIREJO	DESA GIRIREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	214.792.400,00	DPPPAPMD
35	1035 - ADD - DESA WERO	DESA WERO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.161.400,00	DPPPAPMD
36	1036 - ADD - DESA PAGAK	DESA PAGAK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.768.400,00	DPPPAPMD
37	1037 - ADD - DESA MALANG	DESA MALANG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.969.400,00	DPPPAPMD
38	1038 - ADD - DESA DEPOKREJO	DESA DEPOKREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	217.090.400,00	DPPPAPMD
39	1039 - ADD - DESA KEBURUHAN	DESA KEBURUHAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	244.060.400,00	DPPPAPMD
40	1040 - ADD - DESA AWU-AWU	DESA AWU-AWU, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	271.555.400,00	DPPPAPMD
41	1041 - ADD - DESA KUMPULSARI	DESA KUMPULSARI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	217.358.400,00	DPPPAPMD
42	1042 - ADD - DESA KESIDAN	DESA KESIDAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	217.730.400,00	DPPPAPMD
43	1043 - ADD - DESA WONOROTO	DESA WONOROTO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.214.400,00	DPPPAPMD
44	1044 - ADD - DESA PEJAGRAN	DESA PEJAGRAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.528.400,00	DPPPAPMD
45	1045 - ADD - DESA WONOSARI	DESA WONOSARI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	300.957.400,00	DPPPAPMD
46	1046 - ADD - DESA WONOSRI	DESA WONOSRI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	325.375.400,00	DPPPAPMD
47	1047 - ADD - DESA JERUKEN	DESA JERUKEN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.129.400,00	DPPPAPMD
48	1048 - ADD - DESA TANJUNGREJO	DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.042.400,00	DPPPAPMD
49	1049 - ADD - DESA KALITANJUNG	DESA KALITANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.177.400,00	DPPPAPMD
50	1050 - ADD - DESA KUWUKAN	DESA KUWUKAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.995.400,00	DPPPAPMD
51	1051 - ADD - DESA KEDONDONG	DESA KEDONDONG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.932.400,00	DPPPAPMD
52	1052 - ADD - DESA RASUKAN	DESA RASUKAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.747.400,00	DPPPAPMD
53	1053 - ADD - DESA LABAN	DESA LABAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.383.400,00	DPPPAPMD
54	1054 - ADD - DESA WASIAT	DESA WASIAT, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	326.761.400,00	DPPPAPMD
55	1055 - ADD - DESA TUNJUNGAN	DESA TUNJUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	269.831.400,00	DPPPAPMD
56	1056 - ADD - DESA RINGGIT	DESA RINGGIT, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	217.058.400,00	DPPPAPMD
57	1057 - ADD - DESA KALIWUNGUKIDUL	DESA KALIWUNGUKIDUL, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	214.947.400,00	DPPPAPMD
58	1058 - ADD - DESA KALIWUNGULOR	DESA KALIWUNGULOR, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	269.125.400,00	DPPPAPMD
59	1059 - ADD - DESA COKROYASAN	DESA COKROYASAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	271.968.400,00	DPPPAPMD
60	1060 - ADD - DESA BOJONG	DESA BOJONG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.430.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
61	1061 - ADD - DESA KARANGTALUN	DESA KARANGTALUN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	269.024.400,00	DPPPAPMD
62	1062 - ADD - DESA SUSUK	DESA SUSUK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.386.400,00	DPPPAPMD
63	1063 - ADD - DESA KLANDARAN	DESA KLANDARAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.310.400,00	DPPPAPMD
64	1064 - ADD - DESA BRIYAN	DESA BRIYAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.792.400,00	DPPPAPMD
65	1065 - ADD - DESA NGOMBOL	DESA NGOMBOL, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	268.691.400,00	DPPPAPMD
66	1066 - ADD - DESA JOSO	DESA JOSO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.285.400,00	DPPPAPMD
67	1067 - ADD - DESA CANDI	DESA CANDI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	270.668.400,00	DPPPAPMD
68	1068 - ADD - DESA PULUTAN	DESA PULUTAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.460.400,00	DPPPAPMD
69	1069 - ADD - DESA WALIKORO	DESA WALIKORO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	214.383.400,00	DPPPAPMD
70	1070 - ADD - DESA SRUWOH	DESA SRUWOH, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.583.400,00	DPPPAPMD
71	1071 - ADD - DESA WONOBOYO	DESA WONOBOYO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	322.396.400,00	DPPPAPMD
72	1072 - ADD - DESA KEMBANGKUNING	DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	267.200.400,00	DPPPAPMD
73	1073 - ADD - DESA JOMBANG	DESA JOMBANG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	268.847.400,00	DPPPAPMD
74	1074 - ADD - DESA MENDIRO	DESA MENDIRO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	267.631.400,00	DPPPAPMD
75	1075 - ADD - DESA WUNUT	DESA WUNUT, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	268.955.400,00	DPPPAPMD
76	1076 - ADD - DESA SUMBERREJO	DESA SUMBERREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	322.840.400,00	DPPPAPMD
77	1077 - ADD - DESA WINGKOSIGROMULYO	DESA WINGKOSIGROMULYO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	214.581.400,00	DPPPAPMD
78	1078 - ADD - DESA WINGKOHARJO	DESA WINGKOHARJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	215.789.400,00	DPPPAPMD
79	1079 - ADD - DESA SINGKILKULON	DESA SINGKILKULON, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.811.400,00	DPPPAPMD
80	1080 - ADD - DESA SINGKILWETAN	DESA SINGKILWETAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.191.400,00	DPPPAPMD
81	1081 - ADD - DESA TUMENGGUNGAN	DESA TUMENGGUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	216.291.400,00	DPPPAPMD
82	1082 - ADD - DESA CURUG	DESA CURUG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	214.841.400,00	DPPPAPMD
83	1083 - ADD - DESA WINGKOSANGGRAHAN	DESA WINGKOSANGGRAHAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	296.328.400,00	DPPPAPMD
84	1084 - ADD - DESA WINGKOMULYO	DESA WINGKOMULYO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	214.445.400,00	DPPPAPMD
85	1085 - ADD - DESA WINGKOTINUMPUK	DESA WINGKOTINUMPUK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	270.721.400,00	DPPPAPMD
86	1086 - ADD - DESA PIYONO	DESA PIYONO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	269.099.400,00	DPPPAPMD
87	1087 - ADD - DESA TANJUNG	DESA TANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	269.862.400,00	DPPPAPMD
88	1088 - ADD - DESA SECANG	DESA SECANG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	269.485.400,00	DPPPAPMD
89	1089 - ADD - DESA SEBOROPASAR	DESA SEBOROPASAR, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	270.097.400,00	DPPPAPMD
90	1090 - ADD - DESA JATIMALANG	DESA JATIMALANG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	272.805.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
91	1091 - ADD - DESA JATIKONTAL	DESA JATIKONTAL, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	243.395.400,00	DPPPAPMD
92	1092 - ADD - DESA GEDANGAN	DESA GEDANGAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	215.860.400,00	DPPPAPMD
93	1093 - ADD - DESA KARANGANYAR	DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	242.288.400,00	DPPPAPMD
94	1094 - ADD - DESA JOGOBOYO	DESA JOGOBOYO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	351.186.400,00	DPPPAPMD
95	1095 - ADD - DESA WATUKURO	DESA WATUKURO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	215.022.400,00	DPPPAPMD
96	1096 - ADD - DESA KARANGSARI	DESA KARANGSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	272.115.400,00	DPPPAPMD
97	1097 - ADD - DESA BANJARSARI	DESA BANJARSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	322.243.400,00	DPPPAPMD
98	1098 - ADD - DESA KEBONSARI	DESA KEBONSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	295.258.400,00	DPPPAPMD
99	1099 - ADD - DESA SIDOHARJO	DESA SIDOHARJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	296.294.400,00	DPPPAPMD
100	1100 - ADD - DESA JOGORESAN	DESA JOGORESAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	329.395.400,00	DPPPAPMD
101	1101 - ADD - DESA GEPARANG	DESA GEPARANG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	299.681.400,00	DPPPAPMD
102	1102 - ADD - DESA NAMPUREJO	DESA NAMPUREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	270.202.400,00	DPPPAPMD
103	1103 - ADD - DESA KENTENGREJO	DESA KENTENGREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	295.778.400,00	DPPPAPMD
104	1104 - ADD - DESA NAMPU	DESA NAMPU, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	214.986.400,00	DPPPAPMD
105	1105 - ADD - DESA GESING	DESA GESING, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	215.606.400,00	DPPPAPMD
106	1106 - ADD - DESA KEPONGGOK	DESA KEPONGGOK, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	269.221.400,00	DPPPAPMD
107	1107 - ADD - DESA BUBUTAN	DESA BUBUTAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	270.958.400,00	DPPPAPMD
108	1108 - ADD - DESA TEGALAREN	DESA TEGALAREN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	215.451.400,00	DPPPAPMD
109	1109 - ADD - DESA SUKOMANAH	DESA SUKOMANAH, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	324.319.400,00	DPPPAPMD
110	1110 - ADD - DESA BLENDUNG	DESA BLENDUNG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	215.692.400,00	DPPPAPMD
111	1111 - ADD - DESA GUYANGAN	DESA GUYANGAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	269.257.400,00	DPPPAPMD
112	1112 - ADD - DESA BONGKOT	DESA BONGKOT, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	296.542.400,00	DPPPAPMD
113	1113 - ADD - DESA PURWODADI	DESA PURWODADI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	327.389.400,00	DPPPAPMD
114	1114 - ADD - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	296.691.400,00	DPPPAPMD
115	1115 - ADD - DESA PURWOSARI	DESA PURWOSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	324.027.400,00	DPPPAPMD
116	1116 - ADD - DESA JENARWETAN	DESA JENARWETAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	407.640.400,00	DPPPAPMD
117	1117 - ADD - DESA JENARKIDUL	DESA JENARKIDUL, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	324.545.400,00	DPPPAPMD
118	1118 - ADD - DESA JENARLOR	DESA JENARLOR, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	352.364.400,00	DPPPAPMD
119	1119 - ADD - DESA PUNDENSARI	DESA PUNDENSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	324.099.400,00	DPPPAPMD
120	1120 - ADD - DESA KESUGIHAN	DESA KESUGIHAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	296.020.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
121	1121 - ADD - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	324.178.400,00	DPPPAPMD
122	1122 - ADD - DESA PLANDI	DESA PLANDI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	295.902.400,00	DPPPAPMD
123	1123 - ADD - DESA BRAGOLAN	DESA BRAGOLAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	352.677.400,00	DPPPAPMD
124	1124 - ADD - DESA KETANGI	DESA KETANGI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	406.686.400,00	DPPPAPMD
125	1125 - ADD - DESA KARANGMULYO	DESA KARANGMULYO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	297.344.400,00	DPPPAPMD
126	1126 - ADD - DESA KEDUREN	DESA KEDUREN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	379.813.400,00	DPPPAPMD
127	1127 - ADD - DESA SUMBEREJO	DESA SUMBEREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	271.077.400,00	DPPPAPMD
128	1128 - ADD - DESA BRONDONGREJO	DESA BRONDONGREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	243.280.400,00	DPPPAPMD
129	1129 - ADD - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	242.261.400,00	DPPPAPMD
130	1130 - ADD - DESA DADIREJO	DESA DADIREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	389.197.400,00	DPPPAPMD
131	1131 - ADD - DESA TLOGOKOTES	DESA TLOGOKOTES, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	325.751.400,00	DPPPAPMD
132	1132 - ADD - DESA BAPANGSARI	DESA BAPANGSARI, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	470.213.400,00	DPPPAPMD
133	1133 - ADD - DESA BUGEL	DESA BUGEL, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	299.275.400,00	DPPPAPMD
134	1134 - ADD - DESA BAGELEN	DESA BAGELEN, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	464.809.400,00	DPPPAPMD
135	1135 - ADD - DESA KRENDETAN	DESA KRENDETAN, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	414.721.400,00	DPPPAPMD
136	1136 - ADD - DESA SOMOREJO	DESA SOMOREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	388.491.400,00	DPPPAPMD
137	1137 - ADD - DESA HARGOROJO	DESA HARGOROJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	383.858.400,00	DPPPAPMD
138	1138 - ADD - DESA DURENSARI	DESA DURENSARI, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	385.320.400,00	DPPPAPMD
139	1139 - ADD - DESA SEMONO	DESA SEMONO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	301.328.400,00	DPPPAPMD
140	1140 - ADD - DESA SOKOAGUNG	DESA SOKOAGUNG, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	387.134.400,00	DPPPAPMD
141	1141 - ADD - DESA KALIREJO	DESA KALIREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	328.373.400,00	DPPPAPMD
142	1142 - ADD - DESA CLAPAR	DESA CLAPAR, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	324.404.400,00	DPPPAPMD
143	1143 - ADD - DESA SOKO	DESA SOKO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	380.138.400,00	DPPPAPMD
144	1144 - ADD - DESA SEMAGUNG	DESA SEMAGUNG, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	353.979.400,00	DPPPAPMD
145	1145 - ADD - DESA PIJI	DESA PIJI, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	353.900.400,00	DPPPAPMD
146	1146 - ADD - DESA KEMANUKAN	DESA KEMANUKAN, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	382.886.400,00	DPPPAPMD
147	1147 - ADD - DESA JATIREJO	DESA JATIREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	334.982.400,00	DPPPAPMD
148	1148 - ADD - DESA SOMONGARI	DESA SOMONGARI, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	394.051.400,00	DPPPAPMD
149	1149 - ADD - DESA DONOREJO	DESA DONOREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	366.358.400,00	DPPPAPMD
150	1150 - ADD - DESA HULOSOBO	DESA HULOSOBO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	353.984.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
151	1151 - ADD - DESA KALIHARJO	DESA KALIHARJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	356.177.400,00	DPPPAPMD
152	1152 - ADD - DESA KALIGONO	DESA KALIGONO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	557.826.400,00	DPPPAPMD
153	1153 - ADD - DESA TLOGOGUWO	DESA TLOGOGUWO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	453.735.400,00	DPPPAPMD
154	1154 - ADD - DESA PANDANREJO	DESA PANDANREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	298.935.400,00	DPPPAPMD
155	1155 - ADD - DESA TAWANGSARI	DESA TAWANGSARI, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	326.967.400,00	DPPPAPMD
156	1156 - ADD - DESA TLOGOBULU	DESA TLOGOBULU, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	298.805.400,00	DPPPAPMD
157	1157 - ADD - DESA PURBOWONO	DESA PURBOWONO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	299.422.400,00	DPPPAPMD
158	1158 - ADD - DESA NGARAN	DESA NGARAN, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	325.331.400,00	DPPPAPMD
159	1159 - ADD - DESA KEDUNGGUBAH	DESA KEDUNGGUBAH, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	352.375.400,00	DPPPAPMD
160	1160 - ADD - DESA JELOK	DESA JELOK, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	431.942.400,00	DPPPAPMD
161	1161 - ADD - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	323.713.400,00	DPPPAPMD
162	1162 - ADD - DESA GUNUNGWANGI	DESA GUNUNGWANGI, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	267.690.400,00	DPPPAPMD
163	1163 - ADD - DESA HARDIMULYO	DESA HARDIMULYO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	327.766.400,00	DPPPAPMD
164	1164 - ADD - DESA SUDOROGO	DESA SUDOROGO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	355.875.400,00	DPPPAPMD
165	1165 - ADD - DESA SUMOWONO	DESA SUMOWONO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	353.540.400,00	DPPPAPMD
166	1166 - ADD - DESA NGADIREJO	DESA NGADIREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	326.199.400,00	DPPPAPMD
167	1167 - ADD - DESA PUCUNGROTO	DESA PUCUNGROTO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	323.109.400,00	DPPPAPMD
168	1168 - ADD - DESA PACEKELAN	DESA PACEKELAN, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	415.690.400,00	DPPPAPMD
169	1169 - ADD - DESA PLIPIR	DESA PLIPIR, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	270.027.400,00	DPPPAPMD
170	1170 - ADD - DESA BRENGGONG	DESA BRENGGONG, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	409.164.400,00	DPPPAPMD
171	1171 - ADD - DESA GANGGENG	DESA GANGGENG, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	511.660.400,00	DPPPAPMD
172	1172 - ADD - DESA SEMAWUNG	DESA SEMAWUNG, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	463.361.400,00	DPPPAPMD
173	1173 - ADD - DESA WONOROTO	DESA WONOROTO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	374.875.400,00	DPPPAPMD
174	1174 - ADD - DESA SIDOREJO	DESA SIDOREJO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	355.550.400,00	DPPPAPMD
175	1175 - ADD - DESA WONOTULUS	DESA WONOTULUS, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	271.506.400,00	DPPPAPMD
176	1176 - ADD - DESA SIDOMULYO	DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	443.186.400,00	DPPPAPMD
177	1177 - ADD - DESA SUDIMORO	DESA SUDIMORO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	245.172.400,00	DPPPAPMD
178	1178 - ADD - DESA DONORATI	DESA DONORATI, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	270.581.400,00	DPPPAPMD
179	1179 - ADD - DESA SEBOROKRAPYAK	DESA SEBOROKRAPYAK, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	376.439.400,00	DPPPAPMD
180	1180 - ADD - DESA TRIWARNO	DESA TRIWARNO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	405.229.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
181	1181 - ADD - DESA BAJANGREJO	DESA BAJANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	374.939.400,00	DPPPAPMD
182	1182 - ADD - DESA BENCOREJO	DESA BENCOREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	324.374.400,00	DPPPAPMD
183	1183 - ADD - DESA SUROREJO	DESA SUROREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	403.662.400,00	DPPPAPMD
184	1184 - ADD - DESA WANGUNREJO	DESA WANGUNREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	377.197.400,00	DPPPAPMD
185	1185 - ADD - DESA CENGKAWAKREJO	DESA CENGKAWAKREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	357.145.400,00	DPPPAPMD
186	1186 - ADD - DESA POPONGAN	DESA POPONGAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	378.051.400,00	DPPPAPMD
187	1187 - ADD - DESA BOROWETAN	DESA BOROWETAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	327.953.400,00	DPPPAPMD
188	1188 - ADD - DESA TEGALREJO	DESA TEGALREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	324.132.400,00	DPPPAPMD
189	1189 - ADD - DESA BANYUURIP	DESA BANYUURIP, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	377.800.400,00	DPPPAPMD
190	1190 - ADD - DESA MALANGREJO	DESA MALANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	377.791.400,00	DPPPAPMD
191	1191 - ADD - DESA TEGALKUNING	DESA TEGALKUNING, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	402.978.400,00	DPPPAPMD
192	1192 - ADD - DESA KLIWONAN	DESA KLIWONAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	322.539.400,00	DPPPAPMD
193	1193 - ADD - DESA KERTOSONO	DESA KERTOSONO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	324.156.400,00	DPPPAPMD
194	1194 - ADD - DESA TANJUNGANOM	DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	354.468.400,00	DPPPAPMD
195	1195 - ADD - DESA SAWIT	DESA SAWIT, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	322.118.400,00	DPPPAPMD
196	1196 - ADD - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	517.081.400,00	DPPPAPMD
197	1197 - ADD - DESA PAKISREJO	DESA PAKISREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	347.397.400,00	DPPPAPMD
198	1198 - ADD - DESA CANDINGASINAN	DESA CANDINGASINAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	354.654.400,00	DPPPAPMD
199	1199 - ADD - DESA SOKOWATEN	DESA SOKOWATEN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	353.357.400,00	DPPPAPMD
200	1200 - ADD - DESA GOLOK	DESA GOLOK, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	322.569.400,00	DPPPAPMD
201	1201 - ADD - DESA CANDISARI	DESA CANDISARI, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	325.053.400,00	DPPPAPMD
202	1202 - ADD - DESA CONDONGSARI	DESA CONDONGSARI, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	325.768.400,00	DPPPAPMD
203	1203 - ADD - DESA JONO	DESA JONO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	297.318.400,00	DPPPAPMD
204	1204 - ADD - DESA POGUNGJURUTENGAH	DESA POGUNGJURUTENGAH, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	355.278.400,00	DPPPAPMD
205	1205 - ADD - DESA POGUNGREJO	DESA POGUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	352.489.400,00	DPPPAPMD
206	1206 - ADD - DESA BANJAREJO	DESA BANJAREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	322.640.400,00	DPPPAPMD
207	1207 - ADD - DESA POGUNGKALANGAN	DESA POGUNGKALANGAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	298.086.400,00	DPPPAPMD
208	1208 - ADD - DESA KETIWIJAYAN	DESA KETIWIJAYAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	321.055.400,00	DPPPAPMD
209	1209 - ADD - DESA KRANDEGAN	DESA KRANDEGAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	409.145.400,00	DPPPAPMD
210	1210 - ADD - DESA TANJUNGREJO	DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	377.547.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
211	1211 - ADD - DESA DEWI	DESA DEWI, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	352.766.400,00	DPPPAPMD
212	1212 - ADD - DESA TANGKISAN	DESA TANGKISAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	296.926.400,00	DPPPAPMD
213	1213 - ADD - DESA JATINGARANG	DESA JATINGARANG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	324.716.400,00	DPPPAPMD
214	1214 - ADD - DESA BANDUNGKIDUL	DESA BANDUNGKIDUL, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	326.855.400,00	DPPPAPMD
215	1215 - ADD - DESA BANDUNGREJO	DESA BANDUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	355.003.400,00	DPPPAPMD
216	1216 - ADD - DESA BESOLE	DESA BESOLE, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	324.465.400,00	DPPPAPMD
217	1217 - ADD - DESA BOTOREJO	DESA BOTOREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	376.584.400,00	DPPPAPMD
218	1218 - ADD - DESA BOTODALEMAN	DESA BOTODALEMAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	297.606.400,00	DPPPAPMD
219	1219 - ADD - DESA DUKUHREJO	DESA DUKUHREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	324.870.400,00	DPPPAPMD
220	1220 - ADD - DESA GRANTUNG	DESA GRANTUNG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	332.726.400,00	DPPPAPMD
221	1221 - ADD - DESA KALIMIRU	DESA KALIMIRU, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	324.638.400,00	DPPPAPMD
222	1222 - ADD - DESA BRINGIN	DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	330.223.400,00	DPPPAPMD
223	1223 - ADD - DESA BAYAN	DESA BAYAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	324.878.400,00	DPPPAPMD
224	1224 - ADD - DESA PEKUTAN	DESA PEKUTAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	359.745.400,00	DPPPAPMD
225	1225 - ADD - DESA JRAKAH	DESA JRAKAH, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	357.158.400,00	DPPPAPMD
226	1226 - ADD - DESA SAMBENG	DESA SAMBENG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	409.902.400,00	DPPPAPMD
227	1227 - ADD - DESA PUCANGAGUNG	DESA PUCANGAGUNG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	388.498.400,00	DPPPAPMD
228	1228 - ADD - DESA KEBONDALEM	DESA KEBONDALEM, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	322.456.400,00	DPPPAPMD
229	1229 - ADD - DESA TUNTUNGPAIT	DESA TUNTUNGPAIT, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	245.093.400,00	DPPPAPMD
230	1230 - ADD - DESA KIYANGKONGREJO	DESA KIYANGKONGREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	273.473.400,00	DPPPAPMD
231	1231 - ADD - DESA SUREN	DESA SUREN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	414.630.400,00	DPPPAPMD
232	1232 - ADD - DESA KARANGWULUH	DESA KARANGWULUH, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	272.042.400,00	DPPPAPMD
233	1233 - ADD - DESA PURWOSARI	DESA PURWOSARI, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	354.602.400,00	DPPPAPMD
234	1234 - ADD - DESA KEPUH	DESA KEPUH, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	300.161.400,00	DPPPAPMD
235	1235 - ADD - DESA MAJIR	DESA MAJIR, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	380.753.400,00	DPPPAPMD
236	1236 - ADD - DESA KUWUREJO	DESA KUWUREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	246.316.400,00	DPPPAPMD
237	1237 - ADD - DESA PRINGGOWIJAYAN	DESA PRINGGOWIJAYAN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	300.174.400,00	DPPPAPMD
238	1238 - ADD - DESA SIDARUM	DESA SIDARUM, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	297.216.400,00	DPPPAPMD
239	1239 - ADD - DESA PACOR	DESA PACOR, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	328.642.400,00	DPPPAPMD
240	1240 - ADD - DESA TUNGGORONO	DESA TUNGGORONO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	274.008.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
241	1241 - ADD - DESA TEPUSKULON	DESA TEPUSKULON, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	326.584.400,00	DPPPAPMD
242	1242 - ADD - DESA SUKOHARJO	DESA SUKOHARJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	270.397.400,00	DPPPAPMD
243	1243 - ADD - DESA KEMADULOR	DESA KEMADULOR, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	242.321.400,00	DPPPAPMD
244	1244 - ADD - DESA KALIGESING	DESA KALIGESING, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	380.326.400,00	DPPPAPMD
245	1245 - ADD - DESA TEPUSWETAN	DESA TEPUSWETAN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	299.083.400,00	DPPPAPMD
246	1246 - ADD - DESA WIRUN	DESA WIRUN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	472.111.400,00	DPPPAPMD
247	1247 - ADD - DESA KARANGREJO	DESA KARANGREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	378.455.400,00	DPPPAPMD
248	1248 - ADD - DESA TURSINO	DESA TURSINO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	356.298.400,00	DPPPAPMD
249	1249 - ADD - DESA KEDUNGMULYO	DESA KEDUNGMULYO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	351.977.400,00	DPPPAPMD
250	1250 - ADD - DESA MANGUNJAYAN	DESA MANGUNJAYAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	243.757.400,00	DPPPAPMD
251	1251 - ADD - DESA KARANGANOM	DESA KARANGANOM, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	215.751.400,00	DPPPAPMD
252	1252 - ADD - DESA TANJUNGANOM	DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	216.188.400,00	DPPPAPMD
253	1253 - ADD - DESA SIDOMULYO	DESA SIDOMULYO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	321.343.400,00	DPPPAPMD
254	1254 - ADD - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	241.602.400,00	DPPPAPMD
255	1255 - ADD - DESA LANGENREJO	DESA LANGENREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	349.349.400,00	DPPPAPMD
256	1256 - ADD - DESA TAMANSARI	DESA TAMANSARI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	350.080.400,00	DPPPAPMD
257	1257 - ADD - DESA WARENG	DESA WARENG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	412.663.400,00	DPPPAPMD
258	1258 - ADD - DESA KETUG	DESA KETUG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	354.692.400,00	DPPPAPMD
259	1259 - ADD - DESA ROWODADI	DESA ROWODADI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	349.142.400,00	DPPPAPMD
260	1260 - ADD - DESA KEDUNGSARI	DESA KEDUNGSARI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	298.105.400,00	DPPPAPMD
261	1261 - ADD - DESA SRUWOHDUKUH	DESA SRUWOHDUKUH, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	214.803.400,00	DPPPAPMD
262	1262 - ADD - DESA WONODADI	DESA WONODADI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	243.907.400,00	DPPPAPMD
263	1263 - ADD - DESA WONOREJOWETAN	DESA WONOREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	215.786.400,00	DPPPAPMD
264	1264 - ADD - DESA WONOREJOKULON	DESA WONOREJOKULON, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	241.902.400,00	DPPPAPMD
265	1265 - ADD - DESA KUNIREJOKULON	DESA KUNIREJOKULON, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	243.666.400,00	DPPPAPMD
266	1266 - ADD - DESA KUNIREJOWETAN	DESA KUNIREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	215.672.400,00	DPPPAPMD
267	1267 - ADD - DESA KEDUNGSRI	DESA KEDUNGSRI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	295.914.400,00	DPPPAPMD
268	1268 - ADD - DESA KEDUNGAGUNG	DESA KEDUNGAGUNG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	297.454.400,00	DPPPAPMD
269	1269 - ADD - DESA SRUWOHREJO	DESA SRUWOHREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	272.948.400,00	DPPPAPMD
270	1270 - ADD - DESA LUGUREJO	DESA LUGUREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	298.545.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
271	1271 - ADD - DESA LUGU	DESA LUGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	245.310.400,00	DPPPAPMD
272	1272 - ADD - DESA KUNIR	DESA KUNIR, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	326.019.400,00	DPPPAPMD
273	1273 - ADD - DESA LUBANGDUKUH	DESA LUBANGDUKUH, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	215.797.400,00	DPPPAPMD
274	1274 - ADD - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	189.580.400,00	DPPPAPMD
275	1275 - ADD - DESA POLOMARTO	DESA POLOMARTO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	244.468.400,00	DPPPAPMD
276	1276 - ADD - DESA TEGALGONDO	DESA TEGALGONDO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	243.660.400,00	DPPPAPMD
277	1277 - ADD - DESA LUBANGLOR	DESA LUBANGLOR, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	272.440.400,00	DPPPAPMD
278	1278 - ADD - DESA LUBANGINDANGAN	DESA LUBANGINDANGAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	244.216.400,00	DPPPAPMD
279	1279 - ADD - DESA LUBANGKIDUL	DESA LUBANGKIDUL, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	298.291.400,00	DPPPAPMD
280	1280 - ADD - DESA LUBANGSAMPANG	DESA LUBANGSAMPANG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	296.600.400,00	DPPPAPMD
281	1281 - ADD - DESA DLANGU	DESA DLANGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	331.107.400,00	DPPPAPMD
282	1282 - ADD - DESA ANDONG	DESA ANDONG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	297.023.400,00	DPPPAPMD
283	1283 - ADD - DESA KALIWATUBUMI	DESA KALIWATUBUMI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	357.064.400,00	DPPPAPMD
284	1284 - ADD - DESA KALIWATUKRANGGAN	DESA KALIWATUKRANGGAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	326.525.400,00	DPPPAPMD
285	1285 - ADD - DESA PANGGELDLANGU	DESA PANGGELDLANGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	296.756.400,00	DPPPAPMD
286	1286 - ADD - DESA BINANGUN	DESA BINANGUN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	243.680.400,00	DPPPAPMD
287	1287 - ADD - DESA BUTUH	DESA BUTUH, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	358.999.400,00	DPPPAPMD
288	1288 - ADD - DESA KLEPU	DESA KLEPU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	268.968.400,00	DPPPAPMD
289	1289 - ADD - DESA WIRONATAN	DESA WIRONATAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	328.806.400,00	DPPPAPMD
290	1290 - ADD - DESA KENDALREJO	DESA KENDALREJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	328.302.400,00	DPPPAPMD
291	1291 - ADD - DESA KALIMATI	DESA KALIMATI, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	245.108.400,00	DPPPAPMD
292	1292 - ADD - DESA PEPE	DESA PEPE, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	215.155.400,00	DPPPAPMD
293	1293 - ADD - DESA TUNJUNGTEJO	DESA TUNJUNGTEJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	322.584.400,00	DPPPAPMD
294	1294 - ADD - DESA SEKARTEJO	DESA SEKARTEJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	294.568.400,00	DPPPAPMD
295	1295 - ADD - DESA TERSIDILOR	DESA TERSIDILOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	352.108.400,00	DPPPAPMD
296	1296 - ADD - DESA TERSIDIKIDUL	DESA TERSIDIKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	242.305.400,00	DPPPAPMD
297	1297 - ADD - DESA TASIKMADU	DESA TASIKMADU, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	271.976.400,00	DPPPAPMD
298	1298 - ADD - DESA PANGKALAN	DESA PANGKALAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	214.563.400,00	DPPPAPMD
299	1299 - ADD - DESA SUMBER	DESA SUMBER, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	301.881.400,00	DPPPAPMD
300	1300 - ADD - DESA GUMAWANGREJO	DESA GUMAWANGREJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	219.348.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
301	1301 - ADD - DESA KEBURUSAN	DESA KEBURUSAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	348.841.400,00	DPPPAPMD
302	1302 - ADD - DESA WONOYOSO	DESA WONOYOSO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	215.773.400,00	DPPPAPMD
303	1303 - ADD - DESA TAPEN	DESA TAPEN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	243.120.400,00	DPPPAPMD
304	1304 - ADD - DESA WARU	DESA WARU, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	215.432.400,00	DPPPAPMD
305	1305 - ADD - DESA BLEKATUK	DESA BLEKATUK, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	215.588.400,00	DPPPAPMD
306	1306 - ADD - DESA DLINSENWETAN	DESA DLINSENWETAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	243.134.400,00	DPPPAPMD
307	1307 - ADD - DESA DLINSENKULON	DESA DLINSENKULON, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	215.330.400,00	DPPPAPMD
308	1308 - ADD - DESA SEMAMPIR	DESA SEMAMPIR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	216.724.400,00	DPPPAPMD
309	1309 - ADD - DESA PETUGURAN	DESA PETUGURAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	269.518.400,00	DPPPAPMD
310	1310 - ADD - DESA PEKACANGAN	DESA PEKACANGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	271.469.400,00	DPPPAPMD
311	1311 - ADD - DESA KARANGGETAS	DESA KARANGGETAS, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	244.280.400,00	DPPPAPMD
312	1312 - ADD - DESA LUWENGKIDUL	DESA LUWENGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	243.006.400,00	DPPPAPMD
313	1313 - ADD - DESA SAMBENG	DESA SAMBENG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	241.848.400,00	DPPPAPMD
314	1314 - ADD - DESA MEGULUNGKIDUL	DESA MEGULUNGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	299.969.400,00	DPPPAPMD
315	1315 - ADD - DESA PITURUH	DESA PITURUH, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	439.084.400,00	DPPPAPMD
316	1316 - ADD - DESA SIKAMBANG	DESA SIKAMBANG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	269.657.400,00	DPPPAPMD
317	1317 - ADD - DESA NGAMPEL	DESA NGAMPEL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	380.031.400,00	DPPPAPMD
318	1318 - ADD - DESA PRIGELAN	DESA PRIGELAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	350.523.400,00	DPPPAPMD
319	1319 - ADD - DESA NGANDAGAN	DESA NGANDAGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	244.783.400,00	DPPPAPMD
320	1320 - ADD - DESA KARANGANYAR	DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	294.307.400,00	DPPPAPMD
321	1321 - ADD - DESA MEGULUNGLOR	DESA MEGULUNGLOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	296.740.400,00	DPPPAPMD
322	1322 - ADD - DESA PRAPAGKIDUL	DESA PRAPAGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	243.300.400,00	DPPPAPMD
323	1323 - ADD - DESA KEMBANGKUNING	DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	215.415.400,00	DPPPAPMD
324	1324 - ADD - DESA LUWENGLOR	DESA LUWENGLOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	245.768.400,00	DPPPAPMD
325	1325 - ADD - DESA BRENGKOL	DESA BRENGKOL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	336.688.400,00	DPPPAPMD
326	1326 - ADD - DESA GIRIGONDO	DESA GIRIGONDO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	445.385.400,00	DPPPAPMD
327	1327 - ADD - DESA PRAPAGLOR	DESA PRAPAGLOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	356.176.400,00	DPPPAPMD
328	1328 - ADD - DESA KALIKOTES	DESA KALIKOTES, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	357.357.400,00	DPPPAPMD
329	1329 - ADD - DESA KESAWEN	DESA KESAWEN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	244.577.400,00	DPPPAPMD
330	1330 - ADD - DESA KEDUNGBATUR	DESA KEDUNGBATUR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	214.895.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
331	1331 - ADD - DESA POLOWANGI	DESA POLOWANGI, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	216.648.400,00	DPPPAPMD
332	1332 - ADD - DESA KALIJERING	DESA KALIJERING, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	438.361.400,00	DPPPAPMD
333	1333 - ADD - DESA SOMOGEDE	DESA SOMOGEDE, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	408.500.400,00	DPPPAPMD
334	1334 - ADD - DESA KALIGONDANG	DESA KALIGONDANG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	349.662.400,00	DPPPAPMD
335	1335 - ADD - DESA KALIGINTUNG	DESA KALIGINTUNG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	385.515.400,00	DPPPAPMD
336	1336 - ADD - DESA SAWANGAN	DESA SAWANGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	353.362.400,00	DPPPAPMD
337	1337 - ADD - DESA WONOSIDO	DESA WONOSIDO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	358.828.400,00	DPPPAPMD
338	1338 - ADD - DESA PAMRIYAN	DESA PAMRIYAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	460.479.400,00	DPPPAPMD
339	1339 - ADD - DESA WALED	DESA WALED, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	268.671.400,00	DPPPAPMD
340	1340 - ADD - DESA KROYOKULON	DESA KROYOKULON, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	296.204.400,00	DPPPAPMD
341	1341 - ADD - DESA REJOSARI	DESA REJOSARI, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	324.968.400,00	DPPPAPMD
342	1342 - ADD - DESA GESIKAN	DESA GESIKAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	296.217.400,00	DPPPAPMD
343	1343 - ADD - DESA PAITAN	DESA PAITAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	352.749.400,00	DPPPAPMD
344	1344 - ADD - DESA GEDONG	DESA GEDONG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	348.843.400,00	DPPPAPMD
345	1345 - ADD - DESA ROWOBAYEM	DESA ROWOBAYEM, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	379.460.400,00	DPPPAPMD
346	1346 - ADD - DESA KEMIRIKIDUL	DESA KEMIRIKIDUL, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	378.152.400,00	DPPPAPMD
347	1347 - ADD - DESA BEDONOKLUWUNG	DESA BEDONOKLUWUNG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	382.073.400,00	DPPPAPMD
348	1348 - ADD - DESA BEDONOPAGERON	DESA BEDONOPAGERON, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	353.137.400,00	DPPPAPMD
349	1349 - ADD - DESA BEDONOKARANGDUWUR	DESA BEDONOKARANGDUWUR, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	326.657.400,00	DPPPAPMD
350	1350 - ADD - DESA REBUG	DESA REBUG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	326.050.400,00	DPPPAPMD
351	1351 - ADD - DESA LONING	DESA LONING, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	355.148.400,00	DPPPAPMD
352	1352 - ADD - DESA WINONG	DESA WINONG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	329.541.400,00	DPPPAPMD
353	1353 - ADD - DESA SUTORAGAN	DESA SUTORAGAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	327.625.400,00	DPPPAPMD
354	1354 - ADD - DESA JATIWANGSAN	DESA JATIWANGSAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	326.474.400,00	DPPPAPMD
355	1355 - ADD - DESA GIRIMULYO	DESA GIRIMULYO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	326.407.400,00	DPPPAPMD
356	1356 - ADD - DESA GIRIJOYO	DESA GIRIJOYO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	332.229.400,00	DPPPAPMD
357	1357 - ADD - DESA TURUS	DESA TURUS, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	384.151.400,00	DPPPAPMD
358	1358 - ADD - DESA DILEM	DESA DILEM, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	329.745.400,00	DPPPAPMD
359	1359 - ADD - DESA KEDUNGLO	DESA KEDUNGLO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	383.891.400,00	DPPPAPMD
360	1360 - ADD - DESA WONOSUKO	DESA WONOSUKO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	354.975.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
361	1361 - ADD - DESA SIDODADI	DESA SIDODADI, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	325.248.400,00	DPPPAPMD
362	1362 - ADD - DESA KALIMENENG	DESA KALIMENENG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	297.835.400,00	DPPPAPMD
363	1363 - ADD - DESA KEMIRILOR	DESA KEMIRILOR, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	326.031.400,00	DPPPAPMD
364	1364 - ADD - DESA KEREP	DESA KEREP, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	323.786.400,00	DPPPAPMD
365	1365 - ADD - DESA KROYOLOR	DESA KROYOLOR, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	378.092.400,00	DPPPAPMD
366	1366 - ADD - DESA SAMPING	DESA SAMPING, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	418.360.400,00	DPPPAPMD
367	1367 - ADD - DESA WONOSARI	DESA WONOSARI, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	296.545.400,00	DPPPAPMD
368	1368 - ADD - DESA KALIGLAGAH	DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	378.862.400,00	DPPPAPMD
369	1369 - ADD - DESA KAPITERAN	DESA KAPITERAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	296.568.400,00	DPPPAPMD
370	1370 - ADD - DESA WANUROJO	DESA WANUROJO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	326.242.400,00	DPPPAPMD
371	1371 - ADD - DESA REJOWINANGUN	DESA REJOWINANGUN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	383.892.400,00	DPPPAPMD
372	1372 - ADD - DESA KALIURIP	DESA KALIURIP, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	299.718.400,00	DPPPAPMD
373	1373 - ADD - DESA KEDUNGPOMAHANWETAN	DESA KEDUNGPOMAHANWETAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	361.360.400,00	DPPPAPMD
374	1374 - ADD - DESA KARANGLUAS	DESA KARANGLUAS, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	298.064.400,00	DPPPAPMD
375	1375 - ADD - DESA KEDUNGPOMAHANKULON	DESA KEDUNGPOMAHANKULON, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	414.338.400,00	DPPPAPMD
376	1376 - ADD - DESA SUKOGELAP	DESA SUKOGELAP, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	324.310.400,00	DPPPAPMD
377	1377 - ADD - DESA GUNUNGTEGES	DESA GUNUNGTEGES, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	297.913.400,00	DPPPAPMD
378	1378 - ADD - DESA PURBAYAN	DESA PURBAYAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	326.602.400,00	DPPPAPMD
379	1379 - ADD - DESA PUSPO	DESA PUSPO, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	404.110.400,00	DPPPAPMD
380	1380 - ADD - DESA PLIPIRAN	DESA PLIPIRAN, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	385.312.400,00	DPPPAPMD
381	1381 - ADD - DESA PAKISARUM	DESA PAKISARUM, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	431.709.400,00	DPPPAPMD
382	1382 - ADD - DESA BRUNOREJO	DESA BRUNOREJO, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	376.833.400,00	DPPPAPMD
383	1383 - ADD - DESA BRUNOSARI	DESA BRUNOSARI, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	381.337.400,00	DPPPAPMD
384	1384 - ADD - DESA SOMOLETER	DESA SOMOLETER, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	305.925.400,00	DPPPAPMD
385	1385 - ADD - DESA BLIMBING	DESA BLIMBING, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	340.948.400,00	DPPPAPMD
386	1386 - ADD - DESA GOWONG	DESA GOWONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	338.938.400,00	DPPPAPMD
387	1387 - ADD - DESA BRONDONG	DESA BRONDONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	401.313.400,00	DPPPAPMD
388	1388 - ADD - DESA CEPEDAK	DESA CEPEDAK, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	434.491.400,00	DPPPAPMD
389	1389 - ADD - DESA GUNUNGCONDONG	DESA GUNUNGCONDONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	383.464.400,00	DPPPAPMD
390	1390 - ADD - DESA KEMRANGGEN	DESA KEMRANGGEN, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	357.307.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
391	1391 - ADD - DESA KARANGGEDANG	DESA KARANGGEDANG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	300.481.400,00	DPPPAPMD
392	1392 - ADD - DESA GIYOMBONG	DESA GIYOMBONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	313.011.400,00	DPPPAPMD
393	1393 - ADD - DESA KAMBANGAN	DESA KAMBANGAN, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	249.910.400,00	DPPPAPMD
394	1394 - ADD - DESA WATUDUWUR	DESA WATUDUWUR, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	335.649.400,00	DPPPAPMD
395	1395 - ADD - DESA KALIWUNGU	DESA KALIWUNGU, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	379.395.400,00	DPPPAPMD
396	1396 - ADD - DESA TEGALSARI	DESA TEGALSARI, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	382.378.400,00	DPPPAPMD
397	1397 - ADD - DESA WINONGKIDUL	DESA WINONGKIDUL, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	356.084.400,00	DPPPAPMD
398	1398 - ADD - DESA SEREN	DESA SEREN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	415.825.400,00	DPPPAPMD
399	1399 - ADD - DESA GINTUNGAN	DESA GINTUNGAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	491.168.400,00	DPPPAPMD
400	1400 - ADD - DESA BULUS	DESA BULUS, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	330.875.400,00	DPPPAPMD
401	1401 - ADD - DESA RENDENG	DESA RENDENG, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	300.061.400,00	DPPPAPMD
402	1402 - ADD - DESA KROYO	DESA KROYO, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	355.394.400,00	DPPPAPMD
403	1403 - ADD - DESA WINONGLOR	DESA WINONGLOR, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	381.196.400,00	DPPPAPMD
404	1404 - ADD - DESA MLARAN	DESA MLARAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	329.437.400,00	DPPPAPMD
405	1405 - ADD - DESA PELUTAN	DESA PELUTAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	273.505.400,00	DPPPAPMD
406	1406 - ADD - DESA BENDOSARI	DESA BENDOSARI, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	297.490.400,00	DPPPAPMD
407	1407 - ADD - DESA GEBANG	DESA GEBANG, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	378.600.400,00	DPPPAPMD
408	1408 - ADD - DESA SALAM	DESA SALAM, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	245.583.400,00	DPPPAPMD
409	1409 - ADD - DESA PAKEM	DESA PAKEM, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	355.173.400,00	DPPPAPMD
410	1410 - ADD - DESA WONOTOPO	DESA WONOTOPO, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	246.243.400,00	DPPPAPMD
411	1411 - ADD - DESA SIDOLEREN	DESA SIDOLEREN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	325.334.400,00	DPPPAPMD
412	1412 - ADD - DESA PENUNGKULAN	DESA PENUNGKULAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	443.683.400,00	DPPPAPMD
413	1413 - ADD - DESA REDIN	DESA REDIN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	363.981.400,00	DPPPAPMD
414	1414 - ADD - DESA TLOGOSONO	DESA TLOGOSONO, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	273.061.400,00	DPPPAPMD
415	1415 - ADD - DESA NGEMPLAK	DESA NGEMPLAK, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	249.118.400,00	DPPPAPMD
416	1416 - ADD - DESA KRAGILAN	DESA KRAGILAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	271.850.400,00	DPPPAPMD
417	1417 - ADD - DESA PRUMBEN	DESA PRUMBEN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	245.824.400,00	DPPPAPMD
418	1418 - ADD - DESA NGAGLIK	DESA NGAGLIK, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	304.980.400,00	DPPPAPMD
419	1419 - ADD - DESA KEMIRI	DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	299.899.400,00	DPPPAPMD
420	1420 - ADD - DESA KALITENGKEK	DESA KALITENGKEK, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	281.001.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
421	1421 - ADD - DESA KALINONGKO	DESA KALINONGKO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	435.480.400,00	DPPPAPMD
422	1422 - ADD - DESA TRIREJO	DESA TRIREJO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	356.326.400,00	DPPPAPMD
423	1423 - ADD - DESA KARANGREJO	DESA KARANGREJO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	326.972.400,00	DPPPAPMD
424	1424 - ADD - DESA KALIKALONG	DESA KALIKALONG, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	351.044.400,00	DPPPAPMD
425	1425 - ADD - DESA RIMUN	DESA RIMUN, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	299.442.400,00	DPPPAPMD
426	1426 - ADD - DESA TEPANSARI	DESA TEPANSARI, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	435.809.400,00	DPPPAPMD
427	1427 - ADD - DESA KALIGLAGAH	DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	378.286.400,00	DPPPAPMD
428	1428 - ADD - DESA TRIDADI	DESA TRIDADI, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	325.321.400,00	DPPPAPMD
429	1429 - ADD - DESA BANYUASINSEPARE	DESA BANYUASINSEPARE, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	356.196.400,00	DPPPAPMD
430	1430 - ADD - DESA GUYANGAN	DESA GUYANGAN, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	296.344.400,00	DPPPAPMD
431	1431 - ADD - DESA KALISEMO	DESA KALISEMO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	358.180.400,00	DPPPAPMD
432	1432 - ADD - DESA LOANO	DESA LOANO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	569.611.400,00	DPPPAPMD
433	1433 - ADD - DESA JETIS	DESA JETIS, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	466.943.400,00	DPPPAPMD
434	1434 - ADD - DESA KEDUNGPOH	DESA KEDUNGPOH, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	356.347.400,00	DPPPAPMD
435	1435 - ADD - DESA MARON	DESA MARON, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	380.607.400,00	DPPPAPMD
436	1436 - ADD - DESA KEBON GUNUNG	DESA KEBON GUNUNG, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	381.041.400,00	DPPPAPMD
437	1437 - ADD - DESA MUDALREJO	DESA MUDALREJO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	436.436.400,00	DPPPAPMD
438	1438 - ADD - DESA KEMEJING	DESA KEMEJING, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	354.476.400,00	DPPPAPMD
439	1439 - ADD - DESA BANYUASINKEMBARAN	DESA BANYUASINKEMBARAN, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	355.064.400,00	DPPPAPMD
440	1440 - ADD - DESA SEDAYU	DESA SEDAYU, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	436.277.400,00	DPPPAPMD
441	1441 - ADD - DESA NGARGOSARI	DESA NGARGOSARI, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	380.890.400,00	DPPPAPMD
442	1442 - ADD - DESA BENOWO	DESA BENOWO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	301.283.400,00	DPPPAPMD
443	1443 - ADD - DESA KALITAPAS	DESA KALITAPAS, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	244.098.400,00	DPPPAPMD
444	1444 - ADD - DESA KALIWADER	DESA KALIWADER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	388.372.400,00	DPPPAPMD
445	1445 - ADD - DESA KEDUNGPUCANG	DESA KEDUNGPUCANG, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	389.067.400,00	DPPPAPMD
446	1446 - ADD - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	355.820.400,00	DPPPAPMD
447	1447 - ADD - DESA KALIBOTO	DESA KALIBOTO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	354.613.400,00	DPPPAPMD
448	1448 - ADD - DESA KALIURIP	DESA KALIURIP, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	353.491.400,00	DPPPAPMD
449	1449 - ADD - DESA KEDUNGLOTENG	DESA KEDUNGLOTENG, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	270.907.400,00	DPPPAPMD
450	1450 - ADD - DESA WADAS	DESA WADAS, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	304.682.400,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
451	1451 - ADD - DESA CACABANKIDUL	DESA CACABANKIDUL, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	407.959.400,00	DPPPAPMD
452	1452 - ADD - DESA CACABANLOR	DESA CACABANLOR, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	325.021.400,00	DPPPAPMD
453	1453 - ADD - DESA PEKACANGAN	DESA PEKACANGAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	384.998.400,00	DPPPAPMD
454	1454 - ADD - DESA MEDONO	DESA MEDONO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	301.997.400,00	DPPPAPMD
455	1455 - ADD - DESA BLEBER	DESA BLEBER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	352.034.400,00	DPPPAPMD
456	1456 - ADD - DESA BENER	DESA BENER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	416.774.400,00	DPPPAPMD
457	1457 - ADD - DESA KARANGSARI	DESA KARANGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	307.161.400,00	DPPPAPMD
458	1458 - ADD - DESA GUNTUR	DESA GUNTUR, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	558.259.400,00	DPPPAPMD
459	1459 - ADD - DESA LEGETAN	DESA LEGETAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	438.723.400,00	DPPPAPMD
460	1460 - ADD - DESA KETOSARI	DESA KETOSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	330.670.400,00	DPPPAPMD
461	1461 - ADD - DESA KAMIJORO	DESA KAMIJORO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	301.218.400,00	DPPPAPMD
462	1462 - ADD - DESA JATI	DESA JATI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	438.292.400,00	DPPPAPMD
463	1463 - ADD - DESA MAYUNGSARI	DESA MAYUNGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	382.155.400,00	DPPPAPMD
464	1464 - ADD - DESA KALIJAMBE	DESA KALIJAMBE, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	392.614.400,00	DPPPAPMD
465	1465 - ADD - DESA SUKOWUWUH	DESA SUKOWUWUH, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	387.536.400,00	DPPPAPMD
466	1466 - ADD - DESA LIMBANGAN	DESA LIMBANGAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	358.600.400,00	DPPPAPMD
467	1467 - ADD - DESA NGLARIS	DESA NGLARIS, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	383.431.400,00	DPPPAPMD
468	1468 - ADD - DESA SIDOMUKTI	DESA SIDOMUKTI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	248.806.400,00	DPPPAPMD
469	1469 - ADD - DESA NGASINAN	DESA NGASINAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	412.652.400,00	DPPPAPMD
470	0470 - ADD - DESA-DESA DI KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN PURWOREJO	2.019.532,00	DPPPAPMD
	JUMLAH ADD SILTAP DAN NONSILTAP		**150.214.254.132,00**	
	THR PERANGKAT DESA			
1	1001 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA HARJOBINANGUN	DESA HARJOBINANGUN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	9.550.000,00	DPPPAPMD
2	1002 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PATUTREJO	DESA PATUTREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	8.125.000,00	DPPPAPMD
3	1003 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KETAWANGREJO	DESA KETAWANGREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	11.975.000,00	DPPPAPMD
4	1004 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA MUNGGANGSARI	DESA MUNGGANGSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
5	1005 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KERTOJAYAN	DESA KERTOJAYAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
6	1006 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PASARANOM	DESA PASARANOM, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	8.125.000,00	DPPPAPMD
7	1007 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA UKIRSARI	DESA UKIRSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
8	1008 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NAMBANGAN	DESA NAMBANGAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	9.375.000,00	DPPPAPMD
9	1009 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUMBERAGUNG	DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	9.550.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
10	1010 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BENDUNGAN	DESA BENDUNGAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
11	1011 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA ROWODADI	DESA ROWODADI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
12	1012 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BAKUREJO	DESA BAKUREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.500.000,00	DPPPAPMD
13	1013 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DUDUWETAN	DESA DUDUWETAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
14	1014 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DUDUKULON	DESA DUDUKULON, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
15	1015 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA REJOSARI	DESA REJOSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
16	1016 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TRIMULYO	DESA TRIMULYO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
17	1017 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TULUSREJO	DESA TULUSREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
18	1018 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TEGALREJO	DESA TEGALREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
19	1019 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIREJO	DESA KALIREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
20	1020 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOENGGAL	DESA WONOENGGAL, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
21	1021 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BANYUYOSO	DESA BANYUYOSO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
22	1022 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GRABAG	DESA GRABAG, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
23	1023 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA AGLIK	DESA AGLIK, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
24	1024 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA ROWOREJO	DESA ROWOREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
25	1025 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TUNGGULREJO	DESA TUNGGULREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
26	1026 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGKAMAL	DESA KEDUNGKAMAL, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
27	1027 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SANGUBANYU	DESA SANGUBANYU, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
28	1028 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DUKUHDUNGUS	DESA DUKUHDUNGUS, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
29	1029 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TLEPOKWETAN	DESA TLEPOKWETAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
30	1030 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TLEPOKKULON	DESA TLEPOKKULON, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
31	1031 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KUMPULREJO	DESA KUMPULREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
32	1032 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KESE	DESA KESE, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
33	1033 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NGENTAK	DESA NGENTAK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
34	1034 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GIRIREJO	DESA GIRIREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
35	1035 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WERO	DESA WERO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
36	1036 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PAGAK	DESA PAGAK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
37	1037 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA MALANG	DESA MALANG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
38	1038 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DEPOKREJO	DESA DEPOKREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
39	1039 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEBURUHAN	DESA KEBURUHAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
40	1040 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA AWU-AWU	DESA AWU-AWU, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
41	1041 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KUMPULSARI	DESA KUMPULSARI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
42	1042 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KESIDAN	DESA KESIDAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
43	1043 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOROTO	DESA WONOROTO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
44	1044 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PEJAGRAN	DESA PEJAGRAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
45	1045 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOSARI	DESA WONOSARI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
46	1046 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOSRI	DESA WONOSRI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
47	1047 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JERUKEN	DESA JERUKEN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
48	1048 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TANJUNGREJO	DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
49	1049 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALITANJUNG	DESA KALITANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
50	1050 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KUWUKAN	DESA KUWUKAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
51	1051 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDONDONG	DESA KEDONDONG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
52	1052 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA RASUKAN	DESA RASUKAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
53	1053 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LABAN	DESA LABAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
54	1054 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WASIAT	DESA WASIAT, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
55	1055 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TUNJUNGAN	DESA TUNJUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
56	1056 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA RINGGIT	DESA RINGGIT, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
57	1057 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIWUNGUKIDUL	DESA KALIWUNGUKIDUL, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
58	1058 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIWUNGULOR	DESA KALIWUNGULOR, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
59	1059 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA COKROYASAN	DESA COKROYASAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
60	1060 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BOJONG	DESA BOJONG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
61	1061 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KARANGTALUN	DESA KARANGTALUN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
62	1062 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUSUK	DESA SUSUK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
63	1063 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KLANDARAN	DESA KLANDARAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
64	1064 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BRIYAN	DESA BRIYAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
65	1065 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NGOMBOL	DESA NGOMBOL, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
66	1066 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JOSO	DESA JOSO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
67	1067 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA CANDI	DESA CANDI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
68	1068 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PULUTAN	DESA PULUTAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
69	1069 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WALIKORO	DESA WALIKORO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
70	1070 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SRUWOH	DESA SRUWOH, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
71	1071 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOBOYO	DESA WONOBOYO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
72	1072 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEMBANGKUNING	DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
73	1073 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JOMBANG	DESA JOMBANG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
74	1074 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA MENDIRO	DESA MENDIRO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
75	1075 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WUNUT	DESA WUNUT, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
76	1076 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUMBERREJO	DESA SUMBERREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
77	1077 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WINGKOSIGROMULYO	DESA WINGKOSIGROMULYO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
78	1078 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WINGKOHARJO	DESA WINGKOHARJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
79	1079 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SINGKILKULON	DESA SINGKILKULON, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
80	1080 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SINGKILWETAN	DESA SINGKILWETAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
81	1081 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TUMENGGUNGAN	DESA TUMENGGUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
82	1082 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA CURUG	DESA CURUG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
83	1083 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WINGKOSANGGRAHAN	DESA WINGKOSANGGRAHAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
84	1084 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WINGKOMULYO	DESA WINGKOMULYO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
85	1085 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WINGKOTINUMPUK	DESA WINGKOTINUMPUK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
86	1086 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PIYONO	DESA PIYONO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
87	1087 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TANJUNG	DESA TANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
88	1088 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SECANG	DESA SECANG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
89	1089 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SEBOROPASAR	DESA SEBOROPASAR, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
90	1090 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JATIMALANG	DESA JATIMALANG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
91	1091 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JATIKONTAL	DESA JATIKONTAL, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
92	1092 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GEDANGAN	DESA GEDANGAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
93	1093 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KARANGANYAR	DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
94	1094 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JOGOBOYO	DESA JOGOBOYO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
95	1095 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WATUKURO	DESA WATUKURO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	5.000.000,00	DPPPAPMD
96	1096 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KARANGSARI	DESA KARANGSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
97	1097 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BANJARSARI	DESA BANJARSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
98	1098 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEBONSARI	DESA KEBONSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
99	1099 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SIDOHARJO	DESA SIDOHARJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
100	1100 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JOGORESAN	DESA JOGORESAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
101	1101 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GEPARANG	DESA GEPARANG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
102	1102 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NAMPUREJO	DESA NAMPUREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
103	1103 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KENTENGREJO	DESA KENTENGREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
104	1104 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NAMPU	DESA NAMPU, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
105	1105 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GESING	DESA GESING, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
106	1106 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEPONGGOK	DESA KEPONGGOK, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
107	1107 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BUBUTAN	DESA BUBUTAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.250.000,00	DPPPAPMD
108	1108 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TEGALAREN	DESA TEGALAREN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
109	1109 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUKOMANAH	DESA SUKOMANAH, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
110	1110 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BLENDUNG	DESA BLENDUNG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
111	1111 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GUYANGAN	DESA GUYANGAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
112	1112 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BONGKOT	DESA BONGKOT, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
113	1113 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PURWODADI	DESA PURWODADI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
114	1114 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
115	1115 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PURWOSARI	DESA PURWOSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
116	1116 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JENARWETAN	DESA JENARWETAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
117	1117 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JENARKIDUL	DESA JENARKIDUL, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
118	1118 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JENARLOR	DESA JENARLOR, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	8.125.000,00	DPPPAPMD
119	1119 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PUNDENSARI	DESA PUNDENSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
120	1120 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KESUGIHAN	DESA KESUGIHAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
121	1121 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
122	1122 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PLANDI	DESA PLANDI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
123	1123 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BRAGOLAN	DESA BRAGOLAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
124	1124 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KETANGI	DESA KETANGI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
125	1125 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KARANGMULYO	DESA KARANGMULYO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
126	1126 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUREN	DESA KEDUREN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
127	1127 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUMBEREJO	DESA SUMBEREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
128	1128 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BRONDONGREJO	DESA BRONDONGREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
129	1129 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
130	1130 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DADIREJO	DESA DADIREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	8.750.000,00	DPPPAPMD
131	1131 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TLOGOKOTES	DESA TLOGOKOTES, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
132	1132 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BAPANGSARI	DESA BAPANGSARI, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	10.175.000,00	DPPPAPMD
133	1133 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BUGEL	DESA BUGEL, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
134	1134 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BAGELEN	DESA BAGELEN, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	10.175.000,00	DPPPAPMD
135	1135 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KRENDETAN	DESA KRENDETAN, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
136	1136 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SOMOREJO	DESA SOMOREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
137	1137 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA HARGOROJO	DESA HARGOROJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
138	1138 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DURENSARI	DESA DURENSARI, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
139	1139 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SEMONO	DESA SEMONO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
140	1140 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SOKOAGUNG	DESA SOKOAGUNG, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
141	1141 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIREJO	DESA KALIREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
142	1142 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA CLAPAR	DESA CLAPAR, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
143	1143 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SOKO	DESA SOKO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
144	1144 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SEMAGUNG	DESA SEMAGUNG, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
145	1145 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PIJI	DESA PIJI, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
146	1146 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEMANUKAN	DESA KEMANUKAN, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
147	1147 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JATIREJO	DESA JATIREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
148	1148 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SOMONGARI	DESA SOMONGARI, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
149	1149 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DONOREJO	DESA DONOREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
150	1150 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA HULOSOBO	DESA HULOSOBO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
151	1151 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIHARJO	DESA KALIHARJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
152	1152 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIGONO	DESA KALIGONO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	12.050.000,00	DPPPAPMD
153	1153 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TLOGOGUWO	DESA TLOGOGUWO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	9.550.000,00	DPPPAPMD
154	1154 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PANDANREJO	DESA PANDANREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
155	1155 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TAWANGSARI	DESA TAWANGSARI, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
156	1156 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TLOGOBULU	DESA TLOGOBULU, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
157	1157 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PURBOWONO	DESA PURBOWONO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
158	1158 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NGARAN	DESA NGARAN, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
159	1159 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGGUBAH	DESA KEDUNGGUBAH, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
160	1160 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JELOK	DESA JELOK, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	9.550.000,00	DPPPAPMD
161	1161 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
162	1162 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GUNUNGWANGI	DESA GUNUNGWANGI, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
163	1163 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA HARDIMULYO	DESA HARDIMULYO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
164	1164 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUDOROGO	DESA SUDOROGO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
165	1165 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUMOWONO	DESA SUMOWONO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
166	1166 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NGADIREJO	DESA NGADIREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
167	1167 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PUCUNGROTO	DESA PUCUNGROTO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
168	1168 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PACEKELAN	DESA PACEKELAN, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
169	1169 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PLIPIR	DESA PLIPIR, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
170	1170 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BRENGGONG	DESA BRENGGONG, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	9.375.000,00	DPPPAPMD
171	1171 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GANGGENG	DESA GANGGENG, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	11.425.000,00	DPPPAPMD
172	1172 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SEMAWUNG	DESA SEMAWUNG, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	10.175.000,00	DPPPAPMD
173	1173 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOROTO	DESA WONOROTO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
174	1174 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SIDOREJO	DESA SIDOREJO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
175	1175 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOTULUS	DESA WONOTULUS, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
176	1176 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SIDOMULYO	DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	10.450.000,00	DPPPAPMD
177	1177 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUDIMORO	DESA SUDIMORO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
178	1178 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DONORATI	DESA DONORATI, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
179	1179 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SEBOROKRAPYAK	DESA SEBOROKRAPYAK, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
180	1180 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TRIWARNO	DESA TRIWARNO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
181	1181 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BAJANGREJO	DESA BAJANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
182	1182 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BENCOREJO	DESA BENCOREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
183	1183 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUROREJO	DESA SUROREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
184	1184 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WANGUNREJO	DESA WANGUNREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	9.200.000,00	DPPPAPMD
185	1185 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA CENGKAWAKREJO	DESA CENGKAWAKREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
186	1186 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA POPONGAN	DESA POPONGAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
187	1187 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BOROWETAN	DESA BOROWETAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
188	1188 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TEGALREJO	DESA TEGALREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.500.000,00	DPPPAPMD
189	1189 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BANYUURIP	DESA BANYUURIP, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
190	1190 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA MALANGREJO	DESA MALANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
191	1191 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TEGALKUNING	DESA TEGALKUNING, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
192	1192 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KLIWONAN	DESA KLIWONAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
193	1193 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KERTOSONO	DESA KERTOSONO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
194	1194 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TANJUNGANOM	DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
195	1195 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SAWIT	DESA SAWIT, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
196	1196 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	11.425.000,00	DPPPAPMD
197	1197 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PAKISREJO	DESA PAKISREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
198	1198 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA CANDINGASINAN	DESA CANDINGASINAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
199	1199 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SOKOWATEN	DESA SOKOWATEN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
200	1200 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GOLOK	DESA GOLOK, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
201	1201 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA CANDISARI	DESA CANDISARI, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
202	1202 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA CONDONGSARI	DESA CONDONGSARI, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
203	1203 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JONO	DESA JONO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
204	1204 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA POGUNGJURUTENGAH	DESA POGUNGJURUTENGAH, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
205	1205 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA POGUNGREJO	DESA POGUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
206	1206 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BANJAREJO	DESA BANJAREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
207	1207 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA POGUNGKALANGAN	DESA POGUNGKALANGAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
208	1208 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KETIWIJAYAN	DESA KETIWIJAYAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
209	1209 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KRANDEGAN	DESA KRANDEGAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
210	1210 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TANJUNGREJO	DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
211	1211 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DEWI	DESA DEWI, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
212	1212 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TANGKISAN	DESA TANGKISAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
213	1213 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JATINGARANG	DESA JATINGARANG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
214	1214 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BANDUNGKIDUL	DESA BANDUNGKIDUL, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
215	1215 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BANDUNGREJO	DESA BANDUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	8.125.000,00	DPPPAPMD
216	1216 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BESOLE	DESA BESOLE, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
217	1217 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BOTOREJO	DESA BOTOREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
218	1218 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BOTODALEMAN	DESA BOTODALEMAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
219	1219 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DUKUHREJO	DESA DUKUHREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
220	1220 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GRANTUNG	DESA GRANTUNG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
221	1221 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIMIRU	DESA KALIMIRU, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
222	1222 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BRINGIN	DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
223	1223 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BAYAN	DESA BAYAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
224	1224 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PEKUTAN	DESA PEKUTAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
225	1225 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JRAKAH	DESA JRAKAH, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
226	1226 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SAMBENG	DESA SAMBENG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
227	1227 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PUCANGAGUNG	DESA PUCANGAGUNG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	8.750.000,00	DPPPAPMD
228	1228 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEBONDALEM	DESA KEBONDALEM, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
229	1229 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TUNTUNGPAIT	DESA TUNTUNGPAIT, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
230	1230 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KIYANGKONGREJO	DESA KIYANGKONGREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
231	1231 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUREN	DESA SUREN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
232	1232 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KARANGWULUH	DESA KARANGWULUH, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
233	1233 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PURWOSARI	DESA PURWOSARI, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
234	1234 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEPUH	DESA KEPUH, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
235	1235 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA MAJIR	DESA MAJIR, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
236	1236 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KUWUREJO	DESA KUWUREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	5.625.000,00	DPPPAPMD
237	1237 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PRINGGOWIJAYAN	DESA PRINGGOWIJAYAN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
238	1238 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SIDARUM	DESA SIDARUM, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	6.875.000,00	DPPPAPMD
239	1239 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PACOR	DESA PACOR, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
240	1240 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TUNGGORONO	DESA TUNGGORONO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
241	1241 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TEPUSKULON	DESA TEPUSKULON, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
242	1242 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUKOHARJO	DESA SUKOHARJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
243	1243 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEMADULOR	DESA KEMADULOR, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
244	1244 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIGESING	DESA KALIGESING, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
245	1245 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TEPUSWETAN	DESA TEPUSWETAN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	6.875.000,00	DPPPAPMD
246	1246 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WIRUN	DESA WIRUN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	10.175.000,00	DPPPAPMD
247	1247 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KARANGREJO	DESA KARANGREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
248	1248 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TURSINO	DESA TURSINO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
249	1249 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGMULYO	DESA KEDUNGMULYO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	8.575.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
250	1250 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA MANGUNJAYAN	DESA MANGUNJAYAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
251	1251 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KARANGANOM	DESA KARANGANOM, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
252	1252 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TANJUNGANOM	DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
253	1253 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SIDOMULYO	DESA SIDOMULYO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
254	1254 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
255	1255 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LANGENREJO	DESA LANGENREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
256	1256 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TAMANSARI	DESA TAMANSARI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
257	1257 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WARENG	DESA WARENG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.825.000,00	DPPPAPMD
258	1258 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KETUG	DESA KETUG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
259	1259 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA ROWODADI	DESA ROWODADI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
260	1260 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGSARI	DESA KEDUNGSARI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
261	1261 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SRUWOHDUKUH	DESA SRUWOHDUKUH, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
262	1262 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONODADI	DESA WONODADI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
263	1263 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOREJOWETAN	DESA WONOREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
264	1264 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOREJOKULON	DESA WONOREJOKULON, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.625.000,00	DPPPAPMD
265	1265 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KUNIREJOKULON	DESA KUNIREJOKULON, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
266	1266 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KUNIREJOWETAN	DESA KUNIREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
267	1267 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGSRI	DESA KEDUNGSRI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
268	1268 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGAGUNG	DESA KEDUNGAGUNG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
269	1269 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SRUWOHREJO	DESA SRUWOHREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.250.000,00	DPPPAPMD
270	1270 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LUGUREJO	DESA LUGUREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
271	1271 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LUGU	DESA LUGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.625.000,00	DPPPAPMD
272	1272 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KUNIR	DESA KUNIR, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
273	1273 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LUBANGDUKUH	DESA LUBANGDUKUH, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
274	1274 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	3.925.000,00	DPPPAPMD
275	1275 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA POLOMARTO	DESA POLOMARTO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
276	1276 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TEGALGONDO	DESA TEGALGONDO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
277	1277 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LUBANGLOR	DESA LUBANGLOR, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
278	1278 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LUBANGINDANGAN	DESA LUBANGINDANGAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
279	1279 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LUBANGKIDUL	DESA LUBANGKIDUL, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
280	1280 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LUBANGSAMPANG	DESA LUBANGSAMPANG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
281	1281 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DLANGU	DESA DLANGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.950.000,00	DPPPAPMD
282	1282 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA ANDONG	DESA ANDONG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
283	1283 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIWATUBUMI	DESA KALIWATUBUMI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
284	1284 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIWATUKRANGGAN	DESA KALIWATUKRANGGAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
285	1285 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PANGGELDLANGU	DESA PANGGELDLANGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
286	1286 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BINANGUN	DESA BINANGUN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
287	1287 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BUTUH	DESA BUTUH, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
288	1288 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KLEPU	DESA KLEPU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
289	1289 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WIRONATAN	DESA WIRONATAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	8.850.000,00	DPPPAPMD
290	1290 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KENDALREJO	DESA KENDALREJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
291	1291 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIMATI	DESA KALIMATI, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.625.000,00	DPPPAPMD
292	1292 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PEPE	DESA PEPE, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
293	1293 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TUNJUNGTEJO	DESA TUNJUNGTEJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
294	1294 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SEKARTEJO	DESA SEKARTEJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
295	1295 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TERSIDILOR	DESA TERSIDILOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
296	1296 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TERSIDIKIDUL	DESA TERSIDIKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
297	1297 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TASIKMADU	DESA TASIKMADU, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
298	1298 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PANGKALAN	DESA PANGKALAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
299	1299 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUMBER	DESA SUMBER, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
300	1300 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GUMAWANGREJO	DESA GUMAWANGREJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
301	1301 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEBURUSAN	DESA KEBURUSAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
302	1302 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOYOSO	DESA WONOYOSO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
303	1303 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TAPEN	DESA TAPEN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
304	1304 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WARU	DESA WARU, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
305	1305 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BLEKATUK	DESA BLEKATUK, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
306	1306 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DLINSENWETAN	DESA DLINSENWETAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
307	1307 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DLINSENKULON	DESA DLINSENKULON, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
308	1308 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SEMAMPIR	DESA SEMAMPIR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
309	1309 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PETUGURAN	DESA PETUGURAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
310	1310 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PEKACANGAN	DESA PEKACANGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
311	1311 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KARANGGETAS	DESA KARANGGETAS, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
312	1312 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LUWENGKIDUL	DESA LUWENGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
313	1313 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SAMBENG	DESA SAMBENG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
314	1314 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA MEGULUNGKIDUL	DESA MEGULUNGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.875.000,00	DPPPAPMD
315	1315 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PITURUH	DESA PITURUH, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	10.450.000,00	DPPPAPMD
316	1316 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SIKAMBANG	DESA SIKAMBANG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
317	1317 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NGAMPEL	DESA NGAMPEL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
318	1318 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PRIGELAN	DESA PRIGELAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
319	1319 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NGANDAGAN	DESA NGANDAGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.625.000,00	DPPPAPMD
320	1320 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KARANGANYAR	DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
321	1321 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA MEGULUNGLOR	DESA MEGULUNGLOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
322	1322 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PRAPAGKIDUL	DESA PRAPAGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
323	1323 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEMBANGKUNING	DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
324	1324 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LUWENGLOR	DESA LUWENGLOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
325	1325 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BRENGKOL	DESA BRENGKOL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
326	1326 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GIRIGONDO	DESA GIRIGONDO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.550.000,00	DPPPAPMD
327	1327 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PRAPAGLOR	DESA PRAPAGLOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
328	1328 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIKOTES	DESA KALIKOTES, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
329	1329 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KESAWEN	DESA KESAWEN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
330	1330 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGBATUR	DESA KEDUNGBATUR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
331	1331 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA POLOWANGI	DESA POLOWANGI, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	4.550.000,00	DPPPAPMD
332	1332 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIJERING	DESA KALIJERING, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.550.000,00	DPPPAPMD
333	1333 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SOMOGEDE	DESA SOMOGEDE, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
334	1334 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIGONDANG	DESA KALIGONDANG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
335	1335 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIGINTUNG	DESA KALIGINTUNG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	8.750.000,00	DPPPAPMD
336	1336 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SAWANGAN	DESA SAWANGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
337	1337 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOSIDO	DESA WONOSIDO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	8.125.000,00	DPPPAPMD
338	1338 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PAMRIYAN	DESA PAMRIYAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	10.175.000,00	DPPPAPMD
339	1339 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WALED	DESA WALED, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
340	1340 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KROYOKULON	DESA KROYOKULON, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
341	1341 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA REJOSARI	DESA REJOSARI, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
342	1342 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GESIKAN	DESA GESIKAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
343	1343 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PAITAN	DESA PAITAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
344	1344 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GEDONG	DESA GEDONG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
345	1345 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA ROWOBAYEM	DESA ROWOBAYEM, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
346	1346 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEMIRIKIDUL	DESA KEMIRIKIDUL, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
347	1347 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BEDONOKLUWUNG	DESA BEDONOKLUWUNG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
348	1348 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BEDONOPAGERON	DESA BEDONOPAGERON, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
349	1349 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BEDONOKARANGDUWUR	DESA BEDONOKARANGDUWUR, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
350	1350 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA REBUG	DESA REBUG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
351	1351 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LONING	DESA LONING, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
352	1352 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WINONG	DESA WINONG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
353	1353 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUTORAGAN	DESA SUTORAGAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
354	1354 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JATIWANGSAN	DESA JATIWANGSAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
355	1355 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GIRIMULYO	DESA GIRIMULYO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
356	1356 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GIRIJOYO	DESA GIRIJOYO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.500.000,00	DPPPAPMD
357	1357 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TURUS	DESA TURUS, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
358	1358 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA DILEM	DESA DILEM, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
359	1359 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGLO	DESA KEDUNGLO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
360	1360 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOSUKO	DESA WONOSUKO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
361	1361 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SIDODADI	DESA SIDODADI, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
362	1362 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIMENENG	DESA KALIMENENG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
363	1363 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEMIRILOR	DESA KEMIRILOR, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
364	1364 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEREP	DESA KEREP, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
365	1365 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KROYOLOR	DESA KROYOLOR, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
366	1366 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SAMPING	DESA SAMPING, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
367	1367 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOSARI	DESA WONOSARI, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
368	1368 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIGLAGAH	DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
369	1369 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KAPITERAN	DESA KAPITERAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
370	1370 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WANUROJO	DESA WANUROJO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
371	1371 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA REJOWINANGUN	DESA REJOWINANGUN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
372	1372 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIURIP	DESA KALIURIP, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
373	1373 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGPOMAHANWETAN	DESA KEDUNGPOMAHANWETAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
374	1374 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KARANGLUAS	DESA KARANGLUAS, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
375	1375 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGPOMAHANKULON	DESA KEDUNGPOMAHANKULON, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
376	1376 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUKOGELAP	DESA SUKOGELAP, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
377	1377 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GUNUNGTEGES	DESA GUNUNGTEGES, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
378	1378 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PURBAYAN	DESA PURBAYAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
379	1379 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PUSPO	DESA PUSPO, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
380	1380 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PLIPIRAN	DESA PLIPIRAN, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
381	1381 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PAKISARUM	DESA PAKISARUM, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
382	1382 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BRUNOREJO	DESA BRUNOREJO, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	8.125.000,00	DPPPAPMD
383	1383 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BRUNOSARI	DESA BRUNOSARI, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
384	1384 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SOMOLETER	DESA SOMOLETER, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
385	1385 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BLIMBING	DESA BLIMBING, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
386	1386 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GOWONG	DESA GOWONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
387	1387 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BRONDONG	DESA BRONDONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
388	1388 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA CEPEDAK	DESA CEPEDAK, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	9.375.000,00	DPPPAPMD
389	1389 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GUNUNGCONDONG	DESA GUNUNGCONDONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
390	1390 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEMRANGGEN	DESA KEMRANGGEN, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
391	1391 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KARANGGEDANG	DESA KARANGGEDANG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
392	1392 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GIYOMBONG	DESA GIYOMBONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
393	1393 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KAMBANGAN	DESA KAMBANGAN, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
394	1394 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WATUDUWUR	DESA WATUDUWUR, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
395	1395 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIWUNGU	DESA KALIWUNGU, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
396	1396 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TEGALSARI	DESA TEGALSARI, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	9.025.000,00	DPPPAPMD
397	1397 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WINONGKIDUL	DESA WINONGKIDUL, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
398	1398 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SEREN	DESA SEREN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	9.375.000,00	DPPPAPMD
399	1399 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GINTUNGAN	DESA GINTUNGAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	10.800.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
400	1400 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BULUS	DESA BULUS, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
401	1401 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA RENDENG	DESA RENDENG, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
402	1402 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KROYO	DESA KROYO, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
403	1403 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WINONGLOR	DESA WINONGLOR, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
404	1404 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA MLARAN	DESA MLARAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
405	1405 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PELUTAN	DESA PELUTAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
406	1406 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BENDOSARI	DESA BENDOSARI, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
407	1407 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GEBANG	DESA GEBANG, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
408	1408 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SALAM	DESA SALAM, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	5.625.000,00	DPPPAPMD
409	1409 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PAKEM	DESA PAKEM, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
410	1410 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WONOTOPO	DESA WONOTOPO, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
411	1411 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SIDOLEREN	DESA SIDOLEREN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
412	1412 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PENUNGKULAN	DESA PENUNGKULAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	9.550.000,00	DPPPAPMD
413	1413 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA REDIN	DESA REDIN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
414	1414 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TLOGOSONO	DESA TLOGOSONO, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
415	1415 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NGEMPLAK	DESA NGEMPLAK, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
416	1416 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KRAGILAN	DESA KRAGILAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
417	1417 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PRUMBEN	DESA PRUMBEN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
418	1418 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NGAGLIK	DESA NGAGLIK, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
419	1419 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEMIRI	DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
420	1420 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALITENGKEK	DESA KALITENGKEK, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
421	1421 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALINONGKO	DESA KALINONGKO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	9.550.000,00	DPPPAPMD
422	1422 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TRIREJO	DESA TRIREJO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
423	1423 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KARANGREJO	DESA KARANGREJO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
424	1424 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIKALONG	DESA KALIKALONG, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
425	1425 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA RIMUN	DESA RIMUN, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
426	1426 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TEPANSARI	DESA TEPANSARI, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	9.550.000,00	DPPPAPMD
427	1427 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIGLAGAH	DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
428	1428 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA TRIDADI	DESA TRIDADI, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
429	1429 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BANYUASINSEPARE	DESA BANYUASINSEPARE, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
430	1430 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GUYANGAN	DESA GUYANGAN, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
431	1431 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALISEMO	DESA KALISEMO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
432	1432 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LOANO	DESA LOANO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	12.675.000,00	DPPPAPMD
433	1433 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA JETIS	DESA JETIS, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	10.175.000,00	DPPPAPMD
434	1434 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGPOH	DESA KEDUNGPOH, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
435	1435 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA MARON	DESA MARON, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
436	1436 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEBON GUNUNG	DESA KEBON GUNUNG, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
437	1437 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA MUDALREJO	DESA MUDALREJO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	9.550.000,00	DPPPAPMD
438	1438 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEMEJING	DESA KEMEJING, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
439	1439 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BANYUASINKEMBARAN	DESA BANYUASINKEMBARAN, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
440	1440 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SEDAYU	DESA SEDAYU, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	10.000.000,00	DPPPAPMD
441	1441 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NGARGOSARI	DESA NGARGOSARI, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
442	1442 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BENOWO	DESA BENOWO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
443	1443 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALITAPAS	DESA KALITAPAS, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
444	1444 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIWADER	DESA KALIWADER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
445	1445 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGPUCANG	DESA KEDUNGPUCANG, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	8.750.000,00	DPPPAPMD
446	1446 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
447	1447 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIBOTO	DESA KALIBOTO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
448	1448 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIURIP	DESA KALIURIP, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
449	1449 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGLOTENG	DESA KEDUNGLOTENG, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	5.800.000,00	DPPPAPMD
450	1450 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA WADAS	DESA WADAS, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
451	1451 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA CACABANKIDUL	DESA CACABANKIDUL, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
452	1452 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA CACABANLOR	DESA CACABANLOR, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
453	1453 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA PEKACANGAN	DESA PEKACANGAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
454	1454 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA MEDONO	DESA MEDONO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
455	1455 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BLEBER	DESA BLEBER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
456	1456 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA BENER	DESA BENER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
457	1457 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KARANGSARI	DESA KARANGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	7.325.000,00	DPPPAPMD
458	1458 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA GUNTUR	DESA GUNTUR, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	12.050.000,00	DPPPAPMD
459	1459 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LEGETAN	DESA LEGETAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	9.550.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
460	1460 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KETOSARI	DESA KETOSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	7.050.000,00	DPPPAPMD
461	1461 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KAMIJORO	DESA KAMIJORO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	6.425.000,00	DPPPAPMD
462	1462 - ADD THR PERANGKAT DESA - I	DESA JATI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	10.000.000,00	DPPPAPMD
463	1463 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA MAYUNGSARI	DESA MAYUNGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
464	1464 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA KALIJAMBE	DESA KALIJAMBE, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
465	1465 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SUKOWUWUH	DESA SUKOWUWUH, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
466	1466 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA LIMBANGAN	DESA LIMBANGAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	7.675.000,00	DPPPAPMD
467	1467 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NGLARIS	DESA NGLARIS, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	8.300.000,00	DPPPAPMD
468	1468 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA SIDOMUKTI	DESA SIDOMUKTI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	5.175.000,00	DPPPAPMD
469	1469 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA NGASINAN	DESA NGASINAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	8.925.000,00	DPPPAPMD
470	0470 - ADD THR PERANGKAT DESA - DESA-DESA DI KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN PURWOREJO		DPPPAPMD
	JUMLAH ADD THR PERANGKAT DESA		**3.258.525.000,00**	
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA		**153.472.779.132,00**	
C	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW**			
1	2001 - INSENTIF RT/RW - DESA HARJOBINANGUN	DESA HARJOBINANGUN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
2	2002 - INSENTIF RT/RW - DESA PATUTREJO	DESA PATUTREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
3	2003 - INSENTIF RT/RW - DESA KETAWANGREJO	DESA KETAWANGREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	99.000.000,00	DPPPAPMD
4	2004 - INSENTIF RT/RW - DESA MUNGGANGSARI	DESA MUNGGANGSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
5	2005 - INSENTIF RT/RW - DESA KERTOJAYAN	DESA KERTOJAYAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
6	2006 - INSENTIF RT/RW - DESA PASARANOM	DESA PASARANOM, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
7	2007 - INSENTIF RT/RW - DESA UKIRSARI	DESA UKIRSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
8	2008 - INSENTIF RT/RW - DESA NAMBANGAN	DESA NAMBANGAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
9	2009 - INSENTIF RT/RW - DESA SUMBERAGUNG	DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
10	2010 - INSENTIF RT/RW - DESA BENDUNGAN	DESA BENDUNGAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
11	2011 - INSENTIF RT/RW - DESA ROWODADI	DESA ROWODADI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
12	2012 - INSENTIF RT/RW - DESA BAKUREJO	DESA BAKUREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
13	2013 - INSENTIF RT/RW - DESA DUDUWETAN	DESA DUDUWETAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
14	2014 - INSENTIF RT/RW - DESA DUDUKULON	DESA DUDUKULON, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
15	2015 - INSENTIF RT/RW - DESA REJOSARI	DESA REJOSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
16	2016 - INSENTIF RT/RW - DESA TRIMULYO	DESA TRIMULYO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
17	2017 - INSENTIF RT/RW - DESA TULUSREJO	DESA TULUSREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
18	2018 - INSENTIF RT/RW - DESA TEGALREJO	DESA TEGALREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
19	2019 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIREJO	DESA KALIREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	15.000.000,00	DPPPAPMD
20	2020 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOENGGAL	DESA WONOENGGAL, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
21	2021 - INSENTIF RT/RW - DESA BANYUYOSO	DESA BANYUYOSO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
22	2022 - INSENTIF RT/RW - DESA GRABAG	DESA GRABAG, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
23	2023 - INSENTIF RT/RW - DESA AGLIK	DESA AGLIK, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
24	2024 - INSENTIF RT/RW - DESA ROWOREJO	DESA ROWOREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
25	2025 - INSENTIF RT/RW - DESA TUNGGULREJO	DESA TUNGGULREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
26	2026 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUNGKAMAL	DESA KEDUNGKAMAL, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
27	2027 - INSENTIF RT/RW - DESA SANGUBANYU	DESA SANGUBANYU, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
28	2028 - INSENTIF RT/RW - DESA DUKUHDUNGUS	DESA DUKUHDUNGUS, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
29	2029 - INSENTIF RT/RW - DESA TLEPOKWETAN	DESA TLEPOKWETAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
30	2030 - INSENTIF RT/RW - DESA TLEPOKKULON	DESA TLEPOKKULON, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
31	2031 - INSENTIF RT/RW - DESA KUMPULREJO	DESA KUMPULREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
32	2032 - INSENTIF RT/RW - DESA KESE	DESA KESE, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
33	2033 - INSENTIF RT/RW - DESA NGENTAK	DESA NGENTAK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
34	2034 - INSENTIF RT/RW - DESA GIRIREJO	DESA GIRIREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
35	2035 - INSENTIF RT/RW - DESA WERO	DESA WERO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
36	2036 - INSENTIF RT/RW - DESA PAGAK	DESA PAGAK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
37	2037 - INSENTIF RT/RW - DESA MALANG	DESA MALANG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
38	2038 - INSENTIF RT/RW - DESA DEPOKREJO	DESA DEPOKREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
39	2039 - INSENTIF RT/RW - DESA KEBURUHAN	DESA KEBURUHAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	15.000.000,00	DPPPAPMD
40	2040 - INSENTIF RT/RW - DESA AWU-AWU	DESA AWU-AWU, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
41	2041 - INSENTIF RT/RW - DESA KUMPULSARI	DESA KUMPULSARI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
42	2042 - INSENTIF RT/RW - DESA KESIDAN	DESA KESIDAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
43	2043 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOROTO	DESA WONOROTO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
44	2044 - INSENTIF RT/RW - DESA PEJAGRAN	DESA PEJAGRAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
45	2045 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOSARI	DESA WONOSARI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
46	2046 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOSRI	DESA WONOSRI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
47	2047 - INSENTIF RT/RW - DESA JERUKEN	DESA JERUKEN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
48	2048 - INSENTIF RT/RW - DESA TANJUNGREJO	DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
49	2049 - INSENTIF RT/RW - DESA KALITANJUNG	DESA KALITANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
50	2050 - INSENTIF RT/RW - DESA KUWUKAN	DESA KUWUKAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
51	2051 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDONDONG	DESA KEDONDONG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
52	2052 - INSENTIF RT/RW - DESA RASUKAN	DESA RASUKAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
53	2053 - INSENTIF RT/RW - DESA LABAN	DESA LABAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
54	2054 - INSENTIF RT/RW - DESA WASIAT	DESA WASIAT, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
55	2055 - INSENTIF RT/RW - DESA TUNJUNGAN	DESA TUNJUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
56	2056 - INSENTIF RT/RW - DESA RINGGIT	DESA RINGGIT, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	15.000.000,00	DPPPAPMD
57	2057 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIWUNGUKIDUL	DESA KALIWUNGUKIDUL, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
58	2058 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIWUNGULOR	DESA KALIWUNGULOR, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	15.000.000,00	DPPPAPMD
59	2059 - INSENTIF RT/RW - DESA COKROYASAN	DESA COKROYASAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
60	2060 - INSENTIF RT/RW - DESA BOJONG	DESA BOJONG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
61	2061 - INSENTIF RT/RW - DESA KARANGTALUN	DESA KARANGTALUN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
62	2062 - INSENTIF RT/RW - DESA SUSUK	DESA SUSUK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
63	2063 - INSENTIF RT/RW - DESA KLANDARAN	DESA KLANDARAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
64	2064 - INSENTIF RT/RW - DESA BRIYAN	DESA BRIYAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
65	2065 - INSENTIF RT/RW - DESA NGOMBOL	DESA NGOMBOL, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
66	2066 - INSENTIF RT/RW - DESA JOSO	DESA JOSO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
67	2067 - INSENTIF RT/RW - DESA CANDI	DESA CANDI, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
68	2068 - INSENTIF RT/RW - DESA PULUTAN	DESA PULUTAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
69	2069 - INSENTIF RT/RW - DESA WALIKORO	DESA WALIKORO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
70	2070 - INSENTIF RT/RW - DESA SRUWOH	DESA SRUWOH, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
71	2071 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOBOYO	DESA WONOBOYO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
72	2072 - INSENTIF RT/RW - DESA KEMBANGKUNING	DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
73	2073 - INSENTIF RT/RW - DESA JOMBANG	DESA JOMBANG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
74	2074 - INSENTIF RT/RW - DESA MENDIRO	DESA MENDIRO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
75	2075 - INSENTIF RT/RW - DESA WUNUT	DESA WUNUT, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
76	2076 - INSENTIF RT/RW - DESA SUMBERREJO	DESA SUMBERREJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
77	2077 - INSENTIF RT/RW - DESA WINGKOSIGROMULYO	DESA WINGKOSIGROMULYO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
78	2078 - INSENTIF RT/RW - DESA WINGKOHARJO	DESA WINGKOHARJO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
79	2079 - INSENTIF RT/RW - DESA SINGKILKULON	DESA SINGKILKULON, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
80	2080 - INSENTIF RT/RW - DESA SINGKILWETAN	DESA SINGKILWETAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
81	2081 - INSENTIF RT/RW - DESA TUMENGGUNGAN	DESA TUMENGGUNGAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
82	2082 - INSENTIF RT/RW - DESA CURUG	DESA CURUG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
83	2083 - INSENTIF RT/RW - DESA WINGKOSANGGRAHAN	DESA WINGKOSANGGRAHAN, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
84	2084 - INSENTIF RT/RW - DESA WINGKOMULYO	DESA WINGKOMULYO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	15.000.000,00	DPPPAPMD
85	2085 - INSENTIF RT/RW - DESA WINGKOTINUMPUK	DESA WINGKOTINUMPUK, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
86	2086 - INSENTIF RT/RW - DESA PIYONO	DESA PIYONO, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
87	2087 - INSENTIF RT/RW - DESA TANJUNG	DESA TANJUNG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	15.000.000,00	DPPPAPMD
88	2088 - INSENTIF RT/RW - DESA SECANG	DESA SECANG, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
89	2089 - INSENTIF RT/RW - DESA SEBOROPASAR	DESA SEBOROPASAR, KECAMATAN NGOMBOL, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
90	2090 - INSENTIF RT/RW - DESA JATIMALANG	DESA JATIMALANG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
91	2091 - INSENTIF RT/RW - DESA JATIKONTAL	DESA JATIKONTAL, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
92	2092 - INSENTIF RT/RW - DESA GEDANGAN	DESA GEDANGAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	15.000.000,00	DPPPAPMD
93	2093 - INSENTIF RT/RW - DESA KARANGANYAR	DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
94	2094 - INSENTIF RT/RW - DESA JOGOBOYO	DESA JOGOBOYO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
95	2095 - INSENTIF RT/RW - DESA WATUKURO	DESA WATUKURO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
96	2096 - INSENTIF RT/RW - DESA KARANGSARI	DESA KARANGSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
97	2097 - INSENTIF RT/RW - DESA BANJARSARI	DESA BANJARSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
98	2098 - INSENTIF RT/RW - DESA KEBONSARI	DESA KEBONSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	15.000.000,00	DPPPAPMD
99	2099 - INSENTIF RT/RW - DESA SIDOHARJO	DESA SIDOHARJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
100	2100 - INSENTIF RT/RW - DESA JOGORESAN	DESA JOGORESAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
101	2101 - INSENTIF RT/RW - DESA GEPARANG	DESA GEPARANG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
102	2102 - INSENTIF RT/RW - DESA NAMPUREJO	DESA NAMPUREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
103	2103 - INSENTIF RT/RW - DESA KENTENGREJO	DESA KENTENGREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
104	2104 - INSENTIF RT/RW - DESA NAMPU	DESA NAMPU, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
105	2105 - INSENTIF RT/RW - DESA GESING	DESA GESING, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
106	2106 - INSENTIF RT/RW - DESA KEPONGGOK	DESA KEPONGGOK, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
107	2107 - INSENTIF RT/RW - DESA BUBUTAN	DESA BUBUTAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
108	2108 - INSENTIF RT/RW - DESA TEGALAREN	DESA TEGALAREN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
109	2109 - INSENTIF RT/RW - DESA SUKOMANAH	DESA SUKOMANAH, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
110	2110 - INSENTIF RT/RW - DESA BLENDUNG	DESA BLENDUNG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	15.000.000,00	DPPPAPMD
111	2111 - INSENTIF RT/RW - DESA GUYANGAN	DESA GUYANGAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
112	2112 - INSENTIF RT/RW - DESA BONGKOT	DESA BONGKOT, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
113	2113 - INSENTIF RT/RW - DESA PURWODADI	DESA PURWODADI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
114	2114 - INSENTIF RT/RW - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
115	2115 - INSENTIF RT/RW - DESA PURWOSARI	DESA PURWOSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
116	2116 - INSENTIF RT/RW - DESA JENARWETAN	DESA JENARWETAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	69.000.000,00	DPPPAPMD
117	2117 - INSENTIF RT/RW - DESA JENARKIDUL	DESA JENARKIDUL, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
118	2118 - INSENTIF RT/RW - DESA JENARLOR	DESA JENARLOR, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
119	2119 - INSENTIF RT/RW - DESA PUNDENSARI	DESA PUNDENSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
120	2120 - INSENTIF RT/RW - DESA KESUGIHAN	DESA KESUGIHAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
121	2121 - INSENTIF RT/RW - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
122	2122 - INSENTIF RT/RW - DESA PLANDI	DESA PLANDI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
123	2123 - INSENTIF RT/RW - DESA BRAGOLAN	DESA BRAGOLAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
124	2124 - INSENTIF RT/RW - DESA KETANGI	DESA KETANGI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
125	2125 - INSENTIF RT/RW - DESA KARANGMULYO	DESA KARANGMULYO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
126	2126 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUREN	DESA KEDUREN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
127	2127 - INSENTIF RT/RW - DESA SUMBEREJO	DESA SUMBEREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
128	2128 - INSENTIF RT/RW - DESA BRONDONGREJO	DESA BRONDONGREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
129	2129 - INSENTIF RT/RW - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
130	2130 - INSENTIF RT/RW - DESA DADIREJO	DESA DADIREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	72.000.000,00	DPPPAPMD
131	2131 - INSENTIF RT/RW - DESA TLOGOKOTES	DESA TLOGOKOTES, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
132	2132 - INSENTIF RT/RW - DESA BAPANGSARI	DESA BAPANGSARI, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	108.000.000,00	DPPPAPMD
133	2133 - INSENTIF RT/RW - DESA BUGEL	DESA BUGEL, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
134	2134 - INSENTIF RT/RW - DESA BAGELEN	DESA BAGELEN, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	108.000.000,00	DPPPAPMD
135	2135 - INSENTIF RT/RW - DESA KRENDETAN	DESA KRENDETAN, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	90.000.000,00	DPPPAPMD
136	2136 - INSENTIF RT/RW - DESA SOMOREJO	DESA SOMOREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	102.000.000,00	DPPPAPMD
137	2137 - INSENTIF RT/RW - DESA HARGOROJO	DESA HARGOROJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
138	2138 - INSENTIF RT/RW - DESA DURENSARI	DESA DURENSARI, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
139	2139 - INSENTIF RT/RW - DESA SEMONO	DESA SEMONO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
140	2140 - INSENTIF RT/RW - DESA SOKOAGUNG	DESA SOKOAGUNG, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
141	2141 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIREJO	DESA KALIREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	66.000.000,00	DPPPAPMD
142	2142 - INSENTIF RT/RW - DESA CLAPAR	DESA CLAPAR, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
143	2143 - INSENTIF RT/RW - DESA SOKO	DESA SOKO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
144	2144 - INSENTIF RT/RW - DESA SEMAGUNG	DESA SEMAGUNG, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
145	2145 - INSENTIF RT/RW - DESA PIJI	DESA PIJI, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
146	2146 - INSENTIF RT/RW - DESA KEMANUKAN	DESA KEMANUKAN, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
147	2147 - INSENTIF RT/RW - DESA JATIREJO	DESA JATIREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
148	2148 - INSENTIF RT/RW - DESA SOMONGARI	DESA SOMONGARI, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	84.000.000,00	DPPPAPMD
149	2149 - INSENTIF RT/RW - DESA DONOREJO	DESA DONOREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	93.000.000,00	DPPPAPMD
150	2150 - INSENTIF RT/RW - DESA HULOSOBO	DESA HULOSOBO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
151	2151 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIHARJO	DESA KALIHARJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
152	2152 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIGONO	DESA KALIGONO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	156.000.000,00	DPPPAPMD
153	2153 - INSENTIF RT/RW - DESA TLOGOGUWO	DESA TLOGOGUWO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	114.000.000,00	DPPPAPMD
154	2154 - INSENTIF RT/RW - DESA PANDANREJO	DESA PANDANREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
155	2155 - INSENTIF RT/RW - DESA TAWANGSARI	DESA TAWANGSARI, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
156	2156 - INSENTIF RT/RW - DESA TLOGOBULU	DESA TLOGOBULU, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
157	2157 - INSENTIF RT/RW - DESA PURBOWONO	DESA PURBOWONO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
158	2158 - INSENTIF RT/RW - DESA NGARAN	DESA NGARAN, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
159	2159 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUNGGUBAH	DESA KEDUNGGUBAH, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
160	2160 - INSENTIF RT/RW - DESA JELOK	DESA JELOK, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
161	2161 - INSENTIF RT/RW - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
162	2162 - INSENTIF RT/RW - DESA GUNUNGWANGI	DESA GUNUNGWANGI, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	6.000.000,00	DPPPAPMD
163	2163 - INSENTIF RT/RW - DESA HARDIMULYO	DESA HARDIMULYO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
164	2164 - INSENTIF RT/RW - DESA SUDOROGO	DESA SUDOROGO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	57.000.000,00	DPPPAPMD
165	2165 - INSENTIF RT/RW - DESA SUMOWONO	DESA SUMOWONO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
166	2166 - INSENTIF RT/RW - DESA NGADIREJO	DESA NGADIREJO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
167	2167 - INSENTIF RT/RW - DESA PUCUNGROTO	DESA PUCUNGROTO, KECAMATAN KALIGESING, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
168	2168 - INSENTIF RT/RW - DESA PACEKELAN	DESA PACEKELAN, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	75.000.000,00	DPPPAPMD
169	2169 - INSENTIF RT/RW - DESA PLIPIR	DESA PLIPIR, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
170	2170 - INSENTIF RT/RW - DESA BRENGGONG	DESA BRENGGONG, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	57.000.000,00	DPPPAPMD
171	2171 - INSENTIF RT/RW - DESA GANGGENG	DESA GANGGENG, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
172	2172 - INSENTIF RT/RW - DESA SEMAWUNG	DESA SEMAWUNG, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	78.000.000,00	DPPPAPMD
173	2173 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOROTO	DESA WONOROTO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
174	2174 - INSENTIF RT/RW - DESA SIDOREJO	DESA SIDOREJO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
175	2175 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOTULUS	DESA WONOTULUS, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
176	2176 - INSENTIF RT/RW - DESA SIDOMULYO	DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	96.000.000,00	DPPPAPMD
177	2177 - INSENTIF RT/RW - DESA SUDIMORO	DESA SUDIMORO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
178	2178 - INSENTIF RT/RW - DESA DONORATI	DESA DONORATI, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
179	2179 - INSENTIF RT/RW - DESA SEBOROKRAPYAK	DESA SEBOROKRAPYAK, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
180	2180 - INSENTIF RT/RW - DESA TRIWARNO	DESA TRIWARNO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
181	2181 - INSENTIF RT/RW - DESA BAJANGREJO	DESA BAJANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
182	2182 - INSENTIF RT/RW - DESA BENCOREJO	DESA BENCOREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
183	2183 - INSENTIF RT/RW - DESA SUROREJO	DESA SUROREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
184	2184 - INSENTIF RT/RW - DESA WANGUNREJO	DESA WANGUNREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
185	2185 - INSENTIF RT/RW - DESA CENGKAWAKREJO	DESA CENGKAWAKREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	69.000.000,00	DPPPAPMD
186	2186 - INSENTIF RT/RW - DESA POPONGAN	DESA POPONGAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	66.000.000,00	DPPPAPMD
187	2187 - INSENTIF RT/RW - DESA BOROWETAN	DESA BOROWETAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	51.000.000,00	DPPPAPMD
188	2188 - INSENTIF RT/RW - DESA TEGALREJO	DESA TEGALREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
189	2189 - INSENTIF RT/RW - DESA BANYUURIP	DESA BANYUURIP, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	51.000.000,00	DPPPAPMD
190	2190 - INSENTIF RT/RW - DESA MALANGREJO	DESA MALANGREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
191	2191 - INSENTIF RT/RW - DESA TEGALKUNING	DESA TEGALKUNING, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
192	2192 - INSENTIF RT/RW - DESA KLIWONAN	DESA KLIWONAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
193	2193 - INSENTIF RT/RW - DESA KERTOSONO	DESA KERTOSONO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
194	2194 - INSENTIF RT/RW - DESA TANJUNGANOM	DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
195	2195 - INSENTIF RT/RW - DESA SAWIT	DESA SAWIT, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
196	2196 - INSENTIF RT/RW - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	120.000.000,00	DPPPAPMD
197	2197 - INSENTIF RT/RW - DESA PAKISREJO	DESA PAKISREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
198	2198 - INSENTIF RT/RW - DESA CANDINGASINAN	DESA CANDINGASINAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
199	2199 - INSENTIF RT/RW - DESA SOKOWATEN	DESA SOKOWATEN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
200	2200 - INSENTIF RT/RW - DESA GOLOK	DESA GOLOK, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
201	2201 - INSENTIF RT/RW - DESA CANDISARI	DESA CANDISARI, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
202	2202 - INSENTIF RT/RW - DESA CONDONGSARI	DESA CONDONGSARI, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
203	2203 - INSENTIF RT/RW - DESA JONO	DESA JONO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
204	2204 - INSENTIF RT/RW - DESA POGUNGJURUTENGAH	DESA POGUNGJURUTENGAH, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	51.000.000,00	DPPPAPMD
205	2205 - INSENTIF RT/RW - DESA POGUNGREJO	DESA POGUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
206	2206 - INSENTIF RT/RW - DESA BANJAREJO	DESA BANJAREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
207	2207 - INSENTIF RT/RW - DESA POGUNGKALANGAN	DESA POGUNGKALANGAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
208	2208 - INSENTIF RT/RW - DESA KETIWIJAYAN	DESA KETIWIJAYAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
209	2209 - INSENTIF RT/RW - DESA KRANDEGAN	DESA KRANDEGAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
210	2210 - INSENTIF RT/RW - DESA TANJUNGREJO	DESA TANJUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
211	2211 - INSENTIF RT/RW - DESA DEWI	DESA DEWI, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
212	2212 - INSENTIF RT/RW - DESA TANGKISAN	DESA TANGKISAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
213	2213 - INSENTIF RT/RW - DESA JATINGARANG	DESA JATINGARANG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
214	2214 - INSENTIF RT/RW - DESA BANDUNGKIDUL	DESA BANDUNGKIDUL, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
215	2215 - INSENTIF RT/RW - DESA BANDUNGREJO	DESA BANDUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	51.000.000,00	DPPPAPMD
216	2216 - INSENTIF RT/RW - DESA BESOLE	DESA BESOLE, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
217	2217 - INSENTIF RT/RW - DESA BOTOREJO	DESA BOTOREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
218	2218 - INSENTIF RT/RW - DESA BOTODALEMAN	DESA BOTODALEMAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
219	2219 - INSENTIF RT/RW - DESA DUKUHREJO	DESA DUKUHREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
220	2220 - INSENTIF RT/RW - DESA GRANTUNG	DESA GRANTUNG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
221	2221 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIMIRU	DESA KALIMIRU, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
222	2222 - INSENTIF RT/RW - DESA BRINGIN	DESA BRINGIN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
223	2223 - INSENTIF RT/RW - DESA BAYAN	DESA BAYAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
224	2224 - INSENTIF RT/RW - DESA PEKUTAN	DESA PEKUTAN, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
225	2225 - INSENTIF RT/RW - DESA JRAKAH	DESA JRAKAH, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	51.000.000,00	DPPPAPMD
226	2226 - INSENTIF RT/RW - DESA SAMBENG	DESA SAMBENG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
227	2227 - INSENTIF RT/RW - DESA PUCANGAGUNG	DESA PUCANGAGUNG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	66.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
228	2228 - INSENTIF RT/RW - DESA KEBONDALEM	DESA KEBONDALEM, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
229	2229 - INSENTIF RT/RW - DESA TUNTUNGPAIT	DESA TUNTUNGPAIT, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
230	2230 - INSENTIF RT/RW - DESA KIYANGKONGREJO	DESA KIYANGKONGREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
231	2231 - INSENTIF RT/RW - DESA SUREN	DESA SUREN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	93.000.000,00	DPPPAPMD
232	2232 - INSENTIF RT/RW - DESA KARANGWULUH	DESA KARANGWULUH, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
233	2233 - INSENTIF RT/RW - DESA PURWOSARI	DESA PURWOSARI, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
234	2234 - INSENTIF RT/RW - DESA KEPUH	DESA KEPUH, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
235	2235 - INSENTIF RT/RW - DESA MAJIR	DESA MAJIR, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
236	2236 - INSENTIF RT/RW - DESA KUWUREJO	DESA KUWUREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
237	2237 - INSENTIF RT/RW - DESA PRINGGOWIJAYAN	DESA PRINGGOWIJAYAN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
238	2238 - INSENTIF RT/RW - DESA SIDARUM	DESA SIDARUM, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
239	2239 - INSENTIF RT/RW - DESA PACOR	DESA PACOR, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
240	2240 - INSENTIF RT/RW - DESA TUNGGORONO	DESA TUNGGORONO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
241	2241 - INSENTIF RT/RW - DESA TEPUSKULON	DESA TEPUSKULON, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
242	2242 - INSENTIF RT/RW - DESA SUKOHARJO	DESA SUKOHARJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
243	2243 - INSENTIF RT/RW - DESA KEMADULOR	DESA KEMADULOR, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
244	2244 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIGESING	DESA KALIGESING, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	51.000.000,00	DPPPAPMD
245	2245 - INSENTIF RT/RW - DESA TEPUSWETAN	DESA TEPUSWETAN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
246	2246 - INSENTIF RT/RW - DESA WIRUN	DESA WIRUN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	90.000.000,00	DPPPAPMD
247	2247 - INSENTIF RT/RW - DESA KARANGREJO	DESA KARANGREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
248	2248 - INSENTIF RT/RW - DESA TURSINO	DESA TURSINO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
249	2249 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUNGMULYO	DESA KEDUNGMULYO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
250	2250 - INSENTIF RT/RW - DESA MANGUNJAYAN	DESA MANGUNJAYAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
251	2251 - INSENTIF RT/RW - DESA KARANGANOM	DESA KARANGANOM, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
252	2252 - INSENTIF RT/RW - DESA TANJUNGANOM	DESA TANJUNGANOM, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
253	2253 - INSENTIF RT/RW - DESA SIDOMULYO	DESA SIDOMULYO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
254	2254 - INSENTIF RT/RW - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
255	2255 - INSENTIF RT/RW - DESA LANGENREJO	DESA LANGENREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
256	2256 - INSENTIF RT/RW - DESA TAMANSARI	DESA TAMANSARI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
257	2257 - INSENTIF RT/RW - DESA WARENG	DESA WARENG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	72.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
258	2258 - INSENTIF RT/RW - DESA KETUG	DESA KETUG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
259	2259 - INSENTIF RT/RW - DESA ROWODADI	DESA ROWODADI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
260	2260 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUNGSARI	DESA KEDUNGSARI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
261	2261 - INSENTIF RT/RW - DESA SRUWOHDUKUH	DESA SRUWOHDUKUH, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
262	2262 - INSENTIF RT/RW - DESA WONODADI	DESA WONODADI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
263	2263 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOREJOWETAN	DESA WONOREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
264	2264 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOREJOKULON	DESA WONOREJOKULON, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
265	2265 - INSENTIF RT/RW - DESA KUNIREJOKULON	DESA KUNIREJOKULON, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
266	2266 - INSENTIF RT/RW - DESA KUNIREJOWETAN	DESA KUNIREJOWETAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
267	2267 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUNGSRI	DESA KEDUNGSRI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
268	2268 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUNGAGUNG	DESA KEDUNGAGUNG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
269	2269 - INSENTIF RT/RW - DESA SRUWOHREJO	DESA SRUWOHREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
270	2270 - INSENTIF RT/RW - DESA LUGUREJO	DESA LUGUREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
271	2271 - INSENTIF RT/RW - DESA LUGU	DESA LUGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
272	2272 - INSENTIF RT/RW - DESA KUNIR	DESA KUNIR, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
273	2273 - INSENTIF RT/RW - DESA LUBANGDUKUH	DESA LUBANGDUKUH, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
274	2274 - INSENTIF RT/RW - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
275	2275 - INSENTIF RT/RW - DESA POLOMARTO	DESA POLOMARTO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
276	2276 - INSENTIF RT/RW - DESA TEGALGONDO	DESA TEGALGONDO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	15.000.000,00	DPPPAPMD
277	2277 - INSENTIF RT/RW - DESA LUBANGLOR	DESA LUBANGLOR, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
278	2278 - INSENTIF RT/RW - DESA LUBANGINDANGAN	DESA LUBANGINDANGAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
279	2279 - INSENTIF RT/RW - DESA LUBANGKIDUL	DESA LUBANGKIDUL, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
280	2280 - INSENTIF RT/RW - DESA LUBANGSAMPANG	DESA LUBANGSAMPANG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
281	2281 - INSENTIF RT/RW - DESA DLANGU	DESA DLANGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	57.000.000,00	DPPPAPMD
282	2282 - INSENTIF RT/RW - DESA ANDONG	DESA ANDONG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
283	2283 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIWATUBUMI	DESA KALIWATUBUMI, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	57.000.000,00	DPPPAPMD
284	2284 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIWATUKRANGGAN	DESA KALIWATUKRANGGAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
285	2285 - INSENTIF RT/RW - DESA PANGGELDLANGU	DESA PANGGELDLANGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
286	2286 - INSENTIF RT/RW - DESA BINANGUN	DESA BINANGUN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
287	2287 - INSENTIF RT/RW - DESA BUTUH	DESA BUTUH, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	87.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
288	2288 - INSENTIF RT/RW - DESA KLEPU	DESA KLEPU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
289	2289 - INSENTIF RT/RW - DESA WIRONATAN	DESA WIRONATAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
290	2290 - INSENTIF RT/RW - DESA KENDALREJO	DESA KENDALREJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
291	2291 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIMATI	DESA KALIMATI, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
292	2292 - INSENTIF RT/RW - DESA PEPE	DESA PEPE, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
293	2293 - INSENTIF RT/RW - DESA TUNJUNGTEJO	DESA TUNJUNGTEJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
294	2294 - INSENTIF RT/RW - DESA SEKARTEJO	DESA SEKARTEJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
295	2295 - INSENTIF RT/RW - DESA TERSIDILOR	DESA TERSIDILOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
296	2296 - INSENTIF RT/RW - DESA TERSIDIKIDUL	DESA TERSIDIKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
297	2297 - INSENTIF RT/RW - DESA TASIKMADU	DESA TASIKMADU, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
298	2298 - INSENTIF RT/RW - DESA PANGKALAN	DESA PANGKALAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
299	2299 - INSENTIF RT/RW - DESA SUMBER	DESA SUMBER, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
300	2300 - INSENTIF RT/RW - DESA GUMAWANGREJO	DESA GUMAWANGREJO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
301	2301 - INSENTIF RT/RW - DESA KEBURUSAN	DESA KEBURUSAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
302	2302 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOYOSO	DESA WONOYOSO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
303	2303 - INSENTIF RT/RW - DESA TAPEN	DESA TAPEN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
304	2304 - INSENTIF RT/RW - DESA WARU	DESA WARU, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
305	2305 - INSENTIF RT/RW - DESA BLEKATUK	DESA BLEKATUK, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
306	2306 - INSENTIF RT/RW - DESA DLINSENWETAN	DESA DLINSENWETAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
307	2307 - INSENTIF RT/RW - DESA DLINSENKULON	DESA DLINSENKULON, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
308	2308 - INSENTIF RT/RW - DESA SEMAMPIR	DESA SEMAMPIR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
309	2309 - INSENTIF RT/RW - DESA PETUGURAN	DESA PETUGURAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
310	2310 - INSENTIF RT/RW - DESA PEKACANGAN	DESA PEKACANGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
311	2311 - INSENTIF RT/RW - DESA KARANGGETAS	DESA KARANGGETAS, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
312	2312 - INSENTIF RT/RW - DESA LUWENGKIDUL	DESA LUWENGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
313	2313 - INSENTIF RT/RW - DESA SAMBENG	DESA SAMBENG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
314	2314 - INSENTIF RT/RW - DESA MEGULUNGKIDUL	DESA MEGULUNGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
315	2315 - INSENTIF RT/RW - DESA PITURUH	DESA PITURUH, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	72.000.000,00	DPPPAPMD
316	2316 - INSENTIF RT/RW - DESA SIKAMBANG	DESA SIKAMBANG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
317	2317 - INSENTIF RT/RW - DESA NGAMPEL	DESA NGAMPEL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
318	2318 - INSENTIF RT/RW - DESA PRIGELAN	DESA PRIGELAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
319	2319 - INSENTIF RT/RW - DESA NGANDAGAN	DESA NGANDAGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
320	2320 - INSENTIF RT/RW - DESA KARANGANYAR	DESA KARANGANYAR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	15.000.000,00	DPPPAPMD
321	2321 - INSENTIF RT/RW - DESA MEGULUNGLOR	DESA MEGULUNGLOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
322	2322 - INSENTIF RT/RW - DESA PRAPAGKIDUL	DESA PRAPAGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
323	2323 - INSENTIF RT/RW - DESA KEMBANGKUNING	DESA KEMBANGKUNING, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
324	2324 - INSENTIF RT/RW - DESA LUWENGLOR	DESA LUWENGLOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
325	2325 - INSENTIF RT/RW - DESA BRENGKOL	DESA BRENGKOL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
326	2326 - INSENTIF RT/RW - DESA GIRIGONDO	DESA GIRIGONDO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
327	2327 - INSENTIF RT/RW - DESA PRAPAGLOR	DESA PRAPAGLOR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	57.000.000,00	DPPPAPMD
328	2328 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIKOTES	DESA KALIKOTES, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
329	2329 - INSENTIF RT/RW - DESA KESAWEN	DESA KESAWEN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
330	2330 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUNGBATUR	DESA KEDUNGBATUR, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
331	2331 - INSENTIF RT/RW - DESA POLOWANGI	DESA POLOWANGI, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	9.000.000,00	DPPPAPMD
332	2332 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIJERING	DESA KALIJERING, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	57.000.000,00	DPPPAPMD
333	2333 - INSENTIF RT/RW - DESA SOMOGEDE	DESA SOMOGEDE, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	51.000.000,00	DPPPAPMD
334	2334 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIGONDANG	DESA KALIGONDANG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
335	2335 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIGINTUNG	DESA KALIGINTUNG, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	69.000.000,00	DPPPAPMD
336	2336 - INSENTIF RT/RW - DESA SAWANGAN	DESA SAWANGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
337	2337 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOSIDO	DESA WONOSIDO, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
338	2338 - INSENTIF RT/RW - DESA PAMRIYAN	DESA PAMRIYAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
339	2339 - INSENTIF RT/RW - DESA WALED	DESA WALED, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	15.000.000,00	DPPPAPMD
340	2340 - INSENTIF RT/RW - DESA KROYOKULON	DESA KROYOKULON, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
341	2341 - INSENTIF RT/RW - DESA REJOSARI	DESA REJOSARI, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
342	2342 - INSENTIF RT/RW - DESA GESIKAN	DESA GESIKAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
343	2343 - INSENTIF RT/RW - DESA PAITAN	DESA PAITAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
344	2344 - INSENTIF RT/RW - DESA GEDONG	DESA GEDONG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
345	2345 - INSENTIF RT/RW - DESA ROWOBAYEM	DESA ROWOBAYEM, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
346	2346 - INSENTIF RT/RW - DESA KEMIRIKIDUL	DESA KEMIRIKIDUL, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
347	2347 - INSENTIF RT/RW - DESA BEDONOKLUWUNG	DESA BEDONOKLUWUNG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	51.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
348	2348 - INSENTIF RT/RW - DESA BEDONOPAGERON	DESA BEDONOPAGERON, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
349	2349 - INSENTIF RT/RW - DESA BEDONOKARANGDUWUR	DESA BEDONOKARANGDUWUR, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
350	2350 - INSENTIF RT/RW - DESA REBUG	DESA REBUG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
351	2351 - INSENTIF RT/RW - DESA LONING	DESA LONING, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
352	2352 - INSENTIF RT/RW - DESA WINONG	DESA WINONG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
353	2353 - INSENTIF RT/RW - DESA SUTORAGAN	DESA SUTORAGAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
354	2354 - INSENTIF RT/RW - DESA JATIWANGSAN	DESA JATIWANGSAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
355	2355 - INSENTIF RT/RW - DESA GIRIMULYO	DESA GIRIMULYO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
356	2356 - INSENTIF RT/RW - DESA GIRIJOYO	DESA GIRIJOYO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
357	2357 - INSENTIF RT/RW - DESA TURUS	DESA TURUS, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
358	2358 - INSENTIF RT/RW - DESA DILEM	DESA DILEM, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
359	2359 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUNGLO	DESA KEDUNGLO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
360	2360 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOSUKO	DESA WONOSUKO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
361	2361 - INSENTIF RT/RW - DESA SIDODADI	DESA SIDODADI, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
362	2362 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIMENENG	DESA KALIMENENG, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
363	2363 - INSENTIF RT/RW - DESA KEMIRILOR	DESA KEMIRILOR, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
364	2364 - INSENTIF RT/RW - DESA KEREP	DESA KEREP, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
365	2365 - INSENTIF RT/RW - DESA KROYOLOR	DESA KROYOLOR, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
366	2366 - INSENTIF RT/RW - DESA SAMPING	DESA SAMPING, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
367	2367 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOSARI	DESA WONOSARI, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
368	2368 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIGLAGAH	DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
369	2369 - INSENTIF RT/RW - DESA KAPITERAN	DESA KAPITERAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	15.000.000,00	DPPPAPMD
370	2370 - INSENTIF RT/RW - DESA WANUROJO	DESA WANUROJO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
371	2371 - INSENTIF RT/RW - DESA REJOWINANGUN	DESA REJOWINANGUN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
372	2372 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIURIP	DESA KALIURIP, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
373	2373 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUNGPOMAHANWETAN	DESA KEDUNGPOMAHANWETAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
374	2374 - INSENTIF RT/RW - DESA KARANGLUAS	DESA KARANGLUAS, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
375	2375 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUNGPOMAHANKULON	DESA KEDUNGPOMAHANKULON, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
376	2376 - INSENTIF RT/RW - DESA SUKOGELAP	DESA SUKOGELAP, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
377	2377 - INSENTIF RT/RW - DESA GUNUNGTEGES	DESA GUNUNGTEGES, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
378	2378 - INSENTIF RT/RW - DESA PURBAYAN	DESA PURBAYAN, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
379	2379 - INSENTIF RT/RW - DESA PUSPO	DESA PUSPO, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	96.000.000,00	DPPPAPMD
380	2380 - INSENTIF RT/RW - DESA PLIPIRAN	DESA PLIPIRAN, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
381	2381 - INSENTIF RT/RW - DESA PAKISARUM	DESA PAKISARUM, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	99.000.000,00	DPPPAPMD
382	2382 - INSENTIF RT/RW - DESA BRUNOREJO	DESA BRUNOREJO, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	129.000.000,00	DPPPAPMD
383	2383 - INSENTIF RT/RW - DESA BRUNOSARI	DESA BRUNOSARI, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	99.000.000,00	DPPPAPMD
384	2384 - INSENTIF RT/RW - DESA SOMOLETER	DESA SOMOLETER, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
385	2385 - INSENTIF RT/RW - DESA BLIMBING	DESA BLIMBING, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	72.000.000,00	DPPPAPMD
386	2386 - INSENTIF RT/RW - DESA GOWONG	DESA GOWONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	51.000.000,00	DPPPAPMD
387	2387 - INSENTIF RT/RW - DESA BRONDONG	DESA BRONDONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	72.000.000,00	DPPPAPMD
388	2388 - INSENTIF RT/RW - DESA CEPEDAK	DESA CEPEDAK, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	120.000.000,00	DPPPAPMD
389	2389 - INSENTIF RT/RW - DESA GUNUNGCONDONG	DESA GUNUNGCONDONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	57.000.000,00	DPPPAPMD
390	2390 - INSENTIF RT/RW - DESA KEMRANGGEN	DESA KEMRANGGEN, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
391	2391 - INSENTIF RT/RW - DESA KARANGGEDANG	DESA KARANGGEDANG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
392	2392 - INSENTIF RT/RW - DESA GIYOMBONG	DESA GIYOMBONG, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
393	2393 - INSENTIF RT/RW - DESA KAMBANGAN	DESA KAMBANGAN, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
394	2394 - INSENTIF RT/RW - DESA WATUDUWUR	DESA WATUDUWUR, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
395	2395 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIWUNGU	DESA KALIWUNGU, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	75.000.000,00	DPPPAPMD
396	2396 - INSENTIF RT/RW - DESA TEGALSARI	DESA TEGALSARI, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	99.000.000,00	DPPPAPMD
397	2397 - INSENTIF RT/RW - DESA WINONGKIDUL	DESA WINONGKIDUL, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
398	2398 - INSENTIF RT/RW - DESA SEREN	DESA SEREN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	78.000.000,00	DPPPAPMD
399	2399 - INSENTIF RT/RW - DESA GINTUNGAN	DESA GINTUNGAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	78.000.000,00	DPPPAPMD
400	2400 - INSENTIF RT/RW - DESA BULUS	DESA BULUS, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
401	2401 - INSENTIF RT/RW - DESA RENDENG	DESA RENDENG, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
402	2402 - INSENTIF RT/RW - DESA KROYO	DESA KROYO, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
403	2403 - INSENTIF RT/RW - DESA WINONGLOR	DESA WINONGLOR, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
404	2404 - INSENTIF RT/RW - DESA MLARAN	DESA MLARAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	54.000.000,00	DPPPAPMD
405	2405 - INSENTIF RT/RW - DESA PELUTAN	DESA PELUTAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
406	2406 - INSENTIF RT/RW - DESA BENDOSARI	DESA BENDOSARI, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
407	2407 - INSENTIF RT/RW - DESA GEBANG	DESA GEBANG, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
408	2408 - INSENTIF RT/RW - DESA SALAM	DESA SALAM, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
409	2409 - INSENTIF RT/RW - DESA PAKEM	DESA PAKEM, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
410	2410 - INSENTIF RT/RW - DESA WONOTOPO	DESA WONOTOPO, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
411	2411 - INSENTIF RT/RW - DESA SIDOLEREN	DESA SIDOLEREN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
412	2412 - INSENTIF RT/RW - DESA PENUNGKULAN	DESA PENUNGKULAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
413	2413 - INSENTIF RT/RW - DESA REDIN	DESA REDIN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
414	2414 - INSENTIF RT/RW - DESA TLOGOSONO	DESA TLOGOSONO, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	30.000.000,00	DPPPAPMD
415	2415 - INSENTIF RT/RW - DESA NGEMPLAK	DESA NGEMPLAK, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
416	2416 - INSENTIF RT/RW - DESA KRAGILAN	DESA KRAGILAN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
417	2417 - INSENTIF RT/RW - DESA PRUMBEN	DESA PRUMBEN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
418	2418 - INSENTIF RT/RW - DESA NGAGLIK	DESA NGAGLIK, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
419	2419 - INSENTIF RT/RW - DESA KEMIRI	DESA KEMIRI, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
420	2420 - INSENTIF RT/RW - DESA KALITENGKEK	DESA KALITENGKEK, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
421	2421 - INSENTIF RT/RW - DESA KALINONGKO	DESA KALINONGKO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	66.000.000,00	DPPPAPMD
422	2422 - INSENTIF RT/RW - DESA TRIREJO	DESA TRIREJO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
423	2423 - INSENTIF RT/RW - DESA KARANGREJO	DESA KARANGREJO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
424	2424 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIKALONG	DESA KALIKALONG, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
425	2425 - INSENTIF RT/RW - DESA RIMUN	DESA RIMUN, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
426	2426 - INSENTIF RT/RW - DESA TEPANSARI	DESA TEPANSARI, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
427	2427 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIGLAGAH	DESA KALIGLAGAH, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	21.000.000,00	DPPPAPMD
428	2428 - INSENTIF RT/RW - DESA TRIDADI	DESA TRIDADI, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
429	2429 - INSENTIF RT/RW - DESA BANYUASINSEPARE	DESA BANYUASINSEPARE, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
430	2430 - INSENTIF RT/RW - DESA GUYANGAN	DESA GUYANGAN, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	18.000.000,00	DPPPAPMD
431	2431 - INSENTIF RT/RW - DESA KALISEMO	DESA KALISEMO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
432	2432 - INSENTIF RT/RW - DESA LOANO	DESA LOANO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
433	2433 - INSENTIF RT/RW - DESA JETIS	DESA JETIS, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	81.000.000,00	DPPPAPMD
434	2434 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUNGPOH	DESA KEDUNGPOH, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
435	2435 - INSENTIF RT/RW - DESA MARON	DESA MARON, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	51.000.000,00	DPPPAPMD
436	2436 - INSENTIF RT/RW - DESA KEBON GUNUNG	DESA KEBON GUNUNG, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	51.000.000,00	DPPPAPMD
437	2437 - INSENTIF RT/RW - DESA MUDALREJO	DESA MUDALREJO, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
438	2438 - INSENTIF RT/RW - DESA KEMEJING	DESA KEMEJING, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
439	2439 - INSENTIF RT/RW - DESA BANYUASINKEMBARAN	DESA BANYUASINKEMBARAN, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
440	2440 - INSENTIF RT/RW - DESA SEDAYU	DESA SEDAYU, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
441	2441 - INSENTIF RT/RW - DESA NGARGOSARI	DESA NGARGOSARI, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
442	2442 - INSENTIF RT/RW - DESA BENOWO	DESA BENOWO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
443	2443 - INSENTIF RT/RW - DESA KALITAPAS	DESA KALITAPAS, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
444	2444 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIWADER	DESA KALIWADER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
445	2445 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUNGPUCANG	DESA KEDUNGPUCANG, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
446	2446 - INSENTIF RT/RW - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	48.000.000,00	DPPPAPMD
447	2447 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIBOTO	DESA KALIBOTO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
448	2448 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIURIP	DESA KALIURIP, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
449	2449 - INSENTIF RT/RW - DESA KEDUNGLOTENG	DESA KEDUNGLOTENG, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	12.000.000,00	DPPPAPMD
450	2450 - INSENTIF RT/RW - DESA WADAS	DESA WADAS, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
451	2451 - INSENTIF RT/RW - DESA CACABANKIDUL	DESA CACABANKIDUL, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
452	2452 - INSENTIF RT/RW - DESA CACABANLOR	DESA CACABANLOR, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	27.000.000,00	DPPPAPMD
453	2453 - INSENTIF RT/RW - DESA PEKACANGAN	DESA PEKACANGAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	45.000.000,00	DPPPAPMD
454	2454 - INSENTIF RT/RW - DESA MEDONO	DESA MEDONO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	24.000.000,00	DPPPAPMD
455	2455 - INSENTIF RT/RW - DESA BLEBER	DESA BLEBER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
456	2456 - INSENTIF RT/RW - DESA BENER	DESA BENER, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	72.000.000,00	DPPPAPMD
457	2457 - INSENTIF RT/RW - DESA KARANGSARI	DESA KARANGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	42.000.000,00	DPPPAPMD
458	2458 - INSENTIF RT/RW - DESA GUNTUR	DESA GUNTUR, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	87.000.000,00	DPPPAPMD
459	2459 - INSENTIF RT/RW - DESA LEGETAN	DESA LEGETAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
460	2460 - INSENTIF RT/RW - DESA KETOSARI	DESA KETOSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	33.000.000,00	DPPPAPMD
461	2461 - INSENTIF RT/RW - DESA KAMIJORO	DESA KAMIJORO, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
462	2462 - INSENTIF RT/RW - DESA JATI	DESA JATI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
463	2463 - INSENTIF RT/RW - DESA MAYUNGSARI	DESA MAYUNGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	36.000.000,00	DPPPAPMD
464	2464 - INSENTIF RT/RW - DESA KALIJAMBE	DESA KALIJAMBE, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	60.000.000,00	DPPPAPMD
465	2465 - INSENTIF RT/RW - DESA SUKOWUWUH	DESA SUKOWUWUH, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD
466	2466 - INSENTIF RT/RW - DESA LIMBANGAN	DESA LIMBANGAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
467	2467 - INSENTIF RT/RW - DESA NGLARIS	DESA NGLARIS, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	63.000.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
468	2468 - INSENTIF RT/RW - DESA SIDOMUKTI	DESA SIDOMUKTI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	39.000.000,00	DPPPAPMD
469	2469 - INSENTIF RT/RW - DESA NGASINAN	DESA NGASINAN, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	81.000.000,00	DPPPAPMD
470	0470 - INSENTIF RT/RW - DESA-DESA DI KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN Khusus Desa untuk Insentif RT dan RW		**16.932.000.000,00**	
D	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Penghasilan Staf Perangkat Desa**			
1	0002 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA PATUTREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	DESA PATUTREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
2	0003 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA KETAWANGREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	DESA KETAWANGREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	62.407.488,00	DPPPAPMD
3	0006 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA PASARANOM, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	DESA PASARANOM, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
4	0008 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA NAMBANGAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	DESA NAMBANGAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
5	0012 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA BAKUREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	DESA BAKUREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
6	0095 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA WATUKURO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	DESA WATUKURO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
7	0107 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA BUBUTAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	DESA BUBUTAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
8	0118 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA JENARLOR, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	DESA JENARLOR, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
9	0130 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA DADIREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	DESA DADIREJO, KECAMATAN BAGELEN, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
10	0176 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	DESA SIDOMULYO, KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWOREJO	31.203.744,00	DPPPAPMD
11	0184 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA WANGUNREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	DESA WANGUNREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	31.203.744,00	DPPPAPMD
12	0188 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA TEGALREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	DESA TEGALREJO, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
13	0215 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA BANDUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	DESA BANDUNGREJO, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
14	0227 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA PUCANGAGUNG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	DESA PUCANGAGUNG, KECAMATAN BAYAN, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
15	0236 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA KUWUREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	DESA KUWUREJO, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
16	0238 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA SIDARUM, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	DESA SIDARUM, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
17	0245 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA TEPUSWETAN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	DESA TEPUSWETAN, KECAMATAN KUTOARJO, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
18	0249 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGMULYO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	DESA KEDUNGMULYO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	31.203.744,00	DPPPAPMD
19	0257 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA WARENG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	DESA WARENG, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	31.203.744,00	DPPPAPMD
20	0264 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA WONOREJOKULON, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	DESA WONOREJOKULON, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
21	0269 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA SRUWOHREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	DESA SRUWOHREJO, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
22	0271 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA LUGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	DESA LUGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
23	0281 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA DLANGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	DESA DLANGU, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	31.203.744,00	DPPPAPMD
24	0289 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA WIRONATAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	DESA WIRONATAN, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	62.407.488,00	DPPPAPMD
25	0291 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA KALIMATI, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	DESA KALIMATI, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
26	0314 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA MEGULUNGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	DESA MEGULUNGKIDUL, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
27	0315 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA PITURUH, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	DESA PITURUH, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	31.203.744,00	DPPPAPMD
28	0319 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA NGANDAGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	DESA NGANDAGAN, KECAMATAN PITURUH, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
29	0356 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA GIRIJOYO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	DESA GIRIJOYO, KECAMATAN KEMIRI, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
30	0382 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA BRUNOREJO, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	DESA BRUNOREJO, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
31	0388 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA CEPEDAK, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	DESA CEPEDAK, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
32	0396 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA TEGALSARI, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	DESA TEGALSARI, KECAMATAN BRUNO, KABUPATEN PURWOREJO	46.805.616,00	DPPPAPMD
33	0398 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA SEREN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	DESA SEREN, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
34	0408 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA SALAM, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	DESA SALAM, KECAMATAN GEBANG, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
35	0440 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA SEDAYU, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	DESA SEDAYU, KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
36	0445 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA KEDUNGPUCANG, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	DESA KEDUNGPUCANG, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
37	0457 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA KARANGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	DESA KARANGSARI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	31.203.744,00	DPPPAPMD
38	0462 - SILTAP STAF PERANGKAT DESA - DESA JATI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	DESA JATI, KECAMATAN BENER, KABUPATEN PURWOREJO	15.601.872,00	DPPPAPMD
43	0463 - DESA-DESA DI KABUPATEN PURWOREJO	KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN Khusus Desa untuk SILTAP Staf Perangkat Desa		**826.899.216,00**	
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS REGULER		**488.262.450.348,00**	
E	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pemilihan Kepala Desa**			
1	001 BANKEU PILKADES - DESA PACOR	DESA PACOR KECAMATAN DESA PACOR KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
2	002 BANKEU PILKADES - DESA KEPUH	DESA KEPUH KECAMATAN DESA KEPUH KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
3	003 BANKEU PILKADES - DESA SOKOHARJO	DESA SOKOHARJO KECAMATAN DESA SOKOHARJO KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
4	004 BANKEU PILKADES - DESA TEPUSKULON	DESA TEPUSKULON KECAMATAN DESA TEPUSKULON KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
5	005 BANKEU PILKADES - DESA KUWUREJO	DESA KUWUREJO KECAMATAN DESA KUWUREJO KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
6	006 BANKEU PILKADES - DESA SUREN	DESA SUREN KECAMATAN DESA SUREN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	30.079.000,00	DPPPAPMD
7	007 BANKEU PILKADES - DESA SIDARUM	DESA SIDARUM KECAMATAN DESA SIDARUM KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
8	008 BANKEU PILKADES - DESA KEMADULOR	DESA KEMADULOR KECAMATAN DESA KEMADULOR KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
9	009 BANKEU PILKADES - DESA KIYANGKONGREJO	DESA KIYANGKONGREJO KECAMATAN DESA KIYANGKONGREJO KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
10	010 BANKEU PILKADES - DESA MAJIR	DESA MAJIR KECAMATAN DESA MAJIR KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
11	011 BANKEU PILKADES - DESA TUNGGORONO	DESA TUNGGORONO KECAMATAN DESA TUNGGORONO KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
12	012 BANKEU PILKADES - DESA KARANGWULUH	DESA KARANGWULUH KECAMATAN DESA KARANGWULUH KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
13	013 BANKEU PILKADES - DESA KEBONDALEM	DESA KEBONDALEM KECAMATAN DESA KEBONDALEM KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
14	014 BANKEU PILKADES - DESA WIRUN	DESA WIRUN KECAMATAN DESA WIRUN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	34.093.000,00	DPPPAPMD
15	015 BANKEU PILKADES - DESA KALIGESING	DESA KALIGESING KECAMATAN DESA KALIGESING KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
16	016 BANKEU PILKADES - DESA KETAWANGREJO	DESA KETAWANGREJO KECAMATAN DESA KETAWANGREJO GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	34.093.000,00	DPPPAPMD
17	017 BANKEU PILKADES - DESA KESE	DESA KESE KECAMATAN DESA KESE GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
18	018 BANKEU PILKADES - DESA PASARANOM	DESA PASARANOM KECAMATAN DESA PASARANOM GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
19	019 BANKEU PILKADES - DESA PATUTREJO	DESA PATUTREJO KECAMATAN DESA PATUTREJO GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
20	020 BANKEU PILKADES - DESA REJOSARI	DESA REJOSARI KECAMATAN DESA REJOSARI GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
21	021 BANKEU PILKADES - DESA BENDUNGAN	DESA BENDUNGAN KECAMATAN DESA BENDUNGAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
22	022 BANKEU PILKADES - DESA TULUSREJO	DESA TULUSREJO KECAMATAN DESA TULUSREJO GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
23	023 BANKEU PILKADES - DESA DUDUKULON	DESA DUDUKULON KECAMATAN DESA DUDUKULON GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
24	024 BANKEU PILKADES - DESA MUNGGANGSARI	DESA MUNGGANGSARI KECAMATAN DESA MUNGGANGSARI GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
25	025 BANKEU PILKADES - DESA TRIMULYO	DESA TRIMULYO KECAMATAN DESA TRIMULYO GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
26	026 BANKEU PILKADES - DESA HARJOBINANGUN	DESA HARJOBINANGUN KECAMATAN DESA HARJOBINANGUN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
27	027 BANKEU PILKADES - DESA KALIREJO	DESA KALIREJO KECAMATAN DESA KALIREJO GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
28	028 BANKEU PILKADES - DESA TUNGGULREJO	DESA TUNGGULREJO KECAMATAN DESA TUNGGULREJO GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
29	029 BANKEU PILKADES - DESA KERTOJAYAN	DESA KERTOJAYAN KECAMATAN DESA KERTOJAYAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
30	030 BANKEU PILKADES - DESA TEGALREJO	DESA TEGALREJO KECAMATAN DESA TEGALREJO GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
31	031 BANKEU PILKADES - DESA UKIRSARI	DESA UKIRSARI KECAMATAN DESA UKIRSARI GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
32	032 BANKEU PILKADES - DESA BANYUYOSO	DESA BANYUYOSO KECAMATAN DESA BANYUYOSO GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
33	033 BANKEU PILKADES - DESA DUDUWETAN	DESA DUDUWETAN KECAMATAN DESA DUDUWETAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
34	034 BANKEU PILKADES - DESA KUMPULREJO	DESA KUMPULREJO KECAMATAN DESA KUMPULREJO GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
35	035 BANKEU PILKADES - DESA DUKUHDUNGUS	DESA DUKUHDUNGUS KECAMATAN DESA DUKUHDUNGUS GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
36	036 BANKEU PILKADES - DESA ROWOREJO	DESA ROWOREJO KECAMATAN DESA ROWOREJO GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
37	037 BANKEU PILKADES - DESA NAMBANGAN	DESA NAMBANGAN KECAMATAN DESA NAMBANGAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
38	038 BANKEU PILKADES - DESA WIRONATAN	DESA WIRONATAN KECAMATAN DESA WIRONATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
39	039 BANKEU PILKADES - DESA PANGGELDLANGU	DESA PANGGELDLANGU KECAMATAN DESA PANGGELDLANGU BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
40	040 BANKEU PILKADES - DESA WONOREJOKULON	DESA WONOREJOKULON KECAMATAN DESA WONOREJOKULON BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
41	041 BANKEU PILKADES - DESA MANGUNJAYAN	DESA MANGUNJAYAN KECAMATAN DESA MANGUNJAYAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
42	042 BANKEU PILKADES - DESA LUBANGSAMPANG	DESA LUBANGSAMPANG KECAMATAN DESA LUBANGSAMPANG BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
43	043 BANKEU PILKADES - DESA LUBANGDUKUH	DESA LUBANGDUKUH KECAMATAN DESA LUBANGDUKUH BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
44	044 BANKEU PILKADES - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI KECAMATAN DESA SUMBERSARI BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
45	045 BANKEU PILKADES - DESA TAMANSARI	DESA TAMANSARI KECAMATAN DESA TAMANSARI BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
46	046 BANKEU PILKADES - DESA KEDUNGSARI	DESA KEDUNGSARI KECAMATAN DESA KEDUNGSARI BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
47	047 BANKEU PILKADES - DESA SRUWOHDUKUH	DESA SRUWOHDUKUH KECAMATAN DESA SRUWOHDUKUH BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
48	048 BANKEU PILKADES - DESA LUBANGKIDUL	DESA LUBANGKIDUL KECAMATAN DESA LUBANGKIDUL BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
49	049 BANKEU PILKADES - DESA LUBANGLOR	DESA LUBANGLOR KECAMATAN DESA LUBANGLOR BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
50	050 BANKEU PILKADES - DESA KUNIR	DESA KUNIR KECAMATAN DESA KUNIR BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
51	051 BANKEU PILKADES - DESA WARENG	DESA WARENG KECAMATAN DESA WARENG BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
52	052 BANKEU PILKADES - DESA ANDONG	DESA ANDONG KECAMATAN DESA ANDONG BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
53	053 BANKEU PILKADES - DESA LUGUREJO	DESA LUGUREJO KECAMATAN DESA LUGUREJO BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
54	054 BANKEU PILKADES - DESA KALIWATUKRANGGAN	DESA KALIWATUKRANGGAN KECAMATAN DESA KALIWATUKRANGGAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
55	055 BANKEU PILKADES - DESA POLOMARTO	DESA POLOMARTO KECAMATAN DESA POLOMARTO BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
56	056 BANKEU PILKADES - DESA KARANGANOM	DESA KARANGANOM KECAMATAN DESA KARANGANOM BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
57	057 BANKEU PILKADES - DESA TEGALGONDO	DESA TEGALGONDO KECAMATAN DESA TEGALGONDO BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
58	058 BANKEU PILKADES - DESA KEDUNGSRI	DESA KEDUNGSRI KECAMATAN DESA KEDUNGSRI BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
59	059 BANKEU PILKADES - DESA KLEPU	DESA KLEPU KECAMATAN DESA KLEPU BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
60	060 BANKEU PILKADES - DESA LUGU	DESA LUGU KECAMATAN DESA LUGU BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
61	061 BANKEU PILKADES - DESA KUNIREJOKULON	DESA KUNIREJOKULON KECAMATAN DESA KUNIREJOKULON BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
62	062 BANKEU PILKADES - DESA TANJUNGANOM	DESA TANJUNGANOM KECAMATAN DESA TANJUNGANOM BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
63	063 BANKEU PILKADES - DESA SRUWOHREJO	DESA SRUWOHREJO KECAMATAN DESA SRUWOHREJO BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
64	064 BANKEU PILKADES - DESA WONODADI	DESA WONODADI KECAMATAN DESA WONODADI BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
65	065 BANKEU PILKADES - DESA ROWODADI	DESA ROWODADI KECAMATAN DESA ROWODADI BUTUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
66	066 BANKEU PILKADES - DESA BRENGGONG	DESA BRENGGONG KECAMATAN DESA BRENGGONG PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
67	067 BANKEU PILKADES - DESA WONOTULUS	DESA WONOTULUS KECAMATAN DESA WONOTULUS PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
68	068 BANKEU PILKADES - DESA GANGGENG	DESA GANGGENG KECAMATAN DESA GANGGENG PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
69	069 BANKEU PILKADES - DESA DONORATI	DESA DONORATI KECAMATAN DESA DONORATI PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
70	070 BANKEU PILKADES - DESA SUDIMORO	DESA SUDIMORO KECAMATAN DESA SUDIMORO PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
71	071 BANKEU PILKADES - DESA PACEKELAN	DESA PACEKELAN KECAMATAN DESA PACEKELAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
72	072 BANKEU PILKADES - DESA SIDOREJO	DESA SIDOREJO KECAMATAN DESA SIDOREJO PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
73	073 BANKEU PILKADES - DESA BANDUNGREJO	DESA BANDUNGREJO KECAMATAN DESA BANDUNGREJO BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
74	074 BANKEU PILKADES - DESA POGUNGREJO	DESA POGUNGREJO KECAMATAN DESA POGUNGREJO BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
75	075 BANKEU PILKADES - DESA GRANTUNG	DESA GRANTUNG KECAMATAN DESA GRANTUNG BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	30.079.000,00	DPPPAPMD
76	076 BANKEU PILKADES - DESA TANGKISAN	DESA TANGKISAN KECAMATAN DESA TANGKISAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
77	077 BANKEU PILKADES - DESA JONO	DESA JONO KECAMATAN DESA JONO BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
78	078 BANKEU PILKADES - DESA BANJARREJO	DESA BANJARREJO KECAMATAN DESA BANJARREJO BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
79	079 BANKEU PILKADES - DESA DEWI	DESA DEWI KECAMATAN DESA DEWI BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
80	080 BANKEU PILKADES - DESA BRINGIN	DESA BRINGIN KECAMATAN DESA BRINGIN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
81	081 BANKEU PILKADES - DESA BANDUNGKIDUL	DESA BANDUNGKIDUL KECAMATAN DESA BANDUNGKIDUL BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
82	082 BANKEU PILKADES - DESA KALIMIRU	DESA KALIMIRU KECAMATAN DESA KALIMIRU BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
83	083 BANKEU PILKADES - DESA PUCANGAGUNG	DESA PUCANGAGUNG KECAMATAN DESA PUCANGAGUNG BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	34.093.000,00	DPPPAPMD
84	084 BANKEU PILKADES - DESA KRANDEGAN	DESA KRANDEGAN KECAMATAN DESA KRANDEGAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
85	085 BANKEU PILKADES - DESA POGUNGJURUTENGAH	DESA POGUNGJURUTENGAH KECAMATAN DESA POGUNGJURUTENGAH BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
86	086 BANKEU PILKADES - DESA POGUNGKALANGAN	DESA POGUNGKALANGAN KECAMATAN DESA POGUNGKALANGAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
87	087 BANKEU PILKADES - DESA BESOLE	DESA BESOLE KECAMATAN DESA BESOLE BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
88	088 BANKEU PILKADES - DESA JATINGARANG	DESA JATINGARANG KECAMATAN DESA JATINGARANG BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
89	089 BANKEU PILKADES - DESA KETIWIJAYAN	DESA KETIWIJAYAN KECAMATAN DESA KETIWIJAYAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
90	090 BANKEU PILKADES - DESA BOTODALEMAN	DESA BOTODALEMAN KECAMATAN DESA BOTODALEMAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
91	091 BANKEU PILKADES - DESA BAJANGREJO	DESA BAJANGREJO KECAMATAN DESA BAJANGREJO BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
92	092 BANKEU PILKADES - DESA TEGALREJO	DESA TEGALREJO KECAMATAN DESA TEGALREJO BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
93	093 BANKEU PILKADES - DESA PAKISREJO	DESA PAKISREJO KECAMATAN DESA PAKISREJO BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
94	094 BANKEU PILKADES - DESA TEGALKUNING	DESA TEGALKUNING KECAMATAN DESA TEGALKUNING BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
95	095 BANKEU PILKADES - DESA CONDONGSARI	DESA CONDONGSARI KECAMATAN DESA CONDONGSARI BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
96	096 BANKEU PILKADES - DESA WANGUNREJO	DESA WANGUNREJO KECAMATAN DESA WANGUNREJO BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
97	097 BANKEU PILKADES - DESA SUROREJO	DESA SUROREJO KECAMATAN DESA SUROREJO BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
98	098 BANKEU PILKADES - DESA GOLOK	DESA GOLOK KECAMATAN DESA GOLOK BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
99	099 BANKEU PILKADES - DESA SEBOROKRAPYAK	DESA SEBOROKRAPYAK KECAMATAN DESA SEBOROKRAPYAK BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
100	100 BANKEU PILKADES - DESA SAWIT	DESA SAWIT KECAMATAN DESA SAWIT BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
101	101 BANKEU PILKADES - DESA CANDINGASINAN	DESA CANDINGASINAN KECAMATAN DESA CANDINGASINAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
102	102 BANKEU PILKADES - DESA BANYUURIP	DESA BANYUURIP KECAMATAN DESA BANYUURIP BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
103	103 BANKEU PILKADES - DESA CANDISARI	DESA CANDISARI KECAMATAN DESA CANDISARI BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
104	104 BANKEU PILKADES - DESA KERTOSONO	DESA KERTOSONO KECAMATAN DESA KERTOSONO BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
105	105 BANKEU PILKADES - DESA POPONGAN	DESA POPONGAN KECAMATAN DESA POPONGAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
106	106 BANKEU PILKADES - DESA BOROWETAN	DESA BOROWETAN KECAMATAN DESA BOROWETAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
107	107 BANKEU PILKADES - DESA PURBOWONO	DESA PURBOWONO KECAMATAN DESA PURBOWONO KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
108	108 BANKEU PILKADES - DESA SOMONGARI	DESA SOMONGARI KECAMATAN DESA SOMONGARI KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
109	109 BANKEU PILKADES - DESA HARDIMULYO	DESA HARDIMULYO KECAMATAN DESA HARDIMULYO KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
110	110 BANKEU PILKADES - DESA NGARAN	DESA NGARAN KECAMATAN DESA NGARAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
111	111 BANKEU PILKADES - DESA DONOREJO	DESA DONOREJO KECAMATAN DESA DONOREJO KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	30.079.000,00	DPPPAPMD
112	112 BANKEU PILKADES - DESA PUCUNGROTO	DESA PUCUNGROTO KECAMATAN DESA PUCUNGROTO KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
113	113 BANKEU PILKADES - DESA SOMOWONO	DESA SOMOWONO KECAMATAN DESA SOMOWONO KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
114	114 BANKEU PILKADES - DESA TAWANGSARI	DESA TAWANGSARI KECAMATAN DESA TAWANGSARI KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
115	115 BANKEU PILKADES - DESA KEDUNGGUBAH	DESA KEDUNGGUBAH KECAMATAN DESA KEDUNGGUBAH KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
116	116 BANKEU PILKADES - DESA KALIGONO	DESA KALIGONO KECAMATAN DESA KALIGONO KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	34.093.000,00	DPPPAPMD
117	117 BANKEU PILKADES - DESA KALIHARJO	DESA KALIHARJO KECAMATAN DESA KALIHARJO KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
118	118 BANKEU PILKADES - DESA HULOSOBO	DESA HULOSOBO KECAMATAN DESA HULOSOBO KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
119	119 BANKEU PILKADES - DESA JATIREJO	DESA JATIREJO KECAMATAN DESA JATIREJO KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
120	120 BANKEU PILKADES - DESA AWU AWU	DESA AWU AWU KECAMATAN DESA AWU AWU NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
121	121 BANKEU PILKADES - DESA PIYONO	DESA PIYONO KECAMATAN DESA PIYONO NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
122	122 BANKEU PILKADES - DESA WONOSRI	DESA WONOSRI KECAMATAN DESA WONOSRI NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
123	123 BANKEU PILKADES - DESA PAGAK	DESA PAGAK KECAMATAN DESA PAGAK NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
124	124 BANKEU PILKADES - DESA JERUKEN	DESA JERUKEN KECAMATAN DESA JERUKEN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
125	125 BANKEU PILKADES - DESA JOMBANG	DESA JOMBANG KECAMATAN DESA JOMBANG NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
126	126 BANKEU PILKADES - DESA TUMENGGUNGAN	DESA TUMENGGUNGAN KECAMATAN DESA TUMENGGUNGAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
127	127 BANKEU PILKADES - DESA TANJUNG	DESA TANJUNG KECAMATAN DESA TANJUNG NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
128	128 BANKEU PILKADES - DESA SEBOROPASAR	DESA SEBOROPASAR KECAMATAN DESA SEBOROPASAR NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
129	129 BANKEU PILKADES - DESA WINGKOSANGGRAHAN	DESA WINGKOSANGGRAHAN KECAMATAN DESA WINGKOSANGGRAHAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
130	130 BANKEU PILKADES - DESA BOJONG	DESA BOJONG KECAMATAN DESA BOJONG NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
131	131 BANKEU PILKADES - DESA COKROYASAN	DESA COKROYASAN KECAMATAN DESA COKROYASAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
132	132 BANKEU PILKADES - DESA SUMBERREJO	DESA SUMBERREJO KECAMATAN DESA SUMBERREJO NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
133	133 BANKEU PILKADES - DESA NGOMBOL	DESA NGOMBOL KECAMATAN DESA NGOMBOL NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
134	134 BANKEU PILKADES - DESA TUNJUNGAN	DESA TUNJUNGAN KECAMATAN DESA TUNJUNGAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
135	135 BANKEU PILKADES - DESA WONOSARI	DESA WONOSARI KECAMATAN DESA WONOSARI NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
136	136 BANKEU PILKADES - DESA PEJAGRAN	DESA PEJAGRAN KECAMATAN DESA PEJAGRAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
137	137 BANKEU PILKADES - DESA KUMPULSARI	DESA KUMPULSARI KECAMATAN DESA KUMPULSARI NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
138	138 BANKEU PILKADES - DESA LABAN	DESA LABAN KECAMATAN DESA LABAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
139	139 BANKEU PILKADES - DESA CANDI	DESA CANDI KECAMATAN DESA CANDI NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
140	140 BANKEU PILKADES - DESA KUWUKAN	DESA KUWUKAN KECAMATAN DESA KUWUKAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
141	141 BANKEU PILKADES - DESA WASIAT	DESA WASIAT KECAMATAN DESA WASIAT NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
142	142 BANKEU PILKADES - DESA KEMBANGKUNING	DESA KEMBANGKUNING KECAMATAN DESA KEMBANGKUNING NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
143	143 BANKEU PILKADES - DESA SUSUK	DESA SUSUK KECAMATAN DESA SUSUK NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
144	144 BANKEU PILKADES - DESA SINGKILWETAN	DESA SINGKILWETAN KECAMATAN DESA SINGKILWETAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
145	145 BANKEU PILKADES - DESA WONOBOYO	DESA WONOBOYO KECAMATAN DESA WONOBOYO NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
146	146 BANKEU PILKADES - DESA SINGKILKULON	DESA SINGKILKULON KECAMATAN DESA SINGKILKULON NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
147	147 BANKEU PILKADES - DESA WINGKOTINUMPUK	DESA WINGKOTINUMPUK KECAMATAN DESA WINGKOTINUMPUK NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
148	148 BANKEU PILKADES - DESA BRIYAN	DESA BRIYAN KECAMATAN DESA BRIYAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
149	149 BANKEU PILKADES - DESA KESIDAN	DESA KESIDAN KECAMATAN DESA KESIDAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
150	150 BANKEU PILKADES - DESA SECANG	DESA SECANG KECAMATAN DESA SECANG NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
151	151 BANKEU PILKADES - DESA NGENTAK	DESA NGENTAK KECAMATAN DESA NGENTAK NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
152	152 BANKEU PILKADES - DESA SRUWOH	DESA SRUWOH KECAMATAN DESA SRUWOH NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
153	153 BANKEU PILKADES - DESA PULUTAN	DESA PULUTAN KECAMATAN DESA PULUTAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
154	154 BANKEU PILKADES - DESA WALIKORO	DESA WALIKORO KECAMATAN DESA WALIKORO NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
155	155 BANKEU PILKADES - DESA KLANDARAN	DESA KLANDARAN KECAMATAN DESA KLANDARAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
156	156 BANKEU PILKADES - DESA RINGGIT	DESA RINGGIT KECAMATAN DESA RINGGIT NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
157	157 BANKEU PILKADES - DESA WINGKOMULYO	DESA WINGKOMULYO KECAMATAN DESA WINGKOMULYO NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
158	158 BANKEU PILKADES - DESA WUNUT	DESA WUNUT KECAMATAN DESA WUNUT NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
159	159 BANKEU PILKADES - DESA KALITANJUNG	DESA KALITANJUNG KECAMATAN DESA KALITANJUNG NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
160	160 BANKEU PILKADES - DESA CURUG	DESA CURUG KECAMATAN DESA CURUG NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
161	161 BANKEU PILKADES - DESA DEPOKREJO	DESA DEPOKREJO KECAMATAN DESA DEPOKREJO NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
162	162 BANKEU PILKADES - DESA WINGKOHARJO	DESA WINGKOHARJO KECAMATAN DESA WINGKOHARJO NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
163	163 BANKEU PILKADES - DESA PIJI	DESA PIJI KECAMATAN DESA PIJI BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
164	164 BANKEU PILKADES - DESA TLOGOKOTES	DESA TLOGOKOTES KECAMATAN DESA TLOGOKOTES BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
165	165 BANKEU PILKADES - DESA SEMAGUNG	DESA SEMAGUNG KECAMATAN DESA SEMAGUNG BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
166	166 BANKEU PILKADES - DESA KRENDETAN	DESA KRENDETAN KECAMATAN DESA KRENDETAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
167	167 BANKEU PILKADES - DESA SOKO	DESA SOKO KECAMATAN DESA SOKO BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
168	168 BANKEU PILKADES - DESA BAPANGSARI	DESA BAPANGSARI KECAMATAN DESA BAPANGSARI BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
169	169 BANKEU PILKADES - DESA SEMONO	DESA SEMONO KECAMATAN DESA SEMONO BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
170	170 BANKEU PILKADES - DESA BUGEL	DESA BUGEL KECAMATAN DESA BUGEL BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
171	171 BANKEU PILKADES - DESA HARGOROJO	DESA HARGOROJO KECAMATAN DESA HARGOROJO BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
172	172 BANKEU PILKADES - DESA DURENSARI	DESA DURENSARI KECAMATAN DESA DURENSARI BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
173	173 BANKEU PILKADES - DESA DADIREJO	DESA DADIREJO KECAMATAN DESA DADIREJO BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
174	174 BANKEU PILKADES - DESA CLAPAR	DESA CLAPAR KECAMATAN DESA CLAPAR BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
175	175 BANKEU PILKADES - DESA BAGELEN	DESA BAGELEN KECAMATAN DESA BAGELEN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
176	176 BANKEU PILKADES - DESA SIDOHARJO	DESA SIDOHARJO KECAMATAN DESA SIDOHARJO PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
177	177 BANKEU PILKADES - DESA KEPONGGOK	DESA KEPONGGOK KECAMATAN DESA KEPONGGOK PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
178	178 BANKEU PILKADES - DESA GEDANGAN	DESA GEDANGAN KECAMATAN DESA GEDANGAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
179	179 BANKEU PILKADES - DESA GEPARANG	DESA GEPARANG KECAMATAN DESA GEPARANG PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
180	180 BANKEU PILKADES - DESA BLENDUNG	DESA BLENDUNG KECAMATAN DESA BLENDUNG PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
181	181 BANKEU PILKADES - DESA NAMPUREJO	DESA NAMPUREJO KECAMATAN DESA NAMPUREJO PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
182	182 BANKEU PILKADES - DESA JATIMALANG	DESA JATIMALANG KECAMATAN DESA JATIMALANG PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
183	183 BANKEU PILKADES - DESA GESING	DESA GESING KECAMATAN DESA GESING PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
184	184 BANKEU PILKADES - DESA BUBUTAN	DESA BUBUTAN KECAMATAN DESA BUBUTAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
185	185 BANKEU PILKADES - DESA PUNDENSARI	DESA PUNDENSARI KECAMATAN DESA PUNDENSARI PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
186	186 BANKEU PILKADES - DESA JOGOBOYO	DESA JOGOBOYO KECAMATAN DESA JOGOBOYO PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
187	187 BANKEU PILKADES - DESA KARANGSARI	DESA KARANGSARI KECAMATAN DESA KARANGSARI PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
188	188 BANKEU PILKADES - DESA KEDUREN	DESA KEDUREN KECAMATAN DESA KEDUREN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
189	189 BANKEU PILKADES - DESA KESUGIHAN	DESA KESUGIHAN KECAMATAN DESA KESUGIHAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
190	190 BANKEU PILKADES - DESA KARANGMULYO	DESA KARANGMULYO KECAMATAN DESA KARANGMULYO PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
191	191 BANKEU PILKADES - DESA BONGKOT	DESA BONGKOT KECAMATAN DESA BONGKOT PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
192	192 BANKEU PILKADES - DESA SUKOMANAH	DESA SUKOMANAH KECAMATAN DESA SUKOMANAH PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
193	193 BANKEU PILKADES - DESA KEBONSARI	DESA KEBONSARI KECAMATAN DESA KEBONSARI PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
194	194 BANKEU PILKADES - DESA GUYANGAN	DESA GUYANGAN KECAMATAN DESA GUYANGAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
195	195 BANKEU PILKADES - DESA PURWOSARI	DESA PURWOSARI KECAMATAN DESA PURWOSARI PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
196	196 BANKEU PILKADES - DESA NAMPU	DESA NAMPU KECAMATAN DESA NAMPU PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
197	197 BANKEU PILKADES - DESA JATIKONTAL	DESA JATIKONTAL KECAMATAN DESA JATIKONTAL PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
198	198 BANKEU PILKADES - DESA JENARWETAN	DESA JENARWETAN KECAMATAN DESA JENARWETAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
199	199 BANKEU PILKADES - DESA BRAGOLAN	DESA BRAGOLAN KECAMATAN DESA BRAGOLAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
200	200 BANKEU PILKADES - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI KECAMATAN DESA SENDANGSARI PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
201	201 BANKEU PILKADES - DESA PLANDI	DESA PLANDI KECAMATAN DESA PLANDI PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
202	202 BANKEU PILKADES - DESA TEGALAREN	DESA TEGALAREN KECAMATAN DESA TEGALAREN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
203	203 BANKEU PILKADES - DESA KARANGANYAR	DESA KARANGANYAR KECAMATAN DESA KARANGANYAR PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
204	204 BANKEU PILKADES - DESA JENARLOR	DESA JENARLOR KECAMATAN DESA JENARLOR PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
205	205 BANKEU PILKADES - DESA KALIMENENG	DESA KALIMENENG KECAMATAN DESA KALIMENENG KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
206	206 BANKEU PILKADES - DESA KEDUNGPOMAHANKULON	DESA KEDUNGPOMAHANKULON KECAMATAN DESA KEDUNGPOMAHANKULON KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
207	207 BANKEU PILKADES - DESA REJOWINANGUN	DESA REJOWINANGUN KECAMATAN DESA REJOWINANGUN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
208	208 BANKEU PILKADES - DESA GUNUNGTEGES	DESA GUNUNGTEGES KECAMATAN DESA GUNUNGTEGES KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
209	209 BANKEU PILKADES - DESA PURBAYAN	DESA PURBAYAN KECAMATAN DESA PURBAYAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
210	210 BANKEU PILKADES - DESA GESIKAN	DESA GESIKAN KECAMATAN DESA GESIKAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
211	211 BANKEU PILKADES - DESA PAITAN	DESA PAITAN KECAMATAN DESA PAITAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
212	212 BANKEU PILKADES - DESA GEDONG	DESA GEDONG KECAMATAN DESA GEDONG KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
213	213 BANKEU PILKADES - DESA ROWOBAYEM	DESA ROWOBAYEM KECAMATAN DESA ROWOBAYEM KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
214	214 BANKEU PILKADES - DESA WALED	DESA WALED KECAMATAN DESA WALED KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
215	215 BANKEU PILKADES - DESA REJOSARI	DESA REJOSARI KECAMATAN DESA REJOSARI KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
216	216 BANKEU PILKADES - DESA KROYOLOR	DESA KROYOLOR KECAMATAN DESA KROYOLOR KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
217	217 BANKEU PILKADES - DESA SAMPING	DESA SAMPING KECAMATAN DESA SAMPING KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
218	218 BANKEU PILKADES - DESA KAPITERAN	DESA KAPITERAN KECAMATAN DESA KAPITERAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
219	219 BANKEU PILKADES - DESA WONOSUKO	DESA WONOSUKO KECAMATAN DESA WONOSUKO KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
220	220 BANKEU PILKADES - DESA KEDUNGLO	DESA KEDUNGLO KECAMATAN DESA KEDUNGLO KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
221	221 BANKEU PILKADES - DESA WANUROJO	DESA WANUROJO KECAMATAN DESA WANUROJO KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
222	222 BANKEU PILKADES - DESA LONING	DESA LONING KECAMATAN DESA LONING KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
223	223 BANKEU PILKADES - DESA WINONG	DESA WINONG KECAMATAN DESA WINONG KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
224	224 BANKEU PILKADES - DESA GIRIMULYO	DESA GIRIMULYO KECAMATAN DESA GIRIMULYO KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
225	225 BANKEU PILKADES - DESA DILEM	DESA DILEM KECAMATAN DESA DILEM KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
226	226 BANKEU PILKADES - DESA WONOSARI	DESA WONOSARI KECAMATAN DESA WONOSARI KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
227	227 BANKEU PILKADES - DESA BEDONOPAGERON	DESA BEDONOPAGERON KECAMATAN DESA BEDONOPAGERON KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
228	228 BANKEU PILKADES - DESA KEREP	DESA KEREP KECAMATAN DESA KEREP KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
229	229 BANKEU PILKADES - DESA SUTORAGAN	DESA SUTORAGAN KECAMATAN DESA SUTORAGAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
230	230 BANKEU PILKADES - DESA BEDONOKARANGDUWUR	DESA BEDONOKARANGDUWUR KECAMATAN DESA BEDONOKARANGDUWUR KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
231	231 BANKEU PILKADES - DESA SUKOGELAP	DESA SUKOGELAP KECAMATAN DESA SUKOGELAP KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
232	232 BANKEU PILKADES - DESA REBUG	DESA REBUG KECAMATAN DESA REBUG KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
233	233 BANKEU PILKADES - DESA SEKARTEJO	DESA SEKARTEJO KECAMATAN DESA SEKARTEJO PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
234	234 BANKEU PILKADES - DESA KARANGGETAS	DESA KARANGGETAS KECAMATAN DESA KARANGGETAS PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
235	235 BANKEU PILKADES - DESA BLEKATUK	DESA BLEKATUK KECAMATAN DESA BLEKATUK PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
236	236 BANKEU PILKADES - DESA PRAPAGLOR	DESA PRAPAGLOR KECAMATAN DESA PRAPAGLOR PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
237	237 BANKEU PILKADES - DESA PRAPAGKIDUL	DESA PRAPAGKIDUL KECAMATAN DESA PRAPAGKIDUL PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
238	238 BANKEU PILKADES - DESA KALIGONDANG	DESA KALIGONDANG KECAMATAN DESA KALIGONDANG PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
239	239 BANKEU PILKADES - DESA SAWANGAN	DESA SAWANGAN KECAMATAN DESA SAWANGAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
240	240 BANKEU PILKADES - DESA PETUGURAN	DESA PETUGURAN KECAMATAN DESA PETUGURAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
241	241 BANKEU PILKADES - DESA TERSIDIKIDUL	DESA TERSIDIKIDUL KECAMATAN DESA TERSIDIKIDUL PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
242	242 BANKEU PILKADES - DESA KESAWEN	DESA KESAWEN KECAMATAN DESA KESAWEN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
243	243 BANKEU PILKADES - DESA DLISENKULON	DESA DLISENKULON KECAMATAN DESA DLISENKULON PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
244	244 BANKEU PILKADES - DESA SEMAMPIR	DESA SEMAMPIR KECAMATAN DESA SEMAMPIR PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
245	245 BANKEU PILKADES - DESA KENDALREJO	DESA KENDALREJO KECAMATAN DESA KENDALREJO PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
246	246 BANKEU PILKADES - DESA LUWENGKIDUL	DESA LUWENGKIDUL KECAMATAN DESA LUWENGKIDUL PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
247	247 BANKEU PILKADES - DESA MEGULUNGKIDUL	DESA MEGULUNGKIDUL KECAMATAN DESA MEGULUNGKIDUL PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
248	248 BANKEU PILKADES - DESA KEBURUSAN	DESA KEBURUSAN KECAMATAN DESA KEBURUSAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
249	249 BANKEU PILKADES - DESA NGANDAGAN	DESA NGANDAGAN KECAMATAN DESA NGANDAGAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
250	250 BANKEU PILKADES - DESA WONOSIDO	DESA WONOSIDO KECAMATAN DESA WONOSIDO PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
251	251 BANKEU PILKADES - DESA TUNJUNGTEJO	DESA TUNJUNGTEJO KECAMATAN DESA TUNJUNGTEJO PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
252	252 BANKEU PILKADES - DESA WARU	DESA WARU KECAMATAN DESA WARU PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
253	253 BANKEU PILKADES - DESA BRENGKOL	DESA BRENGKOL KECAMATAN DESA BRENGKOL PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
254	254 BANKEU PILKADES - DESA KALIJERING	DESA KALIJERING KECAMATAN DESA KALIJERING PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
255	255 BANKEU PILKADES - DESA SUMBER	DESA SUMBER KECAMATAN DESA SUMBER PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
256	256 BANKEU PILKADES - DESA PANGKALAN	DESA PANGKALAN KECAMATAN DESA PANGKALAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
257	257 BANKEU PILKADES - DESA SOMOGEDE	DESA SOMOGEDE KECAMATAN DESA SOMOGEDE PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
258	258 BANKEU PILKADES - DESA SAMBENG	DESA SAMBENG KECAMATAN DESA SAMBENG PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
259	259 BANKEU PILKADES - DESA KEMBANGKUNING	DESA KEMBANGKUNING KECAMATAN DESA KEMBANGKUNING PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
260	260 BANKEU PILKADES - DESA PEKACANGAN	DESA PEKACANGAN KECAMATAN DESA PEKACANGAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
261	261 BANKEU PILKADES - DESA KEDUNGBATUR	DESA KEDUNGBATUR KECAMATAN DESA KEDUNGBATUR PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
262	262 BANKEU PILKADES - DESA NGAMPEL	DESA NGAMPEL KECAMATAN DESA NGAMPEL PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
263	263 BANKEU PILKADES - DESA GIRIGONDO	DESA GIRIGONDO KECAMATAN DESA GIRIGONDO PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
264	264 BANKEU PILKADES - DESA TERSIDILOR	DESA TERSIDILOR KECAMATAN DESA TERSIDILOR PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
265	265 BANKEU PILKADES - DESA KALIMATI	DESA KALIMATI KECAMATAN DESA KALIMATI PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
266	266 BANKEU PILKADES - DESA LUWENGLOR	DESA LUWENGLOR KECAMATAN DESA LUWENGLOR PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
267	267 BANKEU PILKADES - DESA KARANGANYAR	DESA KARANGANYAR KECAMATAN DESA KARANGANYAR PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
268	268 BANKEU PILKADES - DESA POLOWANGI	DESA POLOWANGI KECAMATAN DESA POLOWANGI PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
269	269 BANKEU PILKADES - DESA MEGULUNGLOR	DESA MEGULUNGLOR KECAMATAN DESA MEGULUNGLOR PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
270	270 BANKEU PILKADES - DESA PEPE	DESA PEPE KECAMATAN DESA PEPE PITURUH KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
271	271 BANKEU PILKADES - DESA GIYOMBONG	DESA GIYOMBONG KECAMATAN DESA GIYOMBONG BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
272	272 BANKEU PILKADES - DESA WATUDUWUR	DESA WATUDUWUR KECAMATAN DESA WATUDUWUR BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
273	273 BANKEU PILKADES - DESA PUSPO	DESA PUSPO KECAMATAN DESA PUSPO BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	34.093.000,00	DPPPAPMD
274	274 BANKEU PILKADES - DESA TEGALSARI	DESA TEGALSARI KECAMATAN DESA TEGALSARI BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	34.093.000,00	DPPPAPMD
275	275 BANKEU PILKADES - DESA BRUNOSARI	DESA BRUNOSARI KECAMATAN DESA BRUNOSARI BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	34.093.000,00	DPPPAPMD
276	276 BANKEU PILKADES - DESA PLIPIRAN	DESA PLIPIRAN KECAMATAN DESA PLIPIRAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
277	277 BANKEU PILKADES - DESA PAKISARUM	DESA PAKISARUM KECAMATAN DESA PAKISARUM BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	30.079.000,00	DPPPAPMD
278	278 BANKEU PILKADES - DESA KEMRANGGEN	DESA KEMRANGGEN KECAMATAN DESA KEMRANGGEN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
279	279 BANKEU PILKADES - DESA GOWONG	DESA GOWONG KECAMATAN DESA GOWONG BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
280	280 BANKEU PILKADES - DESA BRUNOREJO	DESA BRUNOREJO KECAMATAN DESA BRUNOREJO BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	34.093.000,00	DPPPAPMD
281	281 BANKEU PILKADES - DESA KARANGGEDANG	DESA KARANGGEDANG KECAMATAN DESA KARANGGEDANG BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
282	282 BANKEU PILKADES - DESA BLIMBING	DESA BLIMBING KECAMATAN DESA BLIMBING BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	30.079.000,00	DPPPAPMD
283	283 BANKEU PILKADES - DESA GUNUNGCONDONG	DESA GUNUNGCONDONG KECAMATAN DESA GUNUNGCONDONG BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
284	284 BANKEU PILKADES - DESA SOMOLETER	DESA SOMOLETER KECAMATAN DESA SOMOLETER BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
285	285 BANKEU PILKADES - DESA KALIWUNGU	DESA KALIWUNGU KECAMATAN DESA KALIWUNGU BRUNO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	34.093.000,00	DPPPAPMD
286	286 BANKEU PILKADES - DESA JATI	DESA JATI KECAMATAN DESA JATI BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
287	287 BANKEU PILKADES - DESA KALIURIP	DESA KALIURIP KECAMATAN DESA KALIURIP BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
288	288 BANKEU PILKADES - DESA KALIWADER	DESA KALIWADER KECAMATAN DESA KALIWADER BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
289	289 BANKEU PILKADES - DESA BLEBER	DESA BLEBER KECAMATAN DESA BLEBER BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
290	290 BANKEU PILKADES - DESA CACABANKIDUL	DESA CACABANKIDUL KECAMATAN DESA CACABANKIDUL BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
291	291 BANKEU PILKADES - DESA MAYUNGSARI	DESA MAYUNGSARI KECAMATAN DESA MAYUNGSARI BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
292	292 BANKEU PILKADES - DESA NGASINAN	DESA NGASINAN KECAMATAN DESA NGASINAN BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
293	293 BANKEU PILKADES - DESA NGLARIS	DESA NGLARIS KECAMATAN DESA NGLARIS BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
294	294 BANKEU PILKADES - DESA KARANGSARI	DESA KARANGSARI KECAMATAN DESA KARANGSARI BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
295	295 BANKEU PILKADES - DESA BENER	DESA BENER KECAMATAN DESA BENER BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	30.079.000,00	DPPPAPMD
296	296 BANKEU PILKADES - DESA KALIJAMBE	DESA KALIJAMBE KECAMATAN DESA KALIJAMBE BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	34.093.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
297	297 BANKEU PILKADES - DESA KEDUNGPUCANG	DESA KEDUNGPUCANG KECAMATAN DESA KEDUNGPUCANG BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	34.093.000,00	DPPPAPMD
298	298 BANKEU PILKADES - DESA KEDUNGLOTENG	DESA KEDUNGLOTENG KECAMATAN DESA KEDUNGLOTENG BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
299	299 BANKEU PILKADES - DESA KALITAPAS	DESA KALITAPAS KECAMATAN DESA KALITAPAS BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
300	300 BANKEU PILKADES - DESA WADAS	DESA WADAS KECAMATAN DESA WADAS BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
301	301 BANKEU PILKADES - DESA GUNTUR	DESA GUNTUR KECAMATAN DESA GUNTUR BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	34.093.000,00	DPPPAPMD
302	302 BANKEU PILKADES - DESA MEDONO	DESA MEDONO KECAMATAN DESA MEDONO BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
303	303 BANKEU PILKADES - DESA KALIBOTO	DESA KALIBOTO KECAMATAN DESA KALIBOTO BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
304	304 BANKEU PILKADES - DESA KAMIJORO	DESA KAMIJORO KECAMATAN DESA KAMIJORO BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
305	305 BANKEU PILKADES - DESA KETOSARI	DESA KETOSARI KECAMATAN DESA KETOSARI BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
306	306 BANKEU PILKADES - DESA LIMBANGAN	DESA LIMBANGAN KECAMATAN DESA LIMBANGAN BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
307	307 BANKEU PILKADES - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI KECAMATAN DESA SENDANGSARI BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
308	308 BANKEU PILKADES - DESA SIDOMUKTI	DESA SIDOMUKTI KECAMATAN DESA SIDOMUKTI BENER KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
309	309 BANKEU PILKADES - DESA KARANGREJO	DESA KARANGREJO KECAMATAN DESA KARANGREJO LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
310	310 BANKEU PILKADES - DESA SEDAYU	DESA SEDAYU KECAMATAN DESA SEDAYU LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
311	311 BANKEU PILKADES - DESA KALISEMO	DESA KALISEMO KECAMATAN DESA KALISEMO LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
312	312 BANKEU PILKADES - DESA BANYUASINKEMBARAN	DESA BANYUASINKEMBARAN KECAMATAN DESA BANYUASINKEMBARAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
313	313 BANKEU PILKADES - DESA GUYANGAN	DESA GUYANGAN KECAMATAN DESA GUYANGAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
314	314 BANKEU PILKADES - DESA KEBONGUNUNG	DESA KEBONGUNUNG KECAMATAN DESA KEBONGUNUNG LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
315	315 BANKEU PILKADES - DESA TEPANSARI	DESA TEPANSARI KECAMATAN DESA TEPANSARI LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
316	316 BANKEU PILKADES - DESA KALINONGKO	DESA KALINONGKO KECAMATAN DESA KALINONGKO LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
317	317 BANKEU PILKADES - DESA NGARGOSARI	DESA NGARGOSARI KECAMATAN DESA NGARGOSARI LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
318	318 BANKEU PILKADES - DESA TRIREJO	DESA TRIREJO KECAMATAN DESA TRIREJO LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
319	319 BANKEU PILKADES - DESA LOANO	DESA LOANO KECAMATAN DESA LOANO LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	30.079.000,00	DPPPAPMD
320	320 BANKEU PILKADES - DESA MARON	DESA MARON KECAMATAN DESA MARON LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	30.079.000,00	DPPPAPMD
321	321 BANKEU PILKADES - DESA KEDUNGPOH	DESA KEDUNGPOH KECAMATAN DESA KEDUNGPOH LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
322	322 BANKEU PILKADES - DESA KALIKALONG	DESA KALIKALONG KECAMATAN DESA KALIKALONG LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
323	323 BANKEU PILKADES - DESA KALIGLAGAH	DESA KALIGLAGAH KECAMATAN DESA KALIGLAGAH LOANO KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
324	324 BANKEU PILKADES - DESA PELUTAN	DESA PELUTAN KECAMATAN DESA PELUTAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
325	325 BANKEU PILKADES - DESA TLOGOSONO	DESA TLOGOSONO KECAMATAN DESA TLOGOSONO GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL
1	2	3	4	5
326	326 BANKEU PILKADES - DESA BENDOSARI	DESA BENDOSARI KECAMATAN DESA BENDOSARI GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
327	327 BANKEU PILKADES - DESA PRUMBEN	DESA PRUMBEN KECAMATAN DESA PRUMBEN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	10.013.000,00	DPPPAPMD
328	328 BANKEU PILKADES - DESA KROYO	DESA KROYO KECAMATAN DESA KROYO GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
329	329 BANKEU PILKADES - DESA SEREN	DESA SEREN KECAMATAN DESA SEREN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	34.093.000,00	DPPPAPMD
330	330 BANKEU PILKADES - DESA PENUNGKULAN	DESA PENUNGKULAN KECAMATAN DESA PENUNGKULAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
331	331 BANKEU PILKADES - DESA MLARAN	DESA MLARAN KECAMATAN DESA MLARAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
332	332 BANKEU PILKADES - DESA REDIN	DESA REDIN KECAMATAN DESA REDIN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	30.079.000,00	DPPPAPMD
333	333 BANKEU PILKADES - DESA BULUS	DESA BULUS KECAMATAN DESA BULUS GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	26.066.000,00	DPPPAPMD
334	334 BANKEU PILKADES - DESA GEBANG	DESA GEBANG KECAMATAN DESA GEBANG GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	18.040.000,00	DPPPAPMD
335	335 BANKEU PILKADES - DESA WINONGKIDUL	DESA WINONGKIDUL KECAMATAN DESA WINONGKIDUL GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
336	336 BANKEU PILKADES - DESA KRAGILAN	DESA KRAGILAN KECAMATAN DESA KRAGILAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
337	337 BANKEU PILKADES - DESA GINTUNGAN	DESA GINTUNGAN KECAMATAN DESA GINTUNGAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	30.079.000,00	DPPPAPMD
338	338 BANKEU PILKADES - DESA NGEMPLAK	DESA NGEMPLAK KECAMATAN DESA NGEMPLAK GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
339	339 BANKEU PILKADES - DESA WINONGLOR	DESA WINONGLOR KECAMATAN DESA WINONGLOR GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	22.053.000,00	DPPPAPMD
340	340 BANKEU PILKADES - DESA SALAM	DESA SALAM KECAMATAN DESA SALAM GEBANG KABUPATEN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	14.026.000,00	DPPPAPMD
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pemilihan Kepala Desa		**5.824.430.000,00**	
	Jumlah bantuan keuangan khusus reguler dan pemilihan kepala desa		**494.086.880.348,00**	

PERTIMBANGAN TAPD TENTANG DAFTAR NAMA CALON PENERIMA ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL	PERTIMBANGAN TAPD
1	2	3	4	5	8
F	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades**				
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN Khusus Desa untuk Fasilitasi Pelaksanaan Pilkades				
G	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Kepemudaan dan Olaharaga**				
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN Khusus Desa Bidang Kepemudaan dan Olaharaga				
H	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Pariwisata**				
1	6090 - Bankeu Bidang Pariwisata - DESA JATIMALANG	DESA JATIMALANG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	250.000.000,00	DINPORAPAR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN kepada Desa Bidang Pariwisata		**250.000.000,00**		
I	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Bidang Jalan**				
	Usulan pokir DPRD				
1	001 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KEDUNGMULYO	DESA KEDUNGMULYO KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	152.452.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
2	002 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SEMAGUNG	DESA SEMAGUNG KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO	130.866.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
3	003 BANKEU BIDANG JALAN - DESA BRUNOREJO	DESA BRUNOREJO KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO	105.300.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
4	004 BANKEU BIDANG JALAN - DESA BRONDONG	DESA BRONDONG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO	101.567.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
5	005 BANKEU BIDANG JALAN - DESA BANDUNGREJO	DESA BANDUNGREJO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	253.107.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
6	006 BANKEU BIDANG JALAN - DESA DUKUHREJO	DESA DUKUHREJO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
7	007 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SUTORAGAN	DESA SUTORAGAN KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
8	008 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SIDOMULYO	DESA SIDOMULYO KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	98.660.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
9	009 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SIDOMULYO	DESA SIDOMULYO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	345.647.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
10	010 BANKEU BIDANG JALAN - DESA PUSPO	DESA PUSPO KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO	309.253.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
11	011 BANKEU BIDANG JALAN - DESA PEKACANGAN	DESA PEKACANGAN KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
12	012 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KETAWANGREJO	DESA KETAWANGREJO KECAMATAN GRABAGO KABUPATEN PURWOREJO	265.023.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
13	013 BANKEU BIDANG JALAN - DESA NAMBANGAN	DESA NAMBANGAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO	121.362.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
14	014 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KEDUNGMULYO	DESA KEDUNGMULYO KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	152.452.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
15	015 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SEDAYU	DESA SEDAYU KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO	284.995.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
16	016 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SEREN	DESA SEREN KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
17	017 BANKEU BIDANG JALAN - DESA GIRIREJO	DESA GIRIREJO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO	88.922.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
18	018 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SEBOROPASAR	DESA SEBOROPASAR KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPR
19	019 BANKEU BIDANG JALAN - DESA HULOSOBO	DESA HULOSOBO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO	52.828.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
20	020 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KUNIR	DESA KUNIR KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	90.556.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
21	021 BANKEU BIDANG JALAN - DESA POGUNGJURUTENGAH	DESA POGUNGJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	100.000.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
22	022 BANKEU BIDANG JALAN - DESA JATIREJO	DESA JATIREJO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
23	023 BANKEU BIDANG JALAN - DESA PURBOWONO	DESA PURBOWONO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO	140.815.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
24	024 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KALIGONO	DESA KALIGONO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO	138.634.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL	PERTIMBANGAN TAPD
1	2	3	4	5	8
25	025 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SUDOROGO	DESA SUDOROGO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
26	026 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KEDUNGPOMAHANWETAN	DESA PRINGGOWIJAYAN KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
27	027 BANKEU BIDANG JALAN - DESA AWU AWU	DESA AWU AWU KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPR
28	028 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SUDOROGO	DESA SUDOROGO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
29	029 BANKEU BIDANG JALAN - DESA TLOGOGUWO	DESA TLOGOGUWO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
30	030 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SOKOAGUNG	DESA SOKOAGUNG KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO	125.000.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
31	031 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SOMOREJO	DESA SOMOREJO KECAMATAN BAGELENL KABUPATEN PURWOREJO	125.000.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
32	032 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SOKO	DESA SOKO KECAMATAN BAGELEN KABUPATEN PURWOREJO	125.000.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
33	033 BANKEU BIDANG JALAN - DESA POGUNGJURUTENGAH	DESA POGUNGJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	294.808.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
34	034 BANKEU BIDANG JALAN - DESA POGUNGKALANGAN	DESA POGUNGKALANGAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	123.698.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
35	035 BANKEU BIDANG JALAN - DESA POPONGAN	DESA POPONGAN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
36	036 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	345.910.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
37	037 BANKEU BIDANG JALAN - DESA BRUNOSARI	DESA BRUNOSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
38	038 BANKEU BIDANG JALAN - DESA TEGALSARI	DESA TEGALSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
39	039 BANKEU BIDANG JALAN - DESA PLIPIRAN	DESA PLIPIRAN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
40	040 BANKEU BIDANG JALAN - DESA WASIAT	DESA WASIAT KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO	60.650.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
41	041 BANKEU BIDANG JALAN - DESA WONOSIDO	DESA WONOSIDO KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
42	042 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SAMPING	DESA SAMPING KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
43	043 BANKEU BIDANG JALAN - DESA JATIREJO	DESA JATIREJO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO	138.634.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
44	044 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KALIHARJO	DESA KALIHARJO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
45	045 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SEDAYU	DESA SEDAYU KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO	361.910.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
46	046 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SEREN	DESA SEREN KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
47	047 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KEMIRI	DESA KEMIRI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
48	048 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KEMIRI	DESA KEMIRI KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
49	049 BANKEU BIDANG JALAN - DESA NGAGLIK	DESA NGAGLIK KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
50	050 BANKEU BIDANG JALAN - DESA BRONDONG	DESA BRONDONG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
51	051 BANKEU BIDANG JALAN - DESA BESOLE	DESA BESOLE KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
52	052 BANKEU BIDANG JALAN - DESA LUGU	DESA LUGU KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
53	053 BANKEU BIDANG JALAN - DESA GUNTUR	DESA GUNTUR KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	113.870.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
54	054 BANKEU BIDANG JALAN - DESA CACABAN KIDUL	DESA CACABAN KIDUL KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL	PERTIMBANGAN TAPD
1	2	3	4	5	8
55	055 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KALIJAMBE	DESA KALIJAMBE KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	100.232.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
56	056 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KALIWADER	DESA KALIWADER KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
57	057 BANKEU BIDANG JALAN - DESA PEKACANGAN	DESA PEKACANGAN KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	142.722.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
58	058 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SUKOWUWUH	DESA SUKOWUWUH KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	181.180.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
59	059 BANKEU BIDANG JALAN - DESA WADAS	DESA WADAS KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	114.649.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
60	060 BANKEU BIDANG JALAN - DESA WINONGKIDUL	DESA WINONGKIDUL KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
61	061 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KARANGREJO	DESA KARANGREJO KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
62	062 BANKEU BIDANG JALAN - DESA TRIDADI	DESA TRIDADI KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO	107.615.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
63	063 BANKEU BIDANG JALAN - DESA TRIREJO	DESA TRIREJO KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO	107.857.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
64	064 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KERTOJAYAN	DESA KERTOJAYAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO	63.508.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
65	065 BANKEU BIDANG JALAN - DESA AGLIK	DESA AGLIK KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
66	066 BANKEU BIDANG JALAN - DESA BRUNOSARI	DESA BRUNOSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
67	067 BANKEU BIDANG JALAN - DESA PLIPIRAN	DESA PLIPIRAN KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
68	068 BANKEU BIDANG JALAN - DESA TEGALSARI	DESA TEGALSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
69	069 BANKEU BIDANG JALAN - DESA TURUS	DESA TURUS KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
70	070 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SIDOMULYO	DESA SIDOMULYO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	345.647.000,00	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
71	071 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KARANGREJO	DESA KARANGREJO KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO	292.312.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
72	072 BANKEU BIDANG JALAN - DESA GIRIGONDO	DESA GIRIGONDO KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	106.766.000,00	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
73	Bankeu Bidang Jalan Desa-Desa di Kabupaten Purworejo	Desa-desa di Kabupaten Purworejo	-		
	Jumlah Bantuan Keuangan Bidang Jalan yang berasal dari Pokir DPRD		**6.309.407.000,00**		
	Renja Perangkat Daerah				
1	001 BANKEU BIDANG JALAN - DESA TURUS KECAMATAN KEMIRI	DESA TURUS KECAMATAN KEMIRI	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
2	002 BANKEU BIDANG JALAN - DESA BRONDONG KECAMATAN BRUNO	DESA BRONDONG KECAMATAN BRUNO	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
3	003 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KEMANUKAN	DESA KEMANUKAN KECAMATAN BAGELEN	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
4	004 BANKEU BIDANG JALAN - DESA PUNDENSARI	DESA PUNDENSARI KECAMATAN PURWODADI	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
5	005 BANKEU BIDANG JALAN - DESA JENARWETAN	DESA JENARWETAN KECAMATAN PURWODADI	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
6	006 BANKEU BIDANG JALAN - DESA DADIREJO	DESA DADIREJO KECAMATAN BAGELEN	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL	PERTIMBANGAN TAPD
1	2	3	4	5	8
7	007 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KLIWONAN	DESA KLIWONAN KECAMATAN BANYUURIP	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
8	008 BANKEU BIDANG JALAN - DESA BANDUNGREJO	DESA BANDUNGREJO KECAMATAN BAYAN	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
9	009 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KALIHARJO	DESA KALIHARJO KECAMATAN KALIGESING	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
10	010 BANKEU BIDANG JALAN - DESA GANGGENG	DESA GANGGENG KECAMATAN PURWOREJO	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
11	011 BANKEU BIDANG JALAN - DESA BUGEL	DESA BUGEL KECAMATAN BAGELEN	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
12	012 BANKEU BIDANG JALAN - DESA BLENDUNG	DESA BLENDUNG KECAMATAN PURWODADI	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
13	013 BANKEU BIDANG JALAN - DESA UKIRSARI	DESA UKIRSARI KECAMATAN GRABAG	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
14	014 BANKEU BIDANG JALAN - DESA NAMBANGAN	DESA NAMBANGAN KECAMATAN GRABAG	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
15	015 BANKEU BIDANG JALAN - DESA TRIDADI	DESA TRIDADI KECAMATAN LOANO	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
16	016 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SEDAYU	DESA SEDAYU KECAMATAN LOANO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
17	017 BANKEU BIDANG JALAN - DESA POGUNGKALANGAN	DESA POGUNGKALANGAN KECAMATAN BAYAN	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
18	018 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KEDUNGMULYO	DESA KEDUNGMULYO KECAMATAN BUTUH	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
19	019 BANKEU BIDANG JALAN - DESA CACABAN KIDUL	DESA CACABAN KIDUL KAB. PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
20	020 BANKEU BIDANG JALAN - DESA WADAS	DESA WADAS BENER KAB. PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
21	021 BANKEU BIDANG JALAN - DESA TUNJUNGTEJO	DESA TUNJUNGTEJO KECAMATAN PITURUH	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
22	022 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KETAWANGREJO	DESA KETAWANGREJO KECAMATAN GRABAG	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
23	023 BANKEU BIDANG JALAN - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO KECAMATAN KALIGESING	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
24	024 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KEBONGUNUNG	DESA KEBONGUNUNG KECAMATAN BENER	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
25	025 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SAMPING	DESA SAMPING KECAMATAN KEMIRI	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
26	026 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KEREP	DESA KEREP KECAMATAN KEMIRI	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL	PERTIMBANGAN TAPD
1	2	3	4	5	8
27	027 BANKEU BIDANG JALAN - DESA PACEKELAN	DESA PACEKELAN KECAMATAN PURWOREJO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
28	028 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KALIJERING	DESA KALIJERING KECAMATAN PITURUH	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
29	029 BANKEU BIDANG JALAN - DESA NGLARIS	DESA NGLARIS KECAMATAN BENER	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
30	030 BANKEU BIDANG JALAN - DESA NGLARIS	DESA NGLARIS KECAMATAN BENER	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
31	031 BANKEU BIDANG JALAN - DESA NGLARIS	DESA NGLARIS KECAMATAN BENER	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
32	032 BANKEU BIDANG JALAN - DESA HARGOROJO	DESA HARGOROJO KECAMATAN BAGELEN	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
33	033 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SIDOMULYO	DESA SIDOMULYO KECAMATAN PURWOREJO	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
34	034 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SIDOMULYO	DESA SIDOMULYO KECAMATAN PURWOREJO	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
35	035 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KEMBANGKUNING	DESA KEMBANGKUNING KECAMATAN NGOMBOL	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
36	036 BANKEU BIDANG JALAN - DESA SECANG	DESA SECANG KECAMATAN NGOMBOL	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
37	037 BANKEU BIDANG JALAN - DESA WINGKOMULYO	DESA WINGKOMULYO KECAMATAN NGOMBOL	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
38	038 BANKEU BIDANG JALAN - DESA TURUS	DESA TURUS KECAMATAN KEMIRI	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
39	039 BANKEU BIDANG JALAN - DESA TEGALSARI	DESA TEGALSARI KECAMATAN BRUNO	-	DPUPR	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
40	040 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KEMIRI LOR	DESA KEMIRI LOR KECAMATAN KEMIRI	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
41	041 BANKEU BIDANG JALAN - DESA PLIPIRAN	DESA PLIPIRAN KECAMATAN BRUNO	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
42	042 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KEDONGLO	DESA KEDONGLO KECAMATAN KEMIRI	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
43	043 BANKEU BIDANG JALAN - DESA PITURUH	DESA PITURUH KECAMATAN PITURUH	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
44	044 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KRANDEGAN	DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
45	045 BANKEU BIDANG JALAN - DESA PURWODADI	DESA PURWODADI KECAMATAN PURWODADI	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
46	046 BANKEU BIDANG JALAN - DESA BRUNOSARI	DESA BRUNOSARI KECAMATAN BRUNO	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL	PERTIMBANGAN TAPD
1	2	3	4	5	8
47	047 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KEMBANGKUNING	DESA KEMBANGKUNING KECAMATAN NGOMBOL	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
48	048 BANKEU BIDANG JALAN - DESA CENGKAWAKREJO	DESA CENGKAWAKREJO KECAMATAN BANYUURIP	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
49	049 BANKEU BIDANG JALAN - DESA BRONDONG	DESA BRONDONG KECAMATAN BRUNO	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
50	050 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KALIWADER	DESA KALIWADER KECAMATAN BENER	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
51	051 BANKEU BIDANG JALAN - DESA KALITAPAS	DESA KALITAPAS KECAMATAN BENER	-	DPUPR	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
	Jumlah Bantuan Keuangan Bidang Jalan yang berasal dari renja perangkat daerah		-		
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN kepada Desa Bidang Jalan		**6.309.407.000,00**		
J	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa**				
	Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa berasal dari Pokir DPRD				
1	001 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA BINANGUN	DESA BINANGUN KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	125.000.000,00	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
2	002 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA KEBONDALEM	DESA KEBONDALEM KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	150.000.000,00	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
3	003 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA KALIWATU BUMI	DESA KALIWATU BUMI KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	100.000.000,00	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
4	004 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA TEPUSKULON	DESA TEPUSKULON KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPR
5	005 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA KARANGLUAS	DESA KARANGLUAS KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
6	006 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA BRUNOREJO	DESA BRUNOREJO KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
7	007 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA SANGUBANYU	DESA SANGUBANYU KECAMATAN GRABAGG KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
8	008 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA CENGKAWAKREJO	DESA CENGKAWAKREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
9	009 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA CENGKAWAKREJO	DESA CENGKAWAKREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	100.000.000,00	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
10	010 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA BOROWETAN	DESA BOROWETAN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
11	011 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	104.351.200,00	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
12	012 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA WONOTULUS	DESA WONOTULUS KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
13	013 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA KARANGWULUH	DESA KARANGWULUH KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	100.000.000,00	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
14	014 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA BRUNOSARI	DESA BRUNOSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
15	015 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
16	016 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA DEPOKREJO	DESA DEPOKREJO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
17	017 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA WONOSUKO	DESA WONOSUKO KECAMATAN KEMIRI KABUPATEN PURWOREJO	114.194.000,00	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
18	018 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA DEPOKREJO	DESA DEPOKREJO KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL	PERTIMBANGAN TAPD
1	2	3	4	5	8
19	019 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA KEMBANGKUNING	DESA KEMBANGKUNING KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
20	020 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA GANGGENG	DESA GANGGENG KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
21	021 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA PACOR	DESA PACOR KECAMATAN KUTOARJO\ KABUPATEN PURWOREJO	100.600.000,00	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
22	022 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA POLOMARTO	DESA POLOMARTO KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
23	023 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA KLIWONAN	DESA KLIWONAN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
24	024 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
25	025 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA BINANGUN	DESA BINANGUN KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
26	026 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA SANGUBANYU	DESA SANGUBANYU KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO	75.000.000,00	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
27	027 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA NGEMPLAK	DESA NGEMPLAK KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
28	028 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA TRIREJO	DESA TRIREJO KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
29	029 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA BINANGUN	DESA BINANGUN KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
30	030 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA TLOGOBULU	DESA TLOGOBULU KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
31	031 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA CANGKREP KIDUL	DESA CANGKREP KIDUL KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	-	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
32	032 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA PRAPAGKIDUL	DESA PRAPAGKIDUL KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	130.000.000,00	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa berasal dari Pokir DPRD		**1.099.145.200,00**		
	Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa berasal dari Renja Perangkat Daerah				
1	001 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA SUMBERSARI	DESA SUMBERSARI KECAMATAN PURWODADI	_	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
2	002 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA TRIREJO	DESA TRIREJO KEC. LOANO	_	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
3	003 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA PUCUNGROTO	DESA PUCUNGROTO KECAMATAN KALIGESING	_	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
4	004 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA TLOGOREJO	DESA TLOGOREJO KECAMATAN KALIGESING	_	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
5	005 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA TLOGOBULU	DESA TLOGOBULU KECAMATAN KALIGESING	_	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
6	006 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA SEMAGUNG	DESA SEMAGUNG KECAMATAN BAGELEN	_	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
7	007 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA POPONGAN	DESA POPONGAN KECAMATAN BANYUURIP	_	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
8	008 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA BEDONO KARANGDUWUR	DESA BEDONO KARANGDUWUR KECAMATAN KEMIRI	_	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
9	009 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA SUKOWUWUH	DESA SUKOWUWUH KECAMATAN BENER	_	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	PERANGKAT DAERAH TEKNIS PENGUSUL	PERTIMBANGAN TAPD
1	2	3	4	5	8
10	010 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA NGADIREJO	DESA NGADIREJO KEC. KALIGESING	_	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
11	011 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA KRANDEGAN	DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN	_	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
12	012 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI KECAMATAN PURWODADI	_	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
13	013 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA KARANGLUAS	DESA KARANGLUAS KECAMATAN KEMIRI	_	DPPPAPMD	Tidak memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD
14	014 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA MALANGREJO	DESA MALANGREJO KECAMATAN NGOMBOL	_	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
15	015 BANKEU BIDANG PENINGKATAN SARPRAS DESA - DESA TRIREJO	DESA TRIREJO KECAMATAN LOANO	-	DPPPAPMD	Memenuhi syarat dicantumkan dalam Daftar Bantuan Keuangan ke Desa Bersifat Khusus dalam RKPD Tahun 2027 dan Rancangan KUA dan PPAS TA 2027 pada SKPD BPKPAD dengan nilai Rp000. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa berasal dari Renja Perangkat Daerah		**-**		
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN kepada Desa untuk Peningkatan Sarana dan		**1.099.145.200,00**		
K	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Kebudayaan**				
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN Khusus Desa Bidang Kebudayaan		**-**		
L	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa Bidang Kepemudaan dan Olaharaga**				
			-		
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN Khusus Desa Bidang Kepemudaan dan Olaharaga		**-**		
M	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelistrikan**				
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN Khusus Desa untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelistrikan				
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS TIDAK REGULER		**7.658.552.200,00**		
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		**501.745.432.548,00**		
	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SKPD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH		**501.745.432.548,00**		

Selanjutnya, berikut ini daftar calon penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan sosial uang yang diteriama Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2027.

PERTIMBANGAN TAPD TENTANG DAFTAR CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL UANG YANG DITERIMA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
I	**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**				
A	**SUB KEGIATAN 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan**				
1	**5.1.06.01.001.00001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu**				
1	Ulfatun Nisa	Desa Karangsari, RT. 04/02, Kec. Purwodadi	Bansos Uang	0	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena calon penerima masuk dalam kategori desil 5
2	Tri Waluyo	Desa Candingasinan, RT.01/03, Kec. Banyuurip	Bansos Uang	0	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena calon penerima masuk dalam kategori desil 5
3	Kartinah	Desa Candingasinan, RT.01/02, Kec. Banyuurip	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	Ivan Budiadi	Desa Candingasinan, RT.01/02, Kec. Banyuurip	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	Ponikem	Desa Jatikontal, RT.03/01, Kec. Purwodadi	Bansos Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena kondisi calon penerima sudah membaik dan bisa berkativitas
6	Sri Lestari	Desa Banjarsari, RT.02/03, Kec. Purwodadi	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	Zulaikhah	Desa karangsari RT 004 RW 001 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
8	Septiani	Desa Sangubanyu, RT 002 RW 003, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	Rumiyani	Desa Banjarsari, RT 002 RW 002, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo	Bansos Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena calon penerima masuk dalam kategori desil 5
10	Fadhil Azzam Cahyono	Desa Jatikontal RT 02 RW 01 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo	Bansos Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena calon penerima masuk dalam kategori desil 6-10
11	Tasinah	Desa candingasin, RT 01 RW)2, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo	Bansos Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena calon penerima masuk dalam kategori desil 6-10
12	Murniwati	Desa Sangubanyu, RT 001 RW 002. Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
13	Legimun	Desa Jatikontal, RT 01 RW 01, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
14	Ria Artika	Kelurahan Katerban RT 01 RW 08, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
15	Slamet Wiyarni	Kelurahan Katerban RT 03 RW 07, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo	Bansos Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena calon penerima masuk dalam kategori desil 5
16	Rosyiatun Alifah	Desa Sumber Agung, Rt.02/01, Kec. Grabag	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
17	Suciana Ardani	Desa Nambangan, Rt.04/02, Kec. Grabag	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
18	Tegar Wahyudi	Desa Rejosari, Rt 01 Rw 04 Kec.Grabag	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
19	Muhammad Imam	Desa Trimulyo, Rt.02/01, Kec. Grabag	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
20	Tika Setianingsih	Desa Bendungan,Rt 02 Rw 02 Kec.Grabag	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
21	Adelia Jayanti	Desa Condongsari RT 01 RW 02, Kec. Banyuurip	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
22	Akhmad Tugiman	Kel. Sucenjurutengah RT 04 RW 02 Kec. Bayan	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
23	Agus Setiyani	Desa Dewi RT 02 RW 02 Kec. Bayan	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
24	Sobar	Desa Pucangagung RT 02 RW 01 Kec. Bayan	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
25	Nazran Mohammad Akbar Khalfani	Desa Trimulyo RT 01 RW 02 Kec. Grabag	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
26	Ratna Cahyani	Desa Harjobinangun RT 02 RW 06 Kec. Grabag	Bansos Uang	3.600.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan				**68.400.000**	
B	**SUB KEGIATAN 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga**				
1	**5.1.06.02.001.00001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga**				
1	912 Penerima Bansos DBHCHT	Se-Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial BLT Jaring Pengaman Sosial dari DBHCHT	547.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga				**547.200.000**	
2	**5.1.06.04.001.00001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)**				

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
1	LKSA PAYM Danukusumo	Kelurahan Kledungkradenan Kecamatan Banyuurip	Bansos Uang	50.397.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	LKSA Nurul Muttaqin Kemiri	Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri	Bansos Uang	58.796.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	LKS Rehabilitasi Sosial Gangguan Jiwa Tirto Jiwo	Desa Kalinongko Kecamatan Loano	Bansos Uang	97.434.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	LKS Panti Rehabilitasi Sosial Plandi	Desa Wangunrejo Kecamatan Banyuurip	Bansos Uang	83.995.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	LKSA Panti Rini Purworejo	Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo	Bansos Uang	63.836.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	LKSA PAY&D Muhammadiyah Kaligesing	Desa Kaliharjo Kecamatan Kaligesing	Bansos Uang	28.558.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	LKSA Panti Asuhan Muhammadiyah Purworejo	Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo	Bansos Uang	102.473.900	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	Yayasan Sosial Umi Kulsum Indonesia	Kelurahan Lugosobo Kecamatan Gebang	Bansos Uang	6.719.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	LKSA Tunagrahita Santo Laurentius	Desa Borokulon Kecamatan Banyuurip	Bansos Uang	23.518.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				**515.729.300**	
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA SUB KEGIATAN 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				**1.062.929.300**	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
JUMLAH BANTUAN SOSIAL UANG PADA SKPD DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA				**1.131.329.300**	
II	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**				
A	**SUB KEGIATAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**				
1	**5.1.06.02.001.00001 - Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga**				
1	0001 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MUHLISUN	Sabrang Wetan RT 002 RW 002, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	25.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	0002 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MUNDOFAR	Kalicurug RT 002 RW 004, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	25.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
3	0003 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - BONIYATUL	Cacaban, RT 004 RW 002, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	25.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	0004 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUMIRTO	Tegalsari RT 002, RW 003 Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
5	0005 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - PUKSINAH	Tegalsari RT 001, RW 003 Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
6	0006 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUTAMTO	Silo RT 008, RW 001, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
7	0007 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SLAMET	Krajan RT 007, RW 002, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
8	0008 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - PAENO	Sigulo RT 005, RW 002, Desa Purbowono, Kecamatan Kaligesing	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
9	0009 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MIRADIYANTO	Sigodog RT 003, RW 001, Desa Purbowono, Kecamatan Kaligesing	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
10	0010 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - DEDY RUSTAWAN	Ngandagan RT.004 RW.002, Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
11	0011 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUPARMAN WALUYO	Ngandagan RT.003 RW.002, Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
12	0012 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MAHFUDIN	Semranti RT.003 RW.001, Desa Kalitapas, Kecamatan Bener	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
13	0013 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MARIYAH	Bendo RT.001 RW.001, Desa Kalitapas, Kecamatan Bener	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
14	0014 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - INDUN	Salam RT.003 RW.001, Desa Kalitapas, Kecamatan Bener	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
15	0015 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - LANJAR SUPRIYANTO	Bendo RT.001 RW.001, Desa Kalitapas, Kecamatan Bener	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
16	0016 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - JUPRI	Silebeng RT.001 RW.001, Desa Kalitapas, Kecamatan Bener	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
17	0017 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SAMINAH	Silegok RT.001 RW.001, Desa Kalitapas, Kecamatan Bener	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
18	0018 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - PARTIYAH	Kandri, RT 002 RW 002, Desa Karangsari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
19	0019 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - HASANUDIN	Cacaban, RT 004 RW 002, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo		20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
20	0020 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - IRMAWANTO	Cacaban, RT 002 RW 002, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
21	0021 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MOYAN	Kedungwungu, RT 004 RW 003, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
22	0022 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - NUR CHOJIN	Kedungwungu, RT 003 RW 003, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
23	0023 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SITI CHOIRUNISA	Sikempong, RT 002 RW 004, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
24	0024 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUPRIYADI	Kalibang RT 001 RW 005, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
25	0025 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - TAMTO	Kalibang RT 005 RW 005, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
26	0026 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - WASITO	Cacaban RT 002 RW 002, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
27	0027 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUMARDI	Brukutan RT.002 RW.001, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
28	0028 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SULEMAN	Margosono RT.001 RW.002, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
29	0029 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SODIKIN	Kambangan RT.003 RW.001, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
30	0030 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SURATIN	Kambangsari RT.002 RW.001, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
31	0031 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - FAHRUDIN	Kambangan RT.003 RW.001, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
32	0032 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - EDI YULIANTO	Margosono RT.001 RW.002, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
33	0033 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUWARYO	Margosono RT.001 RW.002, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
34	0034 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MAD YAENUDIN	Kambangan RT.003 RW.001, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
35	0035 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MIFTAKHUL IHSAN	Brukutan RT.001 RW.001, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
36	0036 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - JAENAH DULHADI	Kambangan RT.003 RW.001, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
37	0037 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SAIMAN	Margosono RT.001 RW.002, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
38	0038 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - PINGGIR	Kambangan RT.003 RW.001, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
39	0039 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - YUGI DARMINTO	Kambangasri RT.002 RW.001, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
40	0040 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SARIPAH	Karangtingal RT.002 RW.001, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
41	0041 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - BAROKAH	Margosono RT.001 RW.002, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
42	0042 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - KIMAH	Kambangan RT.003 RW.001, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
43	0043 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - ABDUL HALIM	Kambangan RT.003 RW.001, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
44	0044 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - TARIYAH	Kambangasri RT.002 RW.001, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
45	0045 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - WAHYUDIN	Panceng RT.001 RW.002, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
46	0046 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - KASIMIN	Panceng RT.002 RW.002, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
47	0047 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUTARTO	Panceng RT.003 RW.002, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
48	0048 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - PARMAN	Kandang warak RT.002 RW.003, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
49	0049 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - TOMI SETIAWAN	Dukuh Kandang Warak RT. 003 RW.003, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
50	0050 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MOHOYIN	Panceng RT.004 RW.002, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
51	0051 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUPIYAH	Kalilaos RT.003 RW.001, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
52	0052 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUBUR WIBOWO	Pakis arum RT.002 RW.001, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
53	0053 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUMARTO	Kali laos RT.004 RW.001, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
54	0054 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - ISMANTO	Panceng RT.001 RW.002, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
55	0055 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - WISANTO	Kalilaos RT.004 RW.001, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
56	0056 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUBAEDAH	Kandang Warak RT. 002 RW.003, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
57	0057 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - KHANIFUDIN	Pakisarum RT.002 RW.007, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
58	0058 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - TUMIN	Panceng RT.002 RW.002, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
59	0059 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - TUMINO	Kandang Warak RT. 002 RW.003, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
60	0060 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - WARISNO	Dukuh Krajan RT.004 RW.001, Desa Somoleter, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
61	0061 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - BUSERI	Krajan RT.004 RW.001, Desa Somoleter, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
62	0062 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - ROCHANI	Krajan RT.002 RW.001, Desa Somoleter, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
63	0063 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - ASRONIYAH	Krajan RT.002 RW.001, Desa Somoleter, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
64	0064 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - ISNGADI	Somodadi RT.001 RW.003, Desa Somoleter, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
65	0065 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - WAGI SETIAWAN	Watupayung RT.003 RW.001, Desa Somoleter, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
66	0066 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - KASIAH	Krajan RT.001 RW.001, Desa Somoleter, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
67	0067 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MAD SUDARNO	Somodadi RT.002 RW.003, Desa Somoleter, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
68	0068 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MUHYASIN	Somodadi RT.002 RW.002, Desa Somoleter, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
69	0069 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MAD LATIP	Krajan RT.001 RW.001, Desa Somoleter, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
70	0070 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUDIYATI	Tegalsari RT 002, RW 003 Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
71	0071 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SULIYAH	Gobyagan RT 002, RW 003 Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
72	0072 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - RENGGO SUWITO	Dukuh Pabrik, RT 002 RW 004, Gintungan, Gebang	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
73	0073 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - BAROKAH	Krajan, RT 002 RW 002, Kragilan, Gebang	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
74	0074 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SITI KHOTIAH	Dukuh Tobong , RT 001 RW 002, Pelutan, Gebang	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
75	0075 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MUHAMMAD QOMA RUZZAMAN	Ketundan, RT 001 RW 002, Desa Sangubanyu, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
76	0076 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MURSODO	Dusun II RT 001 RW 002, Desa Wonoenggal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
77	0077 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - PARNO	Sipace RT 002, RW 002, Desa Purbowono, Kecamatan Kaligesing	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
78	0078 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - TUKIDI	Krajan RT 003, RW 002, Desa Purbowono, Kecamatan Kaligesing	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
79	0079 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - PONIMIN	Sigodog RT 003, RW 001, Desa Purbowono, Kecamatan Kaligesing	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
80	0080 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - DIDIK ARDIYANTO	Penggung RT 001, RW 002, Desa Purbowono, Kecamatan kaligesing	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
81	0081 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - PARIDJEM	Sigodog RT 003, RW 001, Desa Purbowono, Kecamatan Kaligesing	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
82	0082 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - GINO	Penggung RT 001, RW 002, Desa Purbowono, Kecamatan kaligesing	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
83	0083 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - WAGISAH	Loning Santren RT 001 RW 001, Desa Loning, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
84	0084 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SADINAH	Krajan Utara RT 002 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
85	0085 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - KASIH	Krajan Selatan RT 002 RW 001, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
86	0086 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SAYEM	Krajan Selatan RT 001 RW 001, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
87	0087 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUHARJO	Krajan Utara RT 003 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
88	0088 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - HARJONO	Krajan Utara RT 002 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
89	0089 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - REDIONO	Krajan Utara RT 002 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
90	0090 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - WITOREJO	Krajan Utara RT 002 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
91	0091 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - YUSWADI	Krajan Selatan RT 002 RW 001, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
92	0092 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - TUYEM	Krajan Utara RT 003 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
93	0093 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - TURAH	Krajan Tengah RT 001 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
94	0094 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - PONISIH	Krajan Selatan RT 002 RW 001, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
95	0095 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SARIUN	Krajan Utara RT 003 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
96	0096 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - YANTO	Krajan Tengah RT 001 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
97	0097 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - AYEM	Krajan Utara RT 003 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
98	0098 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SAINTEN	Krajan Utara RT 002 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
99	0099 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - COMLING	Krajan Utara RT 003 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
100	0100 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SIHIN	Krajan Selatan RT 002 RW 001, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
101	0101 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - JEMONO	Krajan Tengah RT 001 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
102	0102 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - PONIRAH	Suko Gelap RT 003 RW 001, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
103	0103 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SURIP	Krajan Tengah RT 003 RW 001, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
104	0104 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MINARDI	Krajan Utara RT 002 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
105	0105 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - PARIDIN	Krajan Tengah RT 001 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
106	0106 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUTARTO	Sukogelap RT 001 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
107	0107 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - FAJAR	Krajan Selatan RT 002 RW 001, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
108	0108 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - NURDIYANTO	Sukogelap RT 001 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
109	0109 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - RIYANTO	Krajan Utara RT 002 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
110	0110 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - TUKIJO	Krajan Tengah RT 001 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
111	0111 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SRIYANTO	Krajan Utara RT 003 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
112	0112 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - WARINO / BURHANUDIN	Krajan Selatan RT 001 RW 001, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
113	0113 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - PARMI	Krajan Selatan RT 001 RW 001, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
114	0114 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - BONOWIRYO	Sukogelap RT 001 RW 002, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
115	0115 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SAPTO AJI	Dusun 02 Pacor RT 002 RW 004, Desa Pacor, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
116	0116 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MARKAMAH	Krajan RT 002, RW 003, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
117	0117 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - EDI SUYONO	Ngemplak RT 001, RW 004, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
118	0118 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - AGUS ADITIA ARIF	Krajan RT 002, RW 003, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
119	0119 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - KUSINO	Gunung Asem RT 002, RW 002, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
120	0120 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - EDI PURWANTO	Gunung Asem RT 002, RW 002, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
121	0121 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SLAMET	Dusun Glagah Ombo RT 002, RW 001, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
122	0122 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUTRISNO	Krajan RT 002, RW 003, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
123	0123 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - ALI RAHMAT	Krajan RT 002, RW 003, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
124	0124 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SUTRISNO	Ngemplak RT 002, RW 004, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
125	0125 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - SITI CHANIFAH	Ngemplak RT 001, RW 004, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
126	0126 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MUCHAMAD WAHYUDIN	Krajan RT 001, RW 003, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
127	0127 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - AMAT SOPINGI	Glagah Ombo RT 003, RW 001, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
128	0128 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - TUSIYAH	Gunung Asem RT 001, RW 002, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
129	0129 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - MAHFUZ FAIZAL	Dusun Ngempak No. 142, RT 001, RW 004, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
130	0130 - BANSOS PERBAIKAN RTLH - ISMARDIYANTO	Keseneng, RT 003 RW 001, Kelurahan Keseneng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
131	AJIDI ROHMAN	Surodadi RT 008 RW 003 , Desa Puspo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Tidak Ada Direses
132	ABDUL ROUF	Sabrang Wetan RT 001 RW 002, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan SIPD tidak BNBA hanya alamat
133	TUMIRIN	Crogol RT 004 RW 007, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan SIPD tidak BNBA hanya alamat dan Tidak Memenuhi Persyaratan (Kerusakan hanya Lantai)
134	MUH MUHLISIN	Singojoyo, RT 002 RW 005, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan SIPD tidak BNBA hanya alamat
135	MISKIYAH	Singojoyo, RT 002 RW 005, Desa Brunosari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan SIPD tidak BNBA hanya alamat

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
136	TUGIMIN	Sambeng RT 003 RW 001, Desa Gowong, Kecamatn Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan SIPD tidak BNBA hanya alamat
137	SUMHAJI	Sambeng RT 003 RW 001, Desa Gowong, Kecamatn Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan SIPD tidak BNBA hanya alamat
138	NUR KHOLIS	Kedung Wungu RT 002 RW 003, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan SIPD tidak BNBA hanya alamat dan Tidak Memenuhi Persyaratan (mengajukan rumah belakang)
139	SITI MUNIROH	Kedungwungu RT 001 RW 003, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan SIPD tidak BNBA hanya alamat
140	IFIN	Sigedog RT 003 RW 004, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan SIPD tidak BNBA hanya alamat
141	AHMADI	Donorejo RT 003 RW 004, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan SIPD tidak BNBA hanya alamat
142	PULNO	Silo RT 005 RW 001, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan SIPD tidak BNBA hanya alamat
143	SATIYEM	Dusun Kidul RT 003 RW 003, Desa Kedungkamal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan SIPD tidak BNBA hanya alamat
144	SARJI SURYO PRAMONO	Blok Melati RT 001 RW 003, Desa Rejosari, Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon mengajukan pembangunan Rumah Baru di tempat lain
145	BUTHUK HANIFAH	Glagah Ombo RT 001, RW 001, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon Tidak mempunyai rumah, yang diusulkan bukan milik sendiri

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
146	MUHAMMAD SIROJUL MUNIR	Glagah Ombo RT 001, RW 001, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon mengajukan bukan rumah utama (dapur)
147	SURYONO	Gunung Asem RT 001, RW 002, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon mengajukan pembangunan Rumah Baru di tempat lain
148	SITI RACHMAH	Gunung Asem RT 001, RW 002, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Rumah Pemohon hanya mengalami rusak ringan (1 komponen kerusakan yaitu Atap)
149	SLAMET GIYONO	Krajan RT 002, RW 003, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon mengajukan bukan rumah utama (dapur)
150	AMAT KOZIM	Dusun Gunung Asem RT 001, RW 002, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon Tidak mempunyai rumah, yang diusulkan bukan milik sendiri
151	PONIRAN	Gunung Asem RT 002, RW 002, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon mengajukan rumah Ibu Saniyem dan rumah sudah mendapatkan bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui dana APBD Kabupaten Tahun 2025
152	MUSLIM	Glagah Ombo RT 001, RW 001, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon Tidak mempunyai rumah, yang diusulkan bukan milik sendiri
153	SLAMET	Ngemplak RT 002, RW 004, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon mengajukan bukan rumah utama (dapur)
154	KADIR	Glagah Ombo RT 002, RW 001, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon mengajukan bukan rumah utama (dapur)
155	RIYANTO	Ngandagan RT.002 RW.002, Desa Ngandagan, Kecamatan Pituruh	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon terdaftar dalam DTSEN Desil 6-10 bukan sebagai Prioritas Utama dalam Data DTSEN/ Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi)penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
156	TUMIRAH	Margosono RT.001 RW.002, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon Meninggal Dunia dan tidak ada ahli waris dalam satu rumah/kartu keluarga
157	WINATA	Margosono RT.001 RW.002, Desa Kambangan, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Lahan Pemohon belum clean and clear
158	SARIPAN	Kandang Warak RT. 001 RW.004, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon terdaftar dalam DTSEN Desil 6-10 bukan sebagai Prioritas Utama dalam Data DTSEN/ Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi)penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
159	NGASINI	Panceng RT. 001 RW.002, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon terdaftar dalam DTSEN Desil 6-10 bukan sebagai Prioritas Utama dalam Data DTSEN/ Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi)penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
160	SUNARTO	Jebugwangi RT.002 RW.005, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon Tidak Mampu Berswadaya
161	NARYUDI	Dukuh Panceng RT.004 RW.002, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Rumah sudah Layak Huni dengan perbaikan secara Mandiri
162	TUTUR SABILAN	Kandang Warak RT.001 RW.003, Desa Pakisarum, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon tidak berdomisili d tempat asal dan berdomisili di luar jawa
163	MANADI	Silo RT 004, RW 001, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon mengajukan bukan rumah utama (dapur)
164	DEWI SRI VANILI	Gobyagan RT 002, RW 003 Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon diusulkan dalam Bantuan Keuangan kepada Desa Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) APBD Provinsi Tahun 2026
165	RUSMINI	Krajan RT 007, RW 002, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon Tidak mempunyai rumah, yang diusulkan bukan milik sendiri

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
166	SAMAWIYAH	Silo RT 001, RW 001, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon mengajukan bukan rumah utama (dapur)
167	ASANAH	Teges RT 005 RW 004, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon Tidak mempunyai rumah, yang diusulkan bukan milik sendiri
168	RUSMIYATI	Dusun l, RT 003 RW 001, Kemiri, Gebang	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon terdaftar dalam DTSEN Desil 6-10 bukan sebagai Prioritas Utama dalam Data DTSEN/ Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi)penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
169	NAWIRUDIN	Beteng, RT 002 RW 005, Winong Lor, Gebang	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon terdaftar dalam DTSEN Desil 6-10 bukan sebagai Prioritas Utama dalam Data DTSEN/ Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi)penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
170	ROBIATUL NGADAWIYAH	Ngebuh, RT 001 RW 002, Winong Lor, Gebang	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Lahan Pemohon belum clean and clear
171	TUSIMAN	Beteng, RT 001 RW 005, Winong Lor, Gebang	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Rumah Pemohon hanya mengalami rusak ringan (1 komponen kerusakan yaitu Atap)
172	AMAT WASITO	Gondoriyo, RT 001 RW 003, Winong Lor, Gebang	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Rumah sudah Layak Huni dengan perbaikan secara Mandiri
173	AMAT JUREMI	Ngebuh, RT 001 RW 002, Winong Lor, Gebang	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Rumah sudah Layak Huni dengan perbaikan secara Mandiri
174	MARYATI	Krajan RT 001, RW 001 Desa Dilem, Kecamatan kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon mendapatkan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Baznas Kabupaten 2026
175	SUTAMI	Krajan RT 001, RW 001 Desa Dilem, Kecamatan kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon mendapatkan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui Baznas Kabupaten 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
176	MARSINAH	Sukogelap RT 003 RW 001, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon Meninggal Dunia dan tidak ada ahli waris dalam satu rumah/kartu keluarga
177	NASRODIN	Krajan Selatan RT 002 RW 001, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon mengajukan rumah yang tidak sesuai dengan proposal
178	WAGIRAN	Krajan Selatan RT 001 RW 001, Sokogelap, Kemiri	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Rumah sudah Layak Huni dengan perbaikan secara Mandiri
179	DASIYAH	Krajan RT 001, RW 003, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon terdaftar dalam DTSEN Desil 6-10 bukan sebagai Prioritas Utama dalam Data DTSEN/ Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi)penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
180	HAMAM MASKUR	Glagah Ombo RT 002, RW 001, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon Tidak mempunyai rumah, yang diusulkan bukan milik sendiri
181	SITI SUNARTI	Gunung Asem RT 002, RW 002, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Rumah Pemohon hanya mengalami rusak ringan (1 komponen kerusakan yaitu Atap)
182	MUCHAMAD KHIRZIN CHASYIN	Glagah Ombo RT 002, RW 001, Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano	Bantuan Sosial Berupa Uang untuk pembelian material Perbaikan RTLH		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pemohon mempunyai rumah/tempat tinggal lebih dari satu atau bukan rumah satu-satunya
JUMLAH BANTUAN SOSIAL UANG PADA SUB KEGIATAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				**355.000.000**	
JUMLAH BANTUAN SOSIAL UANG PADA SKPD DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				**355.000.000**	
JUMLAH BANTUAN SOSIAL UANG				**1.486.329.300**	

Selanjutnya, berikut ini daftar calon penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan sosial barang yang diteriama Kabupaten Purworejo tahun angg

PERTIMBANGAN TAPD TENTANG DAFTAR CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BARANG YANG DITERIMA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
I	**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**				
A	**SUB KEGIATAN 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu**				
1	**5.1.06.01.002.00001 Belanja Bantuan Sosial barang yang Direncanakan kepada Individu**				
1	Afandi Saefudin	Desa Condongsari RT 04 RW 03 Kec.Banyuurip	Alat Bantu	3.187.000,00	Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	Daliyah	Desa Winong Kidul RT 03 RW 01 Kecamatan Gebang	Alat Bantu	3.187.000,00	Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	Subehi	Desa Winong Kidul RT 01 RW 01 Kecamatan Gebang	Alat Bantu	3.187.000,00	Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	Maryati	Desa Winong Kidul RT 01 RW 03 Kecamatan Gebang	Alat Bantu	3.187.000,00	Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
JUMLAH BANTUAN SOSIAL BARANG PADA SUB KEGIATAN 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu				**12.748.000,00**	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
JUMLAH BANTUAN SOSIAL BARANG PADA SKPD DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA				**12.748.000,00**	
II	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
A	**1.03.05.2.01.0051 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat**				
1	**5.1.06.01.002.000 01 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu**				
1	Mukhammad Miftah Surur	Kelurahan Sindurjan RT.001/ RW.001, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Jamban Sehat	10.000.000,00	Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	Sri Budi Mulyono	Kelurahan Sindurjan RT.001/ RW.001, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Jamban Sehat	10.000.000,00	Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
	Perencanaan			1.905.000,00	
	Pengawasan			1.305.000,00	
	Administrasi Pekerjaan			234.000,00	
JUMLAH BANTUAN SOSIAL BARANG PADA 1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat				**23.444.000,00**	
JUMLAH BANTUAN SOSIAL BARANG PADA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**23.444.000,00**	
JUMLAH BANTUAN SOSIAL BARANG				**36.192.000,00**	

Selanjutnya, berikut ini daftar calon penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan sosial barang yang diteriama Kabupaten

PERTIMBANGAN TAPD TENTANG DAFTAR CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH UANG YANG DITERIMA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
I	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**				
A	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar**				
1	**5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	SD 'aisyiyah Unggulan	Jl. Magelang-Purworejo Km. 5 Loano	hibah Uang	64.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	SD Al Madina Purworejo	Islamic Center IPHI No. C 140 Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo	hibah Uang	279.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	SD Islam 1 Baledono	Jl. Brigjen Wiyono No. 12 Baledono Purworejo	hibah Uang	185.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	SD Islam MY Habiebie	Jl. Kemiri - Pituruh Km 1 Desa Kroyolor Kemiri Purworejo	hibah Uang	94.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	SD IT Ash Shidiqqiyah Berjan Gebang	Pondok Pesantren Ash Shiddiqiyyah Berjan Gebang Purworejo	hibah Uang	62.100.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	SD IT Salsabila Purworejo	Jl. Soekarno hatta Borokulon Banyuurip Purworejo	hibah Uang	421.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	SD IT Ulul Albab 2 Purworejo	Jl. Ir. H. Juanda Tegalsari Purworejo	hibah Uang	451.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	SD Kristen Pangen	Jl. Letjen Sarwo Edi Wibowo No. 3 Purworejo	hibah Uang	65.700.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	SD Kristen Penabur Wacana Purworejo	Jl. KHA. Dahlan No. 146 Purworejo	hibah Uang	49.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	SD Maria Purworejo	Jl. Urip Sumoharjo No. 28 Purworejo	hibah Uang	158.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
11	SD Muhammadiyah 1 Purworejo	Jl. Brigjen Wiyono 8 Purworejo	hibah Uang	170.100.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
12	SD Muhammadiyah Bayan	Komplek SMP Muhammadiyah Jono Bayan	hibah Uang	265.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
13	SD Muhammadiyah Kemiri	Jl. Tentara Pelajar Km 4.5, Kemiri Kidul, Kecamatan Kemiri	hibah Uang	264.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
14	SD Muhammadiyah Kutoarjo	Jl. Kliwonan II No. 2 Kutoarjo	hibah Uang	512.100.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
15	SD Muhammadiyah Purwodadi	Jl. Sultan Agung RT 1 RW 2, Kecamatan Purwodadi	hibah Uang	269.100.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
16	SD Nasional Indonesia	Jl. MT Haryono No. 94 Kutoarjo	hibah Uang	48.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
17	SD Pius Bakti Utama	Jl. Marditomo No. 29 Kutoarjo	hibah Uang	99.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
18	SD Prasetiya Bangsa Islamic School	Jl. Pahlawan, Genjorankidul Sucenjurutengah, Bayan, Purworejo	hibah Uang	133.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
19	SD VIP Ma'arif NU 1 Kemiri	Jl. Kemiri-Pituruh Km. 1, Desa Kroyolor, Kecamatan Kemiri	hibah Uang	164.700.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
20	SDIT Darussalam	Jl. Bethoro, Desa Bandungkidul, Kecamatan Bayan	hibah Uang	183.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
21	SDIT Khoiru Ummah Purworejo	Desa Tepus Kulon, Kecamatan Kutoarjo	hibah Uang	79.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
22	SDIT Ulul Albab 01 Purworejo	Perum Argopeni Kutoarjo	hibah Uang	462.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
23	SDTQ Nuurul Waahid Purworejo	Krandegan 01/03, Kecamatan Bayan	hibah Uang	108.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
24	SD Muhammadiyah Bruno	Kamasan, RT 001/RW 001, Kaliwungu, Bruno, Purworejo	hibah Uang	76.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
25	SD TAHFIZHUL QURAN MUTIARA ISLAM	Jl. Diponegoro Desa Depokrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo.	hibah Uang	124.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
26	SD Mutiara Ibu	Jl. Dewi Sartika No. 3A, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo	hibah Uang	119.700.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
27	SD KUB Muhammadiyah Purworejo	Jl Brigjend Katamso 186 Kelurahan Pangenrejo Purworejo, Kec. Purworejo	hibah Uang	126.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
		Jumlah Belanja Hibah BOS SD Swasta		**5.040.000.000**	
		JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		**5.040.000.000**	
B	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik**				
1	**1.05.01.001.000.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat**				
1	Kemenag Kabupaten Purworejo	Jl. KH Agus Salim No. 10	Hibah Uang	87.323.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat				**87.323.400**	
2	**Hibah Uang Kepada SD Swasta**				
1	SD 'aisyiyah Unggulan	Jl. Magelang-Purworejo Km. 5 Loano	Hibah Uang	8.204.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	SD Al Madina Purworejo	Islamic Center IPHI No. C 140 Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo	Hibah Uang	28.783.800	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	SD Islam 1 Baledono	Jl. Brigjen Wiyono No. 12 Baledono Purworejo	Hibah Uang	18.179.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
4	SD Islam MY Habiebie	Jl. Kemiri - Pituruh Km 1 Desa Kroyolor Kemiri Purworejo	Hibah Uang	10.679.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	SD IT Ash Shidiqqiyah Berjan Gebang	Pondok Pesantren Ash Shiddiqiyyah Berjan Gebang Purworejo	Hibah Uang	7.904.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	SD IT Salsabila Purworejo	Jl. Soekarno hatta Borokulon Banyuurip Purworejo	Hibah Uang	58.689.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	SD IT Ulul Albab 2 Purworejo	Jl. Ir. H. Juanda Tegalsari Purworejo	Hibah Uang	64.419.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	SD Kristen Penabur Wacana Purworejo	Jl. KHA. Dahlan No. 146 Purworejo	Hibah Uang	6.929.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	SD Maria Purworejo	Jl. Urip Sumoharjo No. 28 Purworejo	Hibah Uang	17.556.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	SD Muhammadiyah 1 Purworejo	Jl. Brigjen Wiyono 8 Purworejo	Hibah Uang	18.081.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
11	SD Muhammadiyah Bayan	Komplek SMP Muhammadiyah Jono Bayan	Hibah Uang	37.976.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
12	SD Muhammadiyah Kemiri	Jl. Tentara Pelajar Km 4.5, Kemiri Kidul, Kecamatan Kemiri	Hibah Uang	28.611.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
13	SD Muhammadiyah Kutoarjo	Jl. Kliwonan II No. 2 Kutoarjo	Hibah Uang	74.677.800	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
14	SD Muhammadiyah Purwodadi	Jl. Sultan Agung RT 1 RW 2, Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	38.426.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
15	SD Nasional Indonesia	Jl. MT Haryono No. 94 Kutoarjo	Hibah Uang	6.929.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
16	SD Pius Bakti Utama	Jl. Marditomo No. 29 Kutoarjo	Hibah Uang	12.156.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
17	SD Prasetiya Bangsa Islamic School	Jl. Pahlawan, Genjorankidul Sucenjurutengah, Bayan, Purworejo	Hibah Uang	21.394.800	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
18	SD VIP Ma'arif NU 1 Kemiri	Jl. Kemiri-Pituruh Km. 1, Desa Kroyolor, Kecamatan Kemiri	Hibah Uang	21.688.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
19	SDIT Darussalam	Jl. Bethoro, Desa Bandungkidul, Kecamatan Bayan	Hibah Uang	25.917.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
20	SDIT Khoiru Ummah Purworejo	Desa Tepus Kulon, Kecamatan Kutoarjo	Hibah Uang	14.638.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
21	SDIT Ulul Albab 01 Purworejo	Perum Argopeni Kutoarjo	Hibah Uang	62.364.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
22	SDTQ Nuurul Waahid Purworejo	Krandegan 01/03, Kecamatan Bayan	Hibah Uang	14.308.800	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
23	MI Al Huda Bleber	RT 1 RW 1, Desa Bleber, Kecamatan Bener	Hibah Uang	9.681.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
24	MI Al Huda Karanggetas	Desa Karanggetas RT 1 RW 1, Kecamatan Pituruh	Hibah Uang	22.565.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
25	MI Al Huda Kebonsari	Desa Kebonsari, Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	14.856.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
26	MI Al Ikhlas Puspo	Desa Puspo, Kecamatan Bruno	Hibah Uang	15.936.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
27	MI Al Ikhwan Glagahmalang	Glagahmalang RT 2 RW 4, Desa Maron, Kecamatan Loano	Hibah Uang	10.379.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
28	MI Al Iman Bulus	Desa Bulus, Kecamatan Gebang	Hibah Uang	29.713.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
29	MI An-Nur Jogoresan	Desa Jogoresan, Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	27.763.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
30	MI Ash Sholih Penungkulan	Desa Penungkulan RT 2 RW 6, Kecamatan Gebang	Hibah Uang	9.756.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
31	MI At-Taqwa Sendangsari	Desa Sendangsari RT 3 RW 3, Kecamatan Bener	Hibah Uang	11.556.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
32	MI Az Zahra Cangkreplor	Kelurahan Cangkreplor RT 5 RW 2, Kecamatan Purworejo	Hibah Uang	21.981.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
33	MI Guppi At Taqwa	Desa Waled, Kecamatan Kemiri	Hibah Uang	11.804.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
34	MI Guppi AT Taqwa Kaliwader	Jl. Kaliwader KM. 5.5 Ngabean RT. 01 RW. 02 Kaliwader Bener Purworejo	Hibah Uang	6.329.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
35	MI Guppi At Taqwa Ketosari	Puguh, Desa Ketosari, Kecamatan Bener	Hibah Uang	9.404.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
36	MI Hidayatussibyan Kalitapas	Desa Kalitapas, kecamatan Bener	Hibah Uang	4.777.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
37	MI Imam Puro Brenggong	Jl. Kaligesing Km. 5	Hibah Uang	17.383.800	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
38	MI Imam Puro Cangkrep Kidul	Jl. Semawung Km. 5, Kecamatan Purworejo	Hibah Uang	48.010.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
39	MI Imam Puro Cepedak	Desa Cepedak, Kecamatan Bruno	Hibah Uang	20.892.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
40	MI Imam Puro Dadirejo	Jl. Raya Purworejo-Yogyakarta K. 20, Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	9.306.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
41	MI Imam Puro Jogotamu	Jogotamu RT 1 RW 7, Desa Loano, Kecamatan Loano	Hibah Uang	5.279.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
42	MI Imam Puro Lubangindangan	Desa Lubangindangan, Kecamatan Butuh	Hibah Uang	54.010.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
43	MI Imam Puro Pucangagung	Pucangagung RT 1 RW 6, Kecamatan Bayan	Hibah Uang	19.865.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
44	MI Imam Puro Sukowuwuh	Desa Sukowuwuh, Kecamatan Bener	Hibah Uang	9.831.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
45	MI Imam Puro Suren	Desa Suren, Kecamatan Kutoarjo	Hibah Uang	10.154.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
46	MI Imam Puro Sutoragan	Krajan RT 1 RW 1, Desa Sutoragan, Kecamatan Kemiri	Hibah Uang	28.099.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
47	MI Infarul Ghoyyi Kalijambe	Desa Kalijambe RT 3 RW 3, Kecamatan Kalijambe	Hibah Uang	5.204.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
48	MI Islamiyah Kaliangkup	Desa Guntur, Kecamatan Bener	Hibah Uang	3.952.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
49	MI Islamiyah Wareng	Desa Wareng, Kecamatan Butuh	Hibah Uang	22.265.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
50	MI Ma'arif Ngadirejo	Ngadirejo RT 2 RW 2, Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	9.081.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
51	MI Ma'arif NU Brunosari	Desa Brunosari, Kecamatan Bruno	Hibah Uang	39.828.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
52	MI Ma'arif NU Guntur	Kalipancer RT 03 RW 05, Desa Guntur, Kecamatan Bener	Hibah Uang	8.429.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
53	MI Muhammadiyah Krendetan	Desa Krendetan, kecamatan Bagelen	Hibah Uang	18.058.800	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
54	MI Nahdlatul Uqul Cacaban Kidul	Sikeduk RT 4 RW 2, Cacaban Kidul, Kecamatan Bener	Hibah Uang	8.856.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
55	MI NU Blimbing	Desa Blimbing, Kecamatan Bruno	Hibah Uang	12.088.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
56	MI NU Kaliwungu	Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno	Hibah Uang	20.540.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
57	MI NU Pangeran Kajoran	Desa Gowong, Kecamatan Bruno	Hibah Uang	13.588.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
58	MI NU Watuduwur	Ketepeng RT 1 RW 1, Desa Watuduwur, Kecamatan Bruno	Hibah Uang	19.213.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
59	MI P2A Brengkol	Jl. Tumenggong Rekso Projo, Desa Brengkol, Kecamatan Pituruh	Hibah Uang	11.256.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
60	MI Roudlotul Huda Karangrejo	Jl. Puntodewo No. 5, Desa Karangrejo, Kecamatan Kutoarjo	Hibah Uang	7.229.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
61	MI Salafiyah Wareng	Desa Wareng, Kecamatan Butuh	Hibah Uang	36.851.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
62	MI Sudirman Kaliwungu	Jl. Kutoarjo-Wonosobo Km. 32, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno	Hibah Uang	8.406.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
63	MI Tahassus Ma'arif NU Prapagkidul	Desa Prapagkidul RT 1 RW 1, Kecamatan Pituruh	Hibah Uang	79.477.800	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
64	MI TBS AL Fathonah	Jl. Kesatrian No. 25 Pangenrejo, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo	Hibah Uang	7.379.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
65	MI Ungggulan Ash - Shiddiqiyyah Dukuhdungus	Desa Dukuhdungus RT 1 RW 2, Kecamatan Grabag	Hibah Uang	26.142.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				**1.385.707.200**	
JUMLAH BELANJA HIBAH PAD SUB KEGIATAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				**1.473.030.600**	
C	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama**				
1	**5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	SMP A Yani Gebang	Jl. Raya purworejo - Kemiri KM. 05 Desa Seren Kec. Gebang Purworejo	Hibah Uang	30.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	SMP Barata Bener	Jl. Magelang Km 12 Purworejo	Hibah Uang	41.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	SMP Barata Semagung	Jl. Slewah - Semagung Desa Semagung, Kec. Bagelen Purworejo	Hibah Uang	51.700.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	SMP Bhakti Karya Gebang	Jl. Pahlawan Revolusi No. 3 Gebang Purworejo	Hibah Uang	30.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	SMP Bhakti Karya Girimulyo	Desa girimulyo, Kemiri Purworejo	Hibah Uang	14.300.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	SMP Bhakti Mulia Purwodadi	Jl. Panembahan Senopati No. 6 Purwodadi Purworejo	Hibah Uang	70.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	SMP Boarding School Sabilul Muttaqin	Desa Kalimiru, Kecamatan Bayan,Kabupaten Purworejo	Hibah Uang	207.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	SMP Bruderan Purworejo	Jl. Prof. DR. N Driyarkara 3 Purworejo	Hibah Uang	105.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	SMP Darul Hikmah	Jl. S. Parman Kutoarjo	Hibah Uang	61.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	SMP Institut Indonesia Kutoarjo	Jl. Tentara Pelajar No. 15 Kutoarjo	Hibah Uang	8.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
11	SMP Islam Berjan	Jalan Ky Zarkazi Berjan Kec.Gebang Kabupaten Purworejo 54191	Hibah Uang	24.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
12	SMP Islam Sudirman	Jl. Kutoarjo - Wonosobo Km. 30, Bruno, Purworejo	Hibah Uang	169.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
13	SMP IT Asy - Syarof Purworejo	Jl. Sawangan - Purworejo Km 04 Des Jatiwngsan Kemiri Purworejo	Hibah Uang	71.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
14	SMP IT Ulul Albab Purworejo	Desa Krandegan, Bayan, Purworejo	Hibah Uang	189.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
15	SMP Kristen Widhodho Purworejo	Jl. KHA Dahlan No. 146 Purworejo	Hibah Uang	16.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
16	SMP Muhammadiyah Bagelen	Jl. Yogya Km 13 Krendetan, Bagelen, Purworejo	Hibah Uang	41.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
17	SMP Muhammadiyah Jono	Jl. Besole Km 7 Desa Jono, Kec. Bayan, Kab. Purworejo	Hibah Uang	80.300.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
18	SMP Muhammadiyah Kutoarjo	Jl. Kliwonan II No. 10 Kutoarjo	Hibah Uang	80.300.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
19	SMP Muhammadiyah Pituruh	Jl. Srudutan No. 6 Kec.Pituruh Kab.Purworejo	Hibah Uang	9.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
20	SMP Muhammadiyah Purwodadi	Jalan Congot 103 Purwodadi-Purworejo	Hibah Uang	60.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
21	SMP Muhammadiyah Purworejo	Jl. K.H.A Dahlan 10 Purworejo	Hibah Uang	191.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
22	SMP Mutiara Bangsa	Jl. Tentara Pelajar No. 163.a Banyuurip Purworejo 54171	Hibah Uang	53.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
23	SMP NU Kaligesing	Desa Tlogobulu, Kec Kaligesing, Purworejo	Hibah Uang	37.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
24	SMP Nurul Muttaqin Kemiri	Kemiri Lor, Kemiri Purworejo	Hibah Uang	372.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
25	SMP Padmowidjojo Kaligesing	Desa Tawangsari, Kaligesing, Purworejo	Hibah Uang	8.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
26	SMP Panca Marga Bhakti 1 Kutoarjo	Jl. Tentara Pelajar 31 A Kutoarjo	Hibah Uang	7.700.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
27	SMP PGRI Bagelen	Jl. Yogya Km 13 Krendetan, Bagelen, Purworejo	Hibah Uang	8.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
28	SMP PGRI Bruno	Desa Tegalsari Ke. Bruno, Kab. Purworejo	Hibah Uang	152.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
29	SMP PGRI Pituruh	Jl. Srudutan Kec. Pituruh Kab. Purworejo	Hibah Uang	163.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
30	SMP Pius Bhakti Utama Kutoarjo	Jl. Marditomo No. 29 Kutoarjo	Hibah Uang	66.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
31	SMP PMB 1 Pituruh	Jl. Klepu Km 1 Pituruh	Hibah Uang	125.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
32	SMP Setya Budi Loano	Jl. Magelang KM 4 Loano Purworejo	Hibah Uang	8.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
33	SMP Sultan Agung Purworejo	Jl. Gatot Subroto No. 27 Purworejo	Hibah Uang	59.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
34	SMP Takhasus Nuril Anwar	Jl. Magelang Km 07 Desa Maron, Kec. Loano, Kab. Purworejo	Hibah Uang	510.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
35	SMP Terpadu Ash - Shiddiqiyah	Jalan Sampoerna Km. 3 Pekutan Bayan Purworejo	Hibah Uang	17.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
36	SMP Terpadu Ash - Shiddiqiyah-3	Berjan 001/005 Desa Gintungan Kec. Gebang Kb. Purworejo	Hibah Uang	74.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
37	SMP Unggulan Al Istiqomah	Jalan Kyai Jinem Semawung Kembaran RT. 01/ RW. 02 Kutoarjo 54212	Hibah Uang	44.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
38	SMP VIP Asy - Syafiiyah Purworejo	Jl. Bongkot Purwodadi Purworejo	Hibah Uang	158.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
39	SMP VIP Ma'arif NU 1 Kemiri	Jl. Kemiri Pituruh Km 1 Desa Kroyo Lor Kec, Kemiri Purworejo	Hibah Uang	676.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
40	SMP YPI MY HABIEBIE	Jl Kemiri Pituruh Km 1 RT 02 RW 01, Desa Kroyo Lor, Kecamatan Kemiri	Hibah Uang	24.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
41	SMP UNGGULAN AN-NAWAWI PURWOREJO	Dusun Milir, Desa Jetis Kecamatan Loano	Hibah Uang	238.700.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
42	SMP BHAKTI KARYA BENER	Jl. Kaliboto, Bener, Purworejo	Hibah Uang	2.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				**4.371.400.000**	
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				**4.371.400.000**	
D	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik**				
1	**5.1.05.01.001.00001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat**				
1	MTs Negeri 1 Purworejo	Jl. Keseneng, Purworejo	Hibah Uang	140.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	MTs Negeri 2 Purworejo	Jl. Magelang Km. 12	Hibah Uang	126.450.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	MTs Negeri 3 Purworejo	Jl. Magelang Km. 09, Purworejo	Hibah Uang	115.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat				**382.050.000**	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
2	**5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	MTs Al Iman Bulus	Jl. Ngadipurwo Bulus, Gebang	Hibah Uang	119.550.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	MTs Al Iman 02 Bulus	Jl. Bulus-Gintungan, Kecamatan Gebang	Hibah Uang	78.300.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	MTs Al Islam Jono	Desa Jono, Kecamatan Bayan	Hibah Uang	14.100.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	MTs An-Nawawi 04 Donorejo	Donorejo RT 8 RW 2, Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	12.300.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	MTs An-Nawawi Berjan	Jl. KH. Zarkasyi Berjan, Gebang	Hibah Uang	169.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	MTs Imam Puro Butuh	Jl. Stasiun Butuh, Kecamatan Butuh	Hibah Uang	7.350.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	MTs Imam Puro Kutoarjo	Jl. Diponegoro 5 Kutoarjo	Hibah Uang	17.100.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	MTs Ma'arif NU 01 Bruno	Jl. Kutoarjo-Kepil Km. 25, Bruno	Hibah Uang	54.150.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	MTs Ma'arif NU 02 Bruno	Jl. Kutoarjo-Kepil Km. 37, Tegalsari, Kecamatan Bruno	Hibah Uang	34.950.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	MTs Ma'arif NU Bener	Sidomukti, Kecamatan Bener	Hibah Uang	17.700.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
11	MTs Ma'arif NU Kemiri	Jl. Purworejo-Kemiri Km. 08, Desa Winong, Kecamatan Kemiri	Hibah Uang	125.550.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
12	MTs Ma'arif NU Pituruh	Jl. Pituruh-Brengkol Km 3.5, Megulungkidul RT 2 RW 1, Kecamatan Pituruh	Hibah Uang	29.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
13	MTs Ma'arif NU Purworejo	Jl. Raya Bagelen, Km. 2 Legok, Cangkrep Kidul	Hibah Uang	9.750.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
14	MTs Mamba'ul Hikmah	Nambangan, Kecamatan Grabag	Hibah Uang	11.250.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
15	MTs Al Anshory	Jl. Sembaon Km 3 Rt 001 Rw 001 Desa Tulusrejo, Kecamatan Grabag	Hibah Uang	4.350.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
16	SMP A Yani Gebang	Jl. Raya purworejo - Kemiri KM. 05 Desa Seren Kec. Gebang Purworejo		4.650.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
17	SMP Barata Bener	Jl. Magelang Km 12 Purworejo		5.250.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
18	SMP Barata Semagung	Jl. Slewah - Semagung Desa Semagung, Kec. Bagelen Purworejo		7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
19	SMP Bhakti Karya Gebang	Jl. Pahlawan Revolusi No. 3 Gebang Purworejo		4.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
20	SMP Bhakti Karya Girimulyo	Desa girimulyo, Kemiri Purworejo		1.950.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
21	SMP Bhakti Mulia Purwodadi	Jl. Panembahan Senopati No. 6 Purwodadi Purworejo		9.450.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
22	SMP Boarding School Sabilul Muttaqin	Desa Kalimiru, Kecamatan Bayan,Kabupaten Purworejo		28.350.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
23	SMP Darul Hikmah	Jl. S. Parman Kutoarjo		8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
24	SMP Islam Berjan	Jalan Ky Zarkazi Berjan Kec.Gebang Kabupaten Purworejo 54191		3.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
25	SMP Islam Sudirman Bruno	Jl. Kutoarjo - Wonosobo Km. 30, Bruno, Purworejo		23.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
26	SMP IT Asy - Syarof Purworejo	Jl. Sawangan - Purworejo Km 04 Des Jatiwngsan Kemiri Purworejo		9.750.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
27	SMP IT Ulul Albab Purworejo	Desa Krandegan, Bayan, Purworejo		25.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
28	SMP Kristen Widhodho Purworejo	Jl. KHA Dahlan No. 146 Purworejo		3.150.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
29	SMP Muhammadiyah Bagelen	Jl. Yogya Km 13 Krendetan, Bagelen, Purworejo		6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
30	SMP Muhammadiyah Kutoarjo	Jl. Kliwonan II No. 10 Kutoarjo		12.150.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
31	SMP Muhammadiyah Pituruh	Jl. Srudutan No. 6 Kec.Pituruh Kab.Purworejo		1.350.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
32	SMP Muhammadiyah Purwodadi	Jalan Congot 103 Purwodadi-Purworejo		7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
33	SMP Muhammadiyah Purworejo	Jl. K.H.A Dahlan 10 Purworejo		28.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
34	SMP Mutiara Bangsa	Jl. Tentara Pelajar No. 163.a Banyuurip Purworejo 54171		7.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
35	SMP NU Kaligesing	Desa Tlogobulu, Kec Kaligesing, Purworejo		5.250.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
36	SMP Nurul Muttaqin Kemiri	Kemiri Lor, Kemiri Purworejo		50.250.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
37	SMP Panca Marga Bhakti 1 Kutoarjo	Jl. Tentara Pelajar 31 A Kutoarjo		1.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
38	SMP PGRI Pituruh	Jl. Srudutan Kec. Pituruh Kab. Purworejo		21.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
39	SMP Pius Bhakti Utama Kutoarjo	Jl. Marditomo No. 29 Kutoarjo		8.850.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
40	SMP PMB 1 Pituruh	Jl. Klepu Km 1 Pituruh		17.100.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
41	SMP Setya Budi Loano	Jl. Magelang KM 4 Loano Purworejo		1.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
42	SMP Sultan Agung Purworejo	Jl. Gatot Subroto No. 27 Purworejo		8.250.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
43	SMP Takhasus Nuril Anwar	Jl. Magelang Km 07 Desa Maron, Kec. Loano, Kab. Purworejo		67.050.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
44	SMP Terpadu Ash - Shiddiqiyah	Jalan Sampoerna Km. 3 Pekutan Bayan Purworejo		2.250.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
45	SMP Terpadu Ash - Shiddiqiyah-3	Berjan 001/005 Desa Gintungan Kec. Gebang Kb. Purworejo		9.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
46	SMP Unggulan Al Istiqomah	Jalan Kyai Jinem Semawung Kembaran RT. 01/ RW. 02 Kutoarjo 54212		6.300.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
47	SMP VIP Asy - Syafiiyah Purworejo	Jl. Bongkot Purwodadi Purworejo		22.050.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
48	SMP VIP Ma'arif NU 1 Kemiri	Jl. Kemiri Pituruh Km 1 Desa Kroyo Lor Kec, Kemiri Purworejo		91.350.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
49	SMP PGRI Bruno	Desa Tegalsari Ke. Bruno, Kab. Purworejo		21.300.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
Jumlah Hibah Uang Kepada MTS Swasta				**1.238.250.000**	
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				**1.620.300.000**	
E	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD**				
1	**5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	TK PAMEKAR BUDI	DESA PIJI, KECAMATAN BAGELEN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	TK PANCASILA SOKO	DESA SOKO, KECAMATAN BAGELEN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
3	TK KUNCUP HARAPAN	DESA BUGEL, KECAMATAN BAGELEN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	TK SERBAGUNA	DESA KEMANUKAN, KECAMATAN BAGELEN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	TK KRENDETAN	DESA KRENDETAN, KECAMATAN BAGELEN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	TK MARDI PUTRA	DESA KALIREJO, KECAMATAN BAGELEN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	KB SERBAGUNA	DESA : KEMANUKAN KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	KB PELANGI MANIS JAYA	DESA : SOKO KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	KB MELATI	DESA : DURENSARI KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	KB MUTIARA HATI	DESA : SEMONO KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
11	PP PELANGI INDAH	DESA : HARGOROJO KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
12	KB PEMBINA	DESA : BAGELEN KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
13	KB AISYIYAH	DESA : KRENDETAN KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
14	KB MANDARAVA	DESA : HARGOROJO KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
15	PP MUTIARA ABADI	DESA : SOMOREJO KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
16	PP CAHAYA IBU	DESA : SOKOAGUNG KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
17	PP HI PERMATA HATI	DESA : DADIREJO KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
18	PP TRI LESTARI	DESA : SEMAGUNG KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
19	PP PAMEKAR BUDI PIJI	DESA : PIJI KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
20	PP GOTONG ROYONG	DESA : BPANGSARI KECAMATAN : BAGELEN KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
21	TKIT SALSABILA 5 PURWORE.	JL SOEKARNO HATTA BOROKULON KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	30.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
22	TK CENGKAWAKREJO	DESA CENGKAWAKREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
23	TK TUNAS KARYA GOLOK	DESA GOLOK KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
24	TK BOROWETAN	KELURAHAN BOROWETAN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
25	TK AISYIYAH 1 BANYUURIP	DESA WANGUNREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
26	TK NURUL HUDA BAJANGREJ(	DESA BAJANGREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
27	TK KUTILANG	DESA SUMBERSARI KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
28	TK NGUDI BASUKI	DESA PAKISREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
29	TK BOROKULON	KELURAHAN BOROKULON KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
30	TK PERINTIS	KELURAHAN KLEDUNG KARANGDAEM, KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOEJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
31	TK RINDANGKASIH	DESA CANDINGASINAN, KECAMATAN BANYUURIP, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
32	TK BOROWETAN	DESA BOROWETAN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
33	TK NGUDI BASUKI	DESA PAKISREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
34	KB PERMATAHATI	DESA POPONGAN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
35	KB AL IKHWAN	DESA CENGKAWAKREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
36	KB AISYIYAH 1 BANYUURIP	DESA BANYUURIP KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
37	KB NUR ANNISA	DESA TANJUNGANOM KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
38	KB TUNAS KASIH	DESA CANDINGASINAN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
39	KB TUNAS KARYA GOLOK	DESA GOLOK KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
40	KB SALSABILA 5	KELURAHAN BOROKULON KECAMATAN BANYUURIP KAPUPATENPURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
41	KB TRAJUMAS	KELURAHAN KLEDUNG KRADENAN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
42	KB HIDAYATUS SHIBYAN	DESA SEBOROKRAPYAK KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
43	KB NUR HIKMAH	DESA BAJANGREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
44	PP SEKARSARI	DESA CONDONGSARI KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
45	PP TUNAS KUMALA	KELURAHAN KLEDUNGKRANGDALEM KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
46	PP TEGAL KUNING	DESA TEGAL KUNING KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
47	PP KASIH IBU	KELURAHAN KLEDUNG KRADENAN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
48	PP PERTIWI SOKOWATEN	DESA SOKOWATEN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
49	KB HARAPAN BANGSA	DESA CANDISARI KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
50	PP PUTRA BANGSA	DESA TEGALREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
51	PP KUNCUP PERTIWI	DESA KERTOSONO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
52	PP HIDAYATUL AULAD	DESA PAKISREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
53	PP CERDAS CERIA	DESA BOROWETAN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
54	PP TUNAS HARAPAN	DESA SUMBERSARI KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
55	TPA TRAJUMAS	KELURAHAN KLEDUNGKRADENAN KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
56	TK PERTIWI GRANTUNG	DESA GRANTUNG KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
57	TK PKK JONO	DESA JONO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
58	TK PERTIWI JRAKAH	DESA JRAKAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
59	TK IT DARUSSALAM	JL GAJAHMADA NO 4 BANDUNGKIDUL KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
60	KB TUNAS MELATI	KELURAHAN SUCENJURUTENGAH, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	30.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
61	PP TUNAS MATAHARI	DESA POGUNGJURUTENGAH, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
62	PP BINTANG	DESA BOTOREJO, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
63	PP ROUDLOTUS SIBYAN	DESA POGUNGREJO, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
64	KB REMBULAN	DESA DEWI , KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
65	PP INSAN MULIA	DESA GRANTUNG, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
66	PP AL-HIKMAH	DESA DUKUHREJO, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
67	PP CERIA	DESA POGUNGKALANGAN, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
68	PP AN NAJJAH	DESA JRAKAH, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
69	PP HARAPAN IBU	DESA JATINGARANG, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
70	TPA TUNAS MELATI	KELURAHAN SUCENJURUTENGAH, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
71	PP PUTRA PERTIWI	DESA JONO, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
72	KB AISYIYAH JONO	DESA JONO, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
73	KB SINAR HARAPAN	DESA KRANDEGAN, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
74	PP PERMATA BUNDA	DESA TANGKISAN, KEC. BAYAN, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
75	PP GARUDA TUNAS BANGSA	DESA BANDUNGKIDUL KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
76	PP GENERASI BANGSA	DESA BANDUNGREJOI KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
77	PP SEKAR	DESA TANJUNGREJO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
78	KB BINA LOKA	DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
79	PP CIPTA TARUNA	DESA PEKUTAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
80	KB KHASANAH	DESA SAMBENG KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
81	PP PELANGI	DESA BRINGIN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
82	KB PUTRA PERDANA	DESA PUCANGAGUNG KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
83	PP RAHAYU	DESA BESOLE KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
84	TK ABA BENER	JL. MAGELANG KM 14 KEC. BENER KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
85	TK KUNCUP MEKAR KAMIJORO	DESA KAMIJORO KEC. BENER KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
86	TK PERTIWI KARANGSARI	DESA KARANGSARI KEC. BENER KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
87	TK SETIA BUDI SIDOMUKTI	DESA SIDOMUKTI KEC. BENER KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
88	TK LESTARI PERTIWI WADASE	DESA WADAS KEC. BENER KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
89	TK MANDALA PURI BENOWO	DESA BENOWO KEC. BENER KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
90	TK WAHYU LESTARI KALIWADER	DESA KALIWADER KEC. BENER KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
91	TK LESTARI BENER	JL. MAGELANG KM 12 KEC. BENER KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
92	TK PERTIWI KEDUNGPUCANG	DESA KEDUNGPUCANG, BENER, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
93	TK AL HIDAYAH CACABAN LOR	DESA CACABAN LOR, BENER, PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
94	TK RAHAYU KALIURIP	DESA KALIURIP, BENER, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
95	TK TUNAS MELATI SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI, BENER, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
96	TK CAHAYA PEKACANGAN	DESA PEKACANGAN, BENER, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
97	KB AL HIKMAH	DESA : KALIURIP KECAMATAN : BENER KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	36.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
98	KB GIRI PUSPITA	DESA : KALIJAMBE KECAMATAN : BENER KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
99	KB MEKAR ABADI	DESA : MAYUNGSARI KECAMATAN :BENER KABUPATEN : PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
100	KB TUNAS MASYITOH	DESA: KALIBOTO KECAMATAN : BENER KABUPATEN : PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
101	KB DARUL ULUM	DESA : MEDONO KECAMATAN : BENER KABUPATEN : PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
102	KB MADANI	DESA : KALIBOTO KECAMATAN : BENER KABUPATEN : PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
103	KB AL HIDAYAH	DESA : LEGETAN KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
104	PP TUNAS BANGSA	DESA : KARANGSARI KECAMATAN : BENER KABUPATEN : PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
105	KB AL HUDA	DESA : BLEBER KECAMATAN: BENER: KABUPATEN :PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
106	PP CAHAYA NUSA	DESA: KEDUNGPUCANG KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
107	KB MURTIARA HATI	DESA: KALITAPAT KECAMATAN BENER KABUPATEN : PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
108	KB MUTIARA HIKMAH	DESA: BENOWO KECAMATAN: BENER KABUPATEN: PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
109	KB BINA INSANI	DESA: KEDUNG LOTENG KECAMATAN; BENER KABUPATEN : PURRWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
110	KB TUNAS MUDA	DESA : CACAN KIDUL KECAMATAN; BENER KABUPATEN : PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
111	PP BUDI LUHUR	DESA: KAMIJORO KECAMATAN : BENER KABUPATEN : PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
112	TK ABA KALIWUNGU	DESA KALIWUNGU, KECAMATAN BRUNO, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
113	TK EKA BHAKTI	DESA KALIWUNGU, KECAMATAN BRUNO, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
114	TK BROJOWISNU	DESA BRUNOREJO, KECAMATAN BRUNO, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
115	TK ISLAM TERPADU BUSTANUL FALAH	DESA GOWONG, KECAMATAN BRUNO, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
116	TK ARGOSARI	DESA TEGALSARI, KECAMATAN BRUNO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
117	TK AL HIDAYAH PAKISARUM	DESA PAKISARUM,KECAMATAN BRUNO,KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
118	TK MUTIARA WATUDUWUR	DESA WATUDUWUR, KECAMATAN BRUNO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
119	KB HARAPAN BANGSA	SAMBENG RT 03 RW 01 GOWONG BRUNO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
120	KB MRANGGI SIWI	SAWAHLOR RT 01/03KEMRANGGEN BRUNO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
121	KB KARTIKA SOMOLETER	KRAJAN RT 01/02 SOMOLETER BRUNO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
122	KB CONDONGSARI	KARANGSARI RT 03/03 GUNUNG CONDONG	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
123	PP TUNAS HARAPAN	KRAJAN RT 02/02 BLIMBING BRUNO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
124	PP PERMATA	KALIGEDE RT 01/02 GIYOMBONG BRUNO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
125	PP DWIKARTI	BRUNOREJO RT 02/05 BRUNO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
126	KB MENTARI	KAMBANGAN RT 01/02 BRUNO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
127	KB AN NAJAH	RT 02/04 PLAOSAN BLIMBING BRUNO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
128	KB LESTARI	KRAJAN RT01/01 DESA PLIPIRAN, KEC. BRUNO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
129	PP BROJOWISNU	DESA BRUNOREJO RT02/RW09, KEC. BRUNO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
130	PP BUKIT CERIA	DESA WATUDUWUR, KEC. BRUNO, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
131	KB AN NI'MAH	DESA PUSPO, KEC. BRUNO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
132	PP BINA HARAPAN BANGSA	DESA PUSPO, KEC. BRUNO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
133	KB ANANDA	DESA CEPEDAK, KEC. BRUNO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
134	KB PAUD MUTIARA PLIPIRAN	MUNGGANGSARI RT03/RW04, DESA PLIPIRAN, KEC. BRUNO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
135	TK KUNCUP MEKAR	DESA DLANGU KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
136	TK MEKAR	DESA SRUWOHREJO KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
137	KB KASIH IBU	DESA KEDUNGAGUNG KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
138	KB MAWAR	DESA TANJUNGANOM KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
139	KB CAHAYA BUNDA	DESA KALIWAKTUBUMI KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
140	KB AL BAROKAH	DESA WARENG KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
141	KB KUNCUP MEKAR	DESA DLANGU KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
142	PP TUNAS JAYA	DESA KEDUNGMULYO KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
143	PP TUNAS BANGSA	DESA LUBANGKIDUL KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
144	PP HIDAYATUL MUBTADIIN	DESA POLOMARTO KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
145	PP KAROMAH	DESA WONOREJOWETAN KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
146	PP AL MUROFIQ	DESA ROWODADI KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
147	PP HARAPAN BUNDA	DESA LUGUREJO KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
148	PP AL FURQON	DESA BINANGUN KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
149	PP ROUDHOTUL WARDAH	DESA KETUG KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
150	PP KINANTI	DESA KARANGANOM KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
151	KB SEKAR ARUM	DESA MANGUNJAYAN KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
152	KB SADEWA	DESA WONODADI KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
153	PP HI MEKAR	DESA KUNIR KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
154	PP KINASIH	DESA KUNIREJOKULON, KECAMATAN BUTUH, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
155	TK LKMD WINONGLOR	DESA WINONGLOR, KECAMATAN GEBANG, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
156	TK MASYITHOH LUGOSOBO	KEL. LUGOSOBO, KECAMATAN GEBANG, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
157	TK TRI BHAKTI NGEMPLAK	DESA NGEMPLAK, KECAMATAN GEBANG, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
158	TKIT ASH SHIDDIQIYYAH	DESA GINTUNGAN, KECAMATAN GEBANG, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
159	TK TUNAS MUDA	DESA WINONG KIDUL, KECAMATAN GEBANG, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
160	TK BUNAYA	DESA BULUS, KECAMATAN GEBANG, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
161	TK DHARMA BAKTI	KEL. LUGOSOBO, KECAMATAN GEBANG, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
162	TK MEKAR GEBANG	DESA GEBANG, KECAMATAN GEBANG, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
163	TK TUNGGUK RAHAYU	DESA PENUNGKULAN, KECAMATAN GEBANG, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
164	TK DHARMA SIWI	DESA PAKEM, KECAMATAN GEBANG, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
165	KB MAJU MAKMUR	DESA KEMIRI.KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
166	KB HANDAYANI	DESA SIDOLEREN,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
167	KB YOGA UTAMA	DESA WONOTOPO,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
168	KB TELAGASARI	DESA TLOGOSONO,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
169	KB AMONG PUTRO	DESA GEBANG,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
170	KB AISYIYAH GEBANG	DESA RENDENG,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
171	KB TIARA	DESAKRAGILAN,KECANATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
172	KB TUNAS PINTAR	DESA NGAGLIK,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
173	PP KARYA BHAKTI	DESA KALITENGKEK,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
174	PP TUNAS JAYA	DESA REDIN,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
175	PP LOKASARI	DESA BENDOSARI,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
176	SPS AL IMAN	DESA KROYO,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
177	PP AS SHIIBA	DESA WINONGLORL,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
178	PP CERIA	DESA WINONGKIDUL,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
179	PP HARAPAN BANGSA	DESA PAKEM,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
180	PP PERMATA HATI	DESA SALAM,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
181	PP MASITA	DESA GINTUNGAN,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
182	PP MELATI	DESA LUGOSOBO,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
183	PP KENARI	DESA SEREN,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
184	KB BENSARI	DESA PRUMBEN,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
185	PP BINAYOGA	DESA PELUTAN,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
186	PP PERMATA	DESA PENUNGKULAN,KECAMATAN GEBANG,KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
187	TK ABA AL AMIN	DESA PASARANOM KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
188	TK BERINGIN	DESA KEDUNGKAMAL KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
189	TK PAMARDISIWI 1	DESA KETAWANG KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
190	TK TERATAI PUTIH	DESA AGLIK KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
191	TK ABA AL AMIN	DESA PASARANOM KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
192	TK MELATI PUTIH	DESA TEGALREJO KECAMATAN GRABGA KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
193	KB PUTRA AGUNG	DESA SUMBERAGUNG, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	30.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
194	KB KUNCUP MELATI	DESA PATUTREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
195	KB ROUDLOTUL HIDAYAH	DESA TLEPOKWETAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
196	KB NURUL HIDAYAH	DESA SANGUBANYU, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
197	KB PELITA HATI	DESA MUNGGANGSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	30.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
198	KB HARAPAN BUNDA	DESA KETAWANGREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
199	KB MENUR HARAPAN BANGSA	DESA ROWOREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
200	KB BHAKTI PERTIWI	DESA REJOSARI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
201	KB AL MUSLIMUN	DESA AGLIK, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
202	KB SETULUS HATI	DESA TULUSREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
203	KB DHARMA BAKTI INDONESIA	DESA KESE, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
204	KB BINA INSAN	DESA KERTOJAYAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
205	KB RA KARTINI	DESA HARJOBINANGUN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
206	KB SURYA BAKU	DESA BAKUREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
207	KB BINTANG KEJORA	DESA DUDUWETAN, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
208	KB AL IKHLAS	DESA DUDUKULON, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
209	KB MUTIARA GADING	DESA PASARANOM, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
210	KB BHAKTI SIWI	DESA BANYUYOSO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
211	KB KASIH MULIA	DESA TRIMULYO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
212	PP KEMBANGSIH	DESA ROWODADI, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
213	KB MUTIARA SELATAN	DESA TEGALREJO, KECAMATAN GRABAG, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
214	KB PERTIWI	DESA KALIHARJO, KEC. KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
215	KB LESTARI	DESA PANDANREJO, KEC. KALIGESING, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
216	KB PUSPA BANGSA	DESA TLOGOGUWO, KEC. KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
217	KB TUNAS BANGSA	DESA TLOGOBULU, KEC. KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
218	KB KASIH	DESA PURBOWONO, KEC. KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
219	KB LESTARI	DESA SUDOROGO, KEC. KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
220	PP SAKINAH	DESA KALIGONO, KEC. KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
221	POS PAUD MELATI I	DESA HARDIMULYO, KEC. KALIGESING, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
222	POS PAUD MELATI 2	DESA HARDIMULYO, KEC. KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
223	PP PERMATA HATI	DESA JATIREJO, KECAMATAN KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
224	KB ANANDA	DESA KALIGONO, KECAMATAN KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
225	PP CITRA	DESA NGARAN, KECAMATAN KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
226	KB PERMATA BUNDA	DESA SOMONGARI, KECAMATAN KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
227	KB PELITA	DESA TLOGOREJO, KECAMATAN KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
228	KB KARTINI	DESA PUCUNGROTO, KECAMATAN KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
229	KB HARAPAN BUNDA	DESA SOMOWONO, KECAMATAN KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
230	KB CERDAS CERIA 2	DESA TLOGOGUWO, KECAMATAN KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
231	KB NURUL FAJRI	DESA NGADIREJO, KECAMATAN KALIGESING, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
232	TK MARDISIWI	DESA REJOSARI, KEMIRI, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
233	TK SARROJA	DESA KEMIRI KIDUL, KEMIRI, PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
234	TK MASYITOH	DESA KEDUNGPOMAHAN WETAN, KEMIRI, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
235	TK TUNAS BANGSA	DESA KEDUNGLO, KEMIRI, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
236	TK TRI SIWI	DESA LONING, KEMIRI, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
237	TK AL AMIN WINONG	DESA WINONG, KEMIRI, PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
238	TK BHAKTI SIWI	DESA KALIMENENG, KEMIRI, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
239	KB AISYIYAH	DESA KEMIRI KIDUL KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
240	KB AL FIRDAUS	DESA SUTORAGAN KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
241	KB AL MUTTAQIN	DESA REBUG KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
242	KB DARUL ULUM	DESA BEDONO PAGERON KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
243	KB AL BAROKAH	DESA KEDUNGLO KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
244	KB MELATI	DESA BEDONO KARANGDUWUR KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
245	KB SARROJA	DESA KEMIRI KIDUL KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
246	KB ROUDHOTUL HUDA	DESA WALED KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
247	KB TERATAI	DESA GESIKAN KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
248	KB AL IKHSAN	DESA WANUROJO KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
249	KB ISLAM ALIFAH	DESA KEMIRI LOR KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
250	PP MAHARDIKA	DESA KARANGLUAS KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
251	PP AL IMAN	DESA GIRIJOYO KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
252	PP BAKTI PERTIWI	DESA KALIGLAGAH KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
253	PP BINTANG HARAPAN	DESA WONOSUKO KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
254	PP AN-NUR	DESA TURUS KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
255	PP CAHAYA BUNDA	DESA GUNUNG TEGES KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
256	TPA NUSA	DESA REJOSARI KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	30.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
257	KB HARAPAN IBU	DESA JATIWANGSAN KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
258	PP KARTINI	DESA PAITAN KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
259	KB DESI GROUP	DESA KEMIRI LOR KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
260	KB AL IMAN	DESA REJOWINANGUN KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
261	KB BHAKTI SIWI	DESA KALIMENENG KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
262	KB AR ROHMAH	DESA SIDODADI KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
263	KB AL IKHLAS	DESA KEDUNGPOMAHAN KULON KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
264	KB ANGGREK	DESA SUKOGELAP KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
265	KB BINA PUTRA	DESA ROWOBAYEM KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
266	PP MAWAR	DESA KALIURIP KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
267	PP NURUL ILMI	DESA KEMIRI KIDUL KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
268	PP MARDISIWI	DESA REJOSARI KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
269	PP AL AMIN	DESA WINONG KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
270	PP LESTARI	DESA GEDONG KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
271	TPA AISYIYAH	DESA KEMIRI KIDUL KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
272	TPA SARROJA	DESA KEMIRI KIDUL KEC. KEMIRI KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
273	TK PAMARDIRINI	DESA KEPUH, KUTOARJO, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
274	TK DIAN LESTARI	KELURAHAN SEMAWUNG KEMBARAN, KUTOARJO, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
275	TK INDRIYA SANNA II	KELURAHAN KATERBAN, KUTOARJO, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
276	TKIT ULUL ALBAB 3	DESA TUNTUNGPAIT, KUTOARJO, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
277	TKIT ULUL ALBAB 5	PERUM ARGOPENI, KUTOARJO, PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
278	TK PALUPI	PRINGGOWIJAYAN ,KUTOARJO, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
279	TK KHOIRU UMMAH	TEPUS KULON ,KUTOARJO, PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
280	KB AISYIYAH	KELURAHAN KUTOARJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
281	KB SETIA BUDI	DESA TEPUS WETAN KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
282	KB KREATIF CAHAYA	KELURAHAN BANDUNG KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
283	KB MIFTAHUL ILMI	DESA KARANGWULUH KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
284	KB INAYAH	DESA KARANGREJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
285	KB AL ARIF	KELURAHAN KUTOARJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
286	PP TRI LESTARI	KELURAHAN KATERBAN KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
287	PP CAHAYA	DESA PACOR KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
288	PP KENCANA LOKA	DESA WIRUN KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
289	PP NURUL ATHFAL	DESA SOKOHARJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
290	PP LESTARI	DESA TEPUS KULON KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
291	PP SURYA HARAPAN	DESA KUWUREJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
292	PP KASIH BUNDA	DESA KEPUH KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
293	PP MEKAR SARI	DESA KEMADULOR KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
294	PP SEKAR ARUM	DESA SIDARUM KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
295	KB CAHAYA HATI	DESA MAJIR KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
296	PP MUTIARA HATI	DESA PURWOSARI KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
297	PP PERMATA BUNDA	DESA KALIGESING KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
298	TK MARDISIWI LOANO	JL. MASJID JAMI' AL IMAN, DESA LOANO, KECAMATAN LOANO, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
299	TK SIWI UTOMO MARON	DESA MARON, KECAMATAN LOANO, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
300	TK SIWI PENI JETIS	DESA JETIS, KECAMATAN LOANO, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
301	TK MASYITHOH GUYANGAN	DESA GUYANGAN, KECAMATAN LOANO, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
302	TK AL MAUNAH TRIDADI	DESA TRIDADI, KECAMATAN LOANO, PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
303	TK TRI PENI KEBON GUNUNG	DESA KEBON GUNUNG, KECAMATAN LOANO, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
304	TK AL BAROKAH KALIKALONG	DESA KALIKALONG, KECAMATAN LOANO, PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
305	KB. HIDAYATUL MUBTADI	DESA TRIREJO, KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
306	KB. TUNAS BANGSA	DESA SEDAYU,KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
307	KB. HARAPAN BUNDA	DESA TEPANSARI, KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
308	PP AL IMAN	DESA LOANO, KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
309	PP MEKAR ABADI	DESA KEBONGUNUNG, KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
310	PP TUNAS BANGSA	DESA MARON, KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
311	PP MELATI	DESA KARANGREJO, KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
312	PP MUTIARA INSANI	DESA KALIGLAGAH,KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
313	PP BERLIAN	DESA KEDUNGPOH,KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
314	PP TUNAS CENDEKIA	DESA NGARGOSARI KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
315	KB BHAKTI PERTIWI	DESA KALISEMO, KEC. LOANO, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
316	KB BINA LESTARI	DESA KALISEMO, KEC. LOANO, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
317	KB BINA SIWI	DESA KALINONGKO, KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
318	KB PERMATA HATI	DESA JETIS, KEC.LOANO, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
319	KB HARAPAN IBU	DESA GUYANGAN, KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
320	KB TELADAN	DESA KEMEJING, KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
321	KB TUNAS JAYA	DESA BANYUASIN SEPARE, KEC. LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
322	KB PAMARDI PUTRA	DESA MUDALREJO, KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
323	KB HANDAYANI	DESA BANYUASIN KEMBARAN, KEC.LOANO, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
324	TK LESTARI	DESA SEBOROPASAR KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
325	TK ABA	DESA TANJUNG KECAMATAN NGOMBOL KAPUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
326	TK SRINI WONOBOYO	DESA WONOBOYO KECAMATAN NGOMBOL KAPUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
327	TK GAYATRI	DESA SUMBER REJO KEC. NGOMBOL KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
328	TK PERTIWI JERUKEN	DESA JERUKEN KECAMATAN NGOMBOL KAPUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
329	TK PERMATA HATI	DESA AWU-AWU KECAMATAN NGOMBOL KAPUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
330	TK WAHYU SIWI	DESA PEJAGRAN KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
331	KB PENYEJUK HATI	DESA WUNUT KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
332	KB MUTIARA ISLAM	DESA DEPOKREJO KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
333	KB AISYIYAH TANJUNG	DESA TANJUNG KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
334	PP AMALIA	DESA JOSO KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
335	PP ANAK CERDAS	DESA MENDIRO KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
336	PP HARAPAN BUNDA	DESA WINGKOSANGGRAHAN KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
337	PP MELATI	DESA TUMENGGUNGAN KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
338	PP LESTARI	DESA WONOSARI KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
339	PP SUMBER WARAS	DESA KEMBANGKUNING KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
340	KB PERMATA HATI	DESA AWU-AWU, KEC. NGOMBOL, KAB.PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
341	PP MELATI	DESA TUMENGGUNGAN KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
342	PP HARAPAN BUNDA	DESA WINGKOSANGGRAHAN KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
343	PP INSAN CERDAS	DESA WINGKOHARJO KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
344	PP PELITA HARAPAN	DESA SINGKILKULON KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
345	PP PANGUDI LUHUR	DESA SRUWOH KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
346	PP SUMBER WARAS	DESA KEMBANGKUNING KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
347	PP HARAPAN BANGSA	DESA CANDI KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
348	PP PELITA BANGSA	DESA BRIYAN KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
349	PP LESTARI	DESA WONOSARI KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
350	PP WAHYU PRASIWI	DESA PEJAGRAN KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
351	KB PENYEJUK HATI	DESA WUNUT KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
352	KB AL HUDA	DESA TUNJUNGAN KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
353	KB LESTARI	DESA KESIDAN KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
354	KB RAHAYU	DESA KUMPULSARI KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
355	KB MUTIARA ISLAM	DESA DEPOKREJO KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
356	KB PERMATA HATI	DESA AWU-AWU KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
357	KB BUNGA HARAPAN	DESA NGENTAK KEC. NGOMBOL, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
358	KB 'AISYIYAH	DESA PITURUH KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
359	KB TUNAS RIMBA	DESA PAMRIYAN KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
360	KB DEWI SARTIKA	DESA SEKARTEJO KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
361	KB DEWI SARTIKA	DESA KALIGINTUNG KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	30.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
362	KB SINAR INDAH	DESA WONOYOSO KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
363	KB KARTINI	DESA WONOSIDO KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
364	KB PERMATA HATI	DESA KESAWEN KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
365	KB BHAKTI PERTIWI	DESA KALIGONDANG KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
366	KB BUKIT RIMBA	DESA SOMOGEDE KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
367	KB QURRATA'AYUN	DESA WARU KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
368	POS PAUD ASSAKINAH	DESA BRENGKOL KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
369	POS PAUD KELANA SARI	DESA DLISEN WETAN KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
370	POS PAUD ANANDA BANGKIT	DESA TERSIDILOR KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
371	POS PAUD MARDISIWI	DESA PITURUH KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
372	POS PAUD SEKAR ARUM	DESA SUMBER KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
373	POS PAUD KUSUMA	DESA LUWENGLOR KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
374	POS PAUD TUNAS PERTIWI	DESA MEGULUNGKIDUL KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
375	POS PAUD KENANGA	DESA KEDUNGBATUR KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
376	POS PAUD PERMATA HATI	DESA KALIKOTES KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
377	TPA 'AISYIYAH	DESA PITURUH KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
378	POS PAUD PUTRA KARTINI	DESA GIRIGONDO KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
379	KB TUNAS BANGSA	DESA KALIJERING KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
380	KB TUNAS BANGSA	DESA PRAPAGLOR KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
381	KB MUTIARA HATI	DESA TAPEN KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
382	KB TUNAS BANGSA PETUGURAN	DESA PETUGURAN KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
383	KB LESTARI	DESA SAMBENG KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
384	KB HARAPAN BANGSA	DESA TERSIDI KIDUL KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
385	KB PELITA HATI	DESA SEMAMPIR KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
386	POS PAUD KEMUNING	DESA KEMBANGKUNING KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
387	POS PAUD KARTINI	DESA KARANGANYAR KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
388	POS PAUD HARAPAN BANGSA	DESA LUWENGKIDUL KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
389	KB TUNAS HARAPAN	DESA LUWENGLOR KECAMATAN PITURUH KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
390	TK ABA	DESA/ KELURAHAN PUWWODADI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
391	TK SERUNI IX	DESA/ KELURAHAN NAMPUREJO, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
392	TK BINAMASQU	DESA/ KELURAHAN SENDANGSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
393	TK TERATAI	DESA/ KELURAHAN BLENDUNG, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
394	TK WIYATA YOGA	DESA/ KELURAHAN PURWOSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
395	TK PANGUDI LUHUR	DESA/ KELURAHAN JENARWETAN, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
396	TK TUNAS HARAPAN	DESA/ KELURAHAN SUMBERSARI, KECAMATAN PURWODADI, KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
397	KELOMPOK BERMAIN AISYIYAH	DESA PURWODADI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
398	KELOMPOK BERMAIN KUSUMA BANGSA	DESA SIDOHARJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
399	KELOMPOK BERMAIN KUNCUP MEKAR	DESA JENARLOR KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
400	POS PAUD ASUH ASIH	DESA JOGOBOYO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
401	POS PAUD DIAN IBU	DESA SENDANGSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
402	POS PAUD GOTONG ROYONG	DESA KENTENGREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
403	POS PAUD HARAPAN BUNDA	DESA PUNDENSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
404	POS PAUD KARTINI	DESA KEPONGGOK KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
405	KELOMPOK BERMAIN KUNCUP MELATI	DESA BUBUTAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
406	KELOMPOK BERMAIN AZ-ZAHRA	DESA JOGORESAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
407	KELOMPOK BERMAIN HARAPAN BUNDA	DESA KETANGI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
408	POS PAUD MULIA	DESA JATIKONTAL KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
409	POS PAUD TUNAS JAYA	DESA BLENDUNG KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
410	POS PAUD ASSALAMAH	DESA KARANGSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
411	KELOMPOK BERMAIN SEKAR SIWI	DESA KEDUREN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
412	KELOMPOK BERMAIN MUTIARA DESA	DESA BRAGOLAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
413	KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA	DESA BANJARSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
414	KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA	DESA WATUKURO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
415	POS PAUD PUSPA MEKAR	DESA BRONDONGREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
416	POS PAUD BUDI MULIA	DESA JENAR KIDUL KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
417	POS PAUD PERMATA HATI	DESA PLANDI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
418	PAUD TPQ AL MUSTAQIM	DESA TLOGOREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
419	PAUD TPQ AL MUSTAQIM KARANGMULYO	DESA KARANGMULYO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
420	TK ASSA'ADAH	JL. KRAJAN NO. 10 RT 01 RW 08 BALEDONO, KEC. PURWOREJO, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
421	TK MASYITHOH 1	BRENGKELAN RT 01 RW V1, KEC. PURWOREJO KAB PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
422	TK WIYATA KARYA	KRAJAN 1 RT 01 RW 01 KEDUNGSARI, KEC. PURWOREJO KAB PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
423	TK KARTIKA IX-28	JL.LETJEND SOEPRAPTO NO.80A PURWOREJO , KEC. PURWOREJO, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
424	TK ABA 2 PURWOREJO	JL. BRIGJEND KATAMSO 170 A KELURAHAN PANGENREJI, KEC. PURWOREJO, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
425	TK HANDAYANI	KELURAHAN CANGKREP KIDUL KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
426	TK TUNAS RIMBA PURWOREJO	JL. DR SETIABUDI NO. 60 PURWOREJO, KEC. PURWOREJO, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
427	TK MUTIARA IBU	JL DEWI SARTIKA NO 3A SINDURJAN, KEC. PURWOREJO KA. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
428	TK ABA 3 PURWOREJO	JLN. NYAI WANGEN RRT 01 RW 01 MUDAL, KEC. PURWOREJO, KAB. PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
429	TK TUNAS HARAPAN PANGEN	JL BRIGJEND KATAMSO KM 2 RT 02 RW 04 PANGENREJO, KEC. PURWOREJO, KAB PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
430	KB 'AISYIYAH PANGEN	KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
431	KB 'AISYIYAH PURWOREJO	KELURAHAN SINDURJAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
432	KB ALFA KID'S	KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
433	KB 'AISYIYAH BALEDONO	KELURAHAN BALEDONO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
434	KB SERUNI	KELURAHAN PENGEN JURUTENGAH KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
435	KB MUMPUNI	KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
436	KB ANAK HEBAT EL FIRDAUS	DESA SEMAWUNG KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
437	KB KEMALA BHAYANGKARI	KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
438	KB MUNAWAROH	KELURAHAN PANGEN JURUTENGAH KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
439	KB FUN ISLAMIC SCHOOL	KELURAHAN PURWOREJO KECAMATAN PURWOREJO KBUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	30.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
440	TPA ALFA KIDS	KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
441	TPA AZ ZAHRA	KELURAHAN CANGKREP LOR KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
442	TPA AISYIYAH PANGEN	KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
443	PP TPQ ALHIDAYAH	KELURAHAN CANGKREP LOR KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
444	POS PAUD KEPODANG	KELURAHAN CANGKREP LOR KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
445	POS PAUD AMRIH LESTARI	KELURAHAN CANGKREP KIDUL KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
446	POS PAUD BINA BUAH HATI	DESA SIDOREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
447	PP PERMATA BUNDA	DESA SIDOMULYO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
448	KB TUNAS MULIA	KELURAHAN PADUROSO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
449	TPA PRASETIYA BANGSA ISLAMIC SCHOOL	KELURAHAN SINDURJAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
450	PP DUNIA KECIL	KELURAHAN BALEDONO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	30.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
451	PP ANANDA	KELURAHAN SINDURJAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
452	PP KARTINI	DESA SUDIMORO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
453	PAUD AL- BADAWI	KELURAHAN BALEDONO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
454	PP MITRA BUNDA	DESA WONOTULUS , KECAMATAN PURWOREJO, KABUPATEN PURWIREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
455	PP PURNAMASARI	DESA SEMAWUNG KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
456	PP MELATI	KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
457	PP DEWI SARTIKA	KELURAHAN PURWOREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
458	PP SHAFIRA	DESA GANGGENG KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
459	PP SETYO UTAMI	KELURAHAN TAMBAKREJO KECAMTAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
460	PP TUNAS HARAPAN	DESA BRENGGONG KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
461	PP TUNAS BANGSA	DESA PACEKELAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	HIBAH UANG	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				**4.950.000.000**	
JUMLAH BELANJA PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				**4.950.000.000**	
F	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD**				
1	**5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	TK TRISAKTI	Desa Roworejo Kecamatan Grabag	Hibah Uang	2.204.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	TK TERATAI PUTIH	Desa Aglik Kecamatan Grabag	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	TK HARAPAN	Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	TK DHARMA BAKTI	Desa Kese Kecamatan Grabag	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	TK PAMARDISIWI 2	Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	TK BAKTI MULIA	Desa Tlepokkulon Kecamatan Grabag	Hibah Uang	988.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	TK PAMARDISIWI 1	Desa Ketawangrejo Kecamatan Grabag	Hibah Uang	4.484.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	TK TUNAS MELATI	Desa Tulusrejo Kecamatan Grabag	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	TK MAWAR PUTIH	Desa Tegalrejo Kecamatan Grabag	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	TK BERINGIN	Desa Kedungkamal Kecamatan Grabag	Hibah Uang	1.976.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
11	TK MARDISUNU	Desa Grabag Kecamatan Grabag	Hibah Uang	1.368.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
12	TK TUNAS HARAPAN	Desa Tunggulrejo Kecamatan Grabag	Hibah Uang	532.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
13	TK BUDI ASIH	Desa Kalirejo Kecamatan Grabag	Hibah Uang	988.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
14	TK PELITA	Desa Sangubanyu Kecamatan Grabag	Hibah Uang	2.432.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
15	TK TUNAS	Desa Bendungan Kecamatan Grabag	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
16	TK PERINTIS	Desa Kumpulrejo Kecamatan Grabag	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
17	TK NUSA INDAH	Desa Patutrejo Kecamatan Grabag	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
18	RA AL HIDAYAH TLEPOKWETAN	Desa Tlepokwetan Kecamatan Grabag	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
19	TK ABA AL AMIN	Desa Pasaranom Kecamatan Grabag	Hibah Uang	6.916.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
20	TK WOLOJURUTENGAH	Desa Nambangan Kecamatan Grabag	Hibah Uang	2.812.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
21	TK MEKAR SARI	Desa Ukirsari Kecamatan Grabag	Hibah Uang	4.180.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
22	TK KARTINI	Desa Wunut Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.064.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
23	TK LESTARI	Desa Seboropasar Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
24	TK SRINI WONOBOOYO	Desa Wonoboyo Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
25	TK PERTIWI BUKUR	Desa Wasiat Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	2.128.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
26	TK SRINI	Desa Ngombol Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	3.040.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
27	TK PERTIWI KEDONDONG	Desa Kedondong Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	836.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
28	TK INDRIA KUSUMA	Desa Pagak Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	2.280.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
29	TK PANTI SIWI	Desa Wingko Sigromulyo Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	684.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
30	TK PERTIWI JERUKEN	Desa Jeruken Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
31	TK ASRI	Desa Pulutan Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
32	TK PUSPORINI	Desa Tunjungan Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
33	TK SRINI SINGKIL	Desa Singkilwetan Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	608.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
34	TK ABA TANJUNG	Desa Tanjung Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	2.888.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
35	TK RAHAYU	Desa Wonosri Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	836.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
36	TK SETYOWURI	Desa Wonosari Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
37	TK SIWI MURNI	Desa Wonoroto Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
38	TK WAHYU SIWI	Desa Pejagran Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.976.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
39	TK WIYATA SIWI	Desa Ringgit Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
40	TK MARDISIWI	Desa Wingkoharjo Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
41	TK KUNCUP MEKAR	Desa Cokroyasan Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
42	TK PERMATA HATI	Desa Awu-awu Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	12.540.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
43	TK PERMATA HATI 2	Desa Girirejo Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	2.052.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
44	TK AL AZHAR	Desa Secang Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
45	TK SUBUR	Desa Jombang Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
46	TK TAMAN PUTRA	Desa Wingkotinumpuk Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
47	TK SUSUK	Desa Susuk Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
48	TK GAYATRI	Desa Sumberejo Kecamatan Ngombol	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
49	TK TUNAS MEKAR	Desa Tlogorejo Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
50	RA AL HUDA KEBOSARI	Desa Kebonsari Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	3.268.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
51	TK TUNAS KARYA KETANGI	Desa Ketangi Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	2.052.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
52	TK PERTIWI	Desa Keduren Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
53	TK PENDOWO	Desa Bragolan Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
54	TK MEKARSARI	Desa Jenarwetan Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	3.268.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
55	TK WIYATA YOGA	Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
56	TK KUNCUP TERATAI BUBUTAN	Desa Bubutan Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.748.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
57	TK TUNAS HARAPAN	Desa Sumbersari Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
58	TK PUSPASIWI GUYANGAN	Desa Guyangan Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	684.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
59	TK TERATAI BLENDUNG	Desa Blendung Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
60	RA ACHMAD YANI	Desa Jogoresan Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	4.560.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
61	TK PAMBUDI UTOMO	Desa Karangsari Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
62	TK ABA NAMPUREJO	Desa Nampurejo Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	2.280.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
63	TK PUSPASARI JENARLOR	Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.748.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
64	TK PANTISIWI SUKOMANAH	Desa Sukomanah Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	2.204.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
65	TK SERUNI VI JENARWETAN	Desa Jenarwetan Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
66	TK TUNJUNGSARI	Desa Kesugihan Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	456.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
67	TK PANGUDI LUHUR	Desa Jenarwetan Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
68	TK SERUNI IX NAMPUREJO	Desa Nampurejo Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	3.876.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
69	TK MASYITHOH	Desa Geparang Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	2.508.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
70	TK SATU ATAP	Desa Jogoboyo Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
71	TK DHARMA BAKTI INDONESIA	Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	4.484.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
72	TK TUNAS MULYA	Desa Karangmulyo Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
73	TK SA'ADATUL AQOBAH	Desa Jenarlor Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	2.888.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
74	TK ABA PURWODADI	Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	4.940.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
75	TK PANTISIWI BONGKOT	Desa Bongkot Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	456.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
76	TK BINAMASQU	Desa Sendangsari Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
77	TK TARBIYATUL ATHFAL	Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	456.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
78	TK GOTONG ROYONG 2	Desa Bapangsari Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
79	TK GUYUB RUKUN	Desa Tlogokotes Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	760.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
80	TK PANCASILA SOMOREJO	Desa Somorejo Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	760.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
81	TK KUNCUP HARAPAN	Desa Bugel Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
82	TK KRENDETAN	Desa Krendetan Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	2.052.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
83	TK HARAPAN MULIYA	Desa Bagelen Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	532.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
84	TK ABA	Desa Krendetan Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	4.180.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
85	TK HARGO PUTRO	Desa Hargorojo Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
86	TK MARDI PUTRA	Desa Kalirejo Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
87	TK BINA SIWI	Desa Clapar Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
88	TK PANCASILA SOKO	Desa Soko Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	2.432.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
89	TK PAMEKAR BUDI	Desa Piji Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
90	TK MARDI UTOMO	Desa Semagung Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	2.280.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
91	TK SERBAGUNA	Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	2.052.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
92	TK KARTINI 1	Desa Sokoagung Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	988.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
93	TK SATU ATAP DURENSARI	Desa Durensari Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	836.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
94	TK TUNAS PERTIWI	Desa Durensari Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
95	TK GOTONG ROYONG 1	Desa Bapangsari Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	1.368.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
96	RA PERWANIDA	Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
97	TK DONOREJO 1	Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
98	TK MEKARSARI	Desa Tawangsari Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	1.064.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
99	TK PAMARDISIWI	Desa Somongari Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
100	TK MEKARSIWI	Desa Ngaran Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
101	TK MELATI 2	Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
102	TK MELATI 1	Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	988.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
103	TK DONOREJO 2	Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	2.128.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
104	TK KUSUMA	Desa KALIHARJO Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	1.064.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
105	TK JATIREJO	Desa Jatirejo Kec Kaligesing	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
106	TK TUNAS MEKAR	Desa Jelok Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	1.064.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
107	TK LARAS BUDI	Desa Hardimulyo Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	836.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
108	TK PANDANREJO	Desa Pandanrejo Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
109	TK PUSPOSARI	Desa Sumowono Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
110	TK TUNAS HARAPAN	Desa Tlogobulu Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
111	TK SIWI ASIH	Desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	836.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
112	TK MEKARSIWI 3	Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	532.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
113	TK MEKARSIWI 1	Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	684.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
114	TK RUKUN SARI	Desa Tlogorejo Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	608.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
115	TK MEKARSIWI 2	Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
116	RA JABAL NUR	Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	2.508.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
117	TK HARAPAN KITA	Desa Purbowono Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang	988.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
118	TK LESTARI MUDAL	Jl. Ismail No.1 Rt. 02/ Rw. 01 Kelurahan Mudal	Hibah Uang	2.812.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
119	TK KEMALA BHAYANGKARI 83	Jl. Jend Sudirman No.19 Kel. Pangen jurutengah Purworejo	Hibah Uang	5.092.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
120	TK ARTHA KENCANA	Komplek KBN Blok A No.5, Pangen jurutengah Purworejo	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
121	TK SETYO AJI TAMBAKREJO	Kelurahan Tambakrejo Purworejo	Hibah Uang	3.192.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
122	TK SIWI PENI MRANTI	Jl. Letjend. Suprapto No. 195 Kel. Meranti Purworejo	Hibah Uang	2.508.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
123	TK ISLAM DARUL MUTTAQIN	Jl. Mayjend Sutoyo No. 81 Purworejo	Hibah Uang	3.420.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
124	TK TUNAS PERTIWI	Desa Sidorejo Kecamatan Purworejo	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
125	TK PANGUDI LUHUR	Desa Sidomulyo Kec. Purworejo	Hibah Uang	3.496.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
126	TK TULUS SIWI	Jl. Caok Km.6 Desa Wonotulus Kec. Purworejo	Hibah Uang	2.508.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
127	TK MASYITHOH 3	Sindurjan RT.01/ Rw.01, Kec.Purworejo Kab.Purworejo	Hibah Uang	4.788.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
128	TK KUSUMA GANGGENG	Desa Ganggeng Kec. Purworejo	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
129	TK TUNAS HARAPAN PANGENREJO	Jl. Brigjend. Katamso Km. 2 Purworejo	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
130	TK KRISTEN SERUNI 1	Jl. Sibak No.1 Pangen jurutengah Purworejo	Hibah Uang	1.824.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
131	TK MARDISIWI DOPLANG	Jl.Majapahit No.45 Kel.Doplang Purworejo	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
132	TK HANDAYANI CANGKREP KIDUL	Kel. Cangkrep Kidul Purworejo	Hibah Uang	4.712.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
133	TK WIYATA KARYA KEDUNGSARI	Jl. Arahiwang Krajan 1 Kelurahan Kedungsari Purworejo	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
134	TK MARSUDI SIWI	Desa Pacekelan Kec. Purworejo	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
135	TK MELATI BRENGGONG	Jl. Raya Kaligesing Km. 4,5 Desa Brenggong Purworejo	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
136	TK ABA 2 PURWOREJO	Jl. Brigjend. Katamso No. 170A Purworejo	Hibah Uang	8.436.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
137	RA MASYITHOH XV	Kel.Pangenjurutengah Kec.Purworejo	Hibah Uang	8.360.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
138	TK TUNAS RIMBA PURWOREJO	Jl. Dr. Setia Budi No. 60 Kelurahan Sindurjan Purworejo	Hibah Uang	5.092.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
139	TK KARTIKA IX-27	Jl. Kesatriyan No.07, Purworejo	Hibah Uang	5.396.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
140	TK KARTIKA IX-28	Jl. Letjend. Suprapto No.80A Purworejo	Hibah Uang	3.420.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
141	TK BATIK PERBAIK PURWOREJO	Jl. KHA. Dahlan No.12 Purworejo	Hibah Uang	8.132.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
142	TK MASYITHOH 1 PURWOREJO	Kel. Brengkelan Purworejo	Hibah Uang	4.256.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
143	TK ABA 1 BALEDONO PURWOREJO	Baledono Singodranan, Rt.07/Rw.VI Purworejo	Hibah Uang	6.004.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
144	TK ASSA'ADAH	Jalan Krajan No. 10 Rt. 01 Rw. 08 Baledono Purworejo	Hibah Uang	3.876.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
145	TKIT ULUL ALBAB 2 PURWOREJO	Jl. Ir. H. Juanda Tegalsari Purworejo	Hibah Uang	9.272.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
146	TK ABA 4 PURWOREJO	Jl. Dr. Setia Budi No. 14 Purworejo	Hibah Uang	7.068.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
147	TK ABA 3 MUDAL PURWOREJO	Jl. Nyai Wagen RT 01 RW 01 Mudal	Hibah Uang	1.824.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
148	TK MASYITHOH 2 KESENENG	Kelurahan Keseneng Purworejo	Hibah Uang	2.128.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
149	TK AL MUKMINUN BALEDONO	Kel.Baledono Ngentak Rt.07/Rw.05 Purworejo	Hibah Uang	3.344.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
150	RA AZ ZAHRA CANGKREP LOR	Kelurahan Cangkreplor Purworejo	Hibah Uang	11.780.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
151	TK MARIA PURWOREJO	Jl. Urip Sumoharjo No.28 Purworejo	Hibah Uang	3.040.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
152	TK AL GIBRAN	Jl WR Supratman No.171 Cangkreplor Purworejo	Hibah Uang	3.116.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
153	TK MAJU KESENENG	Jl.Ki Pande Kel. Keseneng Purworejo	Hibah Uang	380.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
154	RA ASY SYAKAL	Desa Brenggong Kec. Purworejo	Hibah Uang	3.952.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
155	TK MARDI LUHUR	Desa Sudimoro Kec. Purworejo	Hibah Uang	456.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
156	TK AL-BADAWI	Kelurahan Baledono RT 02/ RW 09 Kecamatan Purworejo	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
157	TK CENGKAWAKREJO	Desa Cengkawakrejo Kecamatan Banyuurip	Hibah Uang	1.748.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
158	TK MEKARSARI CONDONGSARI	Desa Condongsari Kecamatan Banyuurip	Hibah Uang	3.344.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
159	TK BOROWETAN	Desa Borowetan Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
160	TK NURUL HUDA BAJANGREJO	Desa Bajangrejo Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
161	TK RINDANGKASIH CANDINGASINAN	Desa Candingasinan Kec. Banyuurip	Hibah Uang	2.204.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
162	TK KARTIKASARI CANDISARI	Desa Candisari Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.976.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
163	TK TUNAS KARYA GOLOK	Desa Golok Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.824.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
164	TK BOROKULON	Kelurahan Borokulon Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
165	TK POPONGAN	Desa Popongan Kec. Banyuurip	Hibah Uang	684.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
166	TK TEGALKUNING	Desa Tegalkuning Kec. Banyuurip	Hibah Uang	532.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
167	TK TUNAS HARAPAN SUROREJO	Desa Surorejo Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.064.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
168	TK PERTIWI KLEDUNG KRADENAN	Kel. Kledungkradenan Banyuurip	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
169	TK PERTIWI SOKOWATEN	Desa Sokowaten Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
170	TK PERTIWI BENCOREJO	Desa Bencorejo Kec. Banyuurip	Hibah Uang	2.812.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
171	TK PERINTIS	Kel. Kledungkarang dalem Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.064.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
172	TK TRI WALUYO ASI TEGALREJO	Desa Tegalrejo Kec. Banyuurip	Hibah Uang	2.052.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
173	TK MUDA LESTARI SAWIT	Desa Sawit Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
174	TK KARTIKASARI MALANGREJO	Desa Malangrejo Kec. Banyuurip	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
175	TK NGUDI BASUKI PAKISREJO	Desa Pakisrejo Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
176	TK AISYIYAH 1 BANYUURIP	Desa Wangunrejo Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
177	TK KUTILANG SUMBERSARI	Desa Sumbersari Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.824.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
178	RA AL HIDAYAH	Desa Tanjunganom Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
179	TK MARDISIWI KERTOSONO	Desa Kertosono Kec. Banyuurip	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
180	TKIT SALSABILA 5 PURWOREJO	Kel. Borokulon Kec. Banyuurip	Hibah Uang	6.460.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
181	TK TRAJUMAS	Kel.Kledungkradenan Banyuurip	Hibah Uang	3.572.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
182	TK MARDISIWI PEKUTAN	Desa Pekutan Kec. Bayan	Hibah Uang	3.268.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
183	TK PERTIWI PUCANGAGUNG	Desa Pucangagung Kec. Bayan	Hibah Uang	2.280.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
184	TK IT DARUSSALAM	Jln Gajah Mada No. 4 Bandungkidul Kec. Bayan	Hibah Uang	6.004.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
185	TK PERTIWI SAMBENG	Desa Sambeng Kec. Bayan	Hibah Uang	2.052.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
186	TK SIWI LOKA	Desa Bayan Kec. Bayan	Hibah Uang	2.128.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
187	TK PERTIWI JRAKAH	Desa Jrakah Kec. Bayan	Hibah Uang	2.128.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
188	TK DHARMA WANITA BRINGIN	Desa Bringin Kec. Bayan	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
189	TK MASYITHOH PUCANGAGUNG	Desa Pucangagung Kec. Bayan	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
190	TK TUNAS HARAPAN KRANDEGAN	Desa Krandegan Kec. Bayan	Hibah Uang	2.280.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
191	TK MEKAR TANJUNGREJO	Desa Tanjungrejo Kec. Bayan	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
192	TK AT-TAQWA POGUNGREJO	Desa Pogungrejo Kec. Bayan	Hibah Uang	760.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
193	TK PERTIWI POGUNGKALANGAN	Desa Pogungkalangan Kec. Bayan	Hibah Uang	836.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
194	TK PERTIWI GRANTUNG	Desa Grantung Kec. Bayan	Hibah Uang	4.636.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
195	TK PUTRA PERTIWI KALIMIRU	Desa Kalimiru Kec. Bayan	Hibah Uang	988.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
196	TK PRABASIWI DUKUHREJO	Desa Dukuhrejo Kec. Bayan	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
197	TK DHARMA BHAKTI BANDUNGKIDUL	Desa Bandungkidul Kec. Bayan	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
198	TK MARDISIWI TANGKISAN	Desa Tangkisan Kec. Bayan	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
199	TK BANDUNGREJO	Desa Bandungrejo Kec. Bayan	Hibah Uang	2.204.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
200	TK PERTIWI SIWI BAYUN JATINGARANG	Desa Jatingarang Kec. Bayan	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
201	TK PERTIWI KETIWIJAYAN	Desa Ketiwijayan Kec. Bayan	Hibah Uang	1.368.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
202	TK PKK JONO	Desa Jono Kec. Bayan	Hibah Uang	3.116.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
203	TK AISYIYAH JONO	Desa Jono Kec. Bayan	Hibah Uang	5.472.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
204	TK PERTIWI DEWI	Desa Dewi Kec. Bayan	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
205	TK PUTRO JOGORESAN	Desa Botorejo Kec. Bayan	Hibah Uang	988.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
206	TK SETYARINI	Desa Botodaleman Kec. Bayan	Hibah Uang	1.824.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
207	TK IT ULUL ALBAB 1 PURWOREJO	Desa Dukuhrejo Kec. Bayan	Hibah Uang	5.472.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
208	TK MAWAR PERTIWI BESOLE	Desa Besole Kec. Bayan	Hibah Uang	2.584.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
209	TK SRI PURNOMO MARSUDISIWI	Desa Pogungjurutengah Kec. Bayan	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
210	RA MASYITHOH SUCEN JURUTENGAH	KeL. Sucen Juru tengah Kec. Bayan	Hibah Uang	3.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
211	TK SURYA INDAH BANJAREJO	Desa Banjarejo Kec. Bayan	Hibah Uang	1.368.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
212	TK DHARMA RINI	KeL. Sucen Jurutengah Kec. Bayan	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
213	TK PENDIDIKAN PRASETIYA BANGSA	KeL. Sucen Jurutengah Kec. Bayan	Hibah Uang	2.888.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
214	TK TAHFIDZUL QUR'AN NUURUL WAAHID	Desa Krandegan Kec. Bayan	Hibah Uang	1.976.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
215	TK TRISULA I	Jl.Mardi Usodo No.14 Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	2.812.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
216	TK YWKA	Jl. Stasiun No 28 Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	2.128.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
217	TK PIUS BAKTI UTAMA	Jl.Marditomo No.29 Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
218	TK NASIONAL	Jl.MT Haryono No.94 Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
219	TK ABA I KUTOARJO	Jl.Wismoaji No.9 Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	9.424.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
220	TK ABA II	Jl.Senepo Tengah No.7 Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	4.256.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
221	TK HANDAYANI I	Jl.Senepo Tengah No.1 Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
222	TK INDRIYA SANNA II	Kel.Katerban Kec .Kutoarjo	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
223	TK TRISULA IV	Desa Sidarum Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	836.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
224	TK AISYIYAH 3	Kel.Bayem Kec. Kutoarjo	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
225	TK MAHKOTA	Desa Kiyangkongrejo Kec. Kutoarjo	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
226	TK PERTIWI	Desa Purwosari Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
227	TK LESTARI I	Desa Tepus Kulon, Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
228	TK PALUPI	Desa Pringgowijayan Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
229	TK TUNAS BANGSA	Jl. Tunas Patria Rt.02 Rw.05 Kel. Bandung Kec. Kutoarjo	Hibah Uang	988.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
230	TK DIAN LESTARI	Kel.Semawung Kembaran Kec. Kutoarjo	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
231	TK LESTARI II	Desa Kebondalem Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
232	TK PAMARDIRINI	Desa Kepuh Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.368.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
233	TK LARASATI	Semawung Daleman Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	2.356.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
234	TK KUNCUP MEKAR	Desa Tursino Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
235	TK MAWAR PUTIH	Desa Kuwurejo Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
236	TK AISYIYAH 4	Kel.Katerban Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.824.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
237	TK KENCANA LOKA 1	Desa Wirun Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	4.864.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
238	TK TUNAS GAMA	Desa Kaligesing Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.064.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
239	TK KARTIKA	Desa Pacor Kec. Kutoarjo	Hibah Uang	2.888.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
240	TK KENCANA LOKA 2	Desa Wirun Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	3.040.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
241	TK MASYITHOH 1	Jl. Tentara Pelajar Km 3 Desa Tunggorono Kutoarjo	Hibah Uang	2.964.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
242	TK NURUL IMAN	Jl. Tentara Pelajar Kel. Katerban, Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
243	TK MASYITHOH 2	Desa Majir Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.976.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
244	TK MEKARSARI	Desa Kemadulor Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	988.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
245	TK NURUL ATHFAL	Desa Sokoharjo Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
246	TKIT ULUL ALBAB 3	Desa Tuntungpait Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	12.616.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
247	TKIT ULUL ALBAB 5	Perum Argopeni Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	8.284.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
248	TK AL-ARIF	Jl.Letjend.S.Parman No.43 Kutoarjo	Hibah Uang	5.092.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
249	TKIT KHOIRU UMMAH	Desa Tepus Kulon Kec.Kutoarjo	Hibah Uang	2.660.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
250	TK KUNTHI	Desa Lubangsampang Kec. Butuh	Hibah Uang	2.128.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
251	TK RUKUN	Desa Andong Kec. Butuh	Hibah Uang	836.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
252	TK KUNCUP MEKAR	Desa Dlangu Kec. Butuh	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
253	TK TUNAS MUDA	Desa Lugu Kec. Butuh	Hibah Uang	1.064.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
254	TK TUNAS HARAPAN	Desa Butuh Kec. Butuh	Hibah Uang	2.280.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
255	TK DHARMA BHAKTI	Desa Tamansari Kec. Butuh	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
256	TK MEKAR	Desa Sruwohrejo Kec. Butuh	Hibah Uang	1.824.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
257	TK WIDODO	Desa Lugurejo Kec. Butuh	Hibah Uang	1.064.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
258	TK RAHAYU	Desa Ketug Kec. Butuh	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
259	TK MARDISIWI UTAMI	Desa Wareng Kec. Butuh	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
260	TK PERTIWI	Desa Kedungsri Kec. Butuh	Hibah Uang	760.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
261	TK TERATAI INDAH	Desa Wonorejokulon Kec. Butuh	Hibah Uang	2.280.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
262	TK DWI RAHAYU	Desa Langenrejo Kec. Butuh	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
263	TK LESTARI	Desa Sruwohdukuh, Rt.01/Rw.01 Kec. Butuh	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
264	TK MARDI PUTRA	Desa Wironatan Kec. Butuh	Hibah Uang	3.420.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
265	TK MEKARSARI	Desa Kaliwatubumi Kec. Butuh	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
266	TK TRISULA III	Desa Panggeldlangu Kec. Butuh	Hibah Uang	608.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
267	TK PUSPITASARI	Desa Kaliwatubumi Kec. Butuh	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
268	RA Al HIDAYAH	Desa Lubangindangan Kec. Butuh	Hibah Uang	7.448.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
269	TK MADAH MULYA	Desa Sidomulyo Kec. Butuh	Hibah Uang	1.368.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
270	TK SRIDADI	Desa Rowodadi Kec. Butuh	Hibah Uang	608.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
271	TK GADING JAYA	Desa Kedungmulyo Kec. Butuh	Hibah Uang	836.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
272	TK PERINTIS	Desa Kaliwatukranggan Kec. Butuh	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
273	TK UlUL ALBAB 4	Desa Kedungagung Kec. Butuh	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
274	TK ULUL ALBAB 6 PURWOREJO	Desa Kaliwatukranggan Kec. Butuh	Hibah Uang	4.788.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
275	RA MASYITHOH	Desa Wareng Kec. Butuh	Hibah Uang	5.472.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
276	TK PERTIWI PITURUH	Komplek Kantor Kec. Pituruh	Hibah Uang	2.736.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
277	TK MARDISIWI KEBURUSAN	Desa Keburusan Kec. Pituruh	Hibah Uang	3.344.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
278	TK MARDISIWI MEGULUNGLOR	Desa Megulunglor Kec.Pituruh	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
279	TK MARDISIWI KALIKOTES	Desa Kalikotes Kec. Pituruh	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
280	TK MARDISIWI	Desa Tersidilor Kec. Pituruh	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
281	TK SIWI RAHAYU	Desa Sikambang Kec. Pituruh	Hibah Uang	2.508.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
282	TK PKK MEGULUNG KIDUL	Desa Megulungkidul Kec.Pituruh	Hibah Uang	684.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
283	TK DHARMA SIWI NGAMPEL	Desa Ngampel Kec. Pituruh	Hibah Uang	1.824.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
284	TK PUTRA PERTIWI KENDALREJO	Desa Kendalrejo Kec. Pituruh	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
285	TK WIDORO	Desa Pituruh Kec. Pituruh	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
286	TK MARDISIWI PRIGELAN	Desa Prigelan Kec. Pituruh	Hibah Uang	2.356.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
287	TK MELATI MEKAR NGANDANGAN	Desa Ngandangan Kec. Pituruh	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
288	TK HANDAYANI KALIMATI	Desa Kalimati Kec. Pituruh	Hibah Uang	760.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
289	TK PUTRA BHAKTI	Desa Pepe Kec. Pituruh	Hibah Uang	608.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
290	TK PUTRA KARTINI	Desa Girigondo Kec. Pituruh	Hibah Uang	3.344.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
291	TK TUNAS HARAPAN TUNJUNGTEJO	Desa Tunjungtejo Kec. Pituruh	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
292	TK MEKAR TASIKMADU	Desa Tasikmadu Kec. Pituruh	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
293	TK BHAKTI IBU DLISENKULON	Desa Dlisenkulon Kec. Pituruh	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
294	RA AL MASYITHOH BRENGKOL	Desa Brengkol Kec. Pituruh	Hibah Uang	3.724.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
295	RA BANATUL MASYITHOH MEGULUNGKIDUL	Desa Megulungkidul Kec. Pituruh	Hibah Uang	13.604.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
296	RA AL HUDA KARANGGETAS	Desa Karanggetas Kec. Pituruh	Hibah Uang	2.660.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
297	TK MARDI UTAMI PEKACANGAN	Desa Pekacangan Kec. Pituruh	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
298	TK AISYIYAH PITURUH	JLn. Srudutan No .6A Desa Pituruh Kec.Pituruh	Hibah Uang	3.876.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
299	TK MANDIRI SAWANGAN	Desa Sawangan Kec. Pituruh	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
300	TK PERTIWI KEMIRI	Jl. Tentara Pelajar Km. No.46 Desa Kemirikidul Kec. Kemiri	Hibah Uang	3.420.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
301	TK TUNAS MUDA KEREP	Desa Kerep Kec. Kemiri	Hibah Uang	2.052.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
302	TK PELANGI	Desa Bedono Kluwung Kec. Kemiri	Hibah Uang	4.408.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
303	TK AL IMAN GIRIMULYO	Desa Girimulyo Kec. Kemiri	Hibah Uang	2.888.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
304	TK TRI SIWI	Desa Loning Kec. Kemiri	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
305	TK AL AMIN	Desa Winong Kec. Kemiri	Hibah Uang	2.432.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
306	TK MARDISIWI	Desa Rejosari Kec. Kemiri	Hibah Uang	2.508.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
307	TK PUSPASARI	Desa Kroyolor Kec. Kemiri	Hibah Uang	3.040.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
308	TK YOGA TERATAI	Desa Wonosari Kec. Kemiri	Hibah Uang	1.368.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
309	TK TUNAS BANGSA	Desa Kedunglo Kec. Kemiri	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
310	TK PERINTIS	Desa Kroyokulon Kec. Kemiri	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
311	TK BINA PUTRA	Desa Rowobayem Kec. Kemiri	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
312	TK BHAKTI SIWI	Desa Kalimeneng Kec. Kemiri	Hibah Uang	2.128.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
313	TK AISYIYAH KEMIRI KIDUL	Desa Kemirikidul Kec. Kemiri	Hibah Uang	6.612.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
314	TK SATU ATAP	Desa Paitan Kec. Kemiri	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
315	TK AL IMAN	Desa Rejowinangun Kec. Kemiri	Hibah Uang	3.344.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
316	RA AL MASYITHOH	Desa Samping Kec. Kemiri	Hibah Uang	3.344.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
317	TK MELATI	Desa Bedono Karang duwur Kec. Kemiri	Hibah Uang	2.052.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
318	TK AL FIRDAUS	Desa Sutoragan Kec. Kemiri	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
319	TK AMELIA	Desa Dilem Kec. Kemiri	Hibah Uang	2.584.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
320	TK NURUL HIDAYAH	Desa Kemirilor Kec. Kemiri	Hibah Uang	1.368.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
321	TK MASYITOH	Desa Kedungpomahan wetan Kec. Kemiri	Hibah Uang	2.508.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
322	RA MASYITOH SUTORAGAN	Desa Sutoragan Kec. Kemiri	Hibah Uang	7.296.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
323	TK AL HIKMAH	Desa Kedung Pomahan wetan Kec. Kemiri	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
324	TK SARROJA	Desa Kemiri Kidul Kec. Kemiri	Hibah Uang	4.408.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
325	TK AZ ZAHRA	Desa Kedung Pomahan kulon Kec. Kemiri	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
326	TK EKA BHAKTI	Desa Kaliwungu Kec. Bruno	Hibah Uang	3.496.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
327	TK PERTIWI 2 CEPEDAK	Desa Cepedak Kec. Bruno	Hibah Uang	3.040.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
328	TK BROJOWISNU BRUNOREJO	Desa Brunorejo Kec .Bruno	Hibah Uang	3.192.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
329	TK MARDISIWI BRUNOREJO	Desa Brunorejo Kec.Bruno	Hibah Uang	2.508.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
330	TK WULANGSUNU KEMRANGGEN	Desa Kemranggen Kec. Bruno	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
331	TK CEMPAKA GUNUNG CONDONG	Desa Gunung Condong Kec. Bruno	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
332	TK ABA KALIWUNGU	Desa Kaliwungu Kec. Bruno	Hibah Uang	4.864.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
333	TK ISLAM KARTINI BRONDONG	Desa Brondong Kec. Bruno	Hibah Uang	4.256.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
334	TK ARGOSARI TEGALSARI	Desa Tegalsari Kec, Bruno	Hibah Uang	2.128.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
335	TK SEKAR MELATI KARANGGEDANG	Desa Karanggedang Kec. Bruno	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
336	TK ARUM SIWI PAKISARUM	Desa Pakisarum Kec. Bruno	Hibah Uang	2.888.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
337	TK PERTIWI CEPEDAK	Desa Cepedak Kec. Bruno	Hibah Uang	2.736.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
338	TK PERTIWI 3 CEPEDAK	Desa Cepedak Kec. Bruno	Hibah Uang	2.812.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
339	TK ABA PLIPIRAN	Desa Plipiran Kec. Bruno	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
340	TK LESTARI	Desa Plipiran Kec. Bruno	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
341	RA MASYITOH BRUNOREJO	Desa Brunorejo Kec. Bruno	Hibah Uang	2.128.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
342	RA MASYITOH BLIMBING	Desa Blimbing Kec. Bruno	Hibah Uang	3.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
343	RA MASYITHOH BRUNOSARI	Desa Brunosari Kec. Bruno	Hibah Uang	3.268.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
344	RA NURUL ISLAM BRUNOSARI	Desa Brunosari 05 Kec. Bruno	Hibah Uang	2.660.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
345	TK MUTIARA WATUDUWUR	Desa Watuduwur Kec. Bruno	Hibah Uang	2.128.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
346	TK ISLAM NURUL ANWAR AL AZHARY	Desa Brunosari Kec. Bruno	Hibah Uang	2.356.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
347	TK ALHIDAYAH PAKISARUM	Desa Pakisarum Kec. Bruno	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
348	RA MA'ARIF NU TEGALSARI	Desa Tegalsari Kec. Bruno	Hibah Uang	2.736.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
349	TK IT BUSTANUL FALAH	Desa Gowong Kec. Bruno	Hibah Uang	2.508.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
350	TK VIP ASWAJA	esa Tegalsari Kec. Bruno	Hibah Uang	1.596.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
351	TK GINTUNGAN	Desa Gintungan Kec. Gebang	Hibah Uang	2.356.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
352	TK TUNAS MUDA WINONGKIDUL	Desa Winongkidul Kec. Gebang	Hibah Uang	3.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
353	TK LKMD WINONGLOR	Desa Winonglor Kec. Gebang	Hibah Uang	1.824.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
354	TK MARDI SIWI	Desa Mlaran Kec. Gebang	Hibah Uang	988.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
355	TK MASYITHOH LUGOSOBO	Kelurahan Lugosobo Kec. Gebang	Hibah Uang	4.180.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
356	TK TUNAS HARAPAN	Desa Kroyo Kec. Gebang	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
357	TK BINAYOGA	Desa Pelutan Kec. Gebang	Hibah Uang	836.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
358	TK KENARI SEREN	Desa Seren Kec. Gebang	Hibah Uang	2.812.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
359	TK DHARMA SIWI	Desa Pakem Kec. Gebang	Hibah Uang	1.976.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
360	TK TRI BHAKTI	Desa Ngemplak Kec. Gebang	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
361	TK ABA RENDENG	Desa Rendeng Kec. Gebang	Hibah Uang	2.964.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
362	TK MASYITHOH REDIN	Desa Redin Kec. Gebang	Hibah Uang	4.180.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
363	TK SERUNI XII	Desa Rendeng Kec. Gebang	Hibah Uang	836.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
364	TK TUNAS KARYA	Desa Mlaran Kec. Gebang	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
365	TK MEKAR	Desa Gebang Kec. Gebang	Hibah Uang	1.292.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
366	TK DHARMA BAKTI	Kelurahan Lugosobo Kec.Gebang	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
367	TKIT ASH- SHIDDIQIYYAH	Desa Gintungan Kec. Gebang	Hibah Uang	2.508.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
368	TK BUNAYA BULUS	Desa Bulus Kec. Gebang	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
369	TK TUNGGUK RAHAYU	Desa Penungkulan Kec. Gebang	Hibah Uang	2.812.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
370	TK ISLAM ASY SYAMS	Desa Seren Kec. Gebang	Hibah Uang	3.268.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
371	TK MARDISIWI	Desa Loano Kec. Loano	Hibah Uang	2.660.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
372	TK TRI MARDISIWI TRIREJO	Desa Trirejo Kec. Loano	Hibah Uang	1.064.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
373	TK RATNASIWI KALINONGKO	Desa Kalinongko Kec. Loano	Hibah Uang	2.660.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
374	TK KOLOPAKING KALISEMO	Desa Kalisemo Kec. Loano	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
375	TK SIWI UTOMO MARON	Desa Maron Kec. Loano	Hibah Uang	5.092.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
376	TK HARDI SIWI SEDAYU	Desa Sedayu Kec. Loano	Hibah Uang	1.444.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
377	TK PAMARDI PUTERA MUDALREJO	Desa Mudalrejo Kec. Loano	Hibah Uang	3.344.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
378	TK SIWI PENI JETIS	Desa Jetis Kec. Loano	Hibah Uang	1.748.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
379	TK TRI PENI KEBON GUNUNG	Desa Kebon Gunung Kec. Loano	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
380	TK KARTINI KARANGREJO	Desa Karangrejo Kec. Loano	Hibah Uang	2.280.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
381	TK KARYA LUHUR KEDUNGPOH	Desa Kedungpoh Kec. Loano	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
382	TK MARDI SANTOSO RIMUN	Desa Rimun Kec. Loano	Hibah Uang	988.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
383	TK SIWI ASIH SEPARE	Desa Banyuasin Separe Kec. Loano	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
384	TK ABA LOANO	Desa Loano Kec.Loano	Hibah Uang	2.888.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
385	TK MASYITHOH GUYANGAN	Desa Guyangan Kec. Loano	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
386	TK AL MAUNAH TRIDADI	Desa Tridadi Kec. Loano	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
387	RA AN NAJA	Desa Banyuasin Kembaran Kec. Loano	Hibah Uang	2.888.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
388	TK AL BAROKAH KALIKALONG	Desa Kalikalong Kec. Loano	Hibah Uang	2.584.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
389	TK AS SAKINAH	Desa Tepansari Kec. Loano	Hibah Uang	2.356.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
390	RA TRI BHAKTI GLGAHMALANG	Desa Maron Kec. Loano	Hibah Uang	1.748.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
391	TK SIWISARI NGARGOSARI	Desa Ngargosari Kec. Loano	Hibah Uang	532.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
392	TK ABA BENER	Jl.Magelang Km 14 Desa Bener Kec. Bener	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
393	TK AL HIDAYAH CACABAN LOR	Desa Cacabanlor Kec. Bener	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
394	TK CAHAYA PEKACANGAN	Desa Cacabanlor Kec. Bener	Hibah Uang	2.432.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
395	TK KUNCUP MEKAR KAMIJORO	Desa Kamijoro Kec. Bener	Hibah Uang	912.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
396	TK KUNCUP MEKAR SUKOWUWUH	Desa Sukowuwuh Kec. Bener	Hibah Uang	2.584.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
397	TK KUSUMA LIMBANGAN	Desa Limbangan Kec. Bener	Hibah Uang	1.672.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
398	TK LESTARI BENER	Jl. Magelang Km 12, Desa Bener Kec. Bener	Hibah Uang	6.232.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
399	TK LESTARI PERTIWI WADAS	Desa Wadas Kec. Bener	Hibah Uang	988.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
400	TK MANDALA PURI BENOWO	Desa BenowoKec. Bener	Hibah Uang	1.368.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
401	TK MANDIRI KEDUNGPUCANG	Desa Kedungpucang Kec. Bener	Hibah Uang	1.368.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
402	TK MARDISIWI KALIBOTO	Desa Kaliboto Kec. Bener	Hibah Uang	2.888.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
403	TK MELATI NGASINAN	Desa Ngasinan Kec. Bener	Hibah Uang	2.584.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
404	TK PERTIWI MAYUNGSARI	Desa Mayungngsari Kec. Bener	Hibah Uang	1.140.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
405	TK PERTIWI JATI	Desa Jati Kec. Bener	Hibah Uang	2.964.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
406	TK PERTIWI KALIJAMBE	Desa Kalijambe Kec. Bener	Hibah Uang	1.824.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
407	TK PERTIWI KARANGSARI	Desa Karangsari Kec. Bener	Hibah Uang	3.876.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
408	TK PERTIWI KEDUNGPUCANG	Desa Kedungpucang Kec. Bener	Hibah Uang	4.332.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
409	TK PERTIWI SIDOSARI	Desa Kalijambe Kec. Bener	Hibah Uang	1.976.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
410	TK RAHAYU KALIURIP	Desa Kaliurip Kec. Bener	Hibah Uang	2.660.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
411	TK SETIA BUDI SIDOMUKTI	Desa Sidomukti Kec. Bener	Hibah Uang	2.736.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
412	TK SIWI ASIH KETOSARI	Desa Ketosari Kec. Bener	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
413	TK SIWI PENI NGLARIS	Desa Nglaris Kec. Bener	Hibah Uang	1.520.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
414	TK TUNAS ILMU GUNTUR	Desa Guntur Kec. Bener	Hibah Uang	1.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
415	TK TUNAS MELATI SENDANGSARI	Desa Sendangsari Kec. Bener	Hibah Uang	2.280.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
416	TK WAHYU LESTARI KALIWADER	Desa Kaliwader Kec. Bener	Hibah Uang	2.660.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
417	RA AL MUTTAQIN KETOSARI	Desa Ketosari Kec. Bener	Hibah Uang	1.216.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
418	RA INSAN MULIA GUNTUR	Desa Guntur Kec. Bener	Hibah Uang	1.824.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
419	RA DARUL ULUM SUKOWUWUH	Desa Sukowuwuh Kec. Bener	Hibah Uang	836.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
420	RA AL ISLAM NGLARIS	Desa Nglaris Kec. Bener	Hibah Uang	2.128.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
421	RA MASYITOH BENER	Jl. Magelang Km.12 Desa Kaliboto Kec. Bener	Hibah Uang	6.916.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
422	RA NAHDLATUL ATHFAL SENDANGSARI	Desa Sendangsari Kec. Bener	Hibah Uang	2.736.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				**969.000.000**	
JUMLAH HIBAH PADA SUBKEGIATAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				**969.000.000**	
G	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD**				
1	**5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	KB Mandarava	Kec. Bagelen	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	KB MUTIARA HATI	Kec. Bagelen	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	KB AISYIYAH BAGELEN	Kec. Bagelen	hibah uang	21.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	KB Pembina	Kec. Bagelen	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
5	KB Serbaguna	Kec. Bagelen	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	KB Melati	Kec. Bagelen	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	KB PELANGI MANIS JAYA	Kec. Bagelen	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	POS PAUD MUTIARA ABADI	Kec. Bagelen	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	POS PAUD PERMATA HATI	Kec. Bagelen	hibah uang	16.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	POS PAUD TRI LESTARI	Kec. Bagelen	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
11	Pos Paud Gotong Royong	Kec. Bagelen	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
12	POS PAUD Cahaya Ibu	Kec. Bagelen	hibah uang	17.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
13	POS PAUD PAMEKAR BUDI PIJ	Kec. Bagelen	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
14	POS Paud Pelangi Indah	Kec. Bagelen	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
15	TK KARTINI 1	Kec. Bagelen	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
16	TK HARAPAN MULIYA	Kec. Bagelen	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
17	TK HARGO PUTRO	Kec. Bagelen	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
18	TK TARBIYATUL ATFAL	Kec. Bagelen	hibah uang	3.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
19	TK TUNAS PERTIWI DURENOM	Kec. Bagelen	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
20	TK PANCASILA SOKO	Kec. Bagelen	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
21	TK PANCASILA SOMOREJO	Kec. Bagelen	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
22	TK KRENDETAN	Kec. Bagelen	hibah uang	16.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
23	TK PAMEKAR BUDI	Kec. Bagelen	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
24	TK BINA SIWI	Kec. Bagelen	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
25	TK MARDI UTOMO	Kec. Bagelen	hibah uang	18.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
26	TK GUYUB RUKUN	Kec. Bagelen	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
27	TK MARDI PUTRA	Kec. Bagelen	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
28	TK GOTONG ROYONG I	Kec. Bagelen	hibah uang	4.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
29	TK Satu Atap Durensari	Kec. Bagelen	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
30	TK KUNCUP HARAPAN	Kec. Bagelen	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
31	TK ABA	Kec. Bagelen	hibah uang	41.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
32	TK SERBA GUNA	Kec. Bagelen	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
33	TK GOTONG ROYONG 2	Kec. Bagelen	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
34	KB HARAPAN BANGSA	Kec. Banyu Urip	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
35	KB TUNAS KARYA GOLOK	Kec. Banyu Urip	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
36	KB Salsabila 5 Purworejo	Kec. Banyu Urip	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
37	KB Permata Hati	Kec. Banyu Urip	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
38	KB TUNAS KASIH	Kec. Banyu Urip	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
39	KB Hidayatush Shibyan	Kec. Banyu Urip	hibah uang	22.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
40	KB TRAJU MAS	Kec. Banyu Urip	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
41	KB Insan Cendekia	Kec. Banyu Urip	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
42	KB NUR HIKMAH	Kec. Banyu Urip	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
43	KB AL-IKHWAN	Kec. Banyu Urip	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
44	KB NUR ANNISA	Kec. Banyu Urip	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
45	KB AISYIYAH I	Kec. Banyu Urip	hibah uang	36.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
46	POS Paud Sekar Sari	Kec. Banyu Urip	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
47	POS PAUD HIDAYATUL AULAD	Kec. Banyu Urip	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
48	POS Paud Putra Bangsa	Kec. Banyu Urip	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
49	POS PAUD CERDAS CERIA	Kec. Banyu Urip	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
50	POS Paud Tunas Harapan	Kec. Banyu Urip	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
51	POS PAUD KASIH IBU	Kec. Banyu Urip	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
52	POS PAUD KUNCUP PERTIWI	Kec. Banyu Urip	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
53	POS Paud Pertiwi	Kec. Banyu Urip	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
54	POS PAUD TEGAL KUNING	Kec. Banyu Urip	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
55	POS PAUD TUNAS KUMALA	Kec. Banyu Urip	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
56	TK TRI WALUYO ASI	Kec. Banyu Urip	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
57	TK SIWI ASTRI	Kec. Banyu Urip	hibah uang	600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
58	TK TEGALKUNING	Kec. Banyu Urip	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
59	TK MEKARSARI	Kec. Banyu Urip	hibah uang	19.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
60	TK BOROWETAN	Kec. Banyu Urip	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
61	TK KUTILANG	Kec. Banyu Urip	hibah uang	19.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
62	TK CENGKAWAKREJO	Kec. Banyu Urip	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
63	TK AISYIYAH I	Kec. Banyu Urip	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
64	TK KARTIKASARI MALANGREJ	Kec. Banyu Urip	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
65	TK RINDANG KASIH	Kec. Banyu Urip	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
66	TK PERTIWI SOKOWATEN	Kec. Banyu Urip	hibah uang	3.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
67	TK NURUL HUDA	Kec. Banyu Urip	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
68	TK BOROKULON	Kec. Banyu Urip	hibah uang	16.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
69	TK PERTIWI	Kec. Banyu Urip	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
70	TK PERTIWI	Kec. Banyu Urip	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
71	TK TUNAS KARYA	Kec. Banyu Urip	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
72	TK PERINTIS	Kec. Banyu Urip	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
73	TK NGUDI BASUKI	Kec. Banyu Urip	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
74	TK KARTIKASARI	Kec. Banyu Urip	hibah uang	17.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
75	TK MARDISIWI KERTOSONO	Kec. Banyu Urip	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
76	TK TUNAS HARAPAN SURORE.	Kec. Banyu Urip	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
77	TKIT SALSABILA 5 PURWOREJ	Kec. Banyu Urip	hibah uang	52.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
78	TK MUDA LESTARI	Kec. Banyu Urip	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
79	TK POPONGAN	Kec. Banyu Urip	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
80	TK TUNAS HARAPAN	Kec. Banyu Urip	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
81	TK Traju Mas	Kec. Banyu Urip	hibah uang	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
82	TK MARDISIWI	Kec. Banyu Urip	hibah uang	4.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
83	TPA TRAJU MAS	Kec. Banyu Urip	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
84	KB KHASANAH	Kec. Bayan	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
85	KB SURYA INDAH	Kec. Bayan	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
86	KB SINAR HARAPAN	Kec. Bayan	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
87	KB AISYIYAH JONO	Kec. Bayan	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
88	KB BINA LOKA	Kec. Bayan	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
89	KB REMBULAN	Kec. Bayan	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
90	KB TUNAS MELATI	Kec. Bayan	hibah uang	25.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
91	KB PUTRA PERDANA	Kec. Bayan	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
92	POS PAUD AL-HIKMAH	Kec. Bayan	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
93	POS Paud RAHAYU	Kec. Bayan	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
94	POS PAUD SEKAR	Kec. Bayan	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
95	POS Paud Pelangi	Kec. Bayan	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
96	POS PAUD ROUDLOTUS SIBYA	Kec. Bayan	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
97	POS PAUD GARUDA TUNAS BA	Kec. Bayan	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
98	POS PAUD BINTANG	Kec. Bayan	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
99	POS Paud Tunas Matahari	Kec. Bayan	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
100	POS PAUD GENERASI BANGSA	Kec. Bayan	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
101	POS PAUD INSAN MULIA	Kec. Bayan	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
102	POS Paud Permata Bunda	Kec. Bayan	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
103	POS PAUD CAHAYA BUNDA	Kec. Bayan	hibah uang	3.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
104	POS PAUD PUTRA PERTIWI	Kec. Bayan	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
105	POS PAUD CERIA POGUNGKAI	Kec. Bayan	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
106	POS Paud An Najjah	Kec. Bayan	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
107	POS Paud Cipta Taruna	Kec. Bayan	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
108	POS PAUD HARAPAN IBU	Kec. Bayan	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
109	TK PERTIWI JRAKAH	Kec. Bayan	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
110	TK DHARMARINI	Kec. Bayan	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
111	TK PERTIWI GRANTUNG	Kec. Bayan	hibah uang	38.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
112	TK PERTIWI	Kec. Bayan	hibah uang	17.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
113	TK IT DARUS SALAM BANDUNG	Kec. Bayan	hibah uang	47.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
114	TK AT TAQWA	Kec. Bayan	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
115	TK BANDUNGREJO	Kec. Bayan	hibah uang	18.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
116	TK MARDISIWI	Kec. Bayan	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
117	TK DHARMA BHAKTI	Kec. Bayan	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
118	TK MAWAR PERTIWI	Kec. Bayan	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
119	TK PERTIWI POGUNGKALANGA	Kec. Bayan	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
120	TK PERTIWI KETIWIJAYAN	Kec. Bayan	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
121	TK MARDISIWI TANGKISAN	Kec. Bayan	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
122	TK SURYA INDAH	Kec. Bayan	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
123	TK PUTRO JOGORESAN	Kec. Bayan	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
124	TK IT ULUL ALBAB	Kec. Bayan	hibah uang	40.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
125	TK PRABASIWI	Kec. Bayan	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
126	TK SIWI BAYUN	Kec. Bayan	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
127	TK PERTIWI KALIMIRU	Kec. Bayan	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
128	TK PENDIDIKAN PRASETIYA B	Kec. Bayan	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
129	TK PKK	Kec. Bayan	hibah uang	27.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
130	TK MASYITHOH PUCANGAGUN	Kec. Bayan	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
131	TK MEKAR	Kec. Bayan	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
132	TK SETYARINI	Kec. Bayan	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
133	TK SIWI LOKA	Kec. Bayan	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
134	TK PERTIWI SAMBENG	Kec. Bayan	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
135	TK AISYIYAH	Kec. Bayan	hibah uang	24.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
136	TK PERTIWI DEWI	Kec. Bayan	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
137	TK DHARMA WANITA	Kec. Bayan	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
138	TK SRI PURNOMO MARSUDI SI	Kec. Bayan	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
139	TK TUNAS HARAPAN	Kec. Bayan	hibah uang	19.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
140	TPA Tunas Melati	Kec. Bayan	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
141	MEKAR ABADI	Kec. Bener	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
142	TUNAS MASYITOH	Kec. Bener	hibah uang	21.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
143	KB AL HIDAYAH	Kec. Bener	hibah uang	33.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
144	KB Madani	Kec. Bener	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
145	KB Tunas Muda	Kec. Bener	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
146	KB DARUL ULUM	Kec. Bener	hibah uang	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
147	KB BINA INSANI	Kec. Bener	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
148	KB Mutiara Hati Kalitapas	Kec. Bener	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
149	KB MUTIARA HIKMAH	Kec. Bener	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
150	KB AL HIKMAH	Kec. Bener	hibah uang	39.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
151	KB AL HUDA	Kec. Bener	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
152	KB GIRI PUSPITA	Kec. Bener	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
153	POS PAUD BUDI LUHUR	Kec. Bener	hibah uang	600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
154	POS PAUD TUNAS BANGSA	Kec. Bener	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
155	CAHAYA NUSA	Kec. Bener	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
156	TK WAHYU LESTARI KALIWADI	Kec. Bener	hibah uang	24.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
157	TK KUSUMA LIMBANGAN	Kec. Bener	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
158	TK KUNCUP MEKAR SUKOWU	Kec. Bener	hibah uang	19.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
159	TK PERTIWI KEDUNG PUCANG	Kec. Bener	hibah uang	43.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
160	TK KUNCUP MEKAR	Kec. Bener	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
161	TK PERTIWI SIDOSARI	Kec. Bener	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
162	TK MANDALA PURI BENOWO	Kec. Bener	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
163	TK AL HIDAYAH CACABAN LOR	Kec. Bener	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
164	TK LESTARI PERTIWI WADAS	Kec. Bener	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
165	TK SETIA BUDI SIDOMUKTI	Kec. Bener	hibah uang	21.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
166	TK SIWI ASIH KETOSARI	Kec. Bener	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
167	TK PERTIWI JATI	Kec. Bener	hibah uang	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
168	TK CAHAYA PEKACANGAN	Kec. Bener	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
169	TK TUNAS MELATI SENDANGS	Kec. Bener	hibah uang	20.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
170	TK PERTIWI	Kec. Bener	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
171	TK RAHAYU KALIURIP	Kec. Bener	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
172	TK MARDISIWI KALIBOTO	Kec. Bener	hibah uang	16.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
173	TK PERTIWI KARANGSARI	Kec. Bener	hibah uang	21.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
174	TK PERTIWI KALIJAMBE	Kec. Bener	hibah uang	20.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
175	TK MANDIRI	Kec. Bener	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
176	TK TUNAS ILMU GUNTUR	Kec. Bener	hibah uang	19.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
177	TK MELATI NGASINAN	Kec. Bener	hibah uang	21.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
178	TK ABA BENER	Kec. Bener	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
179	TK LESTARI BENER	Kec. Bener	hibah uang	37.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
180	TK SIWI PENI NGLARIS	Kec. Bener	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
181	KB KARTIKA SOMOLETER	Kec. Bruno	hibah uang	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
182	KB AN-NI MAH	Kec. Bruno	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
183	KB MENTARI	Kec. Bruno	hibah uang	20.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
184	KB ANNAJAH	Kec. Bruno	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
185	KB HARAPAN BANGSA	Kec. Bruno	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
186	KB CONDONGSARI	Kec. Bruno	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
187	KB PAUD MUTIARA PLIPIRAN	Kec. Bruno	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
188	KB LESTARI	Kec. Bruno	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
189	KB MRANGGI SIWI	Kec. Bruno	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
190	KB ANANDA	Kec. Bruno	hibah uang	17.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
191	POS PAUD TUNAS HARAPAN	Kec. Bruno	hibah uang	33.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
192	POS PAUD BUKIT CERIA	Kec. Bruno	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
193	POS PAUD PERMATA	Kec. Bruno	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
194	POS PAUD BINA HARAPAN BAN	Kec. Bruno	hibah uang	27.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
195	POS PAUD DWI KARTI	Kec. Bruno	hibah uang	16.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
196	POS PAUD BROJOWISNU	Kec. Bruno	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
197	POS PAUD TUNAS BANGSA	Kec. Bruno	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
198	TK ISLAM TERPADU BUSTANU	Kec. Bruno	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
199	TK ISLAM NURUL ANWAR AL A	Kec. Bruno	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
200	TK ABA KALIWUNGU	Kec. Bruno	hibah uang	28.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
201	TK AL HIDAYAH PAKISARUM	Kec. Bruno	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
202	TK Pertiwi 2 Cepedak	Kec. Bruno	hibah uang	19.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
203	TK LESTARI	Kec. Bruno	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
204	TK ARGOSARI	Kec. Bruno	hibah uang	17.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
205	TK MUTIARA	Kec. Bruno	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
206	TK ISLAM KARTINI	Kec. Bruno	hibah uang	27.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
207	TK PERTIWI CEPEDAK	Kec. Bruno	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
208	TK MARDISIWI BRUNOREJO	Kec. Bruno	hibah uang	22.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
209	TK WULANG SUNU KEMRANG(	Kec. Bruno	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
210	TK EKA BHAKTI	Kec. Bruno	hibah uang	21.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
211	TK SEKAR MELATI	Kec. Bruno	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
212	TK ARUM SIWI PAKISARUM	Kec. Bruno	hibah uang	22.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
213	TK CEMPAKA	Kec. Bruno	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
214	TK BROJOWISNU	Kec. Bruno	hibah uang	25.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
215	TK ABA Plipiran	Kec. Bruno	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
216	TK PERTIWI 3 CEPEDAK	Kec. Bruno	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
217	KB MAWAR	Kec. Butuh	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
218	KB Al Barokah	Kec. Butuh	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
219	KB SADEWA	Kec. Butuh	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
220	KB Kasih Ibu	Kec. Butuh	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
221	KB.CAHAYA BUNDA	Kec. Butuh	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
222	KB Sekar Arum	Kec. Butuh	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
223	KB KUNCUP MEKAR	Kec. Butuh	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
224	POS Paud Tunas Bangsa	Kec. Butuh	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
225	POS PAUD AL Furqon	Kec. Butuh	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
226	POS PAUD ROUDHOTUL WARI	Kec. Butuh	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
227	POS PAUD Karomah	Kec. Butuh	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
228	POS PAUD Hidayatul Mubtadiin	Kec. Butuh	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
229	POS Paud HI Mekar	Kec. Butuh	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
230	POS Paud Harapan Bunda	Kec. Butuh	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
231	POS PAUD Al-Murofiq	Kec. Butuh	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
232	POS Paud Kinasih	Kec. Butuh	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
233	POS PAUD KINANTI	Kec. Butuh	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
234	POS Paud Mutiara Bunda	Kec. Butuh	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
235	POS PAUD TUNAS JAYA	Kec. Butuh	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
236	TK RAHAYU	Kec. Butuh	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
237	TK SRIDADI	Kec. Butuh	hibah uang	3.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
238	TK KUNCUP MEKAR	Kec. Butuh	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
239	TK MEKAR	Kec. Butuh	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
240	TK ISLAM TERPADU ULUL ALB	Kec. Butuh	hibah uang	34.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
241	TK WIDODO	Kec. Butuh	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
242	TK RUKUN	Kec. Butuh	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
243	TK TRISULA III	Kec. Butuh	hibah uang	3.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
244	TK MEKARSARI	Kec. Butuh	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
245	TK PUSPITASARI	Kec. Butuh	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
246	TK TUNAS HARAPAN	Kec. Butuh	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
247	TK DHARMA BHAKTI	Kec. Butuh	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
248	TK KUNTHI	Kec. Butuh	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
249	TK PERINTIS	Kec. Butuh	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
250	TK MARDISIWI	Kec. Butuh	hibah uang	2.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
251	TK DWI RAHAYU	Kec. Butuh	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
252	TK GADING JAYA	Kec. Butuh	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
253	TK TERATAI INDAH	Kec. Butuh	hibah uang	16.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
254	TK LESTARI	Kec. Butuh	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
255	TK TUNAS MUDA	Kec. Butuh	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
256	TK MARDISIWI UTAMI	Kec. Butuh	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
257	TK IT ULUL ALBAB	Kec. Butuh	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
258	TK MADAH MULYA	Kec. Butuh	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
259	TK MARDI PUTRA	Kec. Butuh	hibah uang	22.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
260	TK PERTIWI	Kec. Butuh	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
261	KB BENSARI	Kec. Gebang	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
262	KB TUNAS PINTAR	Kec. Gebang	hibah uang	19.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
263	KB AISYIYAH GEBANG	Kec. Gebang	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
264	KB YOGA UTAMA	Kec. Gebang	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
265	MAJU MAKMUR	Kec. Gebang	hibah uang	22.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
266	KB AMONG PUTRO	Kec. Gebang	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
267	KB Telagasari	Kec. Gebang	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
268	KB TIARA	Kec. Gebang	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
269	HANDAYANI	Kec. Gebang	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
270	POS PAUD BINAYOGA	Kec. Gebang	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
271	POS PAUD TUNAS JAYA	Kec. Gebang	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
272	POS PAUD Melati	Kec. Gebang	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
273	LOKASARI	Kec. Gebang	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
274	POS PAUD KENARI	Kec. Gebang	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
275	POS PAUD As-Shibaa	Kec. Gebang	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
276	POS Paud Ceria	Kec. Gebang	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
277	PERMATA	Kec. Gebang	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
278	POS PAUD PERMATA HATI	Kec. Gebang	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
279	SPS AL IMAN	Kec. Gebang	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
280	POS PAUD MASITA	Kec. Gebang	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
281	POS PAUD HARAPAN BANGSA	Kec. Gebang	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
282	KARYA BAKTI	Kec. Gebang	hibah uang	24.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
283	TK ABA	Kec. Gebang	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
284	TK KENARI SEREN	Kec. Gebang	hibah uang	18.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
285	TK LKMD WINONG LOR	Kec. Gebang	hibah uang	21.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
286	TK DHARMA BAKTI LUGOSOB(	Kec. Gebang	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
287	TK GINTUNGAN	Kec. Gebang	hibah uang	21.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
288	TK MEKAR	Kec. Gebang	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
289	TK IT ASH-SHIDDIQIYYAH GIN	Kec. Gebang	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
290	TK BINAYOGA	Kec. Gebang	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
291	TK MARDI SIWI	Kec. Gebang	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
292	TK MASYITHOH	Kec. Gebang	hibah uang	29.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
293	TK ISLAM ASY SYAMS	Kec. Gebang	hibah uang	23.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
294	TK BUNAYA	Kec. Gebang	hibah uang	16.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
295	TK MASYITHOH REDIN	Kec. Gebang	hibah uang	52.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
296	TK SERUNI XII RENDENG	Kec. Gebang	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
297	TK TUNAS KARYA	Kec. Gebang	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
298	TK TUNGGUK RAHAYU	Kec. Gebang	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
299	TK TUNAS MUDA WINONG KID	Kec. Gebang	hibah uang	36.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
300	TK DHARMA SIWI PAKEM	Kec. Gebang	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
301	TK TRI BHAKTI NGEMPLAK	Kec. Gebang	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
302	TK TUNAS HARAPAN	Kec. Gebang	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
303	KB PELITA HATI	Kec. Grabag	hibah uang	18.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
304	KB Kasih Mulia	Kec. Grabag	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
305	KB Bina Insan	Kec. Grabag	hibah uang	25.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
306	KB KUNCUP MELATI	Kec. Grabag	hibah uang	26.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
307	KB HARAPAN BUNDA	Kec. Grabag	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
308	KB DHARMA BAKTI INDONESI	Kec. Grabag	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
309	KB BHAKTI SIWI	Kec. Grabag	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
310	KB BHAKTI PERTIWI	Kec. Grabag	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
311	KB ROUDLOTUL HIDAYAH	Kec. Grabag	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
312	KB Mutiara Gading	Kec. Grabag	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
313	KB Bintang Kejora	Kec. Grabag	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
314	KB AL IKHLAS	Kec. Grabag	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
315	KB MENUR HARAPAN BANGSA	Kec. Grabag	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
316	KB Putra Agung	Kec. Grabag	hibah uang	26.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
317	KB Surya Baku	Kec. Grabag	hibah uang	18.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
318	KB AL Muslimun	Kec. Grabag	hibah uang	23.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
319	KB RA Kartini	Kec. Grabag	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
320	KB NURUL HIDAYAH	Kec. Grabag	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
321	KB SETULUS HATI	Kec. Grabag	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
322	KB MUTIARA SELATAN	Kec. Grabag	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
323	POS PAUD Enggal Jaya	Kec. Grabag	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
324	POS PAUD KEMBANG SIH	Kec. Grabag	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
325	TK Wolojurutengah	Kec. Grabag	hibah uang	28.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
326	TK PERINTIS	Kec. Grabag	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
327	TK MARDISUNU	Kec. Grabag	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
328	TK ABA AL AMIN	Kec. Grabag	hibah uang	57.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
329	TK HARAPAN	Kec. Grabag	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
330	TK TUNAS HARAPAN	Kec. Grabag	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
331	TK TUNAS MELATI	Kec. Grabag	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
332	TK BERINGIN	Kec. Grabag	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
333	TK PAMARDISIWI 01	Kec. Grabag	hibah uang	22.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
334	TK MEKAR SARI	Kec. Grabag	hibah uang	25.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
335	TK TUNAS	Kec. Grabag	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
336	TK NUSA INDAH	Kec. Grabag	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
337	TK TERATAI PUTIH	Kec. Grabag	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
338	TK PELITA	Kec. Grabag	hibah uang	17.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
339	TK DHARMA BAKTI	Kec. Grabag	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
340	TK MAWAR PUTIH	Kec. Grabag	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
341	TK TRISAKTI	Kec. Grabag	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
342	TK BAKTI MULIA	Kec. Grabag	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
343	TK BUDI ASIH	Kec. Grabag	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
344	TK PAMARDISIWI 02	Kec. Grabag	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
345	KB LESTARI	Kec. Kaligesing	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
346	KB PERTIWI	Kec. Kaligesing	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
347	KB PERMATA BUNDA	Kec. Kaligesing	hibah uang	23.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
348	KB MARDI SIWI	Kec. Kaligesing	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
349	KB Harapan Bunda	Kec. Kaligesing	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
350	KB PERTIWI	Kec. Kaligesing	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
351	KB PELITA	Kec. Kaligesing	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
352	KB PURNAMA ASRI	Kec. Kaligesing	hibah uang	4.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
353	KB ANANDA	Kec. Kaligesing	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
354	KB NURUL FAJRI	Kec. Kaligesing	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
355	KB BUDI ASIH	Kec. Kaligesing	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
356	KB NGUDI LESTARI	Kec. Kaligesing	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
357	KB Kartini	Kec. Kaligesing	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
358	KB CERIA	Kec. Kaligesing	hibah uang	600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
359	KB TUNAS BANGSA	Kec. Kaligesing	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
360	KB KASIH	Kec. Kaligesing	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
361	KB Puspa Bangsa	Kec. Kaligesing	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
362	KB Cerdas Ceria I	Kec. Kaligesing	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
363	KB LESTARI	Kec. Kaligesing	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
364	KB CERDAS CERIA 2	Kec. Kaligesing	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
365	POS Paud Melati 1	Kec. Kaligesing	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
366	POS PAUD SAKINAH	Kec. Kaligesing	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
367	POS PAUD Budi Pertiwi	Kec. Kaligesing	hibah uang	600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
368	POS Paud Melati II	Kec. Kaligesing	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
369	POS Paud Citra	Kec. Kaligesing	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
370	POS Paud Permata Hati	Kec. Kaligesing	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
371	TK SIWI ASIH	Kec. Kaligesing	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
372	TK KUSUMA	Kec. Kaligesing	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
373	TK TUNAS MEKAR	Kec. Kaligesing	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
374	TK TUNAS HARAPAN	Kec. Kaligesing	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
375	TK HARAPAN KITA	Kec. Kaligesing	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
376	TK DONOREJO 01	Kec. Kaligesing	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
377	TK MEKAR SIWI 3	Kec. Kaligesing	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
378	TK PANDANREJO	Kec. Kaligesing	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
379	TK MEKAR SIWI 2	Kec. Kaligesing	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
380	TK RUKUN SARI	Kec. Kaligesing	hibah uang	4.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
381	TK JATIREJO	Kec. Kaligesing	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
382	TK MEKARSARI	Kec. Kaligesing	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
383	TK MEKARSIWI	Kec. Kaligesing	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
384	TK PUSPOSARI	Kec. Kaligesing	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
385	TK MELATI 01	Kec. Kaligesing	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
386	TK PAMARDISIWI	Kec. Kaligesing	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
387	TK MELATI 02	Kec. Kaligesing	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
388	TK DONOREJO 02	Kec. Kaligesing	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
389	TK LARAS BUDI	Kec. Kaligesing	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
390	TK MEKAR SIWI 1	Kec. Kaligesing	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
391	KB BHAKTI SIWI	Kec. Kemiri	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
392	KB MELATI	Kec. Kemiri	hibah uang	17.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
393	KB DESI GROUP	Kec. Kemiri	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
394	KB Bina Putra	Kec. Kemiri	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
395	KB AL-IKHLAS	Kec. Kemiri	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
396	KB Ar Rohmah	Kec. Kemiri	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
397	KB DARUL ULUM	Kec. Kemiri	hibah uang	19.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
398	KB AL-IKHSAN	Kec. Kemiri	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
399	KB AL-FIRDAUS	Kec. Kemiri	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
400	KB AISYIYAH	Kec. Kemiri	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
401	KB AL-BAROKAH	Kec. Kemiri	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
402	KB TERATAI	Kec. Kemiri	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
403	KB Islam Alifah	Kec. Kemiri	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
404	KB ANGGREK	Kec. Kemiri	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
405	KB AL-MUTTAQIN	Kec. Kemiri	hibah uang	27.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
406	KB AL-IMAN	Kec. Kemiri	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
407	KB ROUDHOTUL HUDA	Kec. Kemiri	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
408	KB BUSTANUL ARIFIN	Kec. Kemiri	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
409	KB SARROJA	Kec. Kemiri	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
410	KB HARAPAN IBU	Kec. Kemiri	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
411	POS PAUD Al Iman	Kec. Kemiri	hibah uang	22.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
412	POS PAUD CAHAYA BUNDA	Kec. Kemiri	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
413	POS PAUD AL AMIN	Kec. Kemiri	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
414	SPS NURUL ILMI	Kec. Kemiri	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
415	POS Paud Bintang Harapan	Kec. Kemiri	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
416	POS PAUD AN -NUR	Kec. Kemiri	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
417	POS PAUD MAWAR	Kec. Kemiri	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
418	POS PAUD KARTINI	Kec. Kemiri	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
419	POS PAUD MARDISIWI	Kec. Kemiri	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
420	POS PAUD MAHARDIKA	Kec. Kemiri	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
421	POS Paud Bakti Pertiwi	Kec. Kemiri	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
422	TK MARDISIWI REJOSARI	Kec. Kemiri	hibah uang	19.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
423	TK SATU ATAP	Kec. Kemiri	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
424	TK PERTIWI KEMIRI KIDUL	Kec. Kemiri	hibah uang	31.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
425	TK AL IMAN REJOWINANGUN	Kec. Kemiri	hibah uang	27.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
426	TK NURUL HIDAYAH KEMIRI L	Kec. Kemiri	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
427	TK AL HIKMAH	Kec. Kemiri	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
428	TK TUNAS BANGSA KEDUNGL	Kec. Kemiri	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
429	TK AL-FIRDAUS SUTORAGAN	Kec. Kemiri	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
430	TK BINA PUTRA ROWOBAYEM	Kec. Kemiri	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
431	TK AMELIA DILEM	Kec. Kemiri	hibah uang	22.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
432	TK AL IMAN GIRIMULYO	Kec. Kemiri	hibah uang	21.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
433	TK PERINTIS KROYOKULON	Kec. Kemiri	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
434	TK YOGATERATAI WONOSARI	Kec. Kemiri	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
435	TK MELATI KARANGDUWUR	Kec. Kemiri	hibah uang	16.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
436	TK TRI SIWI LONING	Kec. Kemiri	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
437	TK AISYIYAH KEMIRI KIDUL	Kec. Kemiri	hibah uang	52.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
438	TK AL-AMIN WINONG	Kec. Kemiri	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
439	TK BHAKTI SIWI	Kec. Kemiri	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
440	TK PELANGI	Kec. Kemiri	hibah uang	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
441	TK AZ ZAHRA	Kec. Kemiri	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
442	TK TUNAS MUDA	Kec. Kemiri	hibah uang	21.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
443	TK Sarroja	Kec. Kemiri	hibah uang	33.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
444	TK PUSPASARI KROYO LOR	Kec. Kemiri	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
445	TK MASYITOH KED POMAHAN	Kec. Kemiri	hibah uang	21.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
446	TPA Aisyiyah	Kec. Kemiri	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
447	TPA NUSA KEMIRI	Kec. Kemiri	hibah uang	78.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
448	TPA SARROJA	Kec. Kemiri	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
449	KB Kreatif Cahaya	Kec. Kutoarjo	hibah uang	21.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
450	KB SETIA BUDI	Kec. Kutoarjo	hibah uang	20.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
451	KB Inayah	Kec. Kutoarjo	hibah uang	23.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
452	KB MASYITHOH	Kec. Kutoarjo	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
453	KB CAHAYA HATI	Kec. Kutoarjo	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
454	KB AL-ARIF	Kec. Kutoarjo	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
455	KB Pius Bakti Utama	Kec. Kutoarjo	hibah uang	3.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
456	KB MASYITHOH	Kec. Kutoarjo	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
457	KB. MIFTAHUL ILMI	Kec. Kutoarjo	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
458	KB. AISYIYAH	Kec. Kutoarjo	hibah uang	41.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
459	POS PAUD NURUL ATHFAL	Kec. Kutoarjo	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
460	POS PAUD Kasih Bunda	Kec. Kutoarjo	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
461	POS PAUD SURYA HARAPAN	Kec. Kutoarjo	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
462	POS PAUD Cahaya	Kec. Kutoarjo	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
463	POS Paud Mekar Sari	Kec. Kutoarjo	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
464	POS Paud Mutiara Hati	Kec. Kutoarjo	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
465	POS PAUD SEKAR ARUM	Kec. Kutoarjo	hibah uang	17.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
466	POS PAUD Tri Lestari	Kec. Kutoarjo	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
467	POS PAUD Kuncup Mekar	Kec. Kutoarjo	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
468	POS PAUD PERMATA BUNDA	Kec. Kutoarjo	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
469	POS PAUD. KENCANA LOKA	Kec. Kutoarjo	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
470	POS PAUD LESTARI	Kec. Kutoarjo	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
471	TK LARASATI	Kec. Kutoarjo	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
472	TK NURUL ATHFAL	Kec. Kutoarjo	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
473	TK INDRIYA SANNA II	Kec. Kutoarjo	hibah uang	17.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
474	TK LESTARI II	Kec. Kutoarjo	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
475	TK LESTARI 1	Kec. Kutoarjo	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
476	TK DIAN LESTARI	Kec. Kutoarjo	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
477	TK MASYITHOH 2	Kec. Kutoarjo	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
478	TK IT ULUL ALBAB 5	Kec. Kutoarjo	hibah uang	50.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
479	TK HANDAYANI I	Kec. Kutoarjo	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
480	Tk Kartika	Kec. Kutoarjo	hibah uang	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
481	TK TRISULA I	Kec. Kutoarjo	hibah uang	18.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
482	TK MASYITHOH 1	Kec. Kutoarjo	hibah uang	21.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
483	TK KENCANA LOKA 1	Kec. Kutoarjo	hibah uang	32.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
484	TK NASIONAL	Kec. Kutoarjo	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
485	TK ABA I	Kec. Kutoarjo	hibah uang	70.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
486	TK MAHKOTA	Kec. Kutoarjo	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
487	TK MAWAR PUTIH	Kec. Kutoarjo	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
488	TKIT KHOIRU UMMAH	Kec. Kutoarjo	hibah uang	27.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
489	TK AISYIYAH 4	Kec. Kutoarjo	hibah uang	17.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
490	TK ABA II	Kec. Kutoarjo	hibah uang	27.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
491	TK TUNAS GAMA	Kec. Kutoarjo	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
492	TK YWKA	Kec. Kutoarjo	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
493	TK PAMARDIRINI	Kec. Kutoarjo	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
494	TK AL-ARIF	Kec. Kutoarjo	hibah uang	40.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
495	TK KUNCUP MEKAR	Kec. Kutoarjo	hibah uang	19.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
496	TK MEKAR SARI	Kec. Kutoarjo	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
497	TK TRISULA IV	Kec. Kutoarjo	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
498	TK PIUS BAKTI UTAMA	Kec. Kutoarjo	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
499	TK TUNAS BANGSA	Kec. Kutoarjo	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
500	TK NURUL IMAN	Kec. Kutoarjo	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
501	TK Aisyiyah 3	Kec. Kutoarjo	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
502	TK PALUPI	Kec. Kutoarjo	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
503	TK KENCANA LOKA 2	Kec. Kutoarjo	hibah uang	22.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
504	TK IT ULUL ALBAB 3 PURWOR	Kec. Kutoarjo	hibah uang	58.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
505	TK PERTIWI	Kec. Kutoarjo	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
506	KB TELADAN	Kec. Loano	hibah uang	23.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
507	KB TUNAS JAYA	Kec. Loano	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
508	KB BINA LESTARI	Kec. Loano	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
509	KB HIDAYATUL MUBTADI	Kec. Loano	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
510	KB Tunas Bangsa	Kec. Loano	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
511	KB BHAKTI PERTIWI	Kec. Loano	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
512	KB HANDAYANI	Kec. Loano	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
513	KB Permata Hati	Kec. Loano	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
514	KB Pamardi Putra	Kec. Loano	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
515	KB Harapan Bunda	Kec. Loano	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
516	KB BINA SIWI	Kec. Loano	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
517	KB HARAPAN IBU	Kec. Loano	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
518	POS PAUD TUNAS CENDEKIA	Kec. Loano	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
519	POS PAUD MELATI	Kec. Loano	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
520	POS PAUD MEKAR ABADI	Kec. Loano	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
521	POS PAUD FATAHILLAH	Kec. Loano	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
522	POS PAUD MUTIARA INSANI	Kec. Loano	hibah uang	16.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
523	POS PAUD TUNAS BANGSA	Kec. Loano	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
524	POS Paud Berlian	Kec. Loano	hibah uang	20.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
525	POS PAUD AL IMAN	Kec. Loano	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
526	TK SIWI UTOMO	Kec. Loano	hibah uang	36.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
527	TK RATNASIWI	Kec. Loano	hibah uang	25.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
528	TK HARDISIWI SEDAYU	Kec. Loano	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
529	TK SIWI ASIH	Kec. Loano	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
530	TK MARDISIWI	Kec. Loano	hibah uang	16.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
531	TK AL MAUNAH	Kec. Loano	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
532	TK TRI MARDISIWI TRIREJO	Kec. Loano	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
533	TK SIWI PENI	Kec. Loano	hibah uang	23.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
534	TK MASYITHOH GUYANGAN	Kec. Loano	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
535	TK KOLOPAKING	Kec. Loano	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
536	TK PAMARDI PUTRA	Kec. Loano	hibah uang	21.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
537	TK AS SAKINAH	Kec. Loano	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
538	TK KARYA LUHUR	Kec. Loano	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
539	TK KARTINI	Kec. Loano	hibah uang	22.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
540	TK TRI PENI	Kec. Loano	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
541	TK ABA	Kec. Loano	hibah uang	20.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
542	TK SIWISARI	Kec. Loano	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
543	TK MARDI SANTOSO	Kec. Loano	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
544	TK AL BAROKAH	Kec. Loano	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
545	KB Rahayu	Kec. Ngombol	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
546	KB Mutiara Islam	Kec. Ngombol	hibah uang	33.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
547	KB AL Huda	Kec. Ngombol	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
548	KB LESTARI	Kec. Ngombol	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
549	KB BUNGA HARAPAN	Kec. Ngombol	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
550	KB. PERMATA HATI	Kec. Ngombol	hibah uang	27.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
551	KB. AISYIYAH	Kec. Ngombol	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
552	KB Penyejuk Hati	Kec. Ngombol	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
553	POS PAUD INSAN CERDAS	Kec. Ngombol	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
554	POS PAUD Pelita Bangsa	Kec. Ngombol	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
555	POS Paud Wahyu Prasiwi	Kec. Ngombol	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
556	POS PAUD Pelita Harapan	Kec. Ngombol	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
557	POS PAUD HARAPAN BUNDA	Kec. Ngombol	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
558	POS PAUD LESTARI	Kec. Ngombol	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
559	POS PAUD Ceria	Kec. Ngombol	hibah uang	1.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
560	POS Paud Pangudi Luhur	Kec. Ngombol	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
561	POS PAUD HARAPAN BANGSA	Kec. Ngombol	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
562	POS PAUD Amalia	Kec. Ngombol	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
563	POS PAUD SUMBER WARAS	Kec. Ngombol	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
564	POS PAUD Anak Cerdas	Kec. Ngombol	hibah uang	4.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
565	POS PAUD MELATI	Kec. Ngombol	hibah uang	4.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
566	TK SRINI WONOBOYO	Kec. Ngombol	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
567	TK Permata Hati 2	Kec. Ngombol	hibah uang	22.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
568	TK SRINI	Kec. Ngombol	hibah uang	22.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
569	TK RAHAYU	Kec. Ngombol	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
570	TK PERTIWI BUKUR	Kec. Ngombol	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
571	TK ASRI	Kec. Ngombol	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
572	TK SRINI SINGKIL	Kec. Ngombol	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
573	TK PERTIWI JERUKEN	Kec. Ngombol	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
574	TK TAMAN PUTRA	Kec. Ngombol	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
575	TK KARTINI KALIWUNGU LOR	Kec. Ngombol	hibah uang	1.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
576	TK SUBUR	Kec. Ngombol	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
577	TK PERMATA HATI	Kec. Ngombol	hibah uang	95.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
578	TK KUNCUP MEKAR	Kec. Ngombol	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
579	TK SETYOWURI	Kec. Ngombol	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
580	TK SIWI MURNI	Kec. Ngombol	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
581	TK WAHYU SIWI	Kec. Ngombol	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
582	TK DHARMA PENI	Kec. Ngombol	hibah uang	3.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
583	TK MARDISIWI	Kec. Ngombol	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
584	TK SUSUK	Kec. Ngombol	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
585	TK ABA	Kec. Ngombol	hibah uang	15.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
586	TK KARTINI	Kec. Ngombol	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
587	TK GAYATRI	Kec. Ngombol	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
588	AL AZHAR	Kec. Ngombol	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
589	TK WIYATA SIWI	Kec. Ngombol	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
590	TK PERTIWI KEDONDONG	Kec. Ngombol	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
591	TK PUSPO RINI	Kec. Ngombol	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
592	TK INDRIA KUSUMA	Kec. Ngombol	hibah uang	16.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
593	TK PANTI SIWI	Kec. Ngombol	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
594	TK LESTARI	Kec. Ngombol	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
595	KB Bukit Rimba	Kec. Pituruh	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
596	KB DEWI SARTIKA	Kec. Pituruh	hibah uang	22.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
597	KB SINAR INDAH	Kec. Pituruh	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
598	KB DEWI SARTIKA	Kec. Pituruh	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
599	KB Harapan Bangsa	Kec. Pituruh	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
600	KB SEKAR ARUM	Kec. Pituruh	hibah uang	4.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
601	KB Lestari	Kec. Pituruh	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
602	KB TUNAS BANGSA	Kec. Pituruh	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
603	KB TUNAS RIMBA	Kec. Pituruh	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
604	KB Permata Hati	Kec. Pituruh	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
605	KB Pelita Hati	Kec. Pituruh	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
606	KB Al Falah	Kec. Pituruh	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
607	KB MUTIARA HATI	Kec. Pituruh	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
608	KB Qurrata Ayun	Kec. Pituruh	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
609	KB KARTINI	Kec. Pituruh	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
610	KB TUNAS HARAPAN	Kec. Pituruh	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
611	KB BHAKTI PERTIWI	Kec. Pituruh	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
612	KB AISYIYAH	Kec. Pituruh	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
613	KB TUNAS BANGSA	Kec. Pituruh	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
614	KB Tunas Bangsa Petuguran	Kec. Pituruh	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
615	POS PAUD ASSAKINAH	Kec. Pituruh	hibah uang	32.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
616	POS PAUD KELANA SARI	Kec. Pituruh	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
617	POS Paud Harapan Bangsa	Kec. Pituruh	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
618	POS Paud Permata Hati	Kec. Pituruh	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
619	PP KEMUNING	Kec. Pituruh	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
620	TPA AISYIYAH PITURUH	Kec. Pituruh	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
621	POS PAUD SEKAR ARUM	Kec. Pituruh	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
622	POS PAUD MARDISIWI	Kec. Pituruh	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
623	POS PAUD KARTINI	Kec. Pituruh	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
624	POS Paud Tunas Pertiwi	Kec. Pituruh	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
625	POS Paud Putra Kartini	Kec. Pituruh	hibah uang	17.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
626	POS PAUD KENANGA	Kec. Pituruh	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
627	POS Paud Kusuma	Kec. Pituruh	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
628	POS PAUD ANANDA BANGKIT	Kec. Pituruh	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
629	TK WIDORO	Kec. Pituruh	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
630	TK MARDISIWI TERSIDILOR	Kec. Pituruh	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
631	TK PUTRA BHAKTI	Kec. Pituruh	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
632	TK MARDI UTAMI	Kec. Pituruh	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
633	TK HANDAYANI KALIMATI	Kec. Pituruh	hibah uang	1.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
634	TK MEKAR	Kec. Pituruh	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
635	TK PKK MEGULUNG KIDUL	Kec. Pituruh	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
636	TK MARDISIWI	Kec. Pituruh	hibah uang	25.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
637	TK MELATI MEKAR	Kec. Pituruh	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
638	TK MARDISIWI PRIGELAN	Kec. Pituruh	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
639	TK BHAKTI IBU	Kec. Pituruh	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
640	TK PUTRA PERTIWI KENDALRE	Kec. Pituruh	hibah uang	16.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
641	TK MANDIRI SAWANGAN	Kec. Pituruh	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
642	TK MARDISIWI KALIKOTES	Kec. Pituruh	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
643	TK Aisyiyah	Kec. Pituruh	hibah uang	30.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
644	TK SIWI RAHAYU	Kec. Pituruh	hibah uang	15.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
645	TK TUNAS HARAPAN TUNJUNG	Kec. Pituruh	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
646	TK PUTRA KARTINI	Kec. Pituruh	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
647	TK MARDISIWI MEGULUNGLOI	Kec. Pituruh	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
648	TK DHARMASIWI	Kec. Pituruh	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
649	TK PERTIWI	Kec. Pituruh	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
650	KB Sekarsiwi	Kec. Purwodadi	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
651	KB KUNCUP MEKAR	Kec. Purwodadi	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
652	KB KUNCUP MELATI	Kec. Purwodadi	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
653	KB KUSUMA BANGSA	Kec. Purwodadi	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
654	KB MUTIARA BUNDA	Kec. Purwodadi	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
655	KB TUNAS BANGSA	Kec. Purwodadi	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
656	KELOMPOK BERMAIN AZ-ZAHI	Kec. Purwodadi	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
657	KB Aisyiyah	Kec. Purwodadi	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
658	KB HARAPAN BUNDA	Kec. Purwodadi	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
659	KB MUTIARA DESA	Kec. Purwodadi	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
660	POS Paud Puspa Mekar	Kec. Purwodadi	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
661	POS Paud Dian Ibu	Kec. Purwodadi	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
662	POS PAUD MULIA	Kec. Purwodadi	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
663	POS PAUD BINTANG KEJORA	Kec. Purwodadi	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
664	POS PAUD MAWAR	Kec. Purwodadi	hibah uang	4.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
665	POS PAUD SAYUK RUKUN	Kec. Purwodadi	hibah uang	1.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
666	Paud TPQ Al Mustaqim Tlogorej	Kec. Purwodadi	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
667	POS PAUD TUNAS JAYA	Kec. Purwodadi	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
668	POS PAUD PERMATA HATI	Kec. Purwodadi	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
669	POS PAUD Kartini	Kec. Purwodadi	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
670	POS PAUD GOTONG ROYONG	Kec. Purwodadi	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
671	POS PAUD ASSALAMAH	Kec. Purwodadi	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
672	POS PAUD ASUH ASIH	Kec. Purwodadi	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
673	POS Paud Budi Mulia	Kec. Purwodadi	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
674	POS PAUD HARAPAN BUNDA	Kec. Purwodadi	hibah uang	6.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
675	TPQ Al Mustaqim Karangmulyo	Kec. Purwodadi	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
676	TK ABA NAMPUREJO	Kec. Purwodadi	hibah uang	17.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
677	TK PUSPASIWI	Kec. Purwodadi	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
678	TK PUSPASARI	Kec. Purwodadi	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
679	TK PERTIWI	Kec. Purwodadi	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
680	TK TUNAS MEKAR	Kec. Purwodadi	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
681	TK PANGUDI LUHUR	Kec. Purwodadi	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
682	TK SERUNI VI	Kec. Purwodadi	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
683	TK PANTISIWI	Kec. Purwodadi	hibah uang	3.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
684	TK TUNAS MULYA	Kec. Purwodadi	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
685	TK SATU ATAP JOGOBOYO	Kec. Purwodadi	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
686	TK MASYITHOH GEPARANG	Kec. Purwodadi	hibah uang	22.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
687	TK KUNCUP TERATAI	Kec. Purwodadi	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
688	TK TERATAI	Kec. Purwodadi	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
689	TK DHARMA BAKTI INDONESIA	Kec. Purwodadi	hibah uang	32.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
690	TK PANTISIWI SUKOMANAH	Kec. Purwodadi	hibah uang	16.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
691	TK PAMBUDI UTOMO	Kec. Purwodadi	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
692	TK BINAMASQU	Kec. Purwodadi	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
693	TK MEKAR SARI JENAR WETAN	Kec. Purwodadi	hibah uang	20.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
694	TK PENDOWO	Kec. Purwodadi	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
695	TK WIYATA YOGA	Kec. Purwodadi	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
696	TK TUNAS HARAPAN SUMBERS	Kec. Purwodadi	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
697	TK CEMPAKA	Kec. Purwodadi	hibah uang	3.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
698	TK SERUNI IX	Kec. Purwodadi	hibah uang	20.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
699	TK SAADATUL AQOBAH	Kec. Purwodadi	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
700	TK ABA	Kec. Purwodadi	hibah uang	40.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
701	TK TUNJUNGSARI KESUGIHAN	Kec. Purwodadi	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
702	TK TUNAS KARYA	Kec. Purwodadi	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
703	KB MUTIARA IBU	Kec. Purworejo	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
704	KB Tunas Mulia	Kec. Purworejo	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
705	KELOMPOK BERMAIN KARTIKA	Kec. Purworejo	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
706	KB MUNAWAROH	Kec. Purworejo	hibah uang	19.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
707	KELOMPOK BERMAIN KEMALA	Kec. Purworejo	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
708	KB Qurrota Ayun	Kec. Purworejo	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
709	KELOMPOK BERMAIN BATIK P	Kec. Purworejo	hibah uang	18.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
710	KB Alfa Kids Pangenrejo	Kec. Purworejo	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
711	KB AISYIYAH	Kec. Purworejo	hibah uang	31.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
712	KB Aisyiyah Baledono	Kec. Purworejo	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
713	KELOMPOK BERMAIN MUMPU	Kec. Purworejo	hibah uang	18.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
714	KB Aisyiyah Tambakrejo	Kec. Purworejo	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
715	KB Anak Hebat El-Firdaus	Kec. Purworejo	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
716	KB FUN ISLAMIC SCHOOL	Kec. Purworejo	hibah uang	40.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
717	KELOMPOK BERMAIN AISYIYA	Kec. Purworejo	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
718	KB Seruni	Kec. Purworejo	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
719	KELOMPOK BERMAIN MARIA	Kec. Purworejo	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
720	POS PAUD MELATI	Kec. Purworejo	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
721	POS PAUD HANDAYANI	Kec. Purworejo	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
722	POS PAUD SHAFIRA	Kec. Purworejo	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
723	POS PAUD TPQ Al Hidayah	Kec. Purworejo	hibah uang	18.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
724	POS PAUD Tunas Harapan	Kec. Purworejo	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
725	POS Paud Ananda	Kec. Purworejo	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
726	TPQ PAUD Al Arifin	Kec. Purworejo	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
727	SPS MERPATI	Kec. Purworejo	hibah uang	3.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
728	POS Paud Tunas Bangsa	Kec. Purworejo	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
729	POS Paud Kartini	Kec. Purworejo	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
730	POS PAUD KEPODANG	Kec. Purworejo	hibah uang	12.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
731	POS PAUD BINA BUAH HATI	Kec. Purworejo	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
732	POS PAUD AMRIH LESTARI	Kec. Purworejo	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
733	POS PAUD SETYO UTAMI	Kec. Purworejo	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
734	POS Paud Arga Putra	Kec. Purworejo	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
735	POS PAUD DUNIA KECIL	Kec. Purworejo	hibah uang	36.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
736	POS PAUD MITRA BUNDA	Kec. Purworejo	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
737	PAUD AL-BADAWI	Kec. Purworejo	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
738	POS PAUD LESTARI	Kec. Purworejo	hibah uang	7.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
739	POS PAUD PURNAMASARI	Kec. Purworejo	hibah uang	7.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
740	SPS PERMATA	Kec. Purworejo	hibah uang	3.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
741	POS PAUD DEWI SARTIKA	Kec. Purworejo	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
742	SPS PERMATA BUNDA	Kec. Purworejo	hibah uang	9.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
743	POS PAUD AISYIYAH MELATI	Kec. Purworejo	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
744	TK LESTARI MUDAL	Kec. Purworejo	hibah uang	22.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
745	TK MARDISIWI	Kec. Purworejo	hibah uang	9.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
746	TK TUNAS HARAPAN	Kec. Purworejo	hibah uang	12.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
747	TK Mutiara Islam	Kec. Purworejo	hibah uang	18.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
748	TK AL-BADAWI	Kec. Purworejo	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
749	TK MARSUDI SIWI	Kec. Purworejo	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
750	TK HANDAYANI	Kec. Purworejo	hibah uang	27.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
751	TK IT ULUL ABAB 2	Kec. Purworejo	hibah uang	78.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
752	TK TUNAS HARAPAN	Kec. Purworejo	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
753	TK SIWI PENI	Kec. Purworejo	hibah uang	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
754	TK AL GIBRAN	Kec. Purworejo	hibah uang	24.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
755	TK ASSA`ADAH	Kec. Purworejo	hibah uang	30.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
756	TK TUNAS MEKAR	Kec. Purworejo	hibah uang	11.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
757	TK MARDI LUHUR	Kec. Purworejo	hibah uang	5.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
758	TK ABA 2	Kec. Purworejo	hibah uang	70.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
759	TK TULUS SIWI	Kec. Purworejo	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
760	TK ABA 1	Kec. Purworejo	hibah uang	57.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
761	TK MARIA	Kec. Purworejo	hibah uang	28.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
762	TK MASYITHOH I	Kec. Purworejo	hibah uang	37.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
763	TK PANGUDI LUHUR	Kec. Purworejo	hibah uang	32.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
764	TK ARTHA KENCANA	Kec. Purworejo	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
765	TK ABA 4	Kec. Purworejo	hibah uang	52.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
766	TK KUSUMA	Kec. Purworejo	hibah uang	4.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
767	TK KARTIKA IX-27	Kec. Purworejo	hibah uang	29.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
768	TK BATIK PERBAIK	Kec. Purworejo	hibah uang	77.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
769	TK TUNAS PERTIWI	Kec. Purworejo	hibah uang	10.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
770	TK AL MUKMINUN	Kec. Purworejo	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
771	TK KEMALA BHAYANGKARI 83	Kec. Purworejo	hibah uang	31.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
772	TK KARTIKA IX-28	Kec. Purworejo	hibah uang	27.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
773	TK SETYO AJI	Kec. Purworejo	hibah uang	31.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
774	TK WIYATA KARYA	Kec. Purworejo	hibah uang	10.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
775	TK KRISTEN SERUNI 1	Kec. Purworejo	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
776	TK ISLAM DARUL MUTTAQIN	Kec. Purworejo	hibah uang	34.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
777	TK MELATI	Kec. Purworejo	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
778	TK MUTIARA IBU	Kec. Purworejo	hibah uang	30.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
779	TK MASYITHOH 2	Kec. Purworejo	hibah uang	19.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
780	TK MASYITOH 3	Kec. Purworejo	hibah uang	43.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
781	TK ABA 3	Kec. Purworejo	hibah uang	14.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
782	TK TUNAS RIMBA	Kec. Purworejo	hibah uang	29.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
783	TPA AISYIYAH	Kec. Purworejo	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
784	TPA MUtiara Ibu	Kec. Purworejo	hibah uang	2.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
785	TPA IT ULUL ALBAB 2	Kec. Purworejo	hibah uang	13.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
786	TPA Az Zahra	Kec. Purworejo	hibah uang	13.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
787	TPA AISYIYAH BALEDONO	Kec. Purworejo	hibah uang	600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
788	TPA PRASETIYA BANGSA ISLAN	Kec. Purworejo	hibah uang	19.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
789	TPA AISYIYAH PANGEN	Kec. Purworejo	hibah uang	6.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
790	TPA ALFA KID S	Kec. Purworejo	hibah uang	8.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
	Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			**11.176.800.000**	
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD			**11.176.800.000**	
H	**1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan**				
1	**5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	PKBM SULTAN AGUNG	Kec. Loano	hibah uang	39.300.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	PKBM KHARISMA	Kec. Grabag	hibah uang	42.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	PKBM Yayasan Pesantren Tarekat Asy Syadziliyyah	Kec. Pituruh	hibah uang	79.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	PKBM TUNAS MEKAR AMAN	Kec. Kutoarjo	hibah uang	115.900.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	PKBM DIAN PUTRI WARINGIN JAYA	Kec. Bayan	hibah uang	46.500.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	PKBM SUNAN GESENG	Kec. Bagelen	hibah uang	39.600.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	PKBM SEKAR ARUM	Kec. Pituruh	hibah uang	426.400.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	PKBM LESTARI BRUNO	Kec. Bruno	hibah uang	19.800.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
9	PKBM MEKAR	Kec. Purworejo	hibah uang	539.601.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	PKBM SAWUNGGALING	Kec. Kutoarjo	hibah uang	372.599.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
11	PKBM PUJA KESUMA	Kec. Banyuurrip	hibah uang	5.200.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
Jumlah Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				**1.727.000.000**	
JUMLAH HIBAH PADA SUBKEGIATAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				**1.727.000.000**	
JUMLAH BELANJA HIBAH UANG PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**31.327.530.600**	
II	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWOREJO**				
A	**SUB KEGIATAN 8.01.04.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah**				
1	**5.1.05.05.002.00001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)	Jl. H Agus Salim No 10 Purworejo	Hibah Uang	100.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	DP KORPRI Kab. Purworejo	Jl. RAA. Tjokronegoro No.3 Purworejo	Hibah Uang	110.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)	Jl. Sarwo Edhi Wibowo No. 114 Purworejo	Hibah Uang	468.350.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ) Kab. Purworejo	Jl. H Agus Salim No 10 Purworejo	Hibah Uang	200.000.000	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				**878.350.000**	
2	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang mempunyai Surat Keterangan Terdaftar**				
1	MUSLIMAT NU Kec. Banyuurip	MUSLIMAT NU KEC. BANYUURIP Desa Tegalkuning, Banyuurip (Hj. Sumiyatun 0895414836093), Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena sudah mendapat hibah di tahun 2026 (PC Muslimat)
2	PAC. FATAYAT NU Kec. BUTUH	PAC FATAYAT NU KEC. BUTUH Dsn. Butuh Krajan RT 001 RW 001 Desa Butuh, Kecamatan Butuh Hp. 082315728582, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena sudah mendapat hibah di tahun 2026 (PC Fatayat)
3	JMQH Kab. Purworejo	Ponpes Lulu'il Qur'anil Maknun Snepo Blimbingan 002/012 Kelurahan Kutoarjo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
4	SATGAS PGRI Kec. Bruno	Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo , Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses
5	KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA (KPPI)	KAUKUS PEREMPUAN POLITIK INDONESIA (KPPI) JL. MAYJEND SUTOYO NO 5 KELURAHAN SINDURJAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses
6	MWC NU Kec. GRABAG	MWCNU KEC. GRABAG Jl. Kutoarjo-Ketawang KM.8 Desa Sangubanyu Kec. Grabag, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena sudah diberikan hibah ke PCNU (1 AHU)
7	PD PEMUDA MUHAMMADIYAH	Gang plaosan V no 10 RT 001 RW014, Kelurahan Purworejo, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan di luar dapil
8	CLUB Olaharga UJM	Baledono Krajan RT 003/ RW 008, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan di luar dapil
9	YAYASAN PUSAKA KARYA BANGSA	Yayasan Pusaka Karya Bangsa Desa Girigondo Kec Pituruh, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses dan AHU belum 3 tahun
10	PC HIMASAL	Pengurus Cabang "Himasal" Desa Paitan Kemiri Kec Kemiri, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses
11	LSM SURYA MENTARI SEMESTA	Perkumpulan LSM Surya Mentari Semesta Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan di luar dapil
12	BAMAGNAS	Jl. Raya Jogja KM 10 Dukuh Candi RT 02 RW 06 Jenar Wetan Kec. Purwodadi	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp 0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
13	MWC NU Kec. BAYAN	RT 03 RW 01 Desa Besole Kecamatan Bayan	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena sudah diberikan hibah ke PCNU (1 AHU)
14	MWC NU Kec. KALIGESING	Desa Ngaran Kec. Kaligesing	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena sudah diberikan hibah ke PCNU (1 AHU)
15	DPC WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (WKRI) Purworejo	Jl. Driyakarya No.1 Purworejo	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp 0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
16	PC NAHDLATUL ULAMA Kab. Purworejo	Jl. KH.M Zarkasi Kelurahan Lugosobo Purworejo	Hibah Uang	970.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
17	PD. DEWAN MASJID INDONESIA (DMI) KABUPATEN PURWOREJO	Jl. H. Agus Salim No. 10 Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena SK AHU baru terbit tanggal 7 Februari 2025 sehingga belum ada 3 Tahun
JUMLAH Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang mempunyai Surat Keterangan Terdaftar				**970.000.000**	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				**1.848.350.000**	
B	**SUB KEGIATAN 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**				**M+E1946:L1949emenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2026, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2026.**
1	FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) Kab. Purworejo	Jl. H Agus Salim No 10 Purworejo	Hibah Uang	262.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				**262.000.000**	
Jumlah pada Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
C	**SUB KEGIATAN 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah**				
1	Partai Kebangkitan Bangsa	Jl. Mayjen D.I Panjaitan Perum Mranti No. 58 Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo	Hibah Uang Kepada Partai Politik	209.758.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	Partai Gerindra	Jl. Pemotongan Hewan No. 15 Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	Hibah Uang Kepada Partai Politik	172.151.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jl. Ir. Juanda No. 19 Tegal Sari, Rt 06 Rw 02 Kelurahan Purworejo	Hibah Uang Kepada Partai Politik	321.923.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	Partai Golongan Karya	Jl. Kalikepuh No. 10 Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo	Hibah Uang Kepada Partai Politik	282.551.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	Partai NasDem	Jl. H. Agus Salim No. 58 Tegalsari Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo	Hibah Uang Kepada Partai Politik	119.868.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	Partai Keadilan Sejahtera	Jl. Gajah Mada Km. 5 Desa Candisari Kecamatan Banyuurip	Hibah Uang Kepada Partai Politik	101.608.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	Partai Persatuan Pembangunan	Jl. Mayjen D.I Panjaitan No. 209 Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo Kabupaten	Hibah Uang Kepada Partai Politik	103.694.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	Partai Amanat Nasional	Jl. Sibak (Perum SIBAK REGENCY NO. 1) Kelurahan Doplang Kec. Purworejo	Hibah Uang Kepada Partai Politik	39.970.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	Partai Demokrat	JL. Brigjen Katamso No 187 B Kelurahan Pangenrejo Kec. Purworejo	Hibah Uang Kepada Partai Politik	222.162.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				**1.573.687.500**	
JUMLAH HIBAH PADA PD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				**3.684.037.500**	
III	**SKPD DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**				
A	**SUB KEGIATAN 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kotarana Olahraga Kabupaten/Kota**				
1	**5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**				
1	BTTC Desa Kedungpucang	Desa Kedungpucang, Bener	Hibah Uang	100.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	RBM Desa Kalijambe	Desa Kalijambe, Bener	Hibah Uang	100.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	BSC Desa Kaliboto	Desa Kaliboto, Bener	Hibah Uang	200.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	Kodayo Volleyball Club Desa Kroyo	Desa Kodayo, Gebang	Hibah Uang	58.955.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	Pervog HPG Desa Grabag	Desa Grabag, Grabag	Hibah Uang	36.700.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	Mandiri Artistic Club Kel. Purworejo	Purworejo	Hibah Uang	45.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	Putra Radeksa Volly Ball Club	Desa Kaliurip, Kec. Kemiri	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp 0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
8	Karang Taruna Setia Bakti	Desa Kaligintung, Pituruh	Hibah Uang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
9	Karang Taruna Krido Mudo	Desa Jono, Bayan	Hibah Uang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
10	PS. Ras	Desa Brunorejo, Bruno	Hibah Uang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
11	Karang Taruna Indonesia Taruna Dharma	Desa Hulosobo, Kaligesing	Hibah Uang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
12	Karang Taruna Forkasi 1	Desa Sendangsari, Bener	Hibah Uang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
13	Karang Taruna Kharima Muda	Desa Wonosuko,Kemiri	Hibah Uang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar dan tidak ada dalam reses
14	Karang Taruna Tunas Muda	Desa Seren, Gebang	Hibah Uang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar dan tidak ada dalam reses
15	Karang Taruna Merpati	Kel. Pangenrejo, Purworejo	Hibah Uang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
16	Karang Taruna Desa Pandanrejo	Desa Pandanrejo, Kaligesing	Hibah Uang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar dan usulan di luar dapil
17	Karang Taruna Andesta	Desa Tasikmadu, Pituruh	Hibah Uang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
18	Karang Taruna Krida Muda	Desa Donorejo,Kaligesing	Hibah Uang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
19	KARANG TARUNA PETIR ROMO	Desa Plipiran, Bruno	Hibah Uang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
20	KARANG TARUNA BINA REMAJA	Desa Paitan, Kemiri	Hibah Uang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
	Jumlah Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia			**540.655.000,00**	
B	**SUB KEGIATAN 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait**				
1	**5.1.05.05.001.00001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Jl. WR Supratman No. 433 Cangkreplor, Purworejo	HIBAH UANG	2.000.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam Rancangan RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait				**2.000.000.000**	
C	**SUB KEGIATAN 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah**				
1	**Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Purworejo**				

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
	01 - Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Purworejo	Jalan Tentara Pelajar 230 Telpon (0275)32293 e-mail : kwarcappurworejo@ymail. Com PURWOREJO 54101	HIBAH UANG	350.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam Rancangan RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				**350.000.000**	
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				**2.890.655.000**	
IV	**DINAS KESEHATAN DAERAH**				
A	**SUB KEGIATAN 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya**				
1	**5.1.05.05.001.00001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	Palang Merah Indonesia Kabupaten Purworejo	Jalan Pemuda Nomor 24 Purworejo	Hibah Uang	200.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				**200.000.000**	
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KESEHATAN				**200.000.000,00**	
V	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**				
I.1	**SUB KEGIATAN2.16.02.2.01.0026 Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik**				
1	**5.1.05.05.001.00001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	LPPL Radio Irama FM	Jl. A. Yani Nomor 13 Purworejo	Hibah Uang	300.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
JUMLAH HIBAH PADA 2.16.02.2.01.0026 Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik				**300.000.000,00**	
JUMLAH HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN				**300.000.000,00**	
VI	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN**				
I.1	**2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha**				
1	**5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO	Jalan Kyai Brengkel 28 Purworejo	HIBAH UANG	50.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				**50.000.000,00**	
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				**50.000.000,00**	
VII	**SKPD SEKRETARIAT DAERAH**				
A	**4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual**				

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
1	**5.1.05.05.02.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	MUSHOLA NURUL KAFI	MUSHOLA "NURUL KAFI" DESA WATUDUWUR KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Uang	50.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	MUSHOLA AL HIDAYAH	Mushola Al Hidayah Dusun Trukan RT.02 / RW.03 Desa Grabag Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo	Hibah Uang	24.507.600	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	MASJID NURUL HUDA	BADAN KESEJAHTERAAN MASJID NURUL HUDA RT 01 RW 01 Desa Gesing Kec. Purwodadi 0882003657271, Kab. Purworejo	Hibah Uang	50.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	MASJID AL-IMAN	MASJID AL-IMAN DUSUN TLOGO RT 01 RW 03 Desa Tlogokotes Kec. Bagelen, Kab. Purworejo	Hibah Uang	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	MASJID AL-BAROKAH	MASJID AL-BAROKAH Dsn. Sembir RT 02 RW 01 Desa Somorejo Kec. Bagelen 081227270029, Kab. Purworejo	Hibah Uang	60.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	MUSHOLA ANNUR	MUSHOLA ANNUR Dusun Semayu RT 001 RW 002 Desa Kedungpomahan Wetan Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo	Hibah Uang	70.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	MUSHOLA AL-IBROHIM	MUSHOLLA “AL-IBROHIM" Rt 02 RW 04 Desa Cepedak Kecamatan Bruno No Tlp/Hp. 085229760199, Kab. Purworejo	Hibah Uang	26.220.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	MUSHOLA ROUDLATUL JANNAH	MUSHOLLA ROUDLATUL JANNAH RT 01 RW 07 KELURAHAN PANGENREJO KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Uang	100.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	MUSHOLA HIDAYATUL AMIN	MUSHOLLA HIDAYATUL AMIN Dsn. Ketepeng Rt 05 Rw 01, Desa Watuduwur, Kec. Bruno, Kab. Purworejo	Hibah Uang	30.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	MASJID AL-ISLAM	MASJID " AL-ISLAM " DESA JATI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Uang	50.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
11	MASJID AL MUAWANAH	MASJID AL MUAWANAH Dusun Krajan RT.02 RW.01 Desa Sokowaten Banyuurip (Mukhlas 085781239418), Kab. Purworejo	Hibah Uang	30.670.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
12	MASJID USWAH HASANAH	MASJID JAMI' USWAH HASANAH Dusun Tegalboto RT 02 R 01 Desa Tegalrejo, Kec Banyuurip, Kab. Purworejo	Hibah Uang	65.351.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
13	MUSHOLA DAARUNNAJAH	MUSHOLLA DAARUNNAJAH DESA PEJAGRAN KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Uang	35.388.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
14	MUSHOLA AL-FURQON	Mushola Al-Furqon Kampung Madyokusuman, Kelurahan Sindurjan, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang	35.096.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
15	MASJID BAITUSSYARIF	Masjid Baitussyarif, Desa Tegalsari, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang	30.321.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
16	MUSHOLLA BAITUL MUTTAQIN	MUSHOLLA BAITUL MUTTAQIN desa Winong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang	50.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
17	MUSHOLA AN-NUR	Mushola AN-NUR Dusun Sibentar Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing Pengusul Pupon, Kab. Purworejo	Hibah Uang	51.979.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
18	MASJID NUROH NASHIR AL-KHAMANI	Masjid Nuroh Nashir Al-Khamani Desa Patutrejo, Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo	Hibah Uang	100.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
19	GEREJA JEMAAT KRISTUS INDONESIA	Gereja Jamaat Kristus Indonesia Desa Tlogorejo RT.02/RW.02, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Uang	100.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
20	MUSHOLA AZ-ZAENUDDIN	Musholla Az-Zaenuddin Dusun Garagan RT.01/ RW.03 Desa Girigondo Kecamatan Pituruh, Kab. Purworejo	Hibah Uang	50.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
21	MASJID AL-IMAN	Masjid Al-Iman Desa Keponggok, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Uang	65.952.200	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
22	MUSHOLA AL-HUDA	Mushola Al-Huda Desa Kedungpomahan Wetan Kec Kemiri, Kab. Purworejo	Hibah Uang	100.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
23	MUSHOLA AL-FALAQ	Mushola Al-Falaq Dusun Kedungcuruq Rt 01 Rw 02 Desa Kedunggubah Kecamatan Kaligesing, Kab. Purworejo	Hibah Uang	40.102.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
24	MUSHOLA DARUSSALAM	MUSHOLA DARUSSALAM DESA KUNIR KECAMATAN BUTUH KABPUATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Uang	100.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
25	MUSHOLA AR-ROHMAH	MUSHOLA AR-ROHMAH Dusun Gunung Asem Rt 1/Rw 2Desa Banyuasin Separe, Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo (Ketua takmir Bapak Nur Chamid), Kab. Purworejo	Hibah Uang	25.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
26	MUSHOLA DA'IL FALAH	MUSHOLA DA'IL FALAH, rt 1/rw 3 Desa Limbangan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (Ketua Takmir Muhammad Sodiq), Kab. Purworejo	Hibah Uang	14.968.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
27	MUSHOLA NURUL IMAN	MUSHOLA NURUL IMAN, Dusun Jati Rt 03/Rw 03 Desa Nglaris Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (ketua takmir Agus Susiswo Heri S, S.IP No Hp 085228186402), Kab. Purworejo	Hibah Uang	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
28	MASJID AL-HUDA	MASJID AL-HUDA Dusun I RT 001/ RW 001, Desa Tlepokwetan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang	151.321.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
29	MASJID AT-TAQWA	MASJID AT-TAQWA Desa Salam Kec. Gebang, Kab. Purworejo	Hibah Uang	30.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
30	MUSHOLA AL-IKHLAS	MUSHOLA AL-IKHLAS RT 02 RW 01 Desa Ketosari Kec. Bener, Kab. Purworejo	Hibah Uang	50.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
31	MUSHOLA BAITUL HUDA	MUSHOLLA BAITUL HUDA Dusun Kebon RT 02 RW 01 Desa Benowo Kec. Bener, Kab. Purworejo	Hibah Uang	50.937.700	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
32	MUSHOLA BAITUL LATIF	MUSHOLA BAITUL LATIF Dusun Banaran RT 03 RW 03,Desa Ngasinan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang	43.674.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
33	MASJID AL HUDA	MASJID AL HUDA Dusun Kedung Agung RT 02/ RW 02, Desa Ketosari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang	70.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
34	MASJID BAITUL UMAR	MASJID BAITUL UMAR Dusun Krajan rt 06/ rw 1 Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo (ketua takmir Muhadi, S.Ag), Kab. Purworejo	Hibah Uang	21.325.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
35	MUSHOLA AL HIKMAH	MUSHOLA AL HIKMAH Desa Roworejo RT 002/ RW 002, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang	50.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
36	MUSHOLA DAARUSSALAAMAH	Mushola Daarussalaamah Desa Kuwurejo Kecamatan Kutoarjo, Kab. Purworejo	Hibah Uang	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
37	MASJID AR-ROHMAN	Masjid Ar-Rohman RT.04 / RW.01 Desa Tawangsari Kec Kaligesing, Kab. Purworejo	Hibah Uang	190.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
38	MASJID AL ANWAR	Masjid Al Anwar Dusun Tuk Sungo Desa Tlogoguwo Kec Kaligesing, Kab. Purworejo	Hibah Uang	30.026.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
39	MUSHOLA BAITUL AMININ	Mushola Baitul Aminin Dusun Krajan Rt,.01 RW.02, Desa Pucungroto, Kaligesing, Kab. Purworejo	Hibah Uang	50.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
40	MUSHOLA DARUL FALAH	Mushola Darul Falah Dusun Pesanggarahan RT.02/RW.01 Desa Ngasinan Kec. Bener, Kab. Purworejo	Hibah Uang	46.720.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
41	MUSHOLA AL MUTTAQIN	Mushola AL MUTTAQIN Krajan Wetan Desa Tlogosono rt 1/rw 1 Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo (ketua Tambah Sugiyanto), Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak termasuk dalam kamus pokir
42	MASJID AT TAQWA	Masjid At Taqwa Dusun Tegaliser Desa Kliwonan Kecamatan Banyuurip, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi
43	MASJID NURUL ISLAM	MASJID NURUL ISLAM RT 03 RW 01 Desa Sokoharjo Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena sudah mendapatkan hibah pada tahun 2026
44	MUSHOLA NURUL HUDA	MUSHOLA NURUL HUDA Dsn. Pandean RT 02 RW 03 Desa Suren Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi
45	MASJID AL-AMIN	Masjid Al-Amin Dusun Kalicebong Desa Dilem, Kecamatan Kemiri , Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi
46	MUSHOLA AL-IRSYAD	Mushola Al-Irsyad Dusun Gemelem Desa Kedungpomahan Wetan Kec. Kemiri, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi
47	MUSHOLA NURUL HUDA	Mushola Nurul Huda Desa cacaban Kidul Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi
48	MASJID AR-ROYAN	Masjid Ar Royan, Jl. Brigjen Katamso No. 195 , RT 1/RW 2 Boro Kulon, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi
49	MASJID AL-HUDA	MASJID AL-HUDA Dusun Kretek RT 02 RW 03 Desa Pacekelan Kec. Purworejo HP. 085647804757, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi
50	MUSHOLLA KI KOJOPATI DAN SAYID KAMUL	MUSHOLLA KI KOJOPATI SAYID KAMUL Lingkungan 1 Desa Tambakrejo Kecamatan Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi
51	MUSHOLLA NUR HUDA	MUSHOLLA NUR HUDA Dukuh Lor RT 03 RW 01 Desa Sidomulyo Kec. Purworejo , Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
52	MASJID BISALAMIN AMININ	Masjid Bisalamin Aminin, Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi
53	MASJID JAMI DAARUSHSHOLIHIN	MASJID JAMI' DAARUSH SHOLIHIN Jl. Krajan No.4 Kelurahan Baledono Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi
54	MASJID AL-HIKMAH	MASJID AL-HIKMAH, Dusun Katerban Rt 5/Rw 1 Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo (ketua takmir Muhasim), Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi
55	MASJID AL ISMAILIYAH	Masjid Al Ismailliyah Dusun Krajan Dukuh Carikan RT.001 / RW.001 Brunosari Kec. Bruno , Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi
56	MUSHOLA AR-ROFII	Mushola AR-ROFII Kajoran Kulon Desa Gowong 2025, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses/penjaringan aspirasi
57	MUSHOLA BAITUSSALAM	Mushola Baitussalam Dusun Karang wetan RT 03 RW 03 Desa Kalisemo Kecamatan Loano Ketua Maryadi No Hp 082226474127, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 tidak menyampaikan revisi/melengkapi proposal
58	MASJID SALAFIYYAH	MASJID "SALAFIYYAH" Rt 02 Rw 02 Desa Brunosari Kecamatan Bruno No Tlp/Hp. 085228429819, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
59	MASJID AL AMIN	MASJID AL AMIN Rt 03 Rw 06 Desa Brunosari Kecamatan Bruno No Tlp/Hp. 082227010269, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
60	MASJID SABILUL MUHTADIN	MASJID “SABILUL MUHTADIN" Rt 05 RW 03 Desa Tegalsari Kecamatan Bruno No Tlp/Hp. 082227447339, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
61	MUSHOLA AT-TAQWA	MUSHOLLA “AT-TAQWA" Rt 04 RW 01 Desa Pakisarum Kecamatan Bruno No Tlp/Hp. 082241438366, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
62	MASJID AS-SAHLIYAH	MASJID AS-SAHLIYAH Dukuh Keputihan RT 01 RW 04 Desa Brengkol Kecamatan Pituruh, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
63	MUSHOLA AL MUSLIM	Mushola Al Muslim Dusun Keposong RT 01 RW 01 Desa Ketosari Kecamatan Bener Ketua Busro No Hp 088980371714, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
64	MASJID AL-ICHWAN	Masjid Al-Ichwan Dusun Katisnan RT 02 RW 03 Desa Karangsari Kecamatan Bener Ketua Sutarno No Hp 082145649023, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
65	MUSHOLA AL-IMAN	Mushola Al-Iman Dusun Beru Manis RT 01 RW 04 Desa Kalisemo Kecamatan Loano Ketua H Harsidik Budi Prabowo No Hp 081328199580, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Memenuhi kriteria untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
66	Masjid Al Hikmah	Takmir Masjid Al Hikmah Desa Gunungwangi Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
67	Mushola Al Barokah	Panitia Pembangunan Mushola Al Barokah Gamlok Purbowono Rt 002 Rw001 Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
68	Masjid Nurul Hidayah	Panitia Pembangunan Masjid Nurul Hidayah Desa Kliwonan Kec Banyuurip	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
69	Masjid FATAMMAL CHAMID	Takmir Masjid FATAMMAL CHAMID Desa Kebongunung Kecamatan Loano	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
70	Mushola AL IKHLAS	Takmir Mushola AL IKHLAS Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
71	MASJID AL-BAROKAH	Takmir Dan Panitia Renovasi Masjid AL-BAROKAH Desa Banjarsari Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
72	Mushola AL Hidayah	Mushola AL Hidayah Ketiyudan Desa Rejosari Kecamatan Grabag	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
73	Musholla AL-IMAN	Musholla AL-IMAN Lingkungan II Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Purworejo	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
74	MASJID AL-IKHLAS	MASJID AL-IKHLAS DESA KESIDAN KEC. NGOMBOL	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
75	Masjid Nurul Huda	DESA PEJAGRAN KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
76	MUSHOLLA AR-RACHMAN	MUSHOLLA AR-RACHMAN DESA GRABAG KEC. GRABAG	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
77	Pondok Pesantren Nurul Mubaarok	Desa Kluwung Kecamatan Kemiri	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
78	Masjid Al-Iman	Desa Benowo Kecamatan Bener	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
79	Gereja Kasih Kristus Indonesia Jemaat Bukit Zion Somongari	Desa Sumongari Kecamatan Kaligesing	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
80	Gereja Kristen Jawa Jenar Geparang	Desa Jenar Wetan, Kecamatan Purwodadi	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
81	Mushola Darussalam	RT 1 RW 1 Desa Kertosono Kecamatan Banyuurip	Hibah Uang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
JUMLAH Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				**2.199.560.000**	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
1	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo	Jl. H. Agus Salim No. 10, Tegalsari, Kelurahan Purworejo, Kabupaten Purworejo	Hibah Uang	7.311.800.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
JUMLAH Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat				**7.311.800.000**	
JUMLAH SUB KEGIATAN 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				**9.511.360.000**	
JUMLAH HIBAH UANG				**47.963.583.100,00**	

Selanjutnya, berikut ini daftar calon penerima, alamat, dan besaran alokasi bantuan sosial barang yang diteriama Kabupaten Purworejo

PERTIMBANGAN TAPD TENTANG DAFTAR CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BARANG YANG DITERIMA KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
I	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**				
A	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	Sekolah Dasar Pius Bakti Utama	Sekolah Dasar Pius Bakti Utama Jalan Marditomo no.29 Kutoarjo, Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027. karena antara usulan dengan permasalahan tidak relevan, usulan tidak sesuai dengan permasalahan
2	Sekolah Dasar Pius Bakti Utama	SD Pius Bakti Utama Kec Kutoarjo, Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027. karena antara usulan dengan permasalahan tidak relevan, usulan tidak sesuai dengan permasalahan
3	Sekolah Dasar Pius Bakti Utama	Jalan Marditomo no.29 Kutoarjo, Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027. karena antara usulan dengan permasalahan tidak relevan, usulan tidak sesuai dengan permasalahan
JUMIAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				**-**	
B	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	MI AT-TAQWA DESA SENDANGSARI	DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO	Hibah barang	14.000.000,00	memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	MI NU KALIWUNGU	DESA KALIWUNGU KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
3	MI IMAM PURO CEPEDAK	DESA CEPEDAK KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
4	MI NU PANGERAN KAJORAN	DESA GOWONG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
5	MI MA'ARIF NU PLIPIRAN	DESA PLIPIRAN KECAMATAN PLIPIRAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
6	SD ISLAM 1 BALEDONO	Jl. Brigjen Wiyono No.12 Baledono RT 01 RW 09 Kec. Purworejo , Kab. Purworejo	Hibah barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak terdapat dalam data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
7	MI NU WATUDUWUR	DESA WATUDUWUR KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
8	MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH "HIDAYATUL INSAN" TEGES	DESA TEGALSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
9	MI GUPPI AT-TAQWA KALIWADER	Dusun Ngabean RT 04 RW 02 Desa Kaliwader Kec. Bener, Kab. Purworejo	Hibah barang	100.000.000	memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
Jumlah Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan				**114.000.000**	
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah				**114.000.000**	
C	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	MI IMAMPURO SUKOWUWUH	Sukowuwuh Kecamatan Bener, Kab. Purworejo	Hibah Barang	200.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	MI Imam Puro Dlangu	Desa Dlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak terdapat dalam data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
3	MI IMAM PURO BRENGGONG	Jl. Kaligesing KM.5 Desa Brenggong Kec. Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak terdapat dalam data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
4	SD PIUS BAKTI UTAMA	JALAN MARDITOMO NO.29 KUTOARJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak terdapat dalam data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi dan antara usulan dan permasalahan tidak relevan
5	SD PIUS BAKTI UTAMA	SD PIUS BAKTI UTAMA JALAN MARDITOMO NO.29 KUTOARJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.dan usulan dalam SIPD thanya mencantumkan alamat tanpa menyebutkan nama calon penerima
6	MI Salafiyah Wareng	Desa Wareng Kec. Butuh	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				**200.000.000,00**	
D	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
1	MTs Al Anshory	Jl. Sembaon KM 03, Desa Tulusrejo, RT 01 RW 01, Kec. Grabag, Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
2	MTs MA'ARIF NU BENER	JL. Tlogo Indah Rt 004 Rw 002 Ds Sidomukti Kec. Bener Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
3	MTs An Nawawi 04	Desa Donorejo, Kec. Kaligesing Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang				-	
E	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	SMP BRUDERAN	Jl. Prof. DR. N.Driyarkara3 Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				-	
F	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	TK Kartini	Desa Karangrejo RT 02/02, Kecamatan Loano	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
2	PAUD NUR HIKMAH Desa Bajangrejo	Desa Bajangrejo, Kecamatan Banyuurip	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
3	Pos PAUD Brojowisnu	Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				-	
G	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	RA Masyitoh Sucenjurutengah	Mentogaten Kidul, RT.1/2, Sucenjurutengah, Bayan	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
2	RA Al Iman	Desa Bulus Kecamatan gebang	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2042
JUMLAH HIBAH PADA PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru				-	
H	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	Kelompok Bermain Mranggi Siwi	Desa Kemranggen Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi dan proposal belum ada
2	RA AT-TAZKIYAH	Kalipuring RT.04/ RW.04 Desa Puspo Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo	Hibah Barang	**150.000.000,00**	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	Madin Hidayatul Mubtadi'ien	Desa Gowong RT 001/ RW 003, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak 'memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena antara usulan dengan permasalahan tidak relevan
4	RA KHASNU	Dusun Bambon RT 02 RW 05 Desa Sambeng Bayan. (Puji Astuti 0856263446), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
5	RA BANATUL MASYITOH	DESA MEGULUNG KIDUL, KEC. PITURUH, Kab. Purworejo	Hibah Barang	**200.000.000,00**	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				**350.000.000,00**	
I	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
1	TK. Perintis Kelurahan Kledungkarangdalem	Kelurahan Kledungkarangdalem Kecamatan banyuurip	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				-	
J	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	TK Borowetan	TK Borowetan, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang	24.500.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	TK PANCASILA SOKO	Kec. Bagelen . Desa Soko RT 01 RW 01 , Kab. Purworejo	Hibah Barang	21.500.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	POS PAUD MUTIARA ABADI	Dsn. Tepus RT 01 RW 05 Desa Somorejo Kec. Bagelen , Kab. Purworejo	Hibah Barang	22.646.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	KELOMPOK BERMAIN MELATI	RT 01 RW 01 Desa Durensari Kec. Bagelen (Ernawati 085292115007), Kab. Purworejo	Hibah Barang	23.150.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	TAMAN KANAK-KANAK WIDODO	DESA LUGUREJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	POS PAUD SEKAR ARUM	DESA SIDARUM KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	TK ISLAM TERPADU BUSTANUL FALAH	Dsn. Sigebang Rt 03 Rw 02 Gowog, Bruno HP. 081226419630, Kab. Purworejo	Hibah Barang	25.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	TK TUNAS HARAPAN	SUMBERSARI DESA SUMBERSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	TK Kuncup Mekar	Sukowuwuh Kec Bener, Kab. Purworejo	Hibah Barang	22.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	RAUDHATUL ATHFAL KUNTUM KUSUMA ANI YUDHOYONO	KELURAHAN SINDURJAN KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
11	KELOMPOK BERMAIN MUMPUNI	KELURAHAN PANGENJURUTENGAH KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
12	POS PAUD AL IMAN	DESA LOANO KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO,	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
13	KELOMPOK BERMAIN HIDAYATUL MUBTADI	DESA TRIREJO KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
14	KELOMPOK BERMAIN PUTRA	DESA MUDALREJO KECAMATAN LOANO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
15	TK Handayani	Desa kalimati Kecamatan Pituruh Ketua Sulastri S.Pd No Hp 082223272216, Kab. Purworejo	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
16	KELOMPOK BERMAIN “PERMATA HATI"	RT 03 RW 02 DESA POPONGAN KEC.BANYUURIP HP: 08986071504, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
17	POS PAUD PUTRA KARTINI	Desa Girigondo Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo (kepala sekolah Ibu Sumtriyanti Badiyah No Hp 082328136885), Kab. Purworejo	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
18	KB Mranggi Siwi	Dusun Sawahlor RT 01 RW 03, Desa Kemranggen, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo , Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
19	TK Melati Mekar	Desa Ngandagan RT 002 RW 001, Kec. pituruh, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
20	TK Mandiri	Desa Sawangan RT 002 RW 001, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
21	TK Tunas Muda	Desa Kerep RT 002 RW 002, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
22	KELOMPOK BERMAIN MEKAR ABADI	DESA MAYUNGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO HP. 085328141773, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
23	TK KENARI SEREN	DESA SEREN KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO HP. 085292237372, Kab. Purworejo	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
24	TK Tunas Harapan	Desa Sumbersari, Kecamatan purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
25	POS PAUD Gotong Rorong	Dusun Bapangan RT 003 RW 03, Kecamatan Bagelen , Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karenausulan dalam SIPD hanya mencantumkan alamat tanpa menyebutkan nama calon penerima
26	TK SETIA BUDI SIDOMUKTI	DUSUN KRAJAN 1 RT 03 RW 02 DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
27	TK MASYITHOH PUCANGAGUNG	Desa Pucangagung,Kec.Bayan HP :0853.2813.3183, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
28	Lembaga KB BAKTI PERTIWI,	Desa Rejosari Rt 2/Rw 2 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo (Kepala Sekolah Sujinah, S.Pd No Hp 088714487889), Kab. Purworejo	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
29	POS PAUD Tunas Jaya	Desa Kedungmulyo RT 03/ RW 02, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karenausulan dalam SIPD hanya mencantumkan alamat tanpa menyebutkan nama calon penerima
30	KB Sadewa	Desa Wonodadi RT 01/ RW 01, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karenausulan dalam SIPD hanya mencantumkan alamat tanpa menyebutkan nama calon penerima
31	PAUD Kusuma	Desa Luwenglor RT 002/ RW 002, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karenausulan dalam SIPD hanya mencantumkan alamat tanpa menyebutkan nama calon penerima
32	POS PAUD Tunas Pertiwi	Desa Megulung Kidul RT 002/ RW 002, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karenausulan dalam SIPD hanya mencantumkan alamat tanpa menyebutkan nama calon penerima
33	KB Condongsari	Dusun Karangsari RT 002 RW 003, Desa Gunung Condong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karenausulan dalam SIPD hanya mencantumkan alamat tanpa menyebutkan nama calon penerima
34	RA Masyithoh Gitombong	Dusun Kaligede RT 001/RW 002, Desa Giyombong, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karenausulan dalam SIPD hanya mencantumkan alamat tanpa menyebutkan nama calon penerima
35	TK ABA Kaliwungu	Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karenausulan dalam SIPD hanya mencantumkan alamat tanpa menyebutkan nama calon penerima
36	TK Pertiwi Cepedak	Dusun Munggangsari RT 004/ RW 004, Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karenausulan dalam SIPD hanya mencantumkan alamat tanpa menyebutkan nama calon penerima
37	TK Tunas Harapan Sumbersari	TK Tunas Harapan Sumbersari Desa Sumbersari Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena double usulan
38	Kelompok Bermain "Dewi Sartika"	Desa Kaligintung Kecamatan Pituruh, Kab. Purworejo	Hibah Barang	22.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
39	KB. TUNAS BANGSA	RT 01 RW 03 Desa Banjarsari Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
40	RA Al Muttaqin Ketosari	Dusun Puguh RT 003/ RW 002, Desa Ketosari, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan dalam SIPD hanya mencantumkan alamat tanpa menyebutkan nama calon penerima

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
41	POS PAUD LESTARI	DESA TEPUS KULON KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang	15.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
42	POS PAUD NURUL ATHFAL	DESA SOKOHARJO KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang	15.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
43	POS PAUD AISYIYAH MELATI JL PEJATEN	RT 01 RW 04 KELURAHAN KESENENG KECAMATAN PURWOREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi
44	TK Mekar	Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan, Kab. Purworejo	Hibah Barang	25.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
45	TK. TRI WALUYO ASI	DESA TEGALREJO RT 02 RW 02 KEC. BANYUURIP (Sumawari HP. 081229208848), Kab. Purworejo	Hibah Barang	30.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
46	POS PAUD CAHAYA	Dsn. Satu RT 03 RW 01 Desa Pacor Kec. Kutoarjo (Fulfah HP. 081225421100), Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Tahun 2026 sudah menerima hibah dari sumber yang sama
47	RA Asy Syakal Brenggong	Brenggong Rt 001 RW 004, Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan dalam SIPD hanya mencantumkan alamat tanpa menyebutkan nama calon penerima
48	SD Muhammadiyah Bruno	Desa Kaliwungu RT 001/ RW 001, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan data dukung hasil reses/penjaringan aspirasi dan tidak ada proposal
49	POS PAUD MELATI Desa Karangrejo Kec. Loano	Desa Karangrejo Kecamatan Loano	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
50	TK Tri Mardisiwi Trirejo Loano	Desa Trirejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo	Hibah Barang	20.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
51	KB Kartika Somoleter Bruno	Desa Somoleter Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Barang	22.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
52	PAUD KB Permata Hati Popongan	Desa Hati Kecamatan Popongan Kabupaten Purworejo	Hibah Barang	22.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
53	PP Assakinah Pituruh	Desa Assakinah Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo	Hibah Barang	22.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
54	PP Tunas Bangsa Butuh	Desa Bangsa Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo	Hibah Barang	22.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
55	TK Mahkota Kiangkog Kutoarjo	Desa Kiangkog Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Hibah Barang	22.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
56	TK Masyithoh Guyangan Loano	Desa Guyangan Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo	Hibah Barang	22.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
57	TK Melati Mekar Pituruh	Desa Mekar Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo	Hibah Barang	22.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
58	TK Tunas Harapan Kroya, Kec. Gebang	Harapan Kroya, KecamatKe Gebang	Hibah Barang	24.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
59	TK Wolojurutengah	Desa Nambangan Kecamatan Grabag	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
60	TK Brojowisnu	Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
61	RA KHODIJAH	Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
62	KB KUNCUP MEKAR	Desa Dlangu Rt 2 Rw 2 Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
63	TK Rindangkasih	Desa Candingasinan, Kecamatan Banyuurip	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
64	TK Taman Putra	Desa Wingko Tinumpuk Kecamatan Ngombol	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				**703.796.000,00**	
K	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	TK Mardiswi	Dusun Kaliboto Kulon RT 01 RW 04, Desa Kaliboto	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				-	
L	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**				

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	TK MARDISIWI	RT 001 RW 001 Desa Keburusan Kecamatan Pituruh , Kab. Purworejo	Hibah Barang	63.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	TK Mekar Sari Condong Sari	Condong Sari, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang	50.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	TK Pertiwi Mayungsari	Desa mayungsari Kecamatan Bener, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
4	KB Nur Hikmah	Desa Bajangrejo, Kecamatan Bayan, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
5	TK Masyitoh Kedungpomahan Wetan	Kedungpomahan Wetan Dusun Gemelem RT 001 RW 003 Desa Kedungpomahan Wetan Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo	Hibah Barang	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	TK Pertiwi	Desa Pogungkalangan, Kecamatan Bayan, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
7	TK MELATI NGASINAN	DESA NGASINAN KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	PAUD HI Mekar	Desa Kunir Kecamatan Butuh kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
9	KELOMPOK BERMAIN AL HIKMAH	DUSUN KRAJAN RT 004 RW 001 DESAKALIURIP KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO HP. 081229557737, Kab. Purworejo	Hibah Barang	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	RA Asy Syakal Brenggong	Brenggong Rt 001 RW 004, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
11	TK/PAUD Dunia Kecil	Jalan Singodranan No 11 RT 04 Rw 07 Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
12	POS PAUD ROUDHOTUL WARDAH	Dusun Krajan RT 001/ RW 003 Desa Ketug, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
13	TK Mardisiwi	Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
14	RA AT-Tazkiyah	Desa Puspo Kec Bruno, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
15	Kelompok Bermain Mranggi Siwi	Desa Kemranggen Kec Bruno, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
16	TK ABA Plipiran Bruno	Plipiran Bruno	Hibah Barang	144.270.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
17	TK Kolopaking	Desa Kalisemo Kecamatan Loano	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
18	TK Pertiwi	Desa Kedung Pucang Jl. Magelang KM 11 Kedung Pucang	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
19	TK Bina Siwi Clapar	Dusun Clapar Kidul RT 04 RW 01 Desa Clapar, Bagelen	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
20	TK Serbaguna	Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				**557.270.000,00**	
M	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
1	Madrasah Miftahul 'Ulum Bengkal	Desa Legetan, Kecamatan Bener	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
JUMLAH HIBAH PADA PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru				-	
N	**SUB KEGIATAN 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	MADRASAH DINIYYAH AL-IMAN	Desa Kalimeneng, Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo	Hibah Barang	150.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	TPQ Ishlahul Mubtadi-ien,	Desa Kroyo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena usulan dalam proposal untuk pembangunan kamar santri bukan ruang kelas
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				**150.000.000,00**	
0	**SUB KEGIATAN 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya**				
1	**5.1.05.05.001.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**				
1	Kelompok Kesenian Sakinatul Qolbi	Kelompok Kesenian Sakinatul Qolbi , Nggandek Rt 01 Rw 02 Desa Ketug Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo (Ketua Lailatunnurul Afifah No Hp 085848220355), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
2	Group Rebana Ar Rohmah	Group Rebana Ar Rohmah RW.03 Desa Pasaranom Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
3	Grup Kesenian IKSANJU	Grup Kesenian IKSANJU Desa Kedungmulyo Kecamatan Butuh, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
4	Grub Hadroh Hubbun Nabi	Grub Hadroh Hubbun Nabi Rt 1/rw 1 Dusun Mranti Desa Sukowuwuh Kecamatan Bener (ketua indah susanti No Hp 085643815362), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
5	KELOMPOK HADROH NUR HIDAYAH	KELOMPOK HADROH NUR HIDAYAH Dukuh Bakunglor Desa Kendalrejo, Kec. Pituruh, Telp. 081319232683, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
6	GRUP HADROH “SABILUNNAJAH"	GRUP HADROH “SABILUNNAJAH" Jl Winong – Girijoyo Km 4, Desa Girimulyo, Kec. Kemiri HP. 085287976856, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
7	GROUP REBANA NAILUL MUNA	GROUP REBANA NAILUL MUNA DESA ROWODADI MUNA KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
8	KELOMPOK KESENIAN HADROH DZIKRA NADA	KELOMPOK KESENIAN HADROH DZIKRA NADA DESA KALIWATUBUMI RT 003 RW 003 KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
9	GRUP HADROH NURIL MUBIN	GRUP HADROH NURIL MUBIN DESA KEDUNGMULYO RW 04 KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
10	KESENIAN KENCRENG " AL HASAN "	KESENIAN KENCRENG " AL HASAN " DUSUN PONCOLAN RT 02 RW 05 DESA SUREN KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
11	GROUP HADROH NURUL QOLBI	GROUP HADROH NURUL QOLBI Desa Pakem Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo (Ketua Uji Sulastri No Hp 081327695740), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
12	SENI HADROH DAN SHOLAWAT EL WAFA	SENI HADROH DAN SHOLAWAT EL WAFA Dusun Krendo rt 3 rw 3 Desa Legetan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (Ketua Siti Munawaroh No Hp 085227939443), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
13	GROUP HADROH MODERN "SABILUNNAJAH"	GROUP HADROH MODERN "SABILUNNAJAH" Rt 005 Rw 001 Desa Girigondo Kec Pituruh , Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
14	Kelompok An-nasukha	Kelompok An-nasukha Dusun Kaliboto Kulon RT 01 RW 04, Desa Kaliboto Kecamatan Bener Ketua Istiqomah No Hp 081320729483, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
15	GROUP KESENIAN KUBRO TRADISONAL " BUDI MULYO "	GROUP KESENIAN KUBRO TRADISONAL " BUDI MULYO " DESA KALIJAMBE KECAMATAN BENER, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
16	GROUP HADROH " AL-HIKMAH "	GROUP HADROH " AL-HIKMAH " DESA PENUNGKULAN KECAMATAN GEBANG KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
17	GROUP HADROH "HIDAYATUSH SHIBYAN"	GROUP HADROH "HIDAYATUSH SHIBYAN" DESA UKIRSARI RT 02 RW 01 KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
18	GROUP HADROH NURUL MAGHFIROH	GROUP HADROH NURUL MAGHFIROH, Desa Sukowuwuh Rt 2/Rw 3 Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (Ketua Sudarsi No Hp 081328106511), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
19	PAGUYUBAN SENI KUDA LUMPING “TURONGGO WULUNG"	PAGUYUBAN SENI KUDA LUMPING “TURONGGO WULUNG" Desa Bandungrejo, RT 02/ RW 03 Kec. Bayan (Budi Santoso 081227321657), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
20	GRUP HADROH “AL IRSYAD"	GRUP HADROH “AL IRSYAD" Desa Bandungrejo Kec. Bayan (Arjun 085328951661), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
21	KELOMPOK KESENIAN HADROH “HUBBUL QOLBI”	KELOMPOK KESENIAN HADROH “HUBBUL QOLBI” Dusun Popongan Kidul RT. 001 RW. 003, Desa Popongan Kec. Banyuurip (Sunarti 085293183008), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
22	GRUP HADROH AL-MAKSUM	GRUP HADROH AL-MAKSUM KELURAHAN SUCENJURUTENGAH RT 002 RW 001 KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
23	GROUP HADROH " QOLBU SYIFA "	GROUP HADROH " QOLBU SYIFA " KELURAHAN SUCENJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
24	GRUP SHOLAWATAN JAWA MASJID PERTAPAN TIBAN	GRUP SHOLAWATAN JAWA MASJID PERTAPAN TIBAN SUCENJURUTENGAH KELURAHAN SUCENJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
25	GRUP HADROH AR-ROHMAH KELURAHAN SUCENJURUTENGAH	GRUP HADROH AR-ROHMAH KELURAHAN SUCENJURUTENGAH RT 005 RW 001 KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
26	GROUP HADROH DEWI MASYITOH	GROUP HADROH DEWI MASYITOH DESA SUROREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
27	GROUP HADROH SENANDUNG KOLBU	GROUP HADROH SENANDUNG KOLBU DESA BANYUURIP KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
28	PAGUYUBAN MACAPATAN "SURYAWASESA"	PAGUYUBAN MACAPATAN "SURYAWASESA" DUKUH WETAN RT 01 RW 01 DESA BANYUURIP KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
29	Kelompok Kesenian Kuda Kepang Waris Utomo	Kelompok Kesenian Kuda Kepang Waris Utomo, Dusun Krajan Desa Gunung Condong Kecamatan bruno, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
30	GROUP HADROH AL MUBAROKAH	GROUP HADROH AL MUBAROKAH DESA SUMBERSARI KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
31	GROUP SHOLAWATAN " NURUL HIDAYAH"	GROUP SHOLAWATAN " NURUL HIDAYAH" DESA BANYUURIP KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
32	GRUP HADROH " TOMBO ATI "	GRUP HADROH " TOMBO ATI " DESA BENCOREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
33	GRUP SHOLAWATAN AL IMAN	GRUP SHOLAWATAN AL IMAN DESA REJOSARI KECAMATAN GRABAG, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
34	KELOMPOK HADROH " NURIL ABSHOR "	KELOMPOK HADROH " NURIL ABSHOR " DESA TANJUNGREJO KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
35	Grup Hadroh Raudotul Jannah	Grup Hadroh Raudotul Jannah, Dusun Pamriyan Desa Dilem, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
36	Grup Hadroh Az Zahra	Grup Hadroh Az Zahra Desa Girijoyo Kec. Kemiri, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
37	Grup Hadroh Gandrung Sholawat	Grup Hadroh Gandrung Sholawat Desa Girijoyo Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
38	Grup Hadroh Raudhotul Mustofa	Grup Hadroh Raudhotul Mustofa Desa Girijoyo Kecamatan Kemiri, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
39	KELOMPOK HADROH ”SITI MASITOH”	KELOMPOK HADROH ”SITI MASITOH” Masjid At-Taqwa Desa Wangunrejo, Kecamatan Banyuurip, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
40	GRUP HADROH SYAFA’ATUL UMMAH	GRUP HADROH SYAFA’ATUL UMMAH Dukuh Tegalboto Kulon RT 1 RW 1 Desa Tegalrejo, Kec. Banyuurip Hp. 085643194239, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
41	GROUP HADROH AZ ZAHRA	GROUP HADROH AZ ZAHRA Dusun Kembar RT 002 RW 003 Desa Tegalrejo Kecamatan Banyuurip Hp.0813 1041 5453, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
42	GRUP HADROH "SYIFAUL QULUB"	GRUP HADROH "SYIFAUL QULUB" Desa Ketiwijaya RT 002 RW 002 Bayan Hp. O89683095256 , Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
43	KELOMPOK KESENIAN " BERNADA "	KELOMPOK KESENIAN " BERNADA " DESA BANYUURIP KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
44	KOMUNITAS MUSIK YOUNG MAHATMA	KOMUNITAS MUSIK YOUNG MAHATMA KELURAHAN PANGENREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
45	GRUP SHOLAWATAN JAWA NURUL HUDA	GRUP SHOLAWATAN JAWA NURUL HUDA KELURAHAN SUCENJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO TLP.085-6921-2027, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
46	PAGUYUBAN SENI KUDA LUMPING "MARGO WALUYO"	PAGUYUBAN SENI KUDA LUMPING "MARGO WALUYO" DUSUN DUA RT 05 RW 06 DESA PEKUTAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO TELP. 085963977238/08231986966 , Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
47	GROUP HADROH "ASYIQOL MUTHOFA"	GROUP HADROH "ASYIQOL MUTHOFA" MUSHOLA AR RUQOYAH DUSUN DUA RT 005 RW 001 DESA PEKUTAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
48	GROUP SHOLAWAT TREBANG "BAITUL ABIDIN"	GROUP SHOLAWAT TREBANG "BAITUL ABIDIN" KELURAHAN SUCENJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
49	Grup Hadroh Al Fatah Desa Gunungcondong	Grup Hadroh Al Fatah Desa Gunungcondong RT 01/RW 05, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo , Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
50	GRUB SHOLAWAT JAWA BRONTON NABI	GRUB SHOLAWAT JAWA BRONTON NABI, Kelurahan Cangkrep Lor rt 3/rw 1 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo (ketua Bagiono No Hp 085929023979), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
51	Paguyuban Kesenian Kuda Lumping "Turonggo Mekar Arum"	Paguyuban Kesenian Kuda Lumping "Turonggo Mekar Arum" Desa Tegalsari Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
52	Grup Hadroh "Miftahul firdaus"	Grup Hadroh "Miftahul firdaus" Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
53	PAGUYUBAN KETHOPRAK LANGEN BUDOYO	PAGUYUBAN KETHOPRAK LANGEN BUDOYO DESA HULOSOBO KECAMATAN KALIGESING KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
54	GRUP REBANA SYAUQUN NADA	GRUP REBANA SYAUQUN NADA DESA WONOSARI KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO NO HP. 087863934710, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
55	GRUP HADROH KASYIFUL QUROOB	GRUP HADROH KASYIFUL QUROOB DESA TUMENGGUNGAN KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO NO HP. 085713652865, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
56	Kelompok Hadroh An-Nur	Kelompok Hadroh An-Nur Desa Jenarwetan Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
57	GROUP HADROH AS SYAFA'AT	GROUP HADROH AS SYAFA'AT Dsn. Krembeng RT 05 RW 02 Desa Hardimulyo Kec. Kaligesing HP. 085292496290, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
58	Kelompok Hadroh Hayatul Islamiyah	Kelompok Hadroh Hayatul Islamiyah Desa Somorejo Kecamatan Bagelen, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
59	GRUP REBANA ASYFA	GRUP REBANA ASYFA Dsn. Katerban RT 01 RW 01 Desa Donorejo Kec. Kaligesing HP. 085156592221, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
60	GRUP HADROH AL BAROKAH	GRUP HADROH AL BAROKAH KELURAHAN PANGENREJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
61	GRUP REBANA IFADATASSAMI	GRUP REBANA IFADATASSAMI DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO HP. 082326636436, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
62	GRUP HADROH ROUHOTUL JANNA	GRUP HADROH ROUHOTUL JANNA DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
63	GRUP HADROH MODERN MIFTAHUNNADA	GRUP HADROH MODERN MIFTAHUNNADA DESA SENDANGSARI RT 002 RW 001 KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO TELP. 0852 2977 6274, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
64	GRUP HADROH AL MAFTUH	GRUP HADROH AL MAFTUH KELURAHAN SUCENJURUTENGAH KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO , Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
65	Grup Hadroh "As-Syakinah"	Grup Hadroh "As-Syakinah" Desa Jenarwetan, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada proposal
66	Group Hadroh "Qurrotun Nada"	Group Hadroh "Qurrotun Nada" Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen , Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada proposal
67	Kuda Lumping Turonggo Sari	Kuda Lumping Turonggo Sari Desa Sendangsari, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena pemohon Pemerintah Desa bukan Grup Kesenian
68	GRUP HADROH AR ROHMAH	GRUP HADROH AR ROHMAH DESA SUMBERSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO HP. 085778203970, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
69	Masjid Rahmatan Lil Alamin Desa Tlogorejo, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo	Masjid Rahmatan Lil Alamin Desa Tlogorejo, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
70	TPQ Nuurul Ishlah Dusun Purwogondo	TPQ Nuurul Ishlah Dusun Purwogondo, Desa Purwosari, Kec.Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
71	Kelompok Seni Hadroh "Nur Hidayah"	Kelompok Seni Hadroh "Nur Hidayah" Desa Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada proposal
72	GRUP HADROH AL BAROKAH	GRUP HADROH AL BAROKAH DESA KALIWUNGUKIDUL KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
73	Sanggar Seni "Mardi Laras"	Sanggar Seni "Mardi Laras" Desa Seren Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
74	GROUP HADROH SABILITTAQWA	GROUP HADROH SABILITTAQWA RT 01 RW 04 Kel. Keseneng Purworejo (Ahmad Sujono HP. 08989270118), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
75	GRUP HADROH AL QAANITA NADA	GRUP HADROH AL QAANITA NADA Kel. Pangenrejo RT 02 RW 04 Kec. Purworejo (HP. 085640140823), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
76	HADROH NURUL QOLBI	HADROH NURUL QOLBI Dsn. Sibentar RT 01 RW 02 Desa Tlogoguwo Kec. Kaligesing , Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
77	GROUP HADROH MUSLIMAT NU RANTING BALEDONO	GROUP HADROH MUSLIMAT NU RANTING BALEDONO RT 06 RW 08 Kel. Baledono Purworejo (Hj. Fatihah HP. 089671315083), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
78	GROUP HADROH LA-TAHZAN	GROUP HADROH LA-TAHZAN RT 01 RW 01 Kel. Sindurjan Purworejo (Helmi HP. 08122755147), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
79	HADROH ZAHROTUL JANNAH	HADROH ZAHROTUL JANNAH RT 05 RW 01 Desa Ganggeng Kec. Purworejo , Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
80	GRUP HADROH SYIFA'UL QULUB	GRUP HADROH SYIFA'UL QULUB DESA TEGALREJO KECAMATAN BANYUURIP KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
81	GROUP REBANA SHOUTUL FATA	GROUP REBANA SHOUTUL FATA DESA BRUNOSARI KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
82	GRUP REBANA KHOIRUN NADA	GRUP REBANA KHOIRUN NADA DESA SENDANGSARI KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO 081215285932, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
83	GROUB HADROH NIDAUL FALAH	GROUB HADROH NIDAUL FALAH, Dusun Krajan Rt 2/rw 2 Desa Kaliglagah Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo (Ketua Jauhariyah No hp 085801208296), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
84	KELOMPOK HADROH AL-HUSNA	KELOMPOK HADROH AL-HUSNA, Desa Semawung Kecamatan Purworejo Kabupaten (ketua Rofiah No Hp 081392066977), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
85	Kelompok Hadroh "Miftahul Janah"	Kelompok Hadroh "Miftahul Janah" Desa Roworejo Kec.Grabag, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
86	Grup Hadroh Jamiatus Sholihah	Grup Hadroh Jamiatus Sholihah Desa Patutrejo Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
87	Grup Hadroh Syifaul Qolbi	Grup Hadroh Syifaul Qolbi Desa Trirejo Kecamatan Loano, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
88	Kelompok Purwosari Desa Pekacangan	Kelompok Purwosari Desa Pekacangan Kecamatan Bener, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
89	GROUP HADROH "AL IMAN"	GROUP HADROH "AL IMAN" KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN RT 03 RW 04 KECAMATAN KUTARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
90	GROUP HADROH "AN-NAJAH"	GROUP HADROH "AN-NAJAH" KELURAHAN SEMAWUNGDALEMAN RT 01 RW 05 KECAMATAN KUTOARJO KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
91	GROUP KASIDAH HIDAYATUNNISA	GROUP KASIDAH HIDAYATUNNISA KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN KABUPATEN PURWOREJO, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
92	HADROH AL FANAJA Ponpes Al-Fahham	HADROH AL FANAJA Ponpes Al-Fahham Jl. Baledono Krajan No.2 Baledono Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
93	GROUP KESENIAN KUBRO KREASI SISWO UTOMO	GROUP KESENIAN KUBRO KREASI SISWO UTOMO, Dusun Krandon Rt 1/Rw 4 Desa Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (ketua Muhajir No Hp 088229546735), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
94	PAGUYUBAN KESENIAN TRADISIONAL CAMPUR BUDOYO REWO-REWO	PAGUYUBAN KESENIAN TRADISIONAL CAMPUR BUDOYO REWO-REWO, Desa Redin, Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo (ketua widodo No hp 082314704403), Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
95	Grup Kesenian Iksanju Desa Kedungmulyo	Grup Kesenian Iksanju Desa Kedungmulyo Kecamatan Butuh, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena doubel usulan dengan no 3
96	Group Rebana Ar Rohmah	Group Rebana Ar Rohmah RW.03 Desa Pasaranom Kecamatan Grabag, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena doubel usulan dengan no 3

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
97	Grup Hadroh As Syakinah	Grup Hadroh As Syakinah Desa Jenarwetan Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
98	Grup Hadroh Qurrrotun Nada	Grup Hadroh Qurrrotun Nada Desa Bagelen Kecamatan Baegelen, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
99	TPQ Nuurul Ishlah Dusun Purwogondo	TPQ Nuurul Ishlah Dusun Purwogondo, Desa Purwosari, Kec.Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena doubel usulan dengan no 70
100	Kelompok Seni Hadroh" Nur Hidayah"	Kelompok Seni Hadroh" Nur Hidayah" Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
101	Alat Kesenian Kuda Lumping "Turonggo Sari	Alat Kesenian Kuda Lumping "Turonggo Sari Desa Sendangsari Kec.Purwodadi, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
102	Kelompok Pengajian "Khoirunisa"	Kelompok Pengajian "Khoirunisa" RW 4 dan RW O5 Desa Sidomulyo Kec Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
103	Masjid Al Mubtadiin Dusun Klesem Desa Kaligono	Masjid Al Mubtadiin Dusun Klesem Desa Kaligono Kec Kaligesing, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena belum ada proposal
104	Muslimat NU Desa Sidomulyo Kec Purworejo, Kab. Purworejo	Muslimat NU Desa Sidomulyo Kec Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
105	Kelompok Khairunnisa Kampung Tuk songo	Kelompok Khairunnisa Kampung Tuk songo Kec Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
106	Kelompok"Az zahro" Kelurahan Doplang	Kelompok"Az zahro" Kelurahan Doplang Kec Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
107	Group Hadroh Qurrota Ayun	Group Hadroh Qurrota Ayun RT.01 / RW.04 Desa Somongari Kec Kaligesing, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
108	Kelompok Kesenian Hadroh Manaqib santri dalan	Kelompok Kesenian Hadroh Manaqib santri dalan Pangenrejo RT.02 / RW.06, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
109	Kelompok Kesenian Hadroh "Fatimatus Zahro" TPQ Assyarif	Kelompok Kesenian Hadroh "Fatimatus Zahro" TPQ Assyarif Tegalsari RT,01 / RW.02 Purworejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
110	Grup Hadroh Nada Taqwa Sekar	Grup Hadroh Nada Taqwa Sekar Dusun Krajan Semawung, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
111	Kelompok Kesenian "Mahabbaturrosul Donorati	Kelompok Kesenian "Mahabbaturrosul Donorati RT.02/RW.02, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
112	Jamaah Sholawat Al Barzanji Firqotun najah	Jamaah Sholawat Al Barzanji Firqotun najah desa Donorejo, Kab. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat sesuai rekomendasi Dindikbud untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 namun karena adanya keterbatasan kemempuan keuangan daerah dan menjadi atensi KPK, maka diberikan rekomendasi sebesar Rp.0,-
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				**-**	
JUMLAH HIBAH BARANG PADA SKPD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN				**2.075.066.000**	
II	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO**				
A	**SUB KEGIATAN1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh**				
1	**5.1.05.05.003.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**				
1	POKMAS PAKUeMAS Kelurahan Sucenjurutengah	Kelurahan Sucenjurutengah RT 01 RW 01 , Kecamatan Bayan	Hibah Barang	197.967.660,00	memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	POKMAS PAKUeMAS Kelurahan Sindurjan	Kelurahan Sindurjan RT 003 RW 001, Kecamatan Purworejo	Hibah Barang	120.672.496,00	memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
3	POKMAS PAKUeMAS Kelurahan Cangkrep Kidul	Krajan, RT 002 RW 002 Kelurahan Cangkrep Kidul, Kecamatan Purworejo	Hibah Barang	317.317.098,00	memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	POKMAS PAKUeMAS Kelurahan Cangkreplor	Dusun Regonayan 1 RT 01 RW 03 Kelurahan Cangkreplor, Kecamatan Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp 0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
5	POKMAS PAKUeMAS Kelurahan Kledung Karangdalem	Jl. Majapahit 67 Kelurahan Kledung Karangdalem, Kecamatan Banyuurip	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Terdapat dokumen permohonan yang tidak direvisi dalam waktu yang telah ditentukan dalam Perbup Hibah Bansos
	PERENCANAAN			36.000.000,00	
	PENGAWASAN			27.000.000,00	
	AP HIBAH PAKUEMAS			45.000.000,00	
	JUMLAH HIBAH SUB KEGIATAN1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			**743.957.254,00**	
	JUMLAH HIBAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO			**743.957.254,00**	
III	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN**				
A	**SUB KEGIATAN 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan**				
1	**5.1.05.05.002.000 02 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**				
1	KELOMPOK BANK SAMPAH " JEBOR JAYA "	Desa Kiyangkongrejo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R	39.651.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	BANK SAMPAH BERSIH SEHAT	Kembang Arum RT 003 RW 010 Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R	39.651.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	Bank Sampah Karang Taruna Pokja III	Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena kelompok belum terbentuk
4	BANK SAMPAH " SURYA ABADI "	Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R	39.651.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	BANK SAMPAH " KEMUNING "	Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
6	BANK SAMPAH RESIK APIK	Desa Tunjungtejo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo (ketua Endah Ratnawati)	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R	39.651.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	BANK SAMPAH RESIK BECIK	Desa Tunjungtejo Rt 1/ Rw 2 Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo (ketua Utiyah)	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R	39.651.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	Bank Sampah Madyo Bakti Kp.Madyokusuman	Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena karena di SIPD tidak menyebut nama kelompok dan hanya alamat

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
9	BANK SAMPAH "WIJAYA KUSUMA"	Desa Hulosobo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R	39.651.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	Kelompok "Cipta Karsa"	Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R	39.651.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
11	Desa Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kab. Purworejo	Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena double input usulan pokiroleh pengusul
12	Rumah Daur Ulang Plastik Dauro	Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	Bantuan Mesin Pencacah Plastik di Pengelolaan Sampah Lanjutan	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena merupakan usaha perseorangan bukan nirlaba
13	Desa Tepus Kulon, Kab. Purworejo	Desa Tepus Kulon, Kab. Purworejo	Bantuan Mesin Pencacah Organik di Pengelolaan Sampah Lanjutan	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada proposal yang diupload di SIPD ataupun yang naik di Bupati
14	Bank Sampah Wonoyoso Asri	Desa Wonoyoso Kecamatan Pituruh	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
15	Bank Sampah Baledono Rw 007	Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo	Bantuan sarana bank sampah		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
16	Bank Sampah Gemah Ripah	Rw 09 Sebomenggalan Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo	Bantuan kendaraaan motor beroda tiga di pengelolaan sampah berbasis 3R/ Bank Sampah/ TPS3R		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
	AP HIBAH Sarana Pengelolaan Sampah			15.568.000,00	
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan			**293.125.000,00**	
B	**SUB KEGIATAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota**				
1	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN " NILAM SARI "	Dusun 01 Desa Gowong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Bantuan benih nila unggul	31.190.600,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	Kelompok Budidaya Ikan Mina Lestari	Dusun Katisnan RT 02 RW 03 Desa Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Ketua Muhammad Ircham No Hp 088232528697	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
3	Kelompok Budidaya Ikan Suto Makmur	Dusun Suto RT 02 RW 06 Desa Bener Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Ketua Salman No Hp 082135842856	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
4	Kelompok Budidaya Ikan Mina Ulam Sari	Dusun Simpu RT 02 RW 01 Desa Ketosari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Ketua Rizki Choirul Nurmuizan No Hp 082323911488	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
5	Kelompok Budidaya Ikan Jaman Mina Sentosa	Desa Kaliurip Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Ketua Mukh Basri No Hp 082133659433	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
6	Kelompok Budidaya Ikan Tunas Mulya	Dusun Saniten Rt.03 Rw.03 Desa Bener Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Ketua Edy Setyawan No Hp 081226434537	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
7	Kelompok Budidaya Ikan Citra Sari	Dusun Bendo RT 03 RW 03 Desa Kalijambe Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Ketua Hamam Faruq No Hp 081327104581	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
8	Kelompok Budidaya Ikan Bener Mina Jaya	Krajan RW 04 Desa Bener Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
9	Kelompok Budidaya Ikan Mina Mekar Abadi	RT 02 RW 04 Desa Kaliboto Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
10	Kelompok Budidaya Ikan Mina Sumber Makmur	Dusun Bandongan RT 03 RW 04 Desa Sendangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
11	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN " SUMBER MAJU REJEKI "	Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	35.727.200,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
12	KELOMPOK BUDIDAYA IKAN " MINA MAKMUR "	Desa Banyuurip Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	35.727.200,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
13	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN MAJU LANCAR	Dukuh Bambon RT 002 RW 005 Desa Sambeng Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo HP. 085292581053	Bantuan benih ikan lele unggul	35.727.200,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
14	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN "NGUDI REJEKI"	Desa Golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	35.727.200,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
15	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN "NGUDI REJEKI"	Desa Golok Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027, karena Kelompok sudah sama dengan nomor 14 (dobel input di SIPD pengusul)

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
16	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN "DADI MULYO"	Desa Jenar Lor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	Bantuan benih gurami unggul	33.680.600,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
17	Kelompok Pembudidaya Ikan "Mina Guron Sejahtera"	Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	35.727.200,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
18	Kelompok Budidaya Ikan "Mina Karya Sejahtera"	Kelurahan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	Bantuan benih gurami unggul	33.680.600,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
19	Kelompok Pembudidaya Ikan "Berkah Tirta"	Desa Kalijambe Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam data dukung reses/penjaringan aspirasi
20	KELOMPOK BUDIDAYA IKAN " MINA KRAJAN WETAN "	Desa Sendangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	35.727.200,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
21	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN "BERKAH MINA"	Kelurahan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pengajuan hibah tidak sesuai dengan dapil
22	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN " SITANJUNG MINA SEJAHTERA "	Kelurahan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena Pengajuan hibah tidak sesuai dengan dapil
23	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN "MINA RAHARJO"	Desa Kroyo Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	35.727.200,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
24	Kelompok Budidaya Ikan " Sari Rahayu"	Karangsari, Rt 001/Rw 003 Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	35.727.200,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
25	Pokdakan "Mina Sembada"	Desa Ngemplak Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo	Bantuan benih nila unggul	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam data dukung reses/penjaringan aspirasi
26	Kelompok Pembudidaya Ikan "Mina Mukti" Desa Kedungloteng, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Kab. Purworejo	Desa Kedungloteng Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Bantuan benih gurami unggul	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam data dukung reses/penjaringan aspirasi
27	Kelompok Pembudidaya Ikan " Sindurjan Mina Al Barokah"	Kelurahan Sindurjan Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	Bantuan benih nila unggul	31.190.600,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
28	KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN "ULAMSARI"	Brengkelan RT 01 RW 01 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	Bantuan benih ikan lele unggul	35.727.200,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
29	Kelompok Pembudidaya Ikan "Mina Tani"	Desa Sumbersari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	Bantuan benih gurami unggul	33.680.600,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
30	Kelompok Ternak Mudal Mulyo	Desa Mudalrejo Kecamatan Loano	Bantuan benih ikan nila unggul	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena keberadaan kelompoknya tidak jelas
31	Kelompok Pembudidaya Ikan Nur Mina Farm Botorejo	Desa Botorejo Kecamatan Bayan	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
32	Kelompok Wanita Tani Gemah Ripah	Desa Wingkosanggrahan Kecamatan Ngombol	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
33	Kelompok Pembudidaya Ikan Berkah Mina Farm	Desa Botodaleman Kecamatan Bayan	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
34	Kelompok Pembudidaya Ikan Mejing Mina Farm	Desa Botodaleman Kecamatan Bayan	Bantuan benih ikan lele unggul	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
	AP HIBAH Sarana Pembudidayaan Ikan			17.032.200,00	
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota				**502.000.000,00**	
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN				**795.125.000,00**	
IV	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**				
A	**SUB KEGIATAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**				
1	**5.1.05.05.002.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**				
1	KWT Kembangkates	Desa Wingkotinumpuk Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo	Hibah alat pengolahan pangan	14.373.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
2	KWT Dwi manunggal karya	Desa Karangedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah alat pengolahan pangan	33.513.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				**47.886.000,00**	
B	**SUB KEGIATAN 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian**				
1	**5.1.05.05.002.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**				
1	Kelompok Tani Wono Upoyo 2	Desa Wonotopo Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo	Bibit Hortikultura A	112.620.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
2	Kelompok Tani Maju Makmur	Desa Karangsari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Bibit Hortikultura A	112.620.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
3	Kelompok Wanita Tani Sari Rahayu	Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo	Bibit Jeruk Purut	26.440.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
4	Kelompok Tani Karya Tani I	Desa Tepangsari Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo	Bibit Kopi	41.680.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
5	Kelompok Tani Suko Mulyo	DesaSukowuwuh Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Bibit Kopi	41.680.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
6	Kelompok Tani Koper	Desa Rimun Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo	Bibit Kopi	41.680.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
7	Kelompok Tani Makmur	Desa Kaliurip Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Bibit Kopi	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
8	Kelompok Tani Karya Sakti	Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Bibit Kopi	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
9	Kelompok Tani Suko Makmur	Desa Sukowuwuh Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Bibit Kopi	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				**376.720.000,00**	
C	**SUB KEGIATAN 3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman**				
1	**5.1.05.05.002.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**				
1	Gapoktan Alam Jaya	Desa Seborokrapyak Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Kaligesing	63.221.300,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
2	Kelompok Tani Wanita Guyub Rukun	Desa Cepedak Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Kaligesing	63.221.300,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
3	Kelompok Tani Sido Mukti	Desa Sidomulyo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Kaligesing	63.221.300,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
4	Kelompok Tani Subur	Desa Sudogoro Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Kaligesing	63.221.300,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
5	Kelompok Tani Segaran Berkah	Desa Brunosari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Kaligesing	63.221.300,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
6	Kelompok Wanita Tani Manggis	Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Kaligesing	63.221.300,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
7	Kelompok Tani Sido Maju	Desa Purbowono Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Kaligesing	63.221.300,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
8	Kelompok Tani Nunggal Roso	Desa Tlogorejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Kaligesing	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena belum masuk SIMLUHTAN
9	Kelompok Tani Budidoyo Tani	Desa Brunorejo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Kaligesing	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena belum masuk SIMLUHTAN

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
10	Kelompok Wanita Tani Sembrodo	Desa Tlogoguwo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Kaligesing	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
11	Kelompok Tani Mekar Sari	Desa Jatirejo Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Kaligesing	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
	AP Hibah Ternak			4.998.000,00	
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			**447.547.100,00**	
D	**SUB KEGIATAN 3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain**				
1	**5.1.05.05.002.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**				
1	Kelompok Tani Mekar Sari	Desa Bajangrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Domba	38.531.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
2	Kelompok Tani Ngudi Makmur	Desa Bajangrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Domba	38.531.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
3	Kelompok Tani Ibnu Taslim	Desa Bagelen Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Domba	38.531.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
4	Kelompok Tani Banyuurip Maju Makmur	Desa Banyuurip Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Domba	38.531.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
5	Kelompok Tani Berkah Tani	Desa Pekutan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Domba	38.531.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
6	Kelompok Tani Ngudi Lestari	Desa Bajangrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Domba	38.531.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
7	Kelompok Tani Ketan Lusi	Kelurahan Kledungkradenan Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Domba	38.531.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
8	Kelompok Ternak Gapai Jaya Farm	Desa Kalinongko Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Domba	38.531.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
9	Kelompok Tani Tawangrejo	Kelurahan Keseneng Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Domba	38.531.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
10	Kelompok Tani Bumi Makmur	Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Domba	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan data dukung reses/hasil penjaringan aspirasi
11	Kelompok Petani Peternak Ngudi Mulyo	Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Domba	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tahun 2026 sudah mendapatkan hibah cultivator

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
12	Kelompok Tani Rejo Tani	Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Domba	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
13	Kelompok Tani Sumber Luhur III	Desa Sumbersari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
14	Kelompok Tani Budi Rahayu	Desa Kaliboto Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
15	Kelompok Tani Mataram Tani	Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
16	Kelompok Tani Juru Tani	Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
17	Kelompok Tani Mulyo Tani	Desa Gunung Condong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
18	Kelompok Tani Sri Wuluh	Desa Kedungpomahan Kulon Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
19	Kelompok Tani Sido Dadi	Desa Kroyo Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
20	Kelompok Tani Sido Rukun	Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
21	Kelompok Tani Tani Makmur	Desa Seren Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
22	Kelompok Wanita Tani Kenanga	Desa Pakisarum Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
23	Kelompok Wanita Tani Panceng Makmur	Desa Pakisarum Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
24	Kelompok Tani Argo Mulyo	Desa Pakisarum Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
25	Kelompok Wanita Tani Hikmah Fajar	Desa Pakisarum Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
26	Kelompok Tani Mawar	Desa Pakisarum Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	40.016.300	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
27	Kelompok Tani Serba Guna I	Desa Jenarwetan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan data dukung reses/hasil penjaringan aspirasi
28	Kelompok Tani Sumber Rejeki	Desa Gowong Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena dalam usulan pokir di SIPD tidak menyebut nama calon penerima hanya alamat saja

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
29	Kelompok Tani Sido Lancar	Desa Sidodadi Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan data dukung reses/hasil penjaringan aspirasi
30	Kelompok Tani Sido Langgeng	Desa Sidodadi Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan data dukung reses/hasil penjaringan aspirasi
31	Kelompok Tani Sido Maju	Desa Kalitengkek Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan data dukung reses/hasil penjaringan aspirasi
32	Kelompok Tani Karya Tani	Desa Kragilan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan data dukung reses/hasil penjaringan aspirasi
33	Kelompok Tani Mekar Sejati	Desa Jati Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan data dukung reses/hasil penjaringan aspirasi
34	Kelompok Wanita Tani Rarasawara Sukma	Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak menyebut nama calon penerima hanya alamat
35	Kelompok Tani Tani Maju	Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tahun 2026 sudah menerima hibah pompa
36	Kelompok Tani Sidodadi	Desa Kalirejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
37	Kelompok Tani Sri Makmur	Desa Jetis Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
38	Kelompok Wanita Tani Beringin	Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
39	Kelompok Tani Dua Lima Jaya II	Desa Kalinongko Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
40	Kelompok Wanita Tani Mutiara Fajar	Desa Pakisarum Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
41	Kelompok Tani Cempaka	Desa Pakisarum Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
42	Kelompok Tani Suko Makmur	Desa Pakisarum Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
43	Kelompok Tani Sri Rejeki	Desa Pakisarum Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
44	Kelompok Wanita Tani Anggrek	Desa Pakisarum Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Kambing Jawa Randu	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
45	Kelompok Tani Gading Paukir	Desa Ukirsari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
46	Kelompok Tani Amanah	Desa Kedungpucang Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	120.877.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
47	Kelompok Tani Ngudi Makmur	Desa Bleber Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	120.877.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
48	Kelompok Tani Sido Dadi	Desa Bener Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	120.877.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
49	Kelompok Tani Sido Maju	Desa Kemiri Kidul Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	120.877.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
50	Kelompok Tani Mandiri	Desa Cepedak Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	120.877.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
51	Kelompok Tani Argo Lestari	Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	120.877.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
52	Kelompok Tani Giat Tani	Desa Jelok Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	120.877.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
53	Kelompok Tani Mulyo Tani	Desa Tegalsari Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	120.877.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
54	Kelompok Tani Sedyo Rahayu 05	Desa Patutrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	120.877.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
55	Kelompok Tani Mukti Tani	Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	120.877.500	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027
56	Kelompok Tani Agung Barokah	Desa Ketosari Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mencantumkan nama calon penerima hibah hanya alamat saja
57	Kelompok Tani Joso Sentoso	Desa Joso Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan data dukung reses/hasil penjaringan aspirasi
58	Kelompok Tani Usaha Bersama	Desa Kesidan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan data dukung reses/hasil penjaringan aspirasi
59	Kelompok Tani Gondang Jaya	Desa Pakisarum Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
60	Kelompok Tani Somo Makmur	Desa Somoleter Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
61	Kelompok Tani Tondo Wujud I	Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Hibah Ternak Sapi	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
	AP Hibah Ternak			27.392.000	
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			**2.143.176.900,00**	
E	**SUB KEGIATAN 3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan**				
1	**5.1.05.05.002.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**				
1	Kelompok Tani Makmur	Desa Sendangsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	Pembangunan Rumah burung hantu	5.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 3.27.05.2.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			**5.000.000,00**	
F	**SUB KEGIATAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani**				

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
1	**5.1.05.05.002.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**				
1	Kelompok Tani Unggul Tani	Desa Roworejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	Kelompok Tani Patabu II	Desa Banyuurip Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	Kelompok Tani Patabu IV	Desa Banyuurip Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	Kelompok Tani Dewi Sri Tulus II	Desa Tulusrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	Kelompok Tani Tani Maju Satu	Desa Condongsari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	Kelompok Tani Werdi Dadi	Desa Pekutan Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	Kelompok Tani Setyo Manunggal	Desa Durensari Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	Kelompok Tani Rukun Tani	Desa Jogoresan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	Kelompok Tani Sehati	Desa Kalimiru Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	Kelompok Tani Sido Makmur	Desa Ngentak Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
11	Kelompok Tani Guyub Tani	Desa Jrakah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
12	Kelompok Tani Sumber Makmur	Desa Ngargosari Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
13	Kelompok Tani Sri Lestari	Desa Munggangsari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
14	Kelompok Tani Margo Mulyo	Kelurahan Kledung Karangdalem Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
15	Kelompok Tani Mekar Abadi	Desa Bringin Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
16	Kelompok Tani Lestari I	Desa Dudukulon Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
17	Kelompok Tani Argo Lestari II	Desa Kemranggen Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	150.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
18	Kelompok Tani Tani Jaya	Desa Wangunrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
19	Kelompok Tani Sido Mulyo	Desa Munggangsari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
20	Kelompok Tani Enggalrejo	Desa Lubanglor Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	200.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
21	Kelompok Tani Bangun Mulyo	Desa Dlangu Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	150.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
22	Kelompok Tani Sri Rejo II	Desa Gedong Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	150.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
23	Kelompok Tani Ngudi Barokah	Desa Cengkawakrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena merupakan jalan perkampungan
24	Kelompok Tani Juru Tengah	Desa Banyuurip Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 akrena merupakan jalan inspeksi sekunder
25	Pemerintah Desa Kertosono	Desa Kertosono Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan hasil reses/penjaringan aspirasi dan calon penerima bukan kelembagaan petani
26	Kelompok Tani Makmur Jaya	Desa Tegalrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena belum ada JUT eksisting
27	Kelompok Tani Berkah	Kelurahan Kledung Karangdalem Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 akrena merupakan jalan inspeksi sekunder
28	Kelompok Tani Cengkir Legi	Desa Kalimeneng Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan merupakan jalan desa
29	Kelompok Tani Sidorejo	Desa Kiyangkongrejo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan hasil reses/penjaringan aspirasi
30	Kelompok Tani Sri Wijaya	Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak menyebut nama calon penerima hibah
31	Kelompok Tani Arjuno	Desa Suren Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan merupakan jalan poros desa
32	Kelompok Tani Tunas Harapan	Desa Wonoyoso Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 akrena belum ada JUT eksisting
33	Kelompok Tani Manunggal Karyo	Desa Kalimeneng Kecamatan kemiri Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan hasil reses/penjaringan aspirasi dan merupakan jal;an poros desa

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
34	Kelompok Tani Sri Makmur	Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak menyebut nama calon penerima hibah
35	Gabungan Kelompok Tani Sido Makmur	Desa Sumbersari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan hasil reses/penjaringan aspirasi
36	Kelompok Tani Sidodadi	Desa Dudukulon Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan hasil reses/penjaringan aspirasi
37	Kelompok Tani Ngudi Tani	Desa Bener Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan hasil reses/penjaringan aspirasi
38	Kelompok Tani Sari Bumi	Desa Kedungmulyo Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak menyebut nama calon penerima hibah
39	Kelompok Tani Tondo Wujud 3	Desa Harjobinangun Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan hasil reses/penjaringan aspirasi
40	Kelompok Tani Guyub Rukun	Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan hasil reses/penjaringan aspirasi
41	Kelompok Tani Ratna Sari	Desa Tanjungrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak sesuai dengan hasil reses/penjaringan aspirasi
42	Kelompok Tani Maju Makmur	Desa Rowodadi Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
43	Kelompok Tani Subur Makmur	Desa Somoleter Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
44	Kelompok Tani Karya Tani II	Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
45	Kelompok Tani Tri Lestari	Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
46	Kelompok Tani Cereme Indah	Desa Bedono Pageron Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
47	Gapoktan Mitra Tani	Desa Bajangrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
48	Kelompok Tani Ngudi Mulyo	Desa Durensari Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
49	Kelompok Tani Kenanga Sari	Desa Kaliwungu Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
50	Kelompok Tani Ngudi Rahayu	Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
51	Kelompok Tani Tri Margo Mulyo V	Desa Trirejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
52	Kelompok Tani Sido Luhur	Desa Tunggorono Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
53	Kelompok Tani Sri Waluyo	Desa Pacor Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
54	Kelompok Tani Sido Makmur	Kelurahan Sucenjurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
55	Kelompok Tani Rukun Tani	Desa Kemirilor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
56	Kelompok Tani Subur Makmur	Desa Kaliurip Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
57	Kelompok Tani Rahayu	Kelurahan Sucen Jurutengah Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
58	Kelompok Tani Margo Rukun	Desa Tasikmadu Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
59	Kelompok Tani Tirtorejo	Desa Watuduwur Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
60	Kelompok Tani Tani Makmur	Desa Somorejo Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
61	Kelompok Tani Wono Rejo	Desa Puspo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
62	Kelompok Tani Sumber Rejeki	Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
63	Kelompok Tani Tani Maju	Desa Tegalrejo Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena belum ada JUT eksisting
64	Kelompok Tani Sido Makmur	Desa Kroyolor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan merupakan jalan desa
65	Kelompok Tani Tani Makmur	Desa Watuduwur Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	-	Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena belum ada JUT eksisting
66	Kelompok Tani Sido Makmur 3	Desa Gesikan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jalan Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				**2.550.000.000,00**	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
G	**SUB KEGIATAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani**				
1	**5.1.05.05.002.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**				
1	Kelompok Tani Sido Makmur I	Desa Plandi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	Kelompok Tani Maju Tani	Desa Blekatuk Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	Kelompok Tani Margo Raharjo	Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena lokasi bukan merupakan sawah tadah hujan melainkan sawah irigasi teknis
4	Kelompok Tani Bina Karya	Desa Mendiro Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena lokasi bukan merupakan sawah tadah hujan melainkan sawah irigasi teknis
5	Gabungan Kelompok Tani Manunggal	Desa Rowodadi Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 , usulan dalam sipd rehabilitasi jaringan irigasi tersier, dalam proposan usulan pembangunan jalan usaha tani
6	Kelompok Tani Sri Rahayu	Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena bukan saluran irigasi tersier.
7	Kelompok Tani Tani Rejo	Desa Kerep Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 akrena tidak sesuai dengan hasil reses/penjaringan aspirasi
8	Kelompok Tani Tani Makmur	Desa Kemiri Lor Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 akrena tidak sesuai dengan hasil reses/penjaringan aspirasi
9	Kelompok Tani Siblawong Sigenderan	Desa Wirun Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 akrena tidak sesuai dengan hasil reses/penjaringan aspirasi
10	Kelompok Tani Mekar Sakti	Desa Candi Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 akrena tidak sesuai dengan hasil reses/penjaringan aspirasi
11	Kelompok Tani Sri Bumi II	Desa Tunggulrejo Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak menyebut nama penerima, hanya alamat
12	Kelompok Tani Manggala Tani	Desa Megulunglor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
13	Kelompok Tani Sido Makmur	Desa Kiyangkongrejo Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
14	Kelompok Tani Sido Rahayu	Desa Sidomukti Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
15	Kelompok Tani Usaha Tani	Desa Paitan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
16	Kelompok Tani Makaryo	Desa Seren Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
17	Kelompok Tani Subur Makmur	Desa Kebondalem Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo	Pembangunan Jaringan Irigasi Usaha Tani	-	memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				**200.000.000,00**	
JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN				**5.770.330.000,00**	
V	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
A	**SUB KEGIATAN 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan**				
1	**5.1.05.05.002.00002 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Perundang-Undangan**				
1	BP-SPAMS TIRTA SARI	Desa Mayungsari Kec. Bener	Hibah Barang	1.365.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
	Perencanaan			15.240.000,00	
	Pengawasan			43.278.000,00	
	Administrasi Pekerjaan			26.482.000,00	
2	KP-SPAM TIRTO WENING	Desa Kedungpomahan Kulon Kec. Kemiri	Hibah Barang	400.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
	Perencanaan			15.240.000,00	
	Pengawasan			18.271.000,00	
	Administrasi Pekerjaan			16.489.000,00	
3	KPSPAMS TIRTA SARI BUMI	Desa Dilem Kecamatan Kemiri	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
	Perencanaan				
	Pengawasan				
	Administrasi Pekerjaan				
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan				**1.900.000.000,00**	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
B	**SUB KEGIATAN 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**				
1	**1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**			-	
	5.1.05.05.002.00002 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Perundang-Undangan				
	KP.SPAMS SUMBER BENING	Desa Sumber Kecamatan Pituruh	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
	Pengawasan				
	Administrasi Pekerjaan				
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			-	
C	**SUB KEGIATAN 1.03.03.2.01.0051 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat**				
	5.1.05.05.002.00002 02 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
1	KSM Jasuke Desa Sidoleren Kecamatan Gebang	Desa Sidoleren Kecamatan Gebang	Hibah Barang	400.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	KSM Plipiran Desa Plipiran Kecamatan Bruno	Desa Plipiran Kecamatan Bruno	Hibah Barang	400.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	KSM Al Fallah Desa Brondong Kecamatan Bruno	Desa Brondong Kecamatan Bruno	Hibah Barang	400.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	KSM Harapan Makmur Desa Blimbing Kecamatan Bruno	Desa Blimbing Kecamatan Bruno	Hibah Barang	400.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
	Perencanaan (4 lokasi)			77.295.000,00	
	Pengawasan (4 lokasi)			48.162.000,00	
5	KSM Teges Sehat Desa Gunungteges Kecamatan Kemiri	Desa Gunungteges Kecamatan Kemiri	Hibah Barang	400.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	KSM Desa Sutoragan Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri	Desa Sutoragan Kecamatan Kemiri	Hibah Barang	400.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	Pokmas Kelurahan Semawungkembaran Kelurahan Semawung Kembaran Kecamatan Kutoarjo	Kelurahan Semawungkembaran Kecamatan Kutoarjo	Hibah Barang	400.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	KSM Tumandang Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo	Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo	Hibah Barang	400.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	KSM Kelurahan Pangenjurutengah	Kelurahan Pangenjurutengah Kecamatan Purworejo	Hibah Barang	400.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
	Perencanaan (5 lokasi)			91.483.000,00	
	Pengawasan (5 lokasi)			57.045.000,00	
10	KSM Desa Limbangan Desa Limbangan Kecamatan Bener	Desa Limbangan Kecamatan Bener	Hibah Barang	400.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
11	KSM Guntur Desa Guntur Kecamatan Bener	Desa Guntur Kecamatan Bener	Hibah Barang	400.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
12	KSM Legowo Desa Winonglor Kecamatan Gebang	Desa Winonglor Kecamatan Gebang	Hibah Barang	240.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
13	KSM Sehat Santoso Desa Winongkidul Kecamatan Gebang	Desa Winongkidul Kecamatan Gebang	Hibah Barang	400.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
	Perencanaan (4 lokasi)			77.295.000,00	
	Pengawasan (4 lokasi)			48.162.000,00	
	Administrasi Pekerjaan (13 lokasi/paket)			70.900.000,00	
14	KSM Sumber Lancar Desa Cepedak Kecamatan Bruno	Desa Cepedak Kecamatan Bruno	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
15	KSM Baitunna'im Desa Brunorejo Kecamatan Bruno	Desa Brunorejo Kecamatan Bruno	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
16	KSM Rejo Desa Bendosari Kecamatan Gebang	Desa Bendosari Kecamatan Gebang	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
17	KSM Karunia Sejahtera Lestari Desa Kalitengkek Kecamatan Gebang	Desa Kalitengkek Kecamatan Gebang	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
18	KSM Desa Benowo Desa Benowo Kecamatan Bener	Desa Benowo Kecamatan Bener	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
19	Desa Pelutan Kecamatan Gebang	Desa Pelutan Kecamatan Gebang	Hibah Barang		Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak menyampaikan revisi proposal
	JUMLAH HIBAH PADA 1.03.03.2.01.0051 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			**5.510.342.000,00**	
D	**SUB KEGIATAN 1.03.08.2.01.0034 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**				
1	**5.1.05.01.002.00001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat**				
1	Renovasi Pagar Polres Purworejo	Jl. Gajah Mada 2 Purworejo	Hibah Barang	239.000.000,00	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
	Perencanaan			27.365.000,00	
	Pengawasan			18.271.000,00	
	Administrasi Pekerjaan			5.364.000,00	

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.03.08.2.01.0034 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			**290.000.000,00**	
E	**1.03.10.2.01.0055 Rehabilitasi Jalan**				
1	**5.1.05.01.002.00001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat**				
1	Penanganan Jalan Akses Kantor Polsek Bagelen	Jl. Gajah Mada 2 Purworejo	Hibah Barang	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
	Perencanaan				
	Pengawasan				
	Administrasi Pekerjaan				
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 1.03.08.2.01.0034 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			**-**	
	JUMLAH HIBAH PADA SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**7.700.342.000,00**	
VI	**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA**				
A	**SUB KEGIATAN 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kotarana Olahraga Kabupaten/Kota**				
1	**5.1.05.05.002.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**				
1	PSHT Ranting Kutoarjo	Kel. Kutoarjo, Kec. Kutoarjo	Hibah Barang	20.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	Elang Sakti Gambaran	Kel. Sindurjan, Kec. Purworejo	Hibah Barang	53.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	Purworejo Biliard Club	Kel. Purworejo, Kec. Purworejo	Hibah Barang	51.296.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	Padepokan Pencak Silat Tri Saka Indonesia	Kel. Cangkrepkidul, Kec. Purworejo	Hibah Barang	10.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	Padepokan Seni Bela Diri Yoga Buana Gagak Bagelen	Kel. Baledono, Kec. Purworejo	Hibah Barang	17.080.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
6	Padepokan Pencak Silat Cempaka Putih	Kel. Cangkreplor, Kec. Purworejo	Hibah Barang	10.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	Padepokan Pencak Silat Pancer Seto	Kel. Baledono, Kec. Purworejo	Hibah Barang	10.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	Perguruan Seni Bela Diri Pencak Silat Indonesia Tri Susila	Kel. Cangkrepkidul, Kec. Purworejo	Hibah Barang	10.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
9	Padepokan Pencak Silat Cakra Nusantara	Kel. Pangenjurutengah, Kec. Purworejo	Hibah Barang	10.000.000	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
10	Karangduwur FC	Desa Bedono Karangduwur, Kemiri	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
11	Tim Bola Voly Karangmalang Bruno	Desa Brunorejo, Bruno	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak menyebut nama calon penerima, hanya alamat
12	Voorjoners	Kel. Sindurjan, Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
13	Karang Taruna Bala Dw	Kel. Purworejo, Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
14	Asxho Cycling	Kel. Pangenjurutengah, Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar dan tidak ada dalam reses
15	Drift (Dewa Ruci Inline Freestyle Team)	Kel. Borokulon, Banyuurip	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses
16	Hardline Bmx Club	Kel. Kledung Karang Dalem, Banyuurip	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
17	Karang Taruna Pemuda Pemudi Rw 02	Desa Banyuasin Kembaran, Loano	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
18	Karang Taruna Tunggul Muda	Desa Tunggulrejo, Grabag	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
19	Karang Taruna Wira Bhakti	Desa Ngemplak, Gebang	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
20	Udin Jaya Motor	Kel. Baledono, Purworejo	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
21	Karang Taruna Tunas Harapan	Desa Girigondo, Pituruh	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
22	SSB Sawunggalih	Kel. Semawung Daleman, Kec. Kutoarjo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp 0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
23	SSB Zico FC	Kel. Purworejo, Kec. Purworejo	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp 0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
24	Klub North Wolf Esport	Kel. Borokulon, Kec. Banyuurip	Hibah Barang		Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp 0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
25	IPSI PURWOREJO	Desa Borowetan, Banyuurip	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena induk cabor sudah mendapatkan hibah dari KONI
26	KARANG TARUNA GALIH MULYO SEJATI	Desa Banjarsari, Purwodadi	Hibah Barang		Tidak memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak mendukung kinerja Dinporapar
	AP HIbah Sarana dan Prasarana Olahraga			Rp13.219.400,00	
Jumlah Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat				**Rp204.595.400,00**	
JUMLAH HIBAH PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA				**Rp204.595.400,00**	

VII DINAS KESEHATAN DAERAH

2	**1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksana an Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**				-
	5.1.05.05.002.00002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
1	Posyandu Membara, Pangenrejo	Kelurahah Pangenrejo	Posbindu Kit	3.623.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
2	Posyandu Rimbun, Pangenrejo	Kelurahah Pangenrejo	Posbindu Kit	3.623.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
3	Posyandu Rindang, Pangenrejo	Kelurahah Pangenrejo	Posbindu Kit	3.623.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
4	Posyandu Trubus, Pangenrejo	Kelurahah Pangenrejo	Posbindu Kit	3.623.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
5	Posyandu Terpadu, Jelok, Kaligesing	Desa Jelok, Kaligesing	Posbindu Kit	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena proposal tidak by name by addres
6	Posyandu Anggrek, Condongsari, Banyuurip	Condongsari, Banyuurip	Posbindu Kit	3.623.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
7	Posyandu Dahlia, Condongsari, Banyuurip	Condongsari, Banyuurip	Posbindu Kit	3.623.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
8	Posyandu Lestari, Sokowetan, Banyuurip	Sokowetan, Banyuurip	Posbindu Kit	3.623.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JENIS BARANG YANG AKAN DIBERIKAN	JUMLAH NILAI NOMINAL (Rp)	PERTIMBANGAN TAPD
9	Posyandu Kenanga, Cengkawakrejo, Banyuurip	Cengkawakrejo, Banyuurip	Posbindu Kit	3.623.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
10	Posyandu Mawar, Cengkawakrejo, Banyuurip	Cengkawakrejo, Banyuurip	Posbindu Kit	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
11	Posyandu Melati, Cengkawakrejo, Banyuurip	Cengkawakrejo, Banyuurip	Posbindu Kit	-	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 dengan nilai Rp0,00. Apabila ada tambahan kemampuan keuangan daerah dibahas kembali bersama DPRD dalam forum rapat pembahasan APBD TA 2027
12	Posyandu Cempaka, Cengkawakrejo, Banyuurip	Cengkawakrejo, Banyuurip	Posbindu Kit	3.623.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
13	Posyandu Aman Sehat Sejahtera, Desa Jrakah, Kecamatan Bayan	Jrakah, Bayan	Posbindu Kit	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena proposal tidak by name by addres
14	Posyandu Desa Bapangsari, Bagelen	Desa Bapangsari Bagelen	Posbindu Kit	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena proposal tidak by name by addres
15	Posyandu Anggrek 2 Kelurahan Keseneng	Keseneng, Purworejo	Posbindu Kit	-	Tidak Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027 karena tidak ada dalam reses
16	Posyandu Gutub Rukun 1 Desa Karangluas Kec Kemiri	Desa Karangluas, Kemiri	Posbindu Kit	3.623.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
16	Posyandu Gutub Rukun 2 Desa Karangluas Kec Kemiri	Desa Karangluas, Kemiri	Posbindu Kit	3.623.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
17	Posyandu Desa Sambeng, Kecamatan Pituruh	Desa sambeng, Pituruh	Posbindu Kit	3.623.400	Memenuhi syarat untuk dicantumkan alokasi anggaran hibah dalam RKPD Tahun 2027, Rancangan KUA dan PPAS T.A. 2027.
	Jumlah hibah pada sub kegiatan 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksana an Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			**43.480.800**	-
JUMLAH HIBAH PADA DINAS KESEHATAN DAERAH				**Rp43.480.800,00**	
JUMLAH HIBAH BARANG				**Rp17.332.896.454,00**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diperlukan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menjadi tolok ukur utama pencapaian visi dan misi, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu parameter yang dibentuk untuk mengetahui keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi yang berfungsi untuk memperoleh informasi kinerja yang dinilai penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja serta ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis.

IKU berfungsi untuk memperoleh informasi kinerja yang dinilai penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis. Kedua fungsi tersebut dapat digunakan untuk evaluasi dalam rangka memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dimana aspek akuntabilitas kinerja ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran pada tahun tertentu.

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun IKU Daerah yang menjabarkan indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.1. Target Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	36,98**	Tujuan Daerah
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,06*	Tujuan Daerah
3	Rasio Gini	Angka	0,296**	Tujuan Daerah
4	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,88	Tujuan Daerah
5	Indeks Religiusitas Daerah	Angka	83,04	Tujuan Daerah
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76,73*	Sasaran Daerah
7	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	53,95	Sasaran Daerah
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,13	Sasaran Daerah
9	Indeks Risiko Bencana	Angka	86,43**	Sasaran Daerah
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40*	Sasaran Daerah
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	2,93	Sasaran Daerah
12	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	72,83***	Sasaran Daerah
13	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,89**	Sasaran Daerah
14	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	72,89	Sasaran Daerah
15	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,8	Sasaran Daerah

Keterangan:
**Hasil Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah, diolah*
***Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2025*
****Sesuai Surat Kepala Bappeda Prov. Jawa Tengah No. 500.1/ 139/ 2026 tanggal 12 Mei 2026*
Sumber: RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2025-2029, dianalisis

Kabupaten Purworejo memiliki 15 (lima belas) IKU Daerah yang termasuk dalam indikator tujuan daerah (5) dan indikator sasaran daerah (10). Penyusunan target IKU Daerah pada tahun 2027 ini mendasari RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 tahun pelaksanaan 2025.

6.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) terbagi ke dalam empat aspek: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Selanjutnya, target IKD dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2027 disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Purworejo Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
A	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	2.117.039.300	IUP	-
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,13	Sasaran Daerah/ IUP	DLHP
3	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	86,43**	Sasaran Daerah/ IUP	BPBD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
4	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	72,83***	Sasaran Daerah/ IUP	DKPP
5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	10,30**	IUP	DKPP
6	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	%	48,32**	IUP	DLHP
B	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	36,98**	Tujuan Daerah/ IUP	-
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,06*	Tujuan Daerah/ IUP	-
3	Rasio Gini	Angka	0,296**	Tujuan Daerah	-
4	Indeks Religiusitas Daerah	Angka	83,04	Tujuan Daerah	-
5	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76,73*	Sasaran Daerah	-
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,40*	Sasaran Daerah	-
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,93	Sasaran Daerah/ IUP	-
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,34	IUP	Dinkesda
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	5	IUP	Dinkesda
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	13,4	IUP	Dinkesda
11	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	91,25	IUP	Dinkesda
12	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	90,63	IUP	Dinkesda
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,65**	IUP	Dinkesda
	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):				
14	Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	79,49	IUP	Dindikbud
15	Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	85,91	IUP	Dindikbud

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
16	Numerasi SD/ Sederajat	%	69,17	IUP	Dindikbud
17	Numerasi SMP/ Sederajat	%	75,91	IUP	Dindikbud
18	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	9,95	IUP	Dindikbud
19	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,27	IUP	Dindikbud
20	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,82**	IUP	Dindikbud
21	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	88,18	IUP	Dindikbud
22	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	56,72	IUP	Dindikbud
23	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	34,95	IUP	Dindikbud
24	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	78.800**	IUP	Dindikbud
25	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%	88,09**	IUP	Dindikbud
26	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0,366	IUP	Dinpusip
27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	67,06	IUP	DPPPAPMD
28	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	21,96	IUP	-
29	Indeks Zakat Nasional	Poin Indeks	0,58	*Mandatory*	-
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,88	Tujuan Daerah	-
2	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	53,95	Sasaran Daerah	-
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,67	IUP	Dinperin-transnaker
4	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,15	IUP	Dinporapar
5	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	289	IUP	Dinporapar
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,24**	IUP	DKUKMP

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
7	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,05	IUP	DKUKMP
8	Disparitas Harga	%	+/- 10	IUP	DKUKMP
9	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	27	IUP	DPMPTSP
10	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,21	IUP	Bapperida
11	Persentase Desa Mandiri	%	26,23	IUP	DPPPAPMD
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	42,07	IUP	Dinperin-transnaker
13	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	83,98	IUP	Dinkomin-fostasandi
14	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,58	IUP	Dinperkim-tan
15	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	66,55	IUP	DPUPR
16	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	41,41	IUP	Dinhub
17	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5,31	IUP	DPUPR
18	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	43,16	IUP	DPUPR
19	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	71,85	IUP	DPUPR
20	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	5,09***	*Mandatory*	-
D	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,89**	Sasaran Daerah/ IUP	Setda
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Angka	72,89	Sasaran Daerah	Setda
3	Indeks Ketahanan Nasional	Angka	2,8	Sasaran Daerah	Bakes-bangpol
4	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	IUP	Bakes-bangpol
5	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	72,97**	IUP	DINSOS-DALDUKKB
6	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,143**	IUP	DPPPAPMD
7	*Return on Asset* (ROA) BUMD	%	5,78	IUP	Setda
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,73	IUP	BPKPAD
9	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,38	IUP	Setda

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
10	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,92	IUP	Setda
11	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,38	IUP	Setda
12	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,06**	IUP	Setda
13	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,68	IUP	Dinkomin-fostasandi
14	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,43**	IUP	Setda
15	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,05	IUP	Inspektorat Daerah
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)/ INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
A	**PENDIDIKAN**				
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,27	Tujuan PD	Dindikbud
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,62	Tujuan PD	Dindikbud
3	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	9,95	Tujuan PD	Dindikbud
4	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,82**	Tujuan PD	Dindikbud
6	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	88,18	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020	Dindikbud
7	Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun	%	98,93**	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020	Dindikbud
8	Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun	%	99,25	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020	Dindikbud
9	Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)	%	28,96	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020	Dindikbud
10	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi Minimal B	%	85,83**	Sasaran PD	Dindikbud
	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):				
11	a. Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	79,49	Sasaran PD	Dindikbud
12	b. Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	85,91	Sasaran PD	Dindikbud
13	c. Numerasi SD/ Sederajat	%	69,17	Sasaran PD	Dindikbud
14	d. Numerasi SMP/ Sederajat	%	75,91	Sasaran PD	Dindikbud

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
15	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	%	88,18	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dindikbud
16	Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	98,79	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dindikbud
17	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	28,96	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dindikbud
18	Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	%	67,69	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dindikbud
19	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik	%	71,82	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dindikbud
B	**KESEHATAN**				
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,34	Tujuan PD	Dinkesda
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan	%	92,08**	Tujuan PD	Dinkesda
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	13,4	Sasaran PD	Dinkesda
4	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	100**	Sasaran PD	Dinkesda
5	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	%	50	Sasaran PD	Dinkesda
6	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	81,05**	Sasaran PD	Dinkesda
7	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi Paripurna	%	80,26**	Sasaran PD	Dinkesda
8	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di Puskesmas	%	93	Sasaran Sub Unit PD	Dinkesda
9	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjitrowardojo	%	93**	Sasaran Sub Unit PD	Dinkesda
10	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan di RSUD Tjokronegoro	%	93**	Sasaran Sub Unit PD	Dinkesda

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
11	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda
12	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda
13	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda
14	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda
15	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda
16	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda
17	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda
18	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan	%	*(tidak ditargetkan,*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
	skrining kesehatan sesuai standar		*saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*		
19	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda
20	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda
21	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda
22	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda
23	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda
24	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkesda
25	Persentase Kematian Ibu	%	0,08	Kepmendagri No. 100.2.1.7-	Dinkesda

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
				109 Tahun 2026	
26	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	13,4	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkesda
27	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkesda
28	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai Standar	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkesda
29	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkesda
30	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkesda
31	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar sesuai Standar	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkesda
32	Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif sesuai Standar	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkesda
33	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkesda
34	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkesda
35	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai Standar	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkesda
36	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkesda

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
37	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai Standar	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkesda
39	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai Standar	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkesda
C	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
1	Persentase Kinerja Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum	%	60,79	Tujuan & Sasaran PD	DPUPR
2	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	71,85	Tujuan & Sasaran PD	DPUPR
3	Persentase Kinerja Penataan Ruang	%	65,09**	Tujuan & Sasaran PD	DPUPR
4	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DPUPR
5	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DPUPR
6	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DPUPR
7	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DPUPR

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
8	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DPUPR
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DPUPR
10	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DPUPR
11	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	%	68,15	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPUPR
12	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	%	66,55	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPUPR
13	Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten/ Kota	%	98,97	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPUPR
14	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	95,31	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPUPR
15	Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung Kabupaten/ Kota	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPUPR

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
16	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPUPR
17	Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/ Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPUPR
18	Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah Diterbitkan di Kabupaten/Kota	%	20	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPUPR
20	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan	%	25	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPUPR
D	**PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
1	Persentase Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang Ditangani	%	95,05	Tujuan & Sasaran PD	Dinperkim-tan
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,58	Tujuan & Sasaran PD	Dinperkim-tan
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperkim-tan
4	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperkim-tan
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperkim-tan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperkim-tan
7	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperkim-tan
8	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinperkim-tan
9	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinperkim-tan
10	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	3,21	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinperkim-tan
11	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinperkim-tan
E	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100	Tujuan PD	Satpol PP Damkar
2	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	Tujuan PD	Satpol PP Damkar
3	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas	%	100	Sasaran PD	Satpol PP Damkar
4	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,843**	Tujuan & Sasaran PD	BPBD
5	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Kebakaran dan	%	100	Sasaran PD	Satpol PP Damkar

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
	Penyelamatan Non Kebakaran				
7	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Satpol PP Damkar
8	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Indeks Ketahanan Daerah
9	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPBD
10	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPBD
11	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPBD
12	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPBD
13	Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran	menit	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPBD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
14	Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	BPBD
15	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Satpol PP Damkar
16	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Satpol PP Damkar
17	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	BPBD
18	Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	BPBD
19	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	77	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Satpol PP Damkar
F	**SOSIAL**				
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	%	28	Tujuan & Sasaran PD	DINSOS-DALDUKKB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Taman Makam Pahlawan)	Angka	76	Tujuan & Sasaran PD	DINSOS-DALDUKKB
3	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DINSOS-DALDUKKB
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DINSOS-DALDUKKB

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DINSOS-DALDUKKB
6	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DINSOS-DALDUKKB
7	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DINSOS-DALDUKKB
8	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DINSOS-DALDUKKB
9	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/ atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DINSOS-DALDUKKB
10	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	86,62	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DINSOS-DALDUKKB
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR				
A	**TENAGA KERJA**				
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	97,07	Tujuan & Sasaran PD	Dinperin-transnaker
2	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	60,4	Tujuan & Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020	Dinperin-transnaker
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	42,07	Tujuan & Sasaran PD	Dinperin-transnaker
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperin-transnaker
5	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperin-transnaker

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
			No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)		
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperin-transnaker
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperin-transnaker
8	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinperin-transnaker
9	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	%	2.18	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinperin-transnaker
10	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinperin-transnaker
B	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	Angka			
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,143**	Tujuan PD	DPPPAPMD
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	95,60**	Tujuan PD	DPPPAPMD
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	72,46**	Tujuan & Sasaran PD	DPPPAPMD
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	95,62**	Sasaran PD	DPPPAPMD
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	67,06	Sasaran PD	DPPPAPMD
6	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	*(tidak ditargetkan, saat ini*	Permendagri 18 Th 2020	DPPPAPMD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
			merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)		
7	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	per 100.000 jiwa	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DPPPAPMD
8	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DPPPAPMD
9	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPPPAPMD
10	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPPPAPMD
C	**PANGAN**				
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	10,30**	Tujuan PD	DKPP
2	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	92	Sasaran PD	DKPP
3	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DKPP
4	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	%	75	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DKPP
D	**PERTANAHAN**				
1	Persentase Peningkatan Kepastian Hukum atas Tanah bagi Masyarakat	%	60,00	Tujuan & Sasaran PD	Dinperkim-tan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
	dan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum				
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperkim-tan
3	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperkim-tan
4	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperkim-tan
E	**LINGKUNGAN HIDUP**				
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	48,32**	Tujuan PD	DLHP
2	Indeks Kualitas Air	Angka	75,51	Tujuan & Sasaran PD	DLHP
3	Indeks Kualitas Udara	Angka	86,43	Tujuan & Sasaran PD	DLHP
4	Indeks Kualitas Lahan	Angka	58,13	Tujuan & Sasaran PD	DLHP
5	Persentase sampah terkelola	%	69,91**	Sasaran PD	DLHP
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DLHP
7	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DLHP
8	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	%	*(tidak ditargetkan,*	Permendagri 18 Th 2020	DLHP

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
	kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		*saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*		
9	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) Yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	76	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DLHP
10	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	69,91	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DLHP
F	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
1	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	20,00	Tujuan & Sasaran PD	Disdukcapil
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)5	Angka	90,90	Tujuan & Sasaran PD	Disdukcapil
3	Perekaman KTP elektronik	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Disdukcapil
4	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Disdukcapil
5	Kepemilikan akta kelahiran	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Disdukcapil

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
6	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Disdukcapil
7	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Disdukcapil
8	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Disdukcapil
9	Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Disdukcapil
10	Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik	%	99,78	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Disdukcapil
11	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Disdukcapil
12	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Disdukcapil
13	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Disdukcapil
G	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
1	Persentase Desa Mandiri	%	26,23	Tujuan & Sasaran PD	DPPPAPMD
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DPPPAPMD
3	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	*(tidak ditargetkan,*	Permendagri 18 Th 2020	DPPPAPMD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
			saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)		
4	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	0	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPPPAPMD
5	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPPPAPMD
6	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa	%	0	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPPPAPMD
H	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	72,97**	Tujuan PD	DINSOS-DALDUKKB
2	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Angka	12	Sasaran PD	DINSOS-DALDUKKB
3	*Demand Satisfied*	Angka	87,8**	Sasaran PD	DINSOS-DALDUKKB
4	*Total Fertility Rate*	Angka	2,07**	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020	DINSOS-DALDUKKB
5	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR*)	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DINSOS-DALDUKKB
6	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DINSOS-DALDUKKB
7	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/ TFR) per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun	%	2,08	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DINSOS-DALDUKKB
8	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/	%	69,09	Kepmendagri No. 100.2.1.7-	DINSOS-DALDUKKB

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
	m*odern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)*			109 Tahun 2026	
9	Persentase Kebutuhan Ber- Kb Yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)	%	9,07	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DINSOS-DALDUKKB
I	**PERHUBUNGAN**				
1	Rasio Konektivitas	%	97,14*	Tujuan & Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020	Dinhub
2	Penurunan angka kecelakaan	Angka	530	Tujuan & Sasaran PD	Dinhub
3	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Angka	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinhub
4	Konektivitas Kabupaten/ Kota	Rasio	97,14	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinhub
5	*Volume/ Capacity Ratio* di Jalan Kabupaten/ Kota	Rasio	0,32	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinhub
6	Persentase Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinhub
I	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,70	Tujuan PD	Dinkomin-fostasandi
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Angka	86,00	Sasaran PD	Dinkomin-fostasandi
3	Nilai Aspek Teknologi Digital pada Indeks Pemerintah Digital	Angka	3,38	Sasaran PD	Dinkomin-fostasandi
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkomin-fostasandi
5	Persentase Layanan Publik yang	%	*(tidak ditargetkan, saat ini*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkomin-fostasandi

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
	diselenggarakan secara online dan terintegrasi		*merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*		
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkomin-fostasandi
7	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/ atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkomin-fostasandi
8	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkomin-fostasandi
9	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	%	64	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkomin-fostasandi
J	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				
1	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,05	Tujuan PD	DKUKMP
2	Jumlah volume usaha koperasi	Juta Rupiah	652.400**	Sasaran PD	DKUKMP
3	Persentase UMKM yang Bermitra dengan Koperasi	%	12,1	Sasaran PD	DKUKMP
4	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DKUKMP
5	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DKUKMP

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
6	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	0,05	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DKUKMP
7	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	19,1	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DKUKMP
K	**PENANAMAN MODAL**				
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	27	Tujuan PD	DPMPTSP
2	Realisasi Penanaman Modal	Miliar Rupiah	750**	Sasaran PD	DPMPTSP
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	Angka	96,46**	Sasaran PD	DPMPTSP
4	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DPMPTSP
5	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	%	10	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPMPTSP
6	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DPMPTSP
L	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
1	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Angka	9,33	Tujuan & Sasaran PD	Dinporapar
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinporapar
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinporapar

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
4	Peningkatan prestasi olahraga	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinporapar
5	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	9,47	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinporapar
6	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	0,36	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinporapar
7	Persentase Atlet yang Berasal dari Kabupaten/ Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	%	0,19	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinporapar
8	Persentase Jumlah Atlet Berprestasi	%	29,69	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinporapar
M	**STATISTIKA**				
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,70	Tujuan PD	Dinkomin-fostasandi
2	Indeks Satu Data Indonesia	Angka	61,60	Sasaran PD	Dinkomin-fostasandi
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkomin-fostasandi
4	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinkomin-fostasandi
5	Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkomin-fostasandi
N	**PERSANDIAN**				

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
1	Indeks Pemerintah Digital	Angka	1,70	Tujuan PD	Dinkomin-fostasandi
2	Indeks KAMI	Angka	807**	Sasaran PD	Dinkomin-fostasandi
3	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	87,91	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinkomin-fostasandi
O	**KEBUDAYAAN**				
1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%	34,95	Tujuan & Sasaran PD	Dindikbud
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dindikbud
3	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dindikbud
4	Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah	%	10	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dindikbud
P	**PERPUSTAKAAN**				
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	9,70**	Tujuan PD/ Permendagri 18 Th 2020	Dinpusip
2	Tingkat Gemar Membaca	Nilai	57,45**	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020	Dinpusip
3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat	Nilai	57,45	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinpusip
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	9,70	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinpusip
Q	**KEARSIPAN**				
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Angka	76,15**	Tujuan PD	Dinpusip
2	Persentase Jumlah Arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	39,01**	Sasaran PD	Dinpusip
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan	%	*(tidak ditargetkan,*	Permendagri 18 Th 2020	Dinpusip

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
	akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan		*saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*		
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinpusip
5	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	%	84,03	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinpusip
	URUSAN PILIHAN				
A	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
1	Nilai produksi perikanan tangkap	Juta Rupiah	8.550,73	Tujuan & Sasaran PD	DLHP
2	Nilai produksi perikanan budidaya	Juta Rupiah	194.654,30	Tujuan & Sasaran PD	DLHP
3	Nilai produksi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan	Juta Rupiah	12.928**	Tujuan & Sasaran PD	DLHP
4	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Angka	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DLHP
5	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Th	15,7	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DLHP
6	Produksi Penangkapan Ikan dan Budidaya	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DLHP
B	**PARIWISATA**				
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,15	Tujuan & Sasaran PD	Dinporapar

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinporapar
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinporapar
4	Tingkat hunian akomodasi	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinporapar
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinporapar
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinporapar
7	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing	%	15,6	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinporapar
8	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten/ Kota	%	0,11	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinporapar
C	**PERTANIAN**				
1	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	0,25	Tujuan & Sasaran PD	DKPP
2	Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,25	Tujuan & Sasaran PD	DKPP
3	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	0,40	Tujuan & Sasaran PD	DKPP

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
4	Persentase Peningkatan Produksi Daging	%	1,00	Tujuan & Sasaran PD	DKPP
5	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ ha	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DKPP
6	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DKPP
7	Presentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	0,25	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DKPP
8	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0,25	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DKPP
9	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	1	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DKPP
10	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DKPP
D	**PERDAGANGAN**				
1	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,03	Tujuan PD	DKUKMP
2	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Miliar Rupiah	3.410,14	Sasaran PD	DKUKMP
3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DKUKMP

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DKUKMP
5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	DKUKMP
6	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	DKUKMP
E	**PERINDUSTRIAN**				
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,67	Tujuan PD	Dinperin-transnaker
2	PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHB)	Miliar Rupiah	7.358,25	Sasaran PD	Dinperin-transnaker
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperin-transnaker
4	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperin-transnaker
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Dinperin-transnaker
6	Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota; 2.	%	45,57	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinperin-transnaker

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/ Kota; 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota; 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota; 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota				
7	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Nilai	40,34	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinperin-transnaker
8	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/ Kota	%	50,13	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinperin-transnaker
9	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor	%	34,07	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Dinperin-transnaker
F	**TRANSMIGRASI**				
1	Tingkat Kesempatan Kerja	%	97,07	Tujuan & Sasaran PD	Dinperin-transnaker
2	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	60,40	Tujuan & Sasaran PD	Dinperin-transnaker
3	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	42,07	Tujuan & Sasaran PD	Dinperin-transnaker
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
A	**SEKRETARIAT DAERAH**				
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	61.87	Tujuan & Sasaran PD	Setda
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,43**	Tujuan & Sasaran PD	Setda
3	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja	Angka	32,22	Tujuan & Sasaran PD	Setda
4	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-*	Permendagri 18 Th 2020	Setda

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
			109 Tahun 2026)		
5	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Setda
7	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	Setda
8	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ)	Poin	40,00	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Setda
9	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	23,00	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Setda
10	Kualifikasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Poin	14,40	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Setda
11	Persentase Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	%	66,67	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Setda
B	**SEKRETARIAT DPRD**				
1	Indeks Kepuasan Layanan terhadap DPRD	Angka	81,50	Tujuan & Sasaran PD	Set DPRD
C	**PERENCANAAN**				
1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Angka	22,58	Tujuan & Sasaran PD	Bapperida
2	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Bapperida
D	**KEUANGAN**				
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	84,92	Tujuan PD	BPKPAD
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Predikat	WTP	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020	BPKPAD
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	22,79	Sasaran PD	BPKPAD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,73	Sasaran PD	BPKPAD
5	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPKPAD
6	Rasio PAD	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPKPAD
7	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer *expenditures*)	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPKPAD
8	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPKPAD
9	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPKPAD
10	Manajemen Aset	Angka	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPKPAD
11	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPKPAD

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
12	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPKPAD
13	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BPKPAD
14	Persentase Belanja Pegawai Daerah Tidak termasuk Belanja untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan Tunjangan Sejenis Lainnya yang Bersumber dari Transfer Ke Daerah Ditentukan Penggunaannya	%	29,44	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	BPKPAD
15	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	%	23,85	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	BPKPAD
16	Persentase Realisasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar terhadap Total Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	%	60,63	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	BPKPAD
17	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	27,22	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	BPKPAD
18	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	BPKPAD
E	**KEPEGAWAIAN**				
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	82,81**	Tujuan & Sasaran PD	BKPSDM
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-*	Permendagri 18 Th 2020	BKPSDM

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
			109 Tahun 2026)		
3	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BKPSDM
4	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	*(tidak ditargetkan, saat ini merujuk Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026)*	Permendagri 18 Th 2020	BKPSDM
5	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (Aparatur Sipil Negara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	%	62,35	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	BKPSDM
F	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
1	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	82,81**	Tujuan & Sasaran PD	BKPSDM
G	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
1	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,21	Tujuan PD	Bapperida
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	76**	Sasaran PD	Bapperida
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Yang Ditindaklanjuti	%	50	Sasaran PD	Bapperida
4	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Inovasi dan telah menjadi Bagian dari Program Kegiatan	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Bapperida
H	**INSPEKTORAT DAERAH**				
1	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Angka	3,34	Tujuan PD/ Permendagri 18 Th 2020	Inspektorat Daerah
2	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	2,500**	Sasaran PD/ Permendagri 18 Th 2020	Inspektorat Daerah
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks	Angka	3,3	Sasaran PD	Inspektorat Daerah
4	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Angka	3,2	Sasaran PD	Inspektorat Daerah
5	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,05	Sasaran PD	Inspektorat Daerah
6	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3.341	Kepmendagri No. 100.2.1.7-	Inspektorat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
				109 Tahun 2026	
7	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	2.500	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Inspektorat Daerah
8	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	3.299	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Inspektorat Daerah
9	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran N-1	%	100	Kepmendagri No. 100.2.1.7-109 Tahun 2026	Inspektorat Daerah
I	**KECAMATAN**				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)				
1	Kecamatan Grabag	Angka	88,20	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Grabag
2	Kecamatan Ngombol	Angka	86,64	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Ngombol
3	Kecamatan Purwodadi	Angka	92,30	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Purwodadi
4	Kecamatan Bagelen	Angka	90,90	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Bagelen
5	Kecamatan Kaligesing	Angka	89,40	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Kaligesing
6	Kecamatan Purworejo	Angka	88,50**	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Purworejo
7	Kecamatan Banyuurip	Angka	87,90	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Banyuurip
8	Kecamatan Bayan	Angka	92,15**	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Bayan
9	Kecamatan Kutoarjo	Angka	87,80	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Kutoarjo
10	Kecamatan Butuh	Angka	88,76	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Butuh
11	Kecamatan Pituruh	Angka	87,00	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Pituruh
12	Kecamatan Kemiri	Angka	85,50	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Kemiri
13	Kecamatan Bruno	Angka	87,00	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Bruno
14	Kecamatan Gebang	Angka	85,40**	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Gebang
15	Kecamatan Loano	Angka	85,20	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Loano
16	Kecamatan Bener	Angka	88,50	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Bener
J	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
1	Indeks Ketahanan Ipoleksosbud	Angka	2,8	Tujuan & Sasaran PD	Bakesbang-pol

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
1	Dindikbud	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Dindikbud
2	Dinkes Daerah	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Dinkes Daerah
3	DPUPR	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	DPUPR
4	Dinperkimtan	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Dinperkim-tan
5	Satpol PP Damkar	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Satpol PP Damkar
6	BPBD	Angka	74,22**	Tujuan & Sasaran PD	BPBD
7	DINSOSDALDUKKB	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	DINSOS-DALDUKKB
8	DPPPAPMD	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	DPPPAPMD
9	DKPP	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	DKPP
10	DLHP	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	DLHP
11	Disdukcapil	Angka	77,75**	Tujuan & Sasaran PD	Disdukcapil
12	Dinhub	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Dinhub
13	Dinkominfostasandi	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Dinkomin-fostasandi
14	DKUKMP	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	DKUKMP
15	DPMPTSP	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	DPMPTSP
16	Dinporapar	Angka	73,44**	Tujuan & Sasaran PD	Dinporapar
17	Dinpusip	Angka	74,25**	Tujuan & Sasaran PD	Dinpusip
18	Dinperintransnaker	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Dinperin-transnaker
19	Setda	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Setda
20	Set. DPRD	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Set. DPRD
21	Bapperida	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Bapperida
22	BPKPAD	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	BPKPAD
23	BKPSDM	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	BKPSDM
24	Inspektorat Daerah	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Inspektorat Daerah
25	Kecamatan Grabag	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Grabag

No	Indikator	Satuan	Target Tahun 2027	Keterangan	Perangkat Daerah
26	Kecamatan Ngombol	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Ngombol
27	Kecamatan Purwodadi	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Purwodadi
28	Kecamatan Bagelen	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Bagelen
29	Kecamatan Kaligesing	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Kaligesing
30	Kecamatan Purworejo	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Purworejo
31	Kecamatan Banyuurip	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Banyuurip
32	Kecamatan Bayan	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Bayan
33	Kecamatan Kutoarjo	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Kutoarjo
34	Kecamatan Butuh	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Butuh
35	Kecamatan Pituruh	Angka	73,50**	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Pituruh
36	Kecamatan Kemiri	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Kemiri
37	Kecamatan Bruno	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Bruno
38	Kecamatan Gebang	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Gebang
39	Kecamatan Loano	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Loano
40	Kecamatan Bener	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Kecamatan Bener
41	Bakesbangpol	Angka	72,89	Tujuan & Sasaran PD	Bakesbang-pol

Keterangan:
**Hasil Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah, diolah*
***Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2025*
****Sesuai surat dari Provinsi Jawa Tengah*
Sumber: RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2025-2029, dianalisis

6.3. Indikator Utama Pembangunan (IUP)

RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045. Tabel berikut ini menunjukkan target Indikator Utama Pembangunan (IUP) tahun 2027 dalam rangka dukungan terhadap RPJPD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045.

Tabel 6.4. Target Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2027

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2027	Keterangan	Pemda/ Perangkat Daerah
1	Tingkat Kemiskinan	%	9,06*	Tujuan Daerah	Pemda
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	10,3**	Tujuan PD	DKPP

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2027	Keterangan	Pemda/ Perangkat Daerah
	(*Prevalence of Undernourishment*)				
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	72,83***	Sasaran Daerah	Pemda
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,34	Tujuan PD	Dinkesda
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	5	Program PD	Dinkesda
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	13,4	Sasaran PD	Dinkesda
7	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	91,25	Kegiatan PD	Dinkesda
8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	90,63	Program PD	Dinkesda
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99,65**	Program PD	Dinkesda
10	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):				
	Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	79,49	Sasaran PD	Dindikbud
	Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	85,91	Sasaran PD	Dindikbud
	Numerasi SD/ Sederajat	%	69,17	Sasaran PD	Dindikbud
	Numerasi SMP/ Sederajat	%	75,91	Sasaran PD	Dindikbud
11	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	9,95	Tujuan PD	Dindikbud
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,27	Tujuan PD	Dindikbud
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,82**	Tujuan PD	Pemda
14	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	88,18	Sasaran PD	Dindikbud
15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	56,72	Program PD	Dindikbud
16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak	%	34,95	Tujuan & Sasaran PD	Dindikbud

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2027	Keterangan	Pemda/ Perangkat Daerah
	Benda (WBTB) yang Dilestarikan				
17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang	78.800**	Kegiatan PD	Dindikbud
18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%	88,09**	Program PD	Dindikbud
19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%	0,366	Kegiatan PD	Dinpusip
20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	-	Bakesbangpol
21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	72,97**	Tujuan PD	DINSOSDALDUKKB
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,143**	Tujuan PD	DPPPAPMD
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	20,67	Tujuan PD	Dinperintransnaker
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	3,15	Tujuan PD	Dinporapar
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	289	Program PD	Dinporapar
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,24**	-	-
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,05	Tujuan PD	DKUKMP
28	*Return on Asset* (ROA) BUMD	%	5,78	Program PD	Setda
29	Disparitas Harga	%	+/- 10	Program PD	DKUKMP
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	27	Tujuan PD	DPMPTSP
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,73	Sasaran PD	BPKPAD
32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,38	Program PD	Setda
33	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	5,92	Program PD	Setda
34	Kapabilitas Inovasi	Angka	3,21	Tujuan PD	Bapperida
35	Persentase Desa Mandiri	%	26,23	Tujuan & Sasaran PD	DPPPAPMD
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,93	Sasaran Daerah	Pemda
37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	67,06	Sasaran PD	DPPPAPMD

No	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Target 2027	Keterangan	Pemda/ Perangkat Daerah
38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	42,07	Tujuan & Sasaran PD	Dinperintransnaker
39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	83,98	-	-
40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	68,58	Sasaran PD	Dinperkimtan
41	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%	66,55	-	-
42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%	41,41	Program PD	Dinhub
43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5,31	-	-
44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	43,16	-	-
45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	71,85	Tujuan & Sasaran PD	DPUPR
46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	76,13	Sasaran Daerah	Pemda
47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	%	48,32**	Tujuan PD	DLHP
48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	86,43**	Sasaran Daerah	Pemda
49	Penurunan Emisi GRK	Ton-CO2eq	2.117. 039.300	-	-
50	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,89**	Sasaran Daerah	Pemda
51	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,06**	Program PD	Setda
52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,68	-	-
53	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,43**	Tujuan PD	Setda
54	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,05	Sasaran PD	Inspektorat Daerah
55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	43,71	Tujuan Daerah	Pemda
56	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	21,96	-	-

Keterangan:
**Hasil Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah*
****Sesuai surat Provinsi Jawa Tengah*

Sumber: RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2025-2029, dianalisis

Keseluruhan (56) indikator utama pembangunan tersebut telah selaras dengan indikator utama pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional, merujuk dari RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Tabel di bawah ini menunjukkan keselarasan tersebut.

Tabel 6.5. Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Purworejo, Nasional, dan Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten Purworejo		Nasional		Provinsi Jawa Tengah	
	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan
1	Tingkat Kemiskinan	%	8. Tingkat kemiskinan	%	8. Tingkat kemiskinan	%
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	43.ii. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	%
3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka			Indeks Ketahanan Pangan	Angka
4	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	2. Kesehatan Ibu dan Anak: a. Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	2. Kesehatan Ibu dan Anak: a. Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup
6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	2.b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	2.b. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%
7	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%
8	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	3.b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	3.b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%
10	Persentase Siswa yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional (seluruh jenjang):		5. Hasil Pembelajaran:		5. Hasil Pembelajaran:	
	Literasi Membaca SD/ Sederajat	%	5.a) Rata-rata Nilai PISA		5.a) Persentase kabupaten/kota	%

No	Kabupaten Purworejo		Nasional		Provinsi Jawa Tengah	
	Indikator Utama Pembangunan	**Satuan**	**Indikator Utama Pembangunan**	**Satuan**	**Indikator Utama Pembangunan**	**Satuan**
	Literasi Membaca SMP/ Sederajat	%	a-i Membaca a-ii Matematika a-iii Sains 5.b) Rata-rata nilai asesmen nasional - Literasi membaca - Numerasi		yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi 5.b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: - Literasi membaca - Numerasi	
	Numerasi SD/ Sederajat	%				
	Numerasi SMP/ Sederajat	%				
11	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	5.c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	5.c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun
12	Harapan Lama Sekolah	Tahun	5.d) Harapan Lama Sekolah	Tahun	5.d) Harapan Lama Sekolah	Tahun
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	%	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%
			7. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	7. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%
14	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun	%	-		-	
15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/ Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan	%	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka
16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	%				
17	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah	Orang				
18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	%				

No	Kabupaten Purworejo		Nasional		Provinsi Jawa Tengah	
	Indikator Utama Pembangunan	**Satuan**	**Indikator Utama Pembangunan**	**Satuan**	**Indikator Utama Pembangunan**	**Satuan**
19	Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan	%				
20	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%
			30. Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	30. Indeks Demokrasi Indonesia	Angka
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	38. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka
21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka
22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka
23	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	11. Produktivitas Industri dan Pertanian a) Rasio PDRB Industri Pengolahan b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan	%
24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	12. Pengembangan Pariwisata a) Rasio PDB Pariwisata b) Devisa Pariwisata	% miliar USD	12. Pengembangan Pariwisata a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%
25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang			b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang
26	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekraf Nasional	%
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah	%	14.Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	%
			14.b) Rasio kewirausahaan	%	14.b) Rasio kewirausahaan daerah	%

No	Kabupaten Purworejo		Nasional		Provinsi Jawa Tengah	
	Indikator Utama Pembangunan	**Satuan**	**Indikator Utama Pembangunan**	**Satuan**	**Indikator Utama Pembangunan**	**Satuan**
27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	14.c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB	%	14.c) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%
28	*Return on Asset* (ROA) BUMD	%	14.d) Return on Asset (ROA) BUM	%	14.d) Return on Asset (ROA) BUMN	%
29	Disparitas Harga	%	20. Biaya Logistik	% PDB	20. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	%
			32. Tingkat Inflasi	%	32. Tingkat Inflasi	%
30	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDB	21. Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB
			22. Ekspor Barang dan Jasa	% PDB	22. Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	31. Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB	%	31. Rasio Pajak terhadap PDB	%
32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	33.Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan a) Aset Perbankan/PDB b) Aset Dana Pensiun/PDB c) Aset Asuransi/PDB d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB	%	33. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB b) Aset Dana Pensiun/PDRB c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	%
33	Total Kredit pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	33.e) Total Kredit/PDB	%	33.d) Total Kredit/PDRB	%
			34. Inklusi Keuangan	%	34. Inklusi Keuangan	%
34	Kapabilitas Inovasi	Angka	17. Tingkat penguasaan IPTEK a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi b) Peringkat Indeks Inovasi Global	% PDB Peringkat	17. Tingkat penguasaan IPTEK: - Kababilitas Inovasi	Angka
35	Persentase Desa Mandiri	%	23.e) Persentase Desa Mandiri	%	23.f) Persentase Desa Mandiri	%
36	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik a) Tingkat pengangguran terbuka b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	15.Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik a) Tingkat pengangguran terbuka b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%
37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	16. Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan	%	16. Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan	%
38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%
			10. Persentase penyandang	%	10. Persentase penyandang	%

No	Kabupaten Purworejo		Nasional		Provinsi Jawa Tengah	
	Indikator Utama Pembangunan	**Satuan**	**Indikator Utama Pembangunan**	**Satuan**	**Indikator Utama Pembangunan**	**Satuan**
			disabilitas bekerja di sektor formal		disabilitas bekerja di sektor formal	
39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	19. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	Peringkat	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka
40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	23.c) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	23.d) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan d) Persentase jalan provinsi kondisi permukaan mantap e) Indeks pelayanan transportasi f) Persentase keterwujudan penataan ruang	%
41	Persentase Panjang Jalan Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	%				
42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten	%				
43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	42.b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	42.b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%
44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	43.iii. Ketahanan Air - Kapasitas Tampungan Air - Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	m3/ kapita %	43.c) Ketahanan Air - Kapasitas air bak - Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan - Persentase kondisi baik infrastruktur tampungan air kewenangan Provinsi	m3/ detik % %
f	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	43. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian menuju kedaulatan pangan 43.i. Ketahanan Energi - Indeks Ketahanan Energi	Angka	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a) Ketahanan Energi - Konsumsi Listrik per kapita (kWh) - Intensitas energi primer (SBM/ RP milyar) - Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan provinsi - Persentase sungai kondisi baik kewenangan provinsi	kWh SBM/ Rp milyar Angka %
46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka
			42. Kualitas Lingkungan Hidup a.i. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	42. Kualitas Lingkungan Hidup a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka

No	Kabupaten Purworejo		Nasional		Provinsi Jawa Tengah	
	Indikator Utama Pembangunan	**Satuan**	**Indikator Utama Pembangunan**	**Satuan**	**Indikator Utama Pembangunan**	**Satuan**
			a.ii. Indeks Kualitas Air (IKA) a.iii. Indeks Kualitas Lahan (IKL) a.iv. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)			
47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	42.c) Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	42.c) Pengelolaan Sampah - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah - Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	% % RT
48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB	%	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka
49	Penurunan Emisi GRK	Ton-CO2eq	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a) Indeks Ekonomi Hijau c) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Angka %	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau b) Indeks Ekonomi Hijau d) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Angka %
			45.Persentase Penurunan Emisi GRK a) Kumulatif c) Tahunan	%	45. Persentase Penurunan Emisi GRK b) Kumulatif d) Tahunan	%
50	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	35. *Asia Power Index* (*Diplomatic Influence*)	Angka	35. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Ketegori
			36. *Asia Power Index* (*Military Capability*)	Angka	36. Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Kategori
51	Indeks Reformasi Hukum	Angka	24. Indeks Materi Hukum	Angka	24. Indeks Reformasi Hukum	Angka
			28. Indeks Pembangunan Hukum	Angka	28. Indeks Pembangunan Hukum: - Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka
52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka
53	Indeks Pelayanan Publik	Angka	26. Indeks Pelayanan Publik	Angka	26. Indeks Pelayanan Publik	Angka
54	Indeks Integritas Nasional	Angka	27. Anti Korupsi ii. Indeks Integritas Nasional iii. Indeks Persepsi Korupsi	Angka	27. Indeks Integritas Nasional	Angka

No	Kabupaten Purworejo		Nasional		Provinsi Jawa Tengah	
	Indikator Utama Pembangunan	**Satuan**	**Indikator Utama Pembangunan**	**Satuan**	**Indikator Utama Pembangunan**	**Satuan**
55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Kabupaten	Juta Rupiah	23. Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	%	23. Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan b) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	%
56	Distribusi Pengeluaran berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%				

Sumber: RPJMD Kab. Purworejo Tahun 2025-2029

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2027 ini telah disusun dengan memfokuskan pada prioritas program dan kegiatan Tahun 2027 sesuai dengan tema pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2027 yaitu **"Penguatan Infrastruktur Berbasis Lingkungan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Daerah",** dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah **"Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius dan Inovatif (Purworejo Berseri)"**.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 sangat ditentukan oleh konsistensi penjabaran RKPD ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2027 keterpaduan perencanaan dan penganggaran daerah, serta sinergi dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan berbasis kinerja melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, penguatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Harapannya agar target indikator kinerja sub kegiatan, kegiatan, program perangkat daerah, program pembangunan daerah, sasaran daerah, dan tujuan daerah dapat tercapai sehingga Visi Misi Bupati Purworejo dapat terwujud.

Selanjutnya, RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 menjadi dasar dalam perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja-PD Kabupaten Purworejo Tahun 2027 dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2027 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2027. Dengan tersusunnya RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2027, diharapkan seluruh tahapan pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUPRIONO, SH., M.Acc
Pembina, IV/a
NIP. 197908142010011014